

RKPD 2027

KOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 20 TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

RKPD berfungsi sebagai:

a. pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2027; dan
b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-PD dan RKA-PD Tahun 2027.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB VI : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
BAB V : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB VII : Penutup

(2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk menelaah kesesuaian rancangan akhir Renja-PD dengan RKPD Tahun 2027.

Pasal 5

Apabila terdapat perbedaan antar program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2027 dengan Rancangan APBD Tahun 2027 hasil pembahasan dengan DPRD, maka yang dipergunakan adalah program dan kegiatan berdasarkan RAPBD tahun 2027 hasil pembahasan bersama DPRD.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 6 Juli 2026
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 6 Juli 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

TRI IMAN PRASETYONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 19810130 200604 2 007

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika Pembangunan di Kota Blitar selama kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir cukup dinamis. Kota Blitar terbukti memiliki daya tahan yang tinggi sebagai hasil sinergi berbagai pihak yang tercermin dari bangkitnya ekonomi pasca pandemi COVID – 19. Kondisi makro ekonomi Kota Blitar menunjukkan perkembangan yang signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka (TPT), rasio gini dan PDRB per kapita menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Namun demikian Kota Blitar juga menghadapi tantangan yang cukup berat dari pengaruh eksternal yaitu kondisi perekonomian nasional dan global yang juga berpengaruh terhadap perekonomian di daerah. Selain itu, pengetatan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) menyebabkan biaya pemerintahan (*spending goverment*) menjadi sangat terbatas yang bisa berpengaruh terhadap belanja barang dan jasa masyarakat. Hal tersebut bisa dipahami sebagai "alarm serius" agar memacu Pemerintah Kota Blitar untuk berbenah dan memperkuat kemandirian fiskal. Dengan keterbatasan anggaran (*budget constraint*) memaksa Pemerintah Kota Blitar melakukan efisiensi anggaran dan penyesuaian target pembangunan namun harus tetap bertumpu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi pelayanan publik. Keberhasilan pembangunan Kota Blitar dan perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut turut dipengaruhi oleh implementasi rangkaian kebijakan tahunan pemerintah yang dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan.

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan tetap memperhitungkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan dasar dalam menyusun sebuah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Salah satu tujuan SPPN adalah mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam perencanaan pembangunan di tingkat pusat, daerah, maupun antara pusat dan daerah.

Tingkat keberhasilan perencanaan pembangunan di Indonesia, tidak akan terlepas dari dukungan yang diberikan oleh setiap daerah, termasuk Kota Blitar, melalui perencanaan kebijakan di setiap periodenya (Panjang – Menengah – Tahunan). Kota Blitar, sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 5 yang mengamanatkan bahwa rencana pembangunan daerah dirumuskan melalui prinsip – prinsip perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
7. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*resources availability*), dan memperhatikan fungsi waktu (*times*) (SMART).

Selanjutnya, dalam perencanaan pembangunan daerah terdapat 2 (dua) bentuk pendekatan, yaitu perencanaan yang berorientasi pada proses dan perencanaan yang berorientasi pada substansi. 4 (empat) pendekatan yang harus digunakan daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas:

1. Pendekatan Teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan Politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Selain berorientasi pada proses, terdapat 3 (tiga) pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, yaitu holistik-tematik, integratif dan spasial:

1. Pendekatan Holistik – Tematik bermakna bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Pendekatan Integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terdau dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

3. Pendekatan Spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Adapun tahapan proses penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan;

b. Penyusunan Rancangan Awal;

c. Penyusunan Rancangan;

d. Pelaksanaan Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang);

e. Perumusan Rancangan Akhir; dan

f. Penetapan.

Dalam penyusunan RKPD, Pemerintah Kota Blitar telah mengacu pada tahapan proses penyusunan RKPD sebagaimana tersebut diatas.

Sampai dengan tahun 2026, Pemerintah Kota Blitar telah memiliki berbagai dokumen perencanaan, yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 (Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024).
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 (Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025).
3. Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Blitar untuk pembangunan tahunan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.

Tahun 2027 memiliki arti penting karena merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Sebagai tahun transisi menuju tahap akhir periode RPJMD, RKPD 2027 menempati posisi strategis untuk menilai konsistensi pencapaian tujuan pembangunan daerah sekaligus memperkuat landasan bagi pencapaian target – target RPJMD pada tahun 2029. Pada fase ini, capaian pembangunan yang telah diraih pada tahun 2025 dan 2026 perlu dievaluasi secara komprehensif untuk kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

RKPD Tahun 2027 tidak hanya memuat angka – angka makro dan target pembangunan, tetapi juga menjadi representasi komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh. Pembangunan inklusif bermakna bahwa pertumbuhan ekonomi harus mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Pembangunan berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar manfaat pembangunan dapat diwariskan ke generasi mendatang. Sementara itu, pembangunan tangguh menekankan pentingnya ketahanan daerah dalam menghadapi guncangan, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Ketiga prinsip tersebut menjadi pijakan dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan Kota Blitar pada tahun 2027. RKPD Kota Blitar tahun 2027 juga memperhatikan keterbatasan kemampuan fiskal daerah – sebesar +/- (kurang lebih) 20 % (dua puluh persen) APBD bersumber dari PAD; juga mengingat masih sangat tergantung pada ketersediaan sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi berupa dana transfer TKD (Transfer Keuangan Daerah) seperti DAU, DAK dan DBH serta Bagi serta Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar +/-

(kurang lebih) 80 % (delapan puluh persen) dari keseluruhan pendanaan APBD Kota Blitar – serta pengaruh perkembangan perekonomian global akibat krisis ekonomi dan politik internal di Kawasan Timur Tengah. Pemerintah Kota Blitar terus melakukan upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan PAD :

1. Efisiensi belanja daerah dan lebih fokus pada belanja pelayanan publik.
2. Inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
3. Peningkatan kegiatan – kegiatan event daerah agar menjadi trigger peningkatan perekonomian untuk peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan ini, Pemerintah Kota Blitar juga menerapkan metode kolaborasi dengan pemangku kepentingan melalui pendekatan *pentahelix* yang melibatkan lima pemangku kepentingan utama: masyarakat, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan media; kolaborasi pendanaan pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber pendanaan sah lainnya; penerapan *dynamic government* (sistem tata kelola pemerintah yang bersih, efektif dan efisien serta dinamis/tidak kaku); serta sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dengan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Kota Blitar juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025 serta berbagai tantangan dan isu pembangunan, baik di regional, nasional maupun kewilayahan.

Dokumen RKPD Tahun 2027 mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan disertai Perangkat Daerah penanggung jawab dan prakiraan maju 2028 yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun 2027;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Publik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor2 Seri D);
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 Nomor 9 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lampiran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerag Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam perencanaan pembangunan, setiap daerah diharuskan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004). Untuk mewujudkan amanat tersebut, penyusunan dokumen perencanaan membutuhkan proses koordinasi dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi antar dokumen. Tujuan harmonisasi dan sinkronisasi antar dokumen tersebut adalah : (1) terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan di tingkat pusat dan daerah; dan (2) menjamin dukungan perencanaan daerah terhadap sasaran, program dan target pembangunan nasional.

Adapun proses harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, terdiri atas :

a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yaitu 20 tahun
b. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yaitu 5 tahun
c. Dokumen Rencana Jangka Pendek, dalam hal ini biasa disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang berjangka waktu 1 tahun.

Sistem perencanaan pembangunan merupakan rangkaian dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang sinergis antara nasional dan daerah. Jika dilihat berdasarkan struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan daerah. Ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029;
3. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027.

Sedangkan dokumen perencanaan daerah di Kota Blitar terdiri atas:

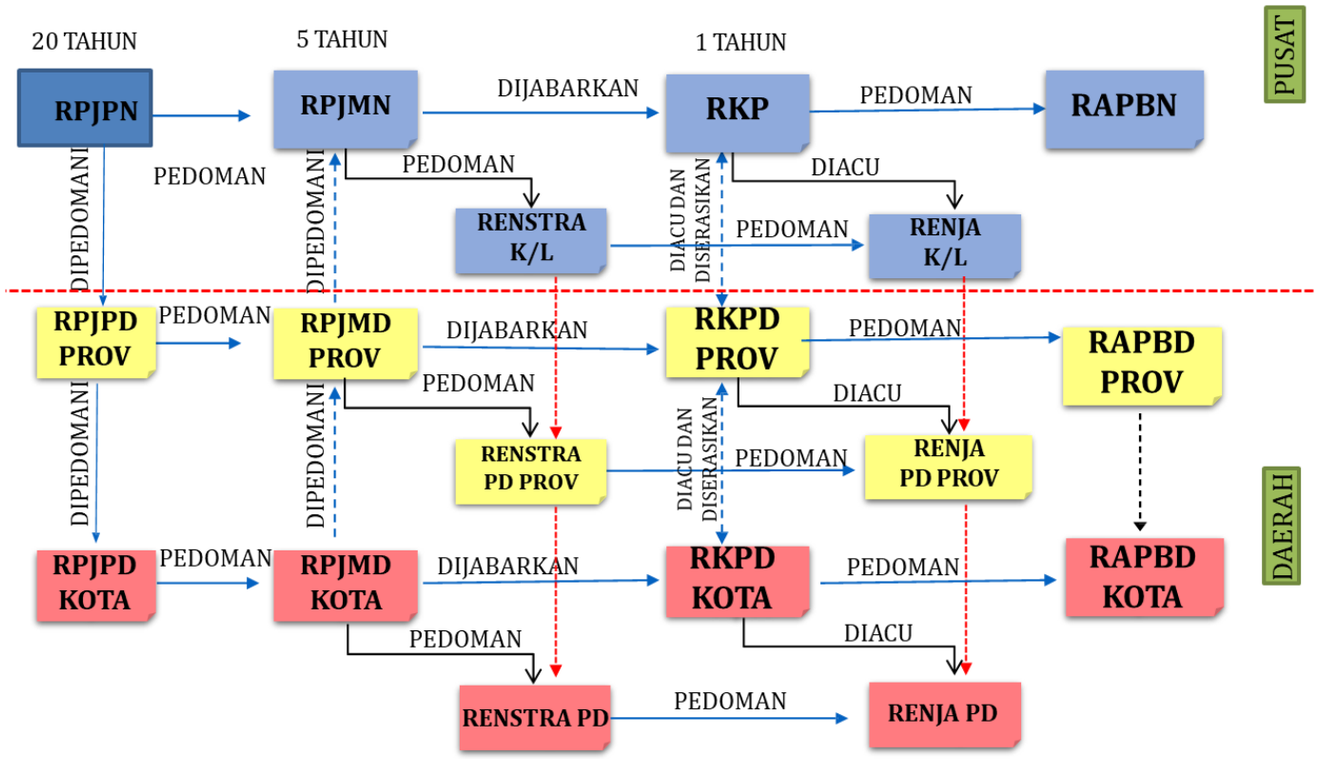
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025 – 2029;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026; dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027.

Selanjutnya, dari berbagai landasan hukum sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya (1.2), tiga dasar hukum utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun proses sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan dilakukan secara spasial dan aspasial.

Untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan provinsi Jawa Timur, maka RKPD Kota Blitar tahun 2027 disesuaikan dan berpedoman pada RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026, serta memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2027. Hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1.

Hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah



a. Hubungan RKPD dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Provinsi

Pembangunan daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2027 tetap mengacu pada tema dan prioritas pembangunan yang tercantum Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, serta RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2029 yang dijabarkan lebih detail dengan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027.

b. Hubungan RKPD dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Oleh karena itu RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 - 2029 dan Renstra PD Tahun 2025 – 2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan daerah dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2027.

c. Hubungan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah

Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. RKPD Kota Blitar Tahun 2027 dan Renja PD Tahun 2027 merupakan dokumen yang terintegrasi, karena RKPD menjadi pedoman dan landasan dalam menyusun Renja PD.

d. Hubungan RKPD dengan Dokumen Penganggaran

Mengingat sistem perencanaan dan sistem penganggaran harus selaras, maka RKPD Kota Blitar Tahun 2027 menjadi dasar penyusunan rencana penganggaran yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2027, Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Tahun 2027, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2027 dimaksudkan untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2027 adalah sebagai:

a. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2027;
b. Menyediakan rencana kebijakan pembangunan daerah tahunan yang terarah, terpadu, dan terukur;
c. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi, serta arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam penyelenggaraan pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2027;
d. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, maupun antar-fungsi pemerintahan;
e. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; dan
f. Menjadi landasan dalam finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD0 serta penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2027 menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, Bab I memuat latar belakang penyusunan RKPD Kota Blitar, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan RKPD, dan sistematika penulisan dokumen RKPD.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dalam Bab II menjabarkan tentang gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan aspek geografi dan demografi, aspek

kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Selain itu pada bab II ini juga menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2025 dan realisasi dari RPJMD, serta permasalahan pembangunan berdasarkan capaian pembangunan.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam mendanai pembangunan daerah Tahun 2027. Pada bab III ini meliputi Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan sasaran dan arah kebijakan serta analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan Kota Blitar Tahun 2027 memperhatikan prioritas nasional, prioritas pembangunan provinsi dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2027.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027.

BAB VII : PENUTUP

Pada penutup dikemukakan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

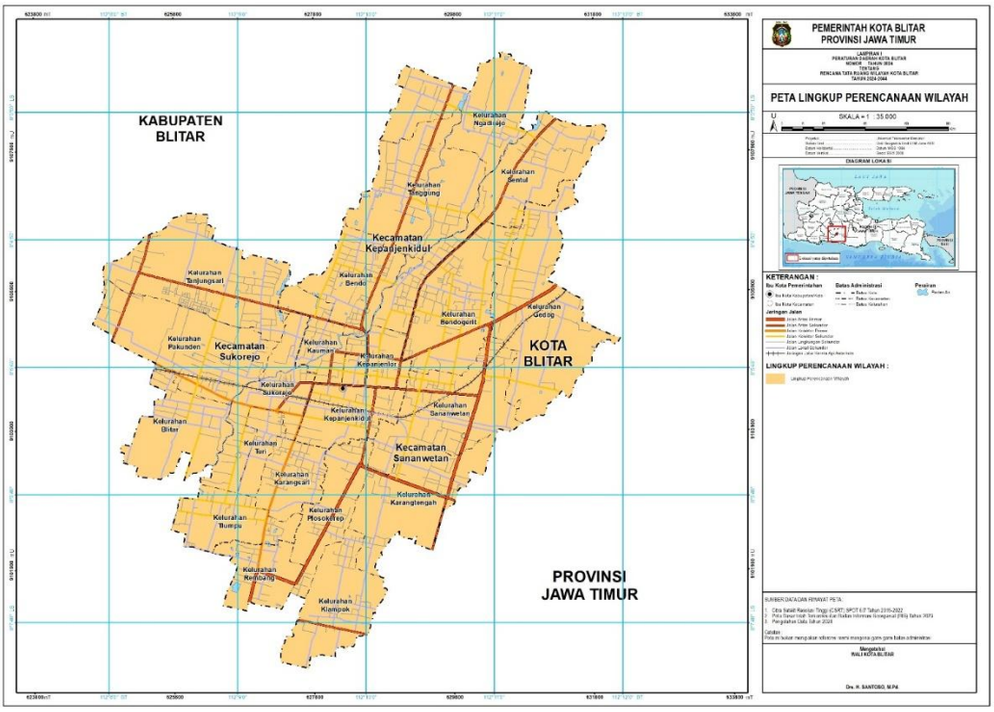
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

2.1.1.1.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kota Blitar memiliki luas wilayah ±33,203 km², merupakan kota terkecil kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto. Secara geografis, wilayah Kota Blitar terletak 112°14'–112°28' Bujur Timur dan 8°2'–8°8' Lintang Selatan yang terbagi menjadi 3 kecamatan yaitu Sananwetan, Kepanjenkidul, dan Sukorejo. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Sananwetan yang memiliki luas wilayah 12,65 km² kemudian Kecamatan Kepanjenkidul 10,43 km² sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Sukorejo dengan luas 10,13 km².



Gambar 2.1

Peta Administrasi Kota Blitar

Kota Blitar berjarak kurang lebih 167 km sebelah tenggara Kota Surabaya, 80 km sebelah barat Kota Malang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar. Posisi Kota Blitar berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar. Sehingga wilayah administratif Kota Blitar berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kab. Blitar
2. Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kab. Blitar
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kab. Blitar

4. Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kab. Blitar.

Wilayah Kota Blitar meliputi 3 kecamatan, yang masing-masing kecamatan terdiri atas 7 kelurahan. Adapun luas masing-masing kelurahan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kota Blitar

NO	KELURAHAN	KODE	KECAMATAN	LUAS (KM2)
1	Kepanjenkidul	35.72.01.1001	Kepanjenkidul	1,043
2	Ngadirejo	35.72.01.1002	Kepanjenkidul	1,928
3	Sentul	35.72.01.1003	Kepanjenkidul	2,287
4	Kauman	35.72.01.1004	Kepanjenkidul	0,765
5	Tanggung	35.72.01.1005	Kepanjenkidul	2,449
6	Bendo	35.72.01.1006	Kepanjenkidul	1,254
7	Kepanjenlor	35.72.01.1007	Kepanjenkidul	0,7
8	Pakunden	35.72.02.1001	Sukorejo	2,31
9	Blitar	35.72.02.1002	Sukorejo	1,448
10	Tlumpu	35.72.02.1003	Sukorejo	1,081
11	Turi	35.72.02.1004	Sukorejo	0,438
12	Karangsari	35.72.02.1005	Sukorejo	0,863
13	Sukorejo	35.72.02.1006	Sukorejo	1,384
14	Tanjungsari	35.72.02.1007	Sukorejo	2,604
15	Gedog	35.72.03.1001	Sananwetan	2,95
16	Plosokerep	35.72.03.1002	Sananwetan	1,164
17	Klampok	35.72.03.1003	Sananwetan	1,557
18	Sananwetan	35.72.03.1004	Sananwetan	2,154
19	Rembang	35.72.03.1005	Sananwetan	0,869
20	Karangtengah	35.72.03.1006	Sananwetan	1,899
21	Bendogerit	35.72.03.1007	Sananwetan	2,055
JUMLAH				**33,203**

Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2022

2.1.1.1.2 Topografi

Tingkat kemiringan Kota Blitar di bagian utara 2° sampai 15°, sedangkan bagian tengah sampai selatan memiliki tingkat kemiringan 0° sampai 2°. Rata-rata ketinggian Kota Blitar dari permukaan air laut sekitar 156 m. Ketinggian di bagian utara sekitar 245 m, bagian tengah 175 m dan bagian selatan 140 m dari permukaan air laut.

Tabel 2.2

Tinggi Wilayah Di Atas Permukaan Laut Kota Blitar

Wilayah	Ketinggian (mdpl)	Kemiringan (◦)
Kota Blitar Utara	245	2 - 15
Kota Blitar Tengah	185	0 - 2
Kota Blitar Selatan	140	0 - 2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2026

2.1.1.1.3 Geologi

Jenis tanah di Kota Blitar didominasi oleh tanah andosol dan regosol. Tanah andosol merupakan jenis tanah yang terbentuk dari proses vulkanis. Tanah ini memiliki ciri warna gelap kecoklatan, bersifat gembur, serta memiliki kadar organik dan kadar air tinggi. Tanah andosol berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian dan agrowisata.

Tanah regosol merupakan jenis tanah yang juga terbentuk dari peristiwa vulkanis. Tanah ini memiliki ciri berupa tekstur tanah yang kasar, berwarna keabuan, cenderung gembur, mempunyai kemampuan menyerap air yang tinggi, serta kaya akan unsur hara. Tanah regosol juga berpotensi untuk dimanfaatkan untuk pertanian.

2.1.1.1.4 Hidrologi dan Klimatologi

Kota Blitar dilalui oleh tiga wilayah Daerah Pengaliran Sungai (DPS):

1. DPS Lahar sepanjang 7,84 km yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara, Tengah, dan Barat;
2. DPS Cari yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara dan Timur; dan
3. DPS Nanas yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara dan Barat.

Berdasarkan data dari tiga stasiun pengukur curah hujan di Kota Blitar, selama tahun 2025 setiap bulan terdapat hari hujan. Curah hujan tertinggi dan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari 2025, yaitu sebanyak 71 hari hujan dengan total curah hujan sebesar 1.392 mm pada tiga stasiun pengukuran curah hujan.

2.1.1.2 Peran Strategis Daerah

Kebijakan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dan nasional memandang posisi strategis Kota Blitar sehingga menetapkan Kota Blitar sebagai Pusat Kegiatan Wilayah. Hal tersebut dikaitkan dengan posisi Kota Blitar yang berada di tengah-tengah Kabupaten Blitar. Kota Blitar menjadi wilayah penghubung antara wilayah selatan dan tengah yaitu Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung dengan wilayah Malang Raya. Posisi ini membuat Kota Blitar berperan cukup strategis dalam konektivitas, distribusi pelayanan dan pertumbuhan wilayah.

Sebagai pusat kegiatan wilayah, Kota Blitar menjadi pusat kegiatan ekonomi, industri, perdagangan dan jasa yang menyediakan berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kondisi tersebut didukung dengan adanya fasilitas transportasi antar daerah yaitu stasiun kereta api dan terminal tipe B.

2.1.1.3 Potensi Sumber Daya

Potensi sumber daya alam dapat dilihat dari pola penggunaan lahan, dimana pola penggunaan lahan Kota Blitar dengan karakteristik kota kecil dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.3

Pola Penggunaan Lahan

No.	JENIS TUTUPAN LAHAN	Luas (Ha)	Persentase
1	Bangunan Industri	27.26	0.82%
2	Bangunan Kesehatan	5.17	0.16%

No.	JENIS TUTUPAN LAHAN	Luas (Ha)	Persentase
3	Bangunan Olahraga	5.53	0.17%
4	Bangunan Pariwisata dan Hiburan	4.92	0.15%
5	Bangunan Pendidikan	28.58	0.86%
6	Bangunan Perdagangan dan Jasa	48.74	1.47%
7	Bangunan Peribadatan	6.96	0.21%
8	Bangunan Perkantoran	11.79	0.36%
9	Bangunan Permukiman	650.40	19.60%
10	Bangunan Pertahanan dan Keamanan	4.85	0.15%
11	Bangunan Sosial	1.30	0.04%
12	Bangunan Transportasi	1.90	0.06%
13	Bangunan Utilitas	0.86	0.03%
14	Embung	0.89	0.03%
15	Jalan	139.93	4.22%
16	Kolam	11.95	0.36%
17	Lapangan Olahraga	35.23	1.06%
18	Makam	23.27	0.70%
19	Median Jalan	0.36	0.01%
20	Pekarangan	703.04	21.18%
21	Permukaan/Lapangan Diperkeras	63.42	1.91%
22	Peternakan	17.76	0.54%
23	Rel	4.32	0.13%
24	Saluran Air	0.16	0.00%
25	Sawah	1048.65	31.60%
26	Sungai	27.64	0.83%
27	Taman	9.36	0.28%
28	Tanah Kosong	22.74	0.69%
29	Tanaman Campuran	410.57	12.37%
30	Terminal	1.47	0.04%

Sumber *: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, 2025*

Dalam keterbatasan sumber daya alam, Kota Blitar memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan yaitu daerah penghasil belimbing dengan kualitas baik, yaitu Kelurahan Karangsari. Belimbing yang dikembangkan di kelurahan ini termasuk bibit unggul dan sudah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu Belimbing Merah Karangsari. Selain sebagai pusat budidaya, Karangsari juga menjadi tempat wisata petik belimbing.

Selain itu, Kota Blitar dikenal dengan Kota Koi karena Kota Blitar minimal sekali dalam setahun mengadakan lomba koi tingkat nasional. Tanah dan air Kota Blitar termasuk baik untuk budidaya koi. Dengan memanfaatkan posisi strategis Kota Blitar sebagai pusat kegiatan wilayah, maka Kota Blitar memposisikan diri sebagai daerah pemasaran dan pusat transaksi ikan koi di wilayah Blitar dan sekitarnya.

Potensi sumber daya alam lainnya, meskipun tidak terlalu luas beberapa sumber mata air dimanfaatkan untuk menjadi tempat wisata seperti Sumber Balang dan Sumber Mbah Bawuk.

2.1.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

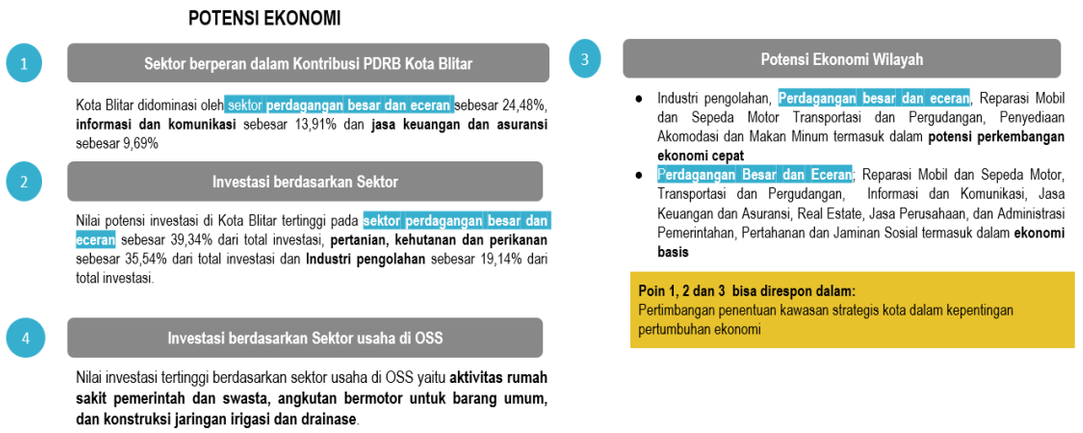
Potensi Wilayah adalah kemampuan suatu daerah yang berupa sumber daya yang dapat diambil manfaatnya untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan kemampuan wilayah yang bersangkutan. Potensi Kota Blitar yang tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disajikan dalam uraian berikut:

2.1.1.4.1 Potensi Ekonomi Wilayah

Potensi ekonomi wilayah di Kota Blitar sebagai berikut:

a. Kota Blitar didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran; informasi dan komunikasi serta jasa keuangan dan asuransi.
b. Nilai potensi investasi di Kota Blitar tertinggi pada sektor perdagangan besar dan eceran ; pertanian, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan.
c. Industri pengolahan, Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum termasuk dalam potensi perkembangan ekonomi cepat.
d. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial termasuk dalam ekonomi basis
e. Nilai investasi tertinggi berdasarkan sektor usaha di OSS yaitu aktivitas rumah sakit pemerintah dan swasta, angkutan bermotor untuk barang umum, dan konstruksi jaringan irigasi dan drainase.

Potensi-potensi ekonomi wilayah di Kota Blitar akan diakomodir ke dalam pertimbangan penyusunan rencana sebagai berikut:



Sumber : Dinas PUPR, 2025

Gambar 2.2

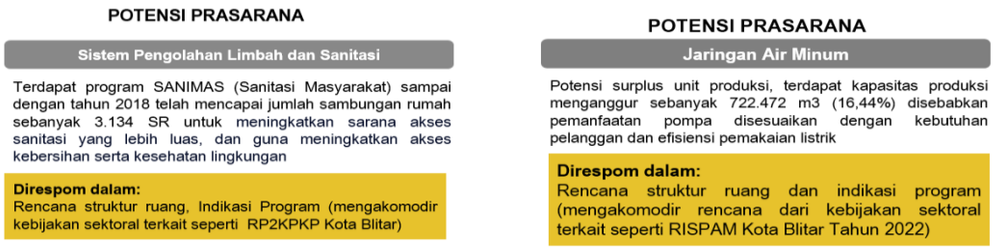
Potensi Ekonomi Kota Blitar

2.1.1.4.2 Potensi Sarana dan Prasarana

Potensi sarana dan prasarana di Kota Blitar sebagai berikut:

a. Terdapat program SANIMAS (Sanitasi Masyarakat) sampai dengan tahun 2018 telah mencapai jumlah sambungan rumah sebanyak 3.134 SR untuk meningkatkan sarana akses sanitasi yang lebih luas, dan guna meningkatkan akses kebersihan serta kesehatan lingkungan
b. Potensi surplus unit produksi, terdapat kapasitas produksi menganggur sebanyak 722.472 m3 (16,44%) disebabkan pemanfaatan pompa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan efisiensi pemakaian listrik

Potensi-potensi sarana dan prasarana di Kota Blitar akan diakomodir ke dalam pertimbangan penyusunan rencana sebagai berikut :



Sumber : Dinas PUPR, 2025

Gambar 2.3

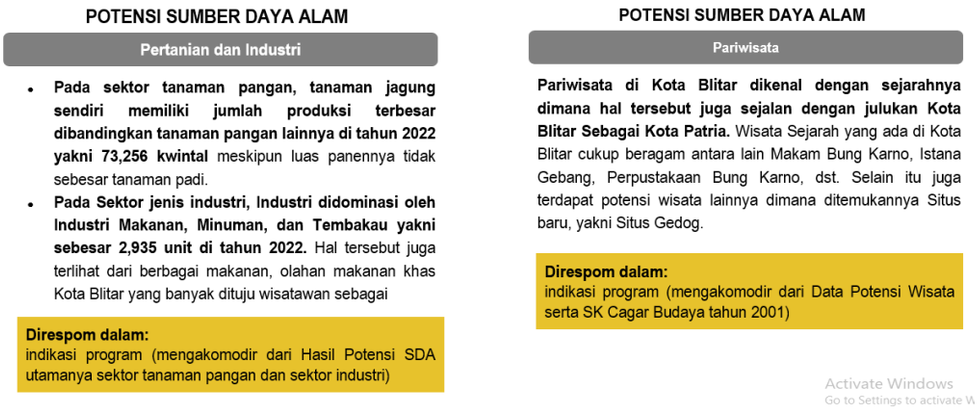
Potensi Sarana dan Prasarana Kota Blitar

2.1.1.4.3 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam di Kota Blitar sebagai berikut:

a. Pada sektor tanaman pangan, tanaman jagung sendiri memiliki jumlah produksi terbesar dibandingkan tanaman pangan lainnya di tahun 2022 yakni 73,256 kwintal meskipun luas panennya tidak sebesar tanaman padi. Hal tersebut tentunya berpotensi sebagai pengembangan tanaman pangan dari hulu hingga hilirnya nanti jika dikelola secara optimal
b. Pada Sektor jenis industri, Industri didominasi oleh Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau yakni sebesar 2,935 unit di tahun 2022. Sektor tersebut tentunya apabila disertai dukungan baik dari pihak swasta dan pemerintah, atau pihak lainnya akan mampu menambah PAD Kota Blitar kedepannya
c. Pariwisata di Kota Blitar dikenal dengan sejarahnya dimana hal tersebut juga sejalan dengan julukan Kota Blitar Sebagai Kota Patria. Wisata Sejarah yang ada di Kota Blitar cukup beragam antara lain Makam Bung Karno, Istana Gebang, Perpustakaan Bung Karno, dst. Selain itu juga terdapat potensi-potensi wisata lainnya dimana ditemukannya Situs baru, yakni Situs Gedog.

Potensi-potensi sumber daya alam di Kota Blitar akan diakomodir ke dalam pertimbangan penyusunan rencana sebagai berikut



Sumber : Dinas PUPR, 2025

Gambar 2.4

Potensi Sumber Daya Alam Kota Blitar

2.1.1.4.4 Potensi Fisik Wilayah

Potensi fisik wilayah di Kota Blitar didominasi oleh klasifikasi pengembangan tinggi sebesar 73,76% dari total luas wilayah. Sehingga dapat mendukung untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya.

Status daya dukung air di Kota Blitar adalah belum terlampaui yang berarti kebutuhan air masih di bawah ketersediaan air. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat nilai surplus yang besar dari ketersediaan air di Kota Blitar sehingga masih bisa digunakan untuk keperluan kegiatan budidaya lainnya

2.1.1.5 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Secara geografis, Kota Blitar terletak diujung selatan Provinsi Jawa Timur dengan ketinggian 156 m dari permukaan air laut dengan suhu udara cukup sejuk rata-rata 24°C- 34°C karena berada di kaki Gunung Kelud. Karena seluruh wilayahnya adalah wilayah perkotaan, yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah pertanian, kebun campuran dan pekarangan, maka sebagai penggerak ekonomi Kota Blitar mengandalkan potensi diluar sumber daya alam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Potensi tersebut didukung dengan kekuatan demografi Kota Blitar yang terus mengalami kenaikan cukup signifikan. Namun, peningkatan jumlah penduduk memberikan konsekuensi tersendiri bagi keberlangsungan lingkungan. Kualitas dan kondisi wilayah menjadi semakin menurun akibat adanya kegiatan manusia yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan dari fungsi lingkungan hidup. Hal lain yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan adalah terjadinya ketidaksesuaian penggunaan ruang, antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya lahan kritis, bencana, dan pelanggaran peruntukan tata ruang, dimana banyak kawasan lindung yang berubah fungsi.

Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya (daya dukung lingkungan hidup) serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (daya tampung lingkungan hidup) penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan pemanfaatan ruang.

Sebagai bagian dari integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dilakukan analisis terhadap Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Hidup (D3TL) Kota Blitar. Hasil perhitungan D3TL memberikan gambaran kapasitas lingkungan dalam menunjang pembangunan secara berkelanjutan.

1. Daya Dukung Lahan (DDL)

   Nilai DDL Kota Blitar adalah 0,63. Nilai ini lebih kecil dari 1, menunjukkan bahwa kebutuhan ruang untuk aktivitas manusia dan pembangunan melebihi luas lahan yang tersedia secara ekologis. Kondisi ini mengindikasikan tekanan terhadap fungsi lahan dan potensi konflik penggunaan ruang, serta perlunya pengendalian alih fungsi lahan dan peningkatan efisiensi tata ruang.

2. Daya Tampung Resapan Air (DTRA)

   Nilai DTRA Kota Blitar adalah 0,97, yang berarti hampir seimbang namun mulai menunjukkan ketidakseimbangan antara air hujan yang masuk dan kemampuan lahan untuk meresapkannya. Hal ini mengindikasikan perlunya langkah konservasi lahan dan pengendalian alih fungsi ruang terbuka hijau agar genangan dan limpasan air dapat dikendalikan secara efektif.

3. Daya Tampung Limbah Cair Domestik (DTLCD)

   Nilai DTLCD adalah 0,42, menunjukkan bahwa daya tampung badan air permukaan untuk menerima limbah cair domestik jauh di bawah jumlah limbah yang dihasilkan oleh masyarakat. Ketidakseimbangan ini dapat menurunkan kualitas air permukaan dan berisiko menimbulkan pencemaran lingkungan perairan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengelolaan air limbah domestik dan IPAL komunal menjadi sangat penting untuk ditekankan dalam arah kebijakan ke depan.

4. Daya Tampung Emisi Karbon (DTEC)

   Nilai DTEC Kota Blitar adalah 0,21, mencerminkan bahwa kemampuan ekosistem di wilayah ini untuk menyerap emisi karbon sangat terbatas dibandingkan jumlah emisi yang dihasilkan, terutama dari sektor transportasi dan energi. Kondisi ini menunjukkan kontribusi signifikan Kota Blitar terhadap perubahan iklim, serta perlunya kebijakan mitigasi emisi seperti penghijauan, efisiensi energi, dan transisi ke energi bersih.

Hasil analisis D3TL menjadi dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kota Blitar. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang direncanakan perlu mempertimbangkan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, agar tidak memperburuk degradasi sumber daya alam. Integrasi ini selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.

Kota Blitar memiliki potensi daya dukung dan daya tampung lingkungan yang relatif baik, dengan nilai daya dukung lahan 0,021 ha/jiwa (2025) dan 0,020 ha/jiwa (2029), masih berada di atas ambang minimum sesuai standar nasional. Hal ini menunjukkan wilayah Kota Blitar masih mampu menampung populasi hingga akhir masa perencanaan.

2.1.1.5.1 Daya Dukung Pangan

Produktivitas lahan untuk pemenuhan pangan beras di Kota Blitar pada tahun 2025 memiliki nilai 0,10 dimana nilai tersebut di atas dari nilai

konsumsi fisik beras minimum per tahun sebesar 0,12. Kondisi pada tahun 2025 dan 2045 juga memiliki tingkat produktivitas lahan sawah masing-masing sebesar 0,10 dan 0,07 sehingga dapat disimpulkan jika kebutuhan pangan di Kota Blitar memiliki status Defisit Daya Dukung Pangan atau Belum Mampu Swasembada Pangan. Lebih detail lagi kondisi daya dukungan pangan setiap kecamatan di Kota Blitar ditunjukkan tabel di bawah ini.

Tabel 2.4

Daya Dukung Pangan Kota Blitar Tahun 2025 dan Tahun 2045

Daya Dukung Pangan Kota Blitar Tahun 2025						
Nama Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Pangan (ton)	Kebutuhan Luas Pertanian (ha)	Luas Pertanian Eksisting (ha)	Daya Tampung Pangan	Keterangan
Kecamatan Kepanjen Kidul	47.211	3.834,95	614,58	528,31	0,86	Defisit/ Terlampaui
Kecamatan Sananwetan	46.020	3.738,20	588,69	545,61	0,93	Defisit/ Terlampaui
Kecamatan Sukorejo	50.088	4.068,65	640,73	496,46	0,77	Defisit/ Terlampaui
KOTA BLITAR	143.319	11.641,80	1.844,00	1.570,38	0,85	Defisit/ Terlampaui

Daya Dukung Pangan Kota Blitar Tahun 2045						
Nama Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Pangan (ton)	Kebutuhan Luas Pertanian (ha)	Luas Pertanian (ha)	Daya Tampung Pangan	Keterangan
Kecamatan Kepanjen Kidul	41.467	3.368,36	539,80	295,38	0,55	Defisit/ Terlampaui
Kecamatan Sananwetan	45.961	3.733,41	587,94	458,94	0,78	Defisit/ Terlampaui
Kecamatan Sukorejo	63.157	5.130,24	807,91	246,66	0,31	Defisit/ Terlampaui
KOTA BLITAR	150.585	12.232,02	1.935,65	1.000,97	0,52	Defisit/ Terlampaui

Sumber *: Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2025*

2.1.1.5.2 Daya Dukung Air

Pada tahun 2025 dan 2029, daya dukung air Kota Blitar dinyatakan kurang, karena kebutuhan melebihi ketersediaan.

Tabel 2.5

Status Daya Dukung Air Kota Blitar

Tahun	Ketersediaan Air (m^3/tahun)	Kebutuhan Air (m^3/tahun)	Status
2023	23.294.039	22.827.832,43	Optimal
2025	23.294.039	25.426.932,44	Kurang

2029	22.132.800	25.827.953,05	Kurang

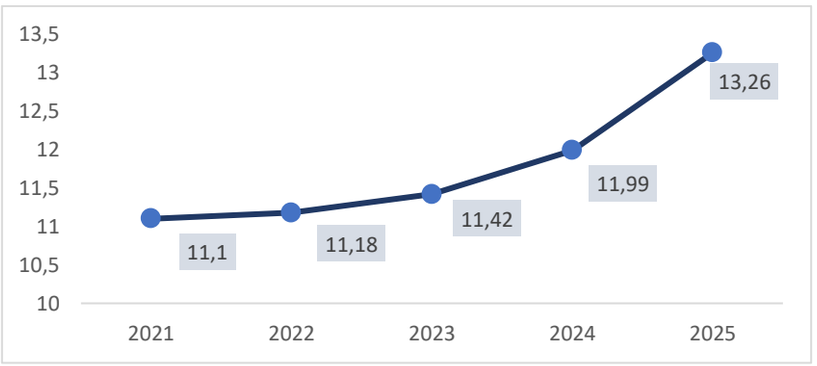
Sumber *: Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2025*

Distribusi jasa ekosistem penyedia air bersih menunjukkan bahwa tiga kecamatan di Kota Blitar masih memiliki area signifikan yang masuk dalam kategori tinggi dan sangat tinggi. Namun demikian, tekanan pembangunan di pusat kota menjadi tantangan terhadap keberlanjutan daerah tangkapan air.

2.1.1.6 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.1.6.1 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Akses terhadap air minum yang layak merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat serta menjadi bagian dari target Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur akses tersebut adalah jumlah sambungan rumah (SR) aktif yang dimanfaatkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan air bersih.



Sumber: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria, 2026

Gambar 2.5

Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Kota Blitar 2021 – 2025

Berdasarkan data Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria, akses rumah tangga terhadap layanan air minum di Kota Blitar menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2025. Persentase cakupan layanan meningkat dari sekitar 11,1% pada tahun 2021 menjadi 13,26% pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya perluasan layanan air minum perpipaan kepada masyarakat. Peningkatan yang relatif lebih signifikan terjadi pada periode 2024–2025. Pada tahun 2025, dari total 52.691 rumah tangga di Kota Blitar, sebanyak 6.986 rumah tangga telah terlayani melalui sambungan rumah aktif.

Meskipun demikian, capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga masih belum mengakses layanan air minum perpipaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa cakupan layanan air minum masih perlu ditingkatkan. Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain keterbatasan kapasitas infrastruktur, jangkauan jaringan distribusi yang belum merata, serta keterbatasan pembiayaan untuk pengembangan layanan.

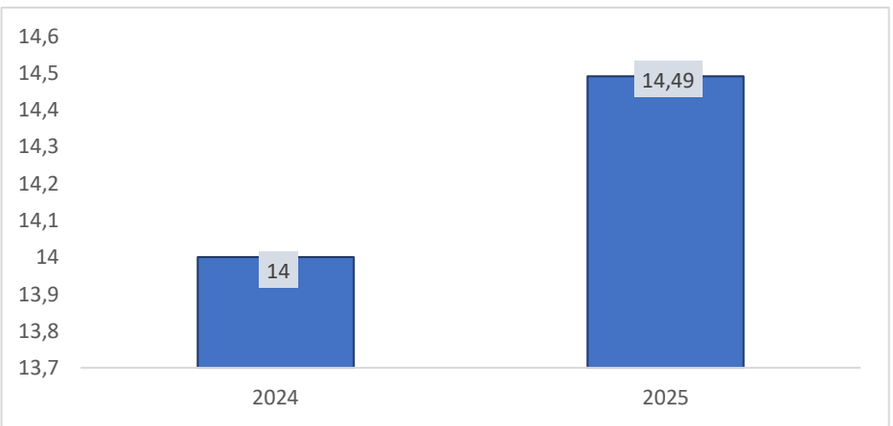
Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan terintegrasi untuk meningkatkan akses air minum, antara lain melalui penguatan investasi infrastruktur, peningkatan kinerja pengelolaan oleh BUMD air

minum, pengurangan tingkat kehilangan air *(non-revenue water)*, serta optimalisasi dukungan kebijakan dan pendanaan. Selain itu, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan juga menjadi aspek penting guna menjamin ketersediaan air baku di masa mendatang.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan cakupan layanan air minum di Kota Blitar dapat terus meningkat sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.

2.1.1.6.2 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah *(on premises)*; 3) Tersedia setiap saat dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. Penyediaan akses air siap minum perpipaan bagi rumah tangga perkotaan merupakan salah satu prioritas dalam pemenuhan infrastruktur dasar yang sehat dan berkelanjutan di Kota Blitar. Pada periode tahun 2021–2023, indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan belum dilakukan perhitungan sehingga belum tersedia data capaian yang dapat dibandingkan. Berdasarkan data capaian, terdapat tren peningkatan yang positif pada indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan, di mana pada tahun 2024 realisasinya sebesar 14% dan meningkat menjadi 14,49% pada tahun 2025. Peningkatan ini didukung kuat oleh performa dan komitmen layanan dari PDAM dalam memperluas jangkauan jaringan serta menjaga kualitas air bagi masyarakat perkotaan.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang, 2026

Gambar 2.6

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Capaian positif tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Blitar untuk terus mengoptimalkan perluasan akses di masa mendatang. Dalam upaya memperkuat kerangka kerja yang lebih sistematis, fokus utama ke depan adalah penyusunan dokumen *masterplan* perencanaan yang komprehensif sebagai panduan strategis pembangunan. Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah daerah berkomitmen memprioritaskan penyusunan *masterplan* tersebut dengan menyelaraskannya pada prioritas program kegiatan daerah. Melalui perencanaan yang lebih terukur dan terintegrasi, diharapkan pemenuhan target akses air siap minum perpipaan

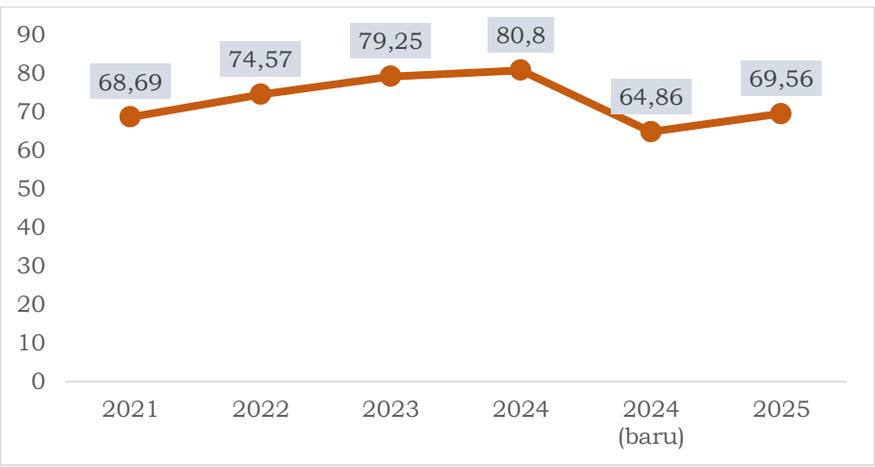
bagi seluruh masyarakat dapat terwujud dengan dukungan penganggaran yang semakin efisien, efektif, dan tepat sasaran.

2.1.1.6.3 Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan, tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan sub sistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada hasil reviu terhadap indeks ketahanan pangan global, tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi, keterwakilan 3 (tiga) pilar ketahanan pangan, dan ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.



Sumber : *Badan Pangan Nasional, 2025*

Gambar 2.7

Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar

Tahun 2021 – 2025

Dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2024, Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 68,69 pada tahun 2021, meningkat menjadi 74,57 pada tahun 2022, kemudian 79,25 pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 80,80 pada tahun 2024. Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi perubahan metode perhitungan Indeks Ketahanan Pangan, sehingga apabila menggunakan metode baru tersebut, nilai indeks tahun 2024 menjadi 64,86. Dengan metode yang sama, nilai indeks tahun 2025 meningkat menjadi 69,56, yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketahanan pangan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar menunjukkan tren perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun perubahan metode pengukuran menyebabkan penyesuaian nilai indeks.

Indeks Ketahanan Pangan tahun 2025 dihitung dengan mengukur aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar tahun 2025 tercatat 69,56, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 64,86. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan masyarakat, meskipun pada saat yang sama terdapat penurunan pada dimensi ketersediaan pangan. Secara komponen, perkembangan indeks tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.6

Komponen Indeks Ketahanan Pangan

Dimensi	Tahun 2024	Tahun 2025	Perubahan
Indeks Ketersediaan	42,27	38,81	Turun
Indeks Keterjangkauan	78,78	86,24	Naik signifikan
Indeks Pemanfaatan	73,73	83,89	Naik signifikan

Sumber *: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, 2025*

Data tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan Kota Blitar pada tahun 2025 terutama didukung oleh meningkatnya keterjangkauan pangan dan kualitas pemanfaatan pangan, sementara aspek ketersediaan pangan masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat ke depan.

Faktor pendorong meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatnya Keterjangkauan Pangan Masyarakat

   Indeks keterjangkauan pangan meningkat dari 78,78 pada tahun 2024 menjadi 86,24 pada tahun 2025. Kondisi ini dipengaruhi oleh:

   a. Penurunan tingkat kemiskinan yang berdampak pada meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan.

   b. Stabilitas harga pangan strategis seperti beras, telur ayam ras, minyak goreng dan daging ayam yang relatif terjaga.

c. Program perlindungan sosial seperti bantuan pangan, bantuan sosial, serta program perlindungan kesehatan yang membantu menjaga daya beli kelompok rentan.

Dengan kondisi tersebut, akses masyarakat terhadap pangan menjadi lebih baik dan kesenjangan konsumsi pangan antar kelompok masyarakat dapat ditekan.

2. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Kualitas Konsumsi

Indeks pemanfaatan pangan meningkat cukup signifikan dari 73,73 pada tahun 2024 menjadi 83,89 pada tahun 2025. Peningkatan ini didorong oleh:

a. Peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat, termasuk program pencegahan stunting dan peningkatan gizi keluarga.

b. Perbaikan akses air bersih dan sanitasi, yang mendukung kesehatan masyarakat serta kualitas konsumsi pangan.

b. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan bergizi, tercermin dari perbaikan skor Pola Pangan Harapan (PPH).

c. Meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, yang berperan penting dalam pengelolaan konsumsi pangan keluarga.

Perbaikan pada dimensi pemanfaatan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki akses pangan, tetapi juga memanfaatkan pangan secara lebih sehat dan berkualitas.

3. Dukungan Program Penguatan Ketahanan Pangan Daerah

Program pemerintah daerah juga berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan, antara lain:

a. Pengembangan urban farming dan pertanian perkotaan;

b. Penguatan cadangan pangan pemerintah daerah (CBPD);

b. Program diversifikasi pangan lokal;

c. Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar dan pangan siap saji.

Program tersebut memperkuat sistem pangan daerah serta menjaga stabilitas pasokan pangan masyarakat.

Meskipun terjadi peningkatan nilai indeks secara keseluruhan, terdapat beberapa faktor yang masih menjadi tantangan dalam peningkatan ketahanan pangan Kota Blitar, yaitu:

1. Penurunan Dimensi Ketersediaan Pangan

Indeks ketersediaan pangan mengalami penurunan dari 42,27 pada tahun 2024 menjadi 38,81 pada tahun 2025. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Keterbatasan lahan pertanian di wilayah perkotaan, sehingga kapasitas produksi pangan lokal relatif terbatas.

b. Ketergantungan pasokan pangan dari daerah lain, sehingga stabilitas ketersediaan pangan dipengaruhi oleh kondisi produksi regional.

c. Cadangan pangan pemerintah daerah yang masih perlu diperkuat, baik dari sisi volume maupun pengelolaannya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan Kota Blitar masih sangat bergantung pada sistem distribusi pangan antar wilayah.

2. Kerentanan terhadap Fluktuasi Harga Pangan

   Meskipun inflasi relatif terkendali, beberapa komoditas pangan strategis masih mengalami fluktuasi harga musiman, yang dapat mempengaruhi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Fluktuasi harga tersebut dapat berdampak pada:

   a. menurunnya akses pangan kelompok rentan
   b. meningkatnya risiko kerawanan pangan pada rumah tangga miskin

3. Tantangan Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan

   Meskipun indeks pemanfaatan meningkat, masih terdapat beberapa tantangan seperti:

   a. konsumsi pangan masyarakat yang belum sepenuhnya beragam dan seimbang;
   b. stunting pada balita yang masih memerlukan penanganan berkelanjutan;
   b. kesenjangan akses air bersih dan sanitasi pada beberapa kelompok masyarakat.

4. Inefisiensi anggaran dalam peningkatan ketahanan pangan daerah, yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

   a. Kurangnya sinergitas dalam perencanaan dan implementasi program antar Perangkat Daerah.

      Program yang berkaitan dengan ketahanan pangan tersebar pada beberapa Perangkat Daerah seperti perangkat daerah yang menangani urusan pertanian, perdagangan, kesehatan, sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, koordinasi perencanaan dan integrasi pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal, sehingga masih terdapat potensi tumpang tindih kegiatan maupun penggunaan anggaran yang belum terfokus pada indikator utama peningkatan ketahanan pangan.

   b. Pendekatan program yang masih parsial

      Intervensi yang dilakukan masih cenderung berdiri sendiri dan belum sepenuhnya mengintegrasikan tiga dimensi utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Sebagian program lebih menitikberatkan pada peningkatan produksi atau bantuan pangan, namun belum secara komprehensif mengintegrasikan aspek distribusi, stabilitas harga, kualitas konsumsi pangan, serta peningkatan gizi masyarakat.

   c. Fokus program masih dominan pada intervensi jangka pendek

      Sebagian besar program masih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan jangka pendek melalui bantuan sosial pangan atau subsidi, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kapasitas produksi pangan lokal, penguatan cadangan pangan daerah, dan kemandirian pangan masyarakat belum optimal.

   d. Pemanfaatan data ketahanan pangan yang belum sepenuhnya terintegrasi Sistem pendataan terkait kondisi kerentanan pangan, rumah tangga rentan, serta distribusi wilayah rawan pangan masih memerlukan penguatan integrasi antar sistem informasi. Kondisi ini menyebabkan penentuan sasaran program dan alokasi anggaran belum sepenuhnya berbasis data yang akurat dan mutakhir.

e. Terbatasnya dukungan terhadap penguatan sistem pangan lokal.

Dukungan anggaran terhadap pengembangan pertanian perkotaan, lumbung pangan masyarakat, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, serta pengembangan rantai pasok pangan lokal masih relatif terbatas, sehingga potensi penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas belum dimanfaatkan secara optimal.

f. Belum optimalnya penguatan rantai distribusi dan tata niaga pangan

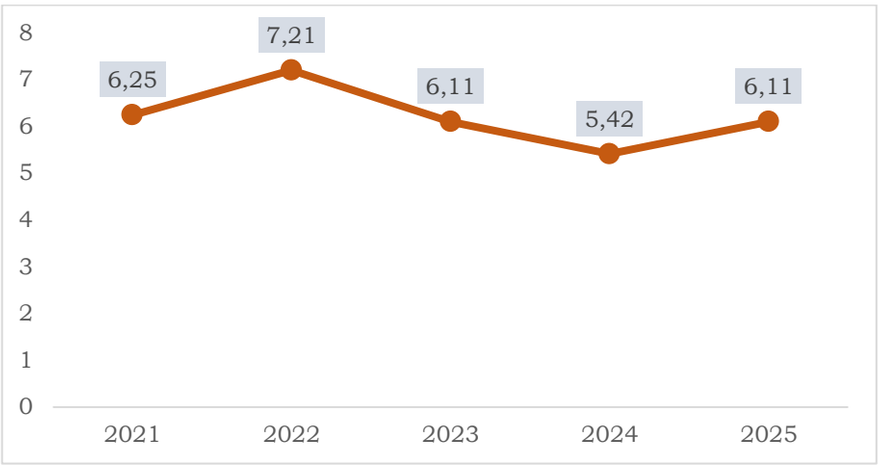
Keterbatasan infrastruktur distribusi, penyimpanan pangan, serta penguatan sistem perdagangan pangan menyebabkan biaya distribusi relatif tinggi dan berpotensi mempengaruhi stabilitas harga pangan di tingkat konsumen.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan, kedepan Pemerintah Kota Blitar akan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan ketersediaan pangan daerah melalui optimalisasi produksi pangan lokal, pengembangan urban farming, pemanfaatan lahan pekarangan, serta penguatan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat berbasis komunitas.
2. Peningkatan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan rumah tangga miskin, melalui stabilisasi harga pangan, penguatan distribusi pangan, serta pelaksanaan program bantuan pangan yang lebih tepat sasaran.
3. Peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan, melalui edukasi diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, peningkatan kesadaran gizi masyarakat, serta pengawasan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.
4. Penguatan sistem distribusi dan rantai pasok pangan, dengan memperbaiki koordinasi antar perangkat daerah, optimalisasi peran pasar daerah, serta pemanfaatan sistem informasi pangan untuk memantau ketersediaan dan harga pangan secara berkala.
5. Pengembangan lumbung pangan masyarakat dan cadangan pangan berbasis komunitas, sebagai instrumen stabilisasi pasokan pangan pada tingkat kelurahan atau kelompok masyarakat, terutama dalam menghadapi potensi kerawanan pangan dan fluktuasi harga.
6. Penguatan kolaborasi lintas sektor, antara pemerintah daerah, kelompok tani, pelaku usaha, serta masyarakat dalam pengembangan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan lokal.
7. Peningkatan efisiensi penggunaan anggaran ketahanan pangan, melalui integrasi program lintas perangkat daerah, penguatan perencanaan berbasis data, serta pemanfaatan program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kemandirian pangan.

2.1.1.6.4 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau dikenal dengan istilah *Prevalence of Undernourishment* (PoU) dapat digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar,2025

Gambar 2.8

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Kota Blitar Tahun 2021-2025

Berdasarkan data tren lima tahun terakhir (2021-2025), angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kota Blitar menunjukkan fluktuasi yang dinamis. Setelah sempat mencapai titik tertinggi sebesar 7,21% pada tahun 2022, angka ini berhasil ditekan hingga menyentuh 5,42% pada tahun 2024, sebelum kembali mengalami sedikit kenaikan menjadi 6,11% pada tahun 2025. Dinamika ini menggambarkan tantangan nyata dalam menjaga konsistensi aksesibilitas pangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

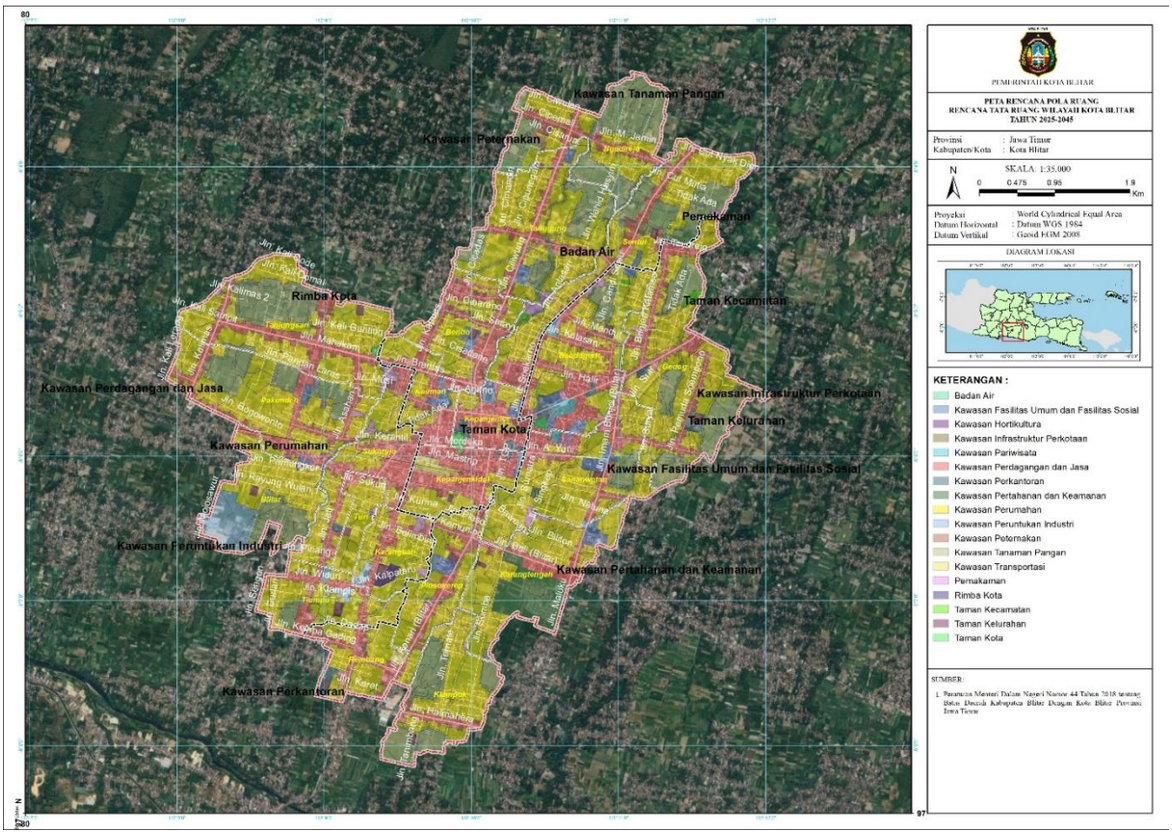
Keberhasilan dalam menekan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kota Blitar didorong oleh sinergi program intervensi ketahanan pangan, bantuan sosial, dan pengendalian inflasi yang melibatkan lintas sektor seperti Bulog, Bapanas, dan Dinas Sosial. Selain itu, masifnya edukasi pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) serta optimalisasi program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) telah memperkuat kemandirian rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi secara mandiri. Namun, tantangan signifikan muncul dari sisi eksternal berupa kenaikan harga pangan pokok yang mengoreksi daya beli masyarakat miskin, serta faktor internal berupa masih tingginya preferensi masyarakat terhadap beras dan pola konsumsi yang belum seimbang akibat kebiasaan lama.

Sebagai langkah strategis ke depan, Pemerintah Kota Blitar akan memprioritaskan perbaikan pemanfaatan pangan dan gizi melalui sosialisasi konsumsi B2SA yang berbasis pada optimalisasi potensi pangan lokal. Langkah ini akan diintegrasikan secara komprehensif dengan program pengentasan kemiskinan guna memastikan akses pangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.1.1.7 Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.1.7.1 Penggunaan Lahan

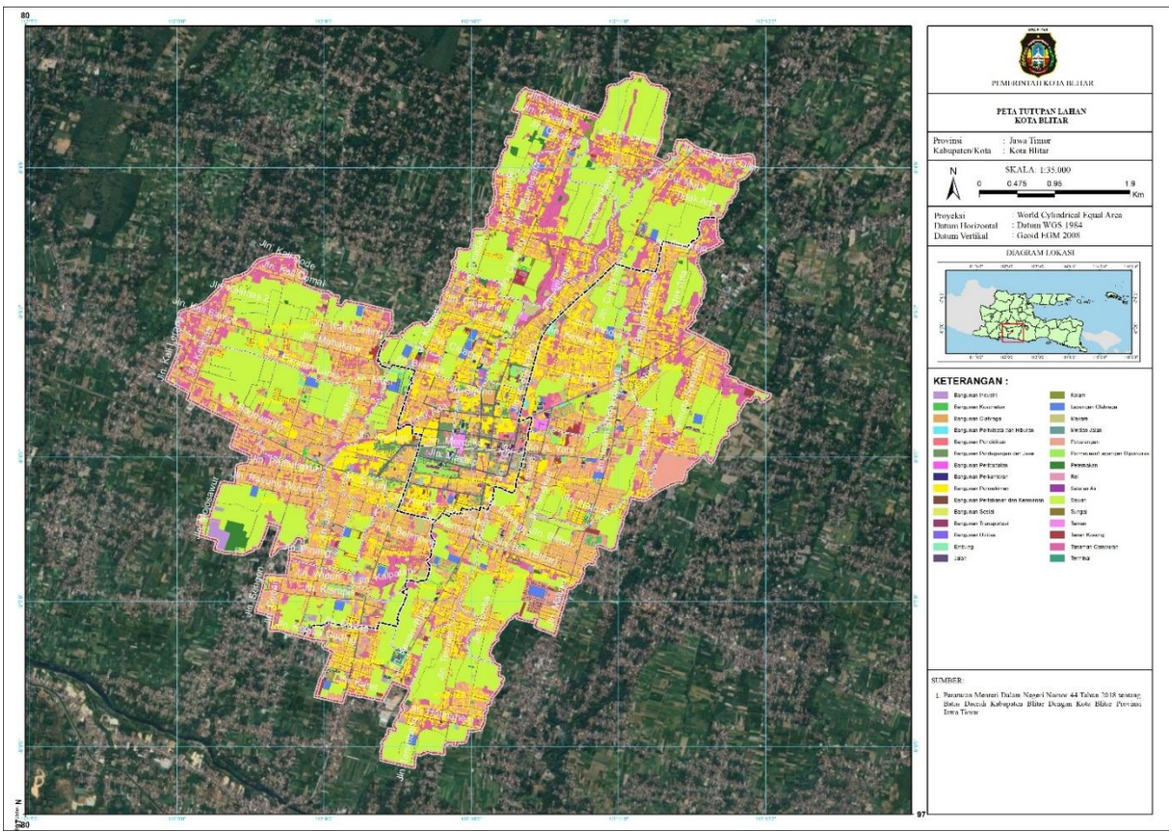
Pemanfaatan lahan di Kota Blitar merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan wilayah yang terstruktur, di mana harmonisasi antara kondisi eksisting dan visi masa depan menjadi kunci keberlanjutan kota. Berikut disampaikan Peta Rencana Pola Ruang Kota Blitar dan Peta Tutupan Lahan Kota Blitar.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, 2026

Gambar 2.9

Peta Rencana Pola Ruang Kota Blitar



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, 2026

Gambar 2.10

Peta Tutupan Lahan Kota Blitar

2.1.1.7.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Blitar selama periode 2023–2025 menunjukkan dinamika yang memerlukan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2023, Kota Blitar mencatatkan nilai IKLH sebesar 67,58, yang kemudian mengalami penurunan ke angka 64,94 pada tahun 2024. Meskipun pada tahun 2025 Kota Blitar mampu melakukan pemulihan dengan meningkatkan nilai IKLH menjadi 67,33, tren fluktuatif ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga stabilitas kualitas lingkungan di tengah aktivitas pembangunan daerah.. Data selengkapnya dari indeks kualitas lingkungan hidup Kota Blitar dapat disimak dari tabel berikut:

Tabel 2.7

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Blitar

Tahun 2021 - 2025

No	Tahun	Kab/Kota	IKU	IKA	IKL	IKLH	RATING IKLH
1.	2021	Kota Blitar	83,76	51,58	38,52	61,75	Sedang
2.	2022	Kota Blitar	85,9	59,73	31,5	64,15	Sedang
3.	2023	Kota Blitar	85,83	67,78	33,51	67,58	Sedang
4.	2024	Kota Blitar	89,79	56,11	34,13	64,94	Sedang
5.	2025	Kota Blitar	75,10	70,86	46,90	67,33	Sedang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Blitar Tahun 2025 termasuk ke dalam kategori sedang. Pencapaian indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kota Blitar didorong oleh komitmen aktif dalam melaksanakan gerakan reboisasi serta penanaman pohon secara sistematis berbasis klaster. Meskipun upaya tersebut telah dilakukan, terdapat sejumlah kendala yang menghambat akurasi dan cakupan pengendalian kualitas udara, di antaranya adalah belum adanya sistem pemantauan emisi bagi kendaraan di luar kewajiban uji KIR. Selain itu, terdapat tantangan metodologis dalam evaluasi target, di mana target tahun 2025 disusun menggunakan data empiris dari kota yang telah memiliki alat *Air Quality Monitoring System* (AQMS), sementara realisasi tahun 2025 dihitung berdasarkan data satelit wilayah kota. Guna mengatasi permasalahan tersebut, langkah yang diambil meliputi penguatan kolaborasi strategis dengan Dinas Perhubungan untuk melaksanakan uji emisi kendaraan secara rutin. Selain itu, sebagai upaya konkret dalam memperbaiki akurasi data pemantauan, akan dilakukan pengadaan alat uji emisi transportasi yang lebih memadai. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan kualitas udara dapat dilakukan secara lebih presisi, berkelanjutan, dan memberikan dampak yang nyata bagi lingkungan perkotaan.

Keberhasilan pencapaian indikator Indeks Kualitas Air (IKA) di Kota Blitar didorong oleh komitmen dalam melaksanakan uji kualitas air secara rutin serta pendampingan berkelanjutan kepada para pelaku usaha maupun kegiatan yang berpotensi menghasilkan air limbah. Meski demikian, upaya tersebut masih dihadapkan pada kendala berupa adanya pencemaran yang bersumber dari sektor industri, peternakan, serta aktivitas domestik yang berdampak pada penurunan kualitas air sungai. Menanggapi tantangan ini,

langkah tindak lanjut yang akan diambil meliputi penguatan pembinaan serta pemantauan dan evaluasi secara intensif bagi pelaku usaha industri dan peternak yang terindikasi mencemari lingkungan. Selain itu, kolaborasi strategis akan terus dijalin dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan limbah domestik, guna memastikan pemulihan dan pemeliharaan kualitas air sungai dapat berjalan secara optimal.

Keberhasilan pencapaian indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) di Kota Blitar didorong oleh komitmen berkelanjutan dalam pembangunan serta pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, terutama terkait adanya perubahan metode penilaian melalui metode delineasi. Di sisi lain, laju pembangunan kota yang pesat guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana telah memicu alih fungsi lahan yang secara langsung berdampak pada berkurangnya tutupan lahan di Kota Blitar. Menanggapi tantangan tersebut, langkah tindak lanjut yang perlu diambil berfokus pada penyesuaian metodologi evaluasi dengan mengoptimalkan penggunaan citra satelit agar perhitungan IKL menjadi lebih akurat. Selain itu, sebagai upaya nyata dalam memulihkan kualitas lahan, pemerintah daerah akan mengintensifkan program penghijauan melalui pemilihan jenis tanaman yang memiliki tajuk lebar. Langkah ini diharapkan mampu memperluas tutupan vegetasi secara efektif, sehingga keseimbangan kualitas lahan di tengah dinamika pembangunan kota dapat tetap terjaga.

Jika dikaitkan dengan ketahanan daerah, tercapainya IKLH sangat tergantung dari kemampuan suatu daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana yang dilakukan secara terstruktur, terencana dan terpadu. Dengan tidak adanya banjir, longsor dan kekeringan air itu sangat terkait dengan terpenuhinya tutupan lahan di suatu wilayah.

2.1.1.7.3 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Akses sanitasi aman adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan dan dikelola dengan baik. Kondisi sanitasi aman, di Kota Blitar masih rendah yaitu sebesar 8,98% dari seluruh rumah tangga sebanyak 52.691 yang ada.

Tabel 2.8
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Kota Blitar Tahun 2021 - 2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	6,55	7,15	8,21	8,45	8,98

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, 2026

Terdapat permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan akses sanitasi aman diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi aman yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan;
2. Lokasi rumah yang sulit dijangkau oleh kendaraan sedot tinja;
3. Belum adanya Perda Air Limbah Domestik sebagai dasar layanan lumpur tinja terjadwal.

Adapun beberapa upaya telah dilaksanakan guna menangani permasalahan diantaranya:

1. Meningkatkan sosialisasi baik melalui media massa, media sosial maupun melalui sosialisasi secara langsung dengan masyarakat;
2. Menyampaikan usulan untuk data dilaksanakan pengadaan kendaraan/peralatan sedot tinja dengan ukuran yang dapat menjangkau lokasi dengan jalan yang cukup sempit;
3. Melaksanakan pengkajian guna mengembangkan IPLT sehingga kedepan dapat memenuhi kapasitas yang diperlukan oleh masyarakat Kota Blitar.

2.1.1.7.4 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA), meminimalkan dampak lingkungan, dan memanfaatkan kembali material yang masih memiliki nilai.

Realisasi pengelolaan sampah di Kota Blitar pada tahun 2025 menunjukkan tantangan yang signifikan, di mana volume timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan hanya mencapai 5.319,94 ton/tahun. Realisasi ini setara dengan 18,47%, yang berarti belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Ketidaktercapaian target ini utamanya disebabkan oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah langsung dari sumbernya. Kondisi sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan dalam keadaan tercampur (residu dan organik menjadi satu) mengakibatkan proses pra-olah menjadi lebih panjang dan rumit, yang secara langsung menurunkan efisiensi operasional serta kapasitas olah fasilitas yang ada.

Sebagai langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan tersebut, rencana tindak lanjut akan difokuskan pada penguatan aspek hulu melalui peningkatan intensitas kampanye "Pilah dari Rumah". Upaya ini tidak hanya akan dilakukan secara administratif, tetapi juga dengan melibatkan pegiat lingkungan dan komunitas lokal secara aktif sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran pemilahan di tingkat rumah tangga, diharapkan beban kerja di fasilitas pengolahan dapat berkurang dan efisiensi pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai guna dapat meningkat secara optimal pada periode mendatang.

2.1.1.7.5 Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Layanan penuh pengumpulan sampah merupakan layanan yang mengambil dan memindahkan sampah dari sumbernya ke tempat pengolahan sampah. Di Kota Blitar layanan penuh pengumpulan sampah yang bersumber dari rumah tangga pada tahun 20245 sebesar 91% yang mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir

Tabel 2.9

Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh

Pengumpulan Sampah Kota Blitar Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	88,6	89,0	90,0	90,5	91,0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2026

Adapun faktor pendorong pengumpulan sampah rumah tangga adalah:

- ✓ Perluasan jaringan pengangkutan sampah berbasis zonasi wilayah dan rute pengumpulan.
- ✓ Keterlibatan masyarakat melalui program lingkungan dan kampanye pilah sampah.

Sedangkan faktor penghambat pengumpulan sampah rumah tangga yaitu:

- ✓ Masih terdapat wilayah marginal yang belum terlayani secara optimal.
- ✓ Ketergantungan pada armada dan sarana fisik pengangkut yang kapasitasnya terbatas.

2.1.1.7.6 Kinerja Penataan Ruang

Pemerintah Kota Blitar secara konsisten menegakkan dan meningkatkan ketaatan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketaatan terhadap tata ruang perlu ditingkatkan melalui pembangunan kerangka hukum, institusi yang kuat, serta mekanisme pemantauan untuk memastikan pembangunan kota berjalan sesuai dengan rencana tata ruang secara berkelanjutan dan terkontrol.

Data hasil pengawasan penyelenggaraan penataan ruang dari Sistem Informasi Pengawasan Teknis atau SIWASTEK untuk kinerja di tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa kinerja aspek pengaturan, sebagaimana data berikut:

Tabel 2.10

Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang dan Pelaksanaan Penataan Ruang Tahun 2021 – 2025

No.	Aspek	Periode Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pengaturan Penataan Ruang	90	82,50	82,50	90	95
2	Pembinaan Penataan Ruang	30	89,81	89,81	98,33	98,89
3	Perencanaan Tata Ruang	100	75,00	75,00	100	100
4	Pemanfaatan Ruang	63	71,43	71,43	80	90

5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	4	75,00	75,00	60	60
	Total	57,33	78,75	78,75	85,67	88,78
	Predikat	Sedang	Sedang	Sedang	Baik	Baik

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2026

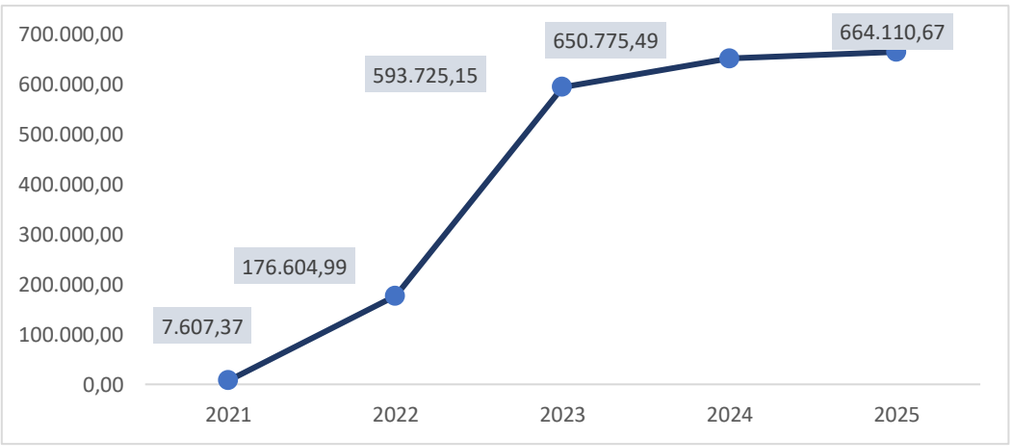
Dari data tersebut, terlihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada sebagian besar aspek penataan ruang, namun terjadi penurunan pada aspek pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini dikarenakan belum adanya Petunjuk Teknis mengenai pelaksanaan Insentif dan Disinsentif baik pada tingkat daerah maupun tingkat nasional serta tidak adanya sengketa penataan ruang yang dilaporkan baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

Meskipun demikian, secara keseluruhan, nilai total kinerja meningkat dari 57,33 pada tahun 2021 menjadi 88,78 pada tahun 2025 dan telah berada pada posisi baik. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan signifikan dalam beberapa aspek, terutama pengaturan, pembinaan, perencanaan, dan pemanfaatan, sedangkan pada aspek pengendalian pemanfaatan ruang masih diperlukan penguatan menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencapai predikat kinerja yang lebih tinggi dan merata di seluruh komponen penataan ruang.

2.1.1.8 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.1.8.1 Potensi Penurunan Emisi GRK Kumulatif

Perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi kehidupan dan pembangunan global dimana salah satu pemicunya adalah emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan upaya untuk mengurangi jumlah emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer per satuan aktivitas. Emisi GRK adalah gas-gas yang dapat menyebabkan efek rumah kaca, yaitu proses penahanan panas di atmosfer yang memengaruhi suhu permukaan bumi.



Sumber*: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, 2026*

Gambar 2.11

Potensi Penurunan Emisi GRK Kumulatif Kota Blitar

Tahun 2021 - 2025

Upaya pembangunan rendah karbon di Kota Blitar telah menunjukkan hasil positif melalui pelaksanaan sejumlah aksi mitigasi perubahan iklim. Berdasarkan data dari Sistem Registrasi Nasional Aksi Perubahan Iklim (AKSARA) hingga 1 Februari 2026, total capaian penurunan emisi GRK kumulatif di Kota Blitar adalah sebesar 664.110,67 Ton CO_2e. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan target yang telah ditentukan untuk capaian penurunan emisi GRK kumulatif di Kota Blitar Tahun 2025 sebesar 663.790,97 Ton CO_2e.

Penurunan emisi GRK berasal dari kegiatan di berbagai sektor, antara lain:

- Limbah dan sanitasi : seperti pembangunan IPAL permukiman, tangki septik komunal, optimalisasi IPLT, dan penyedotan lumpur tinja;
- Energi dan transportasi : Hari Bebas Kendaraan Bermotor *(Car Free Day)*, efisiensi energi dengan penggunaan lampu hemat energi (LED/CFL) dan PJU *solarcell* mendukung program Kampung Iklim (Proklim);
- Kehutanan dan tutupan lahan : penanaman pohon di jalan dan taman kota.
- Pertanian : pendampingan pola tanam padi sehat, pelatihan pembuatan pupuk organik, penggunaan pupuk organik.

Beberapa kegiatan mitigasi yang telah dilaksanakan meliputi:

- Pengolahan limbah peternakan (5.883 ton CO_2eq);
- Penanaman pohon (6.823 ton CO_2eq);
- Pendampingan pembuatan pupuk organik (49.636 ton CO_2eq);
- Penggunaan PJU *solar cell* (2,29 ton CO_2eq);
- Penggunaan lampu hemat energi (215 ton CO_2eq);
- Operasional pengelolaan sampah seperti TPS 3R dan PDU. (434,34 ton CO_2eq).

Faktor Pendorong penurunan emisi GRK yaitu:

- Adanya dukungan program nasional seperti Proklim;
- Partisipasi aktif masyarakat melalui edukasi dan pendampingan;
- Investasi pada teknologi rendah emisi (IPAL, PJU *solarcell*).

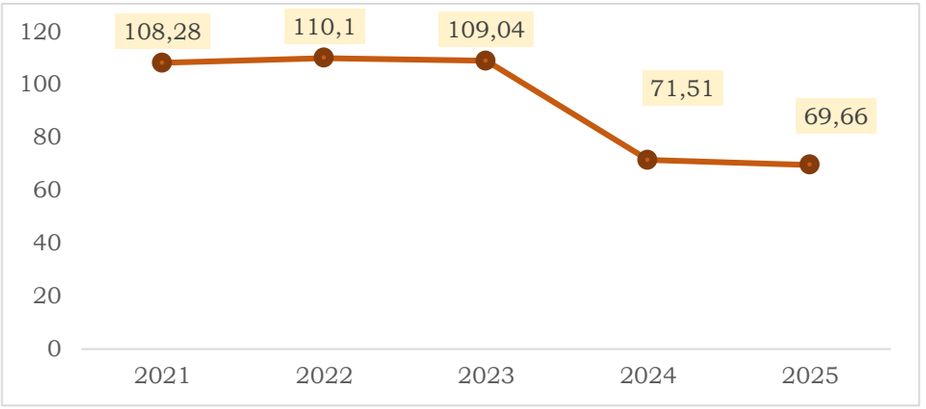
Adapun faktor penghambat penurunan emisi GRK yaitu:

- Terbatasnya ruang hijau dan hutan kota sebagai penyerap karbon di pusat kota;
- Emisi tinggi dari sektor transportasi dan pemukiman padat (contoh: Kelurahan Kepanjenkidul, Plosokerep, Sukorejo).

Target penurunan emisi GRK kumulatif pada periode 2025–2029 telah ditetapkan melalui indikator kinerja RPJMD dalam rentang 663.790,97 ton CO_2eq hingga 718.508,69 ton CO_2eq. Penurunan GRK tersebut ditujukan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pembangunan rendah karbon dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kota Blitar harus menyesuaikan perencanaan pengurangan emisi GRK dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025, yang mensyaratkan integrasi program-program mitigasi perubahan iklim ke dalam dokumen RPJMD, serta pelaporan capaian melalui sistem AKSARA.

2.1.1.8.2 Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan alat ukur yang menggambarkan tingkat potensi dampak negatif (jiwa terancam, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan) akibat bencana di suatu wilayah, dihitung berdasarkan interaksi antara tingkat bahaya (ancaman), kerentanan, dan kapasitas. Serta untuk membantu pemangku kebijakan dan peneliti dalam perencanaan mitigasi bencana dan manajemen risiko. Adapun realisasi IRB Kota Blitar selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

Gambar 2.12

Indeks Risiko Bencana Kota Blitar Tahun 2021 – 2025

Berdasarkan data capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Blitar dalam periode 2021 hingga 2025, terdapat penurunan sebesar 38,62 poin atau sekitar 18,9%. Penurunan ini menunjukkan bahwa adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas daerah.

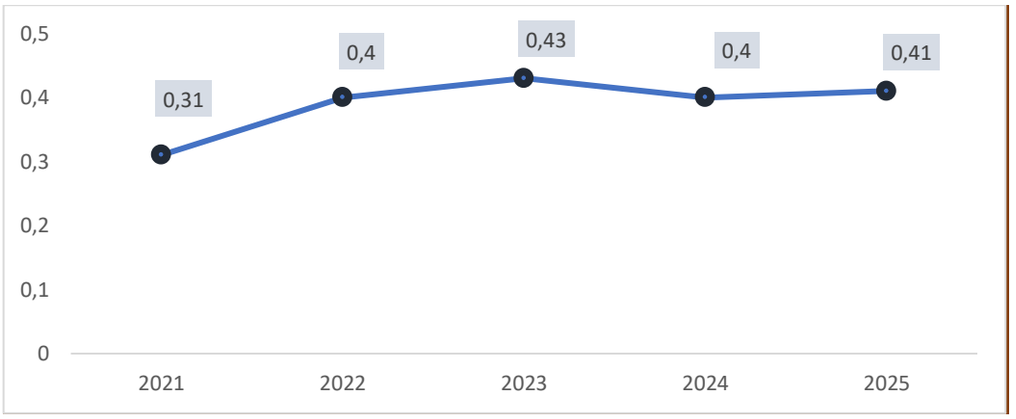
Dalam indeks risiko bencana, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinannya untuk bisa diturunkan. Hal ini karena tren dari dampak bahaya yang cenderung meningkat tiap tahunnya. Kemudian, komponen kerentanan juga cenderung mengalami peningkatan dengan adanya penambahan penduduk, migrasi ke Kawasan urban, peningkatan pembangunan, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim. Fenomena tersebut menyebabkan sulitnya menurunkan indeks kerentanan.

Berbagai kebijakan yang perlu dilakukan guna menurunkan tingkat risiko bencana diantaranya yaitu:

1) peningkatan kapasitas kolaboratif berupa arahan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kapasitas daerah dan Masyarakat, serta harus melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan *(pentahelix)*,
2) perkuatan kebijakan berbasis risiko, guna terus memperkuat kebijakan penanggulangan bencana agar lebih menyentuh pada akar masalah, terutama dalam upaya pengurangan korban jiwa, perlindungan aset ekonomi warga, dan pelestarian lingkungan hidup dari dampak buruk bencana,
3) penguatan tata kelola, dan
4) pengukuran IKD setiap tahun.

2.1.1.8.3 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan menggunakan 71 indikator spesifik. Dari IKD, setiap daerah mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko. IKD dihitung untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengurangi risiko bencana, dengan menetapkan kebijakan pengurangan risiko bencana. Adapun hasil IKD Kota Blitar selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar,

Gambar 2.13

Indeks Ketahanan Daerah Kota Blitar

Tahun 2021 – 2025

Hasil perhitungan Indeks Ketahanan Daerah Kota Blitar Tahun 2025 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu menunjukkan angka 0,41 (telah terverifikasi BNPB) yang termasuk pada kelas SEDANG. Kesesuaian target tersebut karena adanya regulasi pemerintah daerah terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara rinci, nilai indeks pada setiap prioritas ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.11

Data Layanan Kebencanaan di Kota Blitar Tahun 2025

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,84	0,41	Sedang
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,63		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,43		
4	Penanganan tematik kawasan rawan bencana	0,63		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,40		

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,30		
7	Pengembangan sistem pemulihan bencana	0,20		

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Blitar

Secara keseluruhan, ketahanan daerah Kota Blitar dalam menghadapi potensi bencana berada pada kelas sedang dengan nilai Indeks Kapasitas Daerah adalah 0,41. Kelas tersebut ditentukan berdasarkan pencapaian daerah dalam penanggulangan bencana. Nilai terendah terdapat pada indeks prioritas 7 yaitu pengembangan sistem pemulihan bencana. Hal ini dikarenakan kurang lengkapnya dokumen dan bukti dukung terutama pada prioritas 7 tersebut.

Pemerintah Kota Blitar perlu meningkatkan kerja sama dalam rangka mencapai peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, serta pengembangan sistem pemulihan bencana dengan melaksanakan rapat koordinasi bersama Perangkat Daerah Terkait tentang pentingnya pemenuhan dokumen dan kelengkapan bukti dukung untuk pengisian IKD Tahun 2026 serta menyelenggarakan *Focus Group Discussion (FGD)* secara simultan dan berkelanjutan dengan *stakeholder* untuk menyisir kembali hasil evaluasi tahun sebelumnya sehingga dapat ditingkatkan kinerja *output* masing-masing variabel dari setiap indikator.

2.1.1.8.4 Wilayah Rawan Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2024) telah menetapkan Kota Blitar menjadi salah satu Kota yang memiliki indeks risiko sedang terhadap bahaya bencana yang mana menempati skor 111,66 dengan predikat sedang. Kota Blitar memiliki 7 (tujuh) jenis potensi bahaya meliputi Gempa Bumi, Letusan Gunung Api, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Cuaca Ekstrem, Kekeringan, Kejadian Luar Biasa (KLB), dan Banjir. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka masyarakat Kota Blitar nantinya akan terkena dampak dari bencana-bencana tersebut.

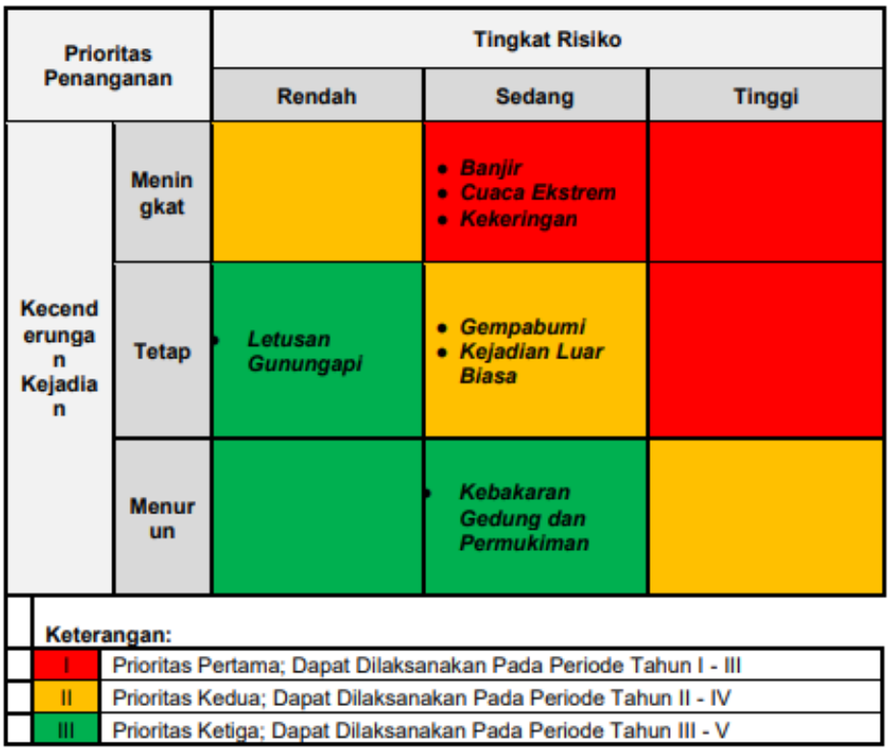
Tujuh bahaya tersebut dihitung nilai kerentanan dan kapasitasnya sehingga menghasilkan risiko. Hasil analisis risiko yang dilakukan menunjukkan, sebagian besar bahaya memiliki risiko tinggi. Pengambilan kelas risiko di tingkat kecamatan didasarkan pada kelas risiko tertinggi di tingkat kelurahan. Kelas risiko tinggi di kecamatan tidak menunjukkan bahwa seluruh kecamatan berisiko tinggi melainkan terdapat minimal satu kelurahan yang berisiko tinggi di kecamatan tersebut. Berikut deskripsi singkat risiko bencana di Kota Blitar :

1. Risiko bencana gempa bumi masuk pada kelas klasifikasi sedang. 14 dari 21 Kelurahan memiliki risiko sedang terhadap bencana gempa Bumi. Seluruh wilayah Kota Blitar termasuk dalam wilayah terdampak bencana gempa bumi dengan total luas risiko keseluruhan yaitu 3.356,64 Ha, diketahui wilayah Selatan Blitar berbatasan langsung dengan zona subduksi lempeng di selatan Pulau Jawa sehingga dampak gempa bumi yang dirasakan di Kota Blitar berupa rambatan.

2. Risiko bencana banjir termasuk kelas rendah, 20 dari 21 kelurahan memiliki risiko banjir rendah, total luas risiko banjir secara keseluruhan di Kota Blitar 543.33 ha. Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di Kota Blitar. Faktor-faktor tersebut adalah kondisi alam (letak geografis wilayah, kondisi topografi, geometri sungai dan sedimentasi), peristiwa alam (curah hujan dan lamanya hujan), dan aktivitas manusia (pembudidayaan daerah dataran banjir, peruntukan tata ruang di dataran banjir yang tidak sesuai, belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran banjir, permukiman di bantaran sungai, sistem drainase yang tidak memadai, terbatasnya tindakan mitigasi banjir, kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai, terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali banjir). Rata-rata banjir yang terjadi dikarenakan oleh luapan air sungai, karena kapasitas sungai tidak mampu untuk menampung jumlah air hujan.
3. Kebakaran Gedung dan Permukiman termasuk dalam kalsifikasi kelas rendah, 18 dari 21 kelurahan memiliki risiko rendah, total luas risiko kebakaran gedung dan permukiman secara keseluruhan di Kota Blitar yaitu 983.70 ha. Kebakaran Gedung dan Permukiman di Kota Blitar lebih disebabkan oleh adanya kelalaian masyarakat sehingga menimbulkan percikan api yang selanjutnya membesar dikarenakan mengenai bahan mudah terbakar.
4. Risiko bencana kekeringan termasuk pada kelas rendah, 12 dari 21 kelurahan di Kota Blitar berpotensi rendah terjadi kekeringan, total luas risiko kekeringan secara keseluruhan di Kota Blitar yaitu 3.356,64 ha.
5. Risiko bencana Cuaca Ekstrem termasuk pada kelas sedang. 17 dari 21 kelurahan masuk ke dalam kategori sedang, total luas risiko cuaca ekstrem secara keseluruhan di Kota Blitar yaitu 3.356,64 ha. Potensi terjadinya bahaya Cuaca Ekstrem berada di wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan dataran yang landai. Cuaca Ekstrem yang terjadi di Kota Blitar berupa angin kencang. Dampak dari bencana ini sampai menyebabkan robohnya atap rumah warga dan menutup akses jalan karena pohon tumbang.
6. Risiko bencana Kejadian Luar Biasa (KLB) pada klasifikasi sedang, terdapat 17 dari 21 Kelurahan di Kota Blitar berpotensi terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) kategori sedang. Luas risiko KLB total di Kota Blitar sebesar 3.356,9 Ha. Indikator yang digunakan untuk peta bahaya Kejadian Luar Bisa berdasarkan kepadatan timbulnya penyakit Malaria, DBD, Campak, Difteri dan Hepatitis yang di ukur di tingkat desa dengan jumlah penduduk pada tahun timbulnya penyakit tersebut.
7. Risiko bencana Letusan Gunung Api termasuk pada klasifikasi rendah, potensi yang diterima Kota Blitar yakni adanya aliran lahar hujan melalui sungai yang mengalir di Kelurahan Gedog. Sehingga perlu adanya peningkatan kewaspadaan pada permukiman yang berlokasi di sekitar sungai lahar.

Identifikasi potensi bencana yang diprioritaskan ditentukan berdasarkan integrasi antara klasifikasi tingkat risiko serta kecenderungan frekuensi kejadian bencana di wilayah Kota Blitar. Penentuan prioritas ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, personel, dan anggaran dalam periode lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis risiko, klasifikasi prioritas penanganan bencana di Kota Blitar dibagi menjadi tiga kategori utama sebagaimana disajikan dalam gambar berikut:



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Gambar 2.14

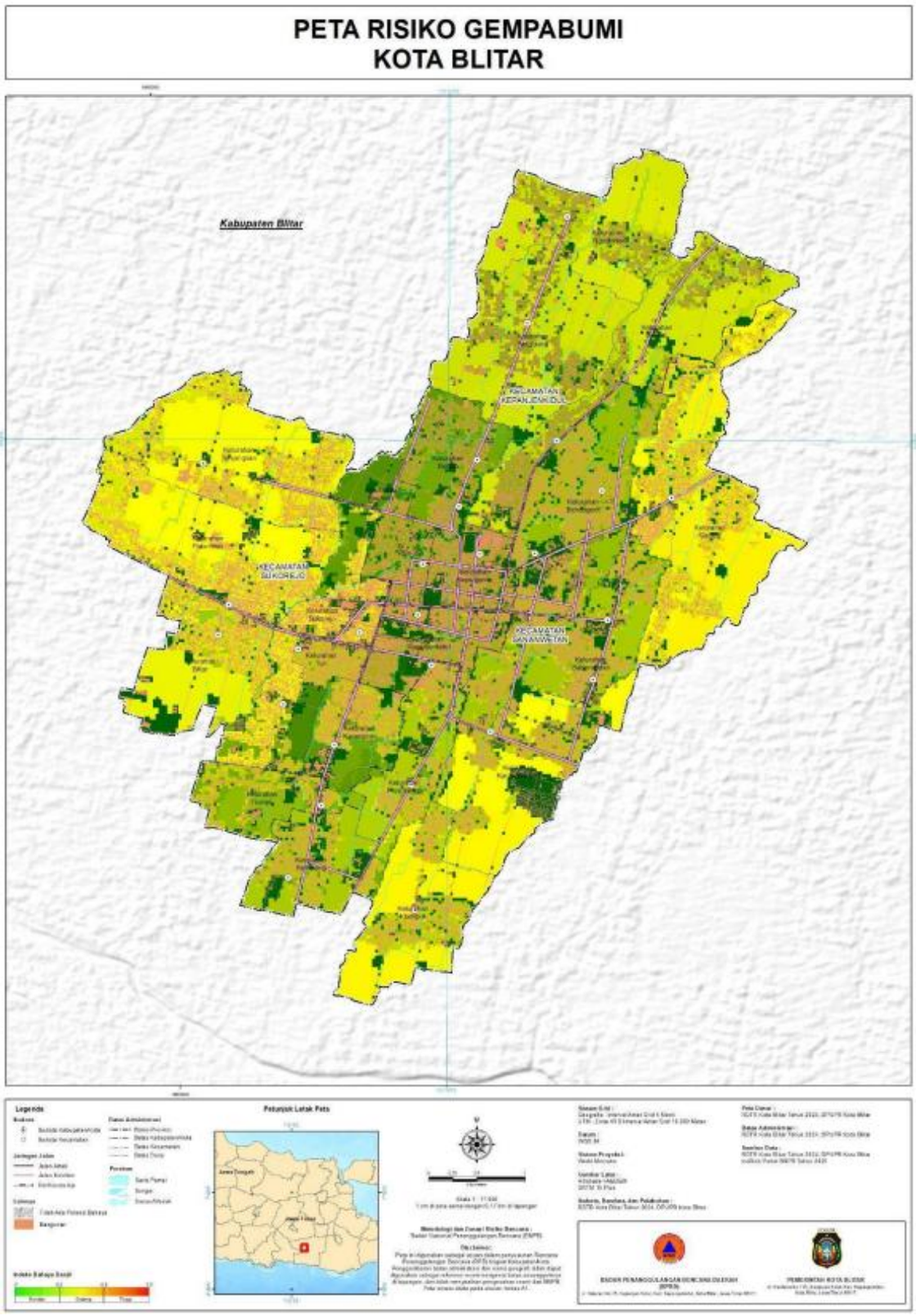
Matriks Prioritas Penanganan Bencana Kota Blitar

Berdasarkan matriks bencana prioritas, maka jenis bencana yang masuk dalam prioritas utama yaitu:

1) Banjir,

2) Cuaca Ekstrem,

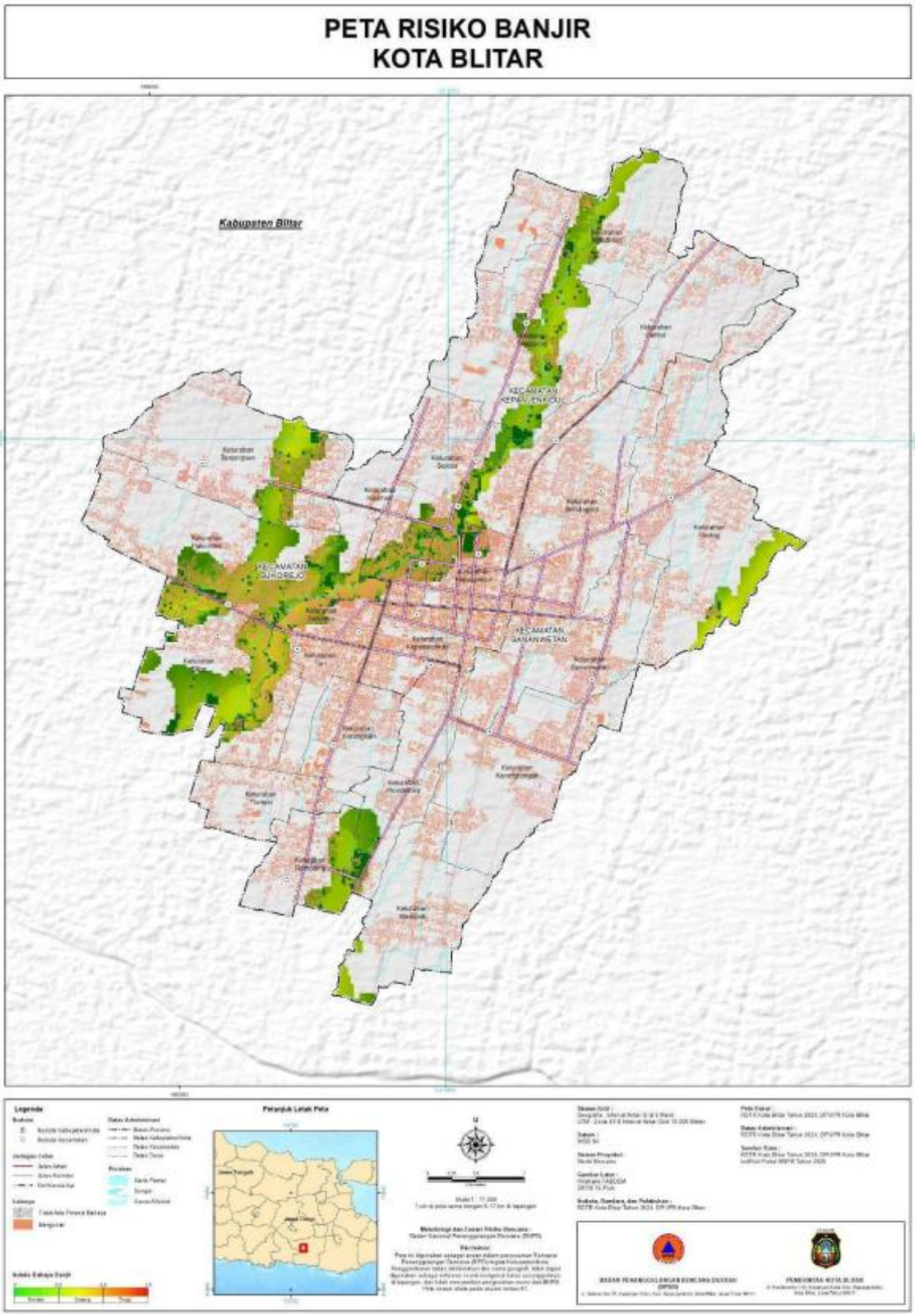
3) Kekeringan.



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Blitar

Gambar 2.15

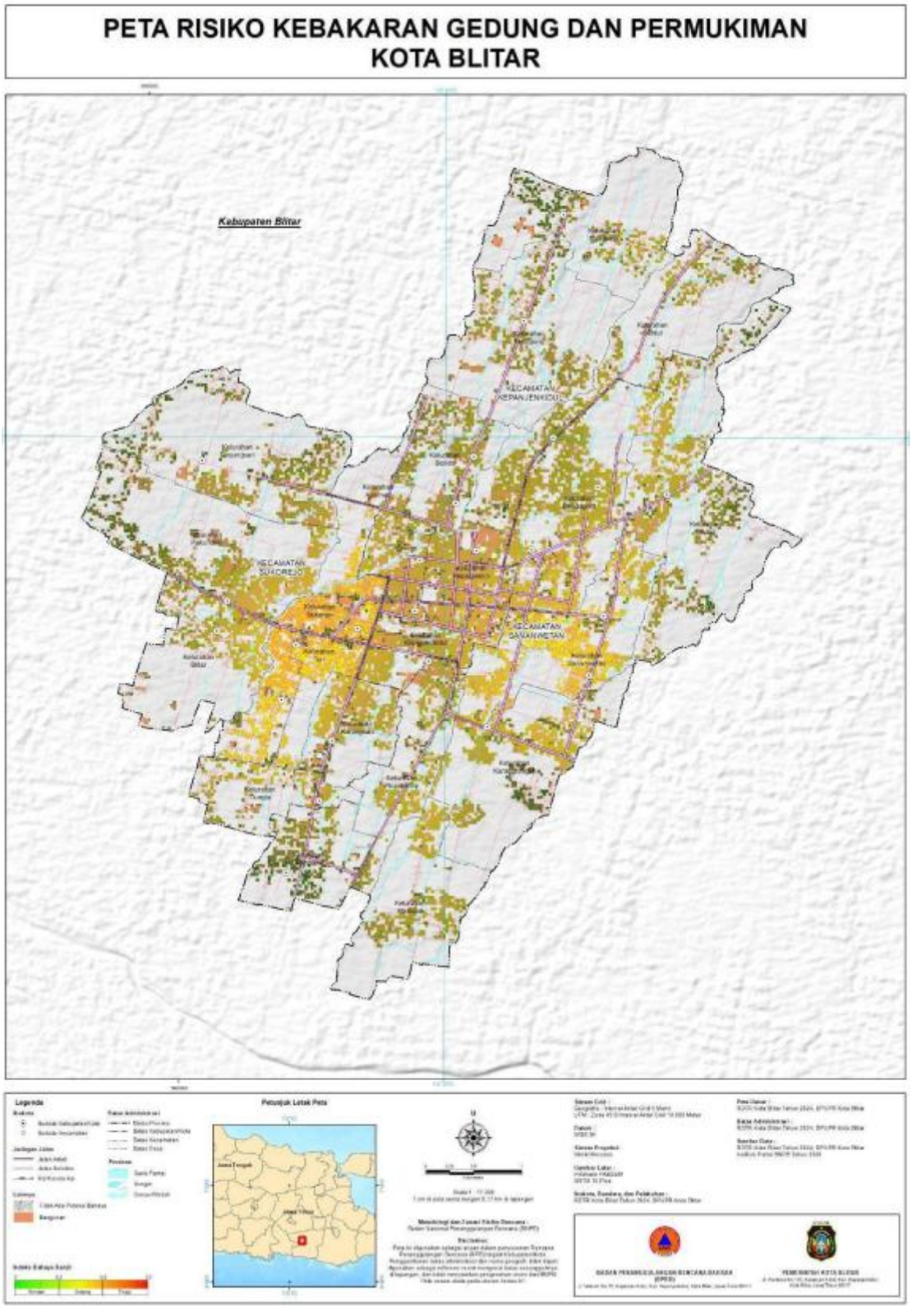
Peta Risiko Gempa Bumi



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Blitar

Gambar 2.16

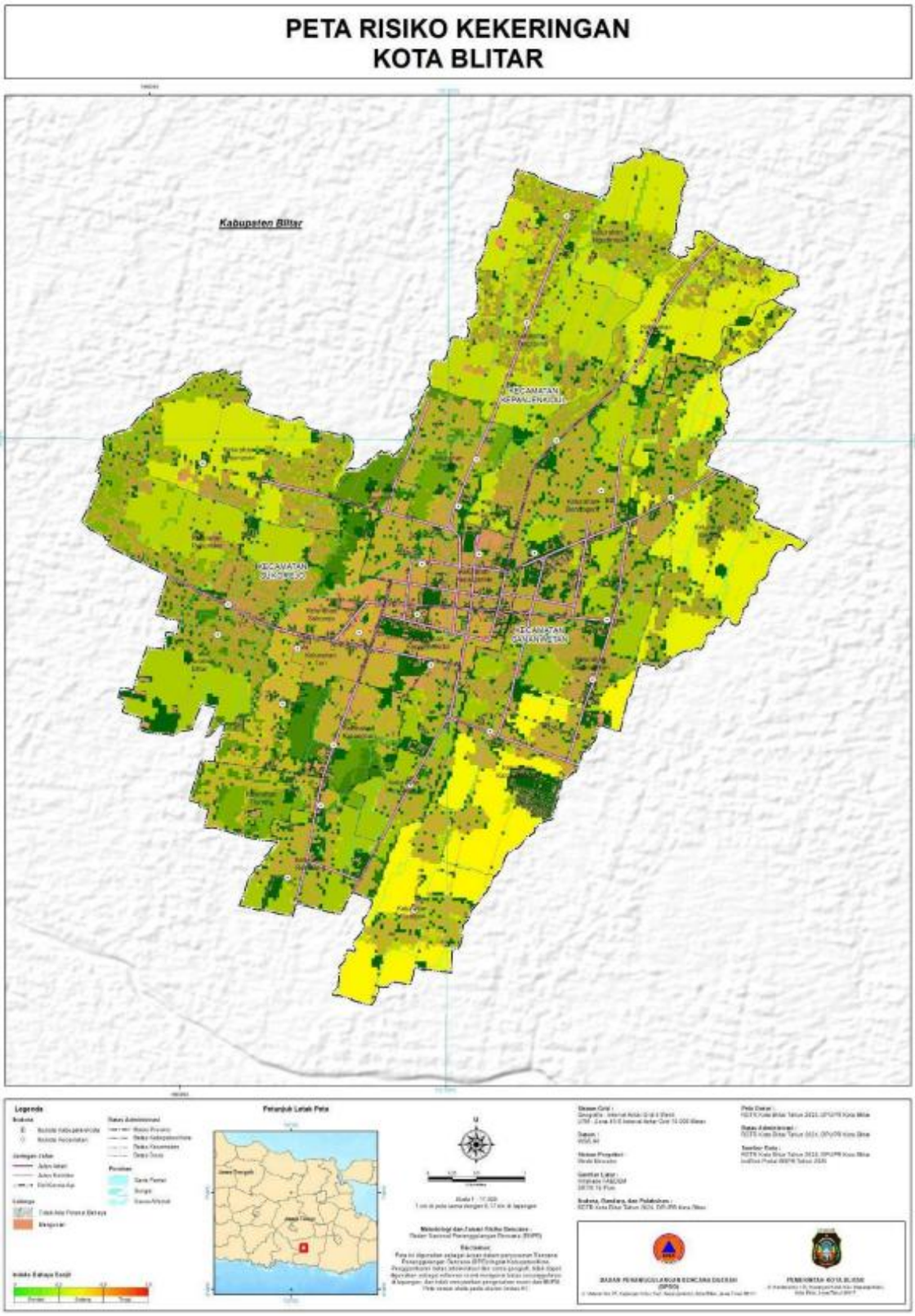
Peta Risiko Banjir



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Blitar

Gambar 2.17

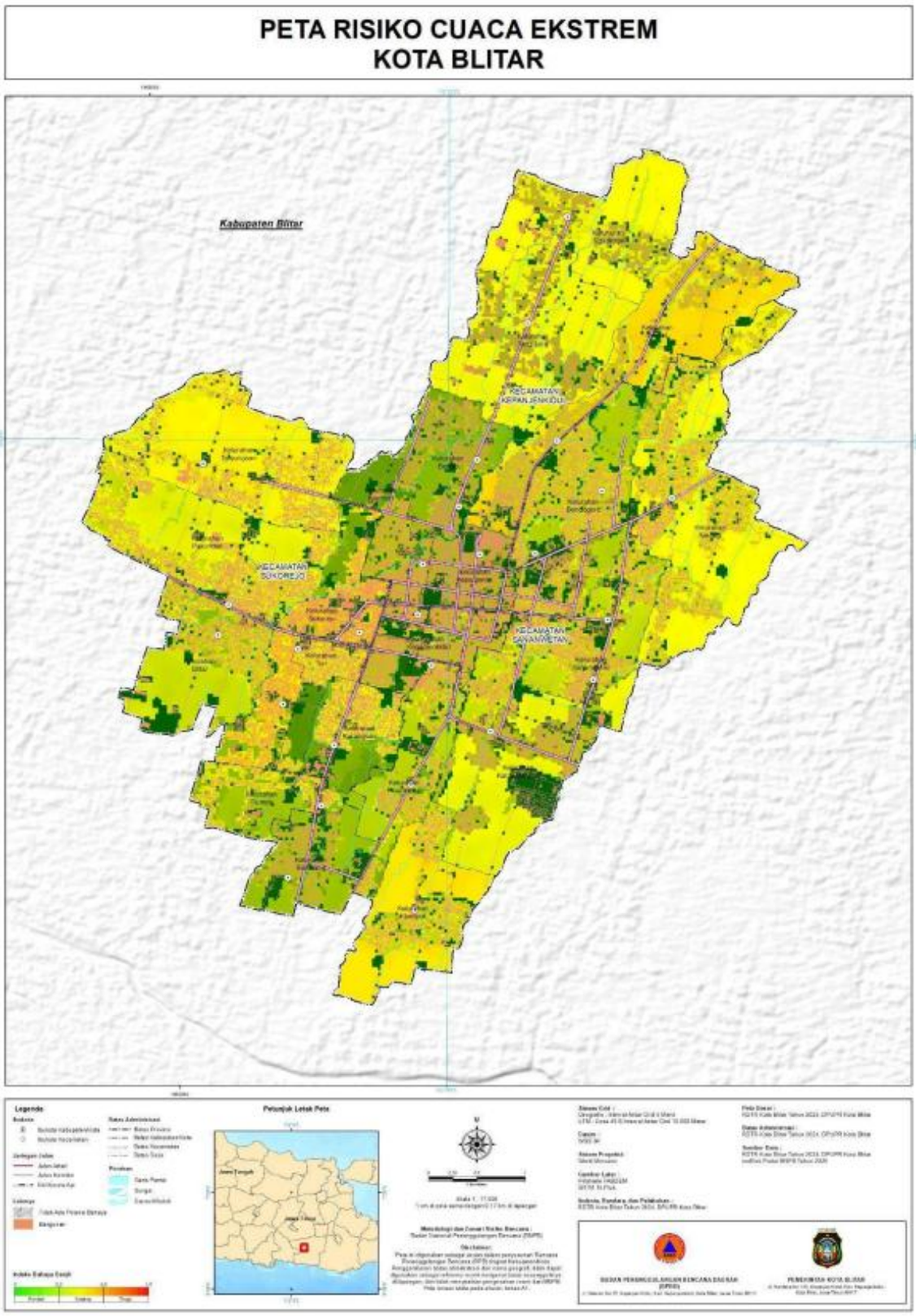
Peta Risiko Kebakaran Gedung dan Permukiman



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Blitar

Gambar 2.18

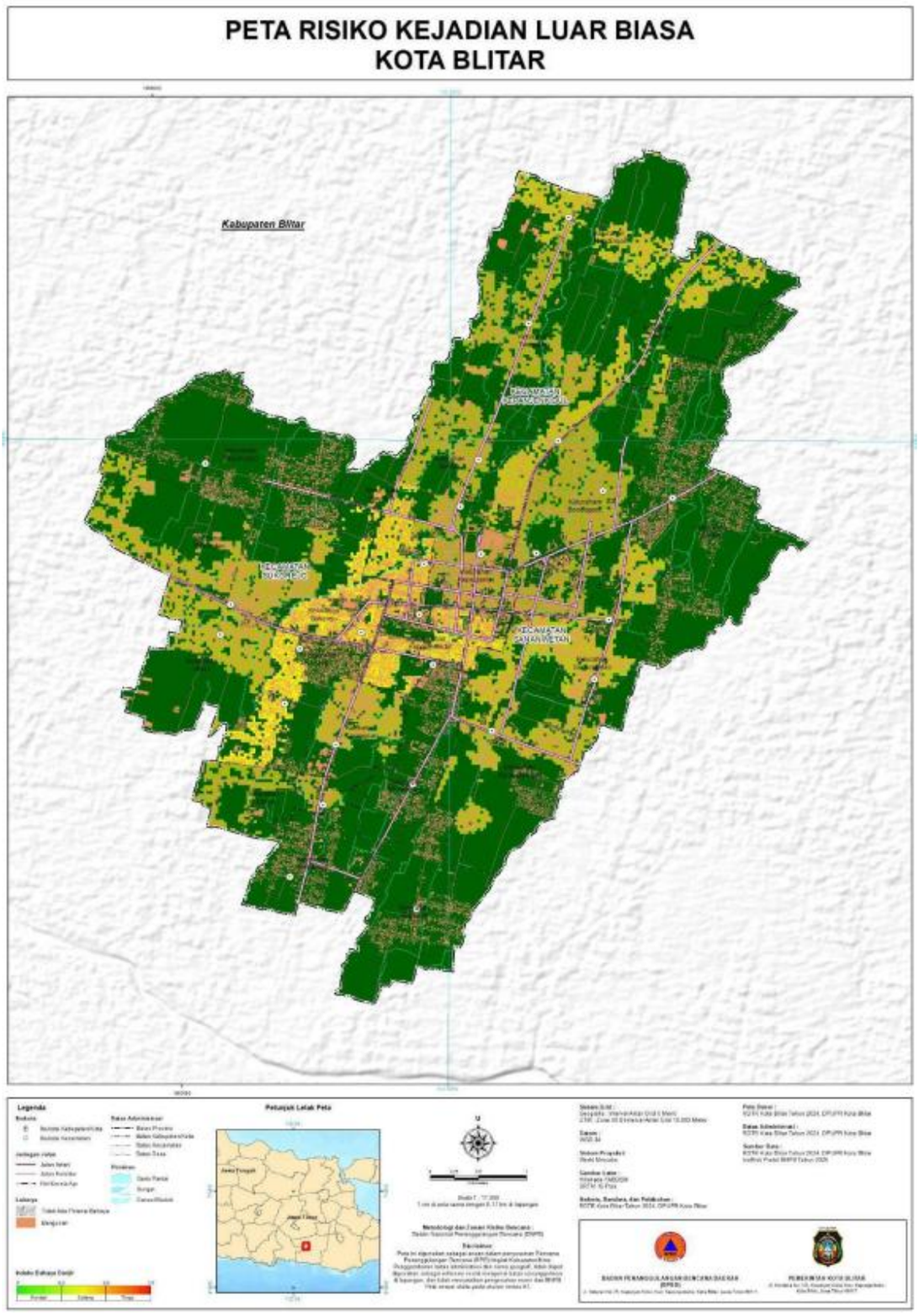
Peta Risiko Kekeringan



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Blitar

Gambar 2.19

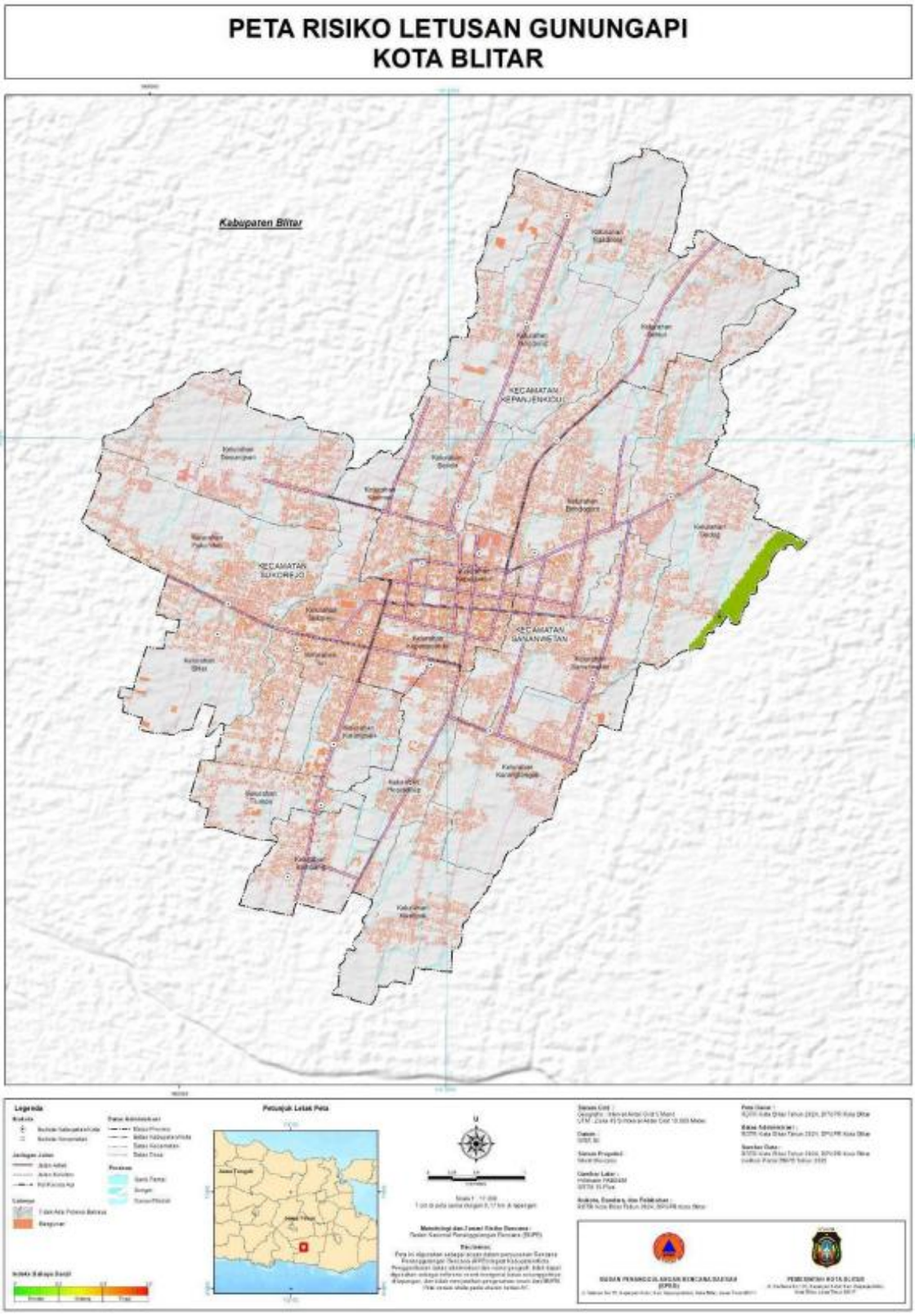
Peta Risiko Cuaca Ekstrem



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Blitar

Gambar 2.20

Peta Risiko Kejadian Luar Biasa



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Blitar

Gambar 2.21

Peta Risiko Letusan Gunung api

Upaya pengurangan risiko bencana guna mengurangi jumlah kerugian baik dari jumlah jiwa terpapar, kerugian harta benda serta jumlah kerusakan lingkungan perlu didukung dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Rekomendasi tindakan berdasarkan 7 (tujuh) risiko bencana di Kota Blitar akan dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.12

Rekomendasi Spesifik

No	Prioritas	Rekomendasi Spesifik
1	Bencana Gempa bumi	Integrasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan Standar Tahan Gempa Audit Kelayakan dan Sertifikasi Layak Fungsi (SLF) Fasilitas Publik Peningkatan Literasi dan Simulasi Mandiri *(Self-Evacuation)*
2	Bencana Banjir	Optimalisasi dan Rehabilitasi Drainase Perkotaan Perencanaan Jaringan Air Berbasis Skenario Curah Hujan Ekstrem Pengawasan Ketat Alih Fungsi Lahan dan Garis Sempadan Sungai Normalisasi dan Pemeliharaan Sungai secara Berkala Penerapan Teknologi Infiltrasi dan Kolam Retensi Konservasi Area Hulu dan Penataan Pintu Air
3	Bencana Letusan Gunung Api	Normalisasi dan Perkuatan Tanggul Alur Lahar Penerapan Sistem Peringatan Dini (EWS) Lahar Terintegrasi Pemeliharaan dan Pembangunan Bangunan Sabo Pendidikan dan Gladi Kesiapsiagaan Aliran Lahar Pengaturan Tata Ruang Sempadan Kali Lahar
4	Bencana Kebakaran Gedung dan Permukiman	Audit dan Standarisasi Instalasi Listrik Bangunan Peningkatan Sarana Prasarana dan Aksesibilitas Pemadaman Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Relawan Penyuluhan dan Edukasi Mitigasi Kebakaran Mandiri Implementasi Sistem Peringatan Dini dan Teknologi Deteksi Penyediaan Anggaran dan Tim Reaksi Cepat
5	Bencana Kekeringan	Pembangunan Infrastruktur Cadangan Air (Embung Urban) Optimalisasi dan Perluasan Jaringan PDAM

No	Prioritas	Rekomendasi Spesifik
		Gerakan Panen Air Hujan dan Sumur Resapan Mandiri Pemanfaatan Teknologi Pengamatan Iklim Edukasi Hemat Air dan Manajemen Krisis Air Bersih
6	Bencana Cuaca Ekstrem	Penerapan Standar Konstruksi Atap Tahan Angin Audit dan Monitoring Struktur Reklame/Baliho Manajemen Vegetasi dan Pohon Peneduh Jalan Sosialisasi Prosedur Penyelamatan Diri Mandiri Penguatan Koordinasi Respon Cepat Pohon Tumbang
7	Bencana Kejadian Luar Biasa (KLB)	Gerakan Masif Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Peningkatan Literasi Penyakit Menular dan Imunisasi Optimalisasi Sistem Surveilans Berbasis Masyarakat Koordinasi Lintas Sektor untuk Sanitasi Perkotaan

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Blitar

2.1.1.9 Demografi

2.1.1.9.1 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kota Blitar senantiasa menempatkan penduduk sebagai pusat pembangunan melalui penguatan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK). Sebagai indeks komposit yang dikembangkan oleh BKKBN, IPBK berfungsi untuk mengukur sejauh mana kebijakan pembangunan telah berorientasi pada *people-centered development*, bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik. Instrumen ini menilai lima dimensi utama, yaitu partisipasi, keberlanjutan, pemihakan, integrasi, dan kesetaraan dengan skala 0-100 untuk memantau keberhasilan pembangunan yang berkualitas.

Pada tahun 2025, realisasi sementara IPBK Kota Blitar tercatat sebesar 71,9. Capaian ini didorong oleh kualitas sumber daya manusia yang membaik melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan keterampilan penduduk, serta keberhasilan pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) yang menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga. Selain itu, tren positif pada angka partisipasi sekolah, penyediaan sanitasi dan air bersih yang layak, serta program kemandirian lansia turut menjadi faktor penguat dalam mewujudkan ketahanan kependudukan yang inklusif di Kota Blitar.

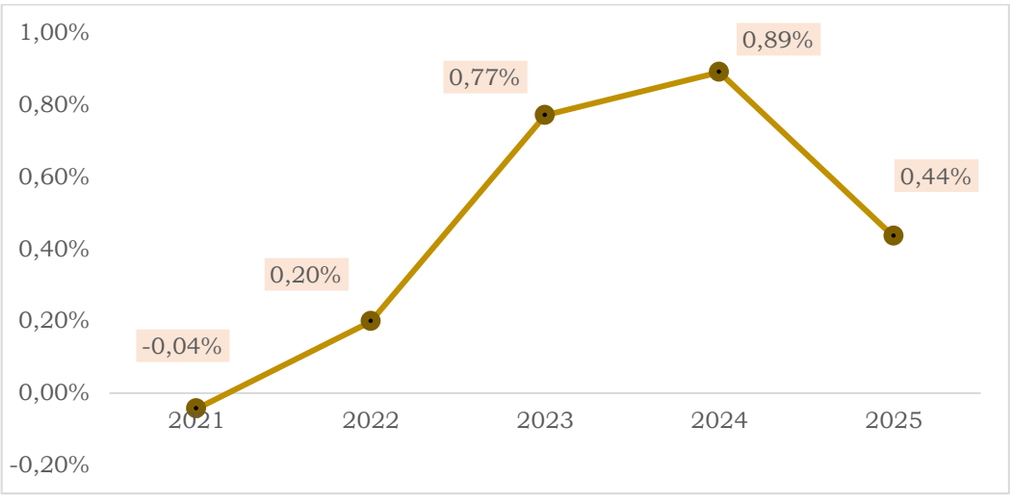
Namun demikian, akselerasi peningkatan nilai IPBK masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu ditangani secara komprehensif. Masalah kemiskinan masih menjadi faktor penghambat utama karena membatasi akses penduduk terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, yang berisiko menyebabkan keterbelakangan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, potensi krisis kesehatan yang dapat menurunkan kualitas hidup serta masih adanya praktik pernikahan usia dini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Guna menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk memperkuat langkah strategis melalui transformasi pelayanan publik yang mempermudah akses kesehatan primer dan kesehatan reproduksi, serta mengimplementasikan kebijakan yang lebih

pro-rakyat. Langkah ini akan diperkuat dengan peningkatan koordinasi lintas sektoral untuk memastikan percepatan pemenuhan infrastruktur air minum dan sanitasi layak bagi seluruh lapisan masyarakat guna mencapai target pembangunan yang lebih berkualitas pada tahun-tahun mendatang.

2.1.1.9.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah tingkat pertambahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu angka kelahiran (natalitas), angka kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi). Laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan penduduk dimasa lampau, sekarang dan masa depan. Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun selama 2021-2025 rata-rata sebesar 0,45 %, melambat dibandingkan rata-rata periode 2016-2020 sebesar 1,67 %.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan penduduk yang terkendali dan diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan membawa dampak positif bagi kemajuan daerah. Laju pertumbuhan penduduk Kota Blitar 2025 adalah 0,44 yang berarti tergolong dalam laju pertumbuhan rendah karena kurang dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Blitar berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.



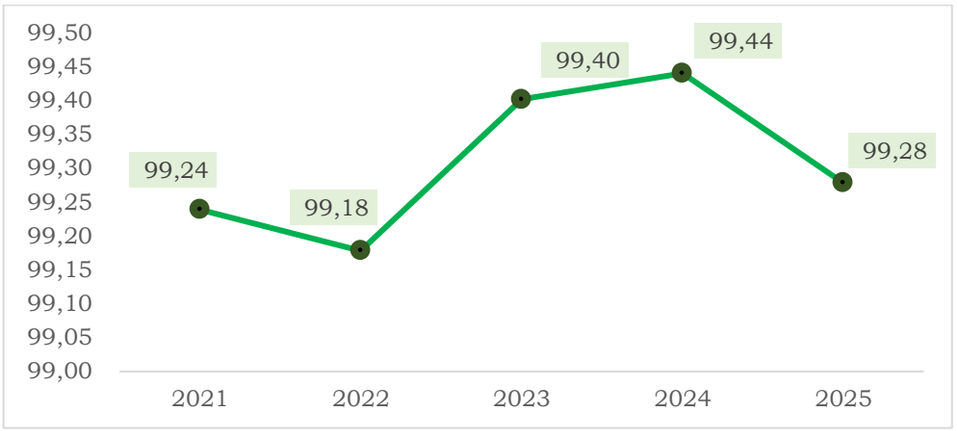
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2026

Gambar 2.22

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Blitar 2021 – 2025

2.1.1.9.3 Rasio Penduduk

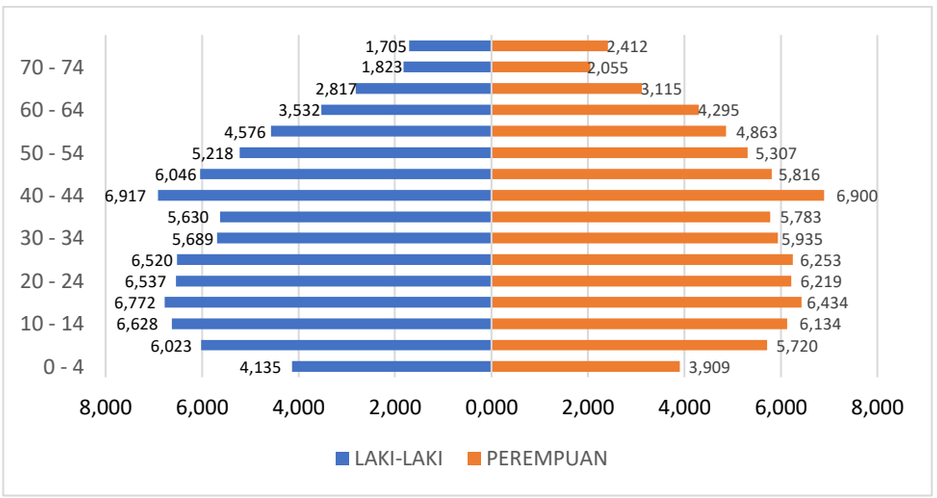
Rasio jenis kelamin merupakan salah satu indikator penting dalam ilmu kependudukan yang menunjukkan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Umumnya, rasio ini dinyatakan dalam jumlah laki-laki per 100 perempuan. Melalui rasio jenis kelamin, pemerintah dan peneliti dapat memahami struktur penduduk serta merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Data rasio jenis kelamin dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan berwawasan gender. Rasio Jenis Kelamin Kota Blitar 2021-2025 berada di 99-100% yang artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 99-100 penduduk laki-laki. Salah satu penyebab rasio jenis kelamin kurang dari 100% adalah Angka Harapan Hidup perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2026

Gambar 2.23

Rasio Jenis Kelamin Kota Blitar 2021 - 2025



Sumber: SIMPEDAK Kota Blitar, 2026

Gambar 2.24

Data Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025

Jika melihat data penduduk berdasarkan status pekerjaan, penduduk Kota Blitar lebih didominasi oleh buruh/karyawan/ pegawai dengan jumlah total 37.366 orang. Sementara itu, kelompok penduduk yang bekerja sebagai pekerja informal seperti usaha sendiri berjumlah 22.467 orang, dan yang dibantu buruh tidak dibayar sebanyak 10.711 orang. Penduduk yang bekerja sebagai berusaha dibantu buruh tetap dibayar mencapai 4.569 orang. Di sisi lain, jumlah penduduk yang berstatus sebagai pekerja bebas sebanyak 4.653 orang, sisanya, terdapat 10.146 orang yang termasuk dalam kategori pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar. Data ini mencerminkan bahwa struktur ketenagakerjaan di Kota Blitar masih bertumpu pada sektor formal, meskipun sektor informal tetap memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal.

Tabel 2.13

Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Blitar, 2025

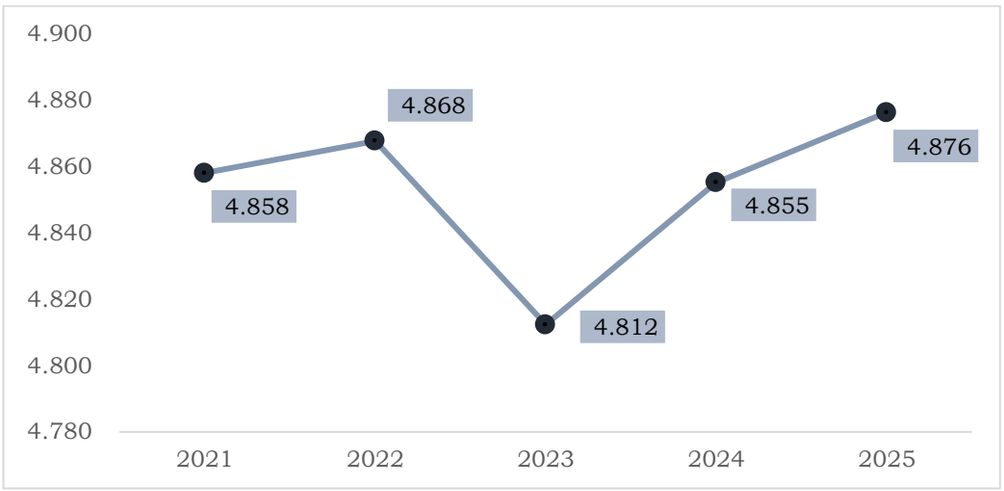
No	Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Berusaha sendiri	13.062	9.405	22.467
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	5.278	5.433	10.711
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3.290	1.279	4.569
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	20.889	16.477	37.366
5	Pekerja Bebas	2.910	1.743	4.653
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	3.572	6.574	10.146
	Jumlah	49.001	40.911	89.912

Sumber: BPS Kota Blitar, 2026

2.1.1.9.4 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah per satuan luas tertentu, biasanya dihitung dalam jiwa per kilometer persegi. Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa padat suatu daerah dihuni serta untuk membantu perencanaan pembangunan. Kepadatan penduduk menjadi salah satu aspek penting dalam studi geografi dan kependudukan karena berpengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan

Rata-rata kepadatan penduduk 2021-2025 sebesar 4.854, naik bila dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk periode 2015-2019 sebesar 4.716. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk kota Blitar yang memiliki tren kenaikan dalam 10 tahun terakhir. Sedangkan penurunan kepadatan penduduk pada tahun 2023-2024 dibandingkan tahun 2020-2022 disebabkan oleh luas wilayah kota Blitar yang bertambah di tahun 2023 dari 32,57 km^2 menjadi 33,20 km^2.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2026

Gambar 2.25

Kepadatan Penduduk Kota Blitar 2021 - 2025

Kota Blitar merupakan kota terkecil kedua di Provinsi Jawa Timur dengan luas sekitar 33,20 km^2 yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan. Berdasarkan distribusinya, penduduk terbanyak ada di Kecamatan Sananwetan, namun kecamatan yang paling padat penduduknya dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kecamatan Sukorejo.

Tabel 2.14

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kota Blitar 2025

Wilayah	Luas Wilayah		Penduduk		Kepadatan
	Km^2	% terhadap Luas	Jumlah	% terhadap Jumlah	
Kecamatan Kepanjenkidul	10,43	31,42	46.147	28,50	4.424
Kecamatan Sukorejo	10,13	30,51	55.270	34,14	5.456
Kecamatan Sananwetan	12,65	38,1	60.489	37,36	4.782
Kota Blitar	33,20	100	161.906	100	4.876

Sumber: SIMPEDAK Kota Blitar, 2026

Tabel 2.15

Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kota Blitar 2021 - 2025

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)			Laju Pertumbuhan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)
	Laki - laki	Perempuan	Total			
2021	78.820	79.424	158.244	-0,04%	99,24	4.858
2022	78.952	79.606	158.558	0,20%	99,18	4.868
2023	79.651	80.130	159.781	0,77%	99,40	4.812
2024	80.376	80.828	161.204	0,89%	99,44	4.855
2025	80.660	81.246	161.906	0,44%	99,28	4.876

Sumber: Bappeda Kota Blitar 2026, data diolah

2.1.1.9.5 Proyeksi dan Analisis Penduduk 5 Tahun ke Depan sesuai RPJPD Kota Blitar 2025-2045

Proyeksi demografi adalah perkiraan jumlah dan komposisi penduduk di masa depan berdasarkan pada data demografi masa lalu, tren pertumbuhan, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi perubahan jumlah penduduk, seperti tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Melalui proyeksi demografi, pemerintah dan lembaga perencana dapat memperkirakan kebutuhan masyarakat di masa mendatang serta menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran

Pada tahun 2030, proyeksi demografi Kota Blitar akan mencakup estimasi jumlah penduduk kota tersebut berdasarkan asumsi-asumsi

tertentu. Asumsi-asumsi ini melibatkan faktor-faktor seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan arus migrasi penduduk. Juga, faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, perubahan ekonomi, dan perubahan sosial dapat memengaruhi proyeksi demografi.

Berikut ini adalah proyeksi penduduk Kota Blitar Tahun 2026 – 2030 berdasarkan Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020.

Tabel 2.16

Proyeksi Penduduk Kota Blitar Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2026 – 2030 (Ribu)

Umur	Jenis Kelamin	2026	2027	2028	2029	2030
0-4	Laki-laki	5,55	5,56	5,57	5,57	5,58
	Perempuan	5,33	5,34	5,35	5,35	5,36
5-9	Laki-laki	5,55	5,59	5,62	5,64	5,62
	Perempuan	5,31	5,36	5,41	5,44	5,41
10-14	Laki-laki	5,69	5,63	5,58	5,55	5,59
	Perempuan	5,41	5,36	5,30	5,28	5,33
15-19	Laki-laki	5,92	5,89	5,85	5,81	5,77
	Perempuan	5,55	5,53	5,53	5,51	5,49
20-24	Laki-laki	6,05	6,04	6,02	6,00	5,97
	Perempuan	5,76	5,75	5,72	5,69	5,67
25-29	Laki-laki	5,93	6,00	6,06	6,10	6,12
	Perempuan	5,76	5,83	5,89	5,94	5,97
30-34	Laki-laki	5,55	5,64	5,75	5,86	5,96
	Perempuan	5,82	5,83	5,85	5,89	5,94
35-39	Laki-laki	5,62	5,54	5,49	5,46	5,48
	Perempuan	5,87	5,87	5,88	5,90	5,91
40-44	Laki-laki	6,06	5,96	5,84	5,72	5,62
	Perempuan	6,09	6,05	5,99	5,93	5,89
45-49	Laki-laki	5,81	5,92	6,01	6,05	6,04
	Perempuan	5,68	5,82	5,95	6,05	6,10
50-54	Laki-laki	5,12	5,23	5,36	5,49	5,62
	Perempuan	5,18	5,25	5,33	5,42	5,52
55-59	Laki-laki	4,66	4,71	4,76	4,81	4,88
	Perempuan	4,87	4,91	4,94	4,99	5,04
60-64	Laki-laki	3,75	3,90	4,05	4,19	4,31
	Perempuan	4,35	4,45	4,54	4,61	4,67
65-69	Laki-laki	2,96	3,03	3,10	3,18	3,28
	Perempuan	3,40	3,55	3,70	3,85	3,98

Umur	Jenis Kelamin	2026	2027	2028	2029	2030
70-74	Laki-laki	2,08	2,17	2,25	2,33	2,41
	Perempuan	2,58	2,67	2,74	2,82	2,93
75+	Laki-laki	1,88	2,01	2,14	2,28	2,42
	Perempuan	2,67	2,87	3,08	3,31	3,53
Total		157,79	159,22	160,62	161,99	163,34

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020

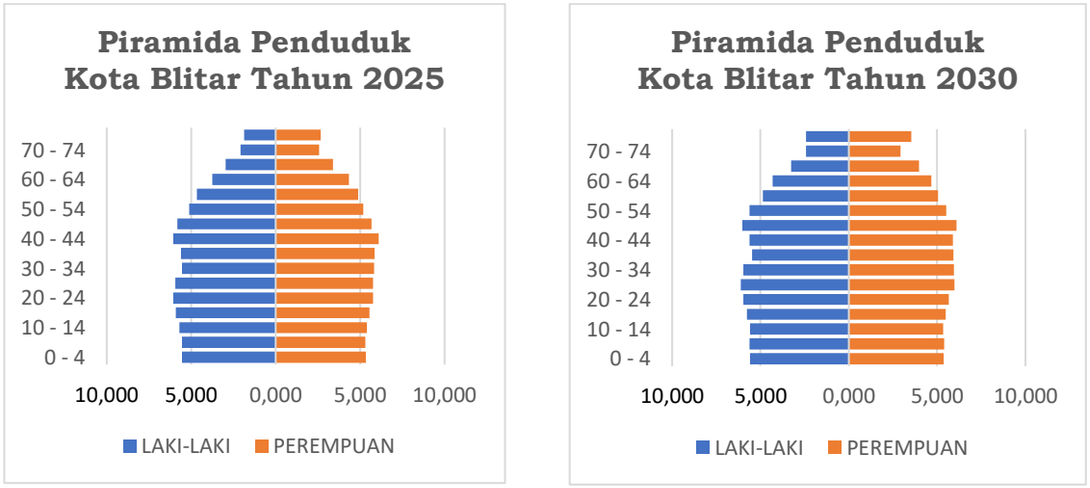
Tabel 2.17

Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Blitar

Tahun 2026 - 2030

Parameter	2026	2027	2028	2029	2030
Penduduk					
Laki-laki	78,16	78,81	79,43	80,03	80,63
Perempuan	79,62	80,41	81,19	81,96	82,71
Total	157,79	159,22	160,62	161,99	163,34

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020

Gambar 2.26

Piramida Penduduk Kota Blitar Tahun 2026 dan 2030

Proyeksi penduduk Kota Blitar periode 2026–2030 memperlihatkan kecenderungan pertumbuhan yang positif. Jumlah penduduk diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 163,34 ribu jiwa pada tahun 2030.

Dengan proyeksi pertumbuhan penduduk yang cenderung positif, Pemerintah Kota Blitar perlu terus memperhatikan aspek pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya guna menjaga keseimbangan perkembangan di setiap wilayah di Kota Blitar. Proyeksi demografi memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang berbasis data dan analisis yang tepat, pemerintah

dapat mengantisipasi berbagai perubahan kependudukan serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan sejahtera bagi generasi mendatang.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

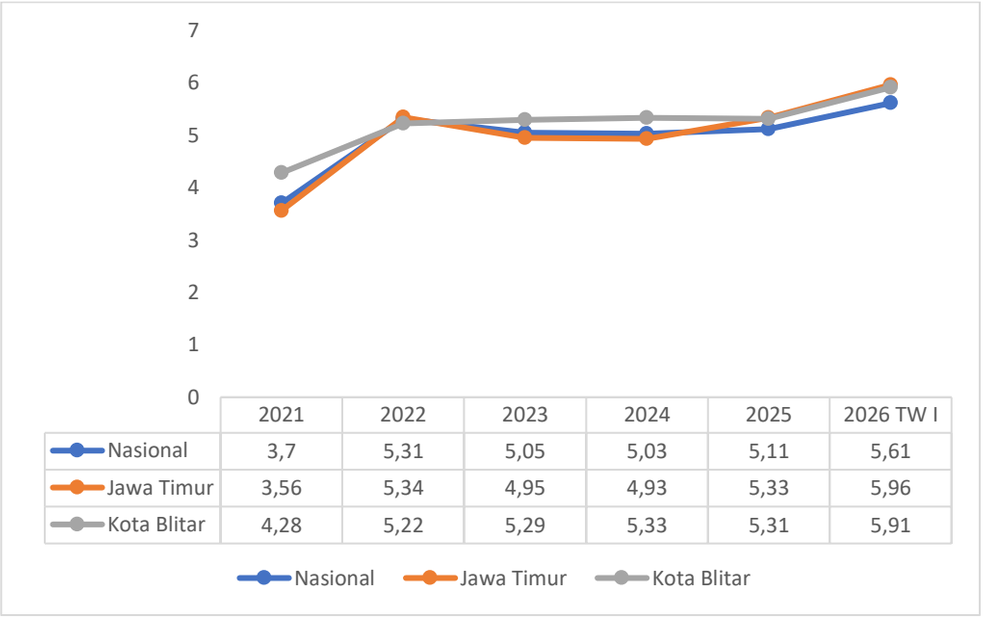
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan konsep yang mengukur perubahan dalam nilai total produksi ekonomi suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Analisis data pertumbuhan ekonomi penting untuk merancang kebijakan ekonomi dan pembangunan yang sesuai dengan kondisi aktual dan perubahan ekonomi, serta untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang mungkin perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Perekonomian Kota Blitar mengalami fluktuasi karena pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 perekonomian melambat sebesar – 2,28%, dan berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan nasional. Namun demikian, kondisi perekonomian cenderung membaik sejak tahun 2021 yang dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang Kembali menyentuh titik positif sebesar 4,28 persen dan terus meningkat hingga 5,33 persen pada tahun 2024. Angka ini masih lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 yang sebesar 4,93 persen, juga diatas laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,03 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi Kota Blitar relatif lebih kuat dan kompetitif dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Stabilitas pertumbuhan yang berada di atas 5 persen selama tiga tahun berturut-turut juga mencerminkan struktur ekonomi daerah yang cukup tangguh serta efektivitas kebijakan pembangunan yang dijalankan. Selanjutnya, perekonomian Kota Blitar mengalami sedikit perlambatan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada 2025 menjadi 5,31 persen. Perlambatan ini terjadi karena adanya penurunan kegiatan perekonomian di Kota Blitar, ditandai dengan berkurangnya kegiatan konstruksi, administrasi pemerintah, dan jasa lainnya karena dampak efisiensi.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi rata perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Blitar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersaji pada tabel berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025	2026 TW I
Nasional	3,7	5,31	5,05	5,03	5,11	5,61
Jawa Timur	3,56	5,34	4,95	4,93	5,33	5,96
Kota Blitar	4,28	5,22	5,29	5,33	5,31	5,91

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar,2026

Gambar 2.27

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar

Tahun 2021-2025

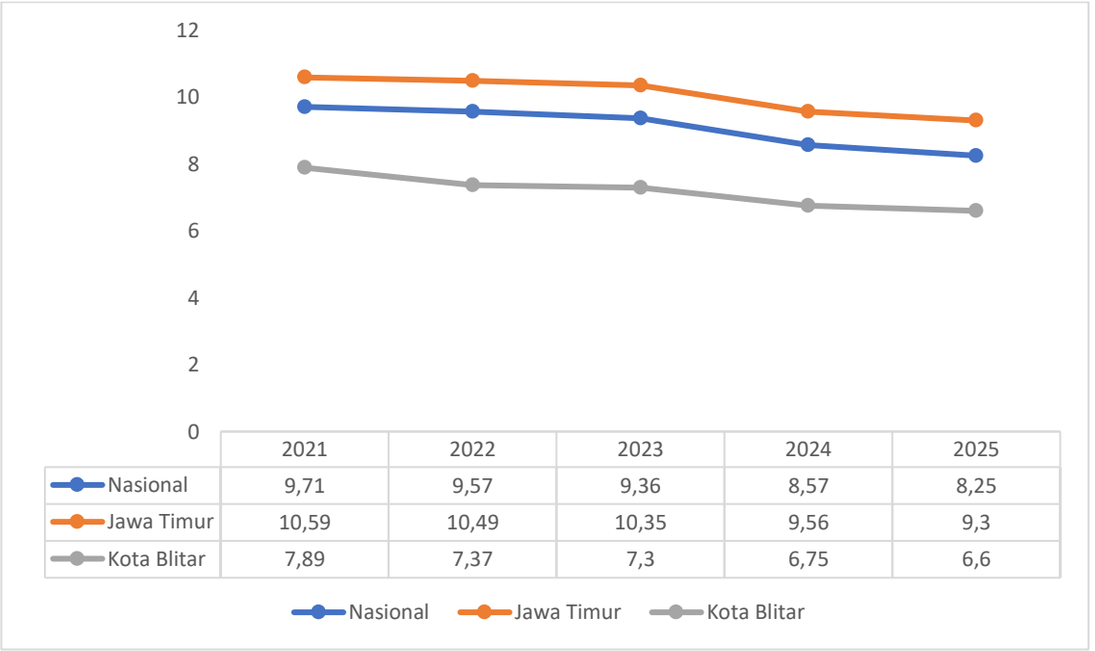
2.1.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang didefinisikan sebagai tingkat kemiskinan. Selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, tingkat kemiskinan di Kota Blitar terus mengalami penurunan.

Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di Kota Blitar mencapai 7,89 persen. Pada tahun 2022 turun menjadi 7,37 persen atau turun sebesar 0,52 poin dari tahun 2021 dan terus turun menjadi 7,30 persen di tahun 2023 atau turun sebesar 0,07 poin dari tahun 2022. Pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kota Blitar turun menjadi 9,86 ribu jiwa, dan tren perbaikan tersebut berlanjut pada tahun 2025.

Pada tahun 2025, tingkat kemiskinan Kota Blitar kembali menurun menjadi 6,6 persen. Angka ini menunjukkan tren positif pengentasan kemiskinan di daerah. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang sebesar 9,3 persen dan nasional sebesar 8,25 persen pada tahun 2025, tingkat kemiskinan Kota Blitar jauh lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Blitar relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.

Berdasarkan grafik tren tingkat kemiskinan, dibandingkan dengan rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan nasional, tingkat kemiskinan Kota Blitar secara konsisten berada di bawah keduanya. Penurunan tingkat kemiskinan mencapai 6,6 persen pada tahun 2025 menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, serta perbaikan kondisi ekonomi daerah berjalan cukup efektif. Namun demikian, upaya pengentasan kemiskinan tetap perlu dilanjutkan agar penurunan ini dapat dipertahankan secara berkelanjutan dan semakin memperkecil kesenjangan kesejahteraan masyarakat.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.28

Tingkat kemiskinan Kota Blitar Tahun 2021 - 2025

Tabel. 2.18

Tingkat kemiskinan Kota Blitar Tahun 2021 s.d 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tingkat kemiskinan	7,89	7,37	7,30	6,75	6,6
2.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	11,33	10,65	10,61	9,86	9,69
3.	Garis Kemiskinan (per kapita per bulan)	481.229	517.363	568.280	596.105	625.337

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan Surat Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Nomor B-120/04330/VS.600/2026 tanggal 28 April 2026, perihal Penyampaian Data Kemiskinan Ekstrem Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun 2024 -2025, dengan batas Kemiskinan Ekstrem yang digunakan adalah sebesar 2,15 USD PPP (*Purcashing Power Parity*) per kapita per hari, mengacu pada median garis kemiskinan dari 28 negara *low income* yang digunakan *Word Bank*, dengan data seperti tabel di bawah ini :

Tabel. 2.19

Tingkat kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 - 2025

No.	Wilayah	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)		
		2024	2025	Penurunan
1	Nasional	1,25	0,85	0,4
2	Jawa Timur	0,59	0,29	0,3
3	Kota Blitar	0,62	0,26	0,36

Sumber : BPS RI, 2026

Tingkat kemiskinan ekstrem di Kota Blitar menunjukkan tren penurunan yang cukup baik dan berada di bawah rata-rata nasional pada tahun 2025. Berdasarkan data tahun 2024–2025, tingkat kemiskinan ekstrem nasional turun dari 1,25 persen menjadi 0,85 persen atau menurun sebesar 0,40 persen. Pada tingkat Provinsi Jawa Timur, kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan dari 0,59 persen menjadi 0,29 persen atau turun sebesar 0,30 persen. Sementara itu, Kota Blitar mencatat penurunan dari 0,62 persen pada tahun 2024 menjadi 0,26 persen pada tahun 2025 atau menurun sebesar 0,36 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kota Blitar telah berjalan cukup efektif melalui berbagai intervensi program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses layanan dasar, serta penguatan ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya turut mendukung percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di daerah.

Meskipun demikian, Pemerintah Kota Blitar tetap perlu meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang masih berada pada kategori rentan miskin dan miskin ekstrem. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan penurunan angka kemiskinan ekstrem sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kabupaten/Kota diminta untuk melaksanakan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui 3 strategi, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, yang dijabarkan dengan melakukan intervensi sebagai berikut :

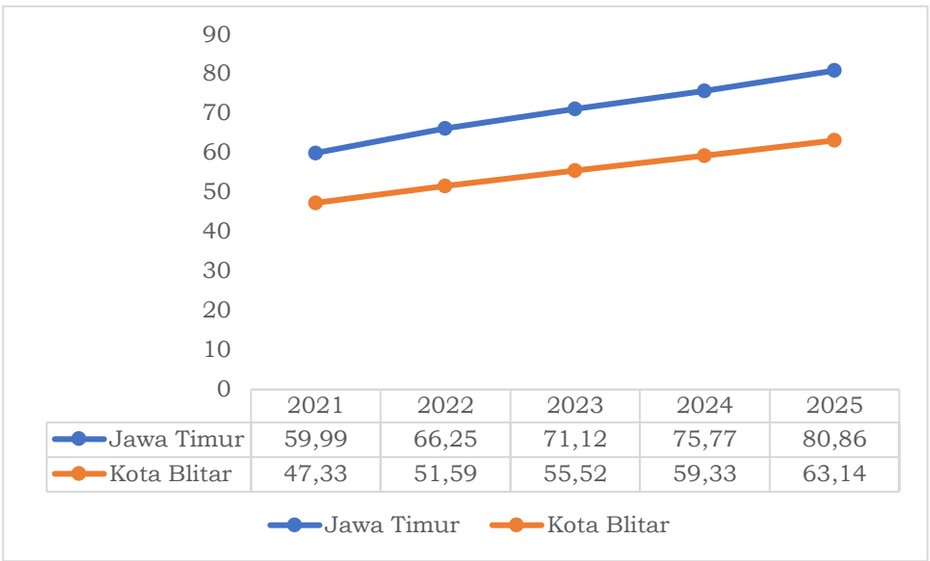
1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, dengan bantuan sosial dan jaminan sosial (Rastrada, Sekolah Gratis, *Home Care*, PKH, BLT, KIS, dll)
2. Peningkatan pendapatan masyarakat, dengan Pelatihan Keterampilan, Pemberdayaan UMKM, fasilitasi untuk pencari kerja *(job fair)*, RT Keren, dll
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, melalui penyediaan akses layanan dasar (Program Penyediaan Layanan Sanitasi, Program Penyediaan Layanan Air Minum, Program Rehabilitasi RTLH, dll)

Tantangan dalam mempertahankan penurunan kemiskinan di Kota Blitar :

a. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang merata ke semua lapisan masyarakat.
b. Perlindungan sosial melalui program bantuan sosial harus terus diperkuat untuk mencegah masyarakat jatuh kembali ke dalam kemiskinan.
c. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan diperlukan untuk memastikan masyarakat dapat bersaing di pasar kerja.

2.1.2.1.3 PDRB Per Kapita (dalam juta rupiah, ADHB)

PDRB per kapita (Produk Domestik Regional Bruto per kapita) merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk atau *output* ekonomi yang dihasilkan oleh setiap individu di Kota Blitar dalam satu tahun. Indikator ini diperoleh dengan membagi total PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduk Kota Blitar pada tahun yang sama. PDRB per kapita Kota Blitar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersaji pada tabel berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Jawa Timur	59,99	66,25	71,12	75,77	80,86
Kota Blitar	47,33	51,59	55,52	59,33	63,14

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.29

PDRB Per Kapita (dalam juta rupiah, ADHB) Kota Blitar

Tahun 2021 - 2025

PDRB Per Kapita (ADHB) Kota Blitar tahun 2021-2025 mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2021 PDRB berada pada angka sebesar 47,33 Juta Rupiah mengalami peningkatan 2,24 Juta Rupiah dari tahun 2020 menjadi 45,09 juta rupiah. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan 4,26 juta rupiah menjadi 51.59 juta rupiah. Nilai ini terus meningkat sampai di tahun 2025 sebesar 63,14 juta rupiah. PDRB Per Kapita Kota Blitar pada tahun 2020-2025 masih berada dibawah rata-rata PDRB Per Kapita Jawa Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi Kota Blitar pada tahun 2021-2025 masih berada dibawah rata-rata kinerja ekonomi Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

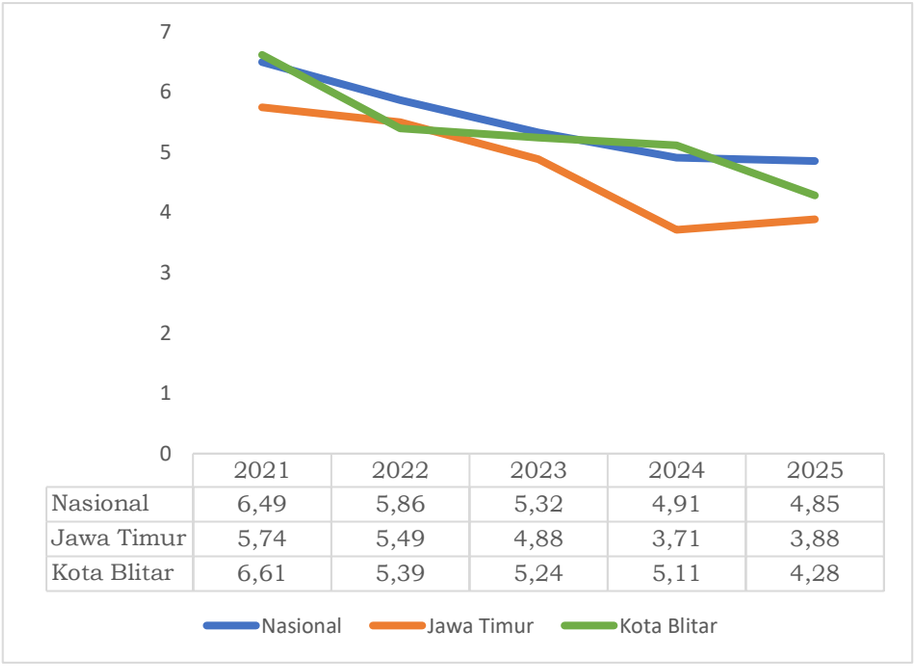
Faktor yang mempengaruhi peningkatan PDRB per Kapita Kota Blitar:

a. Kondisi demografi laju pertumbuhan penduduk Kota Blitar yang relatif menunjukkan perkembangan positif
b. Struktur Ekonomi Kota Blitar bertumpu pada dengan sektor ekonomi yang produktif seperti industri atau jasa
c. Investasi dan Infrastruktur yang berjalan baik

2.1.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT hasil Sakernas (Survey Angkatan Kerja Nasional) bulan Agustus 2023 sebesar 5,24 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang pengangguran. Dibanding Agustus 2022 dimana TPT sebesar 5,39 persen, TPT pada Agustus 2023 mengalami penurunan sebesar 0,15 persen. TPT di tahun 2024 sebesar 5,11 mengalami penurunan sebesar 0,13 persen.

Tren positif ini berlanjut pada Agustus 2025, di mana TPT Kota Blitar tercatat sebesar 4,28 persen. Angka tersebut menunjukkan penurunan yang lebih signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga secara keseluruhan TPT dalam periode 2022–2025 memperlihatkan tren penurunan yang konsisten. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja dan kondisi pasar kerja di Kota Blitar.



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	6,49	5,86	5,32	4,91	4,85
Jawa Timur	5,74	5,49	4,88	3,71	3,88
Kota Blitar	6,61	5,39	5,24	5,11	4,28

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.30
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar
Tahun 2021 – 2025

Tabel 2.20
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar
Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	TPT	6,61	5,39	5,24	5,11	4,28
2.	Penduduk yang Bekerja (orang)	74.339	73.616	82.605	81.650	89.912
3.	Pengangguran (orang)	5.264	4.192	4.571	4.390	4.019

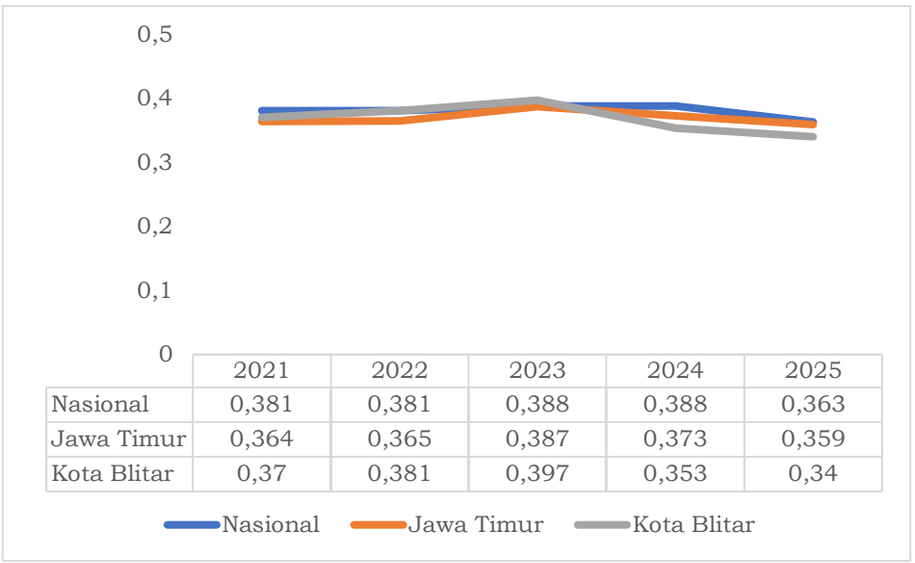
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

2.1.2.1.5 Rasio Gini

Indeks Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai Indeks Gini adalah nol maka artinya terdapat kemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

Pada tahun 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia secara nasional yang diukur menggunakan Indeks Gini tercatat sebesar 0,363. Sementara itu, Indeks Gini Provinsi Jawa Timur berada pada angka 0,359. Adapun Indeks Gini Kota Blitar pada tahun 2025 sebesar 0,340. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Blitar lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional maupun Provinsi Jawa Timur.

Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran atau pendapatan di Kota Blitar relatif lebih merata dibandingkan rata-rata nasional dan provinsi. Selain itu, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penurunan angka Indeks Gini ini juga mengindikasikan adanya perbaikan dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2025.



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	0,381	0,381	0,388	0,388	0,363
Jawa Timur	0,364	0,365	0,387	0,373	0,359
Kota Blitar	0,37	0,381	0,397	0,353	0,34

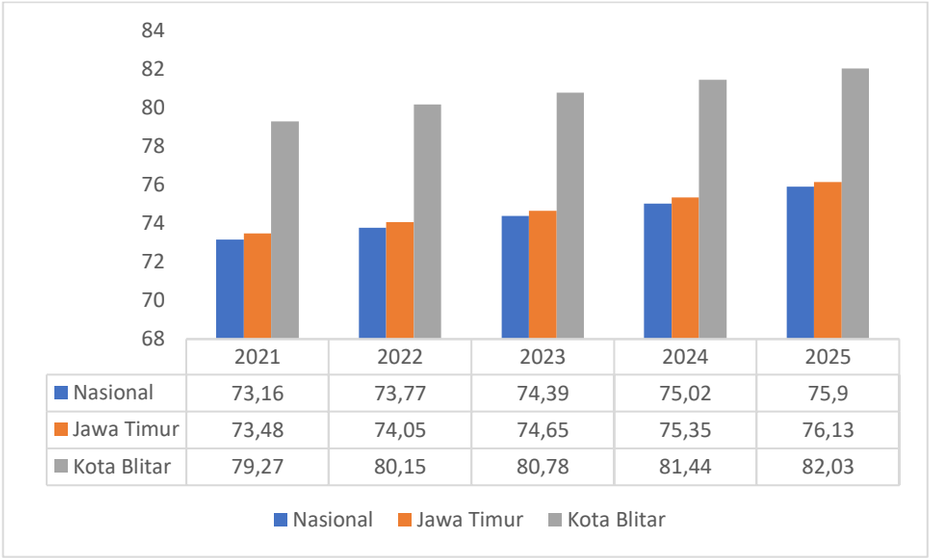
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.31

Indeks Gini Kota Blitar Tahun 2021 – 2025

2.1.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia terus mengalami kemajuan di Kota Blitar. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 sebesar 82,03. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar secara konsisten lebih baik dari rata – rata nasional dan Provinsi Jawa Timur. IPM Kota Blitar juga berada pada level IPM “Sangat Tinggi”, dengan capaian diatas 80,00. Perkembangan IPM selama tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik , 2025

Gambar 2.32

IPM Kota Blitar Tahun 2021 – 2025

Peningkatan nilai IPM ini ditopang oleh kenaikan nilai ketiga dimensi pembentuk IPM yakni Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, Dimensi Pengetahuan, diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Dimensi Standar Hidup Layak yang diukur dengan Pengeluaran Riil per Kapita (PPP) :

Tabel 2.21

IPM Kota Blitar menurut Indikator Penyusunnya

Tahun 2021 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,46	74,71	74,97	75,20	75,47
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,33	14,56	14,57	14,81	14,82
Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,35	10,65	10,78	10,82	10,83
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Ribu Rupiah	13.816	14.058	14.548	14.933	15,586

Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	79,27	80,15	80,78	81,44	82,03

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2025

Pencapaian IPM Kota Blitar sebesar 82,03 pada tahun 2025 atau tumbuh 0,59 dibanding tahun sebelumnya yang ditopang oleh peningkatan dimensi UHH sebesar 0,27 persen, HLS sebesar 0,01 persen, RLS sebesar 0,01 persen dan Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 0,653 persen.

Beragam program pembangunan di bidang kesehatan, Pendidikan dan ekonomi telah banyak digulirkan oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat secara berkesinambungan telah memperkuat pencapaian IPM Kota Blitar. Hal ini juga didukung oleh proses pemulihan ekonomi yang terus berlanjut dan semakin menguat.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan dimensi pembentuk IPM itu sendiri. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing dimensi IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Pertama, Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, usia harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat terus meningkat dalam enam tahun terakhir (2021-2025). Hal ini menunjukkan derajat Kesehatan masyarakat Kota Blitar secara umum semakin membaik.

Kedua, Dimensi Pengetahuan, Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua komponen yakni HLS dan RLS. Kedua komponen ini juga terus meningkat dalam enam tahun terakhir. Meningkatnya HLS menjadi sinyal positif bahwa harapan semakin banyak penduduk yang melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 2025, HLS mencapai 14,82 tahun, yang berarti bahwa anak-anak di Kota Blitar memiliki harapan untuk dapat menempuh Pendidikan formal selama 14,82 tahun atau menamatkan Pendidikan hingga Diploma Dua dan mulai masuk ke jenjang Diploma Tiga. RLS juga terus tumbuh positif setiap tahunnya. Hingga tahun 2025, RLS mencapai 10,83 tahun yang berarti rata-rata penduduk Kota Blitar usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan Pendidikan selama 10,83 tahun atau masuk kelas XI (SMA kelas dua).

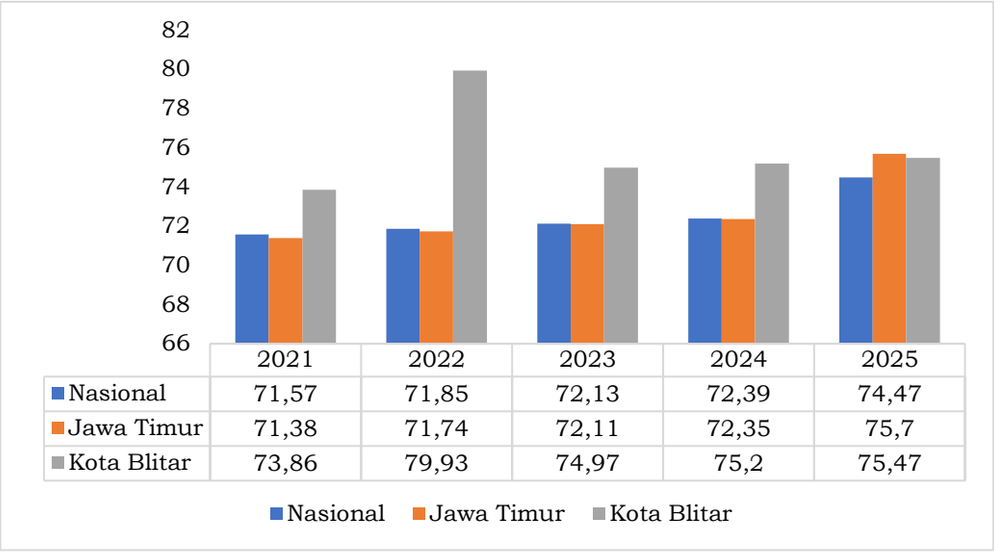
Ketiga, Dimensi Standar Hidup Layak, dimensi ketiga yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang ditunjukkan oleh PPP. PPP Kota Blitar terus menguat selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2025, PPP mampu tumbuh 0,653 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan kesehatan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan komitmen dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan meningkatkan akses, kualitas dan kesadaran akan pentingnya kesehatan, maka dapat menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan sejahtera.

2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup adalah rata-rata jumlah tahun yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir. Usia Harapan Hidup juga dapat diartikan sebagai rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. Usia harapan hidup yang tinggi menunjukkan bahwa taraf kesehatan dan kesejahteraan warga negara semakin baik.



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	71,57	71,85	72,13	72,39	74,47
Jawa Timur	71,38	71,74	72,11	72,35	75,7
Kota Blitar	73,86	79,93	74,97	75,2	75,47

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.33

Usia Harapan Hidup Tahun 2021 – 2025

Usia Harapan Hidup (UHH) di Kota Blitar tahun 2025 mencapai 75,47 tahun meningkat 0,27 tahun (0,36 persen) jika dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini dapat diartikan bahwa seorang bayi akan menjalani hidup selama 75,47 tahun sejak dilahirkan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, angka usia harapan hidup di Kota Blitar yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus mengalami peningkatan. Hal ini menandakan adanya perkembangan positif dalam pembangunan derajat masyarakat melalui peningkatan layanan dan akses kesehatan kepada masyarakat.

2.1.2.2.2 Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria

Situasi kesehatan di Kota Blitar saat ini menuntut perhatian serius terhadap berbagai tantangan penyakit menular yang tersebar di wilayah Kecamatan Sukorejo, Kepanjenkidul, dan Sananwetan. Pemetaan data menunjukkan bahwa ancaman kesehatan masyarakat tidak hanya datang dari penyakit berbasis lingkungan seperti diare yang prevalensinya masih sangat tinggi, tetapi juga dari penyakit menular kronis dan penyakit yang ditularkan melalui vektor nyamuk.

Tabel 2.22

Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria

Tahun 2025

KECAMATAN	HIV/AIDS	IMS	DBD	Diare	Tuberculosis	Malaria
Sukorejo	15	64	14	1.190	59	1

KECAMATAN	HIV/AIDS	IMS	DBD	Diare	Tuberculosis	Malaria
Kepanjenkidul	39	44	11	1.685	189	0
Sananwetan	45	157	24	1.017	216	3
Kota Blitar	99	265	49	3.892	464	4

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Secara keseluruhan, diare menjadi masalah kesehatan yang paling mendominasi di Kota Blitar dengan total mencapai 3.892 kasus. Angka ini jauh melampaui jenis penyakit lainnya, yang mengindikasikan bahwa faktor lingkungan, kebersihan air, dan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) harus menjadi perhatian utama di seluruh wilayah, terutama di Kecamatan Kepanjenkidul yang mencatatkan kasus diare tertinggi.

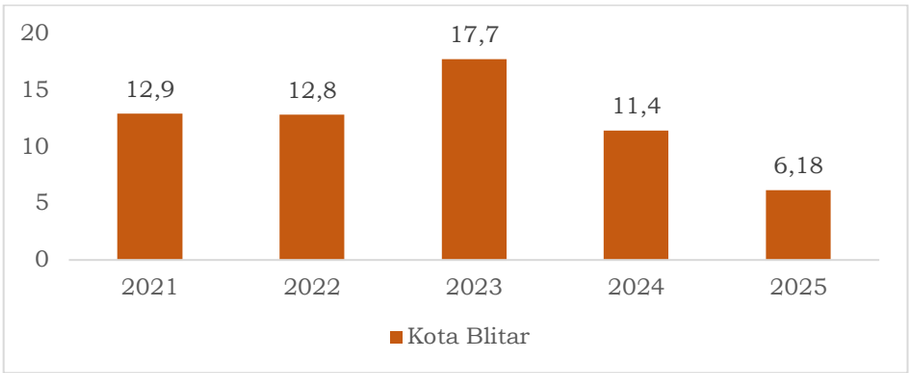
Jika melihat persebaran wilayahnya, Kecamatan Sananwetan muncul sebagai titik perhatian utama karena memiliki beban penyakit tertinggi di hampir semua kategori. Kecamatan ini mencatatkan angka HIV/AIDS (45 kasus), IMS (157 kasus), dan Tuberculosis (216 kasus) yang paling besar dibandingkan kecamatan lainnya. Tingginya angka penyakit menular ini menunjukkan perlunya penguatan program skrining dan edukasi pencegahan penularan di wilayah tersebut.

Di sisi lain, untuk penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, DBD masih ditemukan di seluruh kecamatan dengan total 49 kasus, di mana Sananwetan menyumbang porsi terbesar. Sementara itu, penyakit Malaria sudah sangat terkendali karena hanya ditemukan 4 kasus di seluruh kota, bahkan di Kepanjenkidul tercatat nol kasus.

Meskipun kasus malaria hampir hilang, Kota Blitar masih menghadapi tantangan besar pada pengendalian penyakit saluran pencernaan dan penyakit menular kronis seperti tuberculosis dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Sebagai langkah tindak lanjut, kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk menekan angka kasus-kasus tersebut. Fokus utama tidak hanya terletak pada pengobatan kuratif, tetapi juga pada penguatan edukasi preventif, seperti perbaikan sanitasi lingkungan untuk menekan angka diare, peningkatan akses layanan skrining kesehatan secara berkala, serta penggalakan perilaku hidup bersih dan sehat di tingkat keluarga. Dengan memetakan tantangan kesehatan berdasarkan karakteristik tiap kecamatan, diharapkan upaya penanggulangan penyakit di Kota Blitar dapat menjadi lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan demi terciptanya masyarakat yang lebih sehat dan tangguh di masa depan.

2.1.2.2.3 Prevalensi Stunting

Stunting terjadi karena adanya gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting pada anak dapat terjadi karena kurangnya asupan gizi ibu saat hamil, atau kurangnya asupan gizi pada anak saat dalam masa pertumbuhan.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2025.

Gambar 2.34

Prevalensi Balita Stunting Tahun 2021 – 2025

Prevalensi balita stunting dihitung dengan formula indikator jumlah balita stunting dibagi jumlah seluruh balita dikalikan 100 % (persen). Dalam menentukan prevalensi balita stunting ini mengikuti hasil perhitungan dari Kementerian Kesehatan RI untuk dipublikasikan. Berdasarkan data, prevalensi balita stunting selama kurun waktu 4 (empat) tahun menunjukkan data yang fluktuatif, pada tahun 2025 menurun menjadi sebesar 5,77 %.

Prevalensi stunting tidak hanya menggambarkan kondisi anak pada suatu wilayah, melainkan secara lebih umum dapat menggambarkan kondisi gizi, pemeliharaan kesehatan, pengasuhan, lingkungan, dan faktor sosial ekonomi masyarakat. WHO menetapkan standar prevalensi stunting harus di angka kurang dari 20 % (persen). Meskipun prevalensi balita stunting Kota Blitar berada di bawah standar WHO, prevalensi stunting merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah yang perlu untuk terus ditekan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga diperlukan dukungan lintas sektor dalam rangka penurunan angka stunting di Kota Blitar.

Dalam upaya penanganan stunting masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi diantaranya yaitu masih terdapatnya balita naik berat badan yang kurang dari standar sebesar 56,35% (target 70%), belum terpenuhinya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan bagi seluruh balita bermasalah gizi dan adanya beberapa alat antropometri atau timbangan injak digital dewasa yang mengalami kerusakan.

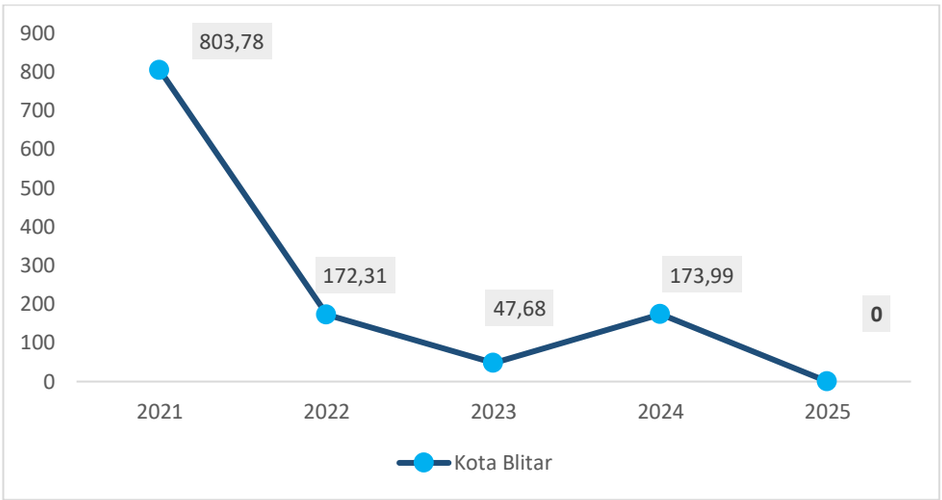
Sebagai komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam mewujudkan generasi yang sehat dilakukan berbagai langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita
2. Memberikan susu PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus) balita dengan hambatan pertumbuhan yang sesuai indikasi dokter spesialis anak
3. Melaksanakan kalibrasi alat antropometri

2.1.2.2.4 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting untuk menilai derajat kesehatan ibu dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Masih adanya angka kematian ibu mencerminkan masih adanya tantangan serius dalam

sistem pelayanan kesehatan, terutama dalam hal akses, kualitas, dan ketepatan penanganan komplikasi kebidanan. Adapun capaian angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Kota Blitar Tahun 2021 – 2025 adalah sebagai berikut:



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2025

Gambar 2.35

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup

Tahun 2021 – 2025

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Blitar menunjukkan tren penurunan yang sangat signifikan dari puncak tertinggi sebesar 803,78 pada tahun 2021 menjadi bebas kematian ibu pada tahun 2025. Hal ini yang mengindikasikan keberhasilan penguatan sistem layanan kesehatan ibu pasca pandemi. Meskipun sempat terjadi fluktuasi kecil di tahun 2024, posisi angka tersebut tetap berada di bawah target nasional (183 per 100.000 kelahiran hidup) yang menunjukkan kinerja kesehatan daerah yang unggul dan optimisme kuat demi tercapainya target ideal *Zero Mother Mortality* (angka 0) pada tahun 2025 melalui intervensi gizi dan pemantauan medis yang lebih intensif.

Zero Mother Mortalily yang dicapai oleh Kota Blitar pada tahun 2025 tidak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya yaitu :

- Pelaksanaan kegiatan audit kasus *nearmiss maternal* (ibu nyaris mati) sebagai salah satu upaya pembelajaran kasus *nearmiss* pada ibu hamil/bersalin/nifas
- Kerja sama dengan lintas sektor pendidikan (Poltekkes Kemenkes Malang-Kampus Blitar) dalam upaya pendampingan ibu hamil risiko tinggi.
- Supervisi fasilitatif dalam rangka monitoring hasil pendampingan di seluruh wilayah kelurahan se-Kota Blitar
- Pelaksanaan Drill Kegawatdaruratan Maternal Neonatal triwulanan di PONED masing-masing UPT Puskesmas

Meskipun Kota Blitar telah bebas kematian ibu pada tahun 2025, namun masih ada berapa kendala yang dihadapi terkait dengan angka kematian ibu diantaranya yaitu :

- Terdapat ibu hamil/bersalin/nifas yang data KTP Kota Blitar tapi domisili luar kota dan melakukan pemeriksaan di luar Kota Blitar. Hal ini mengakibatkan tenaga kesehatan tidak bisa melakukan pemantauan.
- Terdapat ibu hamil/bersalin/nifas yang data kependudukan dan domisili luar Kota Blitar, tetapi melakukan pemeriksaan di Kota Blitar.

Sebagai tindak lanjut dalam mengatasi berbagai kendala tersebut dilakukan berbagai hal sebagai berikut :

- Melanjutkan kerja sama dengan lintas sektor pendidikan (Poltekkes Kemenkes Malang-Kampus Blitar) dalam upaya pendampingan ibu hamil risiko tinggi.
- Pendampingan dr. Sp.OG Wilayah bagi FKTP se-Kota Blitar
- OJT Kegawatdaruratan bagi tim kegawatdaruratan FKTP ke RS

Lebih lanjut, untuk mengetahui jumlah kematian ibu dan jumlah kelahiran selama lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23

Angka Kematian Ibu, Jumlah Ibu Meninggal, dan Jumlah Kelahiran Tahun 2021-2025

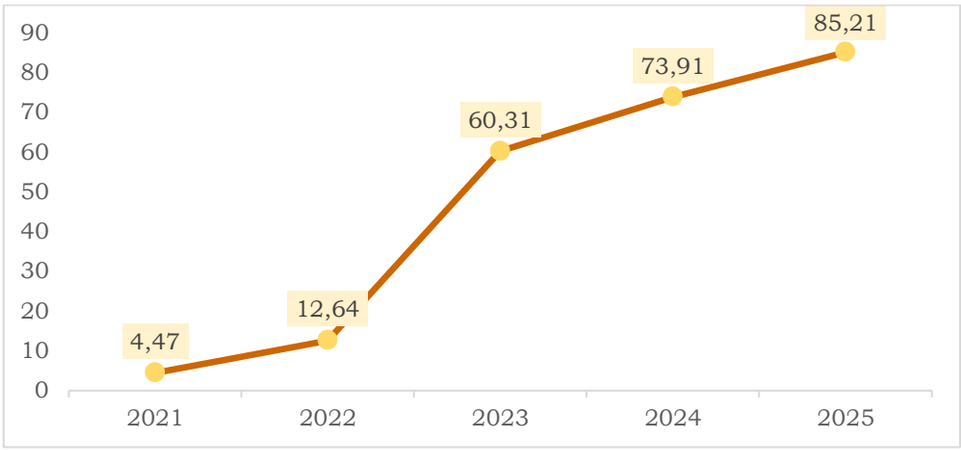
No.	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	803,78	172,31	47,68	173,99	0
2.	Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas	17	3	1	4	0
3.	Jumlah kelahiran hidup	2.115	1.741	2,097	2.299	2.311

Sumber: *Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2025*

2.1.2.2.5 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis

Tuberculosis (TBC) adalah penyakit yang bersifat menular melalui udara, partikel dahak orang yang mengidap TBC aktif saat batuk, berbicara atau bersin. Penularan itu tidak langsung dapat dideteksi karena bakteri dapat bersifat laten (non aktif) pada saat seseorang mempunyai daya tahan tubuh yang baik. Akan tetapi saat daya tubuhnya menurun maka TBC akan menyerang orang tersebut. TBC perlu mendapat perhatian khusus, karena seseorang yang sakit TBC dapat menular pada 10 – 15 orang per tahun.

Penanganan TBC sangat tergantung pada tingkat temuan penderita TBC di wilayah untuk dapat diambil tindakan baik preventif agar tidak terjadi penularan dengan dampak luas dan represif dengan tindakan pengobatan tuntas pada yang bersangkutan.



Sumber*: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2025*

Gambar 2.36

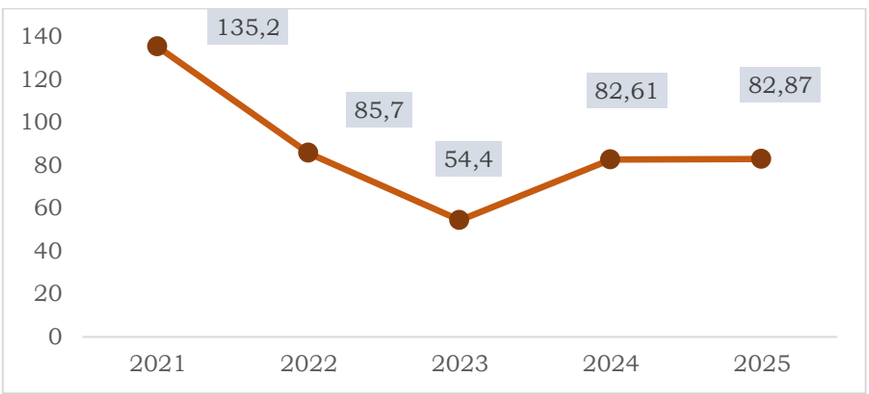
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus *Tuberculosis*

Tahun 2021 – 2025

Tingkat temuan tidak akan berhasil optimal jika tidak diikuti dengan tingkat kesadaran masyarakat yang baik. Masyarakat harus mampu menemu kenali TBC beserta pola tindakan preventif dan represif. Tindakan preventifnya adalah selalu menjaga kesehatan pribadi, sedangkan tindakan represifnya adalah pengobatan secara tuntas.

2.1.2.2.6 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis

Angka keberhasilan pengobatan TBC (*Success Rate Treatment Tuberculosis*) mengukur Jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan dalam satu tahun. Capaian keberhasilan pengobatan pada pasien *Tuberkulosis* di Kota Blitar pada tahun 2025 telah mencapai 82,87 % (persen).



Sumber*: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2025*

Gambar 2.37

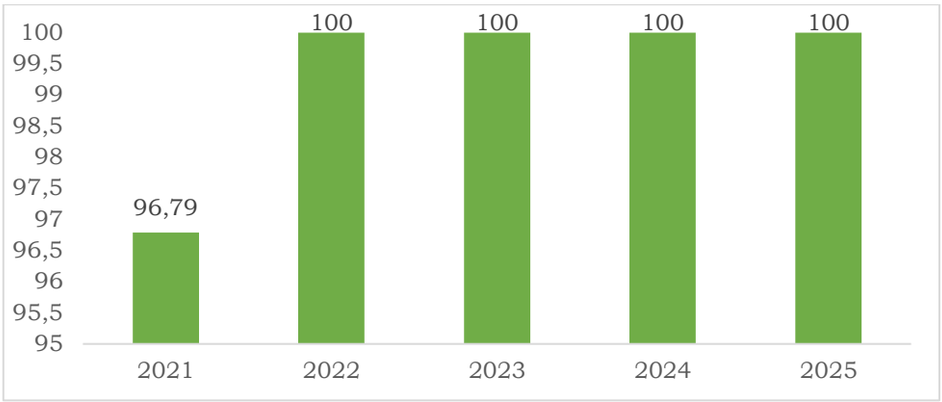
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis

Tahun 2021 – 2025

2.1.2.2.7 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Perkembangan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menunjukkan tren yang sangat membanggakan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, tingkat kepesertaan masyarakat sudah berada di angka yang cukup tinggi, yaitu 96,79%. Namun, lompatan besar terjadi sejak

tahun 2022 hingga tahun 2025, di mana cakupan tersebut berhasil mencapai angka sempurna 100%.



Gambar 2.38

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Tahun 2021 – 2025

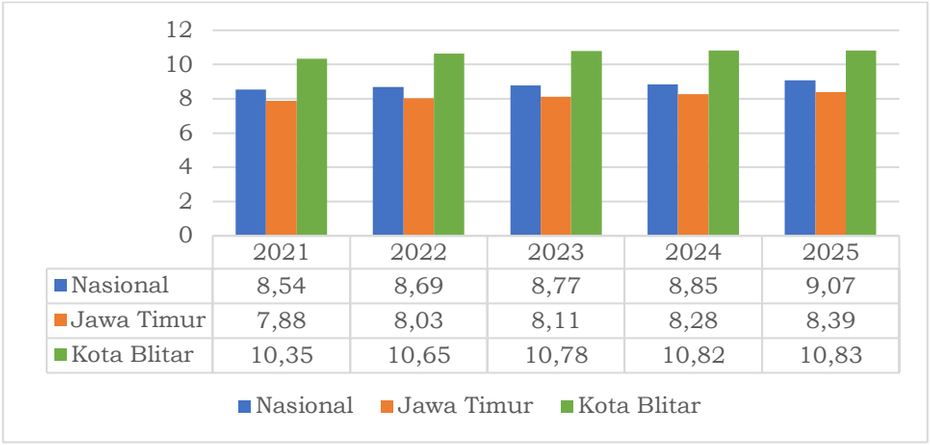
Keberhasilan mempertahankan angka 100% selama empat tahun berturut-turut ini menandakan bahwa target Cakupan Kesehatan Semesta atau *Universal Health Coverage* (UHC) telah tercapai sepenuhnya. Artinya, seluruh lapisan masyarakat kini telah terdaftar dan memiliki akses jaminan perlindungan kesehatan. Stabilitas angka ini juga mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam mengelola data kepesertaan secara konsisten, sehingga meskipun terjadi pertumbuhan penduduk, setiap warga negara baru tetap terakomodasi dalam sistem jaminan kesehatan.

Dengan tercapainya target kepesertaan secara menyeluruh, fokus ke depan tidak lagi hanya sekadar mendata warga, tetapi lebih kepada memastikan bahwa layanan kesehatan yang diterima masyarakat di fasilitas kesehatan benar-benar berkualitas, cepat, dan merata di seluruh wilayah.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.1.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah bukan sekadar deretan angka, melainkan cerminan dari keadilan akses pendidikan. Semakin tinggi dan merata RLS antar wilayah di suatu kabupaten/kota, semakin baik kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut dalam jangka panjang dan hal itu menunjukkan bahwa akses pendidikan sudah menjangkau masyarakat secara luas hingga jenjang yang lebih tinggi.



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	8,54	8,69	8,77	8,85	9,07
Jawa Timur	7,88	8,03	8,11	8,28	8,39
Kota Blitar	10,35	10,65	10,78	10,82	10,83

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2026*

Gambar 2.39

Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2021 – 2025

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Blitar untuk tahun 2025 adalah 10,83 tahun, angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Blitar telah menempuh pendidikan formal hingga kelas 1 SMA atau sederajat (tamat kelas 10).

Permasalahan yang masih sering dijumpai adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan tinggi serta kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu sering kali memaksa anak-anak untuk bekerja membantu keluarga daripada melanjutkan sekolah. Hal ini menyebabkan terdapat anak yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau melanjutkan ke perguruan tinggi.

RLS mencerminkan tingkat partisipasi pendidikan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Pendidikan formal tidak hanya memberikan kemampuan dasar baca-tulis, tetapi juga memperkuat keterampilan literasi fungsional melalui proses belajar yang berkelanjutan.

2.1.2.3.2 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun

Kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur dari kualitas pendidikan. Rata-rata lama sekolah menjadi salah satu indikator penting karena mencerminkan akses dan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin besar peluang masyarakat untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, serta kesempatan kerja yang lebih baik. Di Kota Blitar, rata-rata lama sekolah terus diupayakan peningkatannya melalui pemerataan akses pendidikan dasar hingga menengah, penyediaan beasiswa, serta program pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan non-formal. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pada masyarakat usia 15 tahun ke atas, Rata-rata Lama Sekolah Penduduk menunjukkan data fluktuatif sebagai berikut.

Tabel 2.24

Rata – Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun

Tahun 2021 – 2025

No.	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	10,98	10,95	10,80	10,85	10,95

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

2.1.2.3.3 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Kota Blitar terus menunjukkan progres yang menggembirakan, yang tercermin dari meningkatnya angka partisipasi pendidikan masyarakat secara konsisten. Upaya Pemerintah Kota Blitar dalam menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi tercermin secara nyata melalui tren peningkatan taraf pendidikan penduduknya dari tahun ke tahun.

Tabel 2.25

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2021 – 2025

No.	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	NA	NA	16,34	16,59	25,77

Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2026*

Berdasarkan data terlihat adanya lonjakan kualifikasi yang sangat signifikan. Kenaikan drastis sebesar kurang lebih 9 persen ini menunjukkan efektivitas intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam memperluas aksesibilitas pendidikan tinggi.

Pertumbuhan positif ini didorong secara kuat oleh kebijakan program sekolah gratis yang secara efektif mengurangi beban pengeluaran rumah tangga pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, hadirnya program beasiswa perguruan tinggi dari pemerintah daerah memberikan stimulan langsung bagi siswa berprestasi maupun keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. Kondisi ini diperkuat dengan adanya perguruan tinggi yang berlokasi di wilayah Kota Blitar, sehingga memudahkan akses geografis serta menekan biaya akomodasi bagi penduduk lokal yang ingin menempuh kualifikasi akademik yang lebih tinggi tanpa harus keluar kota.

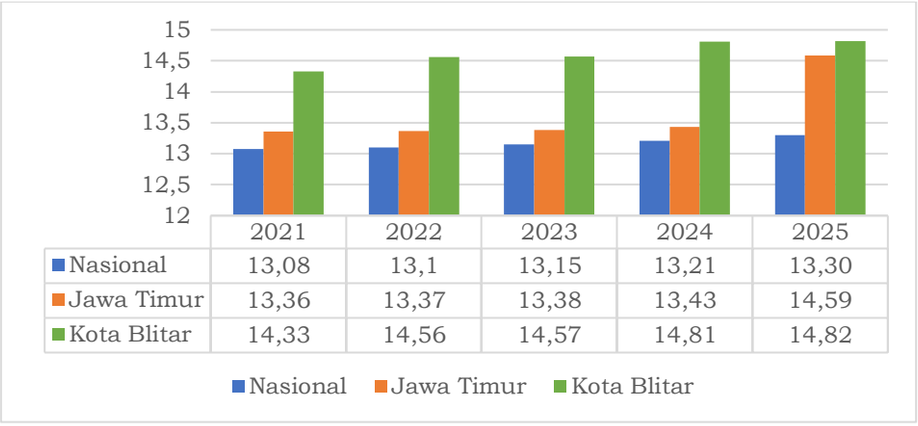
Namun, di balik pencapaian tersebut, masih terdapat tantangan berupa kurangnya motivasi sebagian masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan pandangan terhadap urgensi pendidikan formal di dunia kerja. Sebagai langkah tindak lanjut untuk mengatasi hambatan tersebut dan menjangkau kelompok masyarakat yang tidak menempuh jalur formal, pemerintah akan mengintensifkan sosialisasi mengenai pendidikan non-formal atau pendidikan kesetaraan yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan.

Langkah strategis ini diharapkan dapat memperluas cakupan kualifikasi pendidikan penduduk secara inklusif, sehingga daya saing sumber daya manusia di Kota Blitar dapat terus meningkat secara merata dan berkelanjutan.

2.1.2.3.4 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengukur rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat dihabiskan oleh seorang anak dalam sistem pendidikan formal. Indikator ini mencerminkan harapan lama waktu yang dihabiskan oleh anak-anak untuk bersekolah, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, berdasarkan kondisi pendidikan saat ini. Harapan lama sekolah digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kualitas pendidikan dan perkembangan sosial ekonomi suatu wilayah. Semakin tinggi nilai harapan lama sekolah, semakin besar peluang masyarakat untuk mengakses pendidikan yang lebih lama, yang biasanya berkorelasi dengan peningkatan kualitas hidup dan produktivitas.

Selain itu, harapan lama sekolah berkontribusi sebagai salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi pengetahuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa angka harapan lama sekolah menjadi salah satu indikator strategis dalam mengukur ketercapaian kinerja pembangunan.



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	13,08	13,1	13,15	13,21	13,30
Jawa Timur	13,36	13,37	13,38	13,43	14,59
Kota Blitar	14,33	14,56	14,57	14,81	14,82

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2026*

Gambar 2.40

Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 – 2025

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Blitar pada tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Angka 14,82 tahun merupakan capaian resmi Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Blitar untuk tahun 2025, yang mencerminkan kualitas akses pendidikan yang sangat kompetitif di Kota Blitar. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 (yang berada di angka 14,81 tahun), terdapat kenaikan tipis namun stabil. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Kota Blitar mampu mempertahankan tren positif meskipun secara statistik sudah berada di level yang sangat tinggi.

Harapan Lama Sekolah 14,82 tahun menjadi mesin utama pendongkrak IPM Kota Blitar. Bersama dengan indikator Rata-rata Lama

Sekolah (RLS) yang juga kuat, dimensi pengetahuan di Kota Blitar menjadi salah satu yang paling unggul dibandingkan daerah lain di sekitarnya.

Capaian ini menjadi modal penting bagi Pemerintah Kota Blitar dalam mewujudkan target-target pembangunan jangka menengah, terutama dalam mencetak sumber daya manusia yang kompetitif di tingkat regional maupun nasional, juga merupakan modal sosial yang sangat kuat bagi Kota Blitar, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan investasi yang membutuhkan sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan tinggi.

Tabel 2.26

Jumlah Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kota Blitar) Tahun 2024/2025 Tingkat Sekolah Dasar

No	Kecamatan	Jumlah Siswa (Sekolah Negeri)		Jumlah Siswa (Sekolah Swasta)		Total
		L	P	L	P	
1	Kec. Sukorejo	1	1	0	0	2
2	Kec. Kepanjenkidul	1	0	0	1	2
3	Kec. Sananwetan	1	0	1	0	2
	Kota Blitar	3	1	1	1	6

Sumber data: Portal Satu Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Cut off data: 30 November 2024

Beberapa faktor yang menjadi adanya anak yang tidak bersekolah antara lain:

a. Faktor ekonomi (keterbatasan biaya pendidikan, kebutuhan membantu keluarga).

b. Kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan.

c. Jarak sekolah atau aksesibilitas yang kurang memadai.

d. Kondisi sosial seperti pernikahan dini atau anak bekerja.

e. Disabilitas/anak berkebutuhan khusus.

Komitmen dalam pengentasan ATS melalui program-program strategis yang inklusif menjadi penentu guna memastikan tidak ada satu pun anak Kota Blitar yang tertinggal dari akses pendidikan yang layak dan bermutu. Misalnya dengan meningkatkan intensitas sosialisasi dan pelibatan masyarakat, menyediakan sistem monitoring berbasis data terintegrasi serta penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menjangkau ATS di seluruh wilayah.

2.1.2.3.5 Angka Literasi/Numerasi

Informasi capaian literasi sekolah diperoleh dari salah satu instrumen Asesmen Nasional, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Inti dari AKM adalah penilaian berdasarkan literasi membaca dan numerasi. Dengan mengukur literasi dan numerasi, asesmen nasional mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis dan sistematis. Adapun data capaian persentase satuan

Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional untuk literasi membaca dan numerasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.27

Angka Literasi dan Numerasi Kota Blitar

Tahun 2021-2025

No	Indikator	Jenjang	Angka Literasi dan Numerasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Literasi	SD	62,92	64,49	71,94	70,33	88,12
		SMP	74,12	77,77	84,03	85,77	96,62
2	Numerasi	SD	41,67	47,04	54,19	59,00	84,54
		SMP	74,12	77,77	71,07	71,24	91,73

Sumber : *Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar, 2026*

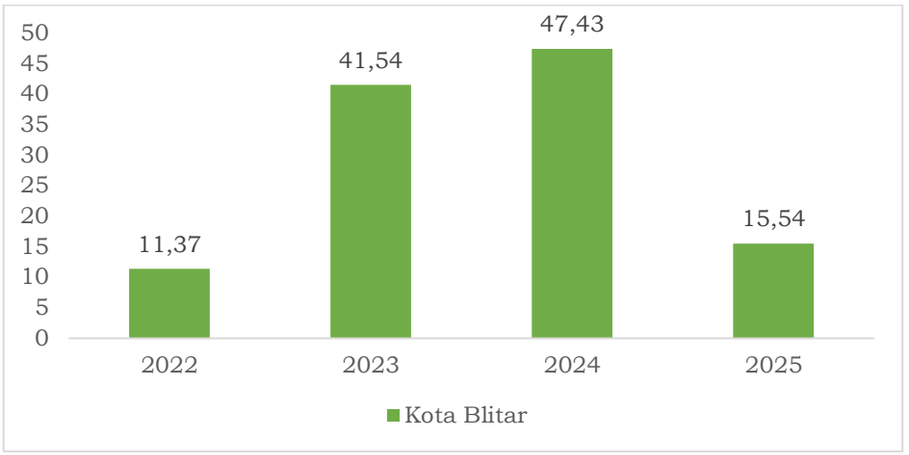
Angka literasi dan numerasi di Kota Blitar menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif, terutama dengan lonjakan signifikan pada tahun 2025. Keberhasilan ini didorong oleh kualitas pembelajaran yang semakin baik serta akses internet yang merata sehingga memungkinkan siswa mengakses berbagai sumber pembelajaran mandiri secara lebih luas.

Namun demikian, akselerasi ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti proporsi pendidik bersertifikasi yang masih berada pada kategori sedang serta kuatnya stigma negatif di kalangan siswa terhadap matematika yang dianggap membosankan dan menakutkan. Selain itu, kegagalan siswa dalam bidang numerasi sering kali disebabkan oleh rendahnya kemampuan literasi baca dalam memahami konteks soal, bukan sekadar ketidakmampuan berhitung.

Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah daerah akan fokus pada kegiatan pengembangan kompetensi melalui pelatihan, bimtek, dan workshop bagi guru. Selain itu, optimalisasi peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) akan diarahkan secara intensif pada pembuatan alat peraga edukatif yang terjangkau serta pemanfaatan aplikasi gamifikasi matematika untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan interaktif.

2.1.2.3.6 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Literasi dikatakan sebagai kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi dalam berbagai bentuk, merupakan fondasi untuk kemajuan individu dan masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat suatu wilayah memiliki kemampuan literasi yang memadai, dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). IPLM dirancang untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat literasi masyarakat dalam berbagai aspek mencakup kemampuan literasi dasar, literasi fungsional, literasi informasi dan digital, literasi sosial dan budaya, serta aksesibilitas.



Sumber: *Perpustakaan Nasional, 2026*

Gambar 2.41

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Tahun 2022 – 2025

Realisasi pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Blitar hingga periode berjalan menunjukkan potret terkini dari tingkat akses dan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat. Perlu menjadi catatan strategis bahwa mulai tahun 2025, telah dilakukan penyesuaian mendasar pada metodologi, dimensi, indikator, serta bobot penghitungan IPLM yang diselaraskan dengan ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan instrumen pengukuran lebih relevan dan akurat dalam merekam dampak layanan literasi di tingkat lokal. Konsekuensi dari adanya reformasi metodologi tersebut menyebabkan angka capaian kinerja pada periode ini bersifat *baseline* baru, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

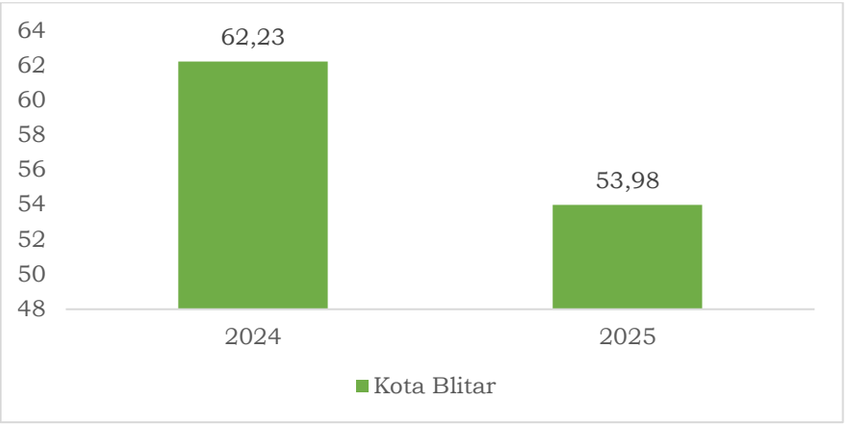
Penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar Tahun 2025 sebesar 15,54 menunjukkan bahwa pembangunan literasi masyarakat Kota Blitar belum memenuhi standar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI. Guna mengoptimalkan capaian Indeks Pembangunan Literasi, Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk mempertegas regulasi pengelolaan perpustakaan daerah, melakukan penyesuaian target kinerja agar tetap selaras dengan kebijakan nasional, serta mengupayakan ketercukupan koleksi dan pemenuhan tenaga perpustakaan yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.1.2.4.1 Indeks Kesejahteraan Sosial

Pemerintah Kota Blitar terus berupaya memantau kualitas hidup masyarakat melalui berbagai instrumen ukur, salah satunya adalah Indeks Kesejahteraan Sosial (IKeSos). Secara konseptual, Indeks Kesejahteraan Sosial (IKeSos) digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan berbagai aspek kehidupan sosial. IKeSos dibangun dari aspek-aspek kesejahteraan sosial yang mencakup dimensi-dimensi utama seperti: Ketahanan Keluarga, Ketersediaan dan Akses terhadap Pelayanan Sosial, Partisipasi Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Layak, Perlindungan Sosial, Pekerjaan dan Pendapatan, dan Lingkungan Sosial. Setiap dimensi diukur menggunakan beberapa indikator, baik yang

bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dan dinilai dengan menggunakan skala tertentu.



Gambar 2.42

Indeks Kesejahteraan Sosial

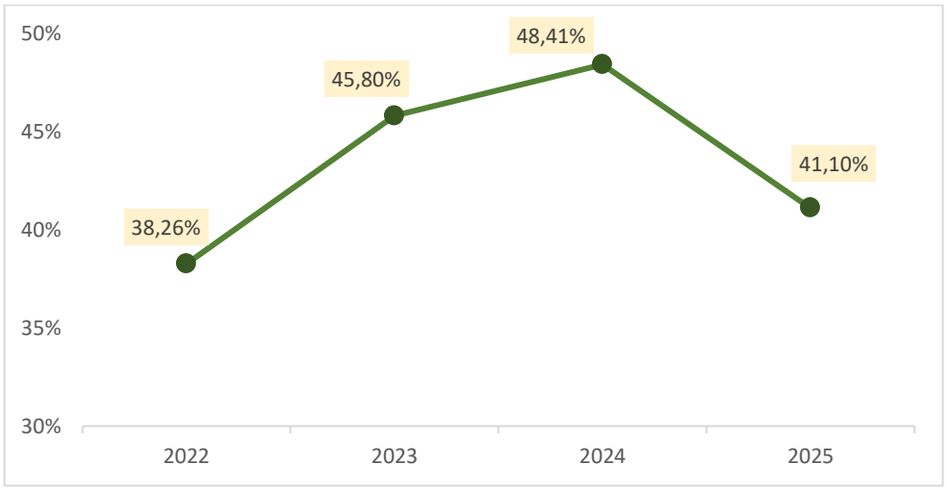
Tahun 2024 – 2025

Indeks Kesejahteraan Sosial Kota Blitar menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2024 angka indeks berada pada 62,23 dan menurun menjadi 53,98 pada tahun 2025. Secara sektoral, capaian ini masih ditopang oleh faktor pendukung berupa kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, mulai dari perumahan (papan), pangan, hingga akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang berjalan dengan baik. Namun, penurunan nilai tersebut dipicu oleh adanya hambatan pada aspek inklusivitas, terutama kurangnya partisipasi aktif dari kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak dalam forum formal perencanaan pembangunan. Kondisi ini diperberat dengan masih lemahnya regulasi daerah yang secara khusus mengatur tentang perlindungan kelompok rentan, sehingga aspirasi mereka belum terakomodasi secara optimal dalam kebijakan publik.

Sebagai langkah strategis ke depan, Pemerintah Kota Blitar perlu segera melakukan tindak lanjut dengan mengarusutamakan keterlibatan kelompok rentan dalam setiap tahapan forum perencanaan pembangunan agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran. Selain itu, diperlukan komitmen kuat untuk mendorong tersusunnya regulasi atau payung hukum yang tegas mengenai perlindungan kelompok rentan guna menjamin hak-hak mereka secara legal dan administratif. Dengan penguatan partisipasi dan regulasi ini, diharapkan Indeks Kesejahteraan Sosial Kota Blitar dapat kembali meningkat dan menciptakan keadilan sosial yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat

2.1.2.4.2 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan sosial tenaga kerja merupakan program perlindungan sosial yang ditujukan untuk pekerja di Indonesia. Program ini bertujuan memberikan jaminan sosial kepada tenaga kerja dan keluarganya dalam menghadapi risiko ekonomi dan sosial, seperti kecelakaan kerja, penyakit, hari tua, atau kehilangan pekerjaan. Berikut grafik Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tahun 2022 – 2025.



Sumber : BPJS Ketenagakerjaan, 2025

Gambar 2.43
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Tahun 2022 – 2025

Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Blitar selama periode Tahun 2022–2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada Tahun 2022 capaian kepesertaan tercatat sebesar 38,26%, kemudian meningkat signifikan pada Tahun 2023 menjadi 45,80%, dan kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2024 menjadi 48,41%. Peningkatan tersebut mencerminkan efektivitas upaya Pemerintah Kota Blitar dalam mendorong perluasan cakupan perlindungan tenaga kerja melalui sosialisasi, penguatan koordinasi dengan pemberi kerja, serta optimalisasi kepesertaan pekerja sektor formal maupun informal.

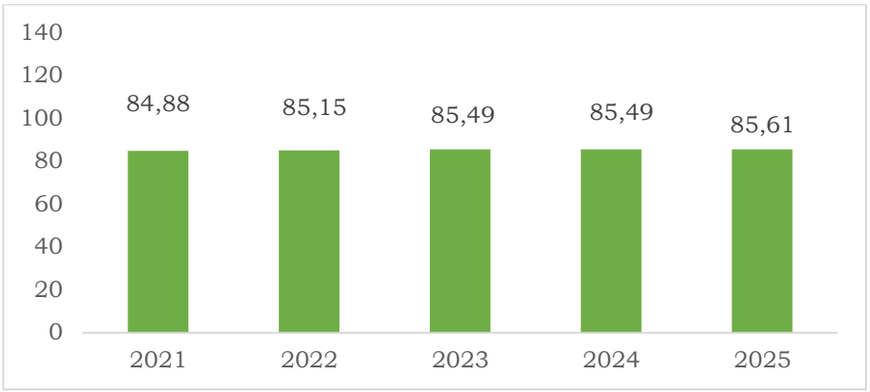
Namun demikian, pada Tahun 2025 capaian kepesertaan tercatat sebesar 41,10%, atau mengalami penurunan sebesar 7,31 poin persentase dibandingkan Tahun 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi ekonomi daerah yang didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang relatif sensitif terhadap fluktuasi ekonomi, sehingga berdampak pada keberlanjutan kepesertaan dan kepatuhan pembayaran iuran. Selain itu, karakteristik ketenagakerjaan di Kota Blitar yang masih didominasi sektor informal turut memengaruhi tingkat kepesertaan, mengingat pekerja sektor informal memiliki tingkat kepatuhan dan keberlanjutan kepesertaan yang lebih dinamis dibandingkan sektor formal. Mobilitas tenaga kerja ke luar daerah serta terbatasnya pertumbuhan lapangan kerja baru juga menjadi faktor yang memengaruhi capaian tahun berjalan.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.1.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan ruang diseminasi riset kebijakan berupa pemetaan kondisi kerukunan umat beragama. Adanya IKUB diharapkan dapat membuat berbagai rumusan atau kebijakan yang dapat membantu mencari solusi yang tepat bagi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan keagamaan di masyarakat.

Selain itu IKUB menjadi acuan bagi pemerintah dalam terus meningkatkan kualitas kerukunan di Kota Blitar.



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

Gambar 2.44

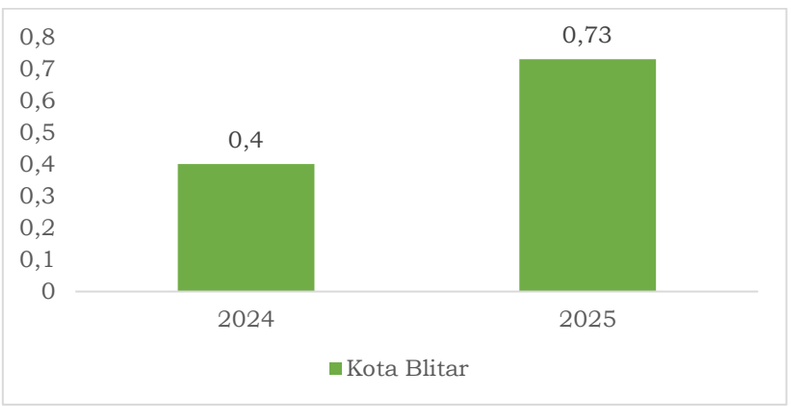
Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kota Blitar 2021-2025

Berdasarkan data di atas, capaian IKUB Kota Blitar menunjukkan tren kenaikan. Konsistensi nilai yang berada di atas rata-rata tersebut mencerminkan bahwa Kota Blitar telah berhasil membangun fondasi toleransi yang kokoh melalui penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta efektivitas program moderasi beragama di tingkat akar rumput. Kondisi ini membuktikan adanya sinergi yang harmonis antara kebijakan pemerintah daerah dengan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga iklim kebinekaan yang kondusif.

2.1.2.5.2 Indeks Zakat Nasional

Pembangunan sektor sosial keagamaan di Kota Blitar terus diarahkan pada optimalisasi potensi lokal sebagai instrumen pendukung kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pengelolaan zakat yang terukur. Sebagai bentuk evaluasi terhadap efektivitas sistem tersebut, realisasi Indeks Zakat Nasional (IZN) Kota Blitar pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,73.



Gambar 2.45

Indeks Zakat Nasional Tahun 2024 – 2025

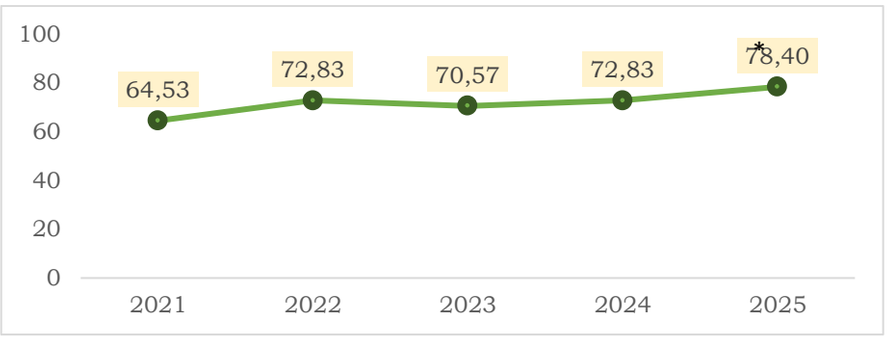
Angka ini merefleksikan performa tata kelola zakat yang berada pada kategori cukup baik, yang didorong oleh eksistensi BAZNAS Kota Blitar sebagai lembaga yang telah terbentuk secara formal, beroperasi secara aktif, serta memiliki program kerja yang berkelanjutan. Kekuatan utama dalam pencapaian ini adalah adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah, baik dalam aspek regulasi maupun fasilitasi kebijakan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) yang terintegrasi dengan upaya pembangunan daerah.

Namun demikian, realisasi penghimpunan dana masih belum mencapai potensi optimalnya. Hal ini dipicu oleh tingkat literasi zakat masyarakat yang masih berada pada kategori sedang, serta pola pendayagunaan yang masih terkonsentrasi pada bantuan konsumtif dibandingkan zakat produktif yang berbasis pemberdayaan ekonomi. Sebagai langkah tindak lanjut strategis, diperlukan penguatan sosialisasi dan edukasi yang lebih masif mengenai urgensi berzakat guna meningkatkan kesadaran kolektif. Dengan mengoptimalkan literasi dan memperluas cakupan zakat produktif, diharapkan kontribusi ZIS dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial di Kota Blitar.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.1.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak. IPA menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan khususnya terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak maupun perlindungan khusus anak.



**data sementara*

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar, 2025

Gambar 2.46

Indeks Perlindungan Anak Kota Blitar Tahun 2021 - 2024

Penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Blitar dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2025) menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Berdasarkan data realisasi, Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Blitar mengalami peningkatan progresif dari angka 64,53 di tahun 2021 menjadi 78,40 pada tahun 2025. Meskipun sempat terjadi fluktuasi pada tahun 2023 (70,57), pemerintah kota berhasil melakukan pemulihan cepat yang tercermin pada lonjakan signifikan di tahun 2025. Capaian angka 78,40 ini mengindikasikan bahwa kualitas pemenuhan hak dan perlindungan

khusus anak di Kota Blitar berada pada jalur yang tepat menuju kategori "Sangat Baik".

Peningkatan indeks yang berkelanjutan ini didorong oleh beberapa faktor kunci, antara lain:

- Komitmen Kebijakan: Adanya komitmen kuat dari Pemerintah Kota Blitar yang diwujudkan melalui alokasi anggaran yang cukup untuk mendukung program-program strategis perlindungan anak.
- Kolaborasi Multisektor: Terjalinnya kerja sama dan sinergi yang harmonis antar instansi pemerintah, lembaga vertikal, serta organisasi kemasyarakatan dalam mengawal isu-isu anak secara terpadu.
- Partisipasi Publik: Meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam melindungi anak, yang ditunjukkan dengan meningkatnya keberanian warga untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungannya.

Di tengah capaian yang menggembirakan, terdapat beberapa tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian khusus:

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Kapasitas operasional pada unit pelaksana masih belum ideal, di mana personil UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) saat ini sangat terbatas (hanya terdiri dari Kepala UPT), sehingga beban kerja dalam penanganan kasus menjadi sangat berat.
- Kendala Metodologi Data: Penghitungan IPA sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian PPPA dengan sumber data utama dari sensus BPS yang tidak dilaksanakan setiap tahun. Hal ini menyebabkan adanya keterbatasan data terkini (*real-time*) untuk melakukan evaluasi performa tahunan secara mandiri di tingkat daerah.

Sebagai upaya akselerasi dan mitigasi hambatan dalam menyongsong perencanaan tahun 2027, Pemerintah Kota Blitar menetapkan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:

- Penguatan Koordinasi Data: Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan BPS Kota Blitar untuk sinkronisasi data indikator anak, serta berkonsultasi secara berkala dengan Dinas PPA Provinsi Jawa Timur dan Kementerian PPPA terkait metodologi penghitungan indeks ter-*update*.
- Penguatan Lembaga Operasional: Mengupayakan penguatan kelembagaan UPT PPA, baik dari sisi penambahan personil maupun peningkatan kapasitas teknis, guna menjamin layanan perlindungan yang lebih responsif.

Tabel 2.28

Jumlah Kasus Perlindungan Anak dan Perempuan Tahun 2021 – 2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah perempuan berhadapan dengan hukum	8	17	9	1	0
1.1	Jumlah perempuan sebagai pelaku	0	0	0	0	0

1.2	Jumlah perempuan sebagai korban	8	17	9	1	25
2	Jumlah anak berhadapan dengan hukum	0	0	1	3	2
2.1	Jumlah anak sebagai pelaku	0	0	0	1	8
2.2	Jumlah anak sebagai korban	0	0	1	2	44
2.3	Jumlah anak sebagai saksi	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar, 2026

Dalam upaya strategis untuk meningkatkan nilai Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Blitar, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar secara konsisten melaksanakan upaya pencegahan eksploitasi anak. Langkah ini diwujudkan melalui pemberian edukasi yang masif dan pendampingan intensif kepada warga, terutama bagi mereka yang tengah menghadapi masalah ketahanan keluarga. Fokus utama intervensi diarahkan pada keluarga yang memiliki kerentanan sosial dan ekonomi yang berpotensi memanfaatkan anak untuk kegiatan yang merugikan perkembangan fisik maupun mental mereka.

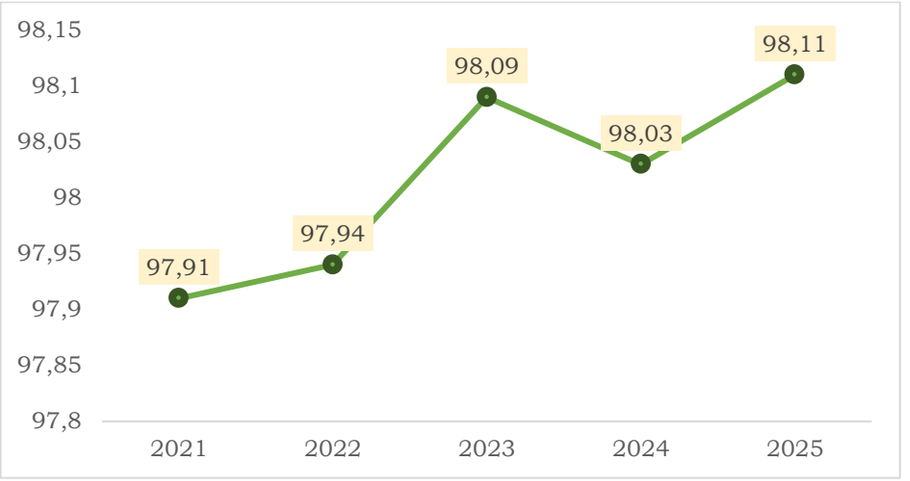
Berdasarkan data pelaporan kekerasan terhadap anak, tercatat dinamika angka yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, jumlah anak yang terdata sebagai korban adalah sebanyak 2 anak, sementara pada tahun 2025, angka pelaporan meningkat menjadi 44 anak.

Peningkatan angka pelaporan dari 2 anak menjadi 44 anak ini tidak serta merta menunjukkan penurunan kualitas perlindungan anak di Kota Blitar. Sebaliknya, lonjakan data ini dipandang sebagai indikator keberhasilan program sosialisasi dan edukasi yang dijalankan oleh Dinas P3AP2KB. Melalui pendekatan yang humanis dan edukatif, kesadaran masyarakat meningkat secara drastis sehingga korban maupun keluarga kini memiliki keberanian untuk melapor.

Terbukanya kasus-kasus yang selama ini tersembunyi (fenomena gunung es) memungkinkan pemerintah untuk memberikan penanganan dan perlindungan yang lebih tepat sasaran, yang pada akhirnya akan menjadi fondasi kuat dalam mencapai target peningkatan nilai IPA Kota Blitar secara berkelanjutan.

2.1.2.6.2 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam hal kualitas hidup laki-laki dan perempuan dari dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Capaian pembangunan manusia Kota Blitar di bidang kesetaraan gender semakin menunjukkan perbaikan. Hal ini dapat diketahui dari realisasi IPG Kota Blitar yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.47

Indeks Pembangunan Gender Kota Blitar

Tahun 2021 – 2025

Pembangunan berbasis gender di Kota Blitar dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat secara positif. Berdasarkan data statistik, angka IPG Kota Blitar pada tahun 2021 dimulai dari 97,91 dan terus menanjak hingga mencapai puncaknya pada tahun 2025 di angka 98,11. Meskipun sempat mengalami sedikit koreksi pada tahun 2024 ke angka 98,03, stabilitas indeks yang tetap berada di atas angka 97 menunjukkan bahwa kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan di Kota Blitar, yang diukur melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, berada pada tingkat kesetaraan yang sangat tinggi atau hampir setara.

Keberhasilan dalam menjaga stabilitas IPG ini didorong oleh faktor pendukung berupa komitmen regulasi dan kelembagaan yang sangat kuat dari Pemerintah Kota Blitar. Landasan hukum utama telah ditetapkan melalui Perda No. 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), yang diperkuat dengan Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2024 sebagai petunjuk pelaksanaannya. Secara operasional, komitmen ini diwujudkan melalui pembentukan berbagai struktur strategis, mulai dari Kelompok Kerja (Pokja) PUG, Tim Teknis Evaluasi Pembangunan Responsif Gender, hingga Tim Penggerak PUG melalui serangkaian SK Walikota yang diterbitkan pada tahun 2023 dan 2024. Adanya kerangka regulasi dan kelembagaan yang komprehensif ini memastikan bahwa perspektif gender telah terintegrasi dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran daerah.

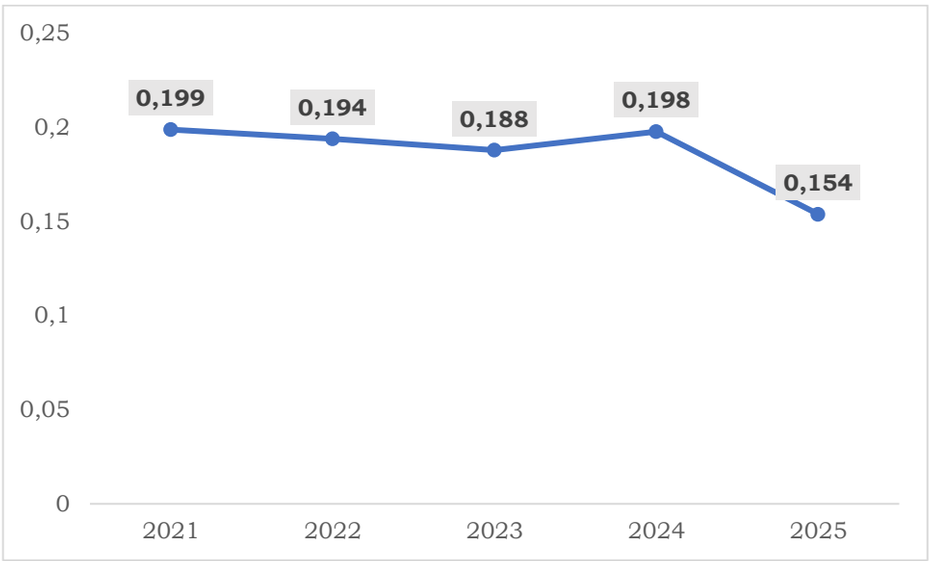
Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan kesenjangan gender belum sepenuhnya tereliminasi. Tantangan utama terletak pada dimensi ekonomi dan pendidikan, di mana standar hidup layak yang diukur dari pendapatan per kapita menunjukkan bahwa laki-laki masih memiliki perolehan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Selain itu, pada komponen pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan masih tercatat lebih rendah daripada laki-laki. Kesenjangan pada dua indikator penyusun IPG ini mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih spesifik guna mendorong partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi produktif serta akses pendidikan yang lebih tinggi.

Sebagai langkah tindak lanjut untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian IPG di masa mendatang, Pemerintah Kota Blitar akan mengintensifkan koordinasi, advokasi, serta sosialisasi dan pelatihan PUG

secara berkelanjutan. Langkah ini akan dibarengi dengan mekanisme evaluasi dan monitoring yang ketat terhadap pelaksanaan anggaran responsif gender di seluruh perangkat daerah. Selain itu, sinkronisasi data akan diperkuat melalui koordinasi dan monitoring evaluasi (monev) secara intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap progres pembangunan gender terekam secara akurat dan objektif, sehingga kebijakan yang diambil di masa depan dapat lebih presisi dalam menutup celah kesenjangan yang masih ada.

2.1.2.6.3 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan gender di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi politik, dan ekonomi. Semakin rendah nilai IKG, semakin kecil ketimpangan gender yang ada di suatu daerah. Sebaliknya, semakin tinggi nilai IKG, semakin besar ketimpangan gender yang ada. Realisasi Indeks Ketimpangan Gender Kota Blitar tahun 2021 sampai tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2024

Gambar 2.48

Indeks Ketimpangan Gender Kota Blitar Tahun 2021 – 2025

Selama periode tahun 2021–2025, nilai indikator menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif namun secara keseluruhan mengalami perbaikan. Pada tahun 2025 nilai indikator kembali menurun secara signifikan menjadi 0,154, atau merupakan capaian terendah selama lima tahun terakhir. Indikator ini merupakan indikator yang semakin kecil nilainya menunjukkan kondisi yang semakin baik, maka capaian tahun 2025 mencerminkan peningkatan kinerja yang cukup baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan mulai memberikan dampak positif terhadap perbaikan indikator dimaksud. Ke depan, Pemerintah Kota Blitar perlu mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan sinergi antar perangkat daerah, peningkatan efektivitas pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan agar tren perbaikan dapat terus dipertahankan dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Angka IKG dipengaruhi oleh ketercapaian faktor-faktor pembentuknya. Permasalahan yang masih ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Kesenjangan di dimensi pemberdayaan dan pasar tenaga kerja

   Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi (kesempatan kerja, jabatan, penghasilan) belum setara dengan laki-laki.

2. Masih rendahnya representasi dan pengambilan keputusan perempuan

   Masih terdapat keterbatasan keterlibatan perempuan dalam posisi pengambilan kebijakan politik dan organisasi, yang menjadi penyumbang IKG.

3. Perbaikan Dimensi Kesehatan Reproduksi Kurang Signifikan

   Meski ada sedikit perbaikan pada indikator usia kawin perempuan <20 tahun saat melahirkan pertama (MHPK20) – dari 0,155 ke 0,154 – peningkatan ini belum signifikan untuk menurunkan IKG secara keseluruhan.

Pemerintah Kota Blitar mempunyai komitmen yang kuat untuk mendorong pemberdayaan perempuan di Kota Blitar. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 menjadi landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender di wilayah Kota Blitar.

2.1.2.6.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pengarusutamaan gender di Kota Blitar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Kota Blitar menunjukkan tren yang sangat positif dan meningkat secara signifikan dalam lima tahun terakhir. Puncaknya pada tahun 2025, TPAK Perempuan mencapai angka 67,37%, yang merupakan titik tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.49

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

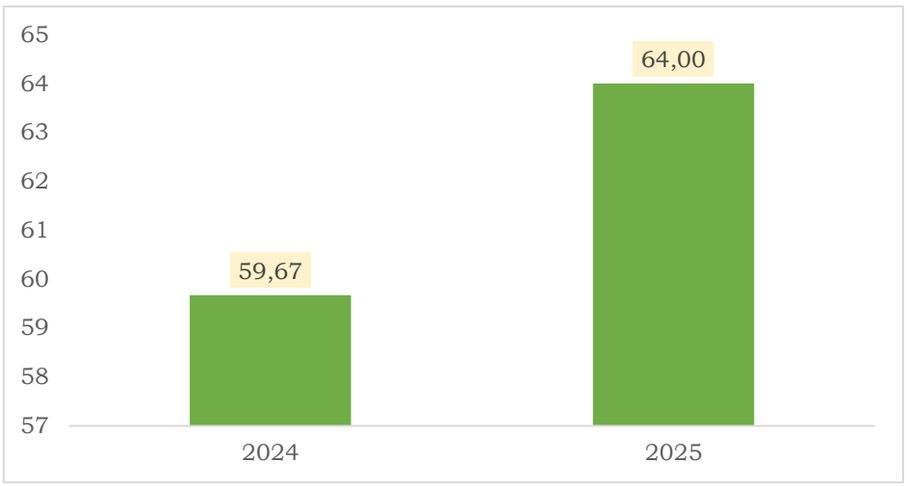
Tahun 2021 – 2025

Peningkatan angka ini mengukuhkan realitas bahwa perempuan di Kota Blitar kini memiliki peran yang sangat aktif dalam memperkuat ekonomi keluarga. Kontribusi mereka tidak lagi terbatas pada ranah domestik seperti

pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga semata, melainkan telah meluas menjadi pilar penyangga pendapatan keluarga. Keberhasilan ini salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia perempuan yang didukung oleh berbagai program pelatihan keterampilan dan kemudahan akses modal bagi UMKM di tingkat lokal. Dengan partisipasi yang mencapai 67,37%, perempuan di Kota Blitar membuktikan kemandirian ekonominya tanpa meninggalkan nilai-nilai keluarga. Tantangan utama dalam meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan adalah menjaga stabilitas angka partisipasi ini serta memastikan adanya lingkungan kerja yang tetap responsif terhadap kebutuhan perempuan, sehingga kontribusi mereka dalam pembangunan daerah dapat terus dioptimalkan secara berkelanjutan.

2.1.2.6.5 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dirumuskan untuk memotret situasi pembangunan pemuda dalam disagregasi data yang memadai, baik dari segi tema maupun wilayah administrasi yang dicakup. IPP disusun berdasarkan tiga lapisan domain pembangunan pemuda yang menjadi ruang lingkup IPP, yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dan diskriminasi terhadap pemuda di berbagai bidang. Melalui tiga lapisan ini, IPP menangkap aspek lintas bidang dari pembangunan pemuda dan mengakomodasi peran pemuda sebagai objek dan subjek pembangunan. Dalam kerangka penyusunan IPP, aspek-aspek pembangunan pemuda tersebut dikelompokkan ke dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunnya. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan alat ukur pembangunan pemuda di lima domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2025

Gambar 2.50

Indeks Pembangunan Pemuda Kota Blitar

Tahun 2024 - 2025

Perkembangan kualitas kepemudaan di Kota Blitar menunjukkan tren yang sangat positif, sebagaimana tercermin dalam capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang meningkat signifikan dari angka 59,67 pada tahun 2024 menjadi 64,00 pada tahun 2025. Kenaikan sebesar 4,33

poin ini mengindikasikan bahwa intervensi program yang dilakukan Pemerintah Kota Blitar telah berjalan di jalur yang tepat dalam upaya meningkatkan daya saing dan kualitas hidup pemuda.

Keberhasilan peningkatan indeks ini didorong secara dominan oleh performa luar biasa pada Domain Kesehatan dan Kesejahteraan serta Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja. Kedua sektor ini mencapai nilai tertinggi yakni 90,00, yang menandakan bahwa pemuda di Kota Blitar memiliki akses kesehatan yang baik serta terserap secara optimal dalam pasar kerja maupun ekosistem kewirausahaan. Kondisi ekonomi yang stabil dan jaminan kesehatan yang merata menjadi fondasi utama (faktor pendukung) bagi pemuda untuk terus produktif dan mandiri.

Namun demikian, analisis data juga mengungkap adanya tantangan krusial pada Domain Partisipasi dan Kepemimpinan yang menjadi faktor penghambat utama dengan nilai indeks hanya sebesar 10,00. Angka yang rendah ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemandirian ekonomi dengan keterlibatan pemuda dalam forum-forum pengambilan keputusan formal maupun organisasi kepemudaan. Hal ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah bahwa aspek "suara pemuda" dalam pembangunan masih memerlukan perhatian serius dan perbaikan struktural.

Sebagai langkah strategis ke depan, Pemerintah Kota Blitar telah merumuskan tindak lanjut yang berfokus pada penguatan kapasitas organisasi kepemudaan. Prioritas akan diarahkan pada pembinaan kepemimpinan yang intensif serta pemberian akses terhadap pendanaan, pelatihan, dan kolaborasi lintas sektor. Selain itu, peran Duta Pemuda akan dioptimalkan melalui kontribusi nyata di masyarakat seperti kampanye literasi digital dan kegiatan sosial kemasyarakatan guna memastikan peran aktif pemuda tidak hanya terlihat pada data ekonomi, tetapi juga dalam kepemimpinan dan pengabdian sosial.

2.1.2.6.6 Indeks Pembangunan Olahraga

Pemerintah Kota Blitar berkomitmen penuh dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan sektor keolahragaan yang terukur dan berkelanjutan. Sebagai representasi dari keberhasilan pembangunan manusia dan kebugaran masyarakat, Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Kota Blitar pada tahun 2025 telah mencapai angka 0,569.

Nilai Indeks Pembangunan Olahraga saat ini didukung oleh faktor sarana dan prasarana olahraga yang secara umum berada dalam kondisi baik dan layak guna. Ketersediaan fasilitas yang terawat menjadi modal dasar bagi masyarakat maupun atlet untuk menjalankan aktivitas fisik dan latihan secara rutin. Kondisi infrastruktur yang representatif ini diharapkan dapat terus menstimulasi minat masyarakat terhadap pola hidup sehat sekaligus mendukung proses pencetakan bibit-bibit atlet potensial.

Namun demikian, terdapat tantangan signifikan yang menjadi faktor penghambat, yakni adanya penurunan hasil kompetisi pada periode terakhir. Hal ini terlihat dari perolehan medali dan peringkat Kota Blitar yang mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Sebagai langkah perbaikan yang komprehensif, pemerintah daerah telah menyusun serangkaian rencana tindak lanjut yang fokus pada penguatan data dan manajemen atlet. Langkah pertama adalah penyediaan sistem informasi pemetaan dan evaluasi atlet daerah serta pengembangan sistem deteksi bakat dini guna menjaring atlet muda secara lebih objektif. Selain itu, akan dilakukan optimalisasi Pusat Latihan Atlet Berbasis

Komunitas dengan memfokuskan sumber daya pada cabang olahraga unggulan yang memiliki potensi medali tinggi.

2.1.2.6.7 Indeks Pelestarian Budaya

Sebagai kota yang menyandang status sebagai pusat sejarah dan perjuangan bangsa, Kota Blitar terus berkomitmen untuk memperkuat jati diri daerahnya melalui berbagai upaya pelestarian nilai-nilai tradisi dan sejarah lokal. Dalam kerangka pembangunan berbasis kebudayaan, pengukuran keberhasilan pelestarian tersebut tidak lagi hanya dilihat secara kualitatif, namun juga diwujudkan melalui perangkat manajerial berupa Indeks Pelestarian Kebudayaan. Dalam implementasinya, pencapaian angka indeks ini sangat dipengaruhi oleh kelengkapan data administratif serta status legalitas dari aset-aset budaya yang dimiliki daerah.

Pada tahun 2025, capaian Indeks Pelestarian Kebudayaan Kota Blitar tercatat sebesar 50,29, sebuah angka yang merefleksikan kondisi transisi dalam sistem pengukuran kinerja kebudayaan di daerah. Secara konseptual, indeks ini dibangun di atas tiga pilar utama dengan mempertimbangkan tingkat peran dan kontribusi setiap dimensi terhadap keberlanjutan pelestarian kebudayaan dengan struktur pembobotan yang menempatkan Dimensi Perlindungan Warisan Budaya Lokal dan Dimensi Partisipasi Masyarakat sebagai pondasi utama dengan bobot masing-masing sebesar 35%. Hal ini karena keduanya merupakan pondasi utama dalam menjaga keberadaan serta menghidupkan praktik kebudayaan di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Regenerasi dan Keberlanjutan Budaya diberikan bobot 30% karena posisinya sebagai hasil jangka panjang yang sangat bergantung pada keberhasilan dua pilar sebelumnya. Selain itu, penentuan bobot ini juga mempertimbangkan praktik perhitungan indeks pada daerah lain sebagai pembanding.

Namun, realisasi angka 50,29 tersebut belum menggambarkan kekuatan budaya Kota Blitar secara utuh karena adanya kendala teknis dalam variabel perhitungan. Angka tersebut hanya bersumber dari akumulasi dimensi partisipasi masyarakat dan dimensi regenerasi, sedangkan dimensi Perlindungan Warisan Budaya Lokal belum dapat diperhitungkan karena ketidaktersediaan data. Hal inilah yang menyebabkan nilai indeks akhir tampak kecil secara statistik, mengingat ada satu dimensi belum bisa memberikan kontribusi nilai. Dengan demikian, rendahnya angka IPK tahun 2025 menjadi indikator bagi Pemerintah Kota Blitar untuk mengakselerasi proses sertifikasi dan penetapan status Cagar Budaya terhadap warisan-warisan lokal yang ada, agar di masa mendatang upaya pelestarian fisik tersebut dapat terkonversi secara sah dalam penghitungan indeks yang lebih representatif.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.3.1.1 Angka Ketergantungan

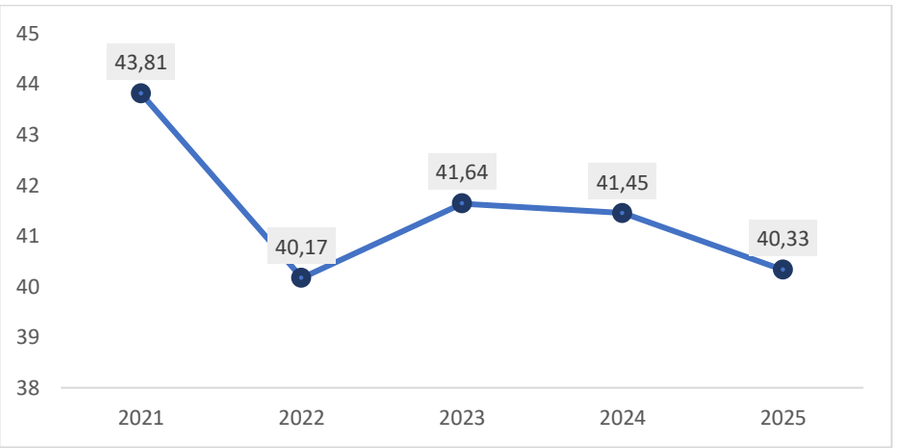
Angka Ketergantungan atau Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah indikator yang secara kasar dapat digunakan untuk melihat keadaan ekonomi suatu daerah. Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif (kelompok umur 15-64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif (kelompok umur <15 tahun dan >65 tahun).

Angka rasio ketergantungan yang semakin tinggi menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.29
Rasio Ketergantungan Kota Blitar Tahun 2021 – 2025

No	Kelompok Umur	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025 (*semester1)
1	0 - 14 - Umur Muda	37.594	32.448	34.716	34.390	32.549
2	15 - 64 - Umur Produktif	110.037	113.121	112.808	113.973	115.242
3	65 + - Umur Tua	10.613	12.989	12.257	12.850	13.927
4	Jumlah penduduk usia tidak produktif	48.207	45.437	46.973	47.240	46.476
5	Rasio ketergantungan	43,81	40,17	41,64	41,45	40,33

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, 2026

Gambar 2.51
Rasio Ketergantungan Kota Blitar Tahun 2021 – 2025

Berdasarkan grafik di atas, rasio ketergantungan di Kota Blitar selama kurun waktu 2021 - 2025 menunjukkan tren penurunan, dengan angka 40,33 % pada 2025 (Semester I). Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2025 setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 40 penduduk non produktif. Angka rasio ketergantungan yang cenderung menurun tiap tahun menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif semakin besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif yang berarti beban tanggungan usia produktif berkurang serta terdapat peningkatan potensi bonus demografi.

2.1.3.1.2 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

Penciptaan lingkungan yang aman dan kondusif merupakan prasyarat mutlak dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat serta mewujudkan kualitas hidup yang berkelanjutan di Kota Blitar. Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan keamanan publik adalah proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Indikator ini tidak hanya memotret kondisi keamanan secara objektif, tetapi juga menangkap persepsi subjektif masyarakat terhadap stabilitas lingkungan di sekitar mereka.

Tabel 2.30

Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Tahun 2024-2025

No	Indikator	Tahun	
		2024	2025
1	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	93,29	94,36

Berdasarkan data realisasi tahun 2025, angka proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya di Kota Blitar menunjukkan realisasi yang sangat positif, yakni sebesar 94,36%. Tingginya angka ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Blitar memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap keamanan lingkungan pemukimannya, baik pada siang maupun malam hari. Capaian ini merupakan hasil dari sinergi yang kuat antara penguatan peran perlindungan masyarakat, efektivitas patroli keamanan terpadu, serta optimalisasi sarana prasarana pendukung seperti peningkatan cakupan Penerangan Jalan Umum (PJU) hingga ke wilayah pemukiman padat penduduk.

Meskipun angka 94,36% menunjukkan kondisi yang sangat stabil, tantangan ke depannya adalah mempertahankan konsistensi angka tersebut di tengah dinamika urbanisasi dan pertumbuhan aktivitas kota yang semakin kompleks. Dengan menjaga angka rasa aman di atas ambang psikologis yang tinggi, diharapkan Kota Blitar tetap menjadi tempat tinggal yang nyaman, inklusif, dan mendukung produktivitas seluruh lapisan masyarakat.

2.1.3.1.1 Angka Partisipasi Masyarakat dalam Proses Politik

Pada Pemilu serentak 14 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar mencatat tingkat partisipasi pemilih yang sangat tinggi, mencapai 85,14 persen dari total daftar pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) sejumlah 120.742 orang, atau sekitar 102.832 pemilih yang menggunakan hak suaranya.

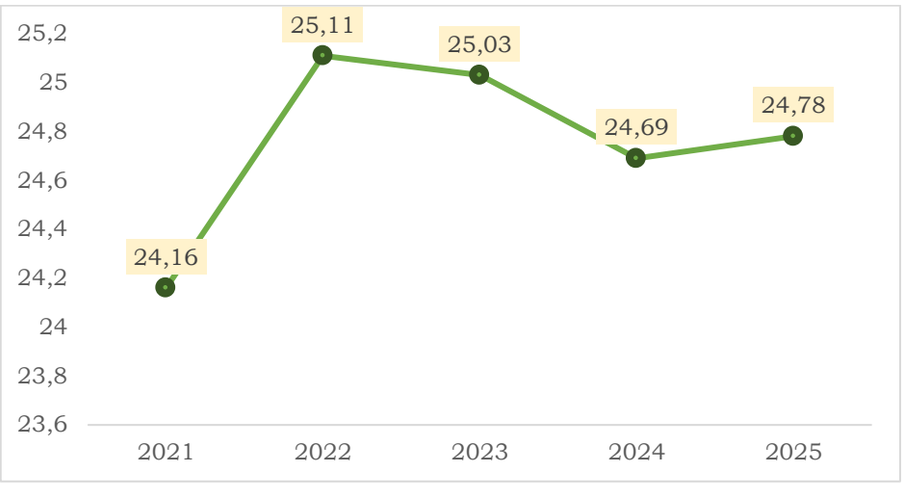
Hal ini merupakan angka partisipasi tertinggi di Kota Blitar sejak Pemilu langsung pertama pada tahun 2004. Keberhasilan ini didorong oleh sosialisasi intensif dari KPU yang menargetkan kalangan Gen Z dan milenial, serta pemilihan petugas KPPS dari rentang usia produktif (17–55 tahun). Secara keseluruhan, Pemilu 2024 di Kota Blitar berlangsung dengan tingkat

kehadiran pemilih yang tinggi, menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.1.3.2.1 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Sektor perdagangan termasuk perdagangan besar dan eceran serta reparasi kendaraan memegang peranan vital sebagai penggerak ekonomi daerah dengan kontribusi yang stabil di angka 24-25%. Setelah mengalami lonjakan kinerja di tahun 2022, sektor ini sempat melewati fase penyesuaian selama dua tahun akibat tantangan pasar dan perubahan daya beli masyarakat. Namun, fase tersebut berhasil dilalui dengan baik, dibuktikan dengan tren positif yang kembali menguat pada tahun 2025. Kembalinya pertumbuhan ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan memiliki daya tahan (*resilience*) yang kuat dan mampu beradaptasi dengan kondisi ekonomi terkini.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2025

Gambar 2.51

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Blitar

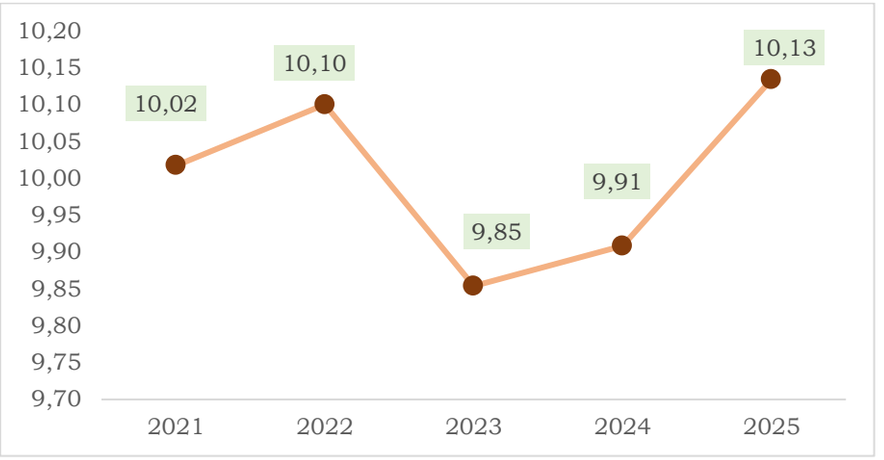
Tahun 2021 – 2025

Dominasi sektor perdagangan didukung oleh aktivitas di pasar tradisional dan modern, UMKM, serta pelayanan reparasi kendaraan, yang mendapat dorongan dari berbagai *event* ekonomi lokal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penguatan sektor perdagangan tidak hanya memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan PDRB, tetapi juga menjadi penggerak utama dinamika ekonomi serta penyerapan tenaga kerja di Kota Blitar.

Ke depan, fokus kebijakan perlu diarahkan pada penguatan daya saing pelaku usaha serta menjaga stabilitas daya beli masyarakat agar momentum pemulihan ini dapat terus berlanjut dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan daerah.

2.1.3.2.2 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Struktur ekonomi Kota Blitar dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2025) menunjukkan dinamika yang positif pada sektor sekunder, khususnya industri pengolahan. Berdasarkan data Rasio PDRB Industri Pengolahan atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), sektor ini terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan nilai tambah ekonomi daerah dengan rata-rata kontribusi di kisaran 10%.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Gambar 2.52

Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Blitar

Tahun 2021 – 2025

Pada tahun 2021 dan 2022, sektor industri pengolahan menunjukkan performa yang stabil dengan rasio masing-masing sebesar 10,02% dan 10,10%. Meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2023 hingga menyentuh titik terendah di angka 9,85% yang dipengaruhi oleh penyesuaian pasar pasca pandemi dan fluktuasi harga bahan baku, sektor ini mampu melakukan perbaikan secara cepat pada tahun-tahun berikutnya.

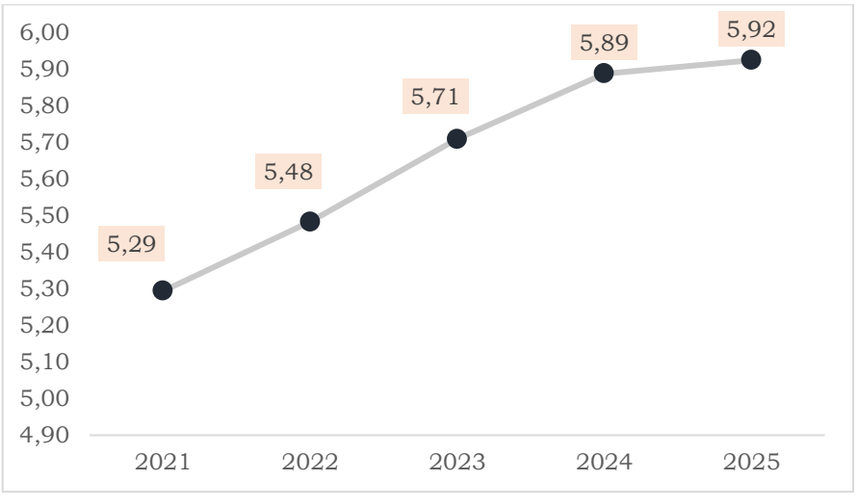
Akselerasi pertumbuhan mulai terlihat pada tahun 2024 (9,91%) dan mencapai puncaknya pada tahun 2025 dengan capaian sebesar 10,13%. Capaian tahun 2025 ini merupakan level tertinggi dalam lima tahun terakhir, yang mengindikasikan bahwa kebijakan pendampingan terhadap industri kecil dan menengah telah berjalan efektif. Kondisi ini mencerminkan penguatan struktur ekonomi Kota Blitar yang semakin tangguh dan mulai bergeser ke arah sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Peningkatan rasio ini diharapkan dapat terus terjaga melalui optimalisasi iklim investasi dan kemudahan akses permodalan, sehingga sektor industri pengolahan dapat menjadi motor penggerak utama dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi daerah di periode perencanaan selanjutnya.

2.1.3.2.3 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum adalah proporsi atau persentase kontribusi sektor akomodasi (perhotelan) dan penyediaan makanan serta minuman terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dalam periode tertentu. Sektor ini merupakan bagian dari sektor pariwisata dan perdagangan, yang mencakup kegiatan seperti penyediaan penginapan (hotel, villa, hostel), restoran, kafe, dan usaha kuliner

lainnya. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kota Blitar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersaji pada tabel berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.53

Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum Kota Blitar

Tahun 2021 – 2025

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Blitar menunjukkan tren pertumbuhan yang positif selama periode 2021–2025. Berdasarkan data Rasio PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), sektor ini berhasil memperkuat posisinya sebagai salah satu penopang ekonomi kota yang berbasis jasa dan pariwisata. Hal ini juga mengindikasikan bahwa sektor akomodasi dan makan minum memiliki peran penting dalam perekonomian Kota Blitar sebagai kota tujuan destinasi pariwisata.

Pada tahun 2021, kontribusi sektor ini tercatat sebesar 5,29%. Seiring dengan pulihnya mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata, rasio ini terus mengalami kenaikan berkelanjutan sampai dengan tahun 2025. Kenaikan yang konsisten ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengaktivasi pusat-pusat kuliner ekonomi kreatif serta optimalisasi daya tarik wisata religi dan sejarah di Kota Blitar.

Sektor ini tetap terjaga dengan capaian rasio sebesar 5,89% pada tahun 2024 dan mencapai puncaknya pada tahun 2025 dengan angka 5,92%. Pertumbuhan yang stabil menunjukkan bahwa sektor akomodasi dan makan minum memiliki daya tahan yang tinggi serta mampu menyerap permintaan domestik maupun kunjungan wisatawan secara optimal.

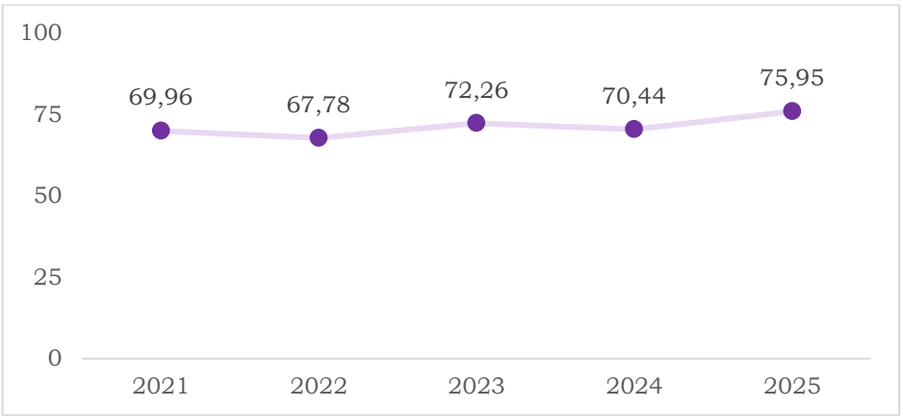
Secara makro, peningkatan rasio ini menegaskan terjadinya transformasi struktur ekonomi Kota Blitar menuju sektor tersier yang lebih bernilai tambah. Ke depan, penguatan integrasi antara sektor pariwisata, jasa akomodasi, dan industri pengolahan (kuliner) menjadi kunci utama untuk mempertahankan tren positif ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.1.3.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, sering disebut sebagai TPAK, merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana

angkatan kerja berkontribusi terhadap jumlah penduduk usia sepuluh tahun ke atas dalam suatu wilayah. TPAK adalah indikator yang berguna untuk menganalisis ketersediaan tenaga kerja dalam suatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin baik kondisi ketenagakerjaan wilayah tersebut. Semakin tinggi TPAK berarti semakin banyak tenaga kerja yang siap berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Selama periode 2021-2022, TPAK di Kota Blitar mengalami penurunan, namun pada tahun 2023 nilai TPAK mengalami kenaikan dari 67,78 menjadi 72,26 persen. Tahun 2024 mengalami penurunan 70,44. Hal ini disebabkan kurangnya tenaga kerja yang disebabkan salah satunya migrasi tenaga kerja dari wilayah lain. Pada tahun 2025 kembali naik cukup signifikan sebesar 75,95. Pemerintah Kota Blitar perlu mengantisipasi dengan memastikan penduduk usia kerja memiliki keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Gambar 2.54

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Blitar

Tahun 2021 – 2025

Tabel 2.31
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Blitar Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2021 – 2025

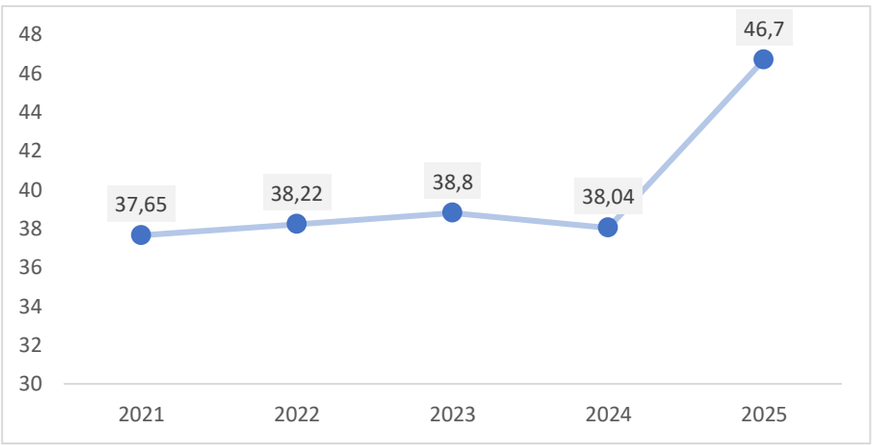
No.	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	81,32	79,79	80,91	82,02	84,65
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	59,04	56,23	63,87	59,23	67.37
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,96	67,78	72,26	70,44	75,95

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, 2026

2.1.3.2.5 Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal

Proporsi tenaga kerja yang terserap dalam sektor formal di Kota Blitar menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun 2021 – 2025. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 46,7 persen dari total penduduk yang bekerja, berstatus formal, sisanya bekerja di sektor informal. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2024 (38,04 persen).

Meski mayoritas tenaga kerja masih berada di sektor informal, tren menuju peningkatan ketenagakerjaan formal ini mencerminkan perbaikan regulasi, peningkatan akses terhadap pekerjaan resmi, dan keberhasilan program pengembangan industri lokal. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja formal di Kota Blitar semakin tumbuh sebagai fondasi penting dalam meningkatkan kualitas lapangan kerja dan stabilitas ekonomi daerah.



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, 2026

Gambar 2.55

Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal

Tahun 2021 – 2025

2.1.3.2.6 Proporsi Jumlah Usaha Mikro

Proporsi jumlah usaha mikro di Kota Blitar memberikan gambaran mengenai tingkat kemandirian ekonomi dan daya serap sektor informal terhadap angkatan kerja di daerah tersebut. Dengan angka realisasi sebesar 16,33%, rasio ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 penduduk usia produktif (rentang usia 15 hingga 64 tahun), terdapat sekitar 16 orang yang mengelola atau memiliki unit usaha mikro. Angka ini mencerminkan dinamika ekonomi lokal yang cukup aktif, di mana sektor mikro menjadi salah satu katup penyelamat dalam penyediaan lapangan kerja mandiri di tengah terbatasnya sektor formal.

Tingginya keterlibatan penduduk usia produktif dalam usaha mikro menunjukkan potensi kewirausahaan yang besar, namun sekaligus memberikan tantangan bagi pemerintah daerah. Tantangan tersebut terletak pada bagaimana meningkatkan produktivitas dari unit-unit usaha ini agar tidak hanya sekadar bertahan hidup, tetapi mampu naik kelas menjadi usaha kecil atau menengah. Hal ini penting karena tingginya jumlah usaha mikro terhadap usia produktif sering kali berkorelasi dengan upaya masyarakat dalam mencari alternatif pendapatan secara mandiri.

Indikator ini merupakan ukuran penting dalam mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Kota Blitar. Realisasi sebesar 16,33% dapat digunakan sebagai basis data untuk merumuskan kebijakan intervensi yang lebih spesifik, seperti kemudahan akses permodalan, pelatihan manajerial, maupun fasilitasi pemasaran digital bagi penduduk usia produktif. Fokus pada kelompok usia ini sangat krusial mengingat mereka adalah mesin penggerak ekonomi utama yang memiliki ketangkasan dalam mengadopsi teknologi, sehingga jika dikelola dengan baik, proporsi usaha mikro ini akan berkontribusi signifikan terhadap penurunan angka pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif.

2.1.3.2.7 Rasio Kewirausahaan Daerah

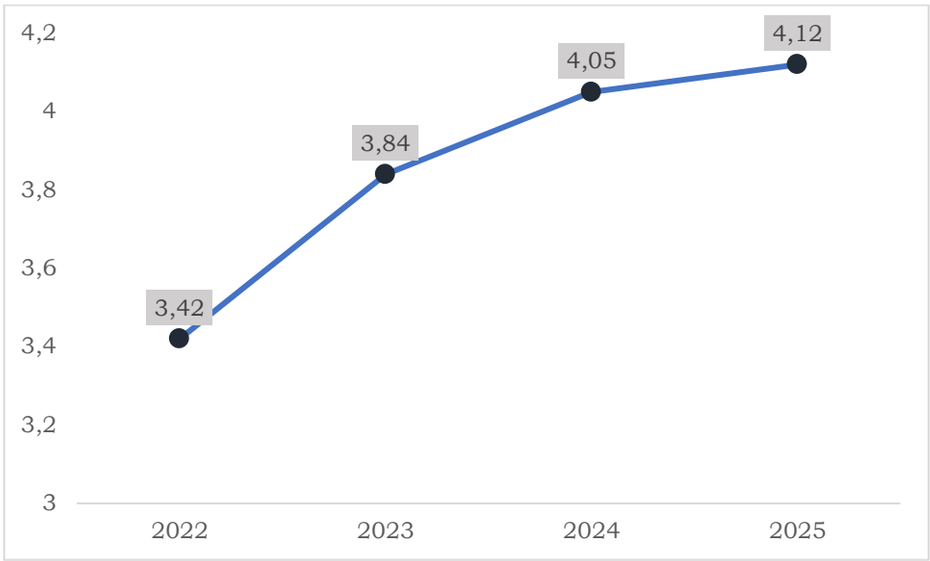
Rasio kewirausahaan Kota Blitar sebesar 0,01 menunjukkan karakteristik struktur ketenagakerjaan yang masih didominasi oleh sektor informal mandiri atau pekerja upahan, daripada pemberi kerja *(entrepreneur)*. Dengan angka rasio tersebut, dapat diartikan bahwa dari setiap 100 orang angkatan kerja di Kota Blitar, hanya terdapat satu orang yang berstatus sebagai pengusaha yang mampu mempekerjakan buruh tetap atau pekerja dibayar. Rasio ini mencerminkan tingkat kematangan ekosistem kewirausahaan daerah, di mana sebagian besar pelaku usaha kemungkinan besar masih bergerak di level usaha mandiri tanpa tenaga kerja tetap.

Rasio 0,01 ini memberikan tantangan strategis dalam upaya penguatan ekonomi daerah, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja yang stabil. Keberadaan pengusaha dengan buruh tetap merupakan indikator penting bagi ketahanan ekonomi, karena mereka adalah kelompok yang memiliki kapasitas manajerial dan modal untuk menyerap tenaga kerja secara formal. Rendahnya rasio ini mengindikasikan bahwa motivasi berusaha penduduk usia kerja di Kota Blitar masih bersifat pemenuhan kebutuhan dasar atau usaha sampingan, belum mencapai tahap ekspansi usaha yang memerlukan struktur organisasi formal dengan tenaga kerja tetap yang berkelanjutan.

Angka ini menjadi basis evaluasi bagi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Fokus intervensi perlu diarahkan pada transformasi pelaku usaha berusaha sendiri menjadi pengusaha yang mampu mempekerjakan orang lain melalui program inkubasi bisnis, kemudahan perizinan, dan akses pembiayaan skala menengah.

2.1.3.2.8 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) mengukur kemampuan daerah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan daya tarik investasi. IDSD terdiri dari empat komponen utama: lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi, yang kemudian diterjemahkan menjadi 12 pilar daya saing untuk menilai kinerja daerah secara komprehensif. Tujuan IDSD adalah mendorong perencanaan kebijakan yang fokus pada peningkatan produktivitas, inovasi, kualitas layanan publik, dan keberlanjutan pembangunan sehingga daerah mampu bersaing secara efektif dengan wilayah lain.



Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2026

Gambar 2.56

Indeks Daya Saing Daerah Kota Blitar Tahun 2022 - 2025

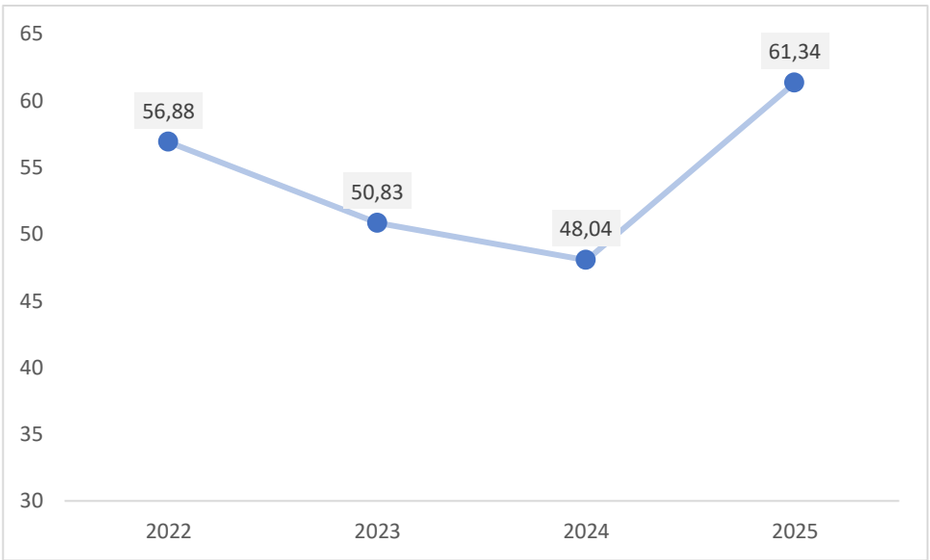
Capaian IDSD Kota Blitar meningkat dari 3,42 pada 2022 menjadi 3,84 pada 2023, kemudian 4,05 pada 2024, dan 4,12 pada 2025. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan pada keempat komponen daya saing, khususnya pada aspek lingkungan pendukung dan sumber daya manusia. Skor 4,12 menempatkan Kota Blitar pada posisi yang sangat kompetitif di tingkat nasional maupun provinsi, Dalam skala 1–5, nilai di atas 4,00 dikategorikan sebagai daerah dengan daya saing Sangat Tinggi, Skor ini jauh melampaui rata-rata IDSD nasional 2025 yang berada di angka 3,5.

Meskipun demikian, beberapa pilar daya saing masih menghadapi kendala, antara lain koordinasi lintas sektor dalam pengembangan ekosistem inovasi dan pasar yang belum optimal, serta kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi yang masih perlu diperkuat.

Strategi ke depan meliputi penguatan infrastruktur dan regulasi sebagai lingkungan pendukung, peningkatan kompetensi SDM dan inovasi, perluasan akses pasar bagi UMKM, serta pengembangan ekosistem inovasi melalui kemitraan industri, universitas, dan lembaga publik. Selain itu, integrasi dan koordinasi antar perangkat daerah untuk mengoptimalkan ke-12 pilar daya saing akan menjadi fokus agar setiap komponen saling mendukung, sehingga Kota Blitar dapat mempertahankan posisi unggul dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.3.2.9 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun. Capaian IID Kota Blitar Tahun 2022 sampai tahun 2025 adalah sebagai berikut



Sumber : Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, 2026

Gambar 2.57

Indeks Inovasi Daerah Kota Blitar Tahun 2022 – 2025

Pada Tahun 2022, nilai Indeks Inovasi Daerah tercatat sebesar 56,88. Pada Tahun 2023 nilai tersebut menurun menjadi 50,83, dan kembali mengalami penurunan pada Tahun 2024 menjadi 48,04. Penurunan selama dua tahun berturut-turut tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam konsistensi pengembangan, implementasi, serta pelaporan inovasi perangkat daerah. Beberapa faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain optimalisasi dokumentasi inovasi yang belum merata di seluruh perangkat daerah, keterbatasan penguatan kapasitas pengelolaan inovasi, serta dinamika prioritas pembangunan daerah yang berimplikasi pada fokus program dan kegiatan.

Namun demikian, pada Tahun 2025 terjadi peningkatan yang signifikan dengan capaian nilai sebesar 61,34, atau meningkat sebesar 13,30 poin dibandingkan Tahun 2024. Capaian ini merupakan nilai tertinggi dalam kurun waktu empat tahun terakhir dan menunjukkan adanya perbaikan tata kelola inovasi daerah, peningkatan komitmen perangkat daerah dalam mengembangkan inovasi, serta optimalisasi proses pelaporan dan validasi inovasi. Secara komparatif, capaian Tahun 2025 juga lebih tinggi dibandingkan Tahun 2022, yang mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Blitar mampu melakukan akselerasi dan penguatan ekosistem inovasi daerah.

Strategi untuk mendukung Indeks Inovasi Daerah Kota Blitar:

a. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja yang inovatif
b. Membangun fasilitas pendukung inovasi, seperti inkubator bisnis dan pusat teknologi digital.
c. Peningkatan jumlah inovasi yang terdokumentasi dan tervalidasi.
d. Optimalisasi pelaporan dan penginputan data inovasi pada sistem penilaian nasional
e. Kerja sama antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat, melalui pelaksanaan lomba inovasi
f. Adanya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang kuat untuk mendorong inovasi, seperti sosialisasi HKI.

2.1.3.2.10 Indeks Akses Keuangan Daerah

Realisasi Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kota Blitar menunjukkan kondisi yang relatif stabil selama periode Tahun 2024–2025. Pada Tahun 2024, IKAD tercatat sebesar 6,46, kemudian pada Tahun 2025 menjadi 6,44 atau mengalami penurunan yang sangat kecil sebesar 0,02 poin. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa tingkat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal di Kota Blitar secara umum masih terjaga, meskipun terdapat sedikit dinamika dalam capaian indikator.

Penurunan yang relatif tidak signifikan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perkembangan jumlah masyarakat yang memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan formal yang belum tumbuh secara optimal, variasi tingkat literasi dan inklusi keuangan, perubahan komponen penyusun indeks, maupun dinamika data yang digunakan dalam penghitungan IKAD. Dengan selisih capaian yang sangat kecil, kondisi tersebut tidak menunjukkan adanya penurunan yang bersifat substantif terhadap akses keuangan masyarakat, melainkan mencerminkan fluktuasi yang masih berada dalam batas yang wajar.

Ke depan, Pemerintah Kota Blitar akan terus mendorong peningkatan akses keuangan masyarakat melalui penguatan sinergi dengan lembaga jasa keuangan, perbankan, lembaga keuangan nonbank, serta pemangku kepentingan lainnya. Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperkuat pembiayaan bagi pelaku UMKM, serta mendukung pengembangan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan nilai Indeks Akses Keuangan Daerah Kota Blitar dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.2.11 Persentase Pemanfaatan Digital pada Sektor Ekonomi

Persentase pemanfaatan digital pada sektor ekonomi di Kota Blitar menunjukkan tren pertumbuhan yang positif namun masih berada pada tahap akselerasi awal. Realisasi yang meningkat dari 9,88% pada tahun 2024 menjadi 10,88% pada tahun 2025 mengindikasikan adanya kenaikan sebesar satu poin persentase dalam kurun waktu satu tahun. Peningkatan ini mencerminkan perluasan adopsi teknologi informasi di kalangan pelaku usaha, khususnya terkait penggunaan platform digital dalam transaksi keuangan UMKM, seperti penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), *mobile banking*, hingga *e-wallet*. Pertumbuhan yang konsisten ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha untuk beralih ke ekosistem ekonomi digital mulai terbentuk sebagai respons terhadap perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan dan keamanan transaksi non tunai.

Tabel 2.32

Persentase Pemanfaatan Digital pada Sektor Ekonomi

Kota Blitar Tahun 2024 – 2025

No.	Indikator	2024	2025
1.	Pemanfaatan Digital pada Sektor Ekonomi	9,88	10,88

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Naker, 2026

Meskipun menunjukkan tren naik, angka 10,88% juga memberikan gambaran bahwa sebagian besar pelaku ekonomi di daerah masih mengandalkan metode transaksi konvensional atau tunai. Hal ini menjadi catatan penting bagi perencanaan kebijakan ekonomi daerah untuk mengidentifikasi hambatan dalam digitalisasi, seperti literasi digital, akses infrastruktur jaringan, maupun kepercayaan terhadap keamanan transaksi siber.

Dengan semakin banyaknya UMKM yang terintegrasi ke dalam platform digital, daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas akan semakin meningkat. Target ke depan bukan sekadar meningkatkan angka persentase, melainkan memastikan bahwa pemanfaatan digital tersebut memberikan dampak nyata pada efisiensi biaya operasional dan perluasan jangkauan pasar bagi pelaku ekonomi di Kota Blitar secara berkelanjutan.

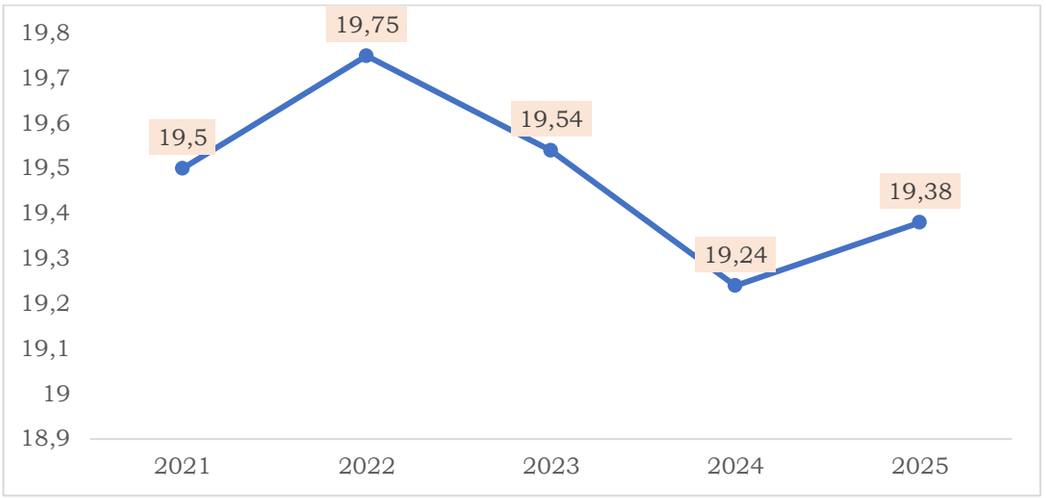
2.1.3.3 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.1.3.3.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi. Investasi meliputi investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini salah satunya tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTPB).

PMTB merupakan penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing)* barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli *(financial leasing)* barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" berarti bahwa di dalamnya masih mengandung penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

Di Kota Blitar, proporsi PMTB terhadap PDRB mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2021 sebesar 19.5 persen, PMTB mengalami pertumbuhan sebesar 19.75 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, proporsi PMTB mengalami sedikit perlambatan hingga tahun 2024. Proporsi PMTB kembali tumbuh pada tahun 2025 sebesar 19.38 persen. Hal ini mengindikasikan adanya penguatan ekonomi lokal dan UMKM serta peningkatan PDRB Kota Blitar.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2026

Gambar 2.58

Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) Kota Blitar

Tahun 2021 – 2025

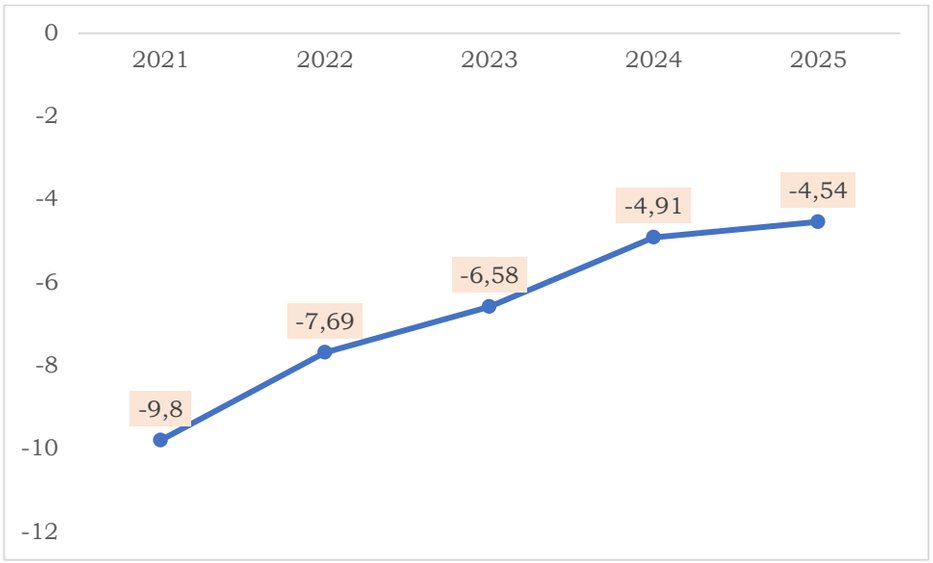
2.1.3.3.2 Ekspor Barang dan Jasa

Transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, namun dikonsumsi oleh pihak luar negeri maupun luar daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor luar negeri adalah pembelian oleh badan internasional, kedutaan besar, awak kapal yang singgah, wisatawan mancanegara, dan sebagainya.

Sementara itu, transaksi impor mencerminkan tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari luar negeri maupun luar daerah. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa. Perkembangan transaksi impor menunjukkan tingkat ketergantungan suatu wilayah terhadap produk dari luar. Komponen impor juga mencakup pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung oleh penduduk di luar wilayah.

Net ekspor merupakan selisih antara ekspor dan impor, baik luar negeri maupun antar daerah. Komponen ini mencerminkan kinerja perdagangan suatu wilayah dengan pihak luar, baik dalam lingkup internasional maupun domestik antar wilayah. Net ekspor Kota Blitar cenderung kecil atau negatif. Hal ini dikarenakan Kota Blitar tidak memiliki industri skala besar sehingga produksi barang untuk “diekspor keluar daerah” relatif terbatas. Selain itu perekonomian Kota Blitar lebih banyak ditopang oleh perdagangan lokal dan jasa (Pendidikan, wisata, dll) dimana sektor ini tidak menghasilkan ekspor besar, namun lebih melayani konsumsi. Meskipun sektor pariwisata menghasilkan pendapatan, namun tercatat sebagai sektor jasa bukan ekspor barang.

Net ekspor Kota Blitar menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas produk unggulan UMKM. Pemerintah Kota Blitar berkolaborasi dengan pihak terkait secara aktif membina pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan volume produksi agar mencapai standar global.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2026

Gambar 2.59

Ekspor Barang dan Jasa Kota Blitar

Tahun 2020 – 2025

2.1.3.3.3 *Return On Asset* (ROA) BUMD

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. Indikator ini mencerminkan tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan guna menghasilkan keuntungan. Dalam konteks Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), ROA digunakan sebagai indikator kinerja keuangan karena mampu menunjukkan sejauh mana aset yang bersumber dari penyertaan modal pemerintah daerah maupun akumulasi investasi perusahaan dapat dimanfaatkan secara produktif untuk menciptakan nilai ekonomi. Semakin tinggi nilai ROA menunjukkan semakin baik kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk menghasilkan laba.

Selain mencerminkan efisiensi pengelolaan aset, peningkatan kinerja keuangan BUMD juga memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). BUMD yang mampu mengelola aset secara optimal dan menghasilkan laba yang berkelanjutan akan memberikan kontribusi terhadap PAD melalui setoran dividen kepada pemerintah daerah sebagai pemegang saham. Oleh karena itu, perbaikan kinerja profitabilitas yang tercermin dari peningkatan nilai *Return on Assets* (ROA) menjadi penting untuk mendorong peningkatan kontribusi BUMD terhadap penerimaan daerah.

Dalam konteks BUMD Kota Blitar, peningkatan kinerja pada Bank Kota Blitar dan PDAM Kota Blitar melalui penguatan manajemen usaha, peningkatan efisiensi operasional, serta optimalisasi pemanfaatan aset diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan. Dengan demikian, pada akhirnya BUMD tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan publik dan penggerak perekonomian daerah, tetapi juga sebagai sumber pendapatan daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas fiskal Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 2.33

Return On Asset (ROA) BUMD Kota Blitar Tahun 2024 – 2025

No.	Tahun	*Return On Asset* (ROA) BUMD Kota Blitar
1.	2024	-0,045
2.	2025	-0,038

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2026

Berdasarkan data kinerja BUMD Kota Blitar, nilai ROA pada tahun 2024 tercatat sebesar -0,045 dan pada tahun 2025 sebesar -0,038. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengembalian aset masih berada pada kategori negatif, yang mengindikasikan bahwa pemanfaatan aset belum mampu menghasilkan laba bersih secara optimal. Meskipun demikian, terdapat perbaikan kinerja yang ditunjukkan dengan penurunan tingkat kerugian pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berdampak terhadap pencapaian laba BUMD. Pada sektor perbankan daerah yang dikelola oleh Bank Kota Blitar sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kinerja profitabilitas masih tertekan akibat meningkatnya kredit bermasalah serta adanya koreksi terhadap biaya operasional dan peningkatan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), yang berdampak pada penurunan laba bersih. Sementara itu, pada sektor pelayanan air minum yang dikelola oleh PDAM Kota Blitar, kinerja keuangan dipengaruhi oleh masih tingginya tingkat kehilangan air *(non-revenue water)* serta belum optimalnya peningkatan jumlah Sambungan Rumah (SR) pelanggan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pemanfaatan aset BUMD belum mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang optimal sehingga nilai ROA masih berada pada level negatif.

Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan BUMD dan mendorong perbaikan nilai ROA, diperlukan beberapa strategi perbaikan yang terarah. Pada sektor perbankan daerah, strategi yang dapat dilakukan antara lain melalui penguatan manajemen risiko kredit untuk menekan rasio kredit bermasalah, peningkatan kualitas analisis penyaluran kredit, serta optimalisasi penagihan kredit bermasalah guna memperbaiki kualitas aset produktif. Selain itu, efisiensi biaya operasional dan penguatan tata kelola keuangan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan profitabilitas. Sementara itu, pada sektor pelayanan air minum, strategi yang perlu ditempuh antara lain melalui penurunan tingkat kehilangan air (*non-revenue water)* melalui perbaikan jaringan distribusi dan peningkatan sistem pengawasan jaringan, serta percepatan perluasan layanan dan peningkatan jumlah Sambungan Rumah (SR) pelanggan guna meningkatkan pendapatan operasional. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan aset BUMD, memperbaiki kinerja keuangan perusahaan, serta secara bertahap mendorong peningkatan nilai ROA pada tahun-tahun berikutnya.

2.1.3.4 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.4.1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah atau penyedia layanan publik

lainnya. Infrastruktur yang dimaksud di sini meliputi berbagai sektor, seperti transportasi, energi, air bersih, saluran pembuangan, telekomunikasi, perumahan, jalan, dan jembatan.

Tabel 2.34

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kota Blitar

Tahun 2024 - 2025

No.	Indikator	2024	2025
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	80,00	81,00*

**data sementara*

Sumber : DPUPR dan Dinas Perhubungan, 2026

Pembangunan infrastruktur di Kota Blitar pada tahun 2025 menunjukkan performa yang baik, tercermin dari capaian sementara Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur yang menyentuh angka 81,00. Skor ini mengindikasikan bahwa intervensi pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah telah selaras dengan ekspektasi dan kebutuhan riil masyarakat. Keberhasilan ini tidak hanya menggambarkan efektivitas pembangunan fisik secara kuantitatif, tetapi juga mencerminkan kualitas layanan publik yang semakin responsif dan inklusif. Infrastruktur yang handal ini menjadi katalisator utama dalam mengakselerasi roda perekonomian lokal, menurunkan biaya logistik, serta meningkatkan derajat kualitas hidup masyarakat.

2.1.3.4.2 Indeks Kota Layak Huni

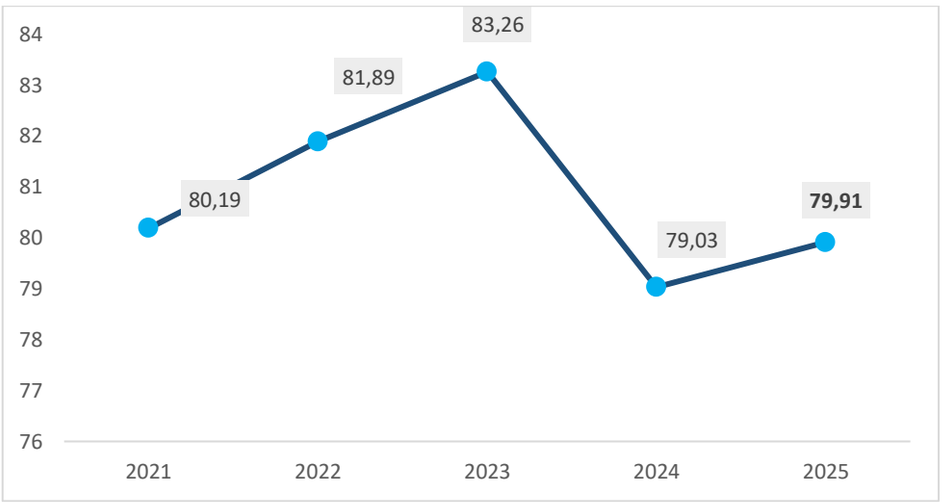
Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan senantiasa menitikberatkan pada keseimbangan antara pembangunan fisik dan kesejahteraan sosial untuk menciptakan ruang hidup yang manusiawi. Kota Blitar terus berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut melalui penyediaan fasilitas publik yang inklusif serta pemeliharaan harmoni sosial di tengah dinamika perkembangan zaman. Sebagai bentuk evaluasi atas upaya tersebut, capaian kinerja daerah tercermin secara konkret dalam hasil pengukuran dari Indeks Kota Layak Huni.

Realisasi Indeks Kota Layak Huni Kota Blitar pada tahun 2025 yang mencapai angka 75,87 menunjukkan performa yang cukup solid dalam menciptakan lingkungan yang nyaman sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Capaian ini merefleksikan keberhasilan integrasi antara aspek fisik, seperti ketersediaan prasarana dan tata ruang yang tertata, dengan aspek non-fisik yang mencakup stabilitas ekonomi serta hubungan sosial yang kondusif. Angka ini didapat dari hasil rata-rata yang konsisten pada indeks kepuasan layanan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup, serta akses hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan bagi rumah tangga. Selain itu, penguatan pada Indeks Risiko Bencana serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum menjadi pilar pendukung yang memastikan Kota Blitar tetap menjadi kota ideal yang mampu memberikan rasa aman dan kemudahan bagi seluruh warganya dalam beraktivitas sehari-hari.

2.1.3.4.3 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Akses hunian layak adalah hunian yang memenuhi persyaratan rumah layak huni berdasarkan Permen PUPR No. 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Hunian Terjangkau dihitung dari *backlog* kepemilikan dan kehunian.

Hunian berkelanjutan adalah hunian yang terpenuhi PSU berdasarkan Perda PKP Kota Blitar. Rumah tangga berpenghasilan rendah di Indonesia dibantu dalam mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau melalui berbagai program nasional seperti Program Sejuta Rumah, BSPS, SSB, dan inisiatif kolaboratif seperti NAHP dengan Bank Dunia untuk mendukung hunian hijau dan tahan gempa. Di tingkat daerah, Kota Blitar aktif memberikan stimulan rumah layak huni, termasuk perbaikan, maupun pembangunan melalui prinsip gotong royong antara pemerintah dan masyarakat. Berikut



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025

Gambar 2.60

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kota Blitar Tahun 2021 - 2025

Berdasarkan data selama periode 2021 hingga 2025, akses rumah tangga terhadap hunian layak di Kota Blitar menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada awal periode (2021-2023), indikator ini menunjukkan tren positif di mana capaian terus meningkat dari 80,19% hingga mencapai puncaknya pada angka 83,26% di tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program stimulan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta meningkatnya swadaya masyarakat dalam memperbaiki kualitas tempat tinggalnya.

Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan cukup tajam menjadi 79,03%. Memasuki tahun 2025, kondisi mulai menunjukkan tren pemulihan dengan kenaikan tipis ke angka 79,91%. Meskipun mulai bangkit, angka ini menunjukkan bahwa cakupan hunian layak belum sepenuhnya kembali ke level optimal tahun 2023. Beberapa hambatan yang dihadapi diantaranya yaitu menurunnya daya beli masyarakat terhadap sektor

perumahan dan berkurangnya kemampuan masyarakat dalam perbaikan rumah tinggalnya.

Dalam upaya mengatasi tantangan pemenuhan hunian, Pemerintah Kota Blitar menempuh langkah akseleratif melalui optimalisasi usulan bantuan perbaikan rumah, penggalian potensi pendanaan non-pemerintah (seperti CSR atau investasi swasta), serta mendorong keterlibatan pengembang dalam penyediaan hunian layak yang terjangkau bagi masyarakat.

2.1.3.5 Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.5.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pajak daerah berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penerimaan, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta mendorong aktivitas perekonomian di daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kontribusi pajak daerah terhadap total aktivitas ekonomi suatu wilayah. Rasio ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi potensi pajak dari kegiatan ekonomi yang berlangsung. Semakin tinggi rasio pajak daerah terhadap PDRB, maka semakin besar kontribusi pajak daerah dalam perekonomian serta semakin kuat kapasitas fiskal daerah.

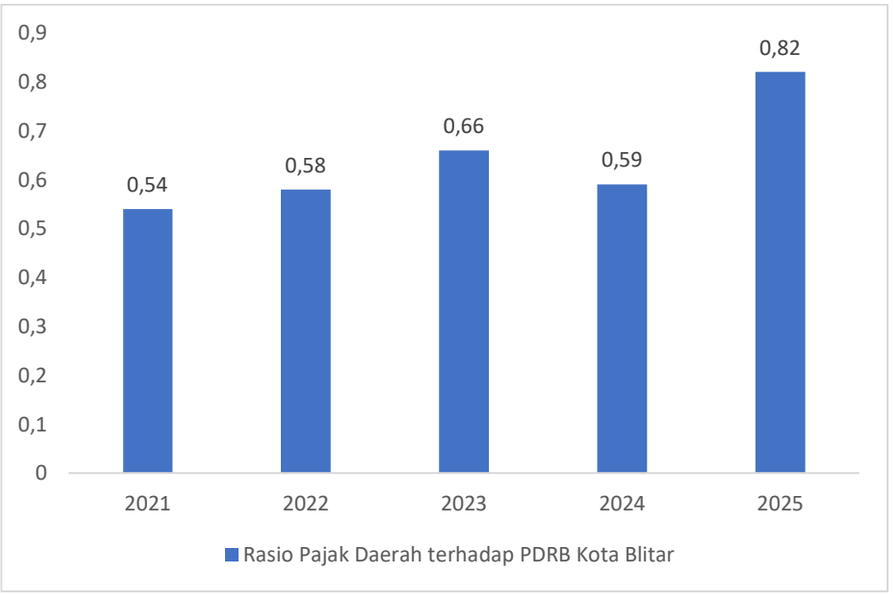
Perkembangan rasio pajak daerah terhadap PDRB di Kota Blitar dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 berada pada kisaran 0,54 persen sampai dengan 0,66 persen. Pada Tahun 2025, rasio tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 0,82 persen. Peningkatan ini antara lain dipengaruhi oleh adanya kebijakan penambahan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai tindak lanjut implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang memberikan tambahan sumber penerimaan bagi pemerintah kabupaten/kota.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata rasio pajak daerah terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, capaian Kota Blitar menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik. Rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur berada pada kisaran 0,30 persen sampai dengan 0,35 persen dalam periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemungutan pajak daerah di Kota Blitar relatif lebih optimal dibandingkan dengan daerah lain di tingkat provinsi. Kondisi tersebut didukung oleh karakteristik wilayah perkotaan, struktur ekonomi yang didominasi sektor perdagangan dan jasa, serta pengelolaan administrasi perpajakan daerah yang relatif lebih tertib dan efektif.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada pada kisaran 1,2 persen sampai dengan 1,3 persen, capaian Kota Blitar masih menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pembentukan

PDRB masih belum optimal dan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk peningkatan.

Secara umum, kinerja rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Blitar tergolong baik pada level regional, namun masih memerlukan upaya optimalisasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Upaya peningkatan rasio pajak daerah tidak hanya dapat dilakukan melalui penyesuaian tarif pajak, namun juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan pajak daerah harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan berorientasi jangka panjang, dengan menitikberatkan pada perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan sistem administrasi perpajakan daerah.



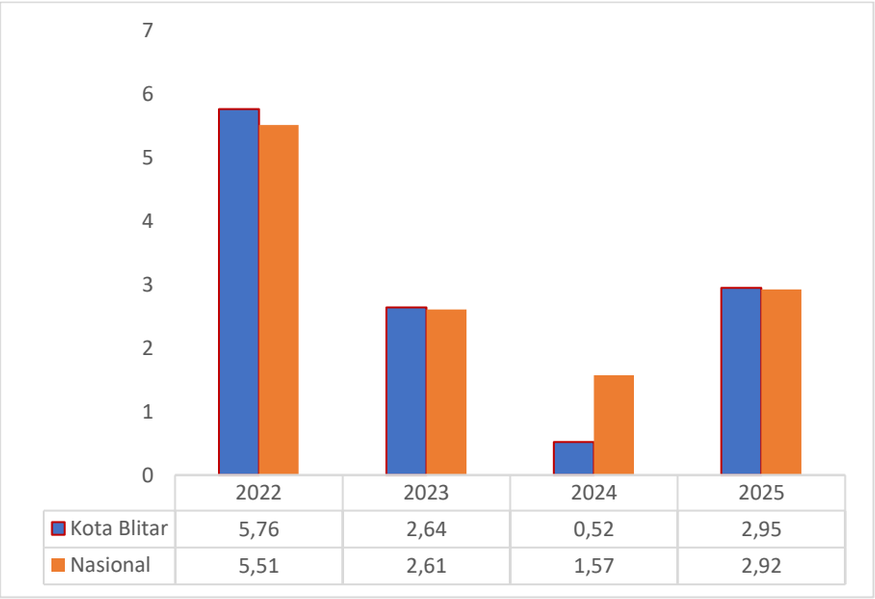
Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, 2026

Gambar 2.61

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Blitar 2021-2025

2.1.3.5.2 Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan indikator makroekonomi yang menggambarkan tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu. Stabilitas inflasi menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi daerah, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.



	2022	2023	2024	2025
Kota Blitar	5,76	2,64	0,52	2,95
Nasional	5,51	2,61	1,57	2,92

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Gambar 2.62

Tingkat Inflasi Kota Blitar dan Nasional per Desember

Tahun 2022-2025

Perkembangan inflasi di Kota Blitar selama periode 2022–2025 menunjukkan dinamika yang relatif sejalan dengan tren inflasi nasional di Indonesia. Pada tahun 2022 inflasi Kota Blitar mencapai 5,76%, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang juga meningkat pada periode tersebut akibat tekanan harga energi dan pangan pasca pemulihan ekonomi. Pada tahun 2023 inflasi Kota Blitar menurun menjadi 2,64%, relatif sejalan dengan inflasi nasional yang berada di kisaran 2,61%, sehingga menunjukkan kondisi stabilitas harga yang mulai terkendali. Selanjutnya pada tahun 2024 inflasi Kota Blitar turun tajam menjadi 0,52%, jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sekitar 1,57%, yang mengindikasikan tekanan harga di daerah relatif lebih rendah dibandingkan tingkat nasional. Namun pada tahun 2025 inflasi Kota Blitar kembali meningkat menjadi 2,95%, yang masih berada dalam kisaran target inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah dan Bank Indonesia, yaitu sekitar 1,5%–3,5%, sehingga secara umum kondisi inflasi daerah masih tergolong terkendali dan mendukung stabilitas perekonomian daerah.

Untuk menjaga stabilitas inflasi di daerah, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain: penguatan koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menjaga stabilitas pasokan dan distribusi komoditas pangan strategis, pelaksanaan operasi pasar dan stabilisasi harga saat terjadi lonjakan harga serta penguatan kerja sama antar daerah dalam pemenuhan pasokan pangan.

2.1.3.5.3 ICOR *(Incremental Capital Output Ratio)*

ICOR *(Incremental Capital Output Ratio*) adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur efisiensi investasi dalam menghasilkan *output* (produk domestik bruto/PDB). ICOR menunjukkan berapa banyak tambahan investasi (modal) yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu unit *output*. Semakin rendah nilai ICOR, semakin efisien perekonomian suatu wilayah dalam menggunakan modal untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan analis ekonomi menggunakan ICOR untuk

mengevaluasi seberapa efektif program pembangunan dan investasi. ICOR juga sering dipakai dalam perencanaan ekonomi jangka menengah dan panjang.

Pada tahun 2024, angka ICOR sebesar 3,51, dan tergolong cukup efisien. Artinya, dengan setiap peningkatan investasi sebesar 3,51 persen dari PDB, ekonomi mampu tumbuh sebesar 1 persen. Semakin kecil angka ICOR, semakin efisien investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Capaian ICOR 3,51 juga mencerminkan bahwa iklim investasi dan perencanaan pembangunan di Kota Blitar relatif terarah. Efisiensi ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti dominasi sektor perdagangan dan jasa yang memiliki perputaran modal lebih cepat, efektivitas belanja pemerintah daerah, serta meningkatnya partisipasi investasi swasta. Dengan mempertahankan nilai ICOR yang rendah dan stabil, Kota Blitar berpotensi menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing daerah di tingkat provinsi maupun nasional.

2.1.3.5.4 Persentase Peningkatan Investasi

Sebagai salah satu indikator penting dalam mengukur pertumbuhan ekonomi daerah, perkembangan investasi perlu diamati secara berkala. Kota Blitar, dalam lima tahun terakhir, mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam hal pertumbuhan investasi. Adapun data investasi di Kota Blitar dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

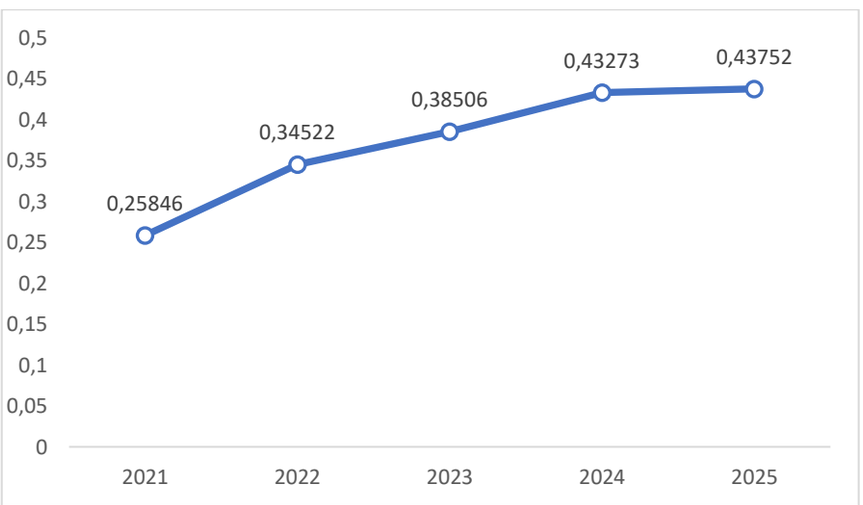
Tabel 2.35

Persentase Peningkatan Investasi Kota Blitar

Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
Realisasi Investasi (Triliun Rupiah)	0,25846	0,34522	0,38506	0,43273	0,43752
Persentase peningkatan investasi	54,67	33,57	11,54	12,38	1,1

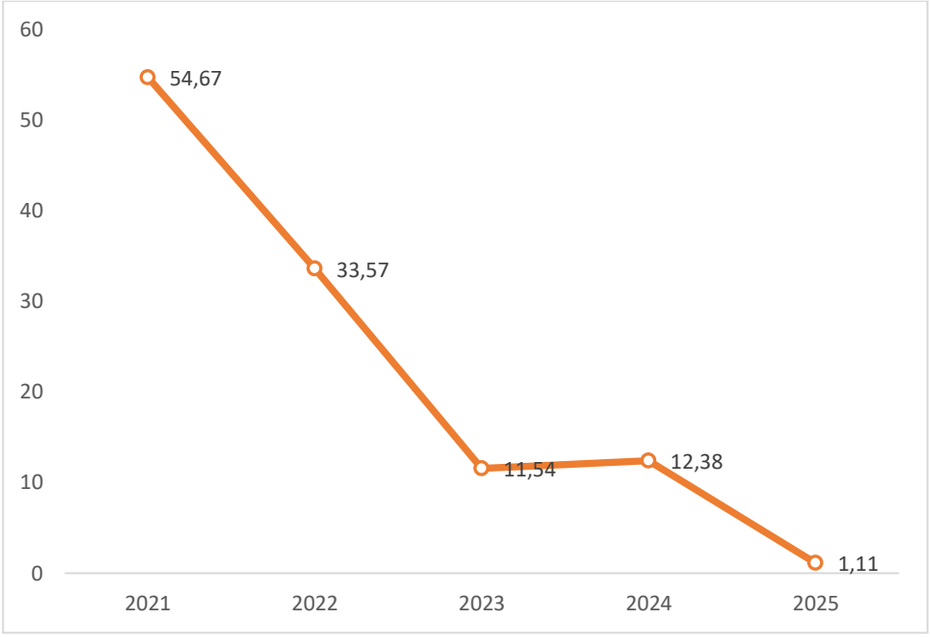
Sumber: *Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2026*



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2026

Gambar 2.63

Realisasi Investasi (Triliun Rupiah)
Kota Blitar Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2026

Gambar 2.64
Persentase Peningkatan Investasi
Kota Blitar Tahun 2021-2025

Tren investasi mengalami pergeseran dari pertumbuhan tinggi tahun 2021 dan tahun 2022 dengan persentase peningkatan investasi 54,67% dan 33,57% menuju perlambatan dan stabilisasi di tahun 2023 dan tahun 2024, hingga hampir stagnan pada tahun 2025 dengan persentase peningkatan investasi 1,1%. Hal ini menjadi sinyal perlunya intervensi kebijakan untuk mendorong kembali daya tarik investasi.

Fluktuasi investasi di Kota Blitar dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut:

1. Faktor Kebijakan

Kekuatan:

a. Implementasi sistem OSS-RBA dalam perizinan berusaha telah mempermudah dan mempercepat proses perizinan bagi pelaku usaha.
b. Peran aktif DPMPTSP dalam memberikan pendampingan pengurusan perizinan dan pelaporan LKPM meningkatkan kemudahan berusaha.
c. Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) memberikan kemudahan akses layanan perizinan dan administrasi usaha bagi masyarakat.

Kelemahan:

a. Tingkat kepatuhan terhadap legalitas usaha, khususnya pada sektor UMKM, masih relatif rendah.
b. Pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan LKPM masih terbatas, sehingga data realisasi investasi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil aktivitas ekonomi.
c. Belum tersedianya kebijakan daerah yang secara khusus mengatur pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

2. Faktor Ekonomi

Kekuatan:

a. Stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat yang relatif terjaga menjadi faktor pendukung iklim investasi.
b. Peningkatan kontribusi investasi dari usaha kecil, khususnya pada sektor perdagangan dan pariwisata.
c. Dukungan akses pembiayaan melalui koperasi, BPR, dan program kredit UMKM dari perbankan.

Kelemahan:

a. Keterbatasan luas wilayah kota berdampak pada sempitnya pasar dan skala ekonomi, sehingga kurang menarik bagi investor skala besar.
b. Perkembangan sektor industri masih terbatas akibat keterbatasan lahan.
c. Fluktuasi harga bahan baku dan energi berdampak pada biaya produksi dan keberlanjutan usaha.

3. Faktor Daya Tarik Investasi

Kekuatan:

a. Potensi sektor pariwisata yang masih terbuka luas untuk dikembangkan.
b. Dukungan pemerintah daerah terhadap produk lokal mendorong peningkatan daya saing di pasar nasional maupun internasional.

Kelemahan:

a. Kegiatan promosi investasi masih belum optimal dan belum dilakukan secara masif.
b. Kawasan tematik yang berpotensi menjadi daya tarik investasi belum dikembangkan secara terintegrasi.
c. Keterbatasan lahan menjadi kendala dalam pengembangan usaha skala besar.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan investasi yang stabil dan inklusif, Kota Blitar perlu menerapkan strategi investasi berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai investasi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Adapun strategi yang dapat dilakukan meliputi:

1) Diversifikasi Sektor
- Melakukan identifikasi dan kajian sektor unggulan baru yang potensial untuk dikembangkan.
- Mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata, termasuk agrowisata dan industri kreatif.
- Mengembangkan kawasan tematik sebagai pusat pertumbuhan investasi.
- Mendorong kerja sama antar daerah untuk memperluas jaringan dan peluang investasi.

2) Peningkatan Kemudahan Perizinan
- Mengembangkan inovasi layanan perizinan yang lebih efektif dan efisien.
- Memperkuat layanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP).
- Meningkatkan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pengurusan izin.
- Mendorong digitalisasi dan integrasi layanan perizinan.
- Menyederhanakan kebijakan, SOP, dan standar pelayanan agar lebih adaptif.

3) Pemberian Insentif
- Menyusun dan menetapkan kebijakan daerah terkait insentif dan kemudahan penanaman modal.
- Memfasilitasi promosi peluang investasi secara digital maupun konvensional.
- Mendorong kemitraan antara investor besar dan pelaku UMKM.

4) Promosi Investasi yang Lebih Aktif

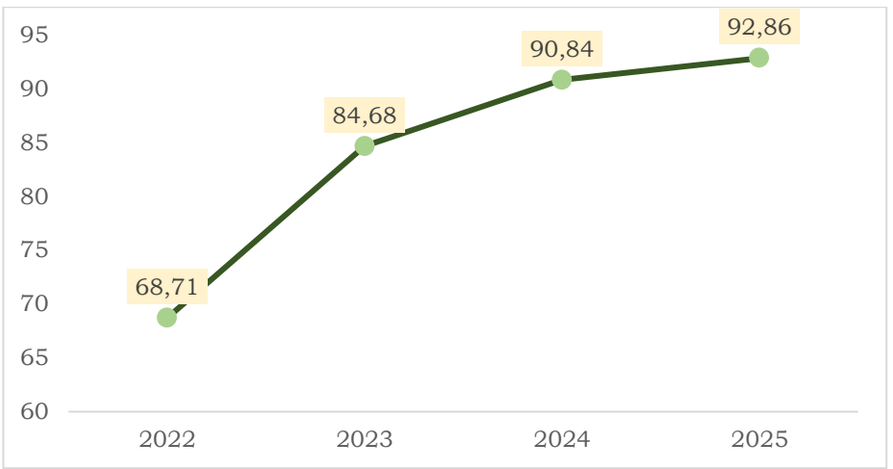
- Memperbarui peta potensi investasi secara berkala.
- Mengoptimalkan promosi melalui media digital dan kanal resmi pemerintah daerah.
- Berpartisipasi aktif dalam forum dan *expo* investasi.
- Menjalin kemitraan dengan media lokal untuk memperluas publikasi.
- Mengintegrasikan data potensi daerah dalam sistem informasi investasi tingkat provinsi dan nasional.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi adalah upaya terencana dan sistematis untuk mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan—terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), tata laksana, dan sumber daya manusia aparatur. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023, RB kini diarahkan menjadi "RB Berdampak", di mana birokrasi tidak hanya fokus pada perbaikan tata kelola internal (hulu), tetapi juga pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat (hilir). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan melayani. Hal ini dilakukan dengan menyederhanakan proses bisnis yang berbelit, mendigitalisasi layanan pemerintahan, serta memperkuat akuntabilitas kinerja di setiap unit kerja. Maksud utamanya adalah menciptakan birokrasi yang lincah (*agile*) dalam merespons dinamika kebutuhan publik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui penguatan akuntabilitas (SAKIP), pengawasan (Zona Integritas), dan peningkatan kualitas pelayanan publik (RB General) serta mempercepat pencapaian agenda prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta pengendalian inflasi melalui kolaborasi lintas instansi (RB Tematik).



Sumber: Sekretariat Daerah, 2026

**)) Nilai Sementara, Nilai RB belum rilis dari KemenPAN RB*

Gambar 2.65

Indeks Reformasi Birokrasi Kota Blitar 2022-2025

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi, capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Blitar dalam kurun waktu Tahun 2022 sampai

dengan Tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2022 nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Blitar tercatat sebesar 68,71, kemudian meningkat secara signifikan pada Tahun 2023 menjadi 84,68. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, baik pada aspek tata kelola organisasi, penguatan akuntabilitas kinerja, maupun peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada Tahun 2024 capaian Indeks Reformasi Birokrasi kembali mengalami peningkatan menjadi 90,84, dan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 92,86 (data sementara). Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Reformasi Birokrasi di Kota Blitar telah berada pada kategori sangat baik. Kondisi ini menggambarkan bahwa sistem tata kelola pemerintahan semakin berjalan secara efektif dan didukung oleh komitmen perangkat daerah dalam melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan.

Salah satu faktor yang mendukung peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Blitar adalah komitmen dari semua pihak dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Rekomendasi tersebut telah diakomodasi melalui perbaikan dan penyempurnaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sehingga pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi nasional. Tindak lanjut terhadap rekomendasi evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kota Blitar tidak hanya difokuskan pada pemenuhan indikator penilaian Reformasi Birokrasi General, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kontribusi birokrasi terhadap pencapaian agenda pembangunan melalui pendekatan Reformasi Birokrasi Tematik. Perbaikan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan perangkat daerah yang mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan tren positif, terdapat faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian, yaitu dinamika regulasi dalam penerapan Reformasi Birokrasi, khususnya terkait transisi menuju Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045, dinamika ini berimplikasi pada beberapa hal:

1. Penyesuaian kerangka kebijakan dan indikator evaluasi RB, yang dapat memerlukan adaptasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan RB di daerah.
2. Perubahan pendekatan dari RB General menuju RB Tematik, yang menuntut integrasi Reformasi Birokrasi dengan isu prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Potensi inkonsistensi sementara dalam implementasi program, terutama pada masa transisi regulasi dan pedoman teknis.

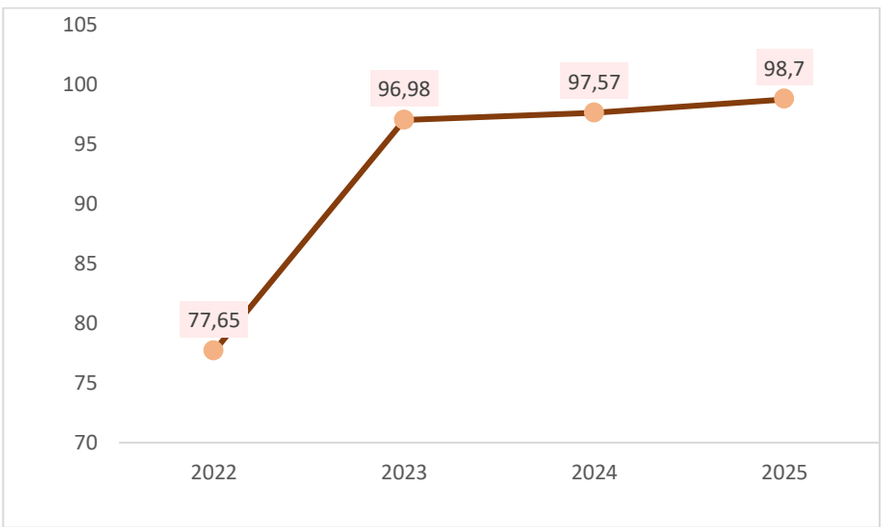
Sebagai langkah strategis ke depan, Pemerintah Kota Blitar akan melakukan:

1. Penyusunan Renaksi RB Tahun 2026 yang berbasis hasil evaluasi RB Tahun 2025, sehingga setiap program perbaikan memiliki dasar analisis yang kuat.

2. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renaksi, guna memastikan setiap perangkat daerah menjalankan program RB secara konsisten dan terukur.
3. Integrasi pelaksanaan RB General dan RB Tematik, agar Reformasi Birokrasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai evaluasi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas tata kelola pemerintahan, serta pencapaian prioritas pembangunan daerah.
4. Penyesuaian implementasi RB daerah dengan Grand Design RB Nasional 2025–2045, sehingga arah reformasi birokrasi di Kota Blitar tetap selaras dengan kebijakan nasional.

2.1.4.1.2 Indeks Reformasi Hukum

Reformasi hukum merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola regulasi yang tertib, berkualitas, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi hukum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah, memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah melalui sistem regulasi yang baik.



Sumber: Sekretariat Daerah, 2026

Gambar 2.66

Indeks Reformasi Hukum Kota Blitar 2022-2025

Capaian Indeks Reformasi Hukum Kota Blitar dalam periode Tahun 2022–2025 menunjukkan tren peningkatan yang sangat baik. Pada Tahun 2022 nilai indeks tercatat sebesar 77,65, kemudian meningkat signifikan pada Tahun 2023 menjadi 96,98. Selanjutnya pada Tahun 2024 meningkat menjadi 97,57, dan pada Tahun 2025 mencapai 98,70. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pembentukan dan pengelolaan produk hukum daerah di Kota Blitar telah berjalan secara optimal dan konsisten.

Peningkatan capaian Indeks Reformasi Hukum tersebut didukung oleh beberapa faktor. Pertama, telah dilaksanakan penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga proses pembentukan regulasi daerah dapat berjalan secara tertib dan sesuai

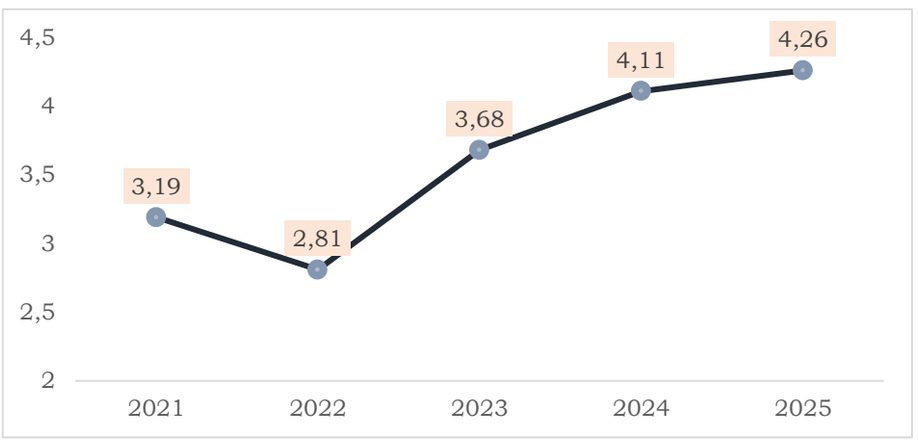
dengan mekanisme yang berlaku. Kedua, telah dilaksanakan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah secara sistematis sehingga regulasi yang dihasilkan memiliki keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menghindari potensi tumpang tindih kebijakan. Ketiga, telah dilaksanakan analisis dan evaluasi terhadap peraturan daerah dan/atau peraturan wali kota secara berkala setiap tahunnya guna memastikan efektivitas pelaksanaan regulasi serta melakukan penyesuaian apabila terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan pembangunan daerah.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi capaian Indeks Reformasi Hukum. Salah satunya adalah aspek penataan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) yang masih mengacu pada hasil penilaian Tahun 2023, sehingga capaian penilaian pada Tahun 2024 belum dapat mencerminkan kondisi pengelolaan JDIH yang telah mengalami perbaikan. Hal tersebut berdampak pada nilai Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 yang belum dapat mencapai nilai maksimal meskipun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Blitar akan melakukan penguatan koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai instansi pembina pengelolaan JDIH guna meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum daerah serta mendukung peningkatan capaian reformasi hukum secara berkelanjutan.

2.1.4.1.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efektivitas tata kelola pemerintahan, serta transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Implementasi SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terpadu, efisien, dan berbasis digital sehingga mampu mendukung percepatan transformasi menuju pemerintahan digital.



Sumber: Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik, 2026

Gambar 2.67

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kota Blitar 2021-2025

Capaian Indeks SPBE Kota Blitar pada periode Tahun 2022–2025 menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada Tahun 2022 nilai indeks tercatat sebesar 2,81, kemudian meningkat menjadi 3,68 pada Tahun 2023. Selanjutnya pada Tahun 2024 nilai indeks kembali meningkat menjadi 4,11, dan pada Tahun 2025 mencapai 4,26. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, khususnya dalam penguatan kebijakan, tata kelola, serta penyediaan layanan SPBE.

Peningkatan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain tersedianya bukti dukung yang telah memenuhi sebagian besar kriteria penilaian SPBE, adanya tim evaluator internal SPBE yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota, serta dukungan perangkat daerah dalam pemenuhan dokumen dan implementasi program SPBE. Dukungan kelembagaan dan koordinasi lintas perangkat daerah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi SPBE, antara lain belum optimalnya pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta masih belum optimalnya kesesuaian antara peta rencana SPBE dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan integrasi antara perencanaan dan implementasi SPBE masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, beberapa strategi penguatan yang dapat dilakukan antara lain:

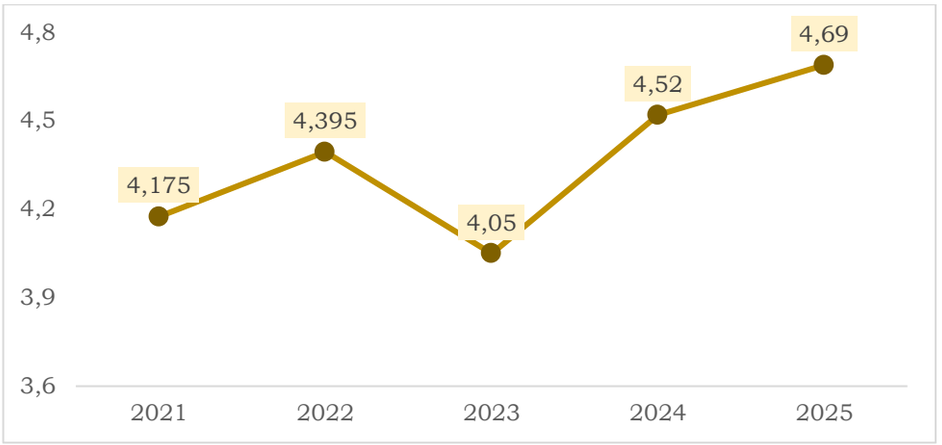
1. Penguatan tata kelola SPBE, melalui penyelarasan peta rencana SPBE dengan dokumen perencanaan daerah serta peningkatan integrasi layanan digital antar perangkat daerah.
2. Optimalisasi audit TIK, guna memastikan keamanan, efektivitas, dan keberlanjutan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM, melalui penguatan peran tim koordinasi SPBE serta peningkatan kompetensi aparatur dalam pengelolaan teknologi informasi.
4. Penguatan integrasi sistem menuju pemerintahan digital, melalui penyusunan arsitektur SPBE yang terpadu dan pengembangan interoperabilitas sistem informasi antar perangkat daerah.

Melalui langkah tersebut diharapkan implementasi SPBE di Kota Blitar dapat semakin optimal serta mampu mendukung transformasi digital pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

2.1.4.1.4 Indeks Pelayanan Publik

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) merupakan mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi pemerintah. Evaluasi ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang hasil pengukuran tersebut berupa Indeks Pelayanan Publik (IPP). Terdapat 6 (enam) aspek yang menjadi dasar penilaian berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2017. Enam aspek tersebut adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem

informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik dengan kategori terdiri dari A, A-, B, B-, C, C-, D, E, dan F.



Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2026

Gambar 2.68

Indeks Pelayanan Publik Kota Blitar 2022-2025

Pada Tahun 2022 nilai indeks tercatat sebesar 4,395, kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2023 menjadi 4,05. Selanjutnya pada Tahun 2024 nilai indeks meningkat menjadi 4,52, dan pada Tahun 2025 kembali meningkat menjadi 4,69. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, khususnya dalam pemenuhan standar pelayanan dan peningkatan kualitas sarana pendukung pelayanan. Dengan nilai 4,69 pada tahun 2025 dengan kategori Pelayanan Prima (A) di mana kategori tersebut merupakan kategori terbaik. Dengan capaian kategori A tersebut, Kota Blitar dinilai sangat prima dalam menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

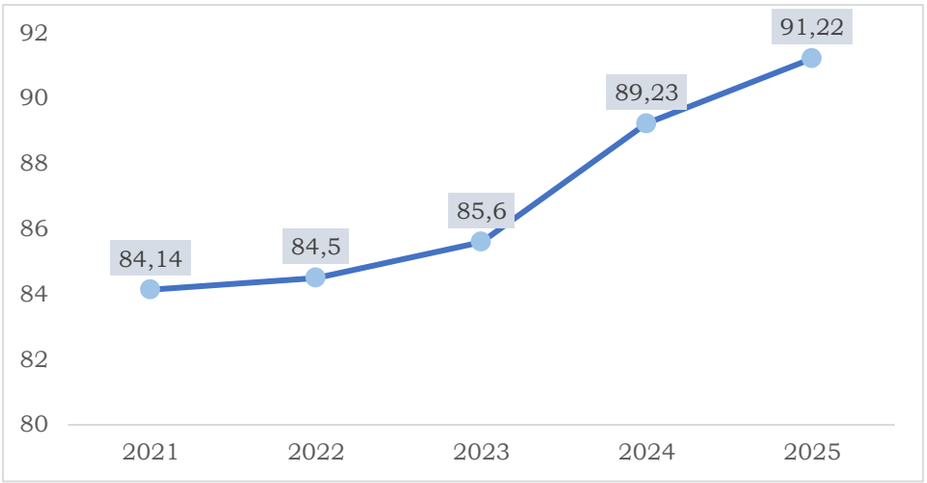
Peningkatan IPP tersebut tidak lepas dari sejumlah faktor pendukung strategis. Pertama, pelaksanaan pembinaan menyeluruh terhadap seluruh perangkat daerah, termasuk pengisian dokumen evaluasi mulai dari F01 hingga F03, telah memberikan dasar penilaian yang lebih akurat dan objektif. Kedua, capaian tinggi pada indikator sarana-prasarana, sistem informasi pelayanan publik, dan kebijakan pelayanan menunjukkan bahwa perangkat daerah telah mampu mengimplementasikan mekanisme layanan secara konsisten dan mendukung pemenuhan standar nasional pelayanan publik. Ketiga, keberadaan tim evaluator internal SPBE dan dukungan aktif perangkat daerah memperkuat koordinasi dan konsistensi implementasi pelayanan.

Meski demikian, terdapat tantangan mendasar yang masih memerlukan perhatian. Tiga indikator dengan capaian terendah—aspek inovasi, profesionalisme SDM, dan konsultasi serta pengaduan, mengindikasikan bahwa pelayanan publik di Kota Blitar masih terbatas pada pemenuhan standar prosedural, sementara aspek transformasi dan inovasi layanan yang bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat belum optimal. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Blitar akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain meningkatkan kemampuan dan kesadaran perangkat daerah dalam menciptakan inovasi pelayanan melalui pengembangan inovasi pada perangkat daerah yang disertai dengan pelaksanaan perlombaan inovasi

pelayanan publik. Selain itu, akan dilakukan peningkatan kegiatan diskusi terkait pengarusutamaan inovasi di lingkungan perangkat daerah serta penguatan pembinaan pelayanan publik melalui kerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman Republik Indonesia, maupun lembaga pendidikan. Upaya lainnya adalah dengan membentuk forum-forum pelayanan publik yang membahas berbagai isu strategis dan tren pelayanan publik sebagai sarana berbagi praktik baik antar perangkat daerah. Melalui langkah tersebut diharapkan kualitas pelayanan publik di Kota Blitar dapat terus meningkat serta mampu memberikan pelayanan yang lebih responsif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

2.1.4.1.5 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Nilai IKM yang tinggi mencerminkan kepuasan masyarakat yang baik terhadap layanan publik, sementara nilai yang rendah menunjukkan perlunya perbaikan sistem pelayanan.



Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2025

Gambar 2.69

Nilai IKM Perangkat Daerah Kota Blitar 2022-2025

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Blitar menunjukkan tren positif dari 84,14 pada 2021 menjadi 91,22 pada 2025, mencerminkan peningkatan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dari sembilan indikator yang digunakan dalam survei, indikator dengan capaian tertinggi meliputi penanganan pengaduan (98,05), biaya/tarif (97,08), dan perilaku pelaksana (90,75), menunjukkan bahwa masyarakat merasakan respons cepat, transparansi biaya, dan sikap profesional aparat dalam pelayanan. Sebaliknya, indikator dengan capaian relatif rendah adalah sarana-prasarana (89,15), produk spesifikasi (89,06), dan waktu pelayanan (87,97), menandakan perlunya perbaikan pada fasilitas fisik, ketepatan layanan, dan kualitas produk layanan yang langsung diterima masyarakat.

Beberapa kendala masih mempengaruhi optimalisasi IKM, antara lain: keterlambatan pelaporan tindak lanjut SKM oleh beberapa perangkat daerah, pemanfaatan aplikasi Sukma-e yang belum maksimal, dan belum seluruh

perangkat daerah melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP). Kondisi ini menekankan perlunya penguatan mekanisme monitoring, koordinasi, dan kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat.

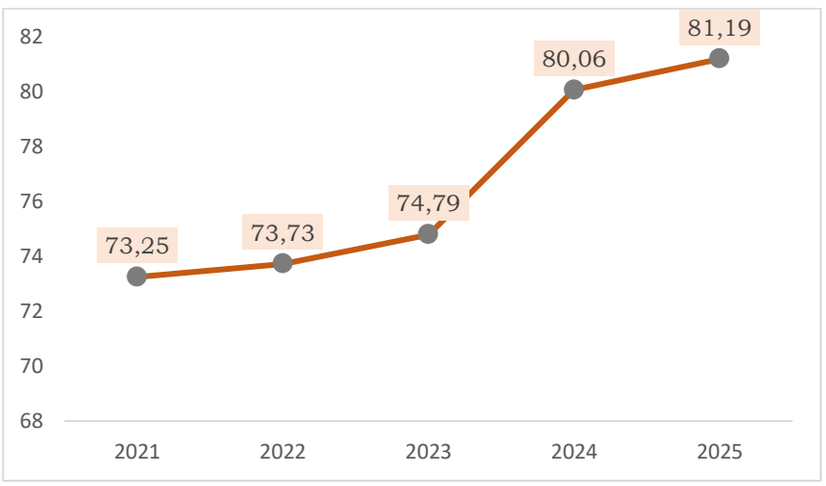
Untuk meningkatkan kualitas IKM ke depan, langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi pelaporan tindak lanjut SKM per triwulan, termasuk pemanfaatan aplikasi Sukma-e;
2. Sosialisasi kewajiban pelaksanaan FKP untuk seluruh perangkat daerah;
3. Peningkatan indikator waktu pelayanan melalui implementasi sistem digital, penggunaan chatbot atau AI untuk respons instan, dan sistem antrian digital yang efisien;
4. Peningkatan indikator produk spesifikasi dengan inovasi layanan, penguatan administrasi data, dan perancangan program yang langsung bermanfaat bagi masyarakat;
5. Peningkatan indikator sarana-prasarana melalui pemeliharaan fasilitas, penambahan fasilitas ramah disabilitas dan lansia, serta penyesuaian fasilitas dengan kebutuhan pengguna layanan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Blitar tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif, profesional dan inovatif.

2.1.4.1.6 Nilai SAKIP

Pencapaian Nilai SAKIP Kota Blitar diperoleh dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP oleh evaluator KemenPAN RB pada tahun berkenaan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah kerangka sistem manajemen kinerja yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi SAKIP bertujuan agar setiap perangkat daerah mampu merencanakan, mengukur, melaporkan, dan mengevaluasi kinerja secara sistematis, sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat diukur secara objektif dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan SAKIP, proses perencanaan kinerja, pengukuran indikator, pelaporan, dan evaluasi menjadi terintegrasi, memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data dan pembelajaran berkelanjutan *(continuous improvement)*.



Sumber : Sekretariat Daerah Kota Blitar,2026

Gambar 2.70

Nilai SAKIP Kota Blitar Tahun 2022 - 2025

Berdasarkan capaian nilai SAKIP Kota Blitar pada periode 2021–2025, terlihat tren peningkatan yang konsisten. Pada Tahun 2022 nilai tercatat 73,73, kemudian meningkat menjadi 74,79 pada Tahun 2023. Tahun 2024 menunjukkan lonjakan signifikan menjadi 80,06, dan pada Tahun 2025 meningkat lagi menjadi 81,19 dengan predikat A. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja adalah "memuaskan", yaitu instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

Meski Capaian nilai SAKIP mengalami tren kenaikan yang konsisten, dan sudah dua tahun terakhir mencapai nilai A, namun ada beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya sebagai berikut :

a. Perencanaan
   - Beberapa perangkat daerah belum sepenuhnya menyelaraskan rencana kinerja tahunan dengan Renstra dan sasaran strategis daerah

b. Pengukuran
   - Indikator kinerja di beberapa perangkat daerah belum sepenuhnya SMART (Spesifik, *Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*)
   - Pemahaman SDM terkait metodologi pengukuran kinerja masih bervariasi sehingga kualitas data pengukuran terkadang belum akurat.

c. Pelaporan
   - Beberapa perangkat daerah belum tepat waktu dalam penyampaian laporan kinerja.
   - Informasi yang disampaikan dalam penilaian kinerja belum dilengkapi dengan analisis penyebab keberhasilan dan atau kegagalannya.
   - Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan strategi perencanaan kinerja tahun berikutnya, terutama pada capaian kinerja yang belum tercapai sesuai target di tahun sebelumnya.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
   - Evaluasi internal di beberapa perangkat daerah masih dilakukan sporadis dan belum sistematis
   - Tindak lanjut hasil evaluasi belum selalu dijadikan dasar perbaikan kinerja berikutnya.

Strategi penguatan ke depan meliputi penyusunan rencana kinerja yang terintegrasi dan berbasis indikator SMART, peningkatan kapasitas SDM melalui bimtek dan pendampingan teknis, pemanfaatan sistem SAKIP digital untuk pelaporan dan monitoring secara rutin, serta mekanisme evaluasi internal yang terstruktur dan berkelanjutan agar setiap tindak lanjut evaluasi dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di seluruh perangkat daerah.

2.1.4.1.7 Opini BPK atas Laporan Keuangan

WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*) adalah predikat tertinggi yang diberikan oleh auditor eksternal, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. Predikat ini diberikan bilamana penyajian laporan keuangan sudah dilakukan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAP).

Tabel 2.36

Opini BPK atas Laporan Keuangan

Kota Blitar Tahun 2021 - 2025

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Blitar, 2024

Pemerintah Kota Blitar telah memperoleh Opini WTP atas Laporan Keuangan sejak tahun 2010 secara berturut-turut dan menjadi satu-satunya Pemerintah Daerah di Jawa Timur yang mendapatkan predikat tersebut sebanyak 15 kali berturut-turut. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Blitar sejak tahun 2010 secara konsisten menerapkan tata kelola keuangan yang baik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dokumen anggaran, pengawasan dan pertanggungjawabannya.

Faktor pendukung tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Blitar selama 15 kali berturut-turut antara lain sebagai berikut:

a. Komitmen pimpinan daerah terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel.
b. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara konsisten.
c. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
d. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan.
e. Pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
f. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan secara konsisten.
g. Penguatan fungsi pengawasan internal oleh APIP (Inspektorat).

Faktor penghambat pencapaian Opini WTP atas LKPD Pemerintah Kota Blitar diantaranya sebagai berikut:

a. Pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya tertib.
b. Kualitas administrasi dan dokumentasi keuangan yang belum sepenuhnya memadai.
c. Pemahaman dan kompetensi pengelola keuangan pada sebagian perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan.
d. Koordinasi dan konsolidasi data keuangan antar perangkat daerah yang belum optimal.
e. Kepatuhan terhadap prosedur dan pengendalian internal yang masih perlu diperkuat.

f. Keterbatasan sistem informasi yang terintegrasi secara menyeluruh.

g. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang memerlukan waktu penyelesaian

h. Implementasi manajemen risiko yang belum sepenuhnya terinternalisasi dan terintegrasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah

Dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pemerintah Kota Blitar perlu terus melakukan penguatan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Strategi penguatan yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut :

a. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

b. Optimalisasi Peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

c. Peningkatan kualitas pengelolaan dan penatausahaan aset daerah

d. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pengelola keuangan

e. Penguatan implementasi manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan daerah

f. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

g. Peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI

h. Penguatan komitmen pimpinan dan budaya integritas dalam pengelolaan keuangan daerah

2.1.4.1.8 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan pembangunan di tingkat daerah, termasuk kualitas pengendalian dan evaluasi. IPPD mengukur sejauh mana suatu daerah telah menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan secara efektif dan efisien.

Tabel 2.37

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar

Tahun 2022 – 2025

No.	Indikator	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	97,54	91,93	99,15	79,74

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, 2026

Secara umum, tren capaian IPPD Kota Blitar selama tiga tahun terakhir menunjukkan pola fluktuatif yang mencerminkan dinamika kualitas perencanaan pembangunan daerah. Meski demikian masih berada pada kategori sangat berhasil, hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah secara umum sudah berjalan baik, terstruktur, dan sesuai dengan kaidah perencanaan yang berlaku.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja IPPD Kota Blitar yaitu hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar dalam perbaikan perencanaan tahun berikutnya.

Sedangkan faktor pendorongnya antara lain :

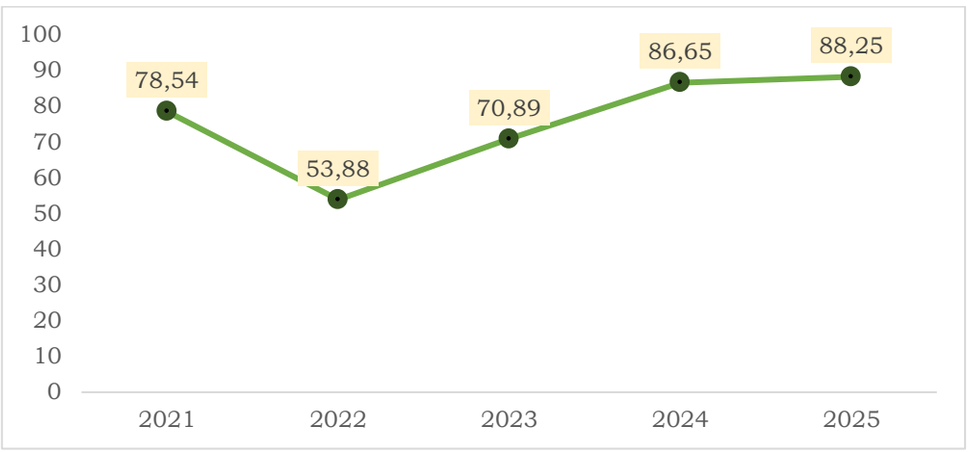
a. Terjalinnya koordinasi yang baik antara Bapperinda dengan Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan.
b. Telah disusunnya dokumen RIPJPID yang merupakan dokumen perencanaan strategis daerah yang memuat arah kebijakan, strategi, dan peta jalan pengembangan riset, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEK) untuk mendukung pembangunan daerah.

2.1.4.1.9 Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)

Indeks Profesional ASN merupakan indikator strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur negara. Dengan pengukuran yang sistematis dan berkelanjutan, pemerintah dapat memastikan bahwa ASN memiliki kompetensi, integritas, dan kinerja yang sesuai dengan tuntutan pelayanan publik modern. Implementasi indeks ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berdaya saing tinggi di Indonesia.

Persentase ASN yang Memenuhi Standar Profesionalitas menurut data Lembaga Administrasi Negara (LAN) mencatat bahwa sekitar 35,23 % ASN secara nasional memenuhi standar kompetensi dalam kerangka IP ASN sampai akhir tahun 2022. Artinya, sebagian besar ASN belum mencapai standar kompetensi yang diharapkan sebagai bagian dari profesionalitas mereka.

Untuk Kota Blitar sendiri menunjukkan bahwa hasil pengukuran IP ASN oleh Pemerintah Kota Blitar tahun 2025 mencapai sekitar 86,65 dan masuk dalam kategori tinggi (*high*). Ini merupakan angka capaian dari seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar, 2025

Gambar 2.71

Indeks Profesionalitas ASN Kota Blitar

Tahun 2021 – 2025

2.1.4.1.10 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tingkat Maturitas *(Maturity Level)* Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya. Adapun capaian Maturitas SPIP Kota Blitar Tahun 2021 – 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.38

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Blitar Tahun 2021 - 2025

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Maturitas SPIP	3	BPKP tidak melaksanakan QA	3	3	3*

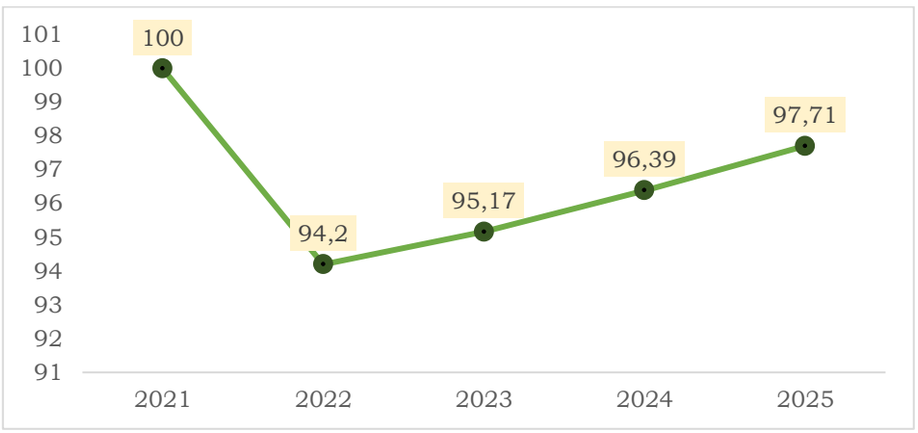
Sumber : Inspektorat Daerah Kota Blitar, 2026

Maturitas SPIP Kota Blitar berada pada Level 3. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan telah terdokumentasi dengan baik. Sebagai bentuk pengendalian intern, Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Pedoman Pengelolaan Risiko melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 63 Tahun 2021. Berdasarkan pedoman pengelolaan risiko diharapkan unit pengendali risiko baik tingkat Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah maupun unit pelaksananya dapat mengidentifikasikan, menganalisa dan mengendalikan risiko yang muncul mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dokumen anggaran, pengawasan dan pertanggungjawabannya.

2.1.4.2 Hukum, Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substantial

2.1.4.2.1 Persentase Penegakan Perda

Penegakan peraturan daerah (Perda) adalah aspek penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Capaian persentase penegakan perda di Kota Blitar menunjukkan seberapa baik Pemerintah Kota Blitar dalam menegakkan aturan dan memastikan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Berikut adalah realisasi persentase penegakan Perda di Kota Blitar selama lima tahun terakhir.



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, 2026

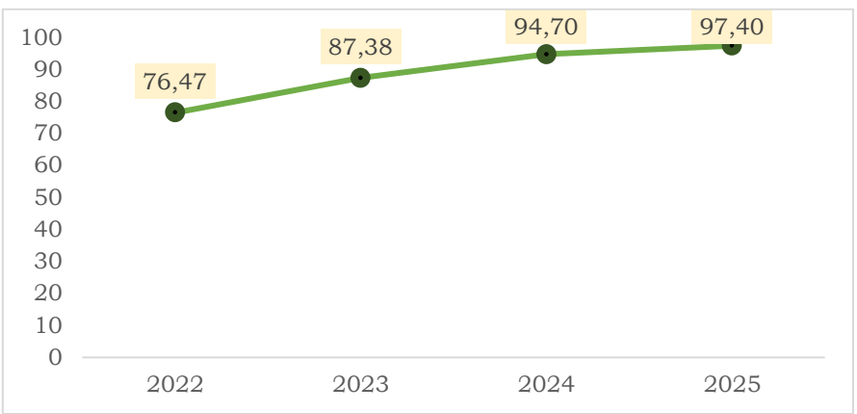
Gambar 2.72

Persentase Penegakan Perda Kota Blitar Tahun 2021 - 2025

Pada tahun 2025, capaian penegakan perda kembali menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, mencapai 97,71%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Blitar berhasil melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan dalam rangka mengatasi masalah yang menghambat penegakan perda pada tahun sebelumnya. Peningkatan di tahun 2025 menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan yang terjadi sepanjang 2022 hingga 2024, Kota Blitar tetap berusaha untuk memperbaiki dan mengoptimalkan penegakan perda dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan penegakan Perda ke depannya, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam penegakan perda serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat.

2.1.4.2.2 Persentase Capaian Aksi HAM

Pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan senantiasa menempatkan penguatan kualitas demokrasi serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pilar fundamental dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kota Blitar secara konsisten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap indikator-indikator strategis guna mengukur sejauh mana kebijakan daerah mampu merespons kebutuhan masyarakat secara substantif. Sejalan dengan semangat tersebut, analisis berikut akan memaparkan perkembangan signifikan pada persentase capaian Aksi HAM di Kota Blitar dalam kurun waktu lima tahun terakhir.



Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2026

Gambar 2.73

Persentase Capaian Aksi HAM Tahun 2022 - 2025

Realisasi capaian Aksi HAM di Kota Blitar selama periode 2022 hingga 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif dan konsisten secara berkelanjutan. Kenaikan yang stabil ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Capaian impresif pada tahun 2025, yang hampir mendekati angka sempurna, merupakan hasil dari efektivitas pelaksanaan lima aksi utama yang menjadi indikator penilaian Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Keberhasilan tersebut mengindikasikan bahwa integrasi instrumen HAM ke dalam program pembangunan daerah telah berjalan dengan sinergi yang baik antar perangkat daerah. Peningkatan poin di setiap

tahunnya membuktikan adanya evaluasi yang berjalan efektif serta optimalisasi sumber daya dalam merespons isu-isu HAM di lapangan. Dengan demikian, progres ini menegaskan bahwa Kota Blitar semakin solid dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

2.1.4.2.3 Indeks Harmoni Indonesia

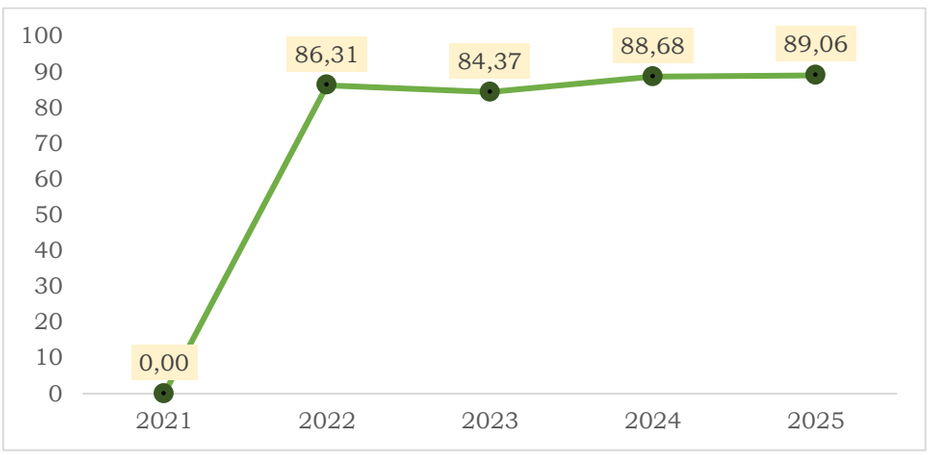
Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) merupakan alat ukur yang dikembangkan untuk memahami, memantau, dan meningkatkan harmoni sosial di berbagai wilayah Indonesia dengan mengukur 4 dimensi yaitu ekonomi, sosial, budaya dan keberagamaan. Pada tahun 2025 skor IHaI Kota Blitar mencapai 6,91 (kategori baik). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Blitar sudah berada pada level harmoni yang baik (mendekati kategori tinggi), di mana keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan telah berjalan secara efektif namun masih memiliki ruang untuk terus ditingkatkan.

Dalam dimensi ekonomi, angka ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penguatan kewirausahaan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara sosial, skor tersebut memvalidasi kuatnya kohesi sosial yang dibangun atas dasar rasa saling percaya dan keterlibatan aktif kelompok perempuan serta pemuda dalam proses pengambilan keputusan publik, sehingga setiap kebijakan yang diambil memiliki tingkat penerimaan yang tinggi di tingkat akar rumput.

Harmoni di Kota Blitar juga diperkokoh oleh dimensi budaya dan keberagamaan yang berfungsi sebagai jangkar stabilitas daerah. Kemampuan masyarakat dalam menjaga kelestarian nilai budaya lokal di tengah arus akulturasi menunjukkan ketahanan identitas yang luar biasa, yang kemudian disempurnakan dengan praktik moderasi beragama secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

2.1.4.2.4 Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah.



Sumber : Bakesbangpol Kota Blitar, 2026

Gambar 2.74

IDI Kota Blitar Tahun 2021 - 2025

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang menarik. Pada tahun 2021, grafik mencatat angka realisasi nol yang disebabkan oleh transisi kebijakan nasional melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200/2202/SJ. Kebijakan ini mengatur penyesuaian Pokja IDI serta sosialisasi IDI Metode Baru yang menyebabkan penilaian ditarik ke tingkat provinsi, sehingga Kota Blitar tidak melaksanakan perhitungan mandiri pada tahun tersebut. Namun, pasca transisi tersebut, Kota Blitar langsung menunjukkan performa demokrasi yang kuat, dimulai dengan skor 86,31 pada tahun 2022. Meskipun sempat mengalami sedikit fluktuasi pada tahun 2023 ke angka 84,37, tren positif kembali terlihat dengan kenaikan konsisten pada tahun 2024 sebesar 88,68 hingga mencapai puncaknya di angka 89,06 pada tahun 2025.

Keberhasilan capaian IDI pada tahun 2025 merupakan buah dari peningkatan kinerja yang solid pada seluruh pilar pembentuk demokrasi, yakni aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek lembaga demokrasi. Kontribusi positif dari ketiga aspek tersebut secara kumulatif membuktikan bahwa pembangunan demokrasi di Kota Blitar telah dijalankan secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber daya yang tepat sasaran. Kondisi ini menegaskan bahwa kualitas demokrasi di Kota Blitar tidak sekadar memenuhi tuntutan prosedural, tetapi telah menyentuh level substantif. Hal ini tercermin dari terpenuhinya hak-hak sipil, semakin kuatnya kelembagaan politik, serta meningkatnya rasa keadilan dan kesetaraan bagi seluruh elemen masyarakat di Kota Blitar.

2.1.4.2.5 Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan trantibum yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Urgensi dari IPKKU adalah untuk melihat dan memastikan secara utuh apakah pengelolaan maupun pemberdayaan Satpol PP dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dari level provinsi sampai kabupaten/kota telah mendapatkan dukungan kebijakan, dukungan program maupun dukungan lainnya.

Tabel 2.39

Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Blitar Tahun 2023 - 2025

No	Indikator	2023	2024	2025
1	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	98,52	81,43

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2026

Berdasarkan data pada Tabel 2.32, Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Blitar menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, indeks ini berada pada posisi maksimal yaitu 100, namun mengalami penurunan menjadi 98,52 pada tahun 2024, dan turun lebih tajam mencapai

angka 81,43 pada tahun 2025. Penurunan nilai ini dipengaruhi oleh beberapa kendala utama, di antaranya adalah rendahnya capaian pada aspek penegakan Peraturan Daerah (Perda), belum optimalnya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, serta belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang operasional secara menyeluruh.

Sebagai langkah strategis untuk memperbaiki angka indeks tersebut, Pemerintah Kota Blitar melalui instansi terkait perlu melakukan tindak lanjut yang lebih komprehensif dengan mengedepankan pendekatan preventif. Fokus utama yang akan dilaksanakan adalah melakukan sosialisasi secara persuasif dan humanis pada saat pelaksanaan patroli lapangan agar pesan-pesan ketertiban dapat diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa menimbulkan konflik. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas personel dan pemenuhan sarana teknis secara bertahap agar penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dapat kembali berjalan optimal sesuai dengan target yang ditetapkan.

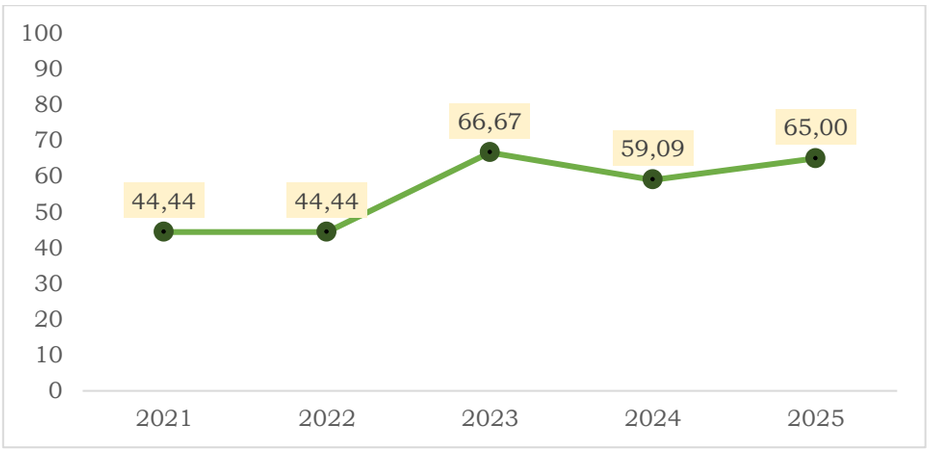
2.1.4.2.6 Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan yang dirasakan oleh masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti keamanan dari kejahatan, bencana alam, serta stabilitas sosial dan politik. Tujuan utama dari pengukuran ini adalah untuk memahami persepsi masyarakat terhadap kondisi keamanan di lingkungan mereka, yang selanjutnya dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan keamanan.

Pengukuran Indeks Rasa Aman biasanya dilakukan melalui survei yang melibatkan berbagai variabel, antara lain Keamanan dari Kejahatan, Keamanan dari Bencana Alam, Kesejahteraan Sosial, Perlindungan atas Kebhinekaan. Pengukuran atas Indeks Rasa Aman pada tahun 2024 sebesar 76,6.

2.1.4.2.7 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan

Kinerja penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kota Blitar dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat, mencapai angka 65,00% pada tahun 2025.



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2026

Gambar 2.75

Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan

Tahun 2021 - 2025

Capaian ini didorong oleh faktor pendukung utama berupa responsifitas pemerintah dalam menangani pengaduan masyarakat serta konsistensi dalam menindaklanjuti pelanggaran aturan yang ada. Meski demikian, progres ini masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan, di antaranya sanksi yang dinilai belum memberikan efek jera serta perlunya penyesuaian regulasi pasca-terbitnya KUHP baru guna merevisi ketentuan sanksi yang relevan. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana penunjang dan adanya resistensi atau penolakan dari kelompok masyarakat tertentu saat proses penertiban di lapangan menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi penegakan hukum. Sebagai langkah strategis ke depan, diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat Daerah (PD) serta instansi vertikal terkait guna menyelaraskan kebijakan dan memperkuat legitimasi penegakan aturan di wilayah Kota Blitar.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.1.4.4 Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.4.4.1 Urusan Wajib

2.1.4.4.1.1 Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan aspek fundamental dalam kemajuan suatu bangsa. Pendidikan tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi pondasi bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara berinvestasi dalam sektor pendidikan untuk menciptakan generasi yang kompeten, kreatif, dan mampu bersaing di era global.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan adalah akses yang merata terhadap pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah di berbagai wilayah telah berupaya menghilangkan hambatan seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan keterbatasan infrastruktur yang sering kali menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Program-program seperti beasiswa, sekolah gratis, dan pembangunan fasilitas pendidikan menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah.

Tabel 2.40

Indikator Urusan Pendidikan Tahun 2022 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1.	Indeks SPM Bidang Pendidikan	Indeks	99,50	97,77	85,48	85,48

Sumber: *Dinas Pendidikan Kota Blitar, 2026*

2.1.4.4.1.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan

nasional yang berkelanjutan. Pembangunan kesehatan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan komitmen dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan meningkatkan akses, kualitas, dan kesadaran akan pentingnya kesehatan, maka dapat menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan sejahtera.

Capaian kinerja urusan kesehatan di Kota Blitar selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 2.41

Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Indeks	Data belum pernah dirilis				Perhitungan dilaksanakan tahun 2026
2.	Angka Kesakitan	Persen	9,99	14,87	9,64	9,45	13,19
3.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	5,23	9,19	4,77	7,39	3,46
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	Indeks	82,65	84,08	84,20	86,78	90,30
5.	Angka kematian ibu (AKI) AMPSR	Per 100.000 kelahiran hidup	889,59	172,31	47,68	130,49	0

Sumber: *Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2026*

2.1.4.4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diselenggarakan untuk mewujudkan tersedianya infrastruktur yang berkualitas dengan melalui pembangunan, pemeliharaan rutin dan berkala sarana prasarana infrastruktur kota yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan/rehabilitasi jalan, jembatan, saluran drainase, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, pembangunan sarpras air bersih dan air limbah.

Kondisi jalan dari tahun 2021 sampai tahun 2025 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42

Kondisi Jalan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025

No	Kondisi Jalan	2021		2022		2023		2024		2025	
		km	%	Km	%	km	%	km	%	km	%
1	Baik	190,454	72,2	156,212	59,2	228,637	91,0	113,2	45,06	108,895	44,57
2	Sedang	64,463	24,4	102,015	38,6	17,623	7,0	118,89	47,30	116,748	47,79
3	Rusak	9,050	3,4	5,740	2,2	5,040	2,0	19,21	7,64	18,673	7,64
Total		263,967	100	263,967	100	251,300	100	251,03	100	244,316	100

Sumber: Dinas PUPR, 2026

Perubahan panjang jalan disebabkan ada perubahan Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/360/HK/410.010.2/2017 tentang Status Jalan dan Kondisi Jalan di Wilayah Kota Blitar dari 263.967 km, diubah dengan Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor 100.3.3.3/225/HK/410.020.3/2025 tentang Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kota menjadi 251.300 km dengan mengeluarkan jalan nasional dan jalan provinsi. Sehingga untuk selanjutnya daerah hanya mencatat jalan kota sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Tabel 2.43

Kondisi Kemantapan Jalan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025

No	Kondisi	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kemantapan Jalan	96,6	97,8	98,0	92,47	92,36

Sumber: Dinas PUPR, 2026

Tingkat Kemantapan Jalan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kualitas infrastruktur jalan dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan kegiatan perekonomian di Kota Blitar. Upaya peningkatan kemantapan jalan terus dilakukan melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Pencapaian indikator ini didukung oleh pemanfaatan data kondisi jalan dan perencanaan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Selain itu, koordinasi yang baik antar bidang dan dengan perangkat daerah terkait turut mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Adapun kendala yang dihadapi antara lain masih adanya kerusakan jalan akibat kendaraan yang melebihi batas tonase yang ditetapkan, serta proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan waktu cukup panjang sehingga memengaruhi pelaksanaan kegiatan.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Blitar akan melakukan penanganan jalan dan jembatan berdasarkan skala prioritas sesuai tingkat kerusakan dan fungsi pelayanan. Selain itu, perencanaan teknis dan pemeliharaan rutin akan terus diperkuat untuk mencegah kerusakan yang lebih berat serta menjaga kemantapan jalan secara berkelanjutan.

Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada periode tahun 2021–2023 belum dilakukan perhitungan sehingga belum tersedia data capaian yang dapat dibandingkan. Sedangkan kinerja tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.44

Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun	
			2024	2025
1	Indeks Infrastruktur Bina Marga	Indeks	92	92,36
2	Persentase Luas Lahan yang Teraliri Irigasi (Primer dan Sekunder) Secara Optimal	Persen	78	80,40
3	Indeks Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi	Indeks	56	64,61
4	Indeks penyehatan lingkungan	Indeks	33,90	34,38
5	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai	78,75	78,75
6	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	20	Belum dilaksanakan pengukuran

Sumber: *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, 2026*

Lebih lanjut, permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

a. Sebagian konstruksi jaringan irigasi telah melewati umur bangunan sehingga rawan mengalami kerusakan.
b. Banyaknya endapan dan sampah di saluran irigasi dan drainase menyebabkan saluran tidak berfungsi secara optimal.
c. Beberapa bangunan gedung sudah tidak memadai untuk mendukung aktivitas kegiatan pelayanan
d. Perlunya peningkatan kompetensi bagi pelaku jasa konstruksi dan perhatian dalam bentuk *reward dan punishment* bagi pelaku jasa konstruksi.
e. Ketersediaan lahan dan keberlanjutan pengelolaan SPALD terbangun
f. Belum tersedianya tata kelola aset dan Belum jelasnya pembagian kewenangan penyelenggaraan SPAM, Kurang tersedianya lahan untuk pembangunan SPAM baru
g. Belum melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang secara optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, beberapa hal yang dapat mendukung ketercapaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

a. Monitoring dan evaluasi serta updating terhadap kondisi jaringan irigasi secara berkala
b. Penanganan pemenuhan standar bangunan yang teralokasikan di beberapa perangkat daerah selaku pengguna/pengelola
c. Tertib perijinan dan tertib administrasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta terlaksanakannya pekerjaan konstruksi yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya

d. Koordinasi yang masif dengan instansi terkait dalam upaya mempercepat capaian kinerja

e. Semakin besarnya komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal melalui penyediaan akses air minum bagi masyarakat

f. Peningkatan peran forum penataan ruang Kota Blitar dalam mendukung penyelenggaraan penataan ruang.

2.1.4.4.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman salah satunya adalah untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Berikut capaian indikator kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

Tabel 2.45

Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	5,11	4,04	3,49	5,99	4,96
2	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,246	0,251	0,255	0,255	0,256
3	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	Persen	67,02	72,3	77,13	43,75	52,625

Sumber: *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, 2025*

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

b. Kawasan Kumuh di Kota Blitar mengalami pengurangan 1,03% dari tahun 2024 sebesar 5,99% menjadi 4,96% pada tahun 2025. Hal ini karena adanya dukungan koordinasi dalam melakukan penanganan kawasan kumuh dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan dari 7 indikator kumuh yang terdiri dari:

1. Kondisi bangunan,
2. Kondisi jalan lingkungan,
3. Kondisi penyediaan air minum,
4. Kondisi drainase lingkungan,

5. Kondisi pengelolaan air limbah,
6. Kondisi pengelolaan persampahan,
7. Kondisi pengamanan proteksi kebakaran.

Hambatan yang dihadapi dalam penanganan Kawasan kumuh adalah belum adanya perencanaan yang terintegrasi dalam penanganan kumuh skala Kawasan, untuk itu perlu tindak lanjut disusunnya perencanaan secara terpadu dalam penanganan kawasan kumuh skala kawasan dan kolaborasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan penanganan kawasan kumuh.

c. Rasio Rumah Layak Huni di Kota Blitar mengalami peningkatan sebesar 0,001 dari tahun 2024 sebesar 0,255 menjadi 0,256 di tahun 2025. Penanganan Pembangunan rumah layak huni ini tidak sesuai dengan yang ditargetkan dikarenakan mengalami kendala berupa menurunnya anggaran APBD guna penanganan RTLH Tidak adanya alokasi bantuan Penanganan RTLH dari Kementerian PKP.

Persentase perumahan dan Kawasan permukiman dengan PSU layak mengalami peningkatan sebesar 8,875% dari tahun 2024 sebesar 43,75% menjadi 52,625% pada tahun 2025.

2.1.4.4.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Blitar diampu oleh 2 Perangkat Daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berikut capaian indikator kinerja urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

Tabel 2.46

Indikator Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2021 - 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada	Pelanggaran	440	993	414	386	343
2	Frekuensi kejadian kebakaran	Kali	17	16	32	36	20
3	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kasus	1.744	1.668	1.529	1.394	1.028
4	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,31	0,40	0,43	0,40	0,41

Sumber: *Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar 2026*

2.1.4.4.1.6 Sosial

Urusan bidang sosial yang merupakan salah satu dari urusan pemerintahan wajib yang termasuk Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayananan Dasar. Penyelenggaraan urusan sosial diarahkan pada peningkatan pemeratan kesejahteraan sosial masyarakat, dan peningkatan kualitas layanan sosial. Sampai dengan tahun 2025, salah satu program prioritas yang terus dilaksanakan secara konsisten adalah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, yang sebagian besar merupakan urusan di bidang sosial. Capaian kinerja urusan sosial lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.47

Indikator Urusan Sosial Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase PPKS yang meningkat kemampuan fungsi sosialnya	Persen	Tahun 2021 – 2023 belum dilaksanakan perhitungan untuk persentase PPKS yang meningkat kemampuan fungsi sosialnya			89,71	90,45

Sumber: *Dinas Sosial Kota Blitar, 2026*

Pemerintah Kota Blitar terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal ini tercermin dari tren positif pada indikator persentase PPKS yang meningkat kemampuan fungsi sosialnya.

Capaian indikator persentase PPKS yang meningkat kemampuan fungsi sosialnya di Kota Blitar didorong oleh penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan, mulai dari rehabilitasi hingga perlindungan sosial yang berbasis data akurat. Keberhasilan ini didukung oleh pendampingan profesional, sinergi antar instansi, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya motivasi internal PPKS, kurangnya dukungan lingkungan, serta keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM kesejahteraan sosial. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Blitar akan mengoptimalkan kompetensi SDM pelayanan sosial serta mengintensifkan bimbingan sosial bagi PPKS dan keluarganya guna menciptakan lingkungan pendukung yang lebih efektif.

2.1.4.4.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.4.4.2.1 Ketenagakerjaan

Sektor ketenagakerjaan memegang peranan krusial dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menekan jumlah permasalahan ketenagakerjaan yang muncul setiap tahunnya. Adapun capaian urusan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.48

Indikator Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun	
			2024	2025
1	Persentase penurunan permasalahan ketenagakerjaan	Persen	5,10	2

Sumber: *Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, 2026*

Indikator persentase penurunan permasalahan ketenagakerjaan mencatatkan angka 5,10% pada tahun 2024 dan mengalami penurunan menjadi 2% pada tahun 2025. Capaian ini secara didukung oleh langkah kolaboratif melalui pelaksanaan pembinaan kepatuhan bagi perusahaan yang melibatkan tim terpadu lintas instansi, Sinergi ini menjadi kekuatan utama dalam memastikan perusahaan menjalankan operasionalnya sesuai dengan standar regulasi yang berlaku secara komprehensif.

Namun demikian, terdapat tantangan nyata yang menjadi faktor penghambat, yakni keterbatasan jumlah SDM pembina yang belum sebanding dengan luasnya jangkauan perusahaan yang perlu diawasi. Hal ini diperparah dengan masih rendahnya pemahaman pihak perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan, yang sering kali memicu timbulnya perselisihan atau ketidakpatuhan administratif. Sebagai solusi atas kendala tersebut, pemerintah berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut berupa penguatan pembinaan dan sosialisasi secara lebih masif. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum bagi pelaku usaha, sehingga potensi permasalahan ketenagakerjaan dapat diminimalisir secara preventif demi terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif.

2.1.4.4.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Adapun capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.49

Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	Madya	NA	Partama	550	710*
2	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya

*Nilai sementara

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Blitar, 2026*

2.1.4.4.2.3 Pangan

Pangan merupakan kebutuhan manusia, untuk itu ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Perlindungan ketahanan pangan merupakan kondisi kecukupan, ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan terpenuhinya kebutuhan pangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif bagi masyarakat untuk menuju masyarakat yang sehat sejahtera dan produktif. Adapun capaian indikator urusan pangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.50

Indikator Urusan Pangan Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun	
			2024	2025
1.	Produktivitas Daging	Kg/Ekor	45,73	45,73
2.	Produktivitas Telur	Kg/Ekor	6,49	6,49
3.	Produktivitas Susu	Kg/Ekor	1739,95	1739,95

Sumber: *Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, 2026*

Peningkatan produktivitas daging dan susu di Kota Blitar didorong oleh pendukung utama berupa ketersediaan pakan berkualitas, ternak yang terjaga, serta jaminan keamanan iklim usaha yang kondusif bagi para peternak. Namun demikian, upaya ini menghadapi penghambat berupa gejolak penyebaran penyakit hewan menular (PMK) dari luar daerah serta meningkatnya kasus penyakit *Helminthiasis* akibat perubahan cuaca ekstrem dan fenomena kemarau basah. Sebagai tindak lanjut yang strategis, Pemerintah Kota Blitar berkomitmen melaksanakan pembagian desinfektan, pemberian obat cacing, dan akselerasi vaksinasi PMK secara berkelanjutan, yang dibarengi dengan kegiatan survey pakan guna memantau ketersediaan, kualitas, serta stabilitas harga di pasar demi menjaga performa produksi ternak tetap optimal.

Pencapaian target produktivitas telur di Kota Blitar didukung secara optimal oleh ketersediaan suplai jagung yang terjaga, adanya alokasi Cadangan Jagung Pemerintah (CJP), serta stabilitas harga telur yang memungkinkan peternak menjaga konsistensi produksi melalui pemberian pakan berkualitas dalam jumlah cukup, serta penerapan biosekuriti ketat guna mencegah serangan penyakit. Meskipun demikian, terdapat penghambat signifikan berupa status Indonesia sebagai daerah endemis flu burung serta ancaman peningkatan kasus global, ditambah dengan risiko perubahan cuaca ekstrem yang memicu penurunan daya tahan tubuh ternak dan meningkatkan kelembapan udara sebagai pemicu penularan penyakit infeksius. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Blitar berkomitmen memfasilitasi akses peternak terhadap suplai jagung murah melalui program CJP, mendistribusikan desinfektan untuk memperkuat biosekuriti di tingkat peternak, serta melaksanakan survei pakan secara rutin guna memantau ketersediaan, kualitas, dan stabilitas harga pakan di pasar.

2.1.4.4.2.4 Pertanahan

Urusan pertanahan difokuskan pada pemanfaatan ruang yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun indikator urusan pertanahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.51

Indikator Urusan Pertanahan Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun	
			2024	2025
1	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	20	26*

*data sementara

Sumber: *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, 2025*

2.1.4.4.2.5 Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan daya dukung SDA, kemudahan akses terhadap layanan sanitasi sektor limbah dan sampah melalui upaya penanganan emisi gas rumah kaca, pemantauan kualitas lingkungan hidup, air dan udara, pengendalian pencemaran serta pengendalian kerusakan lingkungan. Berikut capaian kinerja lingkungan hidup :

Tabel 2.52

Indikator Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	83,76	85,9	85,83	89,79	75,10
2.	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,58	59,73	67,78	56,11	70,86
3.	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	38,52	31,5	33,51	34,13	46,90
4.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	Belum dilaksanakan perhitungan IKPS			61,7	98,01

Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2025*

2.1.4.4.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam upaya pemenuhan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan tugas pelayanan yang dibutuhkan masyarakat secara profesional dan sesuai standar. Capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2021 sampai 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.53

Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	86,66	88,72	89,63	90,11	90,31
2	Persentase penduduk yang memiliki dokumen adminduk lengkap	%	81,81	83,56	85,69	87,96	89,07
3	Persentase peningakatan pemanfaatan data kependudukan	%	NA	19,35	9,68	9,68	9,67

Sumber: *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, 2026*

2.1.4.4.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bertujuan agar laju pertumbuhan penduduk tetap terjaga sehingga dapat memastikan terwujudnya keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup, baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2021 sampai 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.54

Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	56,34	58,38	65,07	65,89	67,30
2	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2.14	1.92	1.91	1,93	1,89
3	Indeks Pengasuhan	Indeks	NA	NA	NA	91,2	82,4

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
	Keluarga yang memiliki Remaja						
4	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	NA	NA	NA	55,3	69,2

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Blitar, 2026*

2.1.4.4.2.8 Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan difokuskan pada peningkatan kualitas perhubungan yang ditunjang oleh sarana dan prasarana perhubungan. Adapun data perlengkapan jalan di Kota Blitar disajikan pada - 141 -able berikut:

Tabel 2.55

Data Perlengkapan Jalan Tahun 2021 – 2025

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Penerangan Jalan Umum	Unit	5.864	5.994	6.041	6.096	5.866
2	Rambu Lalu Lintas	Unit	2.987	2.996	3.004	3.004	1.899
3	*Traffic Light & Ptcl*	Unit	29	29	32	32	32
4	*Warning Light*	Unit	84	89	90	90	91
5	*Cctv*	Unit	23	23	23	23	22
6	Marka Jalan	Unit	123.755	123.755	123.755	123.755	123.755
7	Cermin Tikungan	Unit	60	60	67	70	70
8	*Guarddrill*	Unit	275	275	275	275	275
9	*Deliniator*	Unit	175	175	175	175	175
10	Paku Marka	Unit	995	1.345	1.345	1.345	1.345

Sumber: *Dinas Perhubungan Kota Blitar, 2026*

Ketentuan terkait kelas jalan mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/236/013/2026 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Penggunaan Jalan Serta Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Jalan Kolektor Primer-2, Jalan Kolektor Primer-3, Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder, dan Jalan

Lingkungan Sekunder di Wilayah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan SK tersebut, Kelas Jalan di Kota Blitar sebagai berikut: kelas I sepanjang 5,266 km (2,1%), kelas II sepanjang 30,592 km (12,3%), dan kelas III sepanjang 213,724 km (85,6%).

Kinerja urusan perhubungan juga termasuk penyumbang pendapatan daerah melalui pelayanan parkir. Kinerja pelayanan parkir di Kota Blitar menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Inovasi pelayanan turut menjadi - 142 -able- 142 - utama, seperti sosialisasi tentang karcis parkir resmi berhologram, undian karcis berhadiah, serta patroli dan publikasi untuk menekan praktik parkir liar. Dalam perkembangannya, pengelolaan parkir diadaptasikan dengan kemajuan teknologi sehingga dapat memberikan layanan parkir yang semakin tertata dan profesional, sekaligus mendukung peningkatan kepatuhan masyarakat dan kontribusi PAD daerah.

Tabel 2.56

Data Jumlah Juru Parkir Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Petugas/ Juru Parkir	Orang	226	250	270	282	276

Sumber: *Dinas Perhubungan Kota Blitar, 2026*

Kinerja urusan perhubungan diukur melalui indikator kinerja lalu lintas. Adapun kinerja urusan perhubungan selama lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.57

Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Angka kecelakaan lalu lintas	Angka	301	402	139	164	111
2	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota	Nilai	0,260	0,478	0,259	0,283	0,254
3	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	70	70	70	70	70

Sumber: *Dinas Perhubungan Kota Blitar, 2026*

Terkait dengan perlintasan sebidang, upaya peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang kereta api di Kota Blitar terus dilakukan melalui pemeliharaan sarana dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dari tujuh perlintasan sebidang yang dikelola oleh Pemerintah Kota Blitar, seluruhnya telah mendapatkan pemeliharaan secara rutin. Sementara itu, satu perlintasan lainnya masih dalam proses penyerahan pengelolaan kepada Pemerintah Kota Blitar karena pembangunan palang pintunya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

Selain pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kompetensi petugas juga menjadi perhatian. Saat ini, sebanyak 28 orang Penjaga Perlintasan Jalur (PJL) sedang mengikuti proses perpanjangan sertifikat kompetensi di

PPI Madiun yang pembiayaannya didukung melalui APBD pada sub kegiatan Perjalanan Dinas. Ke depan, diperlukan dukungan penambahan anggaran untuk pemeliharaan palang pintu kereta api, mengingat hasil *assessment* terakhir menunjukkan masih terdapat beberapa komponen dan kelengkapan peralatan yang perlu diganti guna menjaga keandalan fungsi serta meningkatkan keselamatan operasional perlintasan.

2.1.4.4.2.9 Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka mendukung layanan *e-government* serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika diarahkan pada upaya pembinaan dan pengembangan kebijakan komunikasi daerah, pengelolaan dan penyediaan informasi melalui media publik dan kemitraan Lembaga komunikasi, serta pembinaan dan pengembangan *e-government* yang ada di Kota Blitar. Capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika tahun 2024-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.58

Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika

Tahun 2024 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun	
			2024	2025
1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi	%	-	25%
2	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	97,86	98,61

Sumber: *Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar, 2026*

Adapun faktor pendukung dari realisasi persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi dipengaruhi oleh adanya pengelompokan jenis layanan publik sehingga memudahkan dalam pemenuhan capaian kinerja serta adanya dukungan anggaran maupun tenaga pendukung dalam pembuatan maupun pengembangan aplikasi layanan publik. Sedangkan faktor penghambat realisasinya adalah beberapa perangkat daerah masih menggunakan aplikasi milik pemerintah pusat sehingga perlu penyediaan aplikasi layanan publik tingkat Kota Blitar

Peningkatan nilai Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan daerah terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik
2. Ketersediaan regulasi dan kebijakan internal terkait PPID
3. Koordinasi dan sinergi yang baik antara PPID Utama dan PPID Pelaksana
4. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen pendukung keterbukaan informasi
5. Pengelolaan layanan informasi publik yang berjalan konsisten

6. Hasil visitasi yang menunjukkan pemenuhan standar keterbukaan informasi secara optimal

Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Kota Blitar Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja. Hambatan tersebut antara lain belum meratanya komitmen perangkat daerah dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi. Di samping itu, masih terdapat informasi publik yang belum disajikan secara lengkap, mutakhir, dan mudah diakses, didukung oleh pengelolaan dokumentasi yang belum sepenuhnya sistematis serta pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal. Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola keterbukaan informasi publik masih perlu terus dilakukan agar kualitas layanan informasi publik di Kota Blitar dapat semakin meningkat.

2.1.4.4.2.10 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui sektor Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) merupakan prioritas pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat. Melalui penguatan kelembagaan koperasi dan peningkatan daya saing usaha mikro, diharapkan tercipta ekosistem usaha yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Tabel 2.59

Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun	
			2024	2025
1	Persentase usaha mikro yang labanya meningkat	Persen	1,5	2.2
2	Persentase koperasi berkualitas	Persen	24	32

Sumber: *Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, 2026*

Perkembangan koperasi di Kota Blitar menunjukkan tren positif seiring komitmen kuat pemerintah daerah serta berbagai inovasi strategis. Sampai dengan tahun 2025, koperasi di Kota Blitar tercatat sebanyak 283 koperasi dengan rincian 9 koperasi Syariah dan 274 koperasi Non Syariah. Dari total tersebut, 104 di antaranya dinyatakan aktif dengan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan RAT) setiap tahunnya.

Selanjutnya data koperasi aktif di Kota Blitar disajikan pada tabel 2.60 berikut.

Tabel 2.60

Daftar Koperasi Aktif di Kota Blitar Tahun 2025

No.	Nama Koperasi	Keterangan
1	KOPERASI WANITA "PUTERI GELORA"	Aktif
2	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "MEKAR" SMEA NEGERI BLITAR	Aktif

No.	Nama Koperasi	Keterangan
3	KOPERASI KONSUMEN (KPRI) MERAH DELIMA FORSMA	Aktif
4	KOPERASI KONSUMEN "KPRI STM NEGERI BLITAR"	Aktif
5	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "MEKAR MULIA" SMP Negeri 4 Blitar	Aktif
6	KOPERASI "WANITA MELATI ARUM WANGI"	Aktif
7	KOPERASI WANITA "ARGA DEWI MANDIRI"	Aktif
8	Koperasi Aneka Usaha Cipta Karya Kotamadya Blitar	Aktif
9	KOPERASI SIMPAN PINJAM "BINA USAHA MANDIRI"	Aktif
10	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "SUBUR" SMP NEGERI 3 BLITAR	Aktif
11	Koperasi Serba Usaha "AL FAIDA"	Aktif
12	KOPERASI SERBA USAHA (KSU) "YASMIN"	Aktif
13	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "GATI" SMP NEGERI 9 BLITAR	Aktif
14	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BHAKTI PRAJA" PEMDA KODYA BLITAR	Aktif
15	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "SEKAR SARI" SMP NEGERI 5 BLITAR	Aktif
16	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia KPPDK LPA BLITAR	Aktif
17	KOPERASI SIMPAN PINJAM "CENTRA DANA ABADI"	Aktif
18	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "SWAKERTA RAHARJA" KANTOR DEP. KOPERASI KODYA Blitar	Aktif
19	Koperasi Serba Usaha "BAROKAH"	Aktif
20	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "SEJAHTERA" SMP 2 Blitar	Aktif
21	KOPERASI SERBA USAHA "ARTHA KRIDHA USAHA"	Aktif
22	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "USAKO" PERTANAHAN KODYA BLITAR	Aktif
23	PRIMER KOPERASI KEPOLISIAN RESOR KOTA BLITAR	Aktif
24	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "SERBA GUNA" SMA NEGERI 2 BLITAR	Aktif
25	KOPERASI KONSUMEN ABDI PRAJA SEJAHTERA	Aktif
26	KOPERASI WANITA "DEWI KUNTHI"	Aktif
27	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "HUSADA" BLITAR	Aktif
28	KOPERASI WANITA "SRI REJEKI"	Aktif
29	KOPERASI WANITA "SRIKANDI"	Aktif

No.	Nama Koperasi	Keterangan
30	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "SEJAHTERA" KANTOR DEP. AGAMA KODYA BLITAR	Aktif
31	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "SUPRIADI" SMP NEGERI 7 BLITAR	Aktif
32	KOPERASI WANITA "BELIMBING"	Aktif
33	Koperasi Guru dan Karyawan STM Islam Blitar	Aktif
34	KOPERASI PRODUSEN ASUMI OEKIL MANDIRI	Aktif
35	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "PEMBANGUNAN" SMP NEGERI 1 BLITAR	Aktif
36	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "TEGAS" BLITAR	Aktif
37	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "WIJAYA KUSUMA" Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Blitar	Aktif
38	Koperasi Simpan Pinjam "KARYA BHAKTI"	Aktif
39	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "MAKMUR" SMP Negeri 6 Blitar	Aktif
40	Koperasi Konsumen Syariah An Nisa Kota Blitar	Aktif
41	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "HANGUDI MAKMUR" SMP NEGERI 8 BLITAR	Aktif
42	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "ARTA KARYA" BLITAR	Aktif
43	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BINA SEJAHTERA" Blitar	Aktif
44	Koperasi Serba Usaha Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. "SWADHARMA"	Aktif
45	Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera	Aktif
46	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "MANFAAT MAN" Blitar	Aktif
47	KOPERASI PONDOK PESANTREN "NURUL ULUM"	Aktif
48	Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Sejahtera"	Aktif
49	Koperasi Serba Usaha Pedagang Pasar "SUBUR"	Aktif
50	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "PATRIA UTAMA KARYA"	Aktif
51	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia KPPDK PENGADILAN NEGERI BLITAR	Aktif
52	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH "AR-ROHMAH SEJAHTERA ABADI"	Aktif
53	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "LESTARI" SMA NEGERI 1 BLITAR	Aktif
54	PRIMKOPPABRI Kab/Kodya Blitar	Aktif
55	KOPERASI SIMPAN PINJAM "EKA YOGA PRATAMA"	Aktif

No.	Nama Koperasi	Keterangan
56	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "MINA SATWA TANI" Blitar	Aktif
57	KOPERASI SIMPAN PINJAM "ABADI JAYA MULYA"	Aktif
58	KOPERASI WANITA "KARTINI"	Aktif
59	Koperasi Serba Usaha Hillsi	Aktif
60	PRIMKOPPABRI Kab/Kodya Blitar	Aktif
61	KOPERASI WANITA "WENTAR"	Aktif
62	Koperasi Serba Usaha "SYARI'AH MUHAMMADIYAH BLITAR"	Aktif
63	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH "NURUL RIZQU NISA"	Aktif
64	KOPERASI WANITA "TURI"	Aktif
65	KOPERASI SIMPAN PINJAM "ARTHA MITRA SENTOSA"	Aktif
66	KOPERASI BINA USAHA EKONOMI KELUARGA AISYIYAH AS SAKINAH	Aktif
67	Koperasi Pondok Pesantren Bustanul Mutaallimat	Aktif
68	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH RIADHOTUT THOLIBAT CABEAN SEJAHTERA"	Aktif
69	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "PATRIA HUSADA" Dinas Kesehatan Kotamadya Blitar	Aktif
70	Koperasi Serba Usaha "TRI GUNA BHAKTI"	Aktif
71	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "PASANG" Kejaksaan Negeri Blitar	Aktif
72	Primer Koperasi Kartika Merak 08	Aktif
73	PRIMER KOPERASI KARTIKA BADAK HITAM	Aktif
74	KOPERASI WANITA "MEKAR JAYA"	Aktif
75	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "PERINDAG-97" KANTOR DEP. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTAMADYA BLITAR	Aktif
76	Koperasi Mitra Usaha "WAHANA PATRIA" Kotamadya Blitar	Aktif
77	KOPERASI WANITA "PERTIWI"	Aktif
78	Koperasi Karyawan MAYANGKARA ARTHA	Aktif
79	Koperasi Serba Usaha "TAMAN HANGUDI JAYA" Kota Blitar	Aktif
80	Koperasi Serba Usaha "BERGAS"	Aktif
81	Koperasi Simpan Pinjam Setia Bhakti	Aktif
82	KOPERASI KONSUMEN (KSU) "SURYA PATRIA JAYA"	Aktif
83	KOPERASI WANITA "RAYUNG WULAN"	Aktif

No.	Nama Koperasi	Keterangan
84	KOPERASI SIMPAN PINJAM "ADHI ARTHA JAYA"	Aktif
85	Koperasi Simpan Pinjam Mulyo Agung	Aktif
86	Koperasi Simpan Pinjam Bhakti Mulya Jaya	Aktif
87	KOPERASI SIMPAN PINJAM "ARTHA AGUNG ABADI"	Aktif
88	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH NUR CHOIRUNISA SEJAHTERA	Aktif
89	KOPERASI WANITA "KARYA MANDIRI"	Aktif
90	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia KPPDK LAPAS BLITAR	Aktif
91	KOPERASI WANITA "PUTRI PATRIA"	Aktif
92	KOPERASI SERBA USAHA "SRI REJEKI"	Aktif
93	Koperasi Serba Usaha PURNABHAKTI TELKOM	Aktif
94	Koperasi Karyawan "PAGUYUPAN"	Aktif
95	Koperasi PEGAWAI KANTOR CABANG TELEKOMUNIKASI Blitar	Aktif
96	KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) "MITRA ARTA"	Aktif
97	Koperasi Unit Desa "BINA TARUNA MANDIRI	Aktif
98	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH DARUL MUTTAQIN KAUMAN	Aktif
99	Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kotamadya Blitar	Aktif
100	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH NUR ROHMAH SEJAHTERA	Aktif
101	Koperasi Serba Usaha "TOBA SEJAHTERA"	Aktif
102	Koperasi Simpan Pinjam Katalisma	Aktif
103	Koperasi Serba Usaha "GAMMA USAHA" Kotamadya Blitar	Aktif
104	KOPERASI BERDIKARI SUKSES MANDIRI INDONESIA	Aktif

Sumber: *Dinas Koperasi, UMTK Kota Blitar, 2025*

Memasuki tahun 2025, implementasi Instruksi Presiden terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota Blitar. Sebanyak 21 koperasi di tiap kelurahan dibentuk guna memperkuat produktivitas, ketahanan pangan, serta daya saing UMKM lokal. Secara keseluruhan, Kota Blitar mempertahankan arah kebijakan progresif dalam pengembangan koperasi, dari pemberdayaan UMKM dan modernisasi sistem hingga kolaborasi akademik dan percepatan pembentukan koperasi kelurahan. Namun, perhatian serius juga diperlukan terhadap kesehatan administratif dan keberlanjutan operasional koperasi agar lebih banyak koperasi yang aktif, legal, dan berdampak ekonomi nyata bagi masyarakat.

Dalam hal pengembangan usaha mikro, Pemerintah Kota Blitar secara aktif memperkuat ekosistem usaha mikro melalui sejumlah program strategis. Dalam praktik lapangan, Dinkop UKM dan Naker menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan manajerial

sejak tahun 2025, yang berfokus pada manajemen keuangan, strategi pemasaran digital, dan persiapan memasuki pasar global. Program ini dibarengi akses permodalan dan fasilitasi perizinan untuk memastikan UMKM lebih siap bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Sampai dengan tahun 2025, jumlah usaha mikro yang dibina sejumlah 2380 orang berdasarkan data Dinkop UKM dan Naker. Pembinaan ini termasuk pemberian dukungan fasilitasi pemasaran produk usaha. Dari jumlah tersebut, 1767 usaha telah memiliki NIB atau Nomor Induk Berusaha. Sedangkan data usaha mikro yang naik kelas adalah sejumlah 275, menunjukkan adanya perkembangan dalam upaya pembinaan usaha mikro di Kota Blitar.

2.1.4.4.2.11 Penanaman Modal

Realisasi investasi Kota Blitar tahun 2021–2025 menunjukkan tren meningkat secara nominal, dari 0,258 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 0,438 triliun rupiah pada tahun 2025. Meskipun demikian, laju pertumbuhan investasi cenderung melambat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa investasi masih tumbuh, namun belum optimal dalam mendorong akselerasi investasi baru. Peningkatan investasi masih didominasi oleh pengembangan usaha yang telah ada, terutama pada sektor perdagangan dan pariwisata.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan lahan, belum optimalnya pengembangan sektor unggulan, serta promosi dan insentif investasi yang masih perlu ditingkatkan. Ke depan, diperlukan penguatan promosi investasi, pengembangan sektor unggulan dan kawasan tematik, serta peningkatan kemudahan perizinan dan kebijakan insentif guna mendorong pertumbuhan investasi yang lebih optimal.

Tabel 2.61

Indikator Urusan Penanaman Modal Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Realisasi investasi (Triliun Rupiah)	triliun rupiah	0.25846	0.34522	0.38506	0.43273	0.43752

Sumber: *Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar, 2026*

2.1.4.4.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

Selain menjadi agen perubahan, peran pemuda juga sebagai *agent of development* atau agen pembangunan sebagai penerus bangsa. Artinya bahwa para pemuda Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai macam bidang, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Hal ini menjadikan pemikiran bahwa pembangunan pemuda adalah urusan yang strategis dalam membangun masyarakat. Selain itu, sumber daya manusia yang berprestasi akan menambah daya saing suatu daerah, salah satunya di bidang olah raga. Capaian indikator urusan kepemudaan dan olah raga dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.62

Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun	
			2024	2025
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	59,67	64,00
2	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	NA	0,569

Sumber: *Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar, 2026*

2.1.4.4.2.13 Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik diarahkan pada peningkatan layanan data statistik melalui *e-governance* dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terhadap masyarakat di Kota Blitar. Capaian kinerja urusan statistik Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.63

Indikator Urusan Statistik Tahun 2024 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun	
			2024	2025
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,65	2,65

Sumber: *Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar, 2026*

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik di suatu instansi pemerintah atau Lembaga. IPS merupakan hasil akhir proses Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang dilakukan BPS.

Kota Blitar mendapatkan nilai IPS 2,65 dengan kategori baik. Semakin tinggi level IPS, semakin baik kualitas tata kelola dan pemanfaatan data statistik pada instansi tersebut.

Untuk meningkatkan nilai IPS dapat dilakukan beberapa upaya antara lain:

a. Meningkatkan kompetensi ASN (pengelola data) dalam hal metodologi statistik dan pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti.
b. Memperkuat peran statistisi dan pranata komputer dalam mendukung tata kelola data dengan mengikuti pelatihan dari instansi pembina (BPS/Kemkominfo/dll).
c. Penertiban arsip dokumen pelaksanaan kegiatan statistik oleh Perangkat Daerah.

2.1.4.4.2.14 Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian diarahkan pada meningkatnya keamanan informasi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terhadap masyarakat di Kota Blitar. Adapun capaian kinerja urusan persandian Kota Blitar adalah sebagai berikut.

Tabel 2.64

Indikator Urusan Persandian Tahun 2024 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun	
			2024	2025
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	60,24	62,02

Sumber: *Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar, 2026*

Angka Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2024 yang berarti kemampuan dan kematangan suatu instansi pemerintah dalam melindungi informasi serta sistemnya dari berbagai ancaman juga semakin baik.

Meskipun demikian masih terdapat kendala yaitu penilaian masih dilakukan secara penilaian mandiri dan belum dilakukan oleh Tim Penilai dari Badan Siber dan Sandi Negara. Oleh karena itu pada tahun 2026 direncanakan akan dilakukan pengukuran tingkat keamanan informasi menggunakan kerangka kerja :

1. Indeks KAMI oleh Tim BSSN;
2. Sertifikasi SNI ISO/IEC 27001:2022 oleh Tim Audit Eksternal.

2.1.4.4.2.15Perpustakaan

Perpustakaan memegang peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat dan berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam pilar Pendidikan Berkualitas. Perpustakaan menyediakan akses yang demokratis ke pengetahuan dan bahan bacaan yang mendukung pembelajaran sepanjang kehidupan. Dalam era digital, literasi digital menjadi semakin penting. Perpustakaan harus memainkan peran dalam meningkatkan literasi digital sehingga dapat membantu membangun masyarakat yang lebih terdidik, sadar isu global, dan berkelanjutan.

Dengan demikian urusan perpustakaan menjadi urusan wajib non pelayanan dasar yang memiliki fungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Adapun capaian penyelenggaraan urusan perpustakaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.65

Indikator Urusan Perpustakaan Tahun 2022 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	47,49	51,43	52,40	55,47

Sumber: *Perpustakaan Nasional, 2025*

Berdasarkan data capaian tahun 2022 hingga 2025, nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Blitar menunjukkan tren pertumbuhan positif dari angka 47,49 menjadi 55,47, namun secara kualitatif hasil ini menunjukkan bahwa budaya literasi masih berada pada

kategori yang perlu ditingkatkan melalui kebijakan strategis dan penguatan aspek kunci. Keberhasilan tren peningkatan ini didukung oleh kolaborasi erat dan sinergitas antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menggerakkan ekosistem literasi daerah.

Sebagai langkah tindak lanjut untuk mencapai tingkat kegemaran membaca yang lebih optimal, Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk memperkuat pembiasaan membaca yang terstruktur mulai dari lingkup keluarga hingga sekolah, melakukan rekalibrasi target kinerja agar tetap relevan dengan kebijakan nasional, serta memperluas program literasi berbasis kolaborasi seperti bedah buku dan klub membaca. Selain itu, optimalisasi layanan perpustakaan akan terus ditingkatkan melalui perluasan akses layanan fisik dan digital guna memastikan kemudahan jangkauan literasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Seiring dengan pengaruh teknologi informasi yang semakin berkembang, layanan perpustakaan juga ditingkatkan melalui layanan digital bertajuk “Layada” atau Layanan Anak dalam jaringan yang dapat diakses online melalui *website* Perpustakaan Daerah (dinperpusip.blitarkota.go.id). Selain itu, tersedia juga *e-library* di e-library.blitarkota.go.id, Layanan PETA (Pesan Antar) dan Tali Pusaka (Data Literasi Perpustakaan Kota Blitar) sebagai pendukung layanan perpustakaan digital.

2.1.4.4.2.16 Kearsipan

Pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah kearsipan akan menghadirkan manfaat yang besar bagi kehidupan organisasi, pemerintah dan masyarakat. Ketersediaan arsip secara utuh, otentik dan terpercaya pada setiap lembaga dan Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan nyata bagi pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya untuk kemanfaatan penilaian kinerja, pertanggungjawaban kinerja, pelayanan publik serta penyediaan alat bukti bagi kepentingan lainnya. Peningkatan kompetensi tenaga arsiparis juga terus diupayakan untuk mendorong kinerja kearsipan. Adapun capaian penyelenggaraan urusan kearsipan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.66

Indikator Urusan Kearsipan Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	35,64	80,174	84,75	91,59	91,06
2	Tingkat Digitalisasi Arsip	Persen	NA	NA	93,11	95,29	90,64

Sumber: *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2026*

Capaian Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan dan Tingkat Digitalisasi Arsip (TDA) di Kota Blitar hingga tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat baik, yang didorong oleh optimalisasi sinergitas berkelanjutan antara Lembaga Kearsipan Daerah dengan instansi pembina di tingkat provinsi maupun pusat (ANRI), serta adanya dukungan penuh dari pimpinan daerah

dan seluruh Perangkat Daerah dalam menyukseskan transformasi digital kearsipan. Meskipun demikian, progres ini menghadapi faktor penghambat berupa adanya perubahan indikator penilaian TDA dari ANRI yang menuntut penyesuaian parameter kinerja guna menjaga relevansi transformasi digital yang sedang berjalan.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk melakukan pemenuhan kinerja penyelenggaraan kearsipan digital sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi terbaru, yang dibarengi dengan penguatan koordinasi serta konsultasi lintas sektoral dengan pemangku kebijakan dan instansi vertikal guna memastikan tata kelola arsip digital yang semakin bermutu dan akuntabel.

2.1.4.4.2.17 Kebudayaan

Kota Blitar telah mendeklarasikan sebagai kota wisata kebangsaan, oleh karena itu kebudayaan sangat erat hubungannya dengan pengembangan kota. Indikator kinerja untuk urusan ini adalah persentase kelompok seni budaya yang aktif.

Tabel 2.67

Indikator Urusan Kebudayaan Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Terlestarikannya cagar budaya	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: *Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar, 2025*

Melihat sisi sejarah panjang masa lalu, Kota Blitar memiliki aset budaya yang sampai dengan saat ini masih dipelihara kelestariannya. Kekayaan budaya tersebut menjadikan Kota Blitar sebagai salah satu kota di Indonesia yang tergabung dalam JKPI atau Jaringan Kota Pusaka Indonesia. JKPD adalah organisasi yang menghubungkan kota-kota di Indonesia yang kaya akan warisan budaya dan sejarah. Berikut disajikan data cagar budaya peninggalan masa lalu yang tersebar di wilayah Kota Blitar.

Tabel 2.68

Data Situs dan Cagar Budaya Kota Blitar

No	Nama Cagar Budaya	Alamat/Lokasi
1.	Arca Dwarapala	Kel.Kepanjenlor
2.	Prasasti	Kel.Kepanjenlor
3.	Arca Dwarapala	Kel.Kepanjenlor
4.	Makam Kyai Imam Suwangsa	Kel. Bendogerit
5.	Lumpang Batu	Kel. Bendogerit
6.	Umpak	Kel. Bendogerit
7.	Kala	Kel. Gedog
8.	Kala	Kel. Gedog

No	Nama Cagar Budaya	Alamat/Lokasi
9.	Yoni	Kel. Gedog
10.	Fr. Relief	Kel. Gedog
11.	Batu Relief	Kel. Gedog
12.	Antefik	Kel. Gedog
13.	Prasasti Karang Tengah	Kel. Karangtengah
14.	Unsur bangunan	Kel. Karangtengah
15.	Klenteng Poo An Kiong	Jl. Merdeka, No. 194 Kota Blitar
16.	Makam Bung Karno	Jl. Ir. Soekarno, Kota Blitar
17.	Istana Gebang	Jl. Sultan Agung, No. 59 Kota Blitar
18.	SMKN 3 Kota Blitar	Jl. Sudanco Supriadi, Kota Blitar
19.	Kompleks Induk SMKN 3 Kota Blitar	Jl. Sudanco Supriadi, Kota Blitar
20.	SMPN 3 Kota Blitar	Jl. Sudanco Supriadi, Kota Blitar
21.	Paroki Santo Yusup	Jl. Diponegoro, No. 34 Kota Blitar
22.	Rumah Dinas Bupati	Jl. Semeru, No. 40 Kota Blitar
23.	SMPN 5 Kota Blitar	Jl. Sudanco Supriyadi, No. 31 Kota Blitar
24.	SMPN 6 Kota Blitar	Jl. Sudanco Supriyadi, No. 34 Kota Blitar
25.	Pesanggrahan Djoyodigdan	Jl. Melati, No. 43 Kota Blitar
26.	Hotel Tugu Lestari	Jl. Merdeka, No. 173 Kota Blitar
27.	Aloon-Aloon Kota Blitar	Jl. Semeru Kota Blitar
28.	Kebon Rojo	Jl. Diponegoro Kota Blitar
29.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Katolik Santo Yusup	Jl. Jenderal Sudirman, No. 35 Kota Blitar
30.	Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Pendidikan (YP) Kotamadya	Jl. Tanjung, No. 1 Kota Blitar
31.	Biara Roh Kudus Santa Maria	Jl. Sudanco Supriyadi, No. 19 Kota Blitar
32.	Taman Kanak-Kanak (TK) Santa Maria	Jl. Sudanco Supriyadi, No. 17 Kota Blitar
33.	Sekolah Dasar (SD) Santa Maria	Jl. Sudanco Supriyadi, No. 21 Kota Blitar
34.	Pengadilan Negeri Blitar (Kantor Lama)	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, No. 1 Kota Blitar
35.	Rumah Ibu Wardoyo	Jl. Sultan Agung
36.	Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya	Jl. Sudanco Supriyadi
37.	Kompleks Monumen PETA	Jl. Sudanco Supriyadi

No	Nama Cagar Budaya	Alamat/Lokasi
38.	Kompleks Makam Pangeranan	Jl. Sultan Agung
39.	Komplek Pendopo Kabupaten Blitar Dan Aloon-Aloon	Jl. Semeru
40.	Rumah Dinas Walikota Blitar	Jl. Sudanco Supriyadi
41.	Rumah Dinas Dan Yon 511	Jl. Panglima Sudirman
42.	Kompleks Bangunan PGSD	Jl. Ir Soekarno
43.	Candi Gedog	Jl. Brigjen Katamso
44.	Markas Tentara Belanda	Jl. Tanjung
45.	Langgar Gantung	Jl. Kemuning
46.	Pengadilan Negri Blitar (Kota Lama)	Jl. Dr Wahidin
47.	BNI	Jl. Kenanga
48.	Rumah Potong Babi	Jl. Kacapiring
49.	STIEKEN	Jl. Mastrip
50.	Rumah Dinas Kir Master	Jl. Kacapiring
51.	Makam Aryo Blitar	Jl. Pamungkur

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar, 2024

Tabel 2.69

Data Kesenian dan Budaya yang Dibina dan Dikembangkan

Kota Blitar Tahun 2025

JENIS KESENIAN	KELOMPOK KESENIAN	PIMPINAN	ALAMAT	KET
1. Teater modern	1. SMAKENSA	Retno Mawarni	Jl. Kenari Kel. Plosokerep	AKTIF
	2. SMP 1. Sapu Jagad	Suko Wiyono	Jl. A. Yani Kel. Kep. Kidul	AKTIF
	3. SMP 3		Jl. Sudanco Supriyadi Kel. Bendogerit	AKTIF
	4. SMP 5		Jl. Sudanco Supriyadi Kel. Bendogerit	AKTIF
	5. SMP 9		Jl. Widas 29 Kel. Pakunden	AKTIF
	6. SMA 1. Teater Jiwa		Jl. A. Yani Kel. Sananwetan	AKTIF
	7. SMA 2. Teater Bamboo	Suprapti	Jl. Ciliwung Kel. Tanggung	AKTIF
	8. SMA 3. Teater Cakrawala	Sri Mei Rahayu	Jl. Bengawan Solo Kel. Pakunden	AKTIF
	9. SMA 4. Teater Padi		Jl. Melati Kel. Kep. Kidul	AKTIF
	10. SMK 2		Jl. Tanjung Kel. Pakunden	AKTIF

JENIS KESENIAN	KELOMPOK KESENIAN	PIMPINAN	ALAMAT	KET
	11.SMK 3		Jl. Sudanco Supriyadi Kel. Pakunden	AKTIF
	12. SMAK Teater Semak/ Katjadigo	Nanik Lestari	Jl. Diponegoro Kel. Bendogerit	AKTIF
	13. SMK 45		Jl. Diponegoro Kel. Bendogerit	AKTIF
	14. STKIP. Komtesa		Jl. Kalimantan Kel. Karangtengah	AKTIF
2. Film	1. Blitar Kreatif	Supriyanto	Jl. Belawan Kel. Bendo	AKTIF
	2. SMAN 1		Jl. A. Yani Kel. Sananwetan	AKTIF
	3. SMKN 1		Jl. Kenari Kel. Plosokerep	AKTIF
	4. SMKN 2		Jl. Tanjung Kel. Pakunden	AKTIF
3. Teater Tradisional	1. Wayang Orang Patria Loka	YPY. Erwien	Jl. Tanjung Kel. Pakunden	AKTIF
	2. Ketoprak Patria Loka	YPY. Erwien	Jl. Tanjung Kel. Pakunden	AKTIF
	3. Garuda Putra Padepokan	Martini	Jl. Kopi no 28 Rembang Kota Blitar	AKTIF
	4. Etnika	Mike Yuliana	Jl. Piere Tendean no 20 kel. Gedog	AKTIF
	5. Pemuda Berdikari	Endik Supriadi	Jl. Wr. Supratman Kel. Bemdogerit Kota Blitar	AKTIF
	6. Sanggar Melati	Purwanto	Jl. Anyelir Blok I - 10 Griya Melati Indah Blitar	AKTIF
4. Wayang Kulit	1. Cakra Budaya	Rudi Gareng	Jl. DI. Panjaitan Kel. Ngadirejo	PINDAH DOMISILI
	2. Jiwa Budaya	Suyanto	Jl. Jati Gg. VII Kel. Turi	MENINGGAL DUNIA
	3. Among Supanggung	Among Supanggung	Jl. Cut Nyak Dien 15	AKTIF
	4. Irama Sarinada Condro Budoyo	Sudaryanto	Jl. Sukun Rt 21 Rw 02 Kel. Turi	AKTIF
	5. Marga Budaya	Ali Sabdono	Jl. Kamper Gg. II/34 Kel. Tanjungsari	AKTIF
	6. Ngabai Laras	Gatot Tri Laksono	Griya Jati Permai Kel. Turi	AKTIF
	7. Gondo Kusumo	Wiji Santosa	Jl. Masjid 27 Kel. Kauman	AKTIF
	8. Sungging Mustiko	Wangsa Ageng H.	Jl. Ir. Soekarno Rt 1/Rw 9 Kel. Sentul	AKTIF
	9. Patria Loka	YPY. Erwien	Jl. Tanjung Kel. Pakunden	AKTIF
	10. Wayang golek “Puspo Budoyo”	Pramadi Tri Putranto, ST	Jl. Bali 229, Kel. Karangtengah	PASIF
	11. Nyoto Carito	Sunyoto	Jl. Sudanco Supriyadi	AKTIF

JENIS KESENIAN	KELOMPOK KESENIAN	PIMPINAN	ALAMAT	KET
	12. Dhaniswara Laras	Anas Sandi Swara	Jl. Hasanudin No. 02, Kel. Bendogerit - Kota Blitar	PINDAH DOMISILI
	13. Dewa Ruci	Ki Setyo Utomo	Kel. Sentul - Kota Blitar	AKTIF
	14. Manunggal Raos	Ki Waras	Jl. WR. Supratman Kel. Bendogerit - Kota Blitar	AKTIF
	15. Sinten Remen	Ki Refanda Rizki Ardiansyah	Jl. WR. Supratman Kel. Bendogerit - Kota Blitar	AKTIF
	16. Sopo Nyono	Ki Sutarji	Jl. Cemara No. 262 Kel. Tlumpu - Kota Blitar	AKTIF
	17. Mitra Budaya	Ki Sumitro Purbo Carito	jl. Kapuas Kel. Bendo	AKTIF
	18. Sawung Galing	Ki Among Supanggung	jl. Cut Nyak Dien No.15 Kel.Sentul	AKTIF
	19. Makuto Romo	Ki Sutarji	jl. Cemara no. 262 Kel. Tlumpu - Kota Blitar	PASIF
	20. Bowo Carito	Ki Subowo	jl. Muradi no. 27 Kel. Bendogerit	AKTIF
	21. Irama Sarinada	Ki Daryono Mudo	jl. Sukun no.6 Kel. Turi	PASIF
	22. Cakra Kusuma	Ki Vicky Krisna S.	jl. Melati Gg. III no. 9 Kel. Kep. Kidul	AKTIF
1. Tari Tradisional	1. Sanggar Patria Loka	YPY. Erwin	Jl. Tanjung. Kel. Pakunden	AKTIF
Tari yang mengangkat nilai kehidupan tradisi masyarakat setempat	2. Sanggar Sekar Ayu	Nanik Lestari	Jl. Sumantri Brojonegoro. Kel. Sentul	AKTIF
	3. Sanggar Sekar niti	Anting Kusuma	Jl. Kedondong 417 . Kel. Turi.	AKTIF
	4. Sanggar Gong	Evi Rusmiati	Jl. Buton. Ds. Kuningan	AKTIF
	5. Sanggar Megalarista	Darwanti	Kel. Bendogerit	AKTIF
	6. Sanggar Tri Loka	Dian	Jl. Bali, Kel. Karangtengah	PASIF
	7. Sanggar Sapu Jagat	Suko	Jl. Ir. Soekarno	AKTIF
	8. Sanggar Rukun Santoso	Bayu Setyo	Jl. Brigjend Katamso, Kel. Gedog - Kota Blitar	AKTIF
	9. Sanggar Dewa Ruci	Suwanto	Jl. Pamungkur No 29 Kel. Blitar - Kota Blitar	AKTIF
	10. Sanggar Guyubing Budoyo	Trias Kuntadi	Jl. Joko Kandung No. 34 Kel. Blitar - Kota Blitar	AKTIF
	11. Sanggar Smada Loka	Suprapti	SMA 2 Kota Blitar	AKTIF
	12. Sanggar Smatri	Sri Mei Rahayu	SMA 3 Kota Blitar	AKTIF
	13. Sanggar Laskar patria Loka	Enny Rahayu	jl. Piere Tendean No.31 Kel. Gedog	AKTIF

JENIS KESENIAN	KELOMPOK KESENIAN	PIMPINAN	ALAMAT	KET
	14. Sanggar Etnika	Mike Yuliana	jl.Piere Tendean No. 20 Kel. Gedog	AKTIF
2. Tari kreasi baru	1. Aryo Budaya (WAB)	Eping Yulistanto	Jl. Raras Wuyung. Kel. Blitar	AKTIF
Tari klasik yang di modifikasi/ aransemen sesuai dengan perkembangan zaman	2. New Warga Budaya	Purwanto	Jl. Jati Gg.11/42 Kel. Turi	AKTIF
	3. Kridha Budaya	Jatmiko	Jl. Klampis 3 Kel. Tlumpu	PASIF
	4. Sabda Utama	Katelan	Jl. Kali Krasak Kel. Pakunden	AKTIF
	5. Turangga Sriwijaya	Andi Riswa P.	Jl. Rayungwulan 32 Kel. Blitar	AKTIF
	6. Turangga Ksatria Pinayungan	Suseno	Jl. Joko Kandung Kel. Blitar	AKTIF
	7. Turangga Tari	Tukidi	Jl. Kuweni 11 Kel. Karangsari	AKTIF
	8. Sabda Budaya	Wibowo	Jl. Kali Camal 62 Kel. Tanjungsari	AKTIF
	9. Guyubing Budaya	Trias Kuntadi	Jl. Joko Kandung 30 Kel. Blitar	AKTIF
	10. Rukun Budaya	Samuji	Jl. Joko Kandung Kel. Blitar	AKTIF
	11. Turangga Mudha Utama Original	Sugeng	Jl. Tirtoyudo Kel. BLitar	AKTIF
	12. Dewa Ruci	Suwanto	Jl. Pamungkur 29 Kel. Blitar	AKTIF
	13. Turangga Manggala Yudha	Agus Jarwoko	Jl. Bogowonto Kel. Pakunden	AKTIF
	14. Sekar Tanjung	Yadji	Jl. Cemara 182 Kel. Karangsari	AKTIF
	15. Trima Budaya	Kuwat	Jl. Panjaitan Kel. Ngadirejo	AKTIF
	16. Fajar Budaya	Marjuki Ahmat	Ling. Bangsongan Kel. Ngadirejo	PASIF
	17. Putra Wira Yudha	Sumarno	Jl. Arjuno Kel. Kepanjenlor	PASIF
	18. Turangga Manunggal Yudha	Sugianto	Jl. Melati Gg. III/35 Kel. Kep. Kidul	AKTIF
	19. Kuda Taruna Putra	Arjo Katimin	Jl. Cokrodipo Kel. Tanggung	AKTIF
	20. Putra Rukun Budaya	Sujono	Jl. Serayu Kel. Bendo	AKTIF
	21. Wahyu Langgeng Budaya	Yahudi	Jl. Cipemali. 35. Kel. Ngadirejo	AKTIF
	22. Turangga Seta	Sakri	Jl. Ahmad Dahlan 9 Kel. Tanggung	AKTIF
	23. Turangga Giana Muda	Timbul Giono	Jl. Cibareno 15 Kel. Bendo	AKTIF

JENIS KESENIAN	KELOMPOK KESENIAN	PIMPINAN	ALAMAT	KET
	24. Youth Bulls	Joko Prasetyo	Jl. Sawunggaling Gg. II/4 Kel. Tanggung	AKTIF
	25. Turonggo Yudha Putra	Yudi Kristiyanto	Jl. Cakraningrat. Kel. Sentul	AKTIF
	26. Turangga Seta Budaya	Sunarji	Jl. Pinus Kel. Kepanjenkidul	AKTIF
	27. Wahyu Sabda Kawedhar	Sumarsit	Jl. Cimandiri 55 Kel. Tanggung	AKTIF
	28. Turonggo Sekar Wijoyo	Saljianto	Jl. Sawit 17 Kel. Plosokerep	PASIF
	29. Citra Bhirawa	Untung Budi	Kel. Gedog	AKTIF
	30. Family Budaya	Sugeng Wahono	Jl. Tidore Kel. Klampok	AKTIF
	31. Rukun Santoso Gedog	Bayu Setyo Kumoro	Jl. Brigjen Katamso Kel. Gedog	AKTIF
	32. Turangga Jati	Sugeng Asmedi	Jl. Sumatera Kel. Sananwetan	AKTIF
	33. Gesang Megantara Putra	Imam Rokani	Jl. Aru Rt.01 Rw.04 Kel. Karangtengah	AKTIF
	34. Sida Muncul Putra	Sukarmianto	Jl. Sisingamangaraja 20 Kel. Sananwetan	PASIF
	35. New Bima Sakti	Karnoto	Jl. Sumba 175 Kel. Klampok	AKTIF
	36. Turangga Muda Budaya	Meseni	Jl. Seram Kel. Klampok	PASIF
	37. Surya Kuncara Putra	Hari Prabowo	Jl. Sumba Timur 4 Kel. Karangtengah	AKTIF
	38. Kelabang Kencono	Mujiono/Kurniawan	Jl. A.Yani Gg.III /28 Kel. Sananwetan	AKTIF
	39. Sabdo Kuncara Putra	Priyo Tamtomo/Hari	Jl. Sumba Gg. III/7 Kel. Karangtengah	PASIF
	40. Rukun Sasomo	Zainuri	Jl. Sonokeling 7 Kel. Rembang	AKTIF
	41. Puja Wasesa Rahayu	Suprihyanto	Jl. Brau Rt. 5 Rw. 10 Kel. Bendogerit	AKTIF
	42. Tarunggo Kridho Budoyo	Sigit	Jl. Ternate 163 Kel. Klampok	AKTIF
	43. Satrio Wijoyo	Katirin	Ling. Karanglo Rt. 2/15 Kel. Sananwetan	AKTIF
	44. New Turangga Lawe Budaya	Endrik Yudianto	Jl. Sisingamangaraja. Kel. Sananwetan.	PASIF
	45. Turangga Kusuma Buwono	Sujianto	Jl. Sumba 7 Kel. Sananwetan	AKTIF
	46. Turangga Kridha Saputro	Agus sarwono	Jl. Ir. Soekarno 15 a Kel. Bendogerit	AKTIF
	47. Putra Pandhu	Tekat Santoso	Jl. A. Yani 301 Kel. Sananwetan	AKTIF
	48. Putro Bathoro	Dwi Atmoko	Jl. Sawit 03 Kel. Plosokerep	AKTIF

JENIS KESENIAN	KELOMPOK KESENIAN	PIMPINAN	ALAMAT	KET
	49. Margo Rukun	Ivan Leksono	Jl. Kalasan No. 101 Kel. Bendogerit	AKTIF
	50. Sekar Tanjung	Yadji	Jl. Cemara No. 182 kel. Karangsari	AKTIF
	51. New Singo Yudro	Eko Santoso	Jl. Kampar Gg 6 No. 8 Kel. Tanjungsari	AKTIF
	52. Tiger Putro Budoyo	Sudjiman	Jl. Klengkeng No. 80 Kel. Karangsari	AKTIF
	53. Turonggo Rembang Budoyo	Pujiono	Jl. Wadang No. 7 Kel. Rembang	AKTIF
	54. Satrio Manggolo Putro	Untung Budi Prasetyo	jl. Brau Gg V no. 9 Kel. Bendogerit	AKTIF
	55. Kuda Taruna Putra	Sugianto	jl. Ciliwung no. 30 Kel. Blitar	AKTIF
	56. Turonggo Mudo Budoyo	Kadiono	jl. Nasa Lembu Kel. Klampok	AKTIF
	57. Turonggo Putro Wijoyo	Agus Setyawan	jl. Sisingamangraja No.10 A Kel.Sananwetan	AKTIF
	58. Cahyo Tegar Budoyo	Arik Herdiyanto	jl. Sawit No 17 Kel. Ploso	AKTIF
1. Seni lukis	1. Bangkit	Sony	Jl. Nias Kel. Sananwetan	AKTIF
	2. Arif	Arif	Jl. Borobudur Kel. Bendogerit	AKTIF
	3. Jayeng	Jayeng Sutrisno	Rusunawa Kel. Turi	AKTIF
	4. Amik	Amik	Kel. Pakunden	AKTIF
	5. Tattoo	Doni Tatto	Jl. Jati Kel. Turi	AKTIF
	6. Batik	Nanang Premadi	Jl. Borobudur Kel. Bendogerit	AKTIF
	7. Batik tulis “Tradisiku”	Andika Yusdianto	Asabri Gedog Blok S Kel. Gedog	AKTIF
	8. Batik Wentar	Winarti Zulaikah	Jl. Maninjau Blok D Kel. Pakunden	AKTIF
	9. NENTO ART	Rizat Arifin	Jln. Piere Tendean 48 Kel. Gedog - Kota Blitar	AKTIF
	10. Tukang Gambar Blitar	Miryono Daru	Jl. Veteran no. 07 Kepanjen Kidul Kota Blitar	AKTIF
2. Seni Kriya	1. Pring Nggalih	Amang Makmur	Jl. Riau 21 Kel. Sananwetan	AKTIF
	2. Kostum carnival	Yudha Krisnawan	Jl. Sawunggaling No. 6 Kel. Sentul	AKTIF
	3. Bros	Retno Ula Cyndi	Jl. Tirtoyudo Gg. VI/25 Kel. Blitar	AKTIF
	4. Kendang Jimbe	Inung	Kel. Tanggung	AKTIF
	5. Kendang Jimbe	Tohari	Jl. Antasari Kel. Tanggung	AKTIF
	6. Kerajinan Batok Kelapa	Ismarofi	Jl. Kali Glagah Rt 02 Rw 09	AKTIF

JENIS KESENIAN	KELOMPOK KESENIAN	PIMPINAN	ALAMAT	KET
	7. Lilin Pijar Mas	Sulistya Purbaningrum	Jl. Maninjau Blok D Rt 1 Rw 6 Kel. Pakunden	AKTIF
	8. Manik – manik	Sukatmi	Perumnas Pakunden Blok D	AKTIF
3. Seni ukir/patung	1. Sono Keling	Kukuh Priambodo	Jl. Sonokeling. Kel. Rembang	AKTIF
	2. Ogal – agil	Medi	Jl. A. Yani Gg. II Kel. Sananwetan	AKTIF
4. Tosan Aji	1. Panji Patria	Hendra Setyawan		AKTIF
5. Batu mulia/ suiseki	1. Sugiyanto	Sugiyanto	Jl. Sruni Kel. Kepanjen Kidul	AKTIF
	2. Hari	Hari	Jl. S. Parto Hardjono, Kel. Bendogerit	AKTIF
6. Bonsai	1. Persatuan Penggemar Bonsai Ind.	Juyanto	Jl. S. Parto Hardjono. Kel. Bendogerit	AKTIF
1. Seni Vokal / suara	1. Paduan suara “Monalisa”	Tan Sie Ing	Jl. Merdeka . Tk. Murah . Kel. Sukorejo	AKTIF
	2. Paduan Suara “Gita Lentera”	Massa Mike	Jl. Diponegoro Kel. Bendogerit	AKTIF
2. Seni Musik modern	1. Legend Music Community (Lmc)	Sugeng Asmedi	Jl. Sumatera	AKTIF
	2. Bankers Band	Fajar		AKTIF
	3. Bon Rojo Band	Purwanto	Perum Melati Kel. Kepanjenkidul	AKTIF
	4. All Friends Akustik	Ongko Haru Taryono	Jl. Sultan Agung 136 Kel. Sananwetan	AKTIF
	5. Aneka Irama Musik (Aim)	Said Nofandi	Jl. Kenari Kel. Sananwetan	AKTIF
	6. Keroncong Puspanada	Pradiana	Jl. Ciliwung Kel. Tanggung	AKTIF
	7. Keroncong Gita Lentera	Massa Mieke	Jl. Diponegoro Kel. Bendogerit	AKTIF
	8. Keroncong Sakura	Totok Susanto	Jl. Sakura Kel. Kepanjenkidul	AKTIF
	9. Ok.Nn	Beny	Jl. Kacapiring Kel. Kepanjenkidul	AKTIF
	10. Keroncong Sinar Mbothe	Sujarno Usman	Jl. Lawu 9 Kel. Kauman	AKTIF
	11. Ardi Diana	Lies Setyowati	Jl. TGP 25 Kel. Sananwetan	AKTIF
	12. Mega Musika	Riyadi Pristiyono	Jl. Bromo 25 Kel. Kepanjenkidul	AKTIF
	13. OM. Nirmala	Komari	Jl. Kalimas 124 Kel. Tanjungsari	AKTIF
	14. OM. Mahendra	Suhartoyo	Jl. Ciliwung Gg I b/14 Kel. Bendo	AKTIF
	15. Imron Sadewo Elekton	Mashuri	Jl. Sentot Prawiradirjo Kel. Sentul	AKTIF

JENIS KESENIAN	KELOMPOK KESENIAN	PIMPINAN	ALAMAT	KET
	16. Keroncong Ojo Dumeh	Susanto	Jl. Timor 27 Kel. Sananwetan	AKTIF
	17. OM. Alexza	Ika Windi Astutik	Jl. Cimalaya 15 Kel. Bendo	AKTIF
	18. Fokustik	Yudha Kusuma	Jl. Kelud 93 Kel. Kepanjenlor	AKTIF
	19. Keroncong Bina Mitra Muda	Aditia Syah Putra	Jl. Sawit 7 Rt/Rw. 01/06, Kel. Plosokerep	AKTIF
	20. Yianar Star Kids (Musik Anak-Anak)	Tatik Hidayati	Jl. Moeradi I/7, Kel. Bendogerit	AKTIF
	21. Ok. Jenang Abang	Trada Alim Adiwinaki	Griya Melati Indah II. Blok G 14	AKTIF
	22. OK. Ronggolawe	Joko Susanto	Jl. Tanjung 12 I. A Pakunden-Sukorejo	AKTIF
	23. Ok.Galih Jati	Sasmito Rofik	Jl. Wilis Rt/Rw. 01/05, Kel. Kauman	AKTIF
	24. Om Savana	Anik Entriani	jl. Joko Kandung no.159 Kel. Blitar	AKTIF
	25. Irama Patria	Beni Purbo Witoko	jl. Kacapiring Kel. Kepanjenkidul	AKTIF
	26. 01 Blitar Kustik	Dwi Sumardianto	jl. Kalimas Kel. Pakunden	AKTIF
	27. Denista Musik	Deni Rudianto	jl. Antasari No. 58 Kel. Sentul	AKTIF
	28. Biting Musik Studio	Agung Nugroho	perum. GKR jl. Samosir Kel. Sananwetan	AKTIF
	29. Chisty	Hariono ISY	jl. TGP No.39 Kel. Kepanjenkidul	AKTIF
	30. De Kakabe	Masherudin Susanto	Puri Kenari asri J-2 Kel. Karang tengah	AKTIF
	31. Samudra Musica	Fika Aprilia Hariyani	jl. Imam Bonjol no. 12 Kel. Sananwetan	AKTIF
	32. Fantastik Acoustik	Nico Bayu Tantri	jl. RA Kartini no. 191 Kel. Kepanjenlor	AKTIF
	33. Tazakka Hil Acoustik	Moch. Muchsin	jl. Semeru no. 56 Kel. Kauman	AKTIF
	34. Sirdek Merdk Trotoar	Didit Agus Prase Tejo	jl. Kedondong no. 10 Kel. Sukorejo	AKTIF
	35. Pagar Asri	Susilo	Perum ASABRI Blok 5 Kel. Gedog	AKTIF
	36. Kopdaria	Suhariono	jl. Tirtoyudho no.16 Kel. Blitar	AKTIF
	37. Zafea	Handika Rosadi	jl. Randu Agung Kel. Turi	AKTIF
	38. Zeus Band	Novi Indah	jl. Dr. Wahidin 98/100 Kel. Sentul	AKTIF
	39. Apple Mint Band	Rengga Wahyu B.	jl. Sudarmo Gg II NO. 2 Kel. Sananwetan	AKTIF

JENIS KESENIAN	KELOMPOK KESENIAN	PIMPINAN	ALAMAT	KET
	40. The Point	Moh Toha	jl. Jawa No. 17 Kel. Sananwetan	AKTIF
	41. Jati Districk Rebel	Arif Agung Setiawan	jl. Turi no. 15 Kel. Turi	AKTIF
	42. After Night	Juan Jumaidi	jl. Tanggung No. 156 Kel. Pakunden	AKTIF
	43. Endika	Rondi Puspita	jl. Piere Tendean No.20 Kel.Gedog	AKTIF
	44. Mayor Minor	Michail	Jl. Melati no 70 Kepanjenkidul Kota Blitar	AKTIF
	45. Kpj Blitar Raya	Yuni Rahmawati	Jl. Sultan Agung Kec. Sananwetan	AKTIF
	46. Bina Sartika Budaya	MURYANI	JL. DEWI SARTIKA NO. 09 KEPANJENKIDUL	AKTIF
	47. Putra Blitar	NUR ALI	JL RAYUNG WULAN SUKOREJO KOTA BLITAR	AKTIF
3. Seni Musik Tradisional	1. Karawitan Retno Palupi	S. Suyono	Jl. Moeradi No. 3 Kel. Bendogerit	AKTIF
	2. Karawitan Seger Waras	Hadi Sudjut	Jl. Pamungkur Kel. Blitar	AKTIF
	3. Campursari Guyubing Budaya	Nur Ali	Jl. Rayungwulan Kel. Blitar	AKTIF
	4. Reog Ronggolawe	Mien Ali	Jl. Nias Kel. Sananwetan	AKTIF
	5. Blank – Blenk Percussion	Dani Badak	Jl. A. Yani Gg. II Kel. Sananwetan	AKTIF
	6. Anoraga Percussion	Bejo Santoso	Jl. Ciliwung Kel. Bendo	AKTIF
	7. Reog Joko Suro	Nawan Yudianto	Jl. Jati No. 88 Kel. Sukorejo	AKTIF
	8. Campursari Bina Nada	M. Abi Said	Jl. WR. Supratman Kel. Bendogerit	AKTIF
1. Sastra Macapat	1. Sanggar Sastra Pring Nggalih	Amang Makmur	Jl. Riau 21 Kel. Sananwetan	AKTIF
	2. Sanggar Sastra Abdiningsun	Hirdiyanto (Lik Hir)	Jl. Imam Bonjol 110 Kel. Gedog	AKTIF
	3. Macapat Pring Nggalih	Amang Makmur	Jl. Riau 21 Kel. Sananwetan	AKTIF
	4. Macapat Abdiningsun	Herdianto (Lik Hir).	Jl. Imam Bonjol Kel. Gedog	PASIF
	5. Macapat Jaga Laras	Kahir	Jl. Timor Kel. Sananwetan	AKTIF
	4. SEKAR PANGON	AC SUDARMAN	Jl. Piere Tendean No. 28 Kel. Gedog	AKTIF
	5. PASAMUAN BLITAR KAWENTAR	SUWITO	PERUM GKR BLOK O NO. 6	AKTIF

JENIS KESENIAN	KELOMPOK KESENIAN	PIMPINAN	ALAMAT	KET
2. Puisi	1. Sanggar Sastra Dieng	Puput Amiranti	Jl. Dieng 18 Kel. Bendogerit	AKTIF

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar, 2025

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya di Kota Blitar dilaksanakan rutin seperti festival tahunan di kecamatan melalui pameran seni/bazar, penjualan makan dan minuman tradisional, pertunjukan seni jaranan, dan budaya bersih desa. Dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai pelaku diharapkan dapat melestarikan budaya lokal dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Di dalam mempromosikan, melestarikan, dan mengembangkan budaya lokal dapat dilihat dari penambahan sanggar seni yang membuat berbagai kreasi tari seni pertunjukan. Pentas tari kreasi mendapat dukungan dari Pemerintah kota Blitar melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Pendidikan dengan digelarnya *event* rutin mingguan di Makam Bung Karno.

Untuk memperluas wawasan dan pengalaman melalui *event* festival. Pemerintah Kota Blitar memiliki *event* tahunan Blitar Ethnic National Carnifal dan Soekarno Coffe Fest serta Pasar Blitar Djadoel menjadi *event* unggulan yang paling ditunggu masyarakat Blitar.

2.1.4.4.3 Urusan Pilihan

2.1.4.4.3.1 Pariwisata

Kota Blitar masih menjadi destinasi wisata unggulan Jawa Timur. Hal ini disebabkan nama besar proklamator RI, Bung Karno masih menjadi magnet wisata bagi Jawa Timur khususnya, masyarakat Indonesia pada umumnya, bahkan mancanegara. Tidak hanya itu, Kota Blitar juga terkenal dengan sejarah perjuangan PETA dan wisata budaya lain yang diharapkan dapat menarik wisatawan secara lebih luas.

Adapun kinerja urusan pariwisata disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.70

Indikator Urusan Pariwisata Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	90,34	321,4	328,81	97,23	42
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota Blitar	Persen	422,241	575,36	42,4	471,35	0,38

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	22,48	30,67	30,58	40	41,06
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	13,89	35,2	35,74	35,74*	8,61
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	2,08	6,64	6,41	1,45	0,76

Sumber: *Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar, 2025*

Sektor pariwisata unggulan di Kota Blitar didominasi oleh sektor wisata Makam Bung Karno, perhotelan dan akomodasi makan minum atau restoran. Sektor unggulan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif pada pendapatan daerah. Untuk meningkatkan persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar diperlukan langkah-langkah strategis seperti meningkatkan promosi wisata serta meningkatkan kapasitas pelaku wisata.

2.1.4.4.3.2 Pertanian

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu sektor/lapangan usaha yang ikut menggerakkan perekonomian masyarakat di Kota Blitar. Walaupun kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tidak dominan, kinerja urusan pertanian terus didorong Pemerintah Kota Blitar ditengah isu ketahanan pangan secara nasional. Sebagai kawasan perkotaan, pertanian di Kota Blitar diarahkan pada pertanian perkotaan yang merupakan kegiatan pertumbuhan, pengolahan dan distribusi pangan serta produk lainnya.

Tabel 2.71

Indikator Urusan Pertanian Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Milyar Rupiah	201,80	200,34	213,52	200,43	214,73
2	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	7,11	6,18	6,32	4,82	4,90
3	Nilai produksi hasil pertanian prioritas	Rupiah	Mulai dihitung tahun 2024			66.059.050.000	105.602.750

Sumber: *Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, 2026*

Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor pangan di Kota Blitar didorong oleh penerapan teknologi budidaya, mekanisasi pertanian, inovasi pakan, benih unggul, serta optimalisasi teknologi pascapanen yang didukung penuh oleh ketersediaan infrastruktur strategis seperti irigasi serta jalan usaha tani yang memperlancar distribusi di tengah permintaan pasar yang stabil. Namun, keberlanjutan sektor ini menghadapi tantangan serius berupa dampak perubahan iklim seperti kekeringan dan banjir, ancaman penyakit tanaman, keterbatasan permodalan bagi pelaku usaha kecil, serta lemahnya regenerasi petani. Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Kota Blitar berkomitmen memperkuat pembangunan infrastruktur sarana prasarana termasuk penyediaan *cold storage*, mendorong hilirisasi produk berbasis UMKM melalui kemitraan rantai pasok yang kuat, serta mengakselerasi regenerasi sektor pangan melalui sosialisasi dan pembentukan kelompok pemuda tani guna menjamin keberlangsungan usaha tani di masa depan.

2.1.4.4.3.3 Perikanan

Pembangunan sektor perikanan di Kota Blitar merupakan bagian integral dari upaya penguatan ketahanan pangan dan diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal. Adapun indicator urusan perikanan Kota Blitar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.72

Indikator Urusan Perikanan Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai Produksi Hasil Perikanan Prioritas	Rupiah	Tahun 2021 – 2023 belum ada perhitungan untuk nilai produksi hasil perikanan prioritas			12.835.000.000	13.875.384.500
2	Produktivitas Perikanan Budidaya Ikan Konsumsi	kg	Tahun 2021 – 2023 belum ada perhitungan untuk produktivitas perikanan budidaya ikan konsumsi			4,96	5,16
3	Produktivitas Perikanan Budidaya Ikan Hias	Ekor/ m^2	Tahun 2021 – 2023 belum ada perhitungan untuk produktivitas perikanan budidaya ikan hias			103,03	114,2

Sektor perikanan di Kota Blitar memiliki peluang pengembangan yang besar didorong oleh tingginya permintaan pasar terhadap komoditas segar maupun olahan, potensi produksi yang masih luas, serta kemudahan akses perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Meskipun demikian, sektor ini masih menghadapi hambatan berupa fluktuasi harga bahan baku yang berimbas pada kurang kompetitifnya harga produk olahan, dominasi skala usaha mikro yang masih kecil, serta keterbatasan inovasi dan diversifikasi produk olahan. Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Kota Blitar fokus pada penguatan rantai pasok dengan mendekatkan penyedia bahan baku lokal kepada produsen olahan, memacu diversifikasi produk melalui inovasi berkelanjutan pada skala usaha kecil, serta memperketat pembinaan dan pengawasan perizinan guna memastikan seluruh produk hasil perikanan memenuhi standar kualitas dan memiliki daya saing pasar yang lebih tinggi.

2.1.4.4.3.4 Perdagangan

Sektor perdagangan sangat berperan dalam perekonomian Kota Blitar. Hal ini seiring dengan data pendukung yang mencerminkan bahwa perdagangan merupakan salah satu sektor dominan yang menyokong PDRB sebesar 24,69 persen. Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi sektor paling dominan dalam struktur perekonomian Kota Blitar selama 5 (lima) tahun terakhir.

Urusan perdagangan diukur berdasarkan indikator sebagai berikut.

Tabel 2.73

Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun	
			2024	2025
1	Volume Perdagangan	Triliun Rupiah	1,953	2,129

Sumber: *Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, 2025*

2.1.4.4.3.5 Perindustrian

Sektor industri menjadi salah satu penggerak perekonomian di Kota Blitar. Tiga sub sektor industri yang paling dominan secara jumlah usaha dan tenaga kerjanya adalah industri makanan, minuman, dan tembakau; industri kayu, bambu, dan peralatan rumah tangga; serta industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit.

Tabel 2.74

Indikator Urusan Perindustrian Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun	
			2024	2025
1	Nilai produksi industri	Rupiah	844.366.054	919.558.083

Sumber: *Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, 2026*

Berdasarkan data tersebut, indikator Nilai Produksi Industri menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Kenaikan nilai produksi ini

didorong oleh faktor pendukung utama berupa program hibah alat produksi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang secara langsung membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kapasitas produksi mereka. Dukungan sarana prasarana ini terbukti efektif dalam memacu produktivitas unit-unit industri di daerah.

Namun demikian, sektor ini masih menghadapi faktor penghambat berupa kondisi makro ekonomi yang cenderung lesu, sehingga memengaruhi daya beli masyarakat dan kemampuan pasar dalam menyerap hasil produksi secara maksimal. Sebagai langkah strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah daerah akan melakukan tindak lanjut dengan memanfaatkan data dan informasi dalam aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Pemanfaatan platform ini bertujuan untuk melakukan pemetaan industri secara lebih akurat sehingga intervensi kebijakan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran, khususnya bagi industri-industri yang sedang dalam tahap berkembang.

2.1.4.4.4 Urusan Penunjang Pemerintahan

2.1.4.4.4.1 Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan yang baik menjadi salah satu tolok ukur kinerja pemerintahan. Urusan administrasi pemerintahan di Kota Blitar diarahkan pada peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan peningkatan standar kepuasan layanan kesekretariatan. Capaian urusan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut

Tabel 2.75

Indikator Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2021 – 2025

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Kualitas Kebijakan	59,96	67,00	67,00	69,00	81,38
2.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	46,18	59,00	75,82	78,05	90,56
3.	Efektivitas pelaksanaan kebijakan dan kerja sama pemerintah daerah	100	100	100	100	100

Sumber: *Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2026*

2.1.4.4.4.2 Keuangan

Kinerja urusan keuangan daerah Kota Blitar diukur melalui capaian indikator kinerja utama Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD), khususnya pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara umum, kinerja menunjukkan hasil yang cukup baik, namun belum optimal dalam menggali potensi pendapatan daerah.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, yang berdampak pada belum optimalnya realisasi penerimaan pajak daerah. Selain itu, kualitas dan akurasi data perpajakan belum memadai, sehingga potensi pajak belum tergali secara maksimal dan mempengaruhi ketepatan penetapan target. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak hanya

memerlukan optimalisasi pemungutan, tetapi juga penguatan sistem data dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Upaya yang perlu dilakukan meliputi peningkatan sosialisasi perpajakan, pemutakhiran dan integrasi basis data perpajakan, penggalian potensi pajak, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengembangan inovasi layanan perpajakan.

Tabel 2.76

Indikator Urusan Keuangan Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	4,18	17	18,47	18,04	21,05
2	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Indeks	NA	NA	NA	3,09	3,14
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	69,01	76,41	77,08	71	58,13

Sumber: *BPKAD Kota Blitar, 2026*

2.1.4.4.4.3 Kepegawaian

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dianggap paling krusial karena kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dapat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh karena itu penyelenggaraan urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan menjadi penting dalam membentuk pemerintahan daerah yang unggul.

Tabel 2.77

Indikator Urusan Kepegawaian Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Sistem Merit	Indeks	250	262	271,5	271,5	271,5

Sumber: *BKPSDM Kota Blitar, 2026*

Nilai Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Blitar selama periode tahun 2023–2025 tercatat tetap sebesar 271,5. Nilai tersebut bukan menunjukkan tidak adanya upaya peningkatan kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan karena belum dilaksanakannya penilaian kembali terhadap Pemerintah Kota Blitar setelah penilaian terakhir pada tahun 2023.

Seiring dengan adanya perubahan mekanisme pengawasan dan penilaian penerapan Sistem Merit, penilaian dilakukan secara selektif (sampling/random) terhadap instansi pemerintah tertentu oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga tidak seluruh kabupaten/kota memperoleh evaluasi setiap tahun. Dalam pelaksanaan penilaian tersebut, Pemerintah Kota Blitar tidak termasuk instansi yang menjadi objek penilaian,

sehingga nilai Indeks Sistem Merit tetap menggunakan hasil penilaian terakhir, yaitu sebesar 271,5.

Meskipun demikian, Pemerintah Kota Blitar tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Merit melalui penguatan manajemen talenta, pengembangan kompetensi ASN, penyempurnaan sistem manajemen kinerja, serta pengelolaan karier yang mengedepankan prinsip profesionalitas, kompetensi, kinerja, dan integritas. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas manajemen ASN sekaligus menjadi modal utama dalam menghadapi penilaian Sistem Merit pada periode berikutnya.

2.1.4.4.4.4 Pengawasan

Dasar hukum sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintahan No. 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu adanya prosedur dan mekanisme pengawasan internal. Pengawasan internal harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menunjang kesejahteraan seluruh anggota kelembagaan yang bersangkutan demi mencapai tujuan yang dicita - citakan.

Tabel 2.78

Indikator Urusan Pengawasan Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	BPKP tidak melaksanakan QA	3	Terdefinisi	Terdefinisi
2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	%	95,1	81,17	85,05	85	93,25
3	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	%	-	-	9,08	9,51	9,54

Sumber: *Inspektorat Daerah Kota Blitar, 2026*

Indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Blitar pada tahun 2021 dan 2022 belum memiliki nilai capaian karena pada periode tersebut pengukuran IPAK di tingkat Pemerintah Kota Blitar belum dilaksanakan.

Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi mulai dilakukan pada tahun-tahun berikutnya sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap integritas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian indikator kinerja, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Hasil evaluasi menjadi dasar dalam mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi capaian kinerja, baik faktor pendukung maupun penghambat, sekaligus sebagai bahan perumusan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kinerja pembangunan pada periode berikutnya.

2.2.1 Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2025

Salah satu aspek yang dievaluasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah capaian indikator kinerja yang memberikan gambaran mengenai keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Indikator tersebut ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan didukung oleh Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menggambarkan capaian sasaran, program, serta aspek pembangunan daerah lainnya.

Pada subbab ini disajikan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025 berdasarkan target dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Analisis dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian terhadap target yang direncanakan sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, baik dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun dalam mencapai sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini juga menjadi dasar untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi capaian kinerja serta merumuskan langkah perbaikan guna meningkatkan kinerja pembangunan pada periode berikutnya.

Adapun capaian kinerja IKU dan IKD tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.79 dan Tabel 2.80.

Tabel 2.79

Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	6,91	6,91	Tercapai	▪ Upaya menjaga ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penguatan kewirausahaan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat ▪ Harmonisasi budaya dan keberagaman sebagai stabilitas daerah ▪ Keterlibatan aktif kelompok perempuan serta pemuda dalam proses pengambilan keputusan publik	▪ Tantangan menjaga toleransi di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi informasi ▪ Belum optimalnya internalisasi nilai toleransi, keberagaman, dan budaya lokal pada seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, seiring dengan meningkatnya pengaruh media digital dan perubahan sosial.
2.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,30	75,47	Tercapai	Angka usia harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus	▪ Prevalensi penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						mengalami peningkatan.	jantung, dan stroke cenderung meningkat ▪ Tantangan kesehatan pada kelompok lanjut usia utamanya pada pelayanan kesehatan lansia yang memadai ▪ Masih adanya risiko masalah gizi dan kesehatan ibu-anak
3.	Tingkat Kemiskinan	(%)	6,63	6,60	Tercapai	Upaya pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yang disinergikan dengan program pemerintah pusat, provinsi maupun lembaga non pemerintah antara lain kebutuhan pangan, papan, perumahan, kesehatan dan pendidikan serta upaya peningkatan pendapatan melalui	Ketergantungan pada bantuan yang bersifat konsumtif, lemahnya integrasi dan pemutakhiran data sehingga bantuan kurang tepat sasaran, kurang maksimalnya upaya pemberdayaan dan pendampingan KPM agar terentas dari kemiskinan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						peningkatan keterampilan guna mendorong terciptanya wirausaha baru	
4.	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	62,80	75,87	Tercapai	Ketersediaan infrastruktur, penataan ruang, dan kondisi sosial masyarakat relatif baik	▪ Pemerataan kualitas lingkungan hunian dan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya tercapai. ▪ Masih adanya rumah tidak layak huni, keterbatasan akses sebagian masyarakat berpenghasilan rendah terhadap standar hunian yang layak ▪ Masih terdapat penduduk miskin dan pengangguran yang berpotensi memengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan
5.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,71	82,03	Tidak Tercapai	▪ Usia harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan	▪ Tantangan dalam pengendalian penyakit tidak menular,

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dalam enam tahun terakhir (2020-2025) ▪ Meningkatnya harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah ▪ Standar hidup layak yang ditunjukkan oleh Paritas Daya Beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP) yang diukur dari pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan terus menguat selama enam tahun terakhir	pemenuhan gizi masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi kelompok rentan seperti lansia, balita, dan masyarakat berpenghasilan rendah ▪ Masih adanya kemiskinan dan pengangguran yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat ▪ Daya beli masyarakat meningkat namun belum sepenuhnya diikuti peningkatan kesejahteraan ekonomi secara merata
6.	Rasio Gini	Indeks	0,352	0,34	Tercapai	Kebijakan program perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran dan diiringi dengan upaya pemberdayaan untuk	Rendahnya motivasi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi akibat ketergantungan yang berlebihan terhadap Bansos

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						meningkatkan pendapatan	
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	90,91	92,86	Tercapai	Masing-masing koordinator dan pendukung RB telah menindaklanjuti rekomendasi evaluasi RB tahun 2024 melalui perbaikan rencana aksi tahun 2025	Dinamika peraturan penerapan reformasi birokrasi (transisi implementasi RB menuju *grand design* RB Nasional 2025-2045)
8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,37	5,31	Tidak Tercapai	▪ Kondisi perekonomian pasca pandemi cenderung membaik dan terus mengalami peningkatan ▪ Meningkatnya pengembangan kewirausahaan dan dukungan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil ▪ Kondisi keamanan dan stabilitas sosial yang kondusif	Adanya penurunan kegiatan perekonomian, ditandai dengan berkurangnya kegiatan konstruksi, administrasi pemerintah, dan jasa lainnya karena dampak efisiensi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						sehingga mendukung aktivitas ekonomi	
9.	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	98,80	81,43	Tidak Tercapai	Kegiatan patroli dalam rangka pencegahan gangguan trantibum sudah tertib dilakukan	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat terhadap peraturan
10.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	70,32	69,66	Tidak Tercapai	Adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas daerah	Dalam indeks risiko bencana, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk bisa diturunkan. Hal ini karena tren dari dampak bahaya yang cenderung meningkat tiap tahunnya. Kemudian, komponen kerentanan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
							juga cenderung mengalami peningkatan dengan adanya penambahan penduduk, migrasi ke Kawasan urban, peningkatan pembangunan, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim. Fenomena tersebut menyebabkan sulitnya menurunkan indeks kerentanan
11.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	9,69	5,77	Tercapai	Adanya dukungan lintas sektor dalam Percepatan penurunan stunting	▪ Balita Naik Berat Badan kurang dari standar sebesar 56,35% (target 70%) ▪ Belum terpenuhinya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan bagi seluruh balita bermasalah gizi (Balita T, Balita BB Kurang)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
							▪ Adanya beberapa alat antropometri (timbangan injak digital dewasa) yang mengalami kerusakan
12.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	62,58	53,98	Tidak Tercapai	Kemudahan akses untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar baik papan, pangan, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial	Kurangnya partisipasi aktif kelompok rentan khususnya lansia, penyandang disabilitas dan anak dalam forum perencanaan pembangunan serta lemahnya regulasi tentang perlindungan kelompok rentan
13.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	81,00	81,00	Tercapai	Adanya peningkatan kualitas layanan publik yang semakin responsif dan inklusif.	▪ Tantangan akan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, mengingat anggaran yang terbatas.

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
							▪ Belum optimalnya kualitas beberapa infrastruktur pendukung, khususnya jalan lingkungan dan drainase pada beberapa lokasi.
14.	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	88,68	89,06	Tercapai	▪ Terjaminnya kebebasan masyarakat dalam berkumpul, berserikat, berkumpul dan berpendapat. ▪ Tingkat partisapasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan. ▪ Kapasitas Lembaga Demokarasi	▪ Belum efektifnya perlindungan hukum bagi jurnalis dalam dalam rangka memperkuat kemerdekaan pers. ▪ Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam forum-forum yang memengaruhi kebijakan. ▪ Rendahnya pencapaian target PERDA yang diundangkan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
15.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	91,00	79,91	Tidak Tercapai	▪ Adanya dukungan bantuan RTLH dari Kementerian PKP ▪ Didukung dengan dana penanganan di luar APBD dan APBN ▪ Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman.	▪ Menurunnya anggaran APBD guna penanganan RTLH ▪ Tidak adanya alokasi bantuan Penanganan RTLH dari Kementerian PKP ▪ Menurunnya daya beli masyarakat terhadap sektor perumahan ▪ Berkurangnya kemampuan masyarakat dalam perbaikan rumah
16.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,97	4,28	Tercapai	▪ Meningkatnya aktivitas ekonomi pada sektor perdagangan, jasa, dan UMKM yang menjadi penopang utama perekonomian Kota Blitar. ▪ Pelaksanaan program pelatihan kerja, peningkatan	▪ Belum optimalnya kesesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia kerja. ▪ Terbatasnya lapangan kerja formal akibat keterbatasan investasi dan industri skala besar di Kota Blitar.

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						kompetensi tenaga kerja, dan fasilitasi penempatan kerja. ▪ Tumbuhnya kewirausahaan dan usaha mikro yang mampu menciptakan peluang kerja baru.	▪ Perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar kerja yang menuntut peningkatan keterampilan tenaga kerja secara berkelanjutan
17.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89,40	91,22	Tercapai	Dari 9 (Sembilan) Indikator yang digunakan dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai IKM tertinggi, diantaranya yaitu: 1) Indikator penanganan pengaduan (98,05) 2) Indikator biaya/tarif (97,08) 3) Indikator perilaku pelaksana (90,75)	▪ Beberapa PD belum tepat waktu dalam pelaporan tindak lanjut SKM tahun 2024, belum maksimal memanfaatkan aplikasi sukma-e dan ada beberapa PD yang belum melaksanakan FKP. ▪ Dari 9 (Sembilan) Indikator yang digunakan dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai IKM

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
							paling rendah, diantaranya yaitu: 1) Indikator sarana prasarana (89,15) 2) Indikator produk spesifikasi (89,06) 3) Indikator waktu (87,97)
18.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	67,02	67,33	Tercapai	Pembangunan dan pemeliharaan RTH Publik dan Uji Kualitas Air yang dilaksanakan secara rutin	Belum tercapainya Indeks Kualitas Udara Kota Blitar Tahun 2025 (nilai IKLH didapatkan dari perhitungan IKA, IKU, dan IKL)
19.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Angka	80,11	81,19	Tercapai	Masing-masing PD koordinator implementasi SAKIP telah menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP tahun 2024 dan LHE SAKIP semester I tahun 2025 baik dari sisi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan	Perlunya re-komitmen implementasi SAKIP mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal pada seluruh jenjang jabatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						kinerja dan evaluasi SAKIP internal	
20.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,82	14,82	Tercapai	Akses dan kualitas pendidikan yang baik, tingginya partisipasi sekolah, kebijakan pemerintah yang mendukung, dukungan ekonomi keluarga, kualitas guru serta proses pembelajaran, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan	Faktor ekonomi, risiko putus sekolah, serta masalah sosial dan motivasi belajar.
21.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,825	10,83	Tercapai	▪ Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan pada berbagai jenjang. ▪ Tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai modal peningkatan kualitas hidup.	▪ Adanya penduduk yang memiliki tingkat pendidikan relatif rendah sehingga memengaruhi capaian RLS. ▪ Faktor ekonomi yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat melanjutkan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						▪ Dukungan program pemerintah dalam perluasan akses pendidikan dan penurunan angka putus sekolah. ▪ Ketersediaan sarana prasarana pendidikan serta kualitas tenaga pendidik yang semakin baik.	pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. ▪ Risiko putus sekolah pada kelompok rentan akibat permasalahan sosial dan ekonomi keluarga.
22.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	97,49	98,11	Tercapai	▪ Adanya Perda No 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender ▪ Adanya dukungan kebijakan yang mengatur pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	▪ Standar hidup layak yang dilihat dari pendapatan per kapita laki-laki lebih tinggi dari perempuan ▪ Di komponen pendidikan, RLS (Rata-rata Lama Sekolah) perempuan lebih rendah dibanding laki-laki
23.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	25,09	24,78	Tidak Tercapai	Dukungan aktivitas di pasar tradisional dan modern, UMKM, serta pelayanan reparasi	Tantangan ke depan terkait kebijakan penguatan daya saing pelaku usaha dan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						kendaraan, yang mendapat dorongan dari berbagai even ekonomi lokal.	menjaga stabilitas daya beli masyarakat.
24.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	5,90	5,92	Tercapai	Semakin bertumbuhnya iklim usaha di bidang penyediaan akomodasi makan dan minum yang ikut menggerakkan perekonomian.	Tantangan untuk mengintegrasikan sektor pariwisata, jasa akomodasi, dan industri pengolahan (kuliner) untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi daerah
25.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	10,03	10,13	Tercapai	▪ Dukungan kebijakan pendampingan terhadap industri kecil dan menengah dilaksanakan secara efektif ▪ Pengembangan inovasi produk dan diversifikasi usaha pada sektor industri pengolahan	▪ Skala usaha industri pengolahan yang masih didominasi usaha kecil dengan kapasitas produksi yang terbatas. ▪ Keterbatasan akses permodalan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing industri pengolahan. ▪ Fluktuasi harga dan ketersediaan bahan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
							baku yang memengaruhi efisiensi produksi. ▪ Belum optimalnya perluasan pasar dan penguatan jaringan pemasaran produk industri lokal
26.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	Tercapai	▪ Upaya penerapan tata kelola keuangan yang baik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dokumen anggaran, pengawasan dan pertanggung jawabannya.	▪ Pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya tertib. ▪ Kepatuhan terhadap prosedur dan pengendalian internal yang masih perlu diperkuat. ▪ Pemahaman dan kompetensi terkait pengelolaan keuangan daerah perlu ditingkatkan.

Sumber *: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Blitar 2026, data diolah*

Tabel 2.80

Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Tingkat Inflasi	%	1,97	2,95	Tidak tercapai	▪ Penguatan koordinasi TPID, pemantauan harga, serta upaya menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi barang.	▪ Penguatan koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
2	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	1	1,1	Tercapai	▪ Kondusivitas iklim berinvestasi di Kota Blitar yang ditandai dengan proses perizinan bagi pelaku usaha secara cepat dan mudah ▪ Peningkatan kontribusi investasi dari usaha kecil, khususnya pada	▪ Kota Blitar dengan luas wilayah terbatas mempengaruhi minat investor skala besar ▪ Belum optimalnya promosi investasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						sektor perdagangan dan pariwisata	
3	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	Rasio	3,54	Data belum rilis	-	▪ Berkembangnya sektor perdagangan dan jasa yang memiliki perputaran modal relatif cepat ▪ Efektivitas belanja pemerintah daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi ▪ Partisipasi investasi swasta yang mendorong pertumbuhan usaha dan penciptaan nilai tambah ekonomi ▪ ICOR tahun 2024 tercatat sebesar 3,51, menunjukkan tingkat efisiensi investasi yang relatif baik dan telah berada di	▪ Terbatasnya skala ekonomi daerah karena wilayah Kota Blitar yang terbatas ▪ Dominasi usaha perdagangan dan jasa berskala kecil ▪ Keterbatasan investasi pada sektor bernilai tambah tinggi ▪ Belum meratanya adopsi teknologi oleh pelaku usaha

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						bawah target tahun 2025.	
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	%	19,24	19,38	Tercapai	▪ Meningkatnya investasi swasta pada sektor perdagangan, jasa, dan properti, pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur oleh pemerintah ▪ Stabilitas kondisi ekonomi daerah yang mendukung ekspansi usaha dan penambahan aset produktif	Keterbatasan investasi pada sektor industri pengolahan dan sektor bernilai tambah tinggi juga berpotensi membatasi peningkatan PMTB yang lebih signifikan
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72,26	75,95	Tercapai	▪ Meningkatnya penduduk usia produktif yang masuk ke pasar kerja ▪ Bertambahnya peluang kerja dan usaha mandiri sehingga serta	▪ Kurangnya tenaga kerja yang salah satunya disebabkan oleh migrasi tenaga kerja dari wilayah lain ▪ Terbatasnya ketersediaan lapangan kerja

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						meningkatnya partisipasi perempuan dan kelompok usia produktif dalam kegiatan ekonomi. ▪ Tersedianya program pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan.	formal dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja ▪ Ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha.
6	Indeks Inovasi Daerah	Angka	50	61,34	Tercapai	▪ Meningkatnya tata kelola inovasi daerah yang ditunjukkan melalui penguatan regulasi, koordinasi, pembinaan, dan dokumentasi inovasi pada perangkat daerah. ▪ Peningkatan komitmen perangkat daerah dalam mengembangkan	▪ Tantangan kebutuhan inovasi yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi, tuntutan masyarakat, dan perubahan regulasi. ▪ Keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun sarana pendukung, untuk melakukan pengembangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.	inovasi secara lebih luas. ▪ Perlunya peningkatan keberlanjutan inovasi agar tidak hanya berhenti pada tahap penciptaan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik.
7	Proporsi jumlah usaha mikro	%	8,84	16,33	Tercapai	Tingginya keterlibatan penduduk usia produktif dalam usaha mikro menunjukkan potensi kewirausahaan yang besar	Tantangan meningkatkan produktivitas unit-unit usaha agar mampu bertahan sekaligus naik kelas menjadi usaha kecil atau menengah.
8	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan	%	93,59	94,36	Tercapai	▪ Kota Blitar memiliki luas wilayah terkonsentrasi yang	▪ Masih adanya gangguan ketertiban seperti

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
	Sendirian di Area Tempat Tinggalnya					terbagi dalam 3 kecamatan (Kepanjenkidul, Sananwetan, Sukorejo). Hal ini membuat pemantauan wilayah menjadi jauh lebih cepat dan efisien ▪ Pengoptimalan infrastruktur pengawasan digital seperti pemasangan jaringan CCTV di berbagai sudut jalan diskominfotik.blitarkota.go.id serta keaktifan Layanan *Emergency Call* Center 112 diskominfotik.blitarkota.go.id memberikan jaminan psikologis	aksi balap liar atau nongkrong larut malam yang memicu ketidaknyamanan bagi masyarakat

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						bagi warga yang berjalan malam	
9	Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal	%	67,83	46,7	Tidak tercapai	▪ Semakin baiknya regulasi, peningkatan akses terhadap pekerjaan resmi, dan keberhasilan program pengembangan industri lokal. ▪ Adanya program pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja yang mendukung kesiapan memasuki pasar kerja formal.	▪ Sebagian besar tenaga kerja di Kota Blitar masih bekerja pada sektor informal, seperti usaha mikro dan kecil, perdagangan skala kecil, serta pekerjaan mandiri ▪ Ketidaksesuaian antara kompetensi sebagian pencari kerja dengan kebutuhan tenaga kerja formal yang semakin menuntut keterampilan dan sertifikasi tertentu.
10	Rasio kewirausahaan daerah	%	2,92	0,01		Peningkatan kewirausahaan daerah salah satunya didukung dengan aktifnya	Motivasi berusaha penduduk usia kerja masih bersifat pemenuhan kebutuhan dasar atau usaha

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						perkembangan ekonomi lokal.	sampingan, belum mencapai tahap ekspansi usaha yang memerlukan struktur organisasi formal dengan tenaga kerja tetap yang berkelanjutan.
11	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	4,20	4,12	Tidak tercapai	Kondisi perekonomian daerah yang relatif stabil dengan dukungan sektor perdagangan, jasa, dan UMKM sebagai penggerak utama ekonomi.	▪ Koordinasi lintas sektor dalam pengembangan ekosistem inovasi dan pasar yang belum optimal ▪ Kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi yang masih perlu diperkuat.
12	Persentase pemanfaatan digital pada sektor ekonomi	%	10,88	10,88	Tercapai	Ekosistem ekonomi digital yang mulai terbentuk sebagai bentuk kemudahan dan keamanan transaksi non tunai	▪ Tantangan digitalisasi yang terus berkembang sehingga pelaku usaha dituntut untuk terus

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
							beradaptasi dengan teknologi ▪ Masih terdapat pelaku usaha, khususnya UMKM skala mikro, yang memiliki keterbatasan literasi digital dan kemampuan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan usaha.
13	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Proses Politik	%	85,14	Dihitung pada tahun pelaksanaan Pemilihan Umum	-	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi.	Kurangnya pemahaman politik pada kelompok masyarakat tertentu, khususnya pemilih pemula.
14	Angka Ketergantungan	%	40,57	40,33	Tercapai	Struktur penduduk yang masih didominasi oleh usia produktif.	Peningkatan harapan hidup yang berkontribusi pada bertambahnya jumlah penduduk lansia.

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
15	Return on Asset (ROA) BUMD	%	0,01	-0,038	Tidak tercapai	Target ROA bisa tercapai dengan dukungan dari dua motor penggerak utama, yaitu dukungan Finansial (menaikkan laba, menekan biaya) dan dukungan Non-Finansial (manajemen, sistem, dan kebijakan)	Nilai ROA masih dibawah target karena nilai laba yang juga jauh dari target disebabkan karena meningkatnya kredit bermasalah serta adanya koreksi atas biaya dan pembentukan CKPN pada BPR. Serta masih tingginya tingkat kebocoran pada PDAM dan sulitnya meningkatkan SR pelanggan.
16	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	-4,81	-4,54	Tercapai	Adanya peningkatan Net Ekspor dari tahun ke tahun dari produk unggulan UMKM.	Kota Blitar tidak memiliki industri skala besar sehingga produksi barang untuk diekspor keluar daerah relatif terbatas.
17	Realisasi investasi (Triliun Rupiah)	triliun rupiah	0,437	0,43752	Tercapai	▪ Kondusifitas iklim berinvestasi di Kota	▪ Kota Blitar dengan luas wilayah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Blitar yang ditandai dengan proses perizinan bagi pelaku usaha secara cepat dan mudah. ▪ Peningkatan kontribusi investasi dari usaha kecil, khususnya pada sektor perdagangan dan pariwisata.	terbatas mempengaruhi minat investor skala besar. ▪ Belum optimalnya promosi investasi.
18	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	6,47	Data belum dirilis	-	▪ Realisasi 2024 tercatat sebesar 6,46. ▪ Meningkatnya digitalisasi transaksi dan penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi.	Masih terbatasnya literasi keuangan baik konvensional maupun digital pada sebagian masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan kelompok berpenghasilan rendah.
19	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,70	0,82	Tercapai	▪ Adanya kebijakan penambahan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).	Belum optimalnya seluruh potensi pajak daerah yang ada, terutama dari sektor-sektor ekonomi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						▪ Kinerja pemungutan pajak daerah relatif lebih optimal dibandingkan dengan daerah lain di tingkat provinsi	tertentu yang belum tergarap maksimal.
II	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
1	Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Kumulatif	TON CO2 EQ	663790,97	664.110,67	Tidak tercapai	▪ Adanya dukungan program nasional seperti Proklim; ▪ Partisipasi aktif masyarakat melalui edukasi dan pendampingan; ▪ Investasi pada teknologi rendah emisi (IPAL, PJU *solarcell*) ▪ Hari Bebas Kendaraan Bermotor *(Car Free Day)*	▪ Terbatasnya ruang hijau dan hutan kota sebagai penyerap karbon di pusat kota. ▪ Emisi tinggi dari sektor transportasi dan pemukiman padat.

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						▪ Penanaman pohon di jalan dan taman kota.	
2	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	80,81	69,56	Tidak tercapai	▪ Aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan masyarakat meningkat. ▪ Dukungan Program Penguatan Ketahanan Pangan Daerah.	▪ Penurunan Dimensi Ketersediaan Pangan. ▪ Kerentanan terhadap Fluktuasi Harga Pangan. ▪ Tantangan Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan ▪ Inefisiensi anggaran dalam peningkatan ketahanan pangan daerah ▪ Terjadi perubahan metode perhitungan mulai tahun 2024, memungkinkan penyesuaian target kinerja yang telah ditetapkan.

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	28,22	18,47	Tidak Tercapai	Optimalisasi Gerakan Memilah Sampah dari rumah sebagai upaya pengurangan sampah	Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah langsung dari sumbernya
4	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,41	0,41	Tercapai	Adanya regulasi pemerintah daerah terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana	Kurang lengkapnya dokumen dan bukti dukung (terutama pada prioritas ke 7 : Sistem pemulihan bencana)
5	Indeks Kualitas Udara	Indeks	79,59	75,10	Tidak Tercapai	▪ Gerakan Reboisasi dan penanaman pohon secara cluster ▪ Kegiatan *Car free day* dilaksanakan secara rutin ▪ Optimalisasi transportasi massal (bus sekolah).	▪ Belum adanya monitoring terhadap emisi dari kendaraan diluar KIR ▪ Capaian 2025 dihitung menggunakan data satelit atas wilayah Kota

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
6	Indeks Kualitas Air	Indeks	69,47	70,86	Tercapai	Uji Kualitas Air yang dilaksanakan secara rutin	Masih adanya pencemaran dari industri tahu, ternak dan dari sektor domestik yang menyebabkan penurunan kualitas air sungai
7	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	39,55	46,90	Tercapai	Pembangunan dan pemeliharaan RTH Publik	Meningkatnya kebutuhan sarana prasarana kota sejalan dengan alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya tutupan lahan di Kota Blitar
8	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	4,99	6,11		▪ Adanya sinergi program intervensi ketahanan pangan, bantuan sosial, dan pengendalian inflasi yang melibatkan lintas sektor seperti Bulog, Bapanas, dan Dinas Sosial.	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						▪ Masifnya edukasi pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) serta optimalisasi program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).	
9	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,447	0,44	Tidak tercapai	▪ Angka kelahiran yang tinggi: Tingkat kelahiran yang tinggi dapat meningkatkan jumlah penduduk. ▪ Penurunan angka kematian: Penurunan angka kematian bayi dan ibu dapat meningkatkan harapan hidup dan jumlah penduduk. ▪ Mutasi: datang atau keluarnya penduduk.	▪ Angka kematian yang tinggi: Tingkat kematian yang tinggi dapat menurunkan jumlah penduduk. ▪ Angka kelahiran yang rendah: Tingkat kelahiran yang rendah dapat menurunkan jumlah penduduk. ▪ Mutasi: datang atau keluar penduduk, meninggal dunia, dan kelahiran.

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						meninggal dunia, dan kelahiran	
10	Rasio Penduduk	%	99,47	99,28	Tidak tercapai	Rasio Penduduk sebesar 99,52% artinya Penduduk di Kota Blitar 99 laki-laki per 100 perempuan. Hal ini dikarenakan Jumlah Penduduk Perempuan di Kota Blitar lebih Besar dari Jumlah Penduduk Laki-laki.	Salah satu penyebab rasio jenis kelamin kurang dari 100% adalah Angka Harapan Hidup perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.
11	Kepadatan Penduduk	Orang/km^2	4712	4876	Tidak tercapai	Kepadatan Penduduk di Kota Blitar sebesar 4.065/km^2 masih tergolong dalam kategori ideal untuk perkotaan (standar kepadatan ideal perkotaan 5.000 orang per/km2)	Terjadi peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun.
12	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	14,12	14,49	Tercapai	Adanya dukungan capaian dari PDAM	Belum tersedianya masterplan perencanaan,

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
							pentahapan dan kebutuhan atas anggaran yang dibutuhkan
13	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	12,23	13,26	Tercapai	Adanya dukungan capaian dari PDAM	Belum tersedianya masterplan perencanaan, pentahapan dan kebutuhan atas anggaran yang dibutuhkan
14	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	91,0	91,0	Tercapai	Pembinaan Para Pelaku Pengelola sampah (Bank sampah, Pemilah dan pengirit sampah), pengolahan sampah secara *sanitary landfill*	Meningkatnya Jumlah Timbulan sampah setiap tahunnya dikarenakan peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan daya tampung TPA semakin berkurang
15	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	18,66	8,98	Tidak tercapai	Terdapat pelayanan sedot tinja (SIDOTI) dan *idle capacity* IPLT Kota Blitar	Belum adanya Perda Air Limbah Domestik sebagai dasar Layanan Lumpur Tinja Terjadwal

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
16	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	72,00	71,90*		▪ Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Pendidikan, kesehatan, dan keterampilan penduduk yang baik dapat meningkatkan IPBK. ▪ UHC (JKN/BPJS) ▪ Partisipasi sekolah meningkat ▪ Sanitasi layak, air bersih layak, dan kemandirian lansia	▪ Kemiskinan: Kemiskinan dapat menghambat akses penduduk terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. ▪ Keterbelakangan Pendidikan: Pendidikan yang rendah dapat menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia. ▪ Krisis Kesehatan: Krisis kesehatan dapat menurunkan kualitas hidup penduduk dan meningkatkan angka kematian. ▪ Pernikahan muda masih terjadi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
III	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	60,01	63,14	Tercapai	▪ Kondisi demografi laju pertumbuhan penduduk Kota Blitar yang relatif menunjukkan perkembangan positif ▪ Struktur Ekonomi Kota Blitar bertumpu pada dengan sektor ekonomi yang produktif seperti industri atau jasa ▪ Investasi dan Infrastruktur yang berjalan baik.	PDRB Per Kapita Kota Blitar pada tahun 2020-2025 masih berada di bawah rata-rata PDRB Per Kapita Jawa Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
2	Indeks Pelestarian Budaya	Indeks	0	50,29	Tercapai	▪ Masih adanya tokoh masyarakat yang peduli dan berpartisipasi secara aktif dalam	▪ Belum optimalnya inventarisasi, pelaksanaan pengamanan, pemeliharaan, minimnya revitalisasi dan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						pelestarian warisan budaya lokal ▪ Masih adanya kelompok masyarakat yang mempelajari dan mempraktikkan budaya lokal dan peran aktif pemerintah/lembaga dalam pelestarian budaya.	masih kurangnya publikasi ▪ Minimnya minat generasi penerus yang cenderung beranggapan menganggap kebudayaan tradisional kuno dan tidak relevan dengan kehidupan modern, rendahnya pemahaman akan nilai-nilai warisan budaya, serta masih adanya konflik kepentingan atau perbedaan pandangan mengenai nilai suatu budaya di dalam masyarakat. ▪ Kurangnya regenerasi SDM kesenian yang berusia muda dalam melestarikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
							tradisi, kesenian dan adat istiadat.
3	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Indeks	0,699	Dihitung pada tahun 2026	-	▪ Adanya perhitungan mandiri IPKM yang memudahkan proses pemantauan dan evaluasi capaian indikator kesehatan. ▪ Dukungan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.	▪ Penyakit tidak menular, seperti hipertensi dan diabetes, masih menjadi tantangan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. ▪ Kualitas dan kelengkapan data kesehatan dari berbagai sumber masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pengukuran indeks yang lebih akurat. ▪ Keterbatasan sumber daya pada beberapa program promotif dan preventif sehingga belum seluruh sasaran dapat

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
							terlayani secara optimal.
4	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	72,83	88,12	Tercapai	Kualitas pembelajaran telah baik didukung dengan indeks kualitas TIK di angka 98,94	Proporsi Pendidik bersertifikasi masih di angka sedang
5	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	86,87	96,62	Tercapai	Kualitas pembelajaran telah baik didukung dengan indeks kualitas TIK	Proporsi Pendidik bersertifikasi masih di angka sedang
6	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	61,90	84,54	Tercapai	Tersedianya akses internet yang merata memudahkan siswa mengakses sumber belajar mandiri seperti video tutorial pembelajaran matematika dan latihan soal berbasis web.	Masih kuatnya stigma di kalangan siswa bahwa matematika adalah mata pelajaran yang membosankan dan menakutkan. Hal ini menciptakan hambatan psikologis sebelum proses belajar dimulai.

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	72,74	91,73	Tercapai	Tersedianya akses internet yang merata memudahkan siswa mengakses sumber belajar mandiri seperti video tutorial pembelajaran	▪ Masih kuatnya stigma di kalangan siswa bahwa matematika adalah mata pelajaran yang membosankan dan menakutkan. Hal ini menciptakan hambatan psikologis sebelum proses belajar dimulai. ▪ Kesulitan Memahami Soal Cerita: Banyak siswa gagal dalam numerasi bukan karena tidak bisa berhitung, melainkan karena rendahnya kemampuan literasi baca. Mereka kesulitan memahami maksud atau instruksi dalam soal cerita

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
							yang kompleks, sehingga salah dalam menentukan operasi hitung yang tepat.
8	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	62,65	64,00	Tercapai	Meningkatnya kontribusi Domain Kesehatan dan Kesejahteraan serta Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja tercermin dari pencapaian nilai tertinggi sebesar 90,00.	Kurangnya capaian pada Domain Partisipasi dan Kepemimpinan terlihat dari nilai indeks yang berada pada angka 10,00, yang mengindikasikan kebutuhan akan langkah perbaikan.
9	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,569	0,569	Tercapai	Meningkatnya kualitas Dimensi Ruang Terbuka Olahraga *(Indoor* dan *Outdoor)* dengan capaian nilai 0,836 memperkuat indikasi bahwa prasarana olahraga di Kota	Kurangnya capaian pada Dimensi Performa ditandai dengan penurunan hasil kompetisi, di mana perolehan medali dan peringkat Kota Blitar mengalami kemerosotan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Blitar berada dalam kondisi yang baik.	dibandingkan periode sebelumnya.”
10	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	71,06	78,40	Tercapai	▪ Alokasi anggaran yang cukup dan komitmen pemerintah untuk melindungi anak ▪ Kerja sama dan kolaborasi yang baik antar instansi dan Lembaga ▪ Partisipasi aktif masyarakat dalam melindungi anak dan melaporkan kasus kekerasan anak	Jumlah SDM yg terbatas, personil UPT PPA hanya 1 orang (Ka UPT sj), Perhitungan IPA dilakukan oleh Kementerian PPA dimana datanya diperoleh dari hasil sensus BPS yang tidak dilakukan setiap tahun
11	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	173,99	0	Tercapai	▪ Pelaksanaan kegiatan audit kasus *nearmiss maternal* sebagai salah satu upaya pembelajaran kasus *nearmiss* pada ibu	▪ Terdapat ibu hamil/bersalin/nifas yang data KTP Kota Blitar tapi domisili luar Kota, melakukan pemeriksaan di Kota Blitar, mengakibatkan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						hamil/ bersalin/nifas ▪ Kerja sama dengan lintas sektor pendidikan (Poltekkes Kemenkes Malang-Kampus Blitar) dalam upaya pendampingan Ibu Hamil Resti ▪ Supervisi Fasilitatif dalam rangka monitoring hasil pendampingan di seluruh wilayah Kelurahan se-Kota Blitar ▪ Pelaksanaan Drill Kegawatdaruratan Maternal Neonatal triwulanan di PONED masing-masing UPT Puskesmas	tenaga kesehatan tidak bisa melakukan pemantauan ▪ Terdapat ibu hamil/bersalin/nifas yang data kependudukan dan domisili luar Kota Blitar, tetapi melakukan pemeriksaan di Kota Blitar.

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
12	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	tahun	11,01	10,95	Tidak tercapai	Sebagai kota besar di Jawa Timur, Kota Blitar memiliki konsentrasi sarana pendidikan yang lebih lengkap dibandingkan wilayah kabupaten, sehingga memudahkan akses fisik ke jenjang SMA hingga perguruan tinggi.	Masih kurangnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
13	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,185	0,198	Tercapai	▪ Adanya Perda No 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender ▪ Adanya dukungan kebijakan yang mengatur pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.	▪ Kesenjangan di dimensi pemberdayaan dan pasar tenaga kerja ▪ Kenaikan IKG tahun 2024 terutama dipicu oleh memburuknya gap pada dimensi pemberdayaan perempuan dan akses ke pasar tenaga kerja. Artinya, partisipasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
							perempuan dalam kegiatan ekonomi (kesempatan kerja, jabatan, penghasilan) belum setara dengan laki-laki. ▪ Masih rendahnya representasi dan pengambilan keputusan Perempuan ▪ Masih terdapat keterbatasan keterlibatan perempuan dalam posisi pengambilan kebijakan politik dan organisasi, yang menjadi penyumbang IKG. ▪ Perbaikan Dimensi Kesehatan Reproduksi Kurang Signifikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
14	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	100	100	Tercapai	Kota Blitar telah menerapkan UHC 100% dengan tingkat keaktifan 97,15%	Tantangan keikutsertaan JKN secara mandiri oleh masyarakat mengingat keterbatasan anggaran daerah
15	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,44	0,73	Tercapai	BAZNAS Kota Blitar sudah terbentuk, aktif operasional, dan menjalankan program aktif serta adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah baik dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan Shodaqoh	Zakat, infak, dan shodakoh sudah dihimpun secara rutin, baik dari ASN dan masyarakat tetapi belum optimal, Literasi zakat masyarakat masih sedang serta Zakat produktif belum dominan
16	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	%	83,0	82,87	Tidak Tercapai	Kerjasama dan koordinasi yang baik antar fasyankes serta dukungan lintas program/lintas sektor, supervisi dan monitoring data	Pasien terduga TBC tidak kembali ke fasyankes untuk melakukan pemeriksaan penunjang, SITB tidak dilakukan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						secara rutin ke seluruh fasyankes di Kota Blitar	pengisian secara *realtime*
17	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis	%	74,44	84,52	Tercapai	Kerjasama dan koordinasi yang baik antar fasyankes serta dukungan lintas program/lintas sektor	Masih adanya gap antara penemuan kasus dengan pengobatannya
18	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	%	84,93	85,61	Tercapai	Terciptanya fokus dimensi pengukuran toleransi, kesetaraan, kerja sama dan peran pemerintah daerah untuk penilaian IKUB sesuai dengan target	Perhitungan Nilai IKUB direncanakan tahun n-1, sehingga mempengaruhi proses evaluasi dan pengukuran capaian kinerja perangkat daerah
19	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	11,86	25,77	Tercapai	Adanya kebijakan program sekolah gratis yang membantu mengurangi beban pengeluaran pendidikan di Kota Blitar	Masih kurangnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
20	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	48	14,09	Tidak tercapai	▪ Adanya tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan standar layanan perpustakaan. ▪ Optimalisasi koordinasi lintas sektoral dalam meningkatkan pembangunan literasi masyarakat.	▪ Penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar Tahun 2025 sebesar 14,09 menunjukkan bahwa pembangunan literasi masyarakat Kota Blitar belum memenuhi standar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI. ▪ Penyesuaian metodologi, dimensi, indikator, serta bobot penghitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat disesuaikan berdasarkan kewenangan daerah mulai tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
							sehingga capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. ▪ Ketersediaan koleksi maupun kompetensi tenaga perpustakaan masih belum terpenuhi secara optimal.
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	59,72	67,37	Tercapai	▪ Meningkatnya peran Perempuan dalam aktivitas ekonomi keluarga. ▪ Berkembangnya sektor perdagangan, jasa, dan UMKM yang memberikan peluang kerja bagi perempuan. ▪ Meningkatnya akses perempuan terhadap	▪ Keterampilan dan kompetensi tenaga kerja perempuan belum merata sesuai kebutuhan pasar kerja. ▪ Tantangan menjaga stabilitas TPAK serta memastikan adanya lingkungan kerja yang tetap responsif terhadap

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kewirausahaan. ▪ Dukungan program pemberdayaan perempuan dari pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.	kebutuhan Perempuan.
22	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	48,41	41,1	Tidak tercapai	▪ Perluasan cakupan perlindungan tenaga kerja melalui sosialisasi, penguatan koordinasi dengan pemberi kerja, serta optimalisasi kepesertaan pekerja sektor formal maupun informal	▪ Kondisi ekonomi daerah yang didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ▪ Karakteristik ketenagakerjaan di Kota Blitar yang masih didominasi sektor informal.
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM						

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1	Indeks Rasa Aman	Angka	76,60	Data belum rilis	-	Kondusivitas wilayah yang membuat masyarakat nyaman	Belum tersedianya data realisasi tahun 2025, dan masih akan dihitung pada tahun 2026
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi (3,030)	3	Tercapai	▪ Praktik pengendalian intern dan telah terdokumentasi dengan baik. ▪ Telah disusunnya Pedoman Pengelolaan Risiko melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 63 Tahun 2021	Belum optimalnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	77,70	97,94	Tercapai	▪ Terjalinnya koordinasi yang baik antara Bapperinda dengan Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar dalam perbaikan perencanaan tahun berikutnya

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						▪ Telah disusunnya dokumen RIPJPID yang merupakan dokumen perencanaan strategis daerah yang memuat arah kebijakan, strategi, dan peta jalan pengembangan riset, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEK) untuk mendukung pembangunan daerah	
4	Indeks Pemerintahan Digital Indonesia	Indeks	-	Data belum rilis	-	Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Belum terpenuhinya arsitektur Pemerintahan Digital (Pemdi) secara menyeluruh sesuai ketentuan yang berlaku.

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	63,64	65,00	Tercapai	Penanganan pengaduan masyarakat dan pelanggaran Perda sudah dilakukan	▪ Kurangnya Sanksi bagi pelanggar PERDA dan PERKADA ▪ Dengan terbitnya KUHP perlunya revisi saksi bagi pelanggaran PERDA dan PERKADA ▪ Kurangnya sarana prasarana penunjang penegakan PERDA dan PERKADA ▪ Penegakan Perda sering bersinggungan dengan PD lain ▪ Koordinasi lintas instansi belum optimal sehingga terjadi saling lempar tanggung jawab ▪ Penertiban sering mendapat

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
							penolakan dari masyarakat atau kelompok tertentu.
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	4,11	4,26	Tercapai	▪ Bukti dukung yang terkumpul banyak yang sudah memenuhi kriteria untuk mencapai target nilai ▪ Adanya tim evaluator internal SPBE yang ditetapkan melalui SK Walikota	▪ Belum optimalnya pelaksanaan audit TIK ▪ Kesesuaian peta rencana SPBE dengan realisasi kegiatan masih belum optimal

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						▪ Dukungan dari OPD terkait dalam memenuhi bukti dukung	
7	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	97,65	98,7	Tercapai	▪ Telah dilaksanakan penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ▪ Telah dilaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi raperda yang tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ▪ Telah dilaksanakan analisis dan evaluasi peraturan daerah dan/atau	Nilai penataan JDIH mengacu pada penilaian tahun 2023, sehingga nilai 2024 tidak maksimal dan berdampak pada nilai IRH tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						peraturan walikota dengan tertib di setiap tahunnya	
8	Persentase Capaian Aksi HAM	%	94,80	97,40	Tercapai	Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait indikator penilaian secara intens dan kontinyu serta meningkatnya pemahaman perangkat daerah terhadap indikator penilaian sehingga kooperatif dalam memenuhi bukti dukung	Terdapat perubahan pengampu terhadap penilaian aksi HAM Tahun 2025, sehingga membutuhkan proses untuk penyesuaian
9	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,54	4,69	Tercapai	▪ Pembinaan keseluruh perangkat daerah dan melakukan *desk* dalam pengisian F01 yang menghasilkan F02 dan pengisian F03. Dari F02 ditambah	Dari 6 indikator penilaian PEKPPP, terdapat 3 indikator terendah yaitu: aspek inovasi, aspek profesionalisme SDM dan aspek konsultasi dan pengaduan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						F03 menjadi nilai IPP masing-masing perangkat daerah ▪ Dari 6 indikator penilaian PEKPPP, terdapat 3 indikator tertinggi yaitu: aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik dan aspek kebijakan pelayanan	
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)						
	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	%	86,54	95,00	Tercapai	Pemerintah Kota Blitar secara konsisten menjalankan kebijakan sekolah gratis melalui dana bantuan daerah	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang urgensi pendidikan dini masih menjadi faktor dominan. Banyak orang tua

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						untuk menutup biaya operasional sekolah yang tidak tercover BOS, sehingga meringankan beban orang tua.	menganggap: 1) PAUD hanya tempat bermain dan belum menjadi kewajiban seperti SD, 2) Pendidikan bisa dimulai langsung di jenjang Sekolah Dasar (SD) tanpa melalui TK/PAUD, dan 3) Anak cukup belajar di rumah bersama anggota keluarga (pola asuh mandiri).
2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	Tercapai	Pemerintah Kota Blitar secara konsisten menjalankan kebijakan sekolah gratis melalui dana bantuan daerah untuk menutup biaya operasional sekolah yang tidak tercover BOS, sehingga	Biaya Non-Pendidikan: Meskipun biaya SPP gratis, biaya "tersembunyi" seperti transportasi, uang saku, dan kebutuhan penunjang lainnya tetap menjadi beban bagi keluarga di bawah garis

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						meringankan beban orang tua.	kemiskinan atau kelompok marjinal.
3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	43,87	46,61	Tercapai	Pemerintah Kota Blitar secara konsisten menjalankan kebijakan sekolah gratis melalui dana bantuan daerah untuk menutup biaya operasional sekolah yang tidak tercover BOS, sehingga meringankan beban orang tua.	Lingkungan Sosial: Pengaruh lingkungan pertemanan dan kurangnya motivasi dari keluarga di beberapa area tertentu masih menjadi tantangan dalam menurunkan Angka Tidak Sekolah (ATS).
4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	%	Indikator baru	46,22	-	▪ Adanya komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. ▪ Dukungan program rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas sekolah	▪ Sebagian toilet sekolah mengalami kerusakan atau penurunan fungsi akibat usia bangunan dan intensitas penggunaan. ▪ Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
							rehabilitasi sarana sanitasi pada beberapa sekolah
5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	%	Indikator baru	44,52	-	▪ Adanya komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. ▪ Dukungan program rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas sekolah ▪ Dukungan dana dari provinsi dalam pemeliharaan sarpras sekolah.	▪ Sebagian ruang kelas sekolah negeri mengalami kerusakan atau penurunan fungsi akibat usia bangunan dan intensitas penggunaan. ▪ Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan rehabilitasi sarana sanitasi pada beberapa sekolah
	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1	Persentase kematian ibu	(per 100.000 kelahiran hidup)	173,99	0	Tercapai	▪ Pelaksanaan kegiatan audit kasus nearmiss maternal sebagai salah satu upaya	▪ Terdapat ibu hamil/bersalin/nifas yang data KTP Kota Blitar tapi domisili luar Kota,

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						pembelajaran kasus nearmiss pada ibu hamil/bersalin/nifa ▪ Kerjasama dengan lintas sektor pendidikan (Poltekkes Kemenkes Malang-Kampus Blitar) dalam upaya pendampingan Ibu Hamil Resti ▪ Supervisi Fasilitatif dalam rangka monitoring hasil pendampingan di seluruh wilayah Kelurahan se-Kota Blitar ▪ Pelaksanaan Drill Kegawatdaruratan Maternal Neonatal triwulanan di PONED masing-masing UPT Puskesmas	melakukan pemeriksaan di Kota Blitar, mengakibatkan tenaga kesehatan tidak bisa melakukan pemantauan. ▪ Terdapat ibu hamil/bersalin/nifas yang data kependudukan dan domisili luar Kota Blitar, tetapi melakukan pemeriksaan di Kota Blitar.

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	9,69	6,18	Tercapai	Adanya dukungan lintas sektor dalam Percepatan penurunan stunting	▪ Adanya timbangan injak digital yang mengalami kerusakan di Posyandu sehingga menggunakan ▪ Banyaknya balita tidak naik BB (T) saat penimbangan posyandu ▪ Capaian D/S masih belum memenuhi target 80%
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100	100	Tercapai	▪ Kerja sama dengan Dinas Kesehatan tempat ibu hamil berdomisili, dengan menyampaikan data ibu hamil dan hasil pemeriksaannya yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan terkait	▪ Ibu hamil domisili luar kota Blitar yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas/Puskesmas Pembantu ▪ Ibu hamil domisili kota Blitar, tapi saat hamil pulang ke alamat KTP asli dan kembali untuk memanfaatkan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						▪ Pendataan di masing2 puskesmas melalui penempelan stiker P4K, swiping ibu hamil dan pemberian bumil berkah	pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas/Puskesmas Pembantu Kota Blitar
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	100	100	Tercapai	Bekerja sama dengan bidang Pelayanan Kesehatan terkait peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Puskesmas PONED.	Terdapat tenaga kesehatan PONED belum mendapatkan pelatihan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar).
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100	Tercapai	Adanya dukungan dari FKTP swasta dan FKRTL dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir seperti KN1,KN2, KN3 dan skrining bayi baru lahir (SHK, S-HAK, S-G6PD dan Skrining PJB).	▪ Tingginya mobilitas bayi ▪ Adanya hasil CKG bayi baru lahir belum masuk ke ASIK.

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	Tercapai	Kerja sama dan koordinasi yang baik serta dukungan lintas program/lintas sektor, supervisi dan monitoring data secara rutin	▪ Balita yang melakukan pemeriksaan di luar wilayah ▪ Balita yang dilakukan SDIDTK masih ada yang belum dilaporkan secara rutin
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100	100	Tercapai	▪ Adanya dukungan lintas sektor ▪ Jumlah sasaran riil anak usia pendidikan dasar lebih besar dibandingkan dengan sasaran proyeksi sesuai KMK ▪ Waktu pelaksanaan kegiatan menggunakan tahun ajaran, sehingga pada bulan Juni 2025 kegiatan skrining	▪ Kegiatan skrining anak sekolah pada tahun ajaran 2025/2026 menyesuaikan dengan kebijakan CKG anak sekolah dimana item pemeriksaan bertambah, dan sasaran pelaksanaan kegiatan CKG anak sekolah adalah dari kelas 1 – 12 ▪ Jumlah sasaran riil yang berlimpah,

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						anak usia pendidikan dasar telah selesai dilaksanakan	dimana bila dihitung dengan sasaran riil rasio rata-rata per puskesmas menjadi 1 : 15.479, sedangkan bila dibandingkan dengan sasaran proyeksi sesuai KMK adalah 1 : 9.000 anak.
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	100	100	Tercapai	Pelaksanaan posyandu ILP, deteksi dini PTM di OPD, kerja sama dengan jejaring di wilayah telah berjalan, dan PKG mendukung capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif.	Pencatatan dan pelaporan di *website* ASIK Kemenkes masih belum optimal.
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	Tercapai	▪ Adanya *update form* skrining baru ▪ Adanya integrasi pelayanan kegiatan	▪ Pada umumnya lansia memiliki keterbatasan gerak, sehingga tidak

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						yang dilakukan melalui pendataan ke rumah mengikuti kegiatan posyandu ILP	jarang bergantung kepada *caregiver* dalam mengakses layanan kesehatan ▪ Masih ada lansia yang tidak mengakses posyandu atau puskesmas, kemudian memilih layanan kesehatan lain seperti Dokter Keluarga atau klinik karena layanan fleksibel (malam buka) ▪ Tantangan tahun 2026 adalah keterbatasan BMHP, sedangkan di dalam standar sesuai SPM ada pemeriksaan yang membutuhkan BMHP (gula darah dan kolesterol)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100	100	Tercapai	Pelaksanaan posyandu ILP, deteksi dini PTM di OPD, kerja sama dengan jejaring di wilayah telah berjalan, dan PKG mendukung penemuan penderita Diabetes Melitus untuk diberikan rujukan ke fasilitas kesehatan agar mendapatkan tata laksana lebih lanjut.	Pencatatan dan pelaporan di *website* ASIK Kemenkes masih belum optimal
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100	100	Tercapai	Pelaksanaan posyandu ILP, deteksi dini PTM di OPD, kerja sama dengan jejaring di wilayah telah berjalan, dan PKG mendukung penemuan penderita Diabetes Melitus untuk diberikan rujukan ke fasilitas kesehatan agar	Pencatatan dan pelaporan di *website* ASIK Kemenkes masih belum optimal

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						mendapatkan tata laksana lebih lanjut.	
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100	100	Tercapai	Kota Blitar telah memiliki SK TPKJM, pencatatan SPM ODGJ Berat di SIMKESWA telah optimal, dan layanan integrasi dengan psikiater dari RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	Tantangan dalam pelayanan ODGJ Berat yaitu penanganan pasien pasca pemulihan sehingga tidak terjadi kekambuhan dan bisa produktif kembali
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100	100	Tercapai	Kerja sama dan koordinasi yang baik antar fasyankes serta dukungan lintas program/lintas sektor, supervisi dan monitoring data secara rutin ke seluruh fasyankes di Kota Blitar	Pasien terduga TBC tidak kembali ke fasyankes untuk melakukan pemeriksaan penunjang, SITB tidak dilakukan pengisian secara *realtime*
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang	%	100	100	Tercapai	Koordinasi yang baik antar fasyankes, LSM dan lintas sektor	Terdapat populasi kunci yang susah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
	melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar					dalam program HIV/AIDS. - Pencatatan dan pelaporan yang sesuai. - Dilakukannya pelacakan kasus Ohiv yang hilang -Supervisi dilakukan secara berkala	dijangkau (melakukan tes HIV)
	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	%	63,56	63,56	Tercapai	Tersedianya data dan inventarisasi jaringan irigasi	Data kondisi irigasi belum sepenuhnya mutakhir
2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	%	92,35	92,36	Tercapai	▪ Pemanfaatan data dan perencanaan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. ▪ Koordinasi yang baik antar bidang	▪ Kerusakan jalan akibat beban kendaraan melebihi tonase yang ditetapkan ▪ Proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						dan juga dengan Dinas terkait.	waktu cukup Panjang.
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	99,54	96,75	Tidak tercapai	Adanya dukungan capaian dari PDAM	Belum tersedianya masterplan perencanaan, pentahapan dan kebutuhan atas anggaran yang dibutuhkan
4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	Indikator baru	98,53	-	Terdapat pelayanan sedot tinja (SIDOTI) dan *idle capacity* IPLT Kota Blitar	Belum adanya Perda Air Limbah Domestik sebagai dasar Layanan Lumpur Tinja Terjadwal
5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	%	Indikator baru	97,84	-	Sudah terdapat kajian teknis terkait penanganan kawasan rawan banjir	Kurangnya koordinasi dan komitmen antar instansi untuk saling *support* daerah rawan banjir
6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang	%	Tidak memiliki	-	-	-	-

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
	pantai kewenangan kabupaten/kota		kawasan pantai				
7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	%	100	100	Tercapai	Penetapan dokumen RTRW Kota Blitar dan semakin banyaknya penyedia jasa konsultan PBG/SLF di Kota Blitar	Masih terdapat konsultan PBG/SLF yang belum memenuhi standar dan kurang cepat dalam melakukan revisi/perbaikan dokumen PBG/SLF
8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	%	Indikator baru	0	-	-	-
9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	Tercapai	Koordinasi yang baik antar bidang dan juga dengan Dinas terkait.	Proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan waktu cukup Panjang.
10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang	%	Indikator baru	100	-	-	-

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
	sudah diterbitkan di kabupaten/kota						
	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	Tercapai	Penerapan layanan SPM di daerah termasuk SPM Bidang Perumahan Rakyat mendapatkan prioritas dengan dukungan program dan anggaran	Pemenuhan syarat ketentuan SPM Bidang Perumahan sebagaimana Permen PUPR 13/2023 memerlukan waktu dan koordinasi lintas sektor (misal: penetapan SK Bencana)
2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	%	37,07	45,43	Tercapai	Adanya koordinasi dalam melakukan penanganan kawasan kumuh dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan dari 7 indikator kumuh yang terdiri dari : 1. Kondisi bangunan	Belum adanya perencanaan yg terintegrasi dalam penanganan kumuh skala kawasan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						2. Kondisi jalan lingkungan 3. Kondisi penyediaan air minum 4. Kondisi drainase lingkungan 5. Kondisi pengelolaan air limbah 6. Kondisi pengelolaan persampahan 7. Kondisi pengamanan proteksi kebakaran	
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	8,74	14,82	Tercapai	Program Pemerintah Kota masih pro terhadap perbaikan rumah tidak layak huni	▪ Sebagian kondisi rumah memerlukan perbaikan dengan tingkat kerusakan yang cukup berat sehingga membutuhkan biaya lebih besar. ▪ Proses verifikasi dan penetapan calon penerima

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
							bantuan memerlukan ketelitian agar bantuan tepat sasaran.
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum	%	100	100	Tercapai	Penanganan dan pengelolaan PSU perumahan terlah menjadi perhatian dalam program / kegiatan daerah	▪ Tingkat kepatuhan pengembang dalam penyediaan PSU sesuai ketentuan masih perlu ditingkatkan ▪ Belum semua perumahan dapat melakukan penyerahan aset PSU sesuai kelengkapan yang dipersyaratkan
	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	%	NA	80	-	Komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana.	▪ Belum disusunnya R3P ▪ Keterbatasan sumber daya dan data pendukung dalam penyusunan dokumen kebencanaan yang lebih komprehensif.
2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	%	NA	100	-	Koordinasi yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan perangkat daerah, aparat keamanan, dan instansi terkait.	Tingkat kesadaran dan kepatuhan sebagian masyarakat terhadap peraturan daerah masih perlu ditingkatkan.
3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	%	63,64	65,00	Tercapai	▪ Kegiatan sosialisasi dalam rangka pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada ▪ Kegiatan penyelidikan dalam rangka penindakan pelanggaran Perda dan Perkada	▪ Kurangnya Sanksi bagi pelanggar PERDA dan PERKADA ▪ Dengan terbitnya KUHP perlunya revisi saksi bagi pelanggaran PERDA dan PERKADA

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						▪ Kegiatan penertiban pelanggaran dalam rangka penindakan pelanggaran Perda dan Perkada ▪ Kegiatan monitoring pelanggaran Perda dan Perkada dalam rangka penindakan pelanggaran Perda dan Perkada	▪ Kurangnya sarana prasarana penunjang penegakan PERDA dan PERKADA ▪ Penegakan Perda sering bersinggungan dengan OPD lain ▪ Koordinasi lintas instansi belum optimal sehingga terjadi saling lempar tanggung jawab. ▪ Penertiban sering mendapat penolakan dari masyarakat atau kelompok tertentu.
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	NA	100	Tercapai	Sudah terbentuk FPRB (Forum Pengurangan Risiko Bencana) yang membantu memberikan	Belum memiliki fasilitator yang kompeten dan memenuhi secara jumlah dalam

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						pelatihan terkait upaya pengurangan risiko/mitigasi bencana.	memberikan pelatihan.
5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	NA	100	Tercapai	▪ Adanya dukungan dari OPD teknis dalam penanganan bencana ▪ Adanya bantuan sarpras dari BPBD Provinsi Jatim dan BNPB	▪ Keterbatasan jumlah SDM terlatih dan tersertifikat dibandingkan dengan tingginya beban kerja saat tanggap darurat serta kurang meratanya kompetensi teknis personil. ▪ Sarana dan prasarana penanganan bencana kurang memadai dalam mendukung respon cepat di lapangan
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	Tercapai	Upaya penyelamatan telah dilaksanakan	Penguatan fungsi pemadam kebakaran sesuai permendagri

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						dengan memenuhi *Respons Time*	no. 16 Tahun 2020 Tentang nomenklatur dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan, Surat edaran nomor 300.1.79757SJ
	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	Tercapai	Sinergi program dan kegiatan dengan pemerintah pusat, provinsi, kab/kota sekitar serta lembaga non pemerintah dalam rangka layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	▪ Terbatasnya kapasitas/daya tampung panti rehabilitasi sosial milik pemerintah pusat maupun provinsi sehingga PPKS yang memerlukan rujukan harus masuk daftar atrian terlebih dahulu ▪ Terbatasnya SDM kesejahteraan sosial

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
							dari segi kuantitas maupun kualitas
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	Tercapai	Sinergi program dan kegiatan dengan pemerintah pusat, provinsi, kab/kota sekitar serta lembaga non pemerintah dalam rangka layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	▪ Terbatasnya kapasitas/daya tampung panti rehabilitasi sosial milik pemerintah pusat maupun provinsi sehingga PPKS yang memerlukan rujukan harus masuk daftar atrian terlebih dahulu ▪ Terbatasnya SDM kesejahteraan sosial dari segi kuantitas maupun kualitas
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	Tercapai	Sinergi program dan kegiatan dengan pemerintah pusat, provinsi, kab/kota sekitar serta lembaga non pemerintah dalam rangka layanan rehabilitasi	▪ Terbatasnya kapasitas/daya tampung panti rehabilitasi sosial milik pemerintah pusat maupun provinsi sehingga PPKS yang

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	memerlukan rujukan harus masuk daftar atrian terlebih dahulu ▪ Terbatasnya SDM kesejahteraan sosial dari segi kuantitas maupun kualitas
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	Tercapai	Sinergi program dan kegiatan dengan pemerintah pusat, provinsi, kab/kota sekitar serta lembaga non pemerintah dalam rangka layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	▪ Terbatasnya kapasitas/daya tampung panti rehabilitasi sosial milik pemerintah pusat maupun provinsi sehingga PPKS yang memerlukan rujukan harus masuk daftar antrian terlebih dahulu ▪ Terbatasnya SDM kesejahteraan sosial dari segi kuantitas maupun kualitas

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	Tercapai	Komitmen pemerintah dan kesiapsiagaan SDM kesejahteraan sosial dalam rangka perlindungan sosial korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Bencana alam dan sosial terjadi sewaktu-waktu dan mendadak sehingga perencanaan dan perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana kurang akurat
6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	Tercapai	▪ Kecukupan anggaran untuk pemberian bantuan kebutuhan dasar ▪ Ketersediaan data penerima manfaat yang akurat dan termutakhirkan	Seringnya dijumpai perubahan data dan status sosial ekonomi masyarakat sehingga data penerima manfaat kurang akurat
	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	Tercapai	Melaksanakan kegiatan dengan memedomani rencana tenaga kerja	Dinamika kebutuhan tenaga kerja yang dapat berubah mengikuti kondisi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
							lapangan dan prioritas kegiatan.
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	21,51	22,35	Tercapai	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi kepada perusahaan	Kurangnya pemahaman perusahaan untuk menerapkan peraturan ketenagakerjaan
3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	Indikator baru	100	-	-	-
	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	Tercapai	Adanya lembaga PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di masing-masing kelurahan, sehingga	Masih ada masyarakat yang enggan melaporkan terjadinya kasus

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						mempermudah masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan mendapatkan layanan perlindungan anak oleh UPT PPA pelaksanaan sosialisasi, edukasi terkait perlindungan anak ke sekolah dan masyarakat kelurahan	kekerasan terhadap anak
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	Tercapai	▪ Adanya Perda Kota Blitar No 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ▪ Telah terbentuk UPT PPA ▪ Adanya SK Walikota No 100.3.3.3/49/HK/410.020.3/2025	SDM yang menangani di UPT PPA masih Kurang

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak	
	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	1	0	Tidak tercapai	▪ Adanya komitmen pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan dan stunting ▪ Adanya program intervensi pemerintah (bansos, subsidi pangan, BLT), dukungan lintas OPD (Dinsos, Dinkes, Bappeda, Disperindag).	▪ Inflasi bahan pangan berdampak terhadap harga pangan yang mempengaruhi rumah tangga dalam mengakses pangan. ▪ Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang cepat (PHK, inflasi).
	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1	Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	%	88	87,43	Tercapai	Koordinasi yang baik dengan Kantor Pertanahan dan Perangkat Daerah Terkait	Kurang terbukanya pengelola/pemilik tanah terhadap permasalahan yang dihadapi
2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	%	94,8	98,30	Tercapai	Sudah terdapat Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2025 tentang RTRW Kota Blitar Tahun 2025-2045 dapat digunakan sebagai acuan kesesuaian perwujudan rencana pola ruang	Belum terdapat peraturan mengenai kriteria kesesuaian dan ketidaksesuaian
3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	%	Indikator baru	100	-	-	-
	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin	%	66	68,29	Tercapai	Melaksanakan Pembinaan dan pemantauan Kepada Ketaatan penanggung	Pemilik usaha dan atau kegiatan belum optimal dalam memahami dan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota					jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	melaksanakan terhadap ketentuan persetujuan lingkungan terutama bila terjadi perubahan terhadap usaha yang dilaksanakan
2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	NA	100	-	Pembinaan Para Pelaku Pengelola sampah (Bank sampah, Pemilah dan pengirit sampah), pengolahan sampah secara *sanitary landfill*	Meningkatnya Jumlah Timbulan sampah setiap tahunnya dikarenakan peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan daya tampung TPA semakin berkurang
	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	%	99,81	99,81	Tercapai	Adanya komitmen dalam pencapaian target kinerja ,	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						adanya sinergitas layanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil antara pemerintah pusat, provinsi dan dukcapil kab/kota serta inovasi dalam layanan adminduk	melaporkan peristiwa kependudukan nya
2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	99,17	98,99	Tidak tercapai	Adanya komitmen dalam pencapaian target kinerja , adanya sinergitas layanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil antara pemerintah pusat, provinsi dan dukcapil kab/kota serta inovasi dalam layanan adminduk	Masih terdapat anak usia wajib KIA yang belum memiliki KIA dikarenakan secara administrasi sudah pindah namun belum dilaporkan di tempat tujuan. Sehingga berdampak pada perhitungan capaian kepemilikan KIA.
3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	%	100	100	Tercapai	Adanya komitmen dalam pencapaian target kinerja , adanya sinergitas layanan dibidang	Penyusunan buku profil tidak tepat waktu , dikarenakan data penyusunan profil menunggu Data

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						kependudukan dan pencatatan sipil antara pemerintah pusat, provinsi dan dukcapil kab/kota serta inovasi dalam layanan adminduk	Konsolidasi Bersih (DKB) setiap semesternya dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Persen	Indikator baru	99,91	-	Jumlah penduduk yang sudah memiliki IKD 29.005, jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP el 122.886	Data kependudukan yang terus berubah (penduduk pindah, pemula wajib KTP) sehingga membutuhkan pemutakhiran berkelanjutan.
5	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	Tercapai	Adanya komitmen dalam pencapaian target kinerja , adanya sinergitas layanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil antara pemerintah pusat, provinsi dan dukcapil kab/kota	Inovasi WADUK SAE-ETAKJIAH belum berjalan optimal , peran RT dalam melaporkan peristiwa kematian belum berjalan Optimal

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						serta inovasi dalam layanan adminduk	
6	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	93,53	Tidak tercapai	Adanya komitmen dalam pencapaian target kinerja , adanya sinergitas layanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil antara pemerintah pusat, provinsi dan dukcapil kab/kota serta inovasi dalam layanan adminduk	Masih adanya elemen data penduduk terutama terkait data nomor dan tanggal status kawin cerai hidup yang belum terekam dalam *database* kependudukan sehingga untuk cakupan kepemilikan akte perceraian masih rendah
7	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	84,46	Tidak tercapai	Adanya komitmen dalam pencapaian target kinerja , adanya sinergitas layanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil antara pemerintah pusat, provinsi dan dukcapil kab/kota	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan nya

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						serta inovasi dalam layanan adminduk	
	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	NA	0	Indikator tidak dapat dihitung karena tidak memiliki wilayah desa		
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	NA	0			
3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	%	NA	0			
	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	1,93	1,89	Tercapai	Peningkatan / mempermudah akses layanan kesehatan dan kespro, perubahan *lifestyle Chiildfree*, kebijakan pemerintah dlm mendukung keluarga	KDRT, Perceraian, kontrol emosi lemah, tidak ada keteladanan moral dalam keluarga

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						kecil (2 anak lebih baik)	
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	%	64,87	69,03	Tercapai	Peningkatan Pengetahuan KB Pria, Kemudahan akses dalam pelayanan KB, peningkatan pendidikan ibu terkait pengasuhan anak.	Masih adanya usia menikah muda, budaya banyak anak banyak rejeki,
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,1	8,7	Tercapai	Dukungan pasangan, akses layanan mudah, kualitas tenaga kesehatan ,peningkatan pengetahuan tentang KB, kestabilan ekonomi atau kemandirian finansial	Banyak Pus yang tidak ber KB, PUS menggunakan KB Kalender, PUS yang tidak mau memiliki anak, masih ragu memilih kontrasepsi yang aman/sesuai keinginan takut efek samping
	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
1	Konektivitas kabupaten/kota	%	70	70	Tercapai	Luas wilayah yang tidak terlalu luas dan tersedianya SDM	Keterbatasan armada angkutan sekolah maupun angkot

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						angkutan yang mencukupi	sehingga diperlukan peningkatan layanan angkutan orang baik dari segi layanan maupun sarpras
2	Volume/Capacity Ratio di jalan kabupaten/kota	Nilai	0,25	0,25	Tercapai	Pelaksanaan MRL di beberapa simpul kemacetan	Ketidakseimbangan kapasitas jalan serta kurangnya disiplin pengguna jalan sehingga diperlukan pelaksanaan MRL dan sosialisasi kelalulintasan kepada pengguna jalan
3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	Indikator baru	87,50	-	-	-
	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah	%	100	100	Tercapai	Adanya ketersediaan *Bandwith* oleh ISP dan terbangunnya	"Keterbatasan dari Jumlah dan kemampuan SDM

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
	yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika					kecukupan jaringan/komponen IT yang memadai	yang dimiliki OPD dalam menangani setiap gangguan dalam waktu 24 jam/7 hari per seminggu
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	Indikator baru	100	-	▪ Adanya pengelompokan jenis layanan publik sehingga memudahkan dalam pemenuhan capaian kinerja ▪ Adanya dukungan anggaran maupun tenaga pendukung dalam pembuatan maupun pengembangan aplikasi layanan publik	Perangkat Daerah belum memiliki aplikasi layanan publik yang menjadi target capaian kinerja atau PD menggunakan aplikasi milik pemerintah pusat sehingga perlu penyediaan aplikasi layanan publik tingkat Kota Blitar
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program	%	Indikator baru	77,39	-	-	-

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
	prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota						
	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
1	Persentase pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	18,85	18,61	Tidak tercapai	Semangat dan kemauan pengurus serta anggota koperasi sangat tinggi	Daya beli dan pendapatan masyarakat serta anggota koperasi turun sehingga menyebabkan volume usaha koperasi turun. Lemahnya daya saing koperasi dengan korporasi lainnya.
2	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	9,93	9,94	Tercapai	Kesadaran atas pelaku usaha atas pentingnya legalitas usaha sebagai perlindungan dan kepastian hukum	Kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari pelaku usaha akan pentingnya legalitas usaha serta anggapan rumitnya proses pengurusan legalitas

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	1	1,11	Tercapai	▪ Kemudahan perizinan dan digitalisasi (OSS) ▪ Wilayah Kota Blitar yang kondusif ▪ Dominasi sektor UMK ▪ Pembaruan RTRW (Perda No.10 Th 2017 lebih ramah investor, diantaranya aturan pembangunan gedung tinggi (maksimal 15 lantai) di kawasan tertentu)	▪ (1) Keterbatasan lahan (2) Konflik pemanfaatan lahan (protes warga terhadap beberapa proyek pembangunan)
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	100,12	Tercapai	▪ Kemudahan perizinan dan digitalisasi (OSS)	Target realisasi investasi kab/kota telah ditentukan dan hanya non UMK

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						▪ Wilayah Kota Blitar yang kondusif ▪ Dominasi sektor UMK ▪ Pembaruan RTRW (Perda No.10 Th 2017 lebih ramah investor, diantaranya aturan pembangunan gedung tinggi (maksimal 15 lantai) di kawasan tertentu)	
	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	Indikator baru	5,15	-	Kuatnya dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan ketenagakerjaan, yang didukung oleh terjalinnya kerja	Rendahnya kesadaran sebagian pemuda akan pentingnya sertifikasi kompetensi serta ketidaksesuaian jenis pelatihan dengan minat dan potensi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						sama dengan lembaga pelatihan, menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.	pemuda menjadi faktor yang menghambat optimalisasi pengembangan kompetensi kepemudaan.
2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	Indikator baru	7,94	-	▪ Meningkatnya partisipasi pemuda dalam forum perencanaan pembangunan, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan berbagai ruang diskusi publik. ▪ Adanya dukungan pemerintah dan organisasi kepemudaan dalam pengembangan kapasitas serta pemberdayaan pemuda.	▪ Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan belum merata, serta masih didominasi oleh perwakilan dari organisasi atau komunitas tertentu. ▪ Belum optimalnya keterlibatan pemuda secara langsung dalam berbagai kegiatan organisasi dan pembangunan di tingkat masyarakat.

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	%	0	8,85	Tercapai	Meningkatnya keikutsertaan atlet dalam kejuaraan daerah dan regional sebagai ajang seleksi, didukung oleh peran aktif organisasi olahraga dan KONI daerah serta dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah, menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan prestasi olahraga.	Terbatasnya jumlah atlet potensial di beberapa cabang olahraga, belum memadainya fasilitas latihan dan peralatan olahraga standar, kurangnya pelatih berkualitas, serta lemahnya monitoring dan evaluasi pembinaan atlet menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan prestasi olahraga.
4	Persentase jumlah atlet berprestasi	%	Indikator baru	86,96	-	▪ Pembinaan cabor secara berkelanjutan. ▪ Adanya dukungan pemerintah daerah, pengurus cabang olahraga, dan *stakeholder* olahraga dalam	▪ Belum meratanya kualitas pembinaan dan regenerasi atlet pada seluruh cabang olahraga. ▪ Belum optimalnya peningkatan kapasitas pelatih

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						pengembangan atlet. ▪ Tersedianya keikutsertaan atlet pada berbagai kejuaraan sebagai sarana peningkatan pengalaman dan prestasi.	dalam mendukung prestasi atlet.
	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
1	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	%	Indikator baru	100	-	Forum Satu Data yang diupayakan meningkat keaktifannya	▪ Potensi keterlambatan pemutakhiran data pada periode tertentu. ▪ Belum seluruh data terstandarisasi secara optimal sesuai prinsip Satu Data. ▪ Kebutuhan peningkatan kapasitas SDM

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
							pengelola data di beberapa perangkat daerah
	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
1	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	%	Indikator baru	100	-	Implementasi kebijakan keamanan informasi dan persandian di lingkungan pemerintah daerah.	▪ Ancaman keamanan siber yang terus berkembang dan semakin kompleks. ▪ Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis mendalam di bidang keamanan siber.
	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	%	-	48,01	-	Masih adanya partisipasi dan antusias masyarakat untuk menjaga dan	▪ Belum semua keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam melestarikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						melestarikan warisan budaya	kebudayaan terwadahi dan terpenuhi ▪ Masih kurangnya pemahaman SDM baik aparat maupun masyarakat tentang kegiatan pelestarian kebudayaan
2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	%	Indikator baru	-22,80	-	▪ Potensi keberagaman seni, tradisi, dan cagar budaya daerah ▪ Dukungan penyelenggaraan *event* budaya dan festival daerah	Belum optimalnya pemanfaatan obyek budaya sebagai kunjungan wisatawan.
	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	Nilai	55	54,47	Tidak tercapai	Adanya kolaborasi dan sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan	▪ Capaian ini menunjukkan bahwa kegemaran membaca masyarakat Kota

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						kegemaran membaca masyarakat.	Blitar masih berada pada kategori rendah sehingga diperlukan kebijakan strategis dan penguatan pada aspek-aspek kunci untuk mencapai tingkat kegemaran membaca yang lebih optimal. ▪ Penyesuaian metodologi, dimensi, indikator serta bobot penghitungan pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat mulai tahun 2025 sehingga capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	48	14,09	Tidak tercapai	▪ Adanya tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan standar layanan perpustakaan. ▪ Optimalisasi koordinasi lintas sektoral dalam meningkatkan pembangunan literasi masyarakat.	▪ Penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar Tahun 2025 sebesar 14,09 menunjukkan bahwa pembangunan literasi masyarakat Kota Blitar belum memenuhi standar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI. ▪ Penyesuaian metodologi, dimensi, indikator, serta bobot penghitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat disesuaikan berdasarkan kewenangan daerah mulai tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
							sehingga capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. ▪ Ketersediaan koleksi maupun kompetensi tenaga perpustakaan masih belum terpenuhi secara optimal.
	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	Indikator baru	89,25	-	Optimalisasi dan kesinambungan sinergitas Lembaga Kearsipan Daerah dengan Instansi Pembina Kearsipan Provinsi dan Pusat (ANRI), dukungan dan arahan segenap pimpinan daerah,	Terdapat perubahan dari ANRI atas beberapa indikator / Aspek Pengawasan Kearsipan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk peningkatan kualitas kinerja

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						pemangku kebijakan dan seluruh OPD untuk ikut serta bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan guna meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.	penyelenggaraan kearsipan.
	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Kg/Kap/Th	20	22,93	Tercapai	▪ Adanya program Gemarikan ▪ Ketersediaan produksi budidaya ikan lokal	▪ Preferensi masyarakat terhadap olahan ikan masih cukup rendah serta minimnya variasi olahan ikan. ▪ Harga ikan cukup fluktuatif.

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	%	100	100,20	Tercapai	Penerapan teknologi budidaya yang tepat, seperti penggunaan benih unggul, sistem aerasi, serta pengelolaan kualitas air secara berkala, mampu meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi produksi.	Masih terbatasnya pengetahuan sebagian pembudidaya terkait manajemen budidaya modern, terutama efisiensi pakan menyebabkan produktivitas belum optimal.
	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	%	Indikator baru	33,54	-	▪ Kemudahan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berbasis OSS ▪ Ketersediaan potensi destinasi wisata dan ekonomi kreatif lokal.	▪ Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata di Kota Blitar yang dapat diketahui para pengunjung ▪ Ketidakpastian kondisi ekonomi yang mempengaruhi minat investor

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
							▪ Belum Optimalnya kualitas SDM pariwisata dan layanan usaha.
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	%	3,75	42,48	Tercapai	▪ Promosi pariwisata daerah melalui *event*, media digital, dan kerja sama promosi dengan berbagai pihak ▪ Ketersediaan destinasi wisata yang menarik serta produk wisata budaya dan ekonomi kreatif. ▪ Kondisi keamanan dan kenyamanan daerah yang kondusif bagi wisatawan	▪ Persaingan dengan destinasi wisata lain yang lebih dikenal wisatawan asing ▪ Keterbatasan promosi langsung ke pasar wisatawan mancanegara. ▪ Keterbatasan paket wisata terintegrasi yang menarik wisatawan asing untuk tinggal lebih lama.
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	Indikator baru	0,38	Tidak tercapai	Kurangnya promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif yang dapat	Perlunya penguatan promosi dan pemasaran pariwisata melalui media digital

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						diketahui para pengunjung	
	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	0,2	25,12	Tercapai	Kondisi iklim mendukung budidaya komoditi padi dan dukungan program swasembada pangan secara nasional	Perubahan iklim ekstrem (dari el nino/kekeringan panjang ke musim hujan ekstrem) tidak cocok untuk beberapa komoditas, sehingga menyebabkan penurunan produktivitas jagung dan kacang tanah
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	0,14	4,40	Tercapai	Masih tingginya permintaan terhadap komoditas hortikultura terutama untuk cabe dan belimbing	Perubahan iklim ekstrem (dari el nino/kekeringan panjang ke musim hujan ekstrem) menyebabkan penurunan produktivitas

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
							hortikultura terutama komoditi cabai
3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	3	4,54	Tercapai	Adanya fasilitasi pembinaan dan pendampingan dalam pengurusan ijin standar mutu produk (NKV, Halal)	Jangkauan pemasaran produk hasil peternakan masih didominasi pasar lokal, sehingga masih banyak pelaku usaha beranggapan bahwa NKV bukan merupakan suatu kebutuhan.
4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	%	100	100	Tercapai	Adanya bantuan vaksin PMK dan LSD dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	Masih kurangnya kesadaran peternak terhadap kebersihan sanitasi kandang.
	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	%	47,88	61,21	Tercapai	Adanya alat standar metrologi dan SDM metrologi	Adanya pemilik UTTP yang enggan melakukan tera/tera ulang UTTP

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
	bertanda tera sah yang berlaku						dikarenakan jauh dari kantor pelayanan dan berat UTTP yang dibawa
	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri	%	76	76,06	Tercapai	Perkembangan teknologi dan digitalisasi mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah lebih baik	Penurunan daya beli rumah tangga, akibat ekonomi makro

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
	pengolahan nonmigas kabupaten/kota						
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	%	Indikator baru	47,06	-	Adanya payung hukum yaitu UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menyebutkan penggunaan SIINAS bersifat wajib bagi kategori industri tertentu.	Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang manfaat penggunaan aplikasi siinas, sehingga masih enggan untuk memiliki akun.
3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	%	Indikator baru	6,71	-	▪ Dukungan program pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi usaha bagi pelaku IKM ▪ Kemudahan perizinan usaha serta promosi produk lokal.	▪ Persaingan usaha yang semakin ketat, baik dengan produk sejenis maupun produk dari luar daerah. ▪ Fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan perkembangan usaha
4	Persentase realisasi investasi sektor industri	%	11,3	26,22	Tercapai	Regulasi yang ramah investasi mendorong	Sulitnya mencari lahan luas untuk

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
	dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor					investor untuk berinvestasi di Kota Blitar	kawasan industri manufaktur skala besar menghambat masuknya investasi padat modal yang dapat mendongkrak PDRB secara signifikan.
	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Level	9/9 (Target sesuai RPJMD)	40	Tercapai	Pemenuhan penilaian komponen 9 variabel dari 4 domain	Perlu kerja sama dan dukungan seluruh perangkat daerah terutama dalam ketertiban pencatatan realisasi PBJ
2	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	27,50	28,64	Tercapai	Ketertiban pencatatan realisasi pengadaan barang/jasa oleh perangkat daerah sangat penting untuk menunjang perbaikan nilai pemanfaatan sistem pengadaan	▪ Transaksi belanja PBJ melalui katalog elektronik belum sesuai dengan target yang ditetapkan ▪ Terdapat penyesuaian dengan kebijakan LKPP tentang

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
							penonaktifan katalog elektronik versi 5 sehingga perlu adanya adaptasi transaksi belanja PBJ melalui katalog elektronik versi 6
3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Poin	15	21,92	Tercapai	Keaktifan dan kerja sama personil UKPBJ menjadi faktor sangat penting demi meningkatnya kompetensi SDM PBJ	Pelaksanaan Diklat Teknis/Fungsional dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional bagi PPBJ, menunggu jadwal dari LKPP
	4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	%	100	100	Tercapai	Pembahasan Perda dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam rapat banmus	Penjadwalan agenda dan fungsi DPRD yang sering kali harus menyesuaikan dengan dinamika politik dan kondisi internal DPRD
2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	%	100	100	Tercapai	Pembahasan Perda dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang	Penjadwalan agenda dan fungsi DPRD yang sering kali harus menyesuaikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						ditetapkan dalam rapat banmus	dengan dinamika politik dan kondisi internal DPRD
	5.01 - PERENCANAAN						
1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	%	100	100	Tercapai	▪ Sinergi yang baik antara proses perencanaan dan penganggaran daerah. ▪ Komitmen perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan sesuai prioritas pembangunan. ▪ Koordinasi yang efektif antara perangkat daerah, Bappeda, dan TAPD dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.	Dinamika kebutuhan pembangunan yang berkembang sehingga memerlukan realokasi anggaran pada pelaksanaannya.
	5.02 - KEUANGAN						

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	%	30,35	35,98	Tercapai	▪ Regulasi mandatori spending menjadikan anggaran belanja tepat sasaran dan efisien ▪ Penyusunan anggaran belanja yang berpedoman pada Standar Harga dan Analisa Standar Biaya ▪ Pengelolaan penerimaan dan pengelolaan kas dilakukan secara tertib sesuai regulasi yang berlaku ▪ Penerapan belanja secara non tunai meningkatkan efisiensi, transparansi dan keamanan transaksi.	Kurangnya Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						▪ Penyusunan pelaporan keuangan dilakukan secara tertib dan sesuai kebijakan akuntansi meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran ▪ Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang terintegrasi dengan informasi pembangunan daerah mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	
2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	%	18,04	21,50	Tercapai	▪ Berlakunya Regulasi tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah	▪ Belum tertibnya WP dalam membayar pajak daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Daerah yang berpotensi menambah penerimaan pajak daerah yaitu opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor ▪ Pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan dan mempercepat pelayanan pajak daerah ▪ Kerja sama dengan lembaga bank dan lembaga keuangan non bank serta pihak lain yang memudahkan pembayaran pajak dan retribusi daerah	▪ Kurang maksimalnya pelayanan ▪ Terbatasnya sumber penerimaan PAD ▪ Masih terdapat pembayaran retribusi secara tunai/*cash*
3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan	%	Indikator baru	59,19	-	▪ Regulasi mandatori spending	Penyerapan Anggaran Belanja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
	dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N					menjadikan anggaran belanja tepat sasaran dan efisien ▪ Penyusunan anggaran belanja yang berpedoman pada Standar Harga dan Analisa Standar Biaya ▪ Pengelolaan penerimaan dan pengelolaan kas dilakukan secara tertib sesuai regulasi yang berlaku ▪ Penerapan belanja secara non tunai meningkatkan efisiensi, transparansi dan keamanan transaksi. ▪ Penyusunan pelaporan keuangan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar kurang Optimal

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						dilakukan secara tertib dan sesuai kebijakan akuntansi meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran ▪ Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang terintegrasi dengan informasi pembangunan daerah mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	
4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	%	36	34,74	Tidak tercapai	▪ Regulasi mandatori spending menjadikan anggaran belanja tepat sasaran dan efisien	Kurangnya Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						▪ Penyusunan anggaran belanja yang berpedoman pada Standar Harga dan Analisa Standar Biaya ▪ Pengelolaan penerimaan dan pengelolaan kas dilakukan secara tertib sesuai regulasi yang berlaku ▪ Penerapan belanja secara non tunai meningkatkan efisiensi, transparansi dan keamanan transaksi. ▪ Penyusunan pelaporan keuangan dilakukan secara tertib dan sesuai kebijakan akuntansi meningkatkan	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran ▪ Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang terintegrasi dengan informasi pembangunan daerah mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	
	5.03 - KEPEGAWAIAN						
1	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Indikator baru	69,48	-	Realisasi indikator mencapai 69,48 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian besar ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar telah memiliki kualifikasi	Masih terdapat ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan di bawah jenjang perguruan tinggi.

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						pendidikan perguruan tinggi.	
	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	%	100	100	Tercapai	Dukungan kegiatan pengembangan inovasi seperti Lomba Inovasi perangkat daerah (IGA).	▪ Kualitas dan tingkat keberlanjutan inovasi antar perangkat daerah masih bervariasi. ▪ Belum optimalnya dokumentasi, replikasi, dan diseminasi praktik baik inovasi antar perangkat daerah.
	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH						
1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi	Terdefinisi (3,026)	Tercapai	Adanya pendampingan dan asistensi penilaian mandiri maturitas SPIP pada perangkat daerah.	Belum optimalnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3,200	3,195	Tidak tercapai	▪ Komitmen pimpinan dalam penguatan peran pengawasan intern. ▪ Telah tersusunnya kebijakan dan pedoman pengawasan intern sebagai acuan pelaksanaan tugas APIP	Kesenjangan kompetensi APIP/kompetensi APIP belum merata
3	Manajemen Risiko Indeks	Indeks	2,966	2,966	Tercapai	▪ Perangkat daerah telah melakukan identifikasi risiko dan analisa risiko serta telah menyusun rencana tindak pengendalian atas risiko strategis dan risiko operasional yang telah dimitigasi; ▪ Perangkat daerah telah melakukan identifikasi risiko *fraud* yang di	Pemahaman mengenai manajemen risiko masih dianggap sebagai formalitas, bukan sebagai alat bantu pengambilan keputusan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	INTERPRETASI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						dalamnya termasuk risiko kemitraan terutama terkait pengadaan barang dan jasa.	
4	Persentase tindaklanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran N-1	%	85,06	100	Tercapai	Adanya kegiatan pemantauan proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI melalui aplikasi e audit maupun Inspektorat Daerah Kota Blitar melalui aplikasi SI-PATRIAWAS.	Kesesuaian tindak lanjut oleh OPD atas rekomendasi TLHP BPK maupun TLHP APIP yang dikumpulkan oleh auditan kurang sesuai

Sumber: *Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Blitar, 2026 diolah*

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2025 yang bersumber dari laporan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban APBD akhir Tahun 2025, diperoleh gambaran mengenai tingkat pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Monitoring tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025, baik dari sisi capaian keluaran kegiatan maupun capaian kinerja program pada masing-masing Perangkat Daerah.

Hasil monitoring dan evaluasi ini menjadi bahan dalam menilai efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah, mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya. Secara umum, realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi capaian target kinerja program Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.81

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025

No	Nama Daerah	Capaian Kinerja Program terhadap Target		Capaian Keuangan Program terhadap Target	
		Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Urusan Pemerintahan Wajib Dasar					
1	Urusan Pendidikan	99,95	Sangat Tinggi	93,11	Sangat Tinggi
2	Urusan Kesehatan	98,05	Sangat Tinggi	95,91	Sangat Tinggi
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98,35	Sangat Tinggi	93,74	Sangat Tinggi
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100,00	Sangat Tinggi	90,96	Tinggi
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100,00	Sangat Tinggi	90,55	Tinggi

No	Nama Daerah	Capaian Kinerja Program terhadap Target		Capaian Keuangan Program terhadap Target	
		Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Urusan Sosial	97,30	Sangat Tinggi	95,77	Sangat Tinggi
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar					
1	Urusan Tenaga Kerja	100,00	Sangat Tinggi	90,34	Tinggi
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	90,72	Tinggi	96,55	Sangat Tinggi
3	Urusan Pangan	89,09	Tinggi	92,05	Sangat Tinggi
4	Urusan Pertanahan	97,50	Sangat Tinggi	93,08	Sangat Tinggi
5	Urusan Lingkungan Hidup	90,46	Tinggi	97,60	Sangat Tinggi
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78,90	Tinggi	92,14	Sangat Tinggi
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100,00	Sangat Tinggi	97,50	Sangat Tinggi
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	98,35	Sangat Tinggi	86,19	Tinggi
9	Urusan Perhubungan	99,42	Sangat Tinggi	93,27	Sangat Tinggi
10	Urusan Komunikasi dan Informatika	100,00	Sangat Tinggi	96,08	Sangat Tinggi
11	Urusan Koperasi dan Usaha Mikro	72,19	Sedang	94,63	Sangat Tinggi
12	Urusan Penanaman Modal	83,88	Tinggi	97,19	Sangat Tinggi
13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	99,87	Sangat Tinggi	91,58	Sangat Tinggi
14	Urusan Statistik	100,00	Sangat Tinggi	98,97	Sangat Tinggi

No	Nama Daerah	Capaian Kinerja Program terhadap Target		Capaian Keuangan Program terhadap Target	
		Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Urusan Persandian	100,00	Sangat Tinggi	86,66	Tinggi
16	Urusan Kebudayaan	100,00	Sangat Tinggi	93,61	Sangat Tinggi
17	Urusan Perpustakaan	100,00	Sangat Tinggi	93,56	Sangat Tinggi
18	Urusan Kearsipan	100,00	Sangat Tinggi	98,09	Sangat Tinggi
Urusan Pemerintahan Pilihan					
1	Urusan Kelautan dan Perikanan	100,00	Sangat Tinggi	97,86	Sangat Tinggi
2	Urusan Pariwisata	100,00	Sangat Tinggi	97,26	Sangat Tinggi
3	Urusan Pertanian	99,90	Sangat Tinggi	91,49	Sangat Tinggi
4	Urusan Perdagangan	100,00	Sangat Tinggi	92,94	Sangat Tinggi
5	Urusan Perindustrian	100,00	Sangat Tinggi	85,18	Tinggi
Urusan Penunjang Pemerintahan					
1	Sekretariat Daerah	99,57	Sangat Tinggi	94,56	Sangat Tinggi
2	Sekretariat DPRD	100,00	Sangat Tinggi	89,78	Tinggi
3	Perencanaan	98,20	Sangat Tinggi	95,99	Sangat Tinggi
4	Keuangan	92,03	Tinggi	68,80	Sedang
5	Kepegawaian	97,60	Sangat Tinggi	91,70	Sangat Tinggi
6	Pendidikan dan Pelatihan	94,40	Sangat Tinggi	92,28	Sangat Tinggi
7	Penelitian dan Pengembangan	100,00	Sangat Tinggi	99,47	Sangat Tinggi
8	Pengawasan	100,00	Sangat Tinggi	96,55	Sangat Tinggi
9	Kewilayahan	99,35	Sangat Tinggi	91,77	Sangat Tinggi

No	Nama Daerah	Capaian Kinerja Program terhadap Target		Capaian Keuangan Program terhadap Target	
		Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Kesatuan Bangsa dan Politik	100,00	Sangat Tinggi	90,81	Tinggi
	Rata - Rata Capaian	96,01	Sangat Tinggi	93,00	Sangat Tinggi

Sumber*: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Blitar 2026, diolah*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran per urusan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 pada perangkat daerah menunjukkan hasil yang baik. Rata-rata capaian kinerja *outcome* mencapai 96,01 persen dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan capaian kinerja keuangan mencapai 93,00 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain:

a. Kinerja beberapa perangkat daerah masih belum memenuhi target yang ditetapkan, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut baik secara internal perangkat daerah maupun pada tingkat Pemerintah Daerah.
b. Terbatasnya kapasitas keuangan daerah mengakibatkan perlunya pelaksanaan efisiensi dan rasionalisasi anggaran. Sehingga terdapat perbedaan pagu anggaran antara dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD.
c. Adanya penurunan pagu anggaran pada tahun 2025 menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau pelaksanaannya menjadi kurang optimal.

Capaian kinerja program tahun 2025 merupakan bagian dari tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Blitar. Evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan urusan pemerintahan dan program pembangunan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun 2025 disajikan pada tabel Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan sebagai berikut:

Tabel 2.82

Evaluasi Hasil RKPD Kota Blitar Sampai Dengan Tahun Berjalan

(file pdf)300-490

2.2.3 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023 – 2025

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Secara konseptual, pelayanan dasar diartikan sebagai bentuk pelayanan publik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Dalam kerangka tersebut, SPM menetapkan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib, yang harus disediakan oleh pemerintah dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dengan demikian, SPM menjadi acuan penting dalam menjamin terpenuhinya layanan dasar secara merata dan berstandar di seluruh wilayah.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
f. Sosial.

Selanjutnya secara rinci akan diuraikan Pencapaian SPM berdasarkan 6 (enam) aspek sebagai berikut.

2.1.5.1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, SPM bidang pendidikan terdiri atas tiga jenis layanan dasar, yaitu:

a. Pendidikan Anak Usia Dini, Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
b. Pendidikan Dasar, dan Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun
c. Pendidikan Kesetaraan Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Tabel 2.83

Realisasi SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	2023	2024	2025
1	Pendidikan Anak Usia Dini	95,38%	100%	100%
2	Pendidikan Dasar	97,93%	100%	100%

3	Pendidikan Kesetaraan	100%	100%	100%
Indeks Capaian SPM		97,77%	100%	100%
Kategori IP SPM		Tuntas Utama	Tuntas Paripurna	Tuntas Paripurna

Sumber*: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023 – 2025*

Lebih lanjut, kinerja bidang Pendidikan yang merujuk pada Indeks SPM adalah sebagai berikut:

Tabel 2.84

Indikator Kinerja Urusan Bidang Pendidikan yang Merujuk pada SPM

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	83,75	85,77
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,96	100
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	41,06	41,06
4	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	82,07	95,00
5	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	87,07	93,55
6	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai	81,95	82,62
7	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai	78,26	78,26
8	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai	80,58	81,58
9	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai	77,68	77,68
10	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai	65,29	65,29
11	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai	68,21	68,20

Sumber : *Dinas Pendidikan Kota Blitar, 2026*

2.1.5.2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah terdiri atas :

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
c. Pelayanan Kesehatan Ibu Baru Lahir;
d. Pelayanan Kesehatan Balita;
e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
k. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolusis;
l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024–2025 secara berturut - turut menunjukkan pencapaian layanan sebesar 100 persen pada 12 (dua belas) jenis layanan SPM. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam memenuhi standar pelayanan dasar bidang kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.85

Realisasi SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	2023	2024	2025
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	98.53%	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Berhasil	99,06%	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99,76%	100%	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	94,40%	100%	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	98,71%	100%	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	100%	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	95,94%	100%	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	2023	2024	2025
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100 %	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan dengan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (HIV)	100%	100%	100%
Indeks Pencapaian SPM		98,87%	100%	100%
Kategori IP SPM		Tuntas Utama	Tuntas Paripurna	Tuntas Paripurna

Sumber*: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023 – 2025*

2.1.5.3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum mencakup 2 (dua) layanan sebagai berikut:

a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – Hari
b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Minum Domestik

Berikut disajikan data capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023-2025 pada Tabel 2.86.

Tabel 2.86

Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	2023	2024	2025
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – Hari	100%	100%	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Minum Domestik	100%	100%	100%
Indeks Pencapaian SPM		100%	100%	100%
Kategori IP SPM		Tuntas Paripurna	Tuntas Paripurna	Tuntas Paripurna

Sumber*: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023 – 2025*

2.1.5.4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat kabupaten/kota terdiri atas:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaannya, capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Blitar pada periode tahun 2023–2025 telah mencapai target 100 persen atau kategori tuntas paripurna. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan dasar bidang perumahan telah terpenuhi sesuai standar yang ditetapkan, sehingga kebutuhan masyarakat sasaran, baik korban bencana maupun masyarakat terdampak relokasi program pemerintah daerah, dapat terlayani secara optimal.

Tabel 2.87

Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	2023	2024	2025
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
Indeks Pencapaian SPM		100%	100%	100%
Kategori IP SPM		Tuntas Paripurna	Tuntas Paripurna	Tuntas Paripurna

Sumber*: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023 – 2025*

2.1.5.5. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Tramtibumlinmas daerah terdiri atas:

a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
b. Pelayanan informasi rawan bencana
c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Adapun capaian pelayanan dasar untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.88

Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	2023	2024	2025
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%
Indeks Pencapaian SPM		100%	100%	100%
Kategori IP SPM		Tuntas Paripurna	Tuntas Paripurna	Tuntas Paripurna
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%
Indeks Pencapaian SPM		100%	100%	100%
Kategori IP SPM		Tuntas Paripurna	Tuntas Paripurna	Tuntas Paripurna
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	97%	100%	100%
Indeks Pencapaian SPM		97%	100%	100%
Kategori IP SPM		Tuntas Utama	Tuntas Paripurna	Tuntas Paripurna

Sumber*: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023 – 2025*

2.1.5.6. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial

b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial
c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial
d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial
e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.89

Realisasi SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	2023	2024	2025
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan setelah bencana bagi korban bencana kab/kota	100%	100%	100%
Indeks Pencapaian SPM		100%	100%	100%
Kategori IP SPM		Tuntas Paripurna	Tuntas Paripurna	Tuntas Paripurna

Sumber*: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023 – 2025*

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi aktual yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan daerah agar lebih tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi. Analisis permasalahan juga diperlukan untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan nasional, serta tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

Dalam penyusunannya, permasalahan pembangunan daerah diidentifikasi melalui evaluasi capaian indikator pembangunan, hasil

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, analisis kondisi daerah, serta berbagai masukan dari pemangku kepentingan. Permasalahan tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam permasalahan yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Permasalahan tersebut dapat berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, regulasi, kelembagaan, pendanaan, maupun faktor eksternal lainnya yang memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hasil identifikasi ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pencapaian target kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan.

Tabel 2.90

Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Program Prioritas Kota Blitar

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kota Blitar	96,01	Sangat Tinggi	93,00	Sangat Tinggi			
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	99,95	Sangat Tinggi	93,11	Sangat Tinggi	▪ Dilaksanakannya kegiatan penjaminan mutu untuk meningkatkan layanan publik ▪ Kerja sama antar pihak untuk mempertahankan capaian akreditasi terus dilakukan kegiatan untuk mendukung pencapaian 8 standar nasional pendidikan ▪ SDM pendidikan yang berkompeten serta	▪ Belum sepenuhnya tercukupi sarana prasarana yang ramah bagi kelompok rentan ▪ Adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan secara maksimal akibat keterbatasan anggaran ▪ Belum optimalnya pelaksanaan implementasi pelestarian Bahasa	

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						didukung dengan anggaran yang memadai	daerah (sehari berbahasa Jawa) ▪ Proporsi PTK dalam Diklat Teknis masih kurang ▪ Kecukupan Formasi Guru ASN untuk Sekolah yang Diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan Kebutuhan Peningkatan Indeks Distribusi Guru masih pada nilai sedang dengan ▪ Skor capaian Kemampuan Literasi tergolong sedang, peserta didik telah mencapai kompetensi	

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum	
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	98,05	Sangat Tinggi	95,91	Sangat Tinggi	▪ Sarana dan prasarana pendukung yang memadai dan sesuai standar ▪ Pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik primer maupun rujukan yang sesuai standar	▪ Status gizi dan penyakit penyerta saat ibu hamil ▪ Masih ada ibu hamil yang tidak rutin melakukan ANC sesuai jadwal ▪ Kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil dan setelah	

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						▪ SDM (nakes maupun kader) yang berkompeten serta didukung anggaran yang memadai ▪ Fasilitasi tugas belajar, pelatihan dan *workshop* yang dapat menunjang peningkatan kompetensi SDMK baik mandiri atau dibiayai pemerintah ▪ Adanya anggaran DAK NF dan DAK NF BPOM untuk menunjang layanan Kesehatan masyarakat. ▪ Adanya sertifikasi SLHS pada SPPG	melahirkan, bayi terlahir prematur dan atau BBLR, dan bayi memiliki penyakit penyerta ▪ Jenis kompetensi nakes yang beragam belum diimbangi dengan jenis diklat kompetensi pada balai pelatihan kesehatan Murnajati ▪ Aplikasi KS belum terupdate rutin berkala setiap triwulan dan status IKS keluarga tidak terupdate langsung ▪ Ketersediaan tempat tidur (TT) di RS dan klinik ditentukan	

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						menambah sasaran pengawasan sarana pengolahan pangan yang diperiksa.	dipengaruhi oleh pemakaian tempat tidur (BOR) ▪ Belum optimalnya penemuan kasus permasalahan kesehatan, misalnya masih adanya kasus maternal abortus ▪ Pelaporan jejaring RS/Klinik belum optimal ▪ Belum optimalnya pemanfaatan IT dalam pelayanan RS	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan	98,35	Sangat Tinggi	93,74	Sangat Tinggi	▪ Tersedianya sumber air yang cukup, serta adanya partisipasi dari masyarakat, anggaran serta sarana dan	▪ Kurang tersedianya lahan untuk pembangunan SPAM baru	▪ Perlunya tambahan SDM yang menangani, perlunya peningkatan kompetensi bagi

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penataan Ruang					prasarana yang memadai ▪ Terwujudnya Koordinasi yang selektif dengan pihak terkait (pengelola Aset Kota Blitar dan Kantor Pertanahan Kota Blitar) ▪ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Prasarana dan Sarana yang memadai ▪ Adanya kerja sama yang solid dengan BUMD (PDAM) serta sarana dan prasarana kerja yang memadai	▪ Belum tersedianya tata kelola aset dan belum jelasnya pembagian kewenangan penyelenggaraan SPAM ▪ Belum melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang secara optimal ▪ Masih terdapat kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan rencana tata ruang ▪ Kesulitan untuk mendata SPAM	pelaku jasa konstruksi dan perlunya *reward* dan *punishment* bagi pelaku jasa konstruksi ▪ Kurangnya partisipasi badan usaha jasa konstruksi dalam peningkatan pekerja konstruksi yang tersertifikasi ▪ Perlunya penambahan kapasitas IPLT untuk menuju sanitasi aman, keterbatasan akses untuk

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						▪ Adanya infrastruktur sanitasi yang memadai (IPLT) ▪ Penyusunan standarisasi bangunan gedung negara yang didukung dengan anggaran yang memadai ▪ Ketersediaan anggaran untuk mewujudkan gedung pemerintah sesuai *standart* ▪ Ketersediaan lahan dan keberlanjutan pengelolaan SPALD terbangun ▪ Tertib perijinan dan tertib administrasi	bukan jaringan perpipaan ▪ Rendahnya kesadaran warga untuk mengajukan PBG/SLF ▪ Telah ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur RTRW memungkinkan adanya perubahan tentang ketentuan tata ruang di daerah sehingga perlu dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat ▪ Adanya Penyesuaian proses pelaksanaan pembangunan	penyedotan lumpur tinja ▪ Pembagian kewenangan penanganan antara SPAM masyarakat dan oleh PDAM perlu diperjelas, Keterbatasan pengetahuan atas keberlanjutan SPAM oleh masyarakat

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta terlaksanakannya pekerjaan konstruksi yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya	dengan rencana termasuk perubahan regulasi baik terkait proses pengadaan barang dan jasa maupun pengelolaan keuangan	
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100,00	Sangat Tinggi	90,96	Tinggi	▪ Dukungan terhadap pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat cukup baik ▪ Tersedianya *database* Rumah Tidak Layak Huni terhimpun dan terkelola dengan baik sehingga membantu dalam pelaksanaan kebijakan ▪ Terpenuhinya PSU layak pada	▪ Ketersediaan data maupun persyaratan teknis belum dapat menjangkau seluruh kebutuhan data dalam setiap tahapan SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana Permen PUPR 12 / 2023 ▪ Kondisi sosial ekonomi calon	▪ Pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan jadwal ▪ Dampak negatif dari program stimulan ini adalah motivasi masyarakat untuk memperbaiki rumah secara mandiri menurun dan hanya

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						perumahan dan kawasan permukiman ▪ Penyediaan Anggaran Peningkatan Kualitas RTLH dan Pembangunan Baru rumah layak huni ▪ Kemampuan swadaya masyarakat dalam mewujudkan rumah layak huni ▪ Pemahaman dan wawasan yang mumpuni untuk menjaga dan memelihara aspek-aspek kelayak hunian ▪ Adanya koordinasi dan kolaborasi antar PD dalam	penerima bansos RTLH sangat mempengaruhi kemampuan swadaya sehingga berpengaruh pula pada kemampuan sebagai penerima program ▪ Anggaran per tahun masih difokuskan untuk menuntaskan seluruh data RTLH	mengandalkan adanya bantuan dari pemerintah ▪ Perlunya pendataan Penanganan jalan lingkungan, drainase lingkungan dan PSU oleh PD Teknis mengingat batasan tugas DPRKP hanya pada kawasan kumuh dan pada perumahan yang dibangun oleh pengembang dengan aset PSU nya telah

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman		diserahkan kepada pemerintah, sedangkan IKU mencakup keseluruhan wilayah Kota Blitar
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100,00	Sangat Tinggi	90,55	Tinggi	▪ Fasilitasi penyediaan penunjang dan pelayanan umum urusan perangkat daerah telah dilaksanakan dengan baik ▪ Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan ketersediaan anggaran yang telah dialokasikan dalam upaya menjaga	▪ Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal ▪ Adanya keterlambatan pelaporan kejadian kebakaran dari warga masyarakat	▪ Perlu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran melalui sosialisasi dan simulasi penanganan bencana kebakaran

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						ketentraman ketertiban umum ▪ Adanya komunikasi dan koordinasi dengan kelurahan, TKSK/PSM terjalin baik saat terjadi bencana	▪ Pelanggaran perda dan perkada masih tinggi, kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perkada belum optimal	
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	97,30	Sangat Tinggi	95,77	Sangat Tinggi	▪ Ketersediaan anggaran dan penyusunan jadwal kegiatan yang cermat ▪ Dukungan semua elemen baik PD dan *stakeholder* terkait sebagai upaya peningkatan peran serta dan kapasitas PSKS/pilar-pilar sesuai dalam	▪ Terbatasnya pekerja sosial dari segi kuantitas dan kualitas serta minimnya sarana prasarana pelayanan PPKS, sifat kegiatan penanganan masalah sosial dan populasi PPKS yang dinamis/sering berubah menyebabkan	▪ Belum adanya profil data kemiskinan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program penanganan kemiskinan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						penyelenggaraan kesejahteraan sosial ▪ Program pemberdayaan fakir miskin yang sesuai dengan karakter/minat masing-masing guna mendorong tumbuhnya usaha mandiri, motivasi dan rasa percaya diri fakir miskin untuk meningkatkan kualitas hidup, terbukanya akses pemasaran hasil usaha ▪ Kolaborasi baik antara pemerintah pusat, provinsi, daerah dan seluruh	sulitnya memprediksi/ memproyeksikan target kinerja ▪ Kurangnya kesempatan PSKS/pilar-pilar sosial untuk memperoleh peningkatan kapasitas sehingga kurang mendukung upaya penanganan permasalahan sosial yang semakin kompleks ▪ Belum dilakukan pemetaan jenis dan kebutuhan pelatihan keterampilan berdasarkan bakat	▪ Karakter warga miskin yang cenderung bergantung pada Bansos yang bersifat konsumtif

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						stake holder serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ▪ Intervensi program pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan ▪ Sinergitas program penanganan kemiskinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta keterlibatan CSR ▪ Terbukanya kesempatan warga miskin untuk	dan minat calon peserta pelatihan ▪ Karakteristik PMKS/PPKS cenderung memiliki mobilitas sosial yang sangat dinamis, sering berpindah-pindah sehingga jumlahnya selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu dan tidak akan pernah habis ▪ Belum optimalnya *assessment* terhadap PPKS untuk menentukan jenis layanan sesuai kebutuhan	

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						meningkatkan pendapatan melalui ketersediaan akses bekerja dan berusaha ▪ Komitmen pemerintah dan dukungan pilar-pilar sosial, keluarga, lingkungan dan masyarakat terdekat dalam layanan rehabilitasi sosial bagi PMKS/PPKS di luar panti ▪ Dukungan anggaran dan kesiapsiagaan SDM dalam rangka perlindungan sosial korban bencana pada saat dan setelah	▪ Kurangnya dukungan keluarga, lingkungan dan masyarakat dalam upaya pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS/PPKS di luar panti	

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						tanggap darurat bencana		
7	Urusan Tenaga Kerja	100,00	Sangat Tinggi	90,34	Tinggi	▪ Minat pencaker dalam mengikuti pelatihan sangat baik ▪ Minat pencari kerja sangat tinggi dalam mengakses lowongan kerja yang tersedia	▪ Rendahnya minat alumni pelatihan untuk melaksanakan hasil dari pelatihan di dunia kerja ▪ Lowongan kerja yang tersedia kurang diminati pencaker	▪
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	90,72	Tinggi	96,55	Sangat Tinggi	▪ Telah disusunnya Perda No. 3 Tahun 2023 tentang PUG dan Perwal No. 15 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2023 tentang PUG yang	▪ Jumlah keterwakilan perempuan di legislatif masih sedikit ▪ Belum optimalnya keterlibatan lembaga di Kota Blitar untuk aktif	▪ Penyusunan PPRG sebagai salah satu syarat dalam rencana penganggaran perangkat daerah ▪ Data realisasi indikator gender

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						merupakan bentuk komitmen pemda dan perangkat daerah ▪ Keterlibatan *stake holder* dan tim (seperti penggerak PUG, *Focal point* dll) secara aktif dalam kegiatan program ▪ Adanya Perda No.2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan ▪ Adanya Tim P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dengan anggota yang berasal	dalam penyelenggaraan PUG ▪ Belum optimalnya Lembaga PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam melaksanakan fungsi ▪ Belum optimalnya kebermanfaatan rumah aman ▪ Nilai Belum optimalnya implementasi kebijakan responsif gender ▪ Kasus kekerasan terhadap	sering kali terlambat rilis karena data diperoleh dari Provinsi Jatim, PD belum melaksanakan penghitungan secara mandiri.

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						dari Dinas Sosial, Pengadilan, Kejaksaan; Polres; Dinas Informasi, Komunikasi dan Statistik, Bagian Umum Setda Kota Blitar; Aktivis lembaga pendidikan, LPA; Granat; Lembaga psikologi; PKK; Pusat Layanan Disabilitas ▪ Satgas PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang berjumlah 2 orang di setiap Kelurahan dan Kecamatan dan total Satgas PPA ada 48 orang;	perempuan dan anak masih terjadi ▪ Satu Data Keluarga belum terimplementasi secara optimal pada Kelompok Kegiatan	

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						▪ Keaktifan Forum Puspa (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) ▪ Adanya peningkatan kompetensi Kader Kelompok Tribina dan UPPKA di masing-masing Kelurahan		
9	Urusan Pangan	89,09	Tinggi	92,05	Sangat Tinggi	▪ Ketersediaan anggaran yang memadai ▪ Adanya program bantuan pangan baik dari daerah, provinsi maupun kementerian (BNPT, Rastrada, Pasar Murah)	▪ Belum semua penggerak P2B mendapatkan fasilitasi pemasaran produk dalam pasar tani ▪ Belum adanya cadangan pangan pemerintah	

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						▪ Kota Blitar sebagai kota perdagangan, sehingga pasokan pangan selain bersal dari produksi lokal juga dari wilayah sekitar ▪ Pembangunan yang terintegrasi dari berbagai lini (infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pangan) baik yang berasal dari dana APBD maupun APBN	▪ Masih tingginya preferensi beras sebagai sumber pangan utama, sehingga penganekaragaman pangan masih belum optimal. ▪ Inflasi yang menyebabkan kenaikan harga bahan pangan pokok (beras, telur, daging, cabe) sehingga pengeluaran pangan lebih untuk pemenuhan bahan pangan pokok yaitu beras. ▪ Menurunnya lahan pertanian yang	

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							beralih fungsi menjadi kawasan permukiman ▪ Menurunnya produksi tanaman pangan dan produksi hasil peternakan.	
10	Urusan Pertanahan	97,50	Sangat Tinggi	93,08	Sangat Tinggi	▪ Tersedianya ketentuan pemanfaatan ruang yang dapat diakses secara luas ▪ Sumber Daya Manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta fasilitas kantor yang memadai	▪ Menurunnya persentase kesesuaian pemanfaatan ruang ▪ Kurang tersosialisasikannya Rencana Tata Ruang kepada masyarakat dan pentingnya menepati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan	Kegiatan dalam proses pelaksanaan, indikator dapat dihitung pada triwulan IV

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Urusan Lingkungan Hidup	90,46	Tinggi	97,60	Sangat Tinggi	▪ Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal ▪ Tim Pokja penyusunan RPPLH cukup kooperatif ▪ Percepatan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan ▪ Melakukan perencanaan dengan lebih baik agar realisasinya lebih tepat sasaran, dan selalu melakukan monev ▪ koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pelaku usaha	▪ Masih adanya pencemaran dari industri tahu, ternak dan dari sektor domestik yang menyebabkan penurunan kualitas air sungai ▪ Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan/ atau kegiatan penghasil LB3 untuk melaporkan pengelolaan LB3 pada DLH Kota Blitar ▪ Pemilik usaha dan atau kegiatan belum optimal melaksanakan ketentuan	

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						▪ Adanya sosialisasi dan aplikasi untuk mempermudah prosedur pengaduan	persetujuan lingkungan terutama bila terjadi perubahan terhadap usaha yang dilaksanakan ▪ Belum adanya monitoring terhadap emisi dari kendaraan di luar KIR ▪ Meningkatnya kebutuhan sarana prasarana kota sejalan dengan alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya tutupan lahan di Kota Blitar	

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							▪ Kapasitas *Cell* 2 TPA yang semakin penuh	
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78,90	Tinggi	92,14	Sangat Tinggi	▪ Kompetensi SDM yang memadai serta komitmen dalam pencapaian kinerja ▪ Adanya sinergitas layanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil antara pemerintah pusat, propinsi dan dukcapil kab/kota ▪ Konsolidasi data dan *updating* data dengan pusat dan mengoptimalkan Kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Blitar yakni pengajuan KIA secara	▪ Pelayanan akta perceraian di Kota Blitar belum terintegrasi dengan pelayanan KTP dan KK 2. ▪ Masih adanya elemen data penduduk terutama terkait data nomor dan tanggal status kawin/cerai hidup yang belum terekam dalam *database* kependudukan sehingga berdampak pada cakupan kepemilikan	▪ Kesadaran penduduk untuk melaporkan pembaharuan status kependudukan berpengaruh terhadap kinerja ▪ Beberapa capaian program diukur secara tuntas pada akhir tahun perencanaan

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						kolektif bagi sekolah – sekolah ▪ Mengadakan PKS dengan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan Kementerian Agama dalam *update* data perceraian dan perkawinan, serta melaksanakan Pencatatan Perkawinan Masal Sehari Jadi (PENAK MAS EDI)	dokumen perkawinan ▪ Masih kurangnya informasi terkait PKS pemanfaatan data bagi PD/lembaga/badan hukum yang menggunakan data kependudukan untuk layanan	
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan	100,00	Sangat Tinggi	97,50	Sangat Tinggi	▪ Sinergitas *stakeholder* pengampu kewilayahan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	▪ Belum terbiasa melaksanakan tugas evaluasi diri evaluasi perkembangan desa kel dan updating data profil secara mandiri, dan masih	

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Masyarakat dan Desa					masyarakat kelurahan ▪ Adanya monev dari Provinsi yang bisa menjadi motivasi untuk segera melaksanakan evaluasi diri perkembangan desa kelurahan	bergantung pada surat atau permintaan	
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	98,35	Sangat Tinggi	86,19	Tinggi	▪ Dukungan mitra terkait dan sekolah dalam penyelenggaraan Sekolah Siaga Kependudukan ▪ Terpetakannya Kondisi PUS di Kota Blitar ▪ Kerja sama dengan Mitra kerja yang solid	▪ Belum semua sekolah ber MoU terkait penyelenggaraan SSK ▪ Masih adanya Pasangan Usia Subur (PUS) yang enggan ikut KB ▪ Belum optimalnya implementasi	▪ Nilai IDG diperoleh dari Provinsi Jatim. Dan sampai saat ini IDG tahun 2024 belum dikeluarkan oleh prov jatim, sehingga nilai yang digunakan adalah nilai di Tahun 2023.

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						utamanya dalam analisa Kondisi Kependudukan dalam Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk ▪ Kerja sama *pentahelix* dalam peningkatan keluarga sejahtera utamanya dalam penanganan stunting berjalan optimal ▪ Optimalnya peran Kader KB =alam Pendampingan Pasangan Usia Subur untuk ikut KB serta optimalisasi promosi program KB melalui	kebijakan responsif gender ▪ Belum optimalnya Kapasitas dan Pengetahuan SDM Pengelola Program Pengendalian Penduduk utamanya dalam pemanfaatan teknologi informasi pengendalian penduduk ▪ Belum optimalnya peran motivator KB dalam peningkatan kesertaan KB Pria ▪ Belum optimalnya peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam melakukan	Perangkat Daerah belum melaksanakan penghitungan mandiri

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						media elektronik dan medsos ▪ Jumlah Kader KB dan Penyuluh KB yang sudah tersebar di 21 Kelurahan dan memiliki Sarana KIE Kontrasepsi	pendampingan keluarga berisiko stunting	
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	99,42	Sangat Tinggi	93,27	Sangat Tinggi	▪ Tingginya komitmen dalam peningkatan kualitas layanan dan pelaksanaan program prioritas ▪ Monev pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara optimal ▪ Sumber Daya Manusia, anggaran	▪ Masih kurang optimalnya ketersediaan dan kualitas sarpras perhubungan dalam upaya peningkatan keselamatan, ketertiban dan keamanan pengguna jalan ▪ Masih terdapat beberapa titik kemacetan pada	

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						serta fasilitas kantor yang memadai	jam-jam sibuk terutama di lokasi sekolahan dan tujuan wisata ▪ Kurang optimalnya pemanfaatan Terminal Tipe C dan angkutan orang	
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	100,00	Sangat Tinggi	96,08	Sangat Tinggi	▪ Adanya komitmen kepala PD terkait dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan ▪ Sumber Daya Manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta fasilitas kantor yang memadai ▪ Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi	▪ Proses pengembangan dan implementasi perubahan aplikasi layanan ▪ Alokasi anggaran yang masih terbatas untuk peningkatan fasilitas layanan pengaduan dan media publikasi. ▪ Banyaknya aplikasi/kanal	▪ Perlu adanya pedoman teknis cara kerja layanan publik dan inovasi untuk dapat diterapkan secara terintegrasi ▪ Perlunya peningkatan penerapan

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Sumber Daya Manusia ▪ Terjalinnya komunikasi, koordinasi, sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah ▪ Optimalisasi pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	pengaduan di perangkat daerah yang belum terintegrasi. ▪ Adanya kebijakan baru di tingkat pusat yang memerlukan penyesuaian di tingkat daerah dalam pengembangan aplikasi pemda ▪ Perlunya adanya pemahaman persepsi konsep penataan jaringan lokal Perangkat Daerah	pengelolaan risiko SPBE ▪ Perlu disusun masterplan pengembangan *e-government* di tingkat daerah
17	Urusan Koperasi	72,19	Sedang	94,63	Sangat Tinggi	▪ Minat WUB sangat tinggi dalam	▪ Masih banyaknya pelaku UMKM	▪ Pemenuhan persyaratan izin

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan Usaha Mikro					pengembangan usahanya ▪ Monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan ▪ Pendampingan pemenuhan persyaratan pemenuhan izin usaha simpan pinjam koperasi ▪ Adanya Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengawas Koperasi	rumahan yang melakukan usaha tidak menentu ▪ Kurangnya kompetensi Pengawas Koperasi ▪ Pelaku koperasi banyak yang kurang paham IT ▪ Banyaknya pelaku usaha mikro yang gaptek IT dan rata2 pelaku usaha usianya sudah tidak produktif	usaha membutuhkan waktu serta moratorium peraturan perizinan usaha
18	Urusan Pemerintahan Bidang	83,88	Tinggi	97,19	Sangat Tinggi	▪ Potensi investasi yang dapat diakses oleh masyarakat / calon	▪ Aplikasi pelayanan perizinan dari pusat dan daerah belum terintegrasi	▪ Beberapa pelaku usaha terkendala dalam pengurusan izin sehingga

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penanaman Modal					investor karena telah berbasis ebgis ▪ Pelayanan perizinan telah memanfaatkan teknologi informasi, menggunakan aplikasi dari pusat dan daerah (OSS *(Online Single Submission)*, MPPD (Mal Pelayanan Publik Digital), SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung), ePerizinan dan Rinjani ▪ Pembinaan dan pengawasan bagi pelaku usaha ▪ Sumber Daya Manusia, anggaran,	▪ Masih terdapat pelaku usaha yang belum melakukan migrasi data dari OSS 1.1 ke OSS RBA ▪ Masih ada pelaku usaha yang belum tertib dalam pelaporan LKPM ▪ Masih ada pelaku usaha yang belum memiliki perizinan teknis ▪ Beberapa perusahaan dengan status cabang, tidak memiliki akses akun OSS untuk memproses	kegiatan usaha tidak dapat berjalan maksimal ▪ Kebijakan insentif/fasilitas penanaman modal masih dalam proses penyusunan Perda

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						sarana dan prasarana serta fasilitas kantor yang memadai	perizinan dan pelaporan LKPM ▪ Belum tersedianya profil investasi atau IPRO (*Investment Project Ready To Over*)	
19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	99,87	Sangat Tinggi	91,58	Sangat Tinggi	▪ Tingginya antusias pemuda mengikuti kegiatan kepemudaan ▪ Kebijakan penyediaan sarana prasarana olahraga yang menjangkau masyarakat secara umum ▪ Standar pelayanan pengaduan masyarakat	▪ Organisasi Kepemudaan yang ada belum sesuai dengan ketentuan, dalam hal tata kelola administrasi dan program kerja organisasi kepemudaan belum terstruktur dengan baik ▪ Kurang optimalnya peran KNPI sebagai	

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						dijalankan dengan baik. ▪ Pelatih olahraga prestasi yang bersertifikasi	induk organisasi kepemudaan ▪ Belum ada standarisasi pengukuran dalam pembinaan prestasi ▪ Fasilitas olahraga yang masih tersedia bagi beberapa cabang olahraga	
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	100,00	Sangat Tinggi	98,97	Sangat Tinggi	▪ Adanya komitmen kepala PD terkait dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan ▪ Kerja sama dan kolaborasi yang baik antara Produsen Data (Perangkat Daerah), Pembina Data (BPS Kota Blitar) dan	▪ Belum optimalnya penggunaan data statistik sektoral dalam analisa perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan PD ▪ Kurangnya kompetensi SDM Perangkat Daerah	▪ Kegiatan dalam proses pelaksanaan, indikator dapat dihitung pada triwulan IV

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Walidata (Diskominfotik) ▪ Adanya pendampingan pengelolaan data statistik sektoral oleh BPS Kota Blitar selaku Pembina Data.	yang mengelola Data Statistik Sektoral ▪ Penyelenggaraan statistik sektoral dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran	
21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	100,00	Sangat Tinggi	86,66	Tinggi	▪ Adanya komitmen kepala PD terkait dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan ▪ Pembinaan yang intensif dari Diskominfo Prov Jatim dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	▪ Terbatasnya Sumber Daya Manusia di bidang IT ▪ Masih terbatasnya infrastruktur keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	▪ Kegiatan dalam proses pelaksanaan, indikator dapat dihitung pada triwulan IV

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						▪ Pelaksanaan pelatihan, bimtek tentang sistem keamanan informasi pemerintah daerah		
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	100,00	Sangat Tinggi	93,61	Sangat Tinggi	▪ Masih aktifnya SDM kebudayaan atau tokoh Sejarahwan ▪ Optimalnya koordinasi dengan pihak terkait pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yang telah disusun	▪ Sarana dan prasarana pembinaan seni kurang dapat berfungsi secara maksimal ▪ Kurangnya minat generasi muda terhadap seni budaya tradisional ▪ Keterbatasan Sarana dan prasarana pembinaan pembinaan sejarah ▪ Kurangnya tenaga yang berkompeten	▪ Museum PETA yang ditonjolkan sebagai *icon* bersejarah yang masih belum representative

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							dalam bidang kesejarahan	
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	100,00	Sangat Tinggi	93,56	Sangat Tinggi	▪ Intesitas evaluasi pencapaian target dan kinerja program/kegiatan/sub kegiatan serta mengupayakan pencapaian target dan kinerja program/kegiatan/sub kegiatan ▪ Sumber Daya Manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta fasilitas kantor yang memadai	▪ Kurangnya dukungan kebijakan lintas sektoral untuk merealisasikan peningkatan infrastuktur perpustakaan, kuantitas dan kualitas SDM pengelola perpustakaan terutama perpustakaan sekolah.	▪ Dari 5 indikator Tingkat Kegemaran Membaca, indikator Frekuensi Akses Internet termasuk kategori tinggi, dan 4 indikator lainnya termasuk kategori sedang yaitu Frekuensi Membaca, Durasi Membaca, Jumlah Bahan Bacaan serta Durasi Akses

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Internet. Hal ini menunjukkan bahwa kegemaran membaca belum terintegrasi menjadi gaya hidup masyarakat Kota Blitar.
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	100,00	Sangat Tinggi	98,09	Sangat Tinggi	▪ Pelaksanaan evaluasi pencapaian target dan kinerja program/kegiatan/sub kegiatan ▪ Sumber Daya Manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta fasilitas kantor yang memadai	▪ Belum seluruh Perangkat Daerah memiliki Record Center ▪ Berdasarkan hasil verifikasi atas Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023 Pemerintah Kota Blitar oleh Tim Pengawasan	▪ Perlunya optimalisasi kinerja kearsipan sesuai hasil verifikasi dan rekomendasi hasil Pengawasan Kearsipan pada Aspek Kebijakan Pembinaan, Pengelolaan

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Kearsipan Provinsi Jawa Timur, bahwa pada sebagian Perangkat Daerah di Kota Blitar belum tertib dalam menyusun Daftar Arsip Inaktif sesuai NSPK. ▪ Belum optimalnya penyelamatan arsip terhadap bencana sesuai Perka ANRI Nomor 23 Tahun 2015 bahwa perlindungan dan penyelamatan arsip terhadap bencana dilakukan saat pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dari	Arsip (Dinamis dan Statis) serta Sumber daya Kearsipan ▪ Indikator dinilai dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kearsipan

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							3 tahapan perlindungan dan penyelamatan arsip tersebut, saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar baru melaksanakan perlindungan dan penyelamatan arsip pra bencana (melalui preservasi preventif berupa alih media arsip bagi Arsip Vital, Statis dan Dinamis). Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan baru melakukan penyelamatan dari sebagian arsip vital	

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							(kesiswaan), statis dan sebagian arsip inaktif yang mana belum mencakup keseluruhan arsip Kota Blitar. Dikarenakan keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM, sumber daya kearsipan serta belum terwujudnya kesepahaman mengenai kewajiban penyelamatan arsip di lingkungan OPD	
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan	100,00	Sangat Tinggi	97,86	Sangat Tinggi	▪ Adanya bantuan sarana prasarana budidaya perikanan dari provinsi dan kementerian pusat	▪ Belum tersedianya lokasi yang representatif untuk pelaksanaan kegiatan *On Farm*	▪

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan Perikanan					▪ Ketersediaan personil dan anggaran yang memadai	sehingga pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di luar wilayah Kota Blitar	
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	100,00	Sangat Tinggi	97,26	Sangat Tinggi	▪ Adanya kolaborasi dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ▪ Terjalinnya kerja sama dengan pihak terkait yang berkompeten di bidangnya ▪ Dukungan dari komunitas kreatif dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)	▪ Penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan dengan agenda kunjungan tamu resmi dan *event* daerah – ▪ Diperlukan pembinaan SDM bagi pelaku usaha pariwisata yang sesuai dengan klasifikasi ▪ Aksesibilitas ke beberapa lokasi wisata masih terbatas	

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							▪ Capaian rencana menyesuaikan ketersediaan tenaga ahli pendukung	
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	99,90	Sangat Tinggi	91,49	Sangat Tinggi	▪ Tingginya minat belajar petani terhadap perkembangan teknologi pertanian, termasuk yang berasal dari kalangan muda ▪ Semakin meningkatnya kesadaran petani dalam berkelompok tani ▪ Adanya program Vaksinasi PMK dan LSD dari provinsi dan kementerian pusat	▪ Pemeliharaan RPH harus menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan pelayanan di RPH ▪ Terjadinya penurunan populasi sapi perah maupun produksi susu dampak wabah PMK dan LSD ▪ Terjadinya inflasi pada komoditas telur ayam ras karena kenaikan harga pakan	▪

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						▪ Ketersediaan personil dan anggaran yang memadai ▪ Semakin meningkatnya kesadaran peternak terhadap penanganan wabah penyakit ternak menular	sehingga populasi berkurang ▪ Penyediaan bahan pengendali OPT masih terbatas	
28	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	100,00	Sangat Tinggi	92,94	Sangat Tinggi	▪ kerja sama antara tim sangat baik dan saling mendukung sarana prasarana terpenuhi dalam memfasilitasi kegiatan ▪ Meningkatnya kualitas sarana prasarana perdagangan dan menggandeng	▪ Adanya persaingan dengan pedagang lain *(online)* yang didukung dengan perubahan perilaku membeli masyarakat melalui *online* ▪ Banyaknya barang yang berfluktuasi harga dan membutuhkan	▪ Jumlah toko modern berjejaring dibatasi berdasarkan perda no. 1 Tahun 2018, sementara kedepan dimungkinkan pendirian toko

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						perbankan agar masyarakat dapat berbelanja *online* ke pasar rakyat ▪ Adanya kebijakan distribusi minyak kita dari Bulog ke pasar pantauan untuk menjaga ketersediaan stok dan keterjangkauan harga bagi masyarakat ▪ Perijinan usaha dipermudah melalui OSS ▪ Adanya pengawasan dan penyuluhan kepada pemilik UTTP agar mau mentera dan tera ulang	kebijakan dalam waktu cepat ▪ Kurangnya kesadaran pemilik UTTP sehingga masih banyak yang mempunyai pemikiran alat UTTP masih bagus dan tidak perlu ditera ulang	modern bertambah

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						UTTPnya (adanya inovasi jelanter)		
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	100,00	Sangat Tinggi	85,18	Tinggi	▪ Sudah tersedianya SDM Metrologi ▪ Adanya bantuan peralatan produksi untuk IKM program DBHCHT, pembinaan IKM berupa *workshop* digital *marketing, benchmarking* produk IKM, dan fasilitasi sertifikasi produk ▪ Pemantauan dan pengawasan kepada industri yang mengajukan Izin Usaha Industri (IUI)	▪ Banyaknya barang yang berfluktuasi harga dan membutuhkan kebijakan dalam waktu cepat ▪ Pengembangan variasi produk yang rendah, manajemen pemasaran kurang, kurangnya kesadaran dan informasi dalam mengurus sertifikasi produk, kurang sesuainya *branding* produk dengan pangsa pasar	▪ Telah dilakukan perumusan Raperda RPIK Kota Blitar ▪ Perlu adanya pemantauan dan pengawasan kepada industri yang sudah dikeluarkan IUI nya dan sosialisasi pelaporan di aplikasi SIINas ▪ Kegiatan dalam proses pelaksanaan, indikator dapat

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							▪ Terbatasnya modal usaha bagi IKM dan terbatasnya sarana dan prasarana produksi	dihitung pada triwulan IV
30	Sekretariat Daerah	99,57	Sangat Tinggi	94,56	Sangat Tinggi	▪ Anggaran yang memadai ▪ Koordinasi yang baik dengan seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah serta lintas PD, Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat ▪ Perencanaan kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program yang keseluruhan ditujukan untuk	▪ Banyak PD yang masih merevisi RUP paket pengadaan pada PAPBD, utamanya revisi metode pemilihan penyedia ▪ Jadwal rencana pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan oleh masing-masing PD dalam RUP tidak ditepati ▪ PD kesulitan menemukan produk	▪ Target jauh terlampaui dikarenakan penambahan indikator yang semula hanya tender, tender cepat, seleksi menjadi tender, tender cepat, seleksi, pengadaan langsung, *e-purchasing* diatas 10 juta, penunjukan langsung

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						pencapaian kinerja organisasi ▪ Integrasi aplikasi manajemen kinerja	dengan spek TKDN yang disyaratkan sesuai ketentuan sehingga realisasi tidak sesuai dengan perencanaan ▪ Masih minimnya pemahaman Pejabat Pembuatan Komitmen akan kebijakan penggunaan produk dalam negeri pada PBJ Pemerintah dan masih kesulitan menghitung nilai TKDN dalam setiap paket pengadaan barang/jasa sehingga PPK masih menggunakan estimasi atau *self*	

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							declare untuk menentukan nilai TKDN ▪ Kurang tertibnya PD dalam mengisi pelaporan realisasi PDN dan TKDN pada aplikasi P3DN.SIPD ▪ Karena adanya PermenPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi sehingga penerapan RB belum bisa berjalan optimal sesuai dengan indikator yang distandarkan	
31	Sekretariat DPRD	100,00	Sangat Tinggi	89,78	Tinggi	▪ Program dukungan pelaksanaan tugas	▪ Program dukungan pelaksanaan tugas	▪

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						dan fungsi DPRD telah dilaksanakan sesuai dengan agenda DPRD	dan fungsi DPRD menyesuaikan jadwal kegiatan DPRD	
32	Perencanaan	98,20	Sangat Tinggi	95,99	Sangat Tinggi	▪ Kegiatan perencanaan terlaksana sesuai jadwal ▪ Evaluasi hasil dokumen perencanaan yang dilaksanakan dengan rutin.	▪ Belum optimalnya kapasitas SDM perencana, dari segi kuantitas masih kurang ▪ Belum mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam penetapan target kinerja pada dokumen perencanaan tahun berikutnya sehingga target yang ditetapkan belum realistis dan menggambarkan	▪

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							peningkatan kinerjanya	
33	Keuangan	92,03	Tinggi	68,80	Sedang	▪ Pelaksanaan / realisasi kegiatan tertib sesuai jadwal kegiatan dan anggaran kas yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran	▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam membayar pajak, masih belum akuratnya data yang dikelola oleh petugas pajak, kurangnya sosialisasi terkait pajak daerah, kurang optimal dalam menggali objek pajak ▪ Kurang tertibnya Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen keuangan Daerah (penjelasan	

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							dokumen laporan keuangan) ▪ Kurang tertibnya Perangkat Daerah dalam mengelola asetnya, masih terdapat aset tanah yang belum bersertifikat	
34	Kepegawaian	97,60	Sangat Tinggi	91,70	Sangat Tinggi	▪ Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga penyelenggara diklat/pengembangan kompetensi	▪ target pencapaian nilai indeks Sistem Merit telah tercapai, namun belum tersedia rencana suksesi untuk seluruh pegawai. dan belum bisa mengukur kesenjangan kinerja ▪ Dari empat dimensi pengukuran Indeks	▪ Jumlah pegawai fungsional bertambah sejak terdapat kebijakan jabatan fungsional hasil penyetaraan, diharapkan Jabatan Fungsional hasil penyetaraan memiliki

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Profesionalitas ASN, dimensi Kompetensi merupakan dimensi yang masih memiliki nilai rendah karena tingkat kesadaran ASN dalam melaporkan bukti pengembangan kompetensi masih rendah	kompetensi sesuai dengan jabatan yang diampunya
35	Pendidikan dan Pelatihan	94,40	Sangat Tinggi	92,28	Sangat Tinggi	▪ Mensosialisasikan hasil *assessment* kepada setiap individu untuk pengembangan potensi diri ▪ Perumusan perencanaan bagi ASN yang belum mengikuti *assessment*	▪ Jabatan Fungsional bersertifikat masih kecil dikarenakan terbatasnya kuota pelaksanaan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga / instansi yang berwenang mengeluarkan	

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							sertifikasi kompetensi	
36	Penelitian dan Pengembangan	100,00	Sangat Tinggi	99,47	Sangat Tinggi	▪ Anggaran yang memadai	▪ Hasil penelitian dan pengembangan belum dilakukan secara optimal.	
37	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	100,00	Sangat Tinggi	96,55	Sangat Tinggi	▪ Komitmen dan kesungguhan organisasi untuk mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan. Loyalitas pegawai bertindak secara aktif untuk memberikan yang terbaik bagi Instansi ▪ Pemahaman yang baik atas Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan SAKIP	▪ Perangkat Daerah belum seluruhnya menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan inspektorat. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal yang telah dilakukan oleh inspektorat terhadap seluruh Perangkat Daerah belum memacu perbaikan	

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						▪ Adanya peran APIP dalam memberikan pembinaan dan memberikan rekomendasi sehingga mampu mengatasi hambatan yang ada, memberikan keyakinan *(assurance)* bahwa kegiatan OPD telah berjalan efektif dan efisien, serta memberikan saran dalam rangka optimalisasi kinerja perangkat daerah ▪ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) APIP melalui Diklat Pembentukan dan Diklat Substansi	akuntabilitas kinerja secara signifikan ▪ Belum terdapat upaya pemantauan dan reviu oleh Inspektorat atas tindak lanjut hasil evaluasi internal yang dilakukan kepada seluruh PD evaluatan ▪ Dokumen Tindak Lanjut yang disajikan belum sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan ▪ Struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap	

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						sehingga APIP dapat menjalankan perannya dengan Optimal sebagai Pembina dan Pemberi Assurance. ▪ Komitmen seluruh Pimpinan dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Blitar untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan mekanisme kerja (standar dan prosedur) dan peraturan yang ditetapkan ▪ Komitmen Perangkat Daerah untuk memenuhi kekurangan Tindak	perubahan lingkungan organisasi ▪ Ketepatan waktu Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas belum optimal ▪ Pelaksanaan Audit Ketaatan belum optimal mencakup program/fungsi prioritas dan memiliki Resiko Tinggi ▪ Perbaikan kualitas pelaksanaan Audit kinerja melalui internalisasi audit kinerja secara terus	

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Lanjut Hasil Pemerikasaan ▪ Koordinasi yang baik dengan Auditan terkait permintaan Data Audit	menerus utamanya terhadap program-program yang bersifat lintas *sectoral* ▪ Terkait *Risk* register, pernyataan resiko, penyebab dan rencana tindak pengendalian agar dievaluasi efektivitasnya sehingga resiko yang teridentifikasi dapat menjadi TAO yang harus diuji	
38	Kewilayahan	99,35	Sangat Tinggi	91,77	Sangat Tinggi	▪ Anggaran dan SDM yang memadai ▪ Media Sosial yang cukup aktif dan memiliki banyak	▪ Adanya pergantian Petugas pelayanan sehingga memerlukan	

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						pengikut sehingga dapat digunakan sebagai sarana promosi yang efektif	penyesuaian tugas layanan ▪ Jaringan Internet yang kurang stabil menghambat proses pelayanan.	
39	Unsur Pemerintahan Umum	100,00	Sangat Tinggi	90,81	Tinggi	▪ Tim pemantauan Ormas Orpol secara berkala melakukan kunjungan ke kantor yang bersangkutan untuk pengecekan rutin jumlah orpol dan ormas yang tercatat masih aktif ▪ Sinergitas lintas PD dan Instansi vertikal dalam melaksanakan deteksi dini dan pemantauan wilayah secara rutin.	▪ Masih banyak ormas yang belum melaporkan kegiatan, keberadaannya apabila pindah alamat, dan pergantian pengurus ▪ Kurang cepatnya pelaporan potensi konflik (aktivitas orang asing/lembaga asing yang kurang terpantau, penyebaran paham	▪ Berdasarkan hasil pengukuran IDI terakhir pada Pemerintah Kota Blitar tahun 2023 di dapat nilai 90,53 berada pada kategori "BAIK" . ▪ Perhitungan IDI tahun 2024 dihitung pada tahun 2025

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						▪ Bersama FKUB dan FPK secara rutin melakukan dialog antar umat beragama, antar suku dan kunjungan ke tempat-tempat ibadah dalam rangka mencegah terjadinya konflik SARA	radikal, intoleran, anarki aksi demontrasi/unjuk rasa, pertentangan antar kelompok masyarakat) yang diterima ▪ Masih terdapat konflik antar suku, ras dan agama seperti konflik perizinan pembangunan tempat ibadah.	

Sumber *: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026, diolah*

2.4 Isu Strategis Pembangunan Tahun 2027

Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2027. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 1 tahun ke depan. Kriteria penetapan isu strategis mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Kriteria yang digunakan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.91

Kriteria Isu Strategis

No	Kriteria	Keterangan
1.	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan Nasional	Isu tersebut mempunyai keterkaitan dengan kebijakan nasional, kementerian dan Lembaga, serta provinsi
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemda	Isu tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan Pemerintah Kota Blitar
3.	Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat	Isu tersebut memiliki pengaruh kuat dan cakupan yang luas, baik negative maupun positif
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	Isu tersebut berkaitan dengan fungsi dan peran untuk mendorong penguatan terhadap penerapan kebijakan dan program pembangunan
5.	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	Penanganan isu tersebut mudah dilakukan secara kebijakan, regulasi, dan sumber daya manusia dalam jangka menengah (5 tahun)
6.	Memiliki kesesuaian dengan tema RPJMD	Isu tersebut mendukung tema RPJMD

Sumber *: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026, diolah*

Isu strategis Kota Blitar memperhatikan tahapan pertama dari RPJPD Kota Blitar 2025-2045 dan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029, meliputi:

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
b. Pelayanan Pemerintah menuju *Smart Governance*
c. Peningkatan Ekonomi Masyarakat berbasis Potensi Lokal
d. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran serta Peningkatan Ketahanan Pangan

e. Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
f. Penciptaan Wilayah Aman dan Kondusif serta Perlindungan Masyarakat

2.5 Pemanfaatan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) merupakan salah satu sumber data utama dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data. DSSD dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJPD, RPJMD, hingga RKPD, sebagai dasar dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan, menganalisis potensi daerah, menetapkan target kinerja, serta merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang terukur.

Dalam rangka mendukung implementasi Satu Data Indonesia, pengelolaan dan pemanfaatan DSSD di Kota Blitar dilaksanakan melalui modul e-Walidata pada SIPD RI. Sistem ini mendukung proses pengumpulan, pemeriksaan, validasi, penyimpanan, dan penyebarluasan data secara terstandar guna menjamin ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dibagipakaikan antar perangkat daerah.

Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola data yang terintegrasi dan akuntabel, Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Keputusan Wali Kota Blitar Nomor 100.3.3.3/103/HK/410.020.3/2026 tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah dalam e-Walidata SIPD RI. Keputusan tersebut menjadi dasar penyebarluasan DSSD yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia dan dimanfaatkan sebagai rujukan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Daftar Data Statistik Sektoral Daerah yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui e-Walidata SIPD RI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota dimaksud merupakan sumber data resmi yang digunakan dalam penyusunan dokumen pembangunan daerah. Adapun daftar DSSD tersebut disajikan pada Tabel 2.92 Daftar Data Statistik Sektoral Daerah.

Tabel 2.92

Daftar Data Statistik Sektoral Daerah *(terlampir*

Tabel 2.82

Evaluasi Hasil RKPD Kota Blitar Sampai Dengan Tahun Berjalan

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
	101	**Pendidikan**																
	1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**81.88**	**159.865.973.560,00**	**87.5**	**126.955.138.878,00**	**83.1**	**140.624.013.050,00**	**88.91**	**101.000.868.315,00**	**176.41**	**227.956.007.193,00**	**107**	**71.8**	**108.6**	**15.4**	**Dinas Pendidikan**
	1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**355.689.500,00**	**100**	**345.859.600,00**	**100**	**442.850.900,00**	**100**	**405.408.350,00**	**200**	**751.267.950,00**	**100**	**91.5**	**0**	**3.9**	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	251.809.400,00	6	244.567.350,00	6	296.034.200,00	6	260.718.000,00	12	505.285.350,00	100	88.1	100	3	
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	103.880.100,00	9	101.292.250,00	9	146.816.700,00	9	144.690.350,00	18	245.982.600,00	100	98.6	100	6.1	
	1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**124.900.069.655,00**	**100**	**123.627.141.792,00**	**100**	**137.019.149.470,00**	**100**	**94.471.622.832,00**	**200**	**218.098.764.624,00**	**100**	**68.9**	**0**	**19**	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3500	124.870.971.855,00	1128	123.598.921.537,00	3500	136.990.054.970,00	3500	94.443.983.082,00	4628	218.042.904.619,00	100	68.9	100	19	
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	29.097.800,00	3	28.220.255,00	3	29.094.500,00	3	27.639.750,00	6	55.860.005,00	100	95	100	28.8	
	1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**262.725.100,00**	**100**	**257.618.725,00**	**100**	**153.941.600,00**	**88**	**373.834.680,00**	**188**	**631.453.405,00**	**88**	**242.8**	**0**	**0**	
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	80.458.600,00	2	79.220.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	5	94.220.000,00	100	100	150	0	
	1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	101.241.800,00	2	108.634.450,00	2	88.591.600,00	2	79.414.680,00	4	188.049.130,00	100	89.6	100	0	
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	74	81.024.700,00	74	69.764.275,00	74	50.350.000,00	74	279.420.000,00	148	349.184.275,00	100	555	100	0	
	1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**507.630.000,00**	**100**	**620.126.668,00**	**100**	**415.449.100,00**	**100**	**1.197.287.792,00**	**200**	**1.817.414.460,00**	**100**	**288.2**	**0**	**24.9**	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	35.286.800,00	10	33.540.000,00	10	26.845.700,00	10	120.651.931,00	20	154.191.931,00	100	449.4	100	60.6	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	29.661.600,00	5	29.333.990,00	5	29.659.000,00	5	426.344.122,00	10	455.678.112,00	100	1437.5	100	139.8	
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	34.076.400,00	5	31.201.000,00	1	34.076.400,00	1	207.979.397,00	6	239.180.397,00	100	610.3	20	70.5	
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	109.163.800,00	3	129.060.000,00	1	153.088.800,00	1	208.499.740,00	4	337.559.740,00	100	136.2	33.3	21	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	31.152.600,00	4	31.143.500,00	2	26.029.200,00	2	52.654.344,00	6	83.797.844,00	100	202.3	50	0	
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	21.625.800,00	0	21.620.600,00	24	21.570.000,00	24	61.918.500,00	24	83.539.100,00	100	287.1	1200	43.3	
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	199.990.000,00	20	298.823.078,00	100	91.257.000,00	100	88.704.008,00	120	387.527.086,00	100	97.2	100	3.6	
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500	46.673.000,00	0	45.404.500,00	1500	32.923.000,00	1500	30.535.750,00	1500	75.940.250,00	100	92.7	100	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan**		**129.077.400,00**	**100**	**261.375.000,00**	**100**	**425.807.000,00**	**100**	**859.370.218,00**	**200**	**1.120.745.218,00**	**100**	**201.8**	**0**	**38**	
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	38.809.800,00	1	37.700.000,00	2	63.750.000,00	2	90.591.762,00	3	128.291.762,00	100	142.1	100	0	
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	90.267.600,00	3	223.675.000,00	2	362.057.000,00	2	768.778.456,00	5	992.453.456,00	100	212.3	66.7	54.3	
	1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**1.682.376.980,00**	**100**	**1.618.974.712,00**	**100**	**1.723.226.980,00**	**100**	**2.264.367.065,00**	**200**	**3.883.341.777,00**	**100**	**131.4**	**0**	**31.4**	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	5.704.000,00	1	5.702.400,00	1	5.700.000,00	1	13.235.764,00	2	18.938.164,00	100	232.2	50	0	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	809.541.180,00	3	779.758.908,00	36	754.332.380,00	36	1.319.527.205,00	39	2.099.286.113,00	100	174.9	1200	39.8	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	867.131.800,00	2	833.513.404,00	12	963.194.600,00	12	931.604.096,00	14	1.765.117.500,00	100	96.7	600	23.8	
	1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**232.152.400,00**	**100**	**224.042.381,00**	**100**	**443.588.000,00**	**100**	**1.428.977.378,00**	**200**	**1.653.019.759,00**	**100**	**322.1**	**0**	**90.5**	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	107.579.200,00	20	100.527.877,00	21	126.142.000,00	21	151.412.211,00	41	251.940.088,00	100	120	100	5.8	
	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	24.896.700,00	1	24.719.900,00	2	24.807.000,00	2	24.540.000,00	3	49.259.900,00	100	98.9	100	0	
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	49.766.000,00	3	49.169.700,00	3	49.639.000,00	3	191.205.508,00	6	240.375.208,00	100	385.2	100	0	
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	49.910.500,00	1	49.624.904,00	2	60.000.000,00	2	192.448.483,00	3	242.073.387,00	100	320.7	200	0	
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0,00	0	0,00	2	183.000.000,00	2	869.371.176,00	2	869.371.176,00	100	475.1	200	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Peningkatan pelayanan publik dari segi sarana prasarana																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Beberapa sarana untuk pmenuhan layanan pada kelompok rentan belum tercukupi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perbaikan atas SOP dan SPP dengan perkembangan yang ada dan hasil survey SKM																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penganggaran layanan publik untuk kelompok rentan dan pelaksanaan kegiatan FKP																		
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs**	**100**	**103.390.410.978,00**	**0**	**41.081.317.027,00**	**100**	**53.930.188.356,00**	**100**	**44.190.261.169,00**	**100**	**85.271.578.196,00**	**100**	**81.9**	**100**	**5.7**	**Dinas Pendidikan**
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase anak berkebutuhan khusus yang tertutaskan sesuai hasil assesment**	**92.31**	**103.390.410.978,00**	**0**	**41.081.317.027,00**	**100**	**53.930.188.356,00**	**100**	**44.190.261.169,00**	**100**	**85.271.578.196,00**	**100**	**81.9**	**108.3**	**5.7**	**Dinas Pendidikan**
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Satuan pendidikan yang memperoleh pendidikan anti Korupsi**	**95.88**	**103.390.410.978,00**	**96.8**	**41.081.317.027,00**	**100**	**53.930.188.356,00**	**100**	**44.190.261.169,00**	**196.77**	**85.271.578.196,00**	**100**	**81.9**	**104.3**	**5.7**	**Dinas Pendidikan**
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SD/MI)**	**100**	**103.390.410.978,00**	**100**	**41.081.317.027,00**	**95.87**	**53.930.188.356,00**	**95.24**	**44.190.261.169,00**	**195.24**	**85.271.578.196,00**	**99.3**	**81.9**	**95.2**	**5.7**	**Dinas Pendidikan**
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Angka Kelulusan SD/MI**	**100**	**103.390.410.978,00**	**100**	**41.081.317.027,00**	**100**	**53.930.188.356,00**	**100**	**44.190.261.169,00**	**200**	**85.271.578.196,00**	**100**	**81.9**	**100**	**5.7**	**Dinas Pendidikan**
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)**	**100**	**103.390.410.978,00**	**0**	**41.081.317.027,00**	**84.62**	**53.930.188.356,00**	**85**	**44.190.261.169,00**	**85**	**85.271.578.196,00**	**100.4**	**81.9**	**85**	**5.7**	**Dinas Pendidikan**
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase satuan Pendidikan PAUD dan PNF berakreditasi minimal B**	**33.55**	**103.390.410.978,00**	**0**	**41.081.317.027,00**	**33.52**	**53.930.188.356,00**	**76.25**	**44.190.261.169,00**	**76.25**	**85.271.578.196,00**	**227.5**	**81.9**	**227.3**	**5.7**	**Dinas Pendidikan**
	1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Iklim Inklusivitas SD**		**18.039.923.513,00**	**79.3**	**9.358.720.946,00**	**61.04**	**24.172.615.906,00**	**65.29**	**18.264.344.588,00**	**144.58**	**27.623.065.534,00**	**107**	**75.6**	**0**	**16.7**	
	1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Iklim keamanan SD**		**18.039.923.513,00**	**79.2**	**9.358.720.946,00**	**78.74**	**24.172.615.906,00**	**81.95**	**18.264.344.588,00**	**161.18**	**27.623.065.534,00**	**104.1**	**75.6**	**0**	**16.7**	
	1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Iklim Kebhinekaan SD**		**18.039.923.513,00**	**60.9**	**9.358.720.946,00**	**75.32**	**24.172.615.906,00**	**80.57**	**18.264.344.588,00**	**141.46**	**27.623.065.534,00**	**107**	**75.6**	**0**	**16.7**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana**		**18.039.923.513,00**	**100**	**9.358.720.946,00**	**3**	**24.172.615.906,00**	**3**	**18.264.344.588,00**	**103**	**27.623.065.534,00**	**100**	**75.6**	**0**	**16.7**	
	1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah**		**18.039.923.513,00**	**10**	**9.358.720.946,00**	**100**	**24.172.615.906,00**	**100**	**18.264.344.588,00**	**110**	**27.623.065.534,00**	**100**	**75.6**	**0**	**16.7**	
	1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi di tingkat daerah, propinsi dan nasional**		**18.039.923.513,00**	**100**	**9.358.720.946,00**	**10**	**24.172.615.906,00**	**10**	**18.264.344.588,00**	**110**	**27.623.065.534,00**	**100**	**75.6**	**0**	**16.7**	
	1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan**		**18.039.923.513,00**	**100**	**9.358.720.946,00**	**100**	**24.172.615.906,00**	**100**	**18.264.344.588,00**	**200**	**27.623.065.534,00**	**100**	**75.6**	**0**	**16.7**	
	1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik**		**18.039.923.513,00**	**3**	**9.358.720.946,00**	**100**	**24.172.615.906,00**	**100**	**18.264.344.588,00**	**103**	**27.623.065.534,00**	**100**	**75.6**	**0**	**16.7**	
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1	0,00	1.25	203.509.288,00	3	0,00	0	0,00	1.25	203.509.288,00	0	0	0	0	
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2	0,00	2	90.000.000,00	2	0,00	0	0,00	2	90.000.000,00	0	0	0	0	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500	247.795.610,00	1000	270.039.800,00	500	488.452.500,00	500	482.670.395,00	1500	752.710.195,00	100	98.8	100	5.9	
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	63	50.000.000,00	63	24.489.750,00	63	14.093.800,00	63	13.048.500,00	126	37.538.250,00	100	92.6	100	9.7	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	63	9.972.434.928,00	0	0,00	63	11.232.000.000,00	63	7.769.200.063,00	63	7.769.200.063,00	100	69.2	100	28.7	
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	126	31.488.000,00	0	36.152.200,00	120	51.248.000,00	120	49.767.524,00	120	85.919.724,00	100	97.1	95.2	25.2	
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	63	71.139.900,00	63	40.639.925,00	63	14.025.000,00	63	12.561.000,00	126	53.200.925,00	100	89.6	100	2.8	
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3	15.900.000,00	1	14.597.950,00	3	8.250.000,00	4	7.012.500,00	5	21.610.450,00	133.3	85	133.3	0	
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	4.194.000,00	0	43.000.000,00	1	77.527.500,00	2	66.891.365,00	2	109.891.365,00	200	86.3	200	0	
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	2	259.500.000,00	1	238.408.150,00	2	260.068.500,00	3	244.415.198,00	4	482.823.348,00	150	94	150	1.1	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	7	3.856.925.075,00	7	2.806.415.200,00	9	3.128.456.500,00	9	2.267.824.383,00	16	5.074.239.583,00	100	72.5	128.6	0	
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	0,00	5	1.575.383.458,00	15	1.730.620.000,00	15	1.648.860.741,00	20	3.224.244.199,00	100	95.3	1500	0	
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10	5.400.000,00	0	9.091.250,00	63	6.655.000,00	63	6.534.000,00	63	15.625.250,00	100	98.2	630	0	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		540.500.000,00	63	380.794.000,00	63	384.150.400,00	63	369.127.450,00	126	749.921.450,00	100	96.1	0	0.8	
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0,00	0	0,00	14	3.895.077.706,00	14	3.430.807.569,00	14	3.430.807.569,00	100	88.1	0	0	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		0,00	0	0,00	2360	1.851.991.000,00	2360	1.720.650.000,00	2360	1.720.650.000,00	100	92.9	0	0	
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		0,00	0	0,00	2	1.030.000.000,00	2	174.973.900,00	2	174.973.900,00	100	17	0	0	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Iklim Inklusivitas SMP**		**37.324.382.956,00**	**80.6**	**19.926.853.812,00**	**66.68**	**14.786.977.051,00**	**68.2**	**15.331.979.345,00**	**148.82**	**35.258.833.157,00**	**102.3**	**103.7**	**0**	**5.2**	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Iklim keamanan SMP**		**37.324.382.956,00**	**81.3**	**19.926.853.812,00**	**81.43**	**14.786.977.051,00**	**78.26**	**15.331.979.345,00**	**159.55**	**35.258.833.157,00**	**96.1**	**103.7**	**0**	**5.2**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Iklim Kebhinekaan SMP**		**37.324.382.956,00**	**69.4**	**19.926.853.812,00**	**75.73**	**14.786.977.051,00**	**77.68**	**15.331.979.345,00**	**147.11**	**35.258.833.157,00**	**102.6**	**103.7**	**0**	**5.2**	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana**		**37.324.382.956,00**	**100**	**19.926.853.812,00**	**3**	**14.786.977.051,00**	**3**	**15.331.979.345,00**	**103**	**35.258.833.157,00**	**100**	**103.7**	**0**	**5.2**	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah**		**37.324.382.956,00**	**10**	**19.926.853.812,00**	**100**	**14.786.977.051,00**	**100**	**15.331.979.345,00**	**110**	**35.258.833.157,00**	**100**	**103.7**	**0**	**5.2**	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi di tingkat daerah, propinsi dan nasional**		**37.324.382.956,00**	**100**	**19.926.853.812,00**	**10**	**14.786.977.051,00**	**10**	**15.331.979.345,00**	**110**	**35.258.833.157,00**	**100**	**103.7**	**0**	**5.2**	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan**		**37.324.382.956,00**	**100**	**19.926.853.812,00**	**100**	**14.786.977.051,00**	**100**	**15.331.979.345,00**	**200**	**35.258.833.157,00**	**100**	**103.7**	**0**	**5.2**	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik**		**37.324.382.956,00**	**10**	**19.926.853.812,00**	**100**	**14.786.977.051,00**	**100**	**15.331.979.345,00**	**110**	**35.258.833.157,00**	**100**	**103.7**	**0**	**5.2**	
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1	23.000.000.000,00	0.75	16.437.247.548,00	1	2.125.150.000,00	1	2.101.222.188,00	1.75	18.538.469.736,00	100	98.9	100	0.5	
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		0,00	0	0,00	1	4.423.051,00	1	220.733.689,00	1	220.733.689,00	100	4990.5	0	0	
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		0,00	2	72.500.000,00	2	0,00	0	328.170.004,00	2	400.670.004,00	0	0	0	0	
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400	387.500.000,00	0	370.500.000,00	409	499.700.000,00	409	471.400.000,00	409	841.900.000,00	100	94.3	102.3	0	
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300	226.716.390,00	2E+05	224.021.350,00	500	484.930.000,00	500	477.003.180,00	200800	701.024.530,00	100	98.4	166.7	6.6	
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	20	38.231.800,00	21	22.971.900,00	19	11.263.800,00	19	10.211.500,00	40	33.183.400,00	100	90.7	95	7.5	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	9	11.871.864.966,00	0	0,00	19	9.598.650.000,00	19	5.004.870.175,00	19	5.004.870.175,00	100	52.1	211.1	14.5	
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100	38.400.000,00	0	45.665.100,00	38	42.278.000,00	38	40.585.887,00	38	86.250.987,00	100	96	38	20	
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		44.950.000,00	10	14.451.300,00	19	14.687.600,00	19	14.459.000,00	29	28.910.300,00	100	98.4	0	0	
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		10.600.000,00	1	2.597.500,00	3	10.450.000,00	3	9.450.000,00	4	12.047.500,00	100	90.4	0	0	
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		4.248.000,00	0	51.600.000,00	1	57.800.000,00	2	55.345.000,00	2	106.945.000,00	200	95.8	0	0	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		90.323.800,00	63	49.769.200,00	19	30.446.800,00	19	394.627.184,00	82	444.396.384,00	100	1296.1	0	13.6	
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		50.000.000,00	21	23.897.000,00	19	15.013.800,00	19	14.810.500,00	40	38.707.500,00	100	98.6	0	0	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		0,00	3	1.228.556.750,00	3	1.892.184.000,00	3	2.313.629.637,00	6	3.542.186.387,00	100	122.3	0	0	
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		0,00	0	0,00	2	0,00	0	97.584.854,00	0	97.584.854,00	0	0	0	0	
	1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah**		**10.351.781.368,00**	**100**	**7.846.427.855,00**	**100**	**10.402.713.893,00**	**100**	**7.479.995.750,00**	**200**	**15.326.423.605,00**	**100**	**71.9**	**0**	**6**	
	1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan**		**10.351.781.368,00**	**100**	**7.846.427.855,00**	**100**	**10.402.713.893,00**	**100**	**7.479.995.750,00**	**200**	**15.326.423.605,00**	**100**	**71.9**	**0**	**6**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik**		**10.351.781.368,00**	**2**	**7.846.427.855,00**	**100**	**10.402.713.893,00**	**100**	**7.479.995.750,00**	**102**	**15.326.423.605,00**	**100**	**71.9**	**0**	**6**	
	1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana**		**10.351.781.368,00**	**100**	**7.846.427.855,00**	**2**	**10.402.713.893,00**	**2**	**7.479.995.750,00**	**102**	**15.326.423.605,00**	**100**	**71.9**	**0**	**6**	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		355.130.000,00	2	422.378.990,00	1	163.311.380,00	1	160.806.055,00	3	583.185.045,00	100	98.5	0	0	
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia		51.712.000,00	2	37.600.000,00	2	61.235.000,00	0.1	60.262.000,00	2.1	97.862.000,00	5	98.4	0	0	
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia		0,00	0	0,00	1	10.332.990,00	0.1	9.990.000,00	0.1	9.990.000,00	10	96.7	0	0	
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		2.026.600.000,00	0	1.870.700.000,00	3575	2.133.787.500,00	3575	1.826.900.000,00	3575	3.697.600.000,00	100	85.6	0	0	
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		25.006.600,00	0	24.456.500,00	160	53.474.100,00	160	51.130.500,00	160	75.587.000,00	100	95.6	0	15.9	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		3.698.400.000,00	0	3.459.245.099,00	160	3.283.800.000,00	160	1.868.233.100,00	160	5.327.478.199,00	100	56.9	0	15.1	
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD		24.970.000,00	1	24.000.000,00	160	69.987.600,00	160	68.107.871,00	161	92.107.871,00	100	97.3	0	62.4	
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		27.910.000,00	0	27.361.800,00	160	19.566.400,00	160	19.180.000,00	160	46.541.800,00	100	98	0	0	
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		12.432.000,00	0	12.210.000,00	2	8.500.000,00	2	6.864.000,00	2	19.074.000,00	100	80.8	0	0	
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		0,00	0	0,00	1	225.163.800,00	0.15	222.062.198,00	0.15	222.062.198,00	15	98.6	0	0	
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		189.398.900,00	500	219.765.250,00	250	404.522.825,00	2037	394.188.137,00	2537	613.953.387,00	814.8	97.4	0	4.8	
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		10.581.000,00	0	44.727.000,00	17	73.275.000,00	17	72.762.500,00	17	117.489.500,00	100	99.3	0	0	
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		12.788.400,00	0	12.376.500,00	160	10.330.000,00	160	10.197.500,00	160	22.574.000,00	100	98.7	0	0	
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		0,00	0	0,00	1	1.317.336.000,00	0.25	1.064.257.524,00	0.25	1.064.257.524,00	25	80.8	0	0	
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		1.394.312.200,00	7	915.357.225,00	7	841.657.700,00	30	595.871.707,00	37	1.511.228.932,00	428.6	70.8	0	0	
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		49.784.300,00	0	0,00	4	210.285.318,00	0.15	86.957.802,00	0.15	86.957.802,00	3.8	41.4	0	0	
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0,00	0	0,00	4	313.030.000,00	0.25	75.519.973,00	0.25	75.519.973,00	6.3	24.1	0	0	
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia		0,00	0	0,00	2	399.521.080,00	50	288.641.831,00	50	288.641.831,00	2500	72.2	0	0	
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		0,00	0	0,00	160	110.901.900,00	160	99.739.087,00	160	99.739.087,00	100	89.9	0	0	
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat		0,00	0	0,00	1	103.734.000,00	1	101.744.538,00	1	101.744.538,00	100	98.1	0	0	
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0,00	0	0,00	2	588.961.300,00	0.15	396.579.427,00	0.15	396.579.427,00	7.5	67.3	0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana**		**4.397.634.006,00**	**100**	**3.949.314.414,00**	**1**	**4.567.881.506,00**	**1**	**3.113.941.486,00**	**101**	**7.063.255.900,00**	**100**	**68.2**	**0**	**8**	
	1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase Lembaga PKBM Aktif**		**4.397.634.006,00**	**100**	**3.949.314.414,00**	**100**	**4.567.881.506,00**	**100**	**3.113.941.486,00**	**200**	**7.063.255.900,00**	**100**	**68.2**	**0**	**8**	
	1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan**		**4.397.634.006,00**	**1**	**3.949.314.414,00**	**100**	**4.567.881.506,00**	**100**	**3.113.941.486,00**	**101**	**7.063.255.900,00**	**100**	**68.2**	**0**	**8**	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.396.930.000,00	0	1.390.400.000,00	207	2.014.930.000,00	207	1.225.110.000,00	207	2.615.510.000,00	100	60.8	0	0	
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		651.770.000,00	5	645.577.440,00	10	493.530.000,00	10	461.153.102,00	15	1.106.730.542,00	100	93.4	0	16.7	
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		24.641.700,00	170	21.160.400,00	5	17.017.000,00	5	16.492.140,00	175	37.652.540,00	100	96.9	0	0	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		1.324.000.000,00	0	1.129.900.000,00	5	985.900.000,00	5	465.455.000,00	5	1.595.355.000,00	100	47.2	0	15.9	
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		25.009.300,00	10	22.058.000,00	10	16.894.300,00	10	13.265.750,00	20	35.323.750,00	100	78.5	0	21.8	
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		5.158.000,00	1	5.093.000,00	1	24.725.000,00	1	8.913.675,00	2	14.006.675,00	100	36.1	0	0	
	1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		109.696.500,00	500	119.084.750,00	30	192.739.000,00	30	171.319.345,00	530	290.404.095,00	100	88.9	0	0	
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		135.046.169,00	0.5	132.974.304,00	1	304.546.169,00	0.08	275.466.251,00	0.58	408.440.555,00	8	90.5	0	0	
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		17.400.000,00	5	15.410.000,00	10	15.891.000,00	10	15.194.500,00	15	30.604.500,00	100	95.6	0	0	
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		66.684.000,00	100	59.521.500,00	5	54.992.000,00	300	53.694.840,00	400	113.216.340,00	6000	97.6	0	0	
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia		0,00	0	0,00	2	446.717.037,00	0.25	407.876.883,00	0.25	407.876.883,00	12.5	91.3	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : inovasi pengentasan ATS untuk peningkatan akses pendidikan warga kota blitar																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : terdapat lembaga baru yang masih proses dalam akreditasi dan terdapat sd istimewa yang tidak akan tercapai akreditasi minimal B																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : tetap memacu capaian akreditasi lembaga dan tetap dilakukan proses pendampingan untuk peningkatan manajemen mutu dan kelembagaan sekolah																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : penganggaran berkelanjutan untuk peningkatan mutu akses dan tata kelola satuan pendidikan																		
	1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase tenaga pendidik yang menerima peningkatan kapasitas pendidikan anti korupsi**	**50**	**13.024.082.620,00**	**100**	**616.404.100,00**	**40**	**780.871.200,00**	**49**	**750.351.624,00**	**149**	**1.366.755.724,00**	**122.5**	**96.1**	**98**	**0.2**	**Dinas Pendidikan**
	1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan**	**100**	**13.024.082.620,00**	**35**	**616.404.100,00**	**100**	**780.871.200,00**	**100**	**750.351.624,00**	**135**	**1.366.755.724,00**	**100**	**96.1**	**100**	**0.2**	**Dinas Pendidikan**
	1.01.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Yang Ditetapkan**		**527.893.590,00**	**2**	**540.773.400,00**	**1**	**713.415.300,00**	**1**	**690.376.704,00**	**3**	**1.231.150.104,00**	**100**	**96.8**	**0**	**4.4**	
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		42.500.000,00	1	20.420.150,00	1	29.565.300,00	1	22.239.950,00	2	42.660.100,00	100	75.2	0	0	
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia		30.256.800,00	1	30.252.600,00	337	23.556.300,00	674	23.387.800,00	675	53.640.400,00	200	99.3	0	0	
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya		397.999.700,00	100	437.579.200,00	63	219.781.400,00	63	218.429.500,00	163	656.008.700,00	100	99.4	0	3.6	
	1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun		0,00	0	25.000.000,00	1	314.016.600,00	1	301.715.285,00	1	326.715.285,00	100	96.1	0	0	
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		57.137.090,00	1	27.521.450,00	1	126.495.700,00	1	124.604.169,00	2	152.125.619,00	100	98.5	0	16.2	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.01.03.2.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan nonformal Yang Ditetapkan**		**101.126.300,00**	**2**	**75.630.700,00**	**1**	**67.455.900,00**	**0.5**	**59.974.920,00**	**2.5**	**135.605.620,00**	**50**	**88.9**	**0**	**8**	
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun		25.215.500,00	1	13.018.000,00	1	13.065.000,00	1	9.936.000,00	2	22.954.000,00	100	76.1	0	0	
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia		23.361.600,00	750	17.311.100,00	120	8.388.000,00	120	8.338.320,00	870	25.649.420,00	100	99.4	0	0	
	1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun		0,00	0	25.000.000,00	1	24.999.100,00	1	21.556.500,00	1	46.556.500,00	100	86.2	0	0	
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun		0,00	1	20.301.600,00	1	21.003.800,00	1	20.144.100,00	2	40.445.700,00	100	95.9	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : program dan kegiatan didukung dengan kebijakan yang selaras dengan pemerintah pusat																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelaksanaan monev belum begitu optimal																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan kembali implementasi kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan yang belum berjalan secara optimal																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penganggaran dan pelaksanaan program yang keberlanjutan																		
	1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan**	**31.8**	**13.793.948.417,00**	**49.5**	**6.735.323.300,00**	**90**	**6.964.170.500,00**	**90**	**6.820.468.334,00**	**139.5**	**13.555.791.634,00**	**100**	**97.9**	**283**	**13.8**	**Dinas Pendidikan**
	1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompetensi amat baik**	**90.5**	**13.793.948.417,00**	**91.5**	**6.735.323.300,00**	**31.7**	**6.964.170.500,00**	**47**	**6.820.468.334,00**	**138.5**	**13.555.791.634,00**	**148.3**	**97.9**	**51.9**	**13.8**	**Dinas Pendidikan**
	1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase satuan pendidikan menjadi sekolah penggerak**		**7.376.169.500,00**	**6.58**	**6.735.323.300,00**	**6.58**	**6.964.170.500,00**	**6.58**	**6.820.468.334,00**	**13.16**	**13.555.791.634,00**	**100**	**97.9**	**0**	**25.7**	
	1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase Pendidik berkualifikasi minimum S1**		**7.376.169.500,00**	**98.3**	**6.735.323.300,00**	**98.25**	**6.964.170.500,00**	**98.25**	**6.820.468.334,00**	**196.5**	**13.555.791.634,00**	**100**	**97.9**	**0**	**25.7**	
	1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase pendidik yang memanfaatkan PMM**		**7.376.169.500,00**	**100**	**6.735.323.300,00**	**94.47**	**6.964.170.500,00**	**94.47**	**6.820.468.334,00**	**194.47**	**13.555.791.634,00**	**100**	**97.9**	**0**	**25.7**	
	1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran**		**7.376.169.500,00**	**94.5**	**6.735.323.300,00**	**100**	**6.964.170.500,00**	**100**	**6.820.468.334,00**	**194.47**	**13.555.791.634,00**	**100**	**97.9**	**0**	**25.7**	
	1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Indeks Distribusi Guru dan tenaga kependidikan**		**7.376.169.500,00**	**0.45**	**6.735.323.300,00**	**0,86 0,7**	**6.964.170.500,00**	**0.86**	**6.820.468.334,00**	**1.31**	**13.555.791.634,00**	**0**	**97.9**	**0**	**25.7**	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		7.029.592.200,00	3	6.415.387.000,00	3	6.618.366.500,00	3	6.506.070.324,00	6	12.921.457.324,00	100	98.3	0	26.7	
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		346.577.300,00	3	319.936.300,00	3	345.804.000,00	3	314.398.010,00	6	634.334.310,00	100	90.9	0	5	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya kegiatan inovatif seperti Peningkatan kapasitas GTK yaitu RISE Camp 2025 dan OMSC 2025, Layanan kepegawaian, Penataan GTK, seleksi dan pelatihan calon kepala sekolah, Penataan PPPK, Pemenuhan Kepala Sekolah																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya kebijakan atas pembaharuan pembelajaran yang memerlukan peningkatan kompetensi lebih lanjut																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetnsi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penganggaran yang berkelanjutan																		
	1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memiliki izin operasional yang masih berlaku**	**76.89**	**54.673.836,00**	**100**	**19.107.250,00**	**100**	**17.210.000,00**	**100**	**15.508.202,00**	**200**	**34.615.452,00**	**100**	**90.1**	**130.1**	**3**	**Dinas Pendidikan**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.01.05.2.02	**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Jumlah rekomendasi penerbitan ijin PAUD dan PNF yang terbit**		**20.160.900,00**	**1**	**19.107.250,00**	**1**	**17.210.000,00**	**1**	**15.508.202,00**	**2**	**34.615.452,00**	**100**	**90.1**	**0**	**8.2**	
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		10.057.100,00	0.25	9.564.500,00	1	9.064.800,00	0.5	8.143.960,00	0.75	17.708.460,00	50	89.8	0	0	
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		10.103.800,00	1	9.542.750,00	1	8.145.200,00	0.5	7.364.242,00	1.5	16.906.992,00	50	90.4	0	16.3	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Keaktifan dan peran serta dari satuan pendidikan guna mengecek administrasi kelembagaan dan manajemen guna keberlangsungan pengajuan usulan bantuan pemerintah baik dari pusat maupun daerah																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Mekanisme pelayanan yang berbeda antar OPD menjadi hambatan keterlambatan penerbitan ijin operasional lembaga sehingga melebih waktu yang telah ditetapkan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Peningkatan koordinasi baik dengan satuan pendidikan terkait dan OPD yang menerbitkan ijin perpanjangan operasional																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penganggaran yang berkelanjutan untuk pelaksanaan sosialisasi dan monev																		
	1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**81.88**	**159,865,973,560.00**	**87.50**	**443,310,742.00**	**83.10**	**315,532,573.00**	**0**	**327,614,826.00**	**87.5**	**770,925,568.00**	**0**	**103.8**	**0**	**0**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 1**
	1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**2,463,600.00**	**0.00**	**704,000.00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**704,000.00**	**0**	**0**	**0.0**	**0.0**	
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	2,463,600.00	2.00	704,000.00	3	0	3	0	5	704,000.00	100	0	100	0.0	
	1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**70,095,200.00**	**100.00**	**77,338,000.00**	**100**	**25,407,200.00**	**0**	**25,400,000.00**	**100**	**102,738,000.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	33,700,000.00	3.00	33,922,000.00	2	0	2	0	5	33,922,000.00	100	0	100	0.0	
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60	36,395,200.00	140.00	43,416,000.00	60	25,407,200.00	60.00	25,400,000.00	200	68,816,000.00	100	100	100	0	
	1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**82,907,200.00**	**100.00**	**56,996,800.00**	**100**	**80,109,973.00**	**0**	**57,536,609.00**	**100**	**114,533,409.00**	**0**	**71.8**	**0.0**	**1.3**	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	6,990,600.00	1.00	5,542,600.00	1	6,946,000.00	1.00	5,583,855.00	2	11,126,455.00	100	80.4	100	0	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	34,871,400.00	0.00	24,253,200.00	4	34,799,800.00	4	22,798,956.00	4	47,052,156.00	100	65.5	100	0	
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	20,261,700.00	5.00	13,126,000.00	1	21,380,773.00	1.00	19,051,310.00	6	32,177,310.00	100	89.1	100	0	
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1,800,000.00	1.00	1,650,000.00	1	1,800,000.00	1.00	0	2	1,650,000.00	100	0	100	0.0	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	7,223,500.00	0.00	5,837,000.00	1	3,423,400.00	1	2,676,488.00	1	8,513,488.00	100	78.2	100	0	
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	11,760,000.00	2.00	6,588,000.00	48	11,760,000.00	60	7,426,000.00	62	14,014,000.00	125	63.1	125	9.5	
	1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan**		**35,469,800.00**	**100.00**	**38,000,000.00**	**100**	**30,587,400.00**	**0**	**63,795,250.00**	**100**	**101,795,250.00**	**0**	**208.6**	**0.0**	**0**	
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	0	0.00	0	2	8,576,200.00	2	8,535,012.00	2	8,535,012.00	100	99.5	100	0.0	
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	35,469,800.00	0.00	38,000,000.00	2	22,011,200.00	2.00	55,260,238.00	2	93,260,238.00	100	251.1	100	0	
	1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**69,912,000.00**	**100.00**	**65,081,484.00**	**100**	**73,390,000.00**	**0**	**70,822,984.00**	**100**	**135,904,468.00**	**0**	**96.5**	**0.0**	**23.1**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1,150,000.00	0.00	1,144,000.00	1	1,150,000.00	1.00	1,002,900.00	1	2,146,900.00	100	87.2	100	0	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	68,762,000.00	36.00	63,937,484.00	36	72,240,000.00	57	69,820,084.00	93	133,757,568.00	158.3	96.7	158.3	23.5	
	1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**94,610,600.00**	**100.00**	**205,190,458.00**	**100**	**106,038,000.00**	**0**	**110,059,983.00**	**100**	**315,250,441.00**	**0**	**103.8**	**0.0**	**0**	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	0	0.00	1,840,500.00	1	2,601,000.00	1	1,380,000.00	1	3,220,500.00	100	53.1	100	0.0	
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	23,998,000.00	1.00	16,262,000.00	4	31,637,000.00	6.3	26,031,500.00	7.3	42,293,500.00	157.5	82.3	157.5	0	
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0.00	120,999,163.00	1	71,800,000.00	1	82,648,483.00	1	203,647,646.00	100	115.1	100	0.0	
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)**	**100**	**103,390,410,978.00**	**100.00**	**529,753,770.00**	**100**	**720,986,800.00**	**0**	**551,017,479.00**	**100**	**1,080,771,249.00**	**0**	**76.4**	**0**	**0**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 1**
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase angka kelulusan SMP/MTs**	**100**	**103,390,410,978.00**	**85.00**	**529,753,770.00**	**100**	**720,986,800.00**	**0**	**551,017,479.00**	**85**	**1,080,771,249.00**	**0**	**76.4**	**0**	**0**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 1**
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana**		**1,041,872,200.00**	**100.00**	**529,753,770.00**	**1**	**720,986,800.00**	**0**	**551,017,479.00**	**100**	**1,080,771,249.00**	**0**	**76.4**	**0.0**	**0**	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah**		**1,041,872,200.00**	**100.00**	**529,753,770.00**	**100**	**720,986,800.00**	**0**	**551,017,479.00**	**100**	**1,080,771,249.00**	**0**	**76.4**	**0.0**	**0**	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan**		**1,041,872,200.00**	**1.00**	**529,753,770.00**	**100**	**720,986,800.00**	**0**	**551,017,479.00**	**1**	**1,080,771,249.00**	**0**	**76.4**	**0.0**	**0**	
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat		0	0.00	0	1	34,988,000.00	1	34,131,350.00	1	34,131,350.00	100	97.6	0.0	0.0	
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	0	0.00	0	1	42,384,400.00	1	40,986,350.00	1	40,986,350.00	100	96.7	50	0.0	
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3	0	0.00	0	3	35,509,500.00	3	35,020,500.00	3	35,020,500.00	100	98.6	100	0.0	
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	250	18,750,000.00	250.00	19,822,000.00	280	21,000,000.00	0	0	250	19,822,000.00	0	0	0	0.0	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1	0	0.00	62,423,500.00	1	74,237,100.00	1.25	65,040,809.00	1.25	127,464,309.00	125	87.6	125	0.0	
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5	0	0.00	165,136,200.00	5	177,271,000.00	5	156,928,999.00	5	322,065,199.00	100	88.5	100	0.0	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14	0	0.00	230,406,000.00	14	260,716,800.00	14	145,687,235.00	14	376,093,235.00	100	55.9	100	0.0	
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	0	0.00	0	1	74,880,000.00	1	73,222,236.00	1	73,222,236.00	100	97.8	50	0.0	
	1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**81.88**	**159,865,973,560.00**	**87.50**	**517,563,298.00**	**83.10**	**428,227,716.00**	**0**	**427,754,154.00**	**87.5**	**945,317,452.00**	**0**	**99.9**	**0**	**0**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 2**
	1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**2,054,000.00**	**100.00**	**1,481,250.00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**1,481,250.00**	**0**	**0**	**0.0**	**0.0**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	2,054,000.00	4.00	1,481,250.00	3	0	0	0	4	1,481,250.00	0	0	0	0.0	
	1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**85,123,544.00**	**100.00**	**81,397,244.00**	**100**	**25,407,200.00**	**0**	**25,400,000.00**	**100**	**106,797,244.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	80,458,600.00	2.00	46,587,000.00	2	0	2	0	4	46,587,000.00	100	0	100	0.0	
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	63	28,423,544.00	63.00	34,810,244.00	70	25,407,200.00	60.00	25,400,000.00	123	60,210,244.00	85.7	100	95.2	0	
	1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**89,755,432.00**	**100.00**	**80,581,100.00**	**100**	**89,842,000.00**	**0**	**86,875,340.00**	**100**	**167,456,440.00**	**0**	**96.7**	**0.0**	**1.4**	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	21,368,100.00	1.00	21,927,000.00	1	22,456,700.00	1.00	22,082,340.00	2	44,009,340.00	100	98.3	100	0	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	25,989,900.00	3.00	22,630,600.00	3	26,175,300.00	3	25,451,987.00	6	48,082,587.00	100	97.2	100	0	
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	25,075,600.00	3.00	19,113,500.00	1	25,067,000.00	1.00	24,762,990.00	4	43,876,490.00	100	98.8	100	0	
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3,600,000.00	2.00	3,600,000.00	1	3,600,000.00	1.00	3,600,000.00	3	7,200,000.00	100	100	0.0	0	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4,601,832.00	1.00	5,690,000.00	1	3,423,000.00	2	3,418,023.00	3	9,108,023.00	200	99.9	0.0	0	
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		9,120,000.00	48.00	7,620,000.00	48	9,120,000.00	48	7,560,000.00	96	15,180,000.00	100	82.9	0.0	13.8	
	1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan**		**38,699,600.00**	**100.00**	**70,975,000.00**	**100**	**159,354,200.00**	**0**	**191,557,695.00**	**100**	**262,532,695.00**	**0**	**120.2**	**0.0**	**0**	
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	0.00	0	1	19,376,600.00	2	19,314,000.00	2	19,314,000.00	200	99.7	0.0	0.0	
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		38,699,600.00	4.00	70,975,000.00	30	139,977,600.00	30	172,243,695.00	34	243,218,695.00	100	123.1	0.0	0	
	1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**68,581,120.00**	**100.00**	**52,850,176.00**	**100**	**68,646,216.00**	**0**	**51,227,424.00**	**100**	**104,077,600.00**	**0**	**74.6**	**0.0**	**18.1**	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		625,920.00	1.00	585,000.00	1	620,000.00	1.00	612,900.00	2	1,197,900.00	100	98.9	0.0	0	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		67,955,200.00	36.00	52,265,176.00	36	68,026,216.00	36	50,614,524.00	72	102,879,700.00	100	74.4	0.0	18.2	
	1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**25,047,800.00**	**100.00**	**230,278,528.00**	**100**	**84,978,100.00**	**0**	**72,693,695.00**	**100**	**302,972,223.00**	**0**	**85.5**	**0.0**	**0**	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1,652,800.00	0.00	0	1	1,646,100.00	1	1,332,500.00	1	1,332,500.00	100	80.9	0.0	0	
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		14,925,000.00	25.00	14,765,000.00	35	23,367,000.00	35	21,561,195.00	60	36,326,195.00	100	92.3	0.0	0	
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	0.00	182,193,528.00	1	59,965,000.00	2	49,800,000.00	2	231,993,528.00	200	83	0.0	0.0	
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**persentase angka kelulusan SMP/MTs**	**100**	**103,390,410,978.00**	**100.00**	**608,829,399.00**	**100**	**931,453,800.00**	**0**	**792,371,532.00**	**100**	**1,401,200,931.00**	**0**	**85.1**	**0**	**0**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 2**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)**	**100**	**103,390,410,978.00**	**85.00**	**608,829,399.00**	**100**	**931,453,800.00**	**0**	**792,371,532.00**	**85**	**1,401,200,931.00**	**0**	**85.1**	**0**	**0**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 2**
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana**		**1,212,776,800.00**	**1.00**	**608,829,399.00**	**1**	**931,453,800.00**	**0**	**792,371,532.00**	**1**	**1,401,200,931.00**	**0**	**85.1**	**0.0**	**0**	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah**		**1,212,776,800.00**	**100.00**	**608,829,399.00**	**100**	**931,453,800.00**	**0**	**792,371,532.00**	**100**	**1,401,200,931.00**	**0**	**85.1**	**0.0**	**0**	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan**		**1,212,776,800.00**	**100.00**	**608,829,399.00**	**100**	**931,453,800.00**	**0**	**792,371,532.00**	**100**	**1,401,200,931.00**	**0**	**85.1**	**0.0**	**0**	
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		25,500,000.00	340.00	25,500,000.00	342	454,567,800.00	0	443,218,399.00	340	468,718,399.00	0	97.5	0.0	0	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		0	0.00	50,840,000.00	1	59,538,000.00	0	51,411,902.00	0	102,251,902.00	0	86.4	0.0	0.0	
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik		0	0.00	156,471,800.00	5	167,420,000.00	0	154,025,001.00	0	310,496,801.00	0	92	0.0	0.0	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		0	0.00	223,570,000.00	14	249,928,000.00	0	143,716,230.00	0	367,286,230.00	0	57.5	0.0	0.0	
	1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**81.88**	**159,865,973,560.00**	**87.50**	**201,926,969.00**	**83.10**	**258,479,200.00**	**0**	**234,990,875.00**	**87.5**	**436,917,844.00**	**0**	**90.9**	**0**	**0**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 3**
	1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**1,920,330.00**	**100.00**	**1,780,975.00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**1,780,975.00**	**0**	**0**	**0.0**	**0.0**	
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	1,920,330.00	3.00	1,780,975.00	3	0	3	0	6	1,780,975.00	100	0	100	0.0	
	1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**62,533,300.00**	**100.00**	**68,383,300.00**	**100**	**25,407,200.00**	**0**	**25,400,000.00**	**100**	**93,783,300.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	25,500,000.00	2.00	34,850,000.00	2	0	2	0	4	34,850,000.00	100	0	100	0.0	
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64	37,033,300.00	64.00	33,533,300.00	64	25,407,200.00	64.00	25,400,000.00	128	58,933,300.00	100	100	100	0	
	1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**48,745,400.00**	**100.00**	**51,030,100.00**	**100**	**43,078,300.00**	**0**	**38,073,680.00**	**100**	**89,103,780.00**	**0**	**88.4**	**0.0**	**0**	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	9,993,700.00	1.00	19,779,500.00	1	7,492,400.00	1	7,353,084.00	2	27,132,584.00	100	98.1	100	0	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	20,195,900.00	3.00	17,342,600.00	3	18,718,400.00	3	15,395,478.00	6	32,738,078.00	100	82.2	100	0	
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	6,003,800.00	2.00	5,878,000.00	1	6,874,500.00	1.00	6,830,518.00	3	12,708,518.00	100	99.4	50	0	
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	2,610,000.00	0.00	0	1	3,210,000.00	1.00	2,260,000.00	1	2,260,000.00	100	70.4	100	0	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	6,582,000.00	1.00	4,970,000.00	1	3,423,000.00	1	3,174,600.00	2	8,144,600.00	100	92.7	100	0	
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	3,360,000.00	2.00	3,060,000.00	24	3,360,000.00	24	3,060,000.00	26	6,120,000.00	100	91.1	100	0	
	1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan**		**0**	**0.00**	**0**	**100**	**30,265,000.00**	**0**	**30,112,925.00**	**0**	**30,112,925.00**	**0**	**99.5**	**0.0**	**0.0**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	0.00	0	15	30,265,000.00	15	30,112,925.00	15	30,112,925.00	100	99.5	0.0	0.0	
	1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**87,155,000.00**	**100.00**	**80,651,094.00**	**100**	**92,023,500.00**	**0**	**78,794,248.00**	**100**	**159,445,342.00**	**0**	**85.6**	**0.0**	**22.3**	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	575,000.00	50.00	520,000.00	1	500,000.00	1.00	492,900.00	51	1,012,900.00	100	98.6	100	0	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		86,580,000.00	3.00	80,131,094.00	36	91,523,500.00	36	78,301,348.00	39	158,432,442.00	100	85.6	0.0	22.4	
	1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**2,123,600.00**	**100.00**	**81,500.00**	**100**	**67,705,200.00**	**0**	**62,610,022.00**	**100**	**62,691,522.00**	**0**	**92.5**	**0.0**	**0**	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	2,123,600.00	1.00	81,500.00	1	2,010,200.00	1	1,402,000.00	2	1,483,500.00	100	69.7	100	0	
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	0	0.00	0	1	11,695,000.00	1	8,449,320.00	1	8,449,320.00	100	72.2	50	0.0	
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0.00	0	1	54,000,000.00	1	52,758,702.00	1	52,758,702.00	100	97.7	100	0.0	
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs**	**100**	**103,390,410,978.00**	**100.00**	**559,629,717.00**	**100**	**707,059,606.00**	**0**	**576,931,943.00**	**100**	**1,136,561,660.00**	**0**	**81.6**	**0**	**0**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 3**
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)**	**100**	**103,390,410,978.00**	**85.00**	**559,629,717.00**	**100**	**707,059,606.00**	**0**	**576,931,943.00**	**85**	**1,136,561,660.00**	**0**	**81.6**	**0**	**0**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 3**
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana**		**963,955,765.00**	**1.00**	**559,629,717.00**	**1**	**707,059,606.00**	**0**	**576,931,943.00**	**1**	**1,136,561,660.00**	**0**	**81.6**	**0.0**	**0**	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah**		**963,955,765.00**	**100.00**	**559,629,717.00**	**100**	**707,059,606.00**	**0**	**576,931,943.00**	**100**	**1,136,561,660.00**	**0**	**81.6**	**0.0**	**0**	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan "**		**963,955,765.00**	**100.00**	**559,629,717.00**	**100**	**707,059,606.00**	**0**	**576,931,943.00**	**100**	**1,136,561,660.00**	**0**	**81.6**	**0.0**	**0**	
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1	142,051,980.00	1.00	184,754,917.00	1	171,470,106.00	1	169,166,528.00	2	353,921,445.00	100	98.7	100	0	
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	250	36,512,500.00	3.00	30,622,000.00	250	62,416,000.00	250	59,580,795.00	253	90,202,795.00	100	95.5	100	0	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1	0	0.00	48,208,700.00	1	67,017,000.00	1.4	46,160,636.00	1.4	94,369,336.00	140	68.9	140	0.0	
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5	0	0.00	161,861,100.00	5	158,662,000.00	5	150,876,992.00	5	312,738,092.00	100	95.1	100	0.0	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14	0	0.00	129,271,000.00	14	234,380,000.00	14	138,146,228.00	14	267,417,228.00	100	58.9	100	0.0	
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		0	0.00	0	1	13,114,500.00	1	13,000,764.00	1	13,000,764.00	100	99.1	0.0	0.0	
	1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**81.88**	**159,865,973,560.00**	**81.82**	**343,789,921.00**	**83.10**	**285,714,300.00**	**0**	**242,170,687.00**	**81.82**	**585,960,608.00**	**0**	**84.8**	**0**	**0**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 4**
	1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**4,840,000.00**	**100.00**	**4,630,550.00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**4,630,550.00**	**0**	**0**	**0.0**	**0.0**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	4,840,000.00	3.00	4,630,550.00	3	0	0	0	3	4,630,550.00	0	0	0	0.0	
	1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**34,100,000.00**	**100.00**	**78,954,200.00**	**100**	**25,907,200.00**	**0**	**25,875,000.00**	**100**	**104,829,200.00**	**0**	**99.9**	**0.0**	**0**	
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	29,300,000.00	6.00	47,748,000.00	3	0	3	0	9	47,748,000.00	100	0	100	0.0	
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65	4,800,000.00	24.00	31,206,200.00	60	25,907,200.00	60.00	25,875,000.00	84	57,081,200.00	100	99.9	92.3	0	
	1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**85,704,396.00**	**100.00**	**75,825,100.00**	**100**	**83,946,400.00**	**0**	**67,641,358.00**	**100**	**143,466,458.00**	**0**	**80.6**	**0.0**	**0.5**	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	4,917,300.00	6.00	10,555,000.00	1	10,342,500.00	1	3,200,000.00	7	13,755,000.00	100	30.9	50	0	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	29,958,000.00	13.00	20,333,200.00	4	31,822,700.00	4	25,085,100.00	17	45,418,300.00	100	78.8	100	0	
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	21,717,100.00	9.00	21,647,000.00	1	20,808,400.00	1.00	18,668,070.00	10	40,315,070.00	100	89.7	33.3	0	
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	10,225,000.00	4.00	10,113,000.00	1	15,905,000.00	1.00	15,861,480.00	5	25,974,480.00	100	99.7	100	0	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	16,186,996.00	4.00	10,476,900.00	1	2,367,800.00	1	2,126,708.00	5	12,603,608.00	100	89.8	100	0	
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	2,700,000.00	23.00	2,700,000.00	12	2,700,000.00	12	2,700,000.00	35	5,400,000.00	100	100	100	16.7	
	1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan**		**208,574,300.00**	**100.00**	**120,702,000.00**	**100**	**95,153,600.00**	**0**	**76,479,333.00**	**100**	**197,181,333.00**	**0**	**80.4**	**0.0**	**0**	
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42	208,574,300.00	114.00	120,702,000.00	42	95,153,600.00	42	76,479,333.00	156	197,181,333.00	100	80.4	100	0	
	1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**49,998,000.00**	**100.00**	**49,558,021.00**	**100**	**63,547,000.00**	**0**	**50,874,740.00**	**100**	**100,432,761.00**	**0**	**80.1**	**0.0**	**21.3**	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1,150,000.00	4.00	1,040,000.00	1	1,150,000.00	1.00	1,150,000.00	5	2,190,000.00	100	100	100	0	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	48,848,000.00	88.00	48,518,021.00	36	62,397,000.00	36	49,724,740.00	124	98,242,761.00	100	79.7	100	21.8	
	1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**15,651,100.00**	**100.00**	**14,120,050.00**	**100**	**17,160,100.00**	**0**	**21,300,256.00**	**100**	**35,420,306.00**	**0**	**124.1**	**0.0**	**1.7**	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	4,542,600.00	6.00	2,000,050.00	2	4,625,100.00	2	2,923,396.00	8	4,923,446.00	100	63.2	100	5.7	
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36	9,108,500.00	102.00	8,770,000.00	36	9,135,000.00	36	7,481,100.00	138	16,251,100.00	100	81.9	100	0	
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	0.00	0	1	3,400,000.00	1	10,895,760.00	1	10,895,760.00	100	320.5	0.0	0.0	
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)**	**100**	**103,390,410,978.00**	**84.82**	**501,379,063.00**	**100**	**757,839,600.00**	**0**	**600,468,131.00**	**84.82**	**1,101,847,194.00**	**0**	**79.2**	**0**	**0**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 4**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs**	**100**	**103,390,410,978.00**	**100.00**	**501,379,063.00**	**100**	**757,839,600.00**	**0**	**600,468,131.00**	**100**	**1,101,847,194.00**	**0**	**79.2**	**0**	**0**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 4**
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana**		**1,012,505,334.00**	**1.00**	**501,379,063.00**	**1**	**757,839,600.00**	**0**	**600,468,131.00**	**1**	**1,101,847,194.00**	**0**	**79.2**	**0.0**	**0**	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah**		**1,012,505,334.00**	**100.00**	**501,379,063.00**	**100**	**757,839,600.00**	**0**	**600,468,131.00**	**100**	**1,101,847,194.00**	**0**	**79.2**	**0.0**	**0**	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan**		**1,012,505,334.00**	**100.00**	**501,379,063.00**	**100**	**757,839,600.00**	**0**	**600,468,131.00**	**100**	**1,101,847,194.00**	**0**	**79.2**	**0.0**	**0**	
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1	92,905,400.00	4.00	32,900,000.00	1	50,933,900.00	1	48,701,100.00	5	81,601,100.00	100	95.6	100	0	
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	400	30,000,000.00	602.00	118,386,913.00	400	215,390,000.00	400	212,115,267.00	1002	330,502,180.00	100	98.5	100	0	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1	0	0.00	46,373,750.00	1	53,321,500.00	1E+07	44,313,680.00	11178001	90,687,430.00	1117800100	83.1	1.1E+09	0.0	
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5	0	0.00	153,749,400.00	5	166,775,000.00	5	142,056,994.00	5	295,806,394.00	100	85.2	100	0.0	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14	0	0.00	119,211,000.00	14	244,842,000.00	14	127,397,000.00	14	246,608,000.00	100	52	100	0.0	
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		0	0.00	0	2	26,577,200.00	2	25,884,090.00	2	25,884,090.00	100	97.4	0.0	0.0	
	1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**81.88**	**159,865,973,560.00**	**87.50**	**971,087,934.00**	**83.10**	**682,640,986.00**	**0**	**643,381,659.00**	**87.5**	**1,614,469,593.00**	**0**	**94.2**	**0**	**0**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 5**
	1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**2,095,100.00**	**100.00**	**1,749,750.00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**1,749,750.00**	**0**	**0**	**0.0**	**0.0**	
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	2,095,100.00	2.00	1,749,750.00	3	0	3	0	5	1,749,750.00	100	0	100	0.0	
	1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**69,673,600.00**	**100.00**	**69,231,000.00**	**100**	**25,407,200.00**	**0**	**25,400,000.00**	**100**	**94,631,000.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	37,141,900.00	3.00	36,731,000.00	3	0	3	0	6	36,731,000.00	100	0	150	0.0	
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	54	32,531,700.00	54.00	32,500,000.00	54	25,407,200.00	54.00	25,400,000.00	108	57,900,000.00	100	100	100	0	
	1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**98,180,300.00**	**100.00**	**84,612,640.00**	**100**	**98,882,500.00**	**0**	**83,122,951.00**	**100**	**167,735,591.00**	**0**	**84.1**	**0.0**	**0**	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	13,509,100.00	1.00	13,078,500.00	1	18,509,100.00	1	16,068,804.00	2	29,147,304.00	100	86.8	100	0	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	28,649,100.00	3.00	25,258,500.00	3	35,646,700.00	3	28,175,302.00	6	53,433,802.00	100	79	100	0	
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	25,244,100.00	3.00	18,014,900.00	3	32,243,700.00	3	27,380,370.00	6	45,395,270.00	100	84.9	100	0	
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	3,600,000.00	1.00	3,600,000.00	1	4,200,000.00	1.00	3,450,000.00	2	7,050,000.00	100	82.1	100	0	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	22,318,000.00	1.00	20,620,740.00	1	3,423,000.00	1	3,188,475.00	2	23,809,215.00	100	93.1	100	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	4,860,000.00	36.00	4,040,000.00	36	4,860,000.00	36	4,860,000.00	72	8,900,000.00	100	100	100	0	
	1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan**		**321,811,800.00**	**100.00**	**252,464,000.00**	**100**	**20,000,000.00**	**0**	**25,790,850.00**	**100**	**278,254,850.00**	**0**	**129**	**0.0**	**0**	
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	86,362,700.00	2.00	252,464,000.00	2	20,000,000.00	2.00	25,790,850.00	4	278,254,850.00	100	129	100	0	
	1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**59,432,000.00**	**100.00**	**50,273,678.00**	**100**	**71,841,340.00**	**0**	**53,243,966.00**	**100**	**103,517,644.00**	**0**	**74.1**	**0.0**	**22.5**	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1,564,000.00	1.00	1,300,000.00	1	1,560,000.00	1.00	1,545,564.00	2	2,845,564.00	100	99.1	100	0	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	57,868,000.00	36.00	48,973,678.00	36	70,281,340.00	36	51,698,402.00	72	100,672,080.00	100	73.6	100	23.1	
	1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**449,442,300.00**	**100.00**	**512,756,866.00**	**100**	**466,509,946.00**	**0**	**455,823,892.00**	**100**	**968,580,758.00**	**0**	**97.7**	**0.0**	**0**	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	8,525,800.00	2.00	5,292,100.00	2	8,869,800.00	2	6,364,882.00	4	11,656,982.00	100	71.8	100	0	
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42	44,453,500.00	42.00	44,397,500.00	42	29,893,000.00	42	27,490,000.00	84	71,887,500.00	100	92	100	0	
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	396,463,000.00	6.00	463,067,266.00	6	427,747,146.00	6	421,969,010.00	12	885,036,276.00	100	98.6	100	0	
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)**	**100**	**103,390,410,978.00**	**100.00**	**393,509,650.00**	**100**	**639,713,358.00**	**0**	**651,771,457.00**	**100**	**1,045,281,107.00**	**0**	**101.9**	**0**	**0**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 5**
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs**	**100**	**103,390,410,978.00**	**85.00**	**393,509,650.00**	**100**	**639,713,358.00**	**0**	**651,771,457.00**	**85**	**1,045,281,107.00**	**0**	**101.9**	**0**	**0**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 5**
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana**		**594,814,858.00**	**1.00**	**393,509,650.00**	**1**	**639,713,358.00**	**0**	**651,771,457.00**	**1**	**1,045,281,107.00**	**0**	**101.9**	**0.0**	**0**	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**% Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah**		**594,814,858.00**	**100.00**	**393,509,650.00**	**100**	**639,713,358.00**	**0**	**651,771,457.00**	**100**	**1,045,281,107.00**	**0**	**101.9**	**0.0**	**0**	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**% peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan**		**594,814,858.00**	**100.00**	**393,509,650.00**	**100**	**639,713,358.00**	**0**	**651,771,457.00**	**100**	**1,045,281,107.00**	**0**	**101.9**	**0.0**	**0**	
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0	0.00	0	2	136,818,258.00	2	246,924,415.00	2	246,924,415.00	100	180.5	0.0	0.0	
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3	0	0.00	0	2	143,032,000.00	2	139,390,004.00	2	139,390,004.00	100	97.5	66.7	0.0	
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3	104,500,100.00	3.00	117,467,600.00	3	22,521,200.00	3	18,603,600.00	6	136,071,200.00	100	82.6	100	0	
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	320	41,441,000.00	320.00	41,441,000.00	320	45,510,000.00	320	35,105,000.00	640	76,546,000.00	100	77.1	100	0	
	1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		0	0.00	0	2	38,160,000.00	2	38,128,200.00	2	38,128,200.00	100	99.9	0.0	0.0	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1	0	0.00	23,775,550.00	1	31,906,000.00	1	26,301,103.00	1	50,076,653.00	100	82.4	100	0.0	
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	6	0	0.00	85,966,500.00	5	87,291,300.00	21	76,633,135.00	21	162,599,635.00	420	87.8	350	0.0	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14	0	0.00	124,859,000.00	14	134,474,600.00	14	70,686,000.00	14	195,545,000.00	100	52.6	100	0.0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**81.88**	**159,865,973,560.00**	**87.50**	**376,550,401.00**	**83.10**	**565,094,900.00**	**0**	**477,529,127.00**	**87.5**	**854,079,528.00**	**0**	**84.5**	**0**	**0.1**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 6**
	1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**1,035,200.00**	**0.00**	**724,000.00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**724,000.00**	**0**	**0**	**0.0**	**0.0**	
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	1,035,200.00	2.00	724,000.00	3	0	3	0	5	724,000.00	100	0	100	0.0	
	1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**90,817,600.00**	**0.00**	**106,530,000.00**	**100**	**25,407,200.00**	**0**	**25,400,000.00**	**0**	**131,930,000.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	44,000,000.00	2.00	40,230,000.00	2	0	2	0	4	40,230,000.00	100	0	100	0.0	
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55	46,817,600.00	55.00	66,300,000.00	55	25,407,200.00	55.00	25,400,000.00	110	91,700,000.00	100	100	100	0	
	1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**60,354,900.00**	**0.00**	**52,460,110.00**	**100**	**75,784,900.00**	**0**	**68,808,549.00**	**0**	**121,268,659.00**	**0**	**90.8**	**0.0**	**1.2**	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	11,009,200.00	1.00	7,064,000.00	1	12,902,200.00	1	10,767,000.00	2	17,831,000.00	100	83.5	100	0	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	25,977,600.00	3.00	24,706,400.00	3	25,662,200.00	3	23,516,349.00	6	48,222,749.00	100	91.6	100	0	
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	17,420,600.00	3.00	16,090,000.00	1	28,577,500.00	1.00	26,850,600.00	4	42,940,600.00	100	94	33.3	0	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	5,947,500.00	1.00	4,599,710.00	1	3,423,000.00	1	3,174,600.00	2	7,774,310.00	100	92.7	100	0	
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	0	0.00	0	48	5,220,000.00	48	4,500,000.00	48	4,500,000.00	100	86.2	100	0.0	
	1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan**		**53,724,000.00**	**0.00**	**50,580,000.00**	**100**	**60,701,100.00**	**0**	**53,785,050.00**	**0**	**104,365,050.00**	**0**	**88.6**	**0.0**	**0**	
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	53,724,000.00	3.00	50,580,000.00	6	60,701,100.00	6	53,785,050.00	9	104,365,050.00	100	88.6	200	0	
	1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**56,521,075.00**	**0.00**	**57,425,891.00**	**100**	**165,049,200.00**	**0**	**113,378,912.00**	**0**	**170,804,803.00**	**0**	**68.7**	**0.0**	**47.4**	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	575,000.00	1.00	560,000.00	1	600,000.00	1.00	592,900.00	2	1,152,900.00	100	98.8	100	0	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	55,946,075.00	3.00	56,865,891.00	36	164,449,200.00	36	112,786,012.00	39	169,651,903.00	100	68.6	100	47.9	
	1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**135,206,500.00**	**0.00**	**108,830,400.00**	**100**	**238,152,500.00**	**0**	**216,156,616.00**	**0**	**324,987,016.00**	**0**	**90.8**	**0.0**	**150.7**	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	5,573,000.00	2.00	4,407,900.00	2	5,823,000.00	2	5,091,616.00	4	9,499,516.00	100	87.4	100	0	
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	4,633,500.00	13.00	4,633,500.00	13	7,329,500.00	13	7,324,500.00	26	11,958,000.00	100	99.9	100	0	
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	125,000,000.00	1.00	99,789,000.00	1	225,000,000.00	-1	203,740,500.00	0	303,529,500.00	-100	90.6	-100	163	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)**	**100**	**103,390,410,978.00**	**100.00**	**576,334,500.00**	**100**	**618,000,700.00**	**0**	**558,228,822.00**	**100**	**1,134,563,322.00**	**0**	**90.3**	**0**	**0**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 6**
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase angka kelulusan SMP/MTS**	**100**	**103,390,410,978.00**	**85.00**	**576,334,500.00**	**100**	**618,000,700.00**	**0**	**558,228,822.00**	**85**	**1,134,563,322.00**	**0**	**90.3**	**0**	**0**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 6**
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana**		**932,326,200.00**	**1.00**	**576,334,500.00**	**1**	**618,000,700.00**	**0**	**558,228,822.00**	**1**	**1,134,563,322.00**	**0**	**90.3**	**0.0**	**0**	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah**		**932,326,200.00**	**100.00**	**576,334,500.00**	**100**	**618,000,700.00**	**0**	**558,228,822.00**	**100**	**1,134,563,322.00**	**0**	**90.3**	**0.0**	**0**	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan**		**932,326,200.00**	**100.00**	**576,334,500.00**	**100**	**618,000,700.00**	**0**	**558,228,822.00**	**100**	**1,134,563,322.00**	**0**	**90.3**	**0.0**	**0**	
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2	161,600,000.00	2.00	221,430,000.00	2	162,773,200.00	2	148,280,000.00	4	369,710,000.00	100	91.1	100	0	
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4	219,576,700.00	4.00	241,788,000.00	3	168,116,900.00	1	227,802,153.00	5	469,590,153.00	33.3	135.5	25	0	
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	140	14,560,000.00	140.00	14,560,000.00	140	15,400,000.00	140	7,900,000.00	280	22,460,000.00	100	51.3	100	0	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1	0	0.00	17,126,500.00	1	21,168,500.00	1	16,835,967.00	1	33,962,467.00	100	79.5	100	0.0	
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	6	136,740,500.00	6.00	15,184,000.00	5	66,262,000.00	5	50,171,506.00	11	65,355,506.00	100	75.7	83.3	0	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14	0	0.00	66,246,000.00	14	107,782,000.00	0	48,539,196.00	0	114,785,196.00	0	45	0	0.0	
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		0	0.00	0	2	76,498,100.00	2	58,700,000.00	2	58,700,000.00	100	76.7	0.0	0.0	
	1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**81.88**	**159,865,973,560.00**	**87.50**	**332,011,079.00**	**83.10**	**367,975,300.00**	**0**	**368,617,111.00**	**87.5**	**700,628,190.00**	**0**	**100.2**	**0**	**0**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 7**
	1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**1,944,200.00**	**100.00**	**1,737,500.00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**1,737,500.00**	**0**	**0**	**0.0**	**0.0**	
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	1,944,200.00	2.00	1,737,500.00	3	0	0	0	2	1,737,500.00	0	0	0	0.0	
	1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**93,407,200.00**	**100.00**	**75,340,000.00**	**100**	**25,407,200.00**	**0**	**25,395,000.00**	**100**	**100,735,000.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	40,300,000.00	2.00	33,860,000.00	2	0	2	0	4	33,860,000.00	100	0	100	0.0	
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60	53,107,200.00	60.00	41,480,000.00	60	25,407,200.00	60.00	25,395,000.00	120	66,875,000.00	100	100	100	0	
	1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**99,079,400.00**	**100.00**	**155,950,000.00**	**100**	**235,105,300.00**	**0**	**240,091,419.00**	**100**	**396,041,419.00**	**0**	**102.1**	**0.0**	**34.2**	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	7,986,500.00	1.00	25,550,000.00	1	7,854,000.00	1	7,685,000.00	2	33,235,000.00	100	97.8	100	96.2	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	28,958,400.00	3.00	67,830,000.00	3	200,700,400.00	3	211,832,919.00	6	279,662,919.00	100	105.5	100	88.6	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	16,352,000.00	3.00	20,457,500.00	1	16,347,900.00	1.00	11,704,950.00	4	32,162,450.00	100	71.6	100	0	
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	27,600,000.00	1.00	25,420,000.00	1	3,000,000.00	0.60	2,600,000.00	1.6	28,020,000.00	60	86.7	60	0	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	14,402,500.00	2.00	13,612,500.00	1	3,423,000.00	1	3,188,550.00	3	16,801,050.00	100	93.2	50	0	
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	64	3,780,000.00	64.00	3,080,000.00	64	3,780,000.00	64	3,080,000.00	128	6,160,000.00	100	81.5	100	13.2	
	1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**71,934,000.00**	**100.00**	**67,662,213.00**	**100**	**71,936,400.00**	**0**	**69,229,080.00**	**100**	**136,891,293.00**	**0**	**96.2**	**0.0**	**21.9**	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	598,000.00	1.00	582,400.00	1	600,000.00	1.00	592,900.00	2	1,175,300.00	100	98.8	100	0	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	71,336,000.00	36.00	67,079,813.00	36	71,336,400.00	36	68,636,180.00	72	135,715,993.00	100	96.2	100	22.1	
	1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**34,980,200.00**	**100.00**	**31,321,366.00**	**100**	**35,526,400.00**	**0**	**33,901,612.00**	**100**	**65,222,978.00**	**0**	**95.4**	**0.0**	**1.7**	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	0	0.00	0	2	9,278,400.00	2	7,766,872.00	2	7,766,872.00	100	83.7	100	0.0	
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86	25,501,000.00	86.00	24,615,000.00	86	26,248,000.00	86	26,134,740.00	172	50,749,740.00	100	99.6	100	0	
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)**	**100**	**103,390,410,978.00**	**85.00**	**626,080,250.00**	**100**	**580,595,300.00**	**0**	**484,424,932.00**	**85**	**1,110,505,182.00**	**0**	**83.4**	**0**	**0**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 7**
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs**	**100**	**103,390,410,978.00**	**100.00**	**626,080,250.00**	**100**	**580,595,300.00**	**0**	**484,424,932.00**	**100**	**1,110,505,182.00**	**0**	**83.4**	**0**	**0**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 7**
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana**		**1,468,215,000.00**	**1.00**	**626,080,250.00**	**1**	**580,595,300.00**	**0**	**484,424,932.00**	**1**	**1,110,505,182.00**	**0**	**83.4**	**0.0**	**0**	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah "**		**1,468,215,000.00**	**100.00**	**626,080,250.00**	**100**	**580,595,300.00**	**0**	**484,424,932.00**	**100**	**1,110,505,182.00**	**0**	**83.4**	**0.0**	**0**	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan "**		**1,468,215,000.00**	**100.00**	**626,080,250.00**	**100**	**580,595,300.00**	**0**	**484,424,932.00**	**100**	**1,110,505,182.00**	**0**	**83.4**	**0.0**	**0**	
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1	807,229,950.00	1.00	244,849,500.00	1	50,000,000.00	1	47,144,110.00	2	291,993,610.00	100	94.3	100	0	
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	0	0.00	55,472,100.00	7	180,070,500.00	7	229,247,190.00	7	284,719,290.00	100	127.3	700	0.0	
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	250	18,750,000.00	250.00	18,750,000.00	151	36,719,800.00	151	3,600,000.00	401	22,350,000.00	100	9.8	60.4	0	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1	39,121,000.00	420.00	34,426,350.00	1	37,944,000.00	1	27,096,004.00	421	61,522,354.00	100	71.4	100	0	
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5	0	0.00	111,657,300.00	5	109,339,000.00	5	94,423,483.00	5	206,080,783.00	100	86.4	100	0.0	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14	0	0.00	160,925,000.00	14	166,522,000.00	14	82,914,145.00	14	243,839,145.00	100	49.8	100	0.0	
	1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**81.88**	**159,865,973,560.00**	**87.50**	**443,345,223.00**	**83.10**	**212,248,200.00**	**0**	**176,616,185.00**	**87.5**	**619,961,408.00**	**0**	**83.2**	**0**	**0**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 8**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**6,018,000.00**	**100.00**	**5,972,790.00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**5,972,790.00**	**0**	**0**	**0.0**	**0.0**	
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	6,018,000.00	2.00	5,972,790.00	3	0	6	0	8	5,972,790.00	200	0	200	0.0	
	1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**94,669,000.00**	**100.00**	**92,279,000.00**	**100**	**25,407,200.00**	**0**	**25,400,000.00**	**100**	**117,679,000.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	42,800,000.00	2.00	34,800,000.00	2	0	2	0	4	34,800,000.00	100	0	100	0.0	
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60	51,869,000.00	60.00	57,479,000.00	60	25,407,200.00	60.00	25,400,000.00	120	82,879,000.00	100	100	100	0	
	1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**93,585,700.00**	**100.00**	**89,888,000.00**	**100**	**77,492,000.00**	**0**	**75,310,617.00**	**100**	**165,198,617.00**	**0**	**97.2**	**0.0**	**0.7**	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	10,281,900.00	0.00	10,250,000.00	1	10,185,000.00	1	10,154,280.00	1	20,404,280.00	100	99.7	100	0	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17	22,738,900.00	0.00	21,416,500.00	3	22,669,000.00	3	22,118,415.00	3	43,534,915.00	100	97.6	17.6	0	
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	34,076,400.00	0.00	21,839,000.00	1	21,730,000.00	1.00	21,467,622.00	1	43,306,622.00	100	98.8	50	0	
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	12,958,400.00	0.00	12,869,000.00	1	13,065,000.00	1.00	13,060,300.00	1	25,929,300.00	100	100	100	0	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	20,547,500.00	1.00	18,653,500.00	1	3,423,000.00	1	3,240,000.00	2	21,893,500.00	100	94.7	100	0	
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	5,220,000.00	36.00	4,860,000.00	36	6,420,000.00	36	5,270,000.00	72	10,130,000.00	100	82.1	100	12.6	
	1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**85,726,500.00**	**100.00**	**71,198,941.00**	**100**	**93,036,000.00**	**0**	**62,190,662.00**	**100**	**133,389,603.00**	**0**	**66.8**	**0.0**	**19.9**	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	931,500.00	2.00	935,000.00	1	966,000.00	1.00	963,600.00	3	1,898,600.00	100	99.8	100	0	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	84,795,000.00	36.00	70,263,941.00	36	92,070,000.00	36	61,227,062.00	72	131,491,003.00	100	66.5	100	20.1	
	1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**12,010,200.00**	**100.00**	**184,006,492.00**	**100**	**16,313,000.00**	**0**	**13,714,906.00**	**100**	**197,721,398.00**	**0**	**84.1**	**0.0**	**1.6**	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	6,000,200.00	2.00	4,930,139.00	2	6,024,800.00	2	5,214,906.00	4	10,145,045.00	100	86.6	100	3.2	
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	6,010,000.00	4.00	6,626,000.00	4	10,288,200.00	4	8,500,000.00	8	15,126,000.00	100	82.6	100	0	
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)**	**100**	**103,390,410,978.00**	**85.00**	**575,852,000.00**	**100**	**817,008,300.00**	**0**	**769,838,859.00**	**85**	**1,345,690,859.00**	**0**	**94.2**	**0**	**0**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 8**
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs**	**100**	**103,390,410,978.00**	**100.00**	**575,852,000.00**	**100**	**817,008,300.00**	**0**	**769,838,859.00**	**100**	**1,345,690,859.00**	**0**	**94.2**	**0**	**0**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 8**
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana**		**1,053,494,900.00**	**1.00**	**575,852,000.00**	**1**	**817,008,300.00**	**0**	**769,838,859.00**	**1**	**1,345,690,859.00**	**0**	**94.2**	**0.0**	**0**	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah**		**1,053,494,900.00**	**100.00**	**575,852,000.00**	**100**	**817,008,300.00**	**0**	**769,838,859.00**	**100**	**1,345,690,859.00**	**0**	**94.2**	**0.0**	**0**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan**		**1,053,494,900.00**	**100.00**	**575,852,000.00**	**100**	**817,008,300.00**	**0**	**769,838,859.00**	**100**	**1,345,690,859.00**	**0**	**94.2**	**0.0**	**0**	
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	0	0.00	0	1	227,000,000.00	0	278,898,362.00	0	278,898,362.00	0	122.9	0	0.0	
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1	13,730,400.00	1.00	98,490,000.00	1	111,538,300.00	1	111,403,180.00	2	209,893,180.00	100	99.9	100	0	
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		45,010,000.00	2.00	0	400	69,375,000.00	400	66,525,000.00	402	66,525,000.00	100	95.9	0.0	0	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1	0	0.00	62,172,000.00	1	62,836,000.00	1	48,457,108.00	1	110,629,108.00	100	77.1	100	0.0	
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5	0	0.00	141,780,000.00	5	136,835,000.00	0	135,935,007.00	0	277,715,007.00	0	99.3	0	0.0	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14	0	0.00	201,520,000.00	14	209,424,000.00	14	128,620,202.00	14	330,140,202.00	100	61.4	100	0.0	
	1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**81.88**	**159,865,973,560.00**	**87.50**	**233,774,168.00**	**83.10**	**191,070,250.00**	**0**	**177,654,945.00**	**87.5**	**411,429,113.00**	**0**	**93**	**0**	**0**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 9**
	1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**1,941,300.00**	**100.00**	**1,592,250.00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**1,592,250.00**	**0**	**0**	**0.0**	**0.0**	
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	1,941,300.00	2.00	1,592,250.00	3	0	3	0	5	1,592,250.00	100	0	100	0.0	
	1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**65,253,660.00**	**100.00**	**74,903,200.00**	**100**	**25,407,200.00**	**0**	**25,400,000.00**	**100**	**100,303,200.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	26,000,000.00	2.00	40,750,000.00	2	0	2	0	4	40,750,000.00	100	0	100	0.0	
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65	39,253,660.00	65.00	34,153,200.00	65	25,407,200.00	65.00	25,400,000.00	130	59,553,200.00	100	100	100	0	
	1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**90,995,600.00**	**100.00**	**82,809,710.00**	**100**	**80,784,550.00**	**0**	**77,200,531.00**	**100**	**160,010,241.00**	**0**	**95.6**	**0.0**	**4.8**	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	11,340,900.00	1.00	10,476,900.00	1	11,163,300.00	1	11,074,248.00	2	21,551,148.00	100	99.2	100	0	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	25,790,100.00	3.00	23,583,760.00	3	25,405,350.00	0	25,150,616.00	3	48,734,376.00	0	99	0	0	
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	20,970,400.00	4.00	17,769,300.00	1	20,322,900.00	0.25	17,813,107.00	4.25	35,582,407.00	25	87.7	25	14.5	
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	15,070,000.00	2.00	15,070,000.00	1	15,070,000.00	0.00	14,587,960.00	2	29,657,960.00	0	96.8	0	0	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	12,424,200.00	1.00	10,509,750.00	1	3,423,000.00	1	3,174,600.00	2	13,684,350.00	100	92.7	100	0	
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	5,400,000.00	12.00	5,400,000.00	12	5,400,000.00	6	5,400,000.00	18	10,800,000.00	50	100	50	25	
	1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**62,873,700.00**	**100.00**	**60,070,637.00**	**100**	**68,808,000.00**	**0**	**59,453,404.00**	**100**	**119,524,041.00**	**0**	**86.4**	**0.0**	**24.3**	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	600,300.00	1.00	585,000.00	1	600,000.00	1.00	592,900.00	2	1,177,900.00	100	98.8	100	0	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	62,273,400.00	36.00	59,485,637.00	36	68,208,000.00	36	58,860,504.00	72	118,346,141.00	100	86.3	100	24.6	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**15,158,000.00**	**100.00**	**14,398,371.00**	**100**	**16,070,500.00**	**0**	**15,601,010.00**	**100**	**29,999,381.00**	**0**	**97.1**	**0.0**	**2.8**	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	0	1.00	4,806,871.00	1	5,629,500.00	0.48	5,397,557.00	1.48	10,204,428.00	48	95.9	48	0.0	
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19	9,592,000.00	19.00	9,591,500.00	19	10,441,000.00	0	10,203,453.00	19	19,794,953.00	0	97.7	0	0	
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs**	**100**	**103,390,410,978.00**	**100.00**	**834,991,677.00**	**100**	**877,689,550.00**	**0**	**786,364,477.00**	**100**	**1,621,356,154.00**	**0**	**89.6**	**0**	**0.1**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 9**
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)**	**100**	**103,390,410,978.00**	**85.00**	**834,991,677.00**	**100**	**877,689,550.00**	**0**	**786,364,477.00**	**85**	**1,621,356,154.00**	**0**	**89.6**	**0**	**0.1**	**UPT Satuan Pendidikan SMPN 9**
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana**		**1,121,375,251.00**	**1.00**	**834,991,677.00**	**1**	**877,689,550.00**	**0**	**786,364,477.00**	**1**	**1,621,356,154.00**	**0**	**89.6**	**0.0**	**7.2**	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah**		**1,121,375,251.00**	**100.00**	**834,991,677.00**	**100**	**877,689,550.00**	**0**	**786,364,477.00**	**100**	**1,621,356,154.00**	**0**	**89.6**	**0.0**	**7.2**	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan**		**1,121,375,251.00**	**100.00**	**834,991,677.00**	**100**	**877,689,550.00**	**0**	**786,364,477.00**	**100**	**1,621,356,154.00**	**0**	**89.6**	**0.0**	**7.2**	
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	0	0.00	0	1	135,400,000.00	0	132,406,943.00	0	132,406,943.00	0	97.8	0	0.0	
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	0	0.00	0	1	158,280,000.00	0	155,063,456.00	0	155,063,456.00	0	98	0	0.0	
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2	38,784,000.00	3.00	58,584,000.00	2	40,662,800.00	2	40,500,000.00	5	99,084,000.00	100	99.6	100	104.4	
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3	70,002,300.00	3.00	203,142,400.00	3	60,301,750.00	1.5	130,215,970.00	4.5	333,358,370.00	50	215.9	50	44.8	
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	300	71,191,500.00	7.00	70,914,100.00	300	79,845,000.00	0	76,617,972.00	7	147,532,072.00	0	96	0	0	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1	0	1.00	40,750,730.00	1	49,828,000.00	0.5	38,883,975.00	1.5	79,634,705.00	50	78	50	0.0	
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5	0	5.00	129,333,900.00	5	143,658,000.00	0	111,407,992.00	5	240,741,892.00	0	77.6	0	0.0	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14	0	13.00	177,747,000.00	14	209,714,000.00	0	101,268,169.00	13	279,015,169.00	0	48.3	0	0.0	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**99.95**	**93.11**			
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	102	**Kesehatan**																
	1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**83.1**	**30.855.721.150,00**	**90.5**	**30.937.612.888,00**	**90.52**	**77.647.254.137,00**	**90.06**	**76.807.753.570,00**	**180.58**	**107.745.366.458,00**	**99.5**	**98.9**	**108.4**	**66.6**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**	**100**	**41.418.502,00**	**100**	**38.801.700,00**	**100**	**59.185.524,00**	**100**	**58.856.500,00**	**200**	**97.658.200,00**	**100**	**99.4**	**100**	**2.7**	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52	21.589.102,00	13	19.472.500,00	13	20.306.600,00	13	20.306.600,00	26	39.779.100,00	100	100	25	0	
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44	19.829.400,00	11	19.329.200,00	11	38.878.924,00	11	38.549.900,00	22	57.879.100,00	100	99.2	25	5.6	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**	**100**	**23.463.955.410,00**	**100**	**27.301.567.187,00**	**100**	**72.739.978.718,00**	**100**	**72.124.332.400,00**	**200**	**99.425.899.587,00**	**100**	**99.2**	**100**	**85.1**	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	984	23.452.123.410,00	293	27.289.787.487,00	902	72.736.953.718,00	902	72.121.417.400,00	1195	99.411.204.887,00	100	99.2	91.7	85.1	
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	11.832.000,00	4	11.779.700,00	4	3.025.000,00	4	2.915.000,00	8	14.694.700,00	100	96.4	25	0	
	1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**	**100**	**198.252.529,00**	**100**	**281.962.929,00**	**100**	**198.279.100,00**	**100**	**189.577.200,00**	**200**	**471.540.129,00**	**100**	**95.6**	**100**	**0**	
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	84.800.000,00	1	74.482.500,00	1	23.076.000,00	1	22.877.100,00	2	97.359.600,00	100	99.1	25	0	
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8	10.660.000,00	2	10.660.000,00	2	7.839.000,00	2	7.579.000,00	4	18.239.000,00	100	96.7	25	0	
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	260	102.792.529,00	65	196.820.429,00	65	167.364.100,00	65	159.121.100,00	130	355.941.529,00	100	95.1	25	0	
	1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**	**100**	**452.400.950,00**	**100**	**530.834.501,00**	**100**	**445.051.719,00**	**100**	**443.104.179,00**	**200**	**973.938.680,00**	**100**	**99.6**	**100**	**4.8**	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	11.068.554,00	1	14.533.800,00	1	10.194.400,00	1	10.194.400,00	2	24.728.200,00	100	100	25	58.2	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	39.078.366,00	4	33.759.600,00	4	58.782.619,00	4	58.358.694,00	8	92.118.294,00	100	99.3	25	0	
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	18.539.648,00	5	21.824.100,00	6	30.339.200,00	6	30.338.500,00	11	52.162.600,00	100	100	30	0	
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	96	36.285.000,00	24	33.982.500,00	24	42.450.000,00	24	42.440.000,00	48	76.422.500,00	100	100	25	0	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	61.509.475,00	2	61.509.200,00	2	52.019.600,00	2	52.019.600,00	4	113.528.800,00	100	100	25	0	
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	192	9.180.000,00	48	9.180.000,00	48	9.180.000,00	48	9.180.000,00	96	18.360.000,00	100	100	25	16.7	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800	216.739.907,00	200	286.913.801,00	100	115.000.000,00	100	114.784.425,00	300	401.698.226,00	100	99.8	12.5	6.2	
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	60.000.000,00	1	69.131.500,00	1	127.085.900,00	1	125.788.560,00	2	194.920.060,00	100	99	25	0	
	1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan**	**80**	**77.661.290,00**	**80**	**110.178.000,00**	**80**	**710.147.450,00**	**80**	**691.083.735,00**	**160**	**801.261.735,00**	**100**	**97.3**	**100**	**0**	
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0,00	0	0,00	121	274.294.400,00	121	259.310.310,00	121	259.310.310,00	100	94.5	0	0	
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55	77.661.290,00	5	110.178.000,00	80	435.853.050,00	80	431.773.425,00	85	541.951.425,00	100	99.1	145.5	0	
	1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**	**100**	**2.105.309.501,00**	**100**	**2.136.122.637,00**	**100**	**2.984.972.026,00**	**100**	**2.794.854.789,00**	**200**	**4.930.977.426,00**	**100**	**93.6**	**100**	**25.9**	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108	300.571.100,00	36	239.457.653,00	36	424.643.677,00	36	301.488.000,00	72	540.945.653,00	100	71	33.3	19	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52	1.804.738.401,00	13	1.896.664.984,00	13	2.560.328.349,00	23	2.493.366.789,00	36	4.390.031.773,00	176.9	97.4	44.2	27	
	1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**	**100**	**452.405.300,00**	**100**	**538.145.934,00**	**100**	**509.639.600,00**	**100**	**505.944.767,00**	**200**	**1.044.090.701,00**	**100**	**99.3**	**100**	**5.2**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	92	253.784.800,00	23	201.924.337,00	23	230.345.100,00	23	230.296.143,00	46	432.220.480,00	100	100	25	8	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	488	48.620.500,00	170	88.880.500,00	208	109.294.500,00	208	109.294.500,00	378	198.175.000,00	100	100	42.6	6.3	
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	150.000.000,00	1	247.341.097,00	1	170.000.000,00	1	166.354.124,00	2	413.695.221,00	100	97.9	25	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sarana prasarana dinas tersedia dengan cukup																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Terdapat 3 unsur terendah yaitu Prosedur (86,5), Waktu Pelayanan (86) dan Persyaratan (88,5)																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Dukungan anggaran untuk pemeliharaan sarana prasarana kantor 2. Peningkatan kemudahan prosedur dan persyaratan, dan kecepatan waktu pelayanan melalui evaluasi berkala terhadap pelayanan publik Dinas Kesehatan di MPP (perizinan dan jaminan kesehatan)																		
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan**	**29**	**68.284.811.972,00**	**77.8**	**49.135.287.035,00**	**100**	**53.098.169.573,00**	**100**	**53.300.468.080,50**	**177.78**	**102.435.755.115,50**	**100**	**100.4**	**344.8**	**15.2**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)**	**100**	**68.284.811.972,00**	**100**	**49.135.287.035,00**	**100**	**53.098.169.573,00**	**100**	**53.300.468.080,50**	**200**	**102.435.755.115,50**	**100**	**100.4**	**100**	**15.2**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**	**68.284.811.972,00**	**100**	**49.135.287.035,00**	**100**	**53.098.169.573,00**	**100**	**53.300.468.080,50**	**200**	**102.435.755.115,50**	**100**	**100.4**	**100**	**15.2**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)**	**100**	**68.284.811.972,00**	**99**	**49.135.287.035,00**	**100**	**53.098.169.573,00**	**100**	**53.300.468.080,50**	**198.98**	**102.435.755.115,50**	**100**	**100.4**	**100**	**15.2**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)**	**73**	**68.284.811.972,00**	**54.1**	**49.135.287.035,00**	**100**	**53.098.169.573,00**	**100**	**53.300.468.080,50**	**154.13**	**102.435.755.115,50**	**100**	**100.4**	**137**	**15.2**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina**	**100**	**68.284.811.972,00**	**100**	**49.135.287.035,00**	**77.78**	**53.098.169.573,00**	**43.59**	**53.300.468.080,50**	**143.59**	**102.435.755.115,50**	**56**	**100.4**	**43.6**	**15.2**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani**	**100**	**68.284.811.972,00**	**99.5**	**49.135.287.035,00**	**100**	**53.098.169.573,00**	**100**	**53.300.468.080,50**	**199.5**	**102.435.755.115,50**	**100**	**100.4**	**100**	**15.2**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)**	**100**	**68.284.811.972,00**	**100**	**49.135.287.035,00**	**100**	**53.098.169.573,00**	**100**	**53.300.468.080,50**	**200**	**102.435.755.115,50**	**100**	**100.4**	**100**	**15.2**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)**	**100**	**68.284.811.972,00**	**100**	**49.135.287.035,00**	**100**	**53.098.169.573,00**	**100**	**53.300.468.080,50**	**200**	**102.435.755.115,50**	**100**	**100.4**	**100**	**15.2**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)**	**100**	**68.284.811.972,00**	**99.7**	**49.135.287.035,00**	**100**	**53.098.169.573,00**	**100**	**53.300.468.080,50**	**199.67**	**102.435.755.115,50**	**100**	**100.4**	**100**	**15.2**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)**	**100**	**68.284.811.972,00**	**99**	**49.135.287.035,00**	**100**	**53.098.169.573,00**	**100**	**53.300.468.080,50**	**198.97**	**102.435.755.115,50**	**100**	**100.4**	**100**	**15.2**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)**	**100**	**68.284.811.972,00**	**98.8**	**49.135.287.035,00**	**100**	**53.098.169.573,00**	**100**	**53.300.468.080,50**	**198.8**	**102.435.755.115,50**	**100**	**100.4**	**100**	**15.2**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan**	**100**	**68.284.811.972,00**	**100**	**49.135.287.035,00**	**100**	**53.098.169.573,00**	**100**	**53.300.468.080,50**	**200**	**102.435.755.115,50**	**100**	**100.4**	**100**	**15.2**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)**	**100**	**68.284.811.972,00**	**100**	**49.135.287.035,00**	**100**	**53.098.169.573,00**	**100**	**53.300.468.080,50**	**200**	**102.435.755.115,50**	**100**	**100.4**	**100**	**15.2**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)**	**100**	**68.284.811.972,00**	**100**	**49.135.287.035,00**	**100**	**53.098.169.573,00**	**100**	**53.300.468.080,50**	**200**	**102.435.755.115,50**	**100**	**100.4**	**100**	**15.2**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)**	**95.2**	**68.284.811.972,00**	**100**	**49.135.287.035,00**	**100**	**53.098.169.573,00**	**100**	**53.300.468.080,50**	**200**	**102.435.755.115,50**	**100**	**100.4**	**105**	**15.2**	**Dinas Kesehatan**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)**	**100**	**68.284.811.972,00**	**100**	**49.135.287.035,00**	**100**	**53.098.169.573,00**	**100**	**53.300.468.080,50**	**200**	**102.435.755.115,50**	**100**	**100.4**	**100**	**15.2**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan**	**100**	**68.284.811.972,00**	**100**	**49.135.287.035,00**	**70**	**53.098.169.573,00**	**84.62**	**53.300.468.080,50**	**184.62**	**102.435.755.115,50**	**120.9**	**100.4**	**84.6**	**15.2**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)**	**100**	**68.284.811.972,00**	**100**	**49.135.287.035,00**	**100**	**53.098.169.573,00**	**100**	**53.300.468.080,50**	**200**	**102.435.755.115,50**	**100**	**100.4**	**100**	**15.2**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia**	**100**	**12.973.729.974,00**	**100**	**6.034.123.917,00**	**100**	**5.780.969.060,00**	**100**	**6.873.454.960,00**	**200**	**12.907.578.877,00**	**100**	**118.9**	**100**	**4.9**	
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar**	**100**	**12.973.729.974,00**	**100**	**6.034.123.917,00**	**100**	**5.780.969.060,00**	**100**	**6.873.454.960,00**	**200**	**12.907.578.877,00**	**100**	**118.9**	**100**	**4.9**	
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	7	3.509.199.138,00	1	3.187.615.650,00	1	500.000.000,00	1	498.500.000,00	2	3.686.115.650,00	100	99.7	14.3	0	
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3	1.025.484.000,00	1	659.041.292,00	4	854.247.154,00	4	811.894.613,00	5	1.470.935.905,00	100	95	133.3	0	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	214	4.290.257.000,00	6	5.927.400,00	7	468.439.000,00	7	646.568.470,00	13	652.495.870,00	100	138	3.3	4.6	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1138	86.210.664,00	60	142.024.120,00	300	479.192.000,00	300	536.227.230,00	360	678.251.350,00	100	111.9	26.4	82.6	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	19	3.567.801.841,00	6	1.576.589.695,00	5	3.473.190.906,00	5	4.368.317.367,00	11	5.944.907.062,00	100	125.8	26.3	10.5	
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	16580	2.800.000,00	2841	1.060.000,00	2841	500.000,00	2841	6.547.280,00	5682	7.607.280,00	100	1309.5	17.1	0	
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	36	13.877.331,00	12	13.865.000,00	12	5.400.000,00	9	5.400.000,00	21	19.265.000,00	75	100	25	0	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi**	**100**	**40.584.593.427,00**	**100**	**42.890.823.558,00**	**100**	**46.905.681.983,00**	**100**	**46.023.144.864,50**	**200**	**88.913.968.422,50**	**100**	**98.1**	**100**	**24**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan**	**100**	**40.584.593.427,00**	**100**	**42.890.823.558,00**	**100**	**46.905.681.983,00**	**100**	**46.023.144.864,50**	**200**	**88.913.968.422,50**	**100**	**98.1**	**100**	**24**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif**	**100**	**40.584.593.427,00**	**100**	**42.890.823.558,00**	**3**	**46.905.681.983,00**	**3**	**46.023.144.864,50**	**103**	**88.913.968.422,50**	**100**	**98.1**	**3**	**24**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pos UKK yang terbina**	**55**	**40.584.593.427,00**	**100**	**42.890.823.558,00**	**6**	**46.905.681.983,00**	**8**	**46.023.144.864,50**	**108**	**88.913.968.422,50**	**133.3**	**98.1**	**14.5**	**24**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina**	**100**	**40.584.593.427,00**	**100**	**42.890.823.558,00**	**9**	**46.905.681.983,00**	**9**	**46.023.144.864,50**	**109**	**88.913.968.422,50**	**100**	**98.1**	**9**	**24**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentae program prioritas yang dipromosikan**	**100**	**40.584.593.427,00**	**100**	**42.890.823.558,00**	**100**	**46.905.681.983,00**	**100**	**46.023.144.864,50**	**200**	**88.913.968.422,50**	**100**	**98.1**	**100**	**24**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik**	**20**	**40.584.593.427,00**	**66.7**	**42.890.823.558,00**	**100**	**46.905.681.983,00**	**100**	**46.023.144.864,50**	**166.67**	**88.913.968.422,50**	**100**	**98.1**	**500**	**24**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar lengkap (IDL)**	**100**	**40.584.593.427,00**	**100**	**42.890.823.558,00**	**100**	**46.905.681.983,00**	**100**	**46.023.144.864,50**	**200**	**88.913.968.422,50**	**100**	**98.1**	**100**	**24**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai standar**	**100**	**40.584.593.427,00**	**100**	**42.890.823.558,00**	**100**	**46.905.681.983,00**	**100**	**46.023.144.864,50**	**200**	**88.913.968.422,50**	**100**	**98.1**	**100**	**24**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran	100	40.584.593.427,00	100	42.890.823.558,00	66.67	46.905.681.983,00	36	46.023.144.864,50	136	88.913.968.422,50	54	98.1	36	24	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	9	40.584.593.427,00	14	42.890.823.558,00	75	46.905.681.983,00	75	46.023.144.864,50	89	88.913.968.422,50	100	98.1	833.3	24	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	100	40.584.593.427,00	100	42.890.823.558,00	61.9	46.905.681.983,00	100	46.023.144.864,50	200	88.913.968.422,50	161.6	98.1	100	24	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	66.67	40.584.593.427,00	47.6	42.890.823.558,00	14.3	46.905.681.983,00	14.3	46.023.144.864,50	61.9	88.913.968.422,50	100	98.1	21.4	24	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	5	40.584.593.427,00	11.2	42.890.823.558,00	100	46.905.681.983,00	100	46.023.144.864,50	111.15	88.913.968.422,50	100	98.1	2000	24	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	100	40.584.593.427,00	100	42.890.823.558,00	100	46.905.681.983,00	100	46.023.144.864,50	200	88.913.968.422,50	100	98.1	100	24	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyehat tradisional yang berizin	100	40.584.593.427,00	100	42.890.823.558,00	20.42	46.905.681.983,00	25.61	46.023.144.864,50	125.61	88.913.968.422,50	125.4	98.1	25.6	24	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	100	40.584.593.427,00	100	42.890.823.558,00	99.09	46.905.681.983,00	100	46.023.144.864,50	200	88.913.968.422,50	100.9	98.1	100	24	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	100	40.584.593.427,00	100	42.890.823.558,00	100	46.905.681.983,00	100	46.023.144.864,50	200	88.913.968.422,50	100	98.1	100	24	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	100	40.584.593.427,00	100	42.890.823.558,00	100	46.905.681.983,00	100	46.023.144.864,50	200	88.913.968.422,50	100	98.1	100	24	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	100	40.584.593.427,00	100	42.890.823.558,00	100	46.905.681.983,00	100	46.023.144.864,50	200	88.913.968.422,50	100	98.1	100	24	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	100	40.584.593.427,00	100	42.890.823.558,00	100	46.905.681.983,00	100	46.023.144.864,50	200	88.913.968.422,50	100	98.1	100	24	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	91.5	40.584.593.427,00	100	42.890.823.558,00	100	46.905.681.983,00	100	46.023.144.864,50	200	88.913.968.422,50	100	98.1	109.3	24	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	100	40.584.593.427,00	100	42.890.823.558,00	100	46.905.681.983,00	100	46.023.144.864,50	200	88.913.968.422,50	100	98.1	100	24	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	79	40.584.593.427,00	99.1	42.890.823.558,00	100	46.905.681.983,00	100	46.023.144.864,50	199.09	88.913.968.422,50	100	98.1	126.6	24	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	100	40.584.593.427,00	100	42.890.823.558,00	100	46.905.681.983,00	100	46.023.144.864,50	200	88.913.968.422,50	100	98.1	100	24	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	100	40.584.593.427,00	100	42.890.823.558,00	100	46.905.681.983,00	100	46.023.144.864,50	200	88.913.968.422,50	100	98.1	100	24	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	3	40.584.593.427,00	3	42.890.823.558,00	100	46.905.681.983,00	100	46.023.144.864,50	103	88.913.968.422,50	100	98.1	3333.3	24	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	14.3	40.584.593.427,00	14.3	42.890.823.558,00	100	46.905.681.983,00	100	46.023.144.864,50	114.3	88.913.968.422,50	100	98.1	699.3	24	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	70	40.584.593.427,00	100	42.890.823.558,00	100	46.905.681.983,00	100	46.023.144.864,50	200	88.913.968.422,50	100	98.1	142.9	24	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	12	40.584.593.427,00	6	42.890.823.558,00	100	46.905.681.983,00	100	46.023.144.864,50	106	88.913.968.422,50	100	98.1	833.3	24	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan		40.584.593.427,00	0	42.890.823.558,00	100	46.905.681.983,00	99.54	46.023.144.864,50	99.54	88.913.968.422,50	99.5	98.1	0	24	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8893	277.423.717,00	2311	167.991.200,00	2326	75.644.356,00	2326	184.226.700,00	4637	352.217.900,00	100	243.5	26.2	1.9	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8488	148.696.600,00	2304	10.760.800,00	2326	177.050.000,00	2326	190.522.264,00	4630	201.283.064,00	100	107.6	27.4	21.8	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8084	9.950.000,00	2169	25.600.000,00	2167	148.290.000,00	2167	158.565.845,00	4336	184.165.845,00	100	106.9	26.8	188	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32930	83.068.492,00	8665	5.046.000,00	8674	44.031.000,00	8674	78.140.700,00	17339	83.186.700,00	100	177.5	26.3	0	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70285	38.898.000,00	20014	16.737.800,00	19973	78.154.765,00	19973	108.948.215,00	39987	125.686.015,00	100	139.4	28.4	26.4	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	370607	112.581.010,00	1E+05	26.811.800,00	100742	213.089.860,00	1E+05	216.805.900,00	200890	243.617.700,00	100	101.7	27.2	0	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	96494	28.481.300,00	21692	6.091.300,00	22714	70.504.500,00	22714	93.635.086,00	44406	99.726.386,00	100	132.8	23.5	25.2	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	190093	10.017.900,00	49633	10.017.900,00	9876	14.816.600,00	9876	21.900.380,00	59509	31.918.280,00	100	147.8	5.2	0	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17281	1.741.800,00	4061	297.323.800,00	4321	41.456.000,00	4321	85.934.500,00	8382	383.258.300,00	100	207.3	25	0	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1528	38.540.000,00	291	33.500.000,00	297	70.747.900,00	297	135.305.458,00	588	168.805.458,00	100	191.3	19.4	21	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11400	22.377.200,00	2854	314.722.450,00	2829	244.111.084,00	2829	346.897.413,00	5683	661.619.863,00	100	142.1	24.8	21.7	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	13691	90.231.100,00	3410	82.789.492,00	3434	128.935.600,00	3434	133.895.710,00	6844	216.685.202,00	100	103.8	25.1	5.3	
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4	43.439.000,00	2	200.706.800,00	1	10.019.000,00	1	10.019.000,00	3	210.725.800,00	100	100	25	21.6	
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4	2.100.000,00	1	2.100.000,00	1	3.300.000,00	1	3.300.000,00	2	5.400.000,00	100	100	25	0	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20	278.461.692,00	5	125.792.000,00	5	145.680.400,00	5	1.164.209.824,00	10	1.290.001.824,00	100	799.2	25	30.3	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9	125.869.063,00	2	14.914.800,00	3	47.409.900,00	3	85.072.800,00	5	99.987.600,00	100	179.4	33.3	21.2	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6	130.990.650,00	1	137.718.000,00	2	471.438.000,00	2	450.073.744,00	3	587.791.744,00	100	95.5	33.3	10.8	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12	39.854.462,00	3	263.057.700,00	3	285.536.292,00	3	322.531.100,00	6	585.588.800,00	100	113	25	0	
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12	2.864.000,00	3	1.045.000,00	3	20.120.000,00	3	19.931.200,00	6	20.976.200,00	100	99.1	25	206.9	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	28	43.258.600,00	7	54.217.600,00	7	67.568.400,00	7	208.431.882,00	14	262.649.482,00	100	308.5	25	52.7	
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40	3.225.500,00	6	19.805.540,00	10	14.517.561,00	4	13.143.000,00	10	32.948.540,00	40	90.5	10	0	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	48	183.505.900,00	12	587.326.100,00	12	503.490.750,00	12	753.792.531,00	24	1.341.118.631,00	100	149.7	25	6.2	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	78	30.058.721.948,00	13	28.573.629.986,00	18	32.702.212.048,00	18	31.346.592.700,00	31	59.920.222.686,00	100	95.9	23.1	25.8	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2020	56.700.000,00	40	24.611.600,00	163	279.275.000,00	143	241.792.500,00	183	266.404.100,00	87.7	86.6	7.1	0	
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	37	47.998.949,00	9	40.101.000,00	10	199.810.300,00	10	193.601.724,00	19	233.702.724,00	100	96.9	27	0	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	192	8.239.176.000,00	48	9.284.238.161,00	48	9.657.385.816,00	48	8.147.522.064,50	96	17.431.760.225,50	100	84.4	25	20.3	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	29	218.365.238,00	7	267.260.944,00	8	492.706.180,00	8	467.417.043,00	15	734.677.987,00	100	94.9	27.6	0.9	
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	52	11.267.516,00	13	46.497.200,00	13	429.542.715,00	13	381.922.088,00	26	428.419.288,00	100	88.9	25	14.6	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24	91.990.730,00	6	28.989.800,00	8	38.392.500,00	8	38.381.300,00	14	67.371.100,00	100	100	33.3	3.4	
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4	12.733.500,00	1	12.733.500,00	1	19.486.556,00	1	19.486.400,00	2	32.219.900,00	100	100	25	5.5	
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	4	36.225.500,00	1	2.073.003.451,00	1	129.068.900,00	1	112.120.650,00	2	2.185.124.101,00	100	86.9	25	12	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	36	0,00	12	13.126.834,00	12	5.616.000,00	12	5.616.000,00	24	18.742.834,00	100	100	33.3	0	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	24	0,00	12	122.555.000,00	12	76.274.000,00	12	80.003.993,00	24	202.558.993,00	100	104.9	50	0	
	1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi**	**100**	**26.536.816,00**	**100**	**173.611.200,00**	**100**	**290.500.000,00**	**100**	**286.345.000,00**	**200**	**459.956.200,00**	**100**	**98.6**	**100**	**0**	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12	26.536.816,00	3	173.611.200,00	3	290.500.000,00	3	286.345.000,00	6	459.956.200,00	100	98.6	25	0	
	1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin yang dibina**	**100**	**170.345.370,00**	**100**	**36.728.360,00**	**100**	**121.018.530,00**	**100**	**117.523.256,00**	**200**	**154.251.616,00**	**100**	**97.1**	**100**	**0**	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	4	168.550.370,00	1	32.108.360,00	1	8.124.530,00	1	5.085.000,00	2	37.193.360,00	100	62.6	25	0	
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	8	1.795.000,00	2	4.620.000,00	5	112.894.000,00	5	112.438.256,00	7	117.058.256,00	100	99.6	62.5	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Dukungan lintas sektor dalam penemuan dan pelayanan sasaran																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengontrolkan status kesehatannya di fasilitas pelayanan kesehatan. Capaian SPM sampai November 2025.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Dukungan anggaran dalam peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan 2. Optimalisasi penjaringan sasaran dan memudahkan akses kesehatan. Perhitungan berjalan.																		
	1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar**	**100**	**1.356.625.500,00**	**100**	**671.706.400,00**	**100**	**711.361.400,00**	**100**	**684.566.914,00**	**200**	**1.356.273.314,00**	**100**	**96.2**	**100**	**8.6**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase tenaga kesehatan yang diberikan izin praktik tenaga kesehatan**	**100**	**22.573.100,00**	**100**	**20.248.100,00**	**100**	**24.004.200,00**	**100**	**21.240.998,00**	**200**	**41.489.098,00**	**100**	**88.5**	**100**	**9.7**	
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1770	22.573.100,00	270	20.248.100,00	500	24.004.200,00	500	21.240.998,00	770	41.489.098,00	100	88.5	28.2	9.7	
	1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibina**	**100**	**65.188.000,00**	**100**	**202.357.800,00**	**100**	**130.454.200,00**	**100**	**124.605.230,00**	**200**	**326.963.030,00**	**100**	**95.5**	**100**	**18.7**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1500	19.399.500,00	39	19.270.000,00	500	21.629.000,00	500	20.520.000,00	539	39.790.000,00	100	94.9	33.3	37.4	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10	45.788.500,00	4	183.087.800,00	2	108.825.200,00	2	104.085.230,00	6	287.173.030,00	100	95.6	20	10.8	
	1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya**	**21**	**486.460.000,00**	**18**	**449.100.500,00**	**19**	**556.903.000,00**	**19**	**538.720.686,00**	**37**	**987.821.186,00**	**100**	**96.7**	**90.5**	**21**	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	224	486.460.000,00	68	449.100.500,00	68	556.903.000,00	68	538.720.686,00	136	987.821.186,00	100	96.7	30.4	21	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tugas belajar, pelatihan dan workshop yang dapat menunjang peningkatan kompetensi SDMK baik mandiri atau dibiayai pemerintah																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kuota dan jadwal pelatihan dan workshop sesuai pihak penyelenggara																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Dukungan pembiayaan pelatihan dan workshop 2. Koordinasi dengan pihak penyelenggara untuk menentukan jenis pelatihan, jadwal dan kuota																		
	1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan**	**90**	**457.261.600,00**	**100**	**399.725.910,00**	**92.67**	**319.434.225,00**	**86.85**	**311.787.144,00**	**186.85**	**711.513.054,00**	**93.7**	**97.6**	**96.5**	**5**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar**	**100**	**457.261.600,00**	**92**	**399.725.910,00**	**100**	**319.434.225,00**	**100**	**311.787.144,00**	**192.03**	**711.513.054,00**	**100**	**97.6**	**100**	**5**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) berizin yang dibina**	**100**	**104.462.737,00**	**100**	**19.924.100,00**	**100**	**56.552.700,00**	**100**	**55.967.164,00**	**200**	**75.891.264,00**	**100**	**99**	**100**	**5.6**	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20	104.462.737,00	5	19.924.100,00	5	56.552.700,00	5	55.967.164,00	10	75.891.264,00	100	99	25	5.6	
	1.02.04.2.02	**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	**Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang dibina**	**100**	**6.500.536,00**	**100**	**6.500.400,00**	**100**	**4.500.000,00**	**100**	**4.500.000,00**	**200**	**11.000.400,00**	**100**	**100**	**100**	**0**	
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	4	6.500.536,00	1	6.500.400,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	2	11.000.400,00	100	100	25	0	
	1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT yang berizin**	**95**	**155.050.000,00**	**92**	**158.237.600,00**	**94**	**177.524.000,00**	**89.79**	**171.774.980,00**	**181.82**	**330.012.580,00**	**95.5**	**96.8**	**94.5**	**0**	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	8	155.050.000,00	2	158.237.600,00	2	177.524.000,00	2	171.774.980,00	4	330.012.580,00	100	96.8	25	0	
	1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentase tempat pengelolaan makanan (jasa boga,rumah makan, depot air minum) memenuhi syarat kesehatan**	**81**	**636.659,00**	**92**	**632.500,00**	**80**	**40.970.400,00**	**80.98**	**40.720.000,00**	**173.01**	**41.352.500,00**	**101.2**	**99.4**	**100**	**1772.4**	
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3	636.659,00	1	632.500,00	1	40.970.400,00	1	40.720.000,00	2	41.352.500,00	100	99.4	33.3	1772.4	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.02.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Persentase makanan jajanan/kantin dan sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan**	**83**	**598.613,00**	**92**	**594.000,00**	**82**	**19.148.950,00**	**89.78**	**19.148.500,00**	**181.81**	**19.742.500,00**	**109.5**	**100**	**108.2**	**982.3**	
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	3	598.613,00	1	594.000,00	1	19.148.950,00	1	19.148.500,00	2	19.742.500,00	100	100	33.3	982.3	
	1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase IRTP (Indutri Rumah Tangga Pangan) yang dibina dan tersertifikasi**	**95**	**155.042.000,00**	**92**	**213.837.310,00**	**94**	**20.738.175,00**	**89.79**	**19.676.500,00**	**181.82**	**233.513.810,00**	**95.5**	**94.9**	**94.5**	**0**	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	190	155.042.000,00	63	213.837.310,00	50	20.738.175,00	50	19.676.500,00	113	233.513.810,00	100	94.9	26.3	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya anggaran DAK NF dan DAK NF BPOM. Adanya sertifikasi SLHS pada SPPG menambah sasaran pengawasan sarana pengolahan pangan yang diperiksa.																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Update data pemenuhan rekomendasi oleh TPP yang belum memenuhi syarat IKL , menjaring Pengusaha IRTP yang belum memenuhi Komitmen Penerbitan ijin edar IRTP melalui aplikasi PIRT Online																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Monitoring dan Evaluasi dengan Sanitarian di masing-masing wilayah Kecamatan untuk kemajuan status TPP di Wilayah; Koordinasi dan Kolaborasi dalam rangka monitoring Pengusaha IRTP bersama dengan Balai POM di Kediri																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Dukungan anggaran untuk meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan sediaan farmasi dan makanan minuman																		
	1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri**	**85.71**	**2.957.968.100,00**	**85.7**	**2.486.772.832,00**	**85.71**	**2.751.161.400,00**	**85.71**	**2.666.664.005,00**	**171.42**	**5.153.436.837,00**	**100**	**96.9**	**100**	**0.3**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) yang dibina**	**3**	**2.670.588.096,00**	**5**	**2.348.338.532,00**	**3**	**2.458.105.600,00**	**3**	**2.345.290.905,00**	**8**	**4.693.629.437,00**	**100**	**95.4**	**100**	**0**	
	1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Posyandu Strata Purnama Mandiri**	**56**	**2.670.588.096,00**	**60.2**	**2.348.338.532,00**	**100**	**2.458.105.600,00**	**100**	**2.345.290.905,00**	**160.2**	**4.693.629.437,00**	**100**	**95.4**	**178.6**	**0**	
	1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase rumah tangga sehat**	**60**	**2.670.588.096,00**	**100**	**2.348.338.532,00**	**60.2**	**2.458.105.600,00**	**60.2**	**2.345.290.905,00**	**160.2**	**4.693.629.437,00**	**100**	**95.4**	**100.3**	**0**	
	1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase TTU (Tempat-tempat Umum) ber-PHBS**	**95.8**	**2.670.588.096,00**	**100**	**2.348.338.532,00**	**100**	**2.458.105.600,00**	**100**	**2.345.290.905,00**	**200**	**4.693.629.437,00**	**100**	**95.4**	**104.4**	**0**	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	32	2.670.588.096,00	8	2.348.338.532,00	8	2.458.105.600,00	8	2.345.290.905,00	16	4.693.629.437,00	100	95.4	25	0	
	1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya**	**1**	**160.617.774,00**	**1**	**138.434.300,00**	**1**	**293.055.800,00**	**1**	**321.373.100,00**	**2**	**459.807.400,00**	**100**	**109.7**	**100**	**6.4**	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8	160.617.774,00	2	138.434.300,00	2	293.055.800,00	2	321.373.100,00	4	459.807.400,00	100	109.7	25	6.4	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Dukungan lintas sektor terkait dan kader posyandu																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kompetensi teknis kader posyandu perlu ditingkatkan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pelatihan dan pembinaan kader posyandu																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Dukungan anggaran untuk pembinaan posyandu																		
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)**	**29**	**68,284,811,972.00**	**77.78**	**1,230,576,320.00**		**1,990,769,856.00**	**0**	**1,808,277,260.00**	**77.78**	**3,038,853,580.00**	**0**	**90.8**	**0**	**0.5**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan**	**100**	**68,284,811,972.00**	**100.00**	**1,230,576,320.00**		**1,990,769,856.00**	**0**	**1,808,277,260.00**	**100**	**3,038,853,580.00**	**0**	**90.8**	**0**	**0.5**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100	68,284,811,972.00	100.00	1,230,576,320.00	100	1,990,769,856.00	0	1,808,277,260.00	100	3,038,853,580.00	0	90.8	0	0.5	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100	68,284,811,972.00	98.98	1,230,576,320.00		1,990,769,856.00	0	1,808,277,260.00	98.98	3,038,853,580.00	0	90.8	0	0.5	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)	73	68,284,811,972.00	54.13	1,230,576,320.00	100	1,990,769,856.00	0	1,808,277,260.00	54.13	3,038,853,580.00	0	90.8	0	0.5	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100	68,284,811,972.00	100.00	1,230,576,320.00		1,990,769,856.00	0	1,808,277,260.00	100	3,038,853,580.00	0	90.8	0	0.5	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100	68,284,811,972.00	99.50	1,230,576,320.00		1,990,769,856.00	0	1,808,277,260.00	99.5	3,038,853,580.00	0	90.8	0	0.5	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	100	68,284,811,972.00	100.00	1,230,576,320.00	70	1,990,769,856.00	0	1,808,277,260.00	100	3,038,853,580.00	0	90.8	0	0.5	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100	68,284,811,972.00	100.00	1,230,576,320.00		1,990,769,856.00	0	1,808,277,260.00	100	3,038,853,580.00	0	90.8	0	0.5	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	100	68,284,811,972.00	100.00	1,230,576,320.00		1,990,769,856.00	0	1,808,277,260.00	100	3,038,853,580.00	0	90.8	0	0.5	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100	68,284,811,972.00	99.67	1,230,576,320.00		1,990,769,856.00	0	1,808,277,260.00	99.67	3,038,853,580.00	0	90.8	0	0.5	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)	100	68,284,811,972.00	98.97	1,230,576,320.00		1,990,769,856.00	0	1,808,277,260.00	98.97	3,038,853,580.00	0	90.8	0	0.5	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)**	**100**	**68,284,811,972.00**	**98.80**	**1,230,576,320.00**		**1,990,769,856.00**	**0**	**1,808,277,260.00**	**98.8**	**3,038,853,580.00**	**0**	**90.8**	**0**	**0.5**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani**	**100**	**68,284,811,972.00**	**100.00**	**1,230,576,320.00**		**1,990,769,856.00**	**0**	**1,808,277,260.00**	**100**	**3,038,853,580.00**	**0**	**90.8**	**0**	**0.5**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)**	**100**	**68,284,811,972.00**	**100.00**	**1,230,576,320.00**		**1,990,769,856.00**	**0**	**1,808,277,260.00**	**100**	**3,038,853,580.00**	**0**	**90.8**	**0**	**0.5**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**	**68,284,811,972.00**	**100.00**	**1,230,576,320.00**		**1,990,769,856.00**	**0**	**1,808,277,260.00**	**100**	**3,038,853,580.00**	**0**	**90.8**	**0**	**0.5**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)**	**95.2**	**68,284,811,972.00**	**100.00**	**1,230,576,320.00**		**1,990,769,856.00**	**0**	**1,808,277,260.00**	**100**	**3,038,853,580.00**	**0**	**90.8**	**0**	**0.5**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)**	**100**	**68,284,811,972.00**	**100.00**	**1,230,576,320.00**		**1,990,769,856.00**	**0**	**1,808,277,260.00**	**100**	**3,038,853,580.00**	**0**	**90.8**	**0**	**0.5**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Presentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina**	**100**	**68,284,811,972.00**	**100.00**	**1,230,576,320.00**	**46.15**	**1,990,769,856.00**	**0**	**1,808,277,260.00**	**100**	**3,038,853,580.00**	**0**	**90.8**	**0**	**0.5**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul**
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia**	**100.00**	**455,862,290.00**	**100.00**	**425,572,206.00**	**100**	**509,635,200.00**	**0**	**498,160,063.00**	**100**	**923,732,269.00**	**0**	**97.7**	**0**	**36.3**	
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia**	**100.00**	**455,862,290.00**	**100.00**	**425,572,206.00**	**100**	**509,635,200.00**	**0**	**498,160,063.00**	**100**	**923,732,269.00**	**0**	**97.7**	**0**	**36.3**	
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar**		**455,862,290.00**	**0.00**	**425,572,206.00**	**100**	**509,635,200.00**	**0**	**498,160,063.00**	**0**	**923,732,269.00**	**0**	**97.7**	**0.0**	**36.3**	
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar**		**455,862,290.00**	**0.00**	**425,572,206.00**	**100**	**509,635,200.00**	**0**	**498,160,063.00**	**0**	**923,732,269.00**	**0**	**97.7**	**0.0**	**36.3**	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	314	55,882,800.00	60.00	65,056,600.00	55	152,145,200.00	55	149,075,220.00	115	214,131,820.00	100	98	17.5	0	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	88	63,200,000.00	10.00	25,200,000.00	8	22,200,000.00	8	22,200,000.00	18	47,400,000.00	100	100	9.1	0	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	22	0	5.00	334,175,606.00	3	323,044,000.00	3	320,837,563.00	8	655,013,169.00	100	99.3	13.6	0.0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	222	0	55.00	1,140,000.00	57	12,246,000.00	57	6,047,280.00	112	7,187,280.00	100	49.4	25.7	0.0	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyehat tradisional yang berizin**	**55.00**	**1,227,105,384.00**	**100.00**	**805,004,114.00**	**7.51**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**100**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana**	**79.00**	**1,227,105,384.00**	**100.00**	**805,004,114.00**	**100**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**100**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan**	**100.00**	**1,227,105,384.00**	**100.00**	**805,004,114.00**	**100**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**100**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana**	**100.00**	**1,227,105,384.00**	**100.00**	**805,004,114.00**	**100**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**100**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana**	**12.00**	**1,227,105,384.00**	**6.00**	**805,004,114.00**	**100**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**6**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang**	**66.67**	**1,227,105,384.00**	**47.60**	**805,004,114.00**	**69**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**47.6**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana**	**9.00**	**1,227,105,384.00**	**9.00**	**805,004,114.00**	**100**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**9**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar lengkap (IDL)**	**100.00**	**1,227,105,384.00**	**100.00**	**805,004,114.00**	**91**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**100**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai standar**	**100.00**	**1,227,105,384.00**	**100.00**	**805,004,114.00**	**100**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**100**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional**	**3.00**	**1,227,105,384.00**	**3.00**	**805,004,114.00**	**100**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**3**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana**	**91.50**	**1,227,105,384.00**	**100.00**	**805,004,114.00**	**100**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**100**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana**	**5.00**	**1,227,105,384.00**	**11.15**	**805,004,114.00**	**100**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**11.15**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran**	**100.00**	**1,227,105,384.00**	**100.00**	**805,004,114.00**	**17**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**100**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana**	**100.00**	**1,227,105,384.00**	**100.00**	**805,004,114.00**	**100**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**100**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik**	**100.00**	**1,227,105,384.00**	**100.00**	**805,004,114.00**	**100**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**100**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pos UKK yang terbina**	**100.00**	**1,227,105,384.00**	**100.00**	**805,004,114.00**	**11**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**100**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi**	**100.00**	**1,227,105,384.00**	**100.00**	**805,004,114.00**	**100**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**100**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana**	**100.00**	**1,227,105,384.00**	**100.00**	**805,004,114.00**	**100**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**100**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana**	**100.00**	**1,227,105,384.00**	**100.00**	**805,004,114.00**	**100**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**100**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana**	**100.00**	**1,227,105,384.00**	**100.00**	**805,004,114.00**	**100**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**100**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani**	**100.00**	**1,227,105,384.00**	**100.00**	**805,004,114.00**	**67**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**100**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani**	**100.00**	**1,227,105,384.00**	**100.00**	**805,004,114.00**	**100**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**100**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif**	**100.00**	**1,227,105,384.00**	**100.00**	**805,004,114.00**	**3**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**100**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana**	**100.00**	**1,227,105,384.00**	**100.00**	**805,004,114.00**	**100**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**100**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia**	**20.00**	**1,227,105,384.00**	**66.67**	**805,004,114.00**	**100**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**66.67**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih**	**14.30**	**1,227,105,384.00**	**14.30**	**805,004,114.00**	**14.3**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**14.3**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina**	**100.00**	**1,227,105,384.00**	**100.00**	**805,004,114.00**	**61.9**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**100**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentae program prioritas yang dipromosikan**	**100.00**	**1,227,105,384.00**	**100.00**	**805,004,114.00**	**100**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**100**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina**	**100.00**	**1,227,105,384.00**	**100.00**	**805,004,114.00**	**9**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**100**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana**	**70.00**	**1,227,105,384.00**	**99.09**	**805,004,114.00**	**100**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**99.09**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan**		**1,227,105,384.00**	**0.00**	**805,004,114.00**	**93.71**	**1,481,134,656.00**	**0**	**1,310,117,197.00**	**0**	**2,115,121,311.00**	**0**	**88.5**	**0.0**	**15.8**	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2560	19,341,000.00	640.00	12,325,000.00	670	27,675,600.00	670	25,679,300.00	1310	38,004,300.00	100	92.8	26.2	17.3	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2444	2,985,000.00	611.00	45,157,000.00	670	4,550,000.00	670	4,549,500.00	1281	49,706,500.00	100	100	27.4	0	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2319	4,580,000.00	580.00	1,040,000.00	621	600,000.00	621	595,000.00	1201	1,635,000.00	100	99.2	26.8	0	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11944	8,845,500.00	2979.00	1,040,000.00	2484	1,700,000.00	2484	1,700,000.00	5463	2,740,000.00	100	100	20.8	0	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20138	17,446,000.00	5025.00	5,737,057.00	6803	12,010,000.00	6803	3,547,825.00	11828	9,284,882.00	100	29.5	33.8	0	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	106132	66,210,500.00	26543.00	2,636,400.00	28855	906,000.00	28855	733,200.00	55398	3,369,600.00	100	80.9	27.2	0	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27621	38,123,500.00	6540.00	660,000.00	6510	3,132,300.00	6510	3,059,160.00	13050	3,719,160.00	100	97.7	23.6	0	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54436	406,000.00	13563.00	1,400,000.00	2829	1,800,000.00	2829	1,773,780.00	16392	3,173,780.00	100	98.5	5.2	0	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4947	16,021,600.00	1167.00	1,080,000.00	1238	29,122,500.00	1238	18,981,000.00	2405	20,061,000.00	100	65.2	25	0	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	438	39,343,100.00	80.00	4,200,000.00	85	10,400,000.00	85	10,400,000.00	165	14,600,000.00	100	100	19.4	0	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4598	15,775,500.00	1150.00	10,308,000.00	971	32,802,000.00	971	31,639,400.00	2121	41,947,400.00	100	96.5	21.1	0	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3919	21,923,600.00	976.00	6,090,000.00	1210	1,400,000.00	1210	1,400,000.00	2186	7,490,000.00	100	100	30.9	0	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	34	242,275,415.00	12.00	185,623,950.00	5	302,043,200.00	5	276,225,992.00	17	461,849,942.00	100	91.5	14.7	0.4	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	48	11,906,000.00	12.00	770,000.00	12	9,400,000.00	12	9,400,000.00	24	10,170,000.00	100	100	25	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	48	25,716,500.00	12.00	8,200,000.00	12	67,649,000.00	9	34,395,944.00	21	42,595,944.00	75	50.8	18.8	18.4	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	48	52,560,400.00	12.00	5,720,000.00	12	31,878,000.00	12	18,689,500.00	24	24,409,500.00	100	58.6	25	0	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	37	14,279,600.00	12.00	48,825,500.00	12	50,411,000.00	12	42,524,800.00	24	91,350,300.00	100	84.4	32.4	35.4	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			0		0		0		0	0	0	0	0	0.0	0.0	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	48	216,123,500.00	12.00	103,390,590.00	12	67,122,000.00	12	56,805,175.00	24	160,195,765.00	100	84.6	25	5.3	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	8	411,502,669.00	12.00	315,939,917.00	2	756,051,656.00	2	709,228,771.00	14	1,025,168,688.00	100	93.8	25	38.9	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	36	0	12.00	10,216,000.00	12	12,561,000.00	12	5,250,000.00	24	15,466,000.00	100	41.8	33.3	0.0	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	36	0	12.00	28,232,000.00	12	55,070,800.00	9	51,675,500.00	21	79,907,500.00	75	93.8	25	0.0	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	36	0	12.00	6,412,700.00	12	1,400,000.00	12	1,400,000.00	24	7,812,700.00	100	100	33.3	0.0	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			0		0		0		463,350.00	0	463,350.00	0	0	0.0	0.0	
	1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri**	**85.71**	**2,957,968,100.00**	**85.71**	**49,072,100.00**	**85.71**	**11,138,400.00**	**0**	**11,088,000.00**	**85.71**	**60,160,100.00**	**0**	**99.5**	**0**	**0**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul**
	1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya**	**1.00**	**8,986,500.00**	**1.00**	**49,072,100.00**	**1**	**11,138,400.00**	**0**	**11,088,000.00**	**1**	**60,160,100.00**	**0**	**99.5**	**0**	**0**	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	48	8,986,500.00	12.00	49,072,100.00	12	11,138,400.00	12	11,088,000.00	24	60,160,100.00	100	99.5	25	0	
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)**	**100**	**68,284,811,972.00**	**100.00**	**1,425,866,428.00**	**100**	**1,988,459,812.00**	**0**	**1,864,546,750.00**	**100**	**3,290,413,178.00**	**0**	**93.8**	**0**	**0.2**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)**	**100**	**68,284,811,972.00**	**98.98**	**1,425,866,428.00**	**100**	**1,988,459,812.00**	**0**	**1,864,546,750.00**	**98.98**	**3,290,413,178.00**	**0**	**93.8**	**0**	**0.2**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)**	**73**	**68,284,811,972.00**	**54.13**	**1,425,866,428.00**	**100**	**1,988,459,812.00**	**0**	**1,864,546,750.00**	**54.13**	**3,290,413,178.00**	**0**	**93.8**	**0**	**0.2**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100	68,284,811,972.00	99.50	1,425,866,428.00	100	1,988,459,812.00	0	1,864,546,750.00	99.5	3,290,413,178.00	0	93.8	0	0.2	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100	68,284,811,972.00	100.00	1,425,866,428.00	100	1,988,459,812.00	0	1,864,546,750.00	100	3,290,413,178.00	0	93.8	0	0.2	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	29	68,284,811,972.00	77.78	1,425,866,428.00	100	1,988,459,812.00	0	1,864,546,750.00	77.78	3,290,413,178.00	0	93.8	0	0.2	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100	68,284,811,972.00	100.00	1,425,866,428.00	100	1,988,459,812.00	0	1,864,546,750.00	100	3,290,413,178.00	0	93.8	0	0.2	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100	68,284,811,972.00	100.00	1,425,866,428.00	100	1,988,459,812.00	0	1,864,546,750.00	100	3,290,413,178.00	0	93.8	0	0.2	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	100	68,284,811,972.00	100.00	1,425,866,428.00	70	1,988,459,812.00	0	1,864,546,750.00	100	3,290,413,178.00	0	93.8	0	0.2	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)	95.2	68,284,811,972.00	100.00	1,425,866,428.00	100	1,988,459,812.00	0	1,864,546,750.00	100	3,290,413,178.00	0	93.8	0	0.2	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100	68,284,811,972.00	100.00	1,425,866,428.00	100	1,988,459,812.00	0	1,864,546,750.00	100	3,290,413,178.00	0	93.8	0	0.2	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100	68,284,811,972.00	100.00	1,425,866,428.00	100	1,988,459,812.00	0	1,864,546,750.00	100	3,290,413,178.00	0	93.8	0	0.2	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100	68,284,811,972.00	100.00	1,425,866,428.00	100	1,988,459,812.00	0	1,864,546,750.00	100	3,290,413,178.00	0	93.8	0	0.2	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)**	**100**	**68,284,811,972.00**	**99.67**	**1,425,866,428.00**	**100**	**1,988,459,812.00**	**0**	**1,864,546,750.00**	**99.67**	**3,290,413,178.00**	**0**	**93.8**	**0**	**0.2**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)**	**100**	**68,284,811,972.00**	**100.00**	**1,425,866,428.00**	**100**	**1,988,459,812.00**	**0**	**1,864,546,750.00**	**100**	**3,290,413,178.00**	**0**	**93.8**	**0**	**0.2**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)**	**100**	**68,284,811,972.00**	**98.97**	**1,425,866,428.00**	**100**	**1,988,459,812.00**	**0**	**1,864,546,750.00**	**98.97**	**3,290,413,178.00**	**0**	**93.8**	**0**	**0.2**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Presentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina**	**100**	**68,284,811,972.00**	**98.80**	**1,425,866,428.00**	**46.15**	**1,988,459,812.00**	**0**	**1,864,546,750.00**	**98.8**	**3,290,413,178.00**	**0**	**93.8**	**0**	**0.2**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)**	**100**	**68,284,811,972.00**	**100.00**	**1,425,866,428.00**	**100**	**1,988,459,812.00**	**0**	**1,864,546,750.00**	**100**	**3,290,413,178.00**	**0**	**93.8**	**0**	**0.2**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)**	**100**	**68,284,811,972.00**	**100.00**	**1,425,866,428.00**	**100**	**1,988,459,812.00**	**0**	**1,864,546,750.00**	**100**	**3,290,413,178.00**	**0**	**93.8**	**0**	**0.2**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo**
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia**	**100.00**	**517,813,176.00**	**100.00**	**462,526,284.00**	**100**	**306,231,600.00**	**0**	**282,158,141.00**	**100**	**744,684,425.00**	**0**	**92.1**	**0**	**0**	
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar**	**100.00**	**517,813,176.00**	**100.00**	**462,526,284.00**	**100**	**306,231,600.00**	**0**	**282,158,141.00**	**100**	**744,684,425.00**	**0**	**92.1**	**0**	**0**	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	170	85,695,856.00	50.00	80,004,000.00	44	21,782,150.00	43	20,141,650.00	93	100,145,650.00	97.7	92.5	25.3	0	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12	68,000,000.00	3.00	16,102,900.00	4	15,000,000.00	4	11,974,400.00	7	28,077,300.00	100	79.8	33.3	0	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	16	0	2.00	366,419,384.00	4	269,449,450.00	4	250,042,091.00	6	616,461,475.00	100	92.8	25	0.0	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran**	**100.00**	**1,355,077,214.00**	**100.00**	**963,340,144.00**	**17**	**1,682,228,212.00**	**0**	**1,582,388,609.00**	**100**	**2,545,728,753.00**	**0**	**94.1**	**0**	**7.9**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina**	**100.00**	**1,355,077,214.00**	**100.00**	**963,340,144.00**	**9**	**1,682,228,212.00**	**0**	**1,582,388,609.00**	**100**	**2,545,728,753.00**	**0**	**94.1**	**0**	**7.9**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik**	**100.00**	**1,355,077,214.00**	**100.00**	**963,340,144.00**	**100**	**1,682,228,212.00**	**0**	**1,582,388,609.00**	**100**	**2,545,728,753.00**	**0**	**94.1**	**0**	**7.9**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar lengkap (IDL)**	**100.00**	**1,355,077,214.00**	**100.00**	**963,340,144.00**	**91**	**1,682,228,212.00**	**0**	**1,582,388,609.00**	**100**	**2,545,728,753.00**	**0**	**94.1**	**0**	**7.9**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	100.00	1,355,077,214.00	100.00	963,340,144.00	100	1,682,228,212.00	0	1,582,388,609.00	100	2,545,728,753.00	0	94.1	0	7.9	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentae program prioritas yang dipromosikan	100.00	1,355,077,214.00	100.00	963,340,144.00	100	1,682,228,212.00	0	1,582,388,609.00	100	2,545,728,753.00	0	94.1	0	7.9	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	14.30	1,355,077,214.00	14.30	963,340,144.00	14.3	1,682,228,212.00	0	1,582,388,609.00	14.3	2,545,728,753.00	0	94.1	0	7.9	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	3.00	1,355,077,214.00	3.00	963,340,144.00	100	1,682,228,212.00	0	1,582,388,609.00	3	2,545,728,753.00	0	94.1	0	7.9	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Yang sesuai standar	100.00	1,355,077,214.00	100.00	963,340,144.00	100	1,682,228,212.00	0	1,582,388,609.00	100	2,545,728,753.00	0	94.1	0	7.9	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	100.00	1,355,077,214.00	100.00	963,340,144.00	67	1,682,228,212.00	0	1,582,388,609.00	100	2,545,728,753.00	0	94.1	0	7.9	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pos UKK yang terbina	100.00	1,355,077,214.00	100.00	963,340,144.00	11	1,682,228,212.00	0	1,582,388,609.00	100	2,545,728,753.00	0	94.1	0	7.9	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	100.00	1,355,077,214.00	100.00	963,340,144.00	100	1,682,228,212.00	0	1,582,388,609.00	100	2,545,728,753.00	0	94.1	0	7.9	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif	100.00	1,355,077,214.00	100.00	963,340,144.00	3	1,682,228,212.00	0	1,582,388,609.00	100	2,545,728,753.00	0	94.1	0	7.9	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	100.00	1,355,077,214.00	100.00	963,340,144.00	61.9	1,682,228,212.00	0	1,582,388,609.00	100	2,545,728,753.00	0	94.1	0	7.9	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	100.00	1,355,077,214.00	100.00	963,340,144.00	100	1,682,228,212.00	0	1,582,388,609.00	100	2,545,728,753.00	0	94.1	0	7.9	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	70.00	1,355,077,214.00	99.09	963,340,144.00	100	1,682,228,212.00	0	1,582,388,609.00	99.09	2,545,728,753.00	0	94.1	0	7.9	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	91.50	1,355,077,214.00	100.00	963,340,144.00	100	1,682,228,212.00	0	1,582,388,609.00	100	2,545,728,753.00	0	94.1	0	7.9	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	100.00	1,355,077,214.00	100.00	963,340,144.00	100	1,682,228,212.00	0	1,582,388,609.00	100	2,545,728,753.00	0	94.1	0	7.9	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	79.00	1,355,077,214.00	100.00	963,340,144.00	100	1,682,228,212.00	0	1,582,388,609.00	100	2,545,728,753.00	0	94.1	0	7.9	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	9.00	1,355,077,214.00	9.00	963,340,144.00	100	1,682,228,212.00	0	1,582,388,609.00	9	2,545,728,753.00	0	94.1	0	7.9	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	20.00	1,355,077,214.00	66.67	963,340,144.00	100	1,682,228,212.00	0	1,582,388,609.00	66.67	2,545,728,753.00	0	94.1	0	7.9	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	100.00	1,355,077,214.00	100.00	963,340,144.00	100	1,682,228,212.00	0	1,582,388,609.00	100	2,545,728,753.00	0	94.1	0	7.9	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	100.00	1,355,077,214.00	100.00	963,340,144.00	100	1,682,228,212.00	0	1,582,388,609.00	100	2,545,728,753.00	0	94.1	0	7.9	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	12.00	1,355,077,214.00	6.00	963,340,144.00	100	1,682,228,212.00	0	1,582,388,609.00	6	2,545,728,753.00	0	94.1	0	7.9	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	100.00	1,355,077,214.00	100.00	963,340,144.00	100	1,682,228,212.00	0	1,582,388,609.00	100	2,545,728,753.00	0	94.1	0	7.9	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	100.00	1,355,077,214.00	100.00	963,340,144.00	100	1,682,228,212.00	0	1,582,388,609.00	100	2,545,728,753.00	0	94.1	0	7.9	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	5.00	1,355,077,214.00	11.15	963,340,144.00	100	1,682,228,212.00	0	1,582,388,609.00	11.15	2,545,728,753.00	0	94.1	0	7.9	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyehat tradisional yang berizin**	**55.00**	**1,355,077,214.00**	**100.00**	**963,340,144.00**	**7.51**	**1,682,228,212.00**	**0**	**1,582,388,609.00**	**100**	**2,545,728,753.00**	**0**	**94.1**	**0**	**7.9**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana**	**100.00**	**1,355,077,214.00**	**100.00**	**963,340,144.00**	**100**	**1,682,228,212.00**	**0**	**1,582,388,609.00**	**100**	**2,545,728,753.00**	**0**	**94.1**	**0**	**7.9**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang**	**66.67**	**1,355,077,214.00**	**47.60**	**963,340,144.00**	**69**	**1,682,228,212.00**	**0**	**1,582,388,609.00**	**47.6**	**2,545,728,753.00**	**0**	**94.1**	**0**	**7.9**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan**		**1,355,077,214.00**	**0.00**	**963,340,144.00**	**93.71**	**1,682,228,212.00**	**0**	**1,582,388,609.00**	**0**	**2,545,728,753.00**	**0**	**94.1**	**0.0**	**7.9**	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3018	32,184,300.00	778.00	15,318,000.00	786	25,628,900.00	786	26,096,500.00	1564	41,414,500.00	100	101.8	26	0	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2878	1,725,500.00	777.00	36,311,300.00	786	5,000,000.00	786	4,998,200.00	1563	41,309,500.00	100	100	27.3	0	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2758	5,762,900.00	0.00	0	732	7,500,000.00	738	7,325,000.00	738	7,325,000.00	100.8	97.7	26.8	0	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14235	81,224,800.00	0.00	0	2954	7,607,600.00	2954	7,607,400.00	2954	7,607,400.00	100	100	20.8	0	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24002	71,871,800.00	6817.00	6,000,000.00	7450	15,159,900.00	7450	13,779,100.00	14267	19,779,100.00	100	90.9	31	0	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	126526	77,138,800.00	0.00	0	34309	6,000,000.00	34309	4,974,000.00	34309	4,974,000.00	100	82.9	27.1	0	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32932	62,111,200.00	0.00	0	7730	22,791,700.00	7730	14,338,900.00	7730	14,338,900.00	100	62.9	23.5	0	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64894	11,899,800.00	0.00	0	3363	4,230,000.00	3363	3,930,000.00	3363	3,930,000.00	100	92.9	5.2	0	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5900	33,547,500.00	0.00	0	1471	15,873,400.00	1471	22,703,600.00	1471	22,703,600.00	100	143	24.9	0	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	522	147,829,700.00	0.00	0	101	52,697,700.00	101	52,671,300.00	101	52,671,300.00	100	99.9	19.3	0	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3729	86,261,000.00	690.00	186,000.00	688	36,225,000.00	688	33,000,000.00	1378	33,186,000.00	100	91.1	18.4	0	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4674	27,652,300.00	960.00	560,000.00	1059	4,410,000.00	1059	4,410,000.00	2019	4,970,000.00	100	100	22.7	0	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48	53,563,900.00	12.00	233,198,700.00	12	230,736,000.00	12	218,174,400.00	24	451,373,100.00	100	94.6	25	0	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	48	20,078,912.00	0.00	0	12	11,027,800.00	12	11,027,800.00	12	11,027,800.00	100	100	25	0	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	36	0	12.00	8,200,000.00	12	29,534,312.00	12	28,875,000.00	24	37,075,000.00	100	97.8	33.3	0.0	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	48	74,985,700.00	0.00	0	12	17,167,000.00	12	17,166,800.00	12	17,166,800.00	100	100	25	0	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	37	12,172,500.00	12.00	48,558,400.00	12	24,570,000.00	12	23,960,000.00	24	72,518,400.00	100	97.5	32.4	0	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	48	95,283,400.00	12.00	156,884,000.00	12	87,050,100.00	12	84,859,590.00	24	241,743,590.00	100	97.5	25	0	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	52	459,783,202.00	12.00	330,570,244.00	12	958,181,200.00	12	888,932,319.00	24	1,219,502,563.00	100	92.8	23.1	23.3	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	36	0	12.00	10,060,400.00	12	10,754,900.00	12	10,604,900.00	24	20,665,300.00	100	98.6	33.3	0.0	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	129	0	43.00	44,750,000.00	43	30,000,000.00	43	30,000,000.00	86	74,750,000.00	100	100	33.3	0.0	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	36	0	12.00	66,980,200.00	12	76,362,700.00	12	69,316,300.00	24	136,296,500.00	100	90.8	33.3	0.0	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	36	0	12.00	5,762,900.00	12	3,720,000.00	12	3,637,500.00	24	9,400,400.00	100	97.8	33.3	0.0	
	1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri**	**85.71**	**2,957,968,100.00**	**85.71**	**51,695,400.00**	**85.71**	**13,524,100.00**	**0**	**11,295,100.00**	**85.71**	**62,990,500.00**	**0**	**83.5**	**0**	**0**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo**
	1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya**	**1.00**	**74,289,800.00**	**1.00**	**51,695,400.00**	**1**	**13,524,100.00**	**0**	**11,295,100.00**	**1**	**62,990,500.00**	**0**	**83.5**	**0**	**0**	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	48	74,289,800.00	12.00	51,695,400.00	12	13,524,100.00	12	11,295,100.00	24	62,990,500.00	100	83.5	25	0	
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar**	**29**	**68,284,811,972.00**	**77.78**	**1,465,483,936.00**	**100**	**2,151,078,227.00**	**0**	**1,969,201,352.00**	**77.78**	**3,434,685,288.00**	**0**	**91.5**	**0**	**0.4**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)**	**100**	**68,284,811,972.00**	**100.00**	**1,465,483,936.00**	**100**	**2,151,078,227.00**	**0**	**1,969,201,352.00**	**100**	**3,434,685,288.00**	**0**	**91.5**	**0**	**0.4**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan**	**100**	**68,284,811,972.00**	**100.00**	**1,465,483,936.00**	**100**	**2,151,078,227.00**	**0**	**1,969,201,352.00**	**100**	**3,434,685,288.00**	**0**	**91.5**	**0**	**0.4**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)**	**100**	**68,284,811,972.00**	**98.98**	**1,465,483,936.00**	**100**	**2,151,078,227.00**	**0**	**1,969,201,352.00**	**98.98**	**3,434,685,288.00**	**0**	**91.5**	**0**	**0.4**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan**	**73**	**68,284,811,972.00**	**54.13**	**1,465,483,936.00**	**100**	**2,151,078,227.00**	**0**	**1,969,201,352.00**	**54.13**	**3,434,685,288.00**	**0**	**91.5**	**0**	**0.4**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)**	**100**	**68,284,811,972.00**	**100.00**	**1,465,483,936.00**	**100**	**2,151,078,227.00**	**0**	**1,969,201,352.00**	**100**	**3,434,685,288.00**	**0**	**91.5**	**0**	**0.4**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)	100	68,284,811,972.00	99.50	1,465,483,936.00	100	2,151,078,227.00	0	1,969,201,352.00	99.5	3,434,685,288.00	0	91.5	0	0.4	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100	68,284,811,972.00	100.00	1,465,483,936.00	100	2,151,078,227.00	0	1,969,201,352.00	100	3,434,685,288.00	0	91.5	0	0.4	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	100	68,284,811,972.00	0.00	1,465,483,936.00	46.15	2,151,078,227.00	0	1,969,201,352.00	0	3,434,685,288.00	0	91.5	0	0.4	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100	68,284,811,972.00	99.67	1,465,483,936.00	100	2,151,078,227.00	0	1,969,201,352.00	99.67	3,434,685,288.00	0	91.5	0	0.4	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	100	68,284,811,972.00	98.97	1,465,483,936.00	70	2,151,078,227.00	0	1,969,201,352.00	98.97	3,434,685,288.00	0	91.5	0	0.4	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100	68,284,811,972.00	98.80	1,465,483,936.00	100	2,151,078,227.00	0	1,969,201,352.00	98.8	3,434,685,288.00	0	91.5	0	0.4	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100	68,284,811,972.00	100.00	1,465,483,936.00	100	2,151,078,227.00	0	1,969,201,352.00	100	3,434,685,288.00	0	91.5	0	0.4	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100	68,284,811,972.00	100.00	1,465,483,936.00	100	2,151,078,227.00	0	1,969,201,352.00	100	3,434,685,288.00	0	91.5	0	0.4	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100	68,284,811,972.00	100.00	1,465,483,936.00	100	2,151,078,227.00	0	1,969,201,352.00	100	3,434,685,288.00	0	91.5	0	0.4	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)	95.2	68,284,811,972.00	100.00	1,465,483,936.00	100	2,151,078,227.00	0	1,969,201,352.00	100	3,434,685,288.00	0	91.5	0	0.4	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)**	**100**	**68,284,811,972.00**	**100.00**	**1,465,483,936.00**	**100**	**2,151,078,227.00**	**0**	**1,969,201,352.00**	**100**	**3,434,685,288.00**	**0**	**91.5**	**0**	**0.4**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)**	**100**	**68,284,811,972.00**	**100.00**	**1,465,483,936.00**	**100**	**2,151,078,227.00**	**0**	**1,969,201,352.00**	**100**	**3,434,685,288.00**	**0**	**91.5**	**0**	**0.4**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan**
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani**	**100**	**68,284,811,972.00**	**100.00**	**1,465,483,936.00**	**100**	**2,151,078,227.00**	**0**	**1,969,201,352.00**	**100**	**3,434,685,288.00**	**0**	**91.5**	**0**	**0.4**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan**
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia**	**100.00**	**654,986,042.00**	**100.00**	**574,302,168.00**	**100**	**396,631,400.00**	**0**	**384,967,437.00**	**100**	**959,269,605.00**	**0**	**97.1**	**0**	**5.4**	
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar**	**100.00**	**654,986,042.00**	**100.00**	**574,302,168.00**	**100**	**396,631,400.00**	**0**	**384,967,437.00**	**100**	**959,269,605.00**	**0**	**97.1**	**0**	**5.4**	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	113	57,019,900.00	8.00	41,880,718.00	30	9,121,700.00	30	9,031,600.00	38	50,912,318.00	100	99	26.5	0	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	104	58,350,000.00	0.00	0	24	24,000,000.00	24	23,135,000.00	24	23,135,000.00	100	96.4	23.1	0	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	40	0	3.00	532,421,450.00	10	363,509,700.00	10	352,800,837.00	13	885,222,287.00	100	97.1	25	0.0	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi**	**100.00**	**1,484,460,949.00**	**100.00**	**891,181,768.00**	**100**	**1,754,446,827.00**	**0**	**1,584,233,915.00**	**100**	**2,475,415,683.00**	**0**	**90.3**	**0**	**16.1**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan**	**100.00**	**1,484,460,949.00**	**100.00**	**891,181,768.00**	**100**	**1,754,446,827.00**	**0**	**1,584,233,915.00**	**100**	**2,475,415,683.00**	**0**	**90.3**	**0**	**16.1**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif**	**100.00**	**1,484,460,949.00**	**100.00**	**891,181,768.00**	**3**	**1,754,446,827.00**	**0**	**1,584,233,915.00**	**100**	**2,475,415,683.00**	**0**	**90.3**	**0**	**16.1**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pos UKK yang terbina**	**100.00**	**1,484,460,949.00**	**100.00**	**891,181,768.00**	**11**	**1,754,446,827.00**	**0**	**1,584,233,915.00**	**100**	**2,475,415,683.00**	**0**	**90.3**	**0**	**16.1**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina**	**100.00**	**1,484,460,949.00**	**100.00**	**891,181,768.00**	**9**	**1,754,446,827.00**	**0**	**1,584,233,915.00**	**100**	**2,475,415,683.00**	**0**	**90.3**	**0**	**16.1**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentae program prioritas yang dipromosikan**	**100.00**	**1,484,460,949.00**	**100.00**	**891,181,768.00**	**100**	**1,754,446,827.00**	**0**	**1,584,233,915.00**	**100**	**2,475,415,683.00**	**0**	**90.3**	**0**	**16.1**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik**	**100.00**	**1,484,460,949.00**	**100.00**	**891,181,768.00**	**100**	**1,754,446,827.00**	**0**	**1,584,233,915.00**	**100**	**2,475,415,683.00**	**0**	**90.3**	**0**	**16.1**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar lengkap (IDL)**	**100.00**	**1,484,460,949.00**	**100.00**	**891,181,768.00**	**91**	**1,754,446,827.00**	**0**	**1,584,233,915.00**	**100**	**2,475,415,683.00**	**0**	**90.3**	**0**	**16.1**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Yang sesuai standar**	**100.00**	**1,484,460,949.00**	**100.00**	**891,181,768.00**	**100**	**1,754,446,827.00**	**0**	**1,584,233,915.00**	**100**	**2,475,415,683.00**	**0**	**90.3**	**0**	**16.1**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran**	**100.00**	**1,484,460,949.00**	**100.00**	**891,181,768.00**	**17**	**1,754,446,827.00**	**0**	**1,584,233,915.00**	**100**	**2,475,415,683.00**	**0**	**90.3**	**0**	**16.1**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	100.00	1,484,460,949.00	100.00	891,181,768.00	67	1,754,446,827.00	0	1,584,233,915.00	100	2,475,415,683.00	0	90.3	0	16.1	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	100.00	1,484,460,949.00	100.00	891,181,768.00	61.90	1,754,446,827.00	0	1,584,233,915.00	100	2,475,415,683.00	0	90.3	0	16.1	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	14.30	1,484,460,949.00	14.30	891,181,768.00	14.3	1,754,446,827.00	0	1,584,233,915.00	14.3	2,475,415,683.00	0	90.3	0	16.1	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	3.00	1,484,460,949.00	3.00	891,181,768.00	100	1,754,446,827.00	0	1,584,233,915.00	3	2,475,415,683.00	0	90.3	0	16.1	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	20.00	1,484,460,949.00	66.67	891,181,768.00	100	1,754,446,827.00	0	1,584,233,915.00	66.67	2,475,415,683.00	0	90.3	0	16.1	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyehat tradisional yang berizin	55.00	1,484,460,949.00	100.00	891,181,768.00	7.51	1,754,446,827.00	0	1,584,233,915.00	100	2,475,415,683.00	0	90.3	0	16.1	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	66.67	1,484,460,949.00	47.60	891,181,768.00	69	1,754,446,827.00	0	1,584,233,915.00	47.6	2,475,415,683.00	0	90.3	0	16.1	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	12.00	1,484,460,949.00	6.00	891,181,768.00	100	1,754,446,827.00	0	1,584,233,915.00	6	2,475,415,683.00	0	90.3	0	16.1	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	9.00	1,484,460,949.00	9.00	891,181,768.00	100	1,754,446,827.00	0	1,584,233,915.00	9	2,475,415,683.00	0	90.3	0	16.1	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	70.00	1,484,460,949.00	99.09	891,181,768.00	100	1,754,446,827.00	0	1,584,233,915.00	99.09	2,475,415,683.00	0	90.3	0	16.1	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	79.00	1,484,460,949.00	100.00	891,181,768.00	100	1,754,446,827.00	0	1,584,233,915.00	100	2,475,415,683.00	0	90.3	0	16.1	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	100.00	1,484,460,949.00	100.00	891,181,768.00	100	1,754,446,827.00	0	1,584,233,915.00	100	2,475,415,683.00	0	90.3	0	16.1	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	91.50	1,484,460,949.00	100.00	891,181,768.00	100	1,754,446,827.00	0	1,584,233,915.00	100	2,475,415,683.00	0	90.3	0	16.1	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	100.00	1,484,460,949.00	100.00	891,181,768.00	100	1,754,446,827.00	0	1,584,233,915.00	100	2,475,415,683.00	0	90.3	0	16.1	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	100.00	1,484,460,949.00	100.00	891,181,768.00	100	1,754,446,827.00	0	1,584,233,915.00	100	2,475,415,683.00	0	90.3	0	16.1	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	100.00	1,484,460,949.00	100.00	891,181,768.00	100	1,754,446,827.00	0	1,584,233,915.00	100	2,475,415,683.00	0	90.3	0	16.1	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	5.00	1,484,460,949.00	11.15	891,181,768.00	100	1,754,446,827.00	0	1,584,233,915.00	11.15	2,475,415,683.00	0	90.3	0	16.1	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	100.00	1,484,460,949.00	100.00	891,181,768.00	100	1,754,446,827.00	0	1,584,233,915.00	100	2,475,415,683.00	0	90.3	0	16.1	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	100.00	1,484,460,949.00	100.00	891,181,768.00	100	1,754,446,827.00	0	1,584,233,915.00	100	2,475,415,683.00	0	90.3	0	16.1	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	100.00	1,484,460,949.00	100.00	891,181,768.00	100	1,754,446,827.00	0	1,584,233,915.00	100	2,475,415,683.00	0	90.3	0	16.1	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan		1,484,460,949.00	0.00	891,181,768.00	93.71	1,754,446,827.00	0	1,584,233,915.00	0	2,475,415,683.00	0	90.3	0.0	16.1	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3320	20,380,500.00	863.00	2,784,000.00	870	66,370,000.00	870	57,050,000.00	1733	59,834,000.00	100	86	26.2	0.9	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3170	3,174,100.00	863.00	25,547,000.00	870	4,375,000.00	870	4,375,000.00	1733	29,922,000.00	100	100	27.4	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3010	2,479,000.00	809.00	2,479,000.00	808	4,810,000.00	808	6,574,000.00	1617	9,053,000.00	100	136.7	26.8	0	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12255	21,692,000.00	3243.00	120,000.00	3236	24,825,000.00	3236	24,824,800.00	6479	24,944,800.00	100	100	26.4	0	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26162	9,396,000.00	6533.00	80,000.00	5720	26,191,000.00	5720	26,191,000.00	12253	26,271,000.00	100	100	21.9	0	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	137960	2,876,200.00	34507.00	120,000.00	37578	150,000.00	37578	120,000.00	72085	240,000.00	100	80	27.2	0	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35928	47,367,200.00	8113.00	240,000.00	8474	5,925,000.00	8474	5,925,000.00	16587	6,165,000.00	100	100	23.6	12.5	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70766	3,720,187.00	17633.00	120,000.00	3684	1,380,000.00	3684	1,380,000.00	21317	1,500,000.00	100	100	5.2	0	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6434	48,622,572.00	1525.00	120,000.00	1612	2,800,000.00	1612	2,800,000.00	3137	2,920,000.00	100	100	25.1	0	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	568	44,044,000.00	111.00	80,000.00	111	3,187,200.00	111	3,003,500.00	222	3,083,500.00	100	94.2	19.5	0	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3072	52,718,500.00	770.00	32,250,000.00	1170	38,150,000.00	1170	38,150,000.00	1940	70,400,000.00	100	100	38.1	4	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5096	59,388,400.00	1269.00	547,300.00	1165	2,850,000.00	1165	2,790,000.00	2434	3,337,300.00	100	97.9	22.9	0	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	39	528,867,200.00	12.00	268,798,223.00	12	638,221,500.00	12	524,150,700.00	24	792,948,923.00	100	82.1	30.8	15	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	48	28,423,500.00	0.00	0	12	17,260,000.00	12	17,260,000.00	12	17,260,000.00	100	100	25	8.6	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	36	0	12.00	8,200,000.00	12	19,584,600.00	12	7,780,000.00	24	15,980,000.00	100	39.7	33.3	0.0	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	48	83,957,200.00	12.00	120,000.00	12	9,327,000.00	12	9,304,000.00	24	9,424,000.00	100	99.8	25	0	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	48	13,901,000.00	12.00	102,548,800.00	12	80,253,000.00	12	74,390,682.00	24	176,939,482.00	100	92.7	25	111.7	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	48	71,006,400.00	12.00	62,139,931.00	12	113,951,000.00	12	106,677,716.00	24	168,817,647.00	100	93.6	25	0	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48	442,446,990.00	12.00	317,300,514.00	12	619,597,727.00	12	614,191,817.00	24	931,492,331.00	100	99.1	25	30.1	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	36	0	12.00	10,888,000.00	12	8,166,000.00	12	5,050,000.00	24	15,938,000.00	100	61.8	33.3	0.0	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	240	0	34.00	15,000,000.00	80	15,000,000.00	54	15,000,000.00	88	30,000,000.00	67.5	100	22.5	0.0	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	36	0	12.00	40,878,300.00	12	51,650,000.00	12	36,950,000.00	24	77,828,300.00	100	71.5	33.3	0.0	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	36	0	12.00	820,700.00	12	422,800.00	12	295,700.00	24	1,116,400.00	100	69.9	33.3	0.0	
	1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri**	**85.71**	**2,957,968,100.00**	**85.71**	**35,880,800.00**	**85.71**	**13,252,000.00**	**0**	**7,500,000.00**	**85.71**	**43,380,800.00**	**0**	**56.6**	**0**	**0**	**UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya**	**1.00**	**986,000.00**	**1.00**	**35,880,800.00**	**1**	**13,252,000.00**	**0**	**7,500,000.00**	**1**	**43,380,800.00**	**0**	**56.6**	**0**	**0**	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	48	986,000.00	12.00	35,880,800.00	12	13,252,000.00	9	7,500,000.00	21	43,380,800.00	75	56.6	18.8	0	
	1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**79.35**	**165.224.141.817,00**	**0**	**139.279.649.865,71**	**85.5**	**101.306.198.292,31**	**93.54**	**72.009.764.756,04**	**93.54**	**211.289.414.621,75**	**109.4**	**71.1**	**117.9**	**13.2**	**Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo**
	1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**0,00**	**0**	**41.233.563.667,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**41.233.563.667,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0,00	0	41.233.563.667,00	614	0,00	595	0,00	595	41.233.563.667,00	96.9	0	0	0	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**0,00**	**0**	**98.046.086.198,71**	**90**	**101.306.198.292,31**	**100**	**72.009.764.756,04**	**100**	**170.055.850.954,75**	**111.1**	**71.1**	**0**	**0**	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar**		**0,00**	**0**	**98.046.086.198,71**	**100**	**101.306.198.292,31**	**100**	**72.009.764.756,04**	**100**	**170.055.850.954,75**	**100**	**71.1**	**0**	**0**	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar**		**0,00**	**0**	**98.046.086.198,71**	**80**	**101.306.198.292,31**	**85**	**72.009.764.756,04**	**85**	**170.055.850.954,75**	**106.3**	**71.1**	**0**	**0**	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar**		**0,00**	**0**	**98.046.086.198,71**	**85**	**101.306.198.292,31**	**85**	**72.009.764.756,04**	**85**	**170.055.850.954,75**	**100**	**71.1**	**0**	**0**	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar**		**0,00**	**0**	**98.046.086.198,71**	**90**	**101.306.198.292,31**	**90**	**72.009.764.756,04**	**90**	**170.055.850.954,75**	**100**	**71.1**	**0**	**0**	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**0,00**	**0**	**98.046.086.198,71**	**100**	**101.306.198.292,31**	**100**	**72.009.764.756,04**	**100**	**170.055.850.954,75**	**100**	**71.1**	**0**	**0**	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan BLUD sesuai standar**		**0,00**	**0**	**98.046.086.198,71**	**100**	**101.306.198.292,31**	**100**	**72.009.764.756,04**	**100**	**170.055.850.954,75**	**100**	**71.1**	**0**	**0**	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan**		**0,00**	**0**	**98.046.086.198,71**	**55**	**101.306.198.292,31**	**100**	**72.009.764.756,04**	**100**	**170.055.850.954,75**	**181.8**	**71.1**	**0**	**0**	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**0,00**	**0**	**98.046.086.198,71**	**100**	**101.306.198.292,31**	**100**	**72.009.764.756,04**	**100**	**170.055.850.954,75**	**100**	**71.1**	**0**	**0**	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**0,00**	**0**	**98.046.086.198,71**	**100**	**101.306.198.292,31**	**100**	**72.009.764.756,04**	**100**	**170.055.850.954,75**	**100**	**71.1**	**0**	**0**	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi**		**0,00**	**0**	**98.046.086.198,71**	**95**	**101.306.198.292,31**	**95**	**72.009.764.756,04**	**95**	**170.055.850.954,75**	**100**	**71.1**	**0**	**0**	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi**		**0,00**	**0**	**98.046.086.198,71**	**85**	**101.306.198.292,31**	**85**	**72.009.764.756,04**	**85**	**170.055.850.954,75**	**100**	**71.1**	**0**	**0**	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi**		**0,00**	**0**	**98.046.086.198,71**	**100**	**101.306.198.292,31**	**100**	**72.009.764.756,04**	**100**	**170.055.850.954,75**	**100**	**71.1**	**0**	**0**	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas**		**0,00**	**0**	**98.046.086.198,71**	**55**	**101.306.198.292,31**	**65.88**	**72.009.764.756,04**	**65.88**	**170.055.850.954,75**	**119.8**	**71.1**	**0**	**0**	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target**		**0,00**	**0**	**98.046.086.198,71**	**85**	**101.306.198.292,31**	**86.84**	**72.009.764.756,04**	**86.84**	**170.055.850.954,75**	**102.2**	**71.1**	**0**	**0**	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target**		**0,00**	**0**	**98.046.086.198,71**	**85**	**101.306.198.292,31**	**88.1**	**72.009.764.756,04**	**88.1**	**170.055.850.954,75**	**103.6**	**71.1**	**0**	**0**	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target**		**0,00**	**0**	**98.046.086.198,71**	**85**	**101.306.198.292,31**	**93.18**	**72.009.764.756,04**	**93.18**	**170.055.850.954,75**	**109.6**	**71.1**	**0**	**0**	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0,00	0	98.046.086.198,71	1	101.306.198.292,31	1	72.009.764.756,04	1	170.055.850.954,75	100	71.1	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : a) Tersedianya SDM yang memadai dan sesuai kompetensi b) Tersedianya peralatan, sarana dan prasarana rumah sakit yang mendukung pelayanan c) Tersedianya anggaran BLUD d) Pelayanan kesehatan yang sesuai SOP/SPO dan SPM Rumah Sakit e) Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan f) Koordinasi yang baik antar																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : a) Belum optimalnya waktu tunggu layanan b) Belum optimalnya penyediaan dan pemelihataan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : a) Menginformasikan jam layanan dan estimasi pemberian layanan kepada pasien untuk meminimalisir komplain b) Pemenuhan peralatan kesehatan, sarana dan prasarana sesuai standar dan prioritas layanan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : a) Optimalisasi komunikasi efektif kepada pengguna layanan b) Pemenuhan peralatan, sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar dan prioritas layanan																		

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS**	**80.65**	**21.955.320.000,00**	**0**	**953.000.000,00**	**88**	**8.901.283.932,00**	**88**	**8.773.325.016,00**	**88**	**9.726.325.016,00**	**100**	**98.6**	**109.1**	**0**	**Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo**
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik sesuai standar**		**0,00**	**0**	**953.000.000,00**	**85**	**8.901.283.932,00**	**100**	**8.773.325.016,00**	**100**	**9.726.325.016,00**	**117.6**	**98.6**	**0**	**0**	
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit		0,00	0	0,00	7	2.641.757.180,00	7	2.585.660.938,00	7	2.585.660.938,00	100	97.9	0	0	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		0,00	0	953.000.000,00	4	2.830.140.000,00	18	2.798.091.508,00	18	3.751.091.508,00	450	98.9	0	0	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minumandi Fasilitas Kesehatan yang disediakan		0,00	0	0,00	1	3.429.386.752,00	3	3.389.572.570,00	3	3.389.572.570,00	300	98.8	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : a) Tersedianya SDM yang memadai dan sesuai kompetensi b) Tersedianya peralatan, sarana dan prasarana rumah sakit yang mendukung pelayanan c) Tersedianya anggaran d) Pelayanan kesehatan yang sesuai SOP/SPO dan SPM Rumah Sakit e) Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan f) Koordinasi yang baik antar																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : a) Kinerja pelayanan belum optimal b) Pemanfaatan IT dalam pemberian layanan belum optimal c) Penyediaan dan pemelihataan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan belum optimal d) Belum optimalnya jumlah SDM yang mengikuti pelatihan lebih dari 20 Jam																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : a) Peningkatan kualitas pelayanan melalui pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di semua unit layanan b) Pengembangan SIM RS untuk menunjang pelayanan c) Pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan dan sarana prasarana penunjang tepat waktu d) Optimalisasi pelatihan pegawai melalui																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : a) Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di semua unit layanan b) Optimalisasi pengintegrasian teknologi informasi dalam pemberian layanan c) Pemenuhan peralatan, sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar d) Peningkatan kompetensi pegawai sesuai prioritas																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**98.05**	**95.91**			
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	103	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**																
	1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**83**	**11.163.143.755,00**	**90.3**	**6.343.687.531,00**	**82.9**	**7.832.734.666,03**	**90.77**	**7.069.764.225,00**	**181.02**	**13.413.451.756,00**	**109.5**	**90.3**	**109.4**	**11.8**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**52.097.000,00**	**100**	**51.720.530,00**	**100**	**12.285.286,00**	**100**	**10.615.448,00**	**200**	**62.335.978,00**	**100**	**86.4**	**0**	**0**	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7.257.000,00	10	7.143.500,00	10	3.645.286,00	10	3.455.448,00	20	10.598.948,00	100	94.8	0	0	
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		44.840.000,00	1	44.577.030,00	1	8.640.000,00	1	7.160.000,00	2	51.737.030,00	100	82.9	0	0	
	1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**5.689.061.489,00**	**100**	**4.590.267.255,00**	**100**	**5.460.427.090,03**	**100**	**4.871.689.317,00**	**200**	**9.461.956.572,00**	**100**	**89.2**	**0**	**20.2**	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		5.686.812.689,00	36	4.588.097.255,00	36	5.459.686.330,03	43	4.870.984.817,00	79	9.459.082.072,00	119.4	89.2	0	20.3	
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2.248.800,00	5	2.170.000,00	5	740.760,00	5	704.500,00	10	2.874.500,00	100	95.1	0	0	
	1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**181.144.500,00**	**100**	**178.848.700,00**	**100**	**138.179.000,00**	**100**	**135.872.050,00**	**200**	**314.720.750,00**	**100**	**98.3**	**0**	**0**	
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		87.120.000,00	3	86.099.700,00	3	48.894.000,00	3	48.283.890,00	6	134.383.590,00	100	98.8	0	0	
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		94.024.500,00	60	92.749.000,00	60	89.285.000,00	60	87.588.160,00	120	180.337.160,00	100	98.1	0	0	
	1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**339.725.900,00**	**100**	**377.435.027,00**	**100**	**573.576.290,00**	**100**	**534.295.990,00**	**200**	**911.731.017,00**	**100**	**93.2**	**0**	**10.4**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		14.312.500,00	5	14.062.000,00	5	6.942.000,00	5	6.833.700,00	10	20.895.700,00	100	98.4	0	0	
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		35.161.000,00	11	34.881.400,00	11	45.536.000,00	11	45.323.380,00	22	80.204.780,00	100	99.5	0	39.4	
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4.882.400,00	12	4.687.000,00	12	17.339.090,00	12	16.716.500,00	24	21.403.500,00	100	96.4	0	127	
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		43.061.000,00	4	58.728.200,00	4	73.321.300,00	4	71.065.000,00	8	129.793.200,00	100	96.9	0	18.2	
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		15.603.000,00	2	20.781.075,00	2	18.867.600,00	2	18.059.000,00	4	38.840.075,00	100	95.7	0	0	
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		7.200.000,00	24	4.640.000,00	24	7.200.000,00	24	6.960.000,00	48	11.600.000,00	100	96.7	0	16.1	
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		195.506.000,00	80	195.005.352,00	80	230.245.300,00	80	199.291.960,00	160	394.297.312,00	100	86.6	0	3.1	
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		24.000.000,00	100	44.650.000,00	100	174.125.000,00	100	170.046.450,00	200	214.696.450,00	100	97.7	0	0	
	1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan**		**113.330.500,00**	**100**	**347.262.600,00**	**100**	**676.291.519,00**	**100**	**642.364.290,00**	**200**	**989.626.890,00**	**100**	**95**	**0**	**0**	
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		94.272.000,00	32	127.971.300,00	32	184.281.050,00	32	173.511.930,00	64	301.483.230,00	100	94.2	0	0	
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		19.058.500,00	8	219.291.300,00	8	492.010.469,00	8	468.852.360,00	16	688.143.660,00	100	95.3	0	0	
	1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**397.215.200,00**	**100**	**349.921.349,00**	**100**	**547.469.616,00**	**100**	**454.610.153,00**	**200**	**804.531.502,00**	**100**	**83**	**0**	**27.6**	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		93.404.000,00	4	87.550.809,00	4	192.050.716,00	4	109.236.893,00	8	196.787.702,00	100	56.9	0	29.2	
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		303.811.200,00	104	262.370.540,00	104	355.418.900,00	104	345.373.260,00	208	607.743.800,00	100	97.2	0	27.1	
	1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD Yang terpelihara sesuai standart**		**365.397.000,00**	**100**	**448.232.070,00**	**100**	**424.505.865,00**	**100**	**420.316.977,00**	**200**	**868.549.047,00**	**100**	**99**	**0**	**5.7**	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		116.599.000,00	28	160.359.570,00	28	152.334.400,00	28	151.614.387,00	56	311.973.957,00	100	99.5	0	17.8	
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		9.828.000,00	39	9.750.000,00	39	3.999.600,00	39	3.900.540,00	78	13.650.540,00	100	97.5	0	0	
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25.594.000,00	20	70.500.000,00	20	44.946.665,00	20	44.870.250,00	40	115.370.250,00	100	99.8	0	0	
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		175.000.000,00	3	169.876.800,00	3	141.725.200,00	3	138.946.200,00	6	308.823.000,00	100	98	0	0	
	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		38.376.000,00	3	37.745.700,00	3	81.500.000,00	3	80.985.600,00	6	118.731.300,00	100	99.4	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tertibnya administrasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan, adanya dukungan tenaga tambahan (TPL)																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih adanya kekurangan dalam sistem monitoring dan evaluasi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring kegiatan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pada RKPD																		
	1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik**	**100**	**15.047.530.000,00**	**98**	**10.992.916.398,00**	**99**	**7.820.076.567,00**	**99**	**7.668.135.657,00**	**197**	**18.661.052.055,00**	**100**	**98.1**	**99**	**0.7**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan**		**7.881.585.763,00**	**1.64**	**10.992.916.398,00**	**18.05**	**7.820.076.567,00**	**18.05**	**7.668.135.657,00**	**19.69**	**18.661.052.055,00**	**100**	**98.1**	**0**	**1.3**	
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun		1.609.220.000,00	0.59	2.256.419.900,00	0.346	953.925.020,00	0.35	938.209.200,00	0.94	3.194.629.100,00	101.2	98.4	0	0	
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		3.635.870.363,00	2.68	4.036.374.220,00	1.743	3.088.000.018,00	1.75	3.026.449.800,00	4.43	7.062.824.020,00	100.4	98	0	0	
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		478.761.000,00	3.65	2.856.808.557,00	2.5	2.205.466.580,00	2.5	2.169.880.500,00	6.15	5.026.689.057,00	100	98.4	0	0	
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		1.707.734.400,00	6.1	1.644.910.521,00	3.054	1.397.684.949,00	3.06	1.369.147.857,00	9.16	3.014.058.378,00	100.2	98	0	6.2	
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun		450.000.000,00	2	198.403.200,00	3	175.000.000,00	3	164.448.300,00	5	362.851.500,00	100	94	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya sumber air yang cukup , adanya partisipasi dari masyarakat (petani), anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterlambatan kelengkapan administrasi kegiatan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan perbaikan melalui peningkatan koordinasi , penegasan batas waktu pengumpulan dokumen, serta penyampaian informasi persyaratan administrasi secara lebih jelas dan terstruktur. Dan juga melakukan monitoring dan pengingat secara berkala guna memastikan setiap dokumen dapat																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan untuk tahun berikutnya																		
	1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam kondisi baik**	**90.2**	**1.408.284.000,00**	**90**	**121.382.000,00**	**90.1**	**265.365.000,00**	**86.36**	**126.601.000,00**	**176.36**	**247.983.000,00**	**95.8**	**47.7**	**95.7**	**0**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SPAM yang terbangun**		**450.000.000,00**	**79**	**121.382.000,00**	**89.47**	**265.365.000,00**	**86.36**	**126.601.000,00**	**165.31**	**247.983.000,00**	**96.5**	**47.7**	**0**	**0**	
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		200.000.000,00	1	121.382.000,00	1	265.365.000,00	1	126.601.000,00	2	247.983.000,00	100	47.7	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya sumber air yang cukup, adanya kerjasama dengan BUMD (PDAM) serta sarana dan prasarana kerja yang memadai																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tahun 2025 tIdak ada pembangunan fisik SPAM																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Malaksanakan sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan koordinasi yang lebih baik dengan perangkat daerah / pihak terkait																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan -kegiatan dalam RKPD																		
	1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dalam kondisi baik**	**86**	**3.074.535.470,00**	**84**	**3.374.241.860,00**	**85**	**1.074.295.180,00**	**94.68**	**912.642.108,00**	**178.68**	**4.286.883.968,00**	**111.4**	**85**	**110.1**	**0.3**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SPALD yang terbangun**		**2.138.385.900,00**	**79**	**3.374.241.860,00**	**89.47**	**1.074.295.180,00**	**94.68**	**912.642.108,00**	**173.63**	**4.286.883.968,00**	**105.8**	**85**	**0**	**0.5**	
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi		0,00	20	425.995.116,00	20	124.272.000,00	20	119.885.205,00	40	545.880.321,00	100	96.5	0	0	
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun		0,00	60	522.324.000,00	10	174.000.000,00	10	174.000.000,00	70	696.324.000,00	100	100	0	0	
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		0,00	499	730.050.424,00	200	64.734.580,00	592	45.745.390,00	1091	775.795.814,00	296	70.7	0	0	
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar		0,00	216	1.494.000.000,00	25	211.000.000,00	28	211.000.000,00	244	1.705.000.000,00	112	100	0	0	
	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		0,00	30	53.995.500,00	10	197.188.600,00	64	113.235.013,00	94	167.230.513,00	640	57.4	0	0	
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun		0,00	0	147.876.820,00	1	303.100.000,00	1	248.776.500,00	1	396.653.320,00	100	82.1	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat akan sanitasi, serta adanya insfrastruktur sanitasi yang lebih baik (IPLT)																		

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterlambatan kelengkapan administrasi kegiatan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan perbaikan melalui peningkatan koordinasi antar pihak terkait, penegasan batas waktu pengumpulan dokumen, serta penyampaian informasi persyaratan administrasi secara lebih jelas dan terstruktur.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan																		
	1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik**	**100**	**4.368.577.000,00**	**98**	**4.629.432.000,00**	**99.5**	**4.807.271.449,52**	**92.97**	**4.683.957.400,00**	**190.97**	**9.313.389.400,00**	**93.4**	**97.4**	**93**	**0**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara**		**5.027.759.000,00**	**99**	**4.629.432.000,00**	**1.93**	**4.807.271.449,52**	**1.93**	**4.683.957.400,00**	**100.93**	**9.313.389.400,00**	**100**	**97.4**	**0**	**0**	
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi		1.325.000.000,00	200	1.119.226.000,00	10	2.638.596.599,98	18	2.587.962.000,00	218	3.707.188.000,00	180	98.1	0	0	
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		3.225.000.000,00	400	3.054.557.000,00	16	1.727.655.049,54	11	1.676.524.100,00	411	4.731.081.100,00	68.8	97	0	0	
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun		117.759.000,00	3	101.026.000,00	1	111.019.800,00	1	99.220.000,00	4	200.246.000,00	100	89.4	0	0	
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara		360.000.000,00	400	354.623.000,00	3	330.000.000,00	3	320.251.300,00	403	674.874.300,00	100	97	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya koordinasi yang baik antar lintas OPD, tersedia sarana prasarana yang memadai serta adanya partisipasi masyarakat																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterlambatan pengajuan administrasi pencairan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan perbaikan melalui peningkatan koordinasi antar pihak terkait, penegasan batas waktu pengumpulan dokumen, serta penyampaian informasi persyaratan administrasi secara lebih jelas dan terstruktur																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melaksankaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan																		
	1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase gedung pemerintahan yang dibangun**	**100**	**8.158.417.500,00**	**100**	**9.534.982.900,00**	**95.83**	**9.388.632.271,45**	**100**	**8.838.590.620,00**	**200**	**18.373.573.520,00**	**104.4**	**94.1**	**100**	**0.2**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun**		**8.158.417.500,00**	**0**	**9.534.982.900,00**	**95.65**	**9.388.632.271,45**	**100**	**8.838.590.620,00**	**100**	**18.373.573.520,00**	**104.5**	**94.1**	**0**	**0.2**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan**		**11.541.510.300,00**	**48**	**9.534.982.900,00**	**100**	**9.388.632.271,45**	**100**	**8.838.590.620,00**	**148.03**	**18.373.573.520,00**	**100**	**94.1**	**0**	**0.2**	
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		10.791.560.000,00	1.95	9.103.623.900,00	2	9.160.617.271,45	2	8.647.172.620,00	3.95	17.750.796.520,00	100	94.4	0	0	
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penili	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataa		749.950.300,00	5	431.359.000,00	5	228.015.000,00	5	191.418.000,00	10	622.777.000,00	100	83.9	0	2.4	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta adanya kebijakan dan regulasi penunjang																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya Penyesuaian proses pelaksanaan pembangunan dengan rencana pembangunan kota																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan Efektifitas dan efisiensi rencana pelaksanaan pekerjaan sesuai waktu yang tersedia																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan																		
	1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase jalan dalam kondisi baik**	**100**	**9.827.062.000,00**	**99.6**	**16.375.402.376,00**	**99.8**	**9.493.921.532,00**	**94.99**	**9.051.999.958,00**	**194.59**	**25.427.402.334,00**	**95.2**	**95.3**	**95**	**2.1**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik**	**100**	**9.827.062.000,00**	**99.8**	**16.375.402.376,00**	**99.9**	**9.493.921.532,00**	**97.86**	**9.051.999.958,00**	**197.66**	**25.427.402.334,00**	**98**	**95.3**	**97.9**	**2.1**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase jalan yang dibangun**		**8.943.008.508,00**	**100**	**16.375.402.376,00**	**100**	**9.493.921.532,00**	**100**	**9.051.999.958,00**	**200**	**25.427.402.334,00**	**100**	**95.3**	**0**	**2.3**	
	1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi**	**0**	**8.943.008.508,00**	**5.2**	**16.375.402.376,00**	**5.0912**	**9.493.921.532,00**	**4.49**	**9.051.999.958,00**	**9.69**	**25.427.402.334,00**	**88.2**	**95.3**	**0**	**2.3**	
	1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase jembatan yang dipelihara**	**0**	**8.943.008.508,00**	**4.76**	**16.375.402.376,00**	**6.125**	**9.493.921.532,00**	**4.02**	**9.051.999.958,00**	**8.78**	**25.427.402.334,00**	**65.6**	**95.3**	**0**	**2.3**	
	1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Prosentase Jembatan yang dibangun**		**8.943.008.508,00**	**15**	**16.375.402.376,00**	**100**	**9.493.921.532,00**	**100**	**9.051.999.958,00**	**115**	**25.427.402.334,00**	**100**	**95.3**	**0**	**2.3**	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		300.000.000,00	3	297.468.000,00	3	550.000.000,00	7	516.228.447,00	10	813.696.447,00	233.3	93.9	0	0	
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		236.009.866,00	4	7.181.050.713,00	2	3.242.469.163,00	2	3.068.364.180,00	6	10.249.414.893,00	100	94.6	0	0	
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		200.000.000,00	160	218.818.000,00	4	300.003.000,00	4	299.609.980,00	164	518.427.980,00	100	99.9	0	0	
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi		302.999.919,00	2.7	298.803.841,00	3	1.082.831.377,00	3	962.217.003,00	5.7	1.261.020.844,00	100	88.9	0	0	
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi		5.068.999.507,00	3.02	5.953.519.595,00	1	3.063.195.492,00	1	3.010.835.809,00	4.02	8.964.355.404,00	100	98.3	0	0	
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		1.300.000.000,00	5.16	1.339.999.568,00	1	1.255.422.500,00	5.49	1.194.744.539,00	10.65	2.534.744.107,00	549	95.2	0	15.8	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya Partisipasi dan peran dari Masyarakat,tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta adanya tenaga pendukung di lapangan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterlambatan proes pengadaan barang / jasa serta terdapat kekurangan kelengkapan administrasi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan capaian target dan kegiatan selesai sesuai dengan jadwal yang direncanakan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melaksanakan evaluasi dan minitoring kegiatan																		
	1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar**	**100**	**448.125.000,00**	**100**	**699.882.540,00**	**100**	**612.177.100,00**	**100**	**449.447.483,00**	**200**	**1.149.330.023,00**	**100**	**73.4**	**100**	**1.9**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat**		**451.866.850,00**	**100**	**416.665.252,00**	**94.56**	**462.177.100,00**	**100**	**305.602.883,00**	**200**	**722.268.135,00**	**105.8**	**66.1**	**0**	**1.9**	
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi		291.666.650,00	106	250.732.144,00	75	262.006.000,00	75	168.619.883,00	181	419.352.027,00	100	64.4	0	0	
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya		160.200.200,00	370	165.933.108,00	250	200.171.100,00	257	136.983.000,00	627	302.916.108,00	102.8	68.4	0	5.2	
	1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI**		**150.000.000,00**	**60**	**283.217.288,00**	**80**	**150.000.000,00**	**100**	**143.844.600,00**	**160**	**427.061.888,00**	**125**	**95.9**	**0**	**0**	
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan		150.000.000,00	2.6	283.217.288,00	4	150.000.000,00	4	143.844.600,00	6.6	427.061.888,00	100	95.9	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya partisipasi badan usaha jasa konstruksi dalam kegiatan pengawasan tertib usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Dilakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pelaku dan badan usaha jasa konstruksi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melaksanakan evaaluasi kegaiatan - kegiatan																		
	1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase ketersediaan dokumen tata ruang**	**100**	**750.000.000,00**	**100**	**1.160.093.318,00**	**94.75**	**1.041.228.000,00**	**100**	**883.450.962,00**	**200**	**2.043.544.280,00**	**105.5**	**84.8**	**100**	**1.3**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Persentase persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW dan RRTR Kota**		**527.527.500,00**	**2**	**476.154.424,00**	**100**	**380.147.600,00**	**100**	**289.748.615,00**	**102**	**765.903.039,00**	**100**	**76.2**	**0**	**0**	
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		0,00	1	74.481.000,00	1	85.000.000,00	1	84.471.000,00	2	158.952.000,00	100	99.4	0	0	
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota		308.961.500,00	1	212.303.383,00	1	79.500.000,00	1	78.480.865,00	2	290.784.248,00	100	98.7	0	0	
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota		129.315.000,00	4	122.332.795,00	1	159.750.000,00	0	76.383.000,00	4	198.715.795,00	0	47.8	0	0	
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.		0,00	0	0,00	1	55.897.600,00	1	50.413.750,00	1	50.413.750,00	100	90.2	0	0	
	1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tata Ruang**		**657.320.000,00**	**100**	**273.055.240,00**	**100**	**255.610.000,00**	**100**	**254.864.454,00**	**200**	**527.919.694,00**	**100**	**99.7**	**0**	**0.8**	
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku		0,00	165	98.608.750,00	150	80.610.000,00	218	80.382.000,00	383	178.990.750,00	145.3	99.7	0	0	
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang		557.320.000,00	1	99.798.990,00	1	100.000.000,00	1	99.601.854,00	2	199.400.844,00	100	99.6	0	0	
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		0,00	0	0,00	1	75.000.000,00	1	74.880.600,00	1	74.880.600,00	100	99.8	0	0	
	1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketidaksesuaian tata ruang yang ditindaklanjuti**		**726.868.200,00**	**10.8**	**410.883.654,00**	**100**	**405.470.400,00**	**100**	**338.837.893,00**	**110.75**	**749.721.547,00**	**100**	**83.6**	**0**	**0.6**	
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		267.810.200,00	4	144.117.654,00	1	125.034.400,00	1	111.011.158,00	5	255.128.812,00	100	88.8	0	0	
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		76.098.000,00	1	75.558.000,00	1	78.036.000,00	1	77.994.600,00	2	153.552.600,00	100	99.9	0	0	
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		107.960.000,00	12	37.175.000,00	12	102.400.000,00	12	50.400.000,00	24	87.575.000,00	100	49.2	0	4.1	
	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR		200.000.000,00	4	154.033.000,00	1	100.000.000,00	1	99.432.135,00	5	253.465.135,00	100	99.4	0	0	
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya Koordinasi yang baik dengan perangkat daerah terkait																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya penjadwalan dan kebijakan yang belum pasti dari kementerian ATR																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan koordinasi yang lebih efektif dengan kementrian ATR / pihak - pihak terkait																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melaksanakan evaluasi kegiatan																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**98.35**	**93.74**			
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	104	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**																
	1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**81.17**	**5.685.847.796,00**	**92.4**	**4.675.910.111,00**	**90**	**5.385.605.117,00**	**95.3**	**4.836.653.857,00**	**187.72**	**9.512.563.968,00**	**105.9**	**89.8**	**117.4**	**18.7**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
	1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**18.145.000,00**	**100**	**8.135.000,00**	**100**	**781.100,00**	**100**	**773.100,00**	**200**	**8.908.100,00**	**100**	**99**	**0**	**0**	
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.375.500,00	15	3.370.000,00	15	611.000,00	15	603.000,00	30	3.973.000,00	100	98.7	0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		14.769.500,00	12	4.765.000,00	12	170.100,00	12	170.100,00	24	4.935.100,00	100	100	0	0	
	1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**3.425.254.318,00**	**100**	**3.255.294.552,00**	**100**	**3.609.100.561,00**	**100**	**3.174.375.865,00**	**200**	**6.429.670.417,00**	**100**	**88**	**0**	**23**	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		3.422.204.318,00	24	3.252.244.552,00	25	3.608.850.561,00	26	3.174.163.365,00	50	6.426.407.917,00	104	88	0	23	
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		3.050.000,00	7	3.050.000,00	7	250.000,00	7	212.500,00	14	3.262.500,00	100	85	0	0	
	1.04.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**108.546.800,00**	**100**	**105.860.000,00**	**100**	**89.707.400,00**	**100**	**58.641.825,00**	**200**	**164.501.825,00**	**100**	**65.4**	**0**	**0.6**	
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		69.755.000,00	2	67.515.000,00	1	12.515.000,00	1	12.388.825,00	3	79.903.825,00	100	99	0	0	
	1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		38.791.800,00	49	38.345.000,00	50	77.192.400,00	50	46.253.000,00	99	84.598.000,00	100	59.9	0	1.8	
	1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**322.423.800,00**	**100**	**356.286.281,00**	**100**	**223.683.550,00**	**100**	**202.430.281,00**	**200**	**558.716.562,00**	**100**	**90.5**	**0**	**15.7**	
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8.689.100,00	1	8.112.000,00	1	4.909.900,00	1	4.868.500,00	2	12.980.500,00	100	99.2	0	56	
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		21.709.200,00	3	20.402.500,00	3	18.943.600,00	3	17.743.380,00	6	38.145.880,00	100	93.7	0	41.2	
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		13.289.300,00	4	12.057.000,00	4	10.385.400,00	4	10.287.000,00	8	22.344.000,00	100	99.1	0	77.4	
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		49.025.000,00	30	56.445.000,00	30	59.425.000,00	30	58.225.000,00	60	114.670.000,00	100	98	0	29.7	
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		19.582.400,00	1	18.986.400,00	1	10.270.000,00	1	10.250.000,00	2	29.236.400,00	100	99.8	0	25.5	
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		199.923.000,00	49	213.333.381,00	20	100.006.000,00	31	99.776.401,00	80	313.109.782,00	155	99.8	0	3.5	
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		10.205.800,00	5	26.950.000,00	5	19.743.650,00	5	1.280.000,00	10	28.230.000,00	100	6.5	0	0	
	1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan**		**26.356.098,00**	**87**	**29.300.000,00**	**88**	**168.622.100,00**	**88**	**167.701.020,00**	**175**	**197.001.020,00**	**100**	**99.5**	**0**	**0**	
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0,00	0	0,00	1	11.571.800,00	2	11.479.620,00	2	11.479.620,00	200	99.2	0	0	
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		26.356.098,00	3	29.300.000,00	8	157.050.300,00	11	156.221.400,00	14	185.521.400,00	137.5	99.5	0	0	
	1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**790.913.055,00**	**104**	**784.113.775,00**	**100**	**876.345.800,00**	**102**	**831.413.034,00**	**206**	**1.615.526.809,00**	**102**	**94.9**	**0**	**24.1**	
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		51.119.055,00	33	54.707.787,00	36	76.488.000,00	36	48.617.052,00	69	103.324.839,00	100	63.6	0	30.6	
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		739.794.000,00	286	729.405.988,00	286	799.857.800,00	282	782.795.982,00	568	1.512.201.970,00	98.6	97.9	0	23.7	
	1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**171.858.400,00**	**100**	**136.920.503,00**	**100**	**417.364.606,00**	**100**	**401.318.732,00**	**200**	**538.239.235,00**	**100**	**96.2**	**0**	**19**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		141.773.400,00	8	102.245.503,00	11	137.817.200,00	11	125.708.232,00	19	227.953.735,00	100	91.2	0	23	
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		30.085.000,00	25	34.675.000,00	25	40.654.000,00	30	39.773.900,00	55	74.448.900,00	120	97.8	0	0	
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0,00	0	0,00	1	209.238.406,00	1	206.536.600,00	1	206.536.600,00	100	98.7	0	0	
	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0,00	0	0,00	1	29.655.000,00	1	29.300.000,00	1	29.300.000,00	100	98.8	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Monitoring dan evaluasi dilaksanakan tiap bulan, SDM yang berdaya																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : SDM yang kurang sehingga menyebabkan belanja gaji & tunjangan ASN tidak terserap secara maksimal. Selain itu terdapat sisa dari beberapa belanja yang harganya lebih rendah daripada HPS sesuai DPA.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Monitoring dan evaluasi tetap dilaksanakan tiap bulan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Dilaksanakan perencanaan yang lebih dalam																		
	1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase tingkat hunian Rusunawa**	**95**	**2.723.358.875,00**	**95**	**930.165.943,00**	**95**	**1.810.982.315,00**	**95**	**1.705.194.410,00**	**190**	**2.635.360.353,00**	**100**	**94.2**	**100**	**5.6**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
	1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah**	**100**	**2.723.358.875,00**	**100**	**930.165.943,00**	**100**	**1.810.982.315,00**	**100**	**1.705.194.410,00**	**200**	**2.635.360.353,00**	**100**	**94.2**	**100**	**5.6**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
	1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau reloksi program pemerintah yang tersusun dan terupdate**		**61.974.800,00**	**80**	**117.818.450,00**	**85**	**219.608.500,00**	**85**	**218.215.300,00**	**165**	**336.033.750,00**	**100**	**99.4**	**0**	**1.7**	
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus		0,00	0	0,00	1	127.759.450,00	1	126.456.250,00	1	126.456.250,00	100	99	0	0	
	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	4	0,00	2	117.818.450,00	1	2.530.000,00	1	2.520.000,00	3	120.338.450,00	100	99.6	25	0	
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi		0,00	0	0,00	1	89.319.050,00	1	89.239.050,00	1	89.239.050,00	100	99.9	0	0	
	1.04.02.2.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi**		**21.865.000,00**	**100**	**42.631.900,00**	**100**	**31.282.000,00**	**100**	**29.026.000,00**	**200**	**71.657.900,00**	**100**	**92.8**	**0**	**0**	
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		21.865.000,00	100	42.631.900,00	60	22.883.000,00	60	20.692.500,00	160	63.324.400,00	100	90.4	0	0	
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih		0,00	0	0,00	40	8.399.000,00	40	8.333.500,00	40	8.333.500,00	100	99.2	0	0	
	1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota**		**74.707.350,00**	**100**	**42.504.915,00**	**100**	**86.916.900,00**	**100**	**14.136.319,00**	**200**	**56.641.234,00**	**100**	**16.3**	**0**	**0**	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		74.707.350,00	2	42.504.915,00	6	83.916.900,00	2	14.136.319,00	4	56.641.234,00	33.3	16.8	0	0	
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota		0,00	0	0,00	1	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**IKM Pengelolaan Rusunawa**	**0**	**635.911.529,00**	**92.4**	**727.210.678,00**	**92**	**1.473.174.915,00**	**93.3**	**1.443.816.791,00**	**185.72**	**2.171.027.469,00**	**101.4**	**98**	**0**	**23.6**	
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		0,00	0	0,00	1	26.548.800,00	1	26.133.500,00	1	26.133.500,00	100	98.4	0	0	
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		635.911.529,00	1	727.210.678,00	1	1.446.626.115,00	1	1.417.683.291,00	2	2.144.893.969,00	100	98	0	22.4	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat cukup baik																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : -Ketersediaan data maupun persyaratan teknis belum dapat menjangkau seluruh kebutuhan data dalam setiap tahapan SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana Permen PUPR 12 / 2023																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : "- Mengidentifikasi data yang belum tersedia - Pemutakhiran data pelaksanaan SPM secara berkala - Koordinasi dengan BPBD dan OPD terkait"																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : "- Penguatan regulasi SPM di daerah - Pendataan Rumah di Kota Blitar secara menyeluruh dan terintegrasi - Pendataan rumah pada daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya - Updating data rumah yang berada pada aerah rawan bencana"																		
	1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh**	**65.45**	**14.227.722.435,00**	**85.1**	**1.797.779.523,00**	**2.2**	**3.513.381.566,07**	**2.42**	**2.966.768.142,00**	**87.52**	**4.764.547.665,00**	**110**	**84.4**	**3.7**	**1.4**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
	1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman**	**75.66**	**14.227.722.435,00**	**87.5**	**1.797.779.523,00**	**85.22**	**3.513.381.566,07**	**91.68**	**2.966.768.142,00**	**179.16**	**4.764.547.665,00**	**107.6**	**84.4**	**121.2**	**1.4**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
	1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman**	**72**	**14.227.722.435,00**	**2.31**	**1.797.779.523,00**	**88.12**	**3.513.381.566,07**	**98.84**	**2.966.768.142,00**	**101.15**	**4.764.547.665,00**	**112.2**	**84.4**	**137.3**	**1.4**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
	1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun**		**115.000.000,00**	**5**	**126.505.165,00**	**2**	**160.433.400,00**	**5**	**159.233.870,00**	**10**	**285.739.035,00**	**250**	**99.3**	**0**	**2.5**	
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi		0,00	1	88.072.665,00	1	148.508.800,00	3	147.340.470,00	4	235.413.135,00	300	99.2	0	0	
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina		0,00	2	9.773.500,00	2	11.924.600,00	2	11.893.400,00	4	21.666.900,00	100	99.7	0	0	
	1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya**		**1.760.359.500,00**	**189**	**1.671.274.358,00**	**207**	**3.352.948.166,07**	**211**	**2.807.534.272,00**	**400**	**4.478.808.630,00**	**101.9**	**83.7**	**0**	**10.9**	
	1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik**		**1.760.359.500,00**	**####**	**1.671.274.358,00**	**120597, 31**	**3.352.948.166,07**	**1E+05**	**2.807.534.272,00**	**334721.42**	**4.478.808.630,00**	**112.2**	**83.7**	**0**	**10.9**	
	1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik**		**1.760.359.500,00**	**####**	**1.671.274.358,00**	**200768, 91**	**3.352.948.166,07**	**2E+05**	**2.807.534.272,00**	**335717.63**	**4.478.808.630,00**	**107.6**	**83.7**	**0**	**10.9**	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		426.305.000,00	21	416.902.500,00	22	363.367.600,00	22	363.360.100,00	43	780.262.600,00	100	100	0	0.8	
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		259.046.900,00	4	411.354.936,00	2	1.634.874.313,01	2	1.106.755.276,00	6	1.518.110.212,00	100	67.7	0	34	
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		25.000.000,00	1	45.754.625,00	1	17.091.000,00	1	16.578.800,00	2	62.333.425,00	100	97	0	0	
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan		0,00	10.53	797.262.297,00	4.5	1.337.615.253,06	16.05	1.320.840.096,00	26.58	2.118.102.393,00	356.7	98.7	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal																		

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
Faktor penghambat pencapaian kinerja : tumpang tindih antara pekerjaan OPD dengan pekerjaan yang dilakukan oleh kelurahan/kecamatan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perlu adanya koordinasi sebelum pelaksanaan kegiatan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Lebih mengintensifkan lagi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalm perencanaan program dan kegiatan																		
	1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh**	**5.15**	**3.249.141.200,00**	**30.7**	**3.048.376.885,00**	**20.11**	**1.999.672.000,00**	**23.37**	**1.959.160.652,00**	**54.02**	**5.007.537.537,00**	**116.2**	**98**	**453.8**	**0.8**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
	1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)**	**99.93**	**3.249.141.200,00**	**1.55**	**3.048.376.885,00**	**0.62**	**1.999.672.000,00**	**0.62**	**1.959.160.652,00**	**2.17**	**5.007.537.537,00**	**100**	**98**	**0.6**	**0.8**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
	1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan**	**0**	**2.053.225.100,00**	**95**	**3.048.376.885,00**	**95**	**1.999.672.000,00**	**95**	**1.959.160.652,00**	**190**	**5.007.537.537,00**	**100**	**98**	**0**	**1.3**	
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		2.053.225.100,00	185	3.048.376.885,00	118	1.967.527.800,00	112	1.930.048.152,00	297	4.978.425.037,00	94.9	98.1	0	1.3	
	1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		0,00	0	0,00	100	32.144.200,00	100	29.112.500,00	100	29.112.500,00	100	90.6	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : "- Database Rumah Tidak Layak Huni terhimpun dan terkelola dengan baik - Semangat Gotong Royong lingkungan yang masih tinggi mendukung terlaksananya pembangunan"																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : "- Data bersifat dinamis dan cenderung bertambah - Kondisi sosial ekonomi calon penerima bansos RTLH sangat mempengaruhi kemampuan swadaya yang berpengaruh pada kemampuannya sebagai penerima program - Adanya kepercayaan/adat istiadat penggunaan hari baik membuat pelaksanaan harus menyesuaikan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : "- Verifikasi data - Sosialisasi kepada calon penerima RTLH tentang syarat dan mekanisme pelaksanaan bansos - Penguatan peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam mendampingi dan mengawal penerima bantuan - Monitoring dan evaluasi yang lebih dalam dan intens ke seluruh penerima bantuan -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : "- Melaksanakan sesuai jadwal pada setiap tahapan mekanisme bansos RTLH - Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepeda penerima bantuan terkait tahapan dan mekanisme Bansos"																		
	1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan**	**70**	**2.157.210.798,00**	**87**	**1.405.197.636,00**	**88**	**1.232.924.588,93**	**88.38**	**1.215.007.987,00**	**175.38**	**2.620.205.623,00**	**100.4**	**98.5**	**126.3**	**1.9**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
	1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan**	**70**	**2.157.210.798,00**	**92.5**	**1.405.197.636,00**	**95**	**1.232.924.588,93**	**95.79**	**1.215.007.987,00**	**188.29**	**2.620.205.623,00**	**100.8**	**98.5**	**136.8**	**1.9**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
	1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik**		**795.195.000,00**	**####**	**1.405.197.636,00**	**16273,21**	**1.232.924.588,93**	**16357**	**1.215.007.987,00**	**32444.81**	**2.620.205.623,00**	**100.5**	**98.5**	**0**	**5.1**	
	1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik**		**795.195.000,00**	**####**	**1.405.197.636,00**	**31476,33**	**1.232.924.588,93**	**31091**	**1.215.007.987,00**	**61122.07**	**2.620.205.623,00**	**98.8**	**98.5**	**0**	**5.1**	
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		790.425.000,00	5	1.397.290.136,00	4	1.219.982.988,93	4	1.202.136.987,00	9	2.599.427.123,00	100	98.5	0	4.8	
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		4.770.000,00	4	7.907.500,00	4	12.941.600,00	4	12.871.000,00	8	20.778.500,00	100	99.5	0	55.2	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : "- Sebagian Perumahan telah menyerahkan aset PSU kepada Pemerintah Daerah -Perencanaan dan pelaksanaan peningkatan / pemeliharaan aset PSU Perumahan dilakukan dengan baik"																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : "- Masih ada pengembang yang belum melakukan penyerahan aset PSU Perumahan - Ketaatan pengembang dalam membangun perumahan baru sesuai ketentuan masih perlu ditingkatkan"																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : "-Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pengembang terkait penyerahan PSU Perumahan -Rekomendasi siteplan disusun dengan dilakukan koordinasi bersama OPD terkait"																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : "-Perencanaan dan pelaksanaan konstruksi fisik peningkatan PSU / pemeliharaan PSU Perumahan sesuai jadwal - Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perumahan dan penyerahan aset PSU Perumahan lebih intensif - Sosialisasi dan pembinaan kepada pengembang perumahan"																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**100.00**	**90.96**			
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	105	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**																
	1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**82.25**	**7.103.761.713,00**	**84.7**	**6.854.803.133,00**	**82**	**8.184.421.989,04**	**91.92**	**7.296.598.879,00**	**176.58**	**14.151.402.012,00**	**112.1**	**89.2**	**111.8**	**23.3**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**20.405.300,00**	**100**	**13.926.900,00**	**100**	**9.465.300,00**	**100**	**9.383.100,00**	**200**	**23.310.000,00**	**100**	**99.1**	**0**	**0**	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.106.400,00	10	3.042.720,00	10	1.796.500,00	10	1.796.500,00	20	4.839.220,00	100	100	0	0	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		17.298.900,00	7	10.884.180,00	7	7.668.800,00	7	7.586.600,00	14	18.470.780,00	100	98.9	0	0	
	1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**2.102.119.819,00**	**100**	**5.577.736.746,00**	**100**	**6.894.507.104,00**	**100**	**6.082.282.443,00**	**200**	**11.660.019.189,00**	**100**	**88.2**	**0**	**69**	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		5.029.045.122,00	47	5.576.844.096,00	45	6.893.446.604,00	225	6.081.221.943,00	272	11.658.066.039,00	500	88.2	0	28.8	
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		913.000,00	4	892.650,00	4	1.060.500,00	4	1.060.500,00	8	1.953.150,00	100	100	0	0	
	1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**185.180.300,00**	**100**	**179.232.800,00**	**100**	**138.588.900,00**	**100**	**109.746.000,00**	**200**	**288.978.800,00**	**100**	**79.2**	**0**	**51.1**	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		131.509.900,00	7	126.074.800,00	4	100.587.700,00	4	94.669.900,00	11	220.744.700,00	100	94.1	0	72	
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		53.670.400,00	45	53.158.000,00	45	38.001.200,00	45	15.076.100,00	90	68.234.100,00	100	39.7	0	0	
	1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**235.084.100,00**	**100**	**286.360.414,00**	**100**	**159.967.900,00**	**100**	**156.510.837,00**	**200**	**442.871.251,00**	**100**	**97.8**	**0**	**8.2**	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5.113.600,00	1	6.133.000,00	1	10.096.800,00	1	9.793.419,00	2	15.926.419,00	100	97	0	0	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		17.451.200,00	3	16.246.900,00	4	20.712.600,00	4	19.932.500,00	7	36.179.400,00	100	96.2	0	0	
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5.960.500,00	5	7.152.000,00	7	8.683.900,00	7	8.320.950,00	12	15.472.950,00	100	95.8	0	0	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		13.500.000,00	12	18.730.000,00	3	14.700.000,00	3	14.650.000,00	15	33.380.000,00	100	99.7	0	17.6	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		7.517.800,00	12	6.662.740,00	12	8.882.600,00	12	8.794.400,00	24	15.457.140,00	100	99	0	0	
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		5.400.000,00	1	4.320.000,00	1	5.400.000,00	1	4.320.000,00	2	8.640.000,00	100	80	0	0	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		180.141.000,00	46	227.115.774,00	46	91.492.000,00	46	90.699.568,00	92	317.815.342,00	100	99.1	0	9.3	
	1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan**		**121.059.900,00**	**100**	**120.650.000,00**	**100**	**133.782.500,00**	**100**	**124.132.500,00**	**200**	**244.782.500,00**	**100**	**92.8**	**0**	**0**	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10.673.200,00	1	8.500.000,00	7	22.159.200,00	7	18.981.000,00	8	27.481.000,00	100	85.7	0	0	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		110.386.700,00	9	112.150.000,00	8	111.623.300,00	8	105.151.500,00	17	217.301.500,00	100	94.2	0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**159.779.124,00**	**100**	**208.782.878,00**	**100**	**264.053.210,00**	**100**	**241.163.653,00**	**200**	**449.946.531,00**	**100**	**91.3**	**0**	**34.7**	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		66.503.124,00	24	76.072.504,00	24	120.729.810,00	24	108.371.229,00	48	184.443.733,00	100	89.8	0	33.4	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		93.276.000,00	24	132.710.374,00	24	143.323.400,00	24	132.792.424,00	48	265.502.798,00	100	92.7	0	35.6	
	1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**259.787.000,00**	**100**	**468.113.395,00**	**100**	**584.057.075,04**	**100**	**573.380.346,00**	**200**	**1.041.493.741,00**	**100**	**98.2**	**0**	**14.2**	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		288.277.300,00	30	296.360.595,00	33	249.523.130,00	33	244.610.269,00	63	540.970.864,00	100	98	0	12.8	
	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		1.800.000,00	5	1.775.000,00	5	1.800.000,00	5	1.748.250,00	10	3.523.250,00	100	97.1	0	0	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		18.513.000,00	9	17.820.000,00	29	20.739.000,00	29	20.460.000,00	38	38.280.000,00	100	98.7	0	0	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		24.480.000,00	2	152.157.800,00	2	311.994.945,04	2	306.561.827,00	4	458.719.627,00	100	98.3	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Fasilitasi penyediaan penunjang dan pelayanan umum urusan perangkat daerah telah dilaksanakan dengan baik																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelaporan kegiatan yang belum sesuai jadwal																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan dan pellaporannya sesuai jadwal yang telah ditentukan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melaksanakan kegiatan dan pellaporannya sesuai jadwal yang telah ditentukan																		
	1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan**	**99.04**	**11.312.424.970,00**	**96.9**	**5.792.848.168,00**	**98.14**	**4.037.098.314,96**	**99.71**	**3.820.728.303,00**	**196.63**	**9.613.576.471,00**	**101.6**	**94.6**	**100.7**	**5.8**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan**	**99.39**	**11.312.424.970,00**	**98**	**5.792.848.168,00**	**97.71**	**4.037.098.314,96**	**98.25**	**3.820.728.303,00**	**196.24**	**9.613.576.471,00**	**100.6**	**94.6**	**98.9**	**5.8**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**		**4.505.227.611,00**	**100**	**4.717.354.118,00**	**100**	**3.056.940.580,96**	**100**	**3.008.194.188,00**	**200**	**7.725.548.306,00**	**100**	**98.4**	**0**	**14**	
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		304.606.310,00	12	633.020.060,00	12	21.258.900,00	12	21.231.900,00	24	654.251.960,00	100	99.9	0	0	
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1.318.195.194,00	1	1.203.045.690,00	1	159.765.000,00	1	155.340.190,00	2	1.358.385.880,00	100	97.2	0	0.6	
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		116.817.208,00	45	117.724.150,00	45	63.705.500,00	45	59.654.000,00	90	177.378.150,00	100	93.6	0	14.9	
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		0,00	0	2.656.720.008,00	4	2.787.744.080,96	4	2.748.320.598,00	4	5.405.040.606,00	100	98.6	0	0	
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		0,00	0	46.763.560,00	4	24.467.100,00	4	23.647.500,00	4	70.411.060,00	100	96.7	0	0	
	1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada**		**770.023.491,00**	**100**	**1.065.521.250,00**	**100**	**974.940.934,00**	**100**	**807.557.315,00**	**200**	**1.873.078.565,00**	**100**	**82.8**	**0**	**3.1**	
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		0,00	0	592.133.850,00	1	359.140.900,00	1	325.809.600,00	1	917.943.450,00	100	90.7	0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		0,00	0	462.671.800,00	12	603.336.234,00	12	469.503.115,00	12	932.174.915,00	100	77.8	0	0	
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		0,00	0	10.715.600,00	12	12.463.800,00	12	12.244.600,00	12	22.960.200,00	100	98.2	0	0	
	1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan**		**10.361.200,00**	**100**	**9.972.800,00**	**100**	**5.216.800,00**	**100**	**4.976.800,00**	**200**	**14.949.600,00**	**100**	**95.4**	**0**	**0**	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		0,00	0	9.972.800,00	2	5.216.800,00	2	4.976.800,00	2	14.949.600,00	100	95.4	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Patroli dalam Kegiatan patroli dalam rangka pencegahan gangguan ketentraman ketertiban umum sudah rutin dilakukan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat terhadap peraturan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan sosialisasi secara persuasif dan humanis pada saat melaksanakan patroli																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan sosialisasi secara persuasif dan humanis pada saat melaksanakan patroli																		
	1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase kejadian kebakaran yang tertangani**	**100**	**8.617.532.550,00**	**100**	**564.816.945,00**	**100**	**316.595.800,00**	**100**	**294.628.529,00**	**200**	**859.445.474,00**	**100**	**93.1**	**100**	**0.8**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran**		**44.802.800,00**	**100**	**76.460.800,00**	**100**	**180.789.658,00**	**100**	**163.313.779,00**	**200**	**239.774.579,00**	**100**	**90.3**	**0**	**134.9**	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		6.900.000,00	1	6.829.800,00	1	43.895.500,00	1	32.876.500,00	2	39.706.300,00	100	74.9	0	0	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		14.528.000,00	12	13.140.000,00	12	7.072.500,00	12	6.267.500,00	24	19.407.500,00	100	88.6	0	0	
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran		3.400.000,00	12	3.382.000,00	12	8.541.258,00	12	8.466.000,00	24	11.848.000,00	100	99.1	0	65.5	
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		10.791.600,00	12	37.959.000,00	12	89.580.968,00	12	84.688.350,00	24	122.647.350,00	100	94.5	0	539.5	
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		0,00	0	15.150.000,00	4	31.699.432,00	4	31.015.429,00	4	46.165.429,00	100	97.8	0	0	
	1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi**		**298.603.100,00**	**100**	**345.873.985,00**	**100**	**83.659.442,00**	**100**	**83.022.200,00**	**200**	**428.896.185,00**	**100**	**99.2**	**0**	**3.6**	
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran		292.862.900,00	1	340.273.985,00	1	74.603.742,00	1	74.426.900,00	2	414.700.885,00	100	99.8	0	3.6	
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		5.740.200,00	1	5.600.000,00	1	9.055.700,00	1	8.595.300,00	2	14.195.300,00	100	94.9	0	0	
	1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran**		**173.432.800,00**	**20**	**142.482.160,00**	**20**	**52.146.700,00**	**20**	**48.292.550,00**	**40**	**190.774.710,00**	**100**	**92.6**	**0**	**0**	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		127.670.800,00	140	93.800.000,00	140	20.522.100,00	140	18.235.500,00	280	112.035.500,00	100	88.9	0	0	
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya		45.762.000,00	7	48.682.160,00	21	31.624.600,00	21	30.057.050,00	28	78.739.210,00	100	95	0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Patroli dan kesiapsiagaan petugas piket 24 jam sudah rutin dilaksanakan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran masih rendah																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat																		
	1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**88.85**	**6.434.806.662,00**	**84.3**	**3.347.783.721,00**	**84.16**	**3.776.254.098,73**	**91.02**	**3.445.692.703,00**	**175.34**	**6.793.476.424,00**	**108.2**	**91.2**	**102.4**	**10.7**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**	**100**	**24.610.500,00**	**100**	**8.191.000,00**	**100**	**6.388.900,00**	**100**	**5.934.800,00**	**200**	**14.125.800,00**	**100**	**92.9**	**100**	**0**	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48	6.473.500,00	12	6.017.500,00	12	2.684.300,00	12	2.470.900,00	24	8.488.400,00	100	92.1	25	0	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80	18.137.000,00	20	2.173.500,00	20	3.704.600,00	20	3.463.900,00	40	5.637.400,00	100	93.5	25	0	
	1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar**	**100**	**2.102.119.819,00**	**70**	**2.114.314.672,00**	**100**	**2.370.112.974,00**	**64**	**2.153.552.158,00**	**134**	**4.267.866.830,00**	**64**	**90.9**	**64**	**25**	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	2.097.241.319,00	15	2.112.855.172,00	25	2.366.403.974,00	17	2.150.154.158,00	32	4.263.009.330,00	68	90.9	17	25.1	
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	4.878.500,00	5	1.459.500,00	5	3.709.000,00	5	3.398.000,00	10	4.857.500,00	100	91.6	25	0	
	1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**	**100**	**138.933.800,00**	**100**	**148.745.200,00**	**100**	**161.072.610,00**	**150**	**113.555.119,00**	**250**	**262.300.319,00**	**150**	**70.5**	**150**	**5.2**	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12	14.902.000,00	2	43.165.000,00	1	30.944.600,00	2	30.396.119,00	4	73.561.119,00	200	98.2	16.7	0	
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	124.031.800,00	25	105.580.200,00	25	130.128.010,00	25	83.159.000,00	50	188.739.200,00	100	63.9	25	5.8	
	1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar**	**100**	**349.592.400,00**	**99.7**	**374.873.649,00**	**100**	**206.726.228,00**	**93.15**	**190.617.447,00**	**192.87**	**565.491.096,00**	**93.2**	**92.2**	**93.2**	**2.2**	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	8.181.500,00	1	8.057.500,00	1	17.102.500,00	1	16.210.995,00	2	24.268.495,00	100	94.8	25	0	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	27.092.400,00	1	26.820.100,00	1	22.184.700,00	1	17.421.783,00	2	44.241.883,00	100	78.5	8.3	0	
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	9.857.200,00	1	9.821.000,00	1	11.218.700,00	1	8.582.292,00	2	18.403.292,00	100	76.5	8.3	0	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32	27.209.000,00	1	36.582.750,00	1	20.732.390,00	1	20.267.600,00	2	56.850.350,00	100	97.8	3.1	0	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	40.788.300,00	1	19.276.050,00	1	21.315.238,00	1	14.684.873,00	2	33.960.923,00	100	68.9	25	0	
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96	5.400.000,00	24	4.320.000,00	24	5.400.000,00	24	4.920.000,00	48	9.240.000,00	100	91.1	25	0	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	231.064.000,00	50	269.996.249,00	50	108.772.700,00	26	108.529.904,00	76	378.526.153,00	52	99.8	13	3.4	
	1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan**		**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**102.014.200,00**	**83.34**	**93.208.649,00**	**83.34**	**93.208.649,00**	**83.3**	**91.4**	**0**	**0**	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0,00	0	0,00	9	25.148.000,00	6	24.149.999,00	6	24.149.999,00	66.7	96	0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0,00	0	0,00	7	76.866.200,00	7	69.058.650,00	7	69.058.650,00	100	89.8	0	0	
	1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar**	**100**	**559.117.563,00**	**121**	**538.060.063,00**	**100**	**612.627.987,00**	**95.84**	**583.040.691,00**	**216.78**	**1.121.100.754,00**	**95.8**	**95.2**	**95.8**	**24.2**	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	41.292.063,00	24	37.272.003,00	36	77.570.487,00	33	62.779.804,00	57	100.051.807,00	91.7	80.9	22.9	33.4	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52	517.825.500,00	13	500.788.060,00	13	535.057.500,00	13	520.260.887,00	26	1.021.048.947,00	100	97.2	25	23.5	
	1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar**	**100**	**259.787.000,00**	**65.3**	**163.599.137,00**	**100**	**317.311.199,73**	**82.6**	**305.783.839,00**	**147.94**	**469.382.976,00**	**82.6**	**96.4**	**82.6**	**5.1**	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	180.957.000,00	11	129.263.637,00	11	117.100.800,00	9	111.625.343,00	20	240.888.980,00	81.8	95.3	15	7.3	
	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	80	6.918.000,00	11	6.050.000,00	28	7.990.000,00	11	7.605.000,00	22	13.655.000,00	39.3	95.2	13.8	0	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	148	17.512.000,00	37	28.285.500,00	37	49.195.000,00	34	46.629.496,00	71	74.914.996,00	91.9	94.8	23	0	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0,00	0	0,00	1	52.975.800,00	1	52.068.000,00	1	52.068.000,00	100	98.3	0	0	
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	54.400.000,00	0	0,00	1	90.049.599,73	1	87.856.000,00	1	87.856.000,00	100	97.6	16.7	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi yang baik antara penanggungjawab kegiatan dan pelaksana																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang relatif mundur																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perencanaan yang lebih matang di awal, serta koordinasi yang lebih intens antara pimpinan, penanggungjawab kegiatan dan pelaksana																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Mengidentifikasi kegiatan yang perlu dioptimalkan / dievaluasi jika belum mencapai target 2. Memastikan pengajuan kegiatan telah disusun pada dokumen perencanaan 3. Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan jadwal yang telah ditentukan																		
	1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih**	**100**	**0,00**	**100**	**860.799.559,00**	**94**	**994.478.260,27**	**94.39**	**815.238.078,00**	**194.39**	**1.676.037.637,00**	**100.4**	**82**	**94.4**	**0**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya**	**3**	**0,00**	**2**	**860.799.559,00**	**3**	**994.478.260,27**	**3**	**815.238.078,00**	**5**	**1.676.037.637,00**	**100**	**82**	**100**	**0**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana**	**95**	**0,00**	**92.9**	**860.799.559,00**	**100**	**994.478.260,27**	**100**	**815.238.078,00**	**192.86**	**1.676.037.637,00**	**100**	**82**	**105.3**	**0**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana**	**80**	**0,00**	**60**	**860.799.559,00**	**70**	**994.478.260,27**	**70**	**815.238.078,00**	**130**	**1.676.037.637,00**	**100**	**82**	**87.5**	**0**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**100**	**182.623.200,00**	**100**	**252.601.050,00**	**100**	**288.641.000,00**	**100**	**221.851.752,00**	**200**	**474.452.802,00**	**100**	**76.9**	**100**	**0.7**	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		0,00	0	0,00	950	138.641.000,00	950	122.896.752,00	950	122.896.752,00	100	88.6	0	0	
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		0,00	0	0,00	1	150.000.000,00	1	98.955.000,00	1	98.955.000,00	100	66	0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**100**	**425.939.924,00**	**100**	**426.017.260,00**	**100**	**491.890.360,27**	**165.2**	**440.468.485,00**	**265.19**	**866.485.745,00**	**165.2**	**89.5**	**165.2**	**0.4**	
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana		0,00	0	0,00	21	212.105.400,00	21	197.585.580,00	21	197.585.580,00	100	93.2	0	0	
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana		0,00	0	0,00	27	24.487.004,00	115	13.024.600,00	115	13.024.600,00	425.9	53.2	0	0	
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		0,00	0	0,00	1	59.960.000,00	1	57.344.491,00	1	57.344.491,00	100	95.6	0	0	
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya		0,00	0	0,00	12	163.879.056,27	12	147.507.906,00	12	147.507.906,00	100	90	0	0	
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		0,00	0	0,00	8	31.458.900,00	8	25.005.908,00	8	25.005.908,00	100	79.5	0	0	
	1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**100**	**206.672.800,00**	**210**	**66.568.049,00**	**100**	**92.064.200,00**	**671**	**73.978.255,00**	**881**	**140.546.304,00**	**671**	**80.4**	**671**	**0.4**	
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		0,00	0	0,00	50	57.288.200,00	351	45.396.750,00	351	45.396.750,00	702	79.2	0	0	
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200	206.672.800,00	105	66.568.049,00	50	34.776.000,00	320	28.581.505,00	425	95.149.554,00	640	82.2	160	0	
	1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang telah Tersusun**	**100**	**232.631.300,00**	**100**	**115.613.200,00**	**100**	**121.882.700,00**	**363**	**78.939.586,00**	**463**	**194.552.786,00**	**363**	**64.8**	**363**	**0**	
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	4	232.631.300,00	1	115.613.200,00	1	39.175.400,00	1	30.076.086,00	2	145.689.286,00	100	76.8	25	0	
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)		0,00	0	0,00	20	82.707.300,00	125	48.863.500,00	125	48.863.500,00	625	59.1	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi yang baik antara penanggungjawab kegiatan dan pelaksana																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Beberapa kegiatan dijadwalkan pelaksanaannya pada bulan Desember 2. Terdapat kegiatan yang pelaksanaannya menyesuaikan jadwal dari BPBD Provinsi Jatim 3. Terdapat kegiatan yang tumpang tindih dengan lintas sektoral sehingga harus dialihkan untuk kegiatan lainnya																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perencanaan yang lebih matang di awal, serta koordinasi yang lebih intens antara pimpinan, penanggungjawab kegiatan dan pelaksana																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Perlunya koordinasi dengan Lintas Sektoral, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan 2. Mengidentifikasi kegiatan yang perlu dioptimalkan / dievaluasi jika belum mencapai target 3. Memastikan pengajuan kegiatan telah disusun pada dokumen perencanaan 4. Konsistensi pelaksanaan kegiatan																		
												Rata-rata capaian kinerja (%)		**100.00**	**90.55**			
												Predikat kinerja		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			
	106	**Sosial**																
	1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**84.6**	**4.950.002.818,00**	**88.9**	**4.454.656.683,00**	**89**	**4.868.620.444,00**	**89.02**	**4.491.587.091,00**	**177.92**	**8.946.243.774,00**	**100**	**92.3**	**105.2**	**20**	**Dinas Sosial**
	1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**	**100**	**16.207.200,00**	**100**	**5.912.700,00**	**100**	**5.933.200,00**	**100**	**5.619.350,00**	**200**	**11.532.050,00**	**100**	**94.7**	**100**	**0**	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	3.093.800,00	7	3.081.800,00	6	3.093.500,00	7	2.808.000,00	14	5.889.800,00	116.7	90.8	100	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		13.113.400,00	12	2.830.900,00	12	2.839.700,00	12	2.811.350,00	24	5.642.250,00	100	99	0	0	
	1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**3.543.108.900,00**	**100**	**3.398.609.914,00**	**100**	**3.450.938.328,00**	**100**	**3.176.078.643,00**	**200**	**6.574.688.557,00**	**100**	**92**	**0**	**23.1**	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		3.540.015.300,00	24	3.396.715.914,00	26	3.448.585.328,00	24	3.173.949.443,00	48	6.570.665.357,00	92.3	92	0	23.1	
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		3.093.600,00	12	1.894.000,00	12	2.353.000,00	12	2.129.200,00	24	4.023.200,00	100	90.5	0	0	
	1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**110.100.000,00**	**100**	**151.169.600,00**	**100**	**146.374.050,00**	**100**	**105.905.932,00**	**200**	**257.075.532,00**	**100**	**72.4**	**0**	**4**	
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		30.100.000,00	2	30.100.000,00	2	30.616.000,00	2	30.609.434,00	4	60.709.434,00	100	100	0	0	
	1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		80.000.000,00	24	121.069.600,00	26	115.758.050,00	178	75.296.498,00	202	196.366.098,00	684.6	65	0	5.5	
	1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**233.970.997,00**	**100**	**272.750.009,00**	**100**	**228.896.044,00**	**100**	**219.311.223,00**	**200**	**492.061.232,00**	**100**	**95.8**	**0**	**12.3**	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		9.989.500,00	1	10.976.500,00	1	10.753.700,00	1	10.724.188,00	2	21.700.688,00	100	99.7	0	0	
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		15.747.100,00	3	15.683.000,00	4	13.294.200,00	3	12.549.600,00	6	28.232.600,00	75	94.4	0	0	
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		24.999.000,00	5	24.235.100,00	6	18.908.750,00	6	17.128.666,00	11	41.363.766,00	100	90.6	0	0	
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		28.025.000,00	12	30.595.700,00	10	36.713.600,00	13	31.725.510,00	25	62.321.210,00	130	86.4	0	7.1	
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		24.000.000,00	1	23.999.700,00	1	16.246.000,00	1	16.245.900,00	2	40.245.600,00	100	100	0	16.7	
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		5.400.000,00	12	5.400.000,00	12	5.400.000,00	12	4.200.000,00	24	9.600.000,00	100	77.8	0	6.5	
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		125.810.397,00	36	161.860.009,00	40	117.604.794,00	40	117.039.809,00	76	278.899.818,00	100	99.5	0	17.8	
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0,00	0	0,00	2000	9.975.000,00	2004	9.697.550,00	2004	9.697.550,00	100.2	97.2	0	0	
	1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan**		**3.000.000,00**	**100**	**41.371.000,00**	**100**	**202.651.892,00**	**100**	**184.257.018,00**	**200**	**225.628.018,00**	**100**	**90.9**	**0**	**0**	
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0,00	0	0,00	1	8.971.800,00	1	8.894.500,00	1	8.894.500,00	100	99.1	0	0	
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3.000.000,00	6	41.371.000,00	7	193.680.092,00	25	175.362.518,00	31	216.733.518,00	357.1	90.5	0	0	
	1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**470.526.524,00**	**100**	**465.733.133,00**	**100**	**569.892.752,00**	**100**	**552.544.298,00**	**200**	**1.018.277.431,00**	**100**	**97**	**0**	**28.1**	
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		87.641.724,00	48	64.227.585,00	48	68.214.600,00	48	58.671.067,00	96	122.898.652,00	100	86	0	17.8	
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		382.884.800,00	13	401.505.548,00	13	501.678.152,00	13	493.873.231,00	26	895.378.779,00	100	98.4	0	30.5	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**114.622.900,00**	**100**	**119.110.327,00**	**100**	**263.934.178,00**	**100**	**247.870.627,00**	**200**	**366.980.954,00**	**100**	**93.9**	**0**	**8.3**	
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		77.698.900,00	15	74.604.327,00	15	102.029.769,00	15	90.316.238,00	30	164.920.565,00	100	88.5	0	12.2	
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0,00	0	0,00	50	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	2	100	0	0	
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		26.727.000,00	40	26.727.000,00	58	28.165.000,00	33	26.583.489,00	73	53.310.489,00	56.9	94.4	0	0	
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10.197.000,00	1	17.779.000,00	2	95.812.000,00	2	93.629.900,00	3	111.408.900,00	100	97.7	0	0	
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0,00	0	0,00	1	34.927.409,00	2	34.341.000,00	2	34.341.000,00	200	98.3	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Informasi yang jelas mengenai biaya, persyaratan, prosedur pelayanan, pemenuhan sarana dan prasarana, petugas yang kompeten dan berperilaku yang baik, penanganan pengaduan yang baik, kesesuaian produk dengan jenis layanan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya persyaratan administrasi yang kurang lengkap sehingga memerlukan waktu layanan yang lebih lama																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan pelayanan publik melalui perbaikan mutu pelayanan																		
	1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**100**	**1.552.968.101,00**	**100**	**790.736.400,00**	**100**	**1.087.764.600,00**	**100**	**971.778.691,00**	**200**	**1.762.515.091,00**	**100**	**89.3**	**100**	**6.6**	**Dinas Sosial**
	1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial**		**635.537.100,00**	**100**	**790.736.400,00**	**100**	**1.087.764.600,00**	**100**	**971.778.691,00**	**200**	**1.762.515.091,00**	**100**	**89.3**	**0**	**16.2**	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		635.537.100,00	7	790.736.400,00	5	1.087.764.600,00	5	971.778.691,00	12	1.762.515.091,00	100	89.3	0	16.2	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Dukungan semua elemen baik OPD dan stakeholder terkait sebagai upaya peningkatan peran serta dan kapasitas PSKS/pilarpilar sesoai dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya kesempatan PSKS/pilar-pilar sosial untuk memperoleh peningkatan kapasitas/kompetensi kurang mendukung upaya penanganan permasalahan sosial yang semakin kompleks																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan upaya pembinaan bagi PSKS/pilar-pilar sosial pada setiap kesempatan yang ada																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan kesejahteraan sosial secara kontinyu																		
	1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial**	**19.69**	**1.023.655.727,00**	**0.89**	**954.251.000,00**	**0.88**	**957.632.069,00**	**0.88**	**914.688.229,00**	**1.77**	**1.868.939.229,00**	**100**	**95.5**	**4.5**	**7.8**	**Dinas Sosial**
	1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial**		**649.794.500,00**	**100**	**652.806.100,00**	**100**	**957.632.069,00**	**100**	**914.688.229,00**	**200**	**1.567.494.329,00**	**100**	**95.5**	**0**	**12.3**	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		347.426.200,00	130	350.044.700,00	135	412.975.400,00	147	390.247.000,00	277	740.291.700,00	108.9	94.5	0	9.1	
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		4.898.000,00	10	4.499.000,00	30	15.275.700,00	52	14.970.981,00	62	19.469.981,00	173.3	98	0	0	
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		0,00	0	0,00	14	20.037.400,00	14	20.007.750,00	14	20.007.750,00	100	99.9	0	0	
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		268.176.900,00	325	269.008.400,00	482	376.464.369,00	385	370.273.698,00	710	639.282.098,00	79.9	98.4	0	15.7	
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		0,00	0	0,00	180	27.284.200,00	229	26.667.500,00	229	26.667.500,00	127.2	97.7	0	0	
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota		0,00	0	0,00	9	3.475.000,00	9	2.320.000,00	9	2.320.000,00	100	66.8	0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		0,00	0	0,00	35	35.733.000,00	35	30.910.000,00	35	30.910.000,00	100	86.5	0	0	
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		0,00	0	0,00	50	32.074.900,00	58	29.578.000,00	58	29.578.000,00	116	92.2	0	0	
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		0,00	0	0,00	5	6.000.000,00	21	2.350.000,00	21	2.350.000,00	420	39.2	0	0	
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		29.293.400,00	25	29.254.000,00	30	28.312.100,00	30	27.363.300,00	55	56.617.300,00	100	96.6	0	19.2	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Efektivitas jejaring kerja sama dengan Dinsos Provinsi Jatim, Kab/Kota lain dan pilar-pilar sosial/pelaku usaha kesejahteraan sosial																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Terbatasnya pekerja sosial dari segi kuantitas dan kualitas serta minimnya sarana prasarana pelayanan PPKS, sifat kegiatan penanganan masalah sosial dan populasi PPKS yang dinamis/sering berubah menyebabkan sulitnya memprediksi/memproyeksikan target kinerja																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penanganan PPKS dengan melibatkan unsur keluarga, masyarakat dan CSR																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Merencanakan kegiatan penanganan masalah sosial secara spesifik sesuai kebutuhan PPKS berdasarkan hasil assessment																		
	1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase peningkatan PMKS terlatih**	**6.81**	**21.772.466.899,00**	**20.5**	**17.821.446.515,00**	**16.3**	**14.587.442.039,00**	**13.22**	**14.232.352.900,00**	**33.74**	**32.053.799.415,00**	**81.1**	**97.6**	**194.1**	**16.4**	**Dinas Sosial**
	1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial**	**160**	**21.772.466.899,00**	**0.73**	**17.821.446.515,00**	**1.42**	**14.587.442.039,00**	**18.53**	**14.232.352.900,00**	**19.26**	**32.053.799.415,00**	**1304.9**	**97.6**	**11.6**	**16.4**	**Dinas Sosial**
	1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase data DTKS yang diverval**		**18.456.661.620,00**	**23.5**	**17.821.446.515,00**	**100**	**14.587.442.039,00**	**100**	**14.232.352.900,00**	**123.5**	**32.053.799.415,00**	**100**	**97.6**	**0**	**19.4**	
	1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PMKS terlatih**		**18.456.661.620,00**	**100**	**17.821.446.515,00**	**20**	**14.587.442.039,00**	**18.25**	**14.232.352.900,00**	**118.25**	**32.053.799.415,00**	**91.3**	**97.6**	**0**	**19.4**	
	1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial**		**18.456.661.620,00**	**100**	**17.821.446.515,00**	**100**	**14.587.442.039,00**	**100**	**14.232.352.900,00**	**200**	**32.053.799.415,00**	**100**	**97.6**	**0**	**19.4**	
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		103.955.900,00	735	94.219.700,00	100	112.444.800,00	423	104.480.200,00	1158	198.699.900,00	423	92.9	0	3.2	
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		17.723.474.671,00	0	17.292.049.975,00	9572	14.323.394.800,00	7616	13.980.182.500,00	7616	31.272.232.475,00	79.6	97.6	0	20.2	
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		629.231.049,00	101	435.176.840,00	80	151.602.439,00	73	147.690.200,00	174	582.867.040,00	91.3	97.4	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Dukungan dan bantuan dari mitra OPD dan pihak-pihak yang membantu kegiatan berjalan lancar dan tepat waktu																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Data penerima bansos bersifat dinamis, sering berubah																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan perbaikan data, validasi dan evaluasi penerima bansos																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Perencanaan, penganggaran dan alokasi waktu yang valid agar program dan kegiatan terealisasi sesuai jadwal																		
	1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**	**100**	**419.370.685,00**	**100**	**185.472.275,00**	**100**	**199.514.300,00**	**100**	**172.394.000,00**	**200**	**357.866.275,00**	**100**	**86.4**	**100**	**1.1**	**Dinas Sosial**
	1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial**		**47.491.700,00**	**100**	**33.306.400,00**	**100**	**68.345.800,00**	**100**	**59.377.550,00**	**200**	**92.683.950,00**	**100**	**86.9**	**0**	**7**	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		22.499.900,00	13	8.466.350,00	30	29.878.500,00	17	21.181.850,00	30	29.648.200,00	56.7	70.9	0	14.7	
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		24.991.800,00	60	24.840.050,00	60	38.467.300,00	70	38.195.700,00	130	63.035.750,00	116.7	99.3	0	0	
	1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana**		**168.852.100,00**	**81.5**	**152.165.875,00**	**94**	**131.168.500,00**	**81.48**	**113.016.450,00**	**162.96**	**265.182.325,00**	**86.7**	**86.2**	**0**	**0.8**	
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		168.852.100,00	27	152.165.875,00	27	131.168.500,00	27	113.016.450,00	54	265.182.325,00	100	86.2	0	0.8	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Dukungan dan bantuan dari stakeholder terkait seperti kasi kesos kelurahan dan PSM yang ada di wilayah																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Anggaran bersifat penjagaan sehingga pelaksanaan berdasarkan kejadian																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Menjalin komunikasi yang efektif dengan instansi terkait sehingga apabila ada kejadian bencana informasi bisa diperoleh secepatnya																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penyesuaian perencanaan kegiatan sesuai hasil evaluasi tahun sebelumnya																		
	1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase TMP dalam kondisi baik**	**100**	**75.516.924,00**	**100**	**51.165.579,00**	**100**	**35.045.000,00**	**100**	**34.204.216,00**	**200**	**85.369.795,00**	**100**	**97.6**	**100**	**0**	**Dinas Sosial**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase TMP yang terpelihara**		**34.999.300,00**	**100**	**51.165.579,00**	**100**	**35.045.000,00**	**100**	**34.204.216,00**	**200**	**85.369.795,00**	**100**	**97.6**	**0**	**0**	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		34.999.300,00	0	51.165.579,00	979	35.045.000,00	986	34.204.216,00	986	85.369.795,00	100.7	97.6	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kecukupan anggaran, adanya sinergi dan kolaborasi dalam team work serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai SOP																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan pemeliharaan TMP sesuai jadwal yang ditetapkan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Menyusun anggaran pemeliharaan TMP sesuai kebutuhan																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**97.30**	**95.77**			
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
	207	**Tenaga Kerja**																
	2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja**	**50**	**917.756.000,00**	**49**	**2.256.067.392,00**	**49**	**2.699.031.000,00**	**55**	**2.473.147.442,00**	**104**	**4.729.214.834,00**	**112.2**	**91.6**	**110**	**31.4**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja**
	2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase peserta pelatihan terlatih**		**1.999.999.700,00**	**85**	**2.256.067.392,00**	**87**	**2.699.031.000,00**	**88.13**	**2.473.147.442,00**	**173.13**	**4.729.214.834,00**	**101.3**	**91.6**	**0**	**14.4**	
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		1.999.999.700,00	225	2.256.067.392,00	150	2.699.031.000,00	379	2.473.147.442,00	604	4.729.214.834,00	252.7	91.6	0	14.4	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Minat peserta pelatihan sangat besar																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : lowongan kerja yang tersedia belum sesuai dengan minat pencari kerja																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : pelatihan di tahun depan disesuaikan dengan lowongan kerja yang tersedia																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : program pelatihan berbasis kompetensi dilaksanakan secara berkelanjutan																		
	2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online**	**20**	**1.460.115.000,00**	**81.3**	**210.305.200,00**	**18**	**93.266.000,00**	**23**	**81.449.099,00**	**104.3**	**291.754.299,00**	**127.8**	**87.3**	**115**	**0**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja**
	2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**	**83**	**1.460.115.000,00**	**16**	**210.305.200,00**	**82**	**93.266.000,00**	**87**	**81.449.099,00**	**103.01**	**291.754.299,00**	**106.1**	**87.3**	**104.8**	**0**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja**
	2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pencari kerja terdaftar**		**23.691.300,00**	**231**	**21.919.600,00**	**260**	**23.691.000,00**	**567**	**14.121.599,00**	**798**	**36.041.199,00**	**218.1**	**59.6**	**0**	**0**	
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi		0,00	12	21.919.600,00	2	23.691.000,00	2	14.121.599,00	14	36.041.199,00	100	59.6	0	0	
	2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja**		**209.081.000,00**	**33.4**	**188.385.600,00**	**35.4**	**69.575.000,00**	**36.33**	**67.327.500,00**	**69.73**	**255.713.100,00**	**102.6**	**96.8**	**0**	**0**	
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		83.324.600,00	136	78.774.800,00	130	61.954.200,00	245	61.454.200,00	381	140.229.000,00	188.5	99.2	0	0	
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		125.756.400,00	48	109.610.800,00	46	7.620.800,00	0	5.873.300,00	48	115.484.100,00	0	77.1	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : kompetensi pencari kerja sesuai dengan lowongan pekerjaan yang tersedia																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : sebagian pencari kerja masih belum sesuai dengan lowongan pekerjaan yang tersedia																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : menginformasikan lowongan kerja melalui media offline dan online																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : program penempatan tenaga kerja dillaksanakan secara berkelanjutan																		

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan**	**100**	**226.991.000,00**	**100**	**138.442.250,00**	**100**	**94.019.800,00**	**100**	**52.943.590,00**	**200**	**191.385.840,00**	**100**	**56.3**	**100**	**0**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja**
	2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama**		**175.999.300,00**	**85**	**138.442.250,00**	**90**	**94.019.800,00**	**93**	**52.943.590,00**	**178**	**191.385.840,00**	**103.3**	**56.3**	**0**	**0**	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		102.554.200,00	5	92.231.950,00	5	81.603.900,00	7	44.291.000,00	12	136.522.950,00	140	54.3	0	0	
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		1.095.200,00	4	1.095.200,00	5	1.095.000,00	7	930.750,00	11	2.025.950,00	140	85	0	0	
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		72.349.900,00	4	45.115.100,00	4	11.320.900,00	6	7.721.840,00	10	52.836.940,00	150	68.2	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Terjalinnya kerjasama yang baik dengan perusahaan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan permasalahan ketenagakerjaan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Menjalin MOU dengan perusahaan yang ada di wilayah Kota Blitar																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Program hubungan industrial dilaksanakan secara berkelanjutan																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**100.00**	**90.34**			
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			
	208	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**																
	2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**84.5**	**4.881.086.181,00**	**88.5**	**4.358.001.788,00**	**87**	**4.699.278.511,00**	**88.65**	**4.581.192.603,00**	**177.1**	**8.939.194.391,00**	**101.9**	**97.5**	**104.9**	**19.4**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2.08.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart**		**35.507.500,00**	**100**	**27.705.000,00**	**100**	**10.674.800,00**	**100**	**9.808.721,00**	**200**	**37.513.721,00**	**100**	**91.9**	**0**	**1.7**	
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	15.268.500,00	7	13.893.000,00	7	3.300.000,00	7	3.225.000,00	14	17.118.000,00	100	97.7	100	2	
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13	20.239.000,00	13	13.812.000,00	13	7.374.800,00	13	6.583.721,00	26	20.395.721,00	100	89.3	100	1.5	
	2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**3.358.007.889,00**	**100**	**3.178.643.567,00**	**100**	**3.491.759.795,00**	**100**	**3.447.104.559,00**	**200**	**6.625.748.126,00**	**100**	**98.7**	**0**	**24.8**	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	3.354.357.889,00	21	3.174.993.567,00	23	3.489.509.795,00	23	3.445.799.559,00	44	6.620.793.126,00	100	98.7	109.5	24.8	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		3.650.000,00	2	3.650.000,00	17	2.250.000,00	17	1.305.000,00	19	4.955.000,00	100	58	0	0	
	2.08.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**118.047.500,00**	**100**	**116.628.700,00**	**100**	**103.633.900,00**	**100**	**103.354.400,00**	**200**	**219.983.100,00**	**100**	**99.7**	**0**	**0**	
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		50.086.000,00	93	53.638.800,00	99	7.096.000,00	20	7.096.000,00	113	60.734.800,00	20.2	100	0	0	
	2.08.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		67.961.500,00	31	62.989.900,00	31	96.537.900,00	31	96.258.400,00	62	159.248.300,00	100	99.7	0	0	
	2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**265.321.750,00**	**100**	**276.651.782,00**	**100**	**178.841.500,00**	**100**	**164.722.620,00**	**200**	**441.374.402,00**	**100**	**92.1**	**0**	**10.9**	
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8.581.900,00	1	8.581.900,00	1	8.571.000,00	1	8.571.000,00	2	17.152.900,00	100	100	0	99.9	
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		16.899.700,00	5	18.939.400,00	5	22.094.600,00	5	21.583.009,00	10	40.522.409,00	100	97.7	0	54.2	
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		13.732.300,00	4	13.723.700,00	4	12.413.000,00	4	8.215.915,00	8	21.939.615,00	100	66.2	0	21.8	
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		14.825.000,00	4	8.970.000,00	6	10.425.000,00	6	9.800.000,00	10	18.770.000,00	100	94	0	0	
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		17.999.600,00	1	17.999.600,00	1	17.994.300,00	1	17.678.715,00	2	35.678.315,00	100	98.2	0	0	
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		5.400.000,00	24	4.320.000,00	12	2.700.000,00	12	2.160.000,00	36	6.480.000,00	100	80	0	6.7	
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200.102.950,00	53	190.447.682,00	110	100.000.000,00	110	93.466.290,00	163	283.913.972,00	100	93.5	0	3.9	
	2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		4.680.000,00	1	13.669.500,00	1	4.643.600,00	1	3.247.691,00	2	16.917.191,00	100	69.9	0	0	
	2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan**	**0**	**31.113.000,00**	**100**	**107.212.750,00**	**100**	**91.385.900,00**	**100**	**88.723.210,00**	**200**	**195.935.960,00**	**100**	**97.1**	**0**	**0**	
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		31.113.000,00	1	107.212.750,00	3	91.385.900,00	3	88.723.210,00	4	195.935.960,00	100	97.1	0	0	
	2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart**		**269.749.505,00**	**100**	**266.767.639,00**	**100**	**329.387.360,00**	**100**	**312.746.695,00**	**200**	**579.514.334,00**	**100**	**94.9**	**0**	**27.4**	
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.196.000,00	1	1.196.000,00	1	1.190.000,00	1	1.188.000,00	2	2.384.000,00	100	99.8	0	0	
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		64.991.505,00	36	66.219.115,00	36	77.568.360,00	36	65.548.146,00	72	131.767.261,00	100	84.5	0	24.9	
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		203.562.000,00	2	199.352.524,00	2	250.629.000,00	2	246.010.549,00	4	445.363.073,00	100	98.2	0	28.3	
	2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart**		**210.379.500,00**	**100**	**384.392.350,00**	**100**	**493.595.256,00**	**100**	**454.732.398,00**	**200**	**839.124.748,00**	**100**	**92.1**	**0**	**6.1**	
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		108.500.000,00	35	80.034.450,00	37	112.699.256,00	37	84.775.819,00	72	164.810.269,00	100	75.2	0	11.8	
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		29.873.500,00	42	29.425.500,00	57	36.896.000,00	57	31.443.379,00	99	60.868.879,00	100	85.2	0	0	
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		70.006.000,00	1	272.932.400,00	1	342.000.000,00	1	336.513.200,00	2	609.445.600,00	100	98.4	0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2.000.000,00	3	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	7	4.000.000,00	100	100	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya fasilitas kerja, peralatan kantor, jaringan teknologi informasi, serta sarana pendukung lainnya yang memadai mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penunjang pemerintahan daerah.																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Jumlah aparatur yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja dan kompleksitas tugas penunjang																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan penataan ulang pembagian tugas aparatur dan tenaga pendukung agar lebih proporsional sesuai beban kerja, serta memaksimalkan peran pegawai yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan program penunjang.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mengoptimalkan pelaksanaan program penunjang melalui perbaikan tata kelola organisasi, kejelasan pembagian tugas, serta penguatan fungsi perencanaan, keuangan, dan pelaporan kinerja agar pelaksanaan urusan PPPA dan KB berjalan lebih efektif dan akuntabel.																		
	2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase peningkatan komposisi perempuan di sektor bisnis**	**0.33**	**1.120.744.940,00**	**100**	**1.080.467.901,00**	**0.003**	**786.109.200,00**	**0**	**761.209.879,00**	**100**	**1.841.677.780,00**	**0**	**96.8**	**0**	**29.7**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase perempuan pengambilan keputusan publik**	**48**	**1.120.744.940,00**	**47**	**1.080.467.901,00**	**45**	**786.109.200,00**	**15.78**	**761.209.879,00**	**62.78**	**1.841.677.780,00**	**35.1**	**96.8**	**32.9**	**29.7**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG**	**100**	**1.120.744.940,00**	**0.33**	**1.080.467.901,00**	**100**	**786.109.200,00**	**100**	**761.209.879,00**	**100.33**	**1.841.677.780,00**	**100**	**96.8**	**100**	**29.7**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) yang sudah dianalisis**	**47**	**92.499.400,00**	**28**	**76.636.289,00**	**42**	**46.109.200,00**	**36.77**	**40.131.910,00**	**64.81**	**116.768.199,00**	**87.5**	**87**	**78.2**	**9.5**	
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		92.499.400,00	4	76.636.289,00	4	46.109.200,00	4	40.131.910,00	8	116.768.199,00	100	87	0	9.5	
	2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase perempuan yang mendapatkan fasilitasi dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi**		**309.499.900,00**	**20.5**	**412.701.050,00**	**20.67**	**275.000.000,00**	**26.2**	**263.135.658,00**	**46.74**	**675.836.708,00**	**126.8**	**95.7**	**0**	**10.8**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		188.499.900,00	9	281.635.450,00	8	165.000.000,00	8	154.312.770,00	17	435.948.220,00	100	93.5	0	13.7	
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		121.000.000,00	1	131.065.600,00	1	110.000.000,00	1	108.822.888,00	2	239.888.488,00	100	98.9	0	6.3	
	2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi**		**599.999.400,00**	**1**	**591.130.562,00**	**3**	**465.000.000,00**	**3**	**457.942.311,00**	**4**	**1.049.072.873,00**	**100**	**98.5**	**0**	**48.4**	
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan		114.999.600,00	21	109.290.565,00	21	70.000.000,00	21	69.887.510,00	42	179.178.075,00	100	99.8	0	29.5	
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		484.999.800,00	2715	481.839.997,00	614	395.000.000,00	614	388.054.801,00	3329	869.894.798,00	100	98.2	0	52.9	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Perda No. 3 Tahun 2023 tentang PUG - Perwal No. 15 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2023 tentang PUG																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum semua Siswa Sekoper memiliki NIB dan PIRT; Belum semua OPD menyusun Dokumen PPRG; - Jumlah keterwakilan perempuan di legislatif masih sedikit - Pemahaman tentang kesetaraan gender masih perlu diperkuat																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Akan dilaksanakan Pertemuan SEKOPER secara berkala; Rapat Koordinasi Tim Driver PUG; Sosialisasi PUG pada Organisasi dan Lembaga Masyarakat																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota; Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota; Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
	2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan**	**100**	**349.229.926,00**	**100**	**209.785.892,00**	**100**	**154.872.409,00**	**100**	**123.383.956,00**	**200**	**333.169.848,00**	**100**	**79.7**	**100**	**2.3**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perempuan aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan**		**27.349.800,00**	**100**	**66.583.200,00**	**100**	**42.664.700,00**	**100**	**39.623.304,00**	**200**	**106.206.504,00**	**100**	**92.9**	**0**	**29.7**	
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		27.349.800,00	1	66.583.200,00	3	42.664.700,00	3	39.623.304,00	4	106.206.504,00	100	92.9	0	29.7	
	2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih**		**70.999.900,00**	**100**	**52.386.218,00**	**100**	**60.910.309,00**	**100**	**33.424.534,00**	**200**	**85.810.752,00**	**100**	**54.9**	**0**	**0**	
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		44.999.900,00	16	25.200.000,00	36	21.869.881,00	37	11.553.294,00	53	36.753.294,00	102.8	52.8	0	0	
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		26.000.000,00	2	27.186.218,00	2	39.040.428,00	2	21.871.240,00	4	49.057.458,00	100	56	0	0	
	2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan**		**81.499.800,00**	**100**	**90.816.474,00**	**100**	**51.297.400,00**	**100**	**50.336.118,00**	**200**	**141.152.592,00**	**100**	**98.1**	**0**	**0**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		25.999.900,00	35	56.133.974,00	42	5.013.800,00	42	4.815.500,00	77	60.949.474,00	100	96	0	0	
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		55.499.900,00	2	34.682.500,00	2	46.283.600,00	2	45.520.618,00	4	80.203.118,00	100	98.4	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya Perda No 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan. Adanya UPT PPA dan Satgas PPA Kota Blitar																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kasus Kekerasan terhadap perempuan masih terjadi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Sosialisasi Undang Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan di Kelurahan Sukorejo, Pertemuan Rutin Satgas PPA, Pemberian Insentif Satgas PPA tribulan III dan IV																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Ktp dan TPPO kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
	2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak**	**100**	**103.014.403,00**	**100**	**156.105.380,00**	**100**	**105.204.055,00**	**100**	**94.028.286,00**	**200**	**250.133.666,00**	**100**	**89.4**	**100**	**3.5**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase anak yang partisipasi dalam perencanaan pembangunan**		**37.000.000,00**	**100**	**80.713.830,00**	**100**	**21.194.000,00**	**100**	**20.103.192,00**	**200**	**100.817.022,00**	**100**	**94.9**	**0**	**9.7**	
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		37.000.000,00	2	80.713.830,00	3	21.194.000,00	3	20.103.192,00	5	100.817.022,00	100	94.9	0	9.7	
	2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak**		**172.999.700,00**	**100**	**75.391.550,00**	**100**	**84.010.055,00**	**100**	**73.925.094,00**	**200**	**149.316.644,00**	**100**	**88**	**0**	**0**	
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		27.000.000,00	50	41.721.600,00	100	31.178.400,00	100	30.963.840,00	150	72.685.440,00	100	99.3	0	0	
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		145.999.700,00	3	33.669.950,00	1	52.831.655,00	1	42.961.254,00	4	76.631.204,00	100	81.3	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Dukungan dan kerjasama yang baik dengan mitra kerja																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Penyesuaian jadwal kegiatan dengan agenda mitra kerja																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan mitra kerja																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Sinkronisasi program Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan RPJMD Kota Blitar																		
	2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih**	**100**	**340.148.731,00**	**100**	**297.587.090,00**	**100**	**215.210.923,00**	**100**	**192.088.252,00**	**200**	**489.675.342,00**	**100**	**89.3**	**100**	**5.7**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak**		**126.659.500,00**	**100**	**158.937.600,00**	**100**	**110.995.719,00**	**100**	**99.088.290,00**	**200**	**258.025.890,00**	**100**	**89.3**	**0**	**11.2**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu		126.659.500,00	5	108.716.500,00	6	110.995.719,00	6	99.088.290,00	11	207.804.790,00	100	89.3	0	11.2	
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		0,00	10	50.221.100,00	272	0,00	0	0,00	10	50.221.100,00	0	0	0	0	
	2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus**		**27.499.700,00**	**100**	**42.670.000,00**	**100**	**38.525.504,00**	**100**	**31.889.963,00**	**200**	**74.559.963,00**	**100**	**82.8**	**0**	**0.7**	
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		0,00	29	13.952.500,00	24	11.233.000,00	80	9.980.320,00	109	23.932.820,00	333.3	88.8	0	0	
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		0,00	0	0,00	85	27.292.504,00	110	21.909.643,00	110	21.909.643,00	129.4	80.3	0	0	
	2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak**		**79.735.300,00**	**100**	**95.979.490,00**	**100**	**65.689.700,00**	**100**	**61.109.999,00**	**200**	**157.089.489,00**	**100**	**93**	**0**	**6**	
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		79.735.300,00	348	95.979.490,00	400	65.689.700,00	400	61.109.999,00	748	157.089.489,00	100	93	0	6	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sinergi dan koordinasi antara UPT PPA dengan PATBM, Satgas PPA dan perangkat Kelurahan semakin baik																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Meningkatnya pengaduan terkait kasus kekerasan pada anak																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dalam penanganan kasus kekerasan pada anak																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak																		
												Rata-rata capaian kinerja (%)		**90.72**	**96.55**			
												Predikat kinerja		**Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	209	**Pangan**																
	2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**81.75**	**9.451.053.317,00**	**87.7**	**9.127.575.010,00**	**81.5**	**9.163.739.250,00**	**88.09**	**8.426.350.147,00**	**175.79**	**17.553.925.157,00**	**108.1**	**92**	**107.8**	**21.6**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	2.09.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**	**100**	**77.824.700,00**	**100**	**106.488.426,00**	**100**	**16.809.400,00**	**100**	**12.147.580,00**	**200**	**118.636.006,00**	**100**	**72.3**	**100**	**2.1**	
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	10.090.400,00	5	4.644.800,00	5	2.810.000,00	5	2.475.500,00	10	7.120.300,00	100	88.1	25	16.1	
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	67.734.300,00	4	101.843.626,00	4	13.999.400,00	3	9.672.080,00	7	111.515.706,00	75	69.1	18.8	0	
	2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**	**100**	**6.406.155.364,00**	**100**	**6.565.947.714,00**	**100**	**6.876.467.889,00**	**100**	**6.255.378.059,00**	**200**	**12.821.325.773,00**	**100**	**91**	**100**	**25.5**	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224	6.403.385.364,00	56	6.563.385.364,00	56	6.873.697.889,00	56	6.253.123.165,00	112	12.816.508.529,00	100	91	25	25.5	
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	2.770.000,00	5	2.562.350,00	5	2.770.000,00	5	2.254.894,00	10	4.817.244,00	100	81.4	25	0	
	2.09.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**	**100**	**125.090.472,00**	**100**	**109.010.400,00**	**100**	**102.654.641,00**	**100**	**63.016.962,00**	**200**	**172.027.362,00**	**100**	**61.4**	**100**	**0**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	38.000.000,00	2	37.790.000,00	1	10.000.000,00	2	9.993.552,00	4	47.783.552,00	200	99.9	40	0	
	2.09.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	392	87.090.472,00	0	71.220.400,00	98	92.654.641,00	98	53.023.410,00	98	124.243.810,00	100	57.2	25	0	
	2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**	**100**	**352.059.900,00**	**100**	**432.677.709,00**	**100**	**248.179.040,00**	**100**	**237.931.473,00**	**200**	**670.609.182,00**	**100**	**95.9**	**100**	**13.2**	
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	6.859.300,00	3	59.713.500,00	1	11.805.000,00	3	11.026.407,00	6	70.739.907,00	300	93.4	75	0	
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	46.266.100,00	2	45.897.700,00	4	41.799.000,00	4	39.386.741,00	6	85.284.441,00	100	94.2	40	0	
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	25.243.000,00	4	64.045.400,00	5	24.692.000,00	5	22.577.485,00	9	86.622.885,00	100	91.4	41.7	75.4	
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	20.181.000,00	4	9.527.500,00	4	28.490.000,00	4	23.645.820,00	8	33.173.320,00	100	83	25	24.6	
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	23.278.000,00	1	23.036.000,00	1	14.705.620,00	1	14.607.600,00	2	37.643.600,00	100	99.3	25	0	
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	288	14.940.000,00	72	14.940.000,00	72	14.940.000,00	72	14.940.000,00	144	29.880.000,00	100	100	25	16.7	
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224	199.980.000,00	67	199.849.209,00	56	96.547.420,00	74	96.547.420,00	141	296.396.629,00	132.1	100	33	10	
	2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	15.312.500,00	1	15.668.400,00	1	15.200.000,00	1	15.200.000,00	2	30.868.400,00	100	100	33.3	0	
	2.09.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan**	**100**	**23.418.600,00**	**100**	**35.349.000,00**	**100**	**168.350.964,00**	**100**	**152.562.031,00**	**200**	**187.911.031,00**	**100**	**90.6**	**100**	**0**	
	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0,00	0	0,00	1	36.119.300,00	1	34.800.000,00	1	34.800.000,00	100	96.3	0	0	
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0,00	0	0,00	8	18.240.000,00	8	18.137.400,00	8	18.137.400,00	100	99.4	0	0	
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	23.418.600,00	5	35.349.000,00	5	61.184.744,00	6	52.210.340,00	11	87.559.340,00	120	85.3	600	0	
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0,00	0	0,00	3	52.806.920,00	6	47.414.291,00	6	47.414.291,00	200	89.8	0	0	
	2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**	**100**	**1.433.345.535,00**	**100**	**1.371.559.800,00**	**100**	**1.508.362.244,00**	**100**	**1.489.128.649,00**	**200**	**2.860.688.449,00**	**100**	**98.7**	**100**	**24.4**	
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	864	194.617.200,00	216	146.289.272,00	216	193.255.664,00	216	188.745.159,00	432	335.034.431,00	100	97.7	25	29.3	
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52	1.238.728.335,00	13	1.225.270.528,00	13	1.315.106.580,00	13	1.300.383.490,00	26	2.525.654.018,00	100	98.9	25	23.6	
	2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**	**100**	**257.280.739,00**	**100**	**506.541.961,00**	**100**	**242.915.072,00**	**100**	**216.185.393,00**	**200**	**722.727.354,00**	**100**	**89**	**100**	**4.3**	
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120	110.808.000,00	30	92.053.861,00	30	100.128.100,00	30	86.556.863,00	60	178.610.724,00	100	86.4	25	5.4	
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	128	58.171.900,00	32	54.594.200,00	32	54.030.400,00	32	42.235.530,00	64	96.829.730,00	100	78.2	25	8.6	
	2.09.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		0,00	0	0,00	1	25.000.000,00	1	24.864.000,00	1	24.864.000,00	100	99.5	0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	88.300.839,00	3	359.893.900,00	2	63.756.572,00	2	62.529.000,00	5	422.422.900,00	100	98.1	100	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan anggaran dan SDM																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Kegiatan sarasehan dengan DPRD tidak bisa terlaksana karena ada perubahan kebijakan. - waktu pelaksanaan PAPBD yang terbatas																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : - Meningkatkan koordinasi dalam persiapan kegiatan dan persiapan administrasi sehingga pelaksaan kegiatan tidak mengalami keterlampatan.																		
	2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Angka ketersediaan energi perkapita/ hari**	**2200**	**211.968.561,00**	**2158**	**111.095.550,00**	**2200**	**123.513.900,00**	**2377**	**119.392.250,00**	**4534.85**	**230.487.800,00**	**108**	**96.7**	**108**	**13.7**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Angka konsumsi energi per kapita**	**2133**	**211.968.561,00**	**2413**	**111.095.550,00**	**2150**	**123.513.900,00**	**2160**	**119.392.250,00**	**4573**	**230.487.800,00**	**100.5**	**96.7**	**101.2**	**13.7**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Nilai capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah**	**100**	**2.923.600,00**	**100**	**2.892.750,00**	**100**	**44.807.300,00**	**100**	**44.183.700,00**	**200**	**47.076.450,00**	**100**	**98.6**	**100**	**441.6**	
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan		0,00	0	0,00	2	43.634.100,00	2	43.084.900,00	2	43.084.900,00	100	98.7	0	0	
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)		0,00	1	2.892.750,00	2	1.173.200,00	2	1.098.800,00	3	3.991.550,00	100	93.7	0	0	
	2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Angka konsumsi protein**	**57**	**111.851.900,00**	**78.6**	**108.202.800,00**	**57**	**78.706.600,00**	**72.9**	**75.208.550,00**	**151.54**	**183.411.350,00**	**127.9**	**95.6**	**127.9**	**14.4**	
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	8	58.600.100,00	4	57.635.650,00	2	27.806.600,00	2	27.459.750,00	6	85.095.400,00	100	98.8	25	27.5	
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	4	53.251.800,00	1	50.567.150,00	1	50.900.000,00	1	47.748.800,00	2	98.315.950,00	100	93.8	25	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan SDM																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Adanya rasionalisasi anggaran menyebabkan perubahan jadwal kegiatan - waktu pelaksanaan PAPBD yang terbatas																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : - Meningkatkan sinkronisasi antara jadwal pelaksanaan kegiatan dan RAK sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar.																		
	2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase balita rawan pangan yang tertangani**	**16**	**82.654.425,00**	**20.8**	**51.727.700,00**	**62**	**39.299.100,00**	**28.19**	**38.467.975,00**	**48.99**	**90.195.675,00**	**45.5**	**97.9**	**176.2**	**0**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis intervensi balita rawan pangan**	**2**	**53.205.700,00**	**2**	**51.727.700,00**	**2**	**39.299.100,00**	**2**	**38.467.975,00**	**4**	**90.195.675,00**	**100**	**97.9**	**100**	**0**	
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota		0,00	2	51.727.700,00	2	39.299.100,00	2	38.467.975,00	4	90.195.675,00	100	97.9	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan SDM																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - adanya rasionalisasi anggaran - kebijakan perubahan sasaran dari balita gizi kurang kepada keluarga rentan rawan pangan guna mendukung program prioritas sebagai dampak rasionalisasi anggaran.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : - melakukan identifikasi sasaran dan koordinasi dengan OPD terkait terutama terkait sasaran kegiatan sehingga selaras dengan program prioritas baik daerah maupun nasional.																		
	2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Tingkat keamanan pangan segar**	**100**	**14.586.075,00**	**100**	**10.250.200,00**	**100**	**14.235.000,00**	**100**	**14.160.100,00**	**200**	**24.410.300,00**	**100**	**99.5**	**100**	**65.1**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jenis sampel pangan segar yang diuji**	**100**	**10.250.200,00**	**72.7**	**10.250.200,00**	**100**	**14.235.000,00**	**100**	**14.160.100,00**	**172.7**	**24.410.300,00**	**100**	**99.5**	**100**	**92.7**	
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4	10.250.200,00	1	10.250.200,00	1	14.235.000,00	1	14.160.100,00	2	24.410.300,00	100	99.5	25	92.7	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan SDM dan anggaran																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - perubahan biaya pengujian dengan pihak ketiga (lembaga penguji) sehingga memerlukan penyesuaian dalam PAPBD																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : - melakukan identifikasi standar biaya pengujian yang presisi dengan berkoordinasi dengan pihak terkait (lembaga penguji)																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**89.09**	**92.05**			
													Predikat kinerja	**Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	210	**Pertanahan**																
	2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti**	**100**	**15.000.000,00**	**100**	**6.500.000,00**	**100**	**16.400.000,00**	**100**	**2.750.000,00**	**200**	**9.250.000,00**	**100**	**16.8**	**100**	**0**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	2.10.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti sesuai regulasi**		**23.850.000,00**	**100**	**6.500.000,00**	**100**	**16.400.000,00**	**100**	**2.750.000,00**	**200**	**9.250.000,00**	**100**	**16.8**	**0**	**0**	
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0,00	0	0,00	1	16.400.000,00	2	2.750.000,00	2	2.750.000,00	200	16.8	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Terjalinnya koordinasi yang baik dengan perangkat daerah terkait																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Sebagian masyarakat tidak terbuka apabila terdapat pemasalahan sengketa pertanahan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi dengan pihak - pihak terkait dan sosialisasi kepada masyarakat																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Apabila terdapat kegiatan yang tidak terlaksanan akan diadakan evaluasi pada RKPD tahun berikutnya																		
	2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat**	**100**	**310.000.000,00**	**93.5**	**3.084.746.153,00**	**99**	**268.580.000,00**	**87.21**	**262.522.775,00**	**180.72**	**3.347.268.928,00**	**88.1**	**97.7**	**87.2**	**0**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	2.10.10.2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen pertanahan yang tersusun**		**291.150.000,00**	**100**	**3.084.746.153,00**	**99**	**268.580.000,00**	**94.05**	**262.522.775,00**	**194.05**	**3.347.268.928,00**	**95**	**97.7**	**0**	**0**	
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		50.000.000,00	1	99.789.000,00	1	0,00	0	0,00	1	99.789.000,00	0	0	0	0	
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota		241.150.000,00	1	2.984.957.153,00	1	268.580.000,00	1	262.522.775,00	2	3.247.479.928,00	100	97.7	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Terjalinnya koordinasi yang baik antar perangkat daerah terkait																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya perubahan tahapan pendaftaran persertifikatan di Kantor Pertanahan Kota Blitar																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Menjalin Koordinasi dan komunikasi yang baik dan optimal bersama Kantor Pertanahan dengan pihak-pihak terkait																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mengevaluasi target sehingga lebih rasional sesuai dengan kondisi yang regional																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**97.50**	**93.08**			
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	211	**Lingkungan Hidup**																
	2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**80.5**	**9.931.667.195,00**	**85.4**	**6.453.009.701,00**	**80**	**6.794.184.845,67**	**87.45**	**6.620.960.755,00**	**172.81**	**13.073.970.456,00**	**109.3**	**97.5**	**108.6**	**15.1**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**16.320.000,00**	**100**	**9.363.100,00**	**100**	**2.850.000,00**	**100**	**2.850.000,00**	**200**	**12.213.100,00**	**100**	**100**	**0**	**6.4**	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9.750.000,00	5	4.935.000,00	11	1.800.000,00	11	1.800.000,00	16	6.735.000,00	100	100	0	0	
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6.570.000,00	2	4.428.100,00	7	1.050.000,00	7	1.050.000,00	9	5.478.100,00	100	100	0	16	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**6.172.765.868,00**	**100**	**5.375.740.564,00**	**100**	**5.739.094.649,00**	**75**	**5.589.067.795,00**	**175**	**10.964.808.359,00**	**75**	**97.4**	**0**	**21.7**	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		6.168.525.868,00	48	5.371.560.564,00	57	5.737.169.649,00	58	5.587.160.295,00	106	10.958.720.859,00	101.8	97.4	0	21.7	
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4.240.000,00	4	4.180.000,00	4	1.925.000,00	3	1.907.500,00	7	6.087.500,00	75	99.1	0	0	
	2.11.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**92.103.300,00**	**100**	**141.784.700,00**	**100**	**54.088.700,00**	**125**	**53.968.200,00**	**225**	**195.752.900,00**	**125**	**99.8**	**0**	**0**	
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		37.300.000,00	3	37.110.000,00	3	0,00	0	0,00	3	37.110.000,00	0	0	0	0	
	2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		54.803.300,00	69	104.674.700,00	69	54.088.700,00	57	53.968.200,00	126	158.642.900,00	82.6	99.8	0	0	
	2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**313.620.900,00**	**100**	**433.689.407,00**	**100**	**314.630.046,67**	**50**	**309.501.226,00**	**150**	**743.190.633,00**	**50**	**98.4**	**0**	**18.4**	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2.994.100,00	1	2.980.500,00	1	2.833.000,00	1	2.815.500,00	2	5.796.000,00	100	99.4	0	94	
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		45.160.300,00	5	63.140.000,00	6	40.621.800,00	6	40.050.500,00	11	103.190.500,00	100	98.6	0	41	
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4.523.700,00	2	4.496.000,00	4	4.641.500,00	4	4.598.500,00	6	9.094.500,00	100	99.1	0	101.7	
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		63.762.300,00	40	101.614.500,00	22	100.595.000,00	41	99.680.000,00	81	201.294.500,00	186.4	99.1	0	10.3	
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		15.947.000,00	1	15.734.000,00	1	12.491.300,00	1	12.356.500,00	2	28.090.500,00	100	98.9	0	61.8	
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		7.680.000,00	36	6.680.000,00	36	6.600.000,00	27	6.120.000,00	63	12.800.000,00	75	92.7	0	13.3	
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		173.553.500,00	60	239.044.407,00	50	146.847.446,67	53	143.880.226,00	113	382.924.633,00	106	98	0	8.3	
	2.11.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan**		**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**43.637.950,00**	**100**	**41.807.901,00**	**100**	**41.807.901,00**	**100**	**95.8**	**0**	**0**	
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0,00	0	0,00	7	43.637.950,00	7	41.807.901,00	7	41.807.901,00	100	95.8	0	0	
	2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**320.106.500,00**	**100**	**332.356.179,00**	**100**	**352.139.500,00**	**125**	**347.943.068,00**	**225**	**680.299.247,00**	**125**	**98.8**	**0**	**26.4**	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		50.044.500,00	24	67.096.547,00	36	69.115.500,00	18	65.642.407,00	42	132.738.954,00	50	95	0	36.2	
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		270.062.000,00	26	265.259.632,00	26	283.024.000,00	20	282.300.661,00	46	547.560.293,00	76.9	99.7	0	24.5	
	2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**152.483.900,00**	**100**	**160.075.751,00**	**100**	**287.744.000,00**	**125**	**275.822.565,00**	**225**	**435.898.316,00**	**125**	**95.9**	**0**	**9.1**	
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		119.248.700,00	37	127.156.251,00	39	108.636.600,00	3	99.246.304,00	40	226.402.555,00	7.7	91.4	0	7.5	
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		30.255.000,00	80	29.972.500,00	103	54.167.300,00	75	53.935.000,00	155	83.907.500,00	72.8	99.6	0	0	
	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2.980.200,00	98	2.947.000,00	425	124.940.100,00	127	122.641.261,00	225	125.588.261,00	29.9	98.2	0	168	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan anggaran dan SDM yang mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih ada beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan jadwal pada Rencana Anggaran Kas, karena menyesuaikan pekerjaan, terutama yang berkaitan dengan pihak eksternal																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Merencanakan anggaran pada RAK dengan lebih cermat																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Merencanakan anggaran pada RAK dengan lebih cermat, dan meningkatkan kompetensi SDM yang tersedia																		
	2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia**	**100**	**250.000.000,00**	**100**	**240.060.228,00**	**100**	**31.047.500,00**	**100**	**31.037.500,00**	**200**	**271.097.728,00**	**100**	**100**	**100**	**0.3**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11.02.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi**		**76.831.900,00**	**2**	**240.060.228,00**	**1**	**31.047.500,00**	**1**	**31.037.500,00**	**3**	**271.097.728,00**	**100**	**100**	**0**	**1**	
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi		76.831.900,00	2	240.060.228,00	1	31.047.500,00	1	31.037.500,00	3	271.097.728,00	100	100	0	1	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tim Pokja penyusunan RPPLH cukup kooperatif																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih ada beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan jadwal pada Rencana Anggaran Kas, karena menyesuaikan pekerjaan, terutama yang berkaitan dengan pihak eksternal																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Merencanakan anggaran pada RAK dengan lebih cermat																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Merencanakan anggaran pada RAK dengan lebih cermat, dan meningkatkan kompetensi SDM yang tersedia																		
	2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu**	**100**	**1.309.400.000,00**	**8.95**	**474.093.299,00**	**57**	**385.233.600,00**	**57**	**379.781.268,00**	**65.95**	**853.874.567,00**	**100**	**98.6**	**57**	**1.4**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Penurunan Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)**	**15.15**	**1.309.400.000,00**	**100**	**474.093.299,00**	**11.69**	**385.233.600,00**	**9.5**	**379.781.268,00**	**109.5**	**853.874.567,00**	**81.3**	**98.6**	**62.7**	**1.4**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu**	**58**	**1.309.400.000,00**	**59**	**474.093.299,00**	**100**	**385.233.600,00**	**100**	**379.781.268,00**	**159**	**853.874.567,00**	**100**	**98.6**	**172.4**	**1.4**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terlaksana**		**477.790.400,00**	**18**	**474.093.299,00**	**3**	**385.233.600,00**	**3**	**379.781.268,00**	**21**	**853.874.567,00**	**100**	**98.6**	**0**	**3.9**	
	2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim**		**477.790.400,00**	**3**	**474.093.299,00**	**3**	**385.233.600,00**	**3**	**379.781.268,00**	**6**	**853.874.567,00**	**100**	**98.6**	**0**	**3.9**	
	2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu**		**477.790.400,00**	**3**	**474.093.299,00**	**18**	**385.233.600,00**	**16**	**379.781.268,00**	**19**	**853.874.567,00**	**88.9**	**98.6**	**0**	**3.9**	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		206.984.800,00	1	152.058.900,00	1	172.700.000,00	0.5	169.870.000,00	1.5	321.928.900,00	50	98.4	0	0	
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		270.805.600,00	1	322.034.399,00	1	212.533.600,00	0.5	209.911.268,00	1.5	531.945.667,00	50	98.8	0	6.8	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tidak ada faktor penghambat, pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan perencanaan dengan lebih baik agar realisasinya lebih tepat sasaran, dan selalu melakukan monev																		
	2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota**	**16.28**	**4.789.000.000,00**	**16.3**	**6.082.037.357,00**	**16.27**	**3.662.708.759,33**	**16.27**	**3.410.029.838,00**	**32.54**	**9.492.067.195,00**	**100**	**93.1**	**100**	**3.2**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Luas RTH Publik yang Terkelola**		**4.986.150.069,00**	**420**	**6.082.037.357,00**	**420.34**	**3.662.708.759,33**	**420.4**	**3.410.029.838,00**	**840.72**	**9.492.067.195,00**	**100**	**93.1**	**0**	**3.1**	
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola		4.986.150.069,00	14	6.082.037.357,00	15	3.662.708.759,33	15	3.410.029.838,00	29	9.492.067.195,00	100	93.1	0	3.1	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tidak ada faktor penghambat, pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan perencanaan dengan lebih baik agar realisasinya lebih tepat sasaran, dan selalu melakukan monev																		

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan**	**100**	**50.999.100,00**	**100**	**13.208.000,00**	**100**	**2.890.000,00**	**75.56**	**2.885.000,00**	**175.56**	**16.093.000,00**	**75.6**	**99.8**	**75.6**	**0**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11.05.2.02	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan**		**14.444.800,00**	**45**	**13.208.000,00**	**50**	**2.890.000,00**	**34**	**2.885.000,00**	**79**	**16.093.000,00**	**68**	**99.8**	**0**	**0**	
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pen		14.444.800,00	1	13.208.000,00	1	2.890.000,00	1	2.885.000,00	2	16.093.000,00	100	99.8	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak eksternal																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih terdapat pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang tidak taat																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pelaku usaha dan/atau kegiatan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pelaku usaha dan/atau kegiatan																		
	2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup**	**65**	**331.854.400,00**	**65**	**64.087.500,00**	**65**	**14.650.000,00**	**68.29**	**14.130.000,00**	**133.29**	**78.217.500,00**	**105.1**	**96.5**	**105.1**	**0**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup**		**77.716.300,00**	**64**	**64.087.500,00**	**60**	**14.650.000,00**	**56**	**14.130.000,00**	**120**	**78.217.500,00**	**93.3**	**96.5**	**0**	**0**	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		44.033.800,00	12	43.677.500,00	12	2.750.000,00	12	2.725.000,00	24	46.402.500,00	100	99.1	0	0	
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		0,00	0	0,00	60	11.900.000,00	82	11.405.000,00	82	11.405.000,00	136.7	95.8	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan usaha dan/atau kegiatan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Usaha dan/atau kegiatan belum mengetahui prosedur izin lingkungan dan izin PPLH																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan																		
	2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina**	**100**	**650.000.000,00**	**100**	**444.009.500,00**	**100**	**296.475.400,00**	**100**	**274.944.348,00**	**200**	**718.953.848,00**	**100**	**92.7**	**100**	**3.6**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina**		**386.790.400,00**	**21**	**444.009.500,00**	**21**	**296.475.400,00**	**21**	**274.944.348,00**	**42**	**718.953.848,00**	**100**	**92.7**	**0**	**6.1**	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		155.255.900,00	2	220.767.000,00	3	63.390.100,00	3	62.767.000,00	5	283.534.000,00	100	99	0	0	
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		231.534.500,00	14	223.242.500,00	14	233.085.300,00	14	212.177.348,00	28	435.419.848,00	100	91	0	10.2	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan komunikasi yang intens dengan semua leading sektor yang terlibat																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pemahaman yang belum sama																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan pembinaan dan brainwashing tentang pengelolaan lingkungan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memberikan apresiasi kepada semua organisasi pegiat lingkungan																		

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase kelurahan berseri**	**1**	**552.073.850,00**	**44.6**	**413.315.050,00**	**53.97**	**305.964.200,00**	**87.3**	**287.204.191,00**	**131.92**	**700.519.241,00**	**161.8**	**93.9**	**8730**	**0**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)**	**30.58**	**552.073.850,00**	**1**	**413.315.050,00**	**1**	**305.964.200,00**	**0**	**287.204.191,00**	**1**	**700.519.241,00**	**0**	**93.9**	**0**	**0**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)**	**57.14**	**552.073.850,00**	**62.5**	**413.315.050,00**	**28.4**	**305.964.200,00**	**59.23**	**287.204.191,00**	**121.77**	**700.519.241,00**	**208.6**	**93.9**	**103.7**	**0**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh**		**476.210.400,00**	**71**	**413.315.050,00**	**66**	**305.964.200,00**	**0**	**287.204.191,00**	**71**	**700.519.241,00**	**0**	**93.9**	**0**	**0**	
	2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh**		**476.210.400,00**	**52**	**413.315.050,00**	**20**	**305.964.200,00**	**0**	**287.204.191,00**	**52**	**700.519.241,00**	**0**	**93.9**	**0**	**0**	
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		476.210.400,00	5	413.315.050,00	5	305.964.200,00	5	287.204.191,00	10	700.519.241,00	100	93.9	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan komunikasi yang intens dengan semua leading sektor yang terlibat																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pencapaian target jumlah predikat adipura tidak dapat tercapai karena sampai dengan TW IV 2025, belum ada pengumuman resmi dari KLH terkait hasil penilaian Adipura																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak eksternal																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak eksternal																		
	2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**	**100**	**50.000.000,00**	**100**	**4.180.000,00**	**100**	**2.600.000,00**	**100**	**2.476.250,00**	**200**	**6.656.250,00**	**100**	**95.2**	**100**	**0**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**		**7.490.000,00**	**1**	**4.180.000,00**	**1**	**2.600.000,00**	**1**	**2.476.250,00**	**2**	**6.656.250,00**	**100**	**95.2**	**0**	**0**	
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani		7.490.000,00	1	4.180.000,00	1	2.600.000,00	1	2.476.250,00	2	6.656.250,00	100	95.2	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak eksternal																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masyarakat belum memahami prosedur pengaduan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak eksternal																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak eksternal																		
	2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase sampah tertangani**	**14.82**	**0,00**	**81.9**	**11.007.651.672,00**	**83.16**	**11.039.128.048,00**	**83.16**	**10.970.751.163,00**	**165.08**	**21.978.402.835,00**	**100**	**99.4**	**561.1**	**0**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R**	**83.18**	**0,00**	**16.1**	**11.007.651.672,00**	**14.84**	**11.039.128.048,00**	**14.84**	**10.970.751.163,00**	**30.93**	**21.978.402.835,00**	**100**	**99.4**	**17.8**	**0**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**Volume sampah tertangani**		**10.003.801.987,00**	**4548**	**11.007.651.672,00**	**22950**	**11.039.128.048,00**	**17213**	**10.970.751.163,00**	**21760.24**	**21.978.402.835,00**	**75**	**99.4**	**0**	**21.7**	
	2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**Volume sampah yang terkurangi**		**10.003.801.987,00**	**####**	**11.007.651.672,00**	**3977.5**	**11.039.128.048,00**	**2652**	**10.970.751.163,00**	**25805.41**	**21.978.402.835,00**	**66.7**	**99.4**	**0**	**21.7**	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		403.162.550,00	3	428.894.800,00	3	326.829.913,00	3	309.659.727,00	6	738.554.527,00	100	94.7	0	47.4	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		403.162.550,00	3	428.894.800,00	3	326.829.913,00	3	309.659.727,00	6	738.554.527,00	100	94.7	0	47.4	
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		2.502.600.549,00	11	3.264.873.672,00	11	3.083.796.089,00	11	3.040.987.968,00	22	6.305.861.640,00	100	98.6	0	11.2	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan		0,00	1	0,00	1	101.000.000,00	2	100.893.568,00	3	100.893.568,00	200	99.9	0	0	
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah		7.098.038.888,00	90	7.313.883.200,00	90	7.527.502.046,00	90	7.519.209.900,00	180	14.833.093.100,00	100	99.9	0	24	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tidak ada hambatan pada pelaksanaan program ini. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan montoring dan pengawasan terkait hasil pekerjaan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan perencanaan dengan lebih tepat dan cermat																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**90.46**	**97.60**			
													Predikat kinerja	**Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	212	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**																
	2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat**	**88**	**5.738.466.089,00**	**87.3**	**5.354.492.333,00**	**88**	**6.138.834.916,00**	**88.14**	**5.628.659.876,00**	**175.44**	**10.983.152.209,00**	**100.2**	**91.7**	**100.2**	**20**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**	**100**	**29.081.237,00**	**100**	**28.162.100,00**	**100**	**14.351.200,00**	**100**	**13.811.000,00**	**200**	**41.973.100,00**	**100**	**96.2**	**100**	**0**	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44	10.223.500,00	11	9.685.000,00	11	5.776.800,00	11	5.558.000,00	22	15.243.000,00	100	96.2	25	0	
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36	18.857.737,00	11	18.477.100,00	11	8.574.400,00	11	8.253.000,00	22	26.730.100,00	100	96.3	30.6	0	
	2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**	**100**	**3.590.793.871,00**	**100**	**3.764.834.658,00**	**100**	**4.129.435.904,00**	**100**	**3.682.540.514,00**	**200**	**7.447.375.172,00**	**100**	**89.2**	**100**	**26.4**	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108	3.590.793.871,00	27	3.764.834.658,00	29	4.128.735.904,00	27	3.681.845.514,00	54	7.446.680.172,00	93.1	89.2	25	26.4	
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	0,00	0	0,00	1	700.000,00	1	695.000,00	1	695.000,00	100	99.3	25	0	
	2.12.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**	**100**	**89.316.215,00**	**100**	**84.298.260,00**	**100**	**65.413.700,00**	**100**	**62.720.200,00**	**200**	**147.018.460,00**	**100**	**95.9**	**100**	**0**	
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8	35.581.655,00	2	35.576.000,00	3	0,00	0	0,00	2	35.576.000,00	0	0	0	0	
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38	53.734.560,00	40	48.722.260,00	41	65.413.700,00	45	62.720.200,00	85	111.442.460,00	109.8	95.9	118.4	0	
	2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan standart**	**100**	**304.164.400,00**	**100**	**323.155.964,00**	**100**	**370.843.175,00**	**100**	**352.438.407,00**	**200**	**675.594.371,00**	**100**	**95**	**100**	**9.8**	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	12.770.800,00	1	12.770.200,00	1	37.651.900,00	100	37.037.000,00	101	49.807.200,00	10000	98.4	2500	0	
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	26.251.600,00	2	26.068.350,00	1	25.860.275,00	1	25.739.500,00	3	51.807.850,00	100	99.5	12.5	0	
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	14.068.400,00	3	13.675.300,00	4	38.650.500,00	1	34.955.100,00	4	48.630.400,00	25	90.4	8.3	0	
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	45.075.800,00	2	49.168.800,00	2	45.220.000,00	2	43.966.500,00	4	93.135.300,00	100	97.2	25	21.5	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	14.246.800,00	2	14.138.000,00	2	25.360.500,00	2	25.038.000,00	4	39.176.000,00	100	98.7	25	0	
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96	8.100.000,00	24	8.100.000,00	24	8.100.000,00	24	8.100.000,00	48	16.200.000,00	100	100	25	0	
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	172.401.000,00	22	188.110.314,00	30	115.000.000,00	34	104.608.707,00	56	292.719.021,00	113.3	91	28.3	11.6	
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		172.401.000,00	22	188.110.314,00	30	115.000.000,00	34	104.608.707,00	56	292.719.021,00	113.3	91	0	11.6	
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	11.250.000,00	2	11.125.000,00	1	75.000.000,00	1	72.993.600,00	3	84.118.600,00	100	97.3	100	0	
	2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan**	**100**	**60.470.100,00**	**100**	**205.726.000,00**	**100**	**223.417.626,00**	**100**	**218.525.700,00**	**200**	**424.251.700,00**	**100**	**97.8**	**100**	**0**	
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	20.985.300,00	2	91.146.000,00	1	35.278.026,00	0.1	35.242.500,00	2.1	126.388.500,00	10	99.9	2.5	0	
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48	39.484.800,00	3	114.580.000,00	9	188.139.600,00	2	183.283.200,00	5	297.863.200,00	22.2	97.4	4.2	0	
	2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**	**100**	**567.341.451,00**	**100**	**546.175.411,00**	**100**	**691.285.711,00**	**75**	**667.339.711,00**	**175**	**1.213.515.122,00**	**75**	**96.5**	**75**	**28.4**	
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	162.248.451,00	48	152.374.855,00	48	163.491.100,00	36	150.487.304,00	84	302.862.159,00	75	92	75	23	
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52	405.093.000,00	13	393.800.556,00	13	527.794.611,00	10	516.852.407,00	23	910.652.963,00	76.9	97.9	19.2	30.6	
	2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**	**100**	**260.999.600,00**	**100**	**402.139.940,00**	**100**	**644.087.600,00**	**75**	**631.284.344,00**	**175**	**1.033.424.284,00**	**75**	**98**	**75**	**2.7**	
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52	71.160.000,00	13	67.060.048,00	13	91.531.500,00	8	84.292.594,00	21	151.352.642,00	61.5	92.1	15.4	7.7	
	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0,00	0	0,00	1	26.000.000,00	1	25.970.000,00	1	25.970.000,00	100	99.9	0	0	
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		41.466.000,00	4	41.390.892,00	4	86.335.500,00	0.93	85.802.350,00	4.93	127.193.242,00	23.3	99.4	0	3.5	
	2.12.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4	813.600,00	1	812.000,00	1	805.600,00	1	805.600,00	2	1.617.600,00	100	100	25	0	
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	147.560.000,00	1	292.877.000,00	1	439.415.000,00	0.1	434.413.800,00	1.1	727.290.800,00	10	98.9	2.5	0	
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		147.560.000,00	1	292.877.000,00	1	439.415.000,00	0.1	434.413.800,00	1.1	727.290.800,00	10	98.9	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kompetensi pegawai yang memadai dan komitmen dalam pencapaian kinerja																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Capaian realisasi anggaran tidak maksimal, dikarenakan terdapat sisa gaji 435.000.000 yang tidak terealisasi.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penyusunan rencana mempedomani permasalahan yang ada dan mengutamakan pelayanan																		
	2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA**	**100**	**470.738.733,00**	**100**	**460.692.969,00**	**2.55**	**295.889.379,00**	**0**	**286.882.623,00**	**100**	**747.575.592,00**	**0**	**97**	**0**	**35.2**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase peningkatan Kepemilikan e-KTP**	**12.75**	**470.738.733,00**	**4.36**	**460.692.969,00**	**0.03**	**295.889.379,00**	**0.11**	**286.882.623,00**	**4.47**	**747.575.592,00**	**366.7**	**97**	**0.9**	**35.2**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase penerbitan dokumen KK**	**0.18**	**470.738.733,00**	**0.22**	**460.692.969,00**	**100**	**295.889.379,00**	**100**	**286.882.623,00**	**100.22**	**747.575.592,00**	**100**	**97**	**55555.6**	**35.2**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KIA)**	**95**	**435.886.840,00**	**99.5**	**446.085.969,00**	**92.45**	**267.209.379,00**	**99.5**	**258.850.873,00**	**199.04**	**704.936.842,00**	**107.6**	**96.9**	**104.7**	**38**	
	2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP)**		**435.886.840,00**	**100**	**446.085.969,00**	**99.68**	**267.209.379,00**	**99.69**	**258.850.873,00**	**199.69**	**704.936.842,00**	**100**	**96.9**	**0**	**38**	
	2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Penerbitan dokumen kependudukan (KK)**	**99.71**	**435.886.840,00**	**99.9**	**446.085.969,00**	**100**	**267.209.379,00**	**100**	**258.850.873,00**	**199.87**	**704.936.842,00**	**100**	**96.9**	**100.3**	**38**	
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4	9.811.200,00	1	6.119.000,00	1	7.504.200,00	1	6.670.000,00	2	12.789.000,00	100	88.9	25	0	
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	129200	426.075.640,00	32357	439.966.969,00	32300	259.705.179,00	43685	252.180.873,00	76042	692.147.842,00	135.2	97.1	33.8	38.9	
	2.12.02.2.02	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase ketersediaan blanko dan formulir pendafataran penduduk**	**100**	**5.420.000,00**	**100**	**5.420.000,00**	**100**	**12.500.000,00**	**100**	**12.398.000,00**	**200**	**17.818.000,00**	**100**	**99.2**	**100**	**0**	
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		5.420.000,00	1	5.420.000,00	1	12.500.000,00	1	12.398.000,00	2	17.818.000,00	100	99.2	0	0	
	2.12.02.2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**100**	**9.367.000,00**	**100**	**9.187.000,00**	**100**	**16.180.000,00**	**100**	**15.633.750,00**	**200**	**24.820.750,00**	**100**	**96.6**	**100**	**0**	
	2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	5	9.367.000,00	1	9.187.000,00	1	16.180.000,00	1	15.633.750,00	2	24.820.750,00	100	96.6	20	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya komitmen dalam pencapaian target kkinerja , serta adanya sinergitas layanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil antara pemerintah pusat, propinsi dan dukcapil kab/kota																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Perekaman KTP el belum memenuhi target, dikarenakan Masih ada penduduk usia wajib KTP belum melakukan perekaman KTP, dikarenakan yang bersangkutan tidak berdomisili sesuai alamat yang ada di KK																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penindakan tegas diusia 23 keatas bila penduduk belum melakukan perekaman KTP-el akan diajukan ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam negeri untuk diusulkan penonaktifan sementara																		
	2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian**	**1.5**	**438.748.101,00**	**0.2**	**269.171.700,00**	**2.6**	**146.835.600,00**	**1.97**	**142.567.920,00**	**2.17**	**411.739.620,00**	**75.8**	**97.1**	**131.3**	**0**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase penerbitan dokumen akta kematian**	**100**	**438.748.101,00**	**100**	**269.171.700,00**	**100**	**146.835.600,00**	**100**	**142.567.920,00**	**200**	**411.739.620,00**	**100**	**97.1**	**100**	**0**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan**	**13**	**438.748.101,00**	**2.03**	**269.171.700,00**	**2.19**	**146.835.600,00**	**1.02**	**142.567.920,00**	**3.05**	**411.739.620,00**	**46.6**	**97.1**	**7.8**	**0**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran**	**10.95**	**438.748.101,00**	**2.23**	**269.171.700,00**	**0.3**	**146.835.600,00**	**0.2**	**142.567.920,00**	**2.43**	**411.739.620,00**	**66.7**	**97.1**	**1.8**	**0**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akte kalhiran,)**		**171.649.100,00**	**92.4**	**144.556.800,00**	**98.67**	**86.341.400,00**	**99.78**	**84.423.630,00**	**192.21**	**228.980.430,00**	**101.1**	**97.8**	**0**	**0**	
	2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kematian)**		**171.649.100,00**	**100**	**144.556.800,00**	**100**	**86.341.400,00**	**100**	**84.423.630,00**	**200**	**228.980.430,00**	**100**	**97.8**	**0**	**0**	
	2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte perceraian)**	**99**	**171.649.100,00**	**99.6**	**144.556.800,00**	**87.39**	**86.341.400,00**	**84.46**	**84.423.630,00**	**184.04**	**228.980.430,00**	**96.6**	**97.8**	**85.3**	**0**	
	2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte perkawinan)**		**171.649.100,00**	**82.4**	**144.556.800,00**	**87.81**	**86.341.400,00**	**93.53**	**84.423.630,00**	**175.96**	**228.980.430,00**	**106.5**	**97.8**	**0**	**0**	
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	8999	143.089.100,00	3033	121.256.800,00	5400	63.357.400,00	4470	61.439.630,00	7503	182.696.430,00	82.8	97	49.7	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	4	28.560.000,00	1	23.300.000,00	1	22.984.000,00	1	22.984.000,00	2	46.284.000,00	100	100	25	0	
	2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Persentase kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan**	**100**	**104.940.700,00**	**100**	**102.592.900,00**	**100**	**52.716.400,00**	**100**	**51.301.290,00**	**200**	**153.894.190,00**	**100**	**97.3**	**100**	**0**	
	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	4	4.770.000,00	1	4.770.000,00	1	4.650.000,00	1	4.650.000,00	2	9.420.000,00	100	100	25	0	
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	4	40.500.000,00	1	40.140.000,00	1	3.855.000,00	1	2.499.000,00	2	42.639.000,00	100	64.8	25	0	
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	4	15.971.500,00	1	15.323.200,00	1	4.200.000,00	1	4.200.000,00	2	19.523.200,00	100	100	25	0	
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	4	43.699.200,00	1	42.359.700,00	1	40.011.400,00	1	39.952.290,00	2	82.311.990,00	100	99.9	25	0	
	2.12.03.2.03	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang di bina**	**100**	**23.410.500,00**	**100**	**22.022.000,00**	**100**	**7.777.800,00**	**100**	**6.843.000,00**	**200**	**28.865.000,00**	**100**	**88**	**100**	**0**	
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis	4	23.410.500,00	1	22.022.000,00	1	7.777.800,00	1	6.843.000,00	2	28.865.000,00	100	88	25	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya komitmen dalam pencapaian target kkinerja ,adanya sinergitas layanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil antara pemerintah pusat, propinsi dan dukcapil kab/kota , inovasi layanan adminduk																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Status Perkawinan Penduduk yg KAWIN BELUM TERCATAT masih tinggi 2. Kepemilikan Akta Kelahiran untuk seluruh penduduk masih rendah 3. Arsip Akta Pencatatan sipil yg bersifat STATIS masih banyak belum digitalisasi Capaian peningkatan kepemiilikan akta kelahriran belum memenuhi target, sampai dengan TB																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Menggangarkan inovasi SUBUR SAE di tahun 2026, yakni layanan akte kelahiran segala umur yang dilakukan serentak																		
	2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan**	**16**	**961.689.982,00**	**16**	**908.449.600,00**	**16**	**222.210.800,00**	**16.67**	**209.619.879,00**	**32.67**	**1.118.069.479,00**	**104.2**	**94.3**	**104.2**	**0**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Persentase PKS pemanfaatana data kependudukan yang diterbitkan**	**100**	**316.134.800,00**	**100**	**402.009.800,00**	**100**	**72.783.000,00**	**100**	**71.964.279,00**	**200**	**473.974.079,00**	**100**	**98.9**	**100**	**0**	
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	4	300.000.000,00	1	396.475.000,00	1	62.508.800,00	1	61.872.000,00	2	458.347.000,00	100	99	25	0	
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	12	16.134.800,00	3	5.534.800,00	3	10.274.200,00	1	10.092.279,00	4	15.627.079,00	33.3	98.2	8.3	0	
	2.12.04.2.02	**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan**	**100**	**126.045.500,00**	**100**	**121.311.000,00**	**100**	**14.741.000,00**	**100**	**14.665.700,00**	**200**	**135.976.700,00**	**100**	**99.5**	**100**	**0**	
	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun		126.045.500,00	0.75	121.311.000,00	1	14.741.000,00	1	14.665.700,00	1.75	135.976.700,00	100	99.5	0	0	
	2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase jumlah elemen data penduduk yang di update**	**100**	**303.019.357,00**	**100**	**292.826.000,00**	**100**	**129.638.000,00**	**100**	**117.979.900,00**	**200**	**410.805.900,00**	**100**	**91**	**100**	**0**	
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		190.032.857,00	1	188.187.000,00	1	110.338.000,00	1	110.279.900,00	2	298.466.900,00	100	99.9	0	0	
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		112.986.500,00	1	104.639.000,00	1	19.300.000,00	1	7.700.000,00	2	112.339.000,00	100	39.9	0	0	
	2.12.04.2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase operator SIAK yang dilakukan pembinaan dan pengawasan**		**98.884.500,00**	**100**	**92.302.800,00**	**100**	**5.048.800,00**	**100**	**5.010.000,00**	**200**	**97.312.800,00**	**100**	**99.2**	**0**	**0**	
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		50.363.000,00	1	44.064.800,00	1	1.400.000,00	1	1.400.000,00	2	45.464.800,00	100	100	0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		48.521.500,00	1	48.238.000,00	1	3.648.800,00	1	3.610.000,00	2	51.848.000,00	100	98.9	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya komitmen dalam pencapaian target kkinerja ,adanya sinergitas layanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil antara pemerintah pusat, propinsi dan dukcapil kab/kota , inovasi layanan adminduk																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : - Mengutamakan layanan kependudukan masyarakat pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan																		
	2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan standart**	**100**	**103.293.700,00**	**100**	**49.195.200,00**	**100**	**15.048.000,00**	**100**	**14.960.000,00**	**200**	**64.155.200,00**	**100**	**99.4**	**100**	**0**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Persentase penerbitan buku profil kependudukan dan data kependudukan**	**100**	**49.255.200,00**	**100**	**49.195.200,00**	**100**	**15.048.000,00**	**100**	**14.960.000,00**	**200**	**64.155.200,00**	**100**	**99.4**	**100**	**0**	
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun		49.255.200,00	200	49.195.200,00	200	15.048.000,00	1	14.960.000,00	201	64.155.200,00	0.5	99.4	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya komitmen dalam pencapaian target kkinerja ,adanya sinergitas layanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil antara pemerintah pusat, propinsi dan dukcapil kab/kota , inovasi layanan adminduk																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memastikan ketersediaan profil kependudukan untuk mendukung program pembangunan daerah																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**78.9**	**92.137518**			
													Predikat kinerja	**Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	213	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**																
	2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase kelurahan tertib administrasi**		**0**	**142.86**	**21,197,500.00**	**85.71**	**89,426,370.00**	**85.71**	**21,450,000.00**	**228.57**	**42,647,500.00**	**100**	**24**	**0.0**	**0.0**	**Bagian Pemerintahan**
	2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang**		**120,646,500.00**	**38.00**	**21,197,500.00**	**20**	**89,426,370.00**	**21**	**21,450,000.00**	**59**	**42,647,500.00**	**105**	**24**	**0.0**	**0**	
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		120,646,500.00	42.00	21,197,500.00	21	89,426,370.00	21	21,450,000.00	63	42,647,500.00	100	24	0.0	0	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**100.00**	**97.50**			
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	214	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**																
	2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Rata-rata usia kawin pertama wanita**	**24.01**	**121.352.741,00**	**26**	**162.931.175,00**	**25.14**	**218.275.629,00**	**26.7**	**185.194.792,00**	**52.69**	**348.125.967,00**	**106.2**	**84.8**	**111.2**	**44.5**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Capaian Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)**		**73.500.000,00**	**22.4**	**61.501.988,00**	**23.12**	**16.298.829,00**	**20**	**16.218.276,00**	**42.4**	**77.720.264,00**	**86.5**	**99.5**	**0**	**0**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal		47.500.000,00	5	40.945.588,00	5	16.298.829,00	5	16.218.276,00	10	57.163.864,00	100	99.5	0	0	
	2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Profil Kependudukan yang Tersedia**		**164.500.000,00**	**100**	**101.429.187,00**	**100**	**201.976.800,00**	**100**	**168.976.516,00**	**200**	**270.405.703,00**	**100**	**83.7**	**0**	**32.8**	
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		64.200.000,00	0	0,00	2	60.000.000,00	2	59.501.247,00	2	59.501.247,00	100	99.2	0	31.2	
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya		19.000.000,00	6	25.765.500,00	21	47.076.800,00	21	45.994.323,00	27	71.759.823,00	100	97.7	0	161.8	
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		43.800.000,00	1	30.300.000,00	12	41.400.000,00	12	33.900.000,00	13	64.200.000,00	100	81.9	0	0	
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		18.000.000,00	1	26.372.887,00	1	36.000.000,00	1	12.568.980,00	2	38.941.867,00	100	34.9	0	17.5	
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		19.500.000,00	1	18.990.800,00	1	17.500.000,00	1	17.011.966,00	2	36.002.766,00	100	97.2	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Dukungan Mitra Terkait dan Sekolah dalam penyelenggaraan Sekolah Siaga Kependudukan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum semua sekolah ber MoU terkait penyelenggaraan SSK																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kegiatan Advokasi Pendidikan Kependudukan melalui Sekolah Siaga Kependudukan akan lebih dioptimalkan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Kegiatan Advokasi Pendidikan Kependudukan melalui Sekolah Siaga Kependudukan akan lebih dioptimalkan																		
	2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase KB Aktif**	**8.01**	**0,00**	**8.1**	**1.788.148.019,00**	**74.46**	**1.296.710.800,00**	**74.2**	**1.000.569.706,00**	**82.3**	**2.788.717.725,00**	**99.7**	**77.2**	**926.3**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)**	**74.67**	**0,00**	**67.4**	**1.788.148.019,00**	**8.25**	**1.296.710.800,00**	**8.1**	**1.000.569.706,00**	**75.5**	**2.788.717.725,00**	**98.2**	**77.2**	**10.8**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB**		**533.235.611,00**	**3**	**452.564.419,00**	**3**	**492.200.000,00**	**3**	**339.962.700,00**	**6**	**792.527.119,00**	**100**	**69.1**	**0**	**0**	
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		79.988.115,00	3	136.035.690,00	3	0,00	0	0,00	3	136.035.690,00	0	0	0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		144.418.296,00	4	62.800.479,00	3	75.000.000,00	3	71.219.550,00	7	134.020.029,00	100	95	0	0	
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		39.000.000,00	6	41.386.000,00	9	67.200.000,00	9	66.707.750,00	15	108.093.750,00	100	99.3	0	0	
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		149.844.200,00	4	83.503.000,00	5	100.000.000,00	5	77.604.400,00	9	161.107.400,00	100	77.6	0	0	
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		119.985.000,00	1	128.839.250,00	10	250.000.000,00	10	124.431.000,00	11	253.270.250,00	100	49.8	0	0	
	2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Persentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi**		**314.784.378,00**	**100**	**690.235.850,00**	**100**	**422.730.800,00**	**100**	**418.373.000,00**	**200**	**1.108.608.850,00**	**100**	**99**	**0**	**0**	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		314.784.378,00	361	331.360.850,00	421	422.730.800,00	421	418.373.000,00	782	749.733.850,00	100	99	0	0	
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/P		0,00	4	358.875.000,00	1	0,00	0	0,00	4	358.875.000,00	0	0	0	0	
	2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**		**793.015.900,00**	**44.8**	**277.831.850,00**	**50.56**	**336.980.000,00**	**50.56**	**204.021.006,00**	**95.36**	**481.852.856,00**	**100**	**60.5**	**0**	**0.5**	
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		11.078.600,00	24	5.349.600,00	12	0,00	0	0,00	24	5.349.600,00	0	0	0	0	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		271.468.100,00	943	197.717.750,00	655	288.672.000,00	655	165.659.506,00	1598	363.377.256,00	100	57.4	0	0	
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		27.621.200,00	3	13.828.750,00	4	13.508.000,00	4	12.261.500,00	7	26.090.250,00	100	90.8	0	13.2	
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria		77.500.000,00	270	27.471.750,00	20	34.800.000,00	6	26.100.000,00	276	53.571.750,00	30	75	0	0	
	2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Persentase Kampung KB yang terfasilitasi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB**		**327.692.565,00**	**100**	**367.515.900,00**	**100**	**44.800.000,00**	**100**	**38.213.000,00**	**200**	**405.728.900,00**	**100**	**85.3**	**0**	**3.4**	
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		204.192.565,00	1	3.705.000,00	1	0,00	0	0,00	1	3.705.000,00	0	0	0	0	
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB		0,00	21	209.882.350,00	11	0,00	0	0,00	21	209.882.350,00	0	0	0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		123.500.000,00	21	153.928.550,00	21	44.800.000,00	21	38.213.000,00	42	192.141.550,00	100	85.3	0	9	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Terpetakannya Kondisi PUS di Kota Blitar; Ketersediaan Kader KB sampai dengan Tingkat RT/RW																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih adanya Pasangan Usia Subur (PUS) yang enggan ikut KB; Keterbatasan Kapasitas Dalam Pengoperasian Aplikasi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Sinkronisasi Data Cakupan PUS yang belum ber KB; Evaluasi Komitmen dan kapasitas Kader KB																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penyelerasan kebijakan pencatatan pelaporan dengan bukti dukung pemberian insentif kader KB; Kolaborasi dengan Dinas Kominfotik dalam penyusunan Bridging Data																		
	2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase anggota kelompok Tribina & UPPKS yang ber KB**	**74.67**	**206.990.018,00**	**74.7**	**983.538.200,00**	**74.46**	**1.233.256.087,00**	**71.15**	**1.182.988.036,00**	**145.8**	**2.166.526.236,00**	**95.6**	**95.9**	**95.3**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina**		**506.500.000,00**	**100**	**490.228.550,00**	**100**	**474.256.087,00**	**100**	**424.126.036,00**	**200**	**914.354.586,00**	**100**	**89.4**	**0**	**0**	
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		0,00	1	20.049.000,00	1	28.800.000,00	1	14.995.000,00	2	35.044.000,00	100	52.1	0	0	
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		68.500.000,00	1	77.185.250,00	3	298.692.287,00	3	289.307.097,00	4	366.492.347,00	100	96.9	0	0	
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia		360.000.000,00	20	232.750.000,00	18	130.000.000,00	18	104.994.889,00	38	337.744.889,00	100	80.8	0	0	
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		78.000.000,00	807	160.244.300,00	60	16.763.800,00	60	14.829.050,00	867	175.073.350,00	100	88.5	0	0	
	2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)**	**3**	**0,00**	**3**	**493.309.650,00**	**3**	**759.000.000,00**	**3**	**758.862.000,00**	**6**	**1.252.171.650,00**	**100**	**100**	**100**	**0**	
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		0,00	3	113.809.650,00	3	345.000.000,00	3	344.862.000,00	6	458.671.650,00	100	100	0	0	
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan		0,00	9164	379.500.000,00	3720	414.000.000,00	2823	414.000.000,00	11987	793.500.000,00	75.9	100	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya peningkatan kompetensi Kader Kelompok Tribina dan UPPKA di masing - masing Kelurahan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Satu Data Keluarga belum terimplementasi secara optimal pada Kelompok Kegiatan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Orientasi Pelaksaaan Satu Data di Kelompok Kegiatan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Sinkronisasi dan Harmonisasi Pencatatan Pelaporan Kelompok Kegiatan dengan Pelayanan KB																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**98.35**	**86.19**			

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
													Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
	215	Perhubungan																
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.99	8.491.480.161,00	87.8	6.909.534.017,00	87.77	7.340.150.024,59	95.35	6.863.189.607,00	183.12	13.772.723.624,00	108.6	93.5	117.7	17.3	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	400	24.035.500,00	100	14.018.000,00	100	12.000.000,00	100	11.920.000,00	200	25.938.000,00	100	99.3	25	8.8	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56	4.879.500,00	14	4.877.000,00	14	8.800.000,00	14	8.720.000,00	28	13.597.000,00	100	99.1	25	43.4	
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28	19.156.000,00	7	9.141.000,00	7	3.200.000,00	7	3.200.000,00	14	12.341.000,00	100	100	25	0	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	400	5.294.946.233,00	100	5.059.136.712,00	100	5.621.037.560,59	100	5.239.559.907,00	200	10.298.696.619,00	100	93.2	25	23.9	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200	5.293.704.033,00	41	5.057.659.112,00	50	5.619.453.160,59	48	5.237.991.311,00	89	10.295.650.423,00	96	93.2	24	23.9	
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	68	1.242.200,00	17	1.477.600,00	17	1.584.400,00	17	1.568.596,00	34	3.046.196,00	100	99	25	0	
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	400	264.833.400,00	100	388.215.100,00	100	253.129.900,00	100	245.400.230,00	200	633.615.330,00	100	96.9	25	0.5	
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	13	120.211.800,00	5	243.156.800,00	3	116.678.600,00	3	116.172.780,00	8	359.329.580,00	100	99.6	23.1	0	
	2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200	144.621.600,00	50	145.058.300,00	50	136.451.300,00	50	129.227.450,00	100	274.285.750,00	100	94.7	25	0.8	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	400	342.389.780,00	100	354.335.815,00	100	243.911.100,00	100	228.835.173,00	200	583.170.988,00	100	93.8	25	5.1	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4.544.100,00	1	6.955.000,00	1	9.760.100,00	1	9.623.079,00	2	16.578.079,00	100	98.6	25	95.2	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	12.024.100,00	4	11.818.400,00	4	17.785.000,00	4	17.730.817,00	8	29.549.217,00	100	99.7	28.6	0	
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28	7.965.580,00	7	13.054.200,00	7	13.668.000,00	7	13.442.381,00	14	26.496.581,00	100	98.3	25	0	
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	96	55.970.000,00	24	56.079.000,00	20	58.252.000,00	20	44.526.700,00	44	100.605.700,00	100	76.4	20.8	4.6	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	7.900.000,00	1	7.782.500,00	1	9.098.000,00	1	8.998.715,00	2	16.781.215,00	100	98.9	25	0	
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96	7.800.000,00	24	7.536.000,00	24	7.800.000,00	24	7.536.000,00	48	15.072.000,00	100	96.6	25	16.1	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235	246.186.000,00	57	251.110.715,00	25	101.498.000,00	33	101.229.881,00	90	352.340.596,00	132	99.7	14	3.8	
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0,00	0	0,00	1	26.050.000,00	1	25.747.600,00	1	25.747.600,00	100	98.8	0	0	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	400	24.943.600,00	100	34.335.600,00	100	58.367.200,00	100	54.082.300,00	200	88.417.900,00	100	92.7	25	0	
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	7.035.600,00	2	7.035.600,00	2	11.606.200,00	2	11.575.100,00	4	18.610.700,00	100	99.7	40	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22	17.908.000,00	4	27.300.000,00	5	46.761.000,00	5	42.507.200,00	9	69.807.200,00	100	90.9	22.7	0	
	2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**	**400**	**702.147.600,00**	**100**	**643.834.045,00**	**100**	**685.058.104,00**	**100**	**642.961.463,00**	**200**	**1.286.795.508,00**	**100**	**93.9**	**25**	**22.3**	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	156	259.768.000,00	36	213.600.193,00	36	222.609.000,00	36	189.883.341,00	72	403.483.534,00	100	85.3	23.1	19.2	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52	442.379.600,00	13	430.233.852,00	13	462.449.104,00	13	453.078.122,00	26	883.311.974,00	100	98	25	24	
	2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**	**400**	**374.737.800,00**	**100**	**415.658.745,00**	**100**	**466.646.160,00**	**100**	**440.430.534,00**	**200**	**856.089.279,00**	**100**	**94.4**	**25**	**8**	
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	235	299.572.800,00	59	0,00	50	378.833.160,00	50	354.521.476,00	109	354.521.476,00	100	93.6	21.3	10	
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	169	25.065.000,00	40	24.674.500,00	68	33.335.000,00	68	33.117.058,00	108	57.791.558,00	100	99.3	40.2	0	
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	30.000.000,00	3	72.229.000,00	3	44.428.000,00	3	43.710.000,00	6	115.939.000,00	100	98.4	25	0	
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	20.100.000,00	1	19.000.000,00	1	10.050.000,00	1	9.082.000,00	2	28.082.000,00	100	90.4	25	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Strategi kebijakan pimpinan yang tepat didukung oleh SDM yang berkompeten dan memadai, serta monitoring dan pengawasan secara berkala																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Implementasi kegiatan sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah ditetapkan																		
	2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik**	**83.8**	**2.050.778.120,00**	**98.6**	**16.572.291.680,00**	**99.6**	**12.499.516.603,41**	**96.58**	**11.641.474.687,00**	**195.2**	**28.213.766.367,00**	**97**	**93.1**	**115.3**	**118.9**	**Dinas Perhubungan**
	2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**IKM terhadap layanan parkir tepi jalan umum**	**0.29**	**2.050.778.120,00**	**0**	**16.572.291.680,00**	**83.49**	**12.499.516.603,41**	**85.41**	**11.641.474.687,00**	**85.41**	**28.213.766.367,00**	**102.3**	**93.1**	**29451.7**	**118.9**	**Dinas Perhubungan**
	2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik**		**2.050.778.120,00**	**0**	**16.572.291.680,00**	**96.98**	**12.499.516.603,41**	**98.94**	**11.641.474.687,00**	**98.94**	**28.213.766.367,00**	**102**	**93.1**	**0**	**118.9**	**Dinas Perhubungan**
	2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor**		**2.050.778.120,00**	**0**	**16.572.291.680,00**	**92.2**	**12.499.516.603,41**	**92.59**	**11.641.474.687,00**	**92.59**	**28.213.766.367,00**	**100.4**	**93.1**	**0**	**118.9**	**Dinas Perhubungan**
	2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis**		**2.050.778.120,00**	**0**	**16.572.291.680,00**	**90.92**	**12.499.516.603,41**	**89.96**	**11.641.474.687,00**	**89.96**	**28.213.766.367,00**	**98.9**	**93.1**	**0**	**118.9**	**Dinas Perhubungan**
	2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu ralu lintas**		**2.050.778.120,00**	**0**	**16.572.291.680,00**	**0.3**	**12.499.516.603,41**	**0.59**	**11.641.474.687,00**	**0.59**	**28.213.766.367,00**	**196.7**	**93.1**	**0**	**118.9**	**Dinas Perhubungan**
	2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia**	**20**	**7.023.561.496,00**	**5**	**10.241.845.805,00**	**3**	**6.568.031.232,61**	**3**	**6.058.075.925,00**	**8**	**16.299.921.730,00**	**100**	**92.2**	**15**	**20.8**	
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	153	61.414.796,00	5	2.603.154.250,00	16	306.774.784,00	60	268.990.179,00	65	2.872.144.429,00	375	87.7	39.2	0	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	51	39.062.200,00	8	38.458.300,00	1	52.005.690,00	1	43.429.675,00	9	81.887.975,00	100	83.5	2	0	
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	6142	6.840.584.500,00	6055	7.233.279.255,00	5806	5.691.797.658,61	5866	5.253.378.244,00	11921	12.486.657.499,00	101	92.3	95.5	21.4	
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	148	82.500.000,00	28	366.954.000,00	23	517.453.100,00	24	492.277.827,00	52	859.231.827,00	104.3	95.1	16.2	0	
	2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang terkelola**	**61**	**109.979.400,00**	**15**	**109.738.571,00**	**16**	**25.076.600,00**	**16**	**24.754.159,00**	**31**	**134.492.730,00**	**100**	**98.7**	**26.2**	**0**	
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	5	59.979.400,00	1	59.806.687,00	1	0,00	0	0,00	1	59.806.687,00	0	0	0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	39	50.000.000,00	1	49.931.884,00	4	25.076.600,00	5	24.754.159,00	6	74.686.043,00	125	98.7	12.8	0	
	2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Persentase jukir yang mentaati aturan/SOP juru parkir**	**80**	**1.099.386.500,00**	**80.8**	**1.406.142.200,00**	**80.77**	**1.429.159.954,80**	**82.89**	**1.175.763.029,00**	**163.66**	**2.581.905.229,00**	**102.6**	**82.3**	**103.6**	**18.1**	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	48	1.099.386.500,00	12	1.406.142.200,00	12	1.429.159.954,80	12	1.175.763.029,00	24	2.581.905.229,00	100	82.3	25	18.1	
	2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan**	**96.5**	**150.917.668,00**	**96.7**	**431.339.002,00**	**96.68**	**176.375.318,00**	**98.97**	**172.938.928,00**	**195.65**	**604.277.930,00**	**102.4**	**98.1**	**102.6**	**2.1**	
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	18900	47.958.950,00	3254	46.821.650,00	4600	29.048.600,00	2746	28.601.488,00	6000	75.423.138,00	59.7	98.5	14.5	6.6	
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4000	25.000.000,00	1000	25.000.000,00	1000	25.000.000,00	1000	25.000.000,00	2000	50.000.000,00	100	100	25	0	
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	44	77.958.718,00	11	359.517.352,00	11	122.326.718,00	11	119.337.440,00	22	478.854.792,00	100	97.6	25	0	
	2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti**	**7**	**5.425.102.000,00**	**1**	**2.854.095.252,00**	**2**	**2.567.315.342,00**	**2**	**2.500.376.801,00**	**3**	**5.354.472.053,00**	**100**	**97.4**	**28.6**	**6.8**	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	48	2.007.225.600,00	12	2.075.736.521,00	12	2.009.335.442,00	12	1.985.603.408,00	24	4.061.339.929,00	100	98.8	25	18.3	
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	7	69.607.700,00	1	91.017.500,00	1	257.050.500,00	1	223.332.295,00	2	314.349.795,00	100	86.9	14.3	0	
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	29	3.232.176.000,00	9	605.607.066,00	7	208.968.000,00	7	207.207.026,00	16	812.814.092,00	100	99.2	24.1	0	
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	5	116.092.700,00	1	81.734.165,00	1	91.961.400,00	1	84.234.072,00	2	165.968.237,00	100	91.6	20	0	
	2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase angkutan umum layak yang tersedia**	**90**	**1.404.315.400,00**	**0**	**1.529.130.850,00**	**88**	**1.733.558.156,00**	**100**	**1.709.565.845,00**	**100**	**3.238.696.695,00**	**113.6**	**98.6**	**111.1**	**28.9**	
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48	1.006.726.600,00	12	1.008.394.516,00	12	1.068.690.756,00	12	1.061.336.779,00	24	2.069.731.295,00	100	99.3	25	37.5	
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	38	397.588.800,00	9	520.736.334,00	9	664.867.400,00	9	648.229.066,00	18	1.168.965.400,00	100	97.5	23.7	7.3	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Strategi dan kebijakan pimpinan, SDM yang berkompeten dan mencukupi.																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya pengawasan/pengawalan berkala terhadap pelaksanaan kegiatan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pengawasan/pengawalan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan implementasi kegiatan tepat jadwal																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**99.42**	**93.27**			
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	216	**Komunikasi dan Informatika**																
	2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**83**	**8.581.237.470,00**	**88.9**	**5.351.241.123,00**	**89**	**6.052.229.296,00**	**89.77**	**5.598.273.166,00**	**178.71**	**10.949.514.289,00**	**100.9**	**92.5**	**108.2**	**14.2**	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**
	2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart**		**20.139.150,00**	**123**	**19.765.000,00**	**100**	**11.600.000,00**	**100**	**11.454.000,00**	**222.5**	**31.219.000,00**	**100**	**98.7**	**0**	**14.7**	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.239.150,00	11	5.190.000,00	11	3.000.000,00	12	2.970.000,00	23	8.160.000,00	109.1	99	0	56.7	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10.000.000,00	9	9.805.000,00	7	3.000.000,00	7	2.943.000,00	16	12.748.000,00	100	98.1	0	0	
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.900.000,00	1	4.770.000,00	1	5.600.000,00	1	5.541.000,00	2	10.311.000,00	100	98.9	0	0	
	2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan sesuai standart**		**3.994.465.046,00**	**100**	**4.083.362.104,00**	**100**	**4.646.810.785,00**	**76.66**	**4.279.140.152,00**	**176.66**	**8.362.502.256,00**	**76.7**	**92.1**	**0**	**26.4**	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		3.987.165.046,00	33	4.076.222.104,00	13	4.646.010.785,00	13	4.278.350.552,00	46	8.354.572.656,00	100	92.1	0	26.4	
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		7.300.000,00	4	7.140.000,00	4	800.000,00	4	789.600,00	8	7.929.600,00	100	98.7	0	0	
	2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**116.900.800,00**	**106**	**107.272.000,00**	**100**	**79.741.940,00**	**130.7**	**79.462.650,00**	**236.69**	**186.734.650,00**	**130.7**	**99.6**	**0**	**0**	
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		24.790.400,00	69	31.284.000,00	33	7.886.439,00	33	7.870.500,00	102	39.154.500,00	100	99.8	0	0	
	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		92.110.400,00	70	75.988.000,00	68	71.855.501,00	99	71.592.150,00	169	147.580.150,00	145.6	99.6	0	0	
	2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**296.515.100,00**	**100**	**298.723.526,00**	**100**	**205.889.900,00**	**69**	**205.086.505,00**	**169**	**503.810.031,00**	**69**	**99.6**	**0**	**5.2**	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		9.700.000,00	4	9.667.000,00	4	8.636.600,00	5	8.616.600,00	9	18.283.600,00	125	99.8	0	0	
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	13.012.100,00	3	12.959.500,00	3	10.020.600,00	3	9.677.640,00	6	22.637.140,00	100	96.6	25	0	
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		27.000.000,00	5	21.975.000,00	5	31.619.900,00	4	31.342.400,00	9	53.317.400,00	80	99.1	0	0.8	
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		51.125.000,00	36	58.475.000,00	24	39.615.000,00	26	39.511.500,00	62	97.986.500,00	108.3	99.7	0	0	
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5.800.000,00	1	5.799.500,00	1	2.532.800,00	1	2.523.900,00	2	8.323.400,00	100	99.6	0	0	
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		4.000.000,00	24	3.990.000,00	24	4.000.000,00	24	3.960.000,00	48	7.950.000,00	100	99	0	16.5	
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		185.878.000,00	60	185.857.526,00	28	109.465.000,00	37	109.454.465,00	97	295.311.991,00	132.1	100	0	7.9	
	2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan**		**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**150.282.800,00**	**100**	**143.696.399,00**	**100**	**143.696.399,00**	**100**	**95.6**	**0**	**0**	
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0,00	0	0,00	6	150.282.800,00	6	143.696.399,00	6	143.696.399,00	100	95.6	0	0	
	2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart**		**555.389.000,00**	**100**	**587.456.638,00**	**100**	**642.264.305,00**	**51.04**	**567.119.722,00**	**151.04**	**1.154.576.360,00**	**51**	**88.3**	**0**	**24.8**	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		320.000.000,00	36	355.702.510,00	36	393.435.305,00	36	319.931.412,00	72	675.633.922,00	100	81.3	0	25.4	
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		235.389.000,00	13	231.754.128,00	13	248.829.000,00	13	247.188.310,00	26	478.942.438,00	100	99.3	0	24	
	2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart**		**254.803.940,00**	**100**	**254.661.855,00**	**100**	**315.639.566,00**	**100**	**312.313.738,00**	**200**	**566.975.593,00**	**100**	**98.9**	**0**	**4.2**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		97.303.940,00	8	100.308.355,00	8	83.870.266,00	8	83.187.698,00	16	183.496.053,00	100	99.2	0	9.2	
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		90.000.000,00	9	87.775.700,00	10	111.371.500,00	10	111.259.600,00	19	199.035.300,00	100	99.9	0	1.9	
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0,00	0	0,00	2	120.397.800,00	2	117.866.440,00	2	117.866.440,00	100	97.9	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1.pelayanan publik yang efektif dan efisien 2.Adanya perencanaan yang matang dan terukur (seperti dalam dokumen RPJMD) untuk memastikan program tepat sasaran 3.Pemanfaatan teknologi untuk mendukung efisiensi administrasi dan penyebaran informasi.																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1.Kurangnya pengawasan dan evaluasi efektif dan berkala 2.Penyusunan anggaran yang kurang matang menyebabkan perbedaan besar antara anggaran dan realisasi.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance): Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance): Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program.																		
	2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah**	**100**	**3.093.906.654,00**	**90**	**2.780.975.795,00**	**90**	**3.216.536.136,00**	**100**	**3.120.111.099,00**	**190**	**5.901.086.894,00**	**111.1**	**97**	**100**	**8.6**	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**
	2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Di**	**100**	**3.093.906.654,00**	**80**	**2.780.975.795,00**	**95**	**3.216.536.136,00**	**100**	**3.120.111.099,00**	**180**	**5.901.086.894,00**	**105.3**	**97**	**100**	**8.6**	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**
	2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik**		**2.235.944.000,00**	**73**	**2.780.975.795,00**	**68.5**	**3.216.536.136,00**	**2.2**	**3.120.111.099,00**	**75.2**	**5.901.086.894,00**	**3.2**	**97**	**0**	**11.8**	
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo		0,00	0	0,00	5	202.595.372,00	2	202.150.500,00	2	202.150.500,00	40	99.8	0	0	
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		0,00	0	0,00	700	611.097.000,00	1747	604.040.748,00	1747	604.040.748,00	249.6	98.8	0	0	
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		0,00	0	0,00	5	24.751.500,00	4	24.547.000,00	4	24.547.000,00	80	99.2	0	0	
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		0,00	0	0,00	6	2.340.856.264,00	6	2.253.386.051,00	6	2.253.386.051,00	100	96.3	0	0	
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan		0,00	0	0,00	80	37.236.000,00	80	35.986.800,00	80	35.986.800,00	100	96.6	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Adanya pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi yang jelas serta struktur kelembagaan yang mendukung (seperti Diskominfo dan PPID). 2.Melibatkan warga dalam musyawarah dan forum komunikasi untuk membangun kepercayaan dan partisipasi aktif.																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Rendahnya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan, serta tantangan dalam memastikan informasi yang disebarkan berkualitas dan mudah dipahami 2. Adanya sikap apatis dari masyarakat, perbedaan budaya, dan persepsi yang menghambat komunikasi yang terbuka dan jujur.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pelayanan yang cepat, produk informasi berkualitas, dan kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pelayanan yang cepat, produk informasi berkualitas, dan kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan.																		
	2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik**	**100**	**9.290.512.776,00**	**93**	**6.144.371.620,00**	**95**	**5.992.277.310,00**	**95**	**5.943.676.137,00**	**187.98**	**12.088.047.757,00**	**100**	**99.2**	**95**	**10.1**	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**
	2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase penerapan domain go.id / sub domaian pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan**		**4.909.160.910,00**	**100**	**5.347.956.598,00**	**100**	**70.990.004,00**	**100**	**68.963.000,00**	**200**	**5.416.919.598,00**	**100**	**97.1**	**0**	**1.3**	
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa		0,00	0	0,00	4	70.990.004,00	4	68.963.000,00	4	68.963.000,00	100	97.1	0	0	
	2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layananan publik**		**791.155.400,00**	**100**	**796.415.022,00**	**98**	**5.921.287.306,00**	**97.4**	**5.874.713.137,00**	**197.4**	**6.671.128.159,00**	**99.4**	**99.2**	**0**	**110.4**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		0,00	0	0,00	5	449.085.911,00	4	427.820.272,00	4	427.820.272,00	80	95.3	0	0	
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		0,00	0	0,00	30	5.472.201.395,00	30	5.446.892.865,00	30	5.446.892.865,00	100	99.5	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1.Adanya Peta Rencana SPBE 2.Meningkatnya ancaman digital mendorong pengembangan aplikasi keamanan yang lebih kuat. 3.Peningkatan keterampilan komputer dan pemahaman teknologi oleh SDM menjadi krusial untuk tenaga kerja masa kini. 4.Ketersediaan perangkat keras (komputer, server), jaringan internet yang																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Aplikasi seringkali tidak berjalan baik pada perangkat dengan spesifikasi rendah atau ketinggalan zaman 2.Sulitnya mengintegrasikan aplikasi baru dengan sistem lama yang sudah ada																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Adanya programmer, analis, dan desainer yang terampil dalam coding, desain UI/UX, serta manajemen proyek TI.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mengoptimalkan Tim Asistensi untuk menetapkan target sesuai dengan jenis layanan yang harus dipenuhi																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**100.00**	**96.08**			
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	217	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**																
	2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**83**	**3.199.453.439,00**	**174**	**4.892.927.168,00**	**82.5**	**4.947.306.041,00**	**86.97**	**4.626.109.990,00**	**260.97**	**9.519.037.158,00**	**105.4**	**93.5**	**104.8**	**35.4**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja**
	2.17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan**		**39.739.600,00**	**100**	**23.358.800,00**	**100**	**13.641.000,00**	**100**	**12.983.772,00**	**200**	**36.342.572,00**	**100**	**95.2**	**0**	**0**	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6.356.000,00	5	5.973.500,00	5	10.285.000,00	5	9.672.884,00	10	15.646.384,00	100	94	0	0	
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		33.383.600,00	4	17.385.300,00	4	3.356.000,00	4	3.310.888,00	8	20.696.188,00	100	98.7	0	0	
	2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar**		**3.751.891.785,00**	**100**	**3.736.115.603,00**	**100**	**3.901.200.707,00**	**100**	**3.633.059.847,00**	**200**	**7.369.175.450,00**	**100**	**93.1**	**0**	**23.9**	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		3.746.871.585,00	81	3.731.448.303,00	27	3.898.962.207,00	27	3.630.853.522,00	108	7.362.301.825,00	100	93.1	0	24	
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5.020.200,00	21	4.667.300,00	12	2.238.500,00	12	2.206.325,00	33	6.873.625,00	100	98.6	0	0	
	2.17.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai**		**94.743.000,00**	**100**	**193.085.750,00**	**100**	**57.559.800,00**	**100**	**55.603.000,00**	**200**	**248.688.750,00**	**100**	**96.6**	**0**	**0**	
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		49.200.000,00	2	47.745.000,00	0	0,00	0	0,00	2	47.745.000,00	0	0	0	0	
	2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		45.543.000,00	55	145.340.750,00	50	57.559.800,00	50	55.603.000,00	105	200.943.750,00	100	96.6	0	0	
	2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standar**		**317.403.600,00**	**100**	**340.551.572,00**	**100**	**194.794.500,00**	**100**	**188.407.788,00**	**200**	**528.959.360,00**	**100**	**96.7**	**0**	**4.8**	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5.084.500,00	1	5.044.500,00	1	5.189.800,00	1	5.107.554,00	2	10.152.054,00	100	98.4	0	0	
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		29.108.000,00	2	28.278.400,00	3	23.668.500,00	3	23.357.603,00	5	51.636.003,00	100	98.7	0	0	
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		11.654.600,00	1	11.355.800,00	1	8.212.800,00	1	8.083.625,00	2	19.439.425,00	100	98.4	0	0	
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		22.585.000,00	8	22.466.400,00	10	28.480.000,00	10	28.463.500,00	18	50.929.900,00	100	99.9	0	14.4	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		24.998.500,00	0	24.920.000,00	1	22.523.400,00	1	22.258.252,00	1	47.178.252,00	100	98.8	0	0	
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		5.400.000,00	12	3.900.000,00	12	5.400.000,00	12	2.600.000,00	24	6.500.000,00	100	48.1	0	0	
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		217.423.000,00	12	243.473.472,00	12	100.000.000,00	12	97.217.442,00	24	340.690.914,00	100	97.2	0	5.5	
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		217.423.000,00	12	243.473.472,00	12	100.000.000,00	12	97.217.442,00	24	340.690.914,00	100	97.2	0	5.5	
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1.150.000,00	1	1.113.000,00	1	1.320.000,00	1	1.319.812,00	2	2.432.812,00	100	100	0	0	
	2.17.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan**		**110.421.900,00**	**100**	**103.790.000,00**	**100**	**139.583.060,00**	**75**	**137.581.941,00**	**175**	**241.371.941,00**	**75**	**98.6**	**0**	**28.5**	
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		23.112.500,00	25	23.040.000,00	0	0,00	0	0,00	25	23.040.000,00	0	0	0	0	
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		87.309.400,00	7	80.750.000,00	2	139.583.060,00	2	137.581.941,00	9	218.331.941,00	100	98.6	0	36.1	
	2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar**		**340.483.200,00**	**100**	**333.644.657,00**	**100**	**380.951.608,00**	**75**	**354.626.764,00**	**175**	**688.271.421,00**	**75**	**93.1**	**0**	**22.6**	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		67.948.800,00	12	64.887.925,00	12	90.209.960,00	12	79.079.332,00	24	143.967.257,00	100	87.7	0	27.5	
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		272.534.400,00	12	268.756.732,00	12	290.741.648,00	12	275.547.432,00	24	544.304.164,00	100	94.8	0	21.4	
	2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**187.978.900,00**	**100**	**162.380.786,00**	**100**	**259.575.366,00**	**75**	**243.846.878,00**	**175**	**406.227.664,00**	**75**	**93.9**	**0**	**59.1**	
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		101.531.400,00	11	78.177.786,00	10	80.769.500,00	10	67.057.878,00	21	145.235.664,00	100	83	0	5.8	
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		19.247.500,00	3	19.133.000,00	10	20.637.000,00	10	20.637.000,00	13	39.770.000,00	100	100	0	0	
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		61.800.000,00	1	59.670.000,00	1	158.168.866,00	1	156.152.000,00	2	215.822.000,00	100	98.7	0	170.3	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sesuai dengan rencana anggaran kas yang sudah ditetapkan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tetap berpedoman pada rencana anggaran kas yang telah ditetapkan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : dilaksanakan berkelanjutan																		
	2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan**	**26**	**95.000.000,00**	**24.1**	**277.611.200,00**	**25**	**79.118.800,00**	**100**	**78.529.121,00**	**124.1**	**356.140.321,00**	**400**	**99.3**	**384.6**	**0**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja**
	2.17.02.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan**		**293.945.300,00**	**3**	**277.611.200,00**	**3**	**79.118.800,00**	**3**	**78.529.121,00**	**6**	**356.140.321,00**	**100**	**99.3**	**0**	**0**	
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		293.945.300,00	10	277.611.200,00	10	79.118.800,00	10	78.529.121,00	20	356.140.321,00	100	99.3	0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		293.945.300,00	10	277.611.200,00	10	79.118.800,00	10	78.529.121,00	20	356.140.321,00	100	99.3	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Proses pengajuan izin usaha koperasi membutuhkan waktu yang lama																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan																		
	2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Peningkatan Kepatuhan Koperasi**	**37**	**700.000.000,00**	**35.1**	**18.632.800,00**	**36**	**16.471.700,00**	**7.55**	**15.098.096,00**	**42.61**	**33.730.896,00**	**21**	**91.7**	**20.4**	**0**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja**
	2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpam pinjam koperasi yang telah diperiksa dan diawasi**		**18.685.000,00**	**30**	**18.632.800,00**	**31**	**16.471.700,00**	**39.84**	**15.098.096,00**	**69.84**	**33.730.896,00**	**128.5**	**91.7**	**0**	**0**	
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		0,00	90	18.632.800,00	90	16.471.700,00	98	15.098.096,00	188	33.730.896,00	108.9	91.7	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah direncanakan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi membutuhkan waktu yang lama dan hanya bisa dilaksanakan oleh fungsional pengawas koperasi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan																		
	2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)**	**33**	**95.000.000,00**	**31.1**	**64.499.900,00**	**32**	**63.303.700,00**	**8**	**63.302.800,00**	**39.12**	**127.802.700,00**	**25**	**100**	**24.2**	**2.5**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja**
	2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase koperasi yg dilakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan koperasi**		**65.705.300,00**	**100**	**64.499.900,00**	**100**	**63.303.700,00**	**106**	**63.302.800,00**	**206**	**127.802.700,00**	**106**	**100**	**0**	**3.7**	
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan		0,00	100	64.499.900,00	100	63.303.700,00	106	63.302.800,00	206	127.802.700,00	106	100	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Penilaian kesehatan koperasi dilaksanakan oleh fungsional pengawas koperasi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan																		
	2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi**	**38.5**	**459.181.000,00**	**37.2**	**237.890.700,00**	**37.8**	**190.288.600,00**	**7.35**	**188.591.000,00**	**44.53**	**426.481.700,00**	**19.4**	**99.1**	**19.1**	**1.3**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja**
	2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan**		**495.370.000,00**	**5**	**237.890.700,00**	**37.8**	**190.288.600,00**	**41.06**	**188.591.000,00**	**46.06**	**426.481.700,00**	**108.6**	**99.1**	**0**	**1.2**	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		495.370.000,00	150	237.890.700,00	200	190.288.600,00	341	188.591.000,00	491	426.481.700,00	170.5	99.1	0	1.2	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Banyaknya anggota koperasi yang ada, sehingga banyak yang belum berkesempatan mengikuti peningkatan kompetensi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan																		

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha**	**40**	**650.000.000,00**	**36.4**	**391.216.000,00**	**38**	**694.813.400,00**	**32.03**	**682.313.865,00**	**68.45**	**1.073.529.865,00**	**84.3**	**98.2**	**80.1**	**0**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja**
	2.17.06.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase koperasi yang keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi**		**391.784.311,00**	**13**	**391.216.000,00**	**14**	**694.813.400,00**	**44.57**	**682.313.865,00**	**57.57**	**1.073.529.865,00**	**318.4**	**98.2**	**0**	**0**	
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya		0,00	0	0,00	21	201.353.900,00	21	191.414.153,00	21	191.414.153,00	100	95.1	0	0	
	2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya		0,00	10	16.722.700,00	10	16.799.400,00	0	16.694.966,00	10	33.417.666,00	0	99.4	0	0	
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota		0,00	30	374.493.300,00	30	476.660.100,00	51	474.204.746,00	81	848.698.046,00	170	99.5	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah direncanakan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Banyak pengurus yang sudah tua dan tidak pahan IT																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Dilaksanakan secara berkelanjutan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Dilaksanakan secara berkelanjutan																		
	2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan volume usaha**	**2.6**	**650.000.000,00**	**2.44**	**801.234.119,00**	**1.95**	**692.141.200,00**	**2.28**	**657.209.038,00**	**4.72**	**1.458.443.157,00**	**116.9**	**95**	**87.7**	**0**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja**
	2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital**	**2**	**650.000.000,00**	**1.96**	**801.234.119,00**	**2.5**	**692.141.200,00**	**3.7**	**657.209.038,00**	**5.66**	**1.458.443.157,00**	**148**	**95**	**185**	**0**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja**
	2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase produk unggulan UM yang dipromosikan**		**843.411.000,00**	**100**	**801.234.119,00**	**0.5**	**692.141.200,00**	**24.36**	**657.209.038,00**	**124.36**	**1.458.443.157,00**	**4872**	**95**	**0**	**0**	
	2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaa**		**843.411.000,00**	**100**	**801.234.119,00**	**100**	**692.141.200,00**	**100**	**657.209.038,00**	**200**	**1.458.443.157,00**	**100**	**95**	**0**	**0**	
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		295.244.800,00	50	304.335.300,00	50	372.571.700,00	50	350.194.520,00	100	654.529.820,00	100	94	0	0	
	2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		0,00	25	65.800.420,00	25	44.071.800,00	25	43.852.828,00	50	109.653.248,00	100	99.5	0	0	
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata		0,00	9000	189.167.099,00	9000	88.470.500,00	3516	87.558.783,00	12516	276.725.882,00	39.1	99	0	0	
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		0,00	70	241.931.300,00	150	187.027.200,00	175	175.602.907,00	245	417.534.207,00	116.7	93.9	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Semangat Pelaku UMKM melaksanakan teknik pemasaran secara digital sangat membantu peningkatan volume usaha																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelaku UMKM banyak yang berusia tua dan gaptek teknologi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Fasilitasi Pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM di Tahun 2026																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Program pemberdayaan UMKM dilaksanakan secara berkelanjutan																		

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase WUB yang berhasil dikembangkan**	**2**	**750.000.000,00**	**1.89**	**391.858.504,00**	**1.9**	**413.832.800,00**	**2.94**	**399.312.898,00**	**4.83**	**791.171.402,00**	**154.7**	**96.5**	**147**	**0.8**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja**
	2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Persentase kelurahan yang memiliki WUB minimal 2**		**426.320.000,00**	**100**	**391.858.504,00**	**100**	**413.832.800,00**	**100**	**399.312.898,00**	**200**	**791.171.402,00**	**100**	**96.5**	**0**	**1.3**	
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		0,00	105	391.858.504,00	100	413.832.800,00	100	399.312.898,00	205	791.171.402,00	100	96.5	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Minat WUB sangat tinggi dalam pengembangan usahanya																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih banyaknya pelaku UMKM rumahan yang melakukan usaha tidak menentu																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Fasilitasi pelatihan dan pendampingan di Tahun 2026																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Program pengembangan UMKM dilaksanakan secara berkelanjutan																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**72.19**	**94.63**			
													Predikat kinerja	**Sedang**	**Sangat Tinggi**			
	218	**Penanaman Modal**																
	2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**85.1**	**5.529.685.000,00**	**87.5**	**8.107.914.069,00**	**84.8**	**6.550.630.758,00**	**90.75**	**6.386.308.145,00**	**178.25**	**14.494.222.214,00**	**107**	**97.5**	**106.6**	**16.7**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
	2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**15.885.000,00**	**100**	**2.769.000,00**	**100**	**62.574.050,00**	**100**	**50.705.098,00**	**200**	**53.474.098,00**	**100**	**81**	**0**	**0**	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.904.500,00	7	1.822.000,00	7	1.600.500,00	7	1.596.735,00	14	3.418.735,00	100	99.8	0	0	
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		13.980.500,00	4	947.000,00	5	60.973.550,00	5	49.108.363,00	9	50.055.363,00	100	80.5	0	0	
	2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**3.108.774.896,00**	**100**	**2.959.142.666,00**	**100**	**3.114.342.132,00**	**100**	**3.058.454.003,00**	**200**	**6.017.596.669,00**	**100**	**98.2**	**0**	**23.8**	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		3.107.390.896,00	23	2.957.760.166,00	23	3.112.606.132,00	25	3.056.751.263,00	48	6.014.511.429,00	108.7	98.2	0	23.9	
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1.384.000,00	13	1.382.500,00	13	1.736.000,00	13	1.702.740,00	26	3.085.240,00	100	98.1	0	0	
	2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**118.063.800,00**	**100**	**142.857.400,00**	**100**	**70.518.794,00**	**100**	**65.198.600,00**	**200**	**208.056.000,00**	**100**	**92.5**	**0**	**0**	
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		62.761.500,00	2	27.100.000,00	2	7.800.000,00	1	7.800.000,00	3	34.900.000,00	50	100	0	0	
	2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		55.302.300,00	39	115.757.400,00	43	62.718.794,00	43	57.398.600,00	82	173.156.000,00	100	91.5	0	0	
	2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**595.238.080,00**	**100**	**454.313.933,00**	**100**	**358.792.000,00**	**100**	**336.509.015,00**	**200**	**790.822.948,00**	**100**	**93.8**	**0**	**2.7**	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		24.793.300,00	2	24.704.600,00	1	37.959.500,00	1	37.934.496,00	3	62.639.096,00	100	99.9	0	0	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		156.196.300,00	6	119.199.400,00	5	108.671.900,00	5	104.994.400,00	11	224.193.800,00	100	96.6	0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		24.544.880,00	5	22.983.500,00	3	41.340.600,00	3	40.654.000,00	8	63.637.500,00	100	98.3	0	0	
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		90.100.000,00	34	33.364.500,00	34	31.440.000,00	34	31.300.000,00	68	64.664.500,00	100	99.6	0	5.8	
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		30.291.600,00	1	28.536.600,00	1	15.940.000,00	1	15.940.000,00	2	44.476.600,00	100	100	0	0	
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		18.000.000,00	12	7.720.000,00	12	18.000.000,00	12	18.000.000,00	24	25.720.000,00	100	100	0	25	
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		251.312.000,00	27	217.805.333,00	25	105.440.000,00	25	87.686.119,00	52	305.491.452,00	100	83.2	0	2.6	
	2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan**		**4.765.640.351,00**	**100**	**3.776.125.850,00**	**100**	**1.935.694.981,00**	**100**	**1.920.447.818,00**	**200**	**5.696.573.668,00**	**100**	**99.2**	**0**	**0**	
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		268.255.600,00	2	250.436.500,00	2	210.452.175,00	11	209.960.500,00	13	460.397.000,00	550	99.8	0	0	
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		703.171.800,00	44	854.896.350,00	5	452.398.096,00	5	447.143.318,00	49	1.302.039.668,00	100	98.8	0	0	
	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3.794.212.951,00	1.1	2.670.793.000,00	1	1.272.844.710,00	1	1.263.344.000,00	2.1	3.934.137.000,00	100	99.3	0	0	
	2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**719.382.000,00**	**100**	**634.740.997,00**	**100**	**865.156.101,00**	**100**	**814.395.102,00**	**200**	**1.449.136.099,00**	**100**	**94.1**	**0**	**21.4**	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		114.096.000,00	27	160.907.025,00	36	144.173.501,00	36	122.320.741,00	63	283.227.766,00	100	84.8	0	27.6	
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		605.286.000,00	36	473.833.972,00	36	720.982.600,00	36	692.074.361,00	72	1.165.908.333,00	100	96	0	20.3	
	2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**156.836.364,00**	**100**	**137.964.223,00**	**100**	**143.552.700,00**	**100**	**140.598.509,00**	**200**	**278.562.732,00**	**100**	**97.9**	**0**	**7.7**	
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		103.518.864,00	5	86.171.223,00	3	88.763.500,00	2	88.622.308,00	7	174.793.531,00	66.7	99.8	0	11.6	
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		53.317.500,00	62	51.793.000,00	61	42.337.500,00	61	41.313.201,00	123	93.106.201,00	100	97.6	0	0	
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0,00	0	0,00	2	12.451.700,00	2	10.663.000,00	2	10.663.000,00	100	85.6	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sarana prasarana pelayanan publik dilingkungan dpmptsp/mpp telah memadai, penanganan pengaduan masyarakat yang responsif, biaya (pajak/restribusi) perizinan yang transparan (perizinan tertentu ada restibusi/pajak), petugas layanan yang ramah dan berkompeten																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Unsur waktu dan prosedur pelayanan masih dinilai belum maksimal oleh sebagian masyarakat (hasil skm)																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Waktu dan prosedur pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Menambah volume pendampingan perizinan bagi masyarakat																		
	2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Potensi Investasi yang Teridentifikasi**	**65**	**407.484.000,00**	**57.2**	**154.353.500,00**	**60**	**78.852.000,00**	**60.45**	**58.933.000,00**	**117.65**	**213.286.500,00**	**100.8**	**74.7**	**93**	**0**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
	2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebijakan Pemberian Fasilitasi/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Ditetapkan**		**59.021.100,00**	**1**	**65.092.300,00**	**1**	**34.285.000,00**	**1**	**18.975.000,00**	**2**	**84.067.300,00**	**100**	**55.3**	**0**	**0**	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		43.762.400,00	1	52.172.300,00	1	15.680.000,00	1	13.750.000,00	2	65.922.300,00	100	87.7	0	0	
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah		15.258.700,00	1	12.920.000,00	1	18.605.000,00	1	5.225.000,00	2	18.145.000,00	100	28.1	0	0	
	2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Peta Potensi Investasi yang Tersedia**		**110.000.000,00**	**2**	**89.261.200,00**	**1**	**44.567.000,00**	**1**	**39.958.000,00**	**3**	**129.219.200,00**	**100**	**89.7**	**0**	**0**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		60.000.000,00	1	49.610.000,00	1	19.567.000,00	1	15.370.000,00	2	64.980.000,00	100	78.6	0	0	
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		50.000.000,00	2	39.651.200,00	1	25.000.000,00	1	24.588.000,00	3	64.239.200,00	100	98.4	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya regulasi dan kebijakan penanaman modal, ketersediaan potensi ekonomi daerah																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Sebagian potensi investasi belum terdokumentasi dan teridentifikasi secara sistematis																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan evaluasi terhadap indikator dan target agar lebih realistis serta selaras dengan kapasitas dan kondisi daerah																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan evaluasi terhadap indikator dan target agar lebih realistis serta selaras dengan kapasitas dan kondisi daerah.																		
	2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan**	**60**	**1.122.965.000,00**	**50**	**375.138.816,00**	**55**	**257.396.974,00**	**55.3**	**256.788.000,00**	**105.3**	**631.926.816,00**	**100.5**	**99.8**	**92.2**	**4.3**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
	2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase potensi informasi yang dipromosikan**		**331.435.100,00**	**200**	**375.138.816,00**	**100**	**257.396.974,00**	**100**	**256.788.000,00**	**300**	**631.926.816,00**	**100**	**99.8**	**0**	**14.7**	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		331.435.100,00	1	375.138.816,00	1	257.396.974,00	1	256.788.000,00	2	631.926.816,00	100	99.8	0	14.7	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya data potensi investasi daerah, pemanfaatan media promosi yang beragam (instagram, tiktok, radio, forum investasi, event promosi), perencanaan dan pelaksanaan promosi dilaksanakan secara terkoordinasi																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Promosi masih pada skala lokal, sdm promosi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pemutakhiran data potensi investasi, mengikuti forum promosi investasi tingkat regional dan nasional																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pemutakhiran data potensi investasi, mengikuti forum promosi investasi tingkat regional dan nasional																		
	2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase penerbitan izin sesuai SOP**	**99.7**	**721.134.000,00**	**99.7**	**528.831.328,00**	**99.6**	**297.511.000,00**	**100**	**282.508.388,00**	**199.73**	**811.339.716,00**	**100.4**	**95**	**100.3**	**7.4**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
	2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya**		**493.394.100,00**	**3.05**	**528.831.328,00**	**4**	**297.511.000,00**	**4.08**	**282.508.388,00**	**7.13**	**811.339.716,00**	**102**	**95**	**0**	**10.9**	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		212.157.100,00	3542	193.669.400,00	1144	100.213.000,00	2712	99.725.350,00	6254	293.394.750,00	237.1	99.5	0	0.4	
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		122.961.500,00	0	120.423.763,00	3	68.990.000,00	16	54.870.538,00	16	175.294.301,00	533.3	79.5	0	0	
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		158.275.500,00	2641	214.738.165,00	4135	128.308.000,00	5437	127.912.500,00	8078	342.650.665,00	131.5	99.7	0	33.3	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Penerapan SOP yang jelas dan terstandar, pemanfaatan sistem perizinan berbasis elektronik, kompetensi dan komitmen sdm, pengawasan dan pengendalian internal yang efektif, koordinasi yang baik dengan perangkat daerah teknis																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Gangguan teknis sistem/aplikasi perizinan, perubahan regulasi yang relatif cepat																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mempertahankan konsistensi penerapan SOP, peningkatan kualitas sdm, penguatan monev, peningkatan kualitas koordinasi dengan perangkat daerah teknis																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Peningkatan edukasi dan pendampingan pemohon																		
	2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)**	**85**	**559.597.500,00**	**83.2**	**315.435.404,00**	**80**	**94.742.500,00**	**86.1**	**90.252.150,00**	**169.3**	**405.687.554,00**	**107.6**	**95.3**	**101.3**	**0**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
	2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM**		**388.764.000,00**	**300**	**315.435.404,00**	**125**	**94.742.500,00**	**424**	**90.252.150,00**	**724**	**405.687.554,00**	**339.2**	**95.3**	**0**	**0**	
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		54.864.000,00	18	39.434.300,00	8	26.925.000,00	18	23.748.000,00	36	63.182.300,00	225	88.2	0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		258.460.900,00	300	207.420.904,00	350	47.897.500,00	350	46.798.550,00	650	254.219.454,00	100	97.7	0	0	
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		75.439.100,00	18	68.580.200,00	13	19.920.000,00	18	19.705.600,00	36	88.285.800,00	138.5	98.9	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Landasan regulasi yang jelas, tersedianya sistem OSS secara nasional, kegiatan pembinaan, sosialisasi dan pemantauan pelaporan lkpm telah dilaksanakan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya kepatuhan dan pemahaman sebagian pelaku usaha terhadap lkpm																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Menyediakan helpdesk lkpm dan pendampingan teknis untuk pelaku usaha dalam pelaporan lkpm																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Menyediakan helpdesk lkpm dan pendampingan teknis untuk pelaku usaha dalam pelaporan lkpm																		
												Rata-rata capaian kinerja (%)		**83.88**	**97.19**			
												Predikat kinerja		**Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	219	**Kepemudaan dan Olahraga**																
	2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**84**	**5.985.750.000,00**	**86.1**	**4.784.631.177,00**	**86.19**	**5.165.677.057,00**	**87.85**	**4.762.914.029,00**	**173.97**	**9.547.545.206,00**	**101.9**	**92.2**	**104.6**	**18.1**	**Dinas Kepemudaan dan Olah Raga**
	2.19.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart**	**100**	**37.782.000,00**	**100**	**87.476.150,00**	**100**	**6.505.934,00**	**51.39**	**6.411.934,00**	**151.39**	**93.888.084,00**	**51.4**	**98.6**	**51.4**	**0**	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44	1.000.000,00	11	1.000.000,00	11	2.233.934,00	11	2.194.934,00	22	3.194.934,00	100	98.3	25	0	
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35	36.782.000,00	8	86.476.150,00	10	4.272.000,00	10	4.217.000,00	18	90.693.150,00	100	98.7	28.6	0	
	2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standart**	**100**	**2.824.092.615,00**	**100**	**2.355.610.078,00**	**100**	**2.675.567.319,00**	**70.92**	**2.336.729.056,00**	**170.92**	**4.692.339.134,00**	**70.9**	**87.3**	**70.9**	**20.2**	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82	2.823.092.615,00	17	2.354.610.078,00	20	2.674.015.319,00	19	2.335.179.556,00	36	4.689.789.634,00	95	87.3	23.2	20.2	
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.552.000,00	5	1.549.500,00	10	2.549.500,00	100	99.8	25	0	
	2.19.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standart**	**100**	**70.031.600,00**	**100**	**70.021.600,00**	**100**	**100.419.900,00**	**71.5**	**67.192.198,00**	**171.5**	**137.213.798,00**	**71.5**	**66.9**	**71.5**	**0**	
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14	20.000.000,00	2	20.000.000,00	1	10.000.000,00	1	9.990.000,00	3	29.990.000,00	100	99.9	7.1	0	
	2.19.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	50.031.600,00	22	50.021.600,00	26	90.419.900,00	26	57.202.198,00	48	107.223.798,00	100	63.3	26	0	
	2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Strandart**	**100**	**414.284.800,00**	**100**	**387.056.833,00**	**100**	**287.145.220,00**	**72.6**	**283.085.308,00**	**172.6**	**670.142.141,00**	**72.6**	**98.6**	**72.6**	**19.3**	
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	5.747.000,00	1	5.747.000,00	1	5.790.600,00	1	5.765.000,00	2	11.512.000,00	100	99.6	25	100.3	
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	27.503.100,00	4	26.833.700,00	4	28.360.000,00	4	28.240.125,00	8	55.073.825,00	100	99.6	25	57.7	
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	57.501.500,00	5	57.362.400,00	5	52.361.100,00	5	52.358.000,00	10	109.720.400,00	100	100	25	89.1	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32	50.742.000,00	8	55.366.100,00	8	52.326.000,00	8	52.242.415,00	16	107.608.515,00	100	99.8	25	0	
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	25.016.200,00	1	24.864.035,00	1	25.057.200,00	1	24.898.985,00	2	49.763.020,00	100	99.4	25	0	
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	2.700.000,00	12	2.700.000,00	12	2.700.000,00	12	2.700.000,00	24	5.400.000,00	100	100	20	25	
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96	245.075.000,00	24	214.183.598,00	24	120.550.320,00	22	116.880.783,00	46	331.064.381,00	91.7	97	22.9	2.6	
	2.19.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan**	**100**	**27.293.400,00**	**100**	**75.253.000,00**	**100**	**37.737.700,00**	**100**	**37.725.500,00**	**200**	**112.978.500,00**	**100**	**100**	**100**	**0**	
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21	27.293.400,00	9	75.253.000,00	3	37.737.700,00	3	37.725.500,00	12	112.978.500,00	100	100	14.3	0	
	2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan sesuai standart**	**100**	**1.535.599.135,00**	**100**	**1.485.704.569,00**	**100**	**1.929.045.190,00**	**75**	**1.905.305.362,00**	**175**	**3.391.009.931,00**	**75**	**98.8**	**75**	**27.4**	
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	156	31.450.135,00	36	46.774.137,00	36	206.798.830,00	36	204.640.295,00	72	251.414.432,00	100	99	23.1	114.5	
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	240	1.504.149.000,00	60	1.438.930.432,00	60	1.722.246.360,00	60	1.700.665.067,00	120	3.139.595.499,00	100	98.7	25	25.6	
	2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart**	**100**	**96.351.700,00**	**100**	**323.508.947,00**	**100**	**129.255.794,00**	**63.8**	**126.464.671,00**	**163.8**	**449.973.618,00**	**63.8**	**97.8**	**63.8**	**16.4**	
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49	78.580.700,00	10	111.825.913,00	10	83.854.500,00	10	81.410.974,00	20	193.236.887,00	100	97.1	20.4	20.1	
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	192	17.771.000,00	45	211.683.034,00	53	45.401.294,00	53	45.053.697,00	98	256.736.731,00	100	99.2	27.6	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Monitoring dan Evaluasi pada proses layanan dan petugas layanan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Ketidakpuasan terhadap lamanya waktu penyelesaian layanan dan ketidaksesuaian antara waktu standar dan realisasi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Menyelenggarakan forum konsultasi publik untuk mereviu standar pelayanan																		
	2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Pemuda yang mendapat Pelatihan Kader Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawanan dan Kepeloporan Pemuda**	**7.18**	**1.550.000.000,00**	**6.73**	**1.959.400.088,00**	**6.88**	**2.502.938.200,00**	**6.87**	**1.879.573.560,00**	**13.6**	**3.838.973.648,00**	**99.9**	**75.1**	**95.7**	**1.5**	**Dinas Kepemudaan dan Olah Raga**
	2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang aktif**	**90**	**1.550.000.000,00**	**83**	**1.959.400.088,00**	**87**	**2.502.938.200,00**	**86.36**	**1.879.573.560,00**	**169.36**	**3.838.973.648,00**	**99.3**	**75.1**	**96**	**1.5**	**Dinas Kepemudaan dan Olah Raga**
	2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawanan dan Kepeloporan Pemuda**	**6189**	**1.167.144.400,00**	**1463**	**1.708.105.098,00**	**1739**	**2.483.882.600,00**	**207**	**1.862.561.960,00**	**1670**	**3.570.667.058,00**	**11.9**	**75**	**3.3**	**1.3**	
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		0,00	0	0,00	55	10.311.300,00	55	10.286.050,00	55	10.286.050,00	100	99.8	0	0	
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		0,00	0	0,00	5	407.979.700,00	5	403.568.781,00	5	403.568.781,00	100	98.9	0	0	
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi		0,00	0	0,00	475	2.015.591.600,00	477	1.398.832.703,00	477	1.398.832.703,00	100.4	69.4	0	0	
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia		0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	1	49.874.426,00	1	49.874.426,00	100	99.7	0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase OKP yang aktif mengirimkan perwakilan pada kegiatan Pengembangan Organisasi Kepemudaan**	**80**	**261.522.800,00**	**80**	**251.294.990,00**	**80**	**19.055.600,00**	**80**	**17.011.600,00**	**160**	**268.306.590,00**	**100**	**89.3**	**100**	**3.1**	
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota		0,00	0	0,00	100	19.055.600,00	105	17.011.600,00	105	17.011.600,00	105	89.3	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan kepemudaan telah berjalan cukup baik, terutama dari sisi keaktifan organisasi dan partisipasi pemuda dalam event event daerah.																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelatihan kaderisasi dan peningkatan kapasitas belum merata. Selain itu, masih ada organisasi tidak aktif serta ketimpangan jumlah anggota antar OKP/OSK.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Monitoring dan evaluasi kegiatan kepemudaan berbasis data																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Monitoring dan evaluasi kegiatan kepemudaan berbasis data																		
	2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan Pelatih yang tersertifikasi**	**71**	**18.575.000.000,00**	**67**	**11.090.293.076,00**	**70**	**6.875.156.622,00**	**81.59**	**6.649.404.938,00**	**148.59**	**17.739.698.014,00**	**116.6**	**96.7**	**114.9**	**6.5**	**Dinas Kepemudaan dan Olah Raga**
	2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan Pembinaan Atlet Muda**	**43**	**18.575.000.000,00**	**69**	**11.090.293.076,00**	**42**	**6.875.156.622,00**	**46.27**	**6.649.404.938,00**	**115.27**	**17.739.698.014,00**	**110.2**	**96.7**	**107.6**	**6.5**	**Dinas Kepemudaan dan Olah Raga**
	2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan Fasilitas Olahraga sesuai standar**	**77**	**18.575.000.000,00**	**37**	**11.090.293.076,00**	**73**	**6.875.156.622,00**	**73.68**	**6.649.404.938,00**	**110.68**	**17.739.698.014,00**	**100.9**	**96.7**	**95.7**	**6.5**	**Dinas Kepemudaan dan Olah Raga**
	2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cabor yang difasilitasi tempat latihan**	**22**	**447.620.100,00**	**21**	**3.793.071.101,00**	**22**	**1.913.278.122,00**	**22**	**1.702.769.602,00**	**43**	**5.495.840.703,00**	**100**	**89**	**100**	**1.9**	
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia		0,00	0	0,00	7	1.913.278.122,00	7	1.702.769.602,00	7	1.702.769.602,00	100	89	0	0	
	2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah**	**14**	**548.380.400,00**	**4**	**693.020.294,00**	**4**	**181.702.300,00**	**0**	**173.054.063,00**	**4**	**866.074.357,00**	**0**	**95.2**	**0**	**0**	
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		0,00	0	0,00	2	180.302.300,00	1	171.655.463,00	1	171.655.463,00	50	95.2	0	0	
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota		0,00	0	0,00	25	1.400.000,00	25	1.398.600,00	25	1.398.600,00	100	99.9	0	0	
	2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Propinsi**	**3**	**25.934.600,00**	**3**	**25.934.300,00**	**4**	**225.590.600,00**	**2**	**221.878.850,00**	**5**	**247.813.150,00**	**50**	**98.4**	**66.7**	**763.5**	
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga		0,00	0	0,00	168	205.505.000,00	123	203.821.250,00	123	203.821.250,00	73.2	99.2	0	0	
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)		0,00	0	0,00	2	20.085.600,00	2	18.057.600,00	2	18.057.600,00	100	89.9	0	0	
	2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persentase Organisasi Olahraga yang Dibina**	**100**	**5.262.768.600,00**	**100**	**6.174.786.281,00**	**100**	**4.350.000.000,00**	**100**	**4.350.000.000,00**	**200**	**10.524.786.281,00**	**100**	**100**	**100**	**19**	
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota		0,00	0	0,00	3	4.350.000.000,00	3	4.350.000.000,00	3	4.350.000.000,00	100	100	0	0	
	2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persentase Olahraga Rekreaasi yang difasilitasi**	**67**	**403.897.500,00**	**50**	**403.481.100,00**	**50**	**204.585.600,00**	**50**	**201.702.423,00**	**100**	**605.183.523,00**	**100**	**98.6**	**74.6**	**0**	
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		0,00	0	0,00	1	204.585.600,00	1	201.702.423,00	1	201.702.423,00	100	98.6	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tingginya jumlah pelatih bersertifikat di cabor-cabor besar, ketersediaan sarana yang memadai pada mayoritas cabor, serta jumlah atlet muda yang cukup banyak.																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Ketidakmerataan pembinaan atlet dan pelatih serta fasilitas antar cabang olahraga																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Peningkatan kapasitas pelatih, pemerataan pembinaan atlet, dan pemenuhan sarpras di cabor-cabor yang masih tertinggal.																		

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Peningkatan kapasitas pelatih, pemerataan pembinaan atlet, dan pemenuhan sarpras di cabor-cabor yang masih tertinggal.																		
	2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Kelompok Pramuka Aktif**	**82**	**800.000.000,00**	**73**	**427.624.465,00**	**73**	**328.651.200,00**	**75**	**328.648.199,00**	**148**	**756.272.664,00**	**102.7**	**100**	**91.5**	**18.8**	**Dinas Kepemudaan dan Olah Raga**
	2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persentase Kelompok / Organisasi Pramuka yang dibina**	**82**	**398.331.500,00**	**73**	**427.624.465,00**	**73**	**328.651.200,00**	**75**	**328.648.199,00**	**148**	**756.272.664,00**	**102.7**	**100**	**91.5**	**37.7**	
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	350.000.000,00	1	398.957.965,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	2	698.957.965,00	100	100	100	42.9	
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	350	48.331.500,00	50	28.666.500,00	50	28.651.200,00	50	28.648.199,00	100	57.314.699,00	100	100	14.3	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kerja sama lintas sektor dan keberadaan banyak kelompok saka yang sudah mapan.																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya rincian data untuk evaluasi menyeluruh.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi dan memperkuat pembinaan kelompok baru																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memperbaiki sistem pelaporan kegiatan untuk meningkatkan kualitas program kepramukaan																		
												Rata-rata capaian kinerja (%)		**99.87**	**91.58**			
												Predikat kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	220	**Statistik**																
	2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik**	**100**	**592.843.418,00**	**100**	**335.834.550,00**	**98.31**	**200.529.150,00**	**100**	**198.470.445,00**	**200**	**534.304.995,00**	**101.7**	**99**	**100**	**2.6**	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**
	2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS**		**340.838.700,00**	**102**	**335.834.550,00**	**100**	**200.529.150,00**	**87**	**198.470.445,00**	**189.23**	**534.304.995,00**	**87**	**99**	**0**	**4.6**	
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan		0,00	0	0,00	90	55.380.000,00	100	55.266.891,00	100	55.266.891,00	111.1	99.8	0	0	
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu		0,00	0	0,00	80	119.047.150,00	87	117.201.030,00	87	117.201.030,00	108.8	98.4	0	0	
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		0,00	0	0,00	1	26.102.000,00	1	26.002.524,00	1	26.002.524,00	100	99.6	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1.Adanya komitmen untuk menyelenggarakan statistik secara profesional dengan sumber daya manusia yang kompeten, beretika, dan berintegritas, mengolah data secara objektif. 2.Dorongan untuk menyediakan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan mudah diakses untuk menghindari interpretasi yang salah dan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1.Pembinaan statistik sektoral oleh BPS belum dilakukan secara optimal ke seluruh instansi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -Sistem yang Terintegrasi yang Membangun sistem informasi yang menghubungkan data antar sektor.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Penguatan kolaborasi dalam kerangka Satu Data Indonesia 2.Pengawasan dan evaluasi berkala perihal Satu Data Indonesia																		
												Rata-rata capaian kinerja (%)		**100.00**	**98.97**			
												Predikat kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	221	**Persandian**																
	2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**69.77**	**435.534.824,00**	**67.5**	**247.746.950,00**	**62.02**	**167.765.200,00**	**64**	**145.387.251,00**	**131.5**	**393.134.201,00**	**103.2**	**86.7**	**91.7**	**1.3**	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**
	2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintsh daerah kab/kota**		**165.203.000,00**	**60**	**159.355.836,00**	**62.02**	**152.025.200,00**	**62.02**	**129.838.224,00**	**121.97**	**289.194.060,00**	**100**	**85.4**	**0**	**0**	
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		75.400.000,00	1	66.997.386,00	1	4.179.200,00	1	4.095.270,00	2	71.092.656,00	100	98	0	0	
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		49.608.000,00	4	57.065.550,00	4	132.746.000,00	4	114.722.954,00	8	171.788.504,00	100	86.4	0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		24.965.000,00	2	24.379.900,00	2	9.900.000,00	2	7.780.000,00	4	32.159.900,00	100	78.6	0	0	
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		15.230.000,00	20	10.913.000,00	20	5.200.000,00	20	3.240.000,00	40	14.153.000,00	100	62.3	0	0	
	2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi**		**91.080.000,00**	**41.3**	**88.391.114,00**	**75**	**15.740.000,00**	**75**	**15.549.027,00**	**116.32**	**103.940.141,00**	**100**	**98.8**	**0**	**6.4**	
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		91.080.000,00	30	88.391.114,00	30	15.740.000,00	30	15.549.027,00	60	103.940.141,00	100	98.8	0	6.4	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1.Keamanan menjadi prioritas utama, menanamkan kesadaran pada pelaksana untuk menjaga kerahasiaan informasi sensitif agar tidak bocor 2.Sistem harus memberikan manfaat maksimal dalam mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintahan, terutama pertahanan dan pelayanan publi																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1.Rendahnya kesadaran dan kesepahaman tentang keamanan data dan informasi di lingkungan pemerintah daerah 2.Keterlambatan pembaruan data statistik sektoral. 3. masih adanya Ego sektoral yang tinggi, di mana urusan keamanan informasi sering dilimpahkan ke Dinas Kominfo saja																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1.Kemampuan untuk mengintegrasikan dan mengoperasikan teknologi terbaru dalam sistem persandian.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1.Kemampuan untuk mengintegrasikan dan mengoperasikan teknologi terbaru dalam sistem persandian.																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**100.00**	**86.66**			
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			
	222	**Kebudayaan**																
	2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase budaya lokal yang dikembangkan**		**0,00**	**85**	**847.118.900,00**	**100**	**533.467.101,00**	**100**	**523.549.872,00**	**185**	**1.370.668.772,00**	**100**	**98.1**	**0**	**0**	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar**
	2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pengelolaan kebudayaan yang terfasilitasi**		**284.765.300,00**	**9**	**417.205.900,00**	**9**	**319.816.200,00**	**9**	**315.957.872,00**	**18**	**733.163.772,00**	**100**	**98.8**	**0**	**3.5**	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		149.820.000,00	1	242.111.900,00	1	279.816.200,00	0.5	276.457.872,00	1.5	518.569.772,00	50	98.8	0	6.7	
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		134.945.300,00	8	175.094.000,00	8	40.000.000,00	0	39.500.000,00	8	214.594.000,00	0	98.8	0	0	
	2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelestarian kesenian tradisional yang terfasilitasi**		**216.319.100,00**	**10**	**429.913.000,00**	**10**	**213.650.901,00**	**10**	**207.592.000,00**	**20**	**637.505.000,00**	**100**	**97.2**	**0**	**5.6**	
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		216.319.100,00	10	429.913.000,00	10	213.650.901,00	4	207.592.000,00	14	637.505.000,00	40	97.2	0	5.6	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - SDM (ASN) cukup memadai - Tersedia anggaran yang memadai (namun ada Sebagian anggaran yang dirasionalisasi /efisiensi) - SDM (beberapa tokoh budayawan masih aktif)																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Sarana dan prasarana pembinaan seni budaya (fasilitas/peralatan dan perlengkapan Gedung, alat music) kurang dapat berfungsi secara maksimal karena ada beberapa peralatan dan perlengkapan yang rusak - Kurangnya minat generasi muda terhadap seni budaya tradisional																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : - Melaksanakan Kegiatan perlindungan, Pengembangan, pemanfaatan OPK (pemeliharaan/perawatan Gedung Kesenian Aryo Blitar) secara berkala - Melaksanakan Pembinaan SDM (pelaku seni), Lembaga, pranata kebudayaan dan pranata tradisional yang berkelanjutan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : - Merencanakan pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung untuk mendukung pemeliharaan Gedung Kesenian Aryo Blitar - Merencana Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM (pelaku seni), Lembaga, pranata kebudayaan dan pranata tradisional yang berkelanjutan - Merencanakan																		
	2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase kesejarahan yang dikembangkan**		**0,00**	**90**	**1.856.139.972,00**	**90**	**610.124.000,00**	**99.99**	**601.225.000,00**	**189.99**	**2.457.364.972,00**	**111.1**	**98.5**	**0**	**0**	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar**
	2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pembinaan event sejarah yang terfasilitasi**		**588.993.600,00**	**7**	**1.856.139.972,00**	**7**	**610.124.000,00**	**7**	**601.225.000,00**	**14**	**2.457.364.972,00**	**100**	**98.5**	**0**	**21.4**	
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan		424.392.600,00	6	415.656.800,00	6	431.454.800,00	2	424.955.000,00	8	840.611.800,00	33.3	98.5	0	29.7	
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		164.601.000,00	1	1.440.483.172,00	1	178.669.200,00	0	176.270.000,00	1	1.616.753.172,00	0	98.7	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - SDM (ASN) cukup memadai - Tersedia anggaran yang cukup - SDM (beberapa tokoh Sejarahwan masih aktif)																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Keterbatasan Sarana dan prasarana pembinaan pembinaan sejarah (belum ada fasilitas Gedung khusus untuk pelaksanaan pembinaan sejarah sehingga pembinaan belum maksimal - Kurangnya tenaga yang berkompeten dalam bidang kesejarahan - Kondisi Museum PETA yang masih belum representative sebagai tempat																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : - Melaksanakan Kegiatan perlindungan, pemeliharaan/perawatan Bagunan Museum PETA secara berkala - Menjalin kerjasama dengan Daerah lain dalam menggali pengetahuan tentang sejarah bangsa baik Naosional maupun Regional (melalui keikutsertaan JKPT, Jaket Bung Karno atau kegiatan lainnya) -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : - Merencanakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana (peralatan dan perlengkapan gedung Museum PETA) untuk mendukung kegiatan pembinaan kesejarahan - - Merencana Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM yang bertugas di Museum PETA -- Merencanakan alokasi anggaran Kerjasama																		

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase cagar budaya yang dikembangkan**		**0,00**	**70**	**88.295.000,00**	**70**	**30.000.000,00**	**75**	**28.480.000,00**	**145**	**116.775.000,00**	**107.1**	**94.9**	**0**	**0**	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar**
	2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah cagar budaya yang dikelola**		**134.826.000,00**	**1**	**88.295.000,00**	**1**	**30.000.000,00**	**1**	**28.480.000,00**	**2**	**116.775.000,00**	**100**	**94.9**	**0**	**0**	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		134.826.000,00	1	88.295.000,00	1	30.000.000,00	0	28.480.000,00	1	116.775.000,00	0	94.9	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - SDM (ASN) cukup memadai - Tersedia anggaran yang cukup																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Belum tersedianya tenaga Ahli Cagar Budaya - Untuk Situs Candi Gedog sebagian aset adalah masih sewa milik perorangan bukan asset Pemerintah Daerah																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : - Melaksanakan kegiatan perlindungan, dan pengelolaan Situs Candi Gedog secara berkala - Mengoptimalkan tugas pokok fungsi tenaga pengelola Situs Candi Gedog. - Mengusulkan pembebasan tanah untuk pengembangan lahan Situs Candi Gedog																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : - Merencanakan pelaksanaan kegiatan perlindungan, dan pengelolaan Situs Candi Gedog - Merencana penyediaan Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB)																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**100.00**	**93.61**			
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	223	**Perpustakaan**																
	2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**82.8**	**5.284.675.237,00**	**87.9**	**4.740.091.433,00**	**84.5**	**5.893.968.713,00**	**94.08**	**5.490.846.249,00**	**181.99**	**10.230.937.682,00**	**111.3**	**93.2**	**113.6**	**21.4**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	2.23.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**	**100**	**15.792.500,00**	**100**	**12.617.000,00**	**100**	**12.953.600,00**	**100**	**12.573.280,00**	**200.01**	**25.190.280,00**	**100**	**97.1**	**100**	**0**	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28	3.606.000,00	7	3.606.000,00	8	3.446.000,00	8	3.202.580,00	15	6.808.580,00	100	92.9	28.6	0	
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32	12.186.500,00	8	9.011.000,00	8	9.507.600,00	8	9.370.700,00	16	18.381.700,00	100	98.6	25	0	
	2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**3.746.346.181,00**	**100**	**3.503.131.560,00**	**100**	**3.765.926.340,00**	**100**	**3.411.323.693,00**	**200**	**6.914.455.253,00**	**100**	**90.6**	**0**	**23.1**	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	3.745.219.381,00	30	3.502.253.595,00	29	3.765.826.340,00	29	3.411.323.693,00	59	6.913.577.288,00	100	90.6	96.7	23.1	
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	28	1.126.800,00	7	877.965,00	7	100.000,00	6.88	0,00	13.88	877.965,00	98.3	0	24.6	0	
	2.23.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**	**100**	**87.559.306,00**	**100**	**90.280.700,00**	**100**	**52.240.103,00**	**100**	**52.115.300,00**	**200**	**142.396.000,00**	**100**	**99.8**	**100**	**1.1**	
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12	41.324.306,00	3	39.811.200,00	3	4.992.000,00	1	4.972.800,00	4	44.784.000,00	33.3	99.6	8.3	0	
	2.23.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	44	46.235.000,00	43	50.469.500,00	44	47.248.103,00	44	47.142.500,00	87	97.612.000,00	100	99.8	100	2	
	2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**	**100**	**309.033.274,00**	**100**	**391.197.006,00**	**100**	**222.316.800,00**	**86.96**	**219.787.562,00**	**186.96**	**610.984.568,00**	**87**	**98.9**	**87**	**15.7**	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	2.484.300,00	1	2.484.300,00	1	6.985.800,00	1	6.385.830,00	2	8.870.130,00	100	91.4	25	0	
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12.217.900,00	3	10.979.695,00	3	11.283.200,00	3	11.008.700,00	6	21.988.395,00	100	97.6	25	50	
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	32	14.991.400,00	8	14.845.350,00	8	44.531.600,00	7	43.619.900,00	15	58.465.250,00	87.5	98	21.9	84	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	61.229.000,00	31	57.657.800,00	25	50.057.000,00	29	49.927.700,00	60	107.585.500,00	116	99.7	29	14.6	
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	13.047.800,00	1	13.033.400,00	1	4.490.000,00	1	4.490.000,00	2	17.523.400,00	100	100	25	0	
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	8.100.000,00	12	6.480.000,00	12	6.480.000,00	12	6.480.000,00	24	12.960.000,00	100	100	25	13.3	
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169	196.962.874,00	42	285.716.461,00	42	98.489.200,00	27	97.875.432,00	69	383.591.893,00	64.3	99.4	16	10.1	
	2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan**	**100**	**144.753.000,00**	**100**	**169.056.000,00**	**100**	**964.313.443,00**	**107.6**	**928.633.375,00**	**207.58**	**1.097.689.375,00**	**107.6**	**96.3**	**107.6**	**3.7**	
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	181	3.767.800,00	1	5.400.000,00	6	175.043.000,00	39	163.558.500,00	40	168.958.500,00	650	93.4	21.5	0	
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39	140.985.200,00	9	163.656.000,00	6	129.321.039,00	15	115.525.875,00	24	279.181.875,00	250	89.3	38.5	3.8	
	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0,00	0	0,00	5	659.949.404,00	7	649.549.000,00	7	649.549.000,00	140	98.4	0	0	
	2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**	**100**	**380.643.000,00**	**100**	**445.168.399,00**	**100**	**627.607.845,00**	**100**	**619.527.528,00**	**200**	**1.064.695.927,00**	**100**	**98.7**	**100**	**34.5**	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	78.000.000,00	36	83.960.565,00	36	167.479.765,00	36	164.408.196,00	72	248.368.761,00	100	98.2	25	60.1	
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52	302.643.000,00	13	361.207.834,00	13	460.128.080,00	13	455.119.332,00	26	816.327.166,00	100	98.9	25	27.9	
	2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**	**100**	**187.395.140,00**	**100**	**128.640.768,00**	**100**	**248.610.582,00**	**94.33**	**246.885.511,00**	**194.33**	**375.526.279,00**	**94.3**	**99.3**	**94.3**	**42.1**	
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	120.559.140,00	9	92.449.268,00	9	89.100.500,00	0	88.401.611,00	9	180.850.879,00	0	99.2	0	3.3	
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0,00	0	0,00	11	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37	20.430.000,00	47	24.253.500,00	76	43.740.082,00	76	42.821.000,00	123	67.074.500,00	100	97.9	205.4	0	
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	29.988.000,00	0	0,00	1	115.770.000,00	4	115.662.900,00	4	115.662.900,00	400	99.9	400	249.8	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan-kegiatan rutin dan inivasi tetap dilaksanakan secara berkesinambungan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya penambahan anggaran P-APBD yang perlu penyesuaian target pada dokumen perencanaan dan DPA-SKPD																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan evaluasi pencapaian target dan kinerja program/kegiatan/sub kegiatan serta mengupayakan pencapaian target dan kinerja program/kegiatan/sub kegiatan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan evaluasi pencapaian target kinerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD berikutnya																		
	2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk**	**3.6 : 1**	**1.286.315.318,00**	**86.4**	**10.691.404.717,00**	**3.5**	**844.468.229,00**	**3.5**	**813.742.400,00**	**89.89**	**11.505.147.117,00**	**100**	**96.4**	**97.2**	**11.2**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan**	**83**	**1.286.315.318,00**	**3.48**	**10.691.404.717,00**	**84**	**844.468.229,00**	**91.61**	**813.742.400,00**	**95.09**	**11.505.147.117,00**	**109.1**	**96.4**	**110.4**	**11.2**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat**	**1.06**	**736.335.972,00**	**1.5**	**1.481.345.425,00**	**1,06**	**421.453.100,00**	**3.84**	**402.558.420,00**	**5.34**	**1.883.903.845,00**	**384**	**95.5**	**362.3**	**0**	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	98	36.946.100,00	98	36.751.195,00	98	31.666.300,00	98	31.472.700,00	196	68.223.895,00	100	99.4	100	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0,00	0	0,00	98	27.455.300,00	98	15.027.219,00	98	15.027.219,00	100	54.7	0	0	
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan		0,00	0	0,00	4	92.837.400,00	3	92.502.250,00	3	92.502.250,00	75	99.6	0	0	
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		0,00	0	0,00	696	180.224.100,00	1182	176.116.244,00	1182	176.116.244,00	169.8	97.7	0	0	
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		0,00	0	0,00	3	89.270.000,00	3	87.440.007,00	3	87.440.007,00	100	98	0	0	
	2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Pemustaka**	**72**	**11.073.379.650,00**	**356**	**9.210.059.292,00**	**67**	**423.015.129,00**	**146.3**	**411.183.980,00**	**502.11**	**9.621.243.272,00**	**218.4**	**97.2**	**203.2**	**1.3**	
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya		0,00	0	0,00	1	40.764.090,00	1	38.081.345,00	1	38.081.345,00	100	93.4	0	0	
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan		0,00	0	0,00	10	70.698.500,00	0	66.950.450,00	0	66.950.450,00	0	94.7	0	0	
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		0,00	0	0,00	20	57.576.462,00	20	54.511.295,00	20	54.511.295,00	100	94.7	0	0	
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat		0,00	0	0,00	125	253.976.077,00	125	251.640.890,00	125	251.640.890,00	100	99.1	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan-kegiatan rutin perpustakaan tetap dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kepuasan pemustaka																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya target yang perlu disesuaikan pada dokumen perencanaan dan DPA-SKPD																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan evaluasi pencapaian target dan kinerja program/kegiatan/sub kegiatan serta mengupayakan pencapaian target dan kinerja program/kegiatan/sub kegiatan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan evaluasi pencapaian target kinerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD berikutnya																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**100.00**	**93.56**			
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	224	**Kearsipan**																
	2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan**	**82.5**	**838.530.000,00**	**89.4**	**356.737.500,00**	**85**	**233.619.600,00**	**96.55**	**229.163.864,00**	**185.97**	**585.901.364,00**	**113.6**	**98.1**	**117**	**0**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase arsip dinamis yang dilakukan pengelolaan**	**100**	**264.727.000,00**	**100**	**272.797.600,00**	**100**	**225.693.500,00**	**100**	**221.238.214,00**	**200**	**494.035.814,00**	**100**	**98**	**100**	**0**	
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	18000	192.012.500,00	4500	206.238.900,00	4500	211.835.500,00	17943	211.828.114,00	22443	418.067.014,00	398.7	100	99.7	0	
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	30	72.714.500,00	30	66.558.700,00	30	13.858.000,00	30	9.410.100,00	60	75.968.800,00	100	67.9	100	0	
	2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)**	**80**	**95.568.300,00**	**20**	**83.939.900,00**	**20**	**7.926.100,00**	**20**	**7.925.650,00**	**40**	**91.865.550,00**	**100**	**100**	**25**	**0**	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	18000	95.568.300,00	150	83.939.900,00	150	7.926.100,00	150	7.925.650,00	300	91.865.550,00	100	100	0.8	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan rutin dan inovasi layanan kearsipan dilaksanakan sesuai target kinerja dan anggaran																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya kegiatan yang perlu penyesuaian jadwal																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan evaluasi target kinerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan serta mengupayakan pencapaian target kinerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada akhir tahun																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan evaluasi pencapaian target kinerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD tahun berikutnya																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**100**	**98.09**			
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																
	325	**Kelautan dan Perikanan**																

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis**	**15.82**	**389.017.415,00**	**16.9**	**301.152.900,00**	**26.31**	**294.117.656,00**	**29.95**	**289.493.363,00**	**46.82**	**590.646.263,00**	**113.8**	**98.4**	**189.3**	**6.1**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas**	**6.9**	**389.017.415,00**	**23.7**	**301.152.900,00**	**17.21**	**294.117.656,00**	**17.29**	**289.493.363,00**	**40.97**	**590.646.263,00**	**100.5**	**98.4**	**250.6**	**6.1**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan/ pelatihan/ pendampingan pengelolaan pembudidayaan ikan**	**38.58**	**133.378.700,00**	**65.3**	**146.896.700,00**	**60**	**138.425.300,00**	**76.43**	**135.313.654,00**	**141.74**	**282.210.354,00**	**127.4**	**97.8**	**198.1**	**0**	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	4	81.230.300,00	2	98.977.200,00	2	88.515.900,00	2	87.234.000,00	4	186.211.200,00	100	98.6	50	0	
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20	52.148.400,00	5	47.919.500,00	10	49.909.400,00	10	48.079.654,00	15	95.999.154,00	100	96.3	50	0	
	3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi standrat mutu budidaya perikanan**	**3.26**	**154.954.878,00**	**4.93**	**154.256.200,00**	**5**	**155.692.356,00**	**5.57**	**154.179.709,00**	**10.5**	**308.435.909,00**	**111.4**	**99**	**170.9**	**15.3**	
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0,00	0	0,00	1	3.627.800,00	1	3.312.125,00	1	3.312.125,00	100	91.3	0	0	
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	120.000.128,00	1	119.985.600,00	1	117.842.556,00	1	117.619.344,00	2	237.604.944,00	100	99.8	25	19.7	
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		0,00	0	0,00	50	34.222.000,00	50	33.248.240,00	50	33.248.240,00	100	97.2	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan dana dan anggaran																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - perubahan spesifikasi kegiatan sehingga menunggu perubahan dalam PAPBD - waktu pelaksanaan PAPBD yang terbatas																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : - Menyusun perencanaan kegiatan yang jelas, terstruktur dan kosisten sehingga meminimalisir perubahan - menyiapkan persiapan kegiatan baik dilapangan maupun secara administratif sehingga pelaksanaan kegiatan dapat efektif dan efisien.																		
	3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Volume penjualan hasil olahan perikanan**	**35.27**	**149.072.725,00**	**####**	**1.930.722.099,00**	**38018**	**99.611.100,00**	**38055**	**95.800.050,00**	**75884.17**	**2.026.522.149,00**	**100.1**	**96.2**	**107905**	**17.3**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	3.25.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Persentase pelaku usaha olahan hasil perikanan yang sudah memenuhi standar mutu**	**43.48**	**25.622.200,00**	**27**	**24.147.400,00**	**34.78**	**18.439.200,00**	**35.64**	**17.424.050,00**	**62.64**	**41.571.450,00**	**102.5**	**94.5**	**82**	**6.4**	
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		0,00	0	0,00	2	18.439.200,00	2	17.424.050,00	2	17.424.050,00	100	94.5	0	0	
	3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Angka konsumsi ikan perkapita/ tahun**	**19**	**7.584.018.899,00**	**18.8**	**1.906.574.699,00**	**21.5**	**81.171.900,00**	**22.93**	**78.376.000,00**	**41.77**	**1.984.950.699,00**	**106.7**	**96.6**	**120.7**	**0.3**	
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40	55.352.100,00	19.48	60.763.400,00	10	56.741.900,00	19.28	54.183.000,00	38.76	114.946.400,00	192.8	95.5	48.2	0	
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	40	7.528.666.799,00	20	1.845.811.299,00	20	24.430.000,00	20	24.193.000,00	40	1.870.004.299,00	100	99	50	0.3	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan anggaran dan SDM																		

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - perubahan spesifikasi kegiatan sehingga menunggu perubahan dalam PAPBD - waktu pelaksanaan PAPBD yang terbatas																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : - Menyusun perencanaan kegiatan yang jelas, terstruktur dan kosisten sehingga meminimalisir perubahan - menyiapkan persiapan kegiatan baik dilapangan maupun secara administratif sehingga pelaksanaan kegiatan dapat efektif dan efisien.																		
												Rata-rata capaian kinerja (%)		**100.00**	**97.86**			
												Predikat kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	326	**Pariwisata**																
	3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**		**0,00**	**91.9**	**8.590.260.095,00**	**83**	**8.827.025.368,00**	**83.62**	**8.208.305.004,00**	**175.49**	**16.798.565.099,00**	**100.7**	**93**	**0**	**0**	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar**
	3.26.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**16.162.800,00**	**100**	**15.237.200,00**	**100**	**8.651.600,00**	**100**	**8.351.400,00**	**200**	**23.588.600,00**	**100**	**96.5**	**0**	**0**	
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.999.800,00	10	4.992.800,00	10	4.948.600,00	2	4.808.600,00	12	9.801.400,00	20	97.2	0	0	
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		11.163.000,00	7	10.244.400,00	7	3.703.000,00	4	3.542.800,00	11	13.787.200,00	57.1	95.7	0	0	
	3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**4.487.744.059,00**	**100**	**4.413.105.389,00**	**100**	**4.991.395.051,00**	**100**	**4.457.979.821,00**	**200**	**8.871.085.210,00**	**100**	**89.3**	**0**	**25.3**	
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		4.486.458.859,00	41	4.411.820.189,00	41	4.990.116.351,00	41	4.456.701.121,00	82	8.868.521.310,00	100	89.3	0	25.3	
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1.285.200,00	2	1.285.200,00	2	1.278.700,00	0.5	1.278.700,00	2.5	2.563.900,00	25	100	0	0	
	3.26.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**127.123.050,00**	**100**	**169.263.400,00**	**100**	**122.167.900,00**	**100**	**85.732.800,00**	**200**	**254.996.200,00**	**100**	**70.2**	**0**	**21.6**	
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		58.760.200,00	44	58.742.000,00	3	35.300.000,00	2	35.100.000,00	46	93.842.000,00	66.7	99.4	0	38.3	
	3.26.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		68.362.850,00	41	110.521.400,00	41	86.867.900,00	7	50.632.800,00	48	161.154.200,00	17.1	58.3	0	7.3	
	3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan umum**		**366.809.850,00**	**100**	**373.778.521,00**	**8**	**265.173.244,00**	**8**	**260.241.819,00**	**108**	**634.020.340,00**	**100**	**98.1**	**0**	**12.2**	
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		34.351.700,00	28	34.296.000,00	8	34.344.100,00	4	33.817.000,00	32	68.113.000,00	50	98.5	0	43.6	
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		30.002.100,00	4	27.774.200,00	4	33.392.900,00	0	31.873.206,00	4	59.647.406,00	0	95.4	0	0	
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		24.929.550,00	43	24.848.000,00	2	47.303.300,00	1	46.353.600,00	44	71.201.600,00	50	98	0	40.1	
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		49.998.000,00	428	55.200.000,00	10	50.026.000,00	3	49.667.000,00	431	104.867.000,00	30	99.3	0	14	
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		14.664.500,00	7	14.145.250,00	6	14.629.500,00	0	14.064.900,00	7	28.210.150,00	0	96.1	0	0	
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		9.540.000,00	60	9.280.400,00	36	9.540.000,00	9	9.280.800,00	69	18.561.200,00	25	97.3	0	16.2	
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		190.000.000,00	62	197.762.671,00	20	70.868.000,00	5	70.849.513,00	67	268.612.184,00	25	100	0	5.8	
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		13.324.000,00	1	10.472.000,00	1	5.069.444,00	0	4.335.800,00	1	14.807.800,00	0	85.5	0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	3.26.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan**		**99.643.024,00**	**100**	**97.443.000,00**	**5**	**76.731.073,00**	**5**	**70.847.100,00**	**105**	**168.290.100,00**	**100**	**92.3**	**0**	**15.1**	
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		84.643.024,00	6	97.443.000,00	5	61.731.073,00	0	55.847.100,00	6	153.290.100,00	0	90.5	0	0	
	3.26.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		15.000.000,00	1	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	2	15.000.000,00	100	100	0	100	
	3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan**		**2.999.790.200,00**	**100**	**3.091.781.942,00**	**78**	**3.188.527.500,00**	**78**	**3.154.986.627,00**	**178**	**6.246.768.569,00**	**100**	**98.9**	**0**	**23.7**	
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		319.000.000,00	12	318.450.278,00	12	319.000.000,00	3	303.445.711,00	15	621.895.989,00	25	95.1	0	21.7	
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2.680.790.200,00	75	2.773.331.664,00	75	2.869.527.500,00	75	2.851.540.916,00	150	5.624.872.580,00	100	99.4	0	24	
	3.26.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan pemeliharaan BMD**		**175.562.900,00**	**100**	**429.650.643,00**	**12**	**174.379.000,00**	**12**	**170.165.437,00**	**112**	**599.816.080,00**	**100**	**97.6**	**0**	**2.1**	
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		82.242.400,00	14	101.372.143,00	12	75.943.000,00	3	71.764.937,00	17	173.137.080,00	25	94.5	0	4.5	
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		73.320.500,00	5	106.802.500,00	5	88.436.000,00	0	88.400.500,00	5	195.203.000,00	0	100	0	0	
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		20.000.000,00	2	221.476.000,00	2	10.000.000,00	0	10.000.000,00	2	231.476.000,00	0	100	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Kedisiplinan dan tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugas -Sistem administrasi dan keuangan yang sudah berjalan dengan baik. - Koordinasi internal antar-subbag dan bidang cukup lancar. - Dukungan sarana prasarana perkantoran yang memadai.																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Adanya peralatan kerja yang sudah perlu peremajaan sehingga sedikit menghambat kelancaran operasional. - Banyak kegiatan dan laporan yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan, menyebabkan waktu penyelesaian administrasi agak lambat																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -Menjadwalkan penyelesaian laporan dan administrasi lebih awal. -Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana yang perlu perbaikan atau penggantian -Meningkatkan koordinasi lintas bidang untuk percepatan realisasi kegiatan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : -peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan dan umum -Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja yang mendukung efisiensi pelayanan. -Optimalisasi sistem kerja berbasis digital.																		
	3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase peningkatan sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno**		**0,00**	**30**	**1.476.065.656,00**	**30**	**971.673.800,00**	**66.66**	**939.200.110,00**	**96.66**	**2.415.265.766,00**	**222.2**	**96.7**	**0**	**0**	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar**
	3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan**		**0,00**	**25**	**1.476.065.656,00**	**50**	**971.673.800,00**	**66.67**	**939.200.110,00**	**91.67**	**2.415.265.766,00**	**133.3**	**96.7**	**0**	**0**	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar**
	3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase peningkatan sarpras obyek pariwisata**		**0,00**	**50**	**1.476.065.656,00**	**25**	**971.673.800,00**	**26.3**	**939.200.110,00**	**76.3**	**2.415.265.766,00**	**105.2**	**96.7**	**0**	**0**	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar**
	3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase peningkatan usaha pariwisata**		**0,00**	**20**	**1.476.065.656,00**	**20**	**971.673.800,00**	**30**	**939.200.110,00**	**50**	**2.415.265.766,00**	**150**	**96.7**	**0**	**0**	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar**
	3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik**		**150.000.000,00**	**0**	**181.813.572,00**	**1**	**121.839.000,00**	**1**	**121.034.160,00**	**1**	**302.847.732,00**	**100**	**99.3**	**0**	**0**	
	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		150.000.000,00	2	181.813.572,00	1	121.839.000,00	0	121.034.160,00	2	302.847.732,00	0	99.3	0	0	
	3.26.02.2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah sarana prasarana kawasan pariwisata Makam Bung Karno yang dikelola**		**584.900.100,00**	**3**	**843.819.584,00**	**3**	**703.045.100,00**	**3**	**688.225.950,00**	**6**	**1.532.045.534,00**	**100**	**97.9**	**0**	**2.1**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		199.900.300,00	3	465.350.034,00	3	353.365.200,00	0	344.441.500,00	3	809.791.534,00	0	97.5	0	0	
	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		384.999.800,00	3	378.469.550,00	3	349.679.900,00	1	343.784.450,00	4	722.254.000,00	33.3	98.3	0	3.1	
	3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik**		**92.449.900,00**	**1**	**450.432.500,00**	**1**	**146.789.700,00**	**1**	**129.940.000,00**	**2**	**580.372.500,00**	**100**	**88.5**	**0**	**3.6**	
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		92.449.900,00	2	450.432.500,00	2	146.789.700,00	0.25	129.940.000,00	2.25	580.372.500,00	12.5	88.5	0	3.6	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : -Dukungan lintas perangkat daerah dan masyarakat sekitar lokasi destinasi - tersedianya SDM yang memadai -Peningkatan kegiatan promosi dan kolaborasi lintas sektor																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : -Proses perizinan dan koordinasi lintas sektor yang memerlukan waktu cukup lama.- -Penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan dengan agenda kunjungan tamu resmi dan event daerah -Diperlukan pembinaan SDM bagi pelaku usaha pariwisata yang sesuai dengan klasifikasi -Aksesibilitas ke beberapa lokasi wisata masih																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -Meningkatkan koordinasi lintas OPD dan pelaku usaha -Melanjutkan pemeliharaan rutin sarpras -Melakukan pengawasan pelaku sektor pariwisata yang telah di monev untuk mematuhi sesuai ketentuan perizinan yang berlaku -Melakukan inventarisasi obyek mana saja yang sudah melaksanakan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : -Melanjutkan peningkatan dan revitalisasi sarana pendukung wisata -Mendorong integrasi program pariwisata dengan ekonomi kreatif. -Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan petugas kawasan. Pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi dan tata kelola kawasan. -Mengusulkan program																		
	3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan**		**0,00**	**0.08**	**916.197.401,00**	**0.08**	**764.659.488,00**	**0.49**	**752.316.100,00**	**0.57**	**1.668.513.501,00**	**612.5**	**98.4**	**0**	**0**	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar**
	3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah media promosi pariwisata yang dilakukan**		**345.199.400,00**	**11**	**916.197.401,00**	**14**	**764.659.488,00**	**14**	**752.316.100,00**	**25**	**1.668.513.501,00**	**100**	**98.4**	**0**	**4.8**	
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		3.021.500,00	2	3.016.000,00	2	12.217.800,00	0	11.051.000,00	2	14.067.000,00	0	90.4	0	0	
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		249.194.800,00	3	822.971.401,00	3	702.226.288,00	0.5	696.300.100,00	3.5	1.519.271.501,00	16.7	99.2	0	2.2	
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		92.983.100,00	4	90.210.000,00	4	50.215.400,00	1	44.965.000,00	5	135.175.000,00	25	89.5	0	12	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Adanya kolaborasi dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif 2. Terjalinnya kerjasama dengan pihak terkait yang berkompeten di bidangnya 3. tersedianya sumber Daya Manusia yang kompeten																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Adanya kegiatan yang harus dilaksanakan pada TW 4 karena menyesuaikan RAK																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan RAK																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melaksanakan kegiatan yang difokuskan pada pemasaran pariwisata																		
	3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan**		**0,00**	**3.9**	**57.010.000,00**	**4.2**	**29.266.600,00**	**5.35**	**25.680.000,00**	**9.25**	**82.690.000,00**	**127.4**	**87.7**	**0**	**0**	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar**
	3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah Pelaku Ekraf yang Ikut Kegiatan**		**66.738.400,00**	**49**	**57.010.000,00**	**49**	**29.266.600,00**	**49**	**25.680.000,00**	**98**	**82.690.000,00**	**100**	**87.7**	**0**	**0**	
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		30.738.400,00	40	21.360.000,00	40	19.516.600,00	8	17.430.000,00	48	38.790.000,00	20	89.3	0	0	
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata		36.000.000,00	9	35.650.000,00	9	9.750.000,00	1	8.250.000,00	10	43.900.000,00	11.1	84.6	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Dukungan dari komunitas kreatif dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) - Koordinasi lintas bidang di lingkungan OPD berjalan baik																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : -Beberapa kegiatan perlu penyesuaian jadwal -Belum optimalnya partisipasi dari pelaku ekonomi kreatif di semua subsektor - Masih terbatasnya data terkini terkait pelaku usaha dan komunitas kreatif																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -Memperkuat koordinasi dengan komunitas dan pelaku usaha kreatif -Mengoptimalkan publikasi dan promosi hasil kegiatan.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : -Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. -Penguatan jejaring dan kemitraan antar pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**100.00**	**97.26**			
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	327	**Pertanian**																

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase sarana pertanian yang tersedia**	**29.03**	**331.854.721,00**	**73.1**	**706.062.000,00**	**73.1**	**489.882.800,00**	**74.37**	**476.104.120,00**	**147.47**	**1.182.166.120,00**	**101.7**	**97.2**	**256.2**	**37.7**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak**		**331.854.721,00**	**0**	**706.062.000,00**	**98.25**	**489.882.800,00**	**98.25**	**476.104.120,00**	**98.25**	**1.182.166.120,00**	**100**	**97.2**	**0**	**37.7**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase pengawasan peredaran obat hewan**		**331.854.721,00**	**0**	**706.062.000,00**	**55**	**489.882.800,00**	**56.5**	**476.104.120,00**	**56.5**	**1.182.166.120,00**	**102.7**	**97.2**	**0**	**37.7**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian**	**100**	**115.845.600,00**	**100**	**615.961.700,00**	**80**	**382.785.000,00**	**100**	**371.463.750,00**	**200**	**987.425.450,00**	**125**	**97**	**100**	**94.8**	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4	65.842.900,00	2	373.642.900,00	2	348.086.000,00	2	336.832.500,00	4	710.475.400,00	100	96.8	50	165	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4	50.002.700,00	1	242.318.800,00	1	34.699.000,00	1	34.631.250,00	2	276.950.050,00	100	99.8	25	2.3	
	3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase peternak yang dibina**	**50**	**53.535.700,00**	**45**	**53.476.150,00**	**40**	**78.924.700,00**	**69.93**	**78.333.060,00**	**114.93**	**131.809.210,00**	**174.8**	**99.3**	**139.9**	**28.8**	
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	16	53.535.700,00	4	53.476.150,00	3	78.924.700,00	3	78.333.060,00	7	131.809.210,00	100	99.3	18.8	28.8	
	3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengawasan penggunaan pakan ternak yang sesuai standar**	**100**	**32.850.500,00**	**100**	**31.878.250,00**	**100**	**23.930.100,00**	**100**	**22.631.310,00**	**200**	**54.509.560,00**	**100**	**94.6**	**100**	**0**	
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	8	23.928.700,00	2	23.103.950,00	2	18.827.000,00	2	17.704.000,00	4	40.807.950,00	100	94	25	0	
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	4	8.921.800,00	1	8.774.300,00	1	5.103.100,00	2	4.927.310,00	3	13.701.610,00	200	96.6	50	0	
	3.27.02.2.04	**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	**Persentase obat hewan yang sudah teregister**	**70**	**4.792.200,00**	**89.4**	**4.745.900,00**	**95.3**	**4.243.000,00**	**95.3**	**3.676.000,00**	**184.7**	**8.421.900,00**	**100**	**86.6**	**136.1**	**0**	
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4	4.792.200,00	1	4.745.900,00	1	4.243.000,00	1	3.676.000,00	2	8.421.900,00	100	86.6	25	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan anggaran dan SDM																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - perubahan spesifikasi kegiatan sehingga menunggu perubahan dalam PAPBD - waktu pelaksanaan PAPBD yang terbatas																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : - Menyusun perencanaan kegiatan yang jelas, terstruktur dan kosisten sehingga meminimalisir perubahan - menyiapkan persiapan kegiatan baik dilapangan maupun secara administratif sehingga pelaksanaan kegiatan dapat efektif dan efisien.																		
	3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik**	**100**	**2.753.949.659,00**	**70**	**1.800.025.370,00**	**70.7**	**1.681.168.992,00**	**69.7**	**1.414.576.155,00**	**139.69**	**3.214.601.525,00**	**98.6**	**84.1**	**69.7**	**0.4**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)**		**2.753.949.659,00**	**0**	**1.800.025.370,00**	**100**	**1.681.168.992,00**	**100**	**1.414.576.155,00**	**100**	**3.214.601.525,00**	**100**	**84.1**	**0**	**0.4**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Persentase data dukung Raperda LP2B yang tersedia**	**100**	**37.288.400,00**	**100**	**262.879.150,00**	**100**	**13.000.000,00**	**100**	**2.160.000,00**	**200**	**265.039.150,00**	**100**	**16.6**	**100**	**5.8**	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4	2.120.000,00	1	78.560.000,00	1	2.200.000,00	1	2.160.000,00	2	80.720.000,00	100	98.2	25	101.9	
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B		0,00	2	184.319.150,00	1	10.800.000,00	1	0,00	3	184.319.150,00	100	0	0	0	
	3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Persentase prasarana pertanian yang tersedia**	**90**	**1.572.498.620,00**	**70.8**	**1.537.146.220,00**	**70.33**	**1.668.168.992,00**	**71.78**	**1.412.416.155,00**	**142.61**	**2.949.562.375,00**	**102.1**	**84.7**	**79.8**	**0.6**	
	3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Persentase prasarana RPH yang ditingkatkan**	**70.05**	**1.572.498.620,00**	**71.5**	**1.537.146.220,00**	**80**	**1.668.168.992,00**	**83.33**	**1.412.416.155,00**	**154.8**	**2.949.562.375,00**	**104.2**	**84.7**	**119**	**0.6**	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	16	611.250.000,00	3	600.128.400,00	1	225.431.700,00	1	220.032.700,00	4	820.161.100,00	100	97.6	6.3	0	
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		0,00	0	0,00	3	98.827.500,00	3	96.120.650,00	3	96.120.650,00	100	97.3	0	0	
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		0,00	0	0,00	1	85.247.592,00	1	83.079.300,00	1	83.079.300,00	100	97.5	0	0	
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	19	611.250.000,00	3	601.719.500,00	3	1.090.250.000,00	4	846.960.485,00	7	1.448.679.985,00	133.3	77.7	21.1	0	
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3	349.998.620,00	3	335.298.320,00	3	168.412.200,00	3	166.223.020,00	6	501.521.340,00	100	98.7	100	2.7	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan anggaran dan SDM																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - kegiatan kontruksi jaringan irigasi terkendala hujan ekstrim sehingga tidak bisa dilaksanakan - akses lokasi pelaksanaan kontrsuksi JUT yang sulit																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : - menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dengan lebih mempertimbangkan lokasi kegiatan, waktu pelaksanaan dan faktor ekstrenal (cuaca).																		
	3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV)**	**100**	**750.000.000,00**	**60**	**223.435.750,00**	**48**	**229.588.700,00**	**50**	**225.186.814,00**	**110**	**448.622.564,00**	**104.2**	**98.1**	**50**	**4.9**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani**	**72.22**	**750.000.000,00**	**100**	**223.435.750,00**	**100**	**229.588.700,00**	**100**	**225.186.814,00**	**200**	**448.622.564,00**	**100**	**98.1**	**138.5**	**4.9**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar**	**52**	**750.000.000,00**	**56**	**223.435.750,00**	**65**	**229.588.700,00**	**67.85**	**225.186.814,00**	**123.85**	**448.622.564,00**	**104.4**	**98.1**	**130.5**	**4.9**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Angka kejadian kasus penyakit zoonosis**	**0**	**41.055.400,00**	**1**	**40.497.300,00**	**0**	**45.589.300,00**	**1**	**44.891.952,00**	**2**	**85.389.252,00**	**0**	**98.5**	**0**	**0**	
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	90	41.055.400,00	42	40.497.300,00	42	45.589.300,00	42	44.891.952,00	84	85.389.252,00	100	98.5	46.7	0	
	3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang tersedia**	**71**	**146.104.940,00**	**85.7**	**148.402.700,00**	**90**	**148.592.700,00**	**90.47**	**145.719.714,00**	**176.17**	**294.122.414,00**	**100.5**	**98.1**	**127.4**	**25**	
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	4	29.015.850,00	1	29.015.850,00	1	25.679.500,00	1	25.679.500,00	2	54.695.350,00	100	100	25	0	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	16	117.089.090,00	5	119.386.850,00	5	122.913.200,00	5	120.040.214,00	10	239.427.064,00	100	97.7	31.3	31.2	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase unit usaha produk hewan yang dibina**	**48**	**25.871.500,00**	**88.8**	**22.376.500,00**	**88**	**25.930.000,00**	**89.18**	**25.188.545,00**	**177.93**	**47.565.045,00**	**101.3**	**97.1**	**185.8**	**0**	
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	4	8.619.300,00	1	8.419.300,00	1	8.811.000,00	1	8.767.575,00	2	17.186.875,00	100	99.5	25	0	
	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	60	17.252.200,00	23	13.957.200,00	21	17.119.000,00	27	16.420.970,00	50	30.378.170,00	128.6	95.9	45	0	
	3.27.04.2.05	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	**Prosentase KIE yang yang terlaksana**	**100**	**12.313.800,00**	**100**	**12.159.250,00**	**100**	**9.476.700,00**	**100**	**9.386.603,00**	**200**	**21.545.853,00**	**100**	**99**	**100**	**0**	
	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	24	12.313.800,00	10	12.159.250,00	8	9.476.700,00	10	9.386.603,00	20	21.545.853,00	125	99	41.7	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan anggaran dan SDM																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - perubahan spesifikasi pekerjaan, sehingga harus melakukan perubahan dalam PABPD - waktu pelaksanaan PAPBD sangat terbatas																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : - menyusun spesifikasi pekerjaan secara jelas dan terstuktur sehingga meminimalisir adanya perubahan - menyiapkan dokumen pelaksanaan pekerjaan yang lengkap dan meningkatkan koordinasi lapangansehingga kegiatan dapat dilaksanaan secara cepat dan tepat.																		
	3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur**	**100**	**111.206.667,00**	**100**	**16.041.000,00**	**100**	**17.675.000,00**	**100**	**16.872.000,00**	**200**	**32.913.000,00**	**100**	**95.5**	**100**	**0**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan bahan pengendalian OPT**	**13**	**16.041.000,00**	**38**	**16.041.000,00**	**17**	**17.675.000,00**	**19**	**16.872.000,00**	**57**	**32.913.000,00**	**111.8**	**95.5**	**146.2**	**0**	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	400	16.041.000,00	100.2	16.041.000,00	100	17.675.000,00	130.9	16.872.000,00	231.11	32.913.000,00	130.9	95.5	32.7	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan anggaran dan SDM																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - perubahan cuaca ekstrim - ketergantungan petani terhadap obat-obatan kimia																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : - Meningkatkan kesadaran petani terhadap keseimbangan ekosistem dan pengelolaan/penangganan OPT secara seimbang. - penyediaan bantuan obat yang berbasis alami (nabati).																		
	3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis**	**53.85**	**62.223.588,00**	**52.1**	**38.357.100,00**	**42.85**	**6.352.100,00**	**52.17**	**6.071.500,00**	**104.22**	**44.428.600,00**	**121.8**	**95.6**	**96.9**	**0**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis**		**62.223.588,00**	**0**	**38.357.100,00**	**49.23**	**6.352.100,00**	**50.87**	**6.071.500,00**	**50.87**	**44.428.600,00**	**103.3**	**95.6**	**0**	**0**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	3.27.06.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelaku usaha pertanian yang memenuhi standar teknis**	**30**	**28.012.400,00**	**54**	**27.762.400,00**	**20**	**1.375.000,00**	**96**	**1.325.000,00**	**150**	**29.087.400,00**	**480**	**96.4**	**320**	**0**	
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	4	28.012.400,00	2	27.762.400,00	1	1.375.000,00	1	1.325.000,00	3	29.087.400,00	100	96.4	25	0	
	3.27.06.2.02	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	**Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang di keluarkan**	**4**	**5.524.800,00**	**3**	**5.373.800,00**	**1**	**3.487.200,00**	**1**	**3.366.500,00**	**4**	**8.740.300,00**	**100**	**96.5**	**25**	**0**	
	3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	8	5.524.800,00	2	5.373.800,00	2	3.487.200,00	2	3.366.500,00	4	8.740.300,00	100	96.5	25	0	
	3.27.06.2.03	**Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan**	**Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang di keluarkan**	**4**	**5.798.050,00**	**2**	**5.220.900,00**	**1**	**1.489.900,00**	**2**	**1.380.000,00**	**4**	**6.600.900,00**	**200**	**92.6**	**50**	**0**	
	3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	4	5.798.050,00	1	5.220.900,00	1	1.489.900,00	1	1.380.000,00	2	6.600.900,00	100	92.6	25	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Ketersediaan anggaran dan SDM																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - perubahan spesifikasi kegiatan sehingga menunggu perubahan dalam PAPBD - waktu pelaksanaan PAPBD yang terbatas																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : - Menyusun perencanaan kegiatan yang jelas, terstruktur dan kosisten sehingga meminimalisir perubahan - menyiapkan persiapan kegiatan baik dilapangan maupun secara administratif sehingga pelaksanaan kegiatan dapat efektif dan efisien.																		
	3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital**	**38.89**	**288.889.510,00**	**40.9**	**1.916.147.765,00**	**33.33**	**2.049.116.990,00**	**100**	**1.954.190.124,00**	**140.91**	**3.870.337.889,00**	**300**	**95.4**	**257.1**	**5.3**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis**	**23.81**	**288.889.510,00**	**2.05**	**1.916.147.765,00**	**19.05**	**2.049.116.990,00**	**21.43**	**1.954.190.124,00**	**23.48**	**3.870.337.889,00**	**112.5**	**95.4**	**90**	**5.3**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani**	**0.93**	**288.889.510,00**	**14.5**	**1.916.147.765,00**	**0.93**	**2.049.116.990,00**	**2.03**	**1.954.190.124,00**	**16.52**	**3.870.337.889,00**	**218.3**	**95.4**	**218.3**	**5.3**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase petani yang menerima peningkatan kapasitas SDM**	**50**	**2.030.669.968,00**	**41.7**	**1.916.147.765,00**	**45**	**2.049.116.990,00**	**45.14**	**1.954.190.124,00**	**86.86**	**3.870.337.889,00**	**100.3**	**95.4**	**90.3**	**0.8**	
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	72.465.800,00	3	71.925.800,00	3	5.500.000,00	3	5.300.000,00	6	77.225.800,00	100	96.4	100	0	
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	84	1.953.530.168,00	40	1.839.547.965,00	41	1.970.469.790,00	44	1.888.663.644,00	84	3.728.211.609,00	107.3	95.8	52.4	0.8	
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3	4.674.000,00	3	4.674.000,00	3	187.200,00	3	186.480,00	6	4.860.480,00	100	99.6	100	0	
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya		0,00	0	0,00	16	72.960.000,00	16	60.040.000,00	16	60.040.000,00	100	82.3	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan SDM dan anggaran																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - perubahan spesifikasi kegiatan sehingga menunggu perubahan dalam PAPBD terutama untuk kegiatan yang bersumber dari dana DBHCHT - waktu pelaksanaan PAPBD yang terbatas																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : - Menyusun perencanaan kegiatan yang jelas, terstruktur dan kosisten sehingga meminimalisir perubahan - menyiapkan persiapan kegiatan baik dilapangan maupun secara administratif sehingga pelaksanaan kegiatan dapat efektif dan efisien, terutama untuk kegiatan yang mengalami perubahan atau baru																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**99.90**	**91.49**			
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	330	**Perdagangan**																
	3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**82**	**9.968.761.527,00**	**84**	**7.628.176.312,00**	**86.75**	**8.115.355.146,00**	**90.52**	**7.562.362.928,00**	**174.53**	**15.190.539.240,00**	**104.3**	**93.2**	**110.4**	**17.6**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
	3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart**		**9.734.300,00**	**100**	**5.929.600,00**	**100**	**5.494.500,00**	**100**	**5.241.450,00**	**200**	**11.171.050,00**	**100**	**95.4**	**0**	**0**	
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.003.600,00	10	2.757.600,00	10	1.134.000,00	10	1.090.500,00	20	3.848.100,00	100	96.2	0	0	
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6.730.700,00	8	3.172.000,00	8	4.360.500,00	8	4.150.950,00	16	7.322.950,00	100	95.2	0	0	
	3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart**		**5.721.389.340,00**	**99.3**	**6.148.030.569,00**	**100**	**6.347.951.161,00**	**100**	**5.978.789.309,00**	**199.31**	**12.126.819.878,00**	**100**	**94.2**	**0**	**26.9**	
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		5.716.031.240,00	798	6.142.750.969,00	57	6.344.101.161,00	162	5.974.964.309,00	960	12.117.715.278,00	284.2	94.2	0	27	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5.358.100,00	12	5.279.600,00	4	3.850.000,00	4	3.825.000,00	16	9.104.600,00	100	99.4	0	0	
	3.30.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuia standart**		**176.239.220,00**	**100**	**253.599.500,00**	**100**	**129.924.700,00**	**100**	**72.574.500,00**	**200**	**326.174.000,00**	**100**	**55.9**	**0**	**0**	
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		76.950.000,00	4	82.365.000,00	5	0,00	0	0,00	4	82.365.000,00	0	0	0	0	
	3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		99.289.220,00	350	171.234.500,00	300	129.924.700,00	300	72.574.500,00	650	243.809.000,00	100	55.9	0	0	
	3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**471.778.600,00**	**100**	**463.566.270,00**	**100**	**375.860.496,10**	**100**	**373.649.428,00**	**200**	**837.215.698,00**	**100**	**99.4**	**0**	**11.1**	
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		20.197.000,00	1	21.627.800,00	2	28.205.900,00	2	28.177.961,00	3	49.805.761,00	100	99.9	0	0	
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		74.308.000,00	4	74.308.000,00	4	64.473.299,10	4	64.265.055,00	8	138.573.055,00	100	99.7	0	10.3	
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0		7.577.600,00	1	7.573.800,00	7	10.468.600,00	7	10.468.500,00	8	18.042.300,00	100	100	0	39.1	
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		73.987.000,00	15	73.756.000,00	15	54.830.000,00	15	54.765.000,00	30	128.521.000,00	100	99.9	0	8.3	
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		45.350.000,00	4	45.040.000,00	6	35.274.697,00	6	35.075.400,00	10	80.115.400,00	100	99.4	0	0	
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		6.840.000,00	36	5.400.000,00	36	5.400.000,00	36	5.400.000,00	72	10.800.000,00	100	100	0	0	
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		243.519.000,00	15	235.860.670,00	15	177.208.000,00	15	175.497.512,00	30	411.358.182,00	100	99	0	14.7	
	3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD yang tersedia sesuai standar**		**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**158.660.164,00**	**100**	**157.814.529,00**	**100**	**157.814.529,00**	**100**	**99.5**	**0**	**0**	
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0,00	0	0,00	2	158.660.164,00	2	157.814.529,00	2	157.814.529,00	100	99.5	0	0	
	3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**440.657.529,00**	**100**	**470.032.767,00**	**100**	**796.477.424,90**	**100**	**704.476.064,00**	**200**	**1.174.508.831,00**	**100**	**88.4**	**0**	**31.8**	
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		205.864.929,00	24	205.293.295,00	24	482.690.824,90	24	415.260.407,00	48	620.553.702,00	100	86	0	35.7	
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		234.792.600,00	24	264.739.472,00	26	313.786.600,00	26	289.215.657,00	50	553.955.129,00	100	92.2	0	28.4	
	3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**280.888.456,00**	**100**	**287.017.606,00**	**100**	**300.986.700,00**	**100**	**269.817.648,00**	**200**	**556.835.254,00**	**100**	**89.6**	**0**	**6.4**	
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		180.379.456,00	17	187.734.799,00	13	191.361.100,00	13	161.516.148,00	30	349.250.947,00	100	84.4	0	9.9	
	3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0,00	0	0,00	2	5.607.000,00	2	5.607.000,00	2	5.607.000,00	100	100	0	0	
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25.509.000,00	10	25.509.000,00	4	25.987.000,00	4	25.882.000,00	14	51.391.000,00	100	99.6	0	0	
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		75.000.000,00	100	73.773.807,00	1	78.031.600,00	1	76.812.500,00	101	150.586.307,00	100	98.4	0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	3.30.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0,00	0	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	100	0	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sarana prasarana terpenuhi dalam memfasilitasi setiap kegiatan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Rencana anggaran kas ada di Tribulan 3 dan 4																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Akan disegerakan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mempertahankan kinerja dalam melaksanakan setiap kegiatan																		
	3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik**	**6**	**6.146.480.300,00**	**72**	**7.359.476.325,00**	**73.5**	**5.355.235.454,00**	**81.82**	**4.943.249.059,00**	**153.82**	**12.302.725.384,00**	**111.3**	**92.3**	**1363.7**	**15.8**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
	3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**persentase bangunan pasar rakyat dalam kondisi baik**		**4.776.746.400,00**	**80**	**6.524.259.225,00**	**80**	**5.013.985.654,00**	**80**	**4.614.333.959,00**	**160**	**11.138.593.184,00**	**100**	**92**	**0**	**15.2**	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		1.263.425.400,00	101	3.161.625.133,00	8	1.620.848.070,00	8	1.263.390.903,00	109	4.425.016.036,00	100	77.9	0	0	
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		3.513.321.000,00	11	3.362.634.092,00	9	3.393.137.584,00	9	3.350.943.056,00	20	6.713.577.148,00	100	98.8	0	20.6	
	3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**persentase usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan**		**772.703.200,00**	**6**	**835.217.100,00**	**6**	**341.249.800,00**	**6**	**328.915.100,00**	**12**	**1.164.132.200,00**	**100**	**96.4**	**0**	**31.8**	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		494.258.900,00	5	439.723.100,00	4	13.750.000,00	4	13.735.000,00	9	453.458.100,00	100	99.9	0	0	
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		278.444.300,00	4	395.494.000,00	4	327.499.800,00	4	315.180.100,00	8	710.674.100,00	100	96.2	0	88.2	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kerjasama antara tim sangat baik dan saling mendukung Sarana dan prasarana terpenuhi dalam memfasilitasi kegiatan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Jaringan internet masih kurang lancar sehingga memperlambat pekerjaan terkait administrasi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mempertahankan kinerja tim agar dapat melaksanakan kegiatan dengan baik Monitoring dan evaluasi kinerja pegawai																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memfasilitasi jaringan internet agar lebih baik dan lancar																		
	3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan**	**100**	**306.075.000,00**	**110**	**288.426.889,00**	**100**	**202.713.400,00**	**100**	**193.318.359,00**	**210**	**481.745.248,00**	**100**	**95.4**	**100**	**18.7**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
	3.30.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**persentase ketersediaan barang penting yang diawasi**		**92.438.600,00**	**100**	**188.473.589,00**	**100**	**132.209.800,00**	**100**	**125.904.769,00**	**200**	**314.378.358,00**	**100**	**95.2**	**0**	**57.8**	
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		92.438.600,00	2	188.473.589,00	2	132.209.800,00	2	125.904.769,00	4	314.378.358,00	100	95.2	0	57.8	
	3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Persentase pengendalian harga dan stok barang yang diawasi**		**77.728.800,00**	**100**	**77.631.000,00**	**100**	**60.603.600,00**	**100**	**60.263.590,00**	**200**	**137.894.590,00**	**100**	**99.4**	**0**	**4.8**	
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		77.728.800,00	4	77.631.000,00	3	60.603.600,00	3	60.263.590,00	7	137.894.590,00	100	99.4	0	4.8	
	3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi**		**24.100.000,00**	**70**	**22.322.300,00**	**100**	**9.900.000,00**	**100**	**7.150.000,00**	**170**	**29.472.300,00**	**100**	**72.2**	**0**	**0**	
	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		24.100.000,00	2	22.322.300,00	2	9.900.000,00	2	7.150.000,00	4	29.472.300,00	100	72.2	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Terdapat sumberdaya yang mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kondisi cuaca dan makro ekonomi sangat mempengaruhi tingkat inflasi berdampak signifikan terhadap kestabilan harga																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pengawasan pasar ditekankan pada komoditas yang mengalami kondisi labil																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Menyusun secondary plan jika terdapat kejadian luar biasa melalui perubahan rencana anggaran kas yang fleksibel																		

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat UTTP bertanda tera sah**	**55**	**745.181.325,00**	**98**	**154.067.400,00**	**50**	**107.040.900,00**	**62.94**	**106.514.900,00**	**160.92**	**260.582.300,00**	**125.9**	**99.5**	**114.4**	**3.2**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
	3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Persentase alat UTTP bertanda tera sah**		**182.109.938,00**	**4954**	**154.067.400,00**	**50**	**107.040.900,00**	**126.9**	**106.514.900,00**	**5080.86**	**260.582.300,00**	**253.7**	**99.5**	**0**	**12.9**	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		86.467.038,00	4954	60.216.000,00	5900	101.040.900,00	4402	100.598.900,00	9356	160.814.900,00	74.6	99.6	0	27.2	
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		95.642.900,00	160	93.851.400,00	300	6.000.000,00	300	5.916.000,00	460	99.767.400,00	100	98.6	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Alat standart sudah diverifikasi di bsml2 Yogyakarta Sudah ada SDM Metrologi																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Banyak pedagang berpindah ke timbangan elektronik Banyak pedagang yang berjualan kemasan jadi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Dilakukan tera/tera ulang di wilayah dengan cara door to door																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Dengan pendekatan ke masyarakat dengan sosialisasi dan tera ulang door to door																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**100.00**	**92.94**			
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	331	**Perindustrian**																
	3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**persentase peningkatan IKM**	**6**	**2.551.736.250,00**	**4.25**	**3.017.957.389,00**	**5**	**3.548.677.514,00**	**5.62**	**3.022.927.547,00**	**9.87**	**6.040.884.936,00**	**112.4**	**85.2**	**93.7**	**0.1**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
	3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase IKM yang memperoleh pembinaan**		**2.820.071.493,00**	**5**	**3.017.957.389,00**	**5**	**3.548.677.514,00**	**5**	**3.022.927.547,00**	**10**	**6.040.884.936,00**	**100**	**85.2**	**0**	**0.1**	
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		115.252.175,00	3	156.559.900,00	4	69.554.745,00	4	49.271.320,00	7	205.831.220,00	100	70.8	0	0	
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		2.567.127.748,00	5	2.788.020.993,00	5	3.375.655.969,00	5	2.953.409.567,00	10	5.741.430.560,00	100	87.5	0	0.1	
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		137.691.570,00	3	73.376.496,00	5	26.656.000,00	5	12.272.000,00	8	85.648.496,00	100	46	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya sumber daya yang mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan Terdapat aturan yang jelas tentang teknis pelaksanaan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Stakeholder pendukung kegiatan sangat terbatas khususnya untuk uji tar nikotin hanya satu di Jawa Timur dan terdapat pembatasan kuota																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penyusunan Kerangka Acuan Kerja yang disesuaikan dengan teknis pelaksanaan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Perencanaan pada tahun berikutnya dengan koordinasi lebih baik																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**100.00**	**85.18**			
													Predikat kinerja	**Rendah**	**Tinggi**			
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																
	401	**Sekretariat Daerah**																
	4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti**	**100**	**1,160,063,894.00**	**100.00**	**2,123,882,191.00**	**100**	**1,855,510,520.00**	**100**	**1,731,796,445.00**	**200**	**3,855,678,636.00**	**100**	**93.3**	**100**	**32.5**	**Bagian Pemerintahan**
	4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif**	**100**	**1,160,063,894.00**	**100.00**	**2,123,882,191.00**	**100**	**1,855,510,520.00**	**100**	**1,731,796,445.00**	**200**	**3,855,678,636.00**	**100**	**93.3**	**100**	**32.5**	**Bagian Pemerintahan**
	4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi**		**2,322,598,258.00**	**100.00**	**1,461,774,651.00**	**100**	**1,706,942,320.00**	**80**	**1,591,722,445.00**	**180**	**3,053,497,096.00**	**80**	**93.2**	**0.0**	**16.1**	
	4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi**		**2,322,598,258.00**	**165.00**	**1,461,774,651.00**	**100**	**1,706,942,320.00**	**100**	**1,591,722,445.00**	**265**	**3,053,497,096.00**	**100**	**93.2**	**0.0**	**16.1**	
	4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase lembaga kemasyarakatan keluraha**		**2,322,598,258.00**	**0.00**	**1,461,774,651.00**	**100**	**1,706,942,320.00**	**100**	**1,591,722,445.00**	**100**	**3,053,497,096.00**	**100**	**93.2**	**0.0**	**16.1**	
	4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi**		**2,322,598,258.00**	**105.00**	**1,461,774,651.00**	**100**	**1,706,942,320.00**	**100**	**1,591,722,445.00**	**205**	**3,053,497,096.00**	**100**	**93.2**	**0.0**	**16.1**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		252,794,200.00	10.00	252,270,734.00	10	315,512,500.00	10	305,340,244.00	20	557,610,978.00	100	96.8	0.0	22.4	
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		1,915,110,558.00	5.00	1,104,958,529.00	5	973,536,120.00	5	863,901,375.00	10	1,968,859,904.00	100	88.7	0.0	8.3	
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		154,693,500.00	4.00	104,545,388.00	4	417,893,700.00	4	422,480,826.00	8	527,026,214.00	100	101.1	0.0	102.6	
	4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti**		**77,311,500.00**	**0.00**	**662,107,540.00**	**83.33**	**148,568,200.00**	**137.5**	**140,074,000.00**	**137.5**	**802,181,540.00**	**165**	**94.3**	**0.0**	**2.9**	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		77,311,500.00	8.00	662,107,540.00	8	148,568,200.00	10	140,074,000.00	18	802,181,540.00	125	94.3	0.0	2.9	
	4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi**	**100**	**1,160,063,894.00**	**100.00**	**745,728,950.00**	**100**	**584,040,840.00**	**100.00**	**672,385,233.00**	**200**	**1,418,114,183.00**	**100**	**115.1**	**100**	**4.1**	**Bagian Hukum**
	4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana**		**660,140,200.00**	**100.00**	**745,728,950.00**	**100**	**584,040,840.00**	**100.00**	**672,385,233.00**	**200**	**1,418,114,183.00**	**100**	**115.1**	**0.0**	**7.3**	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		207,338,900.00	320.00	345,996,037.00	320	173,605,840.00	243	178,129,345.00	563	524,125,382.00	75.9	102.6	0.0	4.2	
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		271,810,700.00	4.00	193,032,166.00	4	207,425,900.00	3	290,623,982.00	7	483,656,148.00	75	140.1	0.0	3.3	
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		180,990,600.00	70.00	206,700,747.00	70	203,009,100.00	40	203,631,906.00	110	410,332,653.00	57.1	100.3	0.0	16.7	
	4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti**	**100**	**1,160,063,894.00**	**100.00**	**9,349,547,640.00**	**100**	**8,691,538,137.00**	**100**	**8,905,800,356.00**	**200**	**18,255,347,996.00**	**100**	**102.5**	**100**	**49**	**Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**
	4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100**	**1,160,063,894.00**	**100.00**	**9,349,547,640.00**	**100**	**8,691,538,137.00**	**100**	**8,905,800,356.00**	**200**	**18,255,347,996.00**	**100**	**102.5**	**100**	**49**	**Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**
	4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti**		**8,781,778,500.00**	**4.00**	**9,349,547,640.00**	**6**	**8,691,538,137.00**	**6**	**8,905,800,356.00**	**10**	**18,255,347,996.00**	**100**	**102.5**	**0.0**	**6.5**	
	4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti**		**8,781,778,500.00**	**6.00**	**9,349,547,640.00**	**4**	**8,691,538,137.00**	**4**	**8,905,800,356.00**	**10**	**18,255,347,996.00**	**100**	**102.5**	**0.0**	**6.5**	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		8,563,539,500.00	39.00	9,156,684,400.00	25	8,607,276,637.00	25	8,708,678,844.00	64	17,865,363,244.00	100	101.2	0.0	6.5	
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas		114,023,300.00	2.00	103,091,340.00	2	52,496,100.00	2	45,969,500.00	4	149,060,840.00	100	87.6	0.0	6.7	
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		104,215,700.00	2.00	89,771,900.00	2	31,765,400.00	2	151,152,012.00	4	240,923,912.00	100	475.8	0.0	1.8	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti**	**90**	**1,240,625,011.00**	**99.50**	**757,073,357.00**	**100**	**512,149,630.00**	**100**	**542,189,514.00**	**199.5**	**1,299,262,871.00**	**100**	**105.9**	**111.1**	**3.3**	**Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**
	4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti**		**651,438,400.00**	**6.00**	**536,335,593.00**	**6**	**312,149,630.00**	**6**	**365,625,455.00**	**12**	**901,961,048.00**	**100**	**117.1**	**0.0**	**6.1**	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		234,376,000.00	2.00	226,108,777.00	2	201,053,900.00	2	249,255,823.00	4	475,364,600.00	100	124	0.0	3.2	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		220,108,200.00	2.00	156,159,130.00	2	66,169,730.00	2	79,344,210.00	4	235,503,340.00	100	119.9	0.0	8.5	
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		196,954,200.00	4.00	154,067,686.00	4	44,926,000.00	4	37,025,422.00	8	191,093,108.00	100	82.4	0.0	6.9	
	4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti**		**202,817,662.00**	**2.00**	**220,737,764.00**	**2**	**200,000,000.00**	**2**	**176,564,059.00**	**4**	**397,301,823.00**	**100**	**88.3**	**0.0**	**0.8**	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		202,817,662.00	2.00	220,737,764.00	2	200,000,000.00	2	176,564,059.00	4	397,301,823.00	100	88.3	0.0	0.8	
	4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**SANGAT BAIK (90)**	**12,489,965,013.00**	**0.00**	**26,151,607,951.00**	**89**	**29,723,648,153.00**	**86.50**	**29,461,780,775.00**	**86.5**	**55,613,388,726.00**	**97.2**	**99.1**	**0.0**	**44**	**Bagian Umum**
	4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku**	**100**	**12,489,965,013.00**	**400.00**	**26,151,607,951.00**	**100**	**29,723,648,153.00**	**100.00**	**29,461,780,775.00**	**500**	**55,613,388,726.00**	**100**	**99.1**	**100**	**44**	**Bagian Umum**
	4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**11,158,300.00**	**100.00**	**11,158,200.00**	**100**	**72,626,275.00**	**100**	**65,626,100.00**	**200**	**76,784,300.00**	**100**	**90.4**	**0.0**	**0**	
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		11,158,300.00	1.00	11,158,200.00	1	72,626,275.00	1	65,626,100.00	2	76,784,300.00	100	90.4	0.0	0	
	4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**12,390,692,028.00**	**400.00**	**12,640,112,183.00**	**100**	**14,591,007,121.00**	**100.00**	**13,310,100,822.00**	**500**	**25,950,213,005.00**	**100**	**91.2**	**0.0**	**25.9**	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12,381,347,028.00	336.00	12,631,012,183.00	107	14,589,357,121.00	106.00	13,308,450,822.00	442	25,939,463,005.00	99.1	91.2	0.0	26	
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		9,345,000.00	4.00	9,100,000.00	4	1,650,000.00	4	1,650,000.00	8	10,750,000.00	100	100	0.0	0	
	4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar**		**9,450,000.00**	**400.00**	**9,275,000.00**	**100**	**4,400,000.00**	**100.00**	**4,400,000.00**	**500**	**13,675,000.00**	**100**	**100**	**0.0**	**26.2**	
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		5,210,000.00	2.00	5,035,000.00	2	2,200,000.00	2	2,200,000.00	4	7,235,000.00	100	100	0.0	26.4	
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4,240,000.00	2.00	4,240,000.00	2	2,200,000.00	2	2,200,000.00	4	6,440,000.00	100	100	0.0	25.9	
	4.01.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pendapatan Daerah**		**1,060,000.00**	**100.00**	**1,060,000.00**	**100**	**0**	**200**	**0**	**300**	**1,060,000.00**	**200**	**0**	**0.0**	**0.0**	
	4.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		1,060,000.00	1.00	1,060,000.00	1	0	1	0	2	1,060,000.00	100	0	0.0	0.0	
	4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**1,344,497,800.00**	**400.00**	**1,640,743,164.00**	**100**	**1,274,324,091.00**	**100.00**	**1,610,946,375.00**	**500**	**3,251,689,539.00**	**100**	**126.4**	**0.0**	**16.9**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		73,986,100.00	4.00	73,986,100.00	4	45,898,791.00	4	75,569,330.00	8	149,555,430.00	100	164.6	0.0	24.8	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		151,706,500.00	7.00	202,178,500.00	7	89,518,200.00	7	98,511,700.00	14	300,690,200.00	100	110	0.0	25.9	
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		40,479,500.00	3.00	37,990,500.00	3	30,922,300.00	3	23,166,875.00	6	61,157,375.00	100	74.9	0.0	0	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		552,096,400.00	267.00	689,651,400.00	170	695,650,000.00	170	946,444,998.00	437	1,636,096,398.00	100	136.1	0.0	13.2	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		74,642,300.00	5.00	73,404,575.00	2	26,893,800.00	1.00	26,531,300.00	6	99,935,875.00	50	98.7	0.0	1.2	
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		43,650,000.00	24.00	64,800,000.00	24	66,675,000.00	24	66,330,000.00	48	131,130,000.00	100	99.5	0.0	25.3	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		407,937,000.00	276.00	498,732,089.00	130	318,766,000.00	130	374,392,172.00	406	873,124,261.00	100	117.5	0.0	20.7	
	4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan**		**69,410,200.00**	**200.00**	**137,531,000.00**	**100**	**515,301,135.00**	**100.00**	**795,932,478.00**	**300**	**933,463,478.00**	**100**	**154.5**	**0.0**	**65.9**	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		69,410,200.00	2.00	137,531,000.00	10	515,301,135.00	10	795,932,478.00	12	933,463,478.00	100	154.5	0.0	65.9	
	4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**4,187,398,000.00**	**400.00**	**4,161,882,838.00**	**100**	**4,836,263,574.00**	**100.00**	**4,692,602,504.00**	**500**	**8,854,485,342.00**	**100**	**97**	**0.0**	**25.5**	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		437,000.00	1.00	437,000.00	1	441,000.00	1	440,000.00	2	877,000.00	100	99.8	0.0	0	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1,029,257,000.00	48.00	992,721,534.00	48	1,221,634,461.00	48	1,032,964,435.00	96	2,025,685,969.00	100	84.6	0.0	25.1	
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		30,600,000.00	7.00	29,914,500.00	6	30,000,553.00	6	199,054,500.00	13	228,969,000.00	100	663.5	0.0	0	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		3,127,104,000.00	13.00	3,138,809,804.00	13	3,584,187,560.00	13	3,460,143,569.00	26	6,598,953,373.00	100	96.5	0.0	25.9	
	4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar**		**1,456,487,100.00**	**400.00**	**1,623,951,886.00**	**100**	**2,164,213,566.00**	**100.00**	**2,199,953,040.00**	**500**	**3,823,904,926.00**	**100**	**101.7**	**0.0**	**8.5**	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		455,630,100.00	8.00	388,080,950.00	2	429,184,208.00	8	360,527,000.00	16	748,607,950.00	400	84	0.0	10.2	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		503,228,000.00	65.00	570,058,136.00	65	573,415,858.00	65	492,822,750.00	130	1,062,880,886.00	100	85.9	0.0	12.6	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		237,929,000.00	118.00	234,627,600.00	118	190,101,500.00	118	217,013,486.00	236	451,641,086.00	100	114.2	0.0	6.2	
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		259,700,000.00	4.00	431,185,200.00	3	971,512,000.00	3	1,129,589,804.00	7	1,560,775,004.00	100	116.3	0.0	0	
	4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**923,716,314.00**	**400.00**	**909,781,406.00**	**100**	**984,437,581.00**	**400**	**948,559,448.00**	**800**	**1,858,340,854.00**	**400**	**96.4**	**0.0**	**25.8**	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		178,952,314.00	2.00	171,230,731.00	2	239,715,981.00	8	205,362,594.00	10	376,593,325.00	400	85.7	0.0	20.5	
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		138,764,000.00	23.00	138,550,675.00	23	138,721,600.00	23	137,465,950.00	46	276,016,625.00	100	99.1	0.0	34.8	
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		6,000,000.00	0.00	0	2	6,000,000.00	2	5,730,904.00	2	5,730,904.00	100	95.5	0.0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		600,000,000.00	8.00	600,000,000.00	2	600,000,000.00	8	600,000,000.00	16	1,200,000,000.00	400	100	0.0	25.5	
	4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan**		**3,087,322,900.00**	**400.00**	**3,128,192,103.00**	**100**	**3,958,809,605.00**	**100.00**	**4,277,845,209.00**	**500**	**7,406,037,312.00**	**100**	**108.1**	**0.0**	**17.5**	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		1,456,623,800.00	16.00	1,570,172,555.00	4	2,316,504,840.00	4.00	2,505,758,324.00	20	4,075,930,879.00	100	108.2	0.0	16.9	
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		1,334,617,200.00	16.00	1,330,121,748.00	4	1,346,408,965.00	4.00	1,472,801,443.00	20	2,802,923,191.00	100	109.4	0.0	17.6	
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		296,081,900.00	12.00	227,897,800.00	12	295,895,800.00	12	299,285,442.00	24	527,183,242.00	100	101.1	0.0	19.2	
	4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP**		**1,639,220,200.00**	**320.00**	**1,887,920,171.00**	**80**	**1,322,265,205.00**	**8.00**	**1,555,814,799.00**	**328**	**3,443,734,970.00**	**10**	**117.7**	**0.0**	**2.4**	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		1,421,862,900.00	33.00	1,618,742,800.00	33	1,252,250,605.00	33	1,453,949,599.00	66	3,072,692,399.00	100	116.1	0.0	1.5	
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		63,384,000.00	400.00	59,724,371.00	400	1,700,000.00	400	1,500,000.00	800	61,224,371.00	100	88.2	0.0	0	
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		153,973,300.00	3055.00	209,453,000.00	3055	68,314,600.00	3055	100,365,200.00	6110	309,818,200.00	100	146.9	0.0	12.3	
	4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**SANGAT BAIK (90)**	**12,489,965,013.00**	**88.77**	**851,679,625.00**	**89**	**584,475,403.00**	**86.50**	**645,591,052.00**	**175.27**	**1,497,270,677.00**	**97.2**	**110.5**	**0.0**	**1.1**	**Bagian Organisasi**
	4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik**	**48.28**	**12,489,965,013.00**	**45.71**	**851,679,625.00**	**41.38**	**584,475,403.00**	**83.33**	**645,591,052.00**	**129.04**	**1,497,270,677.00**	**201.4**	**110.5**	**172.6**	**1.1**	**Bagian Organisasi**
	4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi**	**100**	**12,489,965,013.00**	**80.00**	**851,679,625.00**	**86.21**	**584,475,403.00**	**86.21**	**645,591,052.00**	**166.21**	**1,497,270,677.00**	**100**	**110.5**	**86.2**	**1.1**	**Bagian Organisasi**
	4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu**	**100.00**	**35,503,000.00**	**106.26**	**12,325,000.00**	**100**	**13,354,000.00**	**100**	**13,105,008.00**	**206.26**	**25,430,008.00**	**100**	**98.1**	**100**	**17.1**	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		16,942,500.00	11.00	8,627,500.00	10	7,854,000.00	10	7,630,008.00	21	16,257,508.00	100	97.1	0.0	11.7	
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		18,560,500.00	6.00	3,697,500.00	6	5,500,000.00	6	5,475,000.00	12	9,172,500.00	100	99.5	0.0	22.1	
	4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian**	**100.00**	**151,494,600.00**	**400.00**	**115,495,000.00**	**100**	**86,800,000.00**	**100.00**	**95,632,000.00**	**500**	**211,127,000.00**	**100**	**110.2**	**100**	**0**	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		69,182,000.00	6.00	33,600,000.00	1	26,250,000.00	1	25,970,000.00	7	59,570,000.00	100	98.9	0.0	0	
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		82,312,600.00	336.00	81,895,000.00	106	60,550,000.00	106.00	69,662,000.00	442	151,557,000.00	100	115	0.0	0	
	4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi**	**30.00**	**693,301,273.00**	**96.00**	**723,859,625.00**	**26**	**484,321,403.00**	**26**	**536,854,044.00**	**122**	**1,260,713,669.00**	**100**	**110.8**	**86.7**	**19.1**	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		182,005,100.00	6.00	245,487,243.00	6	119,404,900.00	6	158,910,734.00	12	404,397,977.00	100	133.1	0.0	23.4	
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		248,560,940.00	5.00	238,741,781.00	5	200,031,500.00	5	193,735,613.00	10	432,477,394.00	100	96.9	0.0	29.5	
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		232,479,900.00	3.00	210,406,817.00	3	141,577,003.00	3	171,082,697.00	6	381,489,514.00	100	120.8	0.0	5.4	
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		18,555,000.00	3.00	18,114,250.00	3	10,000,000.00	3	5,000,000.00	6	23,114,250.00	100	50	0.0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		11,700,333.00	2.00	11,109,534.00	2	13,308,000.00	2	8,125,000.00	4	19,234,534.00	100	61.1	0.0	34.2	
	4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti**	**90**	**1,240,625,011.00**	**100.00**	**696,665,395.00**	**100**	**490,987,689.00**	**100**	**476,923,063.00**	**200**	**1,173,588,458.00**	**100**	**97.1**	**111.1**	**6.8**	**Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa**
	4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement**	**100**	**1,240,625,011.00**	**65.00**	**696,665,395.00**	**76.67**	**490,987,689.00**	**76.67**	**476,923,063.00**	**141.67**	**1,173,588,458.00**	**100**	**97.1**	**76.7**	**6.8**	**Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa**
	4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti**		**159,849,100.00**	**10.00**	**154,014,440.00**	**10**	**110,356,400.00**	**10**	**108,634,121.00**	**20**	**262,648,561.00**	**100**	**98.4**	**0.0**	**7.9**	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		36,413,400.00	6.00	36,157,200.00	6	19,668,000.00	6	18,616,121.00	12	54,773,321.00	100	94.7	0.0	2.3	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		123,435,700.00	16.00	117,857,240.00	16	90,688,400.00	16	90,018,000.00	32	207,875,240.00	100	99.3	0.0	9.5	
	4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)**		**479,120,000.00**	**8.00**	**542,650,955.00**	**7**	**380,631,289.00**	**18**	**368,288,942.00**	**26**	**910,939,897.00**	**257.1**	**96.8**	**0.0**	**15**	
	4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**SKM Layanan UKPBJ**		**479,120,000.00**	**170.55**	**542,650,955.00**	**83**	**380,631,289.00**	**87.63**	**368,288,942.00**	**258.18**	**910,939,897.00**	**105.6**	**96.8**	**0.0**	**15**	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		275,471,400.00	37.00	260,288,320.00	80	196,697,175.00	10	209,074,962.00	47	469,363,282.00	12.5	106.3	0.0	14.8	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		59,892,000.00	2.00	195,888,400.00	2	89,307,614.00	2	88,072,500.00	4	283,960,900.00	100	98.6	0.0	36.7	
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		143,756,600.00	300.00	86,474,235.00	300	94,626,500.00	300	71,141,480.00	600	157,615,715.00	100	75.2	0.0	6.3	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**99.57**	**94.56**			
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	402	**Sekretariat DPRD**																
	4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**82**	**23.190.610.332,00**	**89**	**20.791.884.559,00**	**81.5**	**20.986.542.433,00**	**270.2**	**19.385.712.261,00**	**359.2**	**40.177.596.820,00**	**331.5**	**92.4**	**329.5**	**19.3**	**Sekretariat DPRD**
	4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**38.198.207,00**	**100**	**30.376.000,00**	**100**	**10.054.000,00**	**100**	**7.152.400,00**	**200**	**37.528.400,00**	**100**	**71.1**	**0**	**7.5**	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		19.332.227,00	14	13.968.800,00	7	6.202.800,00	7	4.712.400,00	21	18.681.200,00	100	76	0	11.9	
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		18.865.980,00	12	16.407.200,00	12	3.851.200,00	12	2.440.000,00	24	18.847.200,00	100	63.4	0	2.9	
	4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**3.286.307.391,00**	**100**	**2.845.504.174,00**	**100**	**3.547.895.381,00**	**300**	**2.855.520.491,00**	**400**	**5.701.024.665,00**	**300**	**80.5**	**0**	**20.7**	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		3.286.307.391,00	25	2.845.504.174,00	25	3.547.895.381,00	100	2.855.520.491,00	125	5.701.024.665,00	400	80.5	0	20.7	
	4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan adminsitrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**113.356.740,00**	**100**	**363.547.600,00**	**100**	**249.715.600,00**	**37**	**235.803.400,00**	**137**	**599.351.000,00**	**37**	**94.4**	**0**	**53.5**	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		21.498.750,00	0	44.990.000,00	25	21.000.000,00	25	20.900.000,00	25	65.890.000,00	100	99.5	0	0	
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		91.857.990,00	0	318.557.600,00	25	228.715.600,00	75	214.903.400,00	75	533.461.000,00	300	94	0	66.1	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Daerah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**1.014.190.350,00**	**100**	**551.355.144,00**	**100**	**645.678.800,00**	**100**	**620.968.449,00**	**200**	**1.172.323.593,00**	**100**	**96.2**	**0**	**14.8**	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		64.905.829,00	22	36.345.400,00	22	50.824.500,00	22	49.787.410,00	44	86.132.810,00	100	98	0	0	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		264.770.100,00	53	71.414.200,00	53	85.067.200,00	53	80.469.211,00	106	151.883.411,00	100	94.6	0	11.9	
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		122.712.770,00	37	31.271.000,00	39	54.161.700,00	39	51.594.713,00	76	82.865.713,00	100	95.3	0	3.7	
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		205.713.050,00	10	108.943.500,00	10	34.541.000,00	10	30.599.680,00	20	139.543.180,00	100	88.6	0	3.9	
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		20.280.000,00	48	20.875.400,00	48	20.000.000,00	48	19.238.400,00	96	40.113.800,00	100	96.2	0	15.8	
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		101.243.347,00	12	106.302.000,00	12	238.495.400,00	12	231.142.200,00	24	337.444.200,00	100	96.9	0	92.7	
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		234.565.254,00	12	176.203.644,00	12	162.589.000,00	12	158.136.835,00	24	334.340.479,00	100	97.3	0	3.8	
	4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan**		**2.224.145.414,00**	**100**	**2.259.955.000,00**	**100**	**1.347.273.000,00**	**100**	**1.307.701.450,00**	**200**	**3.567.656.450,00**	**100**	**97.1**	**0**	**0**	
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1.943.719.914,00	2	1.342.730.000,00	3	550.000.000,00	1	543.839.500,00	3	1.886.569.500,00	33.3	98.9	0	0	
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0,00	0	0,00	25	430.427.100,00	25	409.889.700,00	25	409.889.700,00	100	95.2	0	0	
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		280.425.500,00	24	917.225.000,00	24	366.845.900,00	24	353.972.250,00	48	1.271.197.250,00	100	96.5	0	0	
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0,00	0	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
	4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**1.124.065.734,00**	**100**	**1.031.997.604,00**	**100**	**1.245.064.724,00**	**100**	**1.194.797.368,00**	**200**	**2.226.794.972,00**	**100**	**96**	**0**	**28.1**	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		240.651.384,00	12	186.814.180,00	12	171.604.224,00	12	154.829.067,00	24	341.643.247,00	100	90.2	0	16.6	
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		883.414.350,00	12	845.183.424,00	12	1.073.460.500,00	12	1.039.968.301,00	24	1.885.151.725,00	100	96.9	0	31.2	
	4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar**		**787.920.467,00**	**100**	**1.209.642.069,00**	**100**	**943.092.100,00**	**100**	**846.353.903,00**	**200**	**2.055.995.972,00**	**100**	**89.7**	**0**	**9.7**	
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0,00	0	0,00	29	348.715.100,00	29	283.554.248,00	29	283.554.248,00	100	81.3	0	0	
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		104.565.179,00	89	179.525.400,00	89	182.417.000,00	89	171.899.100,00	178	351.424.500,00	100	94.2	0	47.7	
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		265.564.688,00	2	690.665.521,00	13	366.960.000,00	13	346.319.305,00	15	1.036.984.826,00	100	94.4	0	0	
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0,00	2	29.999.240,00	76	45.000.000,00	76	44.581.250,00	78	74.580.490,00	100	99.1	0	0	
	4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**14.292.352.118,00**	**400**	**12.499.506.968,00**	**100**	**12.997.768.828,00**	**148**	**12.317.414.800,00**	**548**	**24.816.921.768,00**	**148**	**94.8**	**0**	**22.2**	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		13.872.153.855,00	25	12.148.666.968,00	25	12.721.821.328,00	100	12.092.226.800,00	125	24.240.893.768,00	400	95.1	0	22.7	
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		345.198.263,00	14	313.000.000,00	14	200.947.500,00	14	193.750.000,00	28	506.750.000,00	100	96.4	0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		75.000.000,00	0	37.840.000,00	25	75.000.000,00	25	31.438.000,00	25	69.278.000,00	100	41.9	0	41.9	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Program penunjang urusan pemerintahan kab/kota telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan target																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Sistem layanan dan prosedur masih lambat sehingga pada kegiatan yang akan datang akan di perbaiki sesuai dengan regulasi yang ada																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : beberapa kegiatan maupun layanan akan menjadi perhatian sehingga dalam memberikan layanan masyarakat akan memperoleh kepuasan																		
	4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan**	**100**	**4.702.077.756,00**	**100**	**11.260.450.659,00**	**100**	**10.673.516.510,00**	**100**	**9.007.520.568,00**	**200**	**20.267.971.227,00**	**100**	**84.4**	**100**	**32.6**	**Sekretariat DPRD**
	4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100**	**4.702.077.756,00**	**100**	**11.260.450.659,00**	**100**	**10.673.516.510,00**	**100**	**9.007.520.568,00**	**200**	**20.267.971.227,00**	**100**	**84.4**	**100**	**32.6**	**Sekretariat DPRD**
	4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar**		**1.446.183.000,00**	**100**	**1.969.794.717,00**	**100**	**2.176.395.400,00**	**100**	**1.617.810.733,00**	**200**	**3.587.605.450,00**	**100**	**74.3**	**0**	**10.7**	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		161.845.200,00	5	120.629.059,00	5	26.464.200,00	5	24.392.500,00	10	145.021.559,00	100	92.2	0	0	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		1.075.457.800,00	10	1.465.411.080,00	10	1.904.681.200,00	10	1.354.608.633,00	20	2.820.019.713,00	100	71.1	0	14.3	
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		70.600.000,00	1	191.140.000,00	1	75.000.000,00	1	72.400.000,00	2	263.540.000,00	100	96.5	0	0	
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		50.000.000,00	0	0,00	2	138.000.000,00	2	135.554.600,00	2	135.554.600,00	100	98.2	0	0	
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		88.280.000,00	2	192.614.578,00	2	32.250.000,00	2	30.855.000,00	4	223.469.578,00	100	95.7	0	0	
	4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar**		**1.764.804.200,00**	**100**	**1.302.614.398,00**	**100**	**1.043.955.700,00**	**100**	**945.232.274,00**	**200**	**2.247.846.672,00**	**100**	**90.5**	**0**	**0**	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		274.550.400,00	2	282.385.786,00	2	52.007.700,00	2	50.372.700,00	4	332.758.486,00	100	96.9	0	0	
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		358.942.900,00	2	20.911.000,00	2	80.796.300,00	2	79.378.410,00	4	100.289.410,00	100	98.2	0	0	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		372.055.900,00	2	286.739.978,00	2	553.641.600,00	2	466.307.964,00	4	753.047.942,00	100	84.2	0	0	
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		380.905.300,00	2	240.536.200,00	2	120.874.700,00	2	116.790.240,00	4	357.326.440,00	100	96.6	0	0	
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		378.349.700,00	2	472.041.434,00	2	236.635.400,00	2	232.382.960,00	4	704.424.394,00	100	98.2	0	0	
	4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar**		**457.104.800,00**	**100**	**542.160.065,00**	**100**	**402.081.200,00**	**92.86**	**352.451.520,00**	**192.86**	**894.611.585,00**	**92.9**	**87.7**	**0**	**29.9**	
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		127.738.000,00	12	125.028.000,00	12	201.346.000,00	12	166.750.000,00	24	291.778.000,00	100	82.8	0	11.8	
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		329.366.800,00	2	417.132.065,00	2	200.735.200,00	2	185.701.520,00	4	602.833.585,00	100	92.5	0	37	
	4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar**		**2.481.145.700,00**	**100**	**2.254.025.527,00**	**100**	**2.325.197.454,00**	**100**	**1.708.291.783,00**	**200**	**3.962.317.310,00**	**100**	**73.5**	**0**	**12.6**	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		1.109.068.000,00	6	968.700.494,00	6	1.350.322.654,00	6	795.980.283,00	12	1.764.680.777,00	100	58.9	0	16.5	
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		209.000.000,00	7	53.900.000,00	7	97.200.000,00	7	70.900.000,00	14	124.800.000,00	100	72.9	0	7.5	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		228.000.000,00	4	242.500.000,00	4	282.000.000,00	16	276.000.000,00	20	518.500.000,00	400	97.9	0	20.2	
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		68.923.500,00	1	49.728.000,00	1	60.209.000,00	1	58.209.000,00	2	107.937.000,00	100	96.7	0	0	
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		548.956.200,00	12	654.862.250,00	12	535.465.800,00	12	507.202.500,00	24	1.162.064.750,00	100	94.7	0	12.2	
	4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar**		**1.054.364.700,00**	**100**	**755.978.800,00**	**100**	**1.362.281.900,00**	**100**	**1.121.907.650,00**	**200**	**1.877.886.450,00**	**100**	**82.4**	**0**	**39.2**	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		1.054.364.700,00	50	755.978.800,00	75	1.362.281.900,00	75	1.121.907.650,00	125	1.877.886.450,00	100	82.4	0	39.2	
	4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar**		**2.715.000.000,00**	**100**	**4.435.877.152,00**	**100**	**3.363.604.856,00**	**100**	**3.261.826.608,00**	**200**	**7.697.703.760,00**	**100**	**97**	**0**	**19**	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		2.640.000.000,00	12	4.336.643.152,00	12	3.313.604.856,00	12	3.213.652.608,00	24	7.550.295.760,00	100	97	0	19.5	
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		75.000.000,00	1	99.234.000,00	1	50.000.000,00	1	48.174.000,00	2	147.408.000,00	100	96.3	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan fasilitasi program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD telah terlaksana sesuai dengan target																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Beberapa kegiatan fasilitasi program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pelaksanaannya tidak sesuai dengan agenda dalam rapat pimpinan dan Banmus DPRD tetapi tetap dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan serta agenda DPRD dan Pemerintah Kota Blitar																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Fasilitasi program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD akan mengikuti agenda DPRD dan Pemerintah Kota Blitar																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Realisasi kegiatan akan di sesuaikan dengan target serta agenda DPRD																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**100.00**	**89.78**			
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																
	501	**Perencanaan**																
	5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**82.05**	**6.578.541.245,00**	**87.6**	**5.258.971.632,00**	**87.82**	**5.455.179.276,00**	**89.11**	**5.300.505.621,00**	**176.73**	**10.559.477.253,00**	**101.5**	**97.2**	**108.6**	**17**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
	5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**	**100**	**30.618.200,00**	**100**	**24.833.000,00**	**100**	**14.096.600,00**	**100**	**9.026.938,00**	**200**	**33.859.938,00**	**100**	**64**	**100**	**0**	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36	14.307.500,00	9	12.932.900,00	9	7.300.400,00	9	5.266.838,00	18	18.199.738,00	100	72.1	25	0	
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28	16.310.700,00	7	11.900.100,00	7	6.796.200,00	7	3.760.100,00	14	15.660.200,00	100	55.3	25	0	
	5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**	**100**	**3.823.274.755,00**	**100**	**4.172.471.872,00**	**100**	**4.448.393.400,00**	**100**	**4.313.528.942,00**	**200**	**8.486.000.814,00**	**100**	**97**	**100**	**27.2**	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	3.818.058.355,00	30	4.167.255.472,00	32	4.446.102.000,00	30	4.311.237.542,00	60	8.478.493.014,00	93.8	97	103.4	27.3	
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	5.216.400,00	3	5.216.400,00	3	2.291.400,00	3	2.291.400,00	6	7.507.800,00	100	100	23.1	0	
	5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**	**100**	**162.537.445,00**	**100**	**161.836.500,00**	**100**	**93.504.400,00**	**100**	**90.388.300,00**	**200**	**252.224.800,00**	**100**	**96.7**	**100**	**0**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8	67.452.345,00	2	67.452.000,00	1	11.232.000,00	1	11.232.000,00	3	78.684.000,00	100	100	12.5	0	
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35	95.085.100,00	0	94.384.500,00	35	82.272.400,00	35	79.156.300,00	35	173.540.800,00	100	96.2	100	0	
	5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**	**100**	**491.243.004,00**	**100**	**490.843.519,00**	**100**	**391.220.900,00**	**100**	**388.056.455,00**	**200**	**878.899.974,00**	**100**	**99.2**	**100**	**7.5**	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	777.900,00	1	777.850,00	1	3.209.000,00	1	3.148.600,00	2	3.926.450,00	100	98.1	25	0	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	31.639.000,00	4	31.567.900,00	4	25.944.100,00	4	24.864.300,00	8	56.432.200,00	100	95.8	25	0	
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8	8.261.800,00	2	8.261.800,00	2	11.272.200,00	2	11.269.800,00	4	19.531.600,00	100	100	25	0	
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	50.509.400,00	12	50.509.400,00	12	45.914.000,00	12	45.909.400,00	24	96.418.800,00	100	100	25	1.8	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	22.383.500,00	1	22.195.900,00	1	22.126.300,00	1	22.126.300,00	2	44.322.200,00	100	100	25	25.1	
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240	13.500.000,00	60	13.500.000,00	60	13.500.000,00	60	13.500.000,00	120	27.000.000,00	100	100	25	17.8	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	480	339.171.404,00	120	339.056.669,00	85	259.755.300,00	85	257.778.055,00	205	596.834.724,00	100	99.2	17.7	8.2	
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	25.000.000,00	1	24.974.000,00	1	9.500.000,00	1	9.460.000,00	2	34.434.000,00	100	99.6	25	0	
	5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan**	**100**	**117.885.500,00**	**100**	**111.945.000,00**	**100**	**180.791.300,00**	**100**	**176.713.383,00**	**200**	**288.658.383,00**	**100**	**97.7**	**100**	**0**	
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	0,00	0	0,00	3	16.117.200,00	3	16.090.000,00	3	16.090.000,00	100	99.8	50	0	
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80	117.885.500,00	20	111.945.000,00	19	164.674.100,00	19	160.623.383,00	39	272.568.383,00	100	97.5	23.8	0	
	5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**	**100**	**138.108.000,00**	**100**	**99.494.112,00**	**100**	**108.399.876,00**	**100**	**107.151.253,00**	**200**	**206.645.365,00**	**100**	**98.8**	**100**	**18.2**	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	3.600.000,00	12	0,00	12	1.800.000,00	12	1.192.290,00	24	1.192.290,00	100	66.2	25	4.7	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52	134.508.000,00	13	99.494.112,00	13	106.599.876,00	13	105.958.963,00	26	205.453.075,00	100	99.4	25	18.5	
	5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**	**100**	**203.770.700,00**	**100**	**197.547.629,00**	**100**	**218.772.800,00**	**100**	**215.640.350,00**	**200**	**413.187.979,00**	**100**	**98.6**	**100**	**6.4**	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	102.764.700,00	3	97.351.610,00	5	107.299.800,00	5	106.181.950,00	8	203.533.560,00	100	99	41.7	12.7	
	5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8	16.680.000,00	2	16.574.000,00	15	9.552.500,00	15	9.376.500,00	17	25.950.500,00	100	98.2	187.5	0	
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	30.818.000,00	20	30.818.000,00	23	51.744.500,00	23	51.105.900,00	43	81.923.900,00	100	98.8	28.8	0	
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	53.508.000,00	1	52.804.019,00	1	50.176.000,00	1	48.976.000,00	2	101.780.019,00	100	97.6	25	0	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Capaian tinggi pada Triwulan III didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain: 1. Biaya/Tarif (96,87) ?€“ Pelayanan Bappeda dinilai transparan dan tidak membebani masyarakat, karena seluruh layanan tidak dipungut biaya. 2. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan (95,25) ?€“ Respon cepat dan tindak lanjut yang baik terhadap pengaduan masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan publik. Secara umum, kualitas pelayanan aparatur dan kejelasan produk layanan menjadi kekuatan utama dalam membangun kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bappeda.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Meskipun capaian IKM tergolong sangat baik, terdapat beberapa unsur yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, yaitu: 1. Sarana dan Prasarana (85,25) ?€“ Nilai terendah di antara unsur lainnya. Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan kenyamanan dan kelengkapan fasilitas pelayanan seperti ruang tunggu, area publik yang ramah disabilitas, serta pemeliharaan peralatan kerja dan jaringan digital. 2. Waktu Penyelesaian Layanan (92,87) ?€“ Sebagian responden menilai waktu penyelesaian pelayanan masih dapat dipercepat melalui optimalisasi proses kerja dan pemanfaatan teknologi informasi. 3. Persyaratan (96,12) ?€“ Disarankan penyederhanaan serta sosialisasi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Untuk menjaga dan meningkatkan nilai IKM pada Triwulan IV, beberapa langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain: 1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, melalui penambahan fasilitas ruang tunggu yang nyaman, penyediaan area ramah disabilitas, dan pemeliharaan peralatan kerja. 2. Optimalisasi waktu pelayanan, dengan melakukan evaluasi SOP pelayanan serta memperluas penerapan sistem pelayanan berbasis digital. 3. Peningkatan sosialisasi dan simplifikasi prosedur, melalui penyebaran informasi persyaratan layanan secara luas melalui website, media sosial, dan media informasi lainnya.

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Sebagai bentuk keberlanjutan perbaikan mutu pelayanan, hasil evaluasi IKM ini menjadi dasar bagi penyusunan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2026, antara lain: 1. Program Penguatan Pelayanan Publik Berbasis Digital, melalui pengembangan sistem layanan terpadu online dan digitalisasi dokumen perencanaan. 2. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kinerja Anaratur, dengan pelatihan kompetensi teknis dan pelayanan prima bagi anaratur Banneda. 3. Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pendukung Pelayanan, guna mencintakan lingkungan pelayanan yang nyaman, aman, dan inklusif. 4. Program Peningkatan Transparansi																	
	5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Capaian Kinerja Tujuan RPJMD**	**91.3**	**904.766.372,00**	**97.8**	**1.374.054.080,00**	**99**	**842.259.539,00**	**125.1**	**775.259.710,00**	**222.97**	**2.149.313.790,00**	**126.4**	**92**	**137.1**	**22.5**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
	5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Capaian Sasaran RPJMD**	**95.58**	**904.766.372,00**	**96.1**	**1.374.054.080,00**	**97.2**	**842.259.539,00**	**101.4**	**775.259.710,00**	**197.44**	**2.149.313.790,00**	**104.3**	**92**	**106.1**	**22.5**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
	5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun Sesuai ketentuan Regulasi**	**100**	**946.669.800,00**	**100**	**1.001.665.850,00**	**100**	**628.955.039,00**	**100**	**562.805.610,00**	**200**	**1.564.471.460,00**	**100**	**89.5**	**100**	**18.5**	
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	10	478.672.500,00	2	587.045.050,00	2	330.727.200,00	2	278.275.610,00	4	865.320.660,00	100	84.1	20	13.2	
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	7	91.191.400,00	1	89.904.100,00	2	74.329.839,00	2	74.309.700,00	3	164.213.800,00	100	100	28.6	42.9	
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5	273.896.000,00	1	255.540.400,00	2	142.330.500,00	2	141.922.100,00	3	397.462.500,00	100	99.7	40	26	
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	11	102.909.900,00	3	69.176.300,00	3	81.567.500,00	3	68.298.200,00	6	137.474.500,00	100	83.7	27.3	1.7	
	5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase data dan informasi Pembangunan daerah yang ditindaklanjuti**	**100**	**56.949.700,00**	**100**	**55.726.330,00**	**100**	**8.851.700,00**	**100**	**8.801.500,00**	**200**	**64.527.830,00**	**100**	**99.4**	**100**	**0**	
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	4	56.949.700,00	1	55.726.330,00	1	8.851.700,00	1	8.801.500,00	2	64.527.830,00	100	99.4	25	0	
	5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Hasil pengendalian yang Ditindaklanjuti**	**100**	**300.025.000,00**	**100**	**316.661.900,00**	**100**	**204.452.800,00**	**100**	**203.652.600,00**	**200**	**520.314.500,00**	**100**	**99.6**	**100**	**9.4**	
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	12	261.961.900,00	3	278.654.900,00	3	176.393.800,00	3	175.611.800,00	6	454.266.700,00	100	99.6	25	10.8	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	38.063.100,00	1	38.007.000,00	1	28.059.000,00	1	28.040.800,00	2	66.047.800,00	100	99.9	25	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Tujuan dan indikator kinerja ditetapkan secara spesifik dan terukur - Target realistis dan sesuai dengan kapasitas organisasi/tim																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Indikator kinerja terkadang dihitung dengan data yang tidak sama atau dihitung dengan formulasi yang berbeda sehingga capaian kinerja sulit dianalisis.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memastikan bahwa target kinerja terukur dan dapat dievaluasi setiap tahunnya																		
	5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Capaian Program Perangkat Daerah**	**84**	**559.639.200,00**	**100**	**728.629.300,00**	**96**	**660.679.900,00**	**92.35**	**603.069.853,00**	**192.35**	**1.331.699.153,00**	**96.2**	**91.3**	**109.9**	**28.3**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang selaras terhadap RPJMD (Tujuan, Program, Indikator) dan RKPD (Tujuan, Program Kegiatan, dan Indikator)**	**100**	**559.639.200,00**	**98.9**	**728.629.300,00**	**100**	**660.679.900,00**	**100**	**603.069.853,00**	**198.93**	**1.331.699.153,00**	**100**	**91.3**	**100**	**28.3**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
	5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100**	**340.881.300,00**	**100**	**327.386.900,00**	**100**	**318.928.200,00**	**100**	**306.380.323,00**	**200**	**633.767.223,00**	**100**	**96.1**	**100**	**23.3**	
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	16	176.826.900,00	4	166.323.400,00	4	209.851.800,00	4	198.648.323,00	8	364.971.723,00	100	94.7	25	26.8	
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	16	164.054.400,00	4	161.063.500,00	4	109.076.400,00	4	107.732.000,00	8	268.795.500,00	100	98.8	25	19.5	
	5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100**	**161.759.200,00**	**100**	**156.177.650,00**	**100**	**69.763.900,00**	**100**	**50.596.500,00**	**200**	**206.774.150,00**	**100**	**72.5**	**100**	**8**	
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	16	161.759.200,00	4	156.177.650,00	4	69.763.900,00	4	50.596.500,00	8	206.774.150,00	100	72.5	25	8	
	5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100**	**254.677.700,00**	**100**	**245.064.750,00**	**100**	**271.987.800,00**	**100**	**246.093.030,00**	**200**	**491.157.780,00**	**100**	**90.5**	**100**	**25.9**	
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	16	254.677.700,00	4	245.064.750,00	4	271.987.800,00	4	246.093.030,00	8	491.157.780,00	100	90.5	25	25.9	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Perencanaan program yang tepat dan terarah - Dukungan anggaran yang memadai dan tepat waktu - Monitoring dan evaluasi yang berkala																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Adanya indikator kinerja yang mengalami kondisi ketika target terlalu tinggi atau rendah sehingga tidak sesuai dengan kondisi riil, serta adanya perubahan perencanaan di tengah tahun. - Monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara rutin atau tindak lanjut hasil evaluasi belum maksimal.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : - Melakukan reviu perencanaan agar program dan indikator kinerja lebih terukur, realistis, dan selaras dengan RPJMD, Renstra, serta prioritas daerah.																		
												Rata-rata capaian kinerja (%)		**98.20**	**95.99**			
												Predikat kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	502	**Keuangan**																
	5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**84**	**11.320.333.628,00**	**85.8**	**11.890.273.892,00**	**84.04**	**13.128.582.128,80**	**87.76**	**11.283.533.531,00**	**173.51**	**23.173.807.423,00**	**104.4**	**85.9**	**104.5**	**31.4**	**Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah**
	5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**12.536.000,00**	**100**	**12.162.000,00**	**100**	**9.270.400,00**	**100**	**9.140.750,00**	**200**	**21.302.750,00**	**100**	**98.6**	**0**	**0**	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.849.000,00	8	5.612.000,00	8	4.510.000,00	8	4.506.000,00	16	10.118.000,00	100	99.9	0	0	
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6.687.000,00	10	6.550.000,00	10	4.760.400,00	10	4.634.750,00	20	11.184.750,00	100	97.4	0	0	
	5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**8.746.658.095,00**	**100**	**9.356.972.156,00**	**100**	**10.973.947.663,80**	**100**	**9.271.549.565,00**	**200**	**18.628.521.721,00**	**100**	**84.5**	**0**	**34.2**	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63	8.742.748.595,00	60	9.353.091.156,00	882	10.971.209.663,80	882	9.268.895.565,00	942	18.621.986.721,00	100	84.5	1400	34.2	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		3.909.500,00	18	3.881.000,00	18	2.738.000,00	18	2.654.000,00	36	6.535.000,00	100	96.9	0	0	
	5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian PD yang sesuai standar**		**135.983.500,00**	**100**	**178.107.300,00**	**100**	**177.524.445,00**	**100**	**138.288.700,00**	**200**	**316.396.000,00**	**100**	**77.9**	**0**	**0**	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		52.148.200,00	3	51.080.000,00	3	68.924.800,00	3	66.340.000,00	6	117.420.000,00	100	96.2	0	0	
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		83.835.300,00	73	127.027.300,00	189	108.599.645,00	189	71.948.700,00	262	198.976.000,00	100	66.3	0	0	
	5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**684.413.400,00**	**100**	**1.119.897.254,00**	**100**	**753.483.900,00**	**100**	**688.314.108,00**	**200**	**1.808.211.362,00**	**100**	**91.4**	**0**	**4.7**	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		13.357.400,00	1	13.303.500,00	1	10.014.100,00	1	10.000.785,00	2	23.304.285,00	100	99.9	0	26.2	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		36.569.800,00	3	33.886.500,00	4	37.269.600,00	4	36.386.650,00	7	70.273.150,00	100	97.6	0	0	
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		11.007.300,00	3	10.915.000,00	3	8.782.000,00	3	8.663.000,00	6	19.578.000,00	100	98.6	0	0	
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		51.634.200,00	24	47.594.000,00	1	45.505.000,00	1	45.004.989,00	25	92.598.989,00	100	98.9	0	0	
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		300.316.700,00	3	677.534.500,00	3	458.923.200,00	3	398.400.268,00	6	1.075.934.768,00	100	86.8	0	0	
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		11.880.000,00	36	9.600.000,00	36	12.600.000,00	36	9.600.000,00	72	19.200.000,00	100	76.2	0	0	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		249.727.000,00	105	319.523.754,00	60	175.015.000,00	108	174.883.416,00	213	494.407.170,00	180	99.9	0	11.6	
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		9.921.000,00	12	7.540.000,00	12	5.375.000,00	12	5.375.000,00	24	12.915.000,00	100	100	0	0	
	5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang tersedia sesuai kebutuhan**		**94.485.700,00**	**100**	**503.560.000,00**	**100**	**618.838.936,00**	**100**	**614.011.384,00**	**200**	**1.117.571.384,00**	**100**	**99.2**	**0**	**426.8**	
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		7.000.000,00	75	301.215.000,00	10	21.336.400,00	10	21.312.000,00	85	322.527.000,00	100	99.9	0	0	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		87.485.700,00	28	202.345.000,00	54	597.502.536,00	53	592.699.384,00	81	795.044.384,00	98.1	99.2	0	460.9	
	5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**431.237.500,00**	**100**	**370.310.512,00**	**100**	**392.549.000,00**	**100**	**368.401.562,00**	**200**	**738.712.074,00**	**100**	**93.8**	**0**	**21.3**	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		93.660.000,00	24	71.828.176,00	24	77.060.000,00	24	69.673.484,00	48	141.501.660,00	100	90.4	0	18.1	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		337.577.500,00	13	298.482.336,00	13	315.489.000,00	13	298.728.078,00	26	597.210.414,00	100	94.7	0	22.2	
	5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**174.415.084,00**	**100**	**349.264.670,00**	**100**	**202.967.784,00**	**100**	**193.827.462,00**	**200**	**543.092.132,00**	**100**	**95.5**	**0**	**21.9**	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		110.853.584,00	55	83.779.670,00	55	99.831.284,00	54	97.643.962,00	109	181.423.632,00	98.2	97.8	0	18.2	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		43.561.500,00	50	47.840.000,00	50	42.376.500,00	50	37.263.500,00	100	85.103.500,00	100	87.9	0	41.1	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		20.000.000,00	1	217.645.000,00	1	60.760.000,00	1	58.920.000,00	2	276.565.000,00	100	97	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : SDM dan Sarpras yang tersedia																		

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum optimalnya penerapan standar pelayanan, sop dan partisipasi masyarakat untuk perbaikan pelayanan BPKAD																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Menerapkan Standar Pelayanan, SOP dan melibatkan masyarakat untuk perbaikan Pelayanan BPKAD																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mengutamakan dukungan sarpras/anggaran untuk perbaikan kinerja pelayanan BPKAD																		
	5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase perangkat daerah yang penyerapan anggarannya di atas 85 %**	**100**	**9.783.567.250,00**	**100**	**4.067.801.846,00**	**98**	**11.712.948.766,00**	**89.65**	**4.121.920.033,00**	**189.65**	**8.189.721.879,00**	**91.5**	**35.2**	**89.7**	**7.9**	**Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah**
	5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu**	**100**	**9.783.567.250,00**	**100**	**4.067.801.846,00**	**100**	**11.712.948.766,00**	**94.12**	**4.121.920.033,00**	**194.12**	**8.189.721.879,00**	**94.1**	**35.2**	**94.1**	**7.9**	**Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah**
	5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase tertib perencanaan keuangan daerah**	**100**	**9.783.567.250,00**	**96.6**	**4.067.801.846,00**	**100**	**11.712.948.766,00**	**58.62**	**4.121.920.033,00**	**155.22**	**8.189.721.879,00**	**58.6**	**35.2**	**58.6**	**7.9**	**Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah**
	5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase rencana anggaran daerah yang telah dikoordinasikan dan disusun**		**1.071.842.180,00**	**100**	**1.047.297.750,00**	**100**	**962.434.870,00**	**100**	**933.327.600,00**	**200**	**1.980.625.350,00**	**100**	**97**	**0**	**16.4**	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		68.832.000,00	2	68.832.000,00	2	48.428.700,00	2	48.362.000,00	4	117.194.000,00	100	99.9	0	0	
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		80.038.600,00	2	78.683.500,00	2	48.028.700,00	2	42.138.600,00	4	120.822.100,00	100	87.7	0	0	
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		38.420.600,00	68	74.526.000,00	68	67.538.186,00	68	66.830.500,00	136	141.356.500,00	100	99	0	0	
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		39.095.180,00	68	35.375.250,00	68	29.620.900,00	68	29.378.000,00	136	64.753.250,00	100	99.2	0	0	
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi		41.930.800,00	68	41.594.600,00	68	27.339.500,00	68	26.524.000,00	136	68.118.600,00	100	97	0	63.3	
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		71.780.300,00	68	67.642.500,00	68	42.404.000,00	68	42.278.000,00	136	109.920.500,00	100	99.7	0	0	
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		548.662.400,00	2	521.290.800,00	2	548.018.484,00	2	527.092.000,00	4	1.048.382.800,00	100	96.2	0	27.2	
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		147.774.300,00	2	145.663.100,00	2	132.334.000,00	2	132.142.500,00	4	277.805.600,00	100	99.9	0	0	
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		15.520.000,00	1	3.225.000,00	1	8.122.400,00	1	8.082.000,00	2	11.307.000,00	100	99.5	0	0	
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		19.788.000,00	80	10.465.000,00	100	10.600.000,00	100	10.500.000,00	180	20.965.000,00	100	99.1	0	0	
	5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Jumlah perangkat daerah yang tertib penatausahaan keuangan**		**363.478.400,00**	**68**	**352.943.800,00**	**68**	**238.575.200,00**	**68**	**214.037.400,00**	**136**	**566.981.200,00**	**100**	**89.7**	**0**	**6.6**	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		109.403.600,00	225	113.650.400,00	334	85.444.300,00	334	78.046.568,00	559	191.696.968,00	100	91.3	0	0	
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		10.270.600,00	204	18.577.600,00	274	9.838.800,00	274	8.817.208,00	478	27.394.808,00	100	89.6	0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		37.697.400,00	20	32.417.800,00	25	10.372.800,00	25	9.109.548,00	45	41.527.348,00	100	87.8	0	0	
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan P		25.236.200,00	329	13.778.000,00	293	25.210.400,00	293	18.641.776,00	622	32.419.776,00	100	73.9	0	30.4	
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		65.997.600,00	68	64.860.000,00	68	55.145.600,00	68	49.173.000,00	136	114.033.000,00	100	89.2	0	16.7	
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		42.304.000,00	5	40.796.100,00	3	17.582.500,00	3	15.268.500,00	8	56.064.600,00	100	86.8	0	13	
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		72.569.000,00	150	68.863.900,00	100	34.980.800,00	100	34.980.800,00	250	103.844.700,00	100	100	0	0	
	5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi**		**508.304.600,00**	**100**	**499.581.561,00**	**100**	**368.802.710,00**	**100**	**347.453.870,00**	**200**	**847.035.431,00**	**100**	**94.2**	**0**	**14.2**	
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		118.677.000,00	16	117.583.674,00	16	77.319.310,00	16	76.674.046,00	32	194.257.720,00	100	99.2	0	28.9	
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		49.373.500,00	14	49.266.380,00	14	26.580.200,00	14	25.998.899,00	28	75.265.279,00	100	97.8	0	0.6	
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		1.217.800,00	1	1.096.240,00	1	494.300,00	1	451.000,00	2	1.547.240,00	100	91.2	0	37	
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		133.260.400,00	2	132.796.249,00	2	109.738.800,00	2	104.224.605,00	4	237.020.854,00	100	95	0	14.4	
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		6.331.500,00	1	4.959.740,00	1	324.200,00	1	286.000,00	2	5.245.740,00	100	88.2	0	4.5	
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		936.900,00	1	821.240,00	1	270.500,00	1	248.000,00	2	1.069.240,00	100	91.7	0	26.5	
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		110.206.900,00	1	105.320.362,00	1	76.259.100,00	1	69.382.320,00	2	174.702.682,00	100	91	0	6.3	
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		50.873.300,00	1	50.711.240,00	1	50.872.200,00	1	50.229.000,00	2	100.940.240,00	100	98.7	0	0.5	
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		37.427.300,00	100	37.026.436,00	150	26.944.100,00	150	19.960.000,00	250	56.986.436,00	100	74.1	0	27	
	5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak**		**4.000.000.000,00**	**100**	**2.078.175.435,00**	**100**	**10.110.975.986,00**	**100**	**2.600.101.163,00**	**200**	**4.678.276.598,00**	**100**	**25.7**	**0**	**12.6**	
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		4.000.000.000,00	12	2.078.175.435,00	12	10.110.975.986,00	12	2.600.101.163,00	24	4.678.276.598,00	100	25.7	0	12.6	
	5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Jumlah perangkat daerah yang tertib perencanaan dan penatausahaan keuangan**		**98.395.000,00**	**68**	**89.803.300,00**	**68**	**32.160.000,00**	**68**	**27.000.000,00**	**136**	**116.803.300,00**	**100**	**84**	**0**	**0**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah		48.395.000,00	4	45.000.000,00	4	31.080.000,00	4	27.000.000,00	8	72.000.000,00	100	86.9	0	0	
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		50.000.000,00	1	44.803.300,00	1	1.080.000,00	1	0,00	2	44.803.300,00	100	0	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : SDM dan Sarpras yang tersedia																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk Tahun 2026 belum tepat waktu dikarenakan adanya perubahan kepemimpinan baik pusat maupun daerah																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan peyusunan dokumen keuangan daerah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan mulai dari penganggaran, penatausahaan dan laporan keuangan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melaksanakan peyusunan dokumen keuangan daerah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan mulai dari penganggaran, penatausahaan dan laporan keuangan																		
	5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase aset daerah yang diinventarisir sesuai regulasi**	**50**	**2.273.357.520,00**	**40**	**1.734.310.760,00**	**45**	**5.867.765.212,44**	**45**	**5.228.442.739,00**	**85**	**6.962.753.499,00**	**100**	**89.1**	**90**	**98.2**	**Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah**
	5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah aset daerah yang difasilitasi tindak lanjut penatausahaannya/penyelesaian permasalahannya**		**1.341.101.029,00**	**100**	**1.734.310.760,00**	**100**	**5.867.765.212,44**	**100**	**5.228.442.739,00**	**200**	**6.962.753.499,00**	**100**	**89.1**	**0**	**166.5**	
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		16.588.000,00	2	10.300.000,00	2	10.328.000,00	2	10.325.500,00	4	20.625.500,00	100	100	0	62.2	
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		203.178.222,00	1	157.084.700,00	1	235.118.172,00	1	153.911.340,00	2	310.996.040,00	100	65.5	0	0	
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		480.657.007,00	2	611.589.900,00	2	557.092.328,44	2	532.331.900,00	4	1.143.921.800,00	100	95.6	0	8.1	
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		50.000.000,00	1	49.950.000,00	1	0,00	0	0,00	1	49.950.000,00	0	0	0	0	
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		100.000.000,00	1	146.647.500,00	1	80.000.000,00	2	49.650.300,00	3	196.297.800,00	200	62.1	0	0	
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		166.479.000,00	2	423.763.360,00	2	4.598.440.652,00	2	4.214.642.999,00	4	4.638.406.359,00	100	91.7	0	1215.6	
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		53.000.000,00	29	70.560.000,00	29	78.950.000,00	29	55.496.000,00	58	126.056.000,00	100	70.3	0	27.4	
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		206.660.000,00	2	242.071.300,00	2	194.140.700,00	2	191.196.700,00	4	433.268.000,00	100	98.5	0	70.3	
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		64.538.800,00	150	22.344.000,00	150	113.695.360,00	150	20.888.000,00	300	43.232.000,00	100	18.4	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : SDM dan Sarpras yang tersedia																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum tertibnya OPD dalam mengelola BMD yang menjadi tanggungjawabnya																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengimplementasikan penilaian pengelolaan BMD pada setiap OPD dengan menggunakan Indeks Pengelolaan Aset																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mengimplementasikan penilaian pengelolaan BMD pada setiap OPD dengan menggunakan Indeks Pengelolaan Aset																		
	5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah**	**35.45**	**2.887.517.892,00**	**57.6**	**2.379.815.855,00**	**34.45**	**2.533.637.075,00**	**49.59**	**2.235.673.008,00**	**107.2**	**4.615.488.863,00**	**143.9**	**88.2**	**139.9**	**11.3**	**Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah**
	5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase peningkatan target pendapatan pajak daerah**	**35.45**	**2.887.517.892,00**	**40.7**	**2.379.815.855,00**	**34.45**	**2.533.637.075,00**	**91.96**	**2.235.673.008,00**	**132.63**	**4.615.488.863,00**	**266.9**	**88.2**	**259.4**	**11.3**	**Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah**
	5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah dokumen penetapan pajak**		**2.470.948.637,00**	**1**	**2.379.815.855,00**	**1**	**2.533.637.075,00**	**1**	**2.235.673.008,00**	**2**	**4.615.488.863,00**	**100**	**88.2**	**0**	**13.2**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase realisasi pajak daerah**		**2.470.948.637,00**	**106**	**2.379.815.855,00**	**90**	**2.533.637.075,00**	**82.06**	**2.235.673.008,00**	**188.49**	**4.615.488.863,00**	**91.2**	**88.2**	**0**	**13.2**	
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		217.096.121,00	2	207.366.700,00	2	167.785.140,00	3	143.459.600,00	5	350.826.300,00	150	85.5	0	6.6	
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		68.186.730,00	0	17.760.000,00	1	17.876.000,00	1	12.201.000,00	1	29.961.000,00	100	68.3	0	0	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		125.000.000,00	9	124.614.024,00	9	252.934.318,00	9	210.597.988,00	18	335.212.012,00	100	83.3	0	7.6	
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		300.000.000,00	9	249.950.000,00	9	271.548.300,00	9	270.939.550,00	18	520.889.550,00	100	99.8	0	47.6	
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		362.382.342,00	50000	362.069.705,00	50000	347.539.000,00	53018	346.771.151,00	103018	708.840.856,00	106	99.8	0	30.3	
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		149.560.000,00	215	131.752.844,00	700	54.184.900,00	609	51.364.070,00	824	183.116.914,00	87	94.8	0	1.5	
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		1.202.010.514,00	49095	1.199.297.582,00	4100	1.173.005.017,00	6626	1.109.613.649,00	55721	2.308.911.231,00	161.6	94.6	0	3.8	
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		46.712.930,00	4	87.005.000,00	4	248.764.400,00	4	90.726.000,00	8	177.731.000,00	100	36.5	0	6.7	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : SDM, Sarpras yang tersedia dan Perubahan Regulasi penambahan pajak baru yaitu Opsen																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah, belum optimalnya penggalian PAD yang berdasarkan potensi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Optimalisasi PAD dengan melakukan ekstensifikasi, intensifikasi, inovasi tata kelola PAD dan meningkatkan basis data potensi berdasarkan kajian potensi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Optimalisasi PAD dengan melakukan ekstensifikasi, intensifikasi, inovasi tata kelola PAD dan meningkatkan basis data potensi berdasarkan kajian potensi																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**88.94**	**68.80**			
													Predikat kinerja	**Tinggi**	**Sedang**			
	503	**Kepegawaian**																
	5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**84**	**7.395.425.440,00**	**88.1**	**8.705.610.630,00**	**86.75**	**8.022.959.282,00**	**93.53**	**8.665.952.073,00**	**181.58**	**17.371.562.703,00**	**107.8**	**108**	**111.3**	**41.9**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**	**100**	**10.032.500,00**	**100**	**9.486.600,00**	**100**	**8.865.500,00**	**100**	**8.518.358,00**	**200**	**18.004.958,00**	**100**	**96.1**	**100**	**13.7**	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7.068.000,00	10	6.524.000,00	10	5.901.000,00	10	5.791.108,00	20	12.315.108,00	100	98.1	0	19.5	
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2.964.500,00	8	2.962.600,00	8	2.964.500,00	8	2.727.250,00	16	5.689.850,00	100	92	0	0	
	5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**	**100**	**8.357.549.689,00**	**100**	**7.605.597.307,00**	**100**	**7.341.302.282,00**	**100**	**7.967.300.203,00**	**200**	**15.572.897.510,00**	**100**	**108.5**	**100**	**35.6**	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		8.355.549.689,00	104	7.603.597.307,00	45	7.339.502.282,00	50	7.965.500.203,00	154	15.569.097.510,00	111.1	108.5	0	35.6	
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	24	3.800.000,00	100	100	0	0	
	5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**	**100**	**250.798.100,00**	**100**	**223.616.000,00**	**100**	**59.612.300,00**	**100**	**58.176.385,00**	**200**	**281.792.385,00**	**100**	**97.6**	**100**	**3.4**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		50.000.000,00	3	49.680.000,00	1	6.300.000,00	1	4.721.385,00	4	54.401.385,00	100	74.9	0	0	
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		78.709.100,00	40	59.458.000,00	40	50.112.300,00	40	47.495.000,00	80	106.953.000,00	100	94.8	0	3.2	
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		122.089.000,00	45	114.478.000,00	40	3.200.000,00	40	5.960.000,00	85	120.438.000,00	100	186.3	0	4.9	
	5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase keseterdiaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**	**100**	**450.075.950,00**	**100**	**509.360.558,00**	**100**	**273.278.600,00**	**100**	**283.770.662,00**	**200**	**793.131.220,00**	**100**	**103.8**	**100**	**13.7**	
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		30.994.100,00	3	24.562.425,00	3	23.822.900,00	3	29.766.478,00	6	54.328.903,00	100	124.9	0	39.5	
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		6.428.000,00	1	6.138.600,00	1	5.983.800,00	1	5.699.983,00	2	11.838.583,00	100	95.3	0	0	
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		50.406.000,00	36	43.893.500,00	12	40.400.000,00	12	39.513.000,00	48	83.406.500,00	100	97.8	0	3.9	
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		42.987.600,00	2	33.487.875,00	2	14.400.000,00	2	14.328.014,00	4	47.815.889,00	100	99.5	0	0	
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		8.553.000,00	36	6.600.000,00	24	3.350.000,00	24	3.660.000,00	60	10.260.000,00	100	109.3	0	21.7	
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		299.997.250,00	60	386.110.158,00	48	184.891.900,00	48	190.412.467,00	108	576.522.625,00	100	103	0	15.2	
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		10.710.000,00	1	8.568.000,00	1	430.000,00	1	390.720,00	2	8.958.720,00	100	90.9	0	0	
	5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan**	**100**	**28.976.660,00**	**100**	**170.400.000,00**	**100**	**166.651.200,00**	**100**	**158.297.100,00**	**200**	**328.697.100,00**	**100**	**95**	**100**	**0**	
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0,00	0	0,00	5	78.161.000,00	5	74.159.100,00	5	74.159.100,00	100	94.9	0	0	
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		28.976.660,00	13	170.400.000,00	6	88.490.200,00	6	84.138.000,00	19	254.538.000,00	100	95.1	0	0	
	5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**	**100**	**68.209.000,00**	**100**	**66.341.008,00**	**100**	**106.134.000,00**	**100**	**117.763.717,00**	**200**	**184.104.725,00**	**100**	**111**	**100**	**53.9**	
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		67.254.000,00	12	66.341.008,00	12	106.134.000,00	12	117.763.717,00	24	184.104.725,00	100	111	0	54.6	
	5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**110.612.600,00**	**100**	**120.809.157,00**	**100**	**67.115.400,00**	**100**	**72.125.648,00**	**200**	**192.934.805,00**	**100**	**107.5**	**0**	**15.9**	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		74.862.600,00	10	85.424.157,00	10	46.708.400,00	10	51.950.754,00	20	137.374.911,00	100	111.2	0	23.5	
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		35.750.000,00	80	35.385.000,00	62	20.407.000,00	62	20.174.894,00	142	55.559.894,00	100	98.9	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1.terlaksananya kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan 2. Telah dilaksanakannya Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai ketentuan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh penerima layanan. dikarenakan beberapa produk layanan harus terproses sampai dengan BKN, Kemendagri dan atau KemenPANRB																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan evaluasi terhadap penilaian Indeks Pelayanan terutama untuk unsur- unsur terendah penilaian																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : lebih sering untuk komunikasi kepada instansi vertikal dalam rangka meningkatkan percepatan waktu pelayanan																		
	5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80**	**91.58**	**10.282.789.026,00**	**84**	**1.759.856.375,00**	**93.06**	**2.849.991.100,00**	**99.79**	**2.458.181.149,00**	**183.79**	**4.218.037.524,00**	**107.2**	**86.3**	**109**	**1.9**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi**	**74**	**10.282.789.026,00**	**80.3**	**1.759.856.375,00**	**48.21**	**2.849.991.100,00**	**61.56**	**2.458.181.149,00**	**141.9**	**4.218.037.524,00**	**127.7**	**86.3**	**83.2**	**1.9**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan**	**78**	**10.282.789.026,00**	**102**	**1.759.856.375,00**	**67**	**2.849.991.100,00**	**75.48**	**2.458.181.149,00**	**177.13**	**4.218.037.524,00**	**112.7**	**86.3**	**96.8**	**1.9**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi**	**50.5**	**10.282.789.026,00**	**37.4**	**1.759.856.375,00**	**91.38**	**2.849.991.100,00**	**100**	**2.458.181.149,00**	**137.37**	**4.218.037.524,00**	**109.4**	**86.3**	**198**	**1.9**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi**	**94.66**	**10.282.789.026,00**	**98.9**	**1.759.856.375,00**	**48.74**	**2.849.991.100,00**	**43.13**	**2.458.181.149,00**	**142.03**	**4.218.037.524,00**	**88.5**	**86.3**	**45.6**	**1.9**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase data kepegawaian yang valid**	**51.01**	**10.282.789.026,00**	**87.1**	**1.759.856.375,00**	**73**	**2.849.991.100,00**	**73.89**	**2.458.181.149,00**	**160.99**	**4.218.037.524,00**	**101.2**	**86.3**	**144.9**	**1.9**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase layanan pensiun tepat waktu**	**100**	**1.260.289.400,00**	**100**	**1.281.372.900,00**	**100**	**869.570.600,00**	**100**	**889.353.537,00**	**200**	**2.170.726.437,00**	**100**	**102.3**	**100**	**12.7**	
	5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase data kepegawaian yang dikelola**	**20**	**1.260.289.400,00**	**100**	**1.281.372.900,00**	**95**	**869.570.600,00**	**95**	**889.353.537,00**	**195**	**2.170.726.437,00**	**100**	**102.3**	**475**	**12.7**	
	5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase usulan Formasi ASN yang disetujui**	**95**	**1.260.289.400,00**	**85.4**	**1.281.372.900,00**	**20**	**869.570.600,00**	**20**	**889.353.537,00**	**105.4**	**2.170.726.437,00**	**100**	**102.3**	**21.1**	**12.7**	
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		551.574.400,00	1	573.340.900,00	2	212.096.700,00	2	202.869.682,00	3	776.210.582,00	100	95.6	0	11.9	
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		35.681.900,00	12	17.135.900,00	12	14.978.000,00	12	13.889.405,00	24	31.025.305,00	100	92.7	0	0	
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	2	800.000.000,00	100	100	0	0	
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		208.336.900,00	1	232.974.000,00	12	242.495.900,00	12	272.594.450,00	13	505.568.450,00	100	112.4	0	45.1	
	5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase ASN yang ditempatkan**	**70**	**413.340.900,00**	**76.1**	**276.203.775,00**	**70**	**523.210.700,00**	**70**	**142.185.040,00**	**146.14**	**418.388.815,00**	**100**	**27.2**	**100**	**3**	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		413.340.900,00	4	276.203.775,00	4	523.210.700,00	4	142.185.040,00	8	418.388.815,00	100	27.2	0	3	
	5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase talent pool ASN yang dikelola**		**185.172.500,00**	**19.8**	**147.300.800,00**	**10**	**135.735.500,00**	**10**	**129.562.000,00**	**29.79**	**276.862.800,00**	**100**	**95.5**	**0**	**8.4**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center		185.172.500,00	12	147.300.800,00	12	135.735.500,00	12	129.562.000,00	24	276.862.800,00	100	95.5	0	8.4	
	5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase SKP yang diverifikasi**		**89.680.700,00**	**99.1**	**54.978.900,00**	**94.56**	**1.321.474.300,00**	**99.32**	**1.297.080.572,00**	**198.4**	**1.352.059.472,00**	**105**	**98.2**	**0**	**6.8**	
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		38.610.500,00	2	19.206.200,00	2	25.328.700,00	2	23.130.058,00	4	42.336.258,00	100	91.3	0	10	
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		7.531.200,00	214	2.331.900,00	200	1.271.442.100,00	200	1.249.079.565,00	414	1.251.411.465,00	100	98.2	0	0	
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		9.312.600,00	12	5.457.000,00	12	24.703.500,00	12	24.870.949,00	24	30.327.949,00	100	100.7	0	23.6	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : -Usulan Formasi dari Pemerintah Kota Blitar ke KEMENPAN RB dikabulkan semua -Kota Blitar memiliki 915 PPPK dan data cenderung statis / tidak ada perubahan -Penilaian kinerja pegawai telah memenuhi ekspektasi atas target yang akan dicapai. Pegawai dengan predikat kinerja Baik dan Sangat Baik sebanyak 98% dari																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : -Masih adanya sisa formasi CPNS sebnyak 7 dan PPPK yang belum terisi 1 karena tidak ada pelamar -Beberapa komponen data memerlukan approval dari BKN -Adanya penambahan jumlah PPPK yang mendapat SPMT di bulan Desember dan masih terkendala dalam pengisian pelaporan kinerja pada aplikasi E-Kinerja BKN																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengingat belanja Pegawai Pemkot Blitar sudah diatas 35%, dan sudah terpenuhinya bnyak formasi di tahun 2024. Pemeirntah Kota Blitar tidak mengusulkan usulan Formasi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan perenecanaan kinerja yang baik dan melaksanakan evaluasi kinerja secara berkelanjutan																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**97.60**	**91.70**			
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	504	**Pendidikan dan Pelatihan**																
	5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah**	**96.85**	**180.223.877,00**	**293**	**1.006.553.605,00**	**96.8**	**2.306.465.425,00**	**100**	**2.238.164.764,00**	**393.27**	**3.244.718.369,00**	**103.3**	**97**	**103.3**	**121.8**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi**		**180.223.877,00**	**0**	**1.006.553.605,00**	**48.21**	**2.306.465.425,00**	**61.56**	**2.238.164.764,00**	**61.56**	**3.244.718.369,00**	**127.7**	**97**	**0**	**121.8**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi**		**180.223.877,00**	**0**	**1.006.553.605,00**	**48.74**	**2.306.465.425,00**	**43.13**	**2.238.164.764,00**	**43.13**	**3.244.718.369,00**	**88.5**	**97**	**0**	**121.8**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan sosio kultural**		**629.851.192,00**	**2.08**	**553.354.945,00**	**1.2**	**589.222.500,00**	**1.2**	**629.452.212,00**	**3.28**	**1.182.807.157,00**	**100**	**106.8**	**0**	**34.8**	
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun		14.418.600,00	12	8.550.400,00	12	2.504.500,00	12	2.130.150,00	24	10.680.550,00	100	85.1	0	0	
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		520.804.992,00	2715	496.037.045,00	1050	562.172.200,00	1639	603.716.884,00	4354	1.099.753.929,00	156.1	107.4	0	42.1	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan U		94.627.600,00	313	48.767.500,00	250	24.545.800,00	250	23.605.178,00	563	72.372.678,00	100	96.2	0	0	
	5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN yang mengikuti diklat Kompetensi Manajerial dan Fungsional**		**537.623.200,00**	**19.6**	**453.198.660,00**	**12**	**1.717.242.925,00**	**12**	**1.608.712.552,00**	**31.59**	**2.061.911.212,00**	**100**	**93.7**	**0**	**0**	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		537.623.200,00	5	453.198.660,00	5	1.717.242.925,00	5	1.608.712.552,00	10	2.061.911.212,00	100	93.7	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Peningkatan kompetensi dilaksanakan dengan metode distance learning (daring), sehingga lebih banyak peserta, lebih mudah dan efisien																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih adanya ASN yang belum mengikuti distance learning yang difasilitasi BKPSDM karena gagap teknologi atau kurangnya motivasi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Metode distance learning dilanjutkan dan diinformasikan (diserbarluaskan) untuk memberikan akses yang lebih luas kepada ASN, tidak hanya melalui SMEDI tetapi juga melalui e-learning BKN, LAN RI, BPSDM Provinsi Jatim																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Membangun koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga Pembina JF agar menyelenggarakan uji sertifikasi kompetensi berbiaya APBN dikarenakan efisiensi anggaran pada tahun berikutnya, serta koordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki tenaga fungsional agar mudah melakukan fasilitasi dan																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**94.40**	**92.28**			
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	505	**Penelitian dan Pengembangan**																
	5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan daerah**	**100**	**970.890.700,00**	**100**	**673.135.728,00**	**100**	**711.726.200,00**	**100**	**707.932.873,00**	**200**	**1.381.068.601,00**	**100**	**99.5**	**100**	**5.4**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
	5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase pemanfaatan hasil litbang pemerintahan, sosial dan kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah**	**100**	**231.151.700,00**	**100**	**184.852.250,00**	**100**	**95.737.900,00**	**100**	**93.484.770,00**	**200**	**278.337.020,00**	**100**	**97.6**	**100**	**0.6**	
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	12	231.151.700,00	3	184.852.250,00	2	95.737.900,00	2	93.484.770,00	5	278.337.020,00	100	97.6	16.7	0.6	
	5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase pemanfaatan hasil litbang Ekonomi dan Pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah**	**100**	**238.104.200,00**	**100**	**198.724.600,00**	**100**	**175.054.600,00**	**100**	**174.488.091,00**	**200**	**373.212.691,00**	**100**	**99.7**	**100**	**0**	
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	6	119.347.700,00	1	94.062.325,00	2	175.054.600,00	2	174.488.091,00	3	268.550.416,00	100	99.7	33.3	0	
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	6	118.756.500,00	2	104.662.275,00	0	0,00	0	0,00	2	104.662.275,00	0	0	0	0	
	5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase Hasil Fasilitasi Inovasi yang Ditindaklanjuti**	**100**	**259.073.900,00**	**100**	**289.558.878,00**	**100**	**440.933.700,00**	**100**	**439.960.012,00**	**200**	**729.518.890,00**	**100**	**99.8**	**100**	**19.8**	
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4	54.983.100,00	1	61.391.250,00	1	46.506.100,00	1	46.465.083,00	2	107.856.333,00	100	99.9	25	23.2	
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	8	146.578.500,00	2	186.927.128,00	2	121.323.500,00	2	120.950.044,00	4	307.877.172,00	100	99.7	25	25.1	
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	4	25.920.700,00	1	15.209.000,00	1	248.309.500,00	1	247.797.674,00	2	263.006.674,00	100	99.8	25	6.8	
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	4	31.591.600,00	1	26.031.500,00	1	24.794.600,00	1	24.747.211,00	2	50.778.711,00	100	99.8	25	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Keselarasan Tema Litbang dengan Dokumen Perencanaan Topik litbang disusun berdasarkan isu strategis RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD yaitu adanya roadmap kelitbangan daerah (RIPJPID) yang sejalan dengan prioritas pembangunan. 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi yaitu tersedianya database atau knowledge																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Rendahnya Keterkaitan Litbang dengan Kebutuhan Perencanaan sehingga topik penelitian tidak selaras dengan isu strategis RPJMD, RKPD, atau Renstra OPD dan hasil litbang bersifat akademis, kurang aplikatif untuk kebijakan. 2. Kurangnya Diseminasi dan Akses Informasi sehingga hasil litbang tidak terdokumentasi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Peningkatan Diseminasi dan Akses Hasil Litbang 1. Menyusun policy brief atau ringkasan eksekutif hasil litbang. 2. Mengembangkan basis data/dokumentasi digital hasil litbang yang mudah diakses.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Litbang																		

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100.00	99.47			
													Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
	601	Inspektorat																
	6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat**	**85.5**	**8.425.121.200,00**	**87.3**	**7.512.680.098,00**	**85**	**7.821.452.866,00**	**93.69**	**8.579.813.560,00**	**181.03**	**16.092.493.658,00**	**110.2**	**109.7**	**109.6**	**30.7**	**Inspektorat Daerah**
	6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart**	**100**	**53.414.100,00**	**100**	**48.394.000,00**	**100**	**35.373.100,00**	**100**	**35.179.200,00**	**199.99**	**83.573.200,00**	**100**	**99.5**	**100**	**0**	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36	6.357.700,00	9	6.043.000,00	9	7.040.600,00	9	6.985.000,00	18	13.028.000,00	100	99.2	25	0	
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28	47.056.400,00	7	42.351.000,00	7	28.332.500,00	7	28.194.200,00	14	70.545.200,00	100	99.5	25	0	
	6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah perangkat daerah yang sesuai standar**	**100**	**5.971.286.706,00**	**102**	**5.686.360.524,00**	**100**	**6.264.525.172,00**	**207.7**	**6.982.456.972,00**	**309.23**	**12.668.817.496,00**	**207.7**	**111.5**	**207.7**	**38.9**	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	5.965.456.706,00	34	5.680.640.524,00	41	6.260.321.372,00	41	6.978.730.972,00	75	12.659.371.496,00	100	111.5	110.8	38.9	
	6.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	250	1.590.000,00	275	1.560.000,00	250	1.650.000,00	250	1.620.000,00	525	3.180.000,00	100	98.2	100	0	
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	4.240.000,00	18	4.160.000,00	18	2.553.800,00	18	2.106.000,00	36	6.266.000,00	100	82.5	25	0	
	6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**	**100**	**422.486.000,00**	**82.9**	**581.921.380,00**	**100**	**457.811.300,00**	**216.7**	**451.447.973,00**	**299.56**	**1.033.369.353,00**	**216.7**	**98.6**	**216.7**	**0**	
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8	49.739.800,00	2	48.022.300,00	2	15.045.000,00	1	14.951.700,00	3	62.974.000,00	50	99.4	12.5	0	
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47	148.309.200,00	46	147.539.900,00	47	149.211.700,00	92	142.957.500,00	138	290.497.400,00	195.7	95.8	195.7	0	
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37	224.437.000,00	34	386.359.180,00	37	293.554.600,00	77	293.538.773,00	111	679.897.953,00	208.1	100	208.1	0	
	6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standar**	**100**	**297.839.500,00**	**111**	**387.848.320,00**	**100**	**292.299.800,00**	**119.6**	**302.416.150,00**	**230.31**	**690.264.470,00**	**119.6**	**103.5**	**119.6**	**22.1**	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4.489.000,00	1	4.489.000,00	1	4.763.200,00	1	4.763.200,00	2	9.252.200,00	100	100	25	0	
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	27.679.100,00	4	26.654.500,00	3	26.591.400,00	3	26.373.200,00	7	53.027.700,00	100	99.2	25	0	
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	20.126.500,00	4	19.509.200,00	3	25.775.700,00	4	27.892.000,00	8	47.401.200,00	133.3	108.2	33.3	22.9	
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	19.842.800,00	12	18.402.800,00	12	24.864.000,00	12	26.759.500,00	24	45.162.300,00	100	107.6	25	19.9	
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	15.936.000,00	3	15.925.000,00	1	14.874.000,00	2	18.781.000,00	5	34.706.000,00	200	126.3	50	52.3	
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96	2.700.000,00	12	2.700.000,00	12	2.700.000,00	12	2.700.000,00	24	5.400.000,00	100	100	12.5	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66	207.066.100,00	25	300.167.820,00	20	192.731.500,00	20	195.147.250,00	45	495.315.070,00	100	101.3	30.3	23.6	
	6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan**		**13.977.900,00**	**100**	**69.410.000,00**	**100**	**52.615.600,00**	**150**	**69.233.320,00**	**250**	**138.643.320,00**	**150**	**131.6**	**0**	**249**	
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0,00	0	0,00	5	17.409.300,00	5	34.810.000,00	5	34.810.000,00	100	200	0	0	
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84	13.977.900,00	5	69.410.000,00	1	35.206.300,00	2	34.423.320,00	7	103.833.320,00	200	97.8	2.4	0	
	6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan sesuai standar**		**412.774.950,00**	**100**	**374.534.029,00**	**100**	**400.389.519,00**	**100**	**435.074.777,00**	**200**	**809.608.806,00**	**100**	**108.7**	**0**	**32.2**	
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	103.689.600,00	24	68.546.685,00	36	78.687.519,00	36	70.467.243,00	60	139.013.928,00	100	89.6	25	11.5	
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52	309.085.350,00	13	305.987.344,00	13	321.702.000,00	13	364.607.534,00	26	670.594.878,00	100	113.3	25	39.1	
	6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**	**100**	**162.981.300,00**	**130**	**364.211.845,00**	**100**	**318.438.375,00**	**122.4**	**304.005.168,00**	**252.69**	**668.217.013,00**	**122.4**	**95.5**	**122.4**	**17.6**	
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	81.528.800,00	18	91.395.745,00	18	89.750.000,00	18	93.287.168,00	36	184.682.913,00	100	103.9	105.9	16.8	
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	3.681.000,00	3	3.530.000,00	6	3.681.000,00	6	3.680.000,00	9	7.210.000,00	100	100	30	0	
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	32.971.500,00	58	82.769.500,00	58	42.415.000,00	59	49.918.000,00	117	132.687.500,00	101.7	117.7	73.8	45.5	
	6.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8	25.000.000,00	1	49.950.000,00	1	100.000.000,00	1	99.000.000,00	2	148.950.000,00	100	99	12.5	0	
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	9.800.000,00	2	126.566.600,00	1	72.592.375,00	1	48.120.000,00	3	174.686.600,00	100	66.3	12.5	0	
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	10.000.000,00	2	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	3	20.000.000,00	100	100	25	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Dokumen perencanaan perangkat daerah disusun dan diselesaikan sesuai dengan tahapan serta jadwal yang telah ditetapkan. 2. Terjalin koordinasi yang efektif dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan proses pengadaan.																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelaksanaan kegiatan kurang memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) yang telah disusun sebelumnya																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan penguatan koordinasi internal dan eksternal serta meningkatkan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar penyusunan dokumen perencanaan, proses pengadaan, dan realisasi anggaran sesuai dengan jadwal serta Rencana Anggaran Kas (RAK) yang telah ditetapkan.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan Perencanaan																		
	6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase TLHP Internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2**	**92.5**	**3.425.334.000,00**	**92.1**	**1.945.832.569,00**	**82.5**	**2.560.183.880,00**	**93.01**	**2.460.299.091,00**	**185.08**	**4.406.131.660,00**	**112.7**	**96.1**	**100.6**	**19.7**	**Inspektorat Daerah**
	6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase TLHP Internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1**	**85**	**3.425.334.000,00**	**83.4**	**1.945.832.569,00**	**82.5**	**2.560.183.880,00**	**93.01**	**2.460.299.091,00**	**176.43**	**4.406.131.660,00**	**112.7**	**96.1**	**109.4**	**19.7**	**Inspektorat Daerah**
	6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase TLHP Eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1**	**80**	**3.425.334.000,00**	**100**	**1.945.832.569,00**	**90**	**2.560.183.880,00**	**94.66**	**2.460.299.091,00**	**194.66**	**4.406.131.660,00**	**105.2**	**96.1**	**118.3**	**19.7**	**Inspektorat Daerah**
	6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase TLHP Eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2**	**92.5**	**3.425.334.000,00**	**92.1**	**1.945.832.569,00**	**90**	**2.560.183.880,00**	**94.66**	**2.460.299.091,00**	**186.73**	**4.406.131.660,00**	**105.2**	**96.1**	**102.3**	**19.7**	**Inspektorat Daerah**
	6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)**	**92.5**	**3.425.334.000,00**	**83.4**	**1.945.832.569,00**	**100**	**2.560.183.880,00**	**100**	**2.460.299.091,00**	**183.42**	**4.406.131.660,00**	**100**	**96.1**	**108.1**	**19.7**	**Inspektorat Daerah**
	6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya**	**10**	**1.978.581.900,00**	**10**	**1.927.593.069,00**	**10**	**2.481.479.880,00**	**13**	**2.398.354.074,00**	**23**	**4.325.947.143,00**	**130**	**96.7**	**130**	**34.2**	
	6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu**	**90**	**1.978.581.900,00**	**92.1**	**1.927.593.069,00**	**70**	**2.481.479.880,00**	**70**	**2.398.354.074,00**	**162.07**	**4.325.947.143,00**	**100**	**96.7**	**77.8**	**34.2**	
	6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti**	**70**	**1.978.581.900,00**	**100**	**1.927.593.069,00**	**87.5**	**2.481.479.880,00**	**339.1**	**2.398.354.074,00**	**439.09**	**4.325.947.143,00**	**387.5**	**96.7**	**484.4**	**34.2**	
	6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti**	**87.5**	**1.978.581.900,00**	**83.4**	**1.927.593.069,00**	**90**	**2.481.479.880,00**	**375.5**	**2.398.354.074,00**	**458.91**	**4.325.947.143,00**	**417.2**	**96.7**	**429.1**	**34.2**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	120	88.693.700,00	50	88.348.500,00	30	586.568.080,00	81	584.995.514,00	131	673.344.014,00	270	99.7	67.5	558.7	
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	160	55.426.800,00	42	54.995.990,00	40	55.426.800,00	42	54.132.500,00	84	109.128.490,00	105	97.7	26.3	0	
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	120	209.442.600,00	81	209.025.000,00	30	145.673.900,00	103	138.088.500,00	184	347.113.500,00	343.3	94.8	85.8	36.3	
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	200	88.484.500,00	82	87.426.000,00	50	88.484.500,00	60	107.500.532,00	142	194.926.532,00	120	121.5	30	45.6	
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	12	1.526.409.300,00	4	1.467.437.379,00	3	1.589.591.600,00	3	1.498.094.628,00	7	2.965.532.007,00	100	94.2	25	4.2	
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	16	10.125.000,00	4	20.360.200,00	4	15.735.000,00	4	15.542.400,00	8	35.902.600,00	100	98.8	25	0	
	6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)**	**100**	**27.369.100,00**	**113**	**18.239.500,00**	**100**	**78.704.000,00**	**62.5**	**61.945.017,00**	**175**	**80.184.517,00**	**62.5**	**78.7**	**62.5**	**0**	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	8	7.420.000,00	2	7.280.000,00	2	7.420.000,00	2	7.139.000,00	4	14.419.000,00	100	96.2	25	0	
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	38	19.949.100,00	5	10.959.500,00	12	71.284.000,00	3	54.806.017,00	8	65.765.517,00	25	76.9	7.9	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Perencanaan dan pencapaian tujuan organisasi sudah terintegrasi di seluruh Perangkat Daerah 2. Manajemen resiko telah diterapkan pada seluruh Perangkat Daerah																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Aplikasi SPIP terintegrasi belum optimal / menyulitkan 2. Manajemen risiko tingkat kota belum optimal																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Berkoordinasi dengan BPKP terkait aplikasi E Integrity 2. Mengoptimalkan pemantauan secara berkala penyelenggaraan manajemen risiko																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Berkoordinasi dengan BPKP terkait aplikasi E Integrity 2. Mengoptimalkan pemantauan secara berkala penyelenggaraan manajemen risiko																		
	6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP minimal memuaskan (A)**	**1**	**1.079.421.100,00**	**100**	**709.289.649,00**	**30**	**695.108.000,00**	**30**	**707.219.200,00**	**130**	**1.416.508.849,00**	**100**	**101.7**	**3000**	**30.2**	**Inspektorat Daerah**
	6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**29**	**1.079.421.100,00**	**0**	**709.289.649,00**	**100**	**695.108.000,00**	**100**	**707.219.200,00**	**100**	**1.416.508.849,00**	**100**	**101.7**	**344.8**	**30.2**	**Inspektorat Daerah**
	6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)**	**100**	**1.079.421.100,00**	**0**	**709.289.649,00**	**1**	**695.108.000,00**	**4**	**707.219.200,00**	**4**	**1.416.508.849,00**	**400**	**101.7**	**4**	**30.2**	**Inspektorat Daerah**
	6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah Kebijakan teknis yang diusulkan**	**4**	**59.322.700,00**	**5**	**17.069.300,00**	**4**	**60.322.700,00**	**8**	**33.207.600,00**	**13**	**50.276.900,00**	**200**	**55**	**200**	**0**	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	16	8.710.000,00	3	7.794.300,00	4	8.710.000,00	4	8.512.200,00	7	16.306.500,00	100	97.7	25	0	
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	16	50.612.700,00	4	9.275.000,00	4	51.612.700,00	4	24.695.400,00	8	33.970.400,00	100	47.8	25	0	
	6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah Perangkat Daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal**	**16**	**575.328.000,00**	**0**	**692.220.349,00**	**4**	**634.785.300,00**	**4**	**674.011.600,00**	**4**	**1.366.231.949,00**	**100**	**106.2**	**25**	**56.6**	
	6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan**	**100**	**575.328.000,00**	**0**	**692.220.349,00**	**100**	**634.785.300,00**	**300**	**674.011.600,00**	**300**	**1.366.231.949,00**	**300**	**106.2**	**300**	**56.6**	
	6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP**	**100**	**575.328.000,00**	**100**	**692.220.349,00**	**100**	**634.785.300,00**	**100**	**674.011.600,00**	**200**	**1.366.231.949,00**	**100**	**106.2**	**100**	**56.6**	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30	8.098.200,00	30	7.531.000,00	30	8.098.200,00	60	5.576.000,00	90	13.107.000,00	200	68.9	200	0	
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10	258.743.600,00	14	226.417.049,00	10	256.693.600,00	10	261.646.150,00	24	488.063.199,00	100	101.9	100	90.2	
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	64	86.915.200,00	16	380.100.300,00	16	115.922.500,00	18	138.571.250,00	34	518.671.550,00	112.5	119.5	28.1	64.5	
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	24	221.571.000,00	4	78.172.000,00	6	254.071.000,00	18	268.218.200,00	22	346.390.200,00	300	105.6	75	16.4	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1.Adanya Aplikasi SI-VAKIP untuk mempermudah tim evaluator SAKIP Inspektorat Daerah Kota Blitar dalam mengevaluasi SAKIP Perangkat Daerah sehingga proses evaluasi menjadi lebih cepat, efisien dan efektif 2. Adanya dasar hukum yang mendukung kelancaran kinerja Pengawasan dan Pendampingan																		

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kelengkapan dokumen SAKIP Perangkat Daerah yang di sampaikan ke Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai bahan evaluasi sering kali tidak lengkap dan tidak tepat waktu																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan disiplin anggaran serta kesesuaian terhadap dokumen perencanaan. Melakukan penyesuaian alokasi anggaran terhadap target kinerja yang telah tercapai																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100.00	96.55			
													Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																
	701	Kecamatan																
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)	Baik (82.50)	14.091.347.355,00	94.3	15.224.262.982,00	87	12.754.377.048,23	94.31	13.908.772.700,00	188.56	29.133.035.682,00	108.4	109.1	0	32	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	9.988.366,00	100	4.431.000,00	100	5.000.000,00	100	26.604.200,00	200	31.035.200,00	100	532.1	100	149.5	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	6.148.200,00	6	2.958.000,00	14	3.000.000,00	14	12.644.800,00	20	15.602.800,00	100	421.5	350	85.1	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	6.113.200,00	7	1.473.000,00	5	2.000.000,00	5	13.959.400,00	12	15.432.400,00	100	698	20.8	158.7	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	9.727.035.376,00	100	9.834.528.221,00	100	11.011.417.399,00	100	11.357.129.991,00	200	21.191.658.212,00	100	103.1	100	39.1	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	340	9.726.135.376,00	85	9.833.640.821,00	82	11.010.667.399,00	82	11.350.637.991,00	167	21.184.278.812,00	100	103.1	24.1	39.1	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	900.000,00	5	887.400,00	5	750.000,00	5	6.492.000,00	10	7.379.400,00	100	865.6	25	270.4	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	212.922.930,00	200	19.640.000,00	100	133.738.000,00	100	247.146.880,00	300	266.786.880,00	100	184.8	100	11.8	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0,00	0	0,00	1	0,00	1	8.308.700,00	1	8.308.700,00	100	0	0	0	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400	19.660.000,00	100	19.640.000,00	100	133.738.000,00	100	238.838.180,00	200	258.478.180,00	100	178.6	25	127.3	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	188.755.436,00	100	254.191.960,00	100	247.638.900,00	100	481.961.306,00	200	736.153.266,00	100	194.6	100	82.6	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4.993.100,00	1	4.993.100,00	1	11.129.800,00	1	36.949.100,00	2	41.942.200,00	100	332	25	234.8	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	19.999.100,00	3	23.077.600,00	3	24.542.400,00	3	105.016.827,00	6	128.094.427,00	100	427.9	25	244.4	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	14.979.600,00	4	15.364.800,00	5	16.540.600,00	5	50.258.957,00	9	65.623.757,00	100	303.9	31.3	162	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	40.187.036,00	2	64.589.700,00	2	69.152.000,00	1	151.167.800,00	3	215.757.500,00	50	218.6	12.5	122.1	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	39.985.100,00	2	42.380.900,00	2	32.116.300,00	2	59.781.131,00	4	102.162.031,00	100	186.1	25	24.6	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144	18.600.000,00	36	18.600.000,00	36	18.600.000,00	36	20.150.000,00	72	38.750.000,00	100	108.3	25	25	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	50.011.500,00	9	85.185.860,00	9	75.557.800,00	9	58.637.491,00	18	143.823.351,00	100	77.6	25	15	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		4.523.112.500,00	100	3.356.295.867,00	100	101.880.758,05	100	166.558.170,00	200	3.522.854.037,00	100	163.5	0	1	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	23.112.500,00	25	38.112.500,00	2	101.880.758,05	2	162.158.170,00	27	200.270.670,00	100	159.2	10	203.6	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**	**100**	**899.663.000,00**	**100**	**857.048.612,00**	**100**	**927.281.871,18**	**50**	**1.188.396.188,00**	**150**	**2.045.444.800,00**	**50**	**128.2**	**50**	**41.8**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	192	29.966.000,00	36	32.793.404,00	36	40.209.664,00	36	174.255.380,00	72	207.048.784,00	100	433.4	18.8	159.2	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52	869.697.000,00	13	824.255.208,00	13	887.072.207,18	13	1.014.140.808,00	26	1.838.396.016,00	100	114.3	25	37.8	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar**	**100**	**125.492.846,00**	**100**	**898.127.322,00**	**100**	**327.420.120,00**	**100**	**440.975.965,00**	**200**	**1.339.103.287,00**	**100**	**134.7**	**100**	**61.4**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	100.245.346,00	14	88.871.711,00	14	98.910.120,00	14	138.427.027,00	28	227.298.738,00	100	140	29.2	42.3	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36	9.947.500,00	9	11.122.191,00	5	28.510.000,00	5	95.885.788,00	14	107.007.979,00	100	336.3	13.9	318.1	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	15.300.000,00	1	798.133.420,00	1	200.000.000,00	1	203.303.150,00	2	1.001.436.570,00	100	101.7	25	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya perencanaan kebutuhan dan penjadwalan pelaksanaan kegiatan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelaksanaan kegiatan terkendala adanya aturan baru terkait pengadaan barang/jasa dan pencairan anggaran																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pencairan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penyusunan perencanaan kebutuhan dan penjadwalan kegiatan dengan memperhatikan aturan-aturan yang terkait																		
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan Kecamatan yang tepat waktu**	**98**	**3.458.665.379,00**	**100**	**449.264.691,00**	**100**	**415.887.801,64**	**100**	**623.094.599,00**	**200**	**1.072.359.290,00**	**100**	**149.8**	**102**	**5.8**	**Kecamatan Kepanjenkidul**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart**	**100**	**400.900.000,00**	**100**	**449.264.691,00**	**100**	**415.887.801,64**	**100**	**623.094.599,00**	**200**	**1.072.359.290,00**	**100**	**149.8**	**100**	**50.4**	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4	900.000,00	1	866.550,00	1	900.000,00	1	7.530.100,00	2	8.396.650,00	100	836.7	25	0	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	28	400.000.000,00	7	448.398.141,00	7	414.987.801,64	7	615.564.499,00	14	1.063.962.640,00	100	148.3	25	50.6	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya SPP dan SOP pada pelayanan masyarakat kecamatan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya kendala teknis pada proses pelayanan masyarakat																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengoptimalkan pelayanan masyarakat baik secara offline maupun online																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat sesuai standart pelayanan prima																		
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**75**	**17.757.107.639,00**	**100**	**3.648.984.480,00**	**100**	**1.824.252.298,13**	**100**	**14.338.395.274,00**	**200**	**17.987.379.754,00**	**100**	**786**	**133.3**	**8.6**	**Kecamatan Kepanjenkidul**
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rt berdaya**		**17.757.107.639,00**	**0**	**3.648.984.480,00**	**100**	**1.824.252.298,13**	**90.2**	**14.338.395.274,00**	**90.2**	**17.987.379.754,00**	**90.2**	**786**	**0**	**8.6**	**Kecamatan Kepanjenkidul**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar**	**100**	**1.892.394.300,00**	**100**	**2.966.431.152,00**	**100**	**1.303.905.398,13**	**100**	**13.330.278.544,00**	**200**	**16.296.709.696,00**	**100**	**1022.3**	**100**	**71.6**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	50.000.000,00	6	47.895.250,00	6	72.673.500,00	6	248.574.900,00	12	296.470.150,00	100	342	100	275.9	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7	2.017.444.100,00	7	2.918.535.902,00	7	1.231.231.898,13	7	5.861.303.644,00	14	8.779.839.546,00	100	476.1	100	60.3	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar**	**100**	**315.802.028,00**	**100**	**682.553.328,00**	**100**	**520.346.900,00**	**30**	**1.008.116.730,00**	**130**	**1.690.670.058,00**	**30**	**193.7**	**30**	**52.9**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24	397.540.576,00	6	401.731.128,00	6	264.932.400,00	6	679.422.830,00	12	1.081.153.958,00	100	256.5	25	40.6	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	281.602.500,00	3	280.822.200,00	3	255.414.500,00	3	328.693.900,00	6	609.516.100,00	100	128.7	25	1.9	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya dukungan koordinasi lembaga masyarakat dan instansi pemerintah																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya hal-hal yang perlu di koordinasikan namun masih belum optimal baik antara instansi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengoptimalkan forum koordinasi dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan koordinasi dan pemberdayaan masyarakat																		
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**620.642.882,00**	**100**	**584.204.900,00**	**100**	**520.502.700,00**	**100**	**577.766.113,00**	**200**	**1.161.971.013,00**	**100**	**111**	**100**	**17.4**	**Kecamatan Kepanjenkidul**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart**	**100**	**636.866.300,00**	**100**	**584.204.900,00**	**100**	**520.502.700,00**	**100**	**577.766.113,00**	**200**	**1.161.971.013,00**	**100**	**111**	**100**	**17**	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe	600	636.866.300,00	150	584.204.900,00	150	520.502.700,00	150	577.766.113,00	300	1.161.971.013,00	100	111	25	17	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya forum koordinasi terkait Trantibum																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya permasalahan koordinasi yang masih belum optimal baik antara instansi pemerintah maupun antara lembaga																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengoptimalkan forum koordinasi di bidang pemerintahan umum																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan koordinasi di bidang pemerintahan umum dan trantib																		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)**	**Baik (82.50)**	**14,091,347,355.00**	**0.00**	**153,718,178.00**	**87**	**112,932,969.00**	**0**	**115,040,525.00**	**0**	**268,758,703.00**	**0**	**101.9**	**0.0**	**0.3**	**Kelurahan Kepanjenkidul**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**5,403,600.00**	**0.00**	**5,403,600.00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,403,600.00**	**0**	**0**	**0.0**	**0.0**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2,098,000.00	1.00	2,098,000.00	7	0	7	0	8	2,098,000.00	100	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3,305,600.00	1.00	3,305,600.00	1	0	1	0	2	3,305,600.00	100	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**2,178,000.00**	**0.00**	**2,178,000.00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,178,000.00**	**0**	**0**	**0.0**	**0.0**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2,178,000.00	4.00	2,178,000.00	5	0	5	0	9	2,178,000.00	100	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**50,907,500.00**	**0.00**	**44,335,000.00**	**100**	**16,535,700.00**	**0**	**16,421,600.00**	**0**	**60,756,600.00**	**0**	**99.3**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	0.00	0	1	114,100.00	1	0	1	0	100	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50,907,500.00	45.96	44,335,000.00	18	16,421,600.00	18.00	16,421,600.00	63.96	60,756,600.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**37,054,600.00**	**0.00**	**37,021,300.00**	**100**	**29,538,302.00**	**0**	**31,278,099.00**	**0**	**68,299,399.00**	**0**	**105.9**	**0.0**	**44.5**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2,975,700.00	1.00	2,975,700.00	1	2,905,100.00	1	2,905,100.00	2	5,880,800.00	100	100	0.0	49.4	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		11,798,100.00	5.00	14,257,700.00	5	15,205,100.00	5	15,204,600.00	10	29,462,300.00	100	100	0.0	84.1	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		6,381,700.00	3.00	6,378,800.00	3	6,381,700.00	3	6,381,700.00	6	12,760,500.00	100	100	0.0	49.6	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3,936,000.00	26.00	3,936,000.00	2	825,000.00	2	825,000.00	28	4,761,000.00	100	100	0.0	21	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		6,563,100.00	31.68	6,563,100.00	2	4,221,402.00	2	5,961,699.00	33.68	12,524,799.00	100	141.2	0.0	17.2	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan**		**16,932,800.00**	**0.00**	**16,932,800.00**	**100**	**21,475,724.00**	**0**	**21,325,724.00**	**0**	**38,258,524.00**	**0**	**99.3**	**0.0**	**100**	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	0.00	0	1	4,550,000.00	1	4,400,000.00	1	4,400,000.00	100	96.7	0.0	0.0	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		16,932,800.00	2.00	16,932,800.00	2	16,925,724.00	2	16,925,724.00	4	33,858,524.00	100	100	0.0	100	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**17,037,416.00**	**0.00**	**17,785,978.00**	**100**	**17,211,643.00**	**0**	**18,358,502.00**	**0**	**36,144,480.00**	**0**	**106.7**	**0.0**	**33.8**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		17,037,416.00	73.09	17,785,978.00	36	17,211,643.00	36	18,358,502.00	109.09	36,144,480.00	100	106.7	0.0	33.8	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar**		**29,423,000.00**	**0.00**	**30,061,500.00**	**100**	**28,171,600.00**	**0**	**27,656,600.00**	**0**	**57,718,100.00**	**0**	**98.2**	**0.0**	**29**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2,832,000.00	0.00	0	6	2,770,600.00	6	2,420,600.00	6	2,420,600.00	100	87.4	0.0	18.2	
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		1,479,500.00	1.00	1,479,500.00	1	3,000,000.00	1	3,000,000.00	2	4,479,500.00	100	100	0.0	202.8	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6,711,500.00	4.00	8,909,000.00	4	9,821,000.00	4	9,821,000.00	8	18,730,000.00	100	100	0.0	74.6	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12,600,000.00	96.82	11,947,500.00	2	12,580,000.00	2	12,415,000.00	98.82	24,362,500.00	100	98.7	0.0	0	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	0.00	5,538,000.00	2	0	2	0	2	5,538,000.00	100	0	0.0	0.0	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu**	**98**	**3,458,665,379.00**	**0.00**	**30,539,000.00**	**100**	**23,800,000.00**	**0**	**21,000,000.00**	**0**	**51,539,000.00**	**0**	**88.2**	**0**	**0.1**	**Kelurahan Kepanjenkidul**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar**		**41,975,000.00**	**0.00**	**30,539,000.00**	**100**	**23,800,000.00**	**0**	**21,000,000.00**	**0**	**51,539,000.00**	**0**	**88.2**	**0.0**	**10**	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		4,975,000.00	1.00	4,975,000.00	1	0	1.00	0	2	4,975,000.00	100	0	0.0	0.0	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		4,975,000.00	1.00	4,975,000.00	1	0	1.00	0	2	4,975,000.00	100	0	0.0	0.0	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		37,000,000.00	3.00	25,564,000.00	3	23,800,000.00	3.00	21,000,000.00	6	46,564,000.00	100	88.2	0.0	11.4	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**75**	**17,757,107,639.00**	**0.00**	**2,839,645,000.00**	**100**	**2,852,848,508.00**	**0**	**2,583,601,168.00**	**0**	**5,423,246,168.00**	**0**	**90.6**	**0**	**0.7**	**Kelurahan Kepanjenkidul**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar**		**2,760,145,000.00**	**0.00**	**2,771,366,000.00**	**100**	**2,783,263,608.00**	**0**	**2,514,163,468.00**	**0**	**5,285,529,468.00**	**0**	**90.3**	**0.0**	**4**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		26,715,000.00	7.00	26,715,000.00	9	33,904,808.00	9	33,904,800.00	16	60,619,800.00	100	100	0.0	47.9	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			0		0		0		1,400,400,000.00	0	1,400,400,000.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2,733,430,000.00	14.00	2,744,651,000.00	14	1,049,358,800.00	14.00	1,079,858,668.00	28	3,824,509,668.00	100	102.9	0.0	3.6	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar**		**63,764,050.00**	**0.00**	**68,279,000.00**	**100**	**69,584,900.00**	**0**	**69,437,700.00**	**0**	**137,716,700.00**	**0**	**99.8**	**0.0**	**21.6**	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		56,310,050.00	4.00	61,425,050.00	3	58,616,100.00	3.00	58,616,100.00	7	120,041,150.00	100	100	0.0	24.4	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		7,454,000.00	3.00	6,853,950.00	3	10,968,800.00	3.00	10,821,600.00	6	17,675,550.00	100	98.7	0.0	0	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**620,642,882.00**	**0.00**	**98,402,500.00**	**100**	**36,046,500.00**	**0**	**40,496,500.00**	**0**	**138,899,000.00**	**0**	**112.3**	**0**	**1.8**	**Kelurahan Kepanjenkidul**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart**		**106,579,000.00**	**0.00**	**98,402,500.00**	**100**	**36,046,500.00**	**0**	**40,496,500.00**	**0**	**138,899,000.00**	**0**	**112.3**	**0.0**	**10.2**	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe		106,579,000.00	118.95	98,402,500.00	100	36,046,500.00	100.00	40,496,500.00	218.95	138,899,000.00	100	112.3	0.0	10.2	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)**	**Baik (82.50)**	**14,091,347,355.00**	**135.50**	**94,909,912.00**	**87**	**54,074,050.00**	**0**	**42,973,757.00**	**135.5**	**137,883,669.00**	**0**	**79.5**	**0.0**	**0**	**Kelurahan Ngadirejo**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**319,600.00**	**100.00**	**280,000.00**	**100**	**200,000.00**	**0**	**200,000.00**	**100**	**480,000.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		78,400.00	2.00	70,000.00	7	100,000.00	7	100,000.00	9	170,000.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		241,200.00	4.00	210,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	5	310,000.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**103,600.00**	**100.00**	**70,000.00**	**100**	**100,000.00**	**0**	**100,000.00**	**100**	**170,000.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		103,600.00	4.00	70,000.00	5	100,000.00	5	100,000.00	9	170,000.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**34,335,600.00**	**100.00**	**34,200,600.00**	**100**	**13,793,000.00**	**0**	**13,793,000.00**	**100**	**47,993,600.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	0.00	0	1	978,600.00	1	978,600.00	1	978,600.00	100	100	0.0	0.0	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		34,335,600.00	15.00	34,200,600.00	160	12,814,400.00	160.00	12,814,400.00	175	47,015,000.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**33,367,300.00**	**100.00**	**36,547,000.00**	**100**	**12,039,200.00**	**0**	**12,035,800.00**	**100**	**48,582,800.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3,398,000.00	1.00	3,398,000.00	1	714,000.00	1	714,000.00	2	4,112,000.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10,050,300.00	3.00	13,266,000.00	3	4,486,000.00	3	4,482,600.00	6	17,748,600.00	100	99.9	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3,431,000.00	3.00	3,431,000.00	1	859,200.00	1	859,200.00	4	4,290,200.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		14,208,000.00	1.00	14,172,000.00	1	3,840,000.00	1	3,840,000.00	2	18,012,000.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2,280,000.00	1.00	2,280,000.00	2	2,140,000.00	2	2,140,000.00	3	4,420,000.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**18,509,600.00**	**100.00**	**10,564,312.00**	**100**	**17,816,850.00**	**0**	**7,069,957.00**	**100**	**17,634,269.00**	**0**	**39.7**	**0.0**	**14.8**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		18,509,600.00	24.00	10,564,312.00	36	17,816,850.00	36	7,069,957.00	60	17,634,269.00	100	39.7	0.0	14.8	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar**		**6,333,500.00**	**100.00**	**13,248,000.00**	**100**	**10,125,000.00**	**0**	**9,775,000.00**	**100**	**23,023,000.00**	**0**	**96.5**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2,150,000.00	7.00	0	6	350,000.00	6	0	13	0	100	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4,183,500.00	18.00	11,563,000.00	18	9,775,000.00	18	9,775,000.00	36	21,338,000.00	100	100	0.0	0	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu**	**98**	**3,458,665,379.00**	**97.00**	**14,070,000.00**	**100**	**20,239,200.00**	**0**	**9,639,200.00**	**97**	**23,709,200.00**	**0**	**47.6**	**0**	**0.1**	**Kelurahan Ngadirejo**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar**		**16,078,400.00**	**100.00**	**14,070,000.00**	**100**	**20,239,200.00**	**0**	**9,639,200.00**	**100**	**23,709,200.00**	**0**	**47.6**	**0.0**	**17.4**	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		78,400.00	1.00	70,000.00	1	239,200.00	1.00	239,200.00	2	309,200.00	100	100	0.0	0	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		16,000,000.00	12.00	14,000,000.00	7	20,000,000.00	7.00	9,400,000.00	19	23,400,000.00	100	47	0.0	17.5	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**75**	**17,757,107,639.00**	**75.00**	**1,199,971,000.00**	**100**	**1,164,288,350.00**	**0**	**1,228,184,180.00**	**75**	**2,428,155,180.00**	**0**	**105.5**	**0**	**0.7**	**Kelurahan Ngadirejo**
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rt berdaya**	**100**	**17,757,107,639.00**	**100.00**	**1,199,971,000.00**	**100**	**1,164,288,350.00**	**0**	**1,228,184,180.00**	**100**	**2,428,155,180.00**	**0**	**105.5**	**0**	**0.7**	**Kelurahan Ngadirejo**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar**		**1,132,316,400.00**	**100.00**	**1,131,965,600.00**	**100**	**1,095,992,850.00**	**0**	**1,147,088,680.00**	**100**	**2,279,054,280.00**	**0**	**104.7**	**0.0**	**8**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		22,866,000.00	6.00	22,386,000.00	10	10,869,000.00	10	10,869,000.00	16	33,255,000.00	100	100	0.0	28.6	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			0		0		0		635,000,000.00	0	635,000,000.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1,109,450,400.00	6.00	1,109,579,600.00	6	450,123,850.00	6.00	501,219,680.00	12	1,610,799,280.00	100	111.4	0.0	7.5	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar**		**59,986,000.00**	**100.00**	**68,005,400.00**	**100**	**68,295,500.00**	**0**	**81,095,500.00**	**100**	**149,100,900.00**	**0**	**118.7**	**0.0**	**42.7**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		48,483,300.00	6.00	56,723,300.00	5	56,800,000.00	5.00	69,600,000.00	11	126,323,300.00	100	122.5	0.0	52.8	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		11,502,700.00	4.00	11,282,100.00	4	11,495,500.00	4.00	11,495,500.00	8	22,777,600.00	100	100	0.0	0	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**620,642,882.00**	**100.00**	**65,360,000.00**	**100**	**26,850,000.00**	**0**	**30,300,000.00**	**100**	**95,660,000.00**	**0**	**112.8**	**0**	**1.1**	**Kelurahan Ngadirejo**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart**		**66,150,000.00**	**100.00**	**65,360,000.00**	**100**	**26,850,000.00**	**0**	**30,300,000.00**	**100**	**95,660,000.00**	**0**	**112.8**	**0.0**	**10.4**	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe		66,150,000.00	120.00	65,360,000.00	150	26,850,000.00	150.00	30,300,000.00	270	95,660,000.00	100	112.8	0.0	10.4	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)**	**Baik (82.50)**	**14,091,347,355.00**	**0.00**	**112,224,055.00**	**87**	**109,139,503.00**	**0**	**112,310,843.00**	**0**	**224,534,898.00**	**0**	**102.9**	**0.0**	**0.2**	**Kelurahan Sentul**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**3,944,000.00**	**0.00**	**3,944,000.00**	**100**	**3,100,000.00**	**0**	**4,700,000.00**	**0**	**8,644,000.00**	**0**	**151.6**	**0.0**	**119.2**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1,479,000.00	5.00	1,479,000.00	7	1,500,000.00	7	1,500,000.00	12	2,979,000.00	100	100	0.0	101.4	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2,465,000.00	6.40	2,465,000.00	1	1,600,000.00	5	3,200,000.00	11.4	5,665,000.00	500	200	0.0	129.8	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**1,479,000.00**	**0.00**	**1,478,800.00**	**100**	**1,000,000.00**	**0**	**1,000,000.00**	**0**	**2,478,800.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1,479,000.00	6.67	1,478,800.00	5	1,000,000.00	5	1,000,000.00	11.67	2,478,800.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**37,045,400.00**	**0.00**	**37,045,400.00**	**100**	**14,832,000.00**	**0**	**14,832,000.00**	**0**	**51,877,400.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		4,800,000.00	1.00	4,800,000.00	12	2,652,000.00	12	2,652,000.00	13	7,452,000.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		32,245,400.00	12.00	32,245,400.00	12	12,180,000.00	12	12,180,000.00	24	44,425,400.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**49,684,412.00**	**0.00**	**48,035,400.00**	**100**	**47,279,712.00**	**0**	**65,679,546.00**	**0**	**113,714,946.00**	**0**	**138.9**	**0.0**	**43.5**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6,864,903.00	1.42	6,860,200.00	1	7,732,000.00	1	7,732,000.00	2.42	14,592,200.00	100	100	0.0	27.9	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		14,959,646.00	2.49	14,959,200.00	3	14,959,646.00	3	14,959,646.00	5.49	29,918,846.00	100	100	0.0	36.1	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4,888,088.00	2.00	4,884,400.00	3	4,888,088.00	3.00	4,888,000.00	5	9,772,400.00	100	100	0.0	67.6	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11,240,400.00	0.83	11,240,400.00	1	15,710,400.00	1	34,110,400.00	1.83	45,350,800.00	100	217.1	0.0	97.9	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		6,331,375.00	1.00	6,331,200.00	1	3,989,578.00	1	3,989,500.00	2	10,320,700.00	100	100	0.0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**14,124,000.00**	**0.00**	**8,892,455.00**	**100**	**27,749,891.00**	**0**	**10,921,897.00**	**0**	**19,814,352.00**	**0**	**39.4**	**0.0**	**22.8**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		14,124,000.00	22.66	8,892,455.00	36	27,749,891.00	36	10,921,897.00	58.66	19,814,352.00	100	39.4	0.0	22.8	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar**		**12,830,500.00**	**0.00**	**12,828,000.00**	**100**	**15,177,900.00**	**0**	**15,177,400.00**	**0**	**28,005,400.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6,223,500.00	5.14	6,221,000.00	6	6,577,900.00	6.07	6,577,400.00	11.21	12,798,400.00	101.2	100	0.0	0	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6,607,000.00	31.72	6,607,000.00	32	8,600,000.00	32	8,600,000.00	63.72	15,207,000.00	100	100	0.0	0	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu**	**98**	**3,458,665,379.00**	**0.00**	**26,601,700.00**	**100**	**27,923,700.00**	**0**	**27,923,700.00**	**0**	**54,525,400.00**	**0**	**100**	**0**	**0.1**	**Kelurahan Sentul**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar**		**35,401,700.00**	**0.00**	**26,601,700.00**	**100**	**27,923,700.00**	**0**	**27,923,700.00**	**0**	**54,525,400.00**	**0**	**100**	**0.0**	**11.3**	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1,183,200.00	1.00	1,183,200.00	1	1,603,500.00	1.00	1,603,500.00	2	2,786,700.00	100	100	0.0	0	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		34,218,500.00	1.49	25,418,500.00	4	26,320,200.00	4.00	26,320,200.00	5.49	51,738,700.00	100	100	0.0	11.7	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**75**	**17,757,107,639.00**	**0.00**	**2,011,753,400.00**	**100**	**1,912,295,200.00**	**0**	**1,973,840,116.00**	**0**	**3,985,593,516.00**	**0**	**103.2**	**0**	**0.4**	**Kelurahan Sentul**
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rt berdaya**	**100**	**17,757,107,639.00**	**0.00**	**2,011,753,400.00**	**100**	**1,912,295,200.00**	**0**	**1,973,840,116.00**	**0**	**3,985,593,516.00**	**0**	**103.2**	**0**	**0.4**	**Kelurahan Sentul**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar**		**1,854,685,000.00**	**0.00**	**1,940,805,000.00**	**100**	**1,863,341,600.00**	**0**	**1,920,161,516.00**	**0**	**3,860,966,516.00**	**0**	**103**	**0.0**	**3.8**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		21,936,000.00	4.00	21,936,000.00	6	28,829,600.00	6	28,829,600.00	10	50,765,600.00	100	100	0.0	25.1	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			0		0		0		1,160,000,000.00	0	1,160,000,000.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1,832,749,000.00	8.87	1,918,869,000.00	9	674,512,000.00	9.00	731,331,916.00	17.87	2,650,200,916.00	100	108.4	0.0	3.5	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar**		**70,949,988.00**	**0.00**	**70,948,400.00**	**100**	**48,953,600.00**	**0**	**53,678,600.00**	**0**	**124,627,000.00**	**0**	**109.7**	**0.0**	**13.3**	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		62,970,630.00	0.00	62,969,300.00	6	38,353,600.00	6.00	43,078,600.00	6	106,047,900.00	100	112.3	0.0	15	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		62,970,630.00	0.00	62,969,300.00	6	38,353,600.00	6.00	43,078,600.00	6	106,047,900.00	100	112.3	0.0	15	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		7,979,358.00	2.00	7,979,100.00	3	10,600,000.00	3.00	10,600,000.00	5	18,579,100.00	100	100	0.0	0	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**620,642,882.00**	**0.00**	**75,254,000.00**	**100**	**6,100,000.00**	**0**	**8,500,000.00**	**0**	**83,754,000.00**	**0**	**139.3**	**0**	**0**	**Kelurahan Sentul**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**		**75,256,000.00**	**0.00**	**75,254,000.00**	**100**	**6,100,000.00**	**0**	**8,500,000.00**	**0**	**83,754,000.00**	**0**	**139.3**	**0.0**	**0**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe		75,256,000.00	236.00	75,254,000.00	50	6,100,000.00	50.00	8,500,000.00	286	83,754,000.00	100	139.3	0.0	0	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)**	**Baik (82.50)**	**14,091,347,355.00**	**0.00**	**94,422,424.00**	**87**	**98,799,200.00**	**0**	**82,910,852.00**	**0**	**177,333,276.00**	**0**	**83.9**	**0.0**	**0.2**	**Kelurahan Kauman**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**4,889,000.00**	**0.00**	**4,888,700.00**	**100**	**4,048,300.00**	**0**	**3,657,200.00**	**0**	**8,545,900.00**	**0**	**90.3**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2,137,600.00	3.00	2,137,500.00	7	2,327,200.00	7	2,125,600.00	10	4,263,100.00	100	91.3	0.0	0	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2,751,400.00	1.00	2,751,200.00	1	1,721,100.00	1.00	1,531,600.00	2	4,282,800.00	100	89	0.0	0	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**828,700.00**	**0.00**	**781,600.00**	**100**	**835,000.00**	**0**	**735,000.00**	**0**	**1,516,600.00**	**0**	**88**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		828,700.00	4.00	781,600.00	5	835,000.00	5	735,000.00	9	1,516,600.00	100	88	0.0	0	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**14,000,000.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**100**	**12,875,000.00**	**0**	**12,875,000.00**	**0**	**26,875,000.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	0.00	0	2	0	1	0	1	0	50	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		14,000,000.00	13.00	14,000,000.00	10	12,875,000.00	10	12,875,000.00	23	26,875,000.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**45,793,200.00**	**0.00**	**42,841,660.00**	**100**	**33,855,500.00**	**0**	**40,875,807.00**	**0**	**83,717,467.00**	**0**	**120.7**	**0.0**	**35.7**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5,114,200.00	1.00	5,114,200.00	1	5,189,900.00	1	5,189,900.00	2	10,304,100.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		9,613,200.00	4.00	9,363,260.00	3	9,156,800.00	3	12,592,750.00	7	21,956,010.00	100	137.5	0.0	88	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		8,225,800.00	3.00	8,225,800.00	3	8,205,100.00	3	9,089,657.00	6	17,315,457.00	100	110.8	0.0	21.5	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11,358,100.00	2.00	11,356,500.00	2	9,009,500.00	2	11,709,500.00	4	23,066,000.00	100	130	0.0	53.7	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		8,781,900.00	1.00	8,781,900.00	1	2,294,200.00	1	2,294,000.00	2	11,075,900.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**54,600,000.00**	**0.00**	**22,658,264.00**	**100**	**37,650,000.00**	**0**	**15,232,445.00**	**0**	**37,890,709.00**	**0**	**40.5**	**0.0**	**10.4**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		54,600,000.00	24.00	22,658,264.00	36	37,650,000.00	32	15,232,445.00	56	37,890,709.00	88.9	40.5	0.0	10.4	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar**		**5,337,700.00**	**0.00**	**9,252,200.00**	**100**	**9,535,400.00**	**0**	**9,535,400.00**	**0**	**18,787,600.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5,337,700.00	6.00	5,227,700.00	6	3,745,400.00	6	3,745,400.00	12	8,973,100.00	100	100	0.0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4,024,500.00	8.00	4,024,500.00	11	5,790,000.00	11	5,790,000.00	19	9,814,500.00	100	100	0.0	0	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu**	**98**	**3,458,665,379.00**	**0.00**	**31,697,800.00**	**100**	**21,503,100.00**	**0**	**21,503,100.00**	**0**	**53,200,900.00**	**0**	**100**	**0**	**0.1**	**Kelurahan Kauman**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**-**		**27,697,800.00**	**0.00**	**31,697,800.00**		**21,503,100.00**	**0**	**21,503,100.00**	**0**	**53,200,900.00**	**0**	**100**	**0.0**	**17.3**	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1,097,800.00	1.00	1,097,800.00	1	1,097,500.00	1.00	1,097,500.00	2	2,195,300.00	100	100	0.0	0	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		26,600,000.00	2.00	30,600,000.00	4	20,405,600.00	4.00	20,405,600.00	6	51,005,600.00	100	100	0.0	18	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rt berdaya**	**75**	**17,757,107,639.00**	**0.00**	**1,953,387,000.00**	**100**	**1,882,139,400.00**	**0**	**1,176,969,804.00**	**0**	**3,130,356,804.00**	**0**	**62.5**	**0**	**0.8**	**Kelurahan Kauman**
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	**17,757,107,639.00**	**0.00**	**1,953,387,000.00**	**100**	**1,882,139,400.00**	**0**	**1,176,969,804.00**	**0**	**3,130,356,804.00**	**0**	**62.5**	**0**	**0.8**	**Kelurahan Kauman**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar**		**1,785,822,400.00**	**0.00**	**1,866,693,900.00**	**100**	**1,810,530,700.00**	**0**	**1,096,780,604.00**	**0**	**2,963,474,504.00**	**0**	**60.6**	**0.0**	**5.3**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0	0.00	0	10	30,218,300.00	10	29,659,500.00	10	29,659,500.00	100	98.2	0.0	0.0	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			0		0		0		745,000,000.00	0	745,000,000.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1,785,822,400.00	12.00	1,866,693,900.00	13	630,312,400.00	13.00	322,121,104.00	25	2,188,815,004.00	100	51.1	0.0	4.7	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar**		**73,560,700.00**	**0.00**	**86,693,100.00**	**100**	**71,608,700.00**	**0**	**80,189,200.00**	**0**	**166,882,300.00**	**0**	**112**	**0.0**	**69.5**	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		60,502,700.00	3.30	73,635,100.00	4	64,433,700.00	4.00	73,014,200.00	7.3	146,649,300.00	100	113.3	0.0	84.5	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		13,058,000.00	5.00	13,058,000.00	2	7,175,000.00	2.00	7,175,000.00	7	20,233,000.00	100	100	0.0	0	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**620,642,882.00**	**0.00**	**66,646,000.00**	**100**	**6,650,000.00**	**0**	**8,575,000.00**	**0**	**75,221,000.00**	**0**	**128.9**	**0**	**0.7**	**Kelurahan Kauman**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart**		**71,146,000.00**	**0.00**	**66,646,000.00**	**100**	**6,650,000.00**	**0**	**8,575,000.00**	**0**	**75,221,000.00**	**0**	**128.9**	**0.0**	**5.9**	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe		71,146,000.00	215.00	66,646,000.00	300	6,650,000.00	300.00	8,575,000.00	515	75,221,000.00	100	128.9	0.0	5.9	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)**	**Baik (82.50)**	**14,091,347,355.00**	**0.00**	**104,966,733.00**	**87**	**82,884,000.00**	**0**	**91,845,168.00**	**0**	**196,811,901.00**	**0**	**110.8**	**0.0**	**0.2**	**Kelurahan Tanggung**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**1,348,000.00**	**0.00**	**2,900,800.00**	**100**	**1,893,000.00**	**0**	**2,826,000.00**	**0**	**5,726,800.00**	**0**	**149.3**	**0.0**	**138.4**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0	0.00	1,552,800.00	7	960,000.00	7	960,000.00	7	2,512,800.00	100	100	0.0	0.0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1,348,000.00	3.00	1,348,000.00	1	933,000.00	1.00	1,866,000.00	4	3,214,000.00	100	200	0.0	138.4	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**1,942,500.00**	**0.00**	**1,938,500.00**	**100**	**950,000.00**	**0**	**947,000.00**	**0**	**2,885,500.00**	**0**	**99.7**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1,942,500.00	4.00	1,938,500.00	5	950,000.00	5	947,000.00	9	2,885,500.00	100	99.7	0.0	0	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**26,500,500.00**	**0.00**	**26,481,500.00**	**100**	**24,112,200.00**	**0**	**24,061,400.00**	**0**	**50,542,900.00**	**0**	**99.8**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	0.00	0	1	1,711,500.00	1	1,711,500.00	1	1,711,500.00	100	100	0.0	0.0	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		26,500,500.00	65.00	26,481,500.00	100	22,400,700.00	105	22,349,900.00	170	48,831,400.00	105	99.8	0.0	0	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**25,742,400.00**	**0.00**	**23,024,300.00**	**100**	**20,920,800.00**	**0**	**27,363,500.00**	**0**	**50,387,800.00**	**0**	**130.8**	**0.0**	**58.4**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4,368,200.00	1.00	4,368,000.00	1	4,450,000.00	1.25	4,421,400.00	2.25	8,789,400.00	125	99.4	0.0	76.6	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4,050,600.00	2.00	4,050,600.00	2	4,488,700.00	2	4,488,000.00	4	8,538,600.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3,006,000.00	6.00	984,000.00	3	3,429,100.00	3.00	5,829,700.00	9	6,813,700.00	100	170	0.0	114.1	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4,380,000.00	1.00	4,363,100.00	1	4,500,000.00	1	6,266,400.00	2	10,629,500.00	100	139.3	0.0	82.9	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5,797,600.00	1.00	5,796,600.00	1	4,053,000.00	1	6,358,000.00	2	12,154,600.00	100	156.9	0.0	79.7	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan**		**7,851,400.00**	**0.00**	**7,850,000.00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,850,000.00**	**0**	**0**	**0.0**	**0.0**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		7,851,400.00	1.00	7,850,000.00	3	0	3	0	4	7,850,000.00	100	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**22,455,000.00**	**0.00**	**18,812,542.00**	**100**	**22,000,000.00**	**0**	**19,313,268.00**	**0**	**38,125,810.00**	**0**	**87.8**	**0.0**	**20.4**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		22,455,000.00	24.00	18,812,542.00	36	22,000,000.00	36	19,313,268.00	60	38,125,810.00	100	87.8	0.0	20.4	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar**		**24,369,500.00**	**0.00**	**23,959,091.00**	**100**	**13,008,000.00**	**0**	**17,334,000.00**	**0**	**41,293,091.00**	**0**	**133.3**	**0.0**	**35.9**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4,508,000.00	7.00	4,301,591.00	6	3,508,000.00	6	4,884,000.00	13	9,185,591.00	100	139.2	0.0	61	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		9,861,500.00	6.00	9,857,500.00	4	9,500,000.00	4	12,450,000.00	10	22,307,500.00	100	131.1	0.0	60.8	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10,000,000.00	1.00	9,800,000.00	1	0	1	0	2	9,800,000.00	100	0	0.0	0.0	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu**	**98**	**3,458,665,379.00**	**0.00**	**29,654,800.00**	**100**	**34,000,000.00**	**0**	**18,800,000.00**	**0**	**48,454,800.00**	**0**	**55.3**	**0**	**0**	**Kelurahan Tanggung**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar**		**38,041,200.00**	**0.00**	**29,654,800.00**	**100**	**34,000,000.00**	**0**	**18,800,000.00**	**0**	**48,454,800.00**	**0**	**55.3**	**0.0**	**0**	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1,041,200.00	1.00	1,041,200.00	1	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00	2	2,041,200.00	100	100	0.0	0	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		37,000,000.00	2.00	28,613,600.00	2	33,000,000.00	2.00	17,800,000.00	4	46,413,600.00	100	53.9	0.0	0	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rt berdaya**	**75**	**17,757,107,639.00**	**0.00**	**2,041,676,899.00**	**100**	**2,046,078,000.00**	**0**	**2,089,809,804.00**	**0**	**4,131,486,703.00**	**0**	**102.1**	**0**	**0.6**	**Kelurahan Tanggung**
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	**17,757,107,639.00**	**0.00**	**2,041,676,899.00**	**100**	**2,046,078,000.00**	**0**	**2,089,809,804.00**	**0**	**4,131,486,703.00**	**0**	**102.1**	**0**	**0.6**	**Kelurahan Tanggung**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar**		**1,974,754,100.00**	**0.00**	**1,973,561,699.00**	**100**	**1,983,468,000.00**	**0**	**2,027,218,504.00**	**0**	**4,000,780,203.00**	**0**	**102.2**	**0.0**	**5.4**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		26,202,000.00	3.00	26,487,400.00	3	26,090,000.00	3	25,989,700.00	6	52,477,100.00	100	99.6	0.0	42.3	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			0		0		0		1,245,000,000.00	0	1,245,000,000.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1,948,552,100.00	11.00	1,947,074,299.00	11	712,378,000.00	11.00	756,228,804.00	22	2,703,303,103.00	100	106.2	0.0	4.9	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar**		**68,965,800.00**	**0.00**	**68,115,200.00**	**100**	**62,610,000.00**	**0**	**62,591,300.00**	**0**	**130,706,500.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		62,097,900.00	9.00	61,264,700.00	3	54,360,000.00	3.00	54,341,300.00	12	115,606,000.00	100	100	0.0	0	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		6,867,900.00	2.00	6,850,500.00	3	8,250,000.00	3.00	8,250,000.00	5	15,100,500.00	100	100	0.0	0	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**620,642,882.00**	**0.00**	**78,012,500.00**	**100**	**7,665,000.00**	**0**	**7,665,000.00**	**0**	**85,677,500.00**	**0**	**100**	**0**	**0**	**Kelurahan Tanggung**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart**		**78,072,500.00**	**0.00**	**78,012,500.00**	**100**	**7,665,000.00**	**0**	**7,665,000.00**	**0**	**85,677,500.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe		78,072,500.00	90.00	78,012,500.00	100	7,665,000.00	100.00	7,665,000.00	190	85,677,500.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)**	**Baik (82.50)**	**14,091,347,355.00**	**0.00**	**142,246,274.00**	**87**	**114,660,900.00**	**0**	**146,539,599.00**	**0**	**288,785,873.00**	**0**	**127.8**	**0.0**	**0.4**	**Kelurahan Bendo**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**2,854,400.00**	**0.00**	**2,854,400.00**	**100**	**2,854,400.00**	**0**	**2,852,000.00**	**0**	**5,706,400.00**	**0**	**99.9**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1,227,200.00	4.00	1,227,200.00	7	1,227,200.00	7	1,227,200.00	11	2,454,400.00	100	100	0.0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1,627,200.00	2.00	1,627,200.00	1	1,627,200.00	1.00	1,624,800.00	3	3,252,000.00	100	99.9	0.0	0	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**901,500.00**	**0.00**	**901,500.00**	**100**	**901,400.00**	**0**	**901,400.00**	**0**	**1,802,900.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		901,500.00	4.00	901,500.00	5	901,400.00	5	901,400.00	9	1,802,900.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**17,689,100.00**	**0.00**	**17,669,100.00**	**100**	**18,125,800.00**	**0**	**18,051,800.00**	**0**	**35,720,900.00**	**0**	**99.6**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	0.00	0	15	1,369,200.00	15	1,369,200.00	15	1,369,200.00	100	100	0.0	0.0	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		17,689,100.00	12.00	17,669,100.00	100	16,756,600.00	100	16,682,600.00	112	34,351,700.00	100	99.6	0.0	0	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**43,368,200.00**	**0.00**	**43,368,200.00**	**100**	**32,030,800.00**	**0**	**39,631,600.00**	**0**	**82,999,800.00**	**0**	**123.7**	**0.0**	**31.9**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4,843,800.00	1.00	4,843,800.00	1	4,790,600.00	1	4,790,600.00	2	9,634,400.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7,122,200.00	4.00	7,122,200.00	3	6,791,500.00	3	12,251,000.00	7	19,373,200.00	100	180.4	0.0	153.3	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		7,189,200.00	22.00	7,189,200.00	22	4,598,200.00	22	6,047,000.00	44	13,236,200.00	100	131.5	0.0	40.3	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12,320,000.00	2.00	12,320,000.00	1	10,247,000.00	1	10,939,500.00	3	23,259,500.00	100	106.8	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		7,993,000.00	1.00	7,993,000.00	4	5,603,500.00	4	5,603,500.00	5	13,596,500.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan**		**17,987,600.00**	**0.00**	**22,600,000.00**	**100**	**15,841,800.00**	**0**	**43,940,000.00**	**0**	**66,540,000.00**	**0**	**277.4**	**0.0**	**167.6**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		17,987,600.00	2.00	22,600,000.00	3	15,841,800.00	3	43,940,000.00	5	66,540,000.00	100	277.4	0.0	167.6	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**28,344,000.00**	**0.00**	**26,919,174.00**	**100**	**31,899,400.00**	**0**	**25,139,499.00**	**0**	**52,058,673.00**	**0**	**78.8**	**0.0**	**24**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		28,344,000.00	24.00	26,919,174.00	36	31,899,400.00	36	25,139,499.00	60	52,058,673.00	100	78.8	0.0	24	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar**		**29,719,700.00**	**0.00**	**27,933,900.00**	**100**	**13,007,300.00**	**0**	**16,023,300.00**	**0**	**43,957,200.00**	**0**	**123.2**	**0.0**	**20.7**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5,120,900.00	6.00	4,895,900.00	6	4,278,300.00	6	4,278,300.00	12	9,174,200.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		9,638,000.00	11.00	3,638,000.00	11	8,729,000.00	11	11,745,000.00	22	15,383,000.00	100	134.6	0.0	63.8	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu**	**98**	**3,458,665,379.00**	**0.00**	**29,420,700.00**	**100**	**36,263,200.00**	**0**	**33,056,000.00**	**0**	**62,476,700.00**	**0**	**91.2**	**0**	**0.3**	**Kelurahan Bendo**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar**		**44,404,700.00**	**0.00**	**29,420,700.00**	**100**	**36,263,200.00**	**0**	**33,056,000.00**	**0**	**62,476,700.00**	**0**	**91.2**	**0.0**	**21.6**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1,366,900.00	1.00	1,366,900.00	1	876,800.00	1.00	875,200.00	2	2,242,100.00	100	99.8	0.0	0	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		43,037,800.00	5.00	28,053,800.00	5	35,386,400.00	5.00	32,180,800.00	10	60,234,600.00	100	90.9	0.0	22.3	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rt berdaya**	**75**	**17,757,107,639.00**	**0.00**	**1,786,489,100.00**	**100**	**1,791,620,300.00**	**0**	**1,354,184,116.00**	**0**	**3,140,673,216.00**	**0**	**75.6**	**0**	**0.5**	**Kelurahan Bendo**
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	**17,757,107,639.00**	**0.00**	**1,786,489,100.00**	**100**	**1,791,620,300.00**	**0**	**1,354,184,116.00**	**0**	**3,140,673,216.00**	**0**	**75.6**	**0**	**0.5**	**Kelurahan Bendo**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar**		**1,742,221,900.00**	**0.00**	**1,740,261,100.00**	**100**	**1,744,663,000.00**	**0**	**1,307,428,516.00**	**0**	**3,047,689,616.00**	**0**	**74.9**	**0.0**	**4.7**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		29,348,500.00	3.00	29,348,500.00	2	24,807,000.00	2	24,716,500.00	5	54,065,000.00	100	99.6	0.0	34.9	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			0		0		0		960,000,000.00	0	960,000,000.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1,712,873,400.00	9.00	1,710,912,600.00	28	624,856,000.00	28.00	322,712,016.00	37	2,033,624,616.00	100	51.6	0.0	4.2	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar**		**43,023,500.00**	**0.00**	**46,228,000.00**	**100**	**46,957,300.00**	**0**	**46,755,600.00**	**0**	**92,983,600.00**	**0**	**99.6**	**0.0**	**0**	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		31,105,000.00	5.00	35,295,500.00	6	37,550,600.00	6.00	37,358,100.00	11	72,653,600.00	100	99.5	0.0	0	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		11,918,500.00	2.00	10,932,500.00	3	9,406,700.00	3.00	9,397,500.00	5	20,330,000.00	100	99.9	0.0	0	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**620,642,882.00**	**0.00**	**71,085,300.00**	**100**	**10,544,000.00**	**0**	**10,454,000.00**	**0**	**81,539,300.00**	**0**	**99.1**	**0**	**0**	**Kelurahan Bendo**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart**		**75,085,400.00**	**0.00**	**71,085,300.00**	**100**	**10,544,000.00**	**0**	**10,454,000.00**	**0**	**81,539,300.00**	**0**	**99.1**	**0.0**	**0**	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe		75,085,400.00	250.00	71,085,300.00	100	10,544,000.00	100.00	10,454,000.00	350	81,539,300.00	100	99.1	0.0	0	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)**	**Baik (82.50)**	**14,091,347,355.00**	**0.00**	**109,888,210.00**	**87**	**78,623,081.00**	**0**	**97,303,476.00**	**0**	**207,191,686.00**	**0**	**123.8**	**0.0**	**0.2**	**Kelurahan Kepanjenlor**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**3,650,400.00**	**0.00**	**3,650,200.00**	**100**	**3,868,981.00**	**0**	**7,379,000.00**	**0**	**11,029,200.00**	**0**	**190.7**	**0.0**	**202.1**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1,908,200.00	1.00	1,908,000.00	7	2,045,481.00	2.00	3,732,000.00	3	5,640,000.00	28.6	182.5	0.0	195.6	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1,742,200.00	1.00	1,742,200.00	1	1,823,500.00	1.00	3,647,000.00	2	5,389,200.00	100	200	0.0	209.3	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**1,590,000.00**	**0.00**	**1,590,000.00**	**100**	**1,216,800.00**	**0**	**2,433,600.00**	**0**	**4,023,600.00**	**0**	**200**	**0.0**	**153.1**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1,590,000.00	4.00	1,590,000.00	5	1,216,800.00	6	2,433,600.00	10	4,023,600.00	120	200	0.0	153.1	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**34,100,000.00**	**0.00**	**34,100,000.00**	**100**	**13,887,400.00**	**0**	**13,887,400.00**	**0**	**47,987,400.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	0.00	0	14	1,597,400.00	14	1,597,400.00	14	1,597,400.00	100	100	0.0	0.0	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		34,100,000.00	14.00	34,100,000.00	14	12,290,000.00	14	12,290,000.00	28	46,390,000.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**22,581,000.00**	**0.00**	**27,800,500.00**	**100**	**14,534,900.00**	**0**	**28,697,100.00**	**0**	**56,497,600.00**	**0**	**197.4**	**0.0**	**51.9**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0	0.00	0	1	107,500.00	1	107,500.00	1	107,500.00	100	100	0.0	0.0	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7,609,500.00	3.00	12,829,100.00	3	4,386,500.00	3.00	16,642,900.00	6	29,472,000.00	100	379.4	0.0	57.6	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		991,300.00	2.00	991,300.00	2	1,729,100.00	2	1,718,700.00	4	2,710,000.00	100	99.4	0.0	173.4	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		10,954,900.00	4.00	10,954,900.00	4	6,540,000.00	4	8,460,000.00	8	19,414,900.00	100	129.4	0.0	35.1	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		3,025,300.00	1.00	3,025,200.00	1	1,771,800.00	1.00	1,768,000.00	2	4,793,200.00	100	99.8	0.0	58.4	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**15,600,000.00**	**0.00**	**33,912,010.00**	**100**	**36,119,000.00**	**0**	**36,760,376.00**	**0**	**70,672,386.00**	**0**	**101.8**	**0.0**	**43.7**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		15,600,000.00	24.00	33,912,010.00	36	36,119,000.00	36	36,760,376.00	60	70,672,386.00	100	101.8	0.0	43.7	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar**		**2,540,000.00**	**0.00**	**8,835,500.00**	**100**	**8,996,000.00**	**0**	**8,146,000.00**	**0**	**16,981,500.00**	**0**	**90.6**	**0.0**	**125.3**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2,540,000.00	7.00	8,835,500.00	6	1,616,000.00	6	1,616,000.00	13	10,451,500.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0	0.00	0	2	360,000.00	2	360,000.00	2	360,000.00	100	100	0.0	0.0	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0	0.00	0	6	6,170,000.00	6	6,170,000.00	6	6,170,000.00	100	100	0.0	0.0	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	0.00	0	1	850,000.00	1	0	1	0	100	0	0.0	0.0	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu**	**98**	**3,458,665,379.00**	**0.00**	**23,059,500.00**	**100**	**18,760,200.00**	**0**	**22,987,100.00**	**0**	**46,046,600.00**	**0**	**122.5**	**0**	**0.3**	**Kelurahan Kepanjenlor**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar**		**28,259,500.00**	**0.00**	**23,059,500.00**	**100**	**18,760,200.00**	**0**	**22,987,100.00**	**0**	**46,046,600.00**	**0**	**122.5**	**0.0**	**31.1**	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		3,259,500.00	1.00	3,259,500.00	1	1,820,100.00	1.00	1,817,100.00	2	5,076,600.00	100	99.8	0.0	0	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		25,000,000.00	2.00	19,800,000.00	2	16,940,100.00	2.00	21,170,000.00	4	40,970,000.00	100	125	0.0	35.2	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**75**	**17,757,107,639.00**	**0.00**	**1,748,564,100.00**	**100**	**1,734,648,400.00**	**0**	**1,809,997,316.00**	**0**	**3,558,561,416.00**	**0**	**104.3**	**0**	**0.5**	**Kelurahan Kepanjenlor**
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rt berdaya**	**100**	**17,757,107,639.00**	**0.00**	**1,748,564,100.00**	**100**	**1,734,648,400.00**	**0**	**1,809,997,316.00**	**0**	**3,558,561,416.00**	**0**	**104.3**	**0**	**0.5**	**Kelurahan Kepanjenlor**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar**		**1,668,612,500.00**	**0.00**	**1,666,754,700.00**	**100**	**1,667,718,800.00**	**0**	**1,738,642,716.00**	**0**	**3,405,397,416.00**	**0**	**104.3**	**0.0**	**4.4**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		24,850,000.00	3.00	24,795,900.00	3	22,280,400.00	3	22,280,400.00	6	47,076,300.00	100	100	0.0	35.1	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			0		0		0		1,075,000,000.00	0	1,075,000,000.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1,643,762,500.00	6.00	1,641,958,800.00	6	620,438,400.00	6.00	641,362,316.00	12	2,283,321,116.00	100	103.4	0.0	4	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar**		**84,651,700.00**	**0.00**	**81,809,400.00**	**100**	**66,929,600.00**	**0**	**71,354,600.00**	**0**	**153,164,000.00**	**0**	**106.6**	**0.0**	**11.3**	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		67,527,700.00	7.00	64,685,400.00	7	52,880,800.00	7.00	57,305,800.00	14	121,991,200.00	100	108.4	0.0	14.1	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		17,124,000.00	2.00	17,124,000.00	2	14,048,800.00	2.00	14,048,800.00	4	31,172,800.00	100	100	0.0	0	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**620,642,882.00**	**0.00**	**95,734,978.00**	**100**	**25,861,000.00**	**0**	**25,049,000.00**	**0**	**120,783,978.00**	**0**	**96.9**	**0**	**1.1**	**Kelurahan Kepanjenlor**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart**		**101,314,900.00**	**0.00**	**95,734,978.00**	**100**	**25,861,000.00**	**0**	**25,049,000.00**	**0**	**120,783,978.00**	**0**	**96.9**	**0.0**	**6.9**	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe		101,314,900.00	120.00	95,734,978.00	120	25,861,000.00	120.00	25,049,000.00	240	120,783,978.00	100	96.9	0.0	6.9	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan**	**89**	**14.059.927.237,00**	**90.1**	**12.103.165.833,00**	**84.85**	**14.382.786.122,00**	**94.02**	**15.608.045.512,00**	**184.1**	**27.711.211.345,00**	**110.8**	**108.5**	**105.6**	**34.8**	**Kecamatan Sukorejo**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**9.988.366,00**	**100**	**4.093.000,00**	**100**	**6.235.900,00**	**100**	**18.380.300,00**	**200**	**22.473.300,00**	**100**	**294.7**	**0**	**0**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.100.500,00	10	2.525.500,00	10	3.741.000,00	15	9.517.300,00	25	12.042.800,00	150	254.4	0	0	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4.887.866,00	16	1.567.500,00	9	2.494.900,00	22	8.863.000,00	38	10.430.500,00	244.4	355.2	0	0	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**9.100.487.701,00**	**100**	**9.364.352.498,00**	**100**	**10.511.439.287,00**	**100**	**10.757.187.093,00**	**200**	**20.121.539.591,00**	**100**	**102.3**	**0**	**40.3**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		9.095.082.801,00	77	9.362.745.498,00	76	10.509.832.087,00	76	10.750.282.763,00	153	20.113.028.261,00	100	102.3	0	40.4	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5.404.900,00	4	1.607.000,00	9	1.607.200,00	117	6.904.330,00	121	8.511.330,00	1300	429.6	0	0	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**212.922.930,00**	**100**	**220.697.200,00**	**100**	**290.196.097,00**	**100**	**386.381.803,00**	**200**	**607.079.003,00**	**100**	**133.1**	**0**	**55.4**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		58.244.900,00	2	58.136.400,00	2	0,00	0	0,00	2	58.136.400,00	0	0	0	0	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		154.678.030,00	300	162.560.800,00	300	290.196.097,00	675	386.381.803,00	975	548.942.603,00	225	133.1	0	76.2	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**287.098.700,00**	**100**	**329.386.438,00**	**100**	**294.399.395,00**	**100**	**707.257.133,00**	**200**	**1.036.643.571,00**	**100**	**240.2**	**0**	**96.4**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4.827.300,00	3	4.794.800,00	1	11.833.700,00	2	52.984.300,00	5	57.779.100,00	200	447.7	0	795.8	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		43.259.400,00	5	46.673.450,00	8	50.637.800,00	18	175.863.781,00	23	222.537.231,00	225	347.3	0	281.7	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		17.454.800,00	4	23.800.750,00	8	22.557.300,00	18	67.248.958,00	22	91.049.708,00	225	298.1	0	221.4	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		98.908.000,00	2	105.072.200,00	2	96.289.500,00	6	236.025.000,00	8	341.097.200,00	300	245.1	0	45.9	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		14.766.700,00	2	19.693.600,00	2	25.506.700,00	6	56.217.005,00	8	75.910.605,00	300	220.4	0	109.9	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		6.900.000,00	36	5.500.000,00	24	6.024.000,00	60	28.970.000,00	96	34.470.000,00	250	480.9	0	100.7	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100.982.500,00	12	123.851.638,00	12	78.950.395,00	15	76.536.189,00	27	200.387.827,00	125	96.9	0	6.2	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0,00	0	0,00	1	2.600.000,00	2	13.411.900,00	2	13.411.900,00	200	515.8	0	0	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**136.412.700,00**	**100**	**90.225.000,00**	**100**	**100.167.800,00**	**100**	**217.573.334,00**	**200**	**307.798.334,00**	**100**	**217.2**	**0**	**85.4**	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0,00	0	0,00	21	16.211.400,00	45	15.096.000,00	45	15.096.000,00	214.3	93.1	0	0	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		136.412.700,00	2	90.225.000,00	9	83.956.400,00	116	202.477.334,00	118	292.702.334,00	1288.9	241.2	0	85.4	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar**		**1.122.117.000,00**	**100**	**1.073.455.220,00**	**100**	**1.536.838.548,00**	**100**	**1.806.520.229,00**	**200**	**2.879.975.449,00**	**100**	**117.5**	**0**	**58.8**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		45.948.600,00	12	44.278.992,00	60	53.974.380,00	135	151.138.379,00	147	195.417.371,00	225	280	0	96.7	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1.076.168.400,00	12	1.029.176.228,00	12	1.482.864.168,00	27	1.655.381.850,00	39	2.684.558.078,00	225	111.6	0	57.2	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart**		**179.289.700,00**	**100**	**1.020.956.477,00**	**100**	**1.643.509.095,00**	**100**	**1.714.745.620,00**	**200**	**2.735.702.097,00**	**100**	**104.3**	**0**	**32.4**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		84.281.700,00	11	91.549.625,00	12	92.532.300,00	27	112.494.688,00	38	204.044.313,00	225	121.6	0	23.6	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25.740.000,00	11	24.911.000,00	28	22.947.500,00	63	104.196.500,00	74	129.107.500,00	225	454.1	0	148.2	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	9.985.000,00	2	14.985.000,00	100	99.9	0	0	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		55.518.000,00	1	880.134.852,00	2	162.928.295,00	2	171.146.900,00	3	1.051.281.752,00	100	105	0	0	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0,00	0	0,00	4	1.355.101.000,00	6	1.316.922.532,00	6	1.316.922.532,00	150	97.2	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kerjasama dan koordinasi antar Seksie dan OPD terkait sehingga mempercepat pelaksanaan dan realisasi Kinerja Program																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelaksanaan Konstruksi menunggu ketersediaan anggaran sehingga baru terlaksana pada Tribulan IV																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Selalu menjalin kerjasama dan berkoordinasi antar Seksi serta OPD lain agar realisasi dan kinerja program cepat terlaksana sesuai dengan jadwal																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : pelaksanaan konstruksi akan dibagi pada triwulan III dan IV agar tidak menumpuk semua pada triwulan ke IV.																		
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu**	**98**	**3.095.226.974,00**	**100**	**362.974.308,00**	**100**	**53.326.900,00**	**100**	**333.641.400,00**	**200**	**696.615.708,00**	**100**	**625.7**	**102**	**3.7**	**Kecamatan Sukorejo**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart**		**381.676.400,00**	**100**	**362.974.308,00**	**100**	**53.326.900,00**	**100**	**333.641.400,00**	**200**	**696.615.708,00**	**100**	**625.7**	**0**	**30.4**	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1.676.400,00	2	6.150.060,00	2	1.279.400,00	5	6.877.600,00	7	13.027.660,00	250	537.6	0	57.3	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		380.000.000,00	3	356.824.248,00	3	52.047.500,00	7	326.763.800,00	10	683.588.048,00	233.3	627.8	0	30.2	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Penggunaan aplikasi pelayanan terintegrasi : Silpusitron dan SIPAK yang meningkatkan transparansi dan kecepatan data antara Kecamatan, Kelurahan dan Dispendukcapil																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Beberapa fasilitas pelayanan publik memerlukan peremajaan untuk memenuhi standar kenyamanan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan anak-anak.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan penguatan standar pelayanan dengan merevisi atau pemutakhiran Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik (SPP) sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mengusulkan fasilitas pelayanan publik yang memerlukan peremajaan terutama yang berfokus pada pelayanan inklusif (ramah kelompok rentan) dalam usulan kegiatan tahun depan untuk kenyamanan masyarakat pencari layanan.																		
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase RT Berdaya**	**75**	**9.350.000.000,00**	**100**	**3.813.796.386,00**	**100**	**1.727.146.170,00**	**100**	**13.518.153.224,00**	**200**	**17.331.949.610,00**	**100**	**782.7**	**133.3**	**11.1**	**Kecamatan Sukorejo**
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	**9.350.000.000,00**	**100**	**3.813.796.386,00**	**100**	**1.727.146.170,00**	**100**	**13.518.153.224,00**	**200**	**17.331.949.610,00**	**100**	**782.7**	**100**	**11.1**	**Kecamatan Sukorejo**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar**		**1.892.394.300,00**	**100**	**3.490.363.486,00**	**100**	**1.473.850.990,00**	**100**	**12.653.817.309,00**	**200**	**16.144.180.795,00**	**100**	**858.6**	**0**	**54.1**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		73.000.000,00	7	72.710.575,00	2	56.194.700,00	6	255.646.612,00	13	328.357.187,00	300	454.9	0	199.3	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.819.394.300,00	34	3.417.652.911,00	17	1.417.656.290,00	38	4.745.170.697,00	72	8.162.823.608,00	223.5	334.7	0	48.3	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar**		**315.802.028,00**	**100**	**323.432.900,00**	**100**	**253.295.180,00**	**100**	**864.335.915,00**	**200**	**1.187.768.815,00**	**100**	**341.2**	**0**	**4.8**	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		190.028.128,00	8	199.995.250,00	8	211.622.400,00	10	761.453.495,00	18	961.448.745,00	125	359.8	0	8	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		125.773.900,00	3	123.437.650,00	3	41.672.780,00	7	102.882.420,00	10	226.320.070,00	233.3	246.9	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kelembagaan Masyarakat yang Aktif, yaitu dengan adanya peran serta aktif dari lembaga kemasyarakatan seperti LPM, PKK, Karang Taruna, dan Posyandu dalam menggerakkan partisipasi warga.																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih bervariasinya kemampuan pendamping RT Keren dan Pokmas dalam penyusunan administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Monitoring Lapangan dengan melakukan verifikasi faktual dan evaluasi berkala terhadap progres fisik dan serapan anggaran kegiatan pembangunan di Kelurahan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mengusulkan anggaran Peningkatan Kapasitas Pendamping RT Keren dan Lembaga Kemasyarakatan/Pokmas dengan melaksanakan Pendampingan/Bimtek pengelolaan administrasi dan pelaporan bagi Pendamping RT Keren dan pengurus lembaga kemasyarakatan pada tahun depan.																		
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**679.036.618,00**	**100**	**387.219.861,00**	**100**	**106.952.000,00**	**100**	**215.380.145,00**	**200**	**602.600.006,00**	**100**	**201.4**	**100**	**2.5**	**Kecamatan Sukorejo**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart**		**437.153.000,00**	**100**	**387.219.861,00**	**100**	**106.952.000,00**	**100**	**215.380.145,00**	**200**	**602.600.006,00**	**100**	**201.4**	**0**	**3.9**	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe		437.153.000,00	0	387.219.861,00	755	106.952.000,00	2098	215.380.145,00	2098	602.600.006,00	277.9	201.4	0	3.9	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sinergitas Forkopimda yang Solid, yaitu dengan menjalin koordinasi yang sangat baik antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, dan instansi vertikal lainnya dalam deteksi dini gangguan kamtibmas.																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Dinamika Isu di Media Sosial dengan cepatnya penyebaran berita bohong (hoax) dan isu provokatif yang berpotensi memicu polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penguatan Deteksi Dini, yaitu dengan meningkatkan frekuensi rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial untuk memetakan potensi kerawanan di wilayah secara lebih detail.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mengusulkan pengembangan aplikasi atau sistem informasi pelaporan konflik sosial yang terintegrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan pimpinan.																		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan**	**89**	**14,059,927,237.00**	**90.08**	**125,298,107.00**	**84.85**	**141,854,300.00**	**0**	**141,277,009.00**	**90.08**	**266,575,116.00**	**0**	**99.6**	**0**	**0.3**	**Kelurahan Pakunden**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**1,370,200.00**	**100.00**	**1,365,750.00**	**100**	**1,130,000.00**	**0**	**620,200.00**	**100**	**1,985,950.00**	**0**	**54.9**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		615,800.00	6.00	614,550.00	10	520,000.00	13	265,800.00	19	880,350.00	130	51.1	0.0	0	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		754,400.00	8.00	751,200.00	9	610,000.00	12	354,400.00	20	1,105,600.00	133.3	58.1	0.0	0	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**761,800.00**	**0.00**	**903,600.00**	**100**	**348,600.00**	**0**	**348,000.00**	**0**	**1,251,600.00**	**0**	**99.8**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		761,800.00	4.00	903,600.00	4	348,600.00	6	348,000.00	10	1,251,600.00	150	99.8	0.0	0	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**32,116,600.00**	**100.00**	**25,437,400.00**	**100**	**14,800,000.00**	**0**	**14,744,000.00**	**100**	**40,181,400.00**	**0**	**99.6**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		11,541,600.00	2.00	8,037,400.00	14	0	0	0	2	8,037,400.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		20,575,000.00	140.00	17,400,000.00	140	14,800,000.00	243	14,744,000.00	383	32,144,000.00	173.6	99.6	0.0	0	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**42,120,300.00**	**100.00**	**37,549,498.00**	**100**	**43,165,500.00**	**0**	**60,428,780.00**	**100**	**97,978,278.00**	**0**	**140**	**0.0**	**79.1**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5,878,000.00	1.00	5,869,000.00	1	5,087,000.00	100	10,173,900.00	101	16,042,900.00	10000	200	0.0	173.1	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		14,820,000.00	5.00	11,250,963.00	1	9,879,200.00	68	14,780,000.00	73	26,030,963.00	6800	149.6	0.0	81.5	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		10,886,300.00	4.00	10,480,779.00	4	6,579,400.00	64	9,842,400.00	68	20,323,179.00	1600	149.6	0.0	60.5	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3,352,400.00	68.00	3,331,864.00	4	14,000,000.00	28	18,790,000.00	96	22,121,864.00	700	134.2	0.0	105.7	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		3,343,600.00	1.00	2,896,892.00	4	2,669,900.00	4	1,704,880.00	5	4,601,772.00	100	63.9	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3,840,000.00	24.00	3,720,000.00	24	3,840,000.00	47	4,030,000.00	71	7,750,000.00	195.8	104.9	0.0	24.2	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	0.00	0	1	1,110,000.00	1	1,107,600.00	1	1,107,600.00	100	99.8	0.0	0.0	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**4,576,800.00**	**100.00**	**13,606,899.00**	**100**	**17,188,200.00**	**0**	**20,277,334.00**	**100**	**33,884,233.00**	**0**	**118**	**0.0**	**109.2**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4,576,800.00	2.00	13,606,899.00	3	17,188,200.00	2	20,277,334.00	4	33,884,233.00	66.7	118	0.0	109.2	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar**		**21,009,960.00**	**100.00**	**24,615,897.00**	**100**	**27,841,000.00**	**0**	**22,861,695.00**	**100**	**47,477,592.00**	**0**	**82.1**	**0.0**	**31**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		21,009,960.00	36.00	24,615,897.00	3	27,841,000.00	11	22,861,695.00	47	47,477,592.00	366.7	82.1	0.0	31	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart**		**23,050,600.00**	**100.00**	**21,819,063.00**	**100**	**37,381,000.00**	**0**	**21,997,000.00**	**100**	**43,816,063.00**	**0**	**58.8**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6,289,100.00	7.00	5,734,583.00	7	4,088,000.00	8	4,088,000.00	15	9,822,583.00	114.3	100	0.0	0	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1,761,500.00	12.00	2,885,000.00	3	5,745,000.00	95	5,635,000.00	107	8,520,000.00	3166.7	98.1	0.0	0	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		15,000,000.00	2.00	13,199,480.00	2	27,548,000.00	44	12,274,000.00	46	25,473,480.00	2200	44.6	0.0	0	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu**	**98**	**3,095,226,974.00**	**100.00**	**48,923,200.00**	**100**	**54,747,200.00**	**0**	**65,749,000.00**	**100**	**114,672,200.00**	**0**	**120.1**	**0**	**0.8**	**Kelurahan Pakunden**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart**		**53,919,200.00**	**100.00**	**48,923,200.00**	**100**	**54,747,200.00**	**0**	**65,749,000.00**	**100**	**114,672,200.00**	**0**	**120.1**	**0.0**	**44.5**	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		919,200.00	1.00	923,200.00	1	797,200.00	2.25	598,000.00	3.25	1,521,200.00	225	75	0.0	0	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		53,000,000.00	3.00	48,000,000.00	2	53,950,000.00	56	65,151,000.00	59	113,151,000.00	2800	120.8	0.0	45.3	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**75**	**9,350,000,000.00**	**100.00**	**2,147,595,000.00**	**100**	**2,153,967,400.00**	**0**	**2,179,609,416.00**	**100**	**4,327,204,416.00**	**0**	**101.2**	**0**	**1.2**	**Kelurahan Pakunden**
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase RT Berdaya**	**100**	**9,350,000,000.00**	**0.00**	**2,147,595,000.00**	**100**	**2,153,967,400.00**	**0**	**2,179,609,416.00**	**0**	**4,327,204,416.00**	**0**	**101.2**	**0**	**1.2**	**Kelurahan Pakunden**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar**		**2,022,299,220.00**	**0.00**	**2,043,552,250.00**	**100**	**2,064,315,000.00**	**0**	**2,088,279,716.00**	**0**	**4,131,831,966.00**	**0**	**101.2**	**0.0**	**4.9**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		22,451,500.00	12.00	23,426,450.00	12	20,906,200.00	47	26,462,912.00	59	49,889,362.00	391.7	126.6	0.0	31.7	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			0		0		0		1,550,000,000.00	0	1,550,000,000.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1,999,847,720.00	9.00	2,020,125,800.00	12	538,408,800.00	35	511,816,804.00	44	2,531,942,604.00	291.7	95.1	0.0	4.6	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar**		**100,628,600.00**	**100.00**	**104,042,750.00**	**100**	**89,652,400.00**	**0**	**91,329,700.00**	**100**	**195,372,450.00**	**0**	**101.9**	**0.0**	**9.8**	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		89,050,600.00	5.00	90,964,750.00	5	82,863,400.00	65	84,540,700.00	70	175,505,450.00	1300	102	0.0	11.1	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		11,578,000.00	1.00	13,078,000.00	3	6,789,000.00	100.75	6,789,000.00	101.75	19,867,000.00	3358.3	100	0.0	0	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**679,036,618.00**	**100.00**	**86,171,745.00**	**100**	**12,650,000.00**	**0**	**13,445,000.00**	**100**	**99,616,745.00**	**0**	**106.3**	**0**	**0.3**	**Kelurahan Pakunden**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart**		**91,911,000.00**	**100.00**	**86,171,745.00**	**100**	**12,650,000.00**	**0**	**13,445,000.00**	**100**	**99,616,745.00**	**0**	**106.3**	**0.0**	**1.9**	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe		91,911,000.00	50.00	86,171,745.00	150	12,650,000.00	157	13,445,000.00	207	99,616,745.00	104.7	106.3	0.0	1.9	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan**	**89**	**14,059,927,237.00**	**90.08**	**63,967,894.00**	**84.85**	**97,576,724.00**	**0**	**98,019,164.00**	**90.08**	**161,987,058.00**	**0**	**100.5**	**0**	**0.3**	**Kelurahan Blitar**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**1,887,000.00**	**90.61**	**1,887,000.00**	**100**	**2,041,600.00**	**0**	**2,041,600.00**	**90.61**	**3,928,600.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		934,100.00	10.00	934,100.00	10	1,020,800.00	13	1,020,800.00	23	1,954,900.00	130	100	0.0	0	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		952,900.00	9.00	952,900.00	9	1,020,800.00	10	1,020,800.00	19	1,973,700.00	111.1	100	0.0	0	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**940,200.00**	**90.61**	**940,200.00**	**100**	**845,800.00**	**0**	**845,800.00**	**90.61**	**1,786,000.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		940,200.00	4.00	940,200.00	4	845,800.00	5	845,800.00	9	1,786,000.00	125	100	0.0	0	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**26,241,300.00**	**100.00**	**26,241,300.00**	**100**	**14,514,400.00**	**0**	**14,014,400.00**	**100**	**40,255,700.00**	**0**	**96.6**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		6,000,000.00	1.00	6,000,000.00	12	0	12	0	13	6,000,000.00	100	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		20,241,300.00	90.00	20,241,300.00	90	14,514,400.00	113	14,014,400.00	203	34,255,700.00	125.6	96.6	0.0	0	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**18,744,400.00**	**85.36**	**18,744,400.00**	**100**	**30,061,300.00**	**0**	**41,776,435.00**	**85.36**	**60,520,835.00**	**0**	**139**	**0.0**	**97.9**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2,495,400.00	1.00	2,495,400.00	1	5,951,000.00	1	7,921,800.00	2	10,417,200.00	100	133.1	0.0	158	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7,022,000.00	3.00	7,022,000.00	3	8,062,500.00	5	10,041,535.00	8	17,063,535.00	166.7	124.5	0.0	56.6	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2,516,900.00	2.00	2,516,900.00	3	4,800,400.00	4	12,238,600.00	6	14,755,500.00	133.3	254.9	0.0	186.5	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		995,000.00	1.00	995,000.00	4	1,395,000.00	5	1,395,000.00	6	2,390,000.00	125	100	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		3,015,100.00	1.00	3,015,100.00	1	5,667,600.00	1	5,769,700.00	2	8,784,800.00	100	101.8	0.0	167.7	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2,700,000.00	12.00	2,700,000.00	12	2,700,000.00	15	2,925,000.00	27	5,625,000.00	125	108.3	0.0	25	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	0.00	0	1	1,484,800.00	1	1,484,800.00	1	1,484,800.00	100	100	0.0	0.0	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar**		**16,215,493.00**	**90.61**	**11,131,394.00**	**100**	**32,858,624.00**	**0**	**17,190,929.00**	**90.61**	**28,322,323.00**	**0**	**52.3**	**0.0**	**32.8**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		16,215,493.00	36.00	11,131,394.00	36	32,858,624.00	45	17,190,929.00	81	28,322,323.00	125	52.3	0.0	32.8	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart**		**5,226,100.00**	**90.61**	**5,023,600.00**	**100**	**17,255,000.00**	**0**	**22,150,000.00**	**90.61**	**27,173,600.00**	**0**	**128.4**	**0.0**	**281.5**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2,061,100.00	6.00	1,858,600.00	4	6,040,000.00	5	6,040,000.00	11	7,898,600.00	125	100	0.0	169.7	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3,165,000.00	0.00	3,165,000.00	25	11,215,000.00	31.5	16,110,000.00	31.5	19,275,000.00	126	143.6	0.0	354.3	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu**	**98**	**3,095,226,974.00**	**100.00**	**29,899,800.00**	**100**	**28,554,100.00**	**0**	**40,154,100.00**	**100**	**70,053,900.00**	**0**	**140.6**	**0**	**0.8**	**Kelurahan Blitar**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart**		**21,099,800.00**	**100.00**	**29,899,800.00**	**100**	**28,554,100.00**	**0**	**40,154,100.00**	**100**	**70,053,900.00**	**0**	**140.6**	**0.0**	**113.7**	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1,099,800.00	14.00	1,099,800.00	2	1,082,400.00	3	1,082,400.00	17	2,182,200.00	150	100	0.0	0	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		20,000,000.00	2.00	28,800,000.00	2	27,471,700.00	3	39,071,700.00	5	67,871,700.00	150	142.2	0.0	120	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase RT Berdaya**	**75**	**9,350,000,000.00**	**100.00**	**1,173,107,100.00**	**100**	**1,144,625,600.00**	**0**	**1,157,559,551.00**	**100**	**2,330,666,651.00**	**0**	**101.1**	**0**	**0.6**	**Kelurahan Blitar**
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	**9,350,000,000.00**	**0.00**	**1,173,107,100.00**	**100**	**1,144,625,600.00**	**0**	**1,157,559,551.00**	**0**	**2,330,666,651.00**	**0**	**101.1**	**0**	**0.6**	**Kelurahan Blitar**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar**		**989,041,616.00**	**100.00**	**1,048,289,000.00**	**100**	**1,006,790,800.00**	**0**	**1,023,474,751.00**	**100**	**2,071,763,751.00**	**0**	**101.7**	**0.0**	**5.7**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		16,118,000.00	4.00	16,118,000.00	4	17,758,800.00	4	16,832,800.00	8	32,950,800.00	100	94.8	0.0	40.1	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			0		0		0		740,000,000.00	0	740,000,000.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		972,923,616.00	4.00	1,032,171,000.00	4	249,032,000.00	4	266,641,951.00	8	1,298,812,951.00	100	107.1	0.0	5.1	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar**		**130,266,900.00**	**100.00**	**124,818,100.00**	**100**	**137,834,800.00**	**0**	**134,084,800.00**	**100**	**258,902,900.00**	**0**	**97.3**	**0.0**	**0**	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		124,781,000.00	3.00	119,332,200.00	4	130,014,800.00	5	126,814,800.00	8	246,147,000.00	125	97.5	0.0	0	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		5,485,900.00	2.00	5,485,900.00	2	7,820,000.00	3	7,270,000.00	5	12,755,900.00	150	93	0.0	0	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**679,036,618.00**	**100.00**	**54,142,500.00**	**100**	**4,725,000.00**	**0**	**4,725,000.00**	**100**	**58,867,500.00**	**0**	**100**	**0**	**0**	**Kelurahan Blitar**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart**		**57,763,500.00**	**100.00**	**54,142,500.00**	**100**	**4,725,000.00**	**0**	**4,725,000.00**	**100**	**58,867,500.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe		57,763,500.00	50.00	54,142,500.00	50	4,725,000.00	25	4,725,000.00	75	58,867,500.00	50	100	0.0	0	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan**	**89**	**14,059,927,237.00**	**90.08**	**123,212,110.00**	**84.85**	**114,210,506.00**	**0**	**125,759,417.00**	**90.08**	**248,971,527.00**	**0**	**110.1**	**0**	**0.3**	**Kelurahan Tlumpu**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**1,175,986.00**	**90.61**	**642,950.00**	**100**	**1,175,986.00**	**0**	**1,026,600.00**	**90.61**	**1,669,550.00**	**0**	**87.3**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		643,078.00	10.00	642,950.00	10	643,078.00	18	543,400.00	28	1,186,350.00	180	84.5	0.0	0	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		532,908.00	9.00	0	9	532,908.00	16	483,200.00	25	483,200.00	177.8	90.7	0.0	0	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**782,500.00**	**85.36**	**782,375.00**	**100**	**782,500.00**	**0**	**782,500.00**	**85.36**	**1,564,875.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		782,500.00	4.00	782,375.00	4	782,500.00	10	782,500.00	14	1,564,875.00	250	100	0.0	0	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**26,545,100.00**	**85.36**	**34,345,100.00**	**100**	**25,934,205.00**	**0**	**21,761,500.00**	**85.36**	**56,106,600.00**	**0**	**83.9**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		8,041,600.00	1.00	8,041,600.00	1	0	0	0	1	8,041,600.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		8,041,600.00	1.00	8,041,600.00	1	0	0	0	1	8,041,600.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		18,503,500.00	40.00	26,303,500.00	40	25,934,205.00	70	21,761,500.00	110	48,065,000.00	175	83.9	0.0	0	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**54,949,981.00**	**0.00**	**54,197,300.00**	**100**	**52,926,415.00**	**0**	**66,952,900.00**	**0**	**121,150,200.00**	**0**	**126.5**	**0.0**	**63.1**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4,668,600.00	1.00	4,650,000.00	1	3,668,600.00	1	3,642,500.00	2	8,292,500.00	100	99.3	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		14,027,700.00	1.00	13,522,500.00	3	9,101,500.00	7	16,564,400.00	8	30,086,900.00	233.3	182	0.0	118.1	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2,855,900.00	3.00	2,752,400.00	3	3,055,200.00	6	6,036,000.00	9	8,788,400.00	200	197.6	0.0	211.4	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		25,071,181.00	4.00	25,069,800.00	5	28,500,000.00	5.78	28,500,000.00	9.78	53,569,800.00	115.6	100	0.0	17.9	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5,626,600.00	1.00	5,502,600.00	1	3,901,115.00	2	7,548,000.00	3	13,050,600.00	200	193.5	0.0	134.1	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2,700,000.00	12.00	2,700,000.00	12	2,700,000.00	6	2,700,000.00	18	5,400,000.00	50	100	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	0.00	0	1	2,000,000.00	3	1,962,000.00	3	1,962,000.00	300	98.1	0.0	0.0	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar**		**16,430,400.00**	**0.00**	**15,995,385.00**	**100**	**16,436,400.00**	**0**	**14,180,917.00**	**0**	**30,176,302.00**	**0**	**86.3**	**0.0**	**26.8**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		16,430,400.00	3.00	15,995,385.00	36	16,436,400.00	45	14,180,917.00	48	30,176,302.00	125	86.3	0.0	26.8	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart**		**20,070,000.00**	**0.00**	**17,249,000.00**	**100**	**16,955,000.00**	**0**	**21,055,000.00**	**0**	**38,304,000.00**	**0**	**124.2**	**0.0**	**49.8**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5,976,000.00	6.00	0	5	860,000.00	1	0	7	0	20	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		14,094,000.00	5.00	16,160,500.00	4	16,095,000.00	2	21,055,000.00	7	37,215,500.00	50	130.8	0.0	71	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu**	**98**	**3,095,226,974.00**	**100.00**	**16,117,200.00**	**100**	**19,319,704.00**	**0**	**26,955,400.00**	**100**	**43,072,600.00**	**0**	**139.5**	**0**	**0.5**	**Kelurahan Tlumpu**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart**		**19,319,704.00**	**90.60**	**16,117,200.00**	**100**	**19,319,704.00**	**0**	**26,955,400.00**	**90.6**	**43,072,600.00**	**0**	**139.5**	**0.0**	**84.3**	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		919,704.00	2.00	917,200.00	2	919,704.00	1.5	1,380,400.00	3.5	2,297,600.00	75	150.1	0.0	104.4	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		18,400,000.00	2.00	15,200,000.00	2	18,400,000.00	4	25,575,000.00	6	40,775,000.00	200	139	0.0	83.3	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**75**	**9,350,000,000.00**	**100.00**	**1,035,970,975.00**	**100**	**1,033,467,262.00**	**0**	**980,384,752.00**	**100**	**2,016,355,727.00**	**0**	**94.9**	**0**	**0.4**	**Kelurahan Tlumpu**
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase RT Berdaya**	**100**	**9,350,000,000.00**	**100.00**	**1,035,970,975.00**	**100**	**1,033,467,262.00**	**0**	**980,384,752.00**	**100**	**2,016,355,727.00**	**0**	**94.9**	**0**	**0.4**	**Kelurahan Tlumpu**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar**		**985,661,428.00**	**0.00**	**983,094,775.00**	**100**	**985,291,428.00**	**0**	**929,037,952.00**	**0**	**1,912,132,727.00**	**0**	**94.3**	**0.0**	**3.6**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		18,569,428.00	4.00	18,434,775.00	4	18,569,428.00	8	18,132,000.00	12	36,566,775.00	200	97.6	0.0	26.9	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			0		0		0		600,000,000.00	0	600,000,000.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		967,092,000.00	4.00	964,660,000.00	4	316,722,000.00	4.08	310,905,952.00	8.08	1,275,565,952.00	102	98.2	0.0	3.1	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar**		**53,041,182.00**	**90.60**	**52,876,200.00**	**100**	**48,175,834.00**	**0**	**51,346,800.00**	**90.6**	**104,223,000.00**	**0**	**106.6**	**0.0**	**0**	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		47,993,616.00	5.00	47,973,000.00	6	42,570,000.00	9	45,950,000.00	14	93,923,000.00	150	107.9	0.0	0	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		5,047,566.00	2.00	4,903,200.00	2	5,605,834.00	2	5,396,800.00	4	10,300,000.00	100	96.3	0.0	0	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**679,036,618.00**	**100.00**	**78,577,300.00**	**100**	**10,800,000.00**	**0**	**10,800,000.00**	**100**	**89,377,300.00**	**0**	**100**	**0**	**0**	**Kelurahan Tlumpu**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart**		**78,627,500.00**	**0.00**	**78,577,300.00**	**100**	**10,800,000.00**	**0**	**10,800,000.00**	**0**	**89,377,300.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe		78,627,500.00	185.00	78,577,300.00	200	10,800,000.00	250	10,800,000.00	435	89,377,300.00	125	100	0.0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan**	**89**	**14,059,927,237.00**	**90.08**	**95,384,178.00**	**84.85**	**76,882,130.00**	**0**	**86,742,041.00**	**90.08**	**182,126,219.00**	**0**	**112.8**	**0**	**0.2**	**Kelurahan Turi**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**2,968,000.00**	**200.00**	**2,664,000.00**	**100**	**1,920,000.00**	**0**	**1,680,000.00**	**200**	**4,344,000.00**	**0**	**87.5**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1,272,000.00	23.60	848,000.00	7	960,000.00	16	720,000.00	39.6	1,568,000.00	228.6	75	0.0	0	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1,696,000.00	24.00	1,816,000.00	8	960,000.00	18	960,000.00	42	2,776,000.00	225	100	0.0	0	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**1,696,000.00**	**200.00**	**1,180,000.00**	**100**	**640,000.00**	**0**	**640,000.00**	**200**	**1,820,000.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1,696,000.00	56.00	1,180,000.00	4	640,000.00	5	640,000.00	61	1,820,000.00	125	100	0.0	0	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**31,370,000.00**	**200.00**	**28,957,800.00**	**100**	**17,040,400.00**	**0**	**16,434,000.00**	**200**	**45,391,800.00**	**0**	**96.4**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		6,500,000.00	3.00	6,000,000.00	1	600,000.00	0	0	3	6,000,000.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		24,870,000.00	84.00	22,957,800.00	12	16,440,400.00	27	16,434,000.00	111	39,391,800.00	225	100	0.0	0	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**15,570,100.00**	**200.00**	**39,387,600.00**	**100**	**24,622,500.00**	**0**	**34,444,600.00**	**200**	**73,832,200.00**	**0**	**139.9**	**0.0**	**154.5**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		932,600.00	3.00	929,500.00	1	579,700.00	3	1,159,200.00	6	2,088,700.00	300	200	0.0	124.3	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		11,703,000.00	13.00	18,413,100.00	5	6,965,800.00	12	12,960,800.00	25	31,373,900.00	240	186.1	0.0	104.9	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1,345,900.00	6.00	1,345,000.00	3	2,791,800.00	8	3,798,000.00	14	5,143,000.00	266.7	136	0.0	238.5	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		22,704,000.00	61.00	13,674,000.00	2	8,300,000.00	5	6,860,000.00	66	20,534,000.00	250	82.7	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2,934,500.00	3.00	2,506,000.00	1	1,841,000.00	2	3,630,000.00	5	6,136,000.00	200	197.2	0.0	123.7	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2,700,000.00	36.00	2,520,000.00	12	2,700,000.00	27	3,150,000.00	63	5,670,000.00	225	116.7	0.0	33.3	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	0.00	0	1	1,444,200.00	2	2,886,600.00	2	2,886,600.00	200	199.9	0.0	0.0	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**0**	**0.00**	**0**	**100**	**3,000,000.00**	**0**	**15,151,500.00**	**0**	**15,151,500.00**	**0**	**505.1**	**0.0**	**0.0**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	0.00	0	1	3,000,000.00	1	15,151,500.00	1	15,151,500.00	100	505.1	0.0	0.0	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar**		**18,624,717.00**	**200.00**	**12,945,278.00**	**100**	**22,967,230.00**	**0**	**13,566,941.00**	**200**	**26,512,219.00**	**0**	**59.1**	**0.0**	**20.3**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		18,624,717.00	108.00	12,945,278.00	36	22,967,230.00	81	13,566,941.00	189	26,512,219.00	225	59.1	0.0	20.3	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart**		**1,950,000.00**	**200.00**	**10,249,500.00**	**100**	**6,692,000.00**	**0**	**4,825,000.00**	**200**	**15,074,500.00**	**0**	**72.1**	**0.0**	**0**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1,950,000.00	15.00	1,357,500.00	6	1,032,000.00	14	0	29	1,357,500.00	233.3	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4,152,000.00	17.00	8,892,000.00	14	5,660,000.00	21	4,825,000.00	38	13,717,000.00	150	85.2	0.0	0	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu**	**98**	**3,095,226,974.00**	**100.00**	**15,808,000.00**	**100**	**25,800,000.00**	**0**	**15,600,000.00**	**100**	**31,408,000.00**	**0**	**60.5**	**0**	**0**	**Kelurahan Turi**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart**		**33,648,000.00**	**200.00**	**15,808,000.00**	**100**	**25,800,000.00**	**0**	**15,600,000.00**	**200**	**31,408,000.00**	**0**	**60.5**	**0.0**	**4.2**	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		848,000.00	2.00	1,008,000.00	2	480,000.00	4.5	480,000.00	6.5	1,488,000.00	225	100	0.0	0	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		32,800,000.00	12.00	14,800,000.00	2	25,320,000.00	5	15,120,000.00	17	29,920,000.00	250	59.7	0.0	4.3	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**75**	**9,350,000,000.00**	**100.00**	**876,004,800.00**	**100**	**896,354,300.00**	**0**	**546,907,507.00**	**100**	**1,422,912,307.00**	**0**	**61**	**0**	**0.5**	**Kelurahan Turi**
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase RT Berdaya**	**100**	**9,350,000,000.00**	**100.00**	**876,004,800.00**	**100**	**896,354,300.00**	**0**	**546,907,507.00**	**100**	**1,422,912,307.00**	**0**	**61**	**0**	**0.5**	**Kelurahan Turi**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar**		**801,586,013.00**	**200.00**	**800,706,300.00**	**100**	**802,959,300.00**	**0**	**451,673,552.00**	**200**	**1,252,379,852.00**	**0**	**56.3**	**0.0**	**5.1**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		13,920,500.00	21.00	13,918,800.00	10	16,255,300.00	12	15,790,000.00	33	29,708,800.00	120	97.1	0.0	49.5	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			0		0		0		243,000,000.00	0	243,000,000.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		787,665,513.00	28.00	786,787,500.00	10	371,704,000.00	20	192,883,552.00	48	979,671,052.00	200	51.9	0.0	4.3	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar**		**75,180,300.00**	**200.00**	**75,298,500.00**	**100**	**93,395,000.00**	**0**	**95,233,955.00**	**200**	**170,532,455.00**	**0**	**102**	**0.0**	**7**	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		68,390,300.00	31.00	68,388,500.00	7	83,339,600.00	17	85,183,955.00	48	153,572,455.00	242.9	102.2	0.0	7.7	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		6,790,000.00	8.00	6,910,000.00	2	10,055,400.00	5	10,050,000.00	13	16,960,000.00	250	99.9	0.0	0	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**679,036,618.00**	**100.00**	**61,016,000.00**	**100**	**21,360,000.00**	**0**	**21,360,000.00**	**100**	**82,376,000.00**	**0**	**100**	**0**	**0**	**Kelurahan Turi**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart**		**61,347,000.00**	**200.00**	**61,016,000.00**	**100**	**21,360,000.00**	**0**	**21,360,000.00**	**200**	**82,376,000.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe		61,347,000.00	259.00	61,016,000.00	208	21,360,000.00	468	21,360,000.00	727	82,376,000.00	225	100	0.0	0	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan**	**89**	**14,059,927,237.00**	**90.08**	**153,009,889.00**	**84.85**	**116,209,300.00**	**0**	**135,915,581.00**	**90.08**	**288,925,470.00**	**0**	**117**	**0**	**0.2**	**Kelurahan Karangsari**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**4,749,600.00**	**85.36**	**4,749,600.00**	**100**	**2,936,000.00**	**0**	**2,893,100.00**	**85.36**	**7,642,700.00**	**0**	**98.5**	**0.0**	**0**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2,458,300.00	8.00	2,458,300.00	10	1,443,000.00	24	1,421,600.00	32	3,879,900.00	240	98.5	0.0	0	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2,291,300.00	14.00	2,291,300.00	8	1,493,000.00	10	1,471,500.00	24	3,762,800.00	125	98.6	0.0	0	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**2,027,700.00**	**85.36**	**1,633,300.00**	**100**	**1,344,400.00**	**0**	**1,328,160.00**	**85.36**	**2,961,460.00**	**0**	**98.8**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2,027,700.00	2.00	1,633,300.00	4	1,344,400.00	10	1,328,160.00	12	2,961,460.00	250	98.8	0.0	0	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**15,085,739.00**	**85.36**	**34,966,039.00**	**100**	**13,916,600.00**	**0**	**13,886,600.00**	**85.36**	**48,852,639.00**	**0**	**99.8**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	0.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		15,085,739.00	3.00	34,966,039.00	50	13,916,600.00	138	13,886,600.00	141	48,852,639.00	276	99.8	0.0	0	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**71,070,600.00**	**85.36**	**77,722,200.00**	**100**	**64,848,300.00**	**0**	**85,354,771.00**	**85.36**	**163,076,971.00**	**0**	**131.6**	**0.0**	**35.1**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3,389,300.00	1.00	3,389,300.00	1	3,395,200.00	3	6,766,000.00	4	10,155,300.00	300	199.3	0.0	199.6	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		14,909,300.00	5.00	14,646,100.00	5	13,503,500.00	12	13,000,146.00	17	27,646,246.00	240	96.3	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3,079,000.00	3.00	7,695,600.00	3	3,075,400.00	5	6,150,800.00	8	13,846,400.00	166.7	200	0.0	199.8	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		37,420,500.00	735.00	40,111,000.00	15	32,100,000.00	35	46,208,600.00	770	86,319,600.00	233.3	144	0.0	28.7	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		8,372,500.00	1.00	7,980,200.00	1	7,884,000.00	3	7,691,725.00	4	15,671,925.00	300	97.6	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3,900,000.00	12.00	3,900,000.00	12	3,900,000.00	27	4,550,000.00	39	8,450,000.00	225	116.7	0.0	33.3	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	0.00	0	1	990,200.00	2	987,500.00	2	987,500.00	200	99.7	0.0	0.0	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar**		**12,160,000.00**	**85.36**	**9,865,950.00**	**100**	**15,953,200.00**	**0**	**12,799,750.00**	**85.36**	**22,665,700.00**	**0**	**80.2**	**0.0**	**22.6**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12,160,000.00	24.00	9,865,950.00	36	15,953,200.00	81	12,799,750.00	105	22,665,700.00	225	80.2	0.0	22.6	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart**		**24,299,900.00**	**85.36**	**24,072,800.00**	**100**	**17,210,800.00**	**0**	**19,653,200.00**	**85.36**	**43,726,000.00**	**0**	**114.2**	**0.0**	**21**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7,003,900.00	6.00	6,776,800.00	6	5,996,800.00	14	5,890,200.00	20	12,667,000.00	233.3	98.2	0.0	0	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12,296,000.00	18.00	12,296,000.00	18	11,214,000.00	27	13,763,000.00	45	26,059,000.00	150	122.7	0.0	41.5	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu**	**98**	**3,095,226,974.00**	**100.00**	**17,000,000.00**	**100**	**28,950,000.00**	**0**	**25,353,000.00**	**100**	**42,353,000.00**	**0**	**87.6**	**0**	**0.2**	**Kelurahan Karangsari**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart**		**32,000,000.00**	**0.00**	**17,000,000.00**	**100**	**28,950,000.00**	**0**	**25,353,000.00**	**0**	**42,353,000.00**	**0**	**87.6**	**0.0**	**16.3**	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		0	0.00	0	2	1,050,000.00	5	1,283,000.00	5	1,283,000.00	250	122.2	0.0	0.0	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		32,000,000.00	40.00	17,000,000.00	2	27,900,000.00	5	24,070,000.00	45	41,070,000.00	250	86.3	0.0	16.3	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**75**	**9,350,000,000.00**	**100.00**	**1,255,926,315.00**	**100**	**1,267,471,300.00**	**0**	**1,272,621,791.00**	**100**	**2,528,548,106.00**	**0**	**100.4**	**0**	**0.7**	**Kelurahan Karangsari**
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase RT Berdaya**	**100**	**9,350,000,000.00**	**100.00**	**1,255,926,315.00**	**100**	**1,267,471,300.00**	**0**	**1,272,621,791.00**	**100**	**2,528,548,106.00**	**0**	**100.4**	**0**	**0.7**	**Kelurahan Karangsari**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar**		**1,154,839,200.00**	**0.00**	**1,178,164,700.00**	**100**	**1,183,475,000.00**	**0**	**1,190,589,701.00**	**0**	**2,368,754,401.00**	**0**	**100.6**	**0.0**	**6**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		21,156,000.00	14.00	20,995,000.00	17	20,796,000.00	37	22,548,000.00	51	43,543,000.00	217.6	108.4	0.0	40.9	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			0		0		0		925,000,000.00	0	925,000,000.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1,133,683,200.00	6.00	1,157,169,700.00	6	222,679,000.00	13	243,041,701.00	19	1,400,211,401.00	216.7	109.1	0.0	5.3	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar**		**80,846,115.00**	**0.00**	**77,761,615.00**	**100**	**83,996,300.00**	**0**	**82,032,090.00**	**0**	**159,793,705.00**	**0**	**97.7**	**0.0**	**0**	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		71,253,600.00	7.00	68,199,100.00	4	78,301,100.00	8	76,517,300.00	15	144,716,400.00	200	97.7	0.0	0	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		9,592,515.00	2.00	9,562,515.00	2	5,695,200.00	4.5	5,514,790.00	6.5	15,077,305.00	225	96.8	0.0	0	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**679,036,618.00**	**100.00**	**53,640,900.00**	**100**	**13,800,000.00**	**0**	**13,771,500.00**	**100**	**67,412,400.00**	**0**	**99.8**	**0**	**0**	**Kelurahan Karangsari**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart**		**58,971,000.00**	**0.00**	**53,640,900.00**	**100**	**13,800,000.00**	**0**	**13,771,500.00**	**0**	**67,412,400.00**	**0**	**99.8**	**0.0**	**0**	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe		58,971,000.00	40.00	53,640,900.00	395	13,800,000.00	789	13,771,500.00	829	67,412,400.00	199.7	99.8	0.0	0	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan**	**89**	**14,059,927,237.00**	**90.08**	**127,774,286.00**	**84.85**	**108,584,601.00**	**0**	**141,898,139.00**	**90.08**	**269,672,425.00**	**0**	**130.7**	**0**	**0.6**	**Kelurahan Sukorejo**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**1,029,600.00**	**0.00**	**1,029,600.00**	**100**	**1,080,000.00**	**0**	**1,072,800.00**	**0**	**2,102,400.00**	**0**	**99.3**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0	20.00	514,800.00	10	540,000.00	24	536,400.00	44	1,051,200.00	240	99.3	0.0	0.0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		514,800.00	8.00	514,800.00	4	540,000.00	8	536,400.00	16	1,051,200.00	200	99.3	0.0	0	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**514,800.00**	**0.00**	**514,800.00**	**100**	**540,000.00**	**0**	**536,400.00**	**0**	**1,051,200.00**	**0**	**99.3**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		514,800.00	4.00	514,800.00	4	540,000.00	9	536,400.00	13	1,051,200.00	225	99.3	0.0	0	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**31,284,600.00**	**0.00**	**27,332,600.00**	**100**	**19,406,201.00**	**0**	**16,789,600.00**	**0**	**44,122,200.00**	**0**	**86.5**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		8,041,600.00	1.00	7,964,600.00	1	0	0	0	1	7,964,600.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		23,243,000.00	14.00	19,368,000.00	200	19,406,201.00	416	16,789,600.00	430	36,157,600.00	208	86.5	0.0	0	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**27,988,900.00**	**0.00**	**27,657,600.00**	**100**	**32,704,400.00**	**0**	**43,204,700.00**	**0**	**70,862,300.00**	**0**	**132.1**	**0.0**	**93.2**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1,506,000.00	1.00	1,506,000.00	1	1,428,000.00	2	1,270,000.00	3	2,776,000.00	200	88.9	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12,290,600.00	1.00	12,108,600.00	1	10,074,000.00	3	18,905,600.00	4	31,014,200.00	300	187.7	0.0	153.8	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3,734,400.00	1.00	3,733,800.00	1	1,754,000.00	3	1,563,500.00	4	5,297,300.00	300	89.1	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2,940,000.00	1.00	2,940,000.00	2	13,100,000.00	5	15,637,200.00	6	18,577,200.00	250	119.4	0.0	223.6	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		3,677,900.00	1.00	3,659,200.00	1	2,548,400.00	2	2,264,000.00	3	5,923,200.00	200	88.8	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3,840,000.00	12.00	3,710,000.00	12	2,400,000.00	27	2,170,000.00	39	5,880,000.00	225	90.4	0.0	16.1	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	0.00	0	1	1,400,000.00	2	1,394,400.00	2	1,394,400.00	200	99.6	0.0	0.0	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**22,110,666.00**	**0.00**	**49,347,500.00**	**100**	**28,347,500.00**	**0**	**56,693,000.00**	**0**	**106,040,500.00**	**0**	**200**	**0.0**	**256.4**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		22,110,666.00	1.00	49,347,500.00	6	28,347,500.00	14	56,693,000.00	15	106,040,500.00	233.3	200	0.0	256.4	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar**		**16,334,400.00**	**0.00**	**6,878,966.00**	**100**	**16,422,000.00**	**0**	**13,561,639.00**	**0**	**20,440,605.00**	**0**	**82.6**	**0.0**	**28.1**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		16,334,400.00	24.00	6,878,966.00	4	16,422,000.00	9	13,561,639.00	33	20,440,605.00	225	82.6	0.0	28.1	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart**		**16,882,500.00**	**0.00**	**15,013,220.00**	**100**	**10,084,500.00**	**0**	**10,040,000.00**	**0**	**25,053,220.00**	**0**	**99.6**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10,276,000.00	7.00	8,406,720.00	6	4,088,000.00	13	4,043,500.00	20	12,450,220.00	216.7	98.9	0.0	0	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6,606,500.00	17.00	6,606,500.00	11	5,996,500.00	16	5,996,500.00	33	12,603,000.00	145.5	100	0.0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu**	**98**	**3,095,226,974.00**	**100.00**	**58,986,800.00**	**100**	**60,890,000.00**	**0**	**71,277,400.00**	**100**	**130,264,200.00**	**0**	**117.1**	**0**	**0.8**	**Kelurahan Sukorejo**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart**		**66,986,800.00**	**2.00**	**58,986,800.00**	**100**	**60,890,000.00**	**0**	**71,277,400.00**	**2**	**130,264,200.00**	**0**	**117.1**	**0.0**	**34.9**	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		514,800.00	1.00	514,800.00	2	540,000.00	3	536,400.00	4	1,051,200.00	150	99.3	0.0	0	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		58,472,000.00	2.00	58,472,000.00	2	60,350,000.00	5	70,741,000.00	7	129,213,000.00	250	117.2	0.0	40	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase RT Berdaya**	**75**	**9,350,000,000.00**	**100.00**	**3,199,864,900.00**	**100**	**3,136,569,400.00**	**0**	**2,975,815,756.00**	**100**	**6,175,680,656.00**	**0**	**94.9**	**0**	**1.2**	**Kelurahan Sukorejo**
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	**9,350,000,000.00**	**100.00**	**3,199,864,900.00**	**100**	**3,136,569,400.00**	**0**	**2,975,815,756.00**	**100**	**6,175,680,656.00**	**0**	**94.9**	**0**	**1.2**	**Kelurahan Sukorejo**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar**		**3,067,588,000.00**	**0.00**	**3,117,587,400.00**	**100**	**3,059,992,700.00**	**0**	**2,900,396,456.00**	**0**	**6,017,983,856.00**	**0**	**94.8**	**0.0**	**3.6**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		38,141,000.00	4.00	38,141,000.00	9	37,510,000.00	9	33,072,000.00	13	71,213,000.00	100	88.2	0.0	27.5	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			0		0		0		1,895,000,000.00	0	1,895,000,000.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3,029,447,000.00	15.00	3,079,446,400.00	15	952,482,700.00	32	972,324,456.00	47	4,051,770,856.00	213.3	102.1	0.0	3.3	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar**		**88,425,500.00**	**0.00**	**82,277,500.00**	**100**	**76,576,700.00**	**0**	**75,419,300.00**	**0**	**157,696,800.00**	**0**	**98.5**	**0.0**	**0**	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		78,776,300.00	4.00	72,628,300.00	8	65,181,500.00	18	64,459,100.00	22	137,087,400.00	225	98.9	0.0	0	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		9,649,200.00	2.00	9,649,200.00	2	11,395,200.00	5.5	10,960,200.00	7.5	20,609,400.00	275	96.2	0.0	0	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**679,036,618.00**	**100.00**	**116,559,500.00**	**100**	**29,625,000.00**	**0**	**29,492,500.00**	**100**	**146,052,000.00**	**0**	**99.6**	**0**	**1.2**	**Kelurahan Sukorejo**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart**		**127,548,000.00**	**0.00**	**116,559,500.00**	**100**	**29,625,000.00**	**0**	**29,492,500.00**	**0**	**146,052,000.00**	**0**	**99.6**	**0.0**	**6.3**	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe		127,548,000.00	90.00	116,559,500.00	70	29,625,000.00	157	29,492,500.00	247	146,052,000.00	224.3	99.6	0.0	6.3	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan**	**89**	**14,059,927,237.00**	**90.08**	**112,801,355.00**	**84.85**	**74,691,977.00**	**0**	**72,648,380.00**	**90.08**	**185,449,735.00**	**0**	**97.3**	**0**	**0**	**Kelurahan Tanjungsari**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**3,551,000.00**	**100.00**	**2,915,000.00**	**100**	**2,950,000.00**	**0**	**2,926,400.00**	**100**	**5,841,400.00**	**0**	**99.2**	**0.0**	**0**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1,431,000.00	7.00	1,431,000.00	10	1,350,000.00	25	1,339,200.00	32	2,770,200.00	250	99.2	0.0	0	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2,120,000.00	8.00	1,484,000.00	9	1,600,000.00	21	1,587,200.00	29	3,071,200.00	233.3	99.2	0.0	0	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**3,360,000.00**	**100.00**	**840,000.00**	**100**	**840,000.00**	**0**	**835,200.00**	**100**	**1,675,200.00**	**0**	**99.4**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		3,360,000.00	4.00	840,000.00	4	840,000.00	10	835,200.00	14	1,675,200.00	250	99.4	0.0	0	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**32,031,311.00**	**100.00**	**28,031,311.00**	**100**	**12,904,313.00**	**0**	**12,416,600.00**	**100**	**40,447,911.00**	**0**	**96.2**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		5,600,000.00	1.00	5,600,000.00	1	0	1	0	2	5,600,000.00	100	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		26,431,311.00	14.00	22,431,311.00	12	12,904,313.00	27	12,416,600.00	41	34,847,911.00	225	96.2	0.0	0	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**31,128,000.00**	**100.00**	**59,260,150.00**	**100**	**36,557,800.00**	**0**	**36,549,800.00**	**100**	**95,809,950.00**	**0**	**100**	**0.0**	**2.9**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2,322,600.00	1.00	2,322,600.00	8	2,218,000.00	18	2,150,000.00	19	4,472,600.00	225	96.9	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		8,677,800.00	3.00	8,662,200.00	5	10,364,000.00	9	10,363,600.00	12	19,025,800.00	180	100	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2,954,600.00	1.00	2,954,600.00	3	1,457,500.00	4	1,457,500.00	5	4,412,100.00	133.3	100	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6,543,000.00	1.00	38,140,000.00	1	14,560,000.00	2	14,395,600.00	3	52,535,600.00	200	98.9	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5,350,000.00	1.00	5,260,750.00	1	4,259,300.00	3	4,259,100.00	4	9,519,850.00	300	100	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		5,280,000.00	12.00	1,920,000.00	24	2,700,000.00	42	2,925,000.00	54	4,845,000.00	175	108.3	0.0	17	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	0.00	0	1	999,000.00	2	999,000.00	2	999,000.00	200	100	0.0	0.0	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar**		**8,999,664.00**	**100.00**	**10,308,794.00**	**100**	**9,898,464.00**	**0**	**8,067,480.00**	**100**	**18,376,274.00**	**0**	**81.5**	**0.0**	**19.4**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		8,999,664.00	12.00	10,308,794.00	12	9,898,464.00	27	8,067,480.00	39	18,376,274.00	225	81.5	0.0	19.4	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart**		**10,740,100.00**	**100.00**	**11,446,100.00**	**100**	**11,541,400.00**	**0**	**11,852,900.00**	**100**	**23,299,000.00**	**0**	**102.7**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7,617,100.00	8.00	8,323,100.00	6	3,279,400.00	14	3,590,900.00	22	11,914,000.00	233.3	109.5	0.0	0	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3,123,000.00	8.00	3,123,000.00	4	8,262,000.00	6	8,262,000.00	14	11,385,000.00	150	100	0.0	0	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu**	**98**	**3,095,226,974.00**	**100.00**	**40,520,800.00**	**100**	**40,915,000.00**	**0**	**40,756,000.00**	**100**	**81,276,800.00**	**0**	**99.6**	**0**	**0.5**	**Kelurahan Tanjungsari**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart**		**51,360,800.00**	**100.00**	**40,520,800.00**	**100**	**40,915,000.00**	**0**	**40,756,000.00**	**100**	**81,276,800.00**	**0**	**99.6**	**0.0**	**28.4**	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		520,800.00	2.00	0	2	435,000.00	5.5	278,400.00	7.5	278,400.00	275	64	0.0	0	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		50,840,000.00	2.00	40,520,800.00	2	40,480,000.00	5	40,477,600.00	7	80,998,400.00	250	100	0.0	28.7	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**75**	**9,350,000,000.00**	**100.00**	**2,473,185,495.00**	**100**	**2,459,697,600.00**	**0**	**2,485,517,500.00**	**100**	**4,958,702,995.00**	**0**	**101**	**0**	**1.1**	**Kelurahan Tanjungsari**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar**		**2,381,725,800.00**	**100.00**	**2,403,326,700.00**	**100**	**2,371,193,200.00**	**0**	**2,398,002,252.00**	**100**	**4,801,328,952.00**	**0**	**101.1**	**0.0**	**4.4**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		35,123,000.00	9.00	0	9	35,818,800.00	20	35,815,000.00	29	35,815,000.00	222.2	100	0.0	39.6	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			0		0		0		1,700,000,000.00	0	1,700,000,000.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2,346,602,800.00	9.00	2,403,326,700.00	9	635,374,400.00	17	662,187,252.00	26	3,065,513,952.00	188.9	104.2	0.0	3.8	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar**		**69,919,300.00**	**100.00**	**69,858,795.00**	**100**	**88,504,400.00**	**0**	**87,515,248.00**	**100**	**157,374,043.00**	**0**	**98.9**	**0.0**	**0**	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		55,433,900.00	5.00	55,404,645.00	5	73,184,000.00	12	72,239,248.00	17	127,643,893.00	240	98.7	0.0	0	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		14,485,400.00	1.00	14,454,150.00	1	15,320,400.00	3.25	15,276,000.00	4.25	29,730,150.00	325	99.7	0.0	0	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**679,036,618.00**	**100.00**	**97,534,800.00**	**100**	**17,230,000.00**	**0**	**16,996,800.00**	**100**	**114,531,600.00**	**0**	**98.6**	**0**	**0**	**Kelurahan Tanjungsari**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart**		**99,075,000.00**	**100.00**	**97,534,800.00**	**100**	**17,230,000.00**	**0**	**16,996,800.00**	**100**	**114,531,600.00**	**0**	**98.6**	**0.0**	**0**	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe		99,075,000.00	20.00	97,534,800.00	12	17,230,000.00	27	16,996,800.00	47	114,531,600.00	225	98.6	0.0	0	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Baik (86)**	**13.204.978.034,00**	**89.5**	**12.751.392.355,00**	**84**	**13.954.230.284,00**	**88.42**	**15.457.097.630,00**	**177.92**	**28.208.489.985,00**	**105.3**	**110.8**	**0**	**35.1**	**Kecamatan Sananwetan**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**	**100**	**9.988.366,00**	**100**	**67.568.300,00**	**100**	**10.300.000,00**	**100**	**21.638.250,00**	**200**	**89.206.550,00**	**100**	**210.1**	**100**	**20**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6.905.200,00	13	6.905.200,00	14	3.300.000,00	14	14.638.250,00	27	21.543.450,00	100	443.6	0	0	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12.482.300,00	7	60.663.100,00	6	7.000.000,00	6	7.000.000,00	13	67.663.100,00	100	100	0	16	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**9.461.015.788,00**	**100**	**9.851.901.237,00**	**100**	**11.230.070.684,00**	**100**	**11.466.620.296,00**	**200**	**21.318.521.533,00**	**100**	**102.1**	**0**	**39.4**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		9.461.015.788,00	80	9.851.901.237,00	88	11.230.070.684,00	88	11.453.832.996,00	168	21.305.734.233,00	100	102	0	39.4	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**212.922.930,00**	**100**	**140.313.000,00**	**100**	**125.375.200,00**	**100**	**247.797.350,00**	**200**	**388.110.350,00**	**100**	**197.6**	**0**	**15.1**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		52.929.500,00	3	52.929.500,00	3	0,00	0	0,00	3	52.929.500,00	0	0	0	0	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		89.386.310,00	120	87.383.500,00	120	125.375.200,00	120	247.797.350,00	240	335.180.850,00	100	197.6	0	36	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**245.825.900,00**	**100**	**321.195.228,00**	**100**	**168.923.400,00**	**100**	**627.278.815,00**	**200**	**948.474.043,00**	**100**	**371.3**	**0**	**104.9**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		18.868.700,00	1	14.655.000,00	1	4.741.000,00	1	43.474.828,00	2	58.129.828,00	100	917	0	105.7	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		26.394.000,00	4	25.399.500,00	4	27.322.800,00	4	160.642.204,00	8	186.041.704,00	100	587.9	0	370.9	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		28.245.900,00	4	25.422.600,00	4	11.568.500,00	4	103.725.755,00	8	129.148.355,00	100	896.6	0	190.8	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		69.473.500,00	39	69.396.500,00	38	29.083.200,00	38	151.553.000,00	77	220.949.500,00	100	521.1	0	63.4	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		20.169.300,00	1	19.378.800,00	1	17.110.500,00	1	75.103.550,00	2	94.482.350,00	100	438.9	0	121.8	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		8.100.000,00	36	6.480.000,00	36	3.600.000,00	36	27.495.000,00	72	33.975.000,00	100	763.8	0	123.3	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100.968.500,00	20	160.462.828,00	20	74.997.400,00	20	58.431.828,00	40	218.894.656,00	100	77.9	0	3.6	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0,00	0	0,00	1	500.000,00	1	6.852.650,00	1	6.852.650,00	100	1370.5	0	0	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan**		**946.645.600,00**	**100**	**436.956.000,00**	**100**	**917.569.800,00**	**100**	**1.122.054.972,00**	**200**	**1.559.010.972,00**	**100**	**122.3**	**0**	**12.9**	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		25.286.000,00	30	25.275.000,00	10	0,00	0	50.196.400,00	30	75.471.400,00	0	0	0	36.8	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		34.310.400,00	4	109.010.000,00	6	60.069.800,00	6	208.532.512,00	10	317.542.512,00	100	347.2	0	131.3	
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		887.049.200,00	4	302.671.000,00	8	857.500.000,00	4	863.326.060,00	8	1.165.997.060,00	50	100.7	0	7.7	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**971.709.050,00**	**100**	**930.076.201,00**	**100**	**1.111.089.500,00**	**100**	**1.454.495.371,00**	**200**	**2.384.571.572,00**	**100**	**130.9**	**0**	**44.6**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		63.780.050,00	24	54.951.393,00	36	73.983.500,00	27	219.493.396,00	51	274.444.789,00	75	296.7	0	94	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		907.929.000,00	36	875.124.808,00	36	1.037.106.000,00	27	1.235.001.975,00	63	2.110.126.783,00	75	119.1	0	41.1	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**169.407.624,00**	**100**	**1.003.382.389,00**	**100**	**390.901.700,00**	**100**	**517.212.576,00**	**200**	**1.520.594.965,00**	**100**	**132.3**	**0**	**32.3**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		91.529.124,00	11	150.123.589,00	13	89.335.200,00	13	141.303.646,00	24	291.427.235,00	100	158.2	0	32.5	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		27.878.500,00	64	37.487.000,00	58	26.566.500,00	58	108.084.000,00	122	145.571.000,00	100	406.8	0	89.7	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		50.000.000,00	7	815.771.800,00	1	205.000.000,00	1	198.866.930,00	8	1.014.638.730,00	100	97	0	0	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0,00	0	0,00	1	70.000.000,00	1	68.958.000,00	1	68.958.000,00	100	98.5	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara kecamatan dan kelurahan sehingga urusan administrasi kepegawaian berjalan lancar																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih adanya keterlambatan dalam penyampaian informasi kepegawaian dari tingkat kecamatan ke kelurahan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan ketepatan waktu penyampaian informasi internal melalui penggunaan grup komunikasi resmi yang lebih terstruktur																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mengusulkan penguatan sistem manajemen informasi internal berbasis digital agar pelayanan kepegawaian lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi																		
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase layanan kecamatan tepat waktu**	**98**	**2.828.267.957,00**	**100**	**318.088.416,00**	**100**	**287.326.460,00**	**100**	**584.478.149,00**	**200**	**902.566.565,00**	**100**	**203.4**	**102**	**5.4**	**Kecamatan Sananwetan**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart**		**353.547.500,00**	**100**	**318.088.416,00**	**100**	**287.326.460,00**	**100**	**584.478.149,00**	**200**	**902.566.565,00**	**100**	**203.4**	**0**	**42.8**	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		3.688.000,00	1	3.688.000,00	1	1.222.400,00	1	9.958.406,00	2	13.646.406,00	100	814.7	0	0	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		349.859.500,00	6.04	314.400.416,00	4	286.104.060,00	4	574.519.743,00	10.04	888.920.159,00	100	200.8	0	43.3	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Disiplin aparatur dalam mematuhi SOP pelayanan sehingga semua urusan dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pada saat tertentu, jumlah pegawai terbatas ketika ada pegawai yang tugas luar atau cuti, sehingga pelayanan berpotensi menumpuk																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan monitoring rutin terhadap beban kerja harian agar distribusi tugas lebih merata dan pelayanan tetap terjaga tepat waktu																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mengusulkan penambahan dukungan tenaga non-ASN atau optimalisasi SDM untuk memperkuat keberlanjutan layanan tepat waktu																		
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**75**	**21.063.598.118,00**	**100**	**3.256.794.535,00**	**100**	**1.238.021.094,00**	**100**	**17.440.022.701,00**	**200**	**20.696.817.236,00**	**100**	**1408.7**	**133.3**	**8.5**	**Kecamatan Sananwetan**
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase RT Berdaya**	**100**	**21.063.598.118,00**	**100**	**3.256.794.535,00**	**100**	**1.238.021.094,00**	**100**	**17.440.022.701,00**	**200**	**20.696.817.236,00**	**100**	**1408.7**	**100**	**8.5**	**Kecamatan Sananwetan**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart**		**1.892.394.300,00**	**100**	**2.828.635.223,00**	**100**	**861.738.195,00**	**100**	**16.406.085.712,00**	**200**	**19.234.720.935,00**	**100**	**1903.8**	**0**	**85**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		53.534.300,00	7	50.853.700,00	14	45.550.100,00	14	279.392.516,00	21	330.246.216,00	100	613.4	0	271.5	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.882.590.800,00	7	2.777.781.523,00	9	816.188.095,00	9	5.769.448.096,00	16	8.547.229.619,00	100	706.9	0	77.7	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart**		**315.802.028,00**	**100**	**428.159.312,00**	**100**	**376.282.899,00**	**100**	**1.033.936.989,00**	**200**	**1.462.096.301,00**	**100**	**274.8**	**0**	**58.5**	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		318.430.885,00	7	325.662.112,00	7	293.599.100,00	7	910.963.897,00	14	1.236.626.009,00	100	310.3	0	58	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		102.497.200,00	4	102.497.200,00	4	82.683.799,00	4	122.973.092,00	8	225.470.292,00	100	148.7	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya partisipasi aktif dari kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam menindaklanjuti program pemberdayaan masyarakat																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Sebagian masyarakat masih kurang konsisten dalam melaksanakan kegiatan yang sudah disepakati bersama saat koordinasi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan pendampingan intensif kepada kelurahan agar hasil koordinasi lebih terarah pada program prioritas yang realistis dijalankan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mengusulkan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan melalui pelatihan dan pendampingan agar kegiatan pemberdayaan berjalan berkelanjutan																		
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**486.664.088,00**	**100**	**488.077.650,00**	**100**	**88.913.600,00**	**100**	**258.569.200,00**	**200**	**746.646.850,00**	**100**	**290.8**	**100**	**8.1**	**Kecamatan Sananwetan**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart**		**496.736.100,00**	**100**	**488.077.650,00**	**100**	**88.913.600,00**	**100**	**258.569.200,00**	**200**	**746.646.850,00**	**100**	**290.8**	**0**	**7.9**	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe		496.736.100,00	1698	488.077.650,00	770	88.913.600,00	770	258.569.200,00	2468	746.646.850,00	100	290.8	0	7.9	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya kerjasama yang solid antara kecamatan, kelurahan, dan stakeholder lain sehingga setiap hasil koordinasi dapat segera ditindaklanjuti																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Beberapa pihak eksternal terkadang terlambat merespons hasil koordinasi sehingga tindak lanjut membutuhkan waktu lebih panjang																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan intensitas komunikasi informal dengan pihak-pihak terkait agar respon terhadap hasil koordinasi lebih cepat																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mengusulkan program penguatan forum koordinasi lintas sektoral secara berkala untuk mempercepat penyelesaian isu pemerintahan umum																		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Baik (86)**	**13,204,978,034.00**	**0.00**	**108,308,425.00**	**84**	**123,634,208.00**	**0**	**126,122,981.00**	**0**	**234,431,406.00**	**0**	**102**	**0.0**	**0.3**	**Kelurahan Gedog**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**1,426,000.00**	**0.00**	**1,426,000.00**	**100**	**1,440,000.00**	**0**	**1,416,000.00**	**0**	**2,842,000.00**	**0**	**98.3**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1,426,000.00	5.00	1,426,000.00	9	1,440,000.00	9	1,416,000.00	14	2,842,000.00	100	98.3	0.0	0	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**1,679,000.00**	**0.00**	**1,678,800.00**	**100**	**1,200,000.00**	**0**	**1,180,000.00**	**0**	**2,858,800.00**	**0**	**98.3**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1,679,000.00	3.00	1,678,800.00	4	1,200,000.00	4	1,180,000.00	7	2,858,800.00	100	98.3	0.0	0	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**24,580,000.00**	**0.00**	**30,180,000.00**	**100**	**13,476,000.00**	**0**	**13,422,000.00**	**0**	**43,602,000.00**	**0**	**99.6**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		5,600,000.00	1.00	5,600,000.00	1	0	0	0	1	5,600,000.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		18,980,000.00	0.00	24,580,000.00	65	13,476,000.00	65	13,422,000.00	65	38,002,000.00	100	99.6	0.0	0	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**48,564,400.00**	**0.00**	**52,106,400.00**	**100**	**45,507,100.00**	**0**	**60,223,600.00**	**0**	**112,330,000.00**	**0**	**132.3**	**0.0**	**66.1**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3,989,500.00	1.00	3,989,500.00	1	3,885,500.00	1.00	7,771,000.00	2	11,760,500.00	100	200	0.0	194.8	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12,000,000.00	3.00	11,915,800.00	3	11,830,300.00	4	11,514,200.00	7	23,430,000.00	133.3	97.3	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		9,999,900.00	6.00	9,999,900.00	6	7,987,900.00	16	15,975,800.00	22	25,975,700.00	266.7	200	0.0	159.8	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		14,875,000.00	1.00	19,041,200.00	4	10,775,000.00	7	14,170,000.00	8	33,211,200.00	175	131.5	0.0	48.9	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	1	7,092,600.00	1	7,092,600.00	2	12,092,600.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2,700,000.00	12.00	2,160,000.00	12	2,700,000.00	15	2,700,000.00	27	4,860,000.00	125	100	0.0	40	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	0.00	0	1	1,235,800.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	100	80.9	0.0	0.0	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan**		**0**	**0.00**	**0**	**100**	**22,225,008.00**	**0**	**19,425,000.00**	**0**	**19,425,000.00**	**0**	**87.4**	**0.0**	**0.0**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	0.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	0.00	0	1	22,225,008.00	0	19,425,000.00	0	19,425,000.00	0	87.4	0.0	0.0	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**24,459,273.00**	**0.00**	**14,779,725.00**	**100**	**26,277,000.00**	**0**	**16,947,281.00**	**0**	**31,727,006.00**	**0**	**64.5**	**0.0**	**19.5**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		22,659,273.00	24.00	12,979,725.00	36	24,477,000.00	55	15,147,281.00	79	28,127,006.00	152.8	61.9	0.0	21.1	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1,800,000.00	12.00	1,800,000.00	12	1,800,000.00	19	1,800,000.00	31	3,600,000.00	158.3	100	0.0	0	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**15,633,000.00**	**0.00**	**8,137,500.00**	**100**	**13,509,100.00**	**0**	**13,509,100.00**	**0**	**21,646,600.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0	0.00	0	7	5,315,600.00	7.00	5,315,600.00	7	5,315,600.00	100	100	0.0	0.0	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		8,137,500.00	5.00	8,137,500.00	5	8,193,500.00	4.00	8,193,500.00	9	16,331,000.00	80	100	0.0	0	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase layanan kecamatan tepat waktu**	**98**	**2,828,267,957.00**	**0.00**	**36,054,800.00**	**100**	**63,361,400.00**	**0**	**60,901,400.00**	**0**	**96,956,200.00**	**0**	**96.1**	**0**	**0**	**Kelurahan Gedog**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart**		**81,884,000.00**	**0.00**	**36,054,800.00**	**100**	**63,361,400.00**	**0**	**60,901,400.00**	**0**	**96,956,200.00**	**0**	**96.1**	**0.0**	**0**	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1,248,400.00	1.00	1,248,400.00	1	1,248,400.00	1	1,248,400.00	2	2,496,800.00	100	100	0.0	0	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		80,635,600.00	4.00	34,806,400.00	3	62,113,000.00	3	59,653,000.00	7	94,459,400.00	100	96	0.0	0	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase RT Berdaya**	**75**	**21,063,598,118.00**	**0.00**	**3,078,225,900.00**	**100**	**3,077,357,700.00**	**0**	**3,130,538,766.00**	**0**	**6,208,764,666.00**	**0**	**101.7**	**0**	**0.8**	**Kelurahan Gedog**
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	**21,063,598,118.00**	**0.00**	**3,078,225,900.00**	**100**	**3,077,357,700.00**	**0**	**3,130,538,766.00**	**0**	**6,208,764,666.00**	**0**	**101.7**	**0**	**0.8**	**Kelurahan Gedog**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart**		**2,985,872,700.00**	**0.00**	**2,997,683,700.00**	**100**	**3,003,938,000.00**	**0**	**3,045,658,166.00**	**0**	**6,043,341,866.00**	**0**	**101.4**	**0.0**	**5.4**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		39,984,700.00	10.00	0	15	35,688,800.00	15.00	34,925,000.00	25	34,925,000.00	100	97.9	0.0	33.5	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0	0.00	0	57	0	0	1,995,000,000.00	0	1,995,000,000.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2,945,888,000.00	15.00	2,997,683,700.00	17	973,249,200.00	1.00	1,015,733,166.00	16	4,013,416,866.00	5.9	104.4	0.0	5	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart**		**76,207,527.00**	**0.00**	**80,542,200.00**	**100**	**73,419,700.00**	**0**	**84,880,600.00**	**0**	**165,422,800.00**	**0**	**115.6**	**0.0**	**14.9**	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		75,254,127.00	3.00	79,588,800.00	4	65,524,800.00	1.00	76,985,700.00	4	156,574,500.00	25	117.5	0.0	15.1	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		953,400.00	1.00	953,400.00	2	7,894,900.00	0	7,894,900.00	1	8,848,300.00	0	100	0.0	0	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**486,664,088.00**	**0.00**	**103,823,000.00**	**100**	**20,763,000.00**	**0**	**20,504,000.00**	**0**	**124,327,000.00**	**0**	**98.8**	**0**	**0**	**Kelurahan Gedog**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart**		**100,135,000.00**	**0.00**	**103,823,000.00**	**100**	**20,763,000.00**	**0**	**20,504,000.00**	**0**	**124,327,000.00**	**0**	**98.8**	**0.0**	**0**	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe		100,135,000.00	600.00	103,823,000.00	360	20,763,000.00	118	20,504,000.00	718	124,327,000.00	32.8	98.8	0.0	0	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Baik (86)**	**13,204,978,034.00**	**0.00**	**122,640,330.00**	**84**	**121,280,605.00**	**0**	**135,975,436.00**	**0**	**258,615,766.00**	**0**	**112.1**	**0.0**	**0.2**	**Kelurahan Plosokerep**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**1,426,000.00**	**0.00**	**1,426,000.00**	**100**	**1,426,000.00**	**0**	**1,426,000.00**	**0**	**2,852,000.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1,426,000.00	9.00	1,426,000.00	9	1,426,000.00	7	1,426,000.00	16	2,852,000.00	77.8	100	0.0	0	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**1,679,000.00**	**100.00**	**1,679,000.00**	**100**	**1,679,000.00**	**0**	**1,679,000.00**	**100**	**3,358,000.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1,679,000.00	5.00	1,679,000.00	4	1,679,000.00	4	1,679,000.00	9	3,358,000.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**24,757,000.00**	**79.00**	**24,757,000.00**	**100**	**12,786,000.00**	**0**	**12,786,000.00**	**79**	**37,543,000.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		5,600,000.00	1.00	5,600,000.00	1	0	0	0	1	5,600,000.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		19,157,000.00	36.00	19,157,000.00	40	12,786,000.00	40	12,786,000.00	76	31,943,000.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**53,677,900.00**	**70.00**	**55,255,500.00**	**100**	**37,474,041.00**	**0**	**59,331,000.00**	**70**	**114,586,500.00**	**0**	**158.3**	**0.0**	**51.8**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2,326,500.00	1.00	2,326,500.00	1	4,000,000.00	1	6,090,400.00	2	8,416,900.00	100	152.3	0.0	179.7	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		11,996,300.00	3.00	11,996,300.00	3	9,316,800.00	2	14,392,200.00	5	26,388,500.00	66.7	154.5	0.0	84.6	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		9,989,200.00	8.00	9,989,200.00	5	5,850,400.00	5	8,964,200.00	13	18,953,400.00	100	153.2	0.0	39.1	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		21,666,000.00	7.00	23,243,600.00	7	9,569,000.00	5	17,778,000.00	12	41,021,600.00	71.4	185.8	0.0	18.1	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4,999,900.00	1.00	4,999,900.00	1	5,537,841.00	1	7,731,200.00	2	12,731,100.00	100	139.6	0.0	65.6	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2,700,000.00	12.00	2,700,000.00	12	2,700,000.00	9	3,375,000.00	21	6,075,000.00	75	125	0.0	50	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	0.00	0	1	500,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	100	200	0.0	0.0	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan**		**0**	**0.00**	**0**	**100**	**29,923,864.00**	**0**	**29,923,864.00**	**0**	**29,923,864.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0.0**	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	0.00	0	12	9,600,000.00	12	9,600,000.00	12	9,600,000.00	100	100	0.0	0.0	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	0.00	0	2	20,323,864.00	2	20,323,864.00	2	20,323,864.00	100	100	0.0	0.0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**25,149,500.00**	**28.00**	**15,681,630.00**	**100**	**24,300,000.00**	**0**	**17,137,872.00**	**28**	**32,819,502.00**	**0**	**70.5**	**0.0**	**20.1**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		23,349,500.00	24.00	13,881,630.00	36	22,500,000.00	27	14,887,872.00	51	28,769,502.00	75	66.2	0.0	17.8	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1,800,000.00	12.00	1,800,000.00	12	1,800,000.00	9	2,250,000.00	21	4,050,000.00	75	125	0.0	50	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**15,132,500.00**	**50.00**	**23,841,200.00**	**100**	**13,691,700.00**	**0**	**13,691,700.00**	**50**	**37,532,900.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7,463,500.00	7.00	7,372,200.00	6	5,691,700.00	3	5,691,700.00	10	13,063,900.00	50	100	0.0	0	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		7,669,000.00	30.00	16,469,000.00	16	8,000,000.00	13	8,000,000.00	43	24,469,000.00	81.3	100	0.0	0	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase layanan kecamatan tepat waktu**	**98**	**2,828,267,957.00**	**0.00**	**33,385,900.00**	**100**	**31,733,656.00**	**0**	**36,618,456.00**	**0**	**70,004,356.00**	**0**	**115.4**	**0**	**0.3**	**Kelurahan Plosokerep**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart**		**44,695,100.00**	**25.00**	**33,385,900.00**	**100**	**31,733,656.00**	**0**	**36,618,456.00**	**25**	**70,004,356.00**	**0**	**115.4**	**0.0**	**15.9**	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1,248,400.00	1.00	1,248,400.00	1	1,248,756.00	0.5	1,248,756.00	1.5	2,497,156.00	50	100	0.0	0	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		43,446,700.00	1.00	32,137,500.00	3	30,484,900.00	2	35,369,700.00	3	67,507,200.00	66.7	116	0.0	16.3	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase RT Berdaya**	**75**	**21,063,598,118.00**	**0.00**	**1,475,026,600.00**	**100**	**1,477,019,466.00**	**0**	**1,373,500,622.00**	**0**	**2,848,527,222.00**	**0**	**93**	**0**	**0.4**	**Kelurahan Plosokerep**
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	**21,063,598,118.00**	**0.00**	**1,475,026,600.00**	**100**	**1,477,019,466.00**	**0**	**1,373,500,622.00**	**0**	**2,848,527,222.00**	**0**	**93**	**0**	**0.4**	**Kelurahan Plosokerep**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart**		**1,390,882,800.00**	**54.00**	**1,405,882,800.00**	**100**	**1,413,328,300.00**	**0**	**1,249,366,156.00**	**54**	**2,655,248,956.00**	**0**	**88.4**	**0.0**	**4.3**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		21,433,200.00	45.00	21,433,200.00	47	22,318,300.00	47.00	22,318,300.00	92	43,751,500.00	100	100	0.0	41.6	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0	0.00	0	18	0	0	750,000,000.00	0	750,000,000.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1,369,449,600.00	47.00	1,384,449,600.00	47	536,010,000.00	47.00	477,047,856.00	94	1,861,497,456.00	100	89	0.0	3.7	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart**		**69,256,600.00**	**35.00**	**69,143,800.00**	**100**	**63,691,166.00**	**0**	**124,134,466.00**	**35**	**193,278,266.00**	**0**	**194.9**	**0.0**	**32.8**	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		68,303,200.00	0.00	68,190,400.00	7	56,350,650.00	7.00	116,793,950.00	7	184,984,350.00	100	207.3	0.0	33.2	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		953,400.00	1.00	953,400.00	2	7,340,516.00	0	7,340,516.00	1	8,293,916.00	0	100	0.0	0	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**486,664,088.00**	**0.00**	**74,759,300.00**	**100**	**24,497,000.00**	**0**	**26,997,000.00**	**0**	**101,756,300.00**	**0**	**110.2**	**0**	**1.4**	**Kelurahan Plosokerep**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart**		**70,528,000.00**	**35.00**	**74,759,300.00**	**100**	**24,497,000.00**	**0**	**26,997,000.00**	**35**	**101,756,300.00**	**0**	**110.2**	**0.0**	**9.7**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe		70,528,000.00	225.00	74,759,300.00	50	24,497,000.00	50.00	26,997,000.00	275	101,756,300.00	100	110.2	0.0	9.7	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Baik (86)**	**13,204,978,034.00**	**0.00**	**132,036,160.00**	**84**	**116,926,996.00**	**0**	**154,243,643.00**	**0**	**286,279,803.00**	**0**	**131.9**	**0.0**	**0.3**	**Kelurahan Klampok**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**1,426,000.00**	**0.00**	**1,426,000.00**	**100**	**1,442,500.00**	**0**	**1,418,250.00**	**0**	**2,844,250.00**	**0**	**98.3**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1,426,000.00	9.00	1,426,000.00	9	1,442,500.00	6	1,418,250.00	15	2,844,250.00	66.7	98.3	0.0	0	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**1,679,000.00**	**0.00**	**1,664,600.00**	**100**	**1,750,000.00**	**0**	**1,725,000.00**	**0**	**3,389,600.00**	**0**	**98.6**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1,679,000.00	5.00	1,664,600.00	4	1,750,000.00	2	1,725,000.00	7	3,389,600.00	50	98.6	0.0	0	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**23,100,000.00**	**0.00**	**23,499,000.00**	**100**	**14,286,000.00**	**0**	**19,835,950.00**	**0**	**43,334,950.00**	**0**	**138.8**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		5,600,000.00	1.00	5,999,000.00	1	0	0	0	1	5,999,000.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		17,500,000.00	40.00	17,500,000.00	60	14,286,000.00	60	19,835,950.00	100	37,335,950.00	100	138.8	0.0	0	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**39,058,100.00**	**0.00**	**44,117,200.00**	**100**	**45,706,400.00**	**0**	**56,491,137.00**	**0**	**100,608,337.00**	**0**	**123.6**	**0.0**	**52.6**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4,000,000.00	1.00	3,956,900.00	1	4,305,900.00	1.00	4,298,928.00	2	8,255,828.00	100	99.8	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		8,499,400.00	3.00	13,603,400.00	3	11,209,600.00	3.00	11,203,154.00	6	24,806,554.00	100	99.9	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		7,321,700.00	0.00	5,091,700.00	5	8,419,100.00	5.00	8,261,355.00	5	13,353,055.00	100	98.1	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11,537,000.00	0.00	11,536,200.00	7	10,545,000.00	7	15,045,000.00	7	26,581,200.00	100	142.7	0.0	78	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5,000,000.00	0.00	7,229,000.00	1	7,908,900.00	1.00	13,689,900.00	1	20,918,900.00	100	173.1	0.0	203.7	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2,700,000.00	9.00	2,700,000.00	12	2,700,000.00	6	3,375,000.00	15	6,075,000.00	50	125	0.0	50	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	0.00	0	1	617,900.00	1.00	617,800.00	1	617,800.00	100	100	0.0	0.0	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan**		**23,046,300.00**	**0.00**	**15,700,000.00**	**100**	**7,500,000.00**	**0**	**14,985,000.00**	**0**	**30,685,000.00**	**0**	**199.8**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10,104,000.00	12.00	5,000,000.00	10	0	0	0	12	5,000,000.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		12,942,300.00	2.00	10,700,000.00	1	7,500,000.00	1	14,985,000.00	3	25,685,000.00	100	199.8	0.0	0	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**35,773,500.00**	**0.00**	**34,085,860.00**	**100**	**31,843,996.00**	**0**	**39,156,306.00**	**0**	**73,242,166.00**	**0**	**123**	**0.0**	**26.4**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		33,973,500.00	45.00	32,285,860.00	24	30,043,996.00	22	36,906,306.00	67	69,192,166.00	91.7	122.8	0.0	25.2	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1,800,000.00	12.00	1,800,000.00	12	1,800,000.00	9	2,250,000.00	21	4,050,000.00	75	125	0.0	50	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**17,773,000.00**	**0.00**	**11,543,500.00**	**100**	**14,398,100.00**	**0**	**20,632,000.00**	**0**	**32,175,500.00**	**0**	**143.3**	**0.0**	**89.6**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0	0.00	0	7	6,450,600.00	7.00	8,237,000.00	7	8,237,000.00	100	127.7	0.0	0.0	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		8,611,500.00	24.00	11,543,500.00	18	7,947,500.00	10	12,395,000.00	34	23,938,500.00	55.6	156	0.0	103.3	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase layanan kecamatan tepat waktu**	**98**	**2,828,267,957.00**	**0.00**	**20,070,200.00**	**100**	**30,722,500.00**	**0**	**28,661,494.00**	**0**	**48,731,694.00**	**0**	**93.3**	**0**	**0.3**	**Kelurahan Klampok**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart**		**36,824,300.00**	**0.00**	**20,070,200.00**	**100**	**30,722,500.00**	**0**	**28,661,494.00**	**0**	**48,731,694.00**	**0**	**93.3**	**0.0**	**26.1**	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		824,300.00	1.00	824,100.00	1	1,224,400.00	1	1,220,950.00	2	2,045,050.00	100	99.7	0.0	0	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		36,000,000.00	40.00	19,246,100.00	3	29,498,100.00	3.00	27,440,544.00	43	46,686,644.00	100	93	0.0	26.7	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase RT Berdaya**	**75**	**21,063,598,118.00**	**0.00**	**1,577,589,625.00**	**100**	**1,597,274,900.00**	**0**	**1,790,063,134.00**	**0**	**3,367,652,759.00**	**0**	**112.1**	**0**	**0.5**	**Kelurahan Klampok**
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	**21,063,598,118.00**	**0.00**	**1,577,589,625.00**	**100**	**1,597,274,900.00**	**0**	**1,790,063,134.00**	**0**	**3,367,652,759.00**	**0**	**112.1**	**0**	**0.5**	**Kelurahan Klampok**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart**		**1,537,674,000.00**	**0.00**	**1,536,530,600.00**	**100**	**1,537,344,000.00**	**0**	**1,724,655,732.00**	**0**	**3,261,186,332.00**	**0**	**112.2**	**0.0**	**5.6**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		21,533,500.00	33.00	21,533,500.00	33	24,498,000.00	33.00	24,498,000.00	66	46,031,500.00	100	100	0.0	52.5	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0	0.00	0	19	0	0	1,273,445,100.00	0	1,273,445,100.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1,516,140,500.00	8.00	1,514,997,100.00	8	417,846,000.00	8.00	426,712,632.00	16	1,941,709,732.00	100	102.1	0.0	4.9	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart**		**31,620,900.00**	**0.00**	**41,059,025.00**	**100**	**59,930,900.00**	**0**	**65,407,402.00**	**0**	**106,466,427.00**	**0**	**109.1**	**0.0**	**30.4**	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		30,667,500.00	5.00	40,213,400.00	4	57,786,000.00	4.00	63,262,502.00	9	103,475,902.00	100	109.5	0.0	31.3	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		953,400.00	1.00	845,625.00	2	2,144,900.00	2	2,144,900.00	3	2,990,525.00	100	100	0.0	0	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**486,664,088.00**	**0.00**	**66,829,500.00**	**100**	**17,798,486.00**	**0**	**21,998,000.00**	**0**	**88,827,500.00**	**0**	**123.6**	**0**	**2.2**	**Kelurahan Klampok**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart**		**69,375,000.00**	**0.00**	**66,829,500.00**	**100**	**17,798,486.00**	**0**	**21,998,000.00**	**0**	**88,827,500.00**	**0**	**123.6**	**0.0**	**15.8**	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe		69,375,000.00	698.00	66,829,500.00	49	17,798,486.00	49.00	21,998,000.00	747	88,827,500.00	100	123.6	0.0	15.8	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Baik (86)**	**13,204,978,034.00**	**0.00**	**118,481,752.00**	**84**	**134,179,433.00**	**0**	**160,971,493.00**	**0**	**279,453,245.00**	**0**	**120**	**0.0**	**0.4**	**Kelurahan Sananwetan**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**1,426,000.00**	**0.00**	**3,104,100.00**	**100**	**1,426,000.00**	**0**	**1,426,000.00**	**0**	**4,530,100.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1,426,000.00	4.00	3,104,100.00	9	1,426,000.00	9.00	1,426,000.00	13	4,530,100.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**1,679,000.00**	**0.00**	**0**	**100**	**1,678,800.00**	**0**	**1,678,800.00**	**0**	**1,678,800.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0	0.00	0	4	1,678,800.00	4	1,678,800.00	4	1,678,800.00	100	100	0.0	0.0	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**30,180,000.00**	**0.00**	**31,129,700.00**	**100**	**12,449,200.00**	**0**	**12,449,200.00**	**0**	**43,578,900.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		5,600,000.00	1.00	5,600,000.00	1	0	0	0	1	5,600,000.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		24,580,000.00	50.00	25,529,700.00	60	12,449,200.00	60	12,449,200.00	110	37,978,900.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**48,575,000.00**	**0.00**	**47,625,200.00**	**100**	**53,917,233.00**	**0**	**69,656,450.00**	**0**	**117,281,650.00**	**0**	**129.2**	**0.0**	**47.1**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4,000,000.00	1.00	4,000,000.00	1	3,887,900.00	1	3,887,900.00	2	7,887,900.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12,000,000.00	1.00	11,999,900.00	3	12,000,000.00	3	18,916,550.00	4	30,916,450.00	100	157.6	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		10,000,000.00	1.00	9,050,300.00	3	10,006,900.00	3.00	15,086,900.00	4	24,137,200.00	100	150.8	0.0	101.6	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		14,875,000.00	2.00	14,875,000.00	5	20,000,000.00	5	20,000,000.00	7	34,875,000.00	100	100	0.0	33.6	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	1	4,704,533.00	1	7,772,200.00	2	12,772,200.00	100	165.2	0.0	127.3	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2,700,000.00	12.00	2,700,000.00	12	2,700,000.00	12	3,375,000.00	24	6,075,000.00	100	125	0.0	50	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	0.00	0	1	617,900.00	1	617,900.00	1	617,900.00	100	100	0.0	0.0	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan**		**0**	**0.00**	**0**	**100**	**19,423,100.00**	**0**	**21,041,990.00**	**0**	**21,041,990.00**	**0**	**108.3**	**0.0**	**0.0**	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	0.00	0	1	5,803,100.00	1	5,803,100.00	1	5,803,100.00	100	100	0.0	0.0	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	0.00	0	1	13,620,000.00	1	15,238,890.00	1	15,238,890.00	100	111.9	0.0	0.0	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**24,460,000.00**	**0.00**	**28,701,752.00**	**100**	**32,000,000.00**	**0**	**34,250,253.00**	**0**	**62,952,005.00**	**0**	**107**	**0.0**	**38.2**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		22,060,000.00	24.00	26,301,752.00	36	30,200,000.00	36	32,000,253.00	60	58,302,005.00	100	106	0.0	38.3	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2,400,000.00	12.00	2,400,000.00	12	1,800,000.00	12	2,250,000.00	24	4,650,000.00	100	125	0.0	37.5	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**15,500,000.00**	**0.00**	**7,921,000.00**	**100**	**13,285,100.00**	**0**	**20,468,800.00**	**0**	**28,389,800.00**	**0**	**154.1**	**0.0**	**92.7**	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0	0.00	0	7	5,378,600.00	7	7,868,800.00	7	7,868,800.00	100	146.3	0.0	0.0	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		8,000,000.00	4.00	7,921,000.00	17	7,906,500.00	17	12,600,000.00	21	20,521,000.00	100	159.4	0.0	117.3	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase layanan kecamatan tepat waktu**	**98**	**2,828,267,957.00**	**0.00**	**80,606,040.00**	**100**	**70,130,000.00**	**0**	**60,735,000.00**	**0**	**141,341,040.00**	**0**	**86.6**	**0**	**0.7**	**Kelurahan Sananwetan**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart**		**97,951,988.00**	**0.00**	**80,606,040.00**	**100**	**70,130,000.00**	**0**	**60,735,000.00**	**0**	**141,341,040.00**	**0**	**86.6**	**0.0**	**21.4**	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		97,951,988.00	1.00	0	1	1,246,400.00	1	1,246,400.00	2	1,246,400.00	100	100	0.0	0	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		0	0.00	0	3	68,883,600.00	3	59,488,600.00	3	59,488,600.00	100	86.4	0.0	0.0	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase RT Berdaya**	**75**	**21,063,598,118.00**	**0.00**	**3,637,922,500.00**	**100**	**3,680,111,826.00**	**0**	**3,373,790,682.00**	**0**	**7,011,713,182.00**	**0**	**91.7**	**0**	**1**	**Kelurahan Sananwetan**
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	**21,063,598,118.00**	**0.00**	**3,637,922,500.00**	**100**	**3,680,111,826.00**	**0**	**3,373,790,682.00**	**0**	**7,011,713,182.00**	**0**	**91.7**	**0**	**1**	**Kelurahan Sananwetan**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart**		**3,559,572,100.00**	**0.00**	**3,561,818,400.00**	**100**	**3,615,319,100.00**	**0**	**3,297,297,956.00**	**0**	**6,859,116,356.00**	**0**	**91.2**	**0.0**	**5.1**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		40,135,036.00	60.00	0	11	40,612,000.00	11.00	46,317,516.00	71	46,317,516.00	100	114	0.0	24.6	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0	0.00	0	46	0	46	2,528,300,000.00	46	2,528,300,000.00	100	0	0.0	0.0	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3,519,437,064.00	17.00	3,561,818,400.00	17	1,034,707,100.00	1.00	722,680,440.00	18	4,284,498,840.00	5.9	69.8	0.0	4.9	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart**		**76,456,612.00**	**0.00**	**76,104,100.00**	**100**	**64,792,726.00**	**0**	**76,492,726.00**	**0**	**152,596,826.00**	**0**	**118.1**	**0.0**	**30.6**	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		75,503,200.00	5.00	75,151,000.00	7	56,806,000.00	7.00	68,506,000.00	12	143,657,000.00	100	120.6	0.0	31	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		953,412.00	1.00	953,100.00	2	7,986,726.00	2	7,986,726.00	3	8,939,826.00	100	100	0.0	0	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**486,664,088.00**	**0.00**	**113,884,100.00**	**100**	**17,812,000.00**	**0**	**22,812,000.00**	**0**	**136,696,100.00**	**0**	**128.1**	**0**	**0**	**Kelurahan Sananwetan**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart**		**110,235,000.00**	**0.00**	**113,884,100.00**	**100**	**17,812,000.00**	**0**	**22,812,000.00**	**0**	**136,696,100.00**	**0**	**128.1**	**0.0**	**0**	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe		110,235,000.00	135.00	113,884,100.00	360	17,812,000.00	360	22,812,000.00	495	136,696,100.00	100	128.1	0.0	0	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Baik (86)**	**13,204,978,034.00**	**0.00**	**109,183,582.00**	**84**	**132,884,563.00**	**0**	**186,360,112.00**	**0**	**295,543,694.00**	**0**	**140.2**	**0.0**	**0.9**	**Kelurahan Rembang**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**1,426,000.00**	**0.00**	**1,426,000.00**	**100**	**1,426,000.00**	**0**	**1,376,000.00**	**0**	**2,802,000.00**	**0**	**96.5**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1,426,000.00	9.00	1,426,000.00	10	1,426,000.00	10	1,376,000.00	19	2,802,000.00	100	96.5	0.0	0	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**1,679,000.00**	**0.00**	**1,678,800.00**	**100**	**1,679,000.00**	**0**	**3,158,000.00**	**0**	**4,836,800.00**	**0**	**188.1**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1,679,000.00	5.00	1,678,800.00	4	1,679,000.00	4	3,158,000.00	9	4,836,800.00	100	188.1	0.0	0	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**23,926,130.00**	**0.00**	**23,895,200.00**	**100**	**13,383,000.00**	**0**	**13,383,000.00**	**0**	**37,278,200.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		4,800,000.00	1.00	4,800,000.00	1	0	0	0	1	4,800,000.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		19,126,130.00	48.00	19,095,200.00	65	13,383,000.00	65	13,383,000.00	113	32,478,200.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**53,932,800.00**	**0.00**	**53,500,200.00**	**100**	**53,862,863.00**	**0**	**89,098,700.00**	**0**	**142,598,900.00**	**0**	**165.4**	**0.0**	**109.4**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4,000,600.00	1.00	4,000,600.00	1	3,991,800.00	1	7,983,600.00	2	11,984,200.00	100	200	0.0	199.6	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		11,983,700.00	3.00	11,592,900.00	3	11,978,100.00	2.23	23,946,000.00	5.23	35,538,900.00	74.3	199.9	0.0	199.8	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		9,950,800.00	4.00	9,950,800.00	4	6,510,400.00	4	13,020,800.00	8	22,971,600.00	100	200	0.0	130.9	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		20,298,000.00	2.00	20,298,000.00	7	20,006,000.00	7	27,709,000.00	9	48,007,000.00	100	138.5	0.0	42.5	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4,999,700.00	1.00	4,957,900.00	1	8,176,563.00	1	12,064,300.00	2	17,022,200.00	100	147.5	0.0	62.1	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2,700,000.00	12.00	2,700,000.00	12	2,700,000.00	12	3,375,000.00	24	6,075,000.00	100	125	0.0	50	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	0.00	0	1	500,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	100	200	0.0	0.0	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan**		**0**	**0.00**	**0**	**100**	**25,616,400.00**	**0**	**51,120,000.00**	**0**	**51,120,000.00**	**0**	**199.6**	**0.0**	**0.0**	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	0.00	0	2	4,681,000.00	1	9,300,000.00	1	9,300,000.00	50	198.7	0.0	0.0	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	0.00	0	2	20,935,400.00	2	41,820,000.00	2	41,820,000.00	100	199.8	0.0	0.0	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**24,503,070.00**	**0.00**	**13,843,122.00**	**100**	**23,700,000.00**	**0**	**13,833,112.00**	**0**	**27,676,234.00**	**0**	**58.4**	**0.0**	**18**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		63,780,050.00	0.00	12,043,122.00	36	21,900,000.00	24	11,583,112.00	24	23,626,234.00	66.7	52.9	0.0	5.5	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		22,703,070.00	36.00	1,800,000.00	12	1,800,000.00	12	2,250,000.00	48	4,050,000.00	100	125	0.0	4	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		22,703,070.00	36.00	1,800,000.00	12	1,800,000.00	12	2,250,000.00	48	4,050,000.00	100	125	0.0	4	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**15,321,600.00**	**0.00**	**14,840,260.00**	**100**	**13,217,300.00**	**0**	**14,391,300.00**	**0**	**29,231,560.00**	**0**	**108.9**	**0.0**	**15.3**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7,489,100.00	7.00	7,007,760.00	7	5,384,300.00	7	5,384,300.00	14	12,392,060.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		7,832,500.00	10.00	7,832,500.00	17	7,833,000.00	17	9,007,000.00	27	16,839,500.00	100	115	0.0	30	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase layanan kecamatan tepat waktu**	**98**	**2,828,267,957.00**	**0.00**	**20,247,700.00**	**100**	**20,696,500.00**	**0**	**15,894,650.00**	**0**	**36,142,350.00**	**0**	**76.8**	**0**	**0**	**Kelurahan Rembang**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart**		**36,695,100.00**	**0.00**	**20,247,700.00**	**100**	**20,696,500.00**	**0**	**15,894,650.00**	**0**	**36,142,350.00**	**0**	**76.8**	**0.0**	**3.8**	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1,248,400.00	1.00	1,248,400.00	1	1,248,400.00	1	1,248,400.00	2	2,496,800.00	100	100	0.0	0	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		35,446,700.00	1.00	18,999,300.00	3	19,448,100.00	0.50	14,646,250.00	1.5	33,645,550.00	16.7	75.3	0.0	3.9	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase RT Berdaya**	**75**	**21,063,598,118.00**	**0.00**	**945,695,000.00**	**100**	**952,397,586.00**	**0**	**992,242,752.00**	**0**	**1,937,937,752.00**	**0**	**104.2**	**0**	**0.3**	**Kelurahan Rembang**
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	**21,063,598,118.00**	**0.00**	**945,695,000.00**	**100**	**952,397,586.00**	**0**	**992,242,752.00**	**0**	**1,937,937,752.00**	**0**	**104.2**	**0**	**0.3**	**Kelurahan Rembang**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart**		**860,746,800.00**	**0.00**	**870,538,000.00**	**100**	**891,431,186.00**	**0**	**914,770,652.00**	**0**	**1,785,308,652.00**	**0**	**102.6**	**0.0**	**5.9**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		15,026,400.00	31.00	15,026,400.00	31	15,026,300.00	31.00	14,626,300.00	62	29,652,700.00	100	97.3	0.0	44.1	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0	0.00	0	11	0	11	490,000,000.00	11	490,000,000.00	100	0	0.0	0.0	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		845,720,400.00	31.00	855,511,600.00	31	386,404,886.00	31.00	410,144,352.00	62	1,265,655,952.00	100	106.1	0.0	5.2	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart**		**67,141,700.00**	**0.00**	**75,157,000.00**	**100**	**60,966,400.00**	**0**	**77,472,100.00**	**0**	**152,629,100.00**	**0**	**127.1**	**0.0**	**22.8**	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		66,188,300.00	8.00	74,203,600.00	8	53,028,500.00	8.00	69,534,200.00	16	143,737,800.00	100	131.1	0.0	23.1	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		953,400.00	3.00	953,400.00	2	7,937,900.00	2	7,937,900.00	5	8,891,300.00	100	100	0.0	0	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**486,664,088.00**	**0.00**	**62,637,400.00**	**100**	**20,287,500.00**	**0**	**22,087,500.00**	**0**	**84,724,900.00**	**0**	**108.9**	**0**	**1.1**	**Kelurahan Rembang**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart**		**63,287,400.00**	**0.00**	**62,637,400.00**	**100**	**20,287,500.00**	**0**	**22,087,500.00**	**0**	**84,724,900.00**	**0**	**108.9**	**0.0**	**8.7**	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe		63,287,400.00	100.00	62,637,400.00	60	20,287,500.00	60.00	22,087,500.00	160	84,724,900.00	100	108.9	0.0	8.7	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Baik (86)**	**13,204,978,034.00**	**0.00**	**128,007,346.00**	**84**	**126,853,586.00**	**0**	**152,505,637.00**	**0**	**280,512,983.00**	**0**	**120.2**	**0.0**	**0.4**	**Kelurahan Karangtengah**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**1,426,800.00**	**0.00**	**1,426,800.00**	**100**	**1,426,000.00**	**0**	**1,426,000.00**	**0**	**2,852,800.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1,426,800.00	9.00	1,426,800.00	10	1,426,000.00	10	1,426,000.00	19	2,852,800.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**1,679,000.00**	**0.00**	**1,678,200.00**	**100**	**1,679,000.00**	**0**	**1,679,000.00**	**0**	**3,357,200.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1,679,000.00	5.00	1,678,200.00	4	1,679,000.00	4	1,679,000.00	9	3,357,200.00	100	100	0.0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**29,780,000.00**	**0.00**	**29,780,000.00**	**100**	**16,408,000.00**	**0**	**16,408,000.00**	**0**	**46,188,000.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		5,200,000.00	1.00	5,200,000.00	1	0	0	0	1	5,200,000.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		24,580,000.00	32.00	24,580,000.00	18	16,408,000.00	18	16,408,000.00	50	40,988,000.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**43,488,700.00**	**0.00**	**53,414,700.00**	**100**	**41,931,400.00**	**0**	**66,411,400.00**	**0**	**119,826,100.00**	**0**	**158.4**	**0.0**	**92.2**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3,935,600.00	1.00	3,935,600.00	1	3,992,000.00	1	3,992,000.00	2	7,927,600.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12,000,000.00	3.00	11,999,500.00	3	12,000,000.00	3	24,000,000.00	6	35,999,500.00	100	200	0.0	200	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		9,978,100.00	6.00	7,606,100.00	5	8,022,000.00	5	17,597,400.00	11	25,203,500.00	100	219.4	0.0	101.6	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		14,875,000.00	10.00	17,525,000.00	10	9,000,000.00	10	10,800,000.00	20	28,325,000.00	100	120	0.0	24.2	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5,000,000.00	1.00	9,648,500.00	1	5,717,400.00	1	5,647,000.00	2	15,295,500.00	100	98.8	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2,700,000.00	12.00	2,700,000.00	12	2,700,000.00	12	3,375,000.00	24	6,075,000.00	100	125	0.0	50	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	0.00	0	1	500,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	100	200	0.0	0.0	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan**		**0**	**0.00**	**0**	**100**	**26,551,700.00**	**0**	**23,199,001.00**	**0**	**23,199,001.00**	**0**	**87.4**	**0.0**	**0.0**	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	0.00	0	6	10,483,200.00	6	7,700,000.00	6	7,700,000.00	100	73.5	0.0	0.0	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	0.00	0	2	16,068,500.00	2	15,499,001.00	2	15,499,001.00	100	96.5	0.0	0.0	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**24,460,000.00**	**0.00**	**16,295,696.00**	**100**	**25,274,586.00**	**0**	**18,889,436.00**	**0**	**35,185,132.00**	**0**	**74.7**	**0.0**	**22.6**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		22,660,000.00	24.00	14,495,696.00	36	23,474,586.00	36	16,639,436.00	60	31,135,132.00	100	70.9	0.0	20.4	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1,800,000.00	12.00	1,800,000.00	12	1,800,000.00	12	2,250,000.00	24	4,050,000.00	100	125	0.0	50	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**15,500,000.00**	**0.00**	**25,411,950.00**	**100**	**13,582,900.00**	**0**	**24,492,800.00**	**0**	**49,904,750.00**	**0**	**180.3**	**0.0**	**15.3**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7,500,000.00	2.00	7,411,950.00	8	5,550,400.00	8	9,266,800.00	10	16,678,750.00	100	167	0.0	0	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		8,000,000.00	21.00	18,000,000.00	14	8,032,500.00	14	15,226,000.00	35	33,226,000.00	100	189.6	0.0	29.6	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase layanan kecamatan tepat waktu**	**98**	**2,828,267,957.00**	**0.00**	**34,330,300.00**	**100**	**31,515,500.00**	**0**	**29,012,433.00**	**0**	**63,342,733.00**	**0**	**92.1**	**0**	**0.2**	**Kelurahan Karangtengah**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart**		**43,934,700.00**	**0.00**	**34,330,300.00**	**100**	**31,515,500.00**	**0**	**29,012,433.00**	**0**	**63,342,733.00**	**0**	**92.1**	**0.0**	**10.9**	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1,334,700.00	1.00	1,334,300.00	1	1,248,700.00	1	1,248,700.00	2	2,583,000.00	100	100	0.0	0	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1,334,700.00	1.00	1,334,300.00	1	1,248,700.00	1	1,248,700.00	2	2,583,000.00	100	100	0.0	0	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		42,600,000.00	2.00	32,996,000.00	3	30,266,800.00	3.00	27,763,733.00	5	60,759,733.00	100	91.7	0.0	11.3	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase RT Berdaya**	**75**	**21,063,598,118.00**	**0.00**	**2,167,691,400.00**	**100**	**2,130,962,600.00**	**0**	**2,202,630,142.00**	**0**	**4,370,321,542.00**	**0**	**103.4**	**0**	**0.7**	**Kelurahan Karangtengah**
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	**21,063,598,118.00**	**0.00**	**2,167,691,400.00**	**100**	**2,130,962,600.00**	**0**	**2,202,630,142.00**	**0**	**4,370,321,542.00**	**0**	**103.4**	**0**	**0.7**	**Kelurahan Karangtengah**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart**		**2,062,856,300.00**	**0.00**	**2,096,945,300.00**	**100**	**2,064,852,800.00**	**0**	**2,114,298,692.00**	**0**	**4,211,243,992.00**	**0**	**102.4**	**0.0**	**6.1**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		29,306,700.00	45.00	29,306,700.00	45	29,306,300.00	45.00	29,306,300.00	90	58,613,000.00	100	100	0.0	38.6	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0	0.00	0	30	0	30	1,520,000,000.00	30	1,520,000,000.00	100	0	0.0	0.0	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2,033,549,600.00	4.00	2,067,638,600.00	10	515,546,500.00	10.00	564,992,392.00	14	2,632,630,992.00	100	109.6	0.0	5.6	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart**		**71,081,400.00**	**0.00**	**70,746,100.00**	**100**	**66,109,800.00**	**0**	**88,331,450.00**	**0**	**159,077,550.00**	**0**	**133.6**	**0.0**	**30.3**	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		70,128,000.00	0.00	69,792,700.00	8	61,674,400.00	8.00	84,126,700.00	8	153,919,400.00	100	136.4	0.0	30.7	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		953,400.00	0.00	953,400.00	2	4,435,400.00	2	4,204,750.00	2	5,158,150.00	100	94.8	0.0	0	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**486,664,088.00**	**0.00**	**79,388,000.00**	**100**	**16,000,000.00**	**0**	**18,400,000.00**	**0**	**97,788,000.00**	**0**	**115**	**0**	**1**	**Kelurahan Karangtengah**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart**		**79,388,000.00**	**0.00**	**79,388,000.00**	**100**	**16,000,000.00**	**0**	**18,400,000.00**	**0**	**97,788,000.00**	**0**	**115**	**0.0**	**6**	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe		79,388,000.00	145.00	79,388,000.00	86	16,000,000.00	66.00	18,400,000.00	211	97,788,000.00	76.7	115	0.0	6	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Baik (86)**	**13,204,978,034.00**	**0.00**	**102,481,792.00**	**84**	**157,036,136.00**	**0**	**162,643,626.00**	**0**	**265,125,418.00**	**0**	**103.6**	**0.0**	**0.2**	**Kelurahan Bendogerit**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**		**1,426,000.00**	**0.00**	**1,426,000.00**	**100**	**1,200,000.00**	**0**	**1,200,000.00**	**0**	**2,626,000.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1,426,000.00	9.00	1,426,000.00	9	1,200,000.00	9	1,200,000.00	18	2,626,000.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**		**1,679,000.00**	**0.50**	**1,679,000.00**	**100**	**1,700,000.00**	**0**	**1,687,500.00**	**0.5**	**3,366,500.00**	**0**	**99.3**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1,679,000.00	5.00	1,679,000.00	4	1,700,000.00	4	1,687,500.00	9	3,366,500.00	100	99.3	0.0	0	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**		**5,200,000.00**	**0.50**	**26,000,000.00**	**100**	**14,345,200.00**	**0**	**14,345,200.00**	**0.5**	**40,345,200.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		5,200,000.00	1.00	5,200,000.00	1	0	0	0	1	5,200,000.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		24,580,000.00	36.00	20,800,000.00	36	14,345,200.00	36	14,345,200.00	72	35,145,200.00	100	100	0.0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**		**48,339,109.00**	**0.50**	**48,308,148.00**	**100**	**40,082,700.00**	**0**	**54,572,300.00**	**0.5**	**102,880,448.00**	**0**	**136.1**	**0.0**	**48.3**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4,000,000.00	1.00	3,999,998.00	1	0	0	0	1	3,999,998.00	0	0	0.0	0.0	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12,000,000.00	3.00	11,994,950.00	3	11,746,800.00	3	23,366,700.00	6	35,361,650.00	100	198.9	0.0	194.7	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		9,764,109.00	5.00	9,747,000.00	5	9,083,300.00	5	9,083,300.00	10	18,830,300.00	100	100	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		14,875,000.00	25.00	14,875,000.00	7	10,050,000.00	7	12,111,000.00	32	26,986,000.00	100	120.5	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5,000,000.00	1.00	4,991,200.00	1	5,884,700.00	1	5,794,350.00	2	10,785,550.00	100	98.5	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2,700,000.00	12.00	2,700,000.00	12	2,700,000.00	13	3,600,000.00	25	6,300,000.00	108.3	133.3	0.0	0	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	0.00	0	1	617,900.00	1	616,950.00	1	616,950.00	100	99.8	0.0	0.0	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan**		**0**	**0.00**	**0**	**100**	**40,296,900.00**	**0**	**40,296,200.00**	**0**	**40,296,200.00**	**0**	**100**	**0.0**	**0.0**	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	0.00	0	20	17,794,000.00	20	17,793,300.00	20	17,793,300.00	100	100	0.0	0.0	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	0.00	0	3	22,502,900.00	3	22,502,900.00	3	22,502,900.00	100	100	0.0	0.0	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**		**24,460,000.00**	**0.50**	**10,762,344.00**	**100**	**46,051,636.00**	**0**	**30,821,026.00**	**0.5**	**41,583,370.00**	**0**	**66.9**	**0.0**	**26**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		22,660,000.00	24.00	8,962,344.00	24	44,251,636.00	24	28,421,026.00	48	37,383,370.00	100	64.2	0.0	28.1	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1,800,000.00	12.00	1,800,000.00	12	1,800,000.00	13	2,400,000.00	25	4,200,000.00	108.3	133.3	0.0	0	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**		**7,500,000.00**	**0.50**	**14,306,300.00**	**100**	**13,359,700.00**	**0**	**19,721,400.00**	**0.5**	**34,027,700.00**	**0**	**147.6**	**0.0**	**0**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7,500,000.00	7.00	6,306,300.00	7	5,361,700.00	7.00	10,723,400.00	14	17,029,700.00	100	200	0.0	0	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		8,000,000.00	28.00	8,000,000.00	21	7,998,000.00	21	8,998,000.00	49	16,998,000.00	100	112.5	0.0	0	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase layanan kecamatan tepat waktu**	**98**	**2,828,267,957.00**	**0.00**	**35,521,800.00**	**100**	**58,845,600.00**	**0**	**41,400,000.00**	**0**	**76,921,800.00**	**0**	**70.4**	**0**	**0.6**	**Kelurahan Bendogerit**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart**		**72,091,415.00**	**0.30**	**35,521,800.00**	**100**	**58,845,600.00**	**0**	**41,400,000.00**	**0.3**	**76,921,800.00**	**0**	**70.4**	**0.0**	**23.2**	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1,248,756.00	1.00	1,281,800.00	1	1,274,400.00	1	1,274,400.00	2	2,556,200.00	100	100	0.0	0	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		70,842,659.00	2.00	34,240,000.00	2	57,571,200.00	2	40,125,600.00	4	74,365,600.00	100	69.7	0.0	23.6	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**75**	**21,063,598,118.00**	**0.00**	**2,852,258,912.00**	**100**	**2,809,833,264.00**	**0**	**2,887,185,268.00**	**0**	**5,739,444,180.00**	**0**	**102.8**	**0**	**0.5**	**Kelurahan Bendogerit**
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase RT Berdaya**	**100**	**21,063,598,118.00**	**0.00**	**2,852,258,912.00**	**100**	**2,809,833,264.00**	**0**	**2,887,185,268.00**	**0**	**5,739,444,180.00**	**0**	**102.8**	**0**	**0.5**	**Kelurahan Bendogerit**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart**		**2,672,435,664.00**	**0.40**	**2,737,645,700.00**	**100**	**2,747,067,064.00**	**0**	**2,802,974,668.00**	**0.4**	**5,540,620,368.00**	**0**	**102**	**0.0**	**3.6**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		34,864,600.00	11.00	0	8	34,864,600.00	8.00	34,864,400.00	19	34,864,400.00	100	100	0.0	32.7	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0	0.00	0	40	0	40	1,800,500,000.00	40	1,800,500,000.00	100	0	0.0	0.0	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2,637,571,064.00	69.00	2,737,645,700.00	8	911,702,464.00	8.00	967,610,268.00	77	3,705,255,968.00	100	106.1	0.0	3.2	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart**		**73,576,612.00**	**0.30**	**114,613,212.00**	**100**	**62,766,200.00**	**0**	**84,210,600.00**	**0.3**	**198,823,812.00**	**0**	**134.2**	**0.0**	**14.1**	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		72,623,200.00	8.00	113,659,800.00	8	61,344,200.00	8.00	82,788,600.00	16	196,448,400.00	100	135	0.0	14.3	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		953,412.00	1.00	953,412.00	1	1,422,000.00	1	1,422,000.00	2	2,375,412.00	100	100	0.0	0	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**486,664,088.00**	**0.00**	**85,613,400.00**	**100**	**15,385,000.00**	**0**	**15,351,000.00**	**0**	**100,964,400.00**	**0**	**99.8**	**0**	**0**	**Kelurahan Bendogerit**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart**		**95,829,000.00**	**0.20**	**85,613,400.00**	**100**	**15,385,000.00**	**0**	**15,351,000.00**	**0.2**	**100,964,400.00**	**0**	**99.8**	**0.0**	**0**	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe		95,829,000.00	554.00	85,613,400.00	328	15,385,000.00	328	15,351,000.00	882	100,964,400.00	100	99.8	0.0	0	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**99.35**	**91.77**			
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																
	801	**Kesatuan Bangsa dan Politik**																
	8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**88.5**	**5.222.007.450,00**	**92.6**	**4.740.890.366,00**	**88.8**	**4.583.773.884,00**	**93.5**	**4.719.997.914,00**	**186.1**	**9.460.888.280,00**	**105.3**	**103**	**105.6**	**25**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**	**100**	**27.052.400,00**	**100**	**5.132.400,00**	**100**	**5.494.800,00**	**100**	**4.263.732,00**	**200**	**9.396.132,00**	**100**	**77.6**	**100**	**0**	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48	8.526.200,00	12	2.566.200,00	12	2.520.600,00	12	2.356.641,00	24	4.922.841,00	100	93.5	25	0	
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80	18.526.200,00	20	2.566.200,00	20	2.974.200,00	20	1.907.091,00	40	4.473.291,00	100	64.1	25	0	
	8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**	**100**	**2.920.896.449,00**	**100**	**3.089.048.683,00**	**100**	**3.601.244.893,00**	**100**	**3.713.401.829,00**	**200**	**6.802.450.512,00**	**100**	**103.1**	**100**	**39.3**	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	2.912.370.249,00	0	3.087.448.483,00	22	3.600.357.493,00	22	3.712.569.742,00	22	6.800.018.225,00	100	103.1	110	39.4	
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	8.526.200,00	5	1.600.200,00	5	887.400,00	5	832.087,00	10	2.432.287,00	100	93.8	100	0	
	8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**	**100**	**169.227.176,00**	**100**	**146.216.000,00**	**100**	**70.428.375,00**	**100**	**63.562.765,00**	**200**	**209.778.765,00**	**100**	**90.3**	**100**	**1.3**	
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8	72.971.476,00	5	64.605.000,00	4	19.678.800,00	0	19.645.335,00	5	84.250.335,00	0	99.8	0	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21	96.255.700,00	20	81.611.000,00	22	50.749.575,00	22	43.917.430,00	42	125.528.430,00	100	86.5	104.8	2.4	
	8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**	**100**	**416.547.994,00**	**100**	**396.587.800,00**	**100**	**207.160.500,00**	**100**	**210.171.664,00**	**200**	**606.759.464,00**	**100**	**101.5**	**100**	**14.3**	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	13.369.100,00	1	10.701.320,00	1	11.872.500,00	1	8.716.608,00	2	19.417.928,00	100	73.4	25	0	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	17.786.100,00	3	11.991.800,00	4	27.550.200,00	4	19.739.835,00	7	31.731.635,00	100	71.7	33.3	37.7	
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8	40.939.294,00	3	39.986.700,00	4	8.117.000,00	4	7.499.869,00	7	47.486.569,00	100	92.4	50	0	
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	31.800.000,00	2	30.758.500,00	4	29.355.000,00	4	25.564.100,00	6	56.322.600,00	100	87.1	8.3	14.6	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	22.192.000,00	2	19.860.500,00	1	8.424.800,00	1	7.942.001,00	3	27.802.501,00	100	94.3	25	0	
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	7.800.000,00	24	6.840.000,00	24	7.800.000,00	24	7.800.000,00	48	14.640.000,00	100	100	100	0	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165	272.272.000,00	56	269.387.980,00	40	110.825.000,00	45	129.909.232,00	101	399.297.212,00	112.5	117.2	27.3	17.6	
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	10.389.500,00	1	7.061.000,00	1	3.216.000,00	1	3.000.019,00	2	10.061.019,00	100	93.3	100	0	
	8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan**	**100**	**231.853.166,00**	**100**	**594.670.000,00**	**100**	**96.704.200,00**	**100**	**95.449.973,00**	**200**	**690.119.973,00**	**100**	**98.7**	**100**	**0**	
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0,00	0	0,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	100	100	0	0	
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27	84.623.700,00	77	258.645.000,00	2	11.052.200,00	2	10.625.018,00	79	269.270.018,00	100	96.1	7.4	0	
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	110.341.466,00	36	336.025.000,00	2	8.912.000,00	1	8.750.000,00	37	344.775.000,00	50	98.2	10	0	
	8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		36.888.000,00	0	0,00	1	36.740.000,00	1	36.074.955,00	1	36.074.955,00	100	98.2	0	0	
	8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**	**100**	**250.368.960,00**	**100**	**259.976.506,00**	**100**	**259.600.416,00**	**100**	**305.214.082,00**	**200**	**565.190.588,00**	**100**	**117.6**	**100**	**35.3**	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	46.806.960,00	36	50.763.082,00	36	44.511.216,00	36	43.869.825,00	72	94.632.907,00	100	98.6	25	15.2	
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52	203.562.000,00	13	209.213.424,00	13	215.089.200,00	13	261.344.257,00	26	470.557.681,00	100	121.5	25	39.9	
	8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**	**100**	**272.429.952,00**	**100**	**249.258.977,00**	**100**	**343.140.700,00**	**100**	**327.933.869,00**	**200**	**577.192.846,00**	**100**	**95.6**	**100**	**2.1**	
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	96.547.952,00	11	67.329.150,00	4	75.703.200,00	4	70.024.629,00	15	137.353.779,00	100	92.5	23.5	5.9	
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	26	6.324.000,00	8	6.275.000,00	8	6.324.000,00	8	6.288.360,00	16	12.563.360,00	100	99.4	30.8	0	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	158	32.058.000,00	85	28.560.000,00	50	30.796.000,00	50	24.847.509,00	135	53.407.509,00	100	80.7	31.6	0	
	8.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		0,00	0	0,00	1	25.000.000,00	1	24.642.000,00	1	24.642.000,00	100	98.6	0	0	
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0,00	0	0,00	1	205.317.500,00	1	202.131.371,00	1	202.131.371,00	100	98.4	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Segera melaksanakan kegiatan yang belum terlaksana																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurang koordinasi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melaksanakan kegiatan tepat waktu																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : melaksanakan kegiatan tepat waktu																		
	8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase penyelesaian konflik keagamaaan**	**57.1**	**758.442.960,00**	**100**	**2.384.609.324,00**	**100**	**1.279.184.300,00**	**100**	**1.245.808.703,00**	**200**	**3.630.418.027,00**	**100**	**97.4**	**175.1**	**2.5**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase kampung berkarakter Pancasila**	**100**	**758.442.960,00**	**19.1**	**2.384.609.324,00**	**14.3**	**1.279.184.300,00**	**19.08**	**1.245.808.703,00**	**38.13**	**3.630.418.027,00**	**133.4**	**97.4**	**19.1**	**2.5**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah pembentukan kampung berkarakter Pancasila**	**85**	**1.370.315.200,00**	**100**	**2.384.609.324,00**	**3**	**1.279.184.300,00**	**3**	**1.245.808.703,00**	**103**	**3.630.418.027,00**	**100**	**97.4**	**3.5**	**1.4**	
	8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**10**	**1.370.315.200,00**	**4**	**2.384.609.324,00**	**84**	**1.279.184.300,00**	**95**	**1.245.808.703,00**	**99**	**3.630.418.027,00**	**113.1**	**97.4**	**950**	**1.4**	
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1000	888.262.800,00	300	1.794.200.824,00	150	62.685.300,00	150	65.973.600,00	450	1.860.174.424,00	100	105.2	15	1.6	
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12	377.958.000,00	3	375.700.000,00	3	250.000.000,00	3	174.625.000,00	6	550.325.000,00	100	69.9	25	0	
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	900	104.094.400,00	400	214.708.500,00	300	83.250.500,00	300	75.029.802,00	700	289.738.302,00	100	90.1	33.3	0	
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka		0,00	0	0,00	1	267.225.000,00	1	262.132.500,00	1	262.132.500,00	100	98.1	0	0	
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka		0,00	0	0,00	78	595.813.500,00	78	647.980.801,00	78	647.980.801,00	100	108.8	0	0	
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		0,00	0	0,00	1	200.000,00	1	195.000,00	1	195.000,00	100	97.5	0	0	
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		0,00	0	0,00	1	2.650.000,00	1	2.595.000,00	1	2.595.000,00	100	97.9	0	0	
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila		0,00	0	0,00	78	17.360.000,00	78	17.277.000,00	78	17.277.000,00	100	99.5	0	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dan laporan kegiatan segera disusun																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurangnya tenaga staf																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : meningkatkan kualitas kegiatan dengan lebih baik																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, pembentukan Kampung Pancasila bisa tuntas 21 kelurahan																		
	8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat**	**100**	**906.063.698,00**	**100**	**16.440.699.259,00**	**100**	**661.920.108,00**	**100**	**927.107.258,00**	**200**	**17.367.806.517,00**	**100**	**140.1**	**100**	**0**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peman**	**Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik**	**85**	**16.751.385.197,00**	**90**	**16.440.699.259,00**	**84**	**661.920.108,00**	**100**	**927.107.258,00**	**190**	**17.367.806.517,00**	**119**	**140.1**	**117.6**	**0**	
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daer	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	1500	1.770.597.000,00	875	786.342.750,00	200	12.190.000,00	200	11.560.000,00	1075	797.902.750,00	100	94.8	13.3	0	

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Dae	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	700	49.971.900,00	200	31.452.200,00	300	30.338.400,00	300	29.414.000,00	500	60.866.200,00	100	97	42.9	0	
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantaua	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peman	38	14.930.816.297,00	11	15.622.904.309,00	8	619.391.708,00	8	886.133.258,00	19	16.509.037.567,00	100	143.1	21.1	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan sudah dilaksanakan semua																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Perlunya koordinasi lebih intensif																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan koordinasi aktif dari semua staf																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Adanya strategi pelaksanaan pelaporan bagi parpol agar dpaat menyapaikan kegiatannya secara rutin																		
	8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif**	**80**	**200.558.531,00**	**89.5**	**59.821.500,00**	**89.1**	**28.448.240,00**	**89.31**	**26.529.200,00**	**178.84**	**86.350.700,00**	**100.2**	**93.3**	**111.6**	**0**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Jumlah Organisasi Masyarakat Yang aktif**	**123**	**49.983.200,00**	**0**	**59.821.500,00**	**122**	**28.448.240,00**	**142**	**26.529.200,00**	**142**	**86.350.700,00**	**116.4**	**93.3**	**115.4**	**0**	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	750	49.983.200,00	270	59.821.500,00	250	28.448.240,00	250	26.529.200,00	520	86.350.700,00	100	93.3	33.3	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : rutin melaksanakan monitoring keberadaan dan keaktifan ormas																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : belum maksimalnya pemanfaatan aplikasi e-landa dan kurangnya edukasi kepada ormas yang belum berbadan hukum																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : sosialisasi aplikasi e-landa dan edukasi agar ormas terdaftar di Bakesbangpol sudah berbadan hukum																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : ormas aktif menggunakan aplikasi e-landa																		
	8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial**	**80**	**1.586.573.194,00**	**80**	**268.177.900,00**	**79**	**177.003.100,00**	**276**	**161.025.800,00**	**356**	**429.203.700,00**	**349.4**	**91**	**345**	**0**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi**	**95**	**287.958.000,00**	**90**	**268.177.900,00**	**93**	**177.003.100,00**	**95**	**161.025.800,00**	**185**	**429.203.700,00**	**102.2**	**91**	**100**	**0**	
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1150	85.000.000,00	300	70.599.900,00	200	27.003.100,00	200	36.405.800,00	500	107.005.700,00	100	134.8	17.4	0	
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4	202.958.000,00	1	197.578.000,00	1	150.000.000,00	1	124.620.000,00	2	322.198.000,00	100	83.1	25	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kesadaran masyarakan untuk mengikuti sosialisasi bahaya narkoba cukup tinggi																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Bakesabngpol belum punya data tersendiri untuk wilayah zona merah (tinggi kasus narkoba)																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan peran aktif P4GN agar bisa menyusun data wilayah zona merah																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penyusunan data masyarakat penyitas narkoba																		

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan**	**100**	**199.987.851,00**	**100**	**3.155.171.318,00**	**100**	**1.536.811.200,00**	**100**	**2.449.760.982,00**	**200**	**5.604.932.300,00**	**100**	**159.4**	**100**	**0**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti**	**100**	**3.057.888.400,00**	**100**	**3.155.171.318,00**	**100**	**1.536.811.200,00**	**100**	**2.449.760.982,00**	**200**	**5.604.932.300,00**	**100**	**159.4**	**100**	**0**	
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	7240	395.259.100,00	4785	509.926.500,00	2040	489.263.500,00	9737	474.528.000,00	14522	984.454.500,00	477.3	97	134.5	0	
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta P	11	2.552.958.000,00	3	2.551.940.000,00	3	990.000.000,00	3	1.940.000.000,00	6	4.491.940.000,00	100	196	27.3	0	
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4	109.671.300,00	1	93.304.818,00	1	57.547.700,00	1	35.232.982,00	2	128.537.800,00	100	61.2	25	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : koordinasi aktif dengan instansi terkait dan vertikal dalam melaksanakan deteksi dini potensi konflik sosial																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : terlambatnya informasi potensi konflik sosial yang di terima																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. koordinasi aktif dengan trantibum kelurahan dan kecamatan 2. meningkatkan peran aktif FKDM																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**100.00**	**90.81**			
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			
										Total Rata-rata capaian kinerja (%)				**96,01**	**93,00**			
										Predikat kinerja				**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			

Tabel 2.92
Daftar Data Statistik Sektoral Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	1.01.000013	Bangunan Gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah keseluruhan bangunan gedung paud yang memerlukan pemeliharaan	17	17	17	17	17	17	17	Dinas Pendidikan
2	1.01.000014	Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah bangunan gedung pendidikan nonformal / kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	0	1	Dinas Pendidikan
3	1.01.000015	Bangunan Gedung Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah keseluruhan bangunan gedung sekolah yang memerlukan pemeliharaan	57	57	57	57	57	57	57	Dinas Pendidikan
4	1.01.000022	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Buah	Jumlah Keseluruhan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Pendidikan
5	1.01.000023	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang dibutuhkan	Buah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang dibutuhkan	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Pendidikan
6	1.01.000024	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia	Buah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Pendidikan
7	1.01.000036	Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
8	1.01.000040	Dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformals yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformals yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
9	1.01.000042	Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	1	1	1	0	11	1	Dinas Pendidikan
10	1.01.000049	fasilitas bermain	Unit	Jumlah fasilitas bermain yang tersedia	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
11	1.01.000050	Fasilitas Parkir	Unit	Jumlah fasilitas parkir yang tersedia	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
12	1.01.000051	Fasilitas Parkir yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah fasilitas parkir yang perlu di rehabilitasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
13	1.01.000052	Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah gedung pendidikan nonformal / kesetaraan yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
14	1.01.000053	Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	Ruang	jumlah gedung pendidikan nonformal / kesetaraan yang telah direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
15	1.01.000054	gedung PAUD	Unit	Jumlah gedung paud yang tersedia	1	1	1	1	1	1	17	Dinas Pendidikan
16	1.01.000055	gedung PAUD yang layak	Unit	Jumlah gedung paud yang layak	188	188	183	180	175	170	17	Dinas Pendidikan
17	1.01.000056	Gedung PAUD yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah gedung paud yang perlu direhabilitasi	135	120	125	124	111	105	17	Dinas Pendidikan
18	1.01.000057	gedung PAUD yang rusak sedang/berat	Unit	Jumlah geudng paud yang rusak sedang/berat	40	45	25	35	30	38	17	Dinas Pendidikan
19	1.01.000058	Gedung PAUD yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah gedung paud yang telah direhabilitasi	4	0	7	0	2	3	17	Dinas Pendidikan
20	1.01.000059	gedung PKBM	Unit	Jumlah gedung pkbm	3	3	3	3	3	3	5	Dinas Pendidikan
21	1.01.000060	gedung PKBM yang layak	Unit	Jumlah gedung pkbm yang layak	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Pendidikan
22	1.01.000061	gedung PKBM yang rusak sedang/berat	Unit	Jumlah gedung pkbm yang rusak sedang/berat	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Pendidikan
23	1.01.000062	Gedung Sekolah yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah gedung sekolah yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	85	Dinas Pendidikan
24	1.01.000063	Gedung Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah gedung sekolah yang telah direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	48	Dinas Pendidikan
25	1.01.000068	Kantin Sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah kantin sekolah yang perlu direhabilitasi	3	3	3	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
26	1.01.000069	Kantin Sekolah yang telah dibangun	Unit	Jumlah kantin sekolah yang telah dibangun	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
27	1.01.000070	Kantin Sekolah yang telah direhabilitasi	Unit	Jumlah kantin sekolah yang telah direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
28	1.01.000071	Kekurangan pendidik	Orang	Jumlah kekurangan pendidik	73	107	106	106	148	251	1113	Dinas Pendidikan
29	1.01.000074	kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dokumen	Jumlah kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
30	1.01.000075	kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Dasar	Dokumen	Jumlah kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar	0	0	1	2	1	1	1	Dinas Pendidikan
31	1.01.000082	Laboratorium yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah laboratorium yang perlu direhabilitasi	3	3	2	1	1	2	1	Dinas Pendidikan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
32	1.01.000083	Media pendidikan	Paket	Jumlah media pendidikan yang tersedia	1	1	1	1	1	1	2	Dinas Pendidikan
33	1.01.000084	Modul Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun	Dokumen	Jumlah Modul Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
34	1.01.000086	pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dokumen	Jumlah pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Pendidikan
35	1.01.000089	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan sekolah dasar	1316	1285	1302	1268	1243	566	553	Dinas Pendidikan
36	1.01.000090	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi	396	396	365	339	403	1265	395	Dinas Pendidikan
37	1.01.000093	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama	Orang	Jumlah pendidik pada sekolah menengah pertama	522	522	555	528	515	536	423	Dinas Pendidikan
38	1.01.000094	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah pendidik pada sekolah menengah pertama yang telah lulus sertifikasi	315	315	291	283	278	217	302	Dinas Pendidikan
39	1.01.000096	Pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan	Orang	Jumlah pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan	3	48	50	177	60	372	265	Dinas Pendidikan
40	1.01.000097	Pendidik yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi	Orang	Jumlah pendidik yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi	18	8	19	25	7	6	6	Dinas Pendidikan
41	1.01.000098	Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi	Orang	Jumlah pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi	440	345	580	538	560	625	975	Dinas Pendidikan
42	1.01.000099	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Salafiah dan Diniyah yang meningkat kompetensinya	Orang	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan adalah Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan dengan alat ukur Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan dengan satuan orang	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Pendidikan
43	1.01.000100	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan	Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan	1687	1842	2388	2301	2324	2333	2333	Dinas Pendidikan
44	1.01.000101	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Penghargaan	Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Penghargaan	3	3	3	3	18	3	82	Dinas Pendidikan
45	1.01.000102	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Perlindungan	Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Perlindungan	1687	1842	2388	2301	2324	2333	2333	Dinas Pendidikan
46	1.01.000103	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang didistribusikan	Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang didistribusikan	1687	1842	2388	2301	2324	2333	2333	Dinas Pendidikan
47	1.01.000110	Pendidik Non ASN	Orang	Jumlah pendidik non asn yang tersedia	250	250	258	272	490	66	76	Dinas Pendidikan
48	1.01.000111	Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Orang	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan nonformal / kesetaraan	269	269	269	269	390	299	299	Dinas Pendidikan
49	1.01.000112	Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV	53	50	53	53	53	6	6	Dinas Pendidikan
50	1.01.000113	Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi	1	1	0	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
51	1.01.000114	Pendidik pada satuan PAUD	Orang	Jumlah pendidik pada satuan paud yang tersedia	263	263	263	210	207	280	280	Dinas Pendidikan
52	1.01.000115	Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV	68	68	68	68	140	132	132	Dinas Pendidikan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
53	1.01.000116	Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi	87	87	84	78	70	50	50	Dinas Pendidikan
54	1.01.000117	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV	816	816	816	801	879	742	553	Dinas Pendidikan
55	1.01.000119	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV	552	552	552	545	549	83	423	Dinas Pendidikan
56	1.01.000120	Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi	Orang	Jumlah Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi	552	552	552	545	549	83	975	Dinas Pendidikan
57	1.01.000126	Perabot	Paket	Jumlah sekolah yang memliki perabot lengkap	57	57	57	57	57	57	2	Dinas Pendidikan
58	1.01.000127	Peralatan Pendidikan	Paket	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki peralatan pendidikan yang lengkap	57	57	57	57	57	57	2	Dinas Pendidikan
59	1.01.000128	Perlengkapan lain	Paket	Jumlah perlengkapan lain yang ada pada satuan pendidikan	7	7	7	7	7	14	14	Dinas Pendidikan
60	1.01.000129	Perpustakaan Sekolah yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah perpustakaan sekolah yang perlu direhabilitasi	10	10	10	2	4	4	14	Dinas Pendidikan
61	1.01.000132	Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolah	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolah	0	0	0	0	0	0	2	Dinas Pendidikan
62	1.01.000133	Peserta Didik Sekolah Dasar yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
63	1.01.000136	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang berpotensi putus sekolah	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang berpotensi putus sekolah	0	0	0	0	0	0	2	Dinas Pendidikan
64	1.01.000137	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
65	1.01.000138	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik	4765	4717	4279	4887	4269	5091	4034	Dinas Pendidikan
66	1.01.000139	Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Belajar	Siswa	Jumlah Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Belajar	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
67	1.01.000140	Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Siswa	Jumlah Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
68	1.01.000141	Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Belajar	Siswa	Jumlah Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Belajar	4932	4932	5099	5099	5099	5099	4034	Dinas Pendidikan
69	1.01.000142	Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Siswa	Jumlah Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	4932	4932	5099	5099	5099	5099	4034	Dinas Pendidikan
70	1.01.000143	Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	Jumlah Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik	8554	8477	8566	8455	8432	8541	12016	Dinas Pendidikan
71	1.01.000144	Prasarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah Prasarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	2	Dinas Pendidikan
72	1.01.000145	Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
73	1.01.000146	Prasarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah Prasarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	17	17	2	17	1	2	4	Dinas Pendidikan
74	1.01.000147	Prasarana PAUD yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah Prasarana PAUD yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	3	Dinas Pendidikan
75	1.01.000148	Prasarana PAUD yang telah direhabilitasi	Unit	Jumlah Prasarana PAUD yang telah direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	3	Dinas Pendidikan
76	1.01.000149	Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
77	1.01.000150	Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	Unit	Jumlah Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
78	1.01.000151	Prasarana sekolah	Unit	Jumlah Prasarana sekolah yang tersedia	17	17	17	1	20	1	2	Dinas Pendidikan
79	1.01.000152	Prasarana sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah prasarana sekolah yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	2	Dinas Pendidikan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
80	1.01.000153	prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Unit	Jumlah prasarana sekolah nonformal/kesetaraan	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Pendidikan
81	1.01.000154	prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak	Unit	Jumlah prasarana sekolah nonformal/kesetaraan yang layak	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Pendidikan
82	1.01.000155	prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat	Unit	Jumlah prasarana sekolah nonformal/kesetaraan yang rusak sedang/hebat	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Pendidikan
83	1.01.000156	Prasarana sekolah yang layak	Unit	Jumlah prasarana sekolah yang layak	60	60	60	60	60	60	60	Dinas Pendidikan
84	1.01.000157	Prasarana sekolah yang rusak sedang/berat	Unit	Jumlah prasarana sekolah yang rusak sedang/berat	1	1	1	1	1	1	48	Dinas Pendidikan
85	1.01.000158	Publikasi kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Publikasi	Jumlah Publikasi kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
86	1.01.000162	rasio Pendidik pada pSatuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	Jumlah rasio Pendidik pada satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	100	100	0	100	100	100	Dinas Pendidikan
87	1.01.000163	rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	Jumlah rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	100	100	0	1	0	100	Dinas Pendidikan
88	1.01.000190	Ruang Guru	Ruang	Jumlah Ruang Guru yang tersedia	164	164	164	164	164	164	83	Dinas Pendidikan
89	1.01.000191	Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah Guru Pendidikan nonformal / kesetaraan yang telah direhabilitasi	0	0	0	0	1	0	0	Dinas Pendidikan
90	1.01.000192	Ruang Guru PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah Ruang Guru PAUD yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
91	1.01.000193	Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang guru paud yang telah direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
92	1.01.000194	Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
93	1.01.000196	Ruang Guru yang layak	Ruang	Jumlah Ruang guru yang layak	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
94	1.01.000197	Ruang Guru yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang guru yang rusak sedang/berat	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
95	1.01.000198	Ruang guru yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah guru yang telah direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
96	1.01.000200	ruang kegiatan anak	Ruang	Jumlah ruang kegiatan anak yang tersedia	2	2	2	1	1	2	2	Dinas Pendidikan
97	1.01.000201	Ruang kelas	Ruang	Jumlah ruang kelas yang tersedia	2	2	1	1	1	1	83	Dinas Pendidikan
98	1.01.000202	Ruang kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah kelas pendidikan nonformal / kesetaraan yang telah direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Pendidikan
99	1.01.000203	Ruang kelas baru yang baru ditambahkan	Ruang	Jumlah ruang kelas baru yang baru ditambhakan	1	1	1	1	1	1	2	Dinas Pendidikan
100	1.01.000204	Ruang Kelas PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah ruang kelas paud yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	17	Dinas Pendidikan
101	1.01.000205	Ruang kelas PAUD yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang kelas paud yang telah direhabilitasi	2	2	2	1	1	2	2	Dinas Pendidikan
102	1.01.000206	Ruang Kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah Ruang Kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	2	Dinas Pendidikan
103	1.01.000207	Ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi	2	2	2	1	1	2	83	Dinas Pendidikan
104	1.01.000208	Ruang kelas yang layak	Ruang	Jumlah ruang kelas yang layak	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
105	1.01.000209	Ruang kelas yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang kelas yang rusak sedang/berat	1	1	1	1	1	1	83	Dinas Pendidikan
106	1.01.000210	Ruang Kepala Sekolah	Ruang	Jumlah ruang kepala sekolah yang tersedia	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
107	1.01.000211	Ruang Kepala Sekolah yang layak	Ruang	Jumlah ruang kepala sekolah yang layak	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
108	1.01.000212	Ruang kepala sekolah yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang kepala sekolah yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
109	1.01.000213	Ruang kepala sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang kepala sekolah yang telah direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
110	1.01.000218	Ruang laboratorium	Ruang	Jumlah ruang laboratorium yang tersedia	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
111	1.01.000225	Ruang laboratorium yang layak	Ruang	Jumlah ruang laboratorium yang layak	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
112	1.01.000226	Ruang laboratorium yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang laboratorium yang rusak sedang/berat	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
113	1.01.000241	Ruang laboratorium IPA	Ruang	Jumlah ruang laboratorium IPA	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
114	1.01.000259	ruang PAUD yang memliki mebel yang harus diganti	Ruang	Jumlah ruang PAUD yang memiliki mebel yang harus diganti	3	3	3	1	1	3	1	Dinas Pendidikan
115	1.01.000260	ruang PAUD yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi	Ruang	Jumlah ruang PAUD yang memiliki mebel yang harus dilakukan rehabliitasi	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Pendidikan
116	1.01.000261	ruang PAUD yang memliki mebel yang masih baik	Ruang	Jumlah ruang PAUD yang memiliki mebel yang masih baik	17	17	17	17	17	17	17	Dinas Pendidikan
117	1.01.000262	ruang PAUD yang tidak memliki mebel	Ruang	Jumlah ruang PAUD yang tidak memiliki mebel	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
118	1.01.000263	ruang pembelejaran	Ruang	Jumlah ruang pembelajaran yang tersedia	1	1	1	1	1	1	17	Dinas Pendidikan
119	1.01.000264	ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel yang harus diganti	Ruang	Jumlah ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki mebel yang harus diganti	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
120	1.01.000265	ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi	Ruang	Jmlah ruang pendidikan nonformal / kesetaraan yang memiliki mebel yang harus dilakukan rehabilitas	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
121	1.01.000266	ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel yang masih baik	Ruang	Jumlah ruang pendidikan nonformal / kesetaraan yang memiliki mebel yang masih baik	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
122	1.01.000267	ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memliki mebel	Ruang	Jumlah ruang pendidikan nonfformal / kesetaraan yang tidak memiliki mebel	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
123	1.01.000268	Ruang perpustakaan	Ruang	Jumlah perpustakaan yang tersedia	1	1	1	1	1	1	84	Dinas Pendidikan
124	1.01.000269	Ruang Perpustakaan Sekolah	Ruang	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang tersedia	1	1	1	1	1	1	84	Dinas Pendidikan
125	1.01.000270	Ruang Perpustakaan Sekolah yang layak	Ruang	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang layak	1	1	1	1	1	1	84	Dinas Pendidikan
126	1.01.000271	Ruang Perpustakaan Sekolah yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang rusak sedang/berat	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
127	1.01.000272	Ruang pimpinan	Ruang	Jumlah ruang pimpinan yang tersedia	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
128	1.01.000281	ruang sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah ruang sekolah yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
129	1.01.000282	Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	Jumlah ruang serba guna/aula	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
130	1.01.000283	Ruang serba guna/aula yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah ruang serba guna /aula yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
131	1.01.000284	Ruang Serba Guna/Aula yang layak	Ruang	Jumlah ruang reba guna/aula yang layak	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
132	1.01.000285	Ruang Serba Guna/Aula yang rusak sedang/berat	Ruang	jumlah ruang serba guna/aula yang rusak sedang/berat	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
133	1.01.000286	Ruang sirkulasi	Ruang	Jumlah ruang sirkulasi yang tersedia	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
134	1.01.000289	Ruang TU	Ruang	Jumlah ruang TU yang tersedia	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
135	1.01.000295	Ruang TU yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang TU yang rusak sedang/berat	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
136	1.01.000296	Ruang UKS	Ruang	Jumlah ruang UKS yang tersedia	1	1	1	1	1	1	84	Dinas Pendidikan
137	1.01.000297	Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang tersedia	1	1	1	1	1	2	84	Dinas Pendidikan
138	1.01.000298	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruangunit kesehatan sekolah yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	5	Dinas Pendidikan
139	1.01.000299	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang layak	Ruang	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang layak	1	1	1	1	1	1	79	Dinas Pendidikan
140	1.01.000300	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang rusak sdang/berat	Ruang	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang rusak sedang/berat	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
141	1.01.000301	Ruang yang memliki mebel yang harus diganti	Ruang	Jumlah ruang yang memiliki mebel yang harus diganti	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
142	1.01.000302	Ruang yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi	Ruang	Jumlah ruang yang memiliki mebel yang harus dilakukan rehabilitais	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
143	1.01.000303	Ruang yang memliki mebel yang masih baik	Ruang	Jumlah ruang yang memiliki mebel yang masih baik	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
144	1.01.000304	Ruang yang tidak memliki mebel	Ruang	Jumlah ruang yang tidak memiliki mebel	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
145	1.01.000307	ruangan Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah ruangan sekolah yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
146	1.01.000314	Rumah Dinas Kepala Sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang perlu direhabilitasi	0	1	1	1	1	0	1	Dinas Pendidikan
147	1.01.000321	Rumah dinas penjaga sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah rumah dinas penjaga sekolah yang memerlukan pemeilharaan	0	0	1	0	0	0	1	Dinas Pendidikan
148	1.01.000325	Sarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah sarana PAUD yang menentukan memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	3	Dinas Pendidikan
149	1.01.000326	Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah sarana pendidikan nonformal / kesetaraan yang memerlukan pemilharaan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
150	1.01.000327	Sarana PAUD yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah sarana PAUD yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	3	Dinas Pendidikan
151	1.01.000328	Sarana PAUD yang telah direhabilitasi	Unit	Jumlah PAUD yang telah direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	2	Dinas Pendidikan
152	1.01.000329	Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah sarana pendidikan nonformal / kesetaraan yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
153	1.01.000330	Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	Unit	Jumlah sarana pendidikan nonformal / kesetaraan yang telah direhabilitasi	2	2	1	1	1	2	1	Dinas Pendidikan
154	1.01.000331	Sarana sekolah	Unit	Jumlah sarana sekolah yang tersedia	2	2	1	1	1	1	2	Dinas Pendidikan
155	1.01.000332	Sarana sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah sarana sekolah yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
156	1.01.000333	sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Unit	Jumlah sarana sekolah nonformal / kesetaraan yang tersedia	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
157	1.01.000334	sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak	Unit	Jumlah sarana sekolah nonformal/kesetaraan yang layak	1	1	1	5	5	5	1	Dinas Pendidikan
158	1.01.000335	Sarana sekolah yang layak	Unit	Jumlah sarana sekolah yang layak	1	1	1	1	1	1	5	Dinas Pendidikan
159	1.01.000336	Sarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah sarana sekolah yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	5	Dinas Pendidikan
160	1.01.000337	Sarana Sekolah yang rusak sedang/berat	Unit	Jumlah saranasekolah yang rusak sedang/berat	1	1	1	1	1	1	5	Dinas Pendidikan
161	1.01.000339	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang belum menerima pembinaan kelembagaan	Orang	jumlah satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang belum menerima pembinaan kelembagaan	0	0	0	0	0	0	5	Dinas Pendidikan
162	1.01.000340	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima pembinaan kelembagaan	Orang	Jumlah satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang menerima pembinaan kelembagaan	120	120	1	120	120	160	160	Dinas Pendidikan
163	1.01.000341	satuan PAUD yang belum menerima pembinaan kelembagaan	Orang	Jumlah satuan PAUD yang belum menerima pembinaan kelembagaan	0	0	0	0	0	0	5	Dinas Pendidikan
164	1.01.000342	satuan PAUD yang melaksanakan rekomendasi	satuan PAUD	Jumlah satuan PAUD yang melaksanakan rekomendasi	1	1	1	1	1	0	5	Dinas Pendidikan
165	1.01.000343	satuan PAUD yang membutuhkan perlengkapan sekolah	satuan PAUD	Jumlah satuan PAUD yang memburuhkan perlengkapan sekolah	1	1	1	1	1	1	17	Dinas Pendidikan
166	1.01.000344	satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti	satuan PAUD	jumlah satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti	1	1	1	1	1	1	17	Dinas Pendidikan
167	1.01.000345	satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik	satuan PAUD	jumlah satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik	1	1	1	1	1	1	17	Dinas Pendidikan
168	1.01.000346	satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi	satuan PAUD	jumlah satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi	5	5	5	5	5	5	17	Dinas Pendidikan
169	1.01.000347	satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa	satuan PAUD	jumlah satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa	17	17	17	17	17	17	17	Dinas Pendidikan
170	1.01.000348	satuan PAUD yang menerima pembinaan kelembagaan	Orang	jumlah satuan paud yang menerima pembinaan kelembagaan	160	160	160	160	160	160	160	Dinas Pendidikan
171	1.01.000349	satuan PAUD yang menerima perlengkapan sekolah	satuan PAUD	jumlah satuan paud yang menerima perlengkapan sekolah	10	10	3	17	17	0	17	Dinas Pendidikan
172	1.01.000350	satuan PAUD yang mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	jumlah satuan paud yang mengelola dana BOP	170	170	170	170	162	143	172	Dinas Pendidikan
173	1.01.000351	satuan PAUD yang menyelenggarakan proses belajar	satuan PAUD	jumlah satuan paud yang menyelenggarakan proses belajar	170	170	170	170	162	143	160	Dinas Pendidikan
174	1.01.000352	satuan PAUD yang siap dievaluasi	satuan PAUD	jumlah satuan paud yang siap dievaluasi	160	160	160	160	160	160	160	Dinas Pendidikan
175	1.01.000353	satuan PAUD yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga siswa	satuan PAUD	jumlah satuan paud yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga siswa	0	0	0	0	0	0	17	Dinas Pendidikan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
176	1.01.000354	satuan PAUD yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa	satuan PAUD	satuan paud yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa	1	1	1	1	4	1	17	Dinas Pendidikan
177	1.01.000355	satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar	satuan PAUD	jumlah satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar	17	17	17	17	17	17	17	Dinas Pendidikan
178	1.01.000356	satuan PAUD yang tidak memliki peralatan rumah tangga	satuan PAUD	jumlah satuan paud yang tidak memiliki peralatan rumah tangga	1	1	1	1	2	2	17	Dinas Pendidikan
179	1.01.000364	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa	satuan PAUD	jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa	5	5	5	5	5	5	1	Dinas Pendidikan
180	1.01.000365	satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan perlengkapan sekolah	satuan PAUD	jumlah satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang membutuhkan perlengkapan sekolah	5	5	5	5	5	5	1	Dinas Pendidikan
181	1.01.000366	satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti	satuan PAUD	jumlah satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
182	1.01.000367	satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik	satuan PAUD	jumlah satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik	5	5	5	5	5	5	1	Dinas Pendidikan
183	1.01.000368	satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi	satuan PAUD	jumlah satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi	5	5	5	5	5	5	1	Dinas Pendidikan
184	1.01.000369	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima alat praktik dan peraga siswa	satuan PAUD	jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima alat praktik dan peraga siswa	0	2	0	1	1	0	1	Dinas Pendidikan
185	1.01.000370	satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima perlengkapan sekolah	satuan PAUD	jumlah satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima perlengkapan sekolah	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan
186	1.01.000371	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang mengelola Dana BOP	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan
187	1.01.000372	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar	satuan PAUD	jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan
188	1.01.000373	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa	satuan PAUD	jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa	0	0	0	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
189	1.01.000374	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar	satuan PAUD	jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan
190	1.01.000375	satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memliki peralatan rumah tangga	satuan PAUD	jumlah satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memliki peralatan rumah tangga	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
191	1.01.000376	Satuan pendidikan yang belum memiliki ruang UKS	Ruang	jumlah Satuan pendidikan yang belum memiliki ruang UKS	17	17	17	17	16	15	15	Dinas Pendidikan
192	1.01.000378	Satuan pendidikan yang belum menerima pembinaan kelembagaan	Orang	jumlah Satuan pendidikan yang belum menerima pembinaan kelembagaan	170	170	170	170	170	170	170	Dinas Pendidikan
193	1.01.000380	satuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa	Satuan Pendidikan	jumlah satuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa	82	82	82	82	82	82	84	Dinas Pendidikan
194	1.01.000383	Satuan pendidikan yang membutuhkan perlengkapan Sekolah	Satuan Pendidikan	jumlah Satuan pendidikan yang membutuhkan perlengkapan Sekolah	170	170	170	170	170	170	170	Dinas Pendidikan
195	1.01.000384	Satuan pendidikan yang memiliki fasilitas parkir yang memadai	Satuan Pendidikan	jumlah Satuan pendidikan yang memiliki fasilitas parkir yang memadai	9	9	9	9	9	9	9	Dinas Pendidikan
196	1.01.000386	Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti	Satuan Pendidikan	jumlah satuan pendidikan yang memiliki peralatan rumah tangga yang harus diganti	2	2	2	2	2	2	9	Dinas Pendidikan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
197	1.01.000387	satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus dilakukan rehabilitasi	Satuan Pendidikan	jumlah satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus dilakukan rehabilitasi	2	2	2	2	2	2	9	Dinas Pendidikan
198	1.01.000388	Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik	Satuan Pendidikan	jumlah Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik	48	48	48	48	48	48	48	Dinas Pendidikan
199	1.01.000390	Satuan pendidikan yang menerima alat praktik dan peraga Siswa	Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan pendidikan yang menerima alat praktik dan peraga Siswa	2	2	2	2	2	2	48	Dinas Pendidikan
200	1.01.000392	Satuan pendidikan yang menerima pembinaan kelembagaan	Orang	Jumlah Satuan pendidikan yang menerima pembinaan kelembagaan	170	170	170	170	170	170	170	Dinas Pendidikan
201	1.01.000393	Satuan pendidikan yang menerima perlengkapan Sekolah	Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan pendidikan yang menerima perlengkapan Sekolah	82	82	82	82	82	82	84	Dinas Pendidikan
202	1.01.000394	Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan AN	Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan AN	0	0	5	5	5	5	89	Dinas Pendidikan
203	1.01.000395	Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	Satuan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	63	63	63	63	63	63	170	Dinas Pendidikan
204	1.01.000396	Satuan Pendidikan yang siap menyelenggarakan AN	Satuan Pendidikan	jumlah satuan pendidikan yang siap menyelenggarakan AN	0	0	5	5	5	5	89	Dinas Pendidikan
205	1.01.000398	Satuan pendidikan yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga Siswa	Satuan Pendidikan	jumlah satuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa	63	63	63	63	63	63	84	Dinas Pendidikan
206	1.01.000399	Satuan pendidikan yang telah memiliki alat praktik dan peraga Siswa	Satuan Pendidikan	jumlah satuan pendidikan yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa	4	4	4	4	1	7	84	Dinas Pendidikan
207	1.01.000400	Satuan Pendidikan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar	Satuan Pendidikan	jumlah Satuan Pendidikan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar	63	63	63	63	63	63	84	Dinas Pendidikan
208	1.01.000402	Satuan pendidikan yang tidak memliki peralatan rumah tangga	Satuan Pendidikan	jumlah satuan pendidikan yang tidak memiliki peralatan rumah tangga	63	63	63	63	63	63	84	Dinas Pendidikan
209	1.01.000403	Sekolah Dasar yang melaksanakan rekomendasi	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah dasar yang melaksanakan rekomendasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
210	1.01.000404	Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah dasar yang mengelola dana bos	63	63	63	63	63	63	63	Dinas Pendidikan
211	1.01.000405	Sekolah Dasar yang siap dievaluasi	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah dasar yang siap dievaluasi	63	63	63	63	63	63	63	Dinas Pendidikan
212	1.01.000408	Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan rekomendasi	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah menengah pertama yang melaksanakan rekomendasi dari hasil pelaksanaan akreditasi	0	0	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
213	1.01.000409	Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah menengah pertama yang mengelola dana bos	0	0	19	19	19	19	20	Dinas Pendidikan
214	1.01.000410	Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat	Unit	jumlah sekolah Nonformal/Kesetaraan dengan kondisi rusak sedang/berat	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Pendidikan
215	1.01.000415	Sekolah yang memiliki kantin yang memadai	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah yang memiliki kantin dengan kondisi memadai	10	10	48	48	48	48	48	Dinas Pendidikan
216	1.01.000416	Sekolah yang memiliki ruang/sudut baca	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah yang memiliki ruang/sudut baca	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Pendidikan
217	1.01.000417	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dokumen	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	0	0	0	1	2	2	2	Dinas Pendidikan
218	1.01.000418	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dokumen	Jumlah silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0	0	0	2	2	2	2	Dinas Pendidikan
219	1.01.000421	Siswa PAUD yang berpotensi putus sekolah	Siswa	Jumlah siswa yang berpotensi putus sekolah pada PAUD	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
220	1.01.000422	Siswa PAUD yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	Siswa	Jumlah siswa PAUD yang layak menerima namun belum menerima biaya personil peserta didik	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
221	1.01.000423	Siswa PAUD yang menerima biaya personil peserta didik	Siswa	Jumlah siswa PAUD yang menerima biaya personil peserta didik	0	4500	4700	4700	4768	3000	5469	Dinas Pendidikan
222	1.01.000424	Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berpotensi putus sekolah	Siswa	Jumlah siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berpotensi putus sekolah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
223	1.01.000425	Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	Siswa	Jumlah siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang layak menerima namun belum menerima biaya personil peserta didik	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
224	1.01.000426	Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik	Siswa	jumlah siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik	192	156	124	141	166	170	180	Dinas Pendidikan
225	1.01.000429	siswa yang membutukan perlengkapan Siswa PAUD	Siswa	Jumlah siswa PAUD yang membutukan perlengkapan PAUD	884	884	893	535	540	554	5469	Dinas Pendidikan
226	1.01.000430	Siswa yang membutukan perlengkapan Peserta Didik	Siswa	jumlah siswa yang membutukan perlengkapan Peserta Didik	3000	3000	2500	2500	540	14000	5469	Dinas Pendidikan
227	1.01.000431	Siswa yang menerima perlengkapan Siswa PAUD	Siswa	jumlah siswa PAUD yang menerima perlengkapan Siswa	800	800	893	535	540	554	5469	Dinas Pendidikan
228	1.01.000432	Siswa yang menerima perlengkapan Peserta Didik	Siswa	jumlah siswa yang menerima perlengkapan Peserta Didik	1200	12000	12000	12000	12000	14000	5469	Dinas Pendidikan
229	1.01.000433	Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik	Peserta Didik	jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik	500	500	500	500	500	500	500	Dinas Pendidikan
230	1.01.000434	Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba nonakademik	Peserta Didik	jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba nonakademik	270	270	231	170	170	500	500	Dinas Pendidikan
231	1.01.000435	Tempat beribadah	Ruang	jumlah sekolah yang memiliki tempat beribadah	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
232	1.01.000436	Tempat bermain/berolahraga	Unit	jumlah sekolah yang memiliki tempat bermain/berolahraga	17	17	1	17	17	1	1	Dinas Pendidikan
233	1.01.000440	Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi	0	0	0	0	0	2	2	Dinas Pendidikan
234	1.01.000441	Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi	Orang	Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
235	1.01.000443	Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi	Orang	jumlah tenaga kependidikan pada sekolah menengah pertama yang telah lulus sertifikasi	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
236	1.01.000444	Tenaga Kependidikan pada SSekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi	Orang	jumlah tenaga kependidikan pada sekolah dasar yang telah lulus sertifikasi	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
237	1.01.000449	Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV	400	400	498	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
238	1.01.000450	Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD	Orang	jumlah tenaga kependidikan pada satuan paud	135	135	746	135	135	134	134	Dinas Pendidikan
239	1.01.000451	Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	jumlah tenaga kependidikan pada satuan paud yang berkualifikasi akademik S1/DIV	400	400	498	6	6	7	192	Dinas Pendidikan
240	1.01.000452	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	500	500	515	182	180	186	186	Dinas Pendidikan
241	1.01.000453	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV	105	105	215	31	30	33	33	Dinas Pendidikan
242	1.01.000456	Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada sekolah menengah pertama	322	322	103	103	103	103	103	Dinas Pendidikan
243	1.01.000457	Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi akademik S1/DIV pada Sekolah Menengah Pertama	150	150	177	25	25	25	25	Dinas Pendidikan
244	1.01.000458	Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan	Orang	jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
245	1.01.000459	Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi	Orang	jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi	0	0	0	0	0	8	8	Dinas Pendidikan
246	1.01.000460	Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi	Orang	jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
247	1.01.000461	Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi	Orang	Jumlah Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
248	1.01.000462	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	160	160	160	160	286	160	160	Dinas Pendidikan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
249	1.01.000463	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Orang	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal / Kesetaraan	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Pendidikan
250	1.01.000465	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	63	63	63	63	63	63	63	Dinas Pendidikan
251	1.01.000468	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	63	63	63	63	63	63	63	Dinas Pendidikan
252	1.01.000474	Unit sekolah	Unit	jumlah unit sekolah yang tersedia	23	1	1	1	23	1	1	Dinas Pendidikan
253	1.01.000475	Unit sekolah yang layak	Unit	jumlah unit sekolah yang layak	1	1	1	1	1	2	1	Dinas Pendidikan
254	1.01.000476	Unit sekolah yang rusak sedang/berat	Unit	jumlah unit sekolah yang rusak sedang/berat	1	1	1	1	1	2	1	Dinas Pendidikan
255	1.01.000481	Usulan pendirian sekolah baru	Dokumen	jumlah usulan pendirian sekolah baru	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
256	1.01.000483	Utilitas PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Unit	jumlah Utilitas PAUD yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	17	Dinas Pendidikan
257	1.01.000484	Utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Unit	jumlah Utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
258	1.01.000485	utilitas PAUD yang perlu direhabilitasi	Unit	jumlah utilitas PAUD yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	17	Dinas Pendidikan
259	1.01.000486	utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi	Unit	jumlah utilitas pendidikan nonformal / kesetaraan yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
260	1.01.000487	Utilitas sekolah	Unit	jumlah utilitas sekolah yang tersedia	1	1	1	1	1	1	17	Dinas Pendidikan
261	1.01.000488	Utilitas sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	jumlah utilitas sekolah yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	17	Dinas Pendidikan
262	1.01.000489	utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Unit	jumlah utilitas sekolah nonformal/kesetaraan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
263	1.01.000490	utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak	Unit	jumlah utilitas sekolah nonformal/kesetaraan yang layak	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
264	1.01.000491	utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat	Unit	jumlah utilitas sekolah nonformal/kesetaraan yang rusak sedang/berat	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
265	1.01.000492	Utilitas sekolah yang layak	Unit	jumlah utilitas sekolah yang layak	1	1	1	1	1	1	5	Dinas Pendidikan
266	1.01.000493	Utilitas Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	jumlah utilitas sekolah yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	5	Dinas Pendidikan
267	1.01.000494	Utilitas sekolah yang rusak sedang/berat	Unit	jumlah utilitas sekolah yang rusak sedang/berat	1	1	1	1	1	1	5	Dinas Pendidikan
268	1.01.000497	Jumlah Sekolah Dasar negeri	Unit	Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah	48	48	48	48	48	48	48	Dinas Pendidikan
269	1.01.000498	Jumlah Sekolah Dasar swasta	Unit	Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta	14	14	15	15	15	15	15	Dinas Pendidikan
270	1.01.000499	jumlah Sekolah Dasar	Unit	Jumlah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	62	62	63	63	63	63	63	Dinas Pendidikan
271	1.01.000500	Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri	Orang	Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah	10718	10099	9563	8949	8742	8507	8360	Dinas Pendidikan
272	1.01.000501	Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta	Orang	Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pihak swasta	3978	4001	3904	3854	3771	3653	3656	Dinas Pendidikan
273	1.01.000502	jumlah Siswa Sekolah Dasar	Orang	Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta	14696	14100	13467	12803	12513	12160	12016	Dinas Pendidikan
274	1.01.000503	Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki negeri	Orang	Jumlah siswa sekolah dasar negeri berjenis kelamin laki-laki	5475	5132	4882	4553	4553	4349	4254	Dinas Pendidikan
275	1.01.000504	Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki swasta	Orang	Jumlah siswa sekolah dasar swasta berjenis kelamin laki-laki	2077	2098	2069	2027	2027	1906	1897	Dinas Pendidikan
276	1.01.000505	jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki	Orang	Jumlah siswa sekolah dasar negeri dan swasta berjenis kelamin laki-laki	7552	7230	6951	6580	2559	6253	6151	Dinas Pendidikan
277	1.01.000506	Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan negeri	Orang	Jumlah siswa sekolah dasar negeri berjenis kelamin perempuan	5243	4967	4681	4396	4293	4159	4106	Dinas Pendidikan
278	1.01.000507	Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan swasta	Orang	Jumlah siswa sekolah dasar swasta berjenis kelamin Perempuan	1901	1903	1835	1827	1754	1754	1759	Dinas Pendidikan
279	1.01.000508	jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan	Orang	Jumlah siswa sekolah dasar negeri dan swasta berjenis kelamin Perempuan	7144	6870	6516	6223	6057	5907	5865	Dinas Pendidikan
280	1.01.000509	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 negeri	Orang	Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar negeri	1524	1385	1411	1357	1302	1302	1355	Dinas Pendidikan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
281	1.01.000510	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 swasta	Orang	Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar negeri	694	630	598	595	640	640	668	Dinas Pendidikan
282	1.01.000511	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1	Orang	Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar negeri	2218	2015	2009	1952	1942	1942	2023	Dinas Pendidikan
283	1.01.000512	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 negeri	Orang	Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar negeri	1639	1506	1386	1396	1364	1364	1393	Dinas Pendidikan
284	1.01.000513	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 swasta	Orang	Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar negeri	754	686	614	594	572	572	621	Dinas Pendidikan
285	1.01.000514	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2	Orang	Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar negeri	2393	2192	2000	1990	1936	1936	2014	Dinas Pendidikan
286	1.01.000515	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 negeri	Orang	Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar negeri	1666	1645	1499	1362	1357	1357	1459	Dinas Pendidikan
287	1.01.000516	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 swasta	Orang	Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar negeri	678	757	667	607	583	583	561	Dinas Pendidikan
288	1.01.000517	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3	Orang	Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar	2344	2402	2166	1969	1940	1940	2020	Dinas Pendidikan
289	1.01.000518	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 negeri	Orang	Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar negeri	1933	1674	1633	1509	1381	1381	1355	Dinas Pendidikan
290	1.01.000519	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 swasta	Orang	Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar swasta	631	678	743	653	596	596	601	Dinas Pendidikan
291	1.01.000520	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4	Orang	Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar	2564	2352	2376	2162	1977	1977	1956	Dinas Pendidikan
292	1.01.000521	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 negeri	Orang	Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar negeri	1969	1928	1701	1644	1375	1375	1410	Dinas Pendidikan
293	1.01.000522	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 swasta	Orang	Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar swasta	621	630	658	736	571	571	595	Dinas Pendidikan
294	1.01.000523	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5	Orang	Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar	2590	2558	2359	2380	1946	1946	2005	Dinas Pendidikan
295	1.01.000524	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 negeri	Orang	Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar negeri	1987	1961	1933	1681	1722	1722	1389	Dinas Pendidikan
296	1.01.000525	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 swasta	Orang	Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar swasta	600	620	624	669	696	696	610	Dinas Pendidikan
297	1.01.000526	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6	Orang	Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar	2587	2581	2557	2350	2418	2418	199	Dinas Pendidikan
298	1.01.000527	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun negeri	Orang	Jumlah siswa usia dibawah 7 tahun pada Sekolah Dasar Negeri	10	273	259	241	84	84	186	Dinas Pendidikan
299	1.01.000528	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun swasta	Orang	Jumlah siswa usia dibawah 7 tahun pada Sekolah Dasar Swasta	5	181	175	196	93	93	155	Dinas Pendidikan
300	1.01.000529	jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun	Orang	Jumlah siswa usia dibawah 7 tahun pada Sekolah Dasar	15	454	434	437	177	177	341	Dinas Pendidikan
301	1.01.000533	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun negeri	Orang	Jumlah siswa usia diatas 12 tahun pada Sekolah Dasar Negeri	1557	88	0	0	292	292	145	Dinas Pendidikan
302	1.01.000534	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun swasta	Orang	Jumlah siswa usia diatas 12 tahun pada Sekolah Dasar Swasta	386	29	0	0	98	98	47	Dinas Pendidikan
303	1.01.000535	jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun	Orang	Jumlah siswa usia diatas 12 tahun pada Sekolah Dasar	1943	117	0	0	390	390	192	Dinas Pendidikan
304	1.01.000536	Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang negeri	Orang	Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Dasar Negeri	19	12	0	0	0	0	17	Dinas Pendidikan
305	1.01.000537	Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang swasta	Orang	Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Dasar Swasta	0	2	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
306	1.01.000538	jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang	Orang	Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Dasar	19	14	0	0	0	0	17	Dinas Pendidikan
307	1.01.000539	Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus negeri	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Dasar Swasta	0	4	0	0	0	0	3	Dinas Pendidikan
308	1.01.000540	Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus swasta	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Dasar Swasta	0	0	0	0	0	0	6	Dinas Pendidikan
309	1.01.000541	jumlah Siswa Sekolah Dasar putus	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Dasar	0	4	0	0	0	0	9	Dinas Pendidikan
310	1.01.000542	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru negeri	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Dasar Negeri	190	638	0	0	503	503	533	Dinas Pendidikan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
311	1.01.000543	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Dasar Swasta	97	259	0	0	227	227	247	Dinas Pendidikan
312	1.01.000544	jumlah kepala Sekolah Dasar & guru	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Dasar	287	897	0	0	730	730	788	Dinas Pendidikan
313	1.01.000545	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki negeri	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Negeri	61	194	0	0	150	150	160	Dinas Pendidikan
314	1.01.000546	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Swasta	25	74	0	0	53	53	61	Dinas Pendidikan
315	1.01.000547	jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar	86	268	0	0	933	933	221	Dinas Pendidikan
316	1.01.000548	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan negeri	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Negeri	129	444	0	0	353	353	373	Dinas Pendidikan
317	1.01.000549	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Swasta	72	185	0	0	174	174	194	Dinas Pendidikan
318	1.01.000550	jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar	201	629	0	0	527	527	567	Dinas Pendidikan
319	1.01.000551	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 negeri	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Negeri	49	18	10	6	546	546	0	Dinas Pendidikan
320	1.01.000552	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Swasta	17	8	7	8	242	242	3	Dinas Pendidikan
321	1.01.000553	jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah dibawah S1 pada Sekolah Dasar	66	26	17	14	6	6	3	Dinas Pendidikan
322	1.01.000554	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas negeri	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 keatas pada Sekolah Dasar Negeri	515	563	568	556	546	546	533	Dinas Pendidikan
323	1.01.000555	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 keatas pada Sekolah Dasar Swasta	219	221	248	245	242	242	252	Dinas Pendidikan
324	1.01.000556	jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 keatas pada Sekolah Dasar	734	784	816	801	788	788	785	Dinas Pendidikan
325	1.01.000557	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Negeri	25	35	0	0	109	109	101	Dinas Pendidikan
326	1.01.000558	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Swasta	15	19	0	0	37	37	37	Dinas Pendidikan
327	1.01.000559	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar	40	54	0	0	146	146	138	Dinas Pendidikan
328	1.01.000560	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Negeri	23	52	0	0	16	16	13	Dinas Pendidikan
329	1.01.000561	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Swasta	20	21	0	0	25	25	25	Dinas Pendidikan
330	1.01.000562	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar	43	73	0	0	41	41	38	Dinas Pendidikan
331	1.01.000563	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA pada Sekolah Dasar	1	0	0	0	83	83	77	Dinas Pendidikan
332	1.01.000564	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA pada Sekolah Dasar Swasta	10	0	0	0	34	34	31	Dinas Pendidikan
333	1.01.000565	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA pada Sekolah Dasar	11	0	0	0	117	117	108	Dinas Pendidikan
334	1.01.000566	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA ke atas pada Sekolah Dasar Negeri	47	87	0	0	29	29	29	Dinas Pendidikan
335	1.01.000567	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA keatas pada Sekolah Dasar Swasta	25	40	0	0	18	18	22	Dinas Pendidikan
336	1.01.000568	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA ke atas pada Sekolah Dasar	72	127	0	0	47	47	51	Dinas Pendidikan
337	1.01.000569	Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar negeri	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Dasar Negeri	403	391	381	371	407	407	407	Dinas Pendidikan
338	1.01.000570	Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar swasta	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Dasar Swasta	164	167	170	169	159	159	159	Dinas Pendidikan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
339	1.01.000571	jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Dasar	567	558	551	540	566	566	566	Dinas Pendidikan
340	1.01.000572	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar negeri	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Dasar Negeri	437	435	433	411	464	464	464	Dinas Pendidikan
341	1.01.000573	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar swasta	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Dasar Swasta	169	171	178	172	181	181	181	Dinas Pendidikan
342	1.01.000574	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Dasar	606	606	611	583	645	645	645	Dinas Pendidikan
343	1.01.000575	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar Negeri	28	162	180	293	447	447	447	Dinas Pendidikan
344	1.01.000576	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar Swasta	26	90	66	113	180	180	180	Dinas Pendidikan
345	1.01.000577	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar	54	252	246	406	627	627	627	Dinas Pendidikan
346	1.01.000578	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Dasar Negeri	369	273	253	65	17	17	17	Dinas Pendidikan
347	1.01.000579	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Dasar Swasta	130	81	112	49	1	1	1	Dinas Pendidikan
348	1.01.000580	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Dasar	499	354	365	114	18	18	18	Dinas Pendidikan
349	1.01.000581	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Dasar Negeri	29	0	0	31	0	0	20	Dinas Pendidikan
350	1.01.000582	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Dasar Swasta	13	0	0	6	0	0	0	Dinas Pendidikan
351	1.01.000583	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Dasar	42	0	0	37	0	0	20	Dinas Pendidikan
352	1.01.000584	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Dasar Negeri	11	0	0	22	0	0	0	Dinas Pendidikan
353	1.01.000585	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Dasar Swasta	0	0	0	4	4	0	0	Dinas Pendidikan
354	1.01.000586	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Dasar	11	0	0	26	0	0	0	Dinas Pendidikan
355	1.01.000587	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Dasar Negeri	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
356	1.01.000588	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Dasar Swasta	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
357	1.01.000589	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Dasar	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
358	1.01.000590	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Negeri	48	87	0	0	20	20	17	Dinas Pendidikan
359	1.01.000591	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Swasta	35	40	0	0	16	16	18	Dinas Pendidikan
360	1.01.000592	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar	83	127	0	0	36	36	35	Dinas Pendidikan
361	1.01.000593	Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri	9	9	9	9	9	9	9	Dinas Pendidikan
362	1.01.000594	Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta	11	11	11	11	10	11	11	Dinas Pendidikan
363	1.01.000595	jumlah Sekolah Menengah Pertama	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Pertama	20	20	20	20	19	20	20	Dinas Pendidikan
364	1.01.000596	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri	Orang	Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	7351	7245	7221	7099	5528	7159	7181	Dinas Pendidikan
365	1.01.000597	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama swasta	Orang	Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	1300	1324	1364	1355	1319	1390	1432	Dinas Pendidikan
366	1.01.000598	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama	Orang	Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama	8651	8569	8585	8454	6847	8549	8613	Dinas Pendidikan
367	1.01.000599	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri	Orang	Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	3795	3803	3766	3715	3651	3651	3696	Dinas Pendidikan
368	1.01.000600	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta	Orang	Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	569	536	535	553	599	599	602	Dinas Pendidikan
369	1.01.000601	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki	Orang	Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama	4364	4339	4301	4268	4148	4250	4298	Dinas Pendidikan
370	1.01.000602	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri	Orang	Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	3556	3442	3455	3384	3476	3476	3485	Dinas Pendidikan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
371	1.01.000603	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta	Orang	Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	731	788	829	802	798	798	830	Dinas Pendidikan
372	1.01.000604	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan	Orang	Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama	4287	4230	4284	4186	4817	4274	4315	Dinas Pendidikan
373	1.01.000605	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 negeri	Orang	Jumlah siswa tingkat 7 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	2523	2389	2436	2386	2101	2101	2390	Dinas Pendidikan
374	1.01.000606	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 swasta	Orang	Jumlah siswa tingkat 7 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	466	453	445	471	475	475	486	Dinas Pendidikan
375	1.01.000607	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1	Orang	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1 atau kelas 7	2989	2842	2881	2857	2485	2485	2876	Dinas Pendidikan
376	1.01.000608	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 negeri	Orang	Jumlah siswa tingkat 8 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	2420	2500	2365	2392	2288	2288	2461	Dinas Pendidikan
377	1.01.000609	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 swasta	Orang	Jumlah siswa tingkat 8 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	413	490	457	426	439	439	1512	Dinas Pendidikan
378	1.01.000610	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2 atau kelas 8	2833	2990	2822	2818	2727	2727	2974	Dinas Pendidikan
379	1.01.000611	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 negeri	Orang	Jumlah siswa tingkat 9 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	2408	2356	2420	2321	2738	2738	2428	Dinas Pendidikan
380	1.01.000612	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 swasta	Orang	Jumlah siswa tingkat 9 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	421	381	462	458	483	483	434	Dinas Pendidikan
381	1.01.000613	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3 atau kelas 9	2829	2737	2882	2779	3221	3221	2862	Dinas Pendidikan
382	1.01.000614	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	0	0	0	0	0	0	7183	Dinas Pendidikan
383	1.01.000615	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	0	0	0	0	0	0	1432	Dinas Pendidikan
384	1.01.000616	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama	0	0	0	0	0	0	7183	Dinas Pendidikan
385	1.01.000617	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	0	0	0	0	0	0	7183	Dinas Pendidikan
386	1.01.000618	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	0	0	0	0	0	0	1432	Dinas Pendidikan
387	1.01.000619	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama	0	0	0	0	0	0	8615	Dinas Pendidikan
388	1.01.000620	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	0	0	0	0	0	0	7183	Dinas Pendidikan
389	1.01.000621	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	0	0	0	0	0	0	1432	Dinas Pendidikan
390	1.01.000622	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama	0	0	0	0	0	0	8615	Dinas Pendidikan
391	1.01.000629	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun negeri	Orang	Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun yang ada pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	1968	217	195	3012	7044	7044	6698	Dinas Pendidikan
392	1.01.000630	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun swasta	Orang	Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun yang ada pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	322	58	43	675	1349	1349	1359	Dinas Pendidikan
393	1.01.000631	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun	Orang	Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun yang ada pada Sekolah Menengah Pertama	2290	275	238	3687	8393	8393	8357	Dinas Pendidikan
394	1.01.000632	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang negeri	Orang	Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	64	57	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
395	1.01.000633	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang swasta	Orang	Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	8	24	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
396	1.01.000634	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang	Orang	Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Pertama	72	81	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
397	1.01.000635	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus negeri	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	0	0	1	0	0	0	0	Dinas Pendidikan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
398	1.01.000636	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus swasta	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
399	1.01.000637	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Pertama	0	0	1	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
400	1.01.000638	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	163	427	0	0	208	208	432	Dinas Pendidikan
401	1.01.000639	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	94	131	0	0	65	65	109	Dinas Pendidikan
402	1.01.000640	jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Pertama	257	558	0	0	275	275	541	Dinas Pendidikan
403	1.01.000641	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	63	148	0	0	87	87	140	Dinas Pendidikan
404	1.01.000642	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	32	45	0	0	21	21	35	Dinas Pendidikan
405	1.01.000643	jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama	95	193	0	0	108	108	175	Dinas Pendidikan
406	1.01.000644	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	100	279	0	0	121	121	292	Dinas Pendidikan
407	1.01.000645	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	62	86	0	0	44	44	74	Dinas Pendidikan
408	1.01.000646	jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama	162	365	0	0	165	165	366	Dinas Pendidikan
409	1.01.000647	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah dibawah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	47	10	2	2	0	0	1	Dinas Pendidikan
410	1.01.000648	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah dibawah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	2	1	1	1	1	1	7	Dinas Pendidikan
411	1.01.000649	jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah dibawah S1 pada Sekolah Menengah Pertama	49	11	3	3	1	1	8	Dinas Pendidikan
412	1.01.000650	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	350	398	435	429	208	208	431	Dinas Pendidikan
413	1.01.000651	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	115	122	117	116	64	64	64	Dinas Pendidikan
414	1.01.000652	jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Pertama	465	520	552	545	272	272	272	Dinas Pendidikan
415	1.01.000653	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	38	47	0	0	65	65	42	Dinas Pendidikan
416	1.01.000654	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	9	10	0	0	8	8	9	Dinas Pendidikan
417	1.01.000655	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama	47	57	0	0	73	73	51	Dinas Pendidikan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
418	1.01.000656	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	30	38	0	0	19	19	19	Dinas Pendidikan
419	1.01.000657	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	11	12	0	0	11	11	13	Dinas Pendidikan
420	1.01.000658	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama	41	50	0	0	30	30	32	Dinas Pendidikan
421	1.01.000659	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah SMA pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	16	0	0	0	51	51	29	Dinas Pendidikan
422	1.01.000660	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah SMA pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	2	0	0	0	11	11	13	Dinas Pendidikan
423	1.01.000661	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah SMA pada Sekolah Menengah Pertama	18	0	0	0	62	62	42	Dinas Pendidikan
424	1.01.000662	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah diatas SMA pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	52	85	0	0	18	18	22	Dinas Pendidikan
425	1.01.000663	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah diatas SMA pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	18	22	0	0	8	8	9	Dinas Pendidikan
426	1.01.000664	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah diatas SMA pada Sekolah Menengah Pertama	70	107	0	0	26	26	31	Dinas Pendidikan
427	1.01.000665	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama negeri	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	240	236	235	231	242	242	242	Dinas Pendidikan
428	1.01.000666	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama swasta	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	54	57	59	59	49	49	49	Dinas Pendidikan
429	1.01.000667	jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama	294	293	294	290	291	291	291	Dinas Pendidikan
430	1.01.000668	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama negeri	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	251	248	250	240	255	255	255	Dinas Pendidikan
431	1.01.000669	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama swasta	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	51	54	58	53	61	61	61	Dinas Pendidikan
432	1.01.000670	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Pertama	302	302	308	293	316	316	316	Dinas Pendidikan
433	1.01.000671	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik negeri	Unit	Jumlah ruang kelas denga kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	58	61	186	252	252	252	Dinas Pendidikan
434	1.01.000672	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik swasta	Unit	Jumlah ruang kelas denga kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	9	45	42	33	56	56	56	Dinas Pendidikan
435	1.01.000673	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama	11	103	103	219	308	308	308	Dinas Pendidikan
436	1.01.000674	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak rigan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	249	190	189	51	3	3	3	Dinas Pendidikan
437	1.01.000675	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak rigan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	42	9	16	20	5	5	5	Dinas Pendidikan
438	1.01.000676	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak rigan pada Sekolah Menengah Pertama	291	199	205	71	8	8	8	Dinas Pendidikan
439	1.01.000677	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	0	0	0	2	0	0	0	Dinas Pendidikan
440	1.01.000678	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
441	1.01.000679	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Pertama	0	0	0	2	0	0	0	Dinas Pendidikan
442	1.01.000680	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	0	0	0	1	0	0	0	Dinas Pendidikan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
443	1.01.000681	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
444	1.01.000682	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Pertama	0	0	0	1	0	0	0	Dinas Pendidikan
445	1.01.000683	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
446	1.01.000684	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
447	1.01.000685	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Pertama	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
448	1.01.000686	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	68	85	0	0	14	14	17	Dinas Pendidikan
449	1.01.000687	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	20	22	0	0	8	8	8	Dinas Pendidikan
450	1.01.000688	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah S1 pada Sekolah Menengah Pertama	88	107	0	0	22	22	25	Dinas Pendidikan
451	1.01.000887	Profesi pelaku perbukuan	Orang	Jumlah pofesi pelaku perbukuan	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Pendidikan
452	1.01.000888	Infrastruktur TIK	Paket	Jumlah Infrastruktur TIK yang tersedia	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
453	1.01.000889	layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
454	1.02.000001	Alat uji dan kalibrasi pada RMC	Unit	Alat kalibrasi adalah sebuah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur, membandingkan, dan menyesuaikan ukuran atau parameter suatu alat atau perangkat lainnya agar sesuai dengan standar atau nilai yang telah ditentukan Jumlah alat kalibrasi dengan kondisi baik	4	4	4	4	6	6	6	Dinas Kesehatan
455	1.02.000002	Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting	Unit	Alat atau perangkat Sistem Informasi Kesehatan (Health Information System) adalah solusi teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis informasi terkait dengan layanan kesehatan. Jaringan Internet adalah jaringan global yang terdiri dari ribuan jaringan komputer yang terhubung menggunakan protokol Internet. Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting	11	11	11	11	11	20	20	Dinas Kesehatan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
456	1.02.000004	Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya	Paket	Alat kesehatan adalah instrumen atau perangkat yang digunakan dalam praktik medis, perawatan kesehatan, atau diagnosis untuk membantu mendeteksi, mencegah, mengobati, atau mengurangi gangguan kesehatan pada manusia. Obat adalah zat atau substansi kimia yang digunakan untuk mencegah, mengobati, atau meredakan penyakit, kondisi medis, atau gejala yang tidak diinginkan pada manusia atau hewan. Bahan habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan sekali atau dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat digunakan lagi setelah digunakan. Bahan medis habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan dalam prosedur medis, diagnosis, atau perawatan kesehatan dan tidak dapat digunakan kembali setelah digunakan satu kali. Jumlah Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman yang didistribusikan ke Fasilitas Kesehatan	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Kesehatan
457	1.02.000005	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes	Unit	Alat Peunjang medis, sering disebut juga sebagai Alat Kesehatan (Alkes), adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk membantu dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan kesehatan pasien. Jumlah Alat kesehatan seperti: instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh yang eksisting. Jumlah Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan seperti: alat, aparatus, mesin yang membantu fungsi pelayanan medis, antara lain seperti peralatan di instalasi rumah duka, instalasi laundry, dan instalasi gizi yang eksisting.	23	27	36	48	48	49	49	Dinas Kesehatan
458	1.02.000008	Anak Usia Pendidikan Dasar	Orang	Anak usia pendidikan dasar adalah kelompok usia anak yang berada pada tingkat pendidikan dasar, yang biasanya berkisar antara usia 6 hingga 12 tahun. Jumlah anak usia pendidikan dasar	6723	6814	16480	17520	21749	20014	19973	Dinas Kesehatan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
459	1.02.000009	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	54	55	50	66	71	71	71	Dinas Kesehatan
460	1.02.000010	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin	Sarana	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
461	1.02.000011	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya	Sarana	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
462	1.02.000012	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin	Sarana	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin	54	55	50	66	71	71	71	Dinas Kesehatan
463	1.02.000014	Balita	Orang	Definisi operasional balita mengacu pada kategori usia anak yang berada pada rentang 1 hingga 5 tahun yang masuk dalam perhitungan. Balita perlu mendapatkan pelayanan mencakup pemantauan pertumbuhan, vaksinasi, pemenuhan gizi yang adekuat, serta stimulasi perkembangan yang sesuai dengan tahapan usia untuk memastikan fondasi kesehatan dan kognitif yang baik.	5814	4443	2421	4864	7674	8665	6547	Dinas Kesehatan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
464	1.02.000015	Barang penunjang operasional RS	Unit	Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit adalah barang untuk memenuhi keperluan perkantoran, langanan daya listrik, telpon, internet dan air Jumlah barang penunjang operasional RS	250	260	270	280	285	290	290	Dinas Kesehatan
465	1.02.000016	Bayi baru lahir	Orang	Bayi baru lahir, atau yang dikenal dengan istilah neonatus, adalah bayi yang baru saja dilahirkan dan berusia antara 0 hingga 28 hari. Jumlah bayi baru lahir	1979	2029	1804	1654	2026	2231	1697	Dinas Kesehatan
466	1.02.000018	BMHP yang disediakan	Paket	Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang disediakan oleh kabupaten/kota mencakup berbagai jenis alat dan perlengkapan medis yang diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan, terutama di Puskesmas. Berikut adalah beberapa kategori dan contoh BMHP yang umumnya disediakan: Kategori BMHP Alat Kesehatan Termometer Stetoskop Alat pengukur tekanan darah Sediaan Farmasi Obat-obatan dasar seperti analgesik, antibiotik, dan vaksin Bahan Medis Habis Pakai Jarum suntik Plester Sarung tangan medis Pembalut luka Perlengkapan Kesehatan Lainnya Alat bantu pernapasan (misalnya masker oksigen) Alat untuk pemeriksaan laboratorium (misalnya alat tes gula darah)	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
467	1.02.000022	Dokter Gigi	Orang	Dokter gigi adalah seorang profesional medis yang memiliki spesialisasi dalam bidang kedokteran gigi. Jumlah dokter gigi	41	36	41	34	45	50	50	Dinas Kesehatan
468	1.02.000023	Dokter Spesialis Anak	Orang	Dokter Spesialis Anak, juga dikenal sebagai dokter spesialis pediatri, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang pediatri. Jumlah Dokter Spesialis Anak	8	9	9	9	8	8	8	Dinas Kesehatan
469	1.02.000024	Dokter Spesialis Anestesi	Orang	Dokter Spesialis Anestesi, juga dikenal sebagai dokter anestesiologis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang anestesiologi. Jumlah Dokter Spesialis Anestesi	2	4	5	5	5	5	5	Dinas Kesehatan
470	1.02.000025	Dokter Spesialis Bedah	Orang	Dokter Spesialis Bedah, juga dikenal sebagai dokter bedah atau dokter bedah spesialis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang bedah. Jumlah Dokter Spesialis Bedah	3	4	5	6	6	6	6	Dinas Kesehatan
471	1.02.000026	Dokter Spesialis Jantung	Orang	Dokter Spesialis Jantung, juga dikenal sebagai dokter kardiolog, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang kardiologi. Jumlah Dokter Spesialis Jantung	3	4	4	4	4	4	4	Dinas Kesehatan
472	1.02.000027	Dokter Spesialis kebidanan	Orang	Jumlah Dokter Spesialis kebidanan	3	11	11	10	10	10	10	Dinas Kesehatan
473	1.02.000028	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
474	1.02.000029	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	1	2	3	4	5	5	5	Dinas Kesehatan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
475	1.02.000030	Dokter Spesialis Mata	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Mata	2	4	5	6	7	7	7	Dinas Kesehatan
476	1.02.000031	Dokter Spesialis Paru	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Paru	0	4	5	5	5	5	5	Dinas Kesehatan
477	1.02.000032	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Penyakit Dalam	3	8	9	12	11	10	10	Dinas Kesehatan
478	1.02.000033	Dokter Spesialis Radiologi	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Radiologi	2	4	4	4	3	3	3	Dinas Kesehatan
479	1.02.000034	Dokter Spesialis THT	Orang	Jumlah Dokter Spesialis THT	1	3	3	4	4	4	4	Dinas Kesehatan
480	1.02.000035	Dokter Spesialis Urologi	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Urologi	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
481	1.02.000036	Dokter Umum	Orang	Jumlah Dokter Umum	125	124	125	126	126	164	164	Dinas Kesehatan
482	1.02.000038	Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
483	1.02.000039	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
484	1.02.000044	Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	1	2	1	2	2	1	Dinas Kesehatan
485	1.02.000045	Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Kesehatan
486	1.02.000047	Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
487	1.02.000049	Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
488	1.02.000053	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	0	0	4	5	5	5	Dinas Kesehatan
489	1.02.000054	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1	0	0	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
490	1.02.000055	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	&Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, juga dikenal sebagai Pelayanan Kesehatan Maternal dan Perinatal, adalah rangkaian layanan kesehatan yang ditujukan untuk mendukung kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan anak-anak kecil. Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi selama masa kehamilan, persalinan, dan masa awal kehidupan anak. Jumalah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak&	0	0	0	0	0	12	12	Dinas Kesehatan
491	1.02.000056	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	0	0	1	1	2	3	Dinas Kesehatan
492	1.02.000057	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	0	4	1	1	1	2	Dinas Kesehatan
493	1.02.000059	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2	2	1	1	3	3	3	Dinas Kesehatan
494	1.02.000060	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Kesehatan
495	1.02.000061	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Kesehatan
496	1.02.000062	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	0	0	0	3	3	3	Dinas Kesehatan
497	1.02.000064	Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
498	1.02.000065	Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Kesehatan
499	1.02.000067	Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	&Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, juga dikenal sebagai Kit Kesehatan Rumah Tangga atau Rumah Tangga Kit Kesehatan, adalah suatu set alat dan obat-obatan medis dasar yang disediakan dan dijaga di rumah tangga untuk digunakan dalam situasi darurat atau untuk memberikan perawatan kesehatan dasar bagi anggota keluarga. Perusahaan Rumah Tangga, juga dikenal sebagai Usaha Mikro Rumah Tangga (UMRT), adalah jenis usaha mikro yang beroperasi di dalam rumah atau lingkungan sekitar rumah. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga&	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
500	1.02.000068	Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20	20	20	25	25	30	30	Dinas Kesehatan
501	1.02.000070	Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	0	0	0	0	8	9	10	Dinas Kesehatan
502	1.02.000071	Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	1	1	2	2	2	5	Dinas Kesehatan
503	1.02.000073	Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	2	3	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
504	1.02.000074	Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	0	0	0	6	7	8	Dinas Kesehatan
505	1.02.000075	Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0	0	0	36	48	48	48	Dinas Kesehatan
506	1.02.000076	Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	&Operasional Pelayanan Rumah Sakit adalah rangkaian kegiatan dan proses yang dilakukan di dalam rumah sakit untuk menyediakan layanan kesehatan kepada pasien. Hal ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rumah sakit. Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit&	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Kesehatan
507	1.02.000077	Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
508	1.02.000079	Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	9	9	9	10	17	30	30	Dinas Kesehatan
509	1.02.000080	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	44	44	44	44	43	39	39	Dinas Kesehatan
510	1.02.000083	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasional	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
511	1.02.000084	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belumyang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	44	44	44	43	16	1	1	Dinas Kesehatan
512	1.02.000085	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
513	1.02.000086	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	0	0	0	1	28	43	43	Dinas Kesehatan
514	1.02.000088	Faskes lainnya	Unit	Jumlah Faskes lainnya	51	50	54	60	68	72	72	Dinas Kesehatan
515	1.02.000090	Fasyankes yang melayani melalui telemedicine	Unit	Jumlah Fasyankes yang melayani melalui telemedicine	0	0	18	18	18	18	18	Dinas Kesehatan
516	1.02.000091	Gudang umum	Unit	Jumlah Gudang umum	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Kesehatan
517	1.02.000094	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	0	0	0	0	0	1	1	Dinas Kesehatan
518	1.02.000096	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	Dokumen	Jumalah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	0	0	0	0	2	2	2	Dinas Kesehatan
519	1.02.000097	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	0	0	0	0	40	63	63	Dinas Kesehatan
520	1.02.000098	HCU	Unit	Jumlah HCU	7	7	7	7	7	7	5	Dinas Kesehatan
521	1.02.000099	Ibu bersalin	Orang	Jumlah Ibu Bersalin	2024	2121	1899	1751	2109	2304	1752	Dinas Kesehatan
522	1.02.000100	Ibu Hamil	Orang	Jumlah ibu hamil	2025	2108	1865	1922	2194	2311	1758	Dinas Kesehatan
523	1.02.000101	ICCU/ICVCU	Unit	Jumlah ICCU/ICVCU	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
524	1.02.000102	ICU	Unit	Jumlah ICU	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Kesehatan
525	1.02.000103	Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Unit	Jumlah Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0	0	0	42	0	1	1	Dinas Kesehatan
526	1.02.000104	Kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah)	Unit	Jumlah Kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah)	16	16	16	16	16	16	16	Dinas Kesehatan
527	1.02.000106	kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Jumlah kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat	0	0	0	5	8	8	8	Dinas Kesehatan
528	1.02.000107	kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	Jumlah kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	0	0	0	2	2	2	Dinas Kesehatan
529	1.02.000110	keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga	Keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga	0	0	0	1240	9056	2841	3699	Dinas Kesehatan
530	1.02.000111	Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	Jumlah Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6	6	6	6	6	6	8	Dinas Kesehatan
531	1.02.000113	NICU	Unit	Jumlah NICU	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Kesehatan
532	1.02.000114	obat dan vaksin yang disediakan	Paket	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	3	5	2	2	3	5	5	Dinas Kesehatan
533	1.02.000116	Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Orang	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	0	0	0	0	0	0	284	Dinas Kesehatan
534	1.02.000118	orang terduga menderita HIV	Orang	Jumlah orang terduga menderita HIV	2643	5456	4933	3929	4843	5552	2835	Dinas Kesehatan
535	1.02.000119	orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	Orang	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	1990	1676	1503	2661	3537	3304	2835	Dinas Kesehatan
536	1.02.000120	orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	299	297	274	329	290	291	298	Dinas Kesehatan
537	1.02.000123	Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB	Paket	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB	54	1738	1906	27	34	28	163	Dinas Kesehatan
538	1.02.000140	Pengolahan Limbah	Unit	Jumlah Pengolahan Limbah	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
539	1.02.000143	Peralatan di laundry	Unit	Jumlah alat di laundry	9	9	10	10	11	12	12	Dinas Kesehatan
540	1.02.000144	Peralatan di ruang CSSD	Unit	Jumlah Peralatan di ruang CSSD	8	9	9	10	10	11	11	Dinas Kesehatan
541	1.02.000145	Peralatan di ruang dapur/gizi	Unit	Jumlah Peralatan di ruang dapur/gizi	40	45	45	45	47	47	47	Dinas Kesehatan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
542	1.02.000146	Peralatan di ruang farmasi	Unit	Jumlah Peralatan di ruang farmasi	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Kesehatan
543	1.02.000147	Peralatan di ruang gawat darurat	Unit	Jumlah Peralatan di ruang gawat darurat	76	78	78	78	80	82	82	Dinas Kesehatan
544	1.02.000148	Peralatan di ruang intensif	Unit	Jumlah Peralatan di ruang intensif	75	75	78	78	78	91	91	Dinas Kesehatan
545	1.02.000149	Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi	Unit	Jumlah Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi	103	103	103	103	105	107	107	Dinas Kesehatan
546	1.02.000150	Peralatan di ruang Laboratorium	Unit	Jumlah Peralatan di ruang Laboratorium	60	62	62	62	62	65	65	Dinas Kesehatan
547	1.02.000151	Peralatan di ruang operasi	Unit	Jumlah Peralatan di ruang operasi	60	65	65	71	72	79	79	Dinas Kesehatan
548	1.02.000152	Peralatan di ruang radiologi	Unit	&Ruang Radiologi adalah area khusus di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya yang didedikasikan untuk pemeriksaan dan pengambilan gambar medis menggunakan teknologi radiologi. Jumlah Peralatan di ruang radiologi&	20	23	23	23	25	27	27	Dinas Kesehatan
549	1.02.000153	Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll)	Unit	Jumlah Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll)	315	320	320	320	325	358	358	Dinas Kesehatan
550	1.02.000154	Peralatan di ruang rekam medik	Unit	Jumlah Peralatan di ruang rekam medik	17	17	17	17	17	17	17	Dinas Kesehatan
551	1.02.000155	Peralatan penanggulangan kebakaran	Unit	Jumlah Peralatan penanggulangan kebakaran	72	72	72	72	72	72	72	Dinas Kesehatan
552	1.02.000156	Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	Unit	Jumlah Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	436	436	436	436	436	436	436	Dinas Kesehatan
553	1.02.000158	PICU	Unit	Jumlah PICU	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
554	1.02.000159	Prasarana di Fasyankes	Unit	jumlah Prasarana di Fasyankes	26	26	26	26	26	26	26	Dinas Kesehatan
555	1.02.000161	Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	Unit	Jumlah Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	0	0	0	0	40	44	44	Dinas Kesehatan
556	1.02.000162	Public Safety Center (PSC 119)	Unit	Jumlah Public Safety Center (PSC 119)	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Kesehatan
557	1.02.000164	Puskesmas	Unit	Jumlah Puskesmas	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Kesehatan
558	1.02.000167	Ruang Administrasi dan Manajemen	Unit	Jumlah Ruang Administrasi dan Manajemen	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Kesehatan
559	1.02.000168	Ruang ASI	Unit	Jumlah Ruang ASI	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Kesehatan
560	1.02.000169	Ruang Bank Darah Rumah Sakit	Unit	Jumlah Ruang Bank Darah Rumah Sakit	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
561	1.02.000170	Ruang cuci linen	Unit	Jumlah Ruang cuci linen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
562	1.02.000172	Ruang Farmasi	Unit	Jumlah Ruang Farmasi	11	11	11	11	11	16	16	Dinas Kesehatan
563	1.02.000173	Ruang Gawat Darurat	Unit	Jumlah Ruang Gawat Darurat	11	11	11	11	11	12	12	Dinas Kesehatan
564	1.02.000174	Ruang Gizi	Unit	Jumlah Ruang Gizi	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Kesehatan
565	1.02.000175	Ruang jaga petugas	Unit	Jumlah Ruang jaga petugas	13	13	13	13	13	13	13	Dinas Kesehatan
566	1.02.000176	Ruang Jenazah	Unit	Jumlah Ruang Jenazah	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
567	1.02.000177	Ruang kantor untuk karyawan	Unit	Jumlah Ruang kantor untuk karyawan	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Kesehatan
568	1.02.000178	Ruang Kepala Puskersmas	Unit	Jumlah Ruang Kepala Puskersmas	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Kesehatan
569	1.02.000179	Ruang kesehatan anak dan iminisasi	Unit	Jumlah Ruang kesehatan anak dan iminisasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
570	1.02.000180	Ruang kesehatan gigi dan mulut	Unit	Jumlah Ruang kesehatan gigi dan mulut	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
571	1.02.000181	Ruang kesesuhatan ibu dan KB	Unit	Jumlah Ruang kesehatan ibu dan KB	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
572	1.02.000182	Ruang KIE	Unit	Jumlah Ruang KIE	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
573	1.02.000183	Ruang Laboraturium	Unit	Jumlah Ruang Laboraturium	11	11	11	11	11	11	11	Dinas Kesehatan
574	1.02.000184	Ruang Loundry	Unit	Jumlah Ruang Loundry	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
575	1.02.000185	Ruang Operasi	Unit	Jumlah Ruang Operasi	3	3	3	5	5	5	5	Dinas Kesehatan
576	1.02.000186	Ruang Parkir	Unit	Jumlah Ruang Parkir	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Kesehatan
577	1.02.000187	Ruang Pemeliharaan Sarpras	Unit	Jumlah Ruang Pemeliharaan Sarpras	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
578	1.02.000189	Ruang pemeriksanaan umum	Unit	Jumlah Ruang pemeriksanaan umum	101	127	124	105	126	142	142	Dinas Kesehatan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
579	1.02.000190	Ruang Penaggulangan Kebakaran	Unit	Jumlah Ruang Penaggulangan Kebakaran	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
580	1.02.000191	Ruang pendaftaran dan rekam medik	Unit	Jumlah Ruang pendaftaran dan rekam medik	101	127	124	105	126	144	144	Dinas Kesehatan
581	1.02.000192	Ruang Pengelolaan Gas Medik	Unit	Jumlah Ruang Pengelolaan Gas Medik	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
582	1.02.000193	Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas	Unit	Jumlah Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
583	1.02.000194	Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry)	Unit	Jumlah Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry)	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
584	1.02.000195	Ruang persalinan	Unit	Jumlah Ruang persalinan	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
585	1.02.000196	Ruang Radiologi	Unit	Jumlah Ruang Radiologi	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
586	1.02.000197	Ruang rapat/diskusi	Unit	Jumlah Ruang rapat/diskusi	6	6	6	6	6	6	6	Dinas Kesehatan
587	1.02.000198	Ruang Rawat Inap	Unit	Jumlah Ruang Rawat Inap	9	9	9	9	9	9	9	Dinas Kesehatan
588	1.02.000199	Ruang Rawat Intentif:	Unit	Jumlah Ruang Rawat Intentif	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
589	1.02.000200	Ruang Rawat Jalan	Unit	Jumlah Ruang Rawat Jalan	19	19	19	19	19	19	19	Dinas Kesehatan
590	1.02.000201	Ruang rawat pascaa persalinan	Unit	Jumlah Ruang rawat pascaa persalinan	9	9	9	9	9	9	9	Dinas Kesehatan
591	1.02.000202	Ruang Rehabilitasi Medik	Unit	Jumlah Ruang Rehabilitasi Medik	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Kesehatan
592	1.02.000203	Ruang Rekam Medis	Unit	Jumlah Ruang Rekam Medis	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
593	1.02.000204	Ruang Sterilisasi	Unit	Jumlah Ruang Sterilisasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
594	1.02.000205	Ruang tindakan dan gawat daerurat	Unit	Jumlah Ruang tindakan dan gawat darurat	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
595	1.02.000206	Ruang tunggu	Unit	Jumlah Ruang tunggu	9	9	9	9	9	9	9	Dinas Kesehatan
596	1.02.000208	Rumah Sakit	Unit	Jumlah Rumah sakit kelas A	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
597	1.02.000209	Rumah Sakit kelas B	Unit	Jumlah Rumah Sakit kelas B	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
598	1.02.000210	Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
599	1.02.000211	Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
600	1.02.000212	Rumah Sakit Kelas B yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
601	1.02.000213	Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki/habis masa izin operasional	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
602	1.02.000214	Rumah Sakit kelas C	Unit	Jumlah Rumah Sakit kelas C	5	4	5	5	5	5	5	Dinas Kesehatan
603	1.02.000215	Rumah Sakit Kelas C dan D	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Kesehatan
604	1.02.000216	Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Kesehatan
605	1.02.000217	Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Kesehatan
606	1.02.000218	Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
607	1.02.000219	Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa izin operasional	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
608	1.02.000220	Rumah Sakit kelas D	Unit	Jumlah Rumah Sakit kelas D	0	0	1	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
609	1.02.000221	Sarana di Fasyankes	Unit	Jumlah Sarana di Fasyankes	1324	1351	1364	1383	1398	1463	1475	Dinas Kesehatan
610	1.02.000224	sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	Unit	Jumlah sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	0	0	0	0	40	44	44	Dinas Kesehatan
611	1.02.000225	Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	Paket	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	54	1738	1906	27	34	28	163	Dinas Kesehatan
612	1.02.000228	Tempat tidur rumah sakit	Unit	Jumlah Tempat tidur rumah sakit	624	643	713	695	680	658	658	Dinas Kesehatan
613	1.02.000229	Tenaga Apotek	Orang	Jumlah Tenaga Apotek	94	150	158	153	188	204	204	Dinas Kesehatan
614	1.02.000230	Tenaga gizi	Orang	Jumlah Tenaga gizi	29	29	30	38	35	35	35	Dinas Kesehatan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
615	1.02.000231	Tenaga Kebidanan	Orang	Jumlah Tenaga Kebidanan	142	156	180	171	180	180	180	Dinas Kesehatan
616	1.02.000232	Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	Jumlah Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya	142	156	180	171	180	180	180	Dinas Kesehatan
617	1.02.000233	Tenaga Keperawatan	Orang	&Tenaga Keperawatan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan para profesional perawat yang berperan dalam memberikan perawatan kesehatan langsung kepada pasien di berbagai setting, seperti rumah sakit, klinik, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan di masyarakat. Jumlah Tenaga Keperawatan&	682	683	761	802	808	844	844	Dinas Kesehatan
618	1.02.000234	Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	&Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya disebut &&Perawat Spesialis&&. Perawat Spesialis adalah perawat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang tertentu dalam praktik keperawatan. Mereka telah menyelesaikan pendidikan tambahan dan pelatihan khusus dalam bidang tertentu untuk memperoleh pengetahuan mendalam dan kemampuan khusus dalam merawat pasien dengan kondisi kesehatan tertentu. Jumlah Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya&	682	683	761	802	808	844	844	Dinas Kesehatan
619	1.02.000235	Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	&Tenaga Kesehatan Lainnya adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada berbagai jenis profesional kesehatan selain perawat dan dokter yang berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seperti: Ahli Gizi, Farmasis, Fisioterapis, Ahli terapi Okupasi, Tenaga Medis Laboratorium, Asisten Medis, Radiografer, Teknisi Gigi, Ahli Optometri, Tenaga Kesehatan masyarakat dan lainnya. Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya&	676	670	260	305	326	362	362	Dinas Kesehatan
620	1.02.000236	Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	&Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya dapat mencakup berbagai profesional kesehatan yang telah mengambil pendidikan dan pelatihan tambahan dalam bidang spesifik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Seperti: Perawat Spesialis, Farmasis Klinis, Ahli Gizi Klinis, Ahli Terapi Okupasi Spesialis, Perawat Anestesi, Perawat Pendidik Lanjutan, dan Spesialis Kesehatan Masyarakat Jumlah Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya&	237	231	260	305	326	362	362	Dinas Kesehatan
621	1.02.000237	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang	&Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah profesional kesehatan yang berfokus pada pemahaman dan penanganan isu-isu kesehatan yang terkait dengan lingkungan fisik di mana manusia tinggal dan bekerja. Tugas utama Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah memastikan kualitas lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat serta mencegah penyakit dan masalah kesehatan yang terkait dengan faktor lingkungan. Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan&	11	13	12	13	10	13	13	Dinas Kesehatan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
622	1.02.000238	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	&Tenaga Kesehatan Masyarakat (TKM) adalah profesional kesehatan yang berfokus pada upaya pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Tugas utama Tenaga Kesehatan Masyarakat adalah menerapkan strategi dan program kesehatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat&	5	12	20	31	35	55	55	Dinas Kesehatan
623	1.02.000239	Tenaga Kesehatan tradisional	Orang	&Tenaga Kesehatan Tradisional (TKT) adalah praktisi kesehatan yang mengandalkan metode dan pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi, biasanya berakar dalam budaya dan tradisi suatu masyarakat tertentu. Jumlah Tenaga Kesehatan tradisional&	439	439	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
624	1.02.000240	Tenaga Keteknisan Medis	Orang	&Tenaga Keteknisan Medis adalah profesional kesehatan yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas teknis dan prosedural dalam pelayanan kesehatan. Nakes ini membantu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam melakukan diagnosis, perawatan, dan penanganan pasien. Jumlah Tenaga Keteknisan Medis&	47	54	62	71	79	87	87	Dinas Kesehatan
625	1.02.000241	Tenaga keterapian fisik	Orang	&Tenaga Keterapian Fisik adalah profesional kesehatan yang mengkhususkan diri dalam memberikan terapi fisik untuk memulihkan atau meningkatkan fungsi fisik, mobilitas, dan kebugaran pasien yang mengalami cedera, kelainan fisik, atau kondisi medis tertentu. Jumlah Tenaga keterapian fisik&	12	15	19	18	24	29	29	Dinas Kesehatan
626	1.02.000242	Tenaga Teknik Biomedika	Orang	&Tenaga Teknik Biomedika adalah profesional kesehatan yang bertanggung jawab untuk memelihara, mengkalibrasi, menguji, dan memperbaiki peralatan medis dan alat kesehatan yang digunakan dalam berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, laboratorium medis, dan pusat perawatan kesehatan lainnya. Tugas utama mereka adalah memastikan bahwa peralatan medis berfungsi dengan baik, akurat, dan aman untuk digunakan dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan pasien. Jumlah Tenaga Teknik Biomedika&	133	108	117	134	143	143	143	Dinas Kesehatan
627	1.02.000244	Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	Usaha Kecil Obat Tradisional adalah bentuk usaha mikro dalam bidang pengobatan tradisional yang menghasilkan, mengolah, dan memasarkan obat-obatan atau produk kesehatan berbasis tradisional.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
628	1.02.000245	Usaha Kecil Obat Tradisional Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya	Sarana	&Usaha Kecil Obat Tradisional adalah bentuk usaha mikro dalam bidang pengobatan tradisional yang menghasilkan, mengolah, dan memasarkan obat-obatan atau produk kesehatan berbasis tradisional. Usaha Kecil Obat Tradisional yang belum memiliki izin atau habis masa izinnya berarti bahwa usaha tersebut belum mendapatkan izin resmi dari otoritas kesehatan atau izin yang dimiliki telah kadaluarsa dan perlu diperbaharui. &	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
629	1.02.000246	Usaha Kecil Obat Tradisional Yang Memiliki Izin	Sarana	&Usaha Kecil Obat Tradisional adalah bentuk usaha mikro dalam bidang pengobatan tradisional yang menghasilkan, mengolah, dan memasarkan obat-obatan atau produk kesehatan berbasis tradisional. Usaha Kecil Obat Tradisional yang memiliki izin berarti bahwa usaha tersebut telah mendapatkan izin resmi dari otoritas kesehatan setempat untuk memproduksi, mengolah, dan memasarkan produk obat tradisional. &	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
630	1.02.000257	Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Puskesmas Keliling	Unit	Jumlah Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Puskesmas Keliling	6	6	6	6	6	6	6	Dinas Kesehatan
631	1.02.000258	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	Sarana	Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan atau entitas yang berperan sebagai distributor utama dalam rantai distribusi obat dan produk farmasi. Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
632	1.02.000259	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya	Sarana	Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
633	1.02.000260	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin	Sarana	Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
634	1.02.000261	Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine	Layanan	Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine adalah bentuk layanan kesehatan yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan informasi, seperti telepon, video conference, atau aplikasi komunikasi online, untuk memberikan konsultasi, diagnosis, dan perawatan jarak jauh kepada pasien. Dalam model telemedicine, pasien dan tenaga kesehatan tidak harus bertemu fisik secara langsung, namun mereka dapat berkomunikasi dan berinteraksi melalui teknologi komunikasi yang telah ada. Jumlah Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
635	1.02.000263	Penderita Diabetes Melitus	Orang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus	3747	1787	2979	37170	4057	4079	3352	Dinas Kesehatan
636	1.02.000264	Penderita Hipertensi	Orang	Jumlah Penderita Hipertensi	39422	4213	8132	4427	48321	49680	7814	Dinas Kesehatan
637	1.02.000265	penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	Dokumen laporan penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
638	1.02.000267	Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB	Orang	Penduduk terdampak dan berisiko pada kondisi KLB (Kejadian Luar Biasa) adalah mereka yang terkena dampak langsung atau memiliki risiko tinggi terkena penyakit atau kondisi kesehatan yang menjadi KLB. KLB adalah situasi di mana suatu penyakit menyebar dengan cepat dan meluas di wilayah tertentu atau populasi tertentu melebihi angka yang diharapkan. Jumlah Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB	54	1738	1606	27	34	28	28	Dinas Kesehatan
639	1.02.000268	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana	Orang	Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya. Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana	54	1738	1906	27	34	28	28	Dinas Kesehatan
640	1.02.000269	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya. Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	54	1738	1906	27	34	28	28	Dinas Kesehatan
641	1.02.000270	Penduduk Usia Lanjut	Orang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut	11628	14492	18673	20544	22210	21683	18203	Dinas Kesehatan
642	1.02.000271	Penduduk Usia Produktif	Orang	Jumlah Penduduk Usia Produktif	80936	24632	34102	93758	95973	100350	76736	Dinas Kesehatan
643	1.02.000272	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Orang	Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki izin Praktik	1275	1311	1352	1430	1507	1233	1085	Dinas Kesehatan
644	1.02.000273	Pengolahan Limbah	Unit	Jumlah Pengolahan Limbah	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
645	1.02.000276	Labkesda	Unit	Labkesda adalah unit laboratorium di tingkat daerah atau regional yang bertanggung jawab untuk melakukan berbagai jenis uji laboratorium terkait dengan kesehatan masyarakat. Tugas utama Labkesda melibatkan pengujian sampel kesehatan, diagnosis penyakit, dan pemantauan kesehatan lingkungan di wilayah tertentu. Fungsi Labkesda melibatkan pemeriksaan berbagai parameter, seperti tes darah, urin, bakteriologi, parasitologi, dan lainnya.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
646	1.02.000278	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
647	1.02.000280	Kasus Penyakit IMS	Kasus	Jumlah Kasus Penyakit IMS	19	25	34	36	59	227	150	Dinas Kesehatan
648	1.02.000281	Kasus Penyakit Campak	Kasus	Jumlah Kasus Penyakit Campak	13	8	4	2	26	27	10	Dinas Kesehatan
649	1.02.000286	Kasus Penyakit Filariasis	Kasus	Jumlah Kasus Penyakit Filariasis	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
650	1.02.000287	Kasus Penyakit Kecacingan	Kasus	Jumlah Kasus Penyakit Kecacingan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
651	1.02.000291	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
652	1.02.000295	Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan	Laporan	Jumlah Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
653	1.02.000297	Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
654	1.02.000305	Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
655	1.02.000311	Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	0	0	0	1	20	24	24	Dinas Kesehatan
656	1.02.000312	Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumah sakit	0	0	0	2	6	0	1	Dinas Kesehatan
657	1.02.000313	Fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi	Unit	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi	0	0	0	0	1	2	2	Dinas Kesehatan
658	1.02.000319	penderita Tuberkulosis	Orang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis	280	363	260	374	398	430	416	Dinas Kesehatan
659	1.02.000320	penderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	Jumlah penderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	280	363	260	374	398	430	416	Dinas Kesehatan
660	1.02.000321	Penderita HIV (ODHIV)	Orang	Jumlah Penderita HIV (ODHIV)	143	118	90	106	100	91	75	Dinas Kesehatan
661	1.02.000322	Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	Jumlah Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	143	118	90	106	100	91	75	Dinas Kesehatan
662	1.02.000324	Orang terjangkit (penderita) Malaria	Orang	Jumlah Orang terjangkit (penderita) Malaria	0	8	2	8	5	2	2	Dinas Kesehatan
663	1.02.000325	Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dan pemeliharaan kesehatan reproduksi	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dan pemeliharaan kesehatan reproduksi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
664	1.02.000326	Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan upaya kesehatan anak	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan upaya kesehatan anak	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
665	1.02.000330	Tatanan kawasan tanpa rokok	Kawasan	Jumlah Tatanan kawasan tanpa rokok	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Kesehatan
666	1.02.000331	Tatatan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok	Kawasan	Jumlah tatatan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok	2	2	2	3	4	4	4	Dinas Kesehatan
667	1.03.000005	Bangunan dan Lingkungan	Bangunan dan Lingkungan	Jumlah yang mendapatkan Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
668	1.03.000010	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan dan kegiatan usaha	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
669	1.03.000018	Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara	242	242	242	242	242	242	242	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
670	1.03.000019	Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara	242	242	242	242	242	242	242	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
671	1.03.000021	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara	0	0	2	0	0	2	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
672	1.03.000026	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis	&Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.&	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
673	1.03.000031	Bentuk Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	Surat/rekomendasi/laporan hasil dari kegiatan penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
674	1.03.000032	Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain)	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan perbatasan antar wilayah kabupaten/kota di dalam/luar provinsi yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing daerah yang hadir.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
675	1.03.000033	Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain)	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dengan kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah di dalam/luar provinsi yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing daerah yang hadir.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
676	1.03.000035	Berita acara hasil forum evaluasi pemerintah daerah provinsi	Dokumen	Keputusan Gubernur yang diterbitkan dari hasil forum evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
677	1.03.000037	Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan bersama hasil pembahasan antar daerah berbatasan yang ditanda tangani oleh perwakilan yang hadir dari setiap pemerintah daerah.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
678	1.03.000038	Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas hasil kesepakatan substansi antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisasi dengan cap basah.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
679	1.03.000040	Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil dari kegiatan konsultasi publik yang di tandatangani oleh perwakilan peserta yang hadir.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
680	1.03.000043	Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang ditandatangani secara langsung atau tanda tangan elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
681	1.03.000044	Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dalam Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota yang ditandatangani secara langsung atau secara elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
682	1.03.000051	Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang di Kabupaten/Kota	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
683	1.03.000055	Dokumen dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Dokumen	Keputusan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup tentang persetujuan Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten/Kota, dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi di perangkat daerah tersebut.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
684	1.03.000067	Dokumen Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen hasil fasilitasi Raperkada RDTR Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
685	1.03.000069	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan	Dokumen	Dokumen data kondisi jaringan jalan dan jembatan yang meliputi: 1) Survei Deskripsi Ruas Jalan, Titik Referensi Lokasi, Survei Inventori Penampang Jalan dan Survei Inventori Konstruksi/Pemeliharaan jalan 2) Survei Profil Memanjang 3) Survei Kondisi Perkerasan Jalan 4) Survei kekuatan struktur Perkerasan Jalan 5) Survei Lalu Lintas 6) Survei Lereng Jalan 7) Survei Kondisi Drainase Jalan 8) Survei Lokasi Titik Rawan Kecelakaan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
686	1.03.000070	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan	Dokumen	Dokumen data kondisi jembatan untuk memastikan aset jembatan yang berada di jaringan jalan berada dalam keadaan aman terhadap pengguna jalan dan juga untuk mengamankan nilai investaasi jembatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
687	1.03.000071	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum	Dokumen	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum Provinsi adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
688	1.03.000075	Dokumen kebijakan PERDA/PERKADA selaian RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perda/pergub selain RTRW Kabupaten/Kota.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
689	1.03.000076	Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Jalan	Dokumen	Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan. Perencanaan teknis jalan minimal memenuhi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
690	1.03.000079	Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Dokumen	Jumlah unit yang diadakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
691	1.03.000080	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah yang berjangka waktu 1 tahun untuk jangka pendek dan 5 tahun untuk jangka menengah	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
692	1.03.000081	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen	Rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang dari hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang ditindaklanjuti dengan penetapan penerima melalui Peraturan Kepala Daerah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
693	1.03.000083	Dokumen Leger Jalan	Dokumen	Leger Jalan adalah dokumen yang memuat antara lain peta lokasi ruas jalan, data jalan dan jembatan, data utilitas dan reklame dan data ruang milik jalan	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
694	1.03.000084	Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapanya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)	0	0	3	0	0	3	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
695	1.03.000087	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPL	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
696	1.03.000088	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
697	1.03.000089	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPL	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
698	1.03.000107	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum yang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air minum serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah Provinsi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
699	1.03.000127	Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	Laporan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang yang terdiri dari hasil Peniliaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang), serta Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
700	1.03.000130	Dokumen Pengelolaan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kualitas air WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
701	1.03.000132	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
702	1.03.000133	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	0	0	0	0	1	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
703	1.03.000134	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
704	1.03.000135	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen pengumpulan data SPM air minum disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air minum yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air minum dan jumlah akses air minum yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
705	1.03.000136	Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	Dokumen dan laporan hasil bantuan penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten Dasar Hukum: Perdais No. 2 Tahun 2017	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
706	1.03.000137	Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Dokumen	Laporan Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
707	1.03.000139	Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	dihapus sesuai PP 21/2021	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
708	1.03.000140	Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	Surat Persetujuan Substansi yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah tentang RTRW telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki (sumber : Permen ATR/BPN 11/2021). Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten/Kota hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016). Penetapan RTRW Kabpaten/Kota adalah penetapan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali Kota (PP 21/2021).	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
709	1.03.000145	Dokumen Ranperda (Raperda, Ranperkada, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	Dokumen	Raperda RTRW Provinsi/Kab/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama), serta Raperkada RDTR Kabupaten/Kota (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama).	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
710	1.03.000150	Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
711	1.03.000154	Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Dokumen Rencana induk SPALD Regional Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun dengan paling sedikit memuat rencana umum, standar dan kriteria pelayananan, rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T, indikasi sumber pembiayaan, rencana kelambagaan dan SDM, rencana legislasi dan rencana pemberdayaan masyarakat	1	0	1	1	0	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
712	1.03.000157	Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Dokumen	RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) merupakan dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
713	1.03.000162	Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	Dokumen Rencana Teknis berisi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
714	1.03.000163	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
715	1.03.000165	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
716	1.03.000178	Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Dokumen	Laporan RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten yang memuat materi pokok RTBL sebagai hasil proses identifikasi, perencanaan dan perancangan suatu lingkungan/kawasan, termasuk di dalamnya adalah identifikasi dan apresiasi konteks lingkungan, program peran masyarakat dan pengelolaan serta pemanfaatan aset properti kawasan. (Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2020) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dalam mewujudkan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten bertujuan untuk memberikan bantuan dalam hal Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten (Perdais No. 2 Tahun 2017	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
717	1.03.000182	Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	Laporan hasil kegiatan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang berupa perda/perkada.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
718	1.03.000186	Draft SK Gubernur tentang hasil evaluasi	Dokumen	Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten/Kota hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016).	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
719	1.03.000189	Fasilitasi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang	Dokumen	Laporan hasil Fasilitasi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang di kabupaten/kota.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
720	1.03.000193	Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Forum Penataan Ruang	Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Forum Penataan Ruang kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
721	1.03.000196	Jembatan	Jembatan	bangunan penghubung guna mengatasi rintangan antarruas jalan	0	0	0	142	142	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
722	1.03.000198	Jumlah Dokumen Rencana Induk pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Dokumen	Dokumen dan laporan hasil bantuan penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten. Dasar Hukum: Perdais No. 2 Tahun 2017	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
723	1.03.000203	Kajian kebijakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	Laporan hasil kajian kebijakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah terkait penataan ruang	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
724	1.03.000214	Kasus Pelanggaran Bidang Penataan Ruang	Kasus	Laporan kasus pelanggaran bidang penataan ruang hasil Audit Tata Ruang di Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
725	1.03.000215	Kasus Penataan Ruang yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Kasus	Laporan Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang di Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
726	1.03.000216	Kasus yang diselesaikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Kasus	Laporan Kasus yang diselesaikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang di Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
727	1.03.000219	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kegiatan	Laporan Hasil Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang di Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
728	1.03.000220	Kelengkapan dokumen Raperda RTRW (Raperda, Dokumen Rencana, Album Peta, Indikasi program)	Dokumen	Dokumen Raperda RTRW Kabupaten/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
729	1.03.000226	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah yang berjangka waktu 1 tahun untuk jangka pendek dan 5 tahun untuk jangka menengah di Kabupaten/Kota.	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
730	1.03.000227	koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
731	1.03.000228	koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
732	1.03.000236	Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten/Kota yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
733	1.03.000237	Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Lembaga	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang disusun	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
734	1.03.000239	Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
735	1.03.000241	Luas Lahan yang Ditertibkan dalam Bidang Penataan Ruang	Ha	Laporan luas lahan yang ditertibkan dalam bidang penataan ruang	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
736	1.03.000243	Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta dasar; b. Peta tematik; dan c. Peta rencana	Dokumen	Dokumen Materi Teknis Raperda RTRW Kab/Kota dan RDTR Kab/Kota yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta b. Peta dan c. Peta rencana	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
737	1.03.000244	Naskah akademik rancangan peraturan daerah (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)	Dokumen	Dokumen Naskah akademik rancangan peraturan daerah RTRW Kabupaten/Kota (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy).	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
738	1.03.000246	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing	KM	Panjang perkuatan tebing yang dibangun, strukturnya dapat berupa timbunan tanah, kayu, pasangan batu, dan/atau beton	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
739	1.03.000249	Panjang Jalan	KM	Panjang Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.	263.967	263.967	1,2	263.967	5,25	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
740	1.03.000251	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	KM	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	0,638	0,638	0,638	0	91316,06	0,638	0,638	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
741	1.03.000252	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	Sarana	Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan atau entitas yang berperan sebagai distributor utama dalam rantai distribusi obat dan produk farmasi.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
742	1.03.000254	Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB	Orang	Penduduk terdampak dan berisiko pada kondisi KLB (Kejadian Luar Biasa) adalah mereka yang terkena dampak langsung atau memiliki risiko tinggi terkena penyakit atau kondisi kesehatan yang menjadi KLB. KLB adalah situasi di mana suatu penyakit menyebar dengan cepat dan meluas di wilayah tertentu atau populasi tertentu melebihi angka yang diharapkan.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
743	1.03.000255	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana	Orang	Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
744	1.03.000257	Panjang Sungai	KM	Panjang sungai yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
745	1.03.000258	Panjang Tanggul	KM	Tanggul Sungai adalah bangunan yang berada di daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai penahan aliran atau mencegah banjir Panjang tanggul yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
746	1.03.000268	Penerbitan PKKPR	Dokumen	Surat persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menyatakan kesesuaian antara rencena kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR yang diterbitkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN.	19	19	19	19	19	19	19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
747	1.03.000269	Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	Surat/rekomendasi/laporan hasil dari kegiatan penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
748	1.03.000276	Penyempurnaan Ranperda RTRW Kabaupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	Raperda RTRW Kabupaten/Kota hasil penyempurnaan oleh Pemda Kab/Kota dengan DPRD Kab/Kota yang disempurnakan berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten/Kota.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
749	1.03.000278	Penyempurnaan Ranperkada RRTR Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil fasilitasi dari provinsi	Dokumen	Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dari hasil fasilitasi dari provinsi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
750	1.03.000279	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	PPNS	Laporan jumlah Penyidik Pegawai Negeri ipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
751	1.03.000281	Persetujuan Bersama dengan DPRD (Pasca Linsek)	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan persetujuan bersama antara Bupati/Wali Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang ditandatangani cap basah, atau tanda tangan elektronik terhadap Raperda RTRW Kabupaten/Kota.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
752	1.03.000285	Peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur	Dokumen	Scan dokumen peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dari lampiran RTRW Kab/Kota dan RDTR yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
753	1.03.000286	Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur	Dokumen	Scan dokumen peta rencana RTRW Kab/Kota dan RDTR yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
754	1.03.000290	Rancangan Peraturan Daerah kabupaten.kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)	Dokumen	Dokumen Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
755	1.03.000292	Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)	Dokumen	Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
756	1.03.000293	Rapat Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Laporan Rapat Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
757	1.03.000294	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	Notulensi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
758	1.03.000296	Rapat Pelaksanaan Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten/Kota hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016).	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
759	1.03.000298	Rapat persetujuan substansi	Dokumen	Surat Persetujuan Substansi yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki (sumber : Permen ATR/BPN 11/2021).	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
760	1.03.000299	Rapat persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas persetujuan substnasi RDTR Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
761	1.03.000300	Rapat Persiapan persetujuan substansi	Dokumen	Laporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
762	1.03.000301	Rapat Persiapan persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Laporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RDTR	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
763	1.03.000303	Rekomendasi gubernur/BA pembahasan provinsi	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan penyusunan RTRW Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
764	1.03.000304	Rekomendasi peta dari BIG	Dokumen	duplikasi dengan nomor 271	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
765	1.03.000306	Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan	Dokumen	Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
766	1.03.000307	Rumah Deret	Rumah	Jumlah rumah tapak umum yang dibangun dalam satu baris (berderet) dengan jumlah dua atau lebih rumah, saling berbatasan langsung pada dindingnya, namun memiliki batas-batas, ukuran, dan luas yang jelas (kavling mandiri).	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
767	1.03.000309	Rumah Tangga	Rumah Tangga	Jumlah kelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik (rumah/unit) dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur.	1	1	1	1	1	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
768	1.03.000311	Rumah Tinggal Tunggal	Rumah	Jumlah bangunan gedung/rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
769	1.03.000316	Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	Jumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
770	1.03.000332	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	Laporan hasil kegiatan sosialiasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
771	1.03.000336	Stasiun Pompa Banjir	Unit	Stasiun pompa yang berfungsi untuk menguras atau mengendalikan kelebihan air untuk dialirkan ke sungai atau ke laut. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Jumlah stasiun pompa banjir yang dibangun	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
772	1.03.000341	Surat penetapan deliniasi RDTR oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah	Dokumen	Surat penetapan deliniasi RDTR yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
773	1.03.000342	Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dari Bupati/Walikota Kepada Gubernur	Dokumen	Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan di tandatangani oleh Bupati/Walikota Kepada Gubernur dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
774	1.03.000345	Surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota	Dokumen	Surat permohonan evaluasi yang di tanda tangani Bupati/Walikota dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
775	1.03.000347	Surat Persetujuan Substandi dari Kementerian ATR/BPN	Dokumen	Surat Persetujuan Substansi di tanda tangani Kementerian ATR/BPN dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
776	1.03.000350	Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)	Dokumen	Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang di tanda tangani Menteri (untuk revisi RTRW)	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
777	1.03.000351	Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR)	Dokumen	Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang di tanda tangani Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR)	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
778	1.03.000352	Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati/walikota	Dokumen	Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang di tandatangani oleh Bupati/Walikota dan/atau Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang di tandatangani oleh Bupati/Walikota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
779	1.03.000357	Terowongan/Tunnel	Terowongan/Tunnel	Bangunan jalan yang melintas di bawah permukaan tanah dengan persyaratan teknis sebagai berikut: a. Memiliki ruang yang memadai untuk dapat menampung semua fasilitas terowongan b. Dilengkapi trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
780	1.03.000364	Underpass	Underpass	jalan tidak sebidang lebih rendah yang melintasi bagian bawah jalan lain untuk menghindari daerah/kawasan dengan kemacetan lalu lintas atau lokasi yang dilewati jalan rel sehingga meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi, mengatasi hambatan karena konflik dipersimpangan, dll	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
781	1.03.000367	Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan	Dokumen	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
782	1.03.000373	Jumlah Tim Profesi Ahli (TPA)	Orang	&Jumlah TPA dari masing-masing unsur terdiri dari: Akademisi = 422 Profesi = 1075 Pakar =117 Jumlah TPA = 1614 TPA&	0	3	0	2	3	3	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
783	1.03.000374	Jumlah Penilik	Orang	Jumlah Penilik yang sudah ada SK sebesar 4414 Penilik dari Kabupaten/Kota yang sudah mengimplementasikan SIMBG	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
784	1.03.000375	Jumlah Tim Penilai Teknis (TPT)	Orang	Jumlah TPT yang sudah ada SK sebesar 3746 TPT dari Kabupaten/Kota yang sudah mengimplementasikan SIMBG	0	2	0	2	2	2	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
785	1.03.000378	Fasilitas Penunjang TPA di Kawasan Strategis Kab/Kota	Paket	Fasilitas penunjang TPA adalah alat berat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah di TPA	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
786	1.03.000379	Fasilitas Penunjang TPS	Paket	Fasilitas penunjang TPS adalah alat berat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah di TPS	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
787	1.03.000386	Jumlah Asesor Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Orang	Asesor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan menilai uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
788	1.03.000387	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi	Badan Usaha	Badan Usaha adalah badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan	27	144	27	144	144	144	144	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
789	1.03.000388	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Badan Usaha	Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota adalah 1. badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan yang sedang bekerja menggunakan biaya APBD Kabupaten/kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha 2. badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayah kewenangannya	144	144	144	144	144	144	144	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
790	1.03.000392	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang ditata	Kawasan	Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur bangunan Gedung dan penataan bangunan sesuai indikasi program yang telah tercantum dalam lampiran pp 50 tahun 2011	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
791	1.03.000393	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
792	1.03.000394	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang ditata	Kawasan	Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan perkotaan dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur sarana prasarana publik guna pemenuhan standar pelayanan perkotaan (spp) sesuai permendagri nomor 57 tahun 2010 pada bidang penataan bangunan dan lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
793	1.03.000395	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
794	1.03.000396	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis lainnya yang ditata	Kawasan	Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan Strategis Nasional dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur sarana prasarana publik guna pemenuhan standar pelayanan perkotaan (spp)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
795	1.03.000397	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
796	1.03.000398	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Belum tersediannya proses penyelenggaraan BGCB didalam SIMBG dan masih dalam tahap pengembangan sistem	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
797	1.03.000399	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	Bangunan Gedung Cagar Budaya	&Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCG) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap banguna gedung yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.&	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
798	1.03.000400	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Bangunan Gedung Cagar Budaya	&Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. Kajian identifikasi meliputi: a. b. identifikasi nilai penting dan arti khusus c. pendataan dan penilaian kondisi fisik dan d. studi kelayakan Pelestarian BGCB.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
799	1.03.000401	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi	Bangunan Gedung Cagar Budaya	&Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. Kajian identifikasi meliputi: a. b. identifikasi nilai penting dan arti khusus c. pendataan dan penilaian kondisi fisik dan d. studi kelayakan Pelestarian BGCB. &	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
800	1.03.000404	Jumlah Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pemerintah	242	242	242	242	242	242	242	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
801	1.03.000405	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang sudah terdaftar dengan dibuktikan Huruf Daftar Nomor (HDNo) sebagai pencatatan/inventarisasi Bangunan Gedung Negara yang dilaksanakan untuk tertib administrasi	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
802	1.03.000406	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, danf atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
803	1.03.000407	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dirawat	Bangunan Gedung	Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
804	1.03.000409	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dirawat	Bangunan Gedung	Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
805	1.03.000411	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung	Pengubahsuaian adalah upaya penyesuaian kinerja Bangunan Gedung agar memenuhi standar teksnis Bangunan Gedung.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
806	1.03.000412	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	Bangunan Gedung	Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
807	1.03.000413	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung	Pengubahsuaian adalah upaya penyesuaian kinerja Bangunan Gedung agar memenuhi standar teksnis Bangunan Gedung.	2	2	0	2	0	2	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
808	1.03.000414	Jumlah Bangunan Konstruksi	Unit	Bangunan Konstruksi merupakan produk konstruksi baik bangunan gedung maupun bangunan sipil yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kabupaten/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
809	1.03.000415	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota	Unit	Bangunan Konstruksi kabupaten/Kota merupakan produk konstruksi baik bangunan gedung maupun bangunan sipil yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kab/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
810	1.03.000417	Jumlah Bantuan Tenaga Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah bangunan negara yang sudah direnovasi di Provinsi DKI Jakarta 151 bangunan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
811	1.03.000419	Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Dokumen	Data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota sesuai Indikator Kinerja Kunci sesuai peraturan perundang-undangan	0	2	0	2	2	2	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
812	1.03.000421	Jumlah Desa	Desa	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
813	1.03.000422	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi paling sedikit mencakup nama pekerjaan konstruksi, lokasi, jenis, waktu, dampak dan penyebab kecelakaan.	0	1	0	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
814	1.03.000423	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung paling sedikit mencakup: a. Identitas b. Nama c. Pemilik dan/atau penanggung jawab d. Lokasi detil e. Jenis keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya f. Waktu kejadian Kegagalan dan g. Foto atau bukti kejadian Kegagalan Bangunan.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
815	1.03.000424	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil paling sedikit mencakup: a. Identitas b. Nama c. Pemilik dan/atau penanggung jawab d. Lokasi detil e. Jenis keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya f. Waktu kejadian Kegagalan dan g. Foto atau bukti kejadian Kegagalan Bangunan.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
816	1.03.000425	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material dan Peralatan Konstruksi	Dokumen	1. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material mencakup nama varian produk, nama subvarian produk, sertifikat TKDN, sertifikat SNI, pencatatan di SIMPK. 2. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Peralatan Konstruksi mencakup nama varian peralatan, nama subvarian peralatan, merk, jumlah unit, syarat K3, bukti kepemilikan, pencatatan di SIMPK.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
817	1.03.000426	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pelaksanaan Infrastruktur dengan Skema KPDBU	Dokumen	Skema KPDBU mencakup Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
818	1.03.000427	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penggunaan Material dan Peralatan Konstruksi	Dokumen	1. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material mencakup nama varian produk, nama subvarian produk, sertifikat TKDN, sertifikat SNI, pencatatan di SIMPK. 2. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Peralatan Konstruksi mencakup nama varian peralatan, nama subvarian peralatan, merk, jumlah unit, syarat K3, bukti kepemilikan, pencatatan di SIMPK.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
819	1.03.000428	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Dokumen	Data dan informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur meliputi jenis infrastruktur, lokasi, nilai investasi, dan tingkat risiko (tinggi, menengah atau rendah) di wilayah kewenangannya	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
820	1.03.000429	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Jasa Konstruksi/Usaha Rantai Pasok	Dokumen	1. Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota paling sedikit mencakup nama badan usaha, NIB, Kualifikasi, Klasifikasi, Sub Klasifikasi dan Nomor SBU. 2. Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Rantai Pasok Konstruksi yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota paling sedikit mencakup nama badan usaha, NIB, dan jenis usaha.	0	1	0	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
821	1.03.000430	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Profil Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Konstruksi yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota paling sedikit mencakup nama LPPK, ruang pengajar, kapasitas pengajar, jumlah tenaga pelatih, jenis pelatihan, izin yang dimiliki.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
822	1.03.000431	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi mencakup Tahun Anggaran, Nama Pekerjaan, Sumber Dana, Pengguna jasa, Penyedia jasa, Nilai kontrak, Jenis kontrak, Karakteristik kontrak, Persentase Progres fisik, Waktu Progres fisik, Persentase Progres keuangan, Waktu Progres keuangan.	0	1	0	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
823	1.03.000433	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Dokumen	Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi paling sedikit mencakup nama, NIK, jabatan kerja, klasifikasi subklasifikasi, jenjang keahlian, dan nomor sertifikat kompetensi kerja kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis.	0	1	0	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
824	1.03.000434	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi paling sedikit mencakup nama bangunan konstruksi, penanggung jawab/pengelola, lokasi, hasil pengawasan tertib pemanfaatan produk.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
825	1.03.000435	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa konsultansi konstruksi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.	0	1	0	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
826	1.03.000436	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa pekerjaan konstruksi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.	0	0	0	0	0	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
827	1.03.000437	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
828	1.03.000438	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi paling sedikit mencakup nama badan usaha, NIB, kualifikasi, klasifikasi, subklasifikasi, sertifikat badan usaha, hasil pengawasan tertib usaha.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
829	1.03.000443	Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Persampahan	Dokumen	Kajian/studi kelayakan diperlukan untuk kegiatan penyediaan prasarana dan sarana persampahan yang menggunakan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir berupa proses biologi, termal atau teknologi lain dengan kapasitas lebih besar dari 100 ton/hari yang disusun berdasarkan: a. rencana induk penyelenggaraan PSP yang telah b. kelayakan teknis, ekonomi, dan dan c. kajian lingkungan, sosial, hukum dan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 3/2013&	0	0	0	0	0	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
830	1.03.000444	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen pelaksanaan pembangunan yang dimaksud adalah dokumen gambar yang terbangun (As Build Drawing)	1	0	0	2	2	3	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
831	1.03.000446	Jumlah Dokumen PeLaporan Capaian SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Limbah yang disusun oleh Pemerintaha Daerah dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air limbah serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah kabupaten/ kota	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
832	1.03.000447	Jumlah Dokumen Pelestarian Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Pelestarian Bangunan Gedung adalah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan perawatan, pemugaran, serta Pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
833	1.03.000449	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Pemanfaatan Pembangunan Bangunan Gedung adalah dokumen operasionalisasi, pemeliharaan perawatan, dan pemeriksaan berkala bangunan gedung	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
834	1.03.000451	Jumlah Dokumen Pembinaan	Dokumen	-Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konsultasi dan fasilitasi dalam pembangunan bangunan gedung negara	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
835	1.03.000452	Jumlah Dokumen Pembongkaran Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	&1. SE 011/5979/S tentang Percepatan Penyususnan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Pelayanan PBG dan Retribusi PBG, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja 2. Surat Edaran 4 Menteri tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Kebijakan Direktur BPB 3. Untuk Permohonan PBG untuk bangunan Gedung sampai dengan ketinggian 2 (dua) lantai termasuk untuk perumahan, pemohon tidak wajib melampirkan penyelidikan dan 4. Untuk permohonan PBG tidak wajib menggunakan arsitek &	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
836	1.03.000454	Jumlah Dokumen Pengawasan	Dokumen	&Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.&	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
837	1.03.000455	Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	&Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.&	1	3	0	0	2	3	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
838	1.03.000457	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	&Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan meliputi a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi f. surat pernyataan kelaikan fungsi.&	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
839	1.03.000458	Jumlah Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
840	1.03.000459	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
841	1.03.000460	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapanya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)	1	2	0	2	2	2	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
842	1.03.000462	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi	Dokumen	Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi adalah dokumen atau laporan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor Jasa konstruksi yang dievaluasi dan dipantau agar tertib dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
843	1.03.000464	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Produk hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di kabupaten/Kota merupakan Peraturan yang disusun daerah meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di daerah.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
844	1.03.000466	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Produk hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi di kabupaten/Kota merupakan Peraturan yang disusun daerah meliputi SOP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sub sektor Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
845	1.03.000467	Jumlah Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi yang disusun	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
846	1.03.000470	Jumlah Dokumen Readiness Criteria Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Readiness Criteria dapat berupa DED, RAB, Kesiapan Lahan, dan Lembaga Pengelola	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
847	1.03.000480	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	merupakan panduan umum untuk melakukan penataan bangunan dan lingkungan di daerah. Dokumen RTBL mengacu pada Rencana Tata Ruang dan skenario pengembangan wilayah. Beberapa rencana aksi (action plan) yang tertuang dalam RTBL di antaranya revitalisasi kawasan, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), pelestarian kawasan tradisional, serta penanggulangan kebakaran.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
848	1.03.000481	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
849	1.03.000482	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB)	Dokumen	Fitur RTB pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sedang dalam tahap pengembangan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
850	1.03.000483	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Dokumen rencana teknis rinci (RTR/DED) SPALD merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
851	1.03.000484	Jumlah Dokumen rencana teknis rinci TPA, TPST, SPA, TPS-3R, TPS	Dokumen	Dokumen rencana teknis rinci Perencanaan teknik terinci merupakan perencanaan detail TPA, TPST, SPA, TPS-3R, TPS	1	1	0	0	0	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
852	1.03.000486	Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Dokumen	1. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan 2. Penyiapan dokumen SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Kabupaten/Kota melaui Dinas Perizinan Kabupaten/Kota 3. Jumlah Dokumen SLF yang Terbit Dari 2 Agustus 2021 s.d 7 Agustus 2023 berjumlah 30.291 terdiri dari	39	39	0	0	39	39	39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
853	1.03.000489	Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)	Dokumen	Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang difasilitasi penyusunannya oleh Provinsi merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten/Kota yang disusun oleh Pemda Kab/Kota yang difasilitasi oleh Provinsi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
854	1.03.000492	Jumlah Dokumen Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)	Dokumen	Fitur SBKBG pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sedang dalam tahap pengembangan bersamaan dengan penyusunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung sebagai aturan operasionalnya	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
855	1.03.000494	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Dokumen	Dokumen Training Need Assessment (TNA) Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi jabatan Operator, dan Teknisi atau Analis paling sedikit meliputi standar operasional (SOP) pelatihan, jenis pelatihan, perhitungan jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan Operator, dan Teknisi atau Analis yang perlu dilatih, jumlah instruktur, biaya yang diperlukan, sumber pendanaan, identifikasi kerja sama, dan sarana prasarana pelatihan.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
856	1.03.000495	Jumlah Informasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Dokumen	&Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. Pemerintah Daerah provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam bentuk pemberdayaan, pengawasan dan evaluasi proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah b. Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Masyarakat dan penyelenggara Bangunan Gedung dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Teknis dan proses Penyelenggaraan Bangunan dan c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Masyarakat dan penyelenggara Bangunan Gedung dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Teknis dan proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung.&	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
857	1.03.000497	Jumlah Instruktur Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Orang	Instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingan.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
858	1.03.000500	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Teritorial sekaligus pembagian wilayah administratif setelah provinsi	1	1	0	0	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
859	1.03.000501	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kabupaten/Kota	1. Bimbingan Teknis Dan Pengawasan & Evaluasi PP 16/2021 2. Bantuan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara 3. Pendampingan Penyusunan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
860	1.03.000502	Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik	Dokumen	Dokumen Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengatur pengelolaan air limbah domestik	0	1	0	0	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
861	1.03.000504	Jumlah Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Kegiatan	Belum tersediannya proses penyelenggaraan BGCB didalam SIMBG dan masih dalam tahap pengembangan sistem	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
862	1.03.000506	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Layanan	Layanan Informasi Jasa Konstruksi adalah dokumen yang berisi data dan informasi yang dihasilkan dalam pengelolaan SIPJAKI sebagaimana indikator kinerja kunci sesuai peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
863	1.03.000507	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi	Lembaga	Lembaga Jasa Konstruksi meliputi masyarakat Jasa Konstruksi seperti OPD, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Instansi terkait, Asosiasi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Jasa Konstruksi, Badan Usaha Rantai Pasok Konstruksi, Pemilik/Pengelola Bangunan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
864	1.03.000508	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA	Lembaga	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang disusun	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
865	1.03.000509	Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga	Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM 1. Lembaga Pengelola SPAM dengan hasil penilaian kinerja yang meningkat dari hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 2. Lembaga pengelola yang menetapkan tarif FCR dan termuat dalam hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 3. Lembaga Pengelola SPAM dalam bentuk BUMD yang sudah memiliki SK pembentukan, SK tarif, SK organisasi. Kalau bentuk UPTD, yang sudah memiliki Perda Pembentukan Dinas, Perkada Pembentukan dan Struktur Organisasi UPTD, SK Pejabat, SK Kepala Dinas tentang Tupoksi dan Penunjukkan SDM, Perda Retribusi Jasa Pelayanan Air 4. Lembaga Pengelola SPAM yang pendanaannya tidak hanya bersumber dari APBD atau BUMD itu dapat berupa Subsidi Bunga, B to B atau lainnya 5. Lembaga Pengelola SPAM yang telah melakukan pembinaan kepada pelanggan/calon pelanggan berupa anjuran untuk melakukan penyambungan SR dan pembayaran tepat waktu. 6. Lembaga pengelola SPAM yang telah membuat dokumen RPAM	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
866	1.03.000512	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM	22	22	22	22	22	22	22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
867	1.03.000513	Jumlah Lisensi Arsitek yang diperpanjang	Lisensi	Jumlah Lisensi yang diperpanjang sebagai bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung dan perizinan lain.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
868	1.03.000514	Jumlah Lisensi Arsitek yang diterbitkan	Lisensi	Jumlah Lisensi yang diterbitkan sebagai bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung dan perizinan lain.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
869	1.03.000515	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Orang	Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
870	1.03.000517	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Paket	Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota adalah kegiatan konstruksi yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kab/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
871	1.03.000519	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Disinsentif	Orang	Disinsentif adalah pengenaan kewajiban membayar ganti rugi perbaikan BGCB oleh pemilik/pengelola Bangunan Gedung kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau Menteri untuk BGCB dengan fungsi dan/atau pembatasan kegiatan pemanfaatan BGCB.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
872	1.03.000520	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Insentif	Orang	Insentif adalah dukungan berupa advokasi yaitu pemberian penghargaan, berbentuk sertifikat, plakat, tanda penghargaan, promosi, atau publikasi, atau berupa perbantuan yaitu dukungan penyediaan sarana dan prasarana termasuk peningkatan kualitas fisik dan/atau dukungan teknis dan/atau kepakaran antara lain berbentuk bantuan advis teknis, bantuan tenaga ahli, dan bantuan Penyedia Jasa yang kompeten di bidang Bangunan Gedung.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
873	1.03.000521	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi	Orang	Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, danf atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
874	1.03.000527	Jumlah Pengelola SIPJAKI	Orang	Pengelola SIPJAKI adalah seseorang atau tim yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan menginput data dan informasi dalam SIPJAKI.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
875	1.03.000530	Jumlah Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Orang	Penyelenggara Pelatihan adalah seseorang atau tim yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelatihan.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
876	1.03.000531	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Unit	Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi paling sedikit meliputi jaringan listrik, penyediaan server, komputer dan penyediaan jaringan internet.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
877	1.03.000533	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	Paket	Sub-sistem Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, terdiri atas: a. pipa retikulasi b. pipa induk lubang kontrol (manhole) c. bangunan penggelontor d. terminal pembersihan (clean out) e. pipa perlintasan (siphon) dan/atau f. stasiun pompa	70	70	67	68	69	70	70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
878	1.03.000535	Jumlah prasarana dan sarana pendukung IPALD Terpusat	Paket	Prasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. lubang kontrol (manhole); b. bangunan c. terminal pembersihan (clean out); d. pipa perlintasan (siphon); dan e. stasiun pompa	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
879	1.03.000538	Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	Rencana Teknis Rinci SPAM suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
880	1.03.000542	Jumlah Sambungan Rumah	Sambungan Rumah (SR)	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Jaringan Perpipaan meliputi individual atau komunal (HU dan KU)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
881	1.03.000544	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	Jumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.	2	2	0	0	1	2	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
882	1.03.000550	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	SDM Penyelenggara SPALD merupakan personil yanng melaksanakan pengelolaan SPALD, terdiri dari pemerintah daerah dan operator (UPTD, BLUD, dan BUMD)	10	10	3	3	9	10	10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
883	1.03.000552	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	SDM pelaksana penyelenggara SPAM adalah orang / personil penyelenggara SPAM	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
884	1.03.000555	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	Total unit atau rangkaian prasarana air (termasuk saluran primer, sekunder, dan tersier) yang terintegrasi secara fungsional untuk mengalirkan air permukaan di wilayah perkotaan guna mencegah genangan atau banjir.	0	0	0	0	227,07	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
885	1.03.000558	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
886	1.03.000560	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
887	1.03.000561	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	22	22	22	22	22	22	22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
888	1.03.000563	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Dokumen	Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi yang dilakukan terhadap pengelola bangunan atau produk konstruksi	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
889	1.03.000564	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Dokumen	Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Jasa pada kegiatan konstruksi	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
890	1.03.000566	Jumlah SPA	Unit	SPA (Stasiun Peralihan Antara) adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kab/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah	1	0	0	0	0	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
891	1.03.000567	Jumlah SPALD	Unit	istem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.	70	70	67	68	69	70	70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
892	1.03.000568	Jumlah SPAM	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
893	1.03.000570	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Orang	Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis yang mencakup jenjang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di wilayah kewenangannya	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
894	1.03.000571	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Orang	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis yang dilatih mencakup jenjang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di wilayah kewenangannya	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
895	1.03.000578	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)	MÃ³/Hari	Kapasitas IPALD adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3	6	6	6	6	6	6	6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
896	1.03.000579	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	MÃ³/Hari	Kapasitas IPALD Terpusat adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3	6	6	6	6	6	6	6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
897	1.03.000594	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Liter/Detik	Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
898	1.03.000596	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
899	1.03.000599	Kapasitas Unit Produksi Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
900	1.03.000603	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	KM	Panjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.	251.096	251.096	251.096	251.096	251,3	244.316	244.316	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
901	1.03.000608	Pendataan Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	Fitur Pendataan pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sedang dalam tahap pengembangan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
902	1.03.000609	Regulasi yang memuat Retrbusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Regulasi	Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	1	1	0	0	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
903	1.03.000610	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
904	1.03.000612	Kapasitas IPLT	MÃ³/Hari	Kapasitas IPLT adalah kemampuan pengolahan lumpur tinja pada IPLT tiap harinya dalam satuan MÃ³	20	20	0	0	20	20	20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
905	1.03.000614	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
906	1.03.000615	Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Lembaga	Lembaga penyelenggaraan SPALD Regional dengan tanggung jawab meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik pada Provinsi Penyelenggaraan SPALD Regional/Kewenangan Provinsi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Gubernur dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai lembaga pengatur (regulator). Pemerintah daerah harus membentuk institusi pengelola infrastruktur (operator) sesuai kebutuhan sebagai penanggung jawab operasional, baik UPTD, UPTD-BLUD, dan BUMD dimana operator harus terpisah dari regulator SPALD.	70	70	67	68	69	70	70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
907	1.03.000616	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang memenuhi standar kompetensi minimal	Orang	Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
908	1.03.000617	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Paket	Prasarana dan sarana pendukung yang berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi IPLT yang berada di satu area dengan IPLT. Prasarana dan sarana pendukung terdiri dari: 1) platform (dumping station) yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (unloading) lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul); 2) kantor yang diperuntukkan bagi tenaga 3) gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan 4) laboratorium untuk pemantauan kinerja 5) infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan 6) sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar 7) fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian 8) alat 9) peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); 10) pos 11) pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang berada di dalam lingkungan 12) pipa 13) tanaman dan/atau 14) sumber energi listrik.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
909	1.03.000623	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Dokumen	Dokumen meliputi jumlah air baku (mata air, air tanah, air permukaan) kapasitas air baku (l/det), kapasitas yang sudah digunakan (l/det), kapasitas masih dapat dimanfaatkan (l/det)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
910	1.03.000625	Kapasitas instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	mÃ³/hari	Kapasitas IPALD-T adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
911	1.03.000626	Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
912	1.03.000627	Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal	Orang	Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkan	10	10	3	3	9	10	10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
913	1.03.000629	Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal	Orang	Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkan	10	10	3	3	9	10	10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
914	1.03.000632	Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang melakukan pengawasan kualitas efluen air limbah domestik	Lembaga	Jumlah Lembaga/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang melakukan pengawasan kualitas efluen air limbah domestik melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
915	1.03.000636	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit SPALD	SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.	70	70	67	68	69	70	70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
916	1.03.000645	Jumlah Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	Pembangunan prasarana air baku berupa sumur bor pada daerah cekungan air tanah (CAT). Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Jumlah titik/lokasi sumur air tanah yang dibangun	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
917	1.03.000646	Jumlah Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Unit	Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi sumur bor untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Rehabilitasi dapat berupa pencucian sumur, penggantian pompa, perbaikan struktur dan komponen lainnya. Termasuk juga peningkatan kapasitas air baku Jumlah titik/lokasi sumur air tanah yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
918	1.03.000647	Jumlah Pembangunan Unit Air Baku	Unit	Pembangunan prasarana air baku yang secara umum terdiri dari intake/pengambilan, penampungan (kolam/reservoir), dan saluran/sarana pembawa ke unit pengolahan (jaringan transmisi). Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Jumlah unit air baku yang dibangun, dapat berupa intake bebas, bendung air baku, broncaptering, reservoir, ABSAH, beserta jaringan transmisi	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
919	1.03.000648	Jumlah Rehabilitasi Unit Air Baku	Unit	Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi unit air baku beserta jaringannya untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Rehabilitasi dapat berupa perbaikan intake, perbaikan bendung, perbaikan pompa, serta perbaikan bangunan pendukung dan jaringan transmisi Jumlah unit air baku yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
920	1.03.000649	Panjang Pembangunan Tanggul Sungai	Km	Merupakan infrastruktur pelindung yang berada di daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai penahan aliran air atau untuk mencegah banjir. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Panjang tanggul sungai yang dibangun, strukturnya dapat berupa timbunan tanah, kayu, pasangan batu, dan/atau beton	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
921	1.03.000650	Panjang Rehabilitasi Tanggul Sungai	Km	Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi tanggul sungai untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
922	1.03.000651	Panjang Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Km	Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
923	1.03.000652	Jumlah Pembangunan Pintu Air	Unit	Bendung pengendali banjir merupakan infrastruktur pengendalian banjir yang dilengkapi dengan pintu yang dapat diatur untuk mengatur elevasi muka air. Bendung pengendali banjir juga dapat berupa bendung karet yang dapat diatur untuk kembang/kempis sesuai elevasi muka air yang diinginkan. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Jumlah pintu air yang dibangun, termasuk bendung gerak dengan pintu	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
924	1.03.000654	Jumlah Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Unit	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
925	1.03.000667	Panjang Peningkatan Tanggul Sungai	Km	Panjang tanggul sungai yang ditingkatkan/direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
926	1.03.000668	Panjang Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Km	Panjang bangunan perkuatan tebing sungai yang ditingkatkan/direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
927	1.03.000669	Jumlah Peningkatan Pintu Air	Unit	Jumlah pintu air yang ditingkatkan/direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
928	1.03.000682	Jumlah Revitalisasi Penampung Air Alami	Penampung Air Alami	Jumlah tampungan air lainnya yang direvitalisasi	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
929	1.03.000683	Panjang Normalisasi/Restorasi Sungai	Km	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
930	1.03.000684	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Unit	Jumlah infrastruktur untuk melindungi mata air yang dibangun	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
931	1.03.000689	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Lainnya	Unit	Bangunan penampung air lainnya dapat meliputi long storage dan dam parit	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
932	1.03.000690	Pembangunan Jumlah Unit Air Baku	Unit	Bangunan dan konstruksi yang secara umum terdiri dari intake/pengambilan dan saluran/sarana pembawa ke unit pengolahan (jaringan transmisi). Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
933	1.03.000691	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
934	1.03.000692	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Unit	Jumlah embung air baku yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
935	1.03.000693	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul	Km	Panjang tanggul yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
936	1.03.000694	Operasi dan Pemeliharaan Tebing Sungai	Km	Panjang tebing sungai yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
937	1.03.000704	Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah bendung irigasi yang dibangun	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
938	1.03.000709	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	1.037	1.037	0	1.075	1.743	1.037	1.037	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
939	1.03.000710	Peningkatan Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah Bendung Irigasi yang ditingkatkan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
940	1.03.000715	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang Jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi atau diperbaiki	1.115	1.115	2.375	0	0	1.115	1.115	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
941	1.03.000716	Rehabilitasi Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
942	1.03.000721	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang Jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	0,84	2	3.038	2.116	3.485	0,84	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
943	1.03.000722	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah bendung irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
944	1.03.000726	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Panjang jaringan irigasi air tanah yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
945	1.03.000727	Fasilitasi Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi	Lembaga	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
946	1.03.000731	Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi drainase yang disusun. Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
947	1.03.000733	Pembangunan Panjang Drainase Perkotaan	Km	Panjang Drainase Perkotaan yang dibangun	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
948	1.03.000734	Peningkatan Panjang Drainase Perkotaan	Km	Panjang Drainase Perkotaan yang dtingkatkan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
949	1.03.000735	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
950	1.03.000736	Jumlah Kapasitas pembangunan Unit Air Baku	mÃ³/detik	Jumlah kapasitas unit air baku yang bertambah akibat pembangunan baru	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
951	1.03.000739	Jumlah Paket Pekerjaan	Paket	Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan konstruksi yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kabupaten/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
952	1.03.000740	Jumlah rehabilitasi sistem drainase perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
953	1.03.000741	Panjang Drainase Perkotaan	Km	Panjang Drainase Perkotaan yang ditingkatkan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
954	1.03.000744	Pengamanan Mata Air	Titik	Jumlah mata air yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
955	1.03.0910102	Jumlah dokumen pengawasan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya	Dokumen	&Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya meliputi a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi f. surat pernyataan kelaikan fungsi.&	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
956	1.03.910102	Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Pariwisata	Dokumen	Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Pariwisata	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
957	1.03.910103	Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Sistem Perkotaan Nasional	Dokumen	&Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional meliputi : a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi f. surat pernyataan kelaikan fungsi.&	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
958	1.03.910104	Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Strategis Lainnya	Dokumen	&Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya meliputi a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi f. surat pernyataan kelaikan fungsi.&	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
959	1.03.910105	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
960	1.03.910106	Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Unit	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
961	1.03.910107	Jumlah Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
962	1.03.910108	Jumlah Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Sistem Perkotaan Nasional meliputi pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, maupun pusat kegiatan strategis nasional.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
963	1.03.910109	Jumlah Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Kawasan Strategis Lainnya adalah kawasan selain Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
964	1.03.910116	Jumlah Bantuan Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Orang	&Bantuan Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara berfungsi membantu kuasa pengguna anggaran, kepala satuan kerja atau pejabat pembuat komitmen di bidang teknis administratif pada setiap tahap pembangunan BGN&	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
965	1.03.910117	Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum	Sambungan Rumah (SR)	Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Jaringan Perpipaan meliputi individual atau komunal Hidran Umum dan Keran Umum.	3469	3469	3310	3469	3419	3469	3496	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
966	1.03.910120	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
967	1.03.910121	Jumlah Warga Negara Penerima Layanan SPALD	Jiwa	Warga Negara penerima layanan IPALD adalah individu yang menerima layanan SPALD-T	10407	10407	9930	10407	10257	10407	10407	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
968	1.03.910123	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pengembangan SPALD	Orang	Masyarakat yang telah mengikuti pembinaan dan pemberdayaan dalam pengembangan SPALD adalah individu yang telah mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan melalui kegiatan fasilitasi, penyuluhan, advokasi, pelatihan sosialisasi dan/atau kegiatan lainnya dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
969	1.03.910126	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung SPALD-Terpusat	Paket	Prasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. lubang kontrol (manhole); b. bangunan c. terminal pembersihan (clean out); d. pipa perlintasan (siphon); dan e. stasiun pompa	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
970	1.03.910127	Jumlah Warga Negara Penerima Layanan IPALD	Jiwa	Warga Negara penerima layanan IPALD adalah individu yang menerima IPALD.	10407	10407	9930	10407	10257	10407	10407	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
971	1.03.910128	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Paket	Prasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. lubang kontrol (manhole); b. bangunan c. terminal pembersihan (clean out); d. pipa perlintasan (siphon); dan e. stasiun pompa& Jaringan perpipaan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan dan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Subsistem Pengolahan Terpusat Sambungan rumah adalah sambungan pelanggan yang mensuplai langsung ke rumah-rumah biasanya berupa sambungan pipa-pipa distribusi melalui water meter dan instalasi pipanya didalam rumah	70	70	67	70	69	70	70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
972	1.03.910129	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	panduan umum untuk melakukan penataan bangunan dan lingkungan di daerah. Dokumen RTBL mengacu pada Rencana Tata Ruang dan skenario pengembangan wilayah.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
973	1.03.910131	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen	Dokumen hasil Penilaian Standar Teknis Kawasan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
974	1.03.910132	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	Dokumen hasil Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
975	1.03.910134	Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Dokumen	Rekomendasi yang dihasilkan Oleh Forum Penataan Ruang Tingkat Provinsi	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
976	1.03.910135	Kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus	Kasus yang dihimpun terkait pelanggaran pemanfaatan ruang	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
977	1.03.910136	Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	Berita Acara	Berita Acara yang dihasilkan dalam pelaksanaan Mediasi Sengketa penataan Ruang	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
978	1.03.910137	Dokumen hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen	Dokumen hasil Penyususnan Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
979	1.03.910138	Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
980	1.03.910139	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan	Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Rencana Tata Ruang	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
981	1.03.910140	Layanan KKPR	Layanan	Layanan yang diberikan terhadap penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
982	1.03.910141	Layanan Persetujuan KKPR	Layanan	Layanan yang diberikan terhadap penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	19	19	19	19	19	19	19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
983	1.03.910146	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
984	1.03.910147	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
985	1.03.910148	Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	Dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
986	1.03.910150	SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang	Sumber daya manusia pada jasa konstruksi yang mendapatkan bimbingan teknis, sertifikasi, dan sejenisnya	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
987	1.03.910151	Data SHP Peta Dasar	Peta	Data SHP Peta Dasar yang telah disetujui oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
988	1.03.910152	Publikasi informasi penataan ruang	Publikasi	Publikasi berkenaan dengan informasi penyelenggaraan penataan ruang	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
989	1.03.910156	Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)	Dokumen	Dokumen Peraturan Walikota Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
990	1.03.910158	Jumlah Bangunan Sabo	Unit	Bangunan Sabo merupakan bangunan pelindung dari lahar gunung berapi	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
991	1.03.910160	Jumlah Dokumen Outline Plan	Dokumen	dokumen perencanaan awal yang menetapkan tata letak, konsep dasar, dan garis besar pemanfaatan lahan suatu kawasan atau infrastruktur sebelum masuk ke tahap desain yang lebih detail (Master Plan atau Site Plan)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
992	1.03.910161	Jumlah Kawasan Genangan	Kawasan Genangan	suatu wilayah atau daratan yang terendam air (akibat air hujan atau luapan sungai) karena sistem drainase yang ada tidak mampu menampung atau mengalirkan air tersebut secara memadai	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
993	1.03.910162	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Teknis terkait perencanaan,kontruksi, dan pengawasan Sistem Drainase Perkotaan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
994	1.03.910163	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem pengelolaan air permukaan (hujan) agar tidak mengganggu aktivitas dan merugikan masyarakat	0	0	0	227,07	227,07	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
995	1.03.910164	Panjang Saluran Drainase Perkotaan	Meter	Jumlah saluran dan infrastruktur pengelolaan air permukaan (hujan) agar tidak mengganggu aktivitas dan merugikan masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
996	1.03.910165	Jumlah Kawasan Rawa	Kawasan Rawa	Ekosistem lahan basah yang tanahnya lunak/berongga, sering tergenang air, dan mencakup area pasang surut serta lebak	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
997	1.03.910167	Jumlah Warga Negara Penerima Layanan	Jiwa	Warga Negara adalah sekelompok orang yang memiliki kedudukan secara resmi menjadi anggota penuh dari suatu negara.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
998	1.03.910168	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Unit	Sarana pendukung sistem drainase adalah Bangunan Pelengkap seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
999	1.03.910169	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Drainase Lingkungan	Dokumen	Dokumen rencana teknis rinci Perencanaan teknik terinci drainase lingkungan merupakan rencana rinci pembangunan sistem drainase	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1000	1.03.910170	Panjang Saluran Drainase Lingkungan	Meter	Saluran untuk mengalirkan limpasan air hujan yang dapat menimbulkan genangan	0	0	0	227,07	227,07	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1001	1.03.910171	Jumlah Rumah Sehat	Rumah	Jumlah rumah dengan kecukupan luas bangunan 7,2 m2/orang, ventilasi/pencahayaan alami, material aman, serta ketersediaan air bersih dan sanitasi	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1002	1.03.910172	Jumlah Rumah Layak Huni	Rumah	Jumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun untuk meningkatkan Kualitas Kumuh kewenangan provinsi dan kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1003	1.03.910174	Jumlah Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Perizinan Pengusahaan dan penggunaan Sumber Daya Air, permasalahan dan penyelesaian Kasus dalam kegiatan Rekomtek Perizinan, Evaluasi Rekomtek, Implementasi pada Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1004	1.03.910177	SPBU Mikro 3 Kilo Liter	Unit	Jumlah gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mikro 3 Kilo Liter (contoh: Pertashop)	3	3	3	3	5	3	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1005	1.03.910178	SPBU Mikro 3 Kilo Liter Berizin Lengkap	Unit	Jumlah gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mikro 3 Kilo Liter sesuai kewenangan daerah (contoh: Pertashop sudah berizin lengkap dokumen PBG dan SLF) PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) adalah Perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan. SLF (Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.	3	3	3	3	0	3	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1006	1.03.910179	SPBU Mikro 3 Kilo Liter Belum Berizin Lengkap	Unit	Jumlah gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mikro 3 Kilo Liter yang belum memiliki kelengkapan perizinan sesuai kewenangan daerah (contoh: Pertashop belum terdapat dokumen perizinan PBG dan atau SLF). PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) adalah Perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan. SLF (Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.	0	0	0	0	5	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1007	1.03.910180	Jumlah Unit Air Baku	Unit	Jumlah unit air baku yang dioperasi dan dipelihara	6751	6751	6751	6751	6641	6751	6751	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1008	1.03.910181	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara	48334	48334	48334	48334	44405	48334	48334	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1009	1.03.910184	Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis operasional TPA/TPST	Dokumen	Dokumen NSPK dan SOP teknis operasional TPA/TPST adalah dokumen yang berisikan aturan/ketentuan yang menjadi pedoman pengelola TPA/TPST dalam mengoperasikan TPA/TPST	1	1	0	1	0	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1010	1.03.910185	Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis penataan TPA/TPST	Dokumen	Dokumen NSPK dan SOP teknis penataan TPA/TPST adalah dokumen yang berisikan aturan/ketentuan yang harus dilakukan oleh pengelola TPA/TPST dalam melaksanakan penataan termasuk revitalisasi atau rehabilitasi TPA/TPST	1	1	0	1	0	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1011	1.03.910186	Jumlah Sarana Pengumpulan Persampahan	Unit	Sarana pengumpulan persampahan adalah peralatan untuk mengambil dan memindahkan sampah (termasuk sampah di badan air dan laut) dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R dan pemilahan minimal 2 jenis sampah	1	1	0	1	0	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1012	1.03.910192	Jumlah Dokumen RTBL	Dokumen	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, tata bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi, Lintas Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1013	1.03.910209	Jumlah Bangunan Gedung Hijau	Bangunan Gedung	Bangunan gedung hijau adalah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1014	1.03.910211	Jumlah bangunan gedung negara yang ditangani	Unit	Jumlah Bangunan Gedung Negara: jumlah massa bangunan yang dilakukan pembangunan dan/atau rehabilitasi melalui pendanaan APBD dalam satuan unit	3	3	5	2	2	3	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1015	1.03.910212	Luas bangunan gedung negara yang ditangani	M2	Luas Bangunan Gedung Negara: luas bangunan gedung negara yang dilakukan pembangunan dan/atau rehabilitasi melalui pendanaan APBD dalam satuan m2	1998	1998	25.452.784	398	1998	1998	1998	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1016	1.03.910213	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat	Dokumen	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST): biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah secara berkala (PP Nomor 16 Tahun 2021)	4	4	0	4	0	4	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1017	1.03.910214	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provinsi	Dokumen	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN: Surat rekomendasi pendanaan pembangunan bangunan gedung negara yang diterbitkan oleh Dinas Teknis Provinsi setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan Bangunan Gedung Negara (PP Nomor 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1018	1.03.910216	Dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/UKL/UPL)	Dokumen	Dokumen Feasibility Study: Dokumen yang memuat studi analisis kelayakan suatu proyek untuk dilaksanakan Dokumen Lingkungan: Dokumen kajian terhadap dampak penting pada lingkungan hidup AMDAL: Dokumen yang memuat kajian terhadap dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yailg direncana.kan, untuk digunakan sebagai prasjiarar. pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. UKL/UPL: Dokumen yang rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. ANDALALIN: Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas. (PP Nomor 22 Tahun 2021)	2	2	0	2	0	2	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1019	1.03.910217	Kesesuaian dengan dokumen tata ruang (RTRW/RDTR, KRK/KKPR)	Dokumen	RTRW Provinsi: Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. RDTR: Rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. KRK/KKPR: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha pertama sebelum perizinan lingkungan dan perizinan gedung bangunan. KKPR ini memiliki dua fungsi utama sebagai acuan pemanfaatan ruang dan acuan administrasi pertanahan. Sebagai acuan administrasi pertanahan, KKPR berfungsi sebagai pengganti izin lokasi. (Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021)	2	2	0	2	0	2	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1020	1.03.910223	Jumlah Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Dokumen	Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Dokumen PBG terdiri dari Permohonan PBG, Permohonan PBG yang diproses, Permohonan PBG yang disetujui, dan Permohonan PBG yang ditolak. termasuk pada Bangunan Gedung Hijau (BGH)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1021	1.03.910227	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan adalah massa bangunan dan lingkungan di sekitar massa bangunan yang ditangani	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1022	1.03.910228	Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	Luas Kawasan adalah besaran (dalam m2) massa bangunan dan lingkungan di sekitrar massa bangunan pada kawasan cagar budaya/pariwisata/sistem perkotaan nasional/rawan bencana/strategis lainnya yang ditangani	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1023	1.03.910229	Jumlah Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	Jumlah Kawasan adalah jumlah kesatuan massa bangunan dan lingkungan di sekitar massa bangunan pada kawasan cagar budaya/pariwisata/sistem perkotaan nasional/rawan bencana/strategis lainnya yang ditangani	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1024	1.03.910230	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat	Dokumen	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST): biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah secara berkala	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1025	1.03.910234	dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/UKL/UPL)	Dokumen	Dokumen Feasibility Study: Dokumen yang memuat studi analisis kelayakan suatu proyek untuk dilaksanakan Dokumen Lingkungan: Dokumen kajian terhadap dampak penting pada lingkungan hidup AMDAL: Dokumen yang memuat kajian terhadap dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yailg direncana.kan, untuk digunakan sebagai prasjiarar. pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. UKL/UPL: Dokumen yang rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. ANDALALIN: Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1026	1.03.910236	Surat Keterangan Status Cagar Budaya Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dan Surat Keterangan Kepemilikan Objek CB yang dikuasai Negara/pemerintah	Dokumen	SK Cagar Budaya adalah penetapan pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah provinsi berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1027	1.03.910237	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Dokumen	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB): Dokumen perencanaan periode 5 tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan / bidang kerja kebencanaan yang menghasilkan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1028	1.03.910238	Dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA)	Dokumen	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPARDA): Dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah memuat rumusan pokok-pokok perencanaan, kebijakan, strategi yang didalamnya mencakup, industri, destinasi, pemasaran dan kelembagaan dibidang Pariwisata	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1029	1.03.910239	Penetapan daerah rawan bencana oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah	M2	Besaran daerah rawan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemda	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1030	1.03.910240	Tim Ahli Cagar Budaya	Orang	Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1031	1.03.910245	Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Orang	Jumlah Orang : individu baik perseorangan maupun dalam instansi/lembaga/kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan oleh pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1032	1.03.910246	Jumlah instansi/ lembaga/kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Instansi	Jumlah Instansi/Lembaga/Kelompok - Instansi : badan pemerintahan umum, seperti kantor atau jawatan - Lembaga : suatu perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan untuk masyarakat - Kelompok : sekelompok individu yang memiliki tujuan yang sam	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1033	1.03.910247	Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan tiap penyelenggara	Dokumen	Laporan Pembinaan dan Pengawasan: Dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah memuat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan dalam periode satu tahun	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1034	1.03.910248	Jumlah Peraturan Bupati/Walikota tentang RTBL	Peraturan	Jumlah Peraturan Bupati/Walikota tentang RTBL adalah dokumen peraturan tentang RTBL yang diterbitkan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1035	1.03.910250	Peta Kerawanan Bencana Daerah	Dokumen	Peta Kerawanan Bencana Daerah adalah peta tematik untuk menggambarkan lokasi atau tempat yang sering mengalami atau diperkirakan akan mengalami bencana seperti banjir, kekeringan, longsor, tsunami maupun bencana alam lainnya yang disusun oleh BPBD untuk untuk menentukanan perencanaan terhadap suatu wilayah yang berpotensi terkena dampak bencana	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1036	1.03.910254	Sambungan Rumah/Sub-sistem pelayanan Air Limbah Domestik	Sambungan Rumah (SR)	sambungan rumah/sub-sistem pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan, terdiri atas: a. Pipa b. Pipa non c. Bak perangkap lemak dan minyak dari d. Pipa e. Bak dan f. Lubang inspeksi	3496	3496	3310	3369	3419	3469	3496	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1037	1.03.910267	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	Rumah tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1038	1.04.000004	Backlog Kepemilikan Rumah	Unit Rumah	Data sekunder rekapitulasi backlog kepemilikan rumah yang yang dihimpun dari data backlog pemerintah kab/kota atau data olahan dari BPS.	0	14947	15134	15426	15717	16057	17226	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1039	1.04.000006	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang berkomitmen menerima bantuan	4	12	21	1	0	1	2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1040	1.04.000007	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang menempati rumah dengan status hak milik	4	12	21	1	0	1	2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1041	1.04.000008	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1042	1.04.000009	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status sewa	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang menempati rumah dengan status sewa	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1043	1.04.000023	Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Dokumen	Dokumen data pembentukan Tim Satgas, pendamping, dan fasilitator adalah SK (Surat Keputusan)	0	0	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1044	1.04.000024	Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Peta sebaran dan titik koordinat lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	0	0	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1045	1.04.000038	Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum	Dokumen	Dokumen pembukuan pemanfaatan rumah susun umum yang memuat: 1. Inventarisasi 2. Pelaporan serah terima rumah susun umum	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1046	1.04.000045	Kebijakan Bidang PKP	Dokumen	Kebijakan berupa produk hukum perundangan di daerah bidang PKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah sesuai atau kebijakan daerah bidang PKP berbentuk keputusan atau himbauan yang dikeluarkan/ ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah atau Kepala OPD sesuai atau rancangan naskah akademis atas produk hukum perundangan bidang PKP di daerah sesuai atau dokumen rancangan teknis bidang PKP sebagai penunjang produk hukum daerah Kabupaten/Kota atau kebijakan daerah provinsi Hasil atau produk kebijakan Bidang PKP antara lain adalah Dokumen RP3KP, Dokumen RP2KPKP, Dokumen RP2KPKPK, SK Kumuh, Kajian Kemudahan Perizinan dan Non Perizinan untuk Pembangunan Perumahan, Kajian Insentif Pajak untuk Pembangunan Perumahan, ketentuan lingkungan hunian berimbang, dan dokumen lain yang mendukung pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Aktivitas di dalamnya meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi.	0	0	5	4	1	1	2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1047	1.04.000061	Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	1. Peruntukan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Tidak berada di kawasan negative list dalam RP3KP 3. Dibuktikan dengan Penetapan Status Barang Milik Daerah	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1048	1.04.000063	Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun yang memuat: 1. Data kepemilikan dan/atau penghunian serta letak Sarusun 2. Pembentukan Panitia Musyawarah 3. Hasil Sosialisasi 4. Hasil Musyawarah pembentukan PPPSRS 5. Susunan Organisasi PPPSRS	0	0	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1049	1.04.000065	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	0	0	1	12	12	4	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1050	1.04.000074	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan oleh Pokja PKP atau Forum PKP sesuai kewenangan. Diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi atau Forum PKP Provinsi bagi Pemerintah Provinsi, serta diselenggarakan oleh Pokja PKP Kabupaten/Kota atau Forum PKP Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.	0	0	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1051	1.04.000101	Laporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan. Aktivitas pelaksanaan meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi.	0	0	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1052	1.04.000106	Laporan Pembinaan P3SRS	Laporan	Laporan pembinaan P3SRS yang memuat laporan kegiatan: 1. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan 2. Kegiatan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi terhadap pengurus P3SRS	0	0	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1053	1.04.000110	Laporan proses penyediaan PSU perumahan	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses penyediaan PSU perumahan yang menjelaskan: 1. Data 2. Dokumentasi kondisi eksisting 3. Progres pelaksanaan penyediaan perumahan 4. DED dan RAB	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1054	1.04.000111	Laporan proses rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Laporan	Dokumen laporan proses Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Dokumentasi rumah eksisting 3. Besaran bantuan dan bentuk bantuan 4. RAB 5. Progres pelaksanaan rehabilitasi/perbaikan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1055	1.04.000115	Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian, dengan penjelasan daftar lokasi perumahan tersebut.	0	19	27	34	34	38	38	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1056	1.04.000116	Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Bencana dan Tingkat Risiko	Lokasi	Lokasi rawan bencana provinsi berdasarkan jenis bencana dan tingkat risiko bencana yang bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	0	0	21	21	21	21	21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1057	1.04.000124	Luas Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Ha	Luas lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	0	0	1626,02	1626,02	1626,02	1626,02	1626,1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1058	1.04.000126	Luas Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Ha	Luas lahan lokasi yang berpotensi terkena relokasi, yaitu: 1. kawasan rawan bencana berisiko tinggi, 2. kawasan negative list perumahan, dan 3. kawasan permukiman kumuh berat. Data bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1059	1.04.000133	Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	Jumlah orang yang mengikuti penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh.	0	0	150	520	110	162	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1060	1.04.000146	Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Daftar jumlah orang dan nama peserta kegiatan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota	0	0	50	100	100	100	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1061	1.04.000168	Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit	Jumlah rumah yang memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang dan dilakukan rehabilitasi sehingga memenuhi kriteria rumah layak huni.	4	12	21	1	0	1	2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1062	1.04.000183	Rumah Susun (Hunian Vertikal)	Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	Jumlah rumah susun eksisting milik pemerintah sesuai kewenangannya beserta data penghunian	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1063	1.04.000193	Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan	Unit Rumah	Jumlah unit rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan.	1539	79	907	737	1400	681	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1064	1.04.000212	UPT Rumah Susun yang dikelola	UPT	Jumlah UPT rumah susun yang dikelola	0	0	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1065	1.04.000216	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan	Orang	Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Kabuoaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan	0	3	0	0	0	1	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1066	1.04.000217	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik	Orang	Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik	0	2	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1067	1.04.000218	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	Orang	Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	0	1	0	0	0	1	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1068	1.04.000219	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status sewa	Orang	Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status sewa	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1069	1.04.000235	Jumlah Backlog Rumah di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	Unit	Jumlah backlog unit rumah di luar kawasan permukiman kumuh	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1070	1.04.000236	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	Jumlah dokumen terkait peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud dibuat dalam suatu wilayah daerah kabupaten/kota, khusus DKI Jakarta dalam suatu wilayah daerah provinsi berdasarkan tabel daftar lokasi.	0	1	1	1	1	1	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1071	1.04.000246	Jumlah Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Lokasi	Peta sebaran dan titik koordinat lokasi yang berpotensi terkena relokasi, yaitu: 1. kawasan rawan bencana berisiko tinggi, 2. kawasan negative list perumahan, dan 3. kawasan permukiman kumuh berat. Data bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1072	1.04.000251	Jumlah Orang yang Terlayani Melalui Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang	Daftar jumlah orang dan nama penerima penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan bagi masyarakat yang terdampak relokasi program kab/kota	0	2	0	0	0	8	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1073	1.04.000258	Jumlah Orang yang Terlayani Pemberian Subsidi Uang Sewa bagi Masyarakat yang Terdampak Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Daftar jumlah orang dan nama penerima pemberian subsidi uang sewa bagi masyarakat terdampak bencana kabupaten/kota	1	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1074	1.04.000259	Jumlah Orang yang Terlayani Pemberian Subsidi Uang Sewa bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang	Daftar jumlah orang dan nama penerima pemberian subsidi uang sewa bagi masyarakat terdampak relokasi program kabupaten/kota	0	1	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1075	1.04.000264	Jumlah Prasarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Jumlah prasarana yang disediakan dalam rangka menunjang fungsi hunian. Prasarana antara lain: a. jaringan jalan b. sistem penyediaan air minum c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase) d. saluran pembuangan air limbah e. sistem pengelolaan persampahan f. sistem proteksi kebakaran.	9	2	5	5	10	5	4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1076	1.04.000271	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	Jumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun untuk meningkatkan Kualitas Kumuh kewenangan daerah	0	9	10	68	16	15	6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1077	1.04.000273	Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	Jumlah unit rumah dengan rincian tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan baik yang sudah diverifikasi maupun belum.	0	4693	4693	4693	4693	4693	4693	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1078	1.04.000274	Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diverifikasi	Unit	Jumlah unit rumah dengan rincian tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan dan sudah diverifikasi.	0	4693	4693	4693	4693	4693	4693	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1079	1.04.000275	Jumlah Rumah di Lokasi Kumuh yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kekumuhan dan penanganannya	Unit	Jumlah rumah di lokasi kumuh dapat dilihat dari data hasil survey sekunder: data wilayah administrasi penanganan RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perencanaan teknis bidang perumahan kumuh dan data survey primer	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1080	1.04.000276	Jumlah Rumah di lokasi rawan bahaya (bantaran sungai, sempadan rel, dll)	Unit	Jumlah rumah yang berada di lokasi rawan bahaya yaitu sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan rel KA, di kolong jembatan, di bawah SUTET yang bersumber RP3KP.	0	0	271	271	271	271	271	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1081	1.04.000277	Jumlah rumah di lokasi rawan bencana	Unit	Jumlah rumah yang berada di lokasi rawan bencana dengan risiko tinggi.	0	0	38920	38920	38920	38920	38920	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1082	1.04.000278	Jumlah Rumah di lokasi yang tidak sesuai dengan tata guna lahan	Unit	Jumlah rumah yang tidak sesuai dengan tata guna lahan dapat dilihat dari data hasil survey sekunder: data wilayah administrasi penanganan RTRW, RDTR, dan data survey primer	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1083	1.04.000280	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	Jumlah keseluruhan unit Rumah Tidak Layak Huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh daerah dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	0	0	1577	955	759	1053	969	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1084	1.04.000281	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit	Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh daerah dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki oleh daerah	42	58	129	80	182	160	102	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1085	1.04.000282	Jumlah Rumah yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang mendapatkan Operasional dan Pemeliharaan	Unit	Jumlah rumah yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga kawasan permukiman agar tidak menjadi kumuh daerah atau tidak kembali kumuh.	0	15	79	49	52	10	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1086	1.04.000285	Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Daftar jenis dan jumlah sarana yang disediakan dalam rangka menunjang fungsi hunian. Sarana antara lain: pendidikan dan pembelajaran, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan niaga, kebudayaan dan rekreasi, ruang terbuka, taman, lapangan olah raga, pemakaman, lahan parkir, serta pelayanan umum dan pemerintahan.	0	0	1	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1087	1.04.000286	Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Daftar jenis dan jumlah sarana yang diperbaiki dalam rangka menunjang fungsi hunian. Sarana antara lain: pendidikan dan pembelajaran, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan niaga, kebudayaan dan rekreasi, ruang terbuka, taman, lapangan olah raga, pemakaman, lahan parkir, serta pelayanan umum dan pemerintahan.	0	0	0	0	0	1	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1088	1.04.000289	Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Daftar jenis dan jumlah utilitas yang menunjang fungsi hunian dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1089	1.04.000290	Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Daftar jenis dan jumlah utilitas yang diperbaiki dalam rangka menunjang fungsi hunian. Jenis utilitas antara lain: jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, dan sarana penerangan jasa umum.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1090	1.04.000293	Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Laporan	Jumlah dokumen yang menjelaskan Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari perbaikan yang dilaksanakan.	0	0	0	0	0	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1091	1.04.000305	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Baru Layak Huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kab/kota yang menjelaskan: 1. Jumlah unit rumah atau penerima bantuan yang terdampak 2. Jenis bantuan yang diberikan 3. Progres pelaksanaan pembangunan	0	1	0	0	0	1	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1092	1.04.000309	Laporan pelaksanaan proses peremajaan kawasan kumuh	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh. Peremajaan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud meliputi: a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan b. penghunian sementara untuk masyarakat c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat d. pendataan masyarakat e. penyusunan rencana dan f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.&	0	0	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1093	1.04.000314	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan peremajaan kawasan kumuh	Ha	Luas kawasan kumuh yang dilaksanakan melalui peremajaan berdasarkan strategi yang sudah disusun melalui dokumen penanganan kumuh daerah.	0	0	23,59	16,72	8,54	11,43	9,58	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1094	1.04.000318	Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	Pembangunan fisik rumah sesuai dengan ketentuan meliputi: 1. Kesesuaian lokasi pembangunan baru 2. Kesuaian rancangan rumah terhadap spesifikasi dan kriteria rumah layak huni 3. Kesesuaian bangunan fisik rumah terhadap site plan, spesifikasi dan kriteria RLH	0	2	0	0	0	1	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1095	1.04.000323	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	Jumlah keseluruhan unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0	340	226	131	116	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1096	1.04.000324	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit	Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh yang telah Diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0	114	95	21	22	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1097	1.04.000328	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian Rumah Susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	Total kuantitas fisik (luas atau unit) dari aset bersama dalam sistem rumah susun yang telah menjalani upaya rutin maupun berkala untuk menjaga fungsi, keandalan, dan nilai gunanya sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1098	1.05.000001	Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana prioritas kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih aspek manajerial maupun teknis dalam hal komunikasi, koordinasi, maupun pengerahan sumber daya untuk penanganan darurat bencana berdasarkan skenario yang disusun mendekati kondisi sebenarnya	0	0	0	100	0	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1099	1.05.000006	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Penanggulangan Kebakaran	Orang	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah	0	0	0	20	18	16	12	Satuan Polisi Pamong Praja
1100	1.05.000013	Data Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	Data kebencanaan adalah Data mengenai Bencana yang sesuai kriteria dan ditetapkan oleh walidata bencana yang disediakan secara bersama ataupun madiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana yang menjadi urusan kabupaten/kota	0	0	0	0	1	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1101	1.05.000017	Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	7	7	21	21	Satuan Polisi Pamong Praja
1102	1.05.000018	Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	7	7	21	21	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1103	1.05.000030	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	0	0	0	1	1	1	12	Satuan Polisi Pamong Praja
1104	1.05.000031	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	0	0	0	1	1	1	12	Satuan Polisi Pamong Praja
1105	1.05.000042	Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota	0	0	0	0	0	12	12	Satuan Polisi Pamong Praja
1106	1.05.000056	Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana dalam bentuk laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi,dll). aktivitas tersebut termasuk dalam pelayanan dasar SPM SUB	0	0	0	250 Orang	12	12	12 laporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1107	1.05.000058	Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana dalam bentuk laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi,dll). aktivitas tersebut termasuk dalam pelayanan dasar SPM SUB	0	0	0	250 Orang	12	12	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1108	1.05.000063	Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan legal dalam bentuk data dan peta yang memberikan analisa ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan bencana untuk mengetahui potensi masyarakat terdampak, potensi kerugian, dan potensi kerusakan lingkungan bila terjadi bencana dan digunakan untuk menyusun kebijakan strategi penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota	1	0	0	0	0	0	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1109	1.05.000065	Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi perjanjian kesepakatan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di tingkat kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	2	2	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1110	1.05.000066	Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	Pencegahan Kebakaran adalah kegiatan dalam rangka meminimalisir dampak kejadian kebakaran melalui kajian penyusunan dokumen NSPM yang dilakukan setiap tahun dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan Kebakaran	0	0	0	1	1	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1111	1.05.000070	Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan. Tersusun dalam dokumen JITUPASNA yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1112	1.05.000071	Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	Meupakan dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara BNPB/BPBD kabupaten/kota bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu melalui penyusunan dokumen R3P yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1113	1.05.000077	Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	Merupakan penyediaan dokumen regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota untuk pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota	0	0	0	2	3	3	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1114	1.05.000080	Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota merupakan dokumen yang berisi proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya prioritas Kabupaten/Kokta dengan skenario dan tujuan disepakati serta tindakan teknis dan manajerial yang telah ditetapkan, baik yang baru disusun ataupun yang dimutakhirkan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1115	1.05.000081	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan dokumen perencanaan penanggulangan bencana daerah kabupaten/kota yang sah dan legal dan menjadi acuan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana lingkup kewenangan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana, Renas PB, dan kondisi kebencanaan daerah	0	0	0	0	0	2	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1116	1.05.000082	Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana merupakan dokumen perencanaan kedaruratan bencana daerah kabupaten/kota yang sah dan legal berisi kebijakan operasional, sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menanggulangi keadaan darurat bencana tingkat kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1117	1.05.000088	Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	SKPDB merupakan dokumen yang berisikan mekanisme koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh unsur dalam organisasi Komando Darurat Bencana untuk penanganan darurat bencana	0	0	0	2	2	2	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1118	1.05.000089	Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat	Dokumen	SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki oleh Kab/Kota	0	0	0	0	0	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1119	1.05.000090	Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan	Dokumen	SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki dan telah di mutahirkan oleh Kab/Kota	0	0	0	0	0	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1120	1.05.000091	Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisikan kebijakan/regulasi/SOP Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam rangka penata kelolaan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota baik dalam hal antara lain struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran	0	0	0	1	1	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1121	1.05.000093	Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses pengumpulan, pencataran dan pengelolaan data yang berkaitan dengan tersedianya Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan/gedung/lingkungan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan	0	0	0	0	0	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1122	1.05.000094	Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses/kegiatan pemeriksaan/pengujian/inspeksi proteksi kebakaran guna memberikan penilaian laik atau tidaknya sesuai standar teknis yang berlaku dengan satuan dokumen, berdasarkan dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan	0	0	0	0	0	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1123	1.05.000099	Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0	0	0	0	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1124	1.05.000108	Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	Informasi kebencanaan adalah informasi mengenai Bencana yang tersedia secara berkala berdasrkan kriteria tertentu yang disediakan secara bersama ataupun madiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	0	0	6	6	6	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1125	1.05.000110	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	Dokumen Hasil Pelaksanaa kerjasama antar lembaga dan kemitraan merupakan dokumen dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kesepakatan dalam lingkup tugas dan fungsi Pol PP dalam Pencegahan dalam gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum	0	0	0	0	0	4	4	Satuan Polisi Pamong Praja
1126	1.05.000111	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	Kegiatan dalam Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	0	0	0	0	0	1785	1785	Satuan Polisi Pamong Praja
1127	1.05.000112	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini	0	0	0	0	0	1842	1842	Satuan Polisi Pamong Praja
1128	1.05.000113	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini	0	0	0	0	0	1842	1842	Satuan Polisi Pamong Praja
1129	1.05.000114	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui patroli	0	0	0	0	0	1842	1842	Satuan Polisi Pamong Praja
1130	1.05.000115	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pembinaan	0	0	0	0	0	1842	1842	Satuan Polisi Pamong Praja
1131	1.05.000116	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan	0	0	0	0	0	1842	1842	Satuan Polisi Pamong Praja
1132	1.05.000117	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pengawalan	0	0	0	0	0	1842	1842	Satuan Polisi Pamong Praja
1133	1.05.000118	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah MelaluiPenyuluhan/Sosialisasi	0	0	0	0	0	1842	1842	Satuan Polisi Pamong Praja
1134	1.05.000119	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana merupakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan memperkuat pada aspek penguatan kesiapsiagaan atas potensi bahaya dan kerentanan melalui peningkatan kapasitas kelompok masyarakat/komunitas yang ada disuatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota	0	0	0	0	21	21	21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1135	1.05.000120	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana	Kawasan	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana merupakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan memperkuat pada aspek pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas kelompok masyarakat/komunitas yang ada disuatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota	0	0	0	0	21	21	21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1136	1.05.000123	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana	Orang	Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota	0	0	0	12 jenis	1553	105	319	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1137	1.05.000124	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana	Orang	Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota	0	0	0	12 jenis	1553	105	319	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1138	1.05.000125	Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	Merupakan pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk memindahkan/mengevakuasi korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman	0	0	0	50	50	50	343	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1139	1.05.000126	Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	Merupakan pelaksanaan pencarian Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk upaya untuk menemukan korban bencana di lokasi bencana	0	0	0	50	50	50	343	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1140	1.05.000127	Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	Merupakan memberikan pertolongan pada Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk menolong korban bencana pada tempat kejadian bencana	0	0	0	50	50	50	343	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1141	1.05.000133	Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	Berisikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten/kota meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, asistensi, supervisi dan sinkronisasi serta evaluasi antar perangkat daerah di kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1142	1.05.000146	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	0	0	0	0	0	1	12	Satuan Polisi Pamong Praja
1143	1.05.000147	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	0	0	0	0	0	1	12	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1144	1.05.000172	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Bupati/Walikota	12	12	12	12	12	12	12	Satuan Polisi Pamong Praja
1145	1.05.000173	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	Laporan	Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah	12	12	12	12	12	12	12	Satuan Polisi Pamong Praja
1146	1.05.000178	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Laporan	1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	0	0	0	0	0	0	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1147	1.05.000181	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	0	0	0	0	0	0	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1148	1.05.000187	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	sosialisasi penegsakan perda kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah	1	1	1	1	1	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1149	1.05.000188	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	sosialisasi Penegakan perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah	1	1	1	1	1	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1150	1.05.000203	Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	Berisikan laporan hasil Koordinasi penanganan awal pelaksanaan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas yang menjadi urusan kabupaten/kota	1	1	1	1	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1151	1.05.000204	Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang Terlayani	Laporan	Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP	0	0	0	0	0	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1152	1.05.000205	Laporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang Terlayani	Laporan	Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perkada sesuai SOP	0	0	0	0	0	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1153	1.05.000213	Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	Laporan	Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Peraturan Bupati/Walikota sesuai SOP	12	12	12	12	12	12	12	Satuan Polisi Pamong Praja
1154	1.05.000214	Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP	Laporan	Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP	12	12	12	12	12	12	12	Satuan Polisi Pamong Praja
1155	1.05.000215	Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerah kabupaten/kota	0	0	0	0	950	950	950	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1156	1.05.000216	Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerah kabupaten/kota	0	0	0	0	950	950	950	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1157	1.05.000224	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya	Orang	Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas manajerialnya dalam hal koordinasi/ dukungan bagi dan/atau di wilayah kabupaten/kota untuk melakukan penanganan awal, penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar	0	0	0	0	0	27	135	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1158	1.05.000225	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis	Orang	Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas teknis operasionalnya dalam hal meningkatkan kecepatan respon time untuk dukungan penanganan awal daurat bencana di wilayah kabupaten/kota untuk melakukan penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar	0	0	0	0	0	27	75	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1159	1.05.000227	Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0	0	0	0	23	15	45	Satuan Polisi Pamong Praja
1160	1.05.000241	SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Orang	1. Dukungan anggaran untuk Diklat Dasar Satpol PP yang diselenggarakan di BPSDM 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek Satlinmas dalam rangka Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas anggota Satlinmas	0	0	0	0	0	45	45	Satuan Polisi Pamong Praja
1161	1.05.000245	Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	0	0	140	70	Satuan Polisi Pamong Praja
1162	1.05.000246	Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi Bencana	Orang	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk pelatihan mitigasi bencana dalam tangka peningkatan kemampuan dan keterampilan warga negara di wilayah kabupaten/kota untuk mengenali potensi risiko bencana yang menjadi kewenangan kabupaten.kota	0	0	0	370	25	8 Kawasan	77	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1163	1.05.000247	Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Bencana	Orang	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk pelatihan pencegahan bencana dalam tangka peningkatan kemampuan dan keterampilan warga negara di wilayah kabupaten/kota untuk meperkuat aspek pencegahan terhadap bencana yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	0	0	370	25	8 Kawasan	77	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1164	1.05.000249	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Kemampuan spesifik dari Aparatur SDM BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P), dengan target pelaksanaan 1 kali dalam satu tahun	0	0	0	0	0	0	135	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1165	1.05.000250	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	Fasilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten/Kota untuk memastikan tertanganinya pasca bencana meliputi Sektor : Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman, Ekonomi, Sosial dan Lintas Sektor	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1166	1.05.000251	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Peningkatan kapasitas meliputi kompetensi, karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan kecakapan yang dimiliki aparatur sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan penanggulangan bencana	0	0	0	0	0	4	75	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1167	1.05.000252	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sesuai dengan Permendagri 59/2021	0	0	0	0	1	1	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1168	1.05.000253	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana sesuai peraturan ini yang ditetapkan oleh peraturan kepala daerah	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1169	1.05.000254	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	Kemampuan spesifik dari Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi dalam melaksanakan penangananan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	0	0	0	0	0	0	75	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1170	1.05.000266	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan	0	0	0	0	0	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1171	1.05.000267	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan	0	0	0	0	0	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1172	1.05.000268	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan	0	0	0	0	0	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1173	1.05.000274	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Kegiatan Pembinaan/ Penyuluhan kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada	1	1	1	1	1	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1174	1.05.000276	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Kegiatan Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12	12	12	12	12	12	12	Satuan Polisi Pamong Praja
1175	1.05.000277	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	Dukungan anggaran dalam rangka penyelenggaraan persidangan atas penyelesaian perkara pidana pelnggaran Perda	0	0	1	0	0	0	12	Satuan Polisi Pamong Praja
1176	1.05.000278	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda	0	0	0	0	0	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1177	1.05.000279	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Kegiatan sosialisasi perda atau perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah	1	1	1	1	1	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1178	1.05.000280	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1179	1.05.000282	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Laporan	Pembinaan dan Pengawasan dalam ketersediaan Tim Penilai Angka Kredit di provinsi dan kabupaten/kota, pengembangan profesi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran, dan kendala dalam penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1180	1.05.000283	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1181	1.05.000284	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	Bentuk kegiatan peningkatan kompetensi jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1182	1.05.000286	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1183	1.05.000290	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	Pelaksanaan tugas Sekretariat PPNS sebagaimana bunyi pasal 8 Permendagri 3 Tahun 2019	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1184	1.05.000291	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, dengan evidence berupa SK TIM/MoU/PKS/Nota Kesepakatan	0	0	1	1	1	1	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1185	1.05.000292	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1186	1.05.000293	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0	0	0	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1187	1.05.000311	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Dokumen	Tercapainya kinerja daerah dalam penegakan perda/perkada sesuai instrumen	12	12	12	12	12	12	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1188	1.05.000312	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Dokumen	Tercapainya kinerja Satpol PP di daerah dalam penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan tibumtranmas sesuai indikator yang di tetapkan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022	12	12	12	12	12	12	1	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1189	1.05.000318	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah penyediaan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuannya adalah laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	0	0	0	12	12	12	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1190	1.05.000325	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses pengumpulan, pencataran dan pengelolaan data yang berkaitan dengan tersedianya Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan/gedung/lingkungan dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0	0	0	0	0	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1191	1.05.000333	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	7	7	21	21	Satuan Polisi Pamong Praja
1192	1.05.000335	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	0	0	0	0	0	12	12	Satuan Polisi Pamong Praja
1193	1.05.000340	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen	Dokumen SOP Ketenteraman dan keteriban Umum merupakan Dokumen pedoman atau acuan yang sistematis bagi Pol PP untuk melakukan tindakan dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang telah di buat dan/atau telah dimutakhirkan	0	0	0	0	0	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1194	1.05.000342	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	Laporan Gangguan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan laporan hasil tidakan yang dilakukan terhadap Suatu Kondisi Yang Tidak Teratur yang Disebabkan Oleh Tidak Taatnya Kepada Hukum, Norma Serta Kesepakatan umum, yang dilakukan melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.	0	0	0	0	0	1842	1842	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1195	1.05.000343	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Linmas dalam bentuk Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa merupakan laporan hasil penertiban dan unjuk rasa dan Penindakan : a. Unjuk Rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan fikiran daengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan peraturan daerah, pergub, kebijakan pemerintah dan kebijakan lainnya terkait dengan pemerintah b. Kerusuhan massa adalah suatu keadaan /situasi rusuh dan kekacauan yang dilakukan oleh seseorang amupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan , pengerusakan faslitaas umum, aset daerah, rumah ibadah dll	0	0	0	0	0	4	4	Satuan Polisi Pamong Praja
1196	1.05.000344	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda mengacu pada Perka POLRI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan PPNS	0	0	0	0	0	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1197	1.05.000346	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Kawasan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan pelaksanaan kegiatan untuk pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas bagi yang ada di suatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah provinsi. seperti: Kawasan Pariwisata Tangguh Bencana, Kawasan Industri Tangguh Bencana, Fasilitasi pembinaan desa tangguh bencana dan keluarga tangguh bencana dsb, dengan alat ukur Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan.	0	0	0	0	21	21	7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1198	1.05.000347	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	0	0	140	70	Satuan Polisi Pamong Praja
1199	1.05.000348	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Laporan hasil pelaksanaan memuat uraian keterangan pelaksanaan pengawasan, hasil pengawasan, dan evaluasi atas hasil pengawasan	12	12	12	12	12	12	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1200	1.06.000007	Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Anak terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	10	11	1	1	1	2	5	Dinas Sosial

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1201	1.06.000008	Anak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	10	11	1	1	2	2	1	Dinas Sosial
1202	1.06.000009	Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Anak telantar di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi	10	11	9	1	1	1	2	Dinas Sosial
1203	1.06.000018	Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Anak telantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	10	11	4	1	1	2	5	Dinas Sosial
1204	1.06.000020	Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	10	11	2	3	4	2	5	Dinas Sosial
1205	1.06.000021	Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	10	11	2	1	1	1	2	Dinas Sosial
1206	1.06.000022	Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Anak telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	10	11	1	1	1	2	2	Dinas Sosial
1207	1.06.000023	Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	Anak telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	10	11	3	1	8	8	5	Dinas Sosial
1208	1.06.000024	Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	10	11	1	1	2	2	1	Dinas Sosial
1209	1.06.000031	Fakir Miskin	Orang	&Fakir miskin yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya	10100	11100	11330	10650	10610	9860	9690	Dinas Sosial
1210	1.06.000034	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	2	2	5	6	3	2	10	Dinas Sosial
1211	1.06.000038	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2	2	1	1	1	1	2	Dinas Sosial

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1212	1.06.000039	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	2	2	2	2	1	1	2	Dinas Sosial
1213	1.06.000040	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan	Orang	Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	2	2	5	2	18	3	9	Dinas Sosial
1214	1.06.000041	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	2	2	1	1	1	1	5	Dinas Sosial
1215	1.06.000042	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	2	2	5	22	2	9	7	Dinas Sosial
1216	1.06.000043	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	2	2	2	17	15	9	6	Dinas Sosial
1217	1.06.000044	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	2	2	4	22	6	8	4	Dinas Sosial
1218	1.06.000047	Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	2	2	5	22	7	7	15	Dinas Sosial
1219	1.06.000055	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Keluarga	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan	3163	3251	3148	3646	3304	5664	11366	Dinas Sosial
1220	1.06.000067	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Laporan	Kegiatan koordinasi dan sosialisasi (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yaitu relawan berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial	32	32	30	25	27	27	10	Dinas Sosial
1221	1.06.000069	Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	Orang	&Korban bencana yang mendapat kebutuhan sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	2	61	1	1	1	1	1	Dinas Sosial
1222	1.06.000070	Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial	Orang	Korban bencana yang mendapat layanan dukungan psikososial melalui bimbingan dan konsultasi, konseling, pendampingan, dan/atau rujukan	2	61	50	13	20	13	17	Dinas Sosial

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1223	1.06.000071	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan	Orang	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan meliputi ibu hamil, penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia	2	61	53	50	80	60	70	Dinas Sosial
1224	1.06.000072	Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat	Orang	Korban bencana yang mendapatkan permakanan berupa bahan permakanan/makanan siap saji dalam masa tanggap darurat	2	61	1204	668	20	13	17	Dinas Sosial
1225	1.06.000074	Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	54	86	2	5	1	1	2	Dinas Sosial
1226	1.06.000075	Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga sebesar 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	54	86	113	125	125	130	135	Dinas Sosial
1227	1.06.000081	Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	54	86	2	21	5	21	22	Dinas Sosial
1228	1.06.000083	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar	Orang	Lanjut usia terlantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	54	86	20	20	3	5	10	Dinas Sosial
1229	1.06.000084	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	Lanjut usia terlantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	54	86	1	1	3	1	2	Dinas Sosial
1230	1.06.000085	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Lanjut usia telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	54	86	1	2	1	1	2	Dinas Sosial
1231	1.06.000086	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	Lanjut usia terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	54	86	6	2	7	5	5	Dinas Sosial
1232	1.06.000087	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Lanjut usia terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	54	86	2	1	1	1	5	Dinas Sosial
1233	1.06.000088	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga yang bersangkutan untuk tujuan reunifikasi	54	86	2	8	1	1	2	Dinas Sosial
1234	1.06.000089	Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga	Orang	Lanjut usia terlantar di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya	1	1	1	1	1	1	2	Dinas Sosial

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1235	1.06.000090	Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga	Lembaga Kesejahteraan Sosial yaitu organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum	9	9	9	8	9	7	10	Dinas Sosial
1236	1.06.000093	Makam Pahlawan Nasional	Makam	Makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan yang dikelola oleh Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Sosial
1237	1.06.000094	orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi	Orang	Pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial	77	24	50	120	103	101	73	Dinas Sosial
1238	1.06.000097	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	Pekerja profesional/tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	1	1	1	1	1	1	5	Dinas Sosial
1239	1.06.000098	pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial	Orang	Pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan sosial	1	1	1	1	1	1	5	Dinas Sosial
1240	1.06.000099	Pekerja Sosial Masyarakat	Orang	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersedia yaitu warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial	44	44	44	44	44	44	44	Dinas Sosial
1241	1.06.000101	Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	1	1	1	1	1	1	5	Dinas Sosial

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1242	1.06.000102	pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial	Orang	Pekerja Sosial Profesional yaitu seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan sosial	1	1	1	1	1	1	5	Dinas Sosial
1243	1.06.000110	Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	3	2	1	4	11	10	7	Dinas Sosial
1244	1.06.000111	Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pemenuhan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan megacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	3	2	5	4	1	11	4	Dinas Sosial
1245	1.06.000112	Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	3	2	10	16	4	4	10	Dinas Sosial
1246	1.06.000113	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	3	2	10	3	1	18	10	Dinas Sosial
1247	1.06.000115	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3	2	10	8	5	3	3	Dinas Sosial
1248	1.06.000116	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Fasilitasi penyandang Disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	3	2	10	9	1	56	52	Dinas Sosial
1249	1.06.000117	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	Fasiitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan kepada provinsi atau sesuai kebutuhan	3	2	10	59	82	7	11	Dinas Sosial
1250	1.06.000118	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	3	2	1	1	1	2	6	Dinas Sosial
1251	1.06.000119	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	3	2	1	4	2	10	7	Dinas Sosial

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1252	1.06.000122	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya	3	2	10	13	1	17	14	Dinas Sosial
1253	1.06.000128	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	8	10	10	12	10	4	0	Dinas Sosial
1254	1.06.000132	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	10	10	10	10	10	10	1	Dinas Sosial
1255	1.06.000133	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	5	4	4	4	2	3	1	Dinas Sosial
1256	1.06.000136	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatanberupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	2	2	2	5	10	18	0	Dinas Sosial
1257	1.06.000137	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan pemenuhan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan megacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	2	2	2	2	5	8	1	Dinas Sosial
1258	1.06.000138	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pLayanan Rujukan	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	5	5	5	5	10	3	1	Dinas Sosial
1259	1.06.000139	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang menerima kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	5	5	5	5	10	25	1	Dinas Sosial

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1260	1.06.000162	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Sosial
1261	1.06.000170	Taruna Siaga Bencana	Orang	Jumlah relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana	32	32	30	25	27	27	27	Dinas Sosial
1262	1.06.000179	Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Sosial
1263	1.06.000180	Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Orang	Tunjangan Berkelanjutan adalah jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan dan/atau tunjangan pendidikan. Pemberian Tunjangan Berkelanjutan sebagai bentuk penghargaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan kepada Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional. Penerima Tunjangan berkelanjutan terdiri atas: 1) Pejuang, yaitu berupa tunjangan veteran dan dana 2) Perintis Kemerdekaan, yaitu diberikan kepada Perintis Kemerdekaan atau Janda/Duda Perintis dan 3) Keluarga Pahlawan Nasioinal, yaitu diberikan kepada Janda/Duda dari Pahlawan Nasional.	5	5	4	4	4	5	2	Dinas Sosial
1264	1.06.000183	Aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Laporan	Layanan yang digunakan ditingkat Kabupaten/Kota adalah untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin & rentan miskin, lalu menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupten/Kota dan Desa/Kelurahan) dan non-pemerintah Pembinaan koordinasi termasuk Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten/Kota yang yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program graduasi.	1	1	1	1	184	918	423	Dinas Sosial
1265	1.06.000184	Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Orang	Melakukan fasilitasi pembinaan teknis berisi pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dasar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menjadi Urusan Pemerintah Bidang Sosial di pusat dan di daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial daerah provinsi dengan bekerjasama Balai Daerah untuk penjaminan mutu.	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Sosial

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1266	1.06.000185	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	Penyediaan perbekalan kesehatan kepada penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	1	1	1	1	1	25	42	Dinas Sosial
1267	1.06.000186	Anak Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	Penyediaan perbekalan kesehatan kepada anak terlantar di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	1	1	1	1	2	1	1	Dinas Sosial
1268	1.06.000187	Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	Penyediaan perbekalan kesehatan kepada lanjut usia terlantar di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	1	1	1	1	20	21	22	Dinas Sosial
1269	1.06.000188	Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	Penyediaan perbekalan kesehatan kepada gelandangan dan pengemis di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	1	1	1	1	1	5	28	Dinas Sosial
1270	1.06.000191	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial	Orang	Reintegrasi adalah penyiapan penerima layanan untuk dapat kembali kepada keluarga, termasuk penyiapan ekosistem di masyarakat (keluarga dan lingkungan).	17	11	20	3	5	9	20	Dinas Sosial
1271	1.06.000192	Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.	1	120	80	71	71	75	45	Dinas Sosial
1272	1.06.000193	Anak Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.	134	139	70	10	42	122	0	Dinas Sosial

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1273	1.06.000195	Gelandang dan Pengemis di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.	1	1	1	1	1	1	28	Dinas Sosial
1274	1.06.000197	Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Sosial
1275	1.06.000199	Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Orang	Fasilitasi proses pengangkatan anak meliputi Pelaporan yaitu proses penyampaian laporan dalam pelaksanaan pengangkatan anak dari pekerja sosial profesional dan orang tua angkat kepada kepala dinas sosial setempat, Kementerian Sosial, dan/atau Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan Indonesia di negara setempat. Pelaporan pelaksanaan Pengangkatan Anak dibuat dalam bentuk laporan kelayakan COTA (Calon Orang Tua Angkat), laporan perkembangan anak, dan laporan kepindahan.	2	3	3	2	1	4	1	Dinas Sosial
1276	1.06.000201	Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.	1	1	1	1	1	1	2330	Dinas Sosial
1277	1.06.000204	Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Orang	Penyelenggaran penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana (fase pra, saat, dan pasca bencana), baik bencana alam, non-alam, dan sosial, pada masyarakat di lokasi rawan OPD Urusan	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Sosial

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1278	1.06.000205	Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Orang	Mitigasi Kebencanaan pada Satuan Pendidikan melalui Program TAGANA Masuk Sekolah (TMS). Kegiatan Tagana Masuk Sekolah diberikan 7 pilihan sub kegiatan yang dapat dilaksanakan di lingkungan pendidikan secara berkesinambungan, yaitu : 1. Pengenalan Jenis Bencana dan Model Menghadapi Bencana 2. Strategi kesiapsiagaan dan mitigasi menghadapi bencana 3. Pengorganisasian Penanggulangan Bencana di Satuan Pendidikan 4. Menentukan tanda bahaya yang disepakati dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan di satuan Pendidikan 5. Menentukan dan memasang tanda petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul 6. Penyampaian informasi/laporan dan permohonan pertolongan 7. Penyelenggaraan kegiatan simulasi kebencanaan secara rutin	1	1	1	150	120	225	225	Dinas Sosial
1279	1.06.000208	Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial, yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan penanggulangan bencana secara berkala oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah	32	32	30	25	27	27	27	Dinas Sosial
1280	1.06.000212	orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional	Orang	OPD Sosial menerima surat pemberitahuan dari Komando Distrik Militer untuk pemakaman. Kemudian OPD Sosial menyiapkan sarana dan prasarana pemakaman, tenaga pemakaman, dan melaksanakan penguburan.	950	957	966	969	976	983	986	Dinas Sosial
1281	1.06.000219	Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Orang	1) Nilai kepahlawanan, keperintisan dan kepeloporan adalah suatu proses kegiatan untuk menghayati, mengamalkan, mengembangkan dan melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kepeloporan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di kalangan generasi muda demi kesinambungan perjuangan bangsa. 2) Kesetiakawanan Sosial adalah nilai dasar yang terwujud dalam bentuk pikiran, sikap, dan tindakan saling peduli dan berbagai yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia. Penguatan Kesetiakawanan Sosial adalah upaya memperkuat penanaman dan pelestarian kesetiakawanan sosial secara terarah, terpadu, terencana, dan berkelanjutan. Tujuan dari penguatan Kesetiakawanan Sosial adalah untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan melestarikan rasa saling peduli dan berbagi yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia.	1	1	1	1	1	1	1100	Dinas Sosial

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1282	2.07.000001	Angkatan Kerja (AK)	Orang	jumlah dan kualitas Penduduk Usia Kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran	79443	78445	79603	77808	87176	86046	93931	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1283	2.07.000002	Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi	Asosiasi	Pengusaha: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.	4	4	6	6	5	6	6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1284	2.07.000005	CPMI/PMI	Orang	Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia	240	55	60	210	237	278	192	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1285	2.07.000032	Lembaga Bipartit	Lembaga	LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh	5	5	5	7	8	9	11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1286	2.07.000036	Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi	Unit	Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi adalah LPK yang dikelola pihak swasta yang telah mendapat pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja	2	3	3	3	4	5	4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1287	2.07.000038	LKS Tripartit	Lembaga	LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1288	2.07.000042	LPKS yang dibina	Lembaga	Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja	32	28	28	26	27	26	22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1289	2.07.000047	Lulusan pelatihan swasta	Orang	Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK swasta	0	137	92	365	430	320	377	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1290	2.07.000048	Mediator	Orang	PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	0	0	0	1	1	1	1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1291	2.07.000049	Nama Program Pelatihan	Program	Jumlah Program PBK. Program PBK yang merupakan suatu rumusan tertulis yang memuat secara komprehensif rancangan pencapaian kompetensi sebagai pedoman pelaksanaan pelatihan yang penyelenggaraanya berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi	0	0	0	6	8	8	16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1292	2.07.000053	Pencaker yang mengikuti Bimbingan Jabatan	Orang	Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja. Penyuluhan Jabatan adalah kegiatan pemberian informasi mengenai jabatan dan pekerjaan kepada Pencari Kerja dan masyarakat. Bimbingan Jabatan adalah pelayanan kepada Pencari Kerja untuk mengetahui dan memahami gambaran mengenai potensi diri dan dunia kerja, serta memilih bidang pekerjaan dan karir yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki	0	150	150	150	150	70	70	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1293	2.07.000056	Pencari Kerja	Orang	Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja	383	141	212	289	577	655	506	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1294	2.07.000057	Pencari kerja ditempatkan	Orang	Tenaga Kerja yang Ditempatkan adalah bagian dari pencari kerja terdaftar yang di tempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam layanan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai bagian dari sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan	240	75	212	210	541	362	192	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1295	2.07.000058	Pencari kerja terdaftar	Orang	Pencari Kerja Terdaftar adalah bagian dari pencari kerja yang terdaftar dan / atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perseorangan, pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau pemberi kerja.	383	141	212	289	577	655	506	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1296	2.07.000059	Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja. Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan	30	0	0	0	50	55	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1297	2.07.000066	Penduduk Usia Kerja (PUK)	Orang	jumlah penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun atau lebih yang disebut juga tenaga kerja	79443	78445	79603	77808	87176	86046	93931	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1298	2.07.000072	Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama	Kasus	Jumlah kasus Perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Perjanjian Bersama adalah hasil kesepakatan bersama penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditandatangani oleh para pihak	1	0	3	0	4	4	7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1299	2.07.000078	Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kasus	Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serat perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan	2	0	3	0	5	3	7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1300	2.07.000084	Perusahaan Kecil	Perusahaan	Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 20/2008	325	200	210	220	147	179	270	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1301	2.07.000086	Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar	Perusahaan	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 20/2008 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 20/2008 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang 20/2008 4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.	325	200	210	220	147	179	22094	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1302	2.07.000087	Perusahaan peserta jamsostek aktif	Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan Pekerjanya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	130	135	150	158	135	138	255	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1303	2.07.000088	Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan	Perusahaan	Perusahaan yang melaporkan ketenagakerjaan dalam sistem WLKP Online	0	0	0	230	242	252	255	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1304	2.07.000095	Petugas Antar Kerja	Orang	Petugas Antarkerja adalah petugas yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan Antarkerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan Antarkerja	0	0	0	2	2	2	1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1305	2.07.000097	PMI yang di tempatkan	Orang	Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan adalah setiap warga negara Indonesia yang sedang melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia	240	55	60	210	237	278	157	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1306	2.07.000109	Tenaga Kerja Disabilitas	Orang	Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain	7	7	8	4	8	12	12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1307	2.07.000110	Tenaga kerja peserta jamsostek aktif	Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	4673	4826	5342	4574	4057	5832	11693	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1308	2.08.000001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Kegiatan	Sarana antara lain lembaga layanan UPTD PPA, rumah aman	1	1	1	1	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1309	2.08.000002	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan	Orang	Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan provinsi	31	17	21	18	30	29	51	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1310	2.08.000003	Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas khidup anak kewenangan kab/ kota yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi yang ditetapkan oleh KPPPA	2500	1500	500	500	500	750	750	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1311	2.08.000005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PHA	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1312	2.08.000006	Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	Dokumen data terpilah jenis kelamin, usia, dan disabilitas di tingkat kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1313	2.08.000008	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan	Dokumen	Meliputi : 1. penyediaan, pengembangan, penyebarluasan informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, budaya, dan 2. pembentukan/ pendampingan Pusat Informasi Sahabat Perempuan (PRISMA) sesuai pedoman teknis yg ditetapkan 3. peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kab/kota dalam penyediaan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1314	2.08.000009	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	KIE dalam bentuk fisik dan elektronik pemenuhan hak anak	2	2	3	3	2	5	5	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1315	2.08.000012	Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen kerjasama antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitass hidup anak untuk melaksanakan layanan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1316	2.08.000013	Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen data atau profil gender dan anak dalam sistem satu data kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1317	2.08.000015	DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	KIE dalam bentuk fisik dan elektronik perlindungan AMPK di tingkat kab/kota	2	2	3	3	2	5	5	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1318	2.08.000017	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di tingkat kabupaten/kota	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1319	2.08.000018	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas hidup anak di tingkat kabupaten/kota	2	2	2	4	2	6	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1320	2.08.000019	Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PUG	5	5	6	6	6	6	6	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1321	2.08.000021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat kabupaten/kota	0	0	0	0	5	4	5	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1322	2.08.000023	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu	6	6	6	6	6	4	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1323	2.08.000024	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	Pelatihan yang wajib diberikan antara lain KHA, manajeman kasus, standar pelayanan PPA, kebijakan perlindungan anak dan mediasi	2	1	1	1	3	4	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1324	2.08.000025	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	Sarana antara lain ruang ramah anak, ruang laktasi lembaga layanan AMPK UPTD PPA	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1325	2.08.000026	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)	Kegiatan	Meliputi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah, dan kebijakan operasional tentang penyelenggaraan PUG kewenangan kab/kota	1	1	1	1	6	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1326	2.08.000028	Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Kabupaten/Kota	Layanan	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak, antara lain ekonomi keluarga, pencegahan kekerasan, dan pengasuhan oleh lembaga penyedia layanan tingkat kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1327	2.08.000029	layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	Layanan AMPK meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan kabupaten/kota	36	13	15	24	32	29	51	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1328	2.08.000031	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	Layanan	Layanan perempuan korban kekerasan meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan kabupaten/kota	17	12	16	15	18	16	20	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1329	2.08.000032	lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/ kota yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi LPLPP yang ditetapkan oleh KPPPA	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1330	2.08.000034	Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	Pelaksanaan Bimtek Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak kepada Perangkat Daerah. lembaga yang memiliki Layanan Kualitas Keluarga merujuk pada Pedoman Standardisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat mencakup penguatan kelembagaan, SDM, Sarana & Prasarana, KIE & Modul, Penyelenggaraan Layanan dan Sinergitas & Koordinasi tingkat daerah kab/kota.	3	3	3	4	4	4	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1331	2.08.000036	organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota	Organisasi	Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang polkum, sosbud, dan ekonomi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1332	2.08.000038	Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha	Organisasi	Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	5	5	5	5	10	10	10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1333	2.08.000039	organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	5	5	5	5	10	10	10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1334	2.08.000041	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga	Kegiatan	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kebijakan teknis peningkatan kualitas keluarga dapat diilakukan melalui pertemuan koordinasi, bimtek dan kegiatan lainnya dengan melibatkan Forum PUSPA, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Akademisi, LPDU, Media dan Komponen Masyarakat lainnya tingkat daerah kab/kota	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1335	2.08.000042	Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1336	2.08.000043	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Kegiatan	Rekomendasi Kebijakan terkait Penguatan Jejaring Antar Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/kota dapat diperoleh dari pertemuan koordinasi, kegiatan teknis lainnya berupa saran/masukan terkait kebutuhan kolaborasi dan sinergitas layanan kualitas keluarga Kewenangan Kab/Kota.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1337	2.08.000044	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Kegiatan	Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1338	2.08.000047	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Perangkat Daerah	Advokasi dan pendampingan pelaksanaan layanan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terkait di Kab/Kota sesuai kebutuhan, seperti koordinasi, penguatan jejaring, dan pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1339	2.08.000048	Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada pemangku dan (2) penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG	29	29	29	29	30	30	30	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1340	2.08.000049	Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	Meliputi : (1) advokasi/ penguatan/ bimbingan teknis dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran kelembagaan PUG (Pokja, Focal Point, Gender Champion, Tim ARG, Tim Driver); (2) pendampingan PUG dalam perencanaan dan penganggaran daerah yg responsif gender, serta PUG dalam pengawasan di daerah	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1341	2.08.000054	perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat	Orang	Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan kabupaten/kota	26	16	22	9	15	16	20	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1342	2.08.000055	SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan kepada LPLPP tingkat kab/kota dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan jumlah perempuan pelopor &SIAP& yang memiliki kemampuan sebagai fasilitator/champion dan pelopor aksi nyata di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	1014	1014	1014	1014	1296	1014	764	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1343	2.08.000057	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan layanan penanganan perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	0	42	64	42	42	42	42	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1344	2.08.000059	SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	Pelatihan yg diberikan kepada SDM lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, fasilitator dan konselor keluarga dapat merujuk pada Pedoman bagi SDM Lembaga Layanan Kualitas Keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang mencakup substansi pada indikator kualitas keluarga atau permasalahan keluarga lainnya dalam rangka mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah kab/kota.	0	0	0	0	30	30	30	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1345	2.08.000061	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kegiatan	Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada pemangku dan (2) penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG	2	2	2	5	47	38	34	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1346	2.08.000067	Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Lembaga	Lembaga milik pemerintah atau masyarakat berbadan hukum yang bertugas menyelenggarakan upaya perlindungan bagi perempuan dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1347	2.09.000030	Konsumsi per kapita per tahun	Laporan	Capaian konsumsi energi (kkal/kap/hari), konsumsi protein (gram/kap/hari) dan konsumsi pangan utama (kg/kapita/tahun) berdasarkan wilayah. Konsumsi pangan utama mencakup konsumsi komoditas pangan utama dari sembilan kelompok pangan PPH	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1348	2.09.000076	Data daerah rentan rawan pangan	Laporan	data daerah yang memiliki karakteristik berpotensi mengalami kejadian rawan pangan. Dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, yang termasuk daerah rentan rawan pangan adalah daerah pada prioritas 1 sampai 3.	0	0	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1349	2.09.000079	Data Jumlah Penduduk	Dokumen	Data jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun berjalan yang digunakan untuk menghitung total kebutuhan pangan, dengan penghitungan konsumsi kg per kapita dikalikan jumlah penduduk. Sumber data dari BPS	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1350	2.09.000081	Data Konsumsi Pangan	Dokumen	Data jumlah pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi baik rumah tangga maupun non rumah tangga (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1351	2.09.000082	Data Perdagangan Antar Wilayah	Dokumen	Data jumlah pangan baik yang belum maupun yang sudah mengalami pengolahan yang didatangkan atau dikeluarkan ke dalam wilayah provinsi atau kabupaten/kota dengan tujuan diperdagangkan/diedarkan/disimpan (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 66 Tahun 2021.	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1352	2.09.000084	Data Stok Pangan	Dokumen	Data jumlah bahan pangan yang disimpan/dikuasai oleh pemerintah/swasta, seperti yang ada di pabrik, gudang, depo, lumbung petani/rumah tangga, dan pasar/pedagang yang dimaksudkan sebagai cadangan pangan(untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1353	2.09.000114	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Jumlah laporan kegiatan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan keluarga yang telah dilaksanakan, melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan, teras pangan, gerasi B2SA, rumah pangan B2SA, Dapur B2SA, dan kegiatan sejenis yang mendukung.	60	60	75	75	75	75	24	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1354	2.09.000115	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala	Laporan	Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi untuk memantau jumlah stok, pasokan dan kondisi harga pangan pokok strategis dengan melibatkan semua pelaku usaha produsen/penggilingan/pedagang/ asosiasi/distributor serta melakukan pemantauan harga di tingkat produsen dan harga eceran di pasar tradisional, grosir, dan retail yang dilakukan secara berkala	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1355	2.09.000126	Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Kegiatan	Jenis kegiatan yang dilakukan dalam rangka sosialisasi/promosi/kampanye/edukasi konsumsi B2SA berbasis pangan lokal	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1356	2.09.000132	Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi	Dokumen	Peta tematik yang menggambarkan situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi sesuai data dan analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) yang mencerminkan aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, dengan unit analisisnya data di tingkat kabuapten/kota. Yang dilakukan secara berkala (bulanan)	0	0	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1357	2.09.000138	Jumlah Pangan Pokok yang Terdistribusi	Laporan	data banyaknya dan sebaran pangan pokok yang terdistribusi	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1358	2.09.000139	Jumlah Pangan Lainnya yang Terdistribusi	Laporan	data banyaknya dan sebaran pangan lainnya yang terdistribusi	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1359	2.09.000144	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	Banyaknya kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan penerapan konsumsi pangan B2SA di desa/kelurahan di kabupaten/kota	2	2	2	2	4	4	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1360	2.09.000145	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan	Banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penilaian capaian konsumsi energi, konsumsi protein, dan skor PPH, serta evaluasi terhadap target RPMJD/dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penetapan target skor PPH sejalan dengan Perbadan nomor 11 tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1361	2.09.000153	Jumlah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	Program atau kegiatan sebagai tindak lanjut hasil analis situasi kewaspadaan pangan dan gizi wilayah & rekomendasi kebijakan tingkat Provinsi atau kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1362	2.09.000159	Rekomendasi Keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	merupakan berita acara hasil pengawasan post market dan/atau bentuk tindaklanjut hasil pengawasan post market yang dilakukan di wilayah masing-masing, dapat berupa surat ke pihak terkait maupun laporan hasil pertemuan tindaklanjut.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1363	2.09.000160	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar	Persentase	Presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat merupakan perbandingan antara jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan dengan jumlah total sampel yang diuji	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1364	2.09.000211	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok	Laporan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan antar instansi dan pelaku usaha dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana logistik pangan dan penguatan jaringan distribusi pangan antar pelaku usaha dan pemerintah.	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1365	2.09.000212	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya	Laporan	Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi kegiatan distribusi/penyaluran pangan pokok lainnya dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1366	2.09.000217	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi	Dokumen	Laporan mengenai pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi yang melibatkan OPD terkait dan stakeholder lainnya.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1367	2.10.000002	Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian	Berita Acara	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan bentuk ganti kerugian yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir Naskah dinas kesepakatan, memuat: a. Pihak yang berhak yang hadir atau kuasanya, yang setuju beserta bentuk Ganti Kerugian yang b. Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya, yang tidak dan c. Pihak yang Berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1368	2.10.000003	Berita Acara kesepakatan desain konsolidasi tanah	Berita Acara	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan desain konsolidasi tanah yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1369	2.10.000004	Berita Acara kesepakatan rencana aksi	Berita Acara	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan rencana aksi yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1370	2.10.000006	Berita Acara pelepasan hak atas tanah/ garapan dalam rangka konsolidasi tanah	Berita Acara	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan pelepasan hak atas tanah/garapan dalam rangka konsolidasi tanah yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1371	2.10.000007	Berita Acara penerapan desain konsolidasi tanah	Berita Acara	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan terhadap penerapan desain konsolidasi tanah yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1372	2.10.000008	Berita Acara pengumpulan data fisik dan yuridis	Berita Acara	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan terhadap pengumpulan data fisik dan yuridis yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1373	2.10.000012	Daftar Nominatif	Dokumen	Rancangan Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan daftar nominatif	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1374	2.10.000013	Daftar peniaian Objek Konsolidasi Tanah	Dokumen	Laporan penilaian objek konsolidasi tanah dalam bentuk tabel	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1375	2.10.000016	Data fisik Objek Pengadaan Tanah	Dokumen	a. Pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi b. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang c. Hasil pelaksanaan berupa Peta Bidang Tanah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1376	2.10.000026	Data inventarisasi tanah kosong	Dokumen	Data yang di inventarisasi adalah alamat lokasi bidang tanah, perkiraan luas bidang tanah, dan data pemilik bidang tanah.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1377	2.10.000037	Data yuridis Objek Pengadaan Tanah	Dokumen	Data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah, paling kurang: a. nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak b. nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak c. bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah d. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang e. status tanah dan dokumennya f. jenis penggunaan dan pemanfaatan g. pemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah h. pembebanan Hak Atas Tanah i. Ruang Atas dan Ruang Bawah Tanah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1378	2.10.000060	Dokumen perencanaan konsolidasi tanah	Dokumen	Perencanaan Konsolidasi Tanah adalah proses pemilihan lokasi untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai lokasi yang memenuhi kriteria Konsolidasi Tanah.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1379	2.10.000063	Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Dokumen	Pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1380	2.10.000070	Keputusan pemberian hak atas tanah objek konsolidasi tanah	Dokumen	Keputusan pemberian hak atas tanah objek konsolidasi tanah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1381	2.10.000071	Keputusan penegasan tanah objek konsolidasi tanah	Dokumen	Penegasan tanah sebagai objek Konsolidasi Tanah dilakukan untuk memberikan kewenangan kepada Tim Perencana/Pelaksana dalam menata kembali bidang tanah sesuai desain Konsolidasi Tanah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1382	2.10.000072	Laporan koordinasi dalam rangka penyelesaian tanah kosong	Laporan	Koordinasi dalam penyelesaian permasalahan tanah kosong yang berada dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota atau lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1383	2.10.000073	Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Laporan	Dalam PP 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah, Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Dalam UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, salah satu kewenangan dibidang pertanahan yang diserahkan ke daerah adalah perencanaan penggunaan tanah.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1384	2.10.000077	Lembar persetujuan penyusunan desain konsolidasi tanah	Dokumen	Desain Konsolidasi Tanah yang disusun oleh pemangku kepentingan harus mendapat verifikasi dan persetujuan yang dituangkan dalam Lembar Persetujuan dari Ketua Tim Perencana/Pelaksana	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1385	2.10.000080	Penetapan nilai oleh tim Penilai	Dokumen	Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan nilai oleh tim Penilai	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1386	2.10.000081	Perda tentang RTRW Provinsi	Dokumen	Bukan Urusan Pertanahan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1387	2.10.000082	Peta Bidang Tanah	Dokumen	Lembaran peta bidang tanah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1388	2.10.000083	Peta desain konsolidasi tanah	Dokumen	Desain Konsolidasi Tanah yang disusun oleh pemangku kepentingan harus mendapat verifikasi dan persetujuan yang dituangkan dalam Lembar Persetujuan dari Ketua Tim Perencana/Pelaksana	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1389	2.10.000086	Rencana aksi	Dokumen	Catatan resmi pelaksanaan rencana aksi dalam pelaksanaan konsolidasi tanah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1390	2.10.000091	Surat tanda bukti hak atas tanah	Surat	Semua bidang tanah yang telah ditetapkan keputusan pemberian haknya diterbitkan Surat Tanda Bukti Hak atas Tanah termasuk TP dan/atau TUB.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1391	2.10.000103	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Berita Acara	hasil Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong berupa berita acara	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1392	2.10.000210	Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Laporan	Laporan Hasil Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1393	2.11.000001	Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1	Laporan	Tersedianya audit lingkungan hidup yang diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1394	2.11.000004	Data Capaian IKLH Per tahun	Poin	Tersedianya data hasil pengukuran capaian IKLH meliputi: IKA, IKU, IKAL, IKL pada tingkat Kab/kota	63,12	66,52	61,75	62,5	67,58	64,94	0	Dinas Lingkungan Hidup
1395	2.11.000005	Data contoh uji	Data	Data jumlah contoh uji yang diinventaris oleh laboratorium lingkungan hidup, baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu	239	239	239	239	233	233	233	Dinas Lingkungan Hidup
1396	2.11.000006	Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD	Laporan	Terbitnya surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi.	0	0	1	0	0	0	1	Dinas Lingkungan Hidup
1397	2.11.000007	Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHS	Laporan	Terbitnya surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah	0	0	1	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1398	2.11.000009	Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD	Laporan	Terbitnya surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah Kabupaten/Kota	0	0	1	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1399	2.11.000010	Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP	Laporan	Tersedianya data hasil penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya	0	0	1	0	1	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1400	2.11.000011	Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP	Laporan	Tersedianya data hasil perumusan alternatif penyempurnaan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya	0	0	1	0	1	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1401	2.11.000012	Data hasil Validasi KLHS	Laporan	a. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KRP lainnya	0	0	1	0	1	3	0	Dinas Lingkungan Hidup
1402	2.11.000013	Data hasil Validasi KLHS RPJMD	Laporan	Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK	0	0	1	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1403	2.11.000014	Data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota	Dokumen	Tersedianya data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1404	2.11.000016	Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada	Data	Data sumber pencemar yang telah dilakukan penghentian pencemaran	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1405	2.11.000018	data Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota	Dokumen	Tersedianya data dan informasi terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1406	2.11.000019	Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	Tersedianya identifikasi TPB	0	0	1	0	1	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1407	2.11.000020	Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH	Laporan	a. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya	0	0	1	0	1	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1408	2.11.000021	Data pengujian parameter kualitas lingkungan	Data	Data hasil penetapan dan penentuan parameter kualitas lingkungan baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu	239	239	239	239	233	233	233	Dinas Lingkungan Hidup
1409	2.11.000022	Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	Tersedianya rumusan skenario TPB	0	0	1	0	1	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1410	2.11.000023	Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi	Dokumen	1. tersedianya data sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. tersedianya data sarana dan prasarana pengurangan sampah (gudang) dll 3. tersedianya data sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibantu pengadaannya (Pusat, Provinsi, Program, LN, LSM, NGO dll)	1	0	0	0	0	0	1	Dinas Lingkungan Hidup
1411	2.11.000024	Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan Hidup	Dokumen	Tersedianya Dokumen dan Data inventarisasi Lingkungan Hidup	0	1	0	1	0	1	0	Dinas Lingkungan Hidup
1412	2.11.000026	Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1	Dokumen	Tersedianya dokumen amdal sesuai dengan NSPK yang berlaku	1	0	1	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1413	2.11.000028	Dokumen DIKPLHD	Dokumen	Tersedianya dokumen telaahan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1414	2.11.000029	Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1415	2.11.000030	Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	Tersedianya data dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1416	2.11.000033	Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting	Dokumen	1. jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang telah tersedia 2. jumlah kebijakan yang telah disusun	0	0	0	0	0	0	2	Dinas Lingkungan Hidup
1417	2.11.000034	Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview	Dokumen	1. jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah 2. jumlah kebijakan yang disusun 3. jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1418	2.11.000037	Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusun	Dokumen	1. jumlah kajian kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST 2. data potensi jumlah timbulan sampah yang dapat ditangani oleh TPA/TPST (setelah jumlah potensi timbulan sampah kabupaten/kota dikurangi potensi penanganan sampah di instalasi TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan ditambah jumlah residu yang dihasilkan) 3. tersedianya data biaya penanganan sampah di TPA/TPST	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1419	2.11.000039	Dokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	Tersedianya dokumen pelaporan pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1420	2.11.000043	Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun	Dokumen	Tersedianya dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1421	2.11.000044	Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1	Dokumen	Tersedianya dokumen UKL-UPL sesuai dengan NSPK yang berlaku	3	27	30	9	4	5	5	Dinas Lingkungan Hidup
1422	2.11.000046	Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah	Kelompok	tersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup
1423	2.11.000048	Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	Tersedianya data Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	0	0	0	0	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1424	2.11.000049	ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1	Izin	Tersedianya izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	3	4	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1425	2.11.000050	Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat	Publikasi	Informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait bahaya yang ditimbulkan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1	1	1	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup
1426	2.11.000051	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan.	3	27	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1427	2.11.000052	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	3	27	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1428	2.11.000056	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	Tersedianya data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	30	9	4	5	0	Dinas Lingkungan Hidup
1429	2.11.000058	Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan	0	0	30	9	4	5	6	Dinas Lingkungan Hidup
1430	2.11.000060	Izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diproses	Izin/persetujuan	Data dan jumlah usaha/kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1431	2.11.000062	Kebijakan/data informasi terkait RPPLH	Dokumen	Dokumen telaahan kebijakan/data informasi terkait RPPLH	0	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1432	2.11.000063	Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	Data jumlah Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	1	1	1	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup
1433	2.11.000066	Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah	Kegiatan	1. Jumlah data usaha/kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah 2. Data jumlah izin/persetujuan lingkungan yang diterbitkan terkait dengan kegiatan pengelolaan sampah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1434	2.11.000067	Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Laporan	Tersedianya laporan dari Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1435	2.11.000068	Kegiatan pengurangan sampah	Kegiatan	1. jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. jumlah kegiatan sosialisasi pembatasan sampah 3. jumlah kegiatan pemantauan pembatasan sampah 4. tersedianya data jumlah sampah yang di di daur ulang 5. tersedianya data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan 6. Data jumlah/volume sampah yang di manfaatkan kembali	21	21	21	21	21	21	21	Dinas Lingkungan Hidup
1436	2.11.000069	Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir	Kelompok	Data kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah (tanggal dan tema peningkatan kapasitas	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup
1437	2.11.000070	Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan	Kelompok	1. tersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan 2. tersedianya data kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah (tanggal dan tema peningkatan kapasitas 3. tersedianya data personil kelompok masyarakat yang telah di tingkatkan kapasitasnya 4. tersedianya data renaksi kelompok yang di tingkatkan kapasitasnya	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup
1438	2.11.000071	Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan	Kelompok	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup
1439	2.11.000075	Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Keluarga	Jumlah Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1440	2.11.000076	Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	Data jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya	0	13	7	2	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1441	2.11.000078	Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota	Dokumen	Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.	12	26	38	40	54	94	90	Dinas Lingkungan Hidup
1442	2.11.000080	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1443	2.11.000081	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau kab/kota	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1444	2.11.000083	Laporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dokumen	dokumen laporan dan bukti-bukti pendukung lainnya terkait hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1445	2.11.000084	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	Rincian kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga lain	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1446	2.11.000086	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	Data dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan yang telah dilakukan	0	13	7	2	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1447	2.11.000090	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi	Dokumen	1. Data sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. Data sarana dan prasarana pengurangan sampah (gudang) dll 3. Data sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibantu pengadaannya (Pusat, Provinsi, Program, LN, LSM, NGO dll)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1448	2.11.000092	Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Laporan	Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1449	2.11.000095	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan	Dokumen	1. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana maupun aktivitas rehabilitasi yang telah dilakukan. 2. Laporan kegiatan aktivitas rehabilitasi yang telah dilakukan melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. 3. Data lokasi yang telah dilakukan Aktivitas rehabilitasi melalui pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. 4. Data luas area yang telah dilakukan Aktivitas rehabilitasi melalui pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1450	2.11.000096	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan remediasi yang dilaksanakan	Dokumen	a. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana remediasi maupun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah sesuai kewenangannya yang telah dilakukan. b. Aktivitas remediasi yang telah dilaksanakan melalui upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1451	2.11.000097	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi yang dilaksanakan	Dokumen	1. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan maupun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah sesuai kewenangannya yang telah dilakukan. 2. Laporan aktivitas restorasi yan telah dilakukan dalam rangka pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1452	2.11.000098	Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1453	2.11.000099	Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen	Dokumen laporan hasil pendampingan pembinaan dalam bentuk konsultasi, koordinasi, supervisi, fasilitasi, promosi pengembangan dan bentuk kegiatan lainnya terkait gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1454	2.11.000100	Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kota	Dokumen	Tersedianya laporan hasil penyelenggaraan penyuluhan dalam bentuk dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1455	2.11.000102	Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor	Dokumen	Kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga lain	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1456	2.11.000104	Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3	Laporan	Tersedianya data terkait hasil laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3 sebelum menerbitkan/menolak izin dimaksud	3	4	0	12	3	4	9	Dinas Lingkungan Hidup
1457	2.11.000105	Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat	Dokumen	Laporan hasil sosialisasi dan penyampaian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1458	2.11.000106	Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dokumen	Data sebaran lokasi yang diisolasi oleh pemerintah provinsi akibat adanya pencemaran	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1459	2.11.000107	Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	Lembaga	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan dan telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup
1460	2.11.000108	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksisting	Lembaga	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1461	2.11.000110	Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi	Lokasi	Area yang telah dilakukan rehabilatasimelalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1462	2.11.000111	Lokasi pelaksanaan remediasi	Lokasi	Aktivitas remediasi untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1463	2.11.000112	Lokasi pelaksanaan Restorasi	Lokasi	Area yang telah dilakukan restorasi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1464	2.11.000113	Lokasi pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Lokasi	Data sebaran lokasi yang diisolasi oleh pemerintah provinsi akibat adanya pencemaran	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1465	2.11.000114	Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota	Lokasi	Data lokasi proklim di kabupaten/kota	1	8	5	11	11	11	11	Dinas Lingkungan Hidup
1466	2.11.000116	Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	Data Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	1,2	1,2	1,2	2,2	2,2	2,2	2,2	Dinas Lingkungan Hidup
1467	2.11.000118	Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	Data Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	520,17	520,17	529,96	529,96	529,96	529,96	529,96	Dinas Lingkungan Hidup
1468	2.11.000120	Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	1. Tersedianya data jumlah Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota 2. Tersedianya data Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1469	2.11.000122	Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	Data Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1470	2.11.000124	Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Orang	Jumlah keseluruhan individu yang telah dilakukan penyuluhan dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan metode penyuluhan & kampanye lainnya terkait lingkungan hidup	200	200	300	300	400	400	1170	Dinas Lingkungan Hidup
1471	2.11.000125	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	Data terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup
1472	2.11.000126	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Entitas	Data terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup
1473	2.11.000127	Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Materi	Jumlah Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup
1474	2.11.000128	Nilai IKA n-1	Poin	Nilai yang menunjukan kualitas air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air sesuai dengan NSPK yang berlaku	55,33	56,32	51,58	59,73	67,78	56,11	0	Dinas Lingkungan Hidup
1475	2.11.000130	Nilai IKLH n-1	Poin	Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari IKA, IKU, IKTL, dan IKAL.	63,12	66,52	61,75	62,5	67,58	64,94	0	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1476	2.11.000131	Nilai IKTL n-1	Poin	Nilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku	54,23	54,23	38,52	23,96	33,51	34,13	0	Dinas Lingkungan Hidup
1477	2.11.000132	Nilai IKU n-1	Poin	Nilai yang menunjukan kualitas udara pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas udara sesuai dengan NSPK yang berlaku	82,77	82,63	83,76	85,9	85,83	89,79	0	Dinas Lingkungan Hidup
1478	2.11.000133	Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	Jumlah SDM yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dll dalam bidang lingkungan hidup	200	200	300	300	400	400	1170	Dinas Lingkungan Hidup
1479	2.11.000135	Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	Data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	0	0	0	0	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1480	2.11.000136	Permohonan kelayakan lingkungan hidup	Dokumen	Data permohonan kelayakan lingkungan hidup yang diajukan kepada pemerintah	1	0	1	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1481	2.11.000139	Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	Dokumen	Data dokumen terkait izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1482	2.11.000140	Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses	Dokumen	Data dokumen terkait permohonan izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1483	2.11.000141	Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses	Dokumen	Data dokumen terkait permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1484	2.11.000142	Permohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	Dokumen	Data dokumen terkait izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1485	2.11.000143	Persetujuan lingkungan hidup	Dokumen	data dokumen persetujuan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh pemerintah	0	0	30	9	4	12	6	Dinas Lingkungan Hidup
1486	2.11.000144	Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1	persetujuan	persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	0	0	30	9	4	12	6	Dinas Lingkungan Hidup
1487	2.11.000150	Rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Rekomendasi	Data rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1488	2.11.000151	Rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	Data dokumen terkait izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1489	2.11.000152	Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	Data dokumen terkait izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1490	2.11.000153	RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	Data jumlah RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	13	13	13	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup
1491	2.11.000155	Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	Unit	Data jumlah unit Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	13	13	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1492	2.11.000156	Sarana dan prasarana pemilahan sampah	Unit	1. tersedianya data dan jumlah sarana pemilahan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pemilahan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pemilahan sampah	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup
1493	2.11.000158	Sarana dan prasarana pengangkutan sampah	Unit	1. tersedianya data dan jumlah sarana pengangkutan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pengangkutan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pengangkutan sampah	13	13	12	12	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup
1494	2.11.000159	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota eksisting	Unit	1. Data TPA/TPST/SPA dan kapasitasnya 2. Data sarana dan prasarana di setiap TPA/TPST/SPA 3. Data biaya operasional setia TPA/TPST/SPA 4. Data SDM yang dibutuhkan di setiap TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	2	3	4	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup
1495	2.11.000160	Sarana dan prasarana pengumpulan sampah	Unit	1. tersedianya data dan jumlah sarana pengumpulan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pengumpulan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pengumpulan sampah	179	179	179	206	228	228	228	Dinas Lingkungan Hidup
1496	2.11.000161	Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	data jumlah Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1497	2.11.000163	Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	Data jumlah Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1498	2.11.000165	Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1499	2.11.000167	Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah	Unit	Data jumlah usaha dan atau kegiatan, Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1500	2.11.000168	Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH	Usaha/Kegiatan	Tersedianya data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1501	2.11.000172	Volume timbulan sampah yang diangkut	Ton	1. tersedianya data jumlah sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari TPS/TPST/Bank Sampah/PDU/TPS3R dll ke TPA 2. tersedianya data jumlah timbulan sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari sumber sampah ke TPA	23.753,67	25.069,05	26.807,66	27.103,54	27.360,80	27.700,94	27700,94	Dinas Lingkungan Hidup
1502	2.11.000174	Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Ton	1. Data jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. Data jumlah sampah yang di di daur ulang 3. Data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan 4. Data jumlah sampah yang di manfaatkan kembali	2.494,25	2.510,36	3.334,65	3.720,74	4.390,08	4.548,20	4548,20	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1503	2.11.000175	Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan	Ton	1. Data jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. Data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. Data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton	903,37	1.886,18	1.863,55	1.015,60	891,87	835,18	835,18	Dinas Lingkungan Hidup
1504	2.11.000176	Volume timbulan sampah yang diolah	Ton	1. Data jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. Data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. Data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton	903,37	1.886,18	1.863,55	1.015,60	891,87	835,18	835,18	Dinas Lingkungan Hidup
1505	2.11.000177	Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA	Ton	1. Data jumlah timbulan sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (sampah yang di angkut dari sumber sampah) 2. Data jumlah residu sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (hasil dari pengolahan di TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan)	20.356,05	20.672,51	21.609,46	22.367,20	22.078,85	22.317,56	22.317,56	Dinas Lingkungan Hidup
1506	2.11.000179	Dokumen rencana/kajian RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst	Dokumen	Data terkait mutu air, mutu udara, mutu air laut, pengelolaan ekosistem gambut, dan pengelolaan karst pada tingkat Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1507	2.11.000181	Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara	Unit	Data jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dioperasikan dalam kondisi baik oleh pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup
1508	2.11.000186	Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	Data Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1509	2.11.000187	Jumlah Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	Data dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan pada tingkat Kabupaten/Kota.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1510	2.11.000189	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun	Dokumen	1. Data jumlah kajian pendukung kebijakan daerah yang di susun 2. Data jumlah kebijakan daerah yang di terbitkan 3. Data kebijakan daerah yang telah di terbitkan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1511	2.11.000191	Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	Dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.	0	0	0	1	1	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1512	2.11.000192	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi	Unit	1. Data dan jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah 2. Data biaya operasional setiap sarana penanganan sampah 3. Data biaya pemeliharaan setiap sarana penanganan sampah (servis berkala)	35	35	35	35	39	39	39	Dinas Lingkungan Hidup
1513	2.11.000193	Jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	Usaha	Data dan informasi terkait pembinaan fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	0	0	30	42	42	79	Dinas Lingkungan Hidup
1514	2.11.000195	Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	data Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	0	0	0	0	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1515	2.11.000205	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Perkara	Tersedianya data jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1516	2.11.000207	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	Unit	Data sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1517	2.11.000208	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Unit	Data dan informasi terkait kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1518	2.11.000209	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	Kegiatan	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1519	2.11.000211	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	Aktivitas rehabilitasi pada wilayah kabupaten/kota untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1520	2.11.000213	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	Area yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan remediasi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1521	2.11.000215	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	Area yang telah dilakukan restorasi melalui pengembalian nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1522	2.11.000217	Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi	Dokumen	Laporan monitoring dan evaluasi implementasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS	0	0	1	0	1	3	0	Dinas Lingkungan Hidup
1523	2.11.000218	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Dokumen	Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.	12	26	38	40	54	94	90	Dinas Lingkungan Hidup
1524	2.11.000220	Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Laporan	1. jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. jumlah kegiatan sosialisasi pembatasan sampah 3. jumlah kegiatan pemantauan pembatasan sampah	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1525	2.11.000221	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	Laporan inventarisasi data GRK yang memuat informasi berupa tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (source) dan penyerapnya (sink) termasuk simpanan karbon (carbon stock).	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1526	2.11.000224	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berwenang bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal pencegahan pencemaran lingkungan hidup	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1527	2.11.000230	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Nilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1528	2.11.000231	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil kegiatan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup untuk peningkatakan kualitas air, udara dan laut pada lingkup provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1529	2.11.000232	Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota	Dokumen	Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim dengan muatan identifikasi target cakupan wilayah dan/atau sektor spesifik dan dampak perubahan iklim, penyusunan kajian kerentanan, pilihan aksi, prioritas aksi adaptasi perubahan iklim dan pengintegrasian aksi adaptasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1530	2.11.000234	Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.	Dokumen	Laporan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan rincian seperti bentuk aktivitas, pihak yang terlibat dan informasi lainnya yang terkait kegiatan sosialisasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1531	2.11.000236	Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Dokumen	Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim di daerah dengan rincian bentuk aksi mitigasi pada sektor yang terkait	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1532	2.11.000238	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting	Lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1533	2.11.000241	Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Lokasi	Area di wilayah kabupaten/kota yang dilkukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Lingkungan Hidup
1534	2.11.000246	Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	Jumlah keseluruhan individu dalam suatu lembaga formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	200	200	300	300	400	400	1170	Dinas Lingkungan Hidup
1535	2.11.000247	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	Tersedianya data jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	13	7	2	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1536	2.11.000250	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	Tersedianya data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	0	0	0	0	1	1	3	Dinas Lingkungan Hidup
1537	2.11.000251	Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD	Orang	Tersedianya data jumlah PNS dengan jabatan fungsional PPLHD	2	1	1	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1538	2.11.000252	Jumlah PPLHD Eksisting	Orang	Tersedianya data PPLHD yang aktif	2	1	1	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1539	2.11.000253	Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	Tersedianya data PPLHD yang telah mengikuti diklat, pelatihan, seminar dll untuk meningkatkan kapasitas PPLHD dimaksud	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1540	2.11.000254	Jumlah PPLHD yang dibutuhkan	Orang	Tersedianya data kebutuhan PPLHD	0	1	1	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup
1541	2.11.000255	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Jumlah pembentukan dan peningkatan kapasitas penyidik PNS LHK Daerah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1542	2.11.000256	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani	Ton	Total berat sampah yang dikelola melalui tindakan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir dari lokasi-lokasi tertentu yang mengalami situasi di luar aktivitas rutin harian	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1543	2.11.000257	Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Unit	Jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup
1544	2.11.000259	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi	Unit	1. tersedianya data dan jumlah sarana serta prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana dan prasearana penanganan sampah kabupaten/kota (Rp/bulan atau Rp/ton atau Rp/tahun) 3. tersedianya data biaya pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota (Rp/tahun)	43	43	43	43	47	47	47	Dinas Lingkungan Hidup
1545	2.11.000260	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersedia	Unit	tersedianya data jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah regional	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1546	2.11.000261	Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit	Tersedianya data terkait sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1547	2.11.000262	Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting	Unit	Tersedianya data terkait sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1548	2.11.000263	Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit	Tersedianya data terkait sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1549	2.11.000264	Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting	Unit	Tersedianya data sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1550	2.11.000265	Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	Unit	1. tersedianya data dan jumlah sarana pemilahan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pemilahan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pemilahan sampah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1551	2.11.000266	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	Tersedianya data jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1552	2.11.000268	Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut	239	239	239	239	233	233	233	Dinas Lingkungan Hidup
1553	2.11.000269	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1554	2.11.000271	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	MÃ²	Area di wilayah kabupaten/kota yang dilkukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1555	2.11.000273	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	Aktivitas rehabilitasi pada wilayah kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1556	2.11.000275	Luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota mapun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1557	2.11.000277	Luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	Aktivitas rehabilitasi di wilayah kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1558	2.11.000279	Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1)	Poin	Besaran nilai indeks kualitas air, kualitas udara, kualitas tutupan lahan dan kualitas air laut yang menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun sebelumnya	55,33Ã 82,77Ã 54,23Ã 63,12	56,32 82,63 54,23 66,52	51,58 83,76 38,52 61,75	59,73 85,9 23,96 62,5	67,78 85,83 33,51 67,58	56,11 89,79 34,13 64,94	56,11 89,79 34,13 64,94	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1559	2.11.000280	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	%	1. tersedianya data jumlah sumber sampah berdasarkan klasifikasi (penduduk, KK. Industri (I, II, III dst.) Hotel, pasar, kantor Swasta dll) 2. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui Gerobak 3. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui roda 3 4. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui pickup 5. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui truck engkel 6. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui truck double 7. tersedianya data jumlah potensi timbulan sampah yang di kumpulkan oleh penanganan sampah berbasis masyarakat (TPS3R/PDU)	90	90	90	90	90	90	90	Dinas Lingkungan Hidup
1560	2.11.000281	Tersusunnya dokumen IKLH	Dokumen	Dokumen hasil perhitungan IKLH yang terdiri atas perhitungan IKA, IKU, IKL, IKAL	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Lingkungan Hidup
1561	2.11.000282	Tersusunnya dokumen IKPLHD	Dokumen	Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerah	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1562	2.11.000286	Volume sampah yang didaur ulang	Ton	1. tersedianya data jumlah sampah yang di di daur ulang 2. tersedianya data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan	2.482,18	2.498,29	3.210,32	3.571,73	4.295,14	4.452,38	4.452,38	Dinas Lingkungan Hidup
1563	2.11.000287	Volume sampah yang dimanfaatkan kembali	Ton	tersedianya data jumlah sampah yang di manfaatkan kembali	8,05	8,05	14,83	17,97	17,96	18,10	18,10	Dinas Lingkungan Hidup
1564	2.11.000288	Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	1. jumlah timbulan sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (sampah yang di angkut dari sumber sampah) 2. jumlah residu sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (hasil dari pengolahan di TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan)	20.356,05	20.672,51	21.609,46	22.367,20	22.078,85	22.317,56	22.317,56	Dinas Lingkungan Hidup
1565	2.11.000289	Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya	Ton	1. tersedianya jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. tersedianya data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. tersedianya data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton	903,37	1.886,18	1.863,55	1.015,60	891,87	835,18	835,18	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1566	2.11.000290	Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	1. tersedianya data jumlah sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari TPS/TPST/Bank Sampah/PDU/TPS3R dll ke TPA 2. tersedianya data jumlah timbulan sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari sumber sampah ke TPA	21.259,42	22.558,69	23.473,01	23.382,80	22.970,72	23.152,74	23.152,74	Dinas Lingkungan Hidup
1567	2.11.000296	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1568	2.11.000297	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Laporan	Laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup
1569	2.11.000298	Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan	Laporan	Data dan informasi terkait jumlah dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1570	2.11.000300	&Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan	Laporan	Laporan Pengembangan dan Penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 2. Berbagai kegiatan pengembangan NSPK pendukung penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 3. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1571	2.11.000301	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1572	2.11.000302	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	Usaha	Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	0	0	0	12	3	4	9	Dinas Lingkungan Hidup
1573	2.11.000303	laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Laporan	laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sesuai kewenangannya	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1574	2.11.000305	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1575	2.11.000310	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan	Usaha/Kegiatan	Data dan informasi terkait usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi objek pengawasan aktif.	0	0	30	35	48	94	90	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1576	2.11.000311	Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Dokumen	Dokumen laporan yang berisi data dan informasi dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terkait izin lingkungan, persetujuan lingkungan, serta surat kelayakan operasi yang dikeluarkan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12	26	38	40	54	94	90	Dinas Lingkungan Hidup
1577	2.11.000313	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1578	2.11.000314	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen	Laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemulihan pencemaran lingkungan hidup	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1579	2.11.000317	Persetujuan Teknis pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	Tersedianya data pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan, permohonan pengumpulan limbah B3 yang sedang diproses dan Permohonan pengumpulan limbah B3 yang ditolak melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1580	2.11.000318	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya skala Provinsi yang diterbitkan	Usaha	Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang diterbitkan	0	0	0	12	3	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1581	2.11.000319	Data unit sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting	Unit	Tersedianya data jumlah sarana prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting	43	43	43	43	47	47	52	Dinas Lingkungan Hidup
1582	2.11.000320	Data unit sarana dan prasarana pepenanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah	Unit	Tersedianya data jumlah sarana prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah pada tahun anggaran berjalan	0	1	1	1	1	1	5	Dinas Lingkungan Hidup
1583	2.11.000321	Data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada	Unit	Tersedianya data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada sebagai dasar untuk pengalokasian anggaran di tahun berikutnya	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1584	2.11.000322	Jumlah sarana dan prasarana Existing penegakan hukum bidang lingkungan hidup	Unit	a. data dan informasi sarana dan prasarana yang saat ini tersedia dan digunakan dalam mendukung proses penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, termasuk fasilitas, peralatan, dan infrastruktur yang relevan. b. Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1585	2.11.000323	Data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tersedia	Unit	Data Fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1586	2.11.000324	Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi	Unit	data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi yang disediakan oleh pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1587	2.11.000325	Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup	Orang	Data dan informasi mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lingkungan hidup yang bertugas di Pemerintah Daerah. Termasuk dalam data ini adalah informasi tentang tugas, wilayah kerja, dan kewenangan mereka. Selain itu, melakukan analisis kebutuhan untuk mengusulkan pembentukan tambahan PPNS di daerah serta identifikasi kebutuhan terkait peningkatan kapasitas penyidik di bidang lingkungan hidup, baik melalui pelatihan, kompetensi usulan sarana prasarana penunjang penyidikan, maupun pengembangan kompetensi lainnya.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1588	2.11.000326	jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola	Ton	data sumber, jenis dan jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola oleh pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1589	2.11.000327	Data pihak swasta yang melakukan pengelolaan sampah	Badan Usaha	tersedianya data jumlah pihak lain (badan usaha) yang dibina dan diawasi kinerjanya dalam pengelolaan sampah.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1590	2.11.000328	Dokuman laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	Dokumen	Tersedianya dokumen laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan sampah spesifik atau pada kondisi khusus	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1591	2.11.000329	jumlah tonase sampah yang terkelola oleh pihak swasta yang telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah	Ton	tersedianya data sampah yang terkelola oleh pihak lain (badan usaha) yag telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1592	2.11.000330	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan tersebut	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan menghitung persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1593	2.11.000331	sesuai dengan kewenangannya	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani sesuai dengan kewenangannya	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1594	2.11.000332	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH	Laporan / Dokumen	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH yang memuat data dan informasi yang menjadi indikator keberhasilan penerapan RPPLH seperti: 1. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 2. Indeks Perilaku Ramah Lingkungan Hidup 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 4. Tingkat daur ulang timbulan sampah 5. Indeks Pengelolaan Kehati 6. dan indikator lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1595	2.11.000335	1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)	Laporan	Semua dokumen hasil proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJPD mulai dari dokumen hasil identifikasi TPB, Rumusan skenario TPB, surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah, BA validasi, dan surat keterangan atau BA verifikasi pengintegrasian muatan KLHS ke dalam dokumen perencanaan daerah	0	0	1	0	1	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1596	2.11.000336	Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)	Laporan	Surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi.	0	0	1	0	1	2	0	Dinas Lingkungan Hidup
1597	2.11.000337	Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1598	2.11.000338	Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1599	2.11.000339	Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1600	2.11.000340	&Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan	Laporan	Laporan pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH antar Daerah 2. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1601	2.11.000341	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan	Laporan	Laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 2. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1602	2.11.000342	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya	Usaha	Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1603	2.11.000343	Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Laporan / Dokumen	Tersedianya data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang sedang Permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang ditolak dan data persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan kewenangannya	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1604	2.11.000344	Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas LingkunganĀ yangĀ diusulkan	Orang	Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1605	2.11.000345	Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan	Orang	Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1606	2.11.000346	Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS	Sekolah	Data jumlah lembaga pendidikan formal atau sekolah yang mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1607	2.11.000347	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya	Sanksi	Data dan Informasi penerapan sanksi administrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup. Data ini mencakup jumlah sanksi administrasi yang dikenakan, jenis sanksi, pelanggaran yang dikenai sanksi, serta status pelaksanaan dan kepatuhan terhadap sanksi tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dan identifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.	0	13	7	2	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1608	2.11.000348	Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Orang	Data dan informasi kegiatan serta inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Data ini mencakup pelatihan, workshop, sertifikasi, dan program pengembangan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam menangani dan menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Informasi ini juga mencakup evaluasi efektivitas pelatihan dan dampaknya ke depan terhadap kualitas penanganan sengketa.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1609	2.11.000349	Laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis	Laporan / Dokumen	Tersedianya laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, baik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1610	2.11.000350	Jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali	8,05	8,05	14,83	17,97	17,96	18,10	18,10	Dinas Lingkungan Hidup
1611	2.11.000351	Jumlah tonase sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah yang tertangani di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya, baik melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah	23.753,67	25.069,05	26.807,66	27.103,54	27.360,80	27.700,94	27.700,94	Dinas Lingkungan Hidup
1612	2.11.000352	jumlah tonase sampah yang didaur ulang	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah yang berbahsil didaur ulang	2.482,18	2.498,29	3.210,32	3.571,73	4.295,14	4.452,38	4.452,38	Dinas Lingkungan Hidup
1613	2.11.000353	Dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampah	Dokumen	Tersedianya dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1614	2.11.000354	Jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampah	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kegiatan kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1615	2.11.000355	Jumlah Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan persentasenya terhadap jumlah total Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga eksisting yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah	Unit	Mendata jumlah Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan menghitung persentasenya terhadap jumlah total Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga eksisting yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1616	2.11.000357	Timbulan Sampah Harian	Ton	Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per hari.	70,94	74,57	75,19	75,98	76,68	77,44	77,44	Dinas Lingkungan Hidup
1617	2.11.000358	Timbulan Sampah Tahunan	Ton	Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per tahunan	25.892,37	27.219,69	27.442,53	27.732,7	27.988,2	28.263,78	28.263,78	Dinas Lingkungan Hidup
1618	2.12.000008	Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Dokumen	Pengolahan data kependudukan adalah proses menabulasi, menjumlahkan, atau memilah-milah data kependudukan menjadi data yang siap disajikan dan dianalisis. Sedangkan penyajian data kependudukan adalah proses menyajikan data yang sudah diolah agar mudah dibaca.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1619	2.12.000023	Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Penting	Dokumen	Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting adalah proses pencatatan dan penerbitan dokumen yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait peristiwa penting yang dialami oleh warga masyarakat	4487	3789	5469	4594	31754	4337	5400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1620	2.12.000024	Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Dokumen	Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk adalah rangkaian kegiatan dalam administrasi kependudukan	17587	29602	32363	38551	4554	49567	32300	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1621	2.12.000025	Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	Mengacu kepada Permendagri 96 Tahun 2019 Pasal 7 bahwa penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan. Dalam pasal 2 disebutkan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan meliputi : 1. Korban Bencana Alam 2. Korban kerusuhan Sosial 3. Orang terlantar 4. komunitas terpencil. Yang disebut dengan orang terlantar dalam permendagri 96 tahun 2019 adalah warga negara Indonesia yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini sudah sejalan dengan definisi dari kategori warga Negara penyandang disabilitas sesuai dengan UU No.8 Tahun 2016 pasal 1 bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1622	2.12.000032	Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	Paket	Penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk adalah kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan kemudahan, Dukcapil melakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1623	2.12.000033	Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	Dokumen	Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) sebagai alat bukti autentik hasil dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, namun tidak termasuk media fisik spesifik berupa blangko KTP-el atau formulir isian tertentu.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1624	2.12.000035	Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	Instrumen hukum tertulis yang mengatur pemberian hak akses dan tata cara penggunaan data kependudukan oleh lembaga pengguna.	3	8	9	15	18	21	24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1625	2.12.000046	Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dokumen	Dokumen hasil pengolahan dan penyajian data statistik kependudukan yang disusun secara berkala (tahunan) untuk memberikan gambaran konkrit mengenai kondisi demografi saat ini dan masa depan di suatu wilayah.	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1626	2.12.000051	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun	Dokumen	Dokumen resmi yang disusun oleh Disdukcapil (berupa SOP/panduan) sebagai acuan teknis dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan seluruh proses pengelolaan informasi Adminduk agar terwujud data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1627	2.12.000053	Laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	Dokumen resmi yang berisi catatan dan hasil kegiatan pendampingan atau dukungan teknis kepada masyarakat atau instansi terkait dalam proses pendaftaran penduduk.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1628	2.12.000056	Laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	Laporan	Dokumen tertulis yang menyajikan hasil pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi peristiwa penting penduduk.	0	0	1	1	1	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1629	2.12.000057	Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	Dokumen tertulis yang memuat dokumentasi, analisis, serta hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis mengenai penggunaan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), akurasi data, dan pemanfaatan hasil kependudukan.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1630	2.12.000060	Laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	Laporan	Dokumen resmi yang menyajikan hasil monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil di suatu wilayah.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1631	2.12.000062	Laporan hasil fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Dokumen resmi yang menyajikan output atau catatan hasil dari kegiatan pendampingan, bimbingan teknis, koordinasi, maupun konsultasi terkait pemanfaatan dan pengelolaan data kependudukan.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1632	2.12.000068	Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1633	2.12.000071	Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Laporan	Dokumen tertulis yang mencatat hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pembinaan bersama antara Disdukcapil Kabupaten/Kota dan Kantor Kemenag (KUA) untuk memelihara hubungan timbal balik, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil dan administrasi kependudukan.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1634	2.12.000072	Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	Jumlah dokumen tertulis yang memuat hasil pertemuan, diskusi, dan pertukaran data antara Disdukcapil dengan Kemenag (KUA) serta Pengadilan Agama. Fokusnya adalah menyinkronkan data pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR) penduduk muslim guna pemutakhiran data kependudukan dalam kurun waktu tertentu.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1635	2.12.000073	Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Laporan	Dokumen/data yang mencatat jumlah dokumen kependudukan (KK, KTP, KIA) dan kutipan akta (kelahiran, kematian) yang diterbitkan melalui layanan proaktif ke masyarakat, biasanya diukur berdasarkan jumlah dokumen/akta yang berhasil diselesaikan dan diserahkan dalam jangka waktu tertentu.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1636	2.12.000074	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Dokumen resmi yang menyajikan hasil pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1637	2.12.000079	Laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	Dokumen resmi yang menyajikan hasil pelaksanaan kegiatan pemberian informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, serta pentingnya pencatatan peristiwa penting (seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian).	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1638	2.12.000081	Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Dokumen resmi yang menyajikan data dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan penyampaian informasi terkait kebijakan, persyaratan, serta alur layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1639	2.12.000085	Laporan pembinaan dan pengawasan terkait Pendataran Penduduk	Laporan	Sebuah dokumen resmi yang menyajikan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap seluruh rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen serta data kependudukan dalam satu periode tertentu.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1640	2.12.000099	Melakukan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan	Kali	Dinas Dukcapil kabupaten/kota melakukan pendataan rutin terhadap penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1641	2.12.000100	Pengadaan blangko Kartu Identitas Anak (KIA) untuk pemenuhan identitas resmi anak	Dokumen	Dinas Dukcapil kabupaten/kota melakukan pengadaan blangko KIA untuk memenuhi hak anak memiliki identitas resmi. Kenapa hanya KIA? Karena KTP-el pengadaan dilakukan oleh Ditjen Dukcapil, sementara blangko lain seperti blangko KK dan blangko pencatatan sipil tidak lagi menggunakan blangko khusus security printing, melainkan hanya menggunakan kertas HVS A4 80 gram	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1642	2.13.000010	Data dasar keluarga, potensi desa dan Kelurahan, tingkat perkembangan desa dan kelurahan	Dokumen	Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan merupakan upaya mendukung proses pelaksanaan Prodeskel mulai dari pengumpulan sampai dengan publikasi data Prodeskel, yang meliputi: 1. Fasilitasi Pengumpulan Data 2. Fasilitasi Penginputan dan Pemutakhiran Data 3. Fasilitasi Publikasi Data	21	21	21	21	21	21	21	Sekretariat Daerah
1643	2.13.000034	Laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	Laporan berisi hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilakukan melalui kegiatan lomba gotong royong tingkat provinsi	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1644	2.13.000035	Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	Laporan berisi hasil fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan: penelusuran, pemetaan, pengkajian, pendokumentasian, pelindungan, dan pemasaran.	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
1645	2.13.000043	lembaga adat di Kabupaten/Kota	Lembaga Adat	Afirmasi atas SK Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Pendataan SK MHA, Fasilitasi Asistensi, Identifikasi, Verifikasi, Validasi Pengakuan dan Perlindungan MHA	0	0	0	0	0	1	1	Sekretariat Daerah
1646	2.13.000069	Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain	Lembaga Desa dan Desa Adat	penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan NSPK, Monev dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi terhadap LKD & LAD serta MHA di Desa dan Desa Adat	5	5	5	5	5	5	5	Sekretariat Daerah
1647	2.13.000074	Tingkat perkembangan desa	Desa	Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun yang diklasifikasikan dalam 5 status Desa yakni: a. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa b. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra- c. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa d. Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra- dan e. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama.	19	21	21	21	21	21	21	Sekretariat Daerah
1648	2.14.000001	Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	Daerah yang meningkatkan Kesertaan KB Pria	15	10	14	12	15	12	7	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1649	2.14.000002	Akseptor yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Orang / Sertifikat	Daerah yang melaksanakan peningkatan kompetensi bagi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	2	2	3	3	3	3	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1650	2.14.000003	Daerah Kab/Kota yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK	Laporan	Jumlah daerah provinsi yang telah menyusun Dokumen GDPK 5 Pilar, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dan memanfaatkannya dalam pembangunan terutama dalam dokumen perencanaan daerah	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1651	2.14.000006	Daerah yang telah melaksanakan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Laporan	Daerah Melaksanakan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui fasilitasi dan orientasi	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1652	2.14.000013	Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	Laporan	Menghasilkan / Mengembangkan / Menyediakan Data dan Informasi Keluarga	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1653	2.14.000014	Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dimanfaatkan stakeholder/instansi/organisasi	Laporan	Melaksanakan Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1654	2.14.000015	Data Keluarga yang tercatat dan terlaporkan	Laporan	Melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	345	345	345	345	345	345	417	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1655	2.14.000017	Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah	Laporan	Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1656	2.14.000018	Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkan	Laporan	Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Keluarga Berencana yang telah diolah dan dilaporkan	21	21	21	21	21	21	21	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1657	2.14.000019	Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	Daerah yang mengintegrasikan Pembangunan Lintas Sektor untuk dalam rangka penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas	1	6	6	6	6	21	21	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1658	2.14.000022	Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kegiatan	Terlaksananya Harmonisasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	6	6	6	6	6	6	6	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1659	2.14.000024	Dokumen Pemetaan Kependudukan	Dokumen	Melaksanakan/Hasil Pemetaan Kependudukan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1660	2.14.000025	Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kegiatan	Penyiapan Data Pendukung Perencanaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1661	2.14.000026	Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang telah disusun	Laporan	Menyusun Profil Bangga Kencana	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1662	2.14.000028	Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	Dukungan anggaran daerah yang tersedia untuk penanganan Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1663	2.14.000029	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	Daerah yang menyediakan Dukungan Operasional Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak, termasuk pelayanan di wilayah khusus, wilayah bencana, dan kegiatan momentum	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1664	2.14.000030	Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Fasilitasi, Pembinaan, Pengembangan, dan Penguatan Pengasuhan 1000 HPK kepada Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1665	2.14.000034	Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	Daerah Menyediakan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	120	120	120	120	120	120	120	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1666	2.14.000035	kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	Daerah Melaksanakan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	15	15	15	15	15	15	15	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1667	2.14.000036	kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	Daerah yang melaksanakan kegiatan penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	345	345	345	345	345	345	417	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1668	2.14.000037	Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	Menyusun Kajian Dampak Kependudukan atau telaahan secara mendalam tentang dampak kependudukan/pengaruh perubahan sistem penduduk terhadap sistem sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dalam rangka penyediaan informasi dan tindak lanjut Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1669	2.14.000038	Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana)	Kampung	Daerah yang melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berencana	6	6	6	10	10	21	21	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1670	2.14.000040	Kampung KB yang telah menerima pembinaan	Kegiatan	Daerah yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berkualitas	6	6	6	10	10	21	21	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1671	2.14.000042	Kebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota terhadap Program KKBPK (Bangga Kencana) yg telah diserasikan	Dokumen	Daerah Melaksanakan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah terhadap Program Bangga Kencana	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1672	2.14.000044	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA, TAMASYA, GATI, GENTING)	68	68	68	68	68	68	68	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1673	2.14.000045	Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	Daerah Membentuk Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) / Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).	68	68	68	68	68	68	68	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1674	2.14.000047	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK yang telah sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan	Daerah yang menyediakan Materi Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	68	68	68	68	68	68	68	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1675	2.14.000048	Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan	Daerah Melaksanakan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1676	2.14.000049	Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	Daerah melaksanakan Pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	25	25	25	25	25	23	23	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1677	2.14.000050	Laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	Daerah yang melakukan penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Penyuluh KB/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1678	2.14.000051	Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1679	2.14.000052	Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1680	2.14.000053	Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	Daerah yang melaksanakan pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan yang teregistrasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1681	2.14.000054	Masyarakat yang memiliki Pengetahuan Kependudukan	Laporan / Sertifikat	Daerah Melaksanakan Penghitungan dan pemanfaatan Indikator Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan	28	28	28	28	28	28	28	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1682	2.14.000056	Materi IPK (iBangga) yang telah tersedia dan dikembangkan	Dokumen	Daerah Melaksanakan Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1683	2.14.000057	Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan	Laporan	Daerah Menghasilkan/Mengembangkan Materi Pendidikan Kependudukan UntukSatuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS sesuai Kearifan Lokal	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1684	2.14.000058	Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan	Laporan	Daerah Menghasilkan/Mengembangkan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur NonFormal Sesuai Kearifan Lokal	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1685	2.14.000059	Materi Promosi dan Konseling Kespro dan Hak-Hak Reproduksi yang telah Dikembangkan dan Disediakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	Daerah yang mengembangkan dan menyediakan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1686	2.14.000061	Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang telah terlaksana	Kegiatan	Daerah yang melaksanakan Mekanisme Operasional Program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1687	2.14.000063	Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang didayagunakan	Organisasi	Daerah Melaksanakan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1688	2.14.000064	Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Laporan	Mengembangkan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan berupa rencana aksi dalam berbagai bentuk program pembangunan yang dapat diimplementasikan melalui kegiatan intervensi yang terintegrasi dan terjaga kesinambungannya sebagai rekomendasi pembangunan wilayah dalam rangka penyediaan informasi dan tindak lanjut Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1689	2.14.000065	Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang telah dikelola	Laporan	Daerah yang mengelola Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1690	2.14.000066	orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	Daerah yang melaksanakan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	345	345	345	345	345	345	417	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1691	2.14.000067	orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang / Sertifikat	Daerah yang melaksanakan peningkatan Kesertaan Kelaurga Berencana Metode Konstrasepsi Jangka Panjang	9	9	9	9	9	9	9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1692	2.14.000068	Orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Orang	Daerah yang melaksanakan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran, serta pendampingan Ibu Hamil/Pascasalin termasuk keluarga beresiko tinggi (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	25	25	25	25	25	25	25	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1693	2.14.000069	Orang yang telah menerima Advokasi, dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Laporan	Daerah Melaksanakan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1694	2.14.000070	Orang yang telah menerima sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Laporan	Daerah Melaksanakan Sosialisasi iBangga	35	35	35	35	35	35	35	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1695	2.14.000071	orang yang telah mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang / Sertifikat	Daerah melaksanakan Pembinaan Peserta KB Pasca Pelayanan Kontrasepsi	9	9	9	9	9	9	9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1696	2.14.000072	Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Laporan	Stakeholder (Lembaga pemerintah) dan Mitra Kerja (Lembaga Non Pemerintah) yang berkomitmen dan mendukung Program Bangga Kencana	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1697	2.14.000073	Organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	Daerah yang meningkatkan penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1698	2.14.000074	Organisasi yang mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	Daerah Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1699	2.14.000075	Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	Daerah Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1700	2.14.000077	Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Sertifikat / Kegiatan	Daerah yang IMPnya telah dibina dan daearah yang telah mendapatkan pembinaan Program Bangga Kencana di lini lapangan oleh PKB/PLKB	28	28	28	28	28	28	28	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1701	2.14.000078	Organisasi yang telah menerima Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Organisasi	Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1702	2.14.000081	Parameter Kependudukan yang telah dirumuskan	Dokumen	Melaksanakan Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk dan KB sebagai target dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1703	2.14.000086	Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kegiatan	Pendidikan Jalur Informal yg Terimplementasi/Mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1704	2.14.000087	Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kegiatan	Pendidikan Jalur Formal dan Nonformal Terimplementasi / Mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1705	2.14.000089	Pemangku Kepentingan yang telah menerima Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	Kegiatan	Memberikan/Melaksanakan Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Kepada Pemangku Kepentingan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1706	2.14.000090	Pemangku Kepentingan yang telah menerima Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	Kegiatan	Memberikan/Melaksanakan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Kepada Pemangku Kepentingan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1707	2.14.000091	Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang telah menerima Orientasi dan Pelatihan Teknis	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1708	2.14.000092	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan	Daerah Melaksanakan/Melaporkan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1709	2.14.000094	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1710	2.14.000095	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Penguatan Program Kerjasama Pendidikan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1711	2.14.000100	Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1712	2.14.000101	PIK-R yang telah mendapat/mengikuti Pengembangan & Perbanyakan Materi Substansi tentang PIK-R, Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Organisasi	Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) yang mendapatkan Pemenuhan Sarana Prasarana berupa Materi Substansi, Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya	0	0	0	0	0	0	18	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1713	2.14.000104	Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah menerima pembinaan dan pengawasan pencatatan	Sertifikat	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	28	28	28	28	28	28	28	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1714	2.14.000105	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Laporan	Daerah melakukan upaya penyebarluasan informasi yang menggunakan melalui Media Massa Cetak dan Elektronik, Media online, Media sosial dan Media tatap muka Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1715	2.14.000107	Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah dilaksanakan	Kegiatan	Melaksanakan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1716	2.14.000108	Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk	Laporan / Dokumen	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	6	6	6	6	8	8	21	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1717	2.14.000109	Sarana KIE Program KKBPK yang Tersedia dan Telah di Distribusikan	Dokumen	Daerah menyediakan dan mendistribusikan sarana KIE Program Bangga Kencana	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1718	2.14.000110	Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersedia	Laporan	Daerah yang menyediakan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1719	2.14.000112	Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang telah terlaksanakan	Kegiatan	Daerah melaksanakan Sarasehan Hasil Pemutakhitan Data Keluarga	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1720	2.14.000113	Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1721	2.14.000117	Tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang / Sertifikat	Daerah yang meningkatkan kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	25	25	25	25	25	23	23	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1722	2.14.000118	Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA, TAMASYA, GENTING, GATI, Sidaya)	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1723	2.14.000119	Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang telah tersedia	Unit	Daerah melaksanakan pemenuhan sarana penunjang pelayanan KB sesuai jenis pelayanan yang diberikan	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1724	2.15.000003	Alat pemberi isyarat lalu lintas	Unit	Perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan	94	100	114	121	122	122	123	Dinas Perhubungan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1725	2.15.000006	Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan	Unit	Alat yang berfungsi sebagai pengendali kecepatan kendaraan bermotor seperti, Speed Bump, Speed Hump, Speed Table dan pembatas lalu lintas . Selain itu juga alat pengaman untuk kendaraan bermotor dalam mengurangi resiko kecelakaan berupa pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas dan jalur pengehentian darurat.	819	1368	612	660	617	556	520	Dinas Perhubungan
1726	2.15.000007	Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	Alat yang berfungsi sebagai pengendali kecepatan kendaraan bermotor seperti, Speed Bump, Speed Hump, Speed Table dan pembatas lalu lintas . Selain itu juga alat pengaman untuk kendaraan bermotor dalam mengurangi resiko kecelakaan berupa pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas dan jalur pengehentian darurat. Fasilitas yang terehabilitasi untuk memastikan kualitas pelayanan	819	1368	612	660	617	556	520	Dinas Perhubungan
1727	2.15.000008	Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi	Unit	Peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor meliputi: a. alat uji rem utama dan rem b. alat uji lampu c. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah Kendaraan d. alat uji e. alat uji tekanan f. alat uji g. alat uji h. alat uji tingkat i. alat uji pengujian j. alat uji kincup roda k. alat uji l. alat uji posisi roda m. alat uji motor n. alat uji o. alat uji sabuk p. alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap gas q. alat uji prestasi Kendaraan r. alat uji s. peralatan dan t. alat uji lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor	11	11	11	11	11	11	11	Dinas Perhubungan
1728	2.15.000040	Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/Kota	Dokumen	Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum dalam Trayek meliputi: a. dokumen b. dokumen Angkutan c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan Angkutan d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang e. tanda identitas perusahaan Angkutan dan f. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum. dan Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan meliputi: a. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan b. fisik Kendaraan dan c. Standar Pelayanan Minimal.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1729	2.15.000067	Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe C	Dokumen	Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1730	2.15.000068	Data Fasilitas Penunjang yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1731	2.15.000071	Data Fasilitas Utama pada Setiap Terminal Tipe C	Dokumen	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1732	2.15.000072	Data Fasilitas Utama yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1733	2.15.000074	Data inspeksi Terminal	Dokumen	Kegiatan pengawasan penyelenggaraan terminal meliputi: a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi: 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perj 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan 3. kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, dan 4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi: 1. persyaratan teknis dan laik 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor 3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita dan 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/ atau papan trayek, dan jenis c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi: 1. pemeriksaan 2. pemeriksaan tanda pengenal dan 3. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza); 4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan dan 5. jam kerja d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi: 1. pemanfaatan fasilitas utama 2. pemanfaatan fasilitas penunjang 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas dan 4. keamanan di dalam Terminal.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1734	2.15.000077	Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	Dokumen	Kegiatan fasilitasi pemenuhan persayaratan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan perolehan izin penyelenggaraan parkir seperti: a.penyiapan Denah marka parkir b.luas area parkir dan perhitungan kapasitas parkir c.persetujuan hasil ANDALALIN (apabila dipersayaratkan).	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1735	2.15.000080	Data Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Rencana Umum Jaringan Trayek Kab/Kota memuat paling sedikit: a. asal dan tujuan setiap Trayek antarkota dalam provinsi merupakan ibukota provinsi, kota, ibukota kabupaten, wilayah strategis provinsi, dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan Kab/ b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten / c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan Kab/ d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe C atau simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta dan e. jumlah kebutuhan dan jenis kendaraan Angkutan Kab/Kota setiap Trayek.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1736	2.15.000085	Data kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penentuan lokasi asal dan tujuan setiap Trayek perkotaan pada kawasan aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan: a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap dan b. penentuan pusat Kawasan Perkotaan aglomerasi. Penentuan tempat persinggahan berupa tempat pemberhentian Mobil Bus dan Mobil Penumpang umum serta penentuan rute setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dengan mempertimbangkan: a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap dan b. kelas jalan. Penentuan jumlah perkiraan jasa Angkutan Penumpang perkotaan untuk setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan: a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap dan b. pembagian moda. Penentuan jumlah kebutuhan kendaraan Angkutan perkotaan setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi jenis, tipe, kapasitas, dan jumlah kendaraan yang harus disiapkan setiap hari serta frekuensi perjalanan yang harus dilayani dalam waktu tertentu. Penentuan jumlah kebutuhan kendaraan Angkutan perkotaan setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap b. panjang Trayek dan waktu tempuh yang dibutuhkan secara selamat dan dan c. jenis kelas pelayanan Angkutan ekonomi dan/atau nonekonomi.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1737	2.15.000086	Data Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan	Dokumen	Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara	4	2	2	2	3	0	1	Dinas Perhubungan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1738	2.15.000087	Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	Dokumen	Pengujian secara visual paling sedikit meliputi: a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan b. nomor dan tipe motor c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar e. kondisi sistem baterai, untuk Kendaraan Bermotor menggunakan energi penggerak f. kondisi dan posisi pipa pembuangan, kecuali Kendaraan Bermotor listrik g. ukuran roda dan ban serta kondisi h. kondisi sistem i. kondisi sistem rem j. kondisi penutup lampu dan alat pemantul k. kondisi panel instrumen pada dashboard l. kondisi kaca m. kondisi o. keberadaan dan kondisi perlengkapan p. rancangan teknis kendaraan sesuai q. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk Mobil dan r. kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk Mobil Barang bak muatan tertutup. n. bentuk	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1739	2.15.000114	Data pelaksanaan sosialisasi pada media cetak	Dokumen	pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Perhubungan
1740	2.15.000115	Data pelaksanaan sosialisasi media elektronik	Dokumen	pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media digital	0	0	4	4	4	4	5	Dinas Perhubungan
1741	2.15.000116	Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat	Dokumen	pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, media digital dan penyampaian langsung kepada masyarakat	8	13	2	1	1	3	1	Dinas Perhubungan
1742	2.15.000120	Data pemberian kemudahan bagi penyandang cacat	Dokumen	Fasilitas Khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut 1. Trotoar Jalan a. Bahan : Stabil, kuat, bertekstur halus, tidak licin pada kondisi kering maupun b. Tekstur Ubin : Ubin garis-garis, ubin bulat/dot c. Ukuran dasar ruang (terlampir) d. Kelandaian : 1 satuan vertical : 10 satuan horizontal, ada jalur penghubung (ramp) 2. Tempat Penyeberangan a. Penyeberangan sebidang dilengkapi dengan suara/bunyi yang berintegrasi dengan alat pemberi isyarat lalu b. Penyeberangan tidak sebidang menggunakan lift, escalator, tangga dengan kelandaian (1 satuan vertical : 10 satuan horizontal). 3. Tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum disertai (ramp) dengan lebar 90 4. Tempat Parkir (desain terlampir); 5. Angkutan Umum Tersedianya fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas (Minimal 1 tempat duduk).	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1743	2.15.000125	Data penetapan lokasi dan jenis APILL yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan	Dokumen	Dokumen inventarisasi yang memuat informasi spesifik mengenai titik koordinat, jenis (lampu/simpang), jumlah, dan kondisi teknis lampu lalu lintas yang terpasang di ruas jalan atau simpang, guna mengatur lalu lintas.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1744	2.15.000126	Data penetapan lokasi dan jenis marka yang dipasang pada ruang dan/atau persimpangan	Dokumen	Dokumen perencanaan perhubungan yang merinci lokasi spesifik dan jenis tanda (marka jalan) yang dipasang di badan jalan untuk mengatur lalu lintas. Data ini berbasis perencanaan teknis dan mencakup hasil analisis situasi lalu lintas.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1745	2.15.000127	Data penetapan lokasi dan jenis rambu yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan	Dokumen	Dokumen inventarisasi teknis yang mencatat rincian jenis (peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk), jumlah, dan lokasi geografis rambu lalu lintas yang telah dipasang pada ruas jalan maupun persimpangan tertentu.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1746	2.15.000130	Data pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan	Dokumen	Sekumpulan informasi terukur mengenai penggunaan sistem, perangkat, dan strategi untuk mengatur pergerakan pengguna jalan (kendaraan dan pejalan kaki) agar berjalan dengan aman, tertib, dan efisien di titik pertemuan dua ruas jalan atau lebih.	1	3	1	0	0	0	1	Dinas Perhubungan
1747	2.15.000131	Data pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan	Dokumen	Variabel atau parameter terukur yang digunakan untuk mengatur, mengarahkan, dan mengoptimalkan pergerakan kendaraan serta pejalan kaki demi mencapai keamanan dan kelancaran transportasi.	0	0	0	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1748	2.15.000143	Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dokumen	Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi: a. alat pemberi isyarat lalu b. rambu lalu c. marka d. alat penerangan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1749	2.15.000144	Data Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: a. Rambu Lalu b. Marka c. Alat Pemberi Isyarat Lalu d. alat penerangan e. alat pengendali dan pengaman Pengguna f. alat pengawasan dan pengamanan g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang dan h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1750	2.15.000168	Data Ruang Lalu Lintas	Dokumen	Hasil pemetaan kebutuhan ruang berdasarkan potensi perpindahan orang dan/atau barang	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
1751	2.15.000172	Data Sumber Daya Manuai Pengelola pada setiapTerminal Tipe C	Dokumen	Pengoperasian Terminal dikoordinasikan oleh koordinator satuan pelayanan Terminal yang dibantu oleh petugas terminal yang meliputi: a. kepala urusan layanan tata b. kepala urusan sistem c. petugas d. petugas pencatat kedatangan, keberangkatan, dan faktor e. pengatur lalu f. Penyidik Pegawai Negeri g. penguji kendaraan dan h. petugas komersial.	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Perhubungan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1752	2.15.000173	Data Terminal	Dokumen	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket. Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1753	2.15.000176	Data Terminal Penumpang Tipe C	Dokumen	Data terminal penumpang sebagai simpul transportasi daerah meliputi: a. nama terminal b. tipe terminal c. lokasi d. status pengelolaan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1754	2.15.000177	Data Terminal yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket. Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1755	2.15.000187	Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	Bersifat lintas sektor dan harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (stakeholders). Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks yang memerlukan keterpaduan, dibahas dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1756	2.15.000189	Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.	4	2	2	2	4	4	1	Dinas Perhubungan
1757	2.15.000210	Marka Jalan	Unit	Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas	123755	123755	123755	123755	123755	123755	123755	Dinas Perhubungan
1758	2.15.000211	Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas yang terehabilitasi untuk memastikan kualitas layanan	123755	123755	123755	123755	123755	123755	123755	Dinas Perhubungan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1759	2.15.000224	Rambu Lalu Lintas	Unit	Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan	1704	1753	1890	1890	1899	1899	1899	Dinas Perhubungan
1760	2.15.000225	Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan untuk menjaga kualitas layanan dari perlengkapan jalan tersebut	1704	1753	1890	1890	1899	1899	1899	Dinas Perhubungan
1761	2.15.000232	Rencana induk terminal	Dokumen	Dokumen rencana pengembangan masing-masing terminal penumpang di masa yang akan datang	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1762	2.15.000245	Marka Jalan	Meter	Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas	123755	123755	123755	123755	123755	123755	123755	Dinas Perhubungan
1763	2.15.000246	Data indentifikasi masalah lalu lintas	Dokumen	Bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan memperhatikan 1. penggunaan ruang 2. kapasitas 3. tata guna lahan pinggir 4. perlengkapanjalan yang berkaitan langsung dengan 5. pengaturan lalu 6. kinerja lalu dan atau 7. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1764	2.15.000247	Data inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas	Dokumen	Bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan, meliputi 1. volume lalu 2. komposisi lalu 3. variasi lalu 4. distribusi 5. pengaturan arus lalu 6. kecepatan dan tundaan lalu 7. kinerja perlengkapan jalan, 8. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1765	2.15.000253	Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas	Dokumen	Bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi 1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan dan 2. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur	4	2	0	0	0	0	1	Dinas Perhubungan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1766	2.15.000257	Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor	Dokumen	Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di b. dan/atau c. rekaman peralatan elektronik Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi: a. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana dan b. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu. (2) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1767	2.15.000267	Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)	Lokasi	Merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah. ZoSS dinyatakan dengan perlengkapan jalan terdiri atas: a. Rambu lalu lintas b. Marka Jalan c. Alat Pemberi Isyarat Lalu dan d. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan e. Alat Penerangan Jalan f. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan kaki berupa Trotoar dan penyandang cacat g. Rambu perintah berupa perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk h. Alat Pengandali dan Pengaman pengguna jalan berupa pulau lalu lintas atau pagar pengaman jalan i. Tempat pemberhentian bus dengan teluk& dan j. Marka jalan berupa paku jalan	4	4	4	4	7	7	7	Dinas Perhubungan
1768	2.15.000270	Halte	Unit	Tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang , umumnya dilengkapi dengan ruang tunggu yang beratap, tetapi lebih kecil daripada stasiun	1	1	1	1	1	1	30	Dinas Perhubungan
1769	2.15.000271	Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki	Unit	Lajur dengan tanda setrip putih pada jalan tempat pejalan kaki menyeberang jalan	104	104	104	104	104	104	104	Dinas Perhubungan
1770	2.15.000272	Dokumen Pengawasan awak kendaraan bermotor umum	Dokumen	Dokumen pengawasan awak kendaraan bermotor umum meliputi: 1. pemeriksaan 2. pemeriksaan tanda pengenal dan 3. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza); 4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan dan 5. jam kerja	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Perhubungan
1771	2.15.000274	Alat Penerangan Jalan	Unit	Lampu penerangan jalan yang dipasang untuk menerangi jalanjalan umum, PJU dipasang agar masyarakat pengguna jalan dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman	5538	5538	5538	5566	5716	5777	5806	Dinas Perhubungan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1772	2.15.000276	Data Prasarana Jalan	Dokumen	Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan prasarana jalan berupa: 1. trotoar 2. halte 3. tempat penyeberangan pejalan kaki 4. lajur sepeda 5. fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas dan usia lanjut (kelompok rentan)	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1773	2.15.000320	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1774	2.15.000321	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	Bukti lulus uji tipe paling sedikit a. Keputusan Direktur b. c. Hasil dan d. Foto kendaraan bermotor	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1775	2.15.000322	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang telah disahkan oleh Kepala Dinas sesuai Syarat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1776	2.15.000403	Data Laporan hasil pengawasan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Laporan	Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum dalam Trayek meliputi: a. dokumen b. dokumen Angkutan c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan Angkutan d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang e. tanda identitas perusahaan Angkutan dan f. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum. dan Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan meliputi: a. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan b. fisik Kendaraan dan c. Standar Pelayanan Minimal.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1777	2.15.000406	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Data laporan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1778	2.15.000408	Data penyelenggaraan pengujian berkalan kendaraan bermotor	Dokumen	Data laporan jumlah kendaraan wajib uji sesuai kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1779	2.15.000409	Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji	Dokumen	Data laporan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1780	2.15.000411	Pengaman Perlintasan Sebidang atau Portal Pengaman Pengguna Jalan	Unit	Terdiri dari pengaman perlintasan berpintu dan tidak berpintu. Pengaman perlintasan berpintu terdiri dari: a. Pintu perlintasan manual mekanik: b. Pintu perlintasan manual c. Pintu perlintasan elektrik.	0	0	5	5	5	7	7	Dinas Perhubungan
1781	2.15.000412	Alat Pendeteksi Kereta Api	Unit	Berfungsi untuk mengetahui kereta api yang akan melintas di perlintasan sebidang.	0	0	5	5	5	7	7	Dinas Perhubungan
1782	2.15.000413	Panic Button/ Emergency Lamp	Unit	Alat pendeteksi rintang jalan di perlintasan sebidang, untuk menginformasikan kepada Masinis (ASP) yang akan melintas di perlintasan melihat Cahaya/Emergency untuk segera mem perlam bat kecepatan dan berhenti sebelum titik perlintasan.	0	0	5	5	5	7	7	Dinas Perhubungan
1783	2.15.000414	Pos Jaga	Unit	Bangunan Pos yang digunakan sebagai tempat untuk operasional Petugas JPL dalam menjalankan tugas.	0	0	5	5	5	7	7	Dinas Perhubungan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1784	2.15.000416	Rambu Peringatan	Unit	Rambu peringatan yang dipasang pada perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api adalah: a. Rambu peringatan pintu perlintasan sebidang kereta b. Rambu peringatan pintu perlintasan sebidang kereta api tanpa c. Untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan dapat dipasang rambu tambahan tentang jarak lokasi kritis dengan perlintasan d. Rambu peringatan dengan kata-kata yang menyatakan agar berhati -- hati mendekati perlintasan kereta e. Rambu yang menyatakan adanya rintangan atau objek berbahaya pada sisi jalan.	26	26	26	26	26	26	26	Dinas Perhubungan
1785	2.15.000417	Rambu Larangan	Unit	Rambu larangan yang dipasang pada perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api, terdiri dari: a. Rambu larangan berhenti terus karena wajib berhenti sesaat dan/atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah b. Rambu larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal sebelum mendapatkan kepastian selamat dari c. Rambu larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur ganda sebelum mendapatkan kepastian selamat dari konflik.	14	14	14	14	14	14	14	Dinas Perhubungan
1786	2.15.000419	Pita Penggaduh	Meter	Merupakan kelengkapan pada jalan yang berfungsi sebagai: a. Mengurangi kecepatan b. Mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus c. Melindungi penyeberang d. Mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	Dinas Perhubungan
1787	2.15.000420	Yellow Box	Meter	Merupakan marka kotak berwarna kuning yang ditempatkan pada perlintasan sebidang untuk mencegah penumpukan kendaraan di atas perlintasan sebidang yang diakibatkan pengguna jalan tidak mau mengalah ketika kereta api akan melintas atau pintu perlintasan sudah tertutup.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
1788	2.15.000421	Penjaga Perlintasan Kereta Api	Orang	Orang yang menjaga perlintasan kereta api yang memiliki kompetensi dan kecakapan untuk menjaga perlintasan kereta api.	0	0	20	20	20	28	28	Dinas Perhubungan
1789	2.16.000067	Nama Domain Pemerintah Daerah	Domain	-Merupakan perhitungan Jumlah Nama Domain Pemerintah Daerah - Nama Domain Pemerintah Daerah adalah alamat resmi pemerintah daerah, layanan publik/layanan administrasi pemerintahan, atau layanan kegiatan berskala nasional/internasional yang telah didaftarkan dan menggunakan Nama Domain .go.id	2	2	2	2	2	2	6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1790	2.16.000068	Nama Sub Domain Pemerintah Daerah	Sub Domain	-Merupakan perhitungan Jumlah Sub Domain Pemerintah Daerah - Nama Sub Domain Pemerintah Daerah adalah penggunaan nama sub domain dari domain .go.id pemerintah daerah yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah, termasuk layanan SPBE dan kegiatan di daerah	339	354	364	369	397	403	387	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1791	2.16.000070	Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen	- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur infrastruktur adalah bagian dari arstitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait infrastruktur SPBE yang digunakan dan/atau dibangun Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	0	0	0	1	1	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1792	2.16.000071	Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen	- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur aplikasi adalah bagian dari arstitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait aplikasi SPBE yang digunakan, dibangun dan/atau dikembangkan Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	0	0	0	1	1	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1793	2.16.000072	Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen	-Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait peta rencana SPBE Pemerintah Daerah - Peta Rencana SPBE pemerintah daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah	0	0	1	1	1	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1794	2.16.000073	Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen	- Perhitungan Jumlah Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah - Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah tersebut telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah. - Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing. - Dinas mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang anggaran dan keuangan daerah	0	0	0	2	0	2	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1795	2.16.000074	Penyusunan proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo	Dokumen	-Perhitungan Jumlah proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo yang telah disusun - Proses Bisnis yang dimaksud terbatas hanya di lingkungan Dinas Kominfo -Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing - Penyusunan Proses Bisnis berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.	16	16	73	54	54	9	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1796	2.16.000075	Data dan informasi dibagipakaikan	Data	- Jumlah perhitungan Data informasi yang dibagipakaikan - Data dan Informasi yang dibagipakaikan adalah Data dan informasi Pemerintah Daerah mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain	3083	3094	3094	3356	3356	3384	1910	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1797	2.16.000076	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. - Pusat Data nasional merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung - Pusat Data nasional terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.	0	0	0	9	22	22	69	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1798	2.16.000077	Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional	Unit	-Perhitungan Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional - Pusat Data yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.	0	0	0	0	1	1	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1799	2.16.000078	Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional - Pusat Komputasi adalah Pusat Komputasi adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu. - Pusat Komputasi terdiri dari laboratorium komputer, ruang server farm, dan workstation farm.	0	0	4	4	5	5	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1800	2.16.000080	Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat komputasiyang diselenggarakan pemerintah daerah	0	0	0	4	4	5	5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1801	2.16.000081	Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1802	2.16.000083	Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota - Dinas di tingkat Pemerintah Daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam Pemerintah Daerah kabupaten/kota. - Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	0	30	30	30	30	36	36	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1803	2.16.000085	Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah daerah -Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah -Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	0	0	0	0	0	9	5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1804	2.16.000086	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah. - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan olehPemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1805	2.16.000087	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi	- Keterhubungan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan SPLP -Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo	0	0	0	0	0	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1806	2.16.000088	Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda	Mbps	- Perhitungan Jumlah Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda - Kapasitas kecepatan bandwith adalah kapasitas kecepatan jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan internet untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik	0	1000	1000	1500	2000	2000	2000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1807	2.16.000089	Perangkat Daerah yang memiliki akses internet	Perangkat Daerah	- Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses internet - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0	30	30	30	30	36	36	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1808	2.16.000090	Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Penyediaan layanan akses internet terhadap fasilitas layanan dasar yang mejadi kewenangan Provinsi (SMA/SMK/SLB, RSUD) / Kabupaten/Kota (SD/SMP,Puskesmas) dengan kualitas layanan dan keamanan jaringan internet yang sama merata baik di kota besar ataupun yang di daerah pelosok.	0	30	30	30	30	36	36	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1809	2.16.000091	Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Titik	- Perhitungan area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Titik Lokasi) - Dinas Kominfo melakukan penyediaan internet di area publik dengan penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Area publik tersebut antara lain jalan, pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota, taman rekreasi, dan lain-lain. - Daerah menyelenggarakan Infrastruktur Pasif sesuai PP 46 Tahun 2021	0	650	650	650	651	651	654	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1810	2.16.000092	Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah	Aplikasi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan pemerintah daerah. - Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat atau Pemerintah Daerah lain	0	0	0	0	0	106	105	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1811	2.16.000093	Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo	Aplikasi	Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Komdigi melalui mekanisme Pendaftaran PSE Lingkup Publik.	0	22	25	27	30	35	35	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1812	2.16.000094	Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Aplikasi	-Perhitungan aplikasi umum yang telah dimanfaatkan - Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB	1	2	2	2	2	3	4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1813	2.16.000095	Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	-Perhitungan Jumlah layanan Pemda yang memanfaatkan Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Pemda -Portal Pelayanan Publik portal pelayanan publik Pemerintah Daerah yang terdiri atas semua pelayanan publik di setiap pemerintah daerah provinsi dan semua pemerintah daerah kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut. -Portal Administrasi Pemerintahan merupakan portal yang mengintergasikan layanan administrasi pemerintahan yang mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. - Portal data nasional merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.	26	29	33	36	38	40	43	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1814	2.16.000096	Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan	-Jumlah Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda - Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1815	2.16.000097	Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan	-Jumlah Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda - Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.	92	95	99	102	104	106	105	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1816	2.16.000098	SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda	Surat Keputusan	-Perhitungan Jumlah SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda - Dokumen tersebut antara lain SK	0	2	2	2	3	3	3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1817	2.16.000099	Server yang dikelola pemerintah daerah	Unit	Jumlah server yang dikelola pemerintah daerah	6	9	9	10	10	10	10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1818	2.16.000100	Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah	Persentase	persentase penggunaan server pemerintah daerah dibandingkan dengan kapasitas total server pemerintah daerah	30	33	40	42	45	48	57	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1819	2.16.000101	Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	- jumlah data storage yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras media penyimpanan TIK adatah data sotrage yang dapat diakses dengan metode akses data sharing Direct Attached Storage/DAS atau Network Attached Storage/NAS.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1820	2.16.000102	Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	- Jumlah perangkat keras jaringan TIK yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras jaringan TIK adalah jenis jaringan TIK yang terdiri dari Network/Communication Device yang digunakan (Switch L2, Switch L3, Switch L4, Switch L7, Multilayer Switch, Router, Wireless equipment, atau Transmission equipment)	121	187	197	291	334	344	354	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1821	2.16.000103	Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	- Jumlah perangkat keras keamanan TIK yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras keamanan TIK adalah perangkat keamanan TIK yang memiliki jenis dari security device (Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless Intrusion Prevention and Detection System, Unified Threat Management, atau Network Access Control)	0	1	2	2	2	2	2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1822	2.16.000104	Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	- Jumlah perangkat keras peripheral TIK yang digunakan pemerintah daerah. - Perangkat keras peripheral TIK adalah perangkat pendukung TIK yang memiliki jenis dari Periferal Input, Output, Input/Output	3	134	468	488	498	508	518	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1823	2.16.000105	Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE	Dokumen	-jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE -Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1824	2.16.000106	Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE	Dokumen	- jumlah dokumen Manajemen Layanan SPBE - Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.	0	0	0	0	0	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1825	2.16.000107	SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK	Orang	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi	54	66	66	67	70	79	124	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1826	2.16.000108	Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	- Perhitungan jumlah Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas -Pedoman Program Kota Cerdas merupakan pedoman program konsep pengelolaan kota/kabupaten berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi, dan melibatkan partisipasi masyarakat.	1	2	2	2	6	6	6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1827	2.16.000109	Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Inovasi	- Perhitungan jumlah Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas -Inovasi Program Kota Cerdas merupakan perubahan cara,metode, teknologi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program atau layanan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan dampak positif kepada masyarakat	21	28	35	36	59	59	59	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1828	2.16.000110	Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE	Orang	-Perhitungan Jumlah pengguna SPBE yang mengikuti Promosi Literasi SPBE - Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.	100050	111655	113411	123042	148136	167694	233341	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1829	2.16.000111	Audit TIK internal	Dokumen	-Jumlah dokumen Audit TIK internal - audit TIK internal dilaksanakan secara periodik oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal dan dapat melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara dari unit kerja lain yang memiliki kompetensi Audit TIK	0	0	2	2	3	4	6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1830	2.16.000112	Audit TIK eksternal	Dokumen	-Jumlah dokumen Audit TIK eksternal - Pelaksanaan Audit TIK mengacu kepada PM Kominfo Nomor 16 tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK	0	0	2	2	2	2	2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1831	2.16.000113	Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Orang	-Merupakan perhitungan jumlah orang yang terpapar informasi - Khalayak yang terpapar informasi adalah orang yang mendapatkan informasi terkait Peraturan bidang IKP	1329	1093	890	720	1015	1040	3356	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1832	2.16.000114	Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor	Aduan	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor - Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara	36	14	13	9	143	157	276	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1833	2.16.000115	Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR	Aduan	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll)	102	116	75	110	78	131	23	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1834	2.16.000116	Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah	Kanal	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll)	4	4	4	4	4	4	5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1835	2.16.000117	Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau	Laporan	1. Laporan Isu publik memuat isu sektoral yang sedang berkembang di masyarakat dengan kategorisasi isu: Polhukam, PMK, Perekonomian, Maritim dan Investasi 2. Mengolah isu publik dengan penerapan analisis: sentimen, situasional analysis, dll 3. Menyusun Rekomendasi komunikasi bagi pimpinan 4. Menyusun agenda setting komunikasi publik Pemda dan mengusulkan agenda komunikasi yang menjadi prioritas 5. Satuan dimaksud berupa laporan/minggu [0 -7]	0	0	0	0	0	257	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1836	2.16.000120	Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	-Perhitungan Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun - strategi komunikasi memuat: a. tujuan komunikasi b. analisis situasi lingkungan internal dan c. pemetaan isu dan pemangku d. Perancangan program komunikasi e. Pelaksanaan program komunikasi publik berdasarkan waktu yang telah f. evaluasi program komunikasi publik. Dalam hal terjadi komunikasi krisis maka penanganannya sesuai SOP komunikasi krisis	0	0	0	1	2	12	12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1837	2.16.000121	Komunikasi krisis yang telah dikelola	Laporan	-Jumlah komunikasi krisis yang telah dikelola - Komunikasi krisis merupakan komunikasi yang betujuan untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah - Satuan laporan yang diamksud adalah laporan kasus	0	0	0	0	0	4	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1838	2.16.000124	Konten Foto	Konten Digital	- Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Foto adalah konten hasil tangakapan kamera	23130	25890	27180	22800	27960	26040	703	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1839	2.16.000125	Konten Teks	Konten	- Perhitungan Jumlah konten teks - Konten Teks adalah konten berisikan karya tulis yang menghadirkan informasi di dalamnya	1554	3013	2512	2612	401	638	828	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1840	2.16.000126	Konten Grafis	Konten	- Perhitungan Jumlah konten grafis - Konten Grafis adalah konten berupa karya visual	0	1056	800	1022	1166	1087	402	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1841	2.16.000127	Konten Audio Video	Konten	- Perhitungan Jumlah konten audio visual - Konten Audio Visual adalah konten dari kombinasi suara dan juga visual yang digunakan untuk menayangkan sebuah informasi atau konteks yang diinginka	87	624	726	564	483	494	248	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1842	2.16.000128	Konten Audio	Konten	- Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Audio adalah konten berbentuk suara yang bisa di dengarkan	1672	2326	2700	2158	2174	1732	318	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1843	2.16.000129	Konten digital yang menggunakan bahasa setempat	Konten	-Jumlah Konten digital yang di produksi dengan menggunakan bahasa setempat untuk berinteraksi - Konten digital yang di produksi dengan menggunakan bahasa setempat/dialek setempat untuk berinteraksi	0	0	0	8	6	5	4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1844	2.16.000130	Pertemuan tatap muka	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah pertemuan tatap muka - Pertemuan tersebut dilakukan secara langsung antara pemberi dan penerima informasi (misal: melalui forum)	0	30	35	35	35	35	16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1845	2.16.000131	Diseminasi melalui Media Berbayar	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui Media Berbayar - Media Berbayar adalah Media Komunikasi Publik yang penggunaannya menggunakan skema berbayar	0	0	0	72	80	96	800	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1846	2.16.000132	Diseminasi melalui Earned Media	Kegiatan	&-Perhitungan jumlah diseminasi melalui earned media - Earned media adalah media yang memiliki konten yang secara sukarela dipublikasikan di platform oleh orang lain -Contoh: postingan ulang diseminasi di akun media sosial masyarakat, review/komentar masyarakat, liputan media (media coverage), dan rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth)	0	0	0	0	0	129	129	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1847	2.16.000133	Diseminasi melalui shared media	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui shared media - Shared media adalah media tidak berbayar , termasuk media sosial populer seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dll	0	0	0	0	0	129	453	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1848	2.16.000134	Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah - Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yaitu saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung dan dikelola oleh Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	2067	709	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1849	2.16.000135	Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal	Orang	& - Jumlah Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal -Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. - Khalayak yang terpapar melalui tatap muka dihitung berdasarkan dari jumlah orang yang mengikuti kegiatan tatap muka	0	0	0	0	56325	113973	113973	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1850	2.16.000136	Media cetak yang dikelola Pemda	Media	-Perhitungan Jumlah Media cetak yang dimiliki dan dikelola Pemda - Media cetak adalah suatu wadah tertulis yang dibuat dengan cara dicetak. Contoh iklan jenis ini antara lain seperti surat kabar, majalah, koran, tabloid, dan lain sebagainya.	0	0	0	0	0	1	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1851	2.16.000140	Radio milik Pemerintah Daerah	Radio	Perhitungan jumlah Radio milik Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1852	2.16.000142	Media Online yang dikelola oleh Pemda	Media	Perhitungan jumlah Media Online yang dikelola oleh Pemda	4	38	38	38	45	61	56	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1853	2.16.000143	Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda	Media	Perhitungan jumlah akun media sosial di selurh Perangkat Daerah Pemda	6	10	20	114	110	116	85	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1854	2.16.000144	Siaran pers yang dibuat	Siaran Pers	-Jumlah Siaran Pers yang dibuat -Siaran pers merupakan ulisan ataupun rekaman yang ditujukan langsung pada media dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa.	0	0	0	0	60	71	65	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1855	2.16.000145	Siaran pers yang dimuat di media	Siaran Pers	Jumlah Siaran pers yang dimuat di media	0	0	0	0	60	71	65	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1856	2.16.000146	Komunitas Informasi Masyarakat	Komunitas	-Jumlah Komunitas Infornasi Masyarakat (KIM) yang terdaftar di platform digital kim.id - KIM meliputi: a. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi dan/atau b. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaaan masyarakat serta melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi.	1	1	3	5	21	21	21	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1857	2.16.000148	Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	-Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan - Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.	0	0	0	0	126	90	140	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1858	2.16.000149	Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	- Perhitungan Jumlah Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah - Informasi berkala adalah nformasi yang diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali	0	46	46	71	116	205	83	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1859	2.16.000150	Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	- Perhitungan Jumlah Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah - Informasiserta merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan.	0	0	0	0	12	14	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1860	2.16.000151	Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	0	0	1	65	100	92	23	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1861	2.16.000152	SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik	Orang	Jumlah SDM Pemda yang memiliki latar belakang Bidang komunikasi publik	21	21	21	21	23	28	89	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1862	2.16.000153	SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Publik	Orang	Jumlah SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di Bidang komunikasi publik	0	0	1	1	1	1	10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1863	2.16.000158	Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Perangkat Daerah	-Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas - Sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas merupakan kegiatan literasi tentang pembangunan kota/kabupaten cerdas bagi seluruh aparatur negara (ASN),masyarakat, pelaku usaha yang berada pada suatu kabupaten/kota	0	3	3	3	24	25	30	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1864	2.16.000162	Jumlah Sebaran Titik Koordinat Blankspot	Titik	- Lokasi Desa yang ditandai dengan sepasang angka atau koordinat. - pengumpulan berbagi pakai data titik layanan publik/OPD/UPT/area publik (pusat kesehatan masyarakat, kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, daerah wisata, sentra UMKM, pasar, pusat kuliner, taman kota) yang tidak memiliki akses dan - data titik wilayah blankspot 4G untuk desa-desa non 3T dan 3T	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1865	2.17.000001	Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Kantor Cabang Pembantu adalah kantor yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman. Dalam hal WIlayah Keanggotaan Kab/Kota setiap Bupati/Wali Kota dlm hal ini didelegasikan kepada Perangkat Daerah yg menangani urusan koperasi dan ukm diwajibkan melakukan fasilitasi bimbingan dan pelindungan usaha simpan pinjam Koperasi pada Kantor Cabang Pembantu dan, melaksanakan pengawasan Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1866	2.17.000002	Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan	Dokumen	Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.	150	150	140	140	130	130	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1867	2.17.000004	Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Cabang adalah kantor yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman. Salah satu bentuk Jaringan Pelayanan.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1868	2.17.000006	Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Cabang Pembantu adalah kantor yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman. Salah satu bentuk jenis Jaringan Pelayanan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1869	2.17.000007	Kantor Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Kantor Cabang Pembantu adalah kantor cabang pembantu yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1870	2.17.000008	Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Kas adalah kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1871	2.17.000010	Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Kantor Kas adalah kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1872	2.17.000014	Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah.	99	73	111	109	105	79	56	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1873	2.17.000015	Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat	Unit Usaha	Akuntabilitas Koperasi adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.	99	73	111	109	105	79	56	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1874	2.17.000016	Koperasi Yang Diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi	Unit Usaha	Jati diri Koperasi meliputi pengertian, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi, seperti dikehendaki oleh anggota dan masyarakat koperasi yang mencerminkan ideologi koperasi.	150	150	140	140	130	130	130	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1875	2.17.000021	Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha	Penghargaan Kesehatan adalah wujud penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi. Bentuk penghargaan kesehatan diberikan dalam bentuk sertifikat kesehatan kepada Koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat sebagaimana dimaksud dalam Permenkop Nomor 9 Tahun 2020	99	73	111	109	105	79	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1876	2.17.000022	Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Koperasi sehat adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus.	99	73	111	109	105	79	56	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1877	2.17.000023	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi	Unit Usaha	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	150	150	140	140	130	130	130	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1878	2.17.000024	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	150	150	140	140	130	130	130	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1879	2.17.000025	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	150	150	140	140	130	130	130	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1880	2.17.000026	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	150	150	140	140	130	130	130	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1881	2.17.000027	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Kemandirian Koperasi adalah suatu koperasi harus berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang didasarkan atas kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Pengawasan atas kemandirian koperasi adalah satu satu faktor kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Koperasi.	150	150	140	140	130	130	130	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1882	2.17.000028	Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Cabang adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1883	2.17.000029	Pembukaan kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Cabang adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1884	2.17.000030	Pembukaan Kantor Cabang untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Kantor Cabang adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1885	2.17.000031	Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Kas adalah kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1886	2.17.000033	SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Orang	Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.	300	300	250	250	200	200	400	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1887	2.17.000034	SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro.	185	174	105	95	416	265	575	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1888	2.17.000036	Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan SDM	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil	246	252	260	268	275	283	286	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1889	2.17.000039	Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro.	175	175	175	175	175	175	105	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1890	2.17.000045	Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan	Unit Usaha	Akses Pembiayaan adalah kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.	0	0	0	0	0	0	1981	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1891	2.17.000046	Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan	Unit Usaha	Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan.	150	150	140	140	130	130	335	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1892	2.17.000047	Unit Usaha Yang memiliki akses pasar	Unit Usaha	Akses pasar adalah kemampuan perusahaan/UMKM untuk memasuki pasar luar negeri dengan menjual barang dan jasanya di negara lain.	0	0	0	0	0	0	10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1893	2.17.000048	Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi	Unit Usaha	Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan. Standardisasi adalah proses menerapkan dan mengembangkan baku teknis berdasarkan kesepakatan berbagai pihak, terutama dalam bidang teknologi dan industri. Pembakuan dapat membantu memaksimalkan kecocokan, keantaroperasian, keamanan, keterulangan, atau mutu.	99	73	111	109	105	79	175	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1894	2.17.000049	Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha	Unit Usaha	Restrukturisasi usaha adalah upaya menata kembali rantai bisnis, Aset dan portofolio asset, struktur keuangan, serta manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing dan lebih sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis Koperasi.	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1895	2.17.000053	Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro dengan usaha besar.	68	68	83	118	161	326	27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1896	2.17.000054	Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	Pembinaan dan Pendampingan Usaha mikro adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.	96	96	96	96	96	109	575	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1897	2.17.000056	Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Usaha Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Koperasi badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.	150	150	140	140	130	130	130	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1898	2.18.000001	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal.	Orang	Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.	100	100	216	368	400	300	350	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1899	2.18.000002	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis.	Orang	Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.	100	100	216	368	400	300	350	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1900	2.18.000004	Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.&	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1901	2.18.000005	Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik.	Dokumen	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1902	2.18.000006	Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.&	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1903	2.18.000010	Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan;	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pelayanan Terpadu Perizinan adalah sistem pelayanan perizinan (izin dan non izin) yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen perizinan dengan transparan dan terpadu pada satu tempat.	4	3	2	2	2	14	11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1904	2.18.000013	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik;	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan berbasis sistem secara elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.	276	350	461	1744	3961	3409	2284	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1905	2.18.000014	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik.	Orang	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan	276	350	461	1744	3961	3409	2284	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1906	2.18.000016	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik;	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pelayanan terpadu perizinan berbasis elektronik adalah Perizinan berbasis sistem secara elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.	276	350	461	1744	3961	3409	2284	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1907	2.18.000017	Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik;	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan berbasis sistem elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.	276	350	461	1744	3961	3409	2284	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1908	2.18.000018	Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.	Dokumen	Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.&	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1909	2.18.000021	Peraturan daerah yang mengatur tentang promosi penanaman modal.	Dokumen	Perumusan strategi Promosi untuk mendorong peningkatan Minat Investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi berdasarkan pada Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1910	2.18.000026	peraturan Kepala Daerah tentang pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah;	Dokumen	Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1911	2.18.000027	Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah.	Dokumen	Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1912	2.18.000028	Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.	Dokumen	Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai nilai ekonomi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1913	2.18.000030	Rencana Minat Investasi di dalam negeri;	Dokumen	Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya. Investasi di dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1914	2.18.000031	Rencana Minat Investasi di luar negeri.	Dokumen	Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya. Investasi di luar negeri adalah investasi asing langsung atau penanaman modal asing, di mana seorang investor pada lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1915	2.18.000032	Unit Usaha yang dilakukan pengawasan.	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya.	6	8	8	10	10	18	26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1916	2.18.000034	Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha.	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.	276	350	461	1744	3961	3409	4573	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1917	2.18.000036	Unit Usaha yang memperoleh insentif di daerah;	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1918	2.18.000037	Unit Usaha yang memperoleh kemudahan berUsaha di daerah.	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Kemudahan Berusaha adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1919	2.18.000038	Unit usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal.	Unit Usaha	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan	2370	1605	1715	2064	2542	1136	1131	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1920	2.18.000040	Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal;	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.	276	350	461	1744	3961	3409	4573	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1921	2.18.000043	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	Kemitraan adalah kerjasama yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara pelaku UMKM dengan usaha besar	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1922	2.19.000064	Pemuda Kader	Orang	Pemuda yang berumur 16-30 tahun di tingkat daerah yang memerlukan pengembangan skill sesuai dengan kriteria tertentu yang dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan/atau forum pengembangan	30	30	50	50	50	50	50	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1923	2.19.000065	Pemuda Pelopor	Orang	Pemuda yang memerlukan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan kepeloporan	30	30	50	50	50	50	50	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1924	2.19.000067	Pemuda wirausaha muda pemula	Orang	wirausahawan berusia muda (16 sampai 30 tahun) yang sedang merintis usahanya	30	30	50	50	50	50	50	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1925	2.19.000068	Pemuda Berprestasi	Orang	Pemuda di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan	3	3	6	6	6	6	6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1926	2.19.000069	Organisasi Kepemudaan	Organisasi	Organisasi kepemudaan yang terdaftar dan aktif untuk terfasilitasi dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	20	30	30	30	30	30	30	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1927	2.19.000070	sarana dan prasarana kepemudaan	Unit	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang tersedia di daerah	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1928	2.19.000071	organisasi kepemudaan berprestasi	Organisasi	Stake holder kepemudaan di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan	2	2	2	2	2	2	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1929	2.19.000072	sentra kewirausahaan pemuda	Sentra	Tersedianya data pusat kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh dan untuk pemuda dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda melalui proses pembelajaran dan pemandirian	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1930	2.19.000073	atlet/olahragawan talenta muda	Orang	Tersedianya atlet/olahragawan usia 12-18 tahun yang dibina melalui PPLP/PPLPD/SKO/induk cabor pengprov/pengkot/kab dan klub olahraga dan usia &18 tahun pada PPLM/PPLD, induk cabor, dan klub olahraga	50	80	80	80	80	80	80	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1931	2.19.000075	atlet/olahragawan disabilitas	Orang	Tersediannya atlet/olahrawagan disabilitas daerah yang mendapatkan pembinaan melalui NPCI Kabupaten/Kota/Provinsi	15	15	20	23	25	45	45	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1932	2.19.000076	kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar satuan pendidikan tingkat menengah	Kegiatan	Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar di daerah pada satuan pendidikan tingkat dasar (Pekan Olahraga Kab/Kota) dan tingkat menengah (Pekan Olahraga Pelajar Daerah)	2	1	2	1	2	1	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1933	2.19.000078	kompetisi/kejuaraan single event	Kegiatan	Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga (Kejurkot/kejuaraan antar klub/kejurda) pada cabang olahraga tertentu di daerah	3	3	5	5	5	5	5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1934	2.19.000081	pelatih olahraga yang bersertifikat	Orang	Tersedianya pelatih olahraga yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikat pelatih di tingkat Provinsi/Kab/Kota	150	150	152	164	164	164	164	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1935	2.19.000082	Organisasi Olahraga	Lembaga	Tersedianya pelatih olahraga yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikat pelatih di tingkat Provinsi/Kab/Kota	30	30	38	38	38	38	38	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1936	2.19.000083	wasit	Orang	Tersedianya wasit/juri yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikasi di tingkat Provinsi/Kab/Kota	15	15	18	19	20	23	23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1937	2.19.000084	Sentra pembinaan Olahraga	Lembaga	Tersedianya SKO, PPLP, PPLPD, PPLD di Provinsi/Kab/Kota	60	60	80	80	80	80	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1938	2.19.000085	Sarana Olahraga	Unit	Tersedianya Sarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota	19	19	20	20	20	20	20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1939	2.19.000086	Prasarana Olahraga	Unit	Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota	19	19	20	20	20	20	20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1940	2.19.000087	Sarana Olahraga Disabilitas	Unit	Tersedianya Sarana pada cabang olahraga unggulan disabilitas di Provinsi/Kabupaten/Kota	5	5	6	6	6	6	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1941	2.19.000088	prasarana olahraga disabilitas	Unit	Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan disabilitas di Provinsi/Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1942	2.19.000089	organisasi kepramukaan	Organisasi	Tersedianya data satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama yang terbentuk di daerah	6	6	8	8	8	8	8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1943	2.19.000090	tenaga pendidik pramuka	Orang	Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa, terdiri atas: a. b. c. dan d. instruktur. Yang telah diberikan sertifikasi kompetensi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan	480	480	500	500	500	500	47	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1944	2.19.000091	kegiatan pramuka	Orang	Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif yang melibatkan peserta didik kepramukaan	14	14	16	16	16	16	16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1945	2.20.000019	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	Metadata Statistik Sektoral adalah Jumlah metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator yang disampaikan kepada Pembina Data Statistik. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.	0	0	24	27	43	60	46	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1946	2.20.000020	Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data	Kegiatan	Jumlah Statistik Sektoral yang dilengkapi standar data yang sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Standar Data	0	0	24	27	43	60	46	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1947	2.20.000021	Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi	Indikator	Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi adalah jumlah indikator statistik statistik sektoral yang mengggukanan kode referensi yang sudah disepakati. Kode referensi adalah kode yang dibahas dan disepakati dalam forum satu data indonesia tingkat pusat.	0	0	24	27	43	60	46	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1948	2.20.000022	Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil	Dokumen	Analisis kebutuhan data adalah proses identifikasi output statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data dan kemungkinan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dibutuhkan. Konfirmasi hasil adalah proses konfirmasi output statistik yang telah dihasilkan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna data.	0	0	24	27	43	60	60	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1949	2.20.000023	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu dibagi dengan kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dimasukkan kedalam penghitungan adalah kegiatan statistik sektoral yang dihasilkan oleh produsen data pada tahun tersebut. Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral adalah Survei yang digunakan untuk identifikasi kebutuhan data statistik sektoral kepada pengguna data.	0	0	70	80	90	95	101	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1950	2.20.000024	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang sudah dimintakan rekomendasi kegiatannya kepada Pembina Data Statistik.	0	0	24	27	43	60	89	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1951	2.20.000025	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang statistik baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain.	250	300	310	320	372	400	105	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1952	2.20.000026	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data	Orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain.	250	300	310	320	372	400	105	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1953	2.20.000028	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan adalah Jumlah OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan dibanding dengan total seluruh OPD.	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1954	2.20.000030	Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data	Laporan	Jumlah Laporan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data adalah jumlah pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata kepada produsen data.	5	5	6	8	9	10	5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1955	2.20.000031	Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data	Laporan	Jumlah Laporan sosialisasi yang dilakukan oleh produsen data atau walidata untuk meningkatkan literasi/pemahaman data statistik pengguna data.	2	4	5	8	9	10	2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1956	2.20.000050	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah	Kegiatan	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPD	0	0	30	35	55	82	98	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1957	2.20.000051	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk	Kegiatan	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPD yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi	0	0	24	27	43	60	46	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1958	2.20.000052	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi 4 prinsip SDI dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral di pemerintah daerah dikalikan 100 persen.	0	0	70	80	90	95	51	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1959	2.20.000053	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya (data/indikator dari kegiatan statistik tersebut) dapat diakses/tersedia di portal data pemda	0	0	24	27	43	60	98	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1960	2.20.000054	Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda	Persentase	Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda adalah persentase pengguna data pengakses portal data pemda yang merasa puas dibandingkan dengan jumlah total pengguna data yang mengakses portal data pemda	80	81	82	84	85	86	89	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1961	2.20.000055	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda dibagi dengan total jumlah kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh Pemda/OPD dikalikan 100 persen	0	0	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1962	2.20.000056	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah dilengkapi dengan dokumen perencanaan kegiatan statistik yang berisikan rancangan setiap tahapan penyelenggaraan statistik, diantaranya mencakup spesifikasi kebutuhan data, rancangan metodologi, instrumen, pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi.	0	0	24	27	43	60	89	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1963	2.20.000057	Persentase kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral	Persentase	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan pemerintah daerah dikali 100 persen.	0	0	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1964	2.20.000058	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dikalikan 100 persen	0	0	70	80	90	95	88	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1965	2.20.000059	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi resmi dari BPS	0	0	24	27	43	60	89	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1966	2.20.000060	Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah	Kegiatan	Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah adalah jumlah penyelenggaraan wadah komunikasi dan koordinasi internal Pemerintah Daerah dan/atau Internal Pemerintah Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan dalam 1 tahun	0	0	1	2	2	2	2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1967	2.21.000001	Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1968	2.21.000002	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	0	1	0	6	8	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1969	2.21.000007	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	15	20	20	20	20	30	22	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1970	2.21.000008	Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	15	20	20	20	20	30	30	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1971	2.21.000009	Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah Laporan penjabaran informasi kebutuhan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	1	1	1	6	4	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1972	2.21.000010	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan dan pemulihan	0	1	1	1	3	2	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1973	2.21.000011	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik	Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis non elektronik dengan tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi non elektronik	0	1	1	1	1	1	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1974	2.21.000012	Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah laporan pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang mencakup pada pengelolaan aset TIK, sumber daya manusia dan manajemen pengetahuan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1975	2.22.000008	Cagar Budaya yang dipublikasikan	Unit	Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1976	2.22.000069	Laporan Pembinaan Pranata Tradisional	Laporan	Pembinaan : Pembinaan berupa latihan, sosialisasi, keikutsertaan dalam event, lomba/ kejuaraan dll	0	5	6	7	8	9	9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1977	2.22.000072	Laporan Pembinaan Lembaga Tradisional	Laporan	Pembinaan : Pembinaan berupa latihan, sosialisasi, keikutsertaan dalam event, lomba/ kejuaraan dll ; Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.	0	5	6	7	8	9	9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1978	2.22.000075	Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Tradisional	Laporan	Pembinaan : Pembinaan berupa latihan, sosialisasi, keikutsertaan dalam event, lomba/ kejuaraan dll ; Sumber daya manusia : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Tradisional : Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.	0	5	6	7	8	9	9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1979	2.22.000092	Lembaga kebudayaan yang dibina	Lembaga	Lembaga Kebudayaan : Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan. - Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1980	2.22.000113	Objek Cagar Budaya yang dikembangkan	Objek	Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	0	40%	40%	50%	60%	70%	70%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1981	2.22.000114	Objek Cagar Budaya yang dilindungi	Objek	Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	0	0	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1982	2.22.000115	Objek Cagar Budaya yang dimanfaatkan	Objek	Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	0	0	0	59	61	63	63	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1983	2.22.000117	Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	Objek	Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1984	2.22.000119	Objek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan	Objek	Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	0	0	0	1	1	1	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1985	2.22.000124	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pemanfaatan	Objek	Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1986	2.22.000125	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pengembangan	Objek	Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. - Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1987	2.22.000126	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan	Objek	Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1988	2.22.000185	Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit	Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan ; Prasarana : Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. - Pembinaan : Pembinaan berupa latihan, sosialisasi, keikutsertaan dalam event, lomba/ kejuaraan dll ; Sejarah : sejarah adalah umpulan benda kebudayaan baik yang bersifat fisik, bersifat tulisan, bersifat lisan, maupun audiovisual untuk membuktikan sejarah.	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1989	2.22.000192	Sumber Daya Manusia Kebudayaan	Orang	SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.	1	1	1	1	1	1	50	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1990	2.22.000234	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)	Dokumen	Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Penyusunan PPKD Provinsi harus berdasarkan dokumen PPKD Kab/Kota. Penyusunan PPKD Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli yang terlibat dalam penyusunan PPKD Kab/kota dalam Provinsi tersebut atau pemangku kepentingan, dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. PPKD disusun dengan tahapan: 1. perencanaan 2. konsolidasi data 3. pengolahan data 4. analisis atas hasil pengolahan data 5. penyusunan naskah 6. penetapan PPKD	0	1	0	0	0	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1991	2.22.000241	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Objek	Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali Penetapan WBTb adalah pemberian status Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi Warisan Budaya Takbenda Penetapan WBTb: 1. Pengusulan OPK yang ingin ditetapkan menjadi WBTb 2. Pengumpulan dokumen pendukung untuk penetapan WBTb 3. Pembahasan usulan oleh tim ahli WBTb 4. Sidang penetapan 5. Rekomendasi penetapan WBTb	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1992	2.23.000095	Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1993	2.23.000096	Jumlah Perpustakaan yang terotomasi	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang menggunakan sistem informasi perpustakaan terintegrasi (Inlislite, SLims, atau sejenisnya)	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1994	2.23.000097	Perpustakaan yang memiliki repositori digital kewenangan kabupaten/kota	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang memiliki sarana penyimpanan dan pelayanan bahan pustaka digital. (Cth. EPrints, DSpace, OJS, aplikasi mobile perpustakaan dan sejenisnya)	0	0	0	0	0	0	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1995	2.23.000098	Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain	0	0	0	0	0	0	5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1996	2.23.000099	Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Dasar sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.	70	70	71	72	72	72	72	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1997	2.23.000100	Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Menengah Pertama sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.	25	25	27	26	26	26	26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1998	2.23.000101	Perpustakaan Kecamatan	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1999	2.23.000102	Perpustakaan Kelurahan/Desa	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.	0	0	0	0	3	10	10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2000	2.23.000103	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah pemustaka /masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	43809	20518	9546	55606	64202	117060	117060	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2001	2.23.000104	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah pemustaka (karyawan/pegawai) yang berkunjung ke perpustakaan khusus yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2002	2.23.000105	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan satuan pendidikan Dasar kewenangan Kabupaten/kota	Orang	Jumlah pemustaka (civitas sekolah) yang berkunjung ke perpustakaan satuan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	153131	61891	14396	64576	78603	92267	92267	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2003	2.23.000106	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota	Orang	Jumlah pemustaka (civitas sekolah) yang berkunjung ke perpustakaan satuan pendidikan menengah pertama yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	115776	24106	32801	47793	46154	44956	44956	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2004	2.23.000107	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Kecamatan	Orang	Jumlah pemustaka/masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan Kecamatan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2005	2.23.000108	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Desa/Kelurahan	Orang	Jumlah pemustaka/masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan Desa/Kelurahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	0	0	0	0	793	793	793	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2006	2.23.000109	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan umum yang berada di wilayah kabupaten/kota	7137	8731	10196	12238	12999	14141	14141	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2007	2.23.000110	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan khusus yang berada di wilayah kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2008	2.23.000111	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah dasar/sederajat yang berada di wilayah kabupaten/kota	125895	121104	107502	118179	104881	94028	94028	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2009	2.23.000112	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah menengah pertama/sederajat yang berada di wilayah kabupaten/kota	40076	24556	25090	24255	30086	39014	39014	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2010	2.23.000113	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Kecamatan	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan kecamatan yang berada di wilayah kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2011	2.23.000114	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Desa/Kelurahan	Judul	Jumlah Semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di Perpustakaan Desa/Kelurahan yang berada di wilayah kabupaten/kota	0	0	0	0	0	10000	10000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2012	2.23.000116	Koleksi khas daerah yang dimiliki perpustakaan kabupaten/kota	Eksemplar	Yang termasuk koleksi khas sebagai berikut : 1. Koleksi buku langka, manuskrip, peta, foto, bentuk mikro, rekaman suara 2. Koleksi khusus sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yaitu bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan 3. Koleksi kearifan budaya etnis nusantara 4. Koleksi tentang negara anggota ASEAN 5. Koleksi tentang negara-negara non ASEAN terutama China, Jepang, Timur Tengah, India, Belanda, dan Australia 6. Koleksi untuk pemustaka berkebutuhan khusus pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah koleksi khas daerah yang dimiliki oleh kab/kota	0	0	84	96	113	119	119	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2013	2.23.000117	koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota	Paket	koleksi budaya etnis nusantara yang mencakup Semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Indonesia baik yang mutahir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan: bahasa, peralatan hidup, mata pencaharian hidup/ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, kesenian, dan budaya Melayu. Kegiatan meliputi hunting data ketersediaan koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ada diwilayah Kab/Kota Pengukurannya dengan menghitung jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersedia di wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2014	2.23.000118	koleksi budaya etnis nusantara yang dimiliki	Eksemplar	koleksi budaya etnis nusantara yang mencakup Semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Indonesia baik yang mutahir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan: bahasa, peralatan hidup, mata pencaharian hidup/ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, kesenian, dan budaya Melayu. Kegiatan meliputi seleksi, pengadaan, pengolahan dan penyiangan koleksi budaya Etnis Nusantara yang ada di wilayahnya Pengukurannya dengan menghitung jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diseleksi dan diadakan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2015	2.23.000119	Jumlah promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/kota	Kegiatan	Kegemaran membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah kegiatan promosi kegemaran membaca di wilayah Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Kab/Kota	17	18	18	20	21	21	21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2016	2.23.000120	Tenaga Teknis Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Umum di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)	6	6	2	2	1	1	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2017	2.23.000121	Tenaga Teknis Perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Khusus di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2018	2.23.000122	Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten/Kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Sekolah Dasar di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)	0	90	77	72	67	123	123	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2019	2.23.000123	Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten/kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)	0	53	54	58	51	80	80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2020	2.23.000124	Tenaga Teknis Perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Kecamatan di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2021	2.23.000125	Tenaga Teknis Perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Desa/Kelurahan di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2022	2.23.000126	Pustakawan pada Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum di wilayah Kabupaten/Kota	6	6	8	11	12	12	12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2023	2.23.000127	Pustakawan pada Perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan khusus di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Khusus di wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2024	2.23.000128	Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten/Kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan menengah di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Sekolah Dasar/sederajat di wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2025	2.23.000129	Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten/kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan khusus di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/sederajat di wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2026	2.23.000130	Pustakawan pada Perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan khusus di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2027	2.23.000131	Pustakawan pada Perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan khusus di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2028	2.23.000132	Anggota perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan umum yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	321	112	318	484	544	424	424	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2029	2.23.000133	Anggota perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan khusus yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2030	2.23.000134	Anggota perpustakaan sekolah dasar binaan Kabupaten/kota	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan satuan Sekolah dasar (SD) /Sederajat yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	22709	18340	16066	17320	16484	16776	16776	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2031	2.23.000135	Anggota perpustakaan sekolah menengah pertama binaan Kabupaten/kota	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan Sekolah Menegah Pertama (SMP) / Sederajat yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	10920	10398	11721	11762	10887	12431	12431	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2032	2.23.000136	Anggota perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2033	2.23.000137	Anggota perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan desa/kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2034	2.23.000138	Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat kabupaten/kota	Orang	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/Kota	95	95	95	122	122	122	122	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2035	2.23.000139	Penggiat literasi binaan kabupaten/kota	Orang	Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca. Duta Baca merupakan sosok inspiratif untuk menjadi motivator dalam membangkitkan kegemaran membaca dan mengampanyekan pembudayaan kegemaran membaca melalui berbagai media. Bunda Baca adalah gelar yang diberikan Perpustakaan Nasional untuk sosok di tiap daerah yang menjadi panutan dalam memajukan serta menumbuhkan minat baca Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah orang yang menjadi pegiat literasi diwilayah Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2036	2.23.000140	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Orang	Masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan dan terlibat dalam kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial	0	0	0	90	175	165	165	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2037	2.23.000141	Jumlah Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial	Orang	Perpustakaan hadir sebagai penyedia layanan yang membuka akses masyarakat pada pengetahuan dan menjadi sarana reproduksi pengetahuan ke dalam aksi nyata yang menyejahterakan perpustakaan yang melakukan replikasi terhadap program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan oleh Perpusnas	0	0	0	0	3	10	10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2038	2.24.000001	Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	&Akusisi Arsip Statis meliputi verifikasi, melakukan penilaian arsip sesuai dengan JRA. Pengolahan Arsip Statis meliputi pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang terdiri dari daftar arsip, inventaris arsip dan guide arsip. Preservasi yang dimaksud meliputi : -Restorasi, -Penyimpanan -Reproduksi/Digitalisasi -Pengujian Arsip Akses Arsip Statis meliputi keterbukaan arsip statis, Aksessibilitas arsip dan pelayanan arsip statis kepada publik.	Ã± 21 ML& dan 2000 arsip foto statis	Ã± 22 ML& dan 2070 arsip foto statis, 10 berkas arsip vital	2,07	13	5579	1978	1978	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2039	2.24.000002	Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	Arsip yang dimaksud meliputi arsip yang telah dilakukan perbaikan arsip dampak bencana	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2040	2.24.000005	Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	Penilaian Arsip adalah proses menentukan nilai arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta karakteristik fisik/nilai instrinsiknya yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi. Pengukuran Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2041	2.24.000006	Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	Pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan SKPD atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi setelah mendapat: 1) Pertimbangan tertulis dari panitia penilai 2) Persetujuan tertulis dari gubenur. Pelaksanaan pemusnahan arsip tersebut menjadi tanggungjawab Unit Kearsipan di satuan kerja perangkat daerah atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi. Pengukuran Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2042	2.24.000007	Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip	Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup meliputi arsip yang mengekspos data diri seseorang, arsip yang sedang digunakan dalam proses hukum, peta perbatasan dll. Kriteria dari arsip tertutup dapat dilihat berdasarkan klasul pada saat penyerahan arsip dan berdasarkan hukum	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2043	2.24.000015	Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	Kegiatan meliputi : - menyusun Berita Acara Hasil alih media dan daftar arsip alihmedia	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2044	2.24.000016	Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Arsip	Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2045	2.24.000017	Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2046	2.24.000018	Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2047	2.24.000019	Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2048	2.24.000020	Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	Arsip	Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2049	2.24.000021	Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip	Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2050	2.24.000027	Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	Informasi arsip yang dipublikasikan di JIKN: 1) Informasi yang bersifat terbuka, sehingga pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) 2) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata, atau jika terdapat kopi digital yang telah disunting atas persetujuan pejabat yang berwenang maka pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) 3) Informasi yang status keterbukaan/ketertutupannya belum ditetapkan karena belum dinilai oleh pejabat yang berwenang, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata.	0	0	0	0	150	150	150	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2051	2.24.000029	Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan	Berkas	Kegiatan meliputi : Pembuatan naskah dinas, pengendalian naskah dinas dan penyajian arsip dinamis	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2052	2.24.000031	Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	Kegiatan meliputi : Pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, pengelolaan arsipvital, terjaga,alih media, penyusutan arsip (pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip statis)	0	0	0	0	4500	4500	4500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2053	2.24.000032	Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Arsip	kegiatan meliputi : identifikasi, pendataan, pelaporan arsip terjaga dan penyerahan salinan otentik arsip terjaga ke ANRI	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2054	2.24.000034	SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan	SOP	Acuan yang digunakan dalam penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2055	2.24.000036	Data Base Arsiparis	Orang	Data berupa jumlah arsiparis dan SDM yang ada dimasing-masing OPD, Jumlah diklat dan Bimtek yang diikuti.	1	9	9	20	22	45	45	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2056	3.25.000012	Data prasarana dan sarana Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Data prasarana dan sarana berdasarkan skala usaha Subsektor Pengolahan Ikan (mikro, kecil, menengah, dan besar) serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2057	3.25.000013	Data prasarana dan sarana pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Data prasarana dan sarana berdasarkan skala usaha Subsektor Pemasaran Ikan (mikro, kecil, menengah, dan besar) serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2058	3.25.000023	Data prasarana dan sarana perikanan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyediaan data dan informasi prasarana dan sarana perikanan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2059	3.25.000032	Data sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyediaan data dan informasi sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2060	3.25.000044	Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	Dokumen	Penyediaan data dan informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2061	3.25.000045	Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	Dokumen	penyediaan data dan informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2062	3.25.000046	Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	Dokumen	Penyediaan data dan informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2063	3.25.000047	Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	Dokumen	penyediaan data dan informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2064	3.25.000050	Data volume dan nilai pemasaran hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Penyediaan data dan informasi volume dan nilai pemasaran hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2065	3.25.000051	Data volume dan nilai pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Penyediaan Data volume dan nilai pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2066	3.25.000065	ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Ton	Data dan Informasi ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	2650	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2067	3.25.000066	ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Ton	Data dan informasi ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	3220,9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2068	3.25.000079	Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	Dokumen	Data dan Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2069	3.25.000080	Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	Dokumen	Data dan Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2070	3.25.000081	Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	Dokumen	Data dan Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2071	3.25.000082	Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	Dokumen	Data dan Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2072	3.25.000114	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas berupa pelatihan teknis dan manajerial usaha budidaya	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2073	3.25.000115	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi	Kelompok	&Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi&	5	5	5	5	5	5	10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2074	3.25.000116	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK berupa diseminasi teknologi terapan untuk peningkatan produktivitas usaha	5	5	5	5	5	5	10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2075	3.25.000117	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Kelompok	&Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan&	5	5	5	5	5	5	10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2076	3.25.000139	Panjang saluran air	Meter	Saluran untuk Pembudidayaan Ikan dibuat untuk menyediakan Air yang memenuhi kuantitas dan kualitas Air sesuai dengan standar dan mengalirkan Air buangan dari wadah Pembudidayaan Ikan.	200	200	200	200	200	200	478	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2077	3.25.000146	pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2078	3.25.000147	pelaku usaha pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2079	3.25.000148	pelaku usaha perikanan skala kecil yang difasilitasi	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha perikanan skala kecil yang difasilitasi	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2080	3.25.000149	pelaku usaha perikanan skala mikro yang difasilitasi	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro yang difasilitasi	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2081	3.25.000154	pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Orang	pembudidaya ikan yang menerapkan usaha budidaya sesuai dengan standar CBIB dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) agar semakin meningkatkan keamanan pangan bagi konsumen.	40	40	40	40	40	50	50	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2082	3.25.000238	unit penyimpanan hasil produksi pembudidayaan ikan	Unit	Unit penyimpanan hasil produksi Pembudidayaan Ikan berupa bangunan yang memenuhi: a. persyaratan dan b. persyaratan dan standar sarana penyimpanan.	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2083	3.25.000241	unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko	Unit Usaha	Jumlah pelaku usaha pemsaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko	1	1	1	1	1	1	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2084	3.25.000242	unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai Skala Usaha	Unit Usaha	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha	1	1	1	1	1	1	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2085	3.25.000245	unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko	Unit Usaha	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko	1	1	1	1	1	1	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2086	3.25.000246	unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha	Unit Usaha	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha	1	1	1	1	1	1	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2087	3.25.004115	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pengolahan hasil perikanan	Dokumen	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di di sub sektor pengolahan hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko sesuai dengan NSPK	0	0	0	0	0	0	9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2088	3.25.004119	Izin Usaha Penunjang Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi	Perizinan berusaha di bidang Usaha penunjang Pengolahan Ikan berupa Rekomendasi Kelayakan Pengolahan oleh Pembina Mutu Daerah	1	1	1	1	1	1	4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2089	3.25.004120	Izin Usaha Penunjang Bidang Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi	Perizinan berusaha di bidang Usaha penunjang Pemasaran Ikan berupa Rekomendasi Kelayakan Pengolahan oleh Pembina Mutu Daerah	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2090	3.25.004167	Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan (SIUP SIUP dan SIUP Pembenihan dan Pembesaran)	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan (SIUP SIUP dan SIUP Pembenihan dan Pembesaran)	0	0	0	0	0	0	30	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2091	3.25.004168	Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1	1	1	1	1	1	30	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2092	3.25.004189	pos kesehatan ikan terpadu	Unit	Jumlah pos kesehatan ikan terpadu	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2093	3.26.000014	Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Terkait kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	Berdasar UU 23/2014 dan PP 12/2017, Fasilitasi merupakan bagian dari pembinaan. Sehingga Fasilitasi didefinisikan sebagai pemberian dukungan administratif, teknis, sarana prasarana, informasi, dan/atau pendampingan oleh Pemerintah Daerah kepada pelaku kebudayaan, pelaku pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengembangan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Terkait adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimiliki oleh Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran, yang dalam konteks kebudayaan dan ekonomi kreatif difasilitasi perlindungan dan pemanfaatannya oleh pemerintah daerah. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2094	3.26.000015	Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	Berdasar UU 23/2014 dan PP 12/2017, Fasilitasi merupakan bagian dari pembinaan. Sehingga Fasilitasi didefinisikan sebagai pemberian dukungan administratif, teknis, sarana prasarana, informasi, dan/atau pendampingan oleh Pemerintah Daerah kepada pelaku kebudayaan, pelaku pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengembangan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Hak Kekayaan Intelektual) adalah hak hukum yang yang diberikan kepada pencipta suatu karya dalam rangka perlindungan, penghargaan, dan nilai ekonomi. HAKI terdiri dari hak cipta, merek, resep dagang, paten, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, varietas tanaman.	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2095	3.26.000016	Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	Hak Kekayaan Industri adalah Hak eksklusif yang diberikan oleh negara atas invensi, merek, desain, atau bentuk kekayaan industri lainnya melalui mekanisme pendaftaran sesuai peraturan perundang-undangan.	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2096	3.26.000022	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri	Dokumen	Mengidentifikasi awareness masyarakat dalam negeri terkait Destinasi Pariwisata (yang berada di bawah naungan kabupaten/kota)	2	2	2	2	2	2	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2097	3.26.000023	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaLuar Negeri	Dokumen	Mengidentifikasi awareness tourist asing terkait Destinasi Pariwisata Daerah (yang berada di bawah naungan kabupaten/kota)	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2098	3.26.000026	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri	Dokumen	melakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan dalam negeri	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2099	3.26.000027	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Luar Negeri	Dokumen	melakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan luar negeri	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2100	3.26.000031	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam Negeri	Dokumen	memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media cetak dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2101	3.26.000032	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Luar Negeri	Dokumen	memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media cetak luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2102	3.26.000033	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri	Dokumen	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektonik dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2103	3.26.000034	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri	Dokumen	memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektonik luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2104	3.26.000035	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri	Dokumen	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media luar ruang dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2105	3.26.000036	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar Negeri	Dokumen	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media luar ruang luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2106	3.26.000037	Dokumen Kemitraan Pariwisata Dalam Negeri	Dokumen	Kemitraan adalah kesepakatan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan pariwisata dalam negeri (pemerintah daerah lain, pelaku usaha, asosiasi, komunitas, perguruan tinggi, dan/atau lembaga terkait) dalam rangka pengembangan destinasi, promosi, pemasaran, penguatan kapasitas, atau pengelolaan pariwisata.	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2107	3.26.000039	Dokumen Kerja Sama Pariwisata Dalam Negeri	Dokumen	Kerjasama adalah kerjasama yang dilakukan dinas dalam rangka pengembangan Pariwisata dan ekraf.	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2108	3.26.000041	Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	Usaha pariwisata adalah usaha yang tersertifikasi melalui lembaga OSS sebelum beroperasi.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2109	3.26.000044	Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	Melakukan kajian dan penyusunan dokumen RIPPARDA Provinsi sesuai dengan Permenparekraf No 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPPARDA	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2110	3.26.000054	Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kawasan	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif. Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. infrastruktur dan b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur fisik adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi& adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2111	3.26.000056	Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan	Sertifikasi Kompetensi subsektor Ekonomi Kreatif adalah kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi yag dilakukan LSP P3 Sub Sekor Ekonomi Kreatif terhadap SDM Ekonomi Kreatif dengan satuan orang, berdasarkan NSPK Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 - 2025	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2112	3.26.000144	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota	Lokasi	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang tercantum/masuk dalam RIPPARKAB/KOTA	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2113	3.26.000163	Data Kondisi SDM Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata	Data	Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2114	3.26.000166	Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata	Dokumen	Tersusunnya data jumlah anggota masyarakat, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi masyarakat di destinasi Pariwisata	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2115	3.26.000167	Data Kondisi Masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota	Dokumen	Tersusunnya data jumlah anggota masyarakat, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2116	3.26.000171	Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi	Mengidentifikasi daya tarik wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam/budaya/buatan di lingkup Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daya Tarik Wisata Unggulan melalui SK Kepala Daerah	5	5	5	5	5	5	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2117	3.26.000172	Data Kondisi SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan	Dokumen	Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2118	3.26.000174	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Destinasi	&Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di destinasi pariwisata Kabupaten/Kota, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.&	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2119	3.26.000175	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Kawasan	&Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.&	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2120	3.26.000188	Amenitas pariwisata yang berkembang di Kab/Kota	Dokumen	Akomodasi, usaha makmin, usaha perjalanan, toko souvenir dan amenitas pariwisata lain yang berkembang karena adanya aktivitas wisata	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2121	3.26.000193	Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata Kab/kota	Dokumen	Tersusunnya data jumlah anggota masyarakat, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi masyarakat di destinasi Pariwisata Kab/kota	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2122	3.26.000195	Standar kegiatan usaha pariwisata berbasis risiko	Kegiatan Usaha	Standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor pariwisata merupakan standar usaha pariwisata yang mencakup sarana, organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan, persyaratan produk, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan Pengawasan.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2123	3.26.000196	Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor	Laporan	17 subsektor ekonomi kreatif diantaranya yaitu Kriya, Musik, Seni Rupa, Seni Pertunjukan, Fesyen, Kuliner, Fotografi, Pengembang Permainan, Desain Interior, Desain Produk, Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, Periklanan, Penerbitan, Televisi dan Radio, Aplikasi, Film, Animasi dan Video	17	17	17	17	17	17	17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2124	3.26.000202	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2125	3.26.000214	Data jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola kawasan strategis pariwisata provinsi melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)	1	1	1	1	1	1	20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2126	3.26.000217	Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2127	3.26.000218	Daya jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2128	3.26.000221	Data jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat	1	1	1	1	1	1	20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2129	3.26.000222	Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2130	3.26.000225	Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2131	3.26.000226	Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2132	3.26.000229	Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	Memberikan fasilitasi Pelatihan (re-skilling, up-skilling, new-skilling), Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	9	9	9	9	9	9	9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2133	3.26.000245	Data masyarakat memahami tentang tata cara Pengembangan Pariwisata setelah difasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan	Dokumen	Melaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2134	3.26.000246	Data kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yang telah dilakukan	Dokumen	Melaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2135	3.26.000249	Data SDM yang memiliki kompetensi setelah mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi pelaku ekonomi kreatif. Selanjutnya peserta PBK akan difasilitasi untuk sertifikasi kompetensinya	9	9	9	9	9	9	9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2136	3.26.000250	Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif setelah mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)	9	9	9	9	9	9	9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2137	3.26.000262	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Promosi	Kegiatan pendukungan pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya yang berbasis kekayaan intelektual, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022 dan UU Nomor 24 Tahun 2019	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2138	3.26.000264	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Dokumen	Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual, mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 2022 dan UU Nomor 24 Tahun 2019	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2139	3.26.000268	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi yang selanjutnya disebut dengan RIPPAR-PROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan provinsi untuk periode 15-25 tahun sebagai acuan RIPPAR-KAB/KOTA. Kab/Kota diharapkan dapat mensinkronkan RIPPAR-KAB/KOTA dengan RTRW dan RDTR	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2140	3.26.000291	Kegiatan/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional	Dokumen	Terpublikasinya kegiatan/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional	4	4	4	5	5	5	5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2141	3.26.000293	Pelaku Usaha yang mendapatkan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Pelaku Usaha	Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan usaha yang diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan ini juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan usaha.	20	25	30	40	40	40	40	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2142	3.27.000135	Panjang Jalan Usaha Tani eksisting	KM	panjang usaha tani yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian	1,7	2,0	2,9	3,9	3,9	4,3	3.866	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2143	3.27.000137	Panjang Jalan Usaha Tani yang direhabilitasi dan dipelihara	KM	Panjang Usaha tani yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian	0,3	0,3	0,9	1	0	0,4	0,2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2144	3.27.000143	Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Laporan	Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Pengawas Obat Hewan dan siap untuk diedarkan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2145	3.27.000152	pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Laporan	Banyaknya kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi peredaran hewan dna produk hewan yang baik	1	1	1	1	1	1	12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2146	3.27.000243	Jumlah Bahan Pakan/Pakan yang beredar	Ton	Banyaknya bahan pakan dan pakan ternak yang beredar	61591	61761	61591	61591	61591	61761	66036	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2147	3.27.000244	Jumlah bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	Ton	Jenis dan banyaknya bahan pakan, pakan dan pakan yang digunakan oleh peternak	61591	61761	61591	61591	61591	61761	66036	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2148	3.27.000245	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun	Unit	Banyaknya Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun dan dikembangkan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2149	3.27.000246	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2150	3.27.000271	Jumlah benih ternak yang bermutu	Dosis	Benih ternak bermutu yang telah dilepas dan dimanfaatkan	1000	600	1100	1150	1150	500	506	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2151	3.27.000275	Jumlah Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang beredar	Ton	Jenis dan banyaknya benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar	61591	61761	61591	61591	61591	61761	66036	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2152	3.27.000279	Jumlah bibit ternak yang bermutu	Ekor	Bibit ternak bermutu yang telah dilepas dan dimanfaatkan	0	0	0	0	0	1145100	1736410	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2153	3.27.000293	Jumlah Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Unit	Banyaknya Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang berfungsi baik	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2154	3.27.000298	Jumlah Eksisting Jaringan Irigasi Usaha Tani	Unit	Panjang jaringan irigasi yang ada, terhubung langsung ke lahan pertanian dan berfungsi baik	734	735	744	750	750	753	756	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2155	3.27.000302	Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota	Unit	Jumlah kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten/Kota (UPTD/BIDANG/SEKSI)	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2156	3.27.000304	Jumlah Eksisting Obat Hewan yang beredar	Dosis	Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Pengawas Obat Hewan dan siap untuk diedarkan	1000000	1350000	1550000	2300000	2600000	2650000	2650000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2157	3.27.000307	Jumlah Eksisting Penyuluh Pertanian ASN	Orang	Jumlah penyuluh pertanian ASN yang terpenuhi sesuai kebutuhan daerah	11	11	19	19	18	17	11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2158	3.27.000308	Jumlah Eksisting Pintu Air	Unit	Jumlah Pintu Air yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian	55	63	71	79	80	81	81	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2159	3.27.000314	Jumlah Eksisting Puskeswan	Unit	Banyaknya Puskeswan yang berfungsi baik	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2160	3.27.000321	Jumlah Eksisting usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	Jumlah usaha pertanian yang ada dan didampingi dalam pengembangannya	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2161	3.27.000327	Jumlah Esksisting Rumah Potong Hewan	Unit	Banyaknya RPH yang beroperasi dan berfungsi baik	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2162	3.27.000331	Jumlah galur yang ditingkatkan kualitasnya	Galur	Jumlah jenis galur yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2163	3.27.000335	Jumlah Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan	Laporan	Hasil uji Laboratorium Kesehatan Hewan yang dilakukan pada Laboratorium terakreditasi	18	1	5	3	2	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2164	3.27.000336	Jumlah Hasil pengujian di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan	Hasil uji Laboratorium Kesehatan Masayarakat Veteriner yang dilakukan pada Laboratorium terakreditasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2165	3.27.000350	Jumlah izin usaha pasar hewan yang diawasi	Laporan	banyaknya izin usaha pasar hewan yang diawasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2166	3.27.000351	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi	Laporan	banyaknya izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi	2	2	2	2	11	13	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2167	3.27.000353	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dinilai kelayakan dan diberikan pertimbangan teknis	Dokumen	Banyaknya izin usaha pertanian yang telah dinilai layak melalui pemberian pertimbangan teknis	1	1	1	1	1	1	133	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2168	3.27.000354	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak yang diawasi	Laporan	banyaknya izin usaha produksi benih/bibit ternak yang diawasi	1	1	1	1	1	1	4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2169	3.27.000355	Jumlah Izin Usaha produksi Pakan yang diawasi	Laporan	banyaknya izin usaha produksi pakan ternak yang diawasi	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2170	3.27.000356	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi	Laporan	banyaknya izin usaha RPH yang diawasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2171	3.27.000357	Jumlah izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner	Laporan	banyaknya izin usaha rumah sakit hewan, klinik hewan, ambulatori, praktik dokter hewan mandiri/puskeswan mandiri, atau tempat pelayanan paramedik veteriner yang diawasi	1	1	9	9	11	14	16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2172	3.27.000360	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dipelihara	Unit	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2173	3.27.000361	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi	Unit	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	3	2	9	6	0	3	4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2174	3.27.000362	Jumlah kader zoonosis	Orang	Ketersediaan sumber daya manusia yang berperan dalam pencegahan zoonosis melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	60	105	84	84	42	42	42	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2175	3.27.000369	Jumlah Kebutuhan Benih	Ton	Jumlah benih yang dibutuhkan per hektar sesuai luasan yang tersedia	69	54	58	42	48	45	0,015	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2176	3.27.000380	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Jumlah kelembagaan yang menangani penyuluhan tingkat desa	21	21	21	21	21	21	21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2177	3.27.000381	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Jumlah kelembagaan yang menangani penyuluhan tingkat kecamatan	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2178	3.27.000382	Jumlah Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Banyaknya kelembagaan petani di desa yang meningkat kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai	6	9	10	19	34	39	35	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2179	3.27.000383	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Banyaknya kelembagaan petani di kecamatan yang meningkat kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2180	3.27.000404	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan	adalah jumlah kegiatan pertemuan multipihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghasilkan kesepakatan bersama terkait penggunaan, pengelolaan, termasuk pemeliharaan prasarana pendukung pertanian lainnya. Kesepakatan diputuskan untuk mencapai output bersama, dan dapat dalam bentuk pembagian peran pelaksanaan suatu kebijakan ataupun kewenangan.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2181	3.27.000408	Jumlah Laboratorium	Unit	banyaknya laboratorium yang digunakan dalam rangka kegiatan analisa kesehatan hewan yang beroperasi dan berfungsi baik	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2182	3.27.000424	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura	Ha	luas area kawasan hortikultura yang terdampak perubahan iklim (DPI)	52	53	53	51	49	49	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2183	3.27.000425	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura yang ditangani	Ha	luas kawasan hortikultura yang terdampak perubahan iklim yang ditangani (difasilitasi bantuan/ dilakukan penanganan untuk mengurangi/ mengantisipasi dampak perubahan iklim)	15	15	15	15	15	15	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2184	3.27.000426	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan	Ha	Luas area perkebunan yang terdampak perubahan iklim	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2185	3.27.000427	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan yang ditangani	Ha	Luas area perkebunan yang terdampak perubahan iklim dan ditangani oleh OPD yang berwenang	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2186	3.27.000428	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan	Ha	Jumlah luas area sebagai dampak dari perubahan iklim (seperti kenaikan temperatur, perubahan pola hujan dan angin) dan perubahan variabilitas iklim	1006	1010	1010	975	939	931	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2187	3.27.000429	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani	Ha	Jumlah luas areal tanaman pangan yang dapat ditangani sebagai dampak banjir dan kekeringan	250	250	250	250	250	250	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2188	3.27.000433	Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura	Ha	luas area kawasan hortikultura yang terserang OPT (organisme pengganggu hama, penyakit, dan gulma)	1,12	0,84	1,3	1,5	1,45	1,68	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2189	3.27.000434	Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani	Ha	Jumlah luas area kawasan hortikultura yang dikendalikan/ditangani (jumlah/populasi OPT (organisme pengganggu hama, penyakit, dan gulma) berkurang/ intensitas serangan menurun)	1,12	0,84	1,3	1,5	1,45	1,68	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2190	3.27.000435	Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan	Ha	luas area perkebunan yang terserang OPT	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2191	3.27.000436	Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani	Ha	luas area perkebunan yang terserang OPT dan dikendalikan /ditangani oleh OPD yang berwenang	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2192	3.27.000437	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan	Ha	Jumlah luas areal tanaman pangan yang terserang organisme pengganggu tumbuhan (hama, penyakit, dan gulma) sehingga menyebabkan kerusakan, gangguan kehidupan atau kematian pada tumbuhan	16,04	10,92	21,26	6,8	3,92	2,07	18,35	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2193	3.27.000438	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani	Ha	Jumlah luas areal tanaman pangan yang sembuh (tidak bertambah/populasi OPT tidak meningkat/intensitas serangan OPT tidak meningkat) akibat adanya tindakan pengendalian	16,04	10,92	53	6,8	3,92	2,07	18,35	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2194	3.27.000442	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Orang	Banyaknya masayarakat yang teredukasi dan meningkat pemahamannya terhadap kesmavet dan keswan	120	120	115	120	190	145	266	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2195	3.27.000444	Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar	Dokumen	Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Inspeksi Good manufacturing practise (GMP) atau cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dari Veterinary Drug & Animal Feed Administration & Control Authority (VDFACA) dan siap untuk didistribusikan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2196	3.27.000448	Jumlah pelayanan jasa laboratorium	Laporan	banyaknya pelayanan jasa pada laboratorium kesehatan hewan yang beroperasi dan berfungsi baik	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2197	3.27.000449	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	Banyaknya pelayanan yang dilakukan oleh petugas medik veteriner pada tahun berjalan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2198	3.27.000455	Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang bereda	Laporan	Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Inspeksi Good manufacturing practise (GMP) atau cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dari Veterinary Drug & Animal Feed Administration & Control Authority (VDFACA) dan siap untuk didistribusikan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2199	3.27.000462	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian adalah kegiatan fasilitasi, advokasi, dan komunikasi terhadap penggunaan sarana pendukung pertanian agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2200	3.27.000465	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain	Ekor	Banyaknya bibit ternak yang didatangkan dari daerah lain	0	0	0	3	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2201	3.27.000474	Jumlah penggunaan alsintan	Unit	Kegiatan pengawasan alat dan mesin pertanian pra panen yang meliputi pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pemanfaatan bantuan alsintan pra panen di tingkat kabupaten/kota	369	374	389	399	451	527	1340	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2202	3.27.000475	Jumlah penggunaan pestisida	Liter	Kegiatan penggunaan pestisida yang meliputi perijinan, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pemanfaatan bantuan pestisida di tingkat kabupaten/kota	5310	5185	4966	4754	4235	4015	270,5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2203	3.27.000476	Jumlah penggunaan pupuk	Ton	kegiatan pengelolaan pupuk bersubsidi meliputi perencanaan penginputan, dan penetapan alokasi pupuk bersubsidi, sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan pengawalan terhadap verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh tim Kecamatan Kegiatan Pengelolaan Pupuk Non Subsidi meliputi kegiatan pendataan pupuk dan pembenah tanah yang terdaftar, pemantauan peredarannya di lapangan serta melakukan edukasi penggunaaan pupuk dan pembenah tanah yang tepat.	2793	2423	1369	1341	1033	1102	1.047.081	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2204	3.27.000486	Jumlah penggunaan sarana pendukung pertanian lainnya	Unit	Pengawasan sarana pendukung pertanian adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan sarana pendukung pertanian agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	23	23	32	51	61	71	71	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2205	3.27.000500	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan	Orang	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karir dan peningkatan kompetensi	1	1	1	1	1	1	11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2206	3.27.000501	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	Jumlah Penyuluh Pertanian swadaya dan swasta yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka dan peningkatan kompetensi	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2207	3.27.000506	Jumlah Petugas Medik Veteriner	Orang	Banyaknya petugas medik veteriner di daerah	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2208	3.27.000511	Jumlah Pintu Air direhabilitasi	Unit	Jumlah Pintu Air yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian	1	8	8	8	1	1	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2209	3.27.000527	Jumlah Prasarana Pendukung Hortikultura	Unit	banyaknya prasarana pendukung kawasan hortikultura	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2210	3.27.000528	Jumlah Prasarana Pendukung Perkebunan	Unit	banyaknya prasarana pendukung perkebunan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2211	3.27.000529	Jumlah Prasarana Pendukung Peternakan	Unit	Banyaknya prasarana pendukung peternakan yang digunakan dalam rangka mendukung produktivitas hasil peternakan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2212	3.27.000530	Jumlah Prasarana Pendukung Tanaman Pangan	Unit	banyaknya prasarana pendukung kawasan tanaman pangan	21	21	21	21	20	20	20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2213	3.27.000534	Jumlah prasarana penyuluhan pertanian	Unit	Jumlah prasarana penyuluhan pertanian merujuk pada total bangunan, tanah, dan fasilitas fisik lainnya yang digunakan sebagai tempat atau lokasi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di suatu wilayah tertentu. Prasarana ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, gedung penyuluhan, aula, lapangan demonstrasi, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya yang digunakan dalam proses penyuluhan. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau inventarisasi prasarana penyuluhan pertanian yang ada dalam periode waktu tertentu.	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2214	3.27.000550	Jumlah Puskeswan yang dibangun	Unit	Banyaknya Puskeswan yang dibangun dan dikembangkan	0	1	1	1	1	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2215	3.27.000551	Jumlah Puskeswan yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya Puskeswan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2216	3.27.000554	Jumlah Rekomendasi Pemasukan HPM	Rekomendasi	Dokumen yang berisikan perijinan pemasukan lalu lintas HPM dalam satu wilayahnyang dikeluarkan oleh otoritas veteriner	0	0	0	0	0	4	4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2217	3.27.000555	Jumlah Rekomendasi Pengeluaran HPM	Rekomendasi	Dokumen yang berisikan perijinan pengeluaran lalu lintas HPM dalam satu wilayahnyang dikeluarkan oleh otoritas veteriner	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2218	3.27.000564	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun	Unit	Banyaknya RPH yang dibangun dan dikembangkan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2219	3.27.000565	Jumlah Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya RPH yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2220	3.27.000572	Jumlah rumpun yang ditingkatkan kualitasnya	Rumpun	Jumlah jenis rumpun yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2221	3.27.000579	Jumlah sarana penyuluhan pertanian	Unit	Jumlah sarana penyuluhan pertanian merujuk pada total alat, fasilitas, atau infrastruktur yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan pertanian di suatu wilayah tertentu. Sarana ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, ruang kelas, alat peraga, media penyuluhan, kendaraan operasional, dan peralatan teknologi informasi yang digunakan dalam proses penyuluhan. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau inventarisasi sarana penyuluhan pertanian yang ada dalam periode waktu tertentu.	426	426	426	426	426	426	426	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2222	3.27.000582	Jumlah SDG Tanaman yang ditingkatkan kualitasnya	Varietas Unggul Baru (VUB)	Jumlah jenis SDG yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas	1	1	0	1	1	1	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2223	3.27.000589	Jumlah Sertifikat Veteriner HPM	Sertifikat	Jumlah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh otoritas Veteriner dalam rangka pengawasan lalu lintas HPM	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2224	3.27.000590	Jumlah SKKH/SKPH HPM	Dokumen	Ketersediaan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang berisi standar persayaratan terkait penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan	2183	1979	2719	2419	2404	1025	2209	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2225	3.27.000605	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota	Ha	Kawasan KP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi di tingkat Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2226	3.27.000607	Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota	Ha	Kawasan LCP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2227	3.27.000609	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota	Ha	LP2B yang ditetapkan akan dijadikan dasar dalam pemberian bantuan di bidang pertanian baik melalui APBN maupun pengendalian terhadap KP2B yang ditetapkan dalam Peraturan daerah Rencana Tata Ruang mengikuti dengan pengaturan penataan ruang dan UU 41 2009 beserta turunannya	0	0	0	0	0	303	303	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2228	3.27.000615	Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ha	Luas area KP2B yang telah ditetapkan berdasarkan data spasial dan numerik di tingkat Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2229	3.27.000617	Luasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ha	Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan berasal dari lahan bekas hutan atau lahan Daerah yang tidak memiliki lahan cadangan sesuai dengan yang dipersyaratkan tidak perlu menetapkan lahan cadangan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2230	3.27.000619	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ha	- Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan kab/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah kab/ KP2B yang ditetapkan berupa lahan beririgasi, reklamasi rawa pasang surut dan lebak, tidak Sesuai amanat Perpres 18 Tahun 2020 maka eksisting sawah seluruhnya ditetapkan sebagai Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan penetapan kawasan memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial.&	0	0	0	0	0	303	303	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2231	3.27.000636	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Laporan	Banyaknya unit usaha yang didampingi dalam menerapkan prinsip kesejahteraan hewan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2232	3.27.000641	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Unit Usaha	unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi sebagai jaminan keamanan dan kualitas untuk produk pangan asal ternak yang dikonsumsi masyarakat.	8	8	10	10	21	21	21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2233	3.30.000001	Agen dan Pasar Rakyat	Unit	- Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar - Agen adalah individu atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara dalam kegiatan jual beli barang atau jasa, yang mewakili produsen atau prinsipal untuk menawarkan, memasarkan, atau menjual produk kepada konsumen	Agen / Pasar : 12 / 10	Agen / Pasar : 12 / 10	Agen / Pasar : 13 / 10	Agen / Pasar : 14 / 10	Agen / Pasar : 14 / 11	Agen / Pasar : 14 / 11	Agen / Pasar : 14 / 11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2234	3.30.000014	Fasilitasi proses Perizinan Surat Tanda Pendaftara dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Kegiatan	Kegiatan pendampingan, pelayanan, dan bantuan administratif yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan berwenang kepada pelaku usaha waralaba dalam negeri untuk mengajukan, memproses, dan memperoleh Surat Tanda Pendaftaran dan/atau perpanjangan STPW melalui sistem perizinan berbasis elektronik yang terintegrasi secara nasional	0	0	0	0	0	10	10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2235	3.30.000015	Gudang yang telah terdaftar	Unit	Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.	13	13	13	13	13	13	15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2236	3.30.000019	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kegiatan	Serangkaian aktivitas komunikasi, pertemuan, pertukaran data, serta penyelarasan kebijakan dan tindakan antara pemerintah daerah dan instansi vertikal, agen/distributor, dan pengelola pasar rakyat untuk memastikan ketersediaan, kelancaran distribusi, serta kestabilan pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan pasar rakyat	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2237	3.30.000023	Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi	Kegiatan	Kegiatan sosialisasi, pendampingan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, dan penerapan ketentuan metrologi legal dalam penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) sesuai peraturan perundang-undangan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2238	3.30.000024	Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kegiatan	Kegiatan fasilitasi, pendampingan, dan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuan, kepatuhan regulasi, dan daya saing dalam melakukan kegiatan ekspor barang dan/atau jasa ke pasar internasional	1	1	1	1	1	0	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2239	3.30.000025	Kegiatan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kegiatan	Kegiatan pemantauan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat secara rutin , mengumpulkan datra tentang ketersedian barang harga dan permintaan barang harga, mengendalikan harga barang kebutuhan pokok untuk mencegah kenaikan.	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2240	3.30.000044	Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	Lokasi	Tempat atau wilayah yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomi, tata ruang, dan kebutuhan masyarakat sebagai lokasi pembangunan fasilitas yang berfungsi mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa dalam sistem perdagangan	1	0	0	2	2	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2241	3.30.000045	Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan yang Diikuti	Kegiatan	Keikutsertaan pelaku usaha atau instansi dalam kegiatan promosi perdagangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait, dengan tujuan memperkenalkan dan memasarkan produk ekspor unggulan ke pasar luar negeri melalui pertemuan bisnis (business matching), pameran, atau penjajakan kerja sama dagang	2	2	2	2	2	0	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2242	3.30.000046	Pameran Dagang Lokal yang Diikuti	Kegiatan	Keikutsertaan pelaku usaha atau instansi dalam kegiatan promosi dan pemasaran produk yang diselenggarakan di tingkat daerah/kabupaten/kota/provinsi, dengan tujuan memperkenalkan produk, memperluas jaringan pemasaran, serta meningkatkan penjualan di pasar domestik	1	1	1	1	2	1	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2243	3.30.000047	Pameran Dagang Nasional yang Diikuti	Kegiatan	Keikutsertaan pelaku usaha atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam kegiatan promosi dan pemasaran produk yang diselenggarakan pada tingkat nasional (lintas provinsi) di dalam negeri, dengan tujuan memperluas akses pasar, meningkatkan jejaring bisnis, dan mendorong peningkatan penjualan serta daya saing produk	1	1	1	1	1	0	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2244	3.30.000049	Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Unit	Pasar rakyat yang telah terhubung dan memanfaatkan sistem informasi perdagangan berbasis elektronik untuk pencatatan, pelaporan, dan pemantauan data perdagangan seperti harga, stok, distribusi, dan aktivitas transaksi secara terpusat dan terkoordinasi dengan instansi terkait	10	10	10	10	11	11	11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2245	3.30.000057	Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kegiatan	Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, instansi terkait untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok atau barang penting melalui pengadaan, penyaluran, dan penjualan langsung di pasar, dengan dampak nyata terhadap ketersediaan barang dan harga di wilayah satu kabupaten/kota	0	0	0	2	2	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2246	3.30.000058	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kegiatan	Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten untuk menjual kebutuhan pokok (beras, minyak goreng, gula, telur) kepada masyarakat dengan menjual harga lebih murah saat terjadi kenaikan harga (misalnya menjelang hari besar keagamaan). bentuk kegiatan berupa operasi pasar	0	0	0	0	1	2	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2247	3.30.000061	Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kegiatan	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah Tersedianya laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan alat ukur laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan satuan laporan	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2248	3.30.000063	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan	Kegiatan	Tera/ Tera ulang alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran penakaran atau penimbangan	8	21	21	21	21	21	21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2249	3.30.000064	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar	Kegiatan	Tera/ Tera ulang alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran	8	21	21	21	21	21	21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2250	3.30.000065	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Timbang	Kegiatan	Tera/ Tera ulang alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan	8	21	21	21	21	21	21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2251	3.30.000066	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur	Kegiatan	Tera/ Tera ulang alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas	8	21	21	21	21	21	21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2252	3.30.000067	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi	Pelaku Usaha	Orang yang melakukan usahan perdagangan mengunakan alat-alat ukur takar timbangan dan perlengkapannya (UTTP)	683	689	694	971	995	1030	1006	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2253	3.30.000068	Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Unit	Individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran barang kebutuhan pokok dan barang penting dari produsen atau pusat distribusi ke pasar, agen, atau konsumen akhir di wilayah satu kabupaten/kota, yang berperan dalam menjaga kelancaran rantai pasok dan ketersediaan barang	0	0	0	12	12	12	12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2254	3.30.000073	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kegiatan	Kegiatan pencatatan, pemantauan, dan pelaporan data harga serta ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar rakyat, yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi perdagangan terintegrasi, untuk mendukung pengambilan kebijakan stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan secara real-time	1	1	1	2	2	2	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2255	3.30.000074	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kegiatan	Kegiatan pengumpulan, pencatatan, pemantauan, dan pelaporan data harga serta ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dimiliki atau didistribusikan oleh pelaku usaha distribusi dalam satu kabupaten/kota, untuk mendukung pengambilan keputusan terkait stabilisasi harga, ketersediaan stok, dan kelancaran rantai pasok	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2256	3.30.000075	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Jasa Akomodasi	Kegiatan	Kegiatan kerja sama antara pelaku usaha produk dalam negeri dan penyedia jasa akomodasi (hotel, resort, penginapan, atau homestay) untuk memasarkan, mempromosikan, dan menjual produk lokal kepada tamu atau konsumen melalui display, penjualan langsung, paket promosi, atau media promosi yang tersedia di fasilitas akomodasi.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2257	3.30.000076	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Marketplace	Kegiatan	Kegiatan kerja sama antara pelaku usaha produk dalam negeri dan platform marketplace (e-commerce) untuk memasarkan, mempromosikan, dan menjual produk lokal secara digital kepada konsumen dengan memanfaatkan fitur, program, atau kampanye yang disediakan oleh marketplace	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2258	3.30.000077	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Perhotelan	Kegiatan	Kegiatan kerja sama antara pelaku usaha produk dalam negeri dan unit perhotelan (hotel, resort, atau penginapan) untuk memasarkan, mempromosikan, dan menjual produk lokal kepada tamu hotel atau pengunjung melalui display produk, paket layanan, atau media promosi yang disediakan oleh pihak perhotelan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2259	3.30.000078	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail	Kegiatan	Kegiatan kerja sama antara pelaku usaha produk dalam negeri dan jaringan retail (supermarket, minimarket, atau toko modern) untuk memasarkan, mempromosikan, dan menjual produk lokal melalui display produk, program promosi, atau mekanisme penjualan yang disediakan oleh pihak retail	0	0	0	0	0	0	3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2260	3.30.000079	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan	Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau lembaga terkait untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kinerja pengelola sarana distribusi perdagangan (seperti pasar, gudang, pusat logistik, atau kios/los) melalui pelatihan, pendampingan, fasilitasi regulasi, dan akses informasi sehingga pengelolaan distribusi barang menjadi lebih efisien, tertib, dan berkelanjutan	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2261	3.30.000080	Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan	Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau lembaga terkait untuk memberikan bimbingan, arahan, serta pengawasan kepada pengelola sarana distribusi perdagangan (seperti pasar, gudang, pusat logistik, kios/los) guna meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, efisiensi pengelolaan, ketertiban operasional, dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok serta barang penting	3	3	4	5	3	3	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2262	3.30.000091	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pelaku Usaha	Dinas yang bertanggung jawab mengatur, mengelola, dan mengawasi operasional sarana distribusi perdagangan seperti pasar, gudang, pusat logistik, kios, atau los—dengan tujuan menjamin kelancaran aliran barang kebutuhan pokok dan barang penting, menjaga tertib administrasi, serta memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan bagi konsumen	2295	2310	2320	2335	2350	2360	2360	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2263	3.30.000094	Produk Unggulan Daerah	Produk	Barang atau produk yang diproduksi di suatu wilayah atau daerah yang memiliki keunikan, kualitas, nilai tambah, atau potensi ekonomi tertentu, sehingga menjadi andalan dalam promosi, pemasaran, dan peningkatan pendapatan daerah melalui konsumsi lokal maupun ekspor	0	0	0	0	0	9	14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2264	3.30.000097	Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	Kegiatan yang dilakukan pemerintah kota untuk mendorong masyarakat, pelaku usaha agar lebih memilih, membeli dan menggunakan produk dalam negeri, dengan tujuan meningkatkan daya saing produk lokal, mendukung \umkm dalam industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada produk import serta mengerakan ekonomi lokal. bentuk kegiatan bazar takjil ramadhan dan coffe fest	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2265	3.30.000099	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90%	Unit	Pupuk dan pestisida bersubsidi yang distribusinya dari pemerintah atau distributor resmi ke petani atau kelompok tani diawasi secara resmi oleh instansi terkait, dengan tingkat realisasi penyaluran dan penggunaan minimal 90% dari alokasi yang telah ditetapkan, untuk memastikan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu penggunaannya sesuai peruntukan	2	2	2	2	2	2	7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2266	3.30.000103	Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	Fasilitas infrastruktur yang digunakan untuk memfasilitasi proses distribusi barang dari produsen ke konsumen contoh distribusi perdagangan yaitu Gudang, pasar,toko,supermaket, pusat distribusi, transportasi, terminal, pelabuhan dan bandara	10	10	10	10	11	11	11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2267	3.30.000107	Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	Toko swalayan atau minimarket yang telah mendapatkan rekomendasi resmi dari instansi terkait sebagai bukti pemenuhan kewajiban perizinan usaha melalui sistem elektronik terintegrasi (Online Single Submission/OSS atau sejenis), yang menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi perizinan berusaha, termasuk izin operasional, izin lokasi, dan izin perdagangan	0	0	0	0	0	10	14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2268	3.30.000108	UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	Usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berlokasi dan beroperasi di wilayah administratif Kabupaten/Kota yang bersangkutan	0	0	0	0	0	0	5261	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2269	3.31.000002	Evaluasi pemenuhan komitmen usaha	Laporan	Kegiatan evaluasi untuk mengukur kesesuaian antara komitmen yang tercantum dalam dokumen perizinan/NIB dengan realisasi pelaksanaan pelaku usaha	0	1	0	1	5	2	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2270	3.31.000003	Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah	Laporan	Fasilitasi yang berupa bentuk kemudahan dan dukungan non-keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku Industri Kecil dan Industri Menengah dalam rangka meningkatkan legalitas, kapasitas produksi, akses pasar, kualitas produk, dan daya saing usaha	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2271	3.31.000004	Hasil pelaksanaan RPIK	Laporan	Hasil Pelaksanaan RPIK adalah tingkat capaian dari program dan kegiatan pembangunan industri yang tercantum dalam dokumen RPIK Kabupaten/Kota dalam periode evaluasi tertentu, yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.	0	0	1	0	1	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2272	3.31.000006	Kegiatan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapangan	Laporan	Rangkaian aktivitas verifikasi administratif dan/atau peninjauan langsung ke lokasi usaha untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perizinan, laporan, atau komitmen usaha dengan kondisi nyata di lapangan dalam periode tertentu.	0	1	0	1	5	2	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2273	3.31.000007	Kunjungan ke Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya yang belum patuh	Laporan	Kegiatan peninjauan langsung (site visit) yang dilakukan kepada perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri yang belum melaporkan kewajiban pelaporan, dan ketentuan administratif/teknis, dengan tujuan melakukan verifikasi, pembinaan, dan/atau tindak lanjut perbaikan dalam periode tertentu.	0	0	0	0	3	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2274	3.31.000008	Menerima atau menolak pengefektifan perizinan usaha industri dan perizinan perluasan usaha industri	Laporan	Proses pengambilan keputusan administratif berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan komitmen usaha, yang menghasilkan penetapan status “disetujui/efektif” atau “ditolak/belum dapat diefektifkan” dalam periode pelayanan tertentu.	0	1	0	1	5	2	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2275	3.31.000009	Pelaksanaan kegiatan bentuk publikasi dan diseminasi lainnya	Laporan	Aktivitas penyampaian informasi resmi kepada sasaran yang dituju melalui media cetak, elektronik, digital, tatap muka, atau bentuk komunikasi lainnya dalam periode tertentu, yang diukur berdasarkan jumlah kegiatan, jangkauan sasaran, serta tingkat ketercapaian tujuan sosialisasi.	240	240	240	480	480	480	480	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2276	3.31.000013	Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah	Laporan	Fasilitasi yang dilakukan berupa dukungan non-regulatif kepada IKM berupa fasilitasi perizinan, pembinaan teknis, bantuan sarana, promosi, akses pembiayaan, atau bentuk dukungan lainnya, yang diukur berdasarkan jumlah IKM penerima dan jenis fasilitas yang diberikan dalam periode tertentu.	2	3	0	8	11	11	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2277	3.31.000015	Pelaksanaan Penguatan kapasitas kelembagaan IKM	Laporan	Kegiatan yang dilakukan meningkatkan kemampuan manajerial, tata kelola organisasi, administrasi, jejaring kemitraan, serta keberlanjutan kelembagaan IKM dalam periode tertentu, yang diukur berdasarkan jumlah kelembagaan yang dibina, jenis intervensi yang diberikan, dan tingkat peningkatan kapasitas kelembagaan.	0	0	0	0	0	1	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2278	3.31.000016	Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKM	Laporan	Kegiatan untuk meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan pada IKM melalui pelatihan, workshop, pendampingan, mentoring, atau program pembelajaran lainnya, yang diukur berdasarkan jumlah kegiatan dan jumlah peserta peningkatan kompetensi dalam periode tertentu.	0	2	4	2	0	3	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2279	3.31.000017	Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri	Laporan	Kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi, penjelasan, dan pelatihan teknis terkait penggunaan SIINas kepada perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, yang diukur berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan, jumlah peserta yang mengikuti, tingkat pemahaman peserta, dan realisasi penginputan data ke SIINas pasca kegiatan.	0	0	0	0	0	2	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2280	3.31.000020	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Laporan	Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja individu maupun kelompok di sektor industri, yang diukur berdasarkan jumlah kegiatan, jumlah peserta yang mengikuti, tingkat peningkatan kompetensi, dan dampak terhadap kinerja individu/organisasi dalam periode tertentu.	0	2	4	2	0	3	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2281	3.31.000021	Pemberian fasilitas nonfiskal untuk Perusahaan industri skala besar	Laporan	Kegiatan yang dilakukan untuk memberikan dukungan non-moneter kepada perusahaan industri skala besar, berupa kemudahan perizinan, pendampingan teknis, promosi investasi, penyediaan informasi pasar atau teknologi, dan fasilitasi akses kemitraan, yang diukur berdasarkan jenis fasilitas yang diberikan, jumlah perusahaan penerima, dan tingkat pemanfaatan fasilitas dalam periode tertentu.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2282	3.31.000023	Pengembangan dan pemanfataan kreativitas dan inovasi	Laporan	Kegiatan yang dilakukan untuk mendorong lahirnya ide, inovasi, atau solusi kreatif baru, serta penerapan hasil kreativitas dan inovasi tersebut dalam produk, proses, atau layanan.	0	0	0	0	0	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2283	3.31.000025	Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah	Laporan	Kegiatan pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan daya saing IKM yang tergabung dalam suatu sentra, melalui penguatan kelembagaan, fasilitasi sarana produksi, pelatihan, pendampingan, promosi, dan pengembangan klaster.	0	0	0	0	0	1	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2284	3.31.000026	Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri	Laporan	Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, daya tarik, dan keberlanjutan suatu wilayah agar menjadi pusat pertumbuhan industri, melalui penyediaan infrastruktur, fasilitasi investasi, penguatan klaster industri, pengembangan SDM, dan pemanfaatan inovasi.	0	0	1	0	1	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2285	3.31.000029	Penyediaan Informasi dan Analisa Industri	Laporan	Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyebarluasan data serta informasi industri sebagai bahan pembuatan laporan/rekomendasi kebijakan, yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan industri.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2286	3.31.000031	Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dokumen	Peraturan daerah yang mengatur strategi, program, dan kebijakan pembangunan industri di tingkat provinsi, termasuk pengembangan industri kecil, menengah, dan besar, penguatan klaster industri, investasi, inovasi, dan peningkatan daya saing industri.	1	1	1	1	1	1	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2287	3.31.000032	Permohonan verifikasi teknis dalam Perizinan usaha industri dan Perizinan Perluasan usaha industri	Laporan	Proses pengajuan formal oleh pelaku industri kepada instansi berwenang untuk dilakukan pengecekan dan validasi kondisi teknis usaha, yang meliputi dokumen, kapasitas produksi, instalasi, dan aspek keselamatan/lingkungan, dengan tujuan memperoleh persetujuan penerbitan izin usaha industri baru atau perluasan usaha.	0	1	0	1	5	2	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2288	3.31.000033	Rapat Koordinasi antara Dinas dengan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya	Laporan	Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dengan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri binaan untuk membahas program pembinaan, evaluasi kinerja, pemecahan masalah operasional, dan pemenuhan regulasi.	1	1	1	1	1	3	3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2289	3.31.000034	Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang diterbitkan	Laporan	Proses pengumpulan dan pencatatan seluruh perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri, dan perizinan perluasan kawasan industri yang telah diterbitkan.	0	0	1	0	3	3	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2290	3.31.000036	Standardisasi industri	Dokumen	Kegiatan menetapkan, menginformasikan, mengawasi, dan memfasilitasi penerapan standar teknis, mutu, keselamatan, lingkungan, atau prosedur operasional dalam industri.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2291	3.31.000037	Tindak lanjut kegiatan evaluasi Pemenuhan komitmen usaha dari perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri	Laporan	Pelaksanaan langkah-langkah perbaikan, pembinaan, atau pengawasan terhadap perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri setelah evaluasi pemenuhan komitmen usaha.	0	1	0	1	5	2	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2292	3.31.000038	Verifikasi teknis perizinan industri dan perizinan perluasan industri	Laporan	Kegiatan pemeriksaan dokumen, inspeksi lapangan, dan validasi teknis terhadap perusahaan industri atau perusahaan yang mengajukan perluasan usaha industri, yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan perizinan.	0	1	0	1	5	2	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2293	3.31.000041	Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Kabupaten/Kota	Data	Data dan informasi yang mencatat jumlah produk yang menjadi sasaran pengawasan jaminan produk halal di suatu Kabupaten/Kota dalam periode tertentu yang meliputi jumlah objek yang diawasi, kategori produk, status kepatuhan terhadap sertifikasi halal, dan wilayah pengawasan.	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2294	3.31.000043	Data PDRB Industri Kabupaten/Kota, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM	Data	Informasi kuantitatif dan kualitatif yang mencakup nilai PDRB industri, jumlah tenaga kerja, nilai investasi, jumlah dan jenis perusahaan industri, status dan luas kawasan industri, serta jumlah dan karakteristik sentra IKM.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2295	3.31.000047	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah investasi	Data	Data perusahaan industri menurut nilai investasi yang ditanamkan dalam periode tertentu.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2296	3.31.000048	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan	Data	Data jumlah perusahaan industri menurut sektor dan subsektor usaha yang mencakup jumlah perusahaan per sektor dan subsektor, distribusi wilayah, skala usaha.	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2297	3.31.000051	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota dalam tahap pembangunan	Data	Data perusahaan industri yang masih dalam proses penyiapan fasilitas produksi atau	0	0	0	0	1	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2298	3.31.000052	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota penerima fasilitas	Data	Data perusahaan industri yang telah menerima fasilitas dari pemerintah atau lembaga pembina	1	1	0	1	1	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2299	3.31.000053	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota telah operasional	Data	Data perusahaan industri yang telah menyelesaikan pembangunan fasilitas produksi dan menjalankan kegiatan produksi secara aktif	0	0	0	0	1	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2300	3.31.000062	Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustriandi Kabupaten/Kota	Data	Jumlah data yang mencatat seluruh permohonan dari perusahaan industri untuk dilakukan pemeriksaan atau validasi teknis terkait pemenuhan persyaratan dan standar kegiatan usaha.	0	1	0	1	5	2	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2301	4.01.000001	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang meliputi hasil skoring penataan perangkat daerah.	0	0	1	4	4	4	4	Sekretariat Daerah
2302	4.01.000002	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berupa hasil fasilitasi dari Gubernur.	0	0	1	4	4	4	4	Sekretariat Daerah
2303	4.01.000003	Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	Dokumen hasil penyusunan Informasi Jabatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai persetujuan KEMENPAN	0	0	0	2	2	2	2	Sekretariat Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2304	4.01.000004	Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi fasilitasi penyusunan perencanaan, monev penerapan dan pelaporan implementasi Reformasi Birokrasi pada level Perangkat Daerah Pengampu RB General dan RB Tematik berdasarkan Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2023 dan Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023.	2	2	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2305	4.01.000005	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja meliputi laporan pembinaan dan fasilitasi evaluasi mandiri implementasi SAKIP perangkat daerah pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntablitas kinerja internal dan capaian kinerja atas output maupun outcome dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented goverment) serta fasilitasi persiapan evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah.	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2306	4.01.000006	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja pada pemerintah daerah yang meliputi dua komponen utama yaitu hasil survey BERAKHLAK meliputi, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif dan loyal serta Hasil Evaluasi Organisasi sesuai komponen penilaian dari KemenPAN-RB	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2307	4.01.000007	Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan meliputi : 1. Laporan Pembinaan Tata Laksana (Tata Naskah Dinas, aplikasi SRIKANDI) 2. Laporan Pembinaan Standar Kerja ASN (Pakaian Dinas, Jam Kerja, Standar Sarpras Kerja ASN) 3. Laporan Penguatan Tata Laksana (SPBE, Proses Bisnis)	3	3	3	3	3	3	3	Sekretariat Daerah
2308	4.01.000008	Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	Dokumen laporan yang memuat hasil kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang meliputi komponen: kebijakan pelayanan publik, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, inovasi pelayanan publik kompetensi pelaksana, standar pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.	2	2	2	3	2	2	2	Sekretariat Daerah
2309	4.01.000009	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan meliputi penyusunan Draft Perwali ataupun SK Walikota baik tim kerja maupun ketentuan-ketentuan kebijakan pemerintahan	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2310	4.01.000010	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum meliputi koordinasi antar pemerintah pusat ke pemerintahan kota ataupun pemerintah provinsi ke pemerintah kota diantaranya mengenai pemilu, laporan toponimi dan rupabumi dan batas wilayah	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2311	4.01.000011	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah meliputi dokumen laporan fasilitasi kegiatan kewilayahan seperti rakor kewilayahan, pembinaan perangkat kecamatan dan Kelurahan dan sinergitas kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2312	4.01.000012	Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD meliputi dokumen hasil fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2313	4.01.000013	Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan berupa laporan urusan pemeritahan sesuai kewenangan daerah semisal SPM	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2314	4.01.000014	Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2315	4.01.000015	Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	Dokumen hasil Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi meliputi MoU, PKS, Fasilitasi APEKSI	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2316	4.01.000016	Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi beruoa Mou atau PKS	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2317	4.01.000017	Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	Kerja Sama yang Dievaluasi berupa inventarisasi PKS dan Mou yang masih berlaku pada tahun berjalan	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2318	4.01.000018	Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit	Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola melalui pemberian hibah kepada kelompok keagamaan, seperti masjid dan gereja	18	16	30	15	21	5	16	Sekretariat Daerah
2319	4.01.000019	Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi meliputi pemberian hibah kepada kelompok keagamaan, seperti baznaz, MUI, masjid dan gereja dan lain-lain	6	6	3	5	6	4	9	Sekretariat Daerah
2320	4.01.000020	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan meliputi : Laporan pemberian beasiswa kepada anak sekolah berprestasi dan dari keluarga tidak mampu,	2	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2321	4.01.000021	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan meliputi : Laporan Koordinasi bersama OPD terkait UKS dan Posyandu, Membantu penilaian kota sehat	2	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2322	4.01.000022	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial meliputi : Pembentukan SK Ranstrada, Juknis Ranstrada	2	4	1	1	2	2	2	Sekretariat Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2323	4.01.000023	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata meliputi : Dilaksanakannya rapat koordinasi	0	0	1	1	0	0	0	Sekretariat Daerah
2324	4.01.000024	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja meliputi : dukungan penilaian kota layak anak, penurunan angka stunting, WTN	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
2325	4.01.000025	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan meliputi : melaksanakan koordinasi	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
2326	4.01.000026	Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	Produk Hukum Pengaturan yang Disusun adalah Produk Hukum berupa Perda dan Perkada yang telah disusun	90	96	75	117	86	65	52	Sekretariat Daerah
2327	4.01.000027	Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	Produk Hukum Penetapan yang Disusun adalah Produk Hukum berupa Keputusan Kepala Daerah yang telah disusun	441	497	376	334	354	332	279	Sekretariat Daerah
2328	4.01.000028	Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya adalah produk hukum (Perda, Perkada dan Keputusan Kepala Daerah) yang telah didokumentasikan serta total informasi hukum yang dikelola	531	593	451	451	440	397	331	Sekretariat Daerah
2329	4.01.000029	Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen	Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi adalah fasilitasi produk hukum daerah yang dibuat oleh pemerintah kabupaten/kota berupa kegiatan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsep produk hukum agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebutuhan daerah, sedangkan produk hukum daerah yang Dievaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian, konsistensi, dan keberlakuan produk hukum tersebut dengan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang berlaku, sehingga produk hukum tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan efektif dalam pelaksanaannya.	5	5	7	38	13	10	10	Sekretariat Daerah
2330	4.01.000030	Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus	Masalah Hukum yang Diselesaikan adalah masalah hukum yang berhasil diselesaikan melalui berbagai mekanisme penyelesaian sengketa atau proses peradilan	4	4	4	4	4	4	4	Sekretariat Daerah
2331	4.01.000031	Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus	Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan adalah Masalah Non Litigasi dan HAM yang proses penyelesaiannya difasilitasi oleh bagian hukum	4	4	4	4	4	4	4	Sekretariat Daerah
2332	4.01.000032	Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro meliputi : Koordinasi terkait Inflasi Daerah	3	3	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2333	4.01.000033	Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro meliputi : Koordinasi hasil pembinaan KUKM terkait penyusunan kebijakan	3	3	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2334	4.01.000034	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan meliputi : Melaksanakan koordinasi ketahanan pangan dengan DKPP	2	2	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2335	4.01.000036	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan energi dan air seperti ; rakor dan monev	2	2	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2336	4.01.000037	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha meliputi : pembinaan Perumda BPR	2	2	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2337	4.01.000038	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi meliputi : Pembinaan Perumda Air Minum Tirta Patria	2	2	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2338	4.01.000039	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD meliputi : Dibuatnya perda BUMD	0	0	2	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
2339	4.01.000040	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah meliputi : rakor dan monev	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
2340	4.01.000041	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan pendirian BLUD	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
2341	4.01.000042	Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa meliputi penentuan cara pemaketan dan cara pengadaan.	2	2	2	2	2	3	2	Sekretariat Daerah
2342	4.01.000043	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi reviu, dokumen klarifikasi, evaluasi penawaran, dokumen pembuktian, penetapan pemenang.	75	75	75	76	80	80	85	Sekretariat Daerah
2343	4.01.000044	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa meliputi monev RUP setiap triwulan.	12	12	12	12	10	12	12	Sekretariat Daerah
2344	4.01.000045	Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik meliputi : rekapitulasi purchasing dan manajemen sistem, dll	2	2	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2345	4.01.000046	Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa meliputi: fasilitasi data SIKAP, Pengembangan Katalog Elektronik dan Pengelolaan Akun Pelaku Pengadaan.	2	2	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2346	4.01.000047	Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa meliputi: rekapitulasi RUP terumumkan dan Realisasi PBJ	2	2	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2347	4.01.000048	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa meliputi : sosialisasi, desk, bimtek	200	200	200	255	300	300	300	Sekretariat Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2348	4.01.000049	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi : penyusunan renaksi pemenuhan SDM PBJ, Peningkatan kompetensi SDM UKPBJ.	6	6	6	6	24	12	22	Sekretariat Daerah
2349	4.01.000050	Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa meliputi : bimtek PBJ kepada pelaku pengadaan, fasilitas probity advice PBJ.	4	4	4	4	10	12	6	Sekretariat Daerah
2350	4.01.000051	Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD meliputi : penyusunan berita acara TEPRA bulanan.	10	10	10	10	24	12	12	Sekretariat Daerah
2351	4.01.000058	Kerja Sama Luar Negeri yang Difasilitasi	Dokumen	Kerja sama luar negeri yang difasilitasi di Indonesia mencakup berbagai bentuk, seperti kerjasama bilateral, multilateral, dan dengan lembaga asing. Fasilitasi ini melibatkan pemerintah pusat, daerah,	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
2352	4.01.000086	Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan	Dokumen	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang meliputi hasil skoring penataan perangkat daerah dan dirumuskan menjadi produk hukum.	0	0	1	0	0	1	0	Sekretariat Daerah
2353	4.01.000089	Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan hasil dari perhitungan kematangan perangkat daerah sesuai Permendagri No. 99 Tahun 2019.	0	0	0	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2354	4.01.000091	Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Dokumen	Dokumen hasil penyusunan Informasi Jabatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai persetujuan KEMENPAN	0	0	0	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2355	4.01.000093	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Dokumen	Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan hasil dari perhitungan kematangan perangkat daerah sesuai Permendagri No. 99 Tahun 2019.	0	0	0	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2356	4.01.000131	Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	Dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan meliputi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan beserta ringkasannya, laporan standar pelayanan minimal Tahun sebelumnya (N-1), pelaporan SPM tiap Tribulanan (I-IV) dan laporan koordinasi pemerintahan	5	5	5	10	10	10	10	Sekretariat Daerah
2357	4.01.000132	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Rakor Kewilayahan, Sinergitas Kecamatan, pembinaan perangkat kecamatan dan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat tingkat RT	5	5	5	5	5	5	5	Sekretariat Daerah
2358	4.01.000133	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah meliputi laporan LKPJ, Fasilitasi Hari Otonomi Daerah, Fasilitasi Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dan Koordinasi Otonomi Daerah	4	4	4	4	4	4	4	Sekretariat Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2359	4.01.000134	Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual meliputi : Pembentukan SK Pembantu Pencatat Nikah dan Perkawinan, SK Panitia Penyelenggaraan jamaah Haji Kota Blitar, Perwali Juknis Pemberian Jasa pertisipasi masyarakat kepada Guru Ngaji, Guru Minggu, Modin Kematian dan Juru Kunci Makam	5	6	6	6	6	6	6	Sekretariat Daerah
2360	4.01.000135	Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB meliputi : Perubahan SK Ranstrada, Juknis Ranstrada	3	3	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2361	4.01.000136	Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas meliputi : Laporan pemberian beasiswa kepada anak sekolah berprestasi dan dari keluarga tidak mampu, Fasilitasi kegiatan UKS	3	3	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2362	4.01.000139	Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	Produk hukum yang disusun adalah total produk hukum (seperti perda, perkada, dan keputusan kepala daerah) yang telah disusun	531	593	451	451	440	397	331	Sekretariat Daerah
2363	4.01.000140	Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum yang diproses penyelesaiannya dan difasilitasi oleh bagian hukum meliputi : litigasi dan non litigasi	4	4	4	4	4	4	4	Sekretariat Daerah
2364	4.01.000141	Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi adalah total produk hukum (Perda, Perkada dan Keputusan Kepala Daerah) yang telah didokumentasikan serta total informasi hukum yang dikelola	531	593	451	451	440	397	331	Sekretariat Daerah
2365	4.01.000142	Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri meliputi fasilitasi penyusunan Mou dan PKS, Muskomwil APEKSI dan Rakernas APEKSI	4	4	4	4	4	4	4	Sekretariat Daerah
2366	4.01.000143	Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	Dokumen Kerja sama luar negeri yang difasilitasi di Indonesia mencakup berbagai bentuk, seperti kerjasama bilateral, multilateral, dan dengan lembaga asing. Fasilitasi ini melibatkan pemerintah pusat, daerah,	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
2367	4.01.000144	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama berupa inventarisasi PKS dan Mou yang masih berlaku pada tahun berjalan	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2368	4.01.000145	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD meliputi : Pembentukan SK Dewan Pengawas PDAM, pelaksanaan rekrutmen direksi BPR, Pelantikan direksi BPR dan PDAM, Koordinasi dan kerjasama antara BPR dan PDAM	4	4	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2369	4.01.000146	Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian meliputi : Pembuatan laporan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dan TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) perbulan dan per tahun	3	3	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2370	4.01.000147	Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil meliputi : Koordinasi hasil pembinaan KUKM terkait penyusunan kebijakan	3	3	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2371	4.01.000148	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD meliputi : Koordinasi Awal pembentukan BLUD Puskesmas	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
2372	4.01.000150	Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah meliputi : rapat koordinasi penyusunan kebijakan dan penetapan kebijakan.	2	2	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2373	4.01.000151	Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan meliputi : Monev pelaksanaan pembangunan setiap bulan dan tribulan.	6	6	6	6	6	6	6	Sekretariat Daerah
2374	4.01.000152	Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan meliputi : monitoring bersama Walikota dan Tim TAPD.	2	2	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2375	4.01.000153	Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi : pendokumentasian dokumen tender/seleksi.	75	75	75	76	80	80	9	Sekretariat Daerah
2376	4.01.000154	Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik meliputi : fasilitasi penyedia pada katalog elektronik dan Rekapitulasi PBJ secara elektronik.	2	2	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2377	4.01.000155	Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui sosialisasi/bimtek/desk.	200	200	200	255	300	300	300	Sekretariat Daerah
2378	4.01.000156	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, meliputi : Melaksanakan koordinasi bersama OPD terkait	2	2	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2379	4.01.000159	Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berupa hasil fasilitasi dari Gubernur.	0	0	1	0	0	1	0	Sekretariat Daerah
2380	4.01.000164	Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Dokumen	Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan hasil dari perhitungan kematangan perangkat daerah sesuai Permendagri No. 99 Tahun 2019.	0	0	0	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2381	4.01.000167	Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Dokumen	Laporan Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota pada pemerintah daerah yang meliputi langkah-langkah penerapan Budaya Kerja Berakhlak antara lain, Internalisasi, penyelarasan sistem, pengukuran baseline, penyusunan dan implementasi agenda perubahan, pemantauan dan evaluasi, penghargaan dan apresiasi, serta penguatan secara berkelanjutan.	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2382	4.01.000183	Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan terhadap seluruh Perangkat Daerah di wilayahnya mengenai hal-hal yang harus dilakukan Pemda dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat berdasarkan Pasal 354 Ayat 2 UU 23/2014sebagai berikut: a. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat b. Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat c. Mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok & organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	21	21	21	21	21	21	21	Sekretariat Daerah
2383	4.01.000184	Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	1. Evaluasi dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah di wilayahnya terhadap pelaksanaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. 2. Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah	21	21	21	21	21	21	21	Sekretariat Daerah
2384	4.02.000005	Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan	Dokumen	Raperda Prakarsa DPRD Kota Blitar yang disosialisasikan kepada masyarakat	0	2	1	2	1	0	2	Sekretariat DPRD
2385	4.02.000007	Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	Dokumen hasil fasilitasi penyusunan perubahan propemperda Tahun 2025 dan propemperda kota Blitar Tahun 2026	1	1	2	2	2	3	5	Sekretariat DPRD
2386	4.02.000008	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	Dokumen hasil fasilitasi pembahasan Raperda Kota Blitar	6	8	7	7	8	10	10	Sekretariat DPRD
2387	4.02.000009	Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	Dokumen hasil fasilitasi penyusunan kajian perundang-undangan	0	0	0	1	1	0	1	Sekretariat DPRD
2388	4.02.000010	Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	Dokumen hasil fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Prakarsa DPRD Kota Blitar Tahun 2025	1	2	2	2	1	1	2	Sekretariat DPRD
2389	4.02.000011	Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	Dokumen hasil fasilitasi penyusunan dan perubahan tata tertib DPRD Kota Blitar	1	0	0	0	0	1	2	Sekretariat DPRD
2390	4.02.000013	Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	Fasilitasi pembahasan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) merupakan fasilitasi pembahasan KUA dan PPAS pada tahun anggaran N+1	2	2	2	2	2	2	2	Sekretariat DPRD
2391	4.02.000014	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	Fasilitasi Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS merupakan Fasilitasi Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun anggaran N	2	2	2	2	2	2	2	Sekretariat DPRD
2392	4.02.000015	Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	Fasilitasi Pembahasan APBD merupakan fasilitasi pembahasan APBD pada tahun anggaran N+1	2	2	2	2	2	2	2	Sekretariat DPRD

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2393	4.02.000018	Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	Fasilitasi Pembahasan Pertanggungjawaban APBD merupakan Fasilitasi Pembahasan Pertanggungjawaban APBD pada tahun anggaran N-1	4	4	4	4	2	2	2	Sekretariat DPRD
2394	4.02.000025	Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	Pengawasan penggunaan anggaran memfasilitasi anggota DPRD dalam pelaksanaan pengawasan meliputi sidak, hearing, rapat dengar pendapat bersama OPD mitra kerja komisi DPRD, tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan dan ganti rugi keuangan daerah	12	12	12	12	12	12	12	Sekretariat DPRD
2395	4.02.000026	Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	Fasilitasi Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah fasilitasi pembahasan laporan tahunan yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD mengenai kinerja pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran	0	0	0	0	2	2	2	Sekretariat DPRD
2396	4.02.000027	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan orientasi. Orientasi merupakan kegiatan proses pengenalan tugas, fungsi dan wewenang DPRD bagi DPRD Kab/Kota sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah. Kegiatan dilaksanakan pada awal masa jabatan Anggota DPRD ataupun pada saat adanya anggota baru karena PAW Anggota DPRD	1	0	0	0	0	1	0	Sekretariat DPRD
2397	4.02.000028	Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pendalaman tugas. Pendalaman tugas DPRD merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan kompetensi anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat di daerah. Penyelenggaran kegiatan pendalaman tugas bagi DPRD Kab/Kota dapat berasal dari BPSDM Prov, Perguruan Tinggi maupun partai Politik.	15	17	17	19	20	13	14	Sekretariat DPRD
2398	4.02.000029	Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	Kelompok pakar atau tim ahli merupakan pakar atau ahli yang mempunyai disiplin ilmu yang sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD yang diusulkan oleh anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD. Kelompok pakar/tim ahli disediakan ketika dilaksanakan pembahasan anggaran, pembahsan Raperda ataupun ketika pembahasan persoalan yang perlu menghadirkan tenaga ahli.	9	10	12	12	16	6	7	Sekretariat DPRD
2399	4.02.000030	Tenaga Ahli Fraksi	Orang	Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi. Jumlah Tenaga Ahli Fraksi sesuai dengan jumlah fraksi yang tersedia di DPRD (saat ini TA Fraksi di DPRD Kota Blitar berjumlah 5 orang)	4	4	4	4	4	5	5	Sekretariat DPRD

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2400	4.02.000032	Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	Dokumen Rencana Kerja DPRD merupakan dokumen program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh masing-masing Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Rencana Kerja DPRD merupakan acuan dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran bagi Sekretariat DPRD	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat DPRD
2401	4.02.000033	Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	Dokumen hasil publikasi kegiatan dewan untuk memberikan dan menyalurkan berita/informasi secara umum kepada masyarakat.	100	100	100	105	100	109	5	Sekretariat DPRD
2402	4.02.000035	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	Reses adalah kegiatan anggota DPRD di luar masa sidang, yang dilaksanakan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti menjadi usulan Pokir DPRD. Dokumen pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD merupakan usulan masyarakat berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses	2	3	3	2	3	2	0	Sekretariat DPRD
2403	4.02.000036	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	Pelaksanaan reses sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Pasal 87 ayat 3 bahwa Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses kecuali, pada persidangan terakhir dari 1 periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan).	50	75	75	50	75	50	3	Sekretariat DPRD
2404	4.02.000042	Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	Dokumen Laporan pelaksanaan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh anggota dan pimpinan DPRD untuk menyusun rencana, memantau, mengevaluasi, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi DPRD. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar DPRD, memperkaya proses perencanaan dan penganggaran, serta menjalin kerja sama yang konstruktif antar wilayah.	65	65	65	65	65	65	8	Sekretariat DPRD
2405	4.02.000043	Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	Laporan Kinerja DPRD adalah dokumen laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang dari Alat Kelengkapan DPRD yang telah dilaksanakan dan dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DPRD agar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang sinergi dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat DPRD
2406	4.02.000055	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	Pembahasan Rancangan Perda adalah rancangan Perda yang dibahas eksekutif bersama dengan DPRD	6	8	7	7	8	10	10	Sekretariat DPRD
2407	4.02.000063	Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	Fasilitasi Pembahasan APBD Perubahan merupakan fasilitasi pembahasan APBD Perubahan pada tahun anggaran N	2	2	2	2	2	2	2	Sekretariat DPRD

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2408	5.01.000001	Aparatur yang menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Orang	Jumlah aparatur yang ditugaskan menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan dan Perangkat Daerah. Aparatur dimaksud dapat berdasarkan SK Tim yang terdiri dari jabatan: 1. JF Perencana 2. JF Statistisi 3. JF Analisis Kebijakan 4. JF Pranata Komputer 5. JF Peneliti	2	3	3	14	14	12	11	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2409	5.01.000002	Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen	Jumlah bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan dalam rangka musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan	3	3	3	3	3	3	3	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2410	5.01.000003	Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	Jumlah berita acara dari hasil pelaksanaan forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.	3	3	3	3	3	3	1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2411	5.01.000004	Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	Jumlah berita acara yang dihasilkan dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	1	2	1	1	1	2	1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2412	5.01.000005	Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	Jumlah Berita Acara hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Musrenbang Kabupaten/Kota adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.	1	2	1	1	1	2	2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2413	5.01.000007	Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	Buku Profil Pembangunan Daerah adalah buku yang berisi data dan informasi tentang kondisi umum, visi, misi dan capaian program dan kegiatan pembangunan	1	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2414	5.01.000009	Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	Jumlah dokumen penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang mulai dikumpulkan pada tahapan persiapan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	1	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2415	5.01.000010	Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	Jumlah dokumen yang berisikan hasil analisis Kondisi Daerah yang dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah serta dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar. Disusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah.	1	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2416	5.01.000011	Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan progres pelaksanaan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan SIPD	1	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2417	5.01.000012	Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan hasil penerapan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan SIPD dalam pembangunan	1	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2418	5.01.000019	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD yang Ditetapkan	1	1	2	1	1	2	3	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2419	5.01.000022	Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	Jumlah dokumen rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD yang disusun	1	2	1	1	2	2	2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2420	5.01.000025	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	1	2	1	1	1	1	2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2421	5.01.000026	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	1	2	1	1	1	1	2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2422	5.01.000027	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	1	2	1	1	1	1	2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2423	5.01.000028	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	1	2	1	1	1	1	2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2424	5.01.000029	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	1	2	1	1	1	1	2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2425	5.01.000030	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan dan tahunan.	1	2	1	1	1	2	2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2426	5.01.000037	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang berisi Formulir Pengendalian Perencanaan dan Formulir Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana diatur	2	2	2	2	2	2	2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2427	5.01.000038	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	2	1	1	1	1	3	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2428	5.01.000039	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1	2	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2429	5.01.000040	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	2	1	1	1	1	5	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2430	5.01.000041	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	2	1	1	1	1	2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2431	5.01.000042	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	2	1	1	1	1	2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2432	5.01.000044	Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	Jumlah aparatur yang dilaksanakan pembinaan terkait pemanfaatan dan dan informasi dalam pembangunan daerah	30	30	30	30	30	30	30	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2433	5.01.000045	Orang yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	Jumlah Orang yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	2	2	4	4	5	5	5	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2434	5.01.000046	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	Jumlah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	1	2	1	1	1	2	2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2435	5.01.000048	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	6	6	6	6	6	6	6	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2436	5.01.000049	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	3	3	3	3	3	3	3	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2437	5.01.000050	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	5	5	5	5	5	5	5	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2438	5.01.000051	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	9	9	9	9	9	9	9	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2439	5.01.000052	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	6	6	6	6	6	6	6	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2440	5.01.000060	Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.	30	30	30	30	30	30	30	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2441	5.01.000061	Peserta Konsultasi Publik	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	150	150	250	250	250	250	250	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2442	5.01.000062	Peserta Musrenbang Provinsi	Orang	Jumlah Peserta Musrenbang Provinsi. Musrenbang Provinsi adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.	5	5	5	5	5	5	5	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2443	5.01.000064	Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2	2	2	2	2	2	1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2444	5.01.000065	Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	Jumlah usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang diverifikasi oleh Kecamatan	30	30	30	36	36	36	32	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2445	5.02.000001	Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	Dokumen KUA dan PPAS tahun n+1 yang dikoordinasikan, disusun, dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.	2	2	2	2	2	2	2	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2446	5.02.000002	Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	Dokumen Perubahan KUA dan PPAS tahun n yang dikoordinasikan, disusun, dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.	2	2	2	2	2	2	2	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2447	5.02.000003	RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Dokumen RKA-SKPD tahun n+1 yang dikoordinasikan, disusun dan diasistensi /diverifikasi.	68	68	68	68	68	68	68	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2448	5.02.000004	Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Dokumen Perubahan RKA-SKPD tahun n yang dikoordinasikan, disusun dan diasistensi/diverifikasi.	68	68	68	68	68	68	68	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2449	5.02.000006	Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Dokumen DPA-SKPD tahun n+1 yang dikoordinasikan, disusun dan diasistensi/diverifikasi.	68	68	68	68	68	68	68	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2450	5.02.000007	Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	"Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun n+1 yang dikoordinasikan, disusun, dibahas, disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan dievaluasi oleh Gubernur"	2	2	2	2	2	2	2	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2451	5.02.000008	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	"Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun n+1 yang dikoordinasikan, disusun, dibahas, disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan dievaluasi oleh Gubernur"	2	2	2	2	2	2	2	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2452	5.02.000009	Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	"Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang dikoordinasikan dan disusun (Perwali ASB)"	1	1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2453	5.02.000024	Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Pendampingan implementasi SIPD yang dalam penyusunan pelaporan keuangan	0	0	0	0	0	250	250	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2454	5.02.000026	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah yang didokumentasi setiap bulan.	12	12	12	12	12	12	12	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2455	5.02.000028	Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	Dokumen Anggaran Kas dan SPD masing-masing OPD yang disiapkan, dilaksanakan, dikendalikan dan diterbitkan setiap 3 bulan/triwulan.	272	272	272	272	272	116	116	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2456	5.02.000030	Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	"Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya yang didokumentasi setiap bulan."	12	12	12	12	12	12	12	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2457	5.02.000032	Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	"Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang dikoordinasikan dan dilaporkan setiap bulan"	12	12	12	12	12	12	12	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2458	5.02.000033	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	Hasil koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1	1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2459	5.02.000034	Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	“Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan OPD setiap 3 bulan."	352	352	352	344	344	348	344	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2460	5.02.000035	Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	SE Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan yang disusun pada awal dan akhir tahun	2	2	2	5	5	5	2	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2461	5.02.000036	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	"Pembinaan Penatausahaan Keuangan kepada Bendahara dan PPK-SKPD"	150	150	150	150	150	150	150	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2462	5.02.000038	Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban yang dilaksanakan dan didokumentasi setiap bulan, semester 1, sebelum di reviu, setelah reviu dan setelah audit.	402	402	402	16	16	16	16	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2463	5.02.000039	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	0	0	1	14	14	14	14	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2464	5.02.000040	Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	Laporan keuangan konsolidasi yang disusun sesuai SAP dan kebijakan akuntansi	0	0	1	1	1	4	4	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2465	5.02.000042	Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2466	5.02.000043	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	Dokumen Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang dikoordinasikan, disinkronisasi, dan disusun setiap Semester	2	2	2	2	2	2	2	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2467	5.02.000044	Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2468	5.02.000045	Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi (Perwali Kebijakan Akuntansi) yang disusun	1	1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2469	5.02.000046	Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	Pendampingan implementasi SIPD yang dalam penyusunan pelaporan keuangan	1	1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2470	5.02.000049	Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola	Dokumen	Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola disusun setiap tersedia alokasi dana cadangan	0	0	0	0	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2471	5.02.000050	Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan Analisis Investasi Pemerintah Daerah/Analisis Laporan Keuangan BUMD yang disusun setiap Tahun	0	0	0	0	0	0	2	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2472	5.02.000057	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	Laporan BTT yang disusun setiap bulan	12	12	12	12	12	12	12	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2473	5.02.000059	Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	Dokumen hasil Inventarisasi, dan Analisis data dokumen Keaungan Daerah serta publikasinya	4	4	4	4	4	4	4	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2474	5.02.000060	Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah yang disusun setiap tahun	0	0	0	0	0	0	1	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2475	5.02.000062	Standar Harga yang Disusun	Dokumen	Dokumen Standar Harga Tahun n+1 yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	2	2	2	2	2	2	2	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2476	5.02.000063	Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	"Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun n+1 yang disusun meliputi Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan"	1	1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2477	5.02.000064	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	"Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun n+1 yang disusun meliputi Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan"	2	2	2	2	2	2	2	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2478	5.02.000065	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	"Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun"	1	1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2479	5.02.000066	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	"Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai Permendargri No. 47 Tahun 2021 dan 7 Tahun 2024"	2	2	2	2	2	2	2	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2480	5.02.000067	Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	"Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah"	1	1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2481	5.02.000068	Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	"Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah"	1	1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2482	5.02.000069	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	"Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah"	1	1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2483	5.02.000070	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2484	5.02.000071	Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	"Laporan Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah"	1	1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2485	5.02.000072	Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	"Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dan dilaporkan setiap 3 bulan/triwulan"	4	4	4	4	4	4	4	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2486	5.02.000073	Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	"Laporan Barang Milik Daerah sesuai Permendargri No. 47 Tahun 2021 dan 7 Tahun 2024"	1	1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2487	5.02.000074	Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	"Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada pengurus barang OPD"	118	118	118	118	118	118	118	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2488	5.02.000075	Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	"Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah tahun n+1 dan perubahan tahun n yang disusun "	1	1	1	1	2	2	2	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2489	5.02.000076	Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	"Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah"	1	1	1	1	1	2	4	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2490	5.02.000077	Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	"Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah"	12	12	12	12	12	12	12	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2491	5.02.000079	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	"Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Pajak Reklame, Air Tanah, PBBP2, BPHTB, PBJT, Opsen PKB)"	9	9	9	9	9	9	9	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2492	5.02.000080	Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	"Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Pajak Reklame, Air Tanah, PBBP2, BPHTB, PBJT, Opsen PKB)"	9	9	9	9	9	9	9	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2493	5.02.000081	Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	"Dokumen Ketetapan Pajak Daerah yang ditetapkan per Jenis Pajak daerah (selain PBBP2, BPHTB dan Opsen)"	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2494	5.02.000082	Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	Penyelesaian Permasalahan yang Telah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti yang disusun setiap bulan	12	12	12	12	12	12	12	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2495	5.02.000084	Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1456	1536	1716	1921	1976	2373	2373	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2496	5.02.000085	Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	"Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah yang diusulkan oleh Wajib Pajak"	431	489	486	508	748	1746	1746	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2497	5.02.000086	Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	"Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah yang didokumentasikan setiap 3	12	12	12	12	12	12	12	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2498	5.02.000087	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	"Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah yang dilaporkan setiap 3 Bulan/Triwulan"	4	4	4	4	12	12	12	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2499	5.02.000088	Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	"Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai yang dilaporkan setiap bulan"	4	4	4	4	12	12	12	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2500	5.02.000093	DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Dokumen DPA-SKPD tahun n+1 yang dikoordinasikan, disusun dan diasistensi/diverifikasi.	68	68	68	68	68	68	68	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2501	5.02.000101	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Petugas/ ASN yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah	90	90	80	80	80	80	80	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2502	5.02.000117	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1 yang dikoordinasikan, disusun, dibahas, disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan dievaluasi oleh Gubernur	2	2	2	2	2	2	2	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2503	5.02.000123	Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah kepada Tim Akuntansi/Penyusun Laporan Keuangan SKPD	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2504	5.02.000153	Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	"Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah"	1	1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2505	5.02.000156	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	"Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Pajak Reklame, Air Tanah, PBBP2, BPHTB, PBJT, Opsen PKB)"	9	9	9	9	9	9	9	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2506	5.02.000158	Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	"Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya"	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2507	5.02.000160	Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	"Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang diberikan"	1357	2054	2570	2519	2799	3542	3542	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2508	5.02.000161	Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi yang disusun setiap bulan	12	12	12	12	12	12	12	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2509	5.02.000162	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	"Penagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak"	9	9	9	9	9	9	9	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2510	5.02.000163	Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	"Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah yang diusulkan oleh Wajib Pajak"	431	489	486	508	748	1746	1746	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2511	5.02.000164	Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	"Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah yang didokumentasikan setiap 3 Bulan/Triwulan"	0	0	0	71	22	29	4	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
2512	5.03.000001	Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen	Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN adalah dokumen yang memuat informasi mengenai telaah kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, keadaan demografis dan geografis dari instansi setempat, serta keuangan untuk melaksanakan pengadaan ASN.	1	1	1	1	1	1	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2513	5.03.000003	Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	Dokumen analisis kebutuhan dan formasi ASN serta laporan pemenuhan pegawai melalui fasilitasi pengadaan (tahapan perekrutan sampai penyerahan SK). Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK meliputi; 1. penyusunan rencana kebutuhan 5 tahunan; 2. dokumen fasilitasi pengadaan pegawai baru yang didalamnya terdapat: a. laporan fasilitasi pengadaan ASN b. usul NIP c. SK pengangkatan d. laporan evaluasi fasilitasi pengadaan CASN	1	1	1	1	1	1	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2514	5.03.000006	Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	Kegiatan dilaksanakan dalam rangka memberikan layanan fasilitasi administrasi pemberhentian ASN (BUP, Uzur Jasmani Rohani, Meninggal, APS, MPP	12	12	12	12	12	12	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2515	5.03.000008	Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	Fasilitasi Lembaga Profesi dimaksudkan untuk pemberian fasilitasi pada Lembaga Profesi ASN	1	1	1	1	1	1	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2516	5.03.000010	Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Pengelolaan data kepegawaian, penambahan fitur, pemeliharaan sistem dan monev pengelolaan sistem informasi kepegawaian	1	1	1	1	1	1	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2517	5.03.000011	Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	Output nyata dari serangkaian aktivitas pengumpulan, pemrosesan, dan penataan data kepegawaian untuk mendukung pengambilan keputusan serta administrasi organisasi	12	12	12	12	12	12	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2518	5.03.000013	Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	Kegiatan berupa fasilitasi mutasi yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	4	4	4	4	4	4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2519	5.03.000014	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	Rangkaian proses administratif dan substantif untuk memberikan penghargaan berupa peningkatan pangkat kepada ASN yang telah memenuhi syarat prestasi kerja dan pengabdian kepada negara.	2	2	2	2	2	6	6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2520	5.03.000016	ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	ASN yang secara berkelanjutan mengembangkan potensi, karakteristik, dan kemampuannya untuk memenuhi standar jabatan dan kebutuhan organisasi.	375	665	1125	484	541	1759	1765	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2521	5.03.000017	Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	Lingkup kegiatan assement center adalah pelaksanaan kegiatan asesment kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural ASN yang dilakukan oleh asesor, evaluasi kesenjangan kompetensi ASN dan pelaksanaan ujian dinas PNS oleh BKN	1	1	1	1	1	1	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2522	5.03.000018	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	Sekumpulan bukti tertulis atau rekaman data yang dihasilkan dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pengembangan kompetensi ASN.	1	1	1	1	1	1	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2523	5.03.000019	Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	Jumlah atau kumpulan berkas administrasi yang dihasilkan dari proses layanan pendidikan lanjutan bagi ASN, yang mencakup tahapan dari pengusulan hingga penyelesaian pendidikan.	27	28	30	31	33	35	35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2524	5.03.000020	Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	Instrumen verifikasi berupa naskah atau kumpulan berkas resmi yang membuktikan telah terlaksananya proses penyelarasan dan kemitraan antarunit atau instansi dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.	1	1	1	1	1	1	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2525	5.03.000022	Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan	Dokumen resmi yang menyajikan data sistematis mengenai efektivitas, capaian, dan dampak dari program pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan.	1	1	1	1	1	1	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2526	5.03.000023	ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	Jumlah atau persentase ASN yang telah mengikuti program pengembangan kompetensi dan dinyatakan lulus serta memiliki sertifikat keahlian/keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan fungsionalnya.	5	5	5	5	34	9	9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2527	5.03.000032	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	Keluaran tertulis (output) yang memuat catatan, data, dan analisis sistematis mengenai capaian hasil kerja dan perilaku kerja ASN dalam periode tertentu.	2	2	2	2	2	1	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2528	5.03.000034	ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	Penghargaan yang dimaksud adalah penghargaan yang berupa piagam SLKS yang disetujui. Satya Lencana Karya Satya merupakan pengakuan kepada ASN memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun	458	390	299	230	284	102	102	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2529	5.03.000037	ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) yang sedang atau telah menjalani proses penanganan atas pelanggaran kewajiban dan larangan, baik melalui tindakan preventif (edukasi/sosialisasi) maupun tindakan korektif (pemberian hukuman disiplin) sesuai dengan PP Nomor 94 Tahun 2021.	225	273	255	170	170	170	170	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2530	5.03.000038	Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN meliputi : pelaksanaan sidak, penemuan dugaan pelanggaran, pemeriksaan pegawai yang melanggar disiplin, penetapan hukuman disiplin, serta penyampaian dan pelaksanaan keputusan pelanggaran disiplin pegawai	12	12	12	12	12	12	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2531	5.03.000039	Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	Jumlah atau akumulasi berkas administrasi permohonan izin perceraian pegawai (PNS/ASN) yang telah diproses, diverifikasi, dan diterbitkan surat keputusannya (dikabulkan atau ditolak) oleh pejabat yang berwenang dalam satu periode waktu tertentu.	1	1	1	1	1	1	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2532	5.03.000047	Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Dokumen	Instrumen atau naskah dinas yang memuat hasil penilaian akhir terhadap kinerja dan perilaku kerja seorang pegawai sebagai dasar pengambilan keputusan pemberhentian.	12	12	12	12	12	12	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2533	5.03.000059	ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	Aparatur Sipil Negara (PNS maupun PPPK) yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi (Diploma, Sarjana, Magister, atau Doktor) berdasarkan penugasan atau izin resmi dari pejabat yang berwenang.	27	28	29	30	31	32	32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2534	5.03.000064	Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen	Dokumen resmi yang menjadi bukti fisik (output) dari seluruh rangkaian proses penyelarasan dan kolaborasi antara instansi pembina, instansi pengguna, atau lembaga pelatihan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat fungsional.	2	2	2	2	1	1	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2535	5.03.000066	Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Laporan	Akumulasi berkas fisik maupun digital yang disusun secara sistematis untuk mendokumentasikan seluruh rangkaian penilaian terhadap program pendidikan, pelatihan (diklat), serta proses sertifikasi bagi Pejabat Fungsional.	1	1	1	1	1	1	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2536	5.04.000001	Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	1	1	1	1	1	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2537	5.04.000003	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	Kegiatan pengembangan kompetensi teknis yang diselenggarakan untuk mengembangkan kompetensi teknis para ASN dilingkungan Pemerintah Kota Blitar dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan praktis yang digunakan dalam menjalankan tugas-tugas tertentu	307	307	307	969	428	2715	2720	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2538	5.04.000004	Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Dokumen	Kumpulan naskah dinas atau laporan tertulis yang merekam seluruh rangkaian aktivitas manajemen pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).	1	1	1	1	1	1	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2539	5.04.000011	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang	Banyaknya Aparatur Sipil Negara yang mengikuti upaya peningkatan kemampuan dan karakteristik (pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku) guna memenuhi tuntutan organisasi serta pelaksanaan tugas jabatan secara profesional.	307	307	307	24	24	24	166	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2540	5.04.000021	Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dokumen	Lingkup kegiatan berupa pelaksanaan orientasi ASN dan pengembangan kompetensi lainnya.	1	1	1	1	1	1	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2541	5.04.000028	Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	Dokumen pertanggungjawaban yang berisi data capaian kinerja dan evaluasi atas pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur di lingkungan instansi pemerintah.	5	5	5	5	5	5	5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2542	5.05.000012	Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen	Kuantitas dokumen hasil kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (kelitbangan) serta dokumen pengaturan yang dikelola secara sistematis melalui basis data kelitbangan untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*).	1	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2543	5.05.000013	Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi	Hasil analisis dan evaluasi hukum yang memberikan saran tindak lanjut terhadap suatu regulasi.	1	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2544	5.05.000016	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	Total akumulasi naskah atau laporan tertulis yang disusun secara sistematis berdasarkan kaidah ilmiah, yang memuat temuan, analisis, dan rekomendasi mengenai fenomena sosial, interaksi antarmanusia, struktur kemasyarakatan, maupun kebijakan publik yang telah selesai disusun dalam kurun waktu tertentu.	3	3	3	3	3	3	1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2545	5.05.000028	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	Fasilitasi Pengiriman dan Penyelenggaraan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Fasilitasi diklat Fungsional dan Diklat dasar di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar	1	1	1	1	1	1	2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2546	5.05.000035	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	Total output atau luaran fisik berupa dokumen yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang infrastruktur dalam satu tahun anggaran.	1	1	1	1	1	1	0	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2547	5.05.000040	Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	Total akumulasi dokumen formal yang dihasilkan dari seluruh rangkaian aktivitas kelitbangan (penelitian, pengembangan, dan perekayasaan/litbangyasa) dalam kurun waktu satu tahun anggaran.	1	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2548	5.05.000041	Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	Akumulasi dokumen tertulis resmi yang menyajikan data, analisis, dan evaluasi atas kegiatan pengujian (uji coba) maupun implementasi nyata dari sebuah desain teknis (rancang bangun), modifikasi model yang sudah ada (replikasi), maupun temuan baru (invensi) yang bertujuan untuk menyebarluaskan teknologi kepada masyarakat atau pengguna (difusi inovasi).	2	2	2	2	2	2	2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2549	5.05.000042	Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	Akumulasi dokumen tertulis yang menyajikan data, analisis, dan dokumentasi atas kegiatan penyebarluasan informasi (diseminasi) mengenai terobosan baru atau pembaruan dalam tata kelola pemerintahan.	1	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2550	5.05.000043	Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	Total dokumen tertulis yang disusun secara sistematis sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi, pemaparan, dan publikasi hasil-hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) atau masyarakat luas.	2	2	2	2	2	2	2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2551	5.05.000044	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	Akumulasi dokumen formal yang disusun sebagai bukti telah dilaksanakannya rangkaian kegiatan pemberian kemudahan, pendampingan, atau bantuan kepada pencipta/penemu dalam memperoleh perlindungan hukum atas karya intelektualnya.	1	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2552	5.05.000059	Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	Sekumpulan keterangan atau fakta mentah yang dihasilkan dari seluruh tahapan kegiatan ilmiah yang tersimpan dalam pangkalan data (*database*) yang mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan, bersifat valid, akurat, dan tidak mengalami perubahan yang tidak sah, dikelola melalui sistem informasi digital (seperti repositori ilmiah) untuk menjamin keberlangsungan (*sustainability*), serta adanya klasifikasi data (mana yang bisa dibuka untuk publik dan mana yang bersifat rahasia/HAKI).	1	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2553	5.05.000063	Riset Kebijakan	naskah	Penelitian yang berkenaan dengan perumusan dan rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan, dan lingkungan kebijakan	1	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2554	5.05.000066	Peserta Didik	Orang	Peserta Didik adalah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan dan lulus penilaian akhir yang diselenggarakan di ujung pelatihan sebagai bukti keikutsertaan dan kompetensi yang diperoleh dari keikutsertaan tersebut.	60	60	60	60	60	60	180	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2555	5.05.000068	Rencana Induk dan Peta Jalan	Dokumen	Rencana Induk dan Peta Jalan adalah dokumen rancangan berisi gagasan inti beserta cara mencapai tujuan kerja organisasi.	1	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2556	5.05.000069	Naskah Kebijakan	Dokumen	Naskah Kebijakan adalah dokumen akademik mengenai telaahan dan argumentasi mengenai sebuah kebijakan pemerintah.	3	3	3	3	3	3	3	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2557	5.05.000072	Anggaran Riset	TOE/Milyar Rupiah	Anggaran Riset adalah susunan rencana dan perkiraan mengenai biaya-biayai belanja yang ditujukan untuk melakukan penelitian.	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2558	5.05.000073	Hak Kekayaan Intelektual	Unit	Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek.	1	1	1	1	1	1	0	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2559	5.05.000074	Perjanjian Kerja Sama	Dokumen	Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.	1	1	1	1	1	1	0	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2560	5.05.000075	Sosialisasi dan Diseminasi	Dokumen	Sosialisasi dan Diseminasi adalah upaya membuat masyarakat kenal, paham, dan menghayati sesuatu serta merupakan proses, cara, dan tujuan agar terjadi perubahan pola pikir, sikap dan tindakan berdasarkan inovasi yang ditunjukkan.	2	2	2	2	2	2	2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2561	5.05.000076	Lokakarya, Pameran, dan Promosi	Berita Acara	Lokakarya, Pameran, dan Promosi adalah kegiatan perkumpulan dan perhimpunan orang banyak untuk melihat dan mengambil inspirasi dari kegiatan yang dilakukan pelaku pameran agar dapat meraih ilmu dan pengetahuan untuk dapat digunakan dalam kehidupan keseharian.	1	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2562	5.05.000077	Apresiasi Riset dan Inovasi	Berita Acara	Apresiasi Riset dan Inovasi adalah adalah setiap aktivitas penghargaan yang dilakukan sebagai hasil penggunaan, peresapan, dan penilaian seseorang terhadap sebuah riset dan inovasi.	2	2	2	2	2	2	2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2563	5.05.000079	Kodefikasi Teknologi Masyarakat	Unit	Kodefikasi Teknologi Masyarakat adalah kegiatan mendokumentasikan dan menerapkan kode pada teknologi yang ada beredar di masyarakat umum.	9	9	9	9	9	9	0	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2564	5.05.000080	Produk Unggulan Daerah	Unit	Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.	5	5	5	5	5	5	5	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2565	5.05.000081	Klaster Industri Berbasis Unggulan Daerah	Unit	Klaster Industri Berbasis Unggulan Daerah adalah konsentrasi geografis dari perusahaan dan institusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu, yang saling berhubungan karena kebersamaan dan saling melengkapi pada bidang yang menjadi keunggulan dan keunikan daerah.	1	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2566	5.05.000082	Lokakarya	Dokumen	Lokakarya adalah pertemuan antara para ahli (pakar) untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya.	1	1	1	1	1	1	0	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2567	5.05.000085	Rapat Koordinasi Teknis	Berita Acara	Rapat Koordinasi Teknis adalah kegiatan permusyawarahan pengarahan atas suatu hal khusus atau bersifat teknis untuk menemukan mufakat dalam penyelesaian atas suatu permasalahan.	1	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2568	5.05.000086	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah dokumen yang merinci hasil analisis pelaksanaan suatu kegiatan sebagai bentuk pemantauan dan penilaian atas kegiatan yang telah berlangsung dalam rangka mengambil penilaian dan pemelajaran untuk masukan bagi kegiatan berikutnya.	1	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2569	5.05.000087	Perangkat Lunak	Aplikasi	Perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer.	1	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2570	5.05.000088	Pendampingan Masyarakat	Berita Acara	Pendampingan Masyarakat adalah kegiatan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator.	1	1	1	1	1	1	0	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2571	5.05.000089	Daftar Kerja Sama	Dokumen	Daftar Kerja Sama adalah dokumen yang memuat rincian perjanjian kerja sama antara satu pihak dengan pihak atau banyak pihak lain untuk mencatat dan mengelola kerja sama yang dilakukan oleh Instansi dan untuk menjadi bahan pertimbangan sekaligus evaluasi program ke depannya.	1	1	1	1	1	1	0	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2572	5.05.000090	Laporan Kinerja	naskah	Laporan Kinerja adalah ikhtisar dari seluruh pekerjaan baik rutin maupun tambahan dalam periode waktu tertentu yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi.	1	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2573	6.01.000001	Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (audit kinerja, pengadaan CASN, Evaluasi SAKIP, Audit SPBE, Probity Audit, PUG, Monev SPM, dan/ atau pengawasan kinerja lainnya)	46	40	42	39	33	50	81	Inspektorat Daerah
2574	6.01.000002	Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (audit dan evaluasi Pendapatan, audit belanja, audit pengelolaan kas, audit persediaan, audit pengelolaan BMD, Monev Fisik, opname cash, Audit ketaatan) pada tahun berjalan	48	26	70	53	42	42	42	Inspektorat Daerah
2575	6.01.000003	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	Jumlah laporan yang dihasilkan dari proses reviu atas Laporan Kinerja (LKj) yang meliputi RKPD, PRKPD, KUA, KUPA, Renja, P Renja, LPPD, LKjIP, ASB, Kinerja Perijinan, Promosi Mutasi, Tata kelola UKPBJ, Kepatuhan BMD	30	30	74	50	90	81	103	Inspektorat Daerah

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2576	6.01.000004	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan yang meliputi DAK fisik, DAK Non Fisik, LK SKPD, LKPD, RKA, PRKA, Tata kelola pajak, P3DN	14	28	73	56	76	82	60	Inspektorat Daerah
2577	6.01.000006	Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2	2	2	3	3	4	3	Inspektorat Daerah
2578	6.01.000007	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2	2	2	2	4	4	4	Inspektorat Daerah
2579	6.01.000008	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	Laporan hasil pemeriksaan yang berisi data dan kesimpulan terkait kerugian negara/daerah.	0	0	2	2	2	2	2	Inspektorat Daerah
2580	6.01.000009	Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	Laporan yang berisi kesimpulan dari pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus yang meliputi Riksus, PDTT, Investigatif	7	3	4	5	8	5	3	Inspektorat Daerah
2581	6.01.000010	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	Draft pedoman untuk pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya.	4	4	4	13	4	3	4	Inspektorat Daerah
2582	6.01.000011	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	Draft pedoman untuk pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, dan kegiatan fasilitasi pengawasan lainnya.	2	2	2	2	4	4	4	Inspektorat Daerah
2583	6.01.000012	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (MR, SPIP)	10	8	8	11	30	30	30	Inspektorat Daerah
2584	6.01.000013	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang meliputi LHKPN, LHKASN, Gratifikasi, RB Unit Kerja dan PMPRB	1	2	2	1	10	14	10	Inspektorat Daerah
2585	6.01.000014	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (MCSP KPK, Gratifikasi, Benturan Kepentingan, WBS)	3	3	4	14	17	16	18	Inspektorat Daerah
2586	6.01.000015	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (ZI)	4	4	5	7	6	4	6	Inspektorat Daerah
2587	7.01.000001	Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat	Dokumen	Dokumen perencanaan teknis (DED/RAB) untuk perbaikan menyeluruh pada bangunan rumah dinas jabatan Camat.	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan
2588	7.01.000003	Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Kantor Lurah	Unit	Ketersediaan sarana prasarana perkantoran seperti meja, kursi, lemari, dan komputer untuk operasional pelayanan di Kelurahan.	63	65	62	66	63	69	13	Kecamatan
2589	7.01.000004	Kantor Lurah Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Berat	Unit	Jumlah bangunan kantor Kelurahan yang dilakukan perbaikan pada struktur utama atau kerusakan di atas 45%.	1	1	1	1	2	2	0	Kecamatan
2590	7.01.000005	Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang	Unit	Jumlah unit rumah dinas jabatan Camat yang mengalami perbaikan pada komponen non-struktural atau kerusakan antara 30% - 45% agar layak huni kembali.	1	1	3	2	1	2	0	Kecamatan
2591	7.01.000006	Dokumen Rencana Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi	Dokumen	Dokumen perencanaan teknis (DED), arsitektur, dan rincian anggaran biaya (RAB) untuk pembangunan ulang atau perbaikan menyeluruh gedung kantor Kelurahan.	1	1	1	1	2	2	0	Kecamatan
2592	7.01.000008	Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Dokumen	Dokumen hasil kesepakatan daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang akan dibawa ke tingkat Kecamatan.	21	21	21	21	21	21	21	Kecamatan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2593	7.01.000009	Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Laporan	Dokumen laporan mengenai pemantauan potensi konflik, gangguan keamanan, dan deteksi dini situasi sosial di tingkat Kelurahan.	8	8	8	9	8	9	0	Kecamatan
2594	7.01.000010	Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Lembaga	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan/pelatihan terkait fungsi tugas pokok mereka di Kelurahan.	91	92	93	100	153	151	105	Kecamatan
2595	7.01.000011	Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Laporan	Laporan dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembinaan mental spiritual, hari besar keagamaan, maupun pengajian rutin di wilayah Kelurahan.	7	6	6	12	11	11	2	Kecamatan
2596	7.01.000012	Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	Laporan mitigasi, evakuasi, dan penyaluran bantuan saat terjadi kejadian bencana di wilayah Kelurahan.	9	11	11	11	10	12	7	Kecamatan
2597	7.01.000013	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Laporan	Laporan fasilitasi, pembinaan, maupun pagelaran seni lokal sebagai upaya pelestarian budaya daerah di tingkat Kelurahan.	8	7	7	8	8	8	11	Kecamatan
2598	7.01.000014	Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Laporan	Dokumentasi aktivitas pos koordinasi untuk pemantauan tahapan pemilihan umum guna menjamin kelancaran dan keamanan di Kelurahan.	7	3	6	3	2	21	0	Kecamatan
2599	7.01.000015	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Laporan	Laporan pelaksanaan kompetisi, pembinaan atlet lokal, atau pemanfaatan fasilitas olahraga masyarakat di tingkat Kelurahan.	13	9	8	9	9	8	0	Kecamatan
2600	7.01.000016	Layanan Perizinan KDO/KDO Khusus	Layanan	Proses administrasi pengurusan surat izin operasional, pajak kendaraan, maupun kelengkapan legalitas lainnya bagi Kendaraan Dinas Operasional.	51	64	64	72	73	97	4	Kecamatan
2601	7.01.000017	BBM yang Disediakan untuk KDO/KDO Khusus	Liter	Volume ketersediaan bahan bakar minyak (dalam satuan liter) yang dialokasikan untuk menunjang mobilisasi kendaraan dinas di lingkungan Kecamatan.	3716	3716	4236	4497	4497	5754	8329	Kecamatan
2602	7.01.000018	KDO Kecamatan yang Dipelihara	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional (roda dua maupun roda empat) di Kecamatan yang mendapatkan pemeliharaan rutin/servis.	64	64	64	72	73	97	80	Kecamatan
2603	7.01.000020	Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Laporan	Dokumen laporan pemantauan potensi konflik, gangguan keamanan, dan deteksi dini situasi sosial di tingkat Kelurahan.	6	6	6	6	2	2	3	Kecamatan
2604	7.01.000021	Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Laporan	Laporan dokumentasi pelaksanaan kegiatan hari besar keagamaan di wilayah Kelurahan.	5	5	5	5	5	5	2	Kecamatan
2605	7.01.000022	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Laporan	Laporan fasilitasi, pembinaan, maupun pagelaran seni lokal sebagai upaya pelestarian budaya daerah di tingkat Kelurahan.	2	2	3	3	3	3	3	Kecamatan
2606	7.01.000023	Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Laporan	Dokumentasi aktivitas pos koordinasi untuk pemantauan tahapan pemilihan umum guna menjamin kelancaran dan keamanan di Kelurahan.	2	1	0	0	0	5	0	Kecamatan
2607	7.01.000024	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan	Laporan	Laporan pelaksanaan Program PKK dalam rangka pemberdayaan keluarga di tingkat Kecamatan.	9	9	9	9	9	9	3	Kecamatan
2608	7.01.000025	Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman	Dokumen	Kumpulan dokumen administrasi kontrak dan berita acara serah terima atas pengadaan alat atau jasa pemeliharaan taman dan area pemakaman di wilayah.	1	1	3	1	1	4	0	Kecamatan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2609	7.01.000028	Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait meliputi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan meliputi Kegiatan Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan hingga Musrenbang Kecamatan	13	13	14	14	13	13	3	Kecamatan
2610	7.01.000029	Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	Berkas evaluasi atau standar prosedur baru yang dibuat untuk mengoptimalkan kinerja birokrasi dan koordinasi di internal Kecamatan.	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan
2611	7.01.000030	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	Dokumen yang memuat standar operasional, jadwal, dan target capaian pelayanan administrasi publik di Kecamatan.	17	17	17	17	17	17	6	Kecamatan
2612	7.01.000031	Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan pendampingan Kecamatan kepada Kelurahan/Unit kerja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal.	15	15	15	15	38	38	19	Kecamatan
2613	7.01.000032	Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan hasil survei kepuasan masyarakat atau evaluasi kecepatan dan ketepatan layanan publik di wilayah Kecamatan.	1	1	1	1	1	1	11	Kecamatan
2614	7.01.000033	Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	Berkas administrasi koordinasi antar instansi (seperti PU atau DLH) terkait perbaikan jalan, drainase, atau lampu penerangan jalan umum.	1	1	1	1	1	1	1	Kecamatan
2615	7.01.000036	Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	Dokumentasi pemberian surat keterangan, rekomendasi, atau legalisasi administrasi kependudukan yang bukan bersifat izin usaha/bangunan.	1	1	1	1	1	1	0	Kecamatan
2616	7.01.000037	Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	Laporan atas pelaksanaan tugas-tugas dari Walikota yang didelegasikan pengelolaannya kepada Camat.	2	2	2	2	2	2	21	Kecamatan
2617	7.01.000039	Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	Dokumen keselarasan antara kegiatan CSR perusahaan dengan program pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan oleh Pemerintah Kecamatan.	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan
2618	7.01.000041	Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	Kehadiran aktif delegasi RT, RW, LPMK, dan PKK dalam forum pengambilan keputusan perencanaan pembangunan.	284	211	212	203	258	260	98	Kecamatan
2619	7.01.000042	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	Hasil pembangunan fisik fasilitas publik di wilayah kelurahan dengan melalui APBD.	59	31	57	131	135	142	519	Kecamatan
2620	7.01.000043	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	Jumlah Kelompok Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program padat karya atau pembangunan swadaya.	85	82	82	125	204	204	132	Kecamatan
2621	7.01.000044	Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	Dokumen hasil penilaian perkembangan kelurahan yang mencakup aspek pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan dalam periode tertentu.	0	0	1	1	1	1	0	Kecamatan
2622	7.01.000045	Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Meliputi Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya	100	100	101	95	183	190	63	Kecamatan
2623	7.01.000047	Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	Jumlah unit bantuan fisik (seperti tenda, kursi, alat peraga, dll) yang diserahkan untuk mendukung operasional organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal.	3	3	3	3	3	3	63	Kecamatan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2624	7.01.000048	Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	Laporan mengenai pendampingan terhadap UMKM atau kelompok usaha ekonomi produktif di wilayah setempat.	8	8	8	8	23	20	22	Kecamatan
2625	7.01.000054	Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Jumlah kepala keluarga yang mengikuti sosialisasi atau simulasi terkait pengamalan butir-butir Pancasila dalam kehidupan bertetangga.	40	40	40	40	40	40	1059	Kecamatan
2626	7.01.000056	Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan pembinaan atau bibit untuk pemanfaatan lahan pekarangan (seperti KRPL) guna mencukupi kebutuhan pangan mandiri.	170	120	120	145	170	150	1030	Kecamatan
2627	7.01.000058	Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	umlah kepala keluarga yang mendapatkan edukasi mengenai kriteria rumah sehat (ventilasi, sanitasi, pencahayaan) dan bantuan teknis atau administratif terkait legalitas kepemilikan aset properti.	40	40	40	40	70	40	988	Kecamatan
2628	7.01.000060	Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan penyuluhan dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta menjaga kualitas kesehatan lingkungan.	111	41	41	121	41	41	1028	Kecamatan
2629	7.01.000061	Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Jumlah anggota keluarga yang mengikuti pelatihan manajemen keuangan mikro, pembentukan koperasi, atau pengembangan unit usaha ekonomi produktif keluarga.	264	260	260	220	250	250	21	Kecamatan
2630	7.01.000062	Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Jumlah keluarga yang berpartisipasi dalam program penghijauan lingkungan, pengelolaan sampah rumah tangga (bank sampah), dan pelestarian sumber daya alam di sekitar tempat tinggal.	112	247	180	200	250	370	608	Kecamatan
2631	7.01.000063	Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	Jumlah anggota keluarga yang mengikuti simulasi evakuasi dan penguatan kapasitas menghadapi bencana alam yang relevan dengan potensi wilayah (seperti banjir atau gempa bumi).	42	82	40	84	40	135	396	Kecamatan
2632	7.01.000064	Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	Jumlah keluarga yang dilatih untuk menangani keadaan darurat skala kecil di rumah, seperti kebakaran kompor gas atau penanganan luka pertama.	40	40	40	40	40	40	0	Kecamatan
2633	7.01.000065	Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan bimbingan mengenai perencanaan usia pernikahan, pengaturan jarak kelahiran, dan pola asuh anak menuju keluarga sejahtera atau keluarga harmonis	50	40	40	40	70	70	0	Kecamatan
2634	7.01.000071	Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13	13	13	13	13	13	3	Kecamatan
2635	7.01.000072	Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Dokumentasi kegiatan silaturahmi, forum dialog, atau mediasi guna menjaga kerukunan antar warga.	45	7	7	9	9	9	7	Kecamatan
2636	7.01.000073	Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	Laporan koordinasi mengenai sosialisasi peraturan daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah kepada masyarakat agar tercipta kepatuhan hukum.	1	1	1	1	1	1	3	Kecamatan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2637	7.01.000076	Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	Laporan hasil sosialisasi peraturan daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah kepada masyarakat agar tercipta kepatuhan hukum.	1	1	1	1	1	1	3	Kecamatan
2638	7.01.000077	Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penguatan ideologi negara dan bela negara untuk memantapkan kesetiaan terhadap NKRI.	1557	2294	1489	2594	4458	5485	1225	Kecamatan
2639	7.01.000078	Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	Jumlah individu (peserta) yang menghadiri sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila dan cinta tanah air.	473	975	589	589	914	914	930	Kecamatan
2640	7.01.000079	Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti dialog antar-elemen masyarakat, upacara hari besar nasional, atau kegiatan seni-budaya yang bertujuan mempererat rasa persaudaraan dan integrasi sosial.	458	960	365	574	347	345	930	Kecamatan
2641	7.01.000080	Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	Jumlah warga yang hadir dalam forum dialog lintas budaya dan agama guna mencegah diskriminasi dan menjaga stabilitas keamanan lokal.	293	795	200	200	150	150	453	Kecamatan
2642	7.01.000081	Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	Dokumentasi kegiatan silaturahmi, forum dialog, atau mediasi guna menjaga kerukunan antar warga.	1	1	2	1	1	2	41	Kecamatan
2643	7.01.000083	Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	Berkas laporan atau dokumentasi pelaksanaan tugas-tugas khusus yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Camat yang tidak termasuk dalam daftar kewenangan rutin daerah.	2	3	4	3	3	3	3	Kecamatan
2644	7.01.000084	Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Notulen atau laporan hasil pemantauan wilayah, dan keputusan bersama antara Camat, Kapolsek, dan Danramil.	1	1	1	1	1	1	5	Kecamatan
2645	7.01.000088	Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	Laporan mengenai sosialisasi peraturan daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah kepada masyarakat agar tercipta kepatuhan hukum.	7	3	4	7	6	6	31	Kecamatan
2646	7.01.000095	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	Dokumen rencana atau laporan pelaksanaan patroli bersama, pengawasan wilayah, dan penertiban gangguan kamtibmas.	7	7	7	6	7	7	42	Kecamatan
2647	7.01.000096	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	Dokumen mengenai dukungan administrasi, penyediaan tempat, atau pembinaan teknis untuk menjamin kelancaran tugas operasional lembaga seperti RT, RW, dan LPMK.	1	1	1	1	1	1	0	Kecamatan
2648	7.01.000097	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	Berkas yang memuat hasil jaring aspirasi masyarakat di luar Musrenbang, seperti rembug warga, kunjungan lapangan, atau Forum Perangkat Daerah.	0	0	0	0	0	0	81	Kecamatan

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2649	8.01.000001	Anggota Paskibraka	Orang	Anggota Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/ menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.	80	5	78	78	78	80	80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2650	8.01.000002	Calon Paskibraka	Orang	Para pelajar yang melamar untuk mengikuti seleksi Paskibraka	200	0	200	200	200	200	200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2651	8.01.000003	Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	Dialog Interaktif dan Diskusi bersama untuk memberikan penguatan kepada peserta terkait pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan kepada para calon anggota paskibraka	1	1	1	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2652	8.01.000004	Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Kegiatan	Memberikan ruang aktivitas, pelatihan, pengajaran, dan sosialisasi bagi anggota paskibraka dan anggota purnapaskibraka untuk meningkatkan pemahaman terkait ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, serta siap untuk menjadi generasi muda yang menjadi contoh dari generasi muda lainnya dalam membangun NKRI	1	0	1	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2653	8.01.000005	Kelengkapan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Unit	Forum Dialog dan Pelatihan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Calon Aggota Paskibraka dan Anggota Paskibraka	0	0	0	0	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2654	8.01.000006	Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka	Orang	Penyediaan kebutuhan administrasi, seleksi, dan pelatihan calon anggota paskibraka	60	0	60	60	60	60	200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2655	8.01.000007	Kelengkapan pada pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Kegiatan Forum dialog, diskusi interaktif, dll terkait pemberian pembinaan lanjutan terkait pancasila dan wawasan kebangsaan bagi anggota purna paskibraka duta pancasila	1	0	1	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2656	8.01.000008	Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka	Unit	Penyediaan seluruh kebutuhan para calon anggota paskibraka dalam proses rekruitment dan seleksi	250	0	250	250	250	250	200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2657	8.01.000009	Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Unit	Penyediaan seluruh kebutuhan para anggota paskibraka dalam melaksanakan tugas pengibaran bendera	4	0	4	4	4	4	6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2658	8.01.000010	Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Penyediaan sarana dan prasarana, serta segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas purna paskibraka duta pancasila	3	0	3	3	3	3	2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2659	8.01.000011	Kelengkapan Pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Unit	Penyediaan ruang diskusi, pelatihan dan pengajaran kepada anggota paskibraka dan purnapaskibraka	1	0	1	1	1	1	2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2660	8.01.000012	Kelengkapan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Pemberian ruang diskusi, pelatihan dan pengajaran kepada anggota purna paskibraka duta pancasila	1	0	1	1	1	1	2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2661	8.01.000013	Kelengkapan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Penyediaan sarana dan prasarana dalam melakukan seleksi dan pengangkatan purnapaskibraka duta pancasila	0	0	0	0	2	2	2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2662	8.01.000014	Narasumber atau fasilitator kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	para pelatih dan pengajar dalam memberikan pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	5	0	5	5	5	5	3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2663	8.01.000015	Narasumber atau fasilitator pada pembentukan Paskibraka	Orang	para pengajar dan fasilitator dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	14	0	14	14	14	14	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2664	8.01.000016	Narasumber atau Pelatih dalam Pembentukan Paskibraka	Orang	para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	4	0	4	4	4	4	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2665	8.01.000017	Pamong/Pengasuh	Orang	Para pamong dan pengasuh angota paskibraka selama pelatihan	10	0	10	10	10	10	10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2666	8.01.000018	Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka	Orang	Panitia dalam proses seleksi dan rekuitment calon anggota paskibraka	130	0	130	130	130	130	69	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2667	8.01.000019	Pelatih Paskibraka	Orang	para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	1	0	1	1	4	4	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2668	8.01.000020	Peningkatan kompetensi bidang karakter Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan pembentukan karakter kebangsaan	0	0	0	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2669	8.01.000021	Peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa) Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa)	0	0	0	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2670	8.01.000022	Peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahraga) Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahraga)	0	0	0	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2671	8.01.000023	Peningkatan kompetensi kepemimpinan Pancasila Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kepemimpinan	0	0	0	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2672	8.01.000024	Peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi	0	0	0	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2673	8.01.000025	Peserta Calon Paskibraka	Orang	penyedian sarana, prasarana, dan kebutuhan calon anggota paskibraka	80	0	78	78	78	80	80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2674	8.01.000026	Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	Penyediaan sarana, prasarana, uang saku, dan kebutuhan para calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka dalam melaksanakan diskusi pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	80	0	78	78	78	78	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2675	8.01.000027	Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Orang	Penyediaan sarana, prasarana, uang saku, dan kebutuhan para anggota dan anggota purnapaskibraka dalam melaksanakan kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	80	0	78	78	78	78	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2676	8.01.000028	Peserta Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	Pembiayaan terkait kebutuhan peserta dalam pembinaan lanjutan kepada purnapakibraka duta pancasila	240	0	240	240	240	240	51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2677	8.01.000029	Peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	Pembiayaan untuk peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	0	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2678	8.01.000031	Purnapaskibraka	Orang	pembentukan purnapaskibraka	80	0	78	78	78	80	80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2679	8.01.000032	Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	Penangkatan, penetapan, dan pelantikan purnapaskibraka duta pancasila	0	0	0	0	78	78	80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2680	8.01.000033	Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	Pembiayan terkait penyediaan ruang diskusi dengan pembelajaran terkait Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	1	1	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2681	8.01.000034	Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi	Orang	Pembiayan terkait Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota Paskibraka	130	0	130	130	130	130	69	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2682	8.01.000035	Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Orang	Penyediaan sarana, prasarana, kebutuhan dan honor Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka	45	45	45	45	45	45	45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2683	8.01.000036	Training of Trainer Kepamongan	Kegiatan	Penyelenggaraan TOT Kepamongan bagi Anggota Paskibraka dan Anggota Purnapaskibraka	10	0	10	10	10	10	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2684	8.01.000037	Transportasi dalam Pembentukan Paskibraka	Unit	kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transportasi dalam pembentukan paskibraka	2	0	2	2	2	2	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2685	8.01.000038	Transportasi pada pembentukan paskibraka	Unit	kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transportasi pada pembentukan paskibraka	2	0	2	2	2	2	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2686	8.01.000039	Transportasi Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Unit	kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transport pelaksana tugas paskibraka	2	2	2	2	2	4	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2687	8.01.000042	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Penyediaan forum diskusi dan dialog terkait Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100	0	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2688	8.01.000043	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	Pelaksanaan Monev dan Penyusunan Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	1	1	1	1	1	2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2689	8.01.000044	Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	Pelaksanaan kegiatan forum diskusi terkait Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1	1	1	1	1	1	3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2690	8.01.000045	Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	Pembentukan dan Penetapan Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	0	0	0	50	0	51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2691	8.01.000046	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1	1	1	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2692	8.01.000047	Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1	1	1	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2693	8.01.000048	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1	1	1	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2694	8.01.000049	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1	1	1	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2695	8.01.000050	Paskibraka	Orang	Program Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila	80	0	78	78	78	80	78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2696	8.01.000053	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi dan bimtek, terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	100	100	100	100	200	160	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2697	8.01.000054	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi, bimtek, pelatihan terkait koordinasi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	100	100	100	100	200	300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2698	8.01.000055	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	Laporan Capaian Kinerja terkait Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Sebelumnya	11	11	11	11	11	11	8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2699	8.01.000064	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti dan melaksanakan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun Sebelumnya)	725	0	763	750	850	850	200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2700	8.01.000065	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	Dokumen Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun Sebelumnya)	1	1	1	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2701	8.01.000069	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegaiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	475	4185	590	90	1810	1810	2040	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2702	8.01.000070	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Tahun Sebelumnya)	3	3	3	4	2	3	3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2703	8.01.000075	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Koordinasi (Diklat, Sosialisasi, Pelatihan dll) di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100	0	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2704	8.01.000091	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialiasis, Bimtek, Kursus, dan/atau Pelatihan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	125	125	125	125	125	121	220	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2705	8.01.000093	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Tahun Sebelumnya)	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2706	8.01.000104	Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Laporan Pelaksanaan & Dokumen SK Anggota Forkopimda)	1	1	1	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

RKPD Kota Blitar tahun 2027 merupakan perencanaan tahunan kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025–2029 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027, program strategis nasional dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2027 serta memerhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2025. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional sekaligus bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu penyelarasan perencanaan pembangunan menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi nasional, kondisi ekonomi Jawa Timur serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan RKPD tahun 2027. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Timur yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kota Blitar. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik tahun sebelumnya dan perkiraan atau prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2027. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal dan kebijakan keuangan dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2027.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Sepanjang tahun 2025, performa ekonomi global menunjukkan pertumbuhan yang sangat berbeda antar kawasan. Dinamika kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS), hubungan ekonomi antara AS-Tiongkok, dan eskalasi konflik di Timur Tengah menjadi faktor yang menentukan arah perekonomian dunia. Ketegangan dagang yang meningkat melalui kebijakan tarif agresif menimbulkan ketidakpastian dan gejolak di pasar keuangan. Stabilitas hubungan AS-Tiongkok menjadi krusial karena setiap perubahan kebijakan dapat berpengaruh pada arus perdagangan, investasi, dan rantai pasok global secara signifikan.

Ketegangan geopolitik dunia yang masih berlanjut dimana perang Rusia dan Ukraina di Eropa masih berlangsung hingga Mei 2026, memasuki tahun keempat konflik sejak invasi Februari 2022 dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah per Mei 2026 berada pada titik kritis, dipicu oleh konflik lanjutan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Ancaman penutupan Selat Hormuz dan potensi pangkalan rahasia Israel di Irak meningkatkan eskalasi, berpotensi

menimbulkan rantai pasok energi yang akan memicu lonjakan harga komoditas dan tekanan inflasi.

Harga komoditas energi, terutama minyak mentah, mengalami tren menurun pada 2025, tetapi mengalami kenaikan di awal 2026 yang dipicu konflik di Timur Tengah. Pelemahan di 2025 tersebut disebabkan oleh proyeksi surplus produksi global dengan kisaran harga berada pada level USD60 per barel. Harga batu bara juga terus mengalami tren penurunan pada 2025 sejalan dengan komitmen banyak negara untuk beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan rendah emisi. Penurunan harga komoditas energi akan memberikan tekanan pada pendapatan negara-negara pengekspor sumber daya alam, termasuk Indonesia.

Kondisi sektor keuangan global masih sangat sensitif terhadap arah kebijakan moneter bank sentral utama dan dominasi dolar Amerika Serikat memicu tekanan depresiasi pada mata uang negara berkembang. Hal tersebut juga meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri dalam valuta asing sehingga berpotensi mempersempit ruang fiskal negara berkembang termasuk Indonesia.

Di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat dan solid. Setelah tumbuh 3,70 persen pada 2021, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,31 persen pada 2022 dan tetap terjaga pada level tinggi sebesar 5,05 persen pada 2023. Kinerja tersebut didorong oleh kuatnya permintaan domestik, terutama dari konsumsi rumah tangga dan investasi, serta didukung berbagai langkah pemulihan yang ditempuh pemerintah melalui stimulus fiskal dan moneter. Kombinasi kebijakan tersebut berhasil menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak dan memperkuat fondasi pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.

Momentum pertumbuhan tersebut terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2024, perekonomian Indonesia tumbuh 5,03 persen dan melanjutkan tren pertumbuhan diatas 5 persen selama tiga tahun berturut-turut, ditopang oleh permintaan domestik yang solid, peningkatan investasi, serta aktivitas manufaktur yang tetap kuat. Memasuki tahun 2025, perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat dengan pertumbuhan mencapai 5,11 persen. Secara umum, capaian tersebut didukung oleh kuatnya permintaan domestik, pertumbuhan investasi yang tinggi, belanja pemerintah yang optimal, serta kinerja ekspor yang tetap stabil. Selain itu, penempatan kas negara pada bank komersial sebagai strategi *cash management* turut mendukung likuiditas perekonomian. Dari sisi produksi, sektor-sektor bernilai tambah tinggi serta sektor yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat menjadi sumber utama pertumbuhan.

Badan Pusat Statistik merilis Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 terhadap triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,61 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,14 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,81 persen. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2026 mencapai Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.447,7 triliun. Sedangkan Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 terhadap triwulan IV-2025 terkontraksi sebesar 0,77 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 8,20 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen PK-P mengalami kontraksi terdalam sebesar 30,13 persen. Kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur

perekonomian Indonesia secara spasial, dengan kontribusi mencapai 57,24 persen dan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,79 persen (y-on-y).

Bank Indonesia dalam dokumen Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 menyebutkan prospek ekonomi global diperkirakan masih meredup pada Tahun 2026 dan 2027. Dengan lima karakteristik yaitu:

1. Kebijakan tarif AS berlanjut yang mengakibatkan turunnya perdagangan dunia, meredupnya multilateralisme, sehingga menimbulkan bangkitnya bilateral dan regionalisme.
2. Pertumbuhan ekonomi dunia melambat, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok. Penurunan inflasi lebih lambat sehingga mempersulit kebijakan moneter bank sentral.
3. Tingginya utang Pemerintah dan suku bunga negara maju. Karena defisit fiskal besar. Berdampak tingginya bunga dan beban fiskal negara berkembang.
4. Tingginya kerentanan dan risiko sistem keuangan dunia.
5. Kerentanan dan risiko pasar keuangan global semakin tinggi sejalan dengan maraknya penerbitan dan perdagangan mata uang dan aset digital oleh pihak swasta.

Dinamika, prospek dan risiko perekonomian global yang penuh gejolak dan tantangan tersebut berimplikasi besar pada perekonomian negara-negara berkembang termasuk Indonesia, dan karenanya perlu direspons dengan kebijakan ekonomi nasional yang optimal, tepat, menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan lebih tinggi, berdaya tahan, tangguh dan mandiri.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 menjadi pedoman utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pelaksanaan pembangunan nasional serta dirancang untuk mendukung transformasi struktural menuju Indonesia Emas.

Di tengah gejolak global yang dinamis dan tantangan struktural domestik, kebijakan fiskal 2027 diarahkan untuk mewujudkan pembangunan nasional dengan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2027 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”. Selaras dengan hal tersebut, strategi ekonomi dan fiskal 2027 dalam jangka pendek diharapkan dapat meredam gejolak secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka menengah secara optimal untuk memperkokoh kemandirian bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan untuk semua.

Dalam rangka menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan secara optimal, kebijakan fiskal tahun 2027 dirancang tetap ekspansif, terarah, dan terukur. APBN terus dijaga tetap sehat dan kredibel, dengan terus melakukan reformasi fiskal dalam rangka mobilisasi pendapatan yang diselaraskan dengan kapasitas perekonomian, meningkatkan kualitas dan efisiensi belanja, serta inovasi pembiayaan untuk mendorong kinerja perekonomian dan kesejahteraan dengan Tema Kebijakan Fiskal tahun 2027 adalah “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”.

Melalui tema ini, Pemerintah menegaskan arah kebijakan pembangunan nasional yang menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (*pro growth*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*pro welfare*). Tema tersebut sekaligus menjadi landasan strategis untuk mendorong produktivitas, memperkuat daya saing, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial secara simultan.

Untuk memastikan arah kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, pelaksanaannya difokuskan pada Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yang terdiri dari 8 (delapan) klaster dan 1 (satu) klaster pendukung (enabler) yang keseluruhan mencakup 60 (enam puluh) program kerja. Pertama, kedaulatan pangan. Kedua, kemandirian energi dan air (16 program kerja). Ketiga, pendidikan (13 program kerja). Keempat, kesehatan (4 program kerja). Kelima, hilirisasi dan industrialisasi (5 program kerja). Keenam, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana (5 program kerja). Ketujuh, ekonomi kerakyatan dan desa (2 program kerja). Kedelapan, penurunan kemiskinan (2 program kerja). Sedangkan 1 (satu) klaster pendukung (enabler) yaitu pertahanan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi (4 program kerja).

Adapun Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Sasaran Pembangunan tahun 2026 - 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2026 - 2027

NO	URAIAN	APBN 2026	KEM PPKF 2027
1	Pertumbuhan Ekonomi %	5,4	5,8 – 6,5
2	Inflasi %	2,5	1,5 - 3,5
3	Nilai tukar (Rp/USD)	16.500	16.800 – 17.500
4	Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,9	6,5 - 7,3
5	Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/Barel)	70	70 - 90
6	Lifting Minyak (ribu barel per hari)	610	602 - 615
7	Lifting Gas (ribu barel setara minyak per tahun)	984	934 - 977

Sumber: Kementerian Keuangan RI, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2027, 2026.

Tabel 3.2 Sasaran Pembangunan tahun 2026 - 2027

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	APBN 2026	KEM PPKF 2027
1	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0,0 – 0,5	0,0
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5	6,0 – 6,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4,96	4,30 - 4,87
4	Gini Rasio (Indeks)	0,377 – 0,380	0,362 – 0,367
5	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,57	0,575
6	Indeks Kesejahteraan Petani	0,7731	0,8038
7	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35,00	40,81

Sumber: Kementerian Keuangan RI, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2027, 2026.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Kinerja perekonomian Jawa Timur yang membaik pada triwulan IV tahun 2025 mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur keseluruhan tahun 2025 lebih tinggi. Ekonomi Jawa Timur pada tahun 2025 tumbuh 5,33% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 sebesar 4,93% (yoy). Akselerasi ekonomi Jawa Timur ditunjang oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga, investasi, dan net ekspor. Dari sisi penawaran, percepatan kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2025 terutama ditopang oleh kinerja LU Industri Pengolahan, LU Pertanian, dan LU Penyediaan Akomodasi Makan Minum sejalan dengan akselerasi konsumsi rumah tangga dan net ekspor. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2025 yang lebih tinggi tertahan oleh perlambatan konsumsi pemerintah seiring pembatasan belanja daerah. Hal ini berimplikasi terhadap perlambatan beberapa LU utama khususnya LU Perdagangan dan LU Konstruksi.

Sementara Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur merilis bahwa Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2026 terhadap Triwulan IV-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 1,25 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 15,85 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 2,47 persen.

Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2026 terhadap Triwulan I-2025 meningkat sebesar 5,96 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 13,44 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang tumbuh sebesar 20,33 persen.

Secara struktur, lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I-2026 dengan kontribusi sebesar 31,45 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 61,51 persen.

Tema RKPD Provinsi Jawa Timur 2027 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri”, dengan tujuan yang menjadi acuan Pembangunan Daerah Tahun 2027, adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Kemiskinan;
2. Terwujudnya Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas;
3. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif;
5. Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis, Toleran dan Inklusif;
6. Terwujudnya kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur meliputi:

1. Jatim Sejahtera, Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan.
2. Jatim Kerja, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas.
3. Jatim Akses, Memperkuat Infrastuktur Konektivitas Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan.
4. Jatim Agro, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan.
5. Jatim Cerdas, Memperkuat Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan.
6. Jatim Sehat, Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan.
7. Jatim Berkah Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.
8. Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.
9. Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, pada Rancangan Akhir (Rankhir) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tmur Tahun 2027 disusun dengan menetapkan sejumlah sasaran utama yang terukur yang direfleksikan melalui Indikator Makro (Inmakro) Daerah yang diarahkan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta penurunan ketimpangan antar wilayah, yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Indikator Makro Daerah Provinsi Jawa Timur

No	Indikator Makro	Target Provinsi Jawa Timur
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00 – 6,10
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,80 – 8,70
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,50 – 4,47
4	Gini Rasio (Indeks)	0,369 - 0,379
5	Indeks Modal Manusia | Indeks Pembangunan Manusia	0,65 – 0,66 | 76,10 – 77,00

Sumber: BAPPERINDA Kota Blitar, 2026.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Blitar

3.1.3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Tahun 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar mencatat laju pertumbuhan ekonomi Kota Blitar menunjukkan tren yang stabil dan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi melambat yaitu mencapai 5,31%, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Kondisi statistik perekonomian daerah dapat ditentukan dengan beberapa indikator makro ekonomi antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, gini ratio, indeks pembangunan manusia dan struktur ekonomi pembangunan daerah bidang ekonomi yang tersedia di daerah. Secara rinci kondisi perekonomian Kota Blitar tersebut terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Kondisi Makro Ekonomi Kota Blitar Tahun 2025

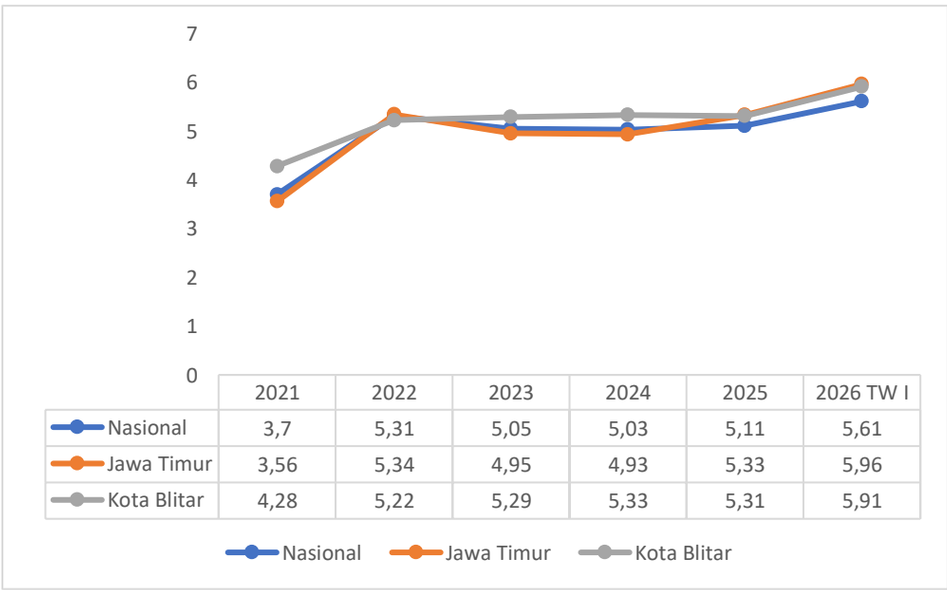
No.	Uraian Indikator	TARGET 2025	REALISASI 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,6–6,2	5,31
2	Angka kemiskinan	6,63-6,02	6,60
3	IPM	81,38 – 81,45	82,03
4	Gini Ratio	0,37 – 0,36	0,340
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,38–3,88	4,28

Sumber: BAPPERINDA Kota Blitar, 2026, diolah.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan adalah seberapa besar laju pertumbuhan ekonominya. Laju pertumbuhan ekonomi ini merupakan ukuran turunan dari PDRB. Adapun PDRB merupakan agregat atau total nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut dalam satu kurun waktu tertentu. Besaran PDRB mencerminkan potensi ekonomi suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya.

Ekonomi Kota Blitar cenderung membaik sejak tahun 2021 yang dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang Kembali menyentuh titik positif sebesar 4,28 persen dan terus meningkat hingga 5,33 persen pada tahun 2024. Angka ini masih lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 yang sebesar 4,93 persen, juga diatas laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,03 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi Kota Blitar relatif lebih kuat dan kompetitif dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Stabilitas pertumbuhan yang berada di atas 5 persen selama tiga tahun berturut-turut juga mencerminkan struktur ekonomi daerah yang cukup tangguh serta efektivitas kebijakan pembangunan yang dijalankan. Namun perekonomian Kota Blitar mengalami sedikit perlambatan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada 2025 menjadi 5,31 persen. Perlambatan ini terjadi karena adanya penurunan kegiatan perekonomian di Kota Blitar, ditandai dengan berkurangnya kegiatan konstruksi, administrasi pemerintah, dan jasa lainnya karena dampak efisiensi. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Kota Blitar sebagai berikut:



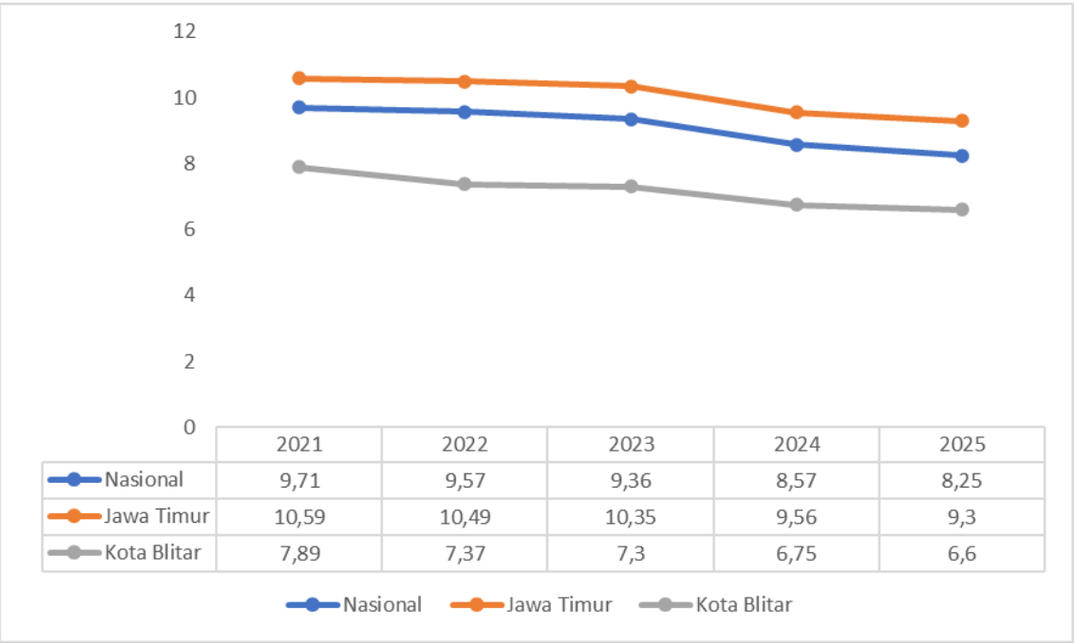
	2021	2022	2023	2024	2025	2026 TW I
Nasional	3,7	5,31	5,05	5,03	5,11	5,61
Jawa Timur	3,56	5,34	4,95	4,93	5,33	5,96
Kota Blitar	4,28	5,22	5,29	5,33	5,31	5,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2026.

b. Angka kemiskinan

Selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, angka kemiskinan di Kota Blitar terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Kota Blitar mencapai 7,89. Pada tahun 2022 turun menjadi 7,37 atau turun sebesar 0,52 poin dari tahun 2021 dan terus turun menjadi 7,30 di tahun 2023 atau turun sebesar 0,07 poin dari tahun 2022. Penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar dari tahun 2023 ke 2024 sebesar 0,55 poin lebih rendah daripada penurunan rata-rata kemiskinan Propinsi Jawa Timur dari 2023 ke 2024 sebesar 0,56 poin dan lebih rendah daripada penurunan rata-rata kemiskinan Nasional dari 2023 ke 2024 sebesar 0,33 poin.

Pada tahun 2025, angka kemiskinan Kota Blitar kembali menurun menjadi 5,33 persen. Angka ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan memperkuat tren positif pengentasan kemiskinan di daerah. Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang sebesar 9,5 persen dan nasional sebesar 8,25 persen pada tahun 2025, tingkat kemiskinan Kota Blitar jauh lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Blitar relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	9,71	9,57	9,36	8,57	8,25
Jawa Timur	10,59	10,49	10,35	9,56	9,3
Kota Blitar	7,89	7,37	7,3	6,75	6,6

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2026.

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Selama lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar selalu berada pada kategori menengah ke atas dan menunjukkan tren meningkat. IPM Kota Blitar pada tahun 2020 mencapai 78,57, sedangkan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 mencapai 71,71 dan Nasional pada tahun yang sama mencapai 71,94. Pada tahun 2021 IPM Kota Blitar mencapai 79,27 dan meningkat menjadi 80,15 pada tahun 2022, kemudian tahun 2023 menempati peringkat tujuh di Jawa Timur dan termasuk status “sangat tinggi” dengan nilai 80,78 atau meningkat 0,63 poin dari tahun 2022. IPM Kota Blitar tahun 2024 menempati peringkat lima di Jawa Timur dan termasuk status “sangat tinggi” dengan nilai 81,44 atau meningkat 0,66 poin dari tahun 2023. Sementara tahun 2025 sebesar 82,03. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar secara konsisten lebih baik dari rata – rata nasional dan Provinsi Jawa Timur. IPM

Kota Blitar juga berada pada level IPM “Sangat Tinggi”, dengan capaian diatas 80,00. Perkembangan IPM selama tahun 2020 – 2024 dapat sebagai berikut:

Tabel 3.5 IPM Kota Blitar menurut Indikator Penyusunnya

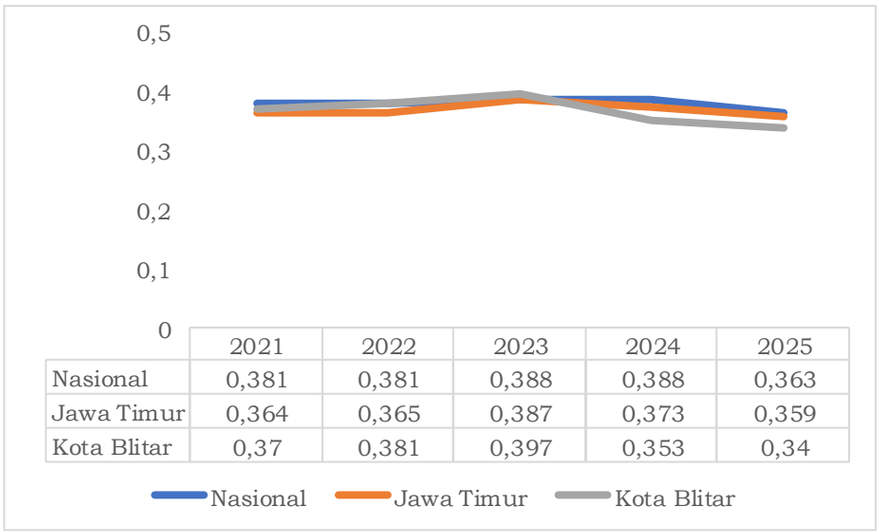
Tahun 2020 – 2025

Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,46	74,71	74,97	75,20	75,47
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,33	14,56	14,57	14,81	14,82
Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,35	10,65	10,78	10,82	10,83
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Ribu Rupiah	13.816	14.058	14.548	14.933	15,586
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	79,27	80,15	80,78	81,44	82,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2026

d. Gini Ratio

Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia secara Nasional yang diukur menggunakan Indeks Gini adalah sebesar 0,388, sedangkan Indeks Gini Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 0,387. Sementara pada tahun 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia secara nasional yang diukur menggunakan Indeks Gini tercatat sebesar 0,363, sedangkan Indeks Gini Provinsi Jawa Timur berada pada angka 0,359. Adapun Indeks Gini Kota Blitar pada tahun 2025 sebesar 0,340. Dibanding dengan Indeks Gini Nasional dan Provinsi Jawa Timur, Indeks Gini pada Kota Blitar sedikit lebih rendah daripada Nasional dan Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 0,353. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kota Blitar memiliki tingkat ketidaksetaraan pendapatan yang lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

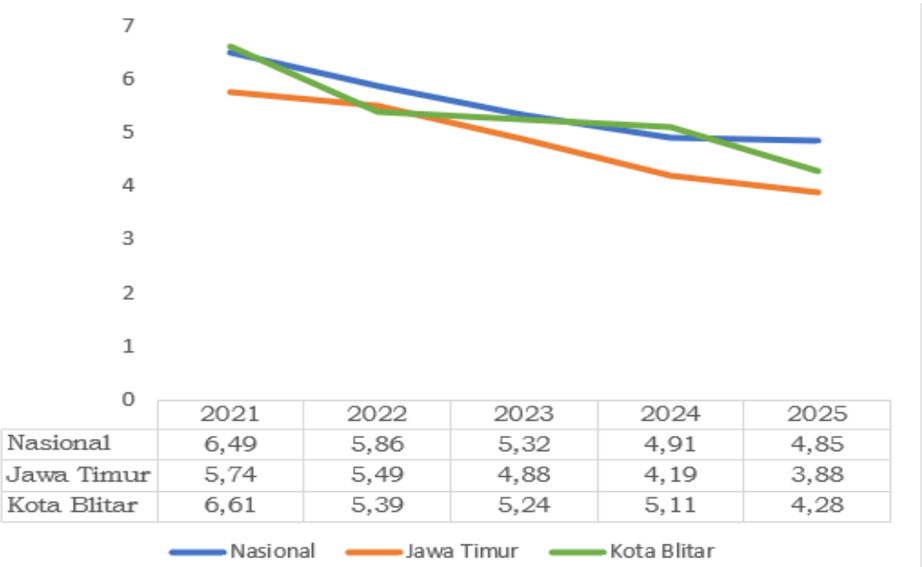


	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	0,381	0,381	0,388	0,388	0,363
Jawa Timur	0,364	0,365	0,387	0,373	0,359
Kota Blitar	0,37	0,381	0,397	0,353	0,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2026.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran Terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 5,24 persen mengalami penurunan sebesar 0,15 persen dibanding TPT pada Agustus 2022 dengan penurunan jumlah pengangguran sebanyak 379 orang dari total jumlah pengangguran sebanyak 4.571 orang. TPT di tahun 2024 sebesar 5,11 dan tren positif ini berlanjut pada Agustus 2025, di mana TPT Kota Blitar tercatat sebesar 4,28 persen. Angka tersebut menunjukkan penurunan yang lebih signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga memperlihatkan tren penurunan yang konsisten.



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	6,49	5,86	5,32	4,91	4,85
Jawa Timur	5,74	5,49	4,88	4,19	3,88
Kota Blitar	6,61	5,39	5,24	5,11	4,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2026.

Penyusunan proyeksi dan prakiraan kondisi makro ekonomi Kota Blitar Tahun 2026 dirancang terintegrasi serta sejalan dengan arah perkembangan ekonomi Nasional maupun target-target makro pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Kebijakan ini diambil guna memastikan adanya sinergi stimulus fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Secara umum, struktur perekonomian Kota Blitar sejauh ini menunjukkan performa dan kondisi yang stabil. Ketahanan ekonomi lokal didorong oleh aktivitas lokal yang kuat serta adaptasi ekosistem usaha pasca pandemi yang berjalan optimal.

Stabilitas dan proyeksi pertumbuhan positif perekonomian Kota Blitar pada tahun 2026 didasarkan pada analisis mendalam terhadap:

1. Akselerasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

   Sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan di Kota Blitar mulai menunjukkan kemajuan struktural. UMKM lokal kini memiliki pasar yang lebih tersegmentasi dan spesifik. Pendekatan klasterisasi dan segmentasi ini memperkuat daya saing produk lokal terhadap guncangan pasar luar serta memastikan keberlanjutan perputaran modal pelaku usaha.

2. Ekspansi industri berskala nasional.

   Hadir dan beroperasinya perusahaan berskala nasional yang berproduksi secara langsung di wilayah Kota Blitar menjadi penopang ekonomi baru. Keberadaan investasi industri ini diproyeksikan berkontribusi nyata terhadap peningkatan daya beli (*purchasing power*) masyarakat luas dan penyerapan tenaga kerja secara masif, khususnya pada level usia produktif, dimana diharapkan mampu menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Blitar secara signifikan.

3. Pengendalian inflasi daerah yang efektif.

   Kestabilan ekonomi makro Kota Blitar didukung penuh oleh tingkat inflasi yang terkendali. Meskipun dalam beberapa dinamika waktu terjadi fluktuasi dan kenaikan harga komoditas bahan pokok, kondisi tersebut hanya berlangsung dalam jangka pendek. Dinamika harga dapat diredam dan dikendalikan dengan cepat pada periode berikutnya berkat respon kebijakan proaktif dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Blitar melalui program intervensi pasar, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan pasokan.

3.1.3.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2027

Selaras dengan Tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, Tema Pembangunan Kota Blitar tahun 2027 adalah “Kota Berkarakter dengan Smart Governance dan Smart Economy” dengan fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, peningkatan kualits pelayanan publik, penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas SDM guna mewujudkan generasi emas yang cerdas dan berkarakter serta pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan.

Kota Blitar memegang peranan krusial sebagai simpul utama dalam pengembangan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Secara geografis, lokasinya di dataran rendah yang subur dengan aksesibilitas tinggi menjadikannya titik hubung strategis bagi wilayah di sekitarnya. Dengan dukungan infrastruktur perkotaan yang mapan serta fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan yang lengkap, Kota Blitar telah mengukuhkan eksistensinya sebagai pusat pelayanan regional yang andal.

Nilai historis sebagai lokasi Makam Proklamator Ir. Soekarno memperkuat posisi Kota Blitar sebagai destinasi wisata sejarah nasional yang berdampak besar pada ekonomi lokal. Nilai ini menjadi fondasi bagi RPJMD 2025-2030 yang dirancang untuk mewujudkan Kota Blitar yang SAE (Santun, Amanah, dan Excellent) melalui pengembangan sektoral dan regional yang terukur.

Guna mencapai target pembangunan tersebut, kebijakan ekonomi daerah diprioritaskan pada langkah-langkah strategis berikut:

1. Penguatan Konektivitas & Infrastruktur Regional

   Mengakselerasi kerja sama dengan Kabupaten Blitar untuk optimalisasi jalan penghubung, guna memperlancar arus logistik dan mobilitas penduduk.

2. Transformasi Ekonomi & Perdagangan

   Mengembangkan Blitar Trade Center (BTC) sebagai pusat ekosistem perdagangan terintegrasi serta melakukan revitalisasi pasar tradisional untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal di tengah keterbatasan sumber daya alam.

3. Ekosistem Kreatif & Investasi

   Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan digital dengan target pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5,3%. Hal ini didukung oleh peningkatan kualitas perizinan untuk menarik investasi di sektor perhotelan, industri rokok, dan pariwisata.

4. Hilirisasi & Kemandirian Lokal

   Mengembangkan potensi pertanian dan industri kecil-menengah (IKM) melalui program hilirisasi komoditas unggulan guna memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi bagi masyarakat.

Melalui sinergi program unggulan ini, Kota Blitar diproyeksikan tidak hanya menjadi kota wisata sejarah, tetapi juga menjadi salah satu motor penggerak ekonomi yang modern, mandiri, dan inklusif di wilayah selatan Jawa Timur.

Target Indikator Makro Kota Blitar tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Target Indikator Makro Kota Blitar Tahun 2027

No.	Uraian Indikator	Target 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,08 - 5,54
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,50 - 6,14
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,27 - 4,08
4	Rasio Gini	0,327 - 0,346
5	Indeks Pembangunan Manusia	83,20 - 84,10
6	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2eq)	677066,79

Sumber : BAPPERINDA Kota Blitar, 2026.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan
8. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memerhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2027 secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2027 secara umum difokuskan pada upaya peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah baik dalam pengelolaan potensi pendapatan daerah yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya maupun pengelolaan belanja daerah yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2027 sebagai pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan perencanaan dan penganggaran lebih fokus pada program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Walikota Blitar sebagai pelaksanaan tahun pertama RPJMD Tahun 2025-2029. Efektivitas kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2027 tidak terlepas dari

kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kota Blitar, untuk itu kebutuhan belanja daerah mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD. Perhitungan kemampuan keuangan daerah tahun 2027 mempertimbangkan beberapa aspek yaitu tren rata-rata pertumbuhan, proporsi dan tingkat realisasi tiap komponen APBD 3 (tiga) tahun sebelumnya, regulasi pemerintah pusat terkait pemulihan ekonomi dan kemandirian fiskal maupun kebijakan lain yang berimplikasi pada perhitungan kemampuan daerah dan potensi pertumbuhan ekonomi Kota Blitar. Tantangan keuangan daerah tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kemandirian fiskal daerah dengan pemulihan, peningkatan dan pengoptimalan sumber-sumber pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah dengan pertimbangan atau proyeksi penurunan atas Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Timur.
2. Pada sisi belanja daerah adalah tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas, belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja daerah dan masih kurang efisiennya belanja operasional.
3. Pada sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.

Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, ketergantungan pada pembiayaan konvensional menjadi kendala. Pemerintah Kota Blitar harus mampu mengeksplorasi skema pembiayaan kreatif dan inovatif guna mendanai pembangunan infrastruktur strategis tanpa mengganggu stabilitas kas daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah di Kota Blitar Tahun 2027 didasarkan pada kebijakan ekonomi daerah yang disinergikan dan diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional sebagaimana termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 beserta Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2027 serta diselaraskan dengan kebijakan ekonomi Provinsi dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Harmonisasi kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah merupakan modal penting menuju Indonesia Emas 2045. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menjadikan sinergi kebijakan fiskal nasional menjadi salah satu ruang lingkup yang ditujukan untuk meningkatkan keselarasan antara kebijakan fiskal pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan fiskal. Beberapa instrumen kebijakan dalam UU HKPD antara lain adalah pelaksanaan (i) opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai upaya sinergi pemungutan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperkuat *local taxing power*; (ii) evaluasi *earmarking* pajak daerah untuk meningkatkan akuntabilitas publik atas pengenaan pungutan daerah; (iii) tersedianya opsi pembiayaan kreatif di daerah seperti obligasi, sukuk, dan dana abadi daerah, yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk mengakselerasi pembangunan dan ekonomi daerah; (iv) penyelenggaraan *platform digital* sinergi kebijakan fiskal nasional dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Nasional; (v) sinergi bagan akun pusat dan daerah; dan (vi) *integrated monitoring* dan evaluasi pendanaan desentralisasi. Pemerintah bersama Pemerintah Daerah terus berkomitmen

untuk mewujudkan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang *impactful, innovative*, dan berintegritas untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Kebijakan PDRD diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah sekaligus menjaga iklim investasi dan kualitas pelayanan publik. Strategi optimalisasi dilakukan melalui penguatan basis data, digitalisasi layanan, sinergi pemungutan pajak (seperti Pajak Kendaraan Bermotor/PKB dan Mineral Bukan Logam dan Batuan/MBLB), serta interkoneksi data antar pemerintah. Penetapan target pendapatan harus realistis berdasarkan kondisi makroekonomi dan potensi penerimaan PDRD. Selain itu, pemberian insentif fiskal dilakukan secara selektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mempertimbangkan aspek keadilan.

Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pada tahun 2027 direncanakan pendapatan daerah bersumber dari 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (bagian laba BUMD) dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; 2) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya (Dana Insentif Daerah), Pendapatan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan); 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Sebagaimana ketentuan pada Tabel T-C.20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, analisis pendapatan daerah dimulai dari realisasi pendapatan n-3 yaitu TA 2023 s.d. TA 2025 dan proyeksi/target pada tahun n+1. Realisasi pendapatan daerah Kota Blitar selama kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi termasuk pada masing-masing jenis pendapatan daerah. Realisasi pendapatan daerah tahun 2023 merangkak naik sejalan dengan pulihnya perekonomian setelah pandemi Covid-19 dan gejolak inflasi, yaitu kenaikan sebesar 1,10 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2024 juga mengalami kenaikan namun turun pada tahun 2025 dimana objek pendapatan yang signifikan turun (adalah Pajak Kendaraan Bermotor PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang sebelumnya komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah menjadi Pendapatan Pajak Daerah.

Perencanaan pendapatan daerah pada tahun 2027 diperkirakan naik sebesar 5,72% dari tahun 2026 yang dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan naik sebesar 8,67 persen yang dihitung dengan memerhatikan realisasi 3 (tiga) tahun terakhir serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah. Penurunan signifikan pada Opsen PKB dan BBNKB dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
    a. Pajak Daerah, ditargetkan turun sebesar 4,69 persen dalam rangka penyesuaian terhadap target Opsen PKB dan BBNKB sementara untuk objek pajak lainnya ditargetkan naik dibanding tahun 2026.
    b. Retribusi Daerah, ditargetkan naik sebesar 21,42 persen, dengan kenaikan signifikan adalah objek retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
    c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan naik sebesar 3,14 persen.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan turun sebesar 7,45 persen dengan penurunan yang signifikan terhadap jasa giro pada Kas Daerah dan pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain.

2. Pendapatan transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah, diasumsikan naik 4,69 persen.

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diestimasi naik sebesar 4,50 persen dengan memerhatikan realisasi penerimaan 3 (tiga) tahun terakhir dan kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2027 yang tertuang pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027 dimana TKD tahun 2027 direncanakan naik dibanding tahun 2026 serta informasi resmi terkait Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pengembangan Program Perpustakaan, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Dana BOKKB.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah diasumsikan naik 6,14 persen diestimasi dengan memerhatikan realisasi penerimaan 3 (tiga) tahun terakhir tahun terakhir serta perkiraan asumsi makro di tahun mendatang yang berpotensi terhadap penetapan target pendapatan pada tahun yang direncanakan. Sedangkan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur tidak diperhitungkan.

7. Lain-lain pendapatan yang sah yang komponen pendapatannya berasal dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) diasumsikan naik sebesar 2,15% menyesuaikan estimasi sementara atas kepesertaan jaminan kesehatan.

Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah, kebijakan pendapatan daerah diarahkan melalui:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperhitungkan berdasarkan potensi dari masing-masing obyek PAD dengan memerhatikan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya serta perkiraan asumsi makro di tahun mendatang yang berpotensi terhadap penetapan target pendapatan pada tahun yang direncanakan.

b. Opsen pajak yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diperhitungkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya dan memerhatikan alokasi sementara dari Provinsi Jawa Timur.

c. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah dilakukan melalui:

i. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah secara optimal melalui penambahan jumlah objek pajak yang disinkronkan dengan perizinan yang masuk di Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta penilaian secara individu terhadap objek pajak.

ii. Penguatan pemungutan pajak daerah melalui kemudahan dan variasi pembayaran secara online maupun manual. Penguatan program PADA MOVE ON mencakup pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak secara online (bekerjasama dengan Bank Jatim, BRI, BNI, Mandiri, Kantor Pos, Tokopedia, Indomart, Alfamart) untuk memberikan kemudahan pada masyarakat serta menghindari penundaan pembayaran pada masyarakat serta menghindari penundaan pembayaran.

iii. Pemutakhiran data wajib pajak dan pengkajian tarif pajak daerah, termasuk penilai individu atas objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

iv. Peningkatan inovasi IT dalam pelayanan pajak daerah.

v. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat melalui Mall Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

vi. Optimalisasi pendayagunaan dan perluasan jenis aset-aset daerah untuk meningkatkan retribusi daerah, diantaranya penyewaan gedung pemerintah dan fasilitas umum.

vii. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak tepat waktu.

viii. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengelola pendapatan daerah yang lebih professional.

ix. Otimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah, pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan.

Hal ini sebagaimana dituangkan ke dalam tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Blitar

Tahun 2023 s.d 2028

No	Uraian	Jumlah (Rp)					
		Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Anggaran 2026	Proyeksi 2027	Proyeksi 2028
1	PENDAPATAN						
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
3	Pajak Daerah	56.381.185.255,00	54.179.720.917,80	80.925.544.955,40	91.246.340.110,00	86.967.580.480,00	87.500.000.000,00
4	Retribusi Daerah	7.830.222.821,23	107.123.314.608,00	105.698.896.690,00	104.093.510.620,00	126.385.941.753,00	129.535.000.000,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.042.119.574,56	979.436.641,76	1.181.168.435,64	1.212.000.000,00	1.250.000.000,00	1.275.000.000,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	106.342.156.180,37	7.283.631.148,88	5.191.365.946,06	6.263.336.020,00	5.796.477.767,00	4.975.000.000,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	171.595.683.831,16	169.566.103.316,44	192.996.976.027,10	202.815.186.750,00	220.400.000.000,00	223.285.000.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)					
		Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Anggaran 2026	Proyeksi 2027	Proyeksi 2028
8	PENDAPATAN TRANSFER						
9	Transfer Pemerintah Pusat						
10	Dana Bagi Hasil	92.510.557.565,00	89.902.080.000,00	87.361.090.200,00	40.313.834.000,00	40.424.500.000,00	32.680.545.100,00
11	Dana Alokasi Umum	417.003.510.313,00	443.238.812.000,00	461.919.554.375,00	377.274.733.000,00	398.200.000.000,00	405.200.000.000,00
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik	9.770.554.691,00	26.140.002.027,00	533.052.578,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	67.415.695.578,00	62.034.580.679,00	65.953.126.318,00	68.375.479.000,00	69.211.499.000,00	68.375.573.000,00
16	Dana Insentif Daerah	53.546.779.000,00	32.033.190.000,00	6.407.817.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	640.247.097.147,00	653.348.664.706,00	622.174.640.471,00	485.964.046.000,00	507.835.999.000,00	506.256.118.100,00
18	Transfer Antar Daerah						
19	Pendapatan	106.195.788.000,00	106.082.874.400,00	68.915.659.850,00	65.340.625.000,00	69.350.000.000,00	69.350.000.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)					
		Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Anggaran 2026	Proyeksi 2027	Proyeksi 2028
	Bagi Hasil						
20	Bantuan Keuangan	1.524.913.621,00	1.741.530.000,00	1.565.530.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.720.701.621,00	107.824.404.400,00	70.481.189.850,00	65.340.625.000,00	69.350.000.000,00	69.350.000.000,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer	747.967.798.768,00	761.173.069.106,00	692.655.830.321,00	551.304.671.000,00	577.185.999.000,00	575.606.118.100,00
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
24	Pendapatan Lainnya	9.005.217.412,53	9.145.864.913,42	12.105.077.894,71	9.300.000.000,00	9.500.000.000,00	9.600.000.000,00
25	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	9.005.217.412,53	9.145.864.913,42	12.105.077.894,71	9.300.000.000,00	9.500.000.000,00	9.600.000.000,00
26	JUMLAH PENDAPATAN	928.568.700.011,69	939.885.037.335,86	897.757.884.242,81	763.419.857.750,00	807.085.999.000,00	808.491.118.100,00

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2026, diolah.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran melalui pendekatan *money follow program*. Pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan menjadi prioritas yang harus tercapai terutama dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Pemerintah Kota Blitar menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Kota Blitar yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan perintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Penetapan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan tetap memerhatikan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Penetapan target capaian kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaanya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai kententuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan belanja daerah pada tahun 2027 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 1,16 persen dibandingkan tahun 2026 yang dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1. Belanja operasi diperhitungkan turun sebesar 1,20 persen, pada komponen belanja pegawai diupayakan turun sebesar 3,03 persen dalam rangka penyesuaian alokasi belanja pegawai diluar TKD paling tinggi 30% yang dipenuhi paling lambat tahun 2027 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Belanja modal diprediksikan mengalami kenaikan sebesar 31,40 persen dibanding dengan alokasi Tahun Anggaran 2026 dalam upaya peningkatan belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Belanja tak terduga direncanakan sama dengan alokasi TA 2026 yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan sebelumnya dan dikaitkan dengan permasalahan atau isu strategis yang dihadapi maka ditetapkan kebijakan belanja daerah tahun 2027 sebagai berikut:

a. Pemanfaatan belanja daerah dilakukan secara efisien, efektif dan bertanggungjawab sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

b. Belanja daerah dialokasikan secara proposional untuk belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga dengan prioritas sebagai berikut:

   1) Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai pengeluaran atau belanja yang bersifat mengikat, *mandatory spending* dan kebijakan tematik yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

      a) Belanja yang bersifat mengikat adalah pengeluaran yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai dan belanja rutin perkantoran meliputi pembayaran listrik, telepon dan internet.

      b) Kebijakan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending)* meliputi:

         i. Belanja pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah, dengan memedomi penandaan subkegiatan untuk anggaran belanja pendidikan sebagaimana diatur dengan keputusan menteri keuangan mengenai penandaan rincian belanja pendidikan untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD.

         ii. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa yaitu DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi dan ADD, Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

         iii. Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% dari total belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun 2027 belanja pegawai masih dialokasikan melebihi 30% yaitu sebesar 36,08%.

         iv. Belanja wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya sesuai ketentuan perundang-undangan, antara lain:

            i) Hasil penerimaan Opsen PKB, paling rendah 10% digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

            ii) hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10% digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan

infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha.

iii) hasil penerimaan Pajak Rokok bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota paling rendah 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Rokok.

iv) Hasil penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) paling rendah 10% digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan uantitas air tanah meliputi penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur serapan, pelestarian hutan atau pepohonan dan pengelolaan limbah.

c) Kebijakan tematik yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya:

i. Standar Pelayanan Minimal (SPM) mempedomani Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta peraturan teknis lainnya terkait SPM.

ii. Belanja untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) seperti program Sekolah Rakyat, Swasembada Pangan dan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

iii. Anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi.

iv. Belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota 2025-2029.

3) Prioritas III, dimaksudkan untuk pemenuhan belanja penyelenggaraan urusan dan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, diantaranya:

a) Urusan pemerintahan umum, bidang Pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan seterusnya sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

b) Pengawasan paling sedikit sebesar 1% dari total belanja daerah.

c) Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan paling sedikit 5% dari pendapatan daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penganggaran belanja barang dan jasa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai tema dan prioritas pembangunan sesuai rencana kebutuhan barang milik daerah.

d. Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dan belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD Tahun 2027.

e. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

f. Pengalokasian belanja modal untuk pembangunan infrastrukur dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, pelayanan publik dan pemulihan dan peningkatan ekonomi.

g. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.

h. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

i. Mengalokasikan belanja usulan masyarakat hasil Musrenbang RKPD maupun Pokok-pokok Pikiran DPRD.

j. Mendukung kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah.

Proyeksi belanja daerah sebagaimana dituangkan ke dalam tabel berikut:

Tabel. 3.8

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

Kota Blitar

Tahun 2023 s.d 2028

No	Uraian	Jumlah (Rp)					
		Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Anggaran 2026	Proyeksi 2027	Proyeksi 2028
1	BELANJA						
2	BELANJA OPERASI						
3	Belanja Pegawai	314.865.852.902,00	346.522.094.817,00	356.460.445.460,00	351.614.754.550,35	340.964.390.645,21	344.638.167.907,89
4	Belanja Barang dan Jasa	443.446.489.987,36	430.109.209.209,71	417.914.688.774,62	386.172.001.514,45	393.504.931.085,94	383.597.474.767,11
5	Belanja Hibah	40.770.317.144,00	45.820.694.832,00	24.921.441.528,00	21.691.944.800,00	15.863.187.755,00	35.882.049.800,00
6	Belanja Bantuan Sosial	20.627.654.900,00	18.650.356.985,00	14.089.349.850,00	8.003.061.700,00	7.908.800.000,00	8.003.061.700,00
7	Jumlah Belanja Operasi	819.710.314.933,36	841.102.355.843,71	813.385.925.612,62	767.481.762.564,80	758.241.309.486,15	772.120.754.175,00
8	BELANJA MODAL						
9	Belanja Tanah	0	2.696.905.689,00	0,00	2.950.677.600,00	4.950.677.600,00	-
10	Belanja Peralatan dan Mesin	26.322.308.618,00	20.744.067.013,00	20.593.270.804,00	11.328.083.327,47	26.538.304.915,00	16.504.429.151,00
11	Belanja Gedung	62.954.436.910,00	55.789.927.363,00	18.578.868.738,00	21.065.586.708,00	23.060.721.500,00	21.565.586.708,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)					
		Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Anggaran 2026	Proyeksi 2027	Proyeksi 2028
	dan Bangunan						
12	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	45.263.635.846,00	51.349.969.945,00	32.735.803.302,00	24.503.452.228,73	23.931.269.798,85	24.468.026.066,00
13	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.097.644.616,00	1.541.538.234,00	1.699.091.944,00	114.208.700,00	268.715.700,00	557.322.000,00
14	Belanja Aset Lainnya	0	199.622.250,00	216.706.948,00	40.000.000,00	95.000.000,00	275.000.000,00
15	Jumlah Belanja Modal	136.638.025.990,00	132.322.030.494,00	73.823.741.736,00	60.002.008.564,20	78.844.689.513,85	63.370.363.925,00
16	BELANJA TIDAK TERDUGA						
17	Belanja Tidak Terduga	2.413.757.451,00	2.111.475.435,00	2.600.101.163,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
18	Jumlah Belanja Tidak Terduga	2.413.757.451,00	2.111.475.435,00	2.600.101.163,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
19	Jumlah Belanja	958.762.098.374,36	975.535.861.772,71	889.809.768.511,62	830.483.771.129,00	840.085.999.000,00	838.491.118.100,00
20	SURPLUS/DEFISIT	-30.193.398.362,67	-35.650.824.436,85	7.948.115.731,19	-67.063.913.379,00	-33.000.000.000,00	-30.000.000.000,00

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2026, diolah.

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
b. Pencairan Dana Cadangan
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
f. Penerimaan Piutang Daerah
g. Penerimaan Dana Bergulir
h. Penerimaan Hasil Penarikan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan ditempuh melalui:

a. Pembentukan dana cadangan
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
c. Pembayaran pokok utang
d. Pemberian pinjaman daerah
e. Pemberian Dana Bergulir

Pembiayaan Daerah adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dengan membandingkan rencana pendapatan daerah dan belanja daerah tahun 2027 terdapat defisit APBD sebesar 3,93% atau sebesar Rp33.000.000.000,00. Atas defisit APBD tersebut direncanakan dipenuhi atau ditutup dari penerimaan pembiayaan daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah Kota Blitar tahun 2027 diarahkan sebagai berikut:

a. Proyeksi SiLPA tahun anggaran 2026 dipergunakan sebagai sumber penerimaan pembiayaan tahun 2027 dalam rangka menutup defisit anggaran dengan proposi yang cukup dan memerhatikan dinamika kemampuan keuangan daerah yaitu sebesar 5,42% atau Rp.45.000.000.000,00, turun sebesar 33,90% dari proyeksi Tahun Anggaran 2026.
b. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembentukan Dana Cadangan dalam rangka pendanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2029 yang akan ditetapkan dengan peraturan daerah Kota Blitar tentang dana cadangan sebesar Rp10.000.000.000,00 dan Penyertaan Modal pada BUMD Multi Usaha sebesar Rp2.000.000.000,00 yang akan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Adapun proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel 3.9

Tabel 3.9

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Blitar Tahun 2023 s.d 2028

No	Uraian	Jumlah (Rp)					
		Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Anggaran 2026	Proyeksi 2027	Proyeksi 2028
1	PEMBIAYAAN						
2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
3	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	119.053.885.988,07	73.994.318.147,86	53.450.843.127,59	67.063.913.379,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
4	Pencairan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00		
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	133.830.522,46	107.349.416,58	42.844.848,21	0,00		
6	Jumlah Penerimaan	129.187.716.510,53	89.101.667.564,44	53.493.687.975,80	67.063.913.379,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
7	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
8	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00
9	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)					
		Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Anggaran 2026	Proyeksi 2027	Proyeksi 2028
10	Jumlah Pengeluaran	25.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000.000,00	15.000.000.000,00
11	PEMBIAYAAN NETTO	104.187.716.510,53	89.101.667.564,44	53.493.687.975,80	67.063.913.379,00	33.000.000.000,00	30.000.000.000,00
12	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	73.994.318.147,86	53.450.843.127,59	61.441.803.706,99	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2026, diolah.

Tabel 3.10

Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kota Blitar Tahun 2025 s.d 2027

No	Uraian	TA 2025		Proyeksi	
		APBD 2025	Anggaran Setelah Perubahan	TA 2026	TA 2027
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	95.226.053.260,00	95.226.053.260,00	91.246.340.110,00	86.967.580.480,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	120.830.046.240,00	108.140.059.250,00	104.093.510.620,00	126.385.941.753,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.212.000.000,00	1.250.000.000,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.090.361.000,00	5.328.115.000,00	6.263.336.020,00	5.796.477.767,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	221.346.460.500,00	209.894.227.510,00	202.815.186.750,00	220.400.000.000,00
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat				
10	Dana Bagi Hasil	85.973.033.000,00	85.973.033.000,00	40.313.834.000,00	40.424.500.000,00
11	Dana Alokasi Umum	456.999.804.000,00	456.689.840.686,00	377.274.733.000,00	398.200.000.000,00
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik	658.260.000,00	658.260.000,00	0,00	0,00

No	Uraian	TA 2025		Proyeksi	
		APBD 2025	Anggaran Setelah Perubahan	TA 2026	TA 2027
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	65.023.657.000,00	65.528.290.998,94	68.375.479.000,00	69.211.499.000,00
16	Dana Insentif Daerah	0,00	6.407.817.000,00	0,00	0,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	608.654.754.000,00	615.257.241.684,94	485.964.046.000,00	507.835.999.000,00
18	Transfer Antar Daerah				
19	Pendapatan Bagi Hasil	64.375.000.000,00	64.375.000.000,00	65.340.625.000,00	69.350.000.000,00
20	Bantuan Keuangan	0,00	1.565.530.000,00	0,00	0,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.375.000.000,00	65.940.530.000,00	65.340.625.000,00	69.350.000.000,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer	673.029.754.000,00	681.197.771.684,94	551.304.671.000,00	577.185.999.000,00
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Lainnya	8.400.000.000,00	12.254.511.660,02	9.300.000.000,00	9.500.000.000,00
25	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	8.400.000.000,00	12.254.511.660,02	9.300.000.000,00	9.500.000.000,00
26	JUMLAH PENDAPATAN	902.776.214.500,00	903.346.510.854,96	763.419.857.750,00	807.085.999.000,00
27	BELANJA				
28	BELANJA OPERASI				
29	Belanja Pegawai	386.367.652.414,00	379.387.469.534,43	351.614.754.550,35	340.964.390.645,21

No	Uraian	TA 2025		Proyeksi	
		APBD 2025	Anggaran Setelah Perubahan	TA 2026	TA 2027
30	Belanja Barang dan Jasa	465.862.665.255,96	447.086.559.289,14	386.172.001.514,45	393.504.931.085,94
31	Belanja Hibah	26.945.900.208,00	26.544.440.028,00	21.691.944.800,00	15.863.187.755,00
32	Belanja Bantuan Sosial	17.774.600.000,00	14.289.870.000,00	8.003.061.700,00	7.908.800.000,00
33	Jumlah Belanja Operasi	896.950.817.877,96	867.308.338.851,57	767.481.762.564,80	758.241.309.486,15
34	BELANJA MODAL				
35	Belanja Tanah	87.000.000,00	0,00	2.950.677.600,00	4.950.677.600,00
36	Belanja Peralatan dan Mesin	19.923.979.013,58	23.184.251.721,65	11.328.083.327,47	26.538.304.915,00
37	Belanja Gedung dan Bangunan	27.924.153.038,56	19.754.610.530,90	21.065.586.708,00	23.060.721.500,00
38	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.710.354.026,90	34.317.414.192,43	24.503.452.228,73	23.931.269.798,85
39	Belanja Aset Tetap Lainnya	484.692.540,00	1.901.762.700,00	114.208.700,00	268.715.700,00
40	Belanja Aset Lainnya	175.000.000,00	220.000.000,00	40.000.000,00	95.000.000,00
41	Jumlah Belanja Modal	74.305.178.619,04	79.378.039.144,98	60.002.008.564,20	78.844.689.513,85
42	BELANJA TIDAK TERDUGA				
43	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	10.110.975.986,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
44	Jumlah Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	10.110.975.986,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
45	Jumlah Belanja	975.255.996.497,00	956.797.353.982,55	830.483.771.129,00	840.085.999.000,00

No	Uraian	TA 2025		Proyeksi	
		APBD 2025	Anggaran Setelah Perubahan	TA 2026	TA 2027
46	SURPLUS/DEFISIT	-72.479.781.997,00	-53.450.843.127,59	-67.063.913.379,00	-33.000.000.000,00
47	PEMBIAYAAN				
48	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
49	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	73.479.781.997,00	53.450.843.127,59	67.063.913.379,00	45.000.000.000,00
50	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Jumlah Penerimaan	73.479.781.997,00	53.450.843.127,59	67.063.913.379,00	45.000.000.000,00
53	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
54	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
55	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
56	Jumlah Pengeluaran	1.000.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000.000,00
57	PEMBIAYAAN NETTO	72.479.781.997,00	53.450.843.127,59	67.063.913.379,00	33.000.000.000,00

No	Uraian	TA 2025		Proyeksi	
		APBD 2025	Anggaran Setelah Perubahan	TA 2026	TA 2027
58	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2026, diolah.

BAB IV
SASARAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

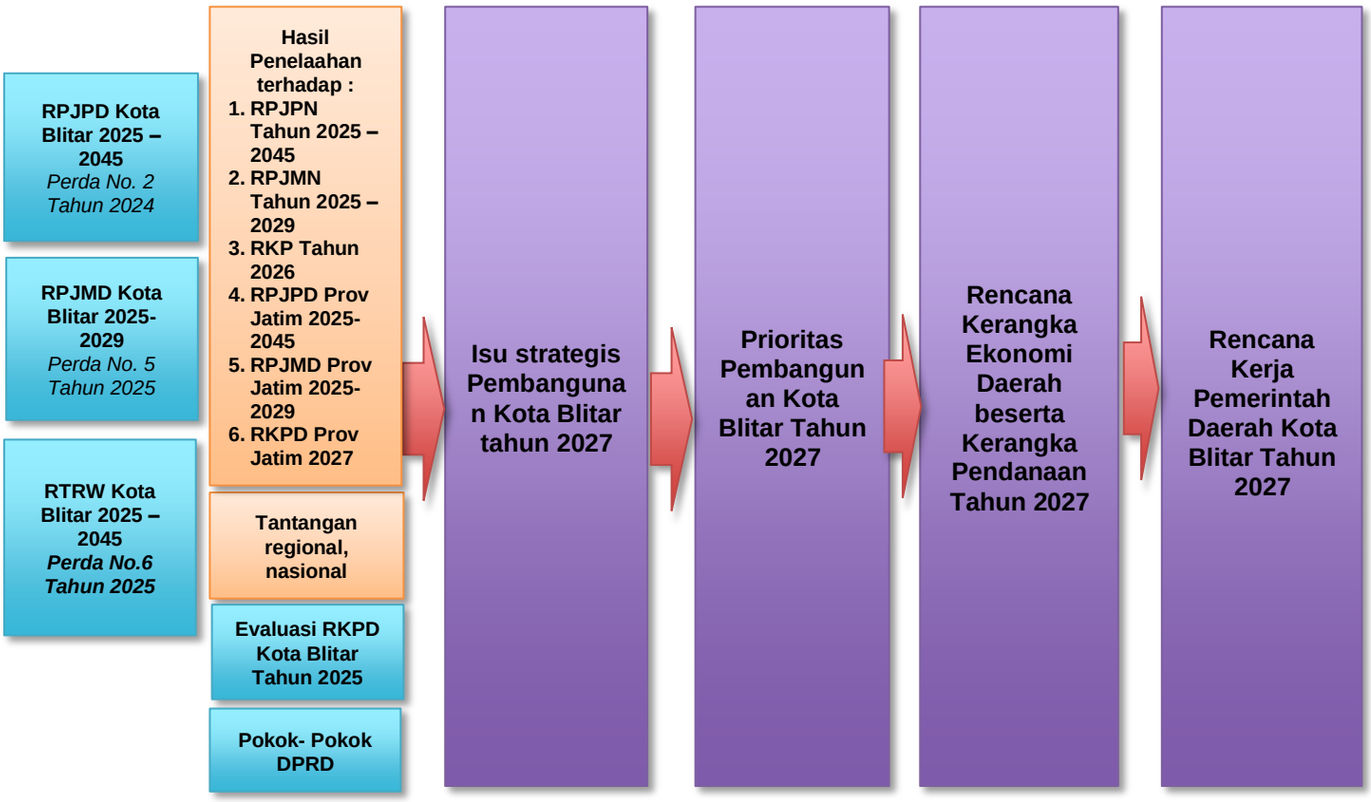
Tahun 2027 memiliki arti penting karena merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Sebagai tahun transisi menuju tahap akhir periode RPJMD, RKPD 2027 memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. RKPD 2027 menempati posisi strategis untuk menilai konsistensi pencapaian tujuan pembangunan daerah sekaligus memperkuat landasan bagi pencapaian target-target RPJMD pada tahun 2029.

Selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB I, perencanaan pembangunan Kota Blitar tahun 2027 menggunakan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), dengan:

1. Menjaga kesinambungan melalui penyesuaian terhadap 8 (delapan) tujuan, 17 (tujuh belas) sasaran, arah kebijakan pembangunan, permasalahan dan isu strategis, serta program prioritas Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 – 2029;
2. Menerapkan prioritas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan, antara lain pencapaian target indikator makro pembangunan, penyelesaian isu-isu komprehensif, penyelesaian isu strategis kewilayahan, serta pengarusutamaan pembangunan;
3. Memastikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sasaran prioritas pembangunan daerah dengan pendekatan berbasis program (*money follow program*) yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diselaraskan dengan Asta Cita, Nawa Bhakti Satya, hasil Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2027;
4. Melibatkan secara aktif *stakeholder* dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
5. Mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas, perencanaan belanja guna mendukung pencapaian target program sampai dengan target sub kegiatan dan aktivitas harus mengimplementasikan prinsip *value for money*, agar mampu optimal secara ekonomis, efektif dan efisien;
6. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain melalui APBD Kota Blitar, APBD Provinsi Jawa Timur, APBN, CSR dan pembiayaan lain yang sah untuk membiayai belanja perangkat daerah.
7. Memaksimalkan penerapan sistem informasi baik yang terkoneksi dengan Pemerintah Pusat maupun internal Pemerintah Kota Blitar.

Perencanaan pembangunan Kota Blitar tahun 2027 juga mengacu dan memperhatikan:

1. RTRW Kota Blitar;
2. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD;
3. Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2025;
4. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam RKPD Provinsi Jawa Timur 2027 dan Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga daerah;
5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs;
6. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2027.



Gambar 4.1
Kerangka Pikir Perencanaan Pembangunan Kota Blitar Tahun 2027

Berdasarkan gambar 4.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa, berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik ditingkat Pusat maupun Daerah serta isu strategis yang dalam penentuannya telah mempertimbangkan berbagai hal (hasil evaluasi pembangunan daerah, tantangan regional dan nasional, capaian pembangunan daerah, serta kondisi kewilayahan) dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan Prioritas Pembangunan Kota Blitar Tahun 2027.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi pembangunan Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 - 2029 adalah "Kota Blitar Yang Maju, Sehat dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan". Terdapat empat poin visi yaitu Maju, Sehat dan Sejahtera serta Kota Masa Depan. Keempat poin visi ini bersifat luas yang mencakup berbagai isu besar yaitu peningkatan kualitas tata kehidupan, kualitas dan daya saing sumber daya manusia, penguatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang ditopang oleh penguatan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui lima misi sebagai berikut :

Misi Pertama: Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis.

Misi Kedua: Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera

Misi Ketiga: Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis *Smart Governance*

Misi Keempat: Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter

Misi Kelima: Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pemerintah Kota Blitar menetapkan tahapan pembangunan daerah secara

sistematis selama periode 2025 – 2029. Tahapan ini disusun berdasarkan prioritas pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional, mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta diarahkan untuk mencapai target pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif

Rincian tahapan pembangunan daerah Kota Blitar selama periode 2025 – 2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kota Blitar 2025 – 2029 tersaji pada gambar berikut :



Gambar 4.2. Pentahapan Pembangunan RPJMD 2025 – 2029

Berdasarkan pentahapan pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 tersebut, tema RKPD Kota Blitar Tahun 2027 adalah “Kota Berkarakter dengan *Smart Governance* dan *Smart Economy*” dengan fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, peningkatan kualitas pelayanan publik, penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas SDM guna mewujudkan generasi emas yang cerdas dan berkarakter serta pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan.

Tema pembangunan Kota Blitar tahun 2027 tersebut sejalan dengan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur yaitu “Penguatan Pelayanan Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas” dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat serta penguatan infrastruktur dasar sebagai prasyarat pembangunan di tahun-tahun berikutnya.

Selaras pula dengan tema pembangunan nasional yaitu : “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.“ dengan fokus pada Swasembada Pangan, Energi dan Air, Hilirisasi Komoditas dan Industri, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Kemiskinan serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Tema pembangunan di atas bukan sekadar *tagline*, melainkan cerminan arah strategis yang dapat dioperasionalkan secara terukur ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program kerja prioritas (Program Walikota) maupun program nomenklatur yang ditetapkan melalui SIPD. Keterkaitan vertikal antara tema, prioritas pembangunan provinsi, hingga program dan kegiatan inilah yang menjamin setiap alokasi anggaran memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

Tujuan pembangunan ditetapkan sebagai orientasi utama yang menjawab secara langsung berbagai isu strategis dan permasalahan nyata dalam pembangunan daerah. Setiap rumusan mengandung arah yang menggambarkan capaian ideal dalam lima tahun mendatang, menjadi fondasi dalam menuntun pelaksanaan program-program prioritas pembangunan Kota Blitar Tahun 2025–2029.

Sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dirumuskan secara spesifik dan terukur, menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan dalam rentang satu hingga lima tahun ke depan. Penyusunan sasaran mempertimbangkan aspek keterjangkauan, relevansi, serta rasionalitas, sehingga proses pencapaian tujuan dapat berjalan dengan arah yang jelas, terfokus, dan tepat guna.

1. Tujuan Pertama, terwujudnya kehidupan yang harmonis melalui penguatan nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, dijabarkan dalam sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah.
2. Tujuan Kedua, terwujudnya jaminan rasa aman pada masyarakat, dijabarkan dalam sasaran :
   a. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
   b. Terwujudnya Kota Blitar yang berketahanan bencana
3. Tujuan ketiga, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang sehat, dijabarkan dalam sasaran terwujudnya Kesehatan yang merata;
4. Tujuan keempat, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dijabarkan dalam sasaran meningkatnya kualitas hidup dan ketangguhan sosial masyarakat
5. Tujuan kelima, terwujudnya pembangunan kota yang nyaman dan layak huni, dijabarkan dalam sasaran :
   a. Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berkelanjutan
   b. Meningkatnya kualitas permukiman
   c. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan
6. Tujuan keenam, meningkatnya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, dijabarkan dalam sasaran :
   a. Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi
   b. Terwujudnya manajemen pemerintahan yang profesional
7. Tujuan ketujuh, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dijabarkan dalam sasaran :
   a. Meningkatnya kualitas pendidikan
   b. Meningkatnya kualitas generasi muda
   c. Meningkatnya kesetaraan gender
   d. Terwujudnya kota yang berkebudayaan maju
8. Tujuan kedelapan, terwujudnya ekonomi daerah yang inklusif, yang dijabarkan dalam sasaran :
   a. Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi
   b. Terwujudnya kemudahan berusaha yang mendorong realisasi investasi daerah
   c. Menurunnya pengangguran.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, ditetapkan strategi untuk lima tahun mendatang.

Tabel 4.1
Strategi Pembangunan Tahun 2025 – 2029

No.	Tujuan dan Sasaran	Strategi
TERWUJUDNYA KEHIDUPAN YANG HARMONIS DI MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT		
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
TERWUJUDNYA JAMINAN RASA AMAN PADA MASYARAKAT		
2.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan

No.	Tujuan dan Sasaran	Strategi
3.	Terwujudnya kota yang berketahanan bencana	Meningkatkan Pencegahan dan Penanganan Bencana
MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEHAT		
4.	Terwujudnya kesehatan yang merata	Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terjangkau, merata, berkelanjutan, profesional dan bermutu
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
5.	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Ketangguhan Sosial Masyarakat	Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu dan terintegrasi
		Meningkatkan ketahanan pangan daerah
TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KOTA NYAMAN DAN LAYAK HUNI		
6.	Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan
		Meningkatkan kualitas dan dan kuantitas jaringan drainase serta menjamin ketersediaan air yang berkelanjutan
		Mewujudkan tata ruang yang efisien dan berkelanjutan melalui perencanaan ruang
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana jalan beserta fasilitas jalan yang berkualitas, aman, ramah serta nyaman
7.	Meningkatnya kualitas permukiman	Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
8.	Terwujudnya Lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan cakupan pengelolaan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemanfaatan teknologi
		Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
MENINGKATNYA BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL		
9.	Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan publik serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
10.	Terwujudnya manajemen pemerintahan yang profesional	Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintahan dan profesionalisme ASN
MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA		
11.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Pengelolaan dan Pemerataan Aksesibilitas Layanan Pendidikan
12.	Meningkatnya kualitas generasi muda	Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreativitas dan Inovasi generasi muda serta menumbuhkan budaya berolahraga di masyarakat

No.	Tujuan dan Sasaran	Strategi
13.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender
14.	Terwujudnya kota yang berkebudayaan maju	Optimalisasi nilai budaya dalam pembangunan karakter
TERWUJUDNYA EKONOMI DAERAH YANG INKLUSIF		
15.	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi	Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan perdagangan, industri , UMKM dan pariwisata
		Mengembangkan ekonomi kreatif
16.	Terwujudnya kemudahan berusaha yang mendorong realisasi investasi daerah	Meningkatkan nilai investasi daerah
17.	Menurunnya pengangguran	Menurunkan Pengangguran

Sumber : Bapperinda Kota Blitar 2026, diolah

Untuk mengetahui tercapainya tujuan dan sasaran tentunya dibutuhkan tolok ukur yang dapat mengukur pencapaian keberhasilannya dalam bentuk indikator kinerja. Indikator kinerja pembangunan Kota Blitar Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Blitar Tahun 2027

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
Terwujudnya Kehidupan yang Harmonis di Masyarakat Melalui Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Harmoni Indonesia			6,99
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	89,10
Terwujudnya jaminan rasa aman pada masyarakat	Indeks Rasa Aman			76,70
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	81,45
		Terwujudnya Kota yang Berketahanan Bencana	Indeks Risiko Bencana	66,97
Meningkatnya kualitas	Usia Harapan Hidup (UHH)			75,82

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
kehidupan masyarakat yang sehat		Terwujudnya Kesehatan yang Merata	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	0,720
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	9,24
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan			5,50 – 6,14
		Meningkatnya Kualitas Hidup dan Ketangguhan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	62,93
			Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	71,06
Terwujudnya pembangunan kota nyaman dan layak huni	Indeks Kota Layak Huni			75,90
	Penurunan emisi GRK Kumulatif			690.608,12
		Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	83,00
		Meningkatnya kualitas permukiman	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	94,19
		Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,35
Meningkatnya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			92,90
		Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,24
			Indeks Pelayanan Publik	4,75
			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	Terdefinisi (3,038)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
			Pemerintah (SPIP)	
			Indeks Pemerintahan Digital Indonesia	1,70
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
		Terwujudnya manajemen pemerintahan yang profesional	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	80,28
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	81,21
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia			83,20 – 84,10
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	14,91
			Rata-Rata Lama Sekolah	10,85
		Meningkatnya kualitas generasi muda	Indeks Pembangunan Pemuda	68,61
		Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,13
		Terwujudnya kota yang berkebudayaan maju	Indeks Pelestarian Budaya	86,98
Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Inklusif	Rasio Gini			0,327 – 0,346
	Tingkat Inflasi			2,75
	PDRB per Kapita			61,33
	Laju Pertumbuhan Ekonomi			5,08 – 5,54
		Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	25,39
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi	5,95

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
		pertumbuhan ekonomi	Makan dan Minum	
			Rasio PDRB Industri Pengolahan	10,15
		Terwujudnya kemudahan berusaha yang mendorong realisasi investasi daerah	Persentase peningkatan investasi	2
		Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,27 – 4,08

Sumber : Bapperinda Kota Blitar 2026, diolah

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Kota Blitar tahun 2027 hadir sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memainkan peran strategis, membuka langkah menuju agenda-agenda besar pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada visi Indonesia Emas 2045. Prioritas Pembangunan Kota Blitar Tahun 2027 disusun dengan mempertimbangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Rumusan prioritas pembangunan daerah dilengkapi dengan tolok ukur kinerja keluaran setiap program beserta kebutuhan pembiayaannya. Tolok ukur kinerja dan kebutuhan pembiayaan prioritas pembangunan akan digunakan sebagai dasar perhitungan pagu indikatif. Oleh karena itu, prioritas pembangunan beserta program pendukungnya, idealnya disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan korelasi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, visi dan misi Kepala Daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, arah pembangunan daerah, pengembangan sektor/bidang unggulan daerah, serta isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan Kota Blitar tahun 2027 dalam pelaksanaannya diharapkan dapat :

1. Berkontribusi pada 6 isu strategis Kota Blitar tahun 2027, yaitu : peningkatan ekonomi, pelayanan pemerintah menuju *smart governance*, pembangunan sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan, penciptaan wilayah aman dan kondusif;
2. Berkontribusi dalam pencapaian target tujuan serta sasaran pembangunan Kota Blitar, baik di tahun 2027, maupun target tujuan serta sasaran pembangunan sasaran pembangunan jangka menengah dan Panjang;
3. Berkontribusi dalam pencapaian kinerja provinsi dan nasional.

Tabel 4.3
Rumusan Prioritas Pembangunan Kota Blitar Tahun 2027

Isu Strategis Kota Blitar Tahun 2025 – 2029	Isu Strategis Kota Blitar Tahun 2027	Prioritas Pembangunan Kota Blitar Tahun 2027
Penguatan Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Potensi Lokal	Peningkatan Ekonomi Masyarakat berbasis Potensi Lokal	Peningkatan Ekonomi daerah yang inklusif
Satu Data Pelayanan Pemerintah menuju Smart Governance	Pelayanan Pemerintah menuju *Smart Governance*	Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah
Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran serta Peningkatan Ketahanan Pangan	Penurunan kemiskinan dan pengangguran

Isu Strategis Kota Blitar Tahun 2025 – 2029	Isu Strategis Kota Blitar Tahun 2027	Prioritas Pembangunan Kota Blitar Tahun 2027
Ketahanan Pangan	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran serta Peningkatan Ketahanan Pangan	Penurunan kemiskinan dan pengangguran
Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Peningkatan kualitas SDM
Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan
Penciptaan Wilayah Aman dan Kondusif serta Perlindungan Masyarakat	Penciptaan Wilayah Aman dan Kondusif serta Perlindungan Masyarakat	Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berketahanan sosial dan budaya

Sumber : Bapperinda Kota Blitar 2026, diolah

Kontribusi Urusan Pemerintah Terhadap Prioritas Pembangunan Kota Blitar 2027

Prioritas Kota 1

Peningkatan Ekonomi Daerah yang Inklusif

- Pangan
- Pertanian
- Kelautan & SDM
- Perindustrian
- Perdagangan
- Penanaman Modal
- Koperasi UKM
- Pariwisata

Prioritas Kota 2

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Ketahanan Fiskal Daerah

- Statistik
- Arsip
- Persandian
- Sekretariat Daerah
- Sekretariat DPRD
- Perencanaan
- Keuangan
- Kepegawaian
- Pendidikan & Pelatihan
- Penelitian & Pengembangan
- Pengawasan
- Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil

Prioritas Kota 3

Penurunan Kemiskinan & Pengangguran

- Sosial
- Tenaga Kerja
- Perumahan & Kawasan Permukiman
- Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Prioritas Kota 4

Peningkatan Kualitas SDM

- Pendidikan
- Perpustakaan
- Kesehatan
- Kepemudaan & Olahraga
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Pengendalian Penduduk & KB

Prioritas Kota 5

Pembangunan Infrastruktur & Lingkungan Berkelanjutan

- Lingkungan Hidup
- Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
- Pertanahan
- Perhubungan
- Kominfotik

Prioritas Kota 6

Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berketahanan sosial & budaya

- Kebudayaan
- Trantibun Linmas
- Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

Prioritas Pembangunan Nasional, Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 2027 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Kota Blitar dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027. Selain itu juga diselaraskan dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD 2025 - 2029) serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan fokus/tema tahunan yang ada di dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Keselarasan kebijakan RPJMD Kota Blitar dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2027

Fokus/Tema Tahunan RPJMD Tahun 2027	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027
Penguatan Pondasi Tansformasi bidang Pelayanan Dasar yang Didukung Kualitas SDM dan Infrastruktur yang Berkelanjutan	1. Peningkatan Ekonomi daerah yang inklusif 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah 3. Penurunan kemiskinan dan pengangguran 4. Peningkatan kualitas Sumber daya manusia 5. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan 6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berketahanan sosial dan budaya

Sumber : Bapperinda, 2026 diolah

Selanjutnya prioritas pembangunan tahun 2027 dijelaskan sebagai berikut:

1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dengan fokus pada:
   a) Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta penguatan stabilitas ekonomi melalui penguatan UMKM, peningkatan kualitas layanan publik dan optimalisasi infrastruktur perkotaan;
   b) Penguatan simpul perdagangan dan pengolahan melalui UMKM olahan pangan, logistik distribusi, dan kemitraan suplai dari kabupaten sekitar untuk kendali inflasi;
   c) Mendorong investasi dan penguatan nilai tambah sektor strategis, khususnya pada sektor perdagangan dan jasa pendukungnya, untuk memperkuat fungsi Kota Blitar sebagai pusat pelayanan wilayah;
   d) Penguatan stabilitas pasar melalui sinergitas pasar konvensional dan pasar modern;
   e) Revitalisasi pasar daerah;
   f) Hilirisasi komoditas unggulan daerah;

g) Dukungan terhadap koperasi merah putih sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal yang inklusif;
h) Optimalisasi pelatihan untuk meningkatkan daya saing produk, fasilitasi pemasaran serta penguatan peran koperasi dalam meningkatkan daya saing;
i) Penataan dan penguatan wisata sejarah khususnya terkait PETA dan Proklamator Bung Karno yang didukung penguatan peran kampung wisata dan wisata hutan kota;
j) Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
k) Peningkatan pelayanan investasi dan perizinan berbasis teknologi informasi;
l) Peningkatan Fasilitas BTC;
m) Penyertaan modal BUMD.

2) Peningkatan Kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah, dengan fokus pada :
a) Peningkatan pelayanan publik terintegrasi berbasis teknologi informasi;
b) Peningkatan interoperabilitas sistem pelayanan publik;
c) Integrasi basis data kependudukan yang akurat dengan sistem layanan Pemerintahan;
d) Peningkatan kapasitas dan kualitas ASN menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Blitar yang profesional dan bebas korupsi;
e) Peningkatan manajemen aset daerah melalui sistem informasi aset dan keuangan yang terintegrasi, sertifikasi, penertiban dan penyelamatan aset daerah dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
f) Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/sarana prasarana pemerintah;
g) Penyediaan basis data sektoral dan spasial, optimalisasi pengendalian dan evaluasi untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan;
h) Optimalisasi peningkatan dan pengelolaan PAD;
i) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan APBD;
j) Penguatan Peran BUMD.

3) Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran, dengan fokus pada:
a) Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial, bantuan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, masyarakat tidak mampu dan anak terlantar;
b) Pemutakhiran dan integrasi data penerima program kesejahteraan sosial;
c) Peningkatan layanan informasi ketenagakerjaan, Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi;
d) Peningkatan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi *smart farming* serta percepatan pencapaian swasembada pangan berkelanjutan.

4) Peningkatan Kualitas SDM guna mewujudkan generasi emas yang cerdas dan berkarakter, dengan fokus pada :
a) Peningkatan kualitas pendidikan, melalui pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan; pendidikan bermutu dan berkeadilan; peningkatan sarana prasarana pendidikan; bantuan operasional sekolah; beasiswa pendidikan untuk siswa tidak mampu pada tingkat menengah; beasiswa sarjana; dukungan pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi satuan

pendidikan; dukungan pelaksanaan program makan bergizi gratis di satuan pendidikan; dukungan pelaksanaan program digitalisasi pembelajaran di satuan pendidikan; pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah; dukungan program sekolah nasional terintegratif; pengembangan anak usia dini holistik integratif; dukungan pelaksanaan program revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; penguatan kemampuan literasi, numerasi, sains, teknologi; pembelajaran mendalam; koding dan kecerdasan artifisial; pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa dan sastra; penguatan pendidikan karakter, dengan penerapan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat dan budaya sekolah aman dan nyaman, didukung dengan penguatan Bimbingan Konseling; pemenuhan, distribusi dan redistribusi, serta profesionalisme, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dukungan terhadap pelaksanaan budaya anti korupsi dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di satuan pendidikan; serta pembinaan terhadap perpustakaan;

b) Peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat, melalui pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan, penyediaan Jaminan Kesehatan universal, peningkatan kualitas layanan puskesmas, peningkatan kualitas layanan RSUD, layanan ambulance gratis, percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting, dukungan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, dukungan pada penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, serta dukungan pada penuntasan kasus TBC;
c) Pemberdayaan penyandang disabilitas dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan serta peningkatan partisipasi di pelbagai bidang pembangunan;
d) Peningkatan pemajuan kebudayaan melalui dukungan penyelenggaraan event seni dan budaya;
e) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
f) Penguatan pengarusutamaan gender dan keluarga berkualitas.

5) Pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan, dengan fokus pada :
a) Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum, perumahan dan permukiman;
b) Pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan utilitas umum dan infrastruktur kota yang peduli lingkungan;
c) Peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kemantapan jalan, penetapan fungsi jalan dan kelas jalan.
d) Peningkatan ketahanan air, pengelolaan drainase untuk mengurangi resiko genangan maupun banjir, pendayagunaan sumber daya air berkelanjutan dan sinergitas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
e) Peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi yang aman bagi masyarakat;
f) Penguatan tata Kelola air minum dan sanitasi (air limbah dan domestik) yang berorientasi pada berkelanjutan
g) Mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsional, andal, menjamin keselamatan, Kesehatan, kenyamanan, serasi dan selaras dengan lingkungannya;

h) Meningkatkan kualitas konstruksi dengan standar efisiensi, keamanan, keselamatan, Kesehatan dan keberlanjutan penyelenggaraan infrastruktur;
i) Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan dan penataan Kawasan kumuh perkotaan;
j) Pengelolaan sampah terpadu hulu – hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah;
k) Perubahan perilaku seluruh penghasil sampah menuju budaya literasi sampah, termasuk pemicuan, pemilahan dan pengurangan yang terintegrasi sistem serta pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna serta optimalisasi TPST dan memastikan *offtaker* hasil olahan sampah;
l) Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
m) Peningkatan pembangunan infrastruktur perhubungan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan.

6) Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berketahanan sosial dan budaya , dengan prioritas pada :
a) Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang trantibum linmas serta kebencanaan;
b) Pemasangan CCTV lingkungan;
c) Peningkatan keamanan wilayah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
d) Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat tentang potensi bahaya gempa bumi, dan cuaca ekstrem.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2027 yang telah ditetapkan, dijabarkan dan diimplementasikan melalui program Prioritas Daerah seperti yang tercantum dalam tabel 4.4 Indikasi Program Prioritas.

Tabel 4.4.
Indikasi Rencana Program Prioritas

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Visi : KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN Misi : - Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis - Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera - Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis *Smart Governance* - Mengembangkan Potensi Pendidikan,	Terwujudnya kehidupan yang harmonis melalui penguatan nilai - nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat			Indeks Harmoni Indonesia(Indeks)		
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah		Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)		
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter - Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Industri			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
	Terwujudnya jaminan rasa aman pada masyarakat			Indeks Rasa Aman(Angka)		
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)		
			Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			dan pelanggaran Perda	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
		Terwujudnya Kota yang		Indeks Risiko Bencana (IRB) (Angka)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Berketahanan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang sehat			Usia Harapan Hidup (UHH)((tahun))		
		Terwujudnya Kesehatan yang Merata		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Indeks)		
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))		
			Meningkatnya kinerja BLUD UPT Puskesmas	Skor penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas Sananwetan (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Skor penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas Kepanjenkidul (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Skor penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas Sukorejo (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya mutu layanan Rumah Sakit	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Akreditasi RSUD (Nilai Akreditasi)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase pemenuhan syarat kualitas kesehatan lingkungan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Insiden Stunting Balita (kasus baru) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yang cukup (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase kelurahan yang mencapai target kekebalan kelompok (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Jumlah Kematian Ibu AMPSR (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat melalui pelayanan kesehatan rujukan	Persentase layanan rumah sakit dengan kompetensi minimal dasar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga Kesehatan	Rasio Nakes dan Named terhadap populasi (Indeks (Skala 0-100))	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase fasilitas layanan kefarmasian dan alat kesehatan dan yang memenuhi evaluasi mutu (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	Persentase UKBM sesuai standar (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Tingkat Kemiskinan(%)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Ketangguhan Sosial Masyarakat		Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)		
				Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		
			Meningkatnya daya dukung potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)		
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya kecukupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota (%)		
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase Izin Usaha budidaya perikanan yang Diterbitkan (%)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya kualitas produk hasil perikanan	Persentase Izin Usaha pengolahan hasil perikanan yang Diterbitkan (%)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya pengendalian	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Strategis (PHMS) (Dokumen)	KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (%)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
				Persentase Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan (%)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian dan	Persentase Kelembagaan yang Dibentuk dan Beroperasi Koperasi Tani (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			pembinaan kelembagaan usaha tani	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP Nasional yang terkelola dengan baik (%)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
	Terwujudnya pembangunan kota nyaman dan layak huni			Indeks Kota Layak Huni(Indeks)		
				Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Kumulatif (TON CO2 EQ)		
		Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berkelanjutan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)		
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum aman (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Persentase bangunan gedung berizin (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang aman dan nyaman	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian perwujudan rencana pola ruang (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (%)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (%)	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase tanah aset yang bersertifikat (%)	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
			Meningkatnya kualitas sarpras perhubungan	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya layanan angkutan	IKM Layanan Angkutan Jalan Berkeselamatan (Indeks)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			jalan berkeselamatan		LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya ketertiban jalan	Persentase Ruas Jalan yang Menerapkan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya pengelolaan perlintasan kereta api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (%)	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	
		Meningkatnya kualitas permukiman		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Yang Memperoleh Fasilitasi	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Penyediaan Rumah Yang Layak Huni (%)		
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Persentase Rumah Layak Huni di kawasan kumuh (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani di luar kawasan kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dalam Kondisi baik (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Persentase Tempat Pemakaman Umum yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (%)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan (Usaha/Kegiatan)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya kapasitas dan partisipasi SDM bidang lingkungan hidup	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif (%)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa /kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase cakupan layanan persampahan (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
	Meningkatnya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel			Indeks Reformasi Birokrasi(Indeks)		
		Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi		Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)		
				Indeks Pelayanan Publik(Indeks)		
				Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)		
				Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (Indeks)		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase kepemilikan dokumen akte kelahiran seluruh penduduk (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase kepemilikan dokumen perceraian (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase kepemilikan dokumen perkawinan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola kelurahan	Persentase fasilitasi tata kelola kelurahan (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya Jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Kualitas Penerapan Digitalisasi Pemerintahan	Persentase pemenuhan layanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis digital (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan (%)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang hasil penilaian implementasi persandian untuk pengaman informasi masuk kategori baik (%)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (%)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
				Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase perangkat daerah yang memiliki IKM dengan kategori minimal Baik (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase unit pelayanan publik dengan kategori pelayanan Baik (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas kerja sama daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase produk hukum yang ditindaklanjuti (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya penyelesaian perkara hukum	Persentase masalah hukum yang terselesaikan (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Level)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase penyampaian rekomendasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Persentase penyampaian rekomendasi penganggaran (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Pendapatan Daerah	Persentase Target Pajak Daerah terhadap PAD (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap PAD (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Persentase Realisasi Retribusi Daerah terhadap Target Retribusi Daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Indeks Manajemen Risiko (IMR) (Indeks)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif (Kelompok)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		Terwujudnya manajemen		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		pemerintahan yang profesional		Pemerintah (SAKIP) (Angka)		
				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal A (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja program daerah (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase program prioritas nasional yang didukung program daerah (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas layanan	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			administrasi kepegawaian	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, pengembangan dan evaluasi serta layanan pengembangan kompetensi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat,	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			daerah dalam pembangunan	Industri, dan Badan Usaha di Daerah (Rasio)		
				Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia			Indeks Pembangunan Manusia(Indeks)		
		Meningkatnya kualitas pendidikan		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat (%)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya kualitas generasi muda		Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
				Rasio Wirausaha Pemuda (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase atlet yang masuk Pelatda Provinsi (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
		Meningkatnya kesetaraan gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 perempuan (Rasio)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Jumlah Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak sesuai Standar (Unit)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (Rasio)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age *Specific Fertility* Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang aktif Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
		Terwujudnya kota yang berkebudayaan maju		Indeks Pelestarian Budaya (Indeks)		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
	Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Inklusif			Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)		
				Rasio Gini (Indeks)		
				Tingkat Inflasi((%))		
				PDRB Per Kapita(Juta Rupiah)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		
				Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		
				Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)		
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (%)	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Pertumbuhan Wirausaha (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya kualitas ekosistem ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi yang Dibentuk dan Beroperasi (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	persentase usaha perdagangan yg berizin (%)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Indeks kepuasan konsumen terhadap layanan perlindungan konsumen (Indeks (Skala 0-100))	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Jumlah kerja sama penggunaan produk lokal daerah (Kerja Sama)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase industri yang terdaftar di SIiNAS (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
		Terwujudnya kemudahan berusaha yang mendorong realisasi investasi daerah		Persentase peningkatan investasi		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
		Menurunnya pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
			Terpenuhinya tenaga kerja sesuai standar kompetensi perusahaan	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				pekerja dan dialog sosial (Orang)		

Sumber : Bapperinda Kota Blitar, 2026

4.3. Keselarasan Dokumen Perencanaan

4.3.1. Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia yang didukung kabupaten dan kota. Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2027, Pemerintah telah menetapkan tema RKP Tahun 2027 yaitu "Penguatan Pelayanan Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas" dengan prioritas pembangunan nasional meliputi :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Pro-SN menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan.

NO	Pro – SN	PROYEK / KEGIATAN
1	Pengentasan kemiskinan	a) Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
2		b) Sekolah Rakyat
3		c) Pembangunan 3 Juta Rumah
4	Ketahanan Pangan	a) Swasembada Pangan (Irigasi unuk mendukung Swasembada Pangan)
5		b) Pendayagunaan Penyuluh Pertanian

NO	Pro – SN	PROYEK / KEGIATAN
6		c) Pengadaan dan Pengelolaan Gabah / Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
7		d) Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah / Lumbung Pangan / Food Estate)
8		e) Pangan Akuatik
9		f) Kampung Nelayan Merah Putih
10	Kesehatan untuk Semua	a) Pencegahan dan Penurunan Stunting
11		b) Pemeriksaan Kesehatan Gratis
12		c) Jaminan Kesehatan Nasional
13		d) Penuntasan TBC
14		e) Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten / Kota
15		f) Makan Bergizi Gratis
16	Perluasan Akses Pendidikan	a) Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
17	Pertumbuhan Ekonomi	a) Pengendalian Inflasi
18		b) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih
19		c) Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan)
20		d) Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

Sumber : Bapperinda Kota Blitar, 2026

Selanjutnya, sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 4 Tahun 2026, Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 disusun dengan fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui pelaksanaan delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Delapan klaster prioritas yaitu: kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan; yang ditopang oleh fondasi penguatan tata kelola. Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) merupakan penajaman arah pembangunan dan dimulai dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 agar pelaksanaan pembangunan semakin konkret, terintegrasi, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. PKPN menjadi *instrument* strategis untuk mengonsolidasikan berbagai arahan Presiden, prioritas RPJMN 2025–2029, Proyek Strategis Nasional (PSN) serta kebutuhan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah ke dalam program-program utama yang memiliki daya ungkit besar terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan kemandirian bangsa.

4.3.2. Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Tema RKPD Provinsi Jawa Timur 2027 “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri”. Adapun tujuan yang menjadi acuan Pembangunan Daerah Tahun 2027, adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Kemiskinan;
2. Terwujudnya Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas;
3. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif;
5. Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis, Toleran dan Inklusif;
6. Terwujudnya kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan.

Sedangkan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Jatim Sejahtera – Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas sektoral-Spasial Berbasis Data Terpadu. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial
2. Jatim Kerja - Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi.
3. Jatim Akses - Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.
4. Jatim Cerdas - Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua *(Education for all)* yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.
5. Jatim Sehat - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua *(health for all)* yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan *Universal Health Coverage* (UHC).
6. Jatim Berkah-Amanah - Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.
7. Jatim Agro - Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional.
8. Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan
9. Jatim Lestari - Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Ketahanan Iklim dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

4.3.3. Sinkronisasi dan keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2027

RKPD tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada kebijakan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur 2027 dan RKP tahun 2027. Tema pembangunan dan prioritas pembangunan Kota Blitar diselaraskan dengan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur dan tema

pembangunan dan Prioritas Nasional yang tertuang dalam RKP tahun 2027.

Tabel 4.6
Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Blitar tahun 2027

Tema Pembangunan Nasional 2027	Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2027	Tema Pembangunan Kota Blitar 2027
Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri	Penguatan Pelayanan Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Kota Berkarakter dengan *Smart Governance* dan *Smart Economy*
Prioritas Pembangunan Nasional (PN)	Prioritas Pembangunan Provinsi (PP)	Prioritas Pembangunan Kota (PK)
PN 1 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PP 7 - Jatim Berkah Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	PK 6 – Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berketahanan sosial dan budaya
PN 2 - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 2 – Jatim Kerja, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PP 4 – Jatim Agro, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan PP 9 – Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.	PK 6 – Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berketahanan sosial dan budaya PK 1 – Peningkatan Ekonomi Daerah yang Inklusif
PN 3 - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PP 2 – Jatim Kerja, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PP 3 - Jatim Akses, Memperkuat Infrastuktur Konektivitas Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan	PK 1 – Peningkatan Ekonomi Daerah yang Inklusif PK 5 - Pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan

Tema Pembangunan Nasional 2027	Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2027	Tema Pembangunan Kota Blitar 2027
PN 4 - Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	PP 5 – Jatim Cerdas, Memperkuat Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan PP 6 – Jatim Sehat, Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan PP 8 – Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	PK 4 – Peningkatan kualitas Sumber daya manusia
PN 5 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PP 4 – Jatim Agro, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan PP 9 - Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	PK 1 – Peningkatan Ekonomi Daerah yang Inklusif
PN 6 - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;	PP 1 - Jatim Sejahtera, Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan PP 2 – Jatim Kerja, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	PK 3 – Penurunan kemiskinan dan pengangguran PK 1 - Peningkatan Ekonomi daerah yang inklusif
PN 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;	PP 7 – Jatim Berkah Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	PK 2 – Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah
PN 8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan	PP 8 – Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan	PK 6 – Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berketahanan sosial dan budaya

Tema Pembangunan Nasional 2027	Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2027	Tema Pembangunan Kota Blitar 2027
lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Inklusif PP 9 - Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	PK 5 - Pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan

Sumber : Bappenas, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Bapperinda Kota Blitar, 2026

Kontribusi Urusan Pemerintah terhadap Asta Cita

Asta Cita 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	□ Pemerintahan umum (kesbangpol)
Asta Cita 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	□ Pangan □ Pertanian □ Kelautan dan perikanan □ Energi dan sumber daya mineral
Asta Cita 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	□ Pertanahan □ Perhubungan □ Komunikasi dan Informatika □ Koperasi, usaha kecil dan menengah □ Pariwisata □ Pekerjaan umum dan penataan
Asta Cita 4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	□ Pendidikan □ Perpustakaan □ Kesehatan □ Kemudaan dan Olahraga □ Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak □ Pengendalian penduduk dan KB
Asta Cita 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	□ Perindustrian □ Penanaman modal □ Perdagangan
Asta Cita 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	□ Perumahan dan kawasan permukiman □ Pemberdayaan masyarakat dan desa □ Transmigrasi □ Sosial □ Tenaga kerja
Asta Cita 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundup	□ Statistik □ Arsip □ Persandian □ Sekretariat Daerah □ Sekretariat DPRD □ Perencanaan □ Keuangan □ Kepegawaian □ Pendidikan dan pelatihan □ Penelitian dan pengembangan □ Pengawasan □ Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Asta Cita 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur	□ Kehutanan □ Lingkungan Hidup □ Kebudayaan □ Ketenteraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Sasaran pembangunan daerah tahun 2027 diarahkan untuk percepatan pencapaian kinerja sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.7

Tabel 4.7
Keselarasan Indikator Makro Provinsi Jawa Timur dengan Kota Blitar
Tahun 2027

NO.	INDIKATOR	TARGET RKPD PROVINSI TAHUN 2027	TARGET KOTA BLITAR SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2027	TARGET RKPD KOTA BLITAR TAHUN 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00 - 6,10	5,08 - 5,31	5,08 – 5,54
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,80 – 8,70	6,60	5,50 – 6,14
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,50 – 4,47	4,27 – 4,08	4,27 – 4,08
4	Rasio Gini	0,369 – 0,379	0,327 – 0,346	0,327 – 0,346
5	Indeks Pembangunan Manusia	76,10 – 77,00	83,20 – 84,10	83,20 – 84,10
6	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO_2 eq)	-	690.608,12	690.608,12

Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2026

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2027 tidak hanya berpedoman pada RPJMD dan kebutuhan daerah, tetapi juga disesuaikan dengan Asta Cita (Delapan Program Prioritas) Presiden Republik Indonesia. Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan di tingkat kota selaras dengan agenda nasional.

Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan serta penyelarasan proritas pembangunan nasional dan daerah, dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan (Rakortekrenbang). Penyelarasan Rakortekrenbang dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijabarkan dalam tabel 4.8.

Tabel 4.8
Keselarasan Pro – SN/Tematik Pembangunan Hasil Kesepakatan Rakortekrenbang Tahun 2026 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	DIGITALISASI PEMBELAJARAN									
	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran								
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	160	160.00	
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	19	19.00	
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	10	10.00	
2.	EKONOMI SYARIAH									

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03.2.01 .0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	13	0.00	
			3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02.2.04 .0019	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	Pelaku Usaha	1	5.00	
			3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.2.01 .0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Dokumen	1	1.00	
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.2.01 .0027	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Unit Usaha	200	20.00	
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02 .0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	80	80.00	
3.	IRIGASI YANG MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN									
	Ketahanan Pangan	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung								

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Swasembada Pangan)								
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	0		
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.02.0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	0		
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen			
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	3	3.00	
4.	JAMINAN KESEHATAN									

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	NASIONAL (JKN)									
	Kesehatan untuk Semua	Jaminan Kesehatan Nasional								
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	60	60.00	
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	17	17.00	
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	3	1.00	
5.	KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH									
	Ketahanan Pangan	Kampung Nelayan Merah Putih								
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit			

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok			
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang			
6.	KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH									
	Pertumbuhan Ekonomi	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih								
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	50	50.00	
7.	MAKAN BERGIZI GRATIS									
	Perluasan Akses Pendidikan	Makan Bergizi Gratis								

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	2	60.00	
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	63	120.00	
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	1.00	
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah	Dokumen	1	1.00	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Daerah Kabupaten/Kota	kabupaten/kota				
8.	MASYARAKAT ADAT									
			2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	0		
			2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	0		
9.	MENCETAK DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS LAHAN PERTANIAN (SAWAH/LUMBUNG PANGAN/FOOD ESTATE)									

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Ketahanan Pangan	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)								
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	unit	0		
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1		
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	0		
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	5	303.00	
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03.2.0	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan	Dokumen	0	1.00	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				1.0014	secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Pertanian Pangan Berkelanjutan				
10.	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM									
	Pengentasan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan								
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	1.00	
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.00	
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang	8107	8276.00	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Kewenangan Kabupaten/Kota				
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	80	80.00	
11.	PANGAN AKUATIK									
	Ketahanan Pangan	Pangan Akuatik								
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit			
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha			
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit			
12.	PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH									

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pertumbuhan Ekonomi	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah								
13.	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT LENGKAP BERKUALITAS DI KABUPATEN/KOTA									
	Kesehatan untuk Semua	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota								
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	0.00	
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	62	62.00	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14.	PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH									
	Pengentasan Kemiskinan	Pembangunan 3 Juta Rumah								
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	2	2.00	
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, da	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	20	16.00	
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah		1.00	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	50	50.00	
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	3	3.00	
15.	PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA									
16.	PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS									
	Kesehatan untuk Semua	Pemeriksaan Kesehatan Gratis								
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen		17.00	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Laporan	12	12.00	
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Laporan	12	12.00	
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	3	1.00	
17.	PENANGGULANGAN BENCANA									
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1.00	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	2	2.00	
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0		
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0		

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	20	20.00	
18.	PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING									
	Kesehatan untuk Semua	Stunting								
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6	30.00	
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	5	5.00	
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	12	12.00	
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.03.03.2.0	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	1		

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.0028	Perpipaan					
			2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	3	1.00	
19.	PENDAYAGUNAAN PENYULUH PERTANIAN									
	Ketahanan Pangan	Pendayagunaan Penyuluh Pertanian								
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	Unit	0	10.00	
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07.2.01.0016	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	Unit	0	2.00	
20.	PENGARUSUTAMAAN GENDER									

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Lembaga	65	65.00	
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	19	19.00	
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	12	12.00	
			2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	10	0.00	
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.2.01.0021	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Orang	50	0.00	
21.	PENGENDALIAN INFLASI									
	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi								

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan		1.00	
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen		1.00	
			3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan		1.00	
22.	PENUNTASAN TUBERKULOSIS (TBC)									
	Kesehatan untuk Semua	Penuntasan TBC								
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8107	8276.00	
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI	2.12.04.2.0	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data	Dokumen	3	1.00	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.0004		Kependudukan				
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	2093	2093.00	
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3454	582.00	
23.	PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH									
	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah								
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	Dokumen	1	2.00	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			PENDIDIKAN		Layanan di Bidang Pendidikan	Layanan di Bidang Pendidikan				
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	2.00	
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	2.00	
24.	PERLINDUNGAN ANAK									
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	276	210.00	
			2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	Orang	50	150.00	
			5.01 PERENCANAAN	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang	Jumlah Berita Acara Musrenbang	Berita Acara	1	1.00	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota				
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	1.00	
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	243	283.00	
25.	SEKOLAH RAKYAT									
	Pengentasan Kemiskinan	Sekolah Rakyat								
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	60	60.00	
			2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	12	12.00	

Sumber : Bapperinda Kota Blitar, 2026

Arah kebijakan pembangunan pada setiap urusan pemerintahan diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita sebagai upaya pencapaian visi dan agenda prioritas pembangunan nasional. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional sehingga Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai *outcome* prioritas dalam rangka mendukung Asta Cita.

Tabel 4.9
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Kesepakatan Rakortekrenbang Tahun 2026 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

Sumber : Bapperinda Kota Blitar, 2026

4.4. Penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Blitar disusun melalui proses yang berlapis dan partisipatif, mencerminkan hasil dari rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, serta kegiatan reses yang dijalankan oleh DPRD Kota Blitar sesuai mekanisme sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Seluruh usulan tersebut telah disampaikan secara resmi oleh Pimpinan DPRD kepada Tim Penyusun RKPD Kota Blitar Tahun 2027 melalui SIPD untuk selanjutnya diselaraskan dengan sasaran, prioritas pembangunan daerah, serta kapasitas anggaran yang tersedia secara riil. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Di samping itu, proses penyusunan RKPD Tahun 2027 juga berpijak pada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pembangunan tahun – tahun sebelumnya, serta mencermati sejumlah program prioritas nasional yang memerlukan dukungan sinergis dari pemerintah daerah. Melalui kebijakan integratif, berbagai agenda pembangunan tersebut dirangkum dalam satu kerangka perencanaan yang responsif dan selaras dengan dinamika kebutuhan pembangunan Kota Blitar ke depan.

Tabel 4.9
Pokok – Pokok Pikiran DPRD

VISI	MISI	USULAN	JUMLAH	PERANGKAT DAERAH
Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Masa Depan	Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera	Biopori, sumur resapan	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan, Pembangunan/rehabilitasi / Pemeliharaan drainase di permukiman kumuh	3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis *Smart Governance*	Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan, Rehabilitasi/pemeliharaan drainase Perumahan	11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembangunan baru saluran irigasi primer, irigasi sekunder, dan bangunan air lainnya	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembangunan drainase yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pemeliharaan Berkala Jalan	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pemeliharaan gedung kantor kelurahan / Pemeliharaan lapangan kelurahan	2	Kecamatan Kepanjenkidul
		Peningkatan jalan	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rehabilitasi dan pemeliharaan saluran irigasi primer, sekunder dan bangunan air lainnya	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

VISI	MISI	USULAN	JUMLAH	PERANGKAT DAERAH
		Rehabilitasi dan pemeliharaan saluran irigasi primer, sekunder dan bangunan air lainnya	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kajian/Penelitian	3	Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah
		Pemasangan CCTV di wilayah	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Mewujudkan Pembangunan Kota Bitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri yang Berkelanjutan dengan berbasis teknologi	Pembinaan, Sosialisasi, Pelatihan dan Pengembangan Potensi terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pembinaan, sosialisasi, pelatihan dan pengembangan potensi terhadap pelaku seni dan budaya	4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pembinaan/sosialisasi/ pelatihan budidaya ternak terhadap pelaku usaha peternakan	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pembinaan/sosialisasi/ pelatihan budidaya ternak terhadap pelaku usaha peternakan	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pembinaan / sosialisasi / pelatihan	1	Kecamatan Kepanjenkidul
		Penataan pedagang kaki lima	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Kerja sama antar pelaku usaha mikro	1	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
		Pelatihan Barista tingkat Kota	1	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
		Pelatihan Menjahit Dasar tk Kota	1	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
		Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	1	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
		Pemberdayaan dan pengelolaan managemen Resiko bagi pelaku Wirausaha Baru	1	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Sumber : Bapperinda Kota Blitar, 2026

4.5. Usulan Aspirasi Masyarakat

Usulan aspirasi masyarakat dapat berasal dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD dan usulan masyarakat langsung dalam bentuk hibah. Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD merupakan musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan kecamatan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan kota. Tujuan Musrenbang RKPD adalah menjaring aspirasi masyarakat dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan dari para pemangku kepentingan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah yang diklasifikasikan berdasarkan urusan. Usulan musrenbang diinputkan melalui SIPD yang selanjutnya dilakukan pembahasan dan penyepakatan antara Bapperinda Kota Blitar, Perangkat Daerah dan kecamatan. Adapun usulan musrenbang melalui SIPD dapat disajikan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan berkala jalan;
2. Rehabilitasi Jalan;
3. Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan.

Pemerintah daerah menetapkan kebijakan hibah yang diarahkan pada kegiatan strategis non – pemerintah yang relevan dan mendukung sasaran pembangunan daerah. Pemerintah Kota Blitar memberikan hibah kepada lembaga / organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan non formal, dan kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, serta telah melalui proses verifikasi. Hibah kepada lembaga / organisasi masyarakat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Biaya personil peserta didik sekolah dasar
2. Biaya personil peserta didik sekolah menengah
3. Biaya personil peserta didik PAUD
4. Biaya personil peserta didik Non formal
5. BOP PAUD
6. BOP Sekolah Non Formal / Kesetaraan
7. Pembangunan dan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum
8. Fasilitasi Lembaga Pendidikan
9. Fasilitasi Partai Politik
10. Fasilitasi organisasi keagamaan
11. Fasilitasi Organisasi Kepramukaan
12. Fasilitasi lembaga / organisasi Keolahragaan
13. Fasilitasi Fasilitas Kesehatan Lainnya;
14. Fasilitasi lembaga profesi
15. Fasilitasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
16. Hibah kepada Pemerintah Pusat;
17. Hibah kepada Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

4.6. Pendekatan Pengarusutamaan Pembangunan

4.6.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada RKPD Kota Blitar tahun 2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:

- Pendidikan ;
- Kesehatan ;
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ;
- Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ;
- Sosial

Berikut merupakan kebijakan implementasi SPM yang akan dilakukan pada tahun 2027 :

Tabel 4.10
Kebijakan Pencapaian Target SPM

No	Urusan	Kebijakan
1.	Pendidikan	• Fokus kebijakan pada Urusan Pendidikan yaitu penekanan pada sasaran Pendidikan Dasar sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah • Meningkatkan jangkauan Pendidikan khususnya pada Pendidikan khusus
2.	Kesehatan	• Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana • Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa di kabupaten dan kota
3.	Pekerjaan Umum	• Peningkatan jangkauan pemenuhan kebutuhan Air Minum • Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik
4.	Perumahan rakyat	• Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana • Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	• Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat
6.	Sosial	• Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti • Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti • Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti • Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam panti. • Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi Korban Bencana

Sumber : Bapperinda Kota Blitar, 2026

4.7. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Kota Blitar merupakan salah satu kota yang masuk dalam Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Secara geografis, Kota Blitar berada pada kawasan dataran rendah yang relatif subur dan memiliki aksesibilitas yang cukup baik terhadap wilayah sekitarnya. Perekonomian Kota Blitar didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri kecil dan menengah, serta kegiatan pariwisata yang berkembang di wilayah perkotaan. Selain itu, keberadaan berbagai fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur perkotaan menjadikan Kota Blitar berperan sebagai pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya. Selain itu, Kota Blitar juga memiliki nilai historis yang penting dalam sejarah nasional karena menjadi lokasi Makam Proklamator Ir. Soekarno yang menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di Indonesia. Dalam konteks pembangunan wilayah, Kota Blitar memiliki potensi pengembangan pada sektor perdagangan, jasa, pariwisata, sejarah, serta penguatan fungsi kota sebagai pusat pelayanan regional di kawasan selatan Jawa Timur. Adapun arahan pembangunan kewilayahan Kota Blitar Tahun 2027 diarahkan pada:

a. Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau;
b. Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan;
c. Penguatan jalan daerah dalam upaya peningkatan konektivitas menuju/dari pusat kegiatan, pergudangan, simpul transportasi, dan kawasan strategis;
d. Perencanaan dan penyiapan simpul dan layanan transportasi publik di internal Kawasan perkotaan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta konektivitas ke simpul transportasi lainnya (stasiun kereta api, bandara);
e. Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;
f. Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;
g. Peningkatan layanan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman;
h. Peningkatan aksi pembangunan rendah karbon dalam rangka mendukung penurunan emisi gas rumah kaca;
i. Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor jasa dan perdagangan berdaya saing tinggi, terutama pada sektor Perdagangan, Jasa Keuangan, Real Estate, serta Jasa Lainnya sebagai penggerak ekonomi perkotaan;
j. Peningkatan kualitas SDM dan produktivitas sektoral pada sektor Pendidikan, Kesehatan, serta Informasi dan Komunikasi, guna mendukung transformasi ekonomi berbasis jasa modern;
k. Mendorong investasi dan penguatan nilai tambah sektor strategis, khususnya pada sektor Perdagangan dan jasa pendukungnya, untuk memperkuat fungsi Kota Blitar sebagai pusat pelayanan wilayah;
l. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan UMKM, peningkatan kualitas layanan publik, serta optimalisasi infrastruktur perkotaan;
m. Penguatan simpul perdagangan dan pengolahan melalui UMKM olahan pangan, logistik distribusi, dan kemitraan suplai dari sentra kabupaten sekitar untuk kendali inflasi;
n. Peningkatan fasilitas dan mutu layanan Pendidikan dan Kesehatan serta peningkatan kapasitas layanan rujukan;
o. Peningkatan Penemuan kasus TBC;
p. Penguatan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk menyikapi tingginya kasus kematian akibat DBD;

q. Peningkatan cakupan pengobatan Orang Dengan HIV (ODHIV) baru;
r. Pemetaan potensi SDM serta perluasan kesempatan kerja melalui intervensi pemerintah;
s. Peningkatan sarana prasarana Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja untuk meningkatkan kualitas SDM siap kerja; dan
t. Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional - Double Track Jawa Selatan

TABEL 4.9
KESELARASAN OUTCOME PRIORITAS MENDUKUNG ASTA CITA
HASIL KESEPAKATAN DESK URUSAN RAKORTEKBANG TAHUN 2026
DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01.00	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.										
				Tercapainya Target realisasi Penanaman Modal									
					2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							
							2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	80	225.00	
							2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	10	10.00	
2.	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.										
				Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global									
					3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							
							3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	0	1.00	
					3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
							3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	1	1.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.										
				Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional									
					3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
							3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	0		
							3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	5	5.00	
					3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							
							3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang u	Dokumen	0	1.00	
							3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi,	Dokumen	3	3.00	
4.	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
				Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang									

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							
							1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1.00	
							1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	1	1.00	
				Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan									
					1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							
							1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	0		
							1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM	0		
					1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							
							1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	1	1.00	
							1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	0	1.00	
					1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL							
							1.03.04.2.01.0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0		
							1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Unit	0		
					1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							
							1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	1.00	
							1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	1	1.00	
					1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
							1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	1.63	1.63	
							1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	0	0.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							
							1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	0		
							1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	60	60.00	
5.	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
				Terwujudnya Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan									
					2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
							2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	4	4.00	
							2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1	1.00	
					2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							
							2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	0		
							2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	0		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
				Meningkatnya ketahanan pangan									
					2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							
							2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	21	30.00	
							2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan	2	1.00	
					2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							
							2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.00	
							2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	1	1.00	
7.	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
				Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan									
					3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							
							3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	1.00	
							3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Dokumen	0		
					3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
							3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	0		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	0		
8.	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
				Meningkatnya Produksi Pertanian									
					3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
							3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	2	2.00	
							3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	0		
					3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							
							3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen	1	1.00	
							3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	0		
9.	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.										
				Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah									

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
					2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							
							2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan	Dokumen	1	1.00	
							2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	1.00	
10.	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Lingkungan Hidup Berkualitas									
					2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
							2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	25	1.00	
							2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	1	1.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
							2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	12	12.00	
							2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	60	60.00	
11.	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.										
				Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan									
					1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							
							1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	14	14.00	
							1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	3	3.00	
					1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
							1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	1	2.00	
							1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	3	2.00	
12.	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.										
				Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal berbasis sinergi dan kolaborasi lintas sektor									

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							
							3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga	0		
							3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	0		
13.	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial									
					1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							
							1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	20	20.00	
							1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Orang	0	47.00	
					1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
							1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	7751	8276.00	
							1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	0	60.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
14.	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan									
					2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
							2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	10	150.00	
					2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							
							2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	1	1.00	
							2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	50	50.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
15.	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.									
				Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa								
					2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA							
							2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	0		
							2.13.03.3.01.0004	Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabu	Dokumen	0		
					2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
							2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	0		
							2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	0		
16.	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.										
				Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)									

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
					2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							
							2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	85	80.00	
							2.20.02.2.01.0023	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	%	85	85.00	
17.	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).										
				Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah									
					2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							
							2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	Orang	114752	67.00	
							2.16.02.2.01.0027	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	Dokumen	4	4.00	
					2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							
							2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Titik	30	30.00	
							2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	11	11.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
18.	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional								
					8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
							8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Orang	400	200.00	
							8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	Orang	0	300.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
							8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga	Orang	0	44.00	
							8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Orang	2275	5340.00	
19.	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
				Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah									
					2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE							
							2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0.00	
							2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Berita Acara	0	0.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
20.	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
				Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM									
					2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							
							2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	0		
					2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							
							2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Orang	70	70.00	
							2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	Kegiatan	1	1.00	
21.	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
				Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional									

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							
							3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	1	2.00	
							3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	1	2.00	
					3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							
							3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	1	1.00	
							3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Kegiatan	1	1.00	
22.	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)									
					2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							
							2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	0	130.00	
							2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	Dokumen	1	1.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
					2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							
							2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	Objek	2	2.00	
							2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	5	5.00	
23.	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan									
					1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
							1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	63	120.00	
							1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	19	19.00	
							1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	0	160.00	
							1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	0	1.00	
24.	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Kesehatan Untuk Semua									
					1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
							1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	0		
							1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p	Unit	1	0.00	
							1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	19	5.00	
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
							1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	62	62.00	
25.	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya									
					2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	20	20.00	
							2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	4	2.00	
					2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
							2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	Orang	32	10.00	
							2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	4	12.00	
26.	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital									
					2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							
							2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1.00	
							2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	1	1.00	
					2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL							

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan d	Laporan	1	1.00	
							2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	1.00	
27.	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas									
					2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
							2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kegiatan	1	1.00	
							2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	3	4.00	
					2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
							2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Laporan / Dokumen	3	3.00	
							2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Laporan	1	2.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
28.	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga									
					2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							
							2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	50	50.00	
							2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Organisasi	24	1.00	
					2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							
							2.19.03.2.03.0011	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Orang	20	50.00	
							2.19.03.2.03.0013	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	Orang	20	20.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
29.	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat									
					2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							
							2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	98	98.00	
							2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	15	15.00	
					2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO							
							2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	0		
							2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	0		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
30.	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar									
					1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							
							1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	650	600.00	
							1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan	1	1.00	
							1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	100	100.00	
							1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	21	21.00	
				Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar									

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
					1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
							1.05.02.2.01.0024	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1.00	
							1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12	12.00	
					1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							
							1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	12.00	
							1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1	1.00	
31.	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa									
					2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							
							2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	27	27.00	
							2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	50	50.00	

Sumber : Bapperinda Kota Blitar, 2026

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan memuat program dan kegiatan prioritas tahun 2027 serta program dan kegiatan perangkat daerah dan pagu indikatif tahun 2027 secara keseluruhan. Perumusan program dan kegiatan tersebut didasarkan pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029, evaluasi capaian kinerja, permasalahan, isu strategis, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

5.1. Program Prioritas Daerah

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2027 secara jelas memuat program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, posisi tahun rencana dalam RKPD, serta capaian kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD. Penyusunan program prioritas RKPD 2027 bertujuan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka menengah sesuai RPJMD Kota Blitar 2025–2029. Penetapan prioritas belanja daerah mengacu pada prioritas pembangunan Kota Blitar, yang telah disinkronkan dengan dokumen perencanaan daerah berikut:

1. RPJMD Kota Blitar tahun 2025–2029 sebagai acuan utama pembangunan jangka menengah.
2. RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Jawa Timur 2027 untuk menjamin keselarasan dengan kebijakan regional.
3. Isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang memerlukan penanganan prioritas.
4. Evaluasi capaian kinerja RKPD Kota Blitar 2026 sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan program.
5. Tema Pembangunan Kota Blitar 2027 yang menjadi fokus pelaksanaan pembangunan tahunan.

Dengan demikian, RKPD 2027 dirancang untuk memastikan pembangunan daerah berjalan terarah, efektif, dan selaras dengan tujuan jangka panjang serta kebutuhan strategis Kota Blitar. Adapun komposisi belanja prioritas pembangunan daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Belanja Prioritas Pembangunan Kota Blitar Tahun 2027

No	Prioritas Kota	Urusan	PAGU
1	Peningkatan Ekonomi Daerah yang Inklusif	Pangan	203.902.000
		Pertanian	8.110.738.600
		Kelautan dan Perikanan	2.414.032.500
		Perindustrian	2.390.300.600
		Perdagangan	12.072.208.750
		Penanaman Modal	4.894.265.050
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.526.449.950

No	Prioritas Kota	Urusan	PAGU
		Pariwisata	9.624.711.120
		TOTAL (1)	45.236.608.570
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Ketahanan Fiskal Daerah	Statistik	324.698.700
		Persandian	340.019.600
		Kearsipan	95.926.100
		Unsur Sekretariat Daerah	36.652.553.518
		Unsur Sekretariat DPRD	31.617.298.275
		Unsur Perencanaan	6.077.515.600
		Unsur Keuangan	20.103.261.150
		Unsur Kepegawaian	6.573.919.900
		Unsur Pendidikan dan Pelatihan	380.642.200
		Unsur Penelitian dan Pengembangan	749.865.700
		Inspektorat	9.170.978.050
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.112.635.650
		Kewilayahan	69.897.724.900
		TOTAL (2)	187.097.039.343
3	Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran	Sosial	12.048.666.400
		Tenaga Kerja	2.147.537.500
		Perumahan dan Kawasan permukiman	8.360.180.150
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	576.999.532
		TOTAL (3)	23.133.383.582
4	Peningkatan Kualitas SDM	Pendidikan	185.106.094.950
		Kesehatan	241.308.507.225
		Perpustakaan	5.332.694.650
		Kepemudaan dan Olahraga	22.267.374.450
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.563.069.500
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.295.906.000
		TOTAL (4)	459.873.646.775
5	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.615.080.850
		Lingkungan Hidup	25.802.895.750
		Pertanahan	354.165.000
		Perhubungan	17.945.153.350
		Komunikasi dan Informatika	16.295.696.950
		TOTAL (5)	100.012.991.900

No	Prioritas Kota	Urusan	PAGU
6	Perwujudan Kota Blitar yang Nyaman, Damai, Berketahanan Sosial dan Budaya	Kebudayaan	1.528.473.480
		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.862.952.850
		Kesatuan Bangsa dan Politik	8.340.902.500
		TOTAL (6)	24.732.328.830
		TOTAL	840.085.999.000

Sumber : Hasil Analisa Bapperinda Kota Blitar 2026

5.2. Rencana Pendanaan Implementasi Standar Pelayanan Minmal (SPM) Tahun 2027.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) diimplementasikan sebagai upaya pemenuhan ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar wajib bagi seluruh warga negara. Pelaksanaan kebijakan ini mengikat pemerintah daerah sebagai bentuk kewajiban dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat secara berkualitas dan berkeadilan. Pemerintah Kota Blitar dalam mengalokasikan anggaran untuk Implementasi SPM pada tahun 2027 termuat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.2

Belanja Implementasi SPM Kota Blitar Tahun 2027

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	110.023.200,00
					1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	92.323.400,00
					1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	3.255.910.000,00
					1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	632.381.788,00
					1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	702.833.500,00
					1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil	1.786.350.000,00

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
					Peserta Didik Sekolah Dasar	
				1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	550.800.000,00
					1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	64.355.000,00
				1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	102.550.000,00
					1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.969.900.000,00
					1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	125.901.000,00
					1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	241.909.000,00

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
					1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	739.300.000,00
					1.01.02.2.03.0042 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	96.549.100,00
					1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	323.305.700,00
				1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	83.500.000,00
					1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.903.734,00
					1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	22.500.000,00

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
					1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	42.568.500,00
					1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	10.000.000,00
					1.01.02.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	22.642.000,00
					1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	24.160.000,00
					1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	25.190.700,00
					1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	6.625.000,00

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
					Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
2	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10.846.500,00
					1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	15.586.000,00
					1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8.732.100,00
					1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	259.520.000,00
					1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas	10.649.500,00

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
					Bidang Pendidikan	
					1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	322.470.900,00
				1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	12.059.100,00
					1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	17.415.500,00
					1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	12.250.000,00
					1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.410.200,00

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
					1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	15.118.200,00
			1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.205.344.134,00
					1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	165.236.900,00
		UPT Satuan Pendidikan SMPN 3	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	60.995.200,00
					1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	5.683.200,00

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
		UPT Satuan Pendidikan SMPN 7	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	169.164.800,00
3	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	15.000.000,00
				1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	15.275.000,00
4	Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	10.004.200,00
					1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	18.413.300,00

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
					1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	24.000.000,00
					1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16.925.800,00
					1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	15.065.500,00
					1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	36.771.000,00
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12.286.900,00

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
6	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.020.000,00
7	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	322.688.000,00
8	Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	13.020.000,00
9	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.020.000,00

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
				Kabupaten/Kota		
10	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	13.020.000,00
11	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	13.020.000,00
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13.020.000,00

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
13	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	13.020.000,00
14	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Dinas Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	24.020.000,00
15	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0024 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	30.038.700,00
					1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	85.024.000,00

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
					1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	192.927.060,00
16	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	110.211.600,00
					1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	73.768.000,00
17	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	107.000.000,00
					1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.375.000,00
				1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1.04.02.2.03.0008 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah	4.640.000,00

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
				Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	
				1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	11.650.000,00
18	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.375.000,00
				1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	1.04.02.2.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	11.685.000,00

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
				Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.0004 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	4.374.000,00
				1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	32.580.000,00
					1.04.02.2.03.0007 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	4.640.000,00
19	Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	9.824.000,00
					1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	50.050.000,00
				1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	504.100,00

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
					1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	35.445.408,00
				1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	4.023.200,00
20	Pelayanan informasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	2.131.550,00
21	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	9.336.400,00
					1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	4.950.000,00

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
22	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	4.779.500,00
					1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	6.880.000,00
					1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3.743.400,00
23	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.318.900,00
					1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.424.100,00
					1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	788.500,00

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
				1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	4.450.000,00
					1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	7.964.800,00
24	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	274.871.300,00
					1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	24.879.200,00
					1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	15.198.000,00
					1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.800.000,00
					1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	104.437.800,00

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
					1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	26.131.600,00
					1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	28.560.000,00
					1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	19.430.000,00
					1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	2.800.000,00
					1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.800.000,00
					1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	28.440.000,00

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
					1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	1.200.000,00
25	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	20.154.000,00
					1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	6.120.000,00
					1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	6.633.000,00
					1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	3.000.000,00
	TOTAL					18.519.910.674,00

Sumber : Hasil Analisa Bapperinda Kota Blitar 2026

5.4. Kontribusi Terhadap Pencapaian Nasional

Penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2027 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keterpaduan antara pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat sistem perencanaan pembangunan nasional yang menempatkan pemerintah daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, arah kebijakan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah tidak hanya ditujukan untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan pembangunan di Kota Blitar, tetapi juga diarahkan untuk mendukung diwujudkan melalui beberapa aspek utama. *Pertama*, dukungan terhadap pencapaian sasaran indikator makro nasional melalui penyelarasan target indikator makro daerah dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga capaian pembangunan Kota Blitar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target nasional. Dukungan terhadap pencapaian sasaran indikator makro telah disampaikan dalam Bab IV. *Kedua*, dukungan terhadap pelaksanaan Asta Cita melalui hasil kesepakatan Desk Urusan Rakortekbang Tahun 2026 yang menghubungkan berbagai urusan pemerintahan daerah pencapaian target-target pembangunan nasional secara berkelanjutan. Dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan berbagai proses penyelarasan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, baik pada tahapan perumusan target pembangunan, penyelarasan program dan kegiatan, maupun penetapan prioritas pembangunan. Berbagai forum tersebut, antara lain Rakor Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Tahun 2026, Desk Urusan, serta pembahasan tematik pembangunan nasional, menjadi wadah untuk memastikan keterhubungan antara agenda pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional. *Ketiga,* dukungan terhadap Program Strategis Nasional (ProSN) dan tema pembangunan nasional Tahun 2027 sesuai hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026. *Keempat*, dukungan terhadap Intervensi Pembangunan Kewilayahan, Dukungan terhadap Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) di Kota Blitar. *Kelima*, Dukungan terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU) sebagai upaya memperkuat peran Kota Blitar dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Melalui proses tersebut, berbagai program, kegiatan, dan target pembangunan daerah diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Dukungan Pemerintah Kota Blitar terhadap pencapaian nasional termuat dalam tabel 5.3 sampai 5.6 sebagai berikut:

Tabel 5.3

Keselarasan Asta Cita dengan RKPD Kota Blitar Tahun 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengawasan Penanaman Modal	19.995.000,00
				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	20.000.000,00
2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1.500.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	144.215.000,00
3.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.061.067.000,00

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	9.455.800,00
				Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission*	30.000.000,00
4.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	69.900.000,00

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	9.350.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	85.024.000,00
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	179.300.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Jalan	5.274.129.848,00
				Rekonstruksi Jalan	44.790.666,15
5.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	16.708.400,00

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	208.764.770,00
6.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5.492.800,00
				Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	15.999.700,00
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.250.000,00
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi	3.250.000,00

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				Kabupaten/Kota	
7.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	66.032.500,00
8.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	952.117.300,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	9.969.000,00
9.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	4.400.000,00

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	INFORMASI		
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	165.000.000,00
10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	174.800.000,00

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	4.750.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	500.000,00
				Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	500.000,00
11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	245.000.000,00
				Pembangunan Rumah Baru	105.000.000,00

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	435.552.867,00
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	577.000.000,00
12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-	-
13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	226.280.250,00

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	5.155.800,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.705.476.322,00
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	20.463.795.966,00
14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	2.018.000.000,00

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	2.300.000,00
15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-	-
16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	8.000.000,00

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	70.000.000,00
17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.402.922.400,00
				Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	9.850.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Penyediaan Akses Internet	3.087.360.000,00
				Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	377.585.000,00
18.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	19.360.000,00

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	60.498.300,00
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	5.950.000,00

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	279.293.500,00
19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	3.300.000,00
				Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	1.650.000,00

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	130.000.000,00
				Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	33.000.000,00
21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	690.000.000,00
				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	30.000.000,00
			PROGRAM	Pengembangan dan	15.000.000,00

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	
				Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	10.006.600,00
22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	404.510.400,00
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran	19.986.000,00

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	89.900.000,00
				Pemanfaatan Cagar Budaya	85.172.600,00
23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	47.458.200,00
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	10.004.200,00
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	36.771.000,00

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.866.820.920,00
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	12.000.000,00
25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	25.000.000,00
				Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga	14.478.600,00

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	24.886.500,00
				Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	28.086.100,00
26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.375.000,00
				Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	23.635.000,00
			PROGRAM	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang	4.200.000,00

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			PENCATATAN SIPIL	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K	
				Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	34.885.600,00
27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	6.510.000,00
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2.153.966,00
			PROGRAM	Pengelolaan Ketahanan	3.600.000,00

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	
				Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	6.000.000,00
28.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	9.264.800,00
				Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	58.597.800,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	15.000.000,00

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			KEOLAHRAGAAN	Keolahragaan *(Sport Science)*	
				Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	10.000.000,00
29.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	17.112.100,00
				Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	8.250.000,00

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	92.131.550,00
				Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	9.874.100,00
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	9.336.400,00
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	34.360.300,00
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	50.000.000,00
				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	35.445.408,00
			PROGRAM	Pemadaman dan	6.424.100,00

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	100.000.000,00
31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	5.500.000,00
				Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	4.125.000,00
	TOTAL				51.814.454.433,15

Sumber : Hasil Analisa Bapperinda Kota Blitar 2026

Tabel 5.4
Tabel Keselarasan Pro-SN/Tematik
dengan RKPD Kota Blitar Tahun 2027

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	DIGITALISASI PEMBELAJARAN				
	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	15.065.500,00
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	15.118.200,00
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	6.625.000,00
2.	EKONOMI SYARIAH		4.01 SEKRETARIAT DAERAH	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	89.876.800,00
			3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	48.549.000,00
			3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level	39.015.800,00

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			PERINDUSTRIAN	Kabupaten/Kota	
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	10.000.000,00
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	115.639.000,00
3.	IRIGASI YANG MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN				
	Ketahanan Pangan	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.418.994.361,00
4.	JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)				
	Kesehatan untuk Semua	Jaminan Kesehatan Nasional	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	39.791.000,00
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.095.863.328,00

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5.855.800,00
5.	KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH				
	Ketahanan Pangan	Kampung Nelayan Merah Putih	-	-	-
6.	KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH				
	Pertumbuhan Ekonomi	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	178.294.550,00
7.	MAKAN BERGIZI GRATIS				
	Perluasan Akses Pendidikan	Makan Bergizi Gratis	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	10.649.500,00
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan	7.520.000,00

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	6.244.800,00
8.	MASYARAKAT ADAT		-	-	-
9.	MENCETAK DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS LAHAN PERTANIAN (SAWAH/LUMBUNG PANGAN/FOOD ESTATE)				
	Ketahanan Pangan	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	4.375.000,00
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	7.886.300,00

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
10.	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM				
	Pengentasan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	150.000,00
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.250.000,00
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.705.476.322,00
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	115.639.000,00
11.	PANGAN AKUATIK				
	Ketahanan Pangan	Pangan Akuatik	-	-	-
12.	PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN				

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
	SAMPAH				
	Pertumbuhan Ekonomi	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	-	-	-
13.	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT LENGKAP BERKUALITAS DI KABUPATEN/KOTA				
	Kesehatan untuk Semua	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	12.000.000,00
14.	PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH				
	Pengentasan Kemiskinan	Pembangunan 3 Juta Rumah	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	32.580.000,00
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	11.650.000,00

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.084.275.965,60
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	105.000.000,00
15.	PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA		-	-	-
16.	PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS				
	Kesehatan untuk Semua	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.095.863.328,00
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	69.255.000,00
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	69.255.000,00

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5.855.800,00
17.	PENANGGULANGAN BENCANA		1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	50.000.000,00
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.699.000,00
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	59.151.000,00
18.	PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING				

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
	Kesehatan untuk Semua	Stunting	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5.492.800,00
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.546.481.600,00
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	82.567.800,00
			2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	345.000.000,00
19.	PENDAYAGUNAAN PENYULUH PERTANIAN				
	Ketahanan Pangan	Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	25.880.000,00
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	45.578.500,00
20.	PENGARUSUTAMAAN GENDER		2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	9.100.114,00

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	10.649.500,00
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	82.567.800,00
			2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Perluasan Kesempatan Kerja	58.475.600,00
21.	PENGENDALIAN INFLASI				
	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	15.999.700,00
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1.200.000,00
			3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1.500.000,00
22.	PENUNTASAN				

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
	TUBERKULOSIS (TBC)				
	Kesehatan untuk Semua	Penuntasan TBC	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.705.476.322,00
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5.855.800,00
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.661.850.050,00
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	30.000.000,00
23.	PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH				

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	125.901.000,00
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	92.323.400,00
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	64.355.000,00
24.	PERLINDUNGAN ANAK		1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	26.131.600,00
			2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	25.166.600,00
			5.01 PERENCANAAN	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	82.250.000,00
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	15.275.000,00

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUBKEGIATAN	PAGU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	104.437.800,00
25.	SEKOLAH RAKYAT				
	Pengentasan Kemiskinan	Sekolah Rakyat	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	39.791.000,00
			2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	500.000,00
	TOTAL				84.750.271.340,60

Sumber : Hasil Analisa Bapperinda Kota Blitar 2026

Tabel 5.5
Daftar Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan

KODE	RKP 2026		RKPD 2027		
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
	Provinsi Jawa Timur	• Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional • Double Track Jawa Selatan*	Kota Blitar	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 2.15.05.2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 2.15.05.2.01.0004 Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Pos Jaga PJL Kereta Api

5.3. Rencana Pendanaan Tahun 2027

Rencana pendanaan mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan baik prioritas daerah maupun operasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Pagu indikatif berdasarkan urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel 5.6 sebagai berikut :

Tabel 5.6

Pagu Indikatif berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2027

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PAGU INDIKATIF	
		Rp.	%
A.	URUSAN WAJIB		
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan	185.106.094.950	22,03
2	Kesehatan	241.308.507.225	28,72
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.615.080.850	4,72
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman	8.360.180.150	1,00
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.862.952.850	1,77
6	Sosial	12.048.666.400	1,43
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
7	Tenaga Kerja	2.147.537.500	0,26
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.563.069.500	0,54
9	Pangan	203.902.000	0,02
10	Pertanahan	354.165.000	0,04
11	Lingkungan Hidup	25.802.895.750	3,07
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.112.635.650	0,61
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.295.906.000	0,15
14	Perhubungan	17.945.153.350	2,14
15	Komunikasi dan Informatika	16.295.696.950	1,94
16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.526.449.950	0,66
17	Penanaman Modal	4.894.265.050	0,58
18	Kepemudaan dan Olahraga	22.267.374.450	2,65
19	Statistik	324.698.700	0,04
20	Persandian	340.019.600	0,04
21	Kebudayaan	1.528.473.480	0,18
22	Perpustakaan	5.332.694.650	0,63
23	Kearsipan	95.926.100	0,01
24	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	576.999.532	0,07
B	URUSAN PILIHAN		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PAGU INDIKATIF	
		Rp.	%
1	Kelautan dan Perikanan	2.414.032.500	0,29
2	Pariwisata	9.624.711.120	1,15
3	Pertanian	8.110.738.600	0,97
4	Perdagangan	12.072.208.750	1,44
5	Perindustrian	2.390.300.600	0,28
6	Transmigrasi	0	0,00
C	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
1	Unsur Sekretariat Daerah	36.652.553.518	4,36
2	Unsur Sekretariat DPRD	31.617.298.275	3,76
D	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
1	Unsur Perencanaan	6.077.515.600	0,72
2	Unsur Keuangan	20.103.261.150	2,39
3	Unsur Kepegawaian	6.573.919.900	0,78
4	Unsur Pendidikan dan Pelatihan	380.642.200	0,05
5	Unsur Penelitian dan Pengembangan	749.865.700	0,09
E	UNSUR PENGAWASAN		
1	Inspektorat	9.170.978.050	1,09
F	UNSUR KEWILAYAHAN		
2	Kecamatan	69.897.724.900	8,32
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
3	Kesatuan Bangsa dan Politik	8.340.902.500	0,99
	TOTAL ANGGARAN	840.085.999.000	100,00

Sumber : Hasil Analisa Bapperinda Kota Blitar 2026

Sedangkan pagu indikatif Perangkat Daerah dijelaskan dalam tabel 5.7 dan 5.8 sebagai berikut:

Tabel 5.7
Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2027

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PAGU PERANGKAT DAERAH	
		Rp.	%
1	Dinas Pendidikan	185.106.094.950	22,03
2	Dinas Kesehatan	131.008.507.225	15,59
3	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	110.300.000.000	13,13
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.969.245.850	4,76
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.360.180.150	1,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	11.202.164.300	1,33

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PAGU PERANGKAT DAERAH	
		Rp.	%
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.660.788.550	0,44
8	Dinas Sosial	12.048.666.400	1,43
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.858.975.500	0,70
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.728.673.100	1,28
11	Dinas Lingkungan Hidup	25.802.895.750	3,07
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.112.635.650	0,61
13	Dinas Perhubungan	17.945.153.350	2,14
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	16.960.415.250	2,02
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	7.673.987.450	0,91
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4.894.265.050	0,58
17	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	22.267.374.450	2,65
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11.153.184.600	1,33
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.428.620.750	0,65
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.462.509.350	1,72
21	Sekretariat Daerah	37.229.553.050	4,43
22	Sekretariat DPRD	31.617.298.275	3,76
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.827.381.300	0,81
24	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	20.103.261.150	2,39
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.954.562.100	0,83
26	Inspektorat	9.170.978.050	1,09
27	Kecamatan Kepanjenkidul	21.779.961.100	2,59
28	Kecamatan Sukorejo	23.618.642.400	2,81
29	Kecamatan Sananwetan	24.499.121.400	2,92
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.340.902.500	0,99
	TOTAL ANGGARAN	840.085.999.000	100,00

Sumber : Hasil Analisa Bapperinda Kota Blitar 2026

Tabel 5.8. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Pendidikan						**177.127.042.027,00**							**196.007.814.559,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**177.127.042.027,00**							**196.007.814.559,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**177.127.042.027,00**							**196.007.814.559,00**	
1,	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**132.330.001.179,00**							**143.319.816.449,50**	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						***129.579.437.171,00***							***140.158.114.299,00***	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	88.1 %		100 %	87.8 %	129.579.437.171,00						87.9 %	140.158.114.299,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						117.721.500,00					kantor dinas pendidikan		204.686.160,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						117.721.500,00					kantor dinas pendidikan		204.686.160,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	10.992.400,00						1 Berita Acara	13.274.205,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	9.520.000,00						1 Berita Acara	5.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	13.197.900,00						4 Dokumen	47.655.563,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	60.495.000,00						15 Dokumen	114.267.300,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	23.516.200,00						11 Laporan	23.989.092,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						13.197.900,00							47.655.563,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	13.197.900,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		4 Dokumen	47.655.563,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						23.516.200,00							23.989.092,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	23.516.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		11 Laporan	23.989.092,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.992.400,00							13.274.205,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	2 Berita Acara	10.992.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Berita Acara	13.274.205,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						60.495.000,00							114.267.300,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	15 Dokumen		15 Dokumen	11 Dokumen	60.495.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		15 Dokumen	114.267.300,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis						9.520.000,00							5.500.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	9.520.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Berita Acara	5.500.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						126.646.800.400,00					kantor dinas pendidikan		136.115.298.903,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						126.646.800.400,00					kantor dinas pendidikan		136.115.298.903,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	26.575.000,00						3 Laporan	30.405.186,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3500 Orang/bulan		3500 Orang/bulan	3500 Orang/bulan	18.932.094.066,00						3500 Orang/bulan	136.084.893.717,00	
	1.01.01.2.[illegible]	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						18.932.094.066,00							136.084.893.717,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3500 Orang/bulan		3500 Orang/bulan	132 Orang/bulan	18.932.094.066,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3500 Orang/bulan	136.084.893.717,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						26.575.000,00							30.405.186,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	26.575.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Laporan	30.405.186,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10.425.000,00					kantor dinas pendidikan		10.843.140,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat						10.425.000,00					kantor dinas pendidikan		10.843.140,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.425.000,00						1 Laporan	10.843.140,00	
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						10.425.000,00							10.843.140,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.425.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Laporan	10.843.140,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						10.770.000,00					kantor dinas pendidikan		11.315.640,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah						10.770.000,00					kantor dinas pendidikan		11.315.640,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.770.000,00						1 Dokumen	11.315.640,00	
	1.01.01.2.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi						10.770.000,00							11.315.640,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.770.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Dokumen	11.315.640,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						396.210.450,00					kantor dinas pendidikan		559.209.516,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						396.210.450,00					kantor dinas pendidikan		559.209.516,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	64 Orang		64 Orang	64 Orang	357.290.450,00						64 Orang	477.299.278,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	3 Paket		Paket	3 Paket	38.920.000,00						3 Paket	81.910.238,00	
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						38.920.000,00							81.910.238,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		Paket	3 Paket	38.920.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	81.910.238,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						124.396.450,00							223.069.707,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64 Orang		64 Orang	69 Orang	124.396.450,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		64 Orang	223.069.707,00	Dinas Pendidikan
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		60 Orang	69 Orang	124.396.450,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		60 Orang	223.069.707,00	Dinas Pendidikan
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang		65 Orang	69 Orang	124.396.450,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		65 Orang	223.069.707,00	Dinas Pendidikan
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69 Orang		69 Orang	69 Orang	124.396.450,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		69 Orang	223.069.707,00	Dinas Pendidikan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						879.874.200,00					Kantor Dinas Pendidikan		1.227.050.395,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						879.874.200,00					Kantor Dinas Pendidikan		1.227.050.395,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	73.244.000,00						24 Dokumen	74.347.550,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen		1500 Dokumen	1500 Dokumen	18.860.000,00						1500 Dokumen	45.337.336,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	100.012.500,00						100 Laporan	220.015.993,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	105.069.000,00						1 Paket	203.684.235,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	77.218.200,00						2 Paket	90.389.611,25	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	120.526.800,00						10 Paket	175.203.518,25	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	230.578.000,00						4 Paket	258.174.038,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	154.365.700,00						1 Paket	159.898.113,50	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						26.810.800,00							29.600.912,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	26.810.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		10 Paket	29.600.912,00	Dinas Pendidikan
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Pa ket		1 Paket	10 Paket	26.810.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	29.600.912,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						32.910.800,00							34.471.316,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Pa ket		5 Paket	5 Paket	32.910.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		5 Paket	34.471.316,00	Dinas Pendidikan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Pa ket		4 Paket	5 Pa ket	32.910.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		4 Paket	34.471.316,00	Dinas Pendidikan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Pa ket		1 Paket	5 Pa ket	32.910.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	34.471.316,00	Dinas Pendidikan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Pa ket		3 Paket	5 Pa ket	32.910.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	34.471.316,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						34.097.900,00							37.588.194,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16874500 Paket		1 Paket	1 Pa ket	34.097.900,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	37.588.194,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	34.097.900,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	37.588.194,00	Dinas Pendidikan
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	34.097.900,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	37.588.194,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						56.285.000,00							149.447.535,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	56.285.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	149.447.535,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						27.887.800,00							32.100.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	27.887.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	32.100.000,00	Dinas Pendidikan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	27.887.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	32.100.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						22.004.000,00							14.259.410,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	24 Dokumen	22.004.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		12 Dokumen	14.259.410,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	64 Dokumen		64 Dokumen	24 Dokumen	22.004.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		64 Dokumen	14.259.410,00	Dinas Pendidikan
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	24 Dokumen	22.004.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		48 Dokumen	14.259.410,00	Dinas Pendidikan
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen		36 Dokumen	24 Dokumen	22.004.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Dokumen	14.259.410,00	Dinas Pendidikan
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	22.004.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		24 Dokumen	14.259.410,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.012.500,00							220.015.993,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	100.012.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		100 Laporan	220.015.993,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						18.860.000,00							45.337.336,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen		1500 Dokumen	1500 Dokumen	18.860.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1500 Dokumen	45.337.336,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						430.979.500,00					kantor dinas pendidikan		748.676.225,75	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						430.979.500,00					kantor dinas pendidikan		748.676.225,75	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	18.385.500,00						2 Unit	60.748.632,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	369.915.400,00						5 Unit	687.927.593,75	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						430.979.500,00					kantor dinas pendidikan		748.676.225,75	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	18.385.500,00						2 Unit	60.748.632,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		2 Unit	2 Unit	369.915.400,00						2 Unit	687.927.593,75	
	1.01.01.2.	Pengadaan Mebel						18.385.500,00							60.748.632,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	18.385.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		0 Unit	60.748.632,00	Dinas Pendidikan
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		1 Unit	1 Unit	18.385.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	60.748.632,00	Dinas Pendidikan
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	18.385.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	60.748.632,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						11.285.800,00							201.859.592,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	11.285.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	201.859.592,00	Dinas Pendidikan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	2 Unit	11.285.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		5 Unit	201.859.592,00	Dinas Pendidikan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		2 Unit	2 Unit	11.285.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	201.859.592,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	11.285.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	201.859.592,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.694.734.217,00					kantor dinas pendidikan		2.978.782.814,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						2.694.734.217,00					kantor dinas pendidikan		2.978.782.814,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	1.536.890.881,00						48 Laporan	1.701.318.867,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.143.043.136,00						12 Laporan	1.261.223.838,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	14.800.200,00						1 Laporan	16.240.109,00	
	1.01.01.2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.814.000,00							6.409.935,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.814.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Laporan	6.409.935,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						779.998.000,00							857.192.868,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	36 Laporan	779.998.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		48 Laporan	857.192.868,00	Dinas Pendidikan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	779.998.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Laporan	857.192.868,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.143.043.136,00							1.261.223.838,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.143.043.136,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		12 Laporan	1.261.223.838,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						1.142.485.912,00					kantor dinas pendidikan		1.463.953.655,75	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						1.142.485.912,00					kantor dinas pendidikan		1.463.953.655,75	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	148.618.600,00						3 Unit	194.474.202,75	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.014.000,00						1 Unit	35.072.498,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	13 Unit		13 Unit	13 Unit	280.717.700,00						13 Unit	216.724.391,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	636.464.955,00						1 Unit	935.290.644,00	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan						30.014.000,00							35.072.498,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.014.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	35.072.498,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau						96.540.400,00							139.170.780,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	21 Unit	96.540.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Unit	139.170.780,00	Dinas Pendidikan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	21 Unit	96.540.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	139.170.780,00	Dinas Pendidikan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	96.540.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		21 Unit	139.170.780,00	Dinas Pendidikan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	21 Unit	96.540.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	139.170.780,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						90.339.100,00							55.843.830,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit		19 Unit	2 Unit	90.339.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Unit	55.843.830,00	Dinas Pendidikan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	2 Unit	90.339.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		20 Unit	55.843.830,00	Dinas Pendidikan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	90.339.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	55.843.830,00	Dinas Pendidikan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit		36 Unit	2 Unit	90.339.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Unit	55.843.830,00	Dinas Pendidikan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	2 Unit	90.339.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Unit	55.843.830,00	Dinas Pendidikan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	2 Unit	90.339.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		4 Unit	55.843.830,00	Dinas Pendidikan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	2 Unit	90.339.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	55.843.830,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit		13 Unit	2 Unit	90.339.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		13 Unit	55.843.830,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						136.115.085,00							330.647.842,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	136.115.085,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	330.647.842,00	Dinas Pendidikan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	2 Unit	136.115.085,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	330.647.842,00	Dinas Pendidikan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	2 Unit	136.115.085,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	330.647.842,00	Dinas Pendidikan
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						126.646.800.400,00					kantor dinas pendidikan		136.115.298.903,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Bidang	-		-	-	107.688.131.334,00						-	0,00	
	1.01.01.2.02.0009	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan						107.688.131.334,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan	-		-	1140 Orang/bula n	107.688.131.334,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD Dana Alokasi	-	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	0,00	Dinas Pendidikan
2,	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						47.749.036.058,00							53.781.663.732,00	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						42.520.547.143,00							47.629.504.580,00	
			3.Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS)	99,77 %		89,33 %	92,13 %	42.520.547.143,00						94,67 %	47.629.504.580,00	
			999.Persentase warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100 %		100 %	100 %	42.520.547.143,00						100 %	47.629.504.580,00	
			999.Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	57,9 %		46,67 %	49,48 %	42.520.547.143,00						52,29 %	47.629.504.580,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan sekolah dasar						18.900.930.322,00					Satuan pendidikan		21.056.458.125,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	2 Buku		2 Buku	2 Buku	259.520.000,00						2 Buku	286.120.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	92.323.400,00						1 Dokumen	118.746.747,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.000.000,00						1 Kegiatan	105.702.629,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.586.000,00						1 Dokumen	44.069.020,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas		3 Komunitas	3 Komunitas	8.732.100,00						3 Komunitas	9.646.875,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	120 Orang		120 Orang	120 Orang	10.846.500,00						120 Orang	19.791.419,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	9 Paket		9 Paket	9 Paket	3.255.910.000,00						9 Paket	3.949.440.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket		0 Paket	Paket	312.232.000,00						2 Paket	210.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang	63 Orang		63 Orang	63 Orang	10.649.500,00						63 Orang	6.987.750,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2946 Peserta Didik		2946 Peserta Didik	2946 Peserta Didik	1.786.350.000,00						2946 Peserta Didik	1.974.246.750,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		3 Ruang	3 Ruang	702.833.500,00						3 Ruang	965.918.993,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		3 Unit	3 Unit	632.381.788,00						3 Unit	2.517.250.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	63 Satuan Pendidikan		63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	322.470.900,00						63 Satuan Pendidikan	445.774.597,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	63 Satuan Pendidikan		63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	6.175.800,00						63 Satuan Pendidikan	17.765.024,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	63 Satuan Pendidikan		63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	10.894.850.000,00						63 Satuan Pendidikan	9.741.453.265,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	426.142.400,00						500 Peserta Didik	493.955.570,00	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS	120 Orang		120 Orang	120 Orang	38.903.234,00						120 Orang	49.588.686,00	
	1.01.02.2.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						312.232.000,00							210.000.000,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket		0 Paket	1 Paket	312.232.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	210.000.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						426.142.400,00							493.955.570,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	426.142.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		500 Peserta Didik	493.955.570,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						6.175.800,00							17.765.024,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	63 Satuan Pendidikan		63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	6.175.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		63 Satuan Pendidikan	17.765.024,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.[illegible]	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						10.894.850.000,00							9.741.453.265,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	63 Satuan Pendidikan		63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	10.894.850.000,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-BOS Reguler	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		63 Satuan Pendidikan	9.741.453.265,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						38.903.234,00							49.588.686,00	
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	120 Orang		120 Orang	120 Orang	38.903.234,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		120 Orang	49.588.686,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						10.846.500,00							19.791.419,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	120 Orang		120 Orang	120 Orang	10.846.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		120 Orang	19.791.419,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang						92.323.400,00							118.746.747,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	92.323.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Dokumen	118.746.747,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						15.586.000,00							44.069.020,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.586.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Dokumen	44.069.020,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						8.732.100,00							9.646.875,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas		3 Komunitas	2 Komunitas	8.732.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Komunitas	9.646.875,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan,						15.000.000,00							105.702.629,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Kegiatan	105.702.629,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						259.520.000,00							286.120.800,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	2 Buku		2 Buku	2 Buku	259.520.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Buku	286.120.800,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.	Pengadaan Perlengkapan Peserta						3.255.910.000,00							3.949.440.000,00	
		Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	9 Paket		9 Paket	9 Paket	3.255.910.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		9 Paket	3.949.440.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						632.381.788,00							2.517.250.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		3 Unit	5 Unit	632.381.788,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Unit	2.517.250.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang						10.649.500,00							6.987.750,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	63 Orang		63 Orang	120 Orang	10.649.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		63 Orang	6.987.750,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						322.470.900,00							445.774.597,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	63 Satuan Pendidikan		63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	322.470.900,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		63 Satuan Pendidikan	445.774.597,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						702.833.500,00							965.918.993,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		3 Ruang	5 Ruang	702.833.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Ruang	965.918.993,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						1.786.350.000,00							1.974.246.750,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2946 Peserta Didik		2946 Peserta Didik	2360 Peserta Didik	1.786.350.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2946 Peserta Didik	1.974.246.750,00	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						18.059.798.849,00					satuan pendidikan sekolah menengah		20.129.724.079,00	
		Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan sekolah menengah pertama						18.059.798.849,00					satuan pendidikan sekolah menengah		20.129.724.079,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	64.355.000,00						1 Dokumen	49.061.250,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.275.000,00						1 Kegiatan	65.984.625,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	19 Dokumen		19 Dokumen	19 Dokumen	12.250.000,00						19 Dokumen	49.061.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas		1 Komunitas	1 Komunitas	10.410.200,00						1 Komunitas	11.521.125,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	19 Orang		19 Orang	19 Orang	17.415.500,00						19 Orang	19.201.250,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	3 Paket	3.676.020.300,00						3 Paket	4.665.797.706,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang	19 Orang		19 Orang	19 Orang	15.118.200,00						19 Orang	16.550.289,00	
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya	409 Peserta Didik		409 Peserta Didik	409 Peserta Didik	550.800.000,00						409 Peserta Didik	589.727.250,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	19 Satuan Pendidikan		19 Satuan Pendidikan	19 Satuan Pendidikan	555.479.836,00						19 Satuan Pendidikan	603.947.600,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	19 Satuan Pendidikan		19 Satuan Pendidikan	19 Satuan Pendidikan	12.059.100,00						19 Satuan Pendidikan	13.281.707,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	19 Satuan Pendidikan		19 Satuan Pendidikan	19 Satuan Pendidikan	9.545.150.000,00						19 Satuan Pendidikan	9.587.900.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	311.806.000,00						500 Peserta Didik	519.993.023,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	38 Orang		38 Orang	38 Orang	37.307.034,00						38 Orang	46.245.686,00	
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						550.800.000,00							589.727.250,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	409 Peserta Didik		409 Peserta Didik	409 Peserta Didik	550.800.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		409 Peserta Didik	589.727.250,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						311.806.000,00							519.993.023,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	311.806.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		500 Peserta Didik	519.993.023,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						12.059.100,00							13.281.707,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	19 Satuan Pendidikan		19 Satuan Pendidikan	19 Satuan Pendidikan	12.059.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Satuan Pendidikan	13.281.707,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						9.545.150.000,00							9.587.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	19 Satuan Pendidikan		19 Satuan Pendidikan	19 Satuan Pendidikan	9.545.150.000,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-BOS Reguler	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Satuan Pendidikan	9.587.900.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah						37.307.034,00							46.245.686,00	
		Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	38 Orang		38 Orang	38 Orang	37.307.034,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		38 Orang	46.245.686,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						17.415.500,00							19.201.250,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	19 Orang		19 Orang	19 Orang	17.415.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Orang	19.201.250,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang						64.355.000,00							49.061.250,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	64.355.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Dokumen	49.061.250,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						12.250.000,00							49.061.250,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	19 Dokumen		19 Dokumen	1 Dokumen	12.250.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Dokumen	49.061.250,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						10.410.200,00							11.521.125,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas		1 Komunitas	1 Komunitas	10.410.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Komunitas	11.521.125,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan,						15.275.000,00							65.984.625,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.275.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Kegiatan	65.984.625,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						12.723.900,00							35.258.612,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	19 Satuan Pendidikan		19 Satuan Pendidikan	19 Satuan Pendidikan	12.723.900,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Satuan Pendidikan	35.258.612,00	Dinas Pendidikan
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	854 Satuan Pendidikan		854 Satuan Pendidikan	19 Satuan Pendidikan	12.723.900,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		854 Satuan Pendidikan	35.258.612,00	Dinas Pendidikan
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	782 Satuan Pendidikan		782 Satuan Pendidikan	19 Satuan Pendidikan	12.723.900,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		782 Satuan Pendidikan	35.258.612,00	Dinas Pendidikan
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan	19 Satuan Pendidikan	12.723.900,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Satuan Pendidikan	35.258.612,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang						15.118.200,00							16.550.289,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	19 Orang		19 Orang	19 Orang	15.118.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Orang	16.550.289,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.	Pengadaan Perlengkapan Peserta						2.226.640.000,00							3.045.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13 Paket		13 Paket	3 Paket	2.226.640.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		13 Paket	3.045.900.000,00	Dinas Pendidikan
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	3 Paket	2.226.640.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	3.045.900.000,00	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						7.666.414.634,00					Satuan PAUD		8.381.368.811,00	
		Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan anak usia dini						7.666.414.634,00					Satuan PAUD		8.381.368.811,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	2 Paket	36.771.000,00						2 Paket	40.540.028,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.901.000,00						1 Dokumen	138.151.867,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	35.700.000,00						1 Kegiatan	74.871.216,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000,00						1 Dokumen	98.268.912,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 Komunitas		2 Komunitas	2 Komunitas	16.925.800,00						2 Komunitas	41.656.529,00	
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	2 Paket	92.539.700,00						2 Paket	83.944.350,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	160 Orang		160 Orang	160 Orang	15.300.000,00						160 Orang	21.213.864,00	
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	160 Satuan Pendidikan		160 Satuan Pendidikan	160 Satuan Pendidikan	18.413.300,00						160 Satuan Pendidikan	43.028.039,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	160 Satuan Pendidikan		160 Satuan Pendidikan	160 Satuan Pendidikan	3.298.500.000,00						160 Satuan Pendidikan	3.283.800.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	7 Paket		7 Paket	7 Paket	739.300.000,00						7 Paket	770.657.974,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang	160 Orang		160 Orang	160 Orang	15.065.500,00						160 Orang	12.403.125,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3575 Peserta Didik		3575 Peserta Didik	3575 Peserta Didik	1.969.900.000,00						3575 Peserta Didik	2.185.844.063,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	160 Satuan Pendidikan		160 Satuan Pendidikan	160 Satuan Pendidikan	148.408.000,00						160 Satuan Pendidikan	121.787.552,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta didik		500 Peserta didik	500 Peserta didik	302.248.600,00						500 Peserta didik	313.797.905,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	241.909.000,00						1 Ruang	332.500.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	323.305.700,00						2 Ruang	230.422.500,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	102.550.000,00						1 Unit	331.808.400,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	96.549.100,00						2 Unit	165.401.460,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	160 Orang		160 Orang	160 Orang	53.123.734,00						160 Orang	79.271.027,00	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						102.550.000,00							331.808.400,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	2 Unit	102.550.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	331.808.400,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD						92.539.700,00							83.944.350,00	
		Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	2 Paket	92.539.700,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	83.944.350,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD						1.969.900.000,00							2.185.844.063,00	
		Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3575 Peserta Didik		3575 Peserta Didik	3575 Peserta Didik	1.969.900.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3575 Peserta Didik	2.185.844.063,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						18.413.300,00							43.028.039,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	160 Satuan Pendidikan		160 Satuan Pendidikan	160 Satuan Pendidikan	18.413.300,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		160 Satuan Pendidikan	43.028.039,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0019	Pengelolaan Dana BOP PAUD						3.298.500.000,00							3.283.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	160 Satuan Pendidikan		160 Satuan Pendidikan	160 Satuan Pendidikan	3.298.500.000,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-BOP PAUD DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		160 Satuan Pendidikan	3.283.800.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD						53.123.734,00							79.271.027,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	160 Orang		160 Orang	160 Orang	53.123.734,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		160 Orang	79.271.027,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						15.300.000,00							21.213.864,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	160 Orang		160 Orang	160 Orang	15.300.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		160 Orang	21.213.864,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang						125.901.000,00							138.151.867,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	125.901.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Dokumen	138.151.867,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						24.000.000,00							98.268.912,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Dokumen	98.268.912,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						16.925.800,00							41.656.529,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 Komunitas		2 Komunitas	2 Komunitas	16.925.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Komunitas	41.656.529,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru						241.909.000,00							332.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	241.909.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Ruang	332.500.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik						302.248.600,00							313.797.905,00	
		Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta didik		500 Peserta didik	2500 Peserta didik	302.248.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		500 Peserta didik	313.797.905,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan,						35.700.000,00							74.871.216,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	35.700.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Kegiatan	74.871.216,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang						15.065.500,00							12.403.125,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	160 Orang		160 Orang	160 Orang	15.065.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		160 Orang	12.403.125,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.	Pengadaan Perlengkapan Peserta						739.300.000,00							770.657.974,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	7 Paket		7 Paket	7 Paket	739.300.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		7 Paket	770.657.974,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						96.549.100,00							165.401.460,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	96.549.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	165.401.460,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD						36.771.000,00							40.540.028,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2 Pa ket		2 Paket	1 Pa ket	36.771.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	40.540.028,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD						148.408.000,00							121.787.552,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	160 Satuan Pendidikan		160 Satuan Pendidikan	160 Satuan Pendidikan	148.408.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		160 Satuan Pendidikan	121.787.552,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2. 03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						323.305.700,00							230.422.500,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		2 Ruang	1 Ruang	323.305.700,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Ruang	230.422.500,00	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						3.121.892.253,00					PKBM, LKP dan UPT PLD		4.214.112.717,00	
		Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan kesetaraan						3.121.892.253,00					PKBM, LKP dan UPT PLD		4.214.112.717,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	195.281.360,00	
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.006.600,00						1 Paket	11.025.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	42.568.500,00						1 Dokumen	712.100.475,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	24.160.000,00						1 Kegiatan	27.762.163,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000,00						10 Dokumen	49.612.500,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas		1 Komunitas	1 Komunitas	22.642.000,00						1 Komunitas	33.005.322,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	17.088.800,00						10 Orang	29.476.109,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	100.903.734,00						10 Orang	456.752.575,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.190.700,00						1 Paket	23.059.890,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	2 Paket	15.048.500,00						2 Paket	16.537.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang	10 Orang		0 Orang	10 Orang	6.625.000,00						10 Orang	6.719.600,00	
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	207 Peserta Didik		207 Peserta Didik	207 Peserta Didik	83.500.000,00						207 Peserta Didik	1.400.726.250,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	170 Peserta Didik		170 Peserta Didik	170 Peserta Didik	158.877.000,00						170 Peserta Didik	23.059.890,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	175.491.619,00						1 Unit	88.200.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	300 Peserta Didik		300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	1.257.600.000,00						300 Peserta Didik	80.420.980,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan	5 Satuan Pendidikan		5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	22.500.000,00						5 Satuan Pendidikan	56.384.055,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	5 Satuan Pendidikan		5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	1.092.200.000,00						5 Satuan Pendidikan	985.900.000,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah	10 Orang		10 Orang	10 Orang	7.489.800,00						10 Orang	18.089.048,00	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan						83.500.000,00							1.400.726.250,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	207 Peserta Didik		207 Peserta Didik	207 Peserta Didik	83.500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		207 Peserta Didik	1.400.726.250,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						100.903.734,00							456.752.575,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10 Orang		10 Orang	2 Or an g	100.903.734,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		10 Orang	456.752.575,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan						22.500.000,00							56.384.055,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5 Satuan Pendidikan		5 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	22.500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		5 Satuan Pendidikan	56.384.055,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						1.092.200.000,00							985.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	5 Satuan Pendidikan		5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	1.092.200.000,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		5 Satuan Pendidikan	985.900.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						7.489.800,00							18.089.048,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	7.489.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		10 Orang	18.089.048,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						17.088.800,00							29.476.109,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	17.088.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		10 Orang	29.476.109,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang						42.568.500,00							712.100.475,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	42.568.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Dokumen	712.100.475,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						10.000.000,00							49.612.500,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Dokumen		10 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		10 Dokumen	49.612.500,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						22.642.000,00							33.005.322,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas		1 Komunitas	2 Komunitas	22.642.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Komunitas	33.005.322,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan,						24.160.000,00							27.762.163,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	3 Kegiatan	24.160.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Kegiatan	27.762.163,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik						158.877.000,00							23.059.890,00	
		Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	170 Peserta Didik		170 Peserta Didik	100 Peserta Didik	158.877.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		170 Peserta Didik	23.059.890,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.	Pengadaan Perlengkapan Peserta						25.190.700,00							23.059.890,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Pa ket		1 Paket	1 Pa ket	25.190.700,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	23.059.890,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						15.048.500,00							16.537.500,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	2 Paket	15.048.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	16.537.500,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang						6.625.000,00							6.719.600,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang		0 Oran g	10 Orang	6.625.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		10 Orang	6.719.600,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.	Pengadaan Alat Rumah Tangga						10.006.600,00							11.025.000,00	
		Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Pa ket		1 Paket	1 Pa ket	10.006.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	11.025.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						1.257.600.000,00							80.420.980,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	300 Peserta Didik		300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	1.257.600.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		300 Peserta Didik	80.420.980,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						175.491.619,00							88.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	175.491.619,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	88.200.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan						50.000.000,00							195.281.360,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	195.281.360,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						18.900.930.322,00					Satuan pendidikan		21.056.458.125,00	
		Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan sekolah dasar						18.900.930.322,00					Satuan pendidikan		21.056.458.125,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	110.023.200,00						-	100.000.000,00	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						110.023.200,00							100.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	3 Unit	110.023.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan anak usia dini						7.666.414.634,00					Satuan PAUD		8.381.368.811,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	-		-	-	10.004.200,00						-	12.000.000,00	
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						10.004.200,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	160 Orang	10.004.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	12.000.000,00	Dinas Pendidikan
3,	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						643.512.179,00							973.418.749,00	
		Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan						643.512.179,00							973.418.749,00	
			999.Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	643.512.179,00						100 Persentase	973.418.749,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						577.792.279,00					Tenaga pendidik dan kependidikan		900.962.558,00	
		Meningkatnya kurikulum muatan lokal pendidikan dasar sesuai standar						577.792.279,00					Tenaga pendidik dan kependidikan		900.962.558,00	
			Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	3 Buku		3 Buku	3 Buku	8.100.000,00						3 Buku	8.930.250,00	
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang	500 Buku		500 Buku	500 Buku	25.026.300,00						500 Buku	27.591.496,00	
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	121.688.979,00						1 Dokumen	134.163.225,00	
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	212.187.000,00						1 Dokumen	403.502.652,00	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	63 Orang		63 Orang	63 Orang	194.632.500,00						63 Orang	297.870.693,00	
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.157.500,00						1 Dokumen	28.904.242,00	
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar						16.157.500,00							28.904.242,00	
		Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.157.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Dokumen	28.904.242,00	Dinas Pendidikan
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar						25.026.300,00							27.591.496,00	
		Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	500 Buku		500 Buku	500 Buku	25.026.300,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		500 Buku	27.591.496,00	Dinas Pendidikan
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						194.632.500,00							297.870.693,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	63 Orang		63 Orang	500 Orang	194.632.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		63 Orang	297.870.693,00	Dinas Pendidikan
	1.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan						8.100.000,00							8.930.250,00	
		Buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	3 Buku		3 Buku	3 Buku	8.100.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Buku	8.930.250,00	Dinas Pendidikan
	1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan						212.187.000,00							403.502.652,00	
		Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	212.187.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Dokumen	403.502.652,00	Dinas Pendidikan
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar						121.688.979,00							134.163.225,00	
		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	121.688.979,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Dokumen	134.163.225,00	Dinas Pendidikan
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						65.719.900,00					pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF		72.456.191,00	
		Meningkatnya kurikulum muatan lokal PAUD dan PNF sesuai standar						65.719.900,00					pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF		72.456.191,00	
			Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai	1 Buku		1 Buku	1 Buku	5.900.000,00						1 Buku	6.504.750,00	
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	750 Buku		750 Buku	750 Buku	8.342.100,00						750 Buku	9.197.165,00	
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.357.000,00						1 Dokumen	14.726.093,00	
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.055.800,00						1 Dokumen	27.624.020,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.065.000,00						1 Dokumen	14.404.163,00	
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						13.065.000,00							14.404.163,00	
		Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.065.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Dokumen	14.404.163,00	Dinas Pendidikan
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						8.342.100,00							9.197.165,00	
		Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	750 Buku		750 Buku	57 Buku	8.342.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		750 Buku	9.197.165,00	Dinas Pendidikan
	1.01.03.2.02.0004	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan						5.900.000,00							6.504.750,00	
		Buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai	1 Buku		1 Buku	1 Buku	5.900.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Buku	6.504.750,00	Dinas Pendidikan
	1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan						25.055.800,00							27.624.020,00	
		Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.055.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Dokumen	27.624.020,00	Dinas Pendidikan
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan						13.357.000,00							14.726.093,00	
		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.357.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Dokumen	14.726.093,00	Dinas Pendidikan
4,	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						4.370.581.034,00							7.174.655.791,00	
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan						4.370.581.034,00							7.174.655.791,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Indeks Pemerataan	18.38 Rasio		18.30 Rasio	18.32 Rasio	4.370.581.034,00						18.34 Rasio	7.174.655.791,00	
			999.Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	57.09 Persentase		54 Persentase	55 Persentase	4.370.581.034,00						56 Persentase	7.174.655.791,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan						4.370.581.034,00					Pendidik dan tenaga kependidikan		7.174.655.791,00	
		Meningkatnya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar						4.370.581.034,00					Pendidik dan tenaga kependidikan		7.174.655.791,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	4.205.344.134,00						3 Dokumen	6.931.792.571,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	165.236.900,00						3 Laporan	242.863.220,00	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						4.205.344.134,00							6.931.792.571,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	4.205.344.134,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Dokumen	6.931.792.571,00	Dinas Pendidikan
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						165.236.900,00							242.863.220,00	
		Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	165.236.900,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Laporan	242.863.220,00	Dinas Pendidikan
5,	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**						12.964.500,00							0,00	
		Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan						12.964.500,00							0,00	
			999.Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	12.964.500,00						100 Persentase	0,00	
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						12.964.500,00					Satuan PAUD		0,00	
		Meningkatnya keberlangsungan operasional satuan pendidikan						12.964.500,00					Satuan PAUD		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.064.500,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.900.000,00						1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						5.900.000,00							0,00	
		Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.900.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh						7.064.500,00							0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.064.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan
		UPT Satuan Pendidikan SMPN 1						802.367.600,00							954.050.801,00	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						802.367.600,00							954.050.801,00	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						802.367.600,00							954.050.801,00	
6,	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						132.330.001.179,00							143.319.816.449,50	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						210.541.500,00							379.785.121,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	88.1 %		100 %	87.8 %	210.541.500,00						87.9 %	379.785.121,00	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						396.210.450,00					UPT SP SMPN 1		559.209.516,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						396.210.450,00					UPT SP SMPN 1		559.209.516,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	60 Orang		60 Orang	60 Orang	357.290.450,00						60 Orang	477.299.278,00	
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						25.287.000,00							28.461.038,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64 Orang		64 Orang	60 Orang	25.287.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		64 Orang	28.461.038,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	25.287.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		60 Orang	28.461.038,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang		65 Orang	60 Orang	25.287.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		65 Orang	28.461.038,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69 Orang		69 Orang	60 Orang	25.287.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		69 Orang	28.461.038,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
	1.01.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						879.874.200,00					UPT SP SMPN 1		1.227.050.395,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						879.874.200,00					UPT SP SMPN 1		1.227.050.395,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	73.244.000,00						12 Dokumen	74.347.550,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	105.069.000,00						1 Paket	203.684.235,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	77.218.200,00						1 Paket	90.389.611,25	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.526.800,00						1 Paket	175.203.518,25	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	230.578.000,00						1 Paket	258.174.038,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	154.365.700,00						1 Paket	159.898.113,50	
	1.01.01.2. 06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.630.500,00							7.828.852,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.630.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	7.828.852,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Pa ket	8.630.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		10 Paket	7.828.852,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
	1.01.01.2. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18.538.500,00							34.299.657,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	18.538.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	34.299.657,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	1 Paket	18.538.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		5 Paket	34.299.657,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	18.538.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		4 Paket	34.299.657,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	18.538.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	34.299.657,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
	1.01.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						12.714.400,00							20.033.087,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16874500 Paket		1 Paket	1 Paket	12.714.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	20.033.087,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	12.714.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	20.033.087,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	12.714.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	20.033.087,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
	1.01.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.800.000,00							3.307.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	3.307.500,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.204.600,00							3.803.184,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.204.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	3.803.184,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	4.204.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	3.803.184,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						11.634.000,00							13.230.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	64 Dokumen		64 Dokumen	5 Dokumen	11.634.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		64 Dokumen	13.230.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	5 Dokumen	11.634.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		48 Dokumen	13.230.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen		36 Dokumen	5 Dokumen	11.634.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		36 Dokumen	13.230.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	5 Dokumen	11.634.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		24 Dokumen	13.230.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	5 Dokumen	11.634.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		12 Dokumen	13.230.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						430.979.500,00					UPT SP SMPN 1		748.676.225,75	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						430.979.500,00					UPT SP SMPN 1		748.676.225,75	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	369.915.400,00						2 Unit	687.927.593,75	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						430.979.500,00					UPT SP SMPN 1		748.676.225,75	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	369.915.400,00						1 Unit	687.927.593,75	
	1.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						22.567.200,00							81.832.181,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	22.567.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	81.832.181,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	22.567.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	81.832.181,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	1 Unit	22.567.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		5 Unit	81.832.181,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		2 Unit	1 Unit	22.567.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	81.832.181,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.694.734.217,00					UPT SP SMPN 1		2.978.782.814,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						2.694.734.217,00					UPT SP SMPN 1		2.978.782.814,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	1.536.890.881,00						36 Laporan	1.701.318.867,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	14.800.200,00						1 Laporan	16.240.109,00	
	1.01.01.2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.020.000,00							1.124.550,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.020.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Laporan	1.124.550,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
	1.01.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						74.777.600,00							79.181.550,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	12 Laporan	74.777.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		48 Laporan	79.181.550,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	12 Laporan	74.777.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Laporan	79.181.550,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
	1.01.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						1.142.485.912,00					UPT SP SMPN 1		1.463.953.655,75	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						1.142.485.912,00					UPT SP SMPN 1		1.463.953.655,75	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	148.618.600,00						1 Unit	194.474.202,75	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	1 Unit		1 Unit	1 Unit	280.717.700,00						1 Unit	216.724.391,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		0 Unit	1 Unit	636.464.955,00						1 Unit	935.290.644,00	
	1.01.01.2. 09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						3.732.800,00							3.598.119,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	2 Unit	3.732.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	3.598.119,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	2 Unit	3.732.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Unit	3.598.119,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	3.732.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	3.598.119,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	2 Unit	3.732.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		21 Unit	3.598.119,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.440.200,00							36.248.105,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	15 Unit	25.440.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	36.248.105,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit		36 Unit	15 Unit	25.440.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Unit	36.248.105,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit		19 Unit	15 Unit	25.440.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Unit	36.248.105,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit		13 Unit	15 Unit	25.440.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		13 Unit	36.248.105,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	15 Unit	25.440.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		4 Unit	36.248.105,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	15 Unit	25.440.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Unit	36.248.105,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	15 Unit	25.440.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		20 Unit	36.248.105,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	15 Unit	25.440.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	36.248.105,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						194.700,00							66.837.298,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	194.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	66.837.298,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	194.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	66.837.298,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	194.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	66.837.298,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7,	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						47.749.036.058,00							53.781.663.732,00	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						591.826.100,00							574.265.680,00	
			3.Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS)	99,77 %		89,33 %	92,13 %	591.826.100,00						94,67 %	574.265.680,00	
			999.Persentase warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100 %		100 %	100 %	591.826.100,00						100 %	574.265.680,00	
			999.Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	57,9 %		46,67 %	49,48 %	591.826.100,00						52,29 %	574.265.680,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 1		20.129.724.079,00	
		Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan sekolah menengah						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 1		20.129.724.079,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13 Paket		13 Paket	13 Paket	3.676.020.300,00						13 Paket	4.665.797.706,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	555.479.836,00						1 Satuan Pendidikan	603.947.600,00	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						67.819.200,00							67.776.408,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	67.819.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Satuan Pendidikan	67.776.408,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	854 Satuan Pendidikan		854 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	67.819.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		854 Satuan Pendidikan	67.776.408,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	782 Satuan Pendidikan		782 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	67.819.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		782 Satuan Pendidikan	67.776.408,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	19 Satuan Pendidikan		19 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	67.819.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Satuan Pendidikan	67.776.408,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
	1.01.02.2.	Pengadaan Perlengkapan Peserta						169.607.700,00							187.748.253,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	2 Paket	169.607.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	187.748.253,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13 Paket		13 Paket	2 Paket	169.607.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		13 Paket	187.748.253,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan sekolah menengah						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 1		20.129.724.079,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	7 Buku		7 Buku	7 Buku	1.558.513.600,00						7 Buku	1.761.563.769,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket		0 Paket	1 Paket	207.650.700,00						0 Paket	252.463.993,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket		1 Paket	2 Paket	184.070.900,00						2 Paket	275.533.434,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		0 Unit	1 Unit	592.499.904,00						1 Unit	827.928.087,00	
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						135.540.000,00							87.097.500,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		0 Unit	6 Unit	135.540.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	87.097.500,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	6 Unit	135.540.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	87.097.500,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	6 Unit	135.540.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		Unit	87.097.500,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah						19.729.400,00							9.321.527,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	19.729.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	9.321.527,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	50 Paket		50 Paket	1 Pa ket	19.729.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	9.321.527,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket		0 Paket	1 Pa ket	19.729.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		0 Paket	9.321.527,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
	1.01.02.2.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						17.387.400,00							20.901.416,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Pa ket		1 Paket	2 Pa ket	17.387.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	20.901.416,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Pa ket		0 Paket	2 Pa ket	17.387.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	20.901.416,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket		1 Paket	2 Paket	17.387.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	20.901.416,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
	1.01.02.2. 02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						181.742.400,00							201.420.576,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	7 Buku		7 Buku	5 Buku	181.742.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		7 Buku	201.420.576,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		UPT Satuan Pendidikan SMPN 2						814.246.661,00							873.279.051,00	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						814.246.661,00							873.279.051,00	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						814.246.661,00							873.279.051,00	
8,	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						132.330.001.179,00							143.319.816.449,50	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						374.878.961,00							395.729.203,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	88.1 %		100 %	87.8 %	374.878.961,00						87.9 %	395.729.203,00	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						396.210.450,00					UPT SP SMPN 2		559.209.516,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						396.210.450,00					UPT SP SMPN 2		559.209.516,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	60 Orang		60 Orang	60 Orang	357.290.450,00						60 Orang	477.299.278,00	
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						25.950.000,00							28.862.348,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64 Orang		64 Orang	62 Orang	25.950.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		64 Orang	28.862.348,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		60 Orang	62 Orang	25.950.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		60 Orang	28.862.348,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69 Orang		69 Orang	62 Orang	25.950.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		69 Orang	28.862.348,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang		65 Orang	62 Orang	25.950.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		65 Orang	28.862.348,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
	1.01.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						879.874.200,00					UPT SP SMPN 2		1.227.050.395,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						879.874.200,00					UPT SP SMPN 2		1.227.050.395,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	73.244.000,00						12 Dokumen	74.347.550,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	105.069.000,00						1 Paket	203.684.235,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	77.218.200,00						1 Paket	90.389.611,25	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.526.800,00						1 Paket	175.203.518,25	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	230.578.000,00						1 Paket	258.174.038,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	154.365.700,00						1 Paket	159.898.113,50	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						13.052.000,00							19.080.857,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	13.052.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		10 Paket	19.080.857,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	13.052.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	19.080.857,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						16.892.000,00							22.668.062,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	1 Paket	16.892.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		5 Paket	22.668.062,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	16.892.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	22.668.062,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	16.892.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	22.668.062,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	16.892.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		4 Paket	22.668.062,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
	1.01.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						11.036.000,00							19.303.232,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	11.036.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	19.303.232,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.036.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	19.303.232,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16874500 Paket		1 Paket	1 Paket	11.036.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	19.303.232,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
	1.01.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.600.000,00							3.969.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.600.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	3.969.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
	1.01.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.652.800,00							6.186.128,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.652.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	6.186.128,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Pa ket		2 Paket	1 Pa ket	5.652.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	6.186.128,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.754.000,00							10.259.865,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	48 Dokumen	2.754.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		24 Dokumen	10.259.865,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	2.754.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		48 Dokumen	10.259.865,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	48 Dokumen	2.754.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		12 Dokumen	10.259.865,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	64 Dokumen		64 Dokumen	48 Dokumen	2.754.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		64 Dokumen	10.259.865,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen		36 Dokumen	48 Dokumen	2.754.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Dokumen	10.259.865,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						430.979.500,00					UPT SP SMPN 2		748.676.225,75	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						430.979.500,00					UPT SP SMPN 2		748.676.225,75	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	369.915.400,00						1 Unit	687.927.593,75	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						430.979.500,00					UPT SP SMPN 2		748.676.225,75	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	369.915.400,00						1 Unit	687.927.593,75	
	1.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						86.959.000,00							45.035.141,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	1 Unit	86.959.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		5 Unit	45.035.141,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	86.959.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	45.035.141,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	86.959.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	45.035.141,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		2 Unit	1 Unit	86.959.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	45.035.141,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
	1.01.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.694.734.217,00					UPT SP SMPN 2		2.978.782.814,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						2.694.734.217,00					UPT SP SMPN 2		2.978.782.814,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	1.536.890.881,00						48 Laporan	1.701.318.867,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	14.800.200,00						1 Laporan	16.240.109,00	
	1.01.01.2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.020.000,00							1.124.550,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.020.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Laporan	1.124.550,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
	1.01.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						95.710.161,00							82.650.952,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	95.710.161,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Laporan	82.650.952,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	36 Laporan	95.710.161,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		48 Laporan	82.650.952,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						1.142.485.912,00					UPT SP SMPN 2		1.463.953.655,75	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						1.142.485.912,00					UPT SP SMPN 2		1.463.953.655,75	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	148.618.600,00						3 Unit	194.474.202,75	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	13 Unit		13 Unit	13 Unit	280.717.700,00						13 Unit	216.724.391,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 Unit		2 Unit	2 Unit	636.464.955,00						2 Unit	935.290.644,00	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						4.385.400,00							2.084.497,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	2 Unit	4.385.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		21 Unit	2.084.497,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	2 Unit	4.385.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	2.084.497,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	4.385.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	2.084.497,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	2 Unit	4.385.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Unit	2.084.497,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.143.000,00							19.955.471,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit		36 Unit	35 Unit	10.143.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Unit	19.955.471,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	35 Unit	10.143.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Unit	19.955.471,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	35 Unit	10.143.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	19.955.471,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	35 Unit	10.143.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		20 Unit	19.955.471,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	35 Unit	10.143.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	19.955.471,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit		19 Unit	35 Unit	10.143.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Unit	19.955.471,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit		13 Unit	35 Unit	10.143.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		13 Unit	19.955.471,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	35 Unit	10.143.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		4 Unit	19.955.471,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						55.046.000,00							134.549.100,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	55.046.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	134.549.100,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	55.046.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	134.549.100,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	55.046.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	134.549.100,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						430.979.500,00					UPT SP SMPN 2		748.676.225,75	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	42.678.600,00						0 Unit	0,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						430.979.500,00					UPT SP SMPN 2		748.676.225,75	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	42.678.600,00						0 Unit	0,00	
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						42.678.600,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	42.678.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		0 Unit	0,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
9,	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						47.749.036.058,00							53.781.663.732,00	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						439.367.700,00							477.549.848,00	
			3.Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS)	99,77 %		89,33 %	92,13 %	439.367.700,00						94,67 %	477.549.848,00	
			999.Persentase warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100 %		100 %	100 %	439.367.700,00						100 %	477.549.848,00	
			999.Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	57,9 %		46,67 %	49,48 %	439.367.700,00						52,29 %	477.549.848,00	
		Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan sekolah menengah						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 2		20.129.724.079,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	3 Paket	3.676.020.300,00						3 Paket	4.665.797.706,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	555.479.836,00						1 Satuan Pendidikan	603.947.600,00	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						61.603.200,00							67.776.408,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	854 Satuan Pendidikan		854 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	61.603.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		854 Satuan Pendidikan	67.776.408,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	782 Satuan Pendidikan		782 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	61.603.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		782 Satuan Pendidikan	67.776.408,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	61.603.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Satuan Pendidikan	67.776.408,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	19 Satuan Pendidikan		19 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	61.603.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Satuan Pendidikan	67.776.408,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
	1.01.02.2.	Pengadaan Perlengkapan Peserta						170.293.200,00							188.352.864,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13 Paket		13 Paket	13 Paket	170.293.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		13 Paket	188.352.864,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	13 Paket	170.293.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	188.352.864,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 2		20.129.724.079,00	
		Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan sekolah menengah						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 2		20.129.724.079,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	7 Buku		7 Buku	7 Buku	1.558.513.600,00						7 Buku	1.761.563.769,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket		0 Paket	1 Paket	207.650.700,00						0 Paket	252.463.993,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	293.168.375,00						Unit	188.153.947,00	
	1.01.02.2.	Pengadaan Mebel Sekolah						5.393.900,00							0,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	50 Paket		50 Paket	1 Paket	5.393.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	0,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.393.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	0,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket		0 Paket	1 Paket	5.393.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		0 Paket	0,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						19.383.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		1 Unit	1 Unit	19.383.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	20.000.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	19.383.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		Unit	20.000.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	19.383.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	20.000.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	19.383.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	20.000.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						182.694.400,00							201.420.576,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	7 Buku		7 Buku	7 Buku	182.694.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		7 Buku	201.420.576,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		UPT Satuan Pendidikan SMPN 3						931.457.575,00							1.069.899.957,00	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						931.457.575,00							1.069.899.957,00	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						931.457.575,00							1.069.899.957,00	
10,	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						132.330.001.179,00							143.319.816.449,50	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						335.861.100,00							382.959.439,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	88.1 %		100 %	87.8 %	335.861.100,00						87.9 %	382.959.439,00	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						396.210.450,00					UPT SP SMPN 3		559.209.516,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						396.210.450,00					UPT SP SMPN 3		559.209.516,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	60 Orang		60 Orang	60 Orang	357.290.450,00						60 Orang	477.299.278,00	
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						26.103.000,00							28.461.037,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64 Orang		64 Orang	60 Orang	26.103.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		64 Orang	28.461.037,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	26.103.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		60 Orang	28.461.037,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang		65 Orang	60 Orang	26.103.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		65 Orang	28.461.037,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69 Orang		69 Orang	60 Orang	26.103.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		69 Orang	28.461.037,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
	1.01.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						879.874.200,00					UPT SP SMPN 3		1.227.050.395,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						879.874.200,00					UPT SP SMPN 3		1.227.050.395,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	73.244.000,00						36 Dokumen	74.347.550,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	105.069.000,00						1 Paket	203.684.235,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	77.218.200,00						1 Paket	90.389.611,25	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.526.800,00						1 Paket	175.203.518,25	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	230.578.000,00						1 Paket	258.174.038,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	154.365.700,00						1 Paket	159.898.113,50	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						14.213.100,00							17.394.143,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	14.213.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	17.394.143,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Pa ket	14.213.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		10 Paket	17.394.143,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						23.914.200,00							20.670.221,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Pa ket		1 Paket	1 Pa ket	23.914.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	20.670.221,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Pa ket		3 Paket	1 Pa ket	23.914.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	20.670.221,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Pa ket		4 Paket	1 Pa ket	23.914.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		4 Paket	20.670.221,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Pa ket		5 Paket	1 Pa ket	23.914.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		5 Paket	20.670.221,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
	1.01.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.939.500,00							7.594.902,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16874500 Paket		1 Paket	1 Paket	1.939.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	7.594.902,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.939.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	7.594.902,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	1.939.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	7.594.902,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.375.000,00							5.622.750,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.375.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	5.622.750,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.499.700,00							8.268.419,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	7.499.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	8.268.419,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.499.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	8.268.419,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.426.000,00							3.777.165,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen		36 Dokumen	24 Dokumen	3.426.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Dokumen	3.777.165,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	24 Dokumen	3.426.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		12 Dokumen	3.777.165,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	64 Dokumen		64 Dokumen	24 Dokumen	3.426.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		64 Dokumen	3.777.165,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	24 Dokumen	3.426.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		48 Dokumen	3.777.165,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	3.426.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		24 Dokumen	3.777.165,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						430.979.500,00					UPT SP SMPN 3		748.676.225,75	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						430.979.500,00					UPT SP SMPN 3		748.676.225,75	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	369.915.400,00						1 Unit	687.927.593,75	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						430.979.500,00					UPT SP SMPN 3		748.676.225,75	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	369.915.400,00						1 Unit	687.927.593,75	
	1.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						94.078.500,00							114.052.302,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		2 Unit	5 Unit	94.078.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	114.052.302,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	5 Unit	94.078.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	114.052.302,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	5 Unit	94.078.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	114.052.302,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	94.078.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		5 Unit	114.052.302,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.694.734.217,00					UPT SP SMPN 3		2.978.782.814,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						2.694.734.217,00					UPT SP SMPN 3		2.978.782.814,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	1.536.890.881,00						36 Laporan	1.701.318.867,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	14.800.200,00						1 Laporan	16.240.109,00	
	1.01.01.2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.530.000,00							1.686.825,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.530.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Laporan	1.686.825,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						87.904.000,00							101.929.874,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	24 Laporan	87.904.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		48 Laporan	101.929.874,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	24 Laporan	87.904.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Laporan	101.929.874,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						1.142.485.912,00					UPT SP SMPN 3		1.463.953.655,75	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						1.142.485.912,00					UPT SP SMPN 3		1.463.953.655,75	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	148.618.600,00						1 Unit	194.474.202,75	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	1 Unit		1 Unit	1 Unit	280.717.700,00						1 Unit	216.724.391,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		0 Unit	1 Unit	636.464.955,00						1 Unit	935.290.644,00	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.331.700,00							5.251.759,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	2 Unit	5.331.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		21 Unit	5.251.759,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	5.331.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	5.251.759,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	2 Unit	5.331.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Unit	5.251.759,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	2 Unit	5.331.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	5.251.759,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.546.400,00							8.715.042,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	1 Unit	9.546.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		20 Unit	8.715.042,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit		13 Unit	1 Unit	9.546.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		13 Unit	8.715.042,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit		19 Unit	1 Unit	9.546.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Unit	8.715.042,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	9.546.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	8.715.042,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	9.546.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	8.715.042,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit		36 Unit	1 Unit	9.546.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Unit	8.715.042,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	1 Unit	9.546.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Unit	8.715.042,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	1 Unit	9.546.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		4 Unit	8.715.042,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						55.000.000,00							59.535.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	55.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	59.535.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	55.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	59.535.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	55.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	59.535.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
11,	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						47.749.036.058,00							53.781.663.732,00	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						595.596.475,00							686.940.518,00	
			3.Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS)	99,77 %		89,33 %	92,13 %	595.596.475,00						94,67 %	686.940.518,00	
			999.Persentase warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100 %		100 %	100 %	595.596.475,00						100 %	686.940.518,00	
			999.Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	57,9 %		46,67 %	49,48 %	595.596.475,00						52,29 %	686.940.518,00	
		Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan sekolah menengah						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 3		20.129.724.079,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket		0 Paket	0 Paket	174.916.100,00						2 Paket	268.000.330,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13 Paket		13 Paket	13 Paket	3.676.020.300,00						13 Paket	4.665.797.706,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	555.479.836,00						1 Satuan Pendidikan	603.947.600,00	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						60.995.200,00							66.144.708,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	19 Satuan Pendidikan		19 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	60.995.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Satuan Pendidikan	66.144.708,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	854 Satuan Pendidikan		854 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	60.995.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		854 Satuan Pendidikan	66.144.708,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	782 Satuan Pendidikan		782 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	60.995.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		782 Satuan Pendidikan	66.144.708,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	60.995.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Satuan Pendidikan	66.144.708,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
	1.01.02.2.	Pengadaan Perlengkapan Peserta						170.841.600,00							188.352.864,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	13 Paket	170.841.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	188.352.864,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13 Paket		13 Paket	13 Paket	170.841.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		13 Paket	188.352.864,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						5.683.200,00							59.516.147,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.683.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	59.516.147,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	1 Paket	5.683.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	59.516.147,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket		0 Paket	1 Paket	5.683.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	59.516.147,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 3		20.129.724.079,00	
		Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan sekolah menengah						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 3		20.129.724.079,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	7 Buku		7 Buku	7 Buku	1.558.513.600,00						7 Buku	1.761.563.769,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	293.168.375,00						Unit	188.153.947,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit		0 Unit	1 Unit	107.851.300,00						0 Unit	194.241.868,00	
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						80.000.000,00							139.116.868,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	139.116.868,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit		1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		0 Unit	139.116.868,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit		0 Unit	1 Unit	80.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		0 Unit	139.116.868,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						94.620.475,00							31.549.691,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		1 Unit	4 Unit	94.620.475,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	31.549.691,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	4 Unit	94.620.475,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	31.549.691,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	4 Unit	94.620.475,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		Unit	31.549.691,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		2 Unit	4 Unit	94.620.475,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	31.549.691,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						183.456.000,00							202.260.240,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	7 Buku		7 Buku	3 Buku	183.456.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		7 Buku	202.260.240,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		UPT Satuan Pendidikan SMPN 4						937.314.460,00							1.025.319.996,00	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						937.314.460,00							1.025.319.996,00	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						937.314.460,00							1.025.319.996,00	
12,	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						132.330.001.179,00							143.319.816.449,50	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						289.386.720,00							209.732.501,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	88.1 %		100 %	87.8 %	289.386.720,00						87.9 %	209.732.501,00	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						396.210.450,00					UPT SP SMPN 4		559.209.516,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						396.210.450,00					UPT SP SMPN 4		559.209.516,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	60 Orang		60 Orang	60 Orang	357.290.450,00						60 Orang	477.299.278,00	
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						24.613.000,00							27.495.248,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69 Orang		69 Orang	60 Orang	24.613.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		69 Orang	27.495.248,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang		65 Orang	60 Orang	24.613.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		65 Orang	27.495.248,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64 Orang		64 Orang	60 Orang	24.613.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		64 Orang	27.495.248,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	24.613.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		60 Orang	27.495.248,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
	1.01.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						879.874.200,00					UPT SP SMPN 4		1.227.050.395,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						879.874.200,00					UPT SP SMPN 4		1.227.050.395,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	73.244.000,00						12 Dokumen	74.347.550,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	105.069.000,00						1 Paket	203.684.235,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	77.218.200,00						1 Paket	90.389.611,25	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.526.800,00						1 Paket	175.203.518,25	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	230.578.000,00						1 Paket	258.174.038,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	154.365.700,00						1 Paket	159.898.113,50	
	1.01.01.2. 06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.280.000,00							8.026.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	7.280.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		10 Paket	8.026.200,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.280.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	8.026.200,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						17.919.200,00							19.756.249,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	17.919.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		5 Paket	19.756.249,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	17.919.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		4 Paket	19.756.249,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	17.919.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	19.756.249,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	4 Paket	17.919.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	19.756.249,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
	1.01.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6.814.500,00							7.512.435,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16874500 Paket		1 Paket	1 Paket	6.814.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	7.512.435,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.814.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	7.512.435,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	6.814.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	7.512.435,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						17.500.000,00							19.293.750,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	17.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	19.293.750,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.476.000,00							8.242.290,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.476.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	8.242.290,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	7.476.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	8.242.290,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.978.000,00							4.385.745,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.978.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		12 Dokumen	4.385.745,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	12 Dokumen	3.978.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		48 Dokumen	4.385.745,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	64 Dokumen		64 Dokumen	12 Dokumen	3.978.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		64 Dokumen	4.385.745,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	12 Dokumen	3.978.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		24 Dokumen	4.385.745,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen		36 Dokumen	12 Dokumen	3.978.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Dokumen	4.385.745,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						430.979.500,00					UPT SP SMPN 4		748.676.225,75	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						430.979.500,00					UPT SP SMPN 4		748.676.225,75	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	369.915.400,00						1 Unit	687.927.593,75	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						430.979.500,00					UPT SP SMPN 4		748.676.225,75	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	369.915.400,00						1 Unit	687.927.593,75	
	1.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						19.094.000,00							20.808.144,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	19.094.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	20.808.144,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		2 Unit	2 Unit	19.094.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	20.808.144,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	2 Unit	19.094.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		5 Unit	20.808.144,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	19.094.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	20.808.144,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.694.734.217,00					UPT SP SMPN 4		2.978.782.814,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						2.694.734.217,00					UPT SP SMPN 4		2.978.782.814,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	1.536.890.881,00						36 Laporan	1.701.318.867,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	14.800.200,00						1 Laporan	16.240.109,00	
	1.01.01.2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.020.000,00							1.079.568,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.020.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Laporan	1.079.568,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						62.434.320,00							68.793.354,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	62.434.320,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Laporan	68.793.354,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	36 Laporan	62.434.320,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		48 Laporan	68.793.354,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						1.142.485.912,00					UPT SP SMPN 4		1.463.953.655,75	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						1.142.485.912,00					UPT SP SMPN 4		1.463.953.655,75	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	148.618.600,00						1 Unit	194.474.202,75	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	1 Unit		1 Unit	1 Unit	280.717.700,00						1 Unit	216.724.391,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		0 Unit	1 Unit	636.464.955,00						1 Unit	935.290.644,00	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.587.200,00							2.852.278,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	2.587.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Unit	2.852.278,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	3 Unit	2.587.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	2.852.278,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	3 Unit	2.587.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		21 Unit	2.852.278,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	3 Unit	2.587.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	2.852.278,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						18.670.500,00							10.463.276,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit		13 Unit	3 Unit	18.670.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		13 Unit	10.463.276,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit		36 Unit	3 Unit	18.670.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Unit	10.463.276,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	3 Unit	18.670.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	10.463.276,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	3 Unit	18.670.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		20 Unit	10.463.276,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	18.670.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Unit	10.463.276,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	3 Unit	18.670.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		4 Unit	10.463.276,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	3 Unit	18.670.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	10.463.276,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit		19 Unit	3 Unit	18.670.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Unit	10.463.276,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							11.023.964,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	11.023.964,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	11.023.964,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	11.023.964,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
13,	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						47.749.036.058,00							53.781.663.732,00	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						647.927.740,00							613.327.255,00	
			3.Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS)	99,77 %		89,33 %	92,13 %	647.927.740,00						94,67 %	613.327.255,00	
			999.Persentase warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100 %		100 %	100 %	647.927.740,00						100 %	613.327.255,00	
			999.Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	57,9 %		46,67 %	49,48 %	647.927.740,00						52,29 %	613.327.255,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 4		20.129.724.079,00	
		Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan sekolah menengah						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 4		20.129.724.079,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket		0 Paket	0 Paket	174.916.100,00						2 Paket	268.000.330,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13 Paket		13 Paket	13 Paket	3.676.020.300,00						13 Paket	4.665.797.706,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	555.479.836,00						1 Satuan Pendidikan	603.947.600,00	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						61.782.336,00							64.461.191,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	61.782.336,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Satuan Pendidikan	64.461.191,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	854 Satuan Pendidikan		854 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	61.782.336,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		854 Satuan Pendidikan	64.461.191,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	782 Satuan Pendidikan		782 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	61.782.336,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		782 Satuan Pendidikan	64.461.191,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	19 Satuan Pendidikan		19 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	61.782.336,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Satuan Pendidikan	64.461.191,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
	1.01.02.2.	Pengadaan Perlengkapan Peserta						170.841.600,00							202.260.240,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13 Paket		13 Paket	0 Pa ket	170.841.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		13 Paket	202.260.240,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	0 Pa ket	170.841.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	202.260.240,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
	1.01.02.2. 02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						67.962.800,00							110.243.495,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Pa ket		2 Paket	2 Pa ket	67.962.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	110.243.495,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Pa ket		1 Paket	2 Pa ket	67.962.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	110.243.495,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket		0 Paket	2 Paket	67.962.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	110.243.495,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan sekolah menengah						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 4		20.129.724.079,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	7 Buku		7 Buku	7 Buku	1.558.513.600,00						7 Buku	1.761.563.769,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket		0 Paket	1 Paket	207.650.700,00						0 Paket	252.463.993,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket		0 Paket	2 Paket	184.070.900,00						2 Paket	275.533.434,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		0 Unit	1 Unit	592.499.904,00						1 Unit	827.928.087,00	
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						100.010.504,00							86.090.697,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.010.504,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	86.090.697,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.010.504,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		Unit	86.090.697,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.010.504,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	86.090.697,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah						48.103.200,00							132.883.774,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	50 Paket		50 Paket	1 Paket	48.103.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	132.883.774,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket		0 Paket	1 Paket	48.103.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		0 Paket	132.883.774,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Pa ket		1 Paket	1 Pa ket	48.103.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	132.883.774,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
	1.01.02.2.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						15.771.300,00							17.387.858,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Pa ket		0 Paket	1 Pa ket	15.771.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	17.387.858,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Pa ket		1 Paket	1 Pa ket	15.771.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	17.387.858,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket		1 Paket	1 Paket	15.771.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	17.387.858,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
	1.01.02.2. 02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						183.456.000,00							202.260.240,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	7 Buku		7 Buku	7 Buku	183.456.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		7 Buku	202.260.240,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		UPT Satuan Pendidikan SMPN 5						857.753.070,00							970.788.171,00	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						857.753.070,00							970.788.171,00	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						857.753.070,00							970.788.171,00	
14,	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						132.330.001.179,00							143.319.816.449,50	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						364.644.270,00							367.811.862,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	88.1 %		100 %	87.8 %	364.644.270,00						87.9 %	367.811.862,00	
	1.01.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						396.210.450,00					UPT SP SMPN 5		559.209.516,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						396.210.450,00					UPT SP SMPN 5		559.209.516,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	60 Orang		60 Orang	60 Orang	357.290.450,00						60 Orang	477.299.278,00	
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						25.815.000,00							28.461.038,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69 Orang		69 Orang	60 Orang	25.815.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		69 Orang	28.461.038,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64 Orang		64 Orang	60 Orang	25.815.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		64 Orang	28.461.038,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	25.815.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		60 Orang	28.461.038,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang		65 Orang	60 Orang	25.815.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		65 Orang	28.461.038,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
	1.01.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						879.874.200,00					UPT SP SMPN 5		1.227.050.395,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						879.874.200,00					UPT SP SMPN 5		1.227.050.395,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	73.244.000,00						12 Dokumen	74.347.550,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	105.069.000,00						1 Paket	203.684.235,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	77.218.200,00						1 Paket	90.389.611,25	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.526.800,00						1 Paket	175.203.518,25	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	230.578.000,00						1 Paket	258.174.038,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	154.365.700,00						1 Paket	159.898.113,50	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						22.980.100,00							25.335.560,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	8 Paket	22.980.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		10 Paket	25.335.560,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	8 Paket	22.980.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	25.335.560,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						34.376.200,00							37.899.761,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	26 Paket	34.376.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	37.899.761,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	26 Paket	34.376.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		5 Paket	37.899.761,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	26 Paket	34.376.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	37.899.761,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	26 Paket	34.376.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		4 Paket	37.899.761,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
	1.01.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						28.094.100,00							31.406.587,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	25 Paket	28.094.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	31.406.587,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Pa ket		1 Paket	25 Paket	28.094.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	31.406.587,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16874500 Paket		1 Paket	25 Paket	28.094.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	31.406.587,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
	1.01.01.2. [illegible]	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.800.000,00							1.984.500,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Pa ket		1 Paket	3 Paket	1.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	1.984.500,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
	1.01.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.946.500,00							6.556.016,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Pa ket		1 Paket	3 Pa ket	5.946.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	6.556.016,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Pa ket		2 Paket	3 Pa ket	5.946.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	6.556.016,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
	1.01.01.2. 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						8.382.000,00							5.470.605,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	36 Dokumen	8.382.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		12 Dokumen	5.470.605,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	64 Dokumen		64 Dokumen	36 Dokumen	8.382.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		64 Dokumen	5.470.605,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	36 Dokumen	8.382.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		48 Dokumen	5.470.605,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	8.382.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Dokumen	5.470.605,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	36 Dokumen	8.382.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		24 Dokumen	5.470.605,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						430.979.500,00					UPT SP SMPN 5		748.676.225,75	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						430.979.500,00					UPT SP SMPN 5		748.676.225,75	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	369.915.400,00						1 Unit	687.927.593,75	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						430.979.500,00					UPT SP SMPN 5		748.676.225,75	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	369.915.400,00						1 Unit	687.927.593,75	
	1.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						13.098.600,00							8.434.125,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	13.098.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	8.434.125,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	13.098.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	8.434.125,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	2 Unit	13.098.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		5 Unit	8.434.125,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		2 Unit	2 Unit	13.098.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	8.434.125,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.694.734.217,00					UPT SP SMPN 5		2.978.782.814,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						2.694.734.217,00					UPT SP SMPN 5		2.978.782.814,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	1.536.890.881,00						36 Laporan	1.701.318.867,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	14.800.200,00						1 Laporan	16.240.109,00	
	1.01.01.2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.020.000,00							1.124.550,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.020.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Laporan	1.124.550,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						69.494.400,00							76.617.576,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	36 Laporan	69.494.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		48 Laporan	76.617.576,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	69.494.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Laporan	76.617.576,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						1.142.485.912,00					UPT SP SMPN 5		1.463.953.655,75	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						1.142.485.912,00					UPT SP SMPN 5		1.463.953.655,75	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	148.618.600,00						1 Unit	194.474.202,75	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	1 Unit		1 Unit	1 Unit	280.717.700,00						1 Unit	216.724.391,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		0 Unit	1 Unit	636.464.955,00						1 Unit	935.290.644,00	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						8.807.400,00							10.722.254,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	3 Unit	8.807.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		21 Unit	10.722.254,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	8.807.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Unit	10.722.254,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	3 Unit	8.807.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	10.722.254,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	3 Unit	8.807.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	10.722.254,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						34.816.800,00							17.680.793,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	22 Unit	34.816.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Unit	17.680.793,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit		36 Unit	22 Unit	34.816.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Unit	17.680.793,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	22 Unit	34.816.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	17.680.793,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	22 Unit	34.816.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		20 Unit	17.680.793,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	22 Unit	34.816.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		4 Unit	17.680.793,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	22 Unit	34.816.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	17.680.793,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit		13 Unit	22 Unit	34.816.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		13 Unit	17.680.793,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit		19 Unit	22 Unit	34.816.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Unit	17.680.793,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						110.013.170,00							116.118.497,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	110.013.170,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	116.118.497,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	110.013.170,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	116.118.497,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	110.013.170,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	116.118.497,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
15,	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						47.749.036.058,00							53.781.663.732,00	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						493.108.800,00							602.976.309,00	
			3.Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS)	99,77 %		89,33 %	92,13 %	493.108.800,00						94,67 %	602.976.309,00	
			999.Persentase warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100 %		100 %	100 %	493.108.800,00						100 %	602.976.309,00	
			999.Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	57,9 %		46,67 %	49,48 %	493.108.800,00						52,29 %	602.976.309,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 5		20.129.724.079,00	
		Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan sekolah menengah						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 5		20.129.724.079,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13 Paket		13 Paket	13 Paket	3.676.020.300,00						13 Paket	4.665.797.706,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	555.479.836,00						1 Satuan Pendidikan	603.947.600,00	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						50.889.600,00							60.230.016,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan	256 Satuan Pendidikan	50.889.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Satuan Pendidikan	60.230.016,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	782 Satuan Pendidikan		782 Satuan Pendidikan	256 Satuan Pendidikan	50.889.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		782 Satuan Pendidikan	60.230.016,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	19 Satuan Pendidikan		19 Satuan Pendidikan	256 Satuan Pendidikan	50.889.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Satuan Pendidikan	60.230.016,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	854 Satuan Pendidikan		854 Satuan Pendidikan	256 Satuan Pendidikan	50.889.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		854 Satuan Pendidikan	60.230.016,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
	1.01.02.2.	Pengadaan Perlengkapan Peserta						137.264.000,00							167.424.768,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13 Paket		13 Paket	13 Paket	137.264.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		13 Paket	167.424.768,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	13 Paket	137.264.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	167.424.768,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan sekolah menengah						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 5		20.129.724.079,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	7 Buku		7 Buku	7 Buku	1.558.513.600,00						7 Buku	1.761.563.769,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket		0 Paket	1 Paket	207.650.700,00						0 Paket	252.463.993,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket		0 Paket	2 Paket	184.070.900,00						2 Paket	275.533.434,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	293.168.375,00						Unit	188.153.947,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		0 Unit	1 Unit	592.499.904,00						1 Unit	827.928.087,00	
	1.01.02.2. 02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						116.000.000,00							81.991.140,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		0 Unit	1 Unit	116.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	81.991.140,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	116.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		Unit	81.991.140,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	116.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	81.991.140,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
	1.01.02.2.	Pengadaan Mebel Sekolah						5.553.900,00							7.589.169,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	16 Paket	5.553.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	7.589.169,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	50 Paket		50 Paket	16 Paket	5.553.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	7.589.169,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket		0 Paket	16 Paket	5.553.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		0 Paket	7.589.169,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
	1.01.02.2.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						7.425.600,00							36.018.014,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Pa ket		1 Paket	11 Paket	7.425.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	36.018.014,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Pa ket		0 Paket	11 Paket	7.425.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	36.018.014,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket		1 Paket	11 Paket	7.425.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	36.018.014,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						27.194.900,00							32.793.538,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		1 Unit	45 Unit	27.194.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	32.793.538,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	45 Unit	27.194.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	32.793.538,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	45 Unit	27.194.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		Unit	32.793.538,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		2 Unit	45 Unit	27.194.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	32.793.538,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						148.780.800,00							216.929.664,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	7 Buku		7 Buku	5 Buku	148.780.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		7 Buku	216.929.664,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		UPT Satuan Pendidikan SMPN 6						927.059.900,00							1.329.683.030,50	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						927.059.900,00							1.329.683.030,50	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						927.059.900,00							1.329.683.030,50	
16,	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						132.330.001.179,00							143.319.816.449,50	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						389.027.800,00							637.944.762,50	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	88.1 %		100 %	87.8 %	389.027.800,00						87.9 %	637.944.762,50	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						396.210.450,00					UPT SP SMPN 6		559.209.516,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						396.210.450,00					UPT SP SMPN 6		559.209.516,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	60 Orang		60 Orang	60 Orang	357.290.450,00						60 Orang	477.299.278,00	
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						25.950.000,00							28.461.037,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang		65 Orang	60 Orang	25.950.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		65 Orang	28.461.037,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69 Orang		69 Orang	60 Orang	25.950.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		69 Orang	28.461.037,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	25.950.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		60 Orang	28.461.037,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64 Orang		64 Orang	60 Orang	25.950.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		64 Orang	28.461.037,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
	1.01.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						879.874.200,00					UPT SP SMPN 6		1.227.050.395,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						879.874.200,00					UPT SP SMPN 6		1.227.050.395,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	73.244.000,00						12 Dokumen	74.347.550,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	105.069.000,00						1 Paket	203.684.235,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	77.218.200,00						1 Paket	90.389.611,25	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.526.800,00						1 Paket	175.203.518,25	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	230.578.000,00						1 Paket	258.174.038,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	154.365.700,00						1 Paket	159.898.113,50	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.980.000,00							42.318.470,25	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	1.980.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		10 Paket	42.318.470,25	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.980.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	42.318.470,25	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						21.859.600,00							22.106.007,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	21.859.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	22.106.007,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	1 Paket	21.859.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		5 Paket	22.106.007,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	21.859.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		4 Paket	22.106.007,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	21.859.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	22.106.007,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
	1.01.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						18.867.000,00							73.763,50	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	18.867.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	73.763,50	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	18.867.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	73.763,50	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16874500 Paket		1 Paket	1 Paket	18.867.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	73.763,50	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.000.000,00							3.307.500,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	3.307.500,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.935.000,00							8.262.686,25	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.935.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	8.262.686,25	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	2.935.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	8.262.686,25	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.694.000,00							6.277.635,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	36 Dokumen	5.694.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		24 Dokumen	6.277.635,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	64 Dokumen		64 Dokumen	36 Dokumen	5.694.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		64 Dokumen	6.277.635,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	36 Dokumen	5.694.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		12 Dokumen	6.277.635,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	5.694.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Dokumen	6.277.635,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	36 Dokumen	5.694.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		48 Dokumen	6.277.635,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						430.979.500,00					UPT SP SMPN 6		748.676.225,75	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						430.979.500,00					UPT SP SMPN 6		748.676.225,75	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	369.915.400,00						1 Unit	687.927.593,75	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						430.979.500,00					UPT SP SMPN 6		748.676.225,75	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	369.915.400,00						1 Unit	687.927.593,75	
	1.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						22.276.800,00							168.448.218,75	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	22.276.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	168.448.218,75	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	1 Unit	22.276.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		5 Unit	168.448.218,75	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	22.276.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	168.448.218,75	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		2 Unit	1 Unit	22.276.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	168.448.218,75	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.694.734.217,00					UPT SP SMPN 6		2.978.782.814,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						2.694.734.217,00					UPT SP SMPN 6		2.978.782.814,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	1.536.890.881,00						36 Laporan	1.701.318.867,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	14.800.200,00						1 Laporan	16.240.109,00	
	1.01.01.2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						612.000,00							1.124.550,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	612.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Laporan	1.124.550,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						126.612.000,00							181.121.346,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	48 Laporan	126.612.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Laporan	181.121.346,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	126.612.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		48 Laporan	181.121.346,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						1.142.485.912,00					UPT SP SMPN 6		1.463.953.655,75	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						1.142.485.912,00					UPT SP SMPN 6		1.463.953.655,75	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	148.618.600,00						1 Unit	194.474.202,75	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	1 Unit		1 Unit	1 Unit	280.717.700,00						1 Unit	216.724.391,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		0 Unit	1 Unit	636.464.955,00						1 Unit	935.290.644,00	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.995.000,00							6.236.511,75	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	2 Unit	5.995.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	6.236.511,75	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	2 Unit	5.995.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Unit	6.236.511,75	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	5.995.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	6.236.511,75	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	2 Unit	5.995.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		21 Unit	6.236.511,75	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						33.246.400,00							16.728.894,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	1 Unit	33.246.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Unit	16.728.894,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	1 Unit	33.246.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		4 Unit	16.728.894,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	33.246.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	16.728.894,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	1 Unit	33.246.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		20 Unit	16.728.894,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	33.246.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	16.728.894,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit		13 Unit	1 Unit	33.246.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		13 Unit	16.728.894,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit		36 Unit	1 Unit	33.246.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Unit	16.728.894,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit		19 Unit	1 Unit	33.246.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Unit	16.728.894,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						120.000.000,00							153.478.143,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	153.478.143,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	120.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	153.478.143,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	120.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	153.478.143,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
17,	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						47.749.036.058,00							53.781.663.732,00	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						538.032.100,00							691.738.268,00	
			3.Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS)	99,77 %		89,33 %	92,13 %	538.032.100,00						94,67 %	691.738.268,00	
			999.Persentase warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100 %		100 %	100 %	538.032.100,00						100 %	691.738.268,00	
			999.Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	57,9 %		46,67 %	49,48 %	538.032.100,00						52,29 %	691.738.268,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 6		20.129.724.079,00	
		Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan sekolah menengah						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 6		20.129.724.079,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket		0 Paket	0 Paket	174.916.100,00						2 Paket	268.000.330,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13 Paket		13 Paket	13 Paket	3.676.020.300,00						13 Paket	4.665.797.706,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	555.479.836,00						1 Satuan Pendidikan	603.947.600,00	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						55.936.400,00							56.291.666,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	19 Satuan Pendidikan		19 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	55.936.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Satuan Pendidikan	56.291.666,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	854 Satuan Pendidikan		854 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	55.936.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		854 Satuan Pendidikan	56.291.666,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	782 Satuan Pendidikan		782 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	55.936.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		782 Satuan Pendidikan	56.291.666,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	55.936.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Satuan Pendidikan	56.291.666,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
	1.01.02.2.	Pengadaan Perlengkapan Peserta						151.585.000,00							168.128.163,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13 Paket		13 Paket	1 Pa ket	151.585.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		13 Paket	168.128.163,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	1 Pa ket	151.585.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	168.128.163,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
	1.01.02.2. 02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						101.270.100,00							98.240.688,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Pa ket		0 Paket	1 Pa ket	101.270.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	98.240.688,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Pa ket		1 Paket	1 Pa ket	101.270.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	98.240.688,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	1 Paket	101.270.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	98.240.688,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan sekolah menengah						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 6		20.129.724.079,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	7 Buku		7 Buku	7 Buku	1.558.513.600,00						7 Buku	1.761.563.769,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	293.168.375,00						Unit	188.153.947,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		0 Unit	1 Unit	592.499.904,00						1 Unit	827.928.087,00	
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						58.449.400,00							159.862.500,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	58.449.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		Unit	159.862.500,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		0 Unit	1 Unit	58.449.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	159.862.500,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	58.449.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	159.862.500,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						8.100.000,00							28.863.450,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		1 Unit	1 Unit	8.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	28.863.450,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	8.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	28.863.450,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	8.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		Unit	28.863.450,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	8.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	28.863.450,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						162.691.200,00							180.351.801,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	7 Buku		7 Buku	6 Buku	162.691.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		7 Buku	180.351.801,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		UPT Satuan Pendidikan SMPN 7						910.227.557,00							985.844.034,00	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						910.227.557,00							985.844.034,00	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						910.227.557,00							985.844.034,00	
18,	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						132.330.001.179,00							143.319.816.449,50	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						275.173.157,00							300.098.295,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	88.1 %		100 %	87.8 %	275.173.157,00						87.9 %	300.098.295,00	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						396.210.450,00					UPT SP SMPN 7		559.209.516,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						396.210.450,00					UPT SP SMPN 7		559.209.516,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	60 Orang		60 Orang	60 Orang	357.290.450,00						60 Orang	477.299.278,00	
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						26.613.000,00							28.461.037,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	26.613.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		60 Orang	28.461.037,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64 Orang		64 Orang	60 Orang	26.613.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		64 Orang	28.461.037,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang		65 Orang	60 Orang	26.613.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		65 Orang	28.461.037,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69 Orang		69 Orang	60 Orang	26.613.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		69 Orang	28.461.037,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
	1.01.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						879.874.200,00					UPT SP SMPN 7		1.227.050.395,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						879.874.200,00					UPT SP SMPN 7		1.227.050.395,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	73.244.000,00						12 Dokumen	74.347.550,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	105.069.000,00						1 Paket	203.684.235,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	77.218.200,00						1 Paket	90.389.611,25	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.526.800,00						1 Paket	175.203.518,25	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	230.578.000,00						1 Paket	258.174.038,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	154.365.700,00						1 Paket	159.898.113,50	
	1.01.01.2. 06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.818.800,00							7.656.972,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.818.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	7.656.972,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	8.818.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		10 Paket	7.656.972,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						33.367.800,00							33.408.176,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	33.367.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		4 Paket	33.408.176,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	33.367.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	33.408.176,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	33.367.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	33.408.176,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	3 Paket	33.367.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		5 Paket	33.408.176,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
	1.01.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						11.975.500,00							9.072.473,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.975.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	9.072.473,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16874500 Paket		1 Paket	1 Paket	11.975.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	9.072.473,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Pa ket		3 Paket	1 Pa ket	11.975.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	9.072.473,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
	1.01.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.000.000,00							3.307.500,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Pa ket		1 Paket	1 Pa ket	3.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	3.307.500,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
	1.01.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.484.000,00							3.841.110,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Pa ket		2 Paket	1 Pa ket	3.484.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	3.841.110,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Pa ket		1 Paket	1 Pa ket	3.484.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	3.841.110,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
	1.01.01.2. 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.858.000,00							4.253.445,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	64 Dokumen		64 Dokumen	64 Dokumen	3.858.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		64 Dokumen	4.253.445,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	64 Dokumen	3.858.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		12 Dokumen	4.253.445,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	64 Dokumen	3.858.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		24 Dokumen	4.253.445,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen		36 Dokumen	64 Dokumen	3.858.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Dokumen	4.253.445,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	64 Dokumen	3.858.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		48 Dokumen	4.253.445,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						430.979.500,00					UPT SP SMPN 7		748.676.225,75	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						430.979.500,00					UPT SP SMPN 7		748.676.225,75	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	369.915.400,00						1 Unit	687.927.593,75	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						430.979.500,00					UPT SP SMPN 7		748.676.225,75	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	369.915.400,00						1 Unit	687.927.593,75	
	1.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						35.146.800,00							18.418.806,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	5 Unit	35.146.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	18.418.806,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	5 Unit	35.146.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	18.418.806,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		2 Unit	5 Unit	35.146.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	18.418.806,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	35.146.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		5 Unit	18.418.806,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.694.734.217,00					UPT SP SMPN 7		2.978.782.814,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						2.694.734.217,00					UPT SP SMPN 7		2.978.782.814,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	1.536.890.881,00						36 Laporan	1.701.318.867,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	14.800.200,00						1 Laporan	16.240.109,00	
	1.01.01.2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						632.400,00							697.221,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	632.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Laporan	697.221,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						74.802.000,00							80.355.051,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	36 Laporan	74.802.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		48 Laporan	80.355.051,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	74.802.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Laporan	80.355.051,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						1.142.485.912,00					UPT SP SMPN 7		1.463.953.655,75	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						1.142.485.912,00					UPT SP SMPN 7		1.463.953.655,75	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	148.618.600,00						2 Unit	194.474.202,75	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	1 Unit		1 Unit	1 Unit	280.717.700,00						1 Unit	216.724.391,00	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						8.741.500,00							9.637.504,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	2 Unit	8.741.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Unit	9.637.504,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	8.741.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	9.637.504,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	2 Unit	8.741.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		21 Unit	9.637.504,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	2 Unit	8.741.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	9.637.504,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						18.062.700,00							18.597.080,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	18.062.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		20 Unit	18.597.080,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit		19 Unit	20 Unit	18.062.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Unit	18.597.080,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	20 Unit	18.062.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		4 Unit	18.597.080,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	20 Unit	18.062.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Unit	18.597.080,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit		36 Unit	20 Unit	18.062.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Unit	18.597.080,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	20 Unit	18.062.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	18.597.080,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit		13 Unit	20 Unit	18.062.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		13 Unit	18.597.080,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	20 Unit	18.062.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	18.597.080,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						1.142.485.912,00					UPT SP SMPN 7		1.463.953.655,75	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		1 Unit	1 Unit	46.670.657,00						1 Unit	82.391.920,00	
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						46.670.657,00							82.391.920,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	46.670.657,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	82.391.920,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
19,	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						47.749.036.058,00							53.781.663.732,00	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						635.054.400,00							630.620.739,00	
			3.Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS)	99,77 %		89,33 %	92,13 %	635.054.400,00						94,67 %	630.620.739,00	
			999.Persentase warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100 %		100 %	100 %	635.054.400,00						100 %	630.620.739,00	
			999.Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	57,9 %		46,67 %	49,48 %	635.054.400,00						52,29 %	630.620.739,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 7		20.129.724.079,00	
		Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan sekolah menengah						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 7		20.129.724.079,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13 Paket		13 Paket	13 Paket	3.676.020.300,00						13 Paket	4.665.797.706,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	555.479.836,00						1 Satuan Pendidikan	603.947.600,00	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						59.302.400,00							58.113.215,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	782 Satuan Pendidikan		782 Satuan Pendidikan	782 Satuan Pendidikan	59.302.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		782 Satuan Pendidikan	58.113.215,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	854 Satuan Pendidikan		854 Satuan Pendidikan	782 Satuan Pendidikan	59.302.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		854 Satuan Pendidikan	58.113.215,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	19 Satuan Pendidikan		19 Satuan Pendidikan	782 Satuan Pendidikan	59.302.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Satuan Pendidikan	58.113.215,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan	782 Satuan Pendidikan	59.302.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Satuan Pendidikan	58.113.215,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
	1.01.02.2.	Pengadaan Perlengkapan Peserta						156.246.400,00							172.261.656,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13 Paket		13 Paket	13 Paket	156.246.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		13 Paket	172.261.656,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	13 Paket	156.246.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	172.261.656,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan sekolah menengah						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 7		20.129.724.079,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	7 Buku		7 Buku	7 Buku	1.558.513.600,00						7 Buku	1.761.563.769,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket		0 Paket	1 Paket	207.650.700,00						0 Paket	252.463.993,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket		0 Paket	2 Paket	184.070.900,00						2 Paket	275.533.434,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	293.168.375,00						Unit	188.153.947,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit		0 Unit	1 Unit	107.851.300,00						0 Unit	194.241.868,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		0 Unit	1 Unit	592.499.904,00						1 Unit	827.928.087,00	
	1.01.02.2. 02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						27.851.300,00							55.125.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit		1 Unit	1 Unit	27.851.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		0 Unit	55.125.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit		0 Unit	1 Unit	27.851.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		0 Unit	55.125.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	27.851.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	55.125.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						52.000.000,00							55.125.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	52.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		Unit	55.125.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		0 Unit	1 Unit	52.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	55.125.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	52.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	55.125.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
	1.01.02.2.	Pengadaan Mebel Sekolah						47.424.800,00							0,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket		0 Paket	1 Paket	47.424.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		0 Paket	0,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	50 Paket		50 Paket	1 Paket	47.424.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	0,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	47.424.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	0,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						86.944.700,00							141.467.288,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	86.944.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	141.467.288,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket		1 Paket	1 Paket	86.944.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	141.467.288,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket		0 Paket	1 Paket	86.944.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	141.467.288,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						36.120.000,00							17.149.388,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	36.120.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		Unit	17.149.388,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	36.120.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	17.149.388,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	36.120.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	17.149.388,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	36.120.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	17.149.388,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						169.164.800,00							186.504.192,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	7 Buku		7 Buku	7 Buku	169.164.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		7 Buku	186.504.192,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		UPT Satuan Pendidikan SMPN 8						886.631.600,00							1.083.334.660,00	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						886.631.600,00							1.083.334.660,00	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						886.631.600,00							1.083.334.660,00	
20,	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						132.330.001.179,00							143.319.816.449,50	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						258.728.500,00							227.517.273,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	88.1 %		100 %	87.8 %	258.728.500,00						87.9 %	227.517.273,00	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						396.210.450,00					UPT SP SMPN 8		559.209.516,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						396.210.450,00					UPT SP SMPN 8		559.209.516,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	60 Orang		60 Orang	60 Orang	357.290.450,00						60 Orang	477.299.278,00	
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						25.950.000,00							28.461.038,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69 Orang		69 Orang	60 Orang	25.950.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		69 Orang	28.461.038,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang		65 Orang	60 Orang	25.950.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		65 Orang	28.461.038,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64 Orang		64 Orang	60 Orang	25.950.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		64 Orang	28.461.038,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	25.950.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		60 Orang	28.461.038,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						879.874.200,00					UPT SP SMPN 8		1.227.050.395,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						879.874.200,00					UPT SP SMPN 8		1.227.050.395,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	73.244.000,00						12 Dokumen	74.347.550,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	105.069.000,00						1 Paket	203.684.235,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Pa ket		1 Paket	1 Pa ket	77.218.200,00						1 Paket	90.389.611,25	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Pa ket		1 Paket	1 Pa ket	120.526.800,00						1 Paket	175.203.518,25	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Pa ket		1 Paket	1 Pa ket	230.578.000,00						1 Paket	258.174.038,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Pa ket		1 Paket	1 Pa ket	154.365.700,00						1 Paket	159.898.113,50	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.894.800,00							7.601.517,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Pa ket		1 Paket	1 Pa ket	6.894.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	7.601.517,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Pa ket	6.894.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		10 Paket	7.601.517,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						17.926.000,00							19.763.415,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Pa ket	17.926.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		4 Paket	19.763.415,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	17.926.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	19.763.415,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	17.926.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	19.763.415,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	3 Paket	17.926.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		5 Paket	19.763.415,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
	1.01.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						12.191.000,00							7.536.690,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16874500 Paket		1 Paket	1 Paket	12.191.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	7.536.690,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	12.191.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	7.536.690,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	12.191.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	7.536.690,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
	1.01.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.800.000,00							1.984.500,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.800.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	1.984.500,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.455.000,00							8.219.138,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.455.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	8.219.138,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	7.455.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	8.219.138,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						6.552.000,00							7.223.580,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	64 Dokumen		64 Dokumen	36 Dokumen	6.552.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		64 Dokumen	7.223.580,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	6.552.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Dokumen	7.223.580,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	36 Dokumen	6.552.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		24 Dokumen	7.223.580,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	36 Dokumen	6.552.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		48 Dokumen	7.223.580,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	36 Dokumen	6.552.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		12 Dokumen	7.223.580,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						430.979.500,00					UPT SP SMPN 8		748.676.225,75	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						430.979.500,00					UPT SP SMPN 8		748.676.225,75	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	369.915.400,00						1 Unit	687.927.593,75	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						430.979.500,00					UPT SP SMPN 8		748.676.225,75	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	369.915.400,00						1 Unit	687.927.593,75	
	1.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						52.957.300,00							22.979.849,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		2 Unit	5 Unit	52.957.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	22.979.849,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	52.957.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		5 Unit	22.979.849,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	5 Unit	52.957.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	22.979.849,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	5 Unit	52.957.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	22.979.849,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.694.734.217,00					UPT SP SMPN 8		2.978.782.814,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						2.694.734.217,00					UPT SP SMPN 8		2.978.782.814,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	1.536.890.881,00						36 Laporan	1.701.318.867,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	14.800.200,00						1 Laporan	16.240.109,00	
	1.01.01.2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.111.800,00							1.225.760,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.111.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Laporan	1.225.760,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						95.592.000,00							100.431.576,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	36 Laporan	95.592.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		48 Laporan	100.431.576,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	95.592.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Laporan	100.431.576,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						1.142.485.912,00					UPT SP SMPN 8		1.463.953.655,75	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						1.142.485.912,00					UPT SP SMPN 8		1.463.953.655,75	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	148.618.600,00						1 Unit	194.474.202,75	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	1 Unit		1 Unit	1 Unit	280.717.700,00						1 Unit	216.724.391,00	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.524.000,00							6.090.210,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	2 Unit	5.524.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Unit	6.090.210,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	5.524.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	6.090.210,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	2 Unit	5.524.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	6.090.210,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	2 Unit	5.524.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		21 Unit	6.090.210,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						24.774.600,00							16.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	2 Unit	24.774.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Unit	16.000.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit		19 Unit	2 Unit	24.774.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Unit	16.000.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	2 Unit	24.774.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	16.000.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	2 Unit	24.774.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		20 Unit	16.000.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	24.774.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	16.000.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit		36 Unit	2 Unit	24.774.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Unit	16.000.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit		13 Unit	2 Unit	24.774.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		13 Unit	16.000.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	2 Unit	24.774.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		4 Unit	16.000.000,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
21,	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						47.749.036.058,00							53.781.663.732,00	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						627.903.100,00							855.817.387,00	
			3.Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS)	99,77 %		89,33 %	92,13 %	627.903.100,00						94,67 %	855.817.387,00	
			999.Persentase warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100 %		100 %	100 %	627.903.100,00						100 %	855.817.387,00	
			999.Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	57,9 %		46,67 %	49,48 %	627.903.100,00						52,29 %	855.817.387,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 8		20.129.724.079,00	
		Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan sekolah menengah						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 8		20.129.724.079,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13 Paket		13 Paket	13 Paket	3.676.020.300,00						13 Paket	4.665.797.706,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	555.479.836,00						1 Satuan Pendidikan	603.947.600,00	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						61.384.400,00							61.641.216,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	782 Satuan Pendidikan		782 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	61.384.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		782 Satuan Pendidikan	61.641.216,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	19 Satuan Pendidikan		19 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	61.384.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Satuan Pendidikan	61.641.216,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	61.384.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Satuan Pendidikan	61.641.216,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	854 Satuan Pendidikan		854 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	61.384.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		854 Satuan Pendidikan	61.641.216,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
	1.01.02.2.	Pengadaan Perlengkapan Peserta						151.859.200,00							167.424.768,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Pa ket		3 Paket	13 Paket	151.859.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	167.424.768,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13 Paket		13 Paket	13 Paket	151.859.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		13 Paket	167.424.768,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan sekolah menengah						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 8		20.129.724.079,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	7 Buku		7 Buku	7 Buku	1.558.513.600,00						7 Buku	1.761.563.769,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket		0 Paket	1 Paket	207.650.700,00						0 Paket	252.463.993,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	293.168.375,00						Unit	188.153.947,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		0 Unit	1 Unit	592.499.904,00						1 Unit	827.928.087,00	
	1.01.02.2. 02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						130.500.000,00							357.761.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		0 Unit	2 Unit	130.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	357.761.250,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	2 Unit	130.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	357.761.250,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	2 Unit	130.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		Unit	357.761.250,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah						40.837.500,00							60.031.123,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.837.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	60.031.123,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	50 Paket		50 Paket	1 Paket	40.837.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	60.031.123,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket		0 Paket	1 Paket	40.837.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		0 Paket	60.031.123,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						80.250.000,00							29.172.150,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	80.250.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	29.172.150,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		1 Unit	1 Unit	80.250.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	29.172.150,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	80.250.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	29.172.150,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	80.250.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		Unit	29.172.150,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						163.072.000,00							179.786.880,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	7 Buku		7 Buku	5 Buku	163.072.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		7 Buku	179.786.880,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		UPT Satuan Pendidikan SMPN 9						911.994.500,00							949.540.462,00	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						911.994.500,00							949.540.462,00	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						911.994.500,00							949.540.462,00	
22,	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						132.330.001.179,00							143.319.816.449,50	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						252.322.000,00							260.123.694,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	88.1 %		100 %	87.8 %	252.322.000,00						87.9 %	260.123.694,00	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						396.210.450,00					UPT SP SMPN 9		559.209.516,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						396.210.450,00					UPT SP SMPN 9		559.209.516,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	60 Orang		60 Orang	60 Orang	357.290.450,00						60 Orang	477.299.278,00	
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						26.613.000,00							27.105.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69 Orang		69 Orang	65 Orang	26.613.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		69 Orang	27.105.750,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang		65 Orang	65 Orang	26.613.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		65 Orang	27.105.750,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64 Orang		64 Orang	65 Orang	26.613.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		64 Orang	27.105.750,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		60 Orang	65 Orang	26.613.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		60 Orang	27.105.750,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						879.874.200,00					UPT SP SMPN 9		1.227.050.395,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						879.874.200,00					UPT SP SMPN 9		1.227.050.395,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	73.244.000,00						12 Dokumen	74.347.550,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	105.069.000,00						1 Paket	203.684.235,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Pa ket	77.218.200,00						1 Paket	90.389.611,25	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Pa ket	120.526.800,00						1 Paket	175.203.518,25	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Pa ket	230.578.000,00						1 Paket	258.174.038,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Pa ket	154.365.700,00						1 Paket	159.898.113,50	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						9.866.700,00							10.360.035,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	9.866.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		10 Paket	10.360.035,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.866.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	10.360.035,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12.873.700,00							13.131.174,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	3 Paket	12.873.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		5 Paket	13.131.174,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	12.873.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	13.131.174,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	12.873.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		4 Paket	13.131.174,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	12.873.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	13.131.174,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						16.635.800,00							19.776.750,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16874500 Paket		1 Paket	6 Paket	16.635.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	19.776.750,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	6 Paket	16.635.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	19.776.750,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	6 Paket	16.635.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	19.776.750,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
	1.01.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.909.000,00							11.459.700,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	10.909.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	11.459.700,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.676.800,00							4.910.640,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.676.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	4.910.640,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	4.676.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	4.910.640,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.962.000,00							5.210.100,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	2 Dokumen	4.962.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		48 Dokumen	5.210.100,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	2 Dokumen	4.962.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		12 Dokumen	5.210.100,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	2 Dokumen	4.962.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		24 Dokumen	5.210.100,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen		36 Dokumen	2 Dokumen	4.962.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Dokumen	5.210.100,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	64 Dokumen		64 Dokumen	2 Dokumen	4.962.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		64 Dokumen	5.210.100,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						430.979.500,00					UPT SP SMPN 9		748.676.225,75	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						430.979.500,00					UPT SP SMPN 9		748.676.225,75	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	369.915.400,00						1 Unit	687.927.593,75	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						430.979.500,00					UPT SP SMPN 9		748.676.225,75	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	369.915.400,00						1 Unit	687.927.593,75	
	1.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						12.451.400,00							6.059.235,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	12.451.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	6.059.235,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	1 Unit	12.451.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		5 Unit	6.059.235,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	12.451.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	6.059.235,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		2 Unit	1 Unit	12.451.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	6.059.235,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.694.734.217,00					UPT Satuan Pendidikan SMPN 9		2.978.782.814,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						2.694.734.217,00					UPT Satuan Pendidikan SMPN 9		2.978.782.814,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	1.536.890.881,00						36 Laporan	1.701.318.867,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	14.800.200,00						1 Laporan	16.240.109,00	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.020.000,00							642.600,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.020.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Laporan	642.600,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						69.566.400,00							73.044.720,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	69.566.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Laporan	73.044.720,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	36 Laporan	69.566.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		48 Laporan	73.044.720,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.142.485.912,00					UPT Satuan Pendidikan SMPN 9		1.463.953.655,75	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						1.142.485.912,00					UPT Satuan Pendidikan SMPN 9		1.463.953.655,75	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	148.618.600,00						1 Unit	194.474.202,75	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	1 Unit		1 Unit	1 Unit	280.717.700,00						1 Unit	216.724.391,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		0 Unit	1 Unit	636.464.955,00						1 Unit	935.290.644,00	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						6.973.200,00							8.830.290,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	2 Unit	6.973.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	8.830.290,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	2 Unit	6.973.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Unit	8.830.290,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	6.973.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	8.830.290,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	2 Unit	6.973.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		21 Unit	8.830.290,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.678.000,00							16.491.900,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit		19 Unit	21 Unit	15.678.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Unit	16.491.900,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit		13 Unit	21 Unit	15.678.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		13 Unit	16.491.900,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit		36 Unit	21 Unit	15.678.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Unit	16.491.900,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	21 Unit	15.678.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Unit	16.491.900,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	21 Unit	15.678.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		4 Unit	16.491.900,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	21 Unit	15.678.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	16.491.900,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	21 Unit	15.678.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		20 Unit	16.491.900,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	21 Unit	15.678.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	16.491.900,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						60.096.000,00							63.100.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	60.096.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	63.100.800,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	60.096.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	63.100.800,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	60.096.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	63.100.800,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
23,	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						47.749.036.058,00							53.781.663.732,00	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						659.672.500,00							689.416.768,00	
			3.Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS)	99,77 %		89,33 %	92,13 %	659.672.500,00						94,67 %	689.416.768,00	
			999.Persentase warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100 %		100 %	100 %	659.672.500,00						100 %	689.416.768,00	
			999.Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	57,9 %		46,67 %	49,48 %	659.672.500,00						52,29 %	689.416.768,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 9		20.129.724.079,00	
		Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan sekolah menengah						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 9		20.129.724.079,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13 Paket		13 Paket	13 Paket	3.676.020.300,00						13 Paket	4.665.797.706,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	555.479.836,00						1 Satuan Pendidikan	603.947.600,00	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						63.043.200,00							66.254.160,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	782 Satuan Pendidikan		782 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	63.043.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		782 Satuan Pendidikan	66.254.160,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	854 Satuan Pendidikan		854 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	63.043.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		854 Satuan Pendidikan	66.254.160,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	63.043.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Satuan Pendidikan	66.254.160,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	19 Satuan Pendidikan		19 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	63.043.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Satuan Pendidikan	66.254.160,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
	1.01.02.2.	Pengadaan Perlengkapan Peserta						170.841.600,00							177.944.130,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	13 Paket	170.841.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Paket	177.944.130,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13 Paket		13 Paket	13 Paket	170.841.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		13 Paket	177.944.130,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan sekolah menengah						18.059.798.849,00					UPT SP SMPN 9		20.129.724.079,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	7 Buku		7 Buku	7 Buku	1.558.513.600,00						7 Buku	1.761.563.769,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	207.650.700,00						1 Paket	252.463.993,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket		0 Paket	2 Paket	184.070.900,00						2 Paket	275.533.434,00	
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	117.681.800,00						1 Ruang	123.565.890,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	293.168.375,00						1 Unit	188.153.947,00	
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						117.681.800,00							123.565.890,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	117.681.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Ruang	123.565.890,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
	1.01.02.2.	Pengadaan Mebel Sekolah						40.608.000,00							42.638.400,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	50 Paket		50 Paket	1 Paket	40.608.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	42.638.400,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Pa ket		0 Paket	1 Pa ket	40.608.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		0 Paket	42.638.400,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Pa ket		1 Paket	1 Pa ket	40.608.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	42.638.400,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
	1.01.02.2.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						56.541.900,00							59.758.858,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Pa ket		0 Paket	1 Pa ket	56.541.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	59.758.858,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Pa ket		1 Paket	1 Pa ket	56.541.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Paket	59.758.858,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Pa ket	56.541.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	59.758.858,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						27.500.000,00							28.625.730,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	62 Unit	27.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	28.625.730,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		2 Unit	62 Unit	27.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	28.625.730,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	62 Unit	27.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		Unit	28.625.730,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		1 Unit	62 Unit	27.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Unit	28.625.730,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						183.456.000,00							190.629.600,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	7 Buku		7 Buku	5 Buku	183.456.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		7 Buku	190.629.600,00	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		Dinas Kesehatan						127.878.449.225,00							132.712.235.150,00	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						127.878.449.225,00							132.712.235.150,00	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						127.878.449.225,00							132.712.235.150,00	
24,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						71.144.609.025,00							87.379.434.723,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						71.142.359.025,00							77.604.273.723,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	71.142.359.025,00						100 %	77.604.273.723,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						11.540.000,00					Aparatur Dinas Kesehatan Kota Blitar		79.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						11.540.000,00					Aparatur Dinas Kesehatan Kota Blitar		79.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.750.000,00						1 Berita Acara	21.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.200.000,00						1 Berita Acara	1.500.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data		6 Data	6 Data	1.336.200,00						6 Data	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	2.963.000,00						2 Dokumen	18.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	890.800,00						9 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	3.400.000,00						17 Laporan	18.500.000,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.963.000,00							18.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	2.963.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2 Dokumen	18.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.400.000,00							18.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	3.400.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		17 Laporan	18.500.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						1.336.200,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data		6 Data	6 Data	1.336.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		6 Data	15.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat						1.750.000,00							21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.750.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Berita Acara	21.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						890.800,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	890.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		9 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis						1.200.000,00							1.500.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.200.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Berita Acara	1.500.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						67.868.855.325,00					Aparatur Dinas Kesehatan Kota Blitar		72.688.148.723,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						67.868.855.325,00					Aparatur Dinas Kesehatan Kota Blitar		72.688.148.723,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	450.000,00						4 Laporan	3.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	902 Orang/bulan		902 Orang/bulan	902 Orang/bulan	67.868.405.325,00						902 Orang/bulan	72.684.648.723,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						67.868.405.325,00							72.684.648.723,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	902 Orang/bulan		902 Orang/bulan	902 Orang/bulan	67.868.405.325,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		902 Orang/bulan	72.684.648.723,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						450.000,00							3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	450.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		4 Laporan	3.500.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						450.000,00					Aparatur Dinas Kesehatan Kota Blitar		2.750.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah						450.000,00					Aparatur Dinas Kesehatan Kota Blitar		2.750.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	450.000,00						9 Laporan	2.750.000,00	
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						450.000,00							2.750.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	450.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		9 Laporan	2.750.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						450.000,00					Aparatur Dinas Kesehatan Kota Blitar		2.750.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah						450.000,00					Aparatur Dinas Kesehatan Kota Blitar		2.750.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	450.000,00						13 Dokumen	2.750.000,00	
	1.02.01.2.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi						450.000,00							2.750.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	450.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		13 Dokumen	2.750.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.450.000,00					Masyarakat Kota Blitar		165.750.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						50.450.000,00					Masyarakat Kota Blitar		165.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	450.000,00						2 Dokumen	7.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	400 Orang		300 Orang	310 Orang	50.000.000,00						310 Orang	158.000.000,00	
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						450.000,00							7.750.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	450.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2 Dokumen	7.750.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						50.000.000,00							158.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang		300 Orang	310 Orang	50.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		310 Orang	158.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						63.317.100,00					Aparatur Dinas Kesehatan Kota Blitar		552.625.000,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						63.317.100,00					Aparatur Dinas Kesehatan Kota Blitar		552.625.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	450.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	450.000,00						1 Dokumen	115.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan		200 Laporan	250 Laporan	40.000.000,00						250 Laporan	240.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	12 Paket		12 Paket	12 Paket	900.000,00						12 Paket	31.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	3.657.600,00						5 Paket	52.525.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	12.384.000,00						1 Paket	17.100.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	4.863.000,00						3 Paket	60.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	612.500,00						5 Paket	34.000.000,00	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						12.384.000,00							17.100.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	12.384.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Paket	17.100.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.863.000,00							60.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Pa ket		3 Paket	1 Pa ket	4.863.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3 Paket	60.500.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						612.500,00							34.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	1 Paket	612.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		5 Paket	34.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						900.000,00							31.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	900.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		12 Paket	31.500.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.657.600,00							52.525.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	2 Paket	3.657.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		5 Paket	52.525.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						40.000.000,00							240.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan		200 Laporan	30 Laporan	40.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		250 Laporan	240.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						450.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	450.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Dokumen	115.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						450.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	450.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Dokumen	2.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						61.200.000,00					Aparatur Dinas Kesehatan Kota Blitar		285.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						61.200.000,00					Aparatur Dinas Kesehatan Kota Blitar		285.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	85 Unit		49 Unit	55 Unit	61.200.000,00						55 Unit	285.000.000,00	
	1.02.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						61.200.000,00							285.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	85 Unit		49 Unit	5 Unit	61.200.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		55 Unit	285.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.619.738.900,00					Aparatur Dinas Kesehatan Kota Blitar		3.230.000.000,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						2.619.738.900,00					Aparatur Dinas Kesehatan Kota Blitar		3.230.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	428.574.000,00						36 Laporan	430.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	2.191.164.900,00						13 Laporan	2.800.000.000,00	
	1.02.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						428.574.000,00							430.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	428.574.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		36 Laporan	430.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.191.164.900,00							2.800.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	2.191.164.900,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		13 Laporan	2.800.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						468.607.700,00					Aparatur Dinas Kesehatan Kota Blitar		601.000.000,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						468.607.700,00					Aparatur Dinas Kesehatan Kota Blitar		601.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	0 Unit		1 Unit	2 Unit	205.025.500,00						6 Unit	174.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	18.615.200,00						1 Unit	116.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	200 Unit		151 Unit	160 Unit	56.167.000,00						160 Unit	111.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						18.615.200,00							116.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	18.615.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit	116.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						205.025.500,00							174.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit		1 Unit	9 Unit	205.025.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		6 Unit	174.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						56.167.000,00							111.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit		151 Unit	105 Unit	56.167.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		160 Unit	111.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						468.607.700,00					Aparatur Dinas Kesehatan Kota Blitar		601.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	-		-	-	188.800.000,00						-	200.000.000,00	
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						188.800.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	188.800.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
25,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						56.609.940.200,00							53.690.447.427,00	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						53.297.947.200,00							50.445.178.427,00	
			10.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yang cukup	65 %		30 %	40 %	53.297.947.200,00						50 %	50.445.178.427,00	
			11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	100 %		78.57 %	90.50 %	53.297.947.200,00						97.60 %	50.445.178.427,00	
			4.Presentase lanjut usia yang mandiri	94 %		93.82 %	93.84 %	53.297.947.200,00						93.86 %	50.445.178.427,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			5.Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	73.9 %		71.9 %	77.70 %	53.297.947.200,00						72.9 %	50.445.178.427,00	
			6.Persentase kelurahan yang mencapai target kekebalan kelompok	100 %		100 %	100 %	53.297.947.200,00						100 %	50.445.178.427,00	
			7.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0.62 %		0.7 %	0.68 %	53.297.947.200,00						0.66 %	50.445.178.427,00	
			8.Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	100 %		100 %	100 %	53.297.947.200,00						100 %	50.445.178.427,00	
			999.Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	3.91 Orang		4.35 Orang	4.35 Orang	53.297.947.200,00						4.35 Orang	50.445.178.427,00	
			999.Jumlah Kematian Ibu AMPSR	2 Orang		3 Orang	3 Orang	53.297.947.200,00						3 Orang	50.445.178.427,00	
			999.Persentase Insiden Stunting Balita (kasus baru)	1 %		2.3 %	1.19 %	53.297.947.200,00						1.3 %	50.445.178.427,00	
			9.Persentase pemenuhan syarat kualitas kesehatan lingkungan	90 %		70 %	75 %	53.297.947.200,00						80 %	50.445.178.427,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						6.443.588.355,00					Masyarakat Kota Blitar		13.034.498.427,00	
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana fasilitas pelayanan						6.443.588.355,00					Masyarakat Kota Blitar		13.034.498.427,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Tersedia Sesuai Standar	8 Unit		8 Unit	8 Unit	630.064.000,00						8 Unit	626.700.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit		19 Unit	25 Unit	435.197.325,00						25 Unit	564.683.201,00	
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas	12 Paket		12 Paket	12 Paket	11.506.110,00						12 Paket	5.982.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar	1 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00						1 Unit	472.094.631,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	3 Paket		3 Paket	3 Paket	3.866.820.920,00						3 Paket	10.115.038.595,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan	3 Unit		1 Unit	3 Unit	1.200.000.000,00						3 Unit	1.250.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						300.000.000,00							472.094.631,00	
		Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit	472.094.631,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						1.200.000.000,00							1.250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit		1 Unit	3 Unit	1.200.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3 Unit	1.250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						367.888.645,00							498.683.201,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit		19 Unit	38 Unit	367.888.645,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		25 Unit	498.683.201,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	40 Uni t		48 Unit	38 Unit	367.888.645,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		40 Unit	498.683.201,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	40 Uni t		38 Unit	38 Unit	367.888.645,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		40 Unit	498.683.201,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit		25 Unit	38 Unit	367.888.645,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		30 Unit	498.683.201,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	38 Unit	367.888.645,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit	498.683.201,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						545.500.000,00							578.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	300 Unit		300 Unit	754 Unit	545.500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		300 Unit	578.700.000,00	Dinas Kesehatan
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	8 Unit		8 Unit	754 Unit	545.500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		8 Unit	578.700.000,00	Dinas Kesehatan
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit		828 Unit	754 Unit	545.500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		25 Unit	578.700.000,00	Dinas Kesehatan
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit		30 Unit	754 Unit	545.500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		30 Unit	578.700.000,00	Dinas Kesehatan
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	35 Unit		30 Unit	754 Unit	545.500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		32 Unit	578.700.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						3.018.693.600,00							9.265.061.595,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket		3 Paket	5 Paket	3.018.693.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3 Paket	9.265.061.595,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket		4 Paket	5 Paket	3.018.693.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		4 Paket	9.265.061.595,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Pa ket		5 Paket	5 Pa ket	3.018.693.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		5 Paket	9.265.061.595,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket		9 Paket	5 Paket	3.018.693.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		9 Paket	9.265.061.595,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						11.506.110,00							5.982.000,00	
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	11.506.110,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kot a Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		12 Paket	5.982.000,00	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas layanan fasilitas pelayanan kesehatan						50.030.719.065,00					Masyarakat Kota Blitar		40.448.144.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20473 Orang		20073 Orang	20173 Orang	13.020.000,00						20273 Orang	99.000.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8884 Orang		8717 Orang	8761 Orang	13.020.000,00						8805 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2222 Orang		2178 Orang	2189 Orang	322.688.000,00						2200 Orang	215.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	30.095.863.328,00						17 Dokumen	34.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	11.520.000,00						6 Dokumen	45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1.546.481.600,00						5 Dokumen	185.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	590.610.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.949.000,00						3 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	226.931.000,00						3 Dokumen	263.969.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	11.520.000,00						12 Dokumen	64.822.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	82.567.800,00						12 Dokumen	101.824.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	111.520.000,00						10 Dokumen	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8 Dokumen		6 Dokumen	7 Dokumen	174.678.627,00						7 Dokumen	424.088.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	42 Unit		34 Unit	38 Unit	31.875.000,00						40 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2385 Orang		2337 Orang	2350 Orang	8.104.200,00						2361 Orang	140.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2385 Orang		2337 Orang	2350 Orang	12.286.900,00						2361 Orang	280.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3484 Orang		3444 Orang	3454 Orang	13.020.000,00						3464 Orang	116.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1532 Orang		2428 Orang	2093 Orang	4.661.850.050,00						1854 Orang	660.000.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	115 Orang		75 Orang	85 Orang	16.607.940,00						95 Orang	18.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	310 Orang		300 Orang	303 Orang	24.020.000,00						305 Orang	99.000.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4566 Orang		4373 Orang	4424 Orang	13.020.000,00						4473 Orang	34.000.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10438 Orang		9995 Orang	10112 Orang	13.020.000,00						10224 Orang	45.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23218 Orang		22828 Orang	22928 Orang	13.020.000,00						23028 Orang	59.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	102960 Orang		101280 Orang	101770 Orang	13.020.000,00						102190 Orang	213.000.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu	1 Unit		1 Unit	1 Unit	102.657.220,00						1 Unit	110.000.000,00	
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	3 Tatanan		2 Tatanan	2 Tatanan	11.520.000,00						3 Tatanan	35.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan fasyankes						50.030.719.065,00					Masyarakat Kota Blitar		40.448.144.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20473 Orang		20073 Orang	20173 Orang	13.020.000,00						20273 Orang	99.000.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8884 Orang		8717 Orang	8761 Orang	13.020.000,00						8805 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2222 Orang		2178 Orang	2189 Orang	322.688.000,00						2200 Orang	215.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	30.095.863.328,00						17 Dokumen	34.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	11.520.000,00						6 Dokumen	45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1.546.481.600,00						5 Dokumen	185.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	590.610.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.949.000,00						3 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	226.931.000,00						3 Dokumen	263.969.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	11.520.000,00						12 Dokumen	64.822.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	82.567.800,00						12 Dokumen	101.824.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	111.520.000,00						10 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8 Dokumen		6 Dokumen	7 Dokumen	174.678.627,00						7 Dokumen	424.088.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	42 Unit		34 Unit	38 Unit	31.875.000,00						40 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2385 Orang		2337 Orang	2350 Orang	8.104.200,00						2361 Orang	140.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2385 Orang		2337 Orang	2350 Orang	12.286.900,00						2361 Orang	280.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3484 Orang		3444 Orang	3454 Orang	13.020.000,00						3464 Orang	116.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1532 Orang		2428 Orang	2093 Orang	4.661.850.050,00						1854 Orang	660.000.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	115 Orang		75 Orang	85 Orang	16.607.940,00						95 Orang	18.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	310 Orang		300 Orang	303 Orang	24.020.000,00						305 Orang	99.000.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4566 Orang		4373 Orang	4424 Orang	13.020.000,00						4473 Orang	34.000.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10438 Orang		9995 Orang	10112 Orang	13.020.000,00						10224 Orang	45.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23218 Orang		22828 Orang	22928 Orang	13.020.000,00						23028 Orang	59.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	102960 Orang		101280 Orang	101770 Orang	13.020.000,00						102190 Orang	213.000.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu	1 Unit		1 Unit	1 Unit	102.657.220,00						1 Unit	110.000.000,00	
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	3 Tatanan		2 Tatanan	2 Tatanan	11.520.000,00						3 Tatanan	35.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						12.286.900,00							280.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2385 Orang		2337 Orang	2586 Orang	12.286.900,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2361 Orang	280.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						8.104.200,00							140.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2385 Orang		2337 Orang	2586 Orang	8.104.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2361 Orang	140.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						322.688.000,00							215.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2222 Orang		2178 Orang	2410 Orang	322.688.000,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2200 Orang	215.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						13.020.000,00							50.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8884 Orang		8717 Orang	9459 Orang	13.020.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		8805 Orang	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						13.020.000,00							99.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20473 Orang		20073 Orang	19796 Orang	13.020.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		20273 Orang	99.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						13.020.000,00							213.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	102960 Orang		101280 Orang	101766 Orang	13.020.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		102190 Orang	213.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						13.020.000,00							59.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23218 Orang		22828 Orang	24634 Orang	13.020.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		23028 Orang	59.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						13.020.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10438 Orang		9995 Orang	10112 Orang	13.020.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		10224 Orang	45.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						13.020.000,00							34.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4566 Orang		4373 Orang	4424 Orang	13.020.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		4473 Orang	34.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						24.020.000,00							99.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	310 Orang		300 Orang	303 Orang	24.020.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		305 Orang	99.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						4.661.850.050,00							660.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1532 Orang		2428 Orang	2093 Orang	4.661.850.050,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1854 Orang	660.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						13.020.000,00							116.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3484 Orang		3444 Orang	3454 Orang	13.020.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3464 Orang	116.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						1.546.481.600,00							185.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1.546.481.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		5 Dokumen	185.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						590.610.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	590.610.000,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						226.931.000,00							263.969.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	226.931.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3 Dokumen	263.969.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						17.949.000,00							15.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.949.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						11.520.000,00							64.822.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	11.520.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		12 Dokumen	64.822.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						30.095.863.328,00							34.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	30.095.863.328,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		17 Dokumen	34.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota						111.520.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	111.520.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		10 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						174.678.627,00							424.088.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8 Dokumen		6 Dokumen	7 Dokumen	174.678.627,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		7 Dokumen	424.088.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						31.875.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	42 Unit		34 Unit	38 Unit	31.875.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		40 Unit	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						102.657.220,00							110.000.000,00	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit		1 Unit	1 Unit	102.657.220,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit	110.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						16.607.940,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	115 Orang		75 Orang	85 Orang	16.607.940,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		95 Orang	18.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok						11.520.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	3 Tatanan		2 Tatanan	2 Tatanan	11.520.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3 Tatanan	35.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						82.567.800,00							101.824.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	82.567.800,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		12 Dokumen	101.824.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.	Pengelolaan Layanan Imunisasi						11.520.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	11.520.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		6 Dokumen	45.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						108.303.400,00					Masyarakat Kota Blitar		185.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Kesehatan						108.303.400,00					Masyarakat Kota Blitar		185.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	108.303.400,00						3 Dokumen	185.000.000,00	
	1.02.02.2.	Pengelolaan Sistem Informasi						108.303.400,00							185.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	108.303.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3 Dokumen	185.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						27.329.380,00					Masyarakat Kota Blitar		22.805.000,00	
		Meningkatnya kualitas mutu fasilitas kesehatan rujukan						27.329.380,00					Masyarakat Kota Blitar		22.805.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	12.844.880,00						2 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	37 Unit		24 Unit	28 Unit	14.484.500,00						32 Unit	7.805.000,00	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						14.484.500,00							7.805.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	37 Unit		24 Unit	28 Unit	14.484.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		32 Unit	7.805.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan						12.844.880,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	12.844.880,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat melalui pelayanan kesehatan						5.443.588.355,00							12.070.521.427,00	
			999.Persentase layanan rumah sakit dengan kompetensi minimal dasar	87.50 %		70.83 %	0 %	3.932.082.245,00						79.17 %	10.342.444.796,00	
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana fasilitas pelayanan						6.443.588.355,00					Masyarakat Kota Blitar		13.034.498.427,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	35 Unit		30 Unit	32 Unit	630.064.000,00						32 Unit	626.700.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit		25 Unit	30 Unit	435.197.325,00						30 Unit	564.683.201,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.866.820.920,00						4 Paket	10.115.038.595,00	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						367.888.645,00							498.683.201,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	40 Unit		38 Unit	38 Unit	367.888.645,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		40 Unit	498.683.201,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	38 Unit	367.888.645,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit	498.683.201,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit		19 Unit	38 Unit	367.888.645,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		25 Unit	498.683.201,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit		25 Unit	38 Unit	367.888.645,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		30 Unit	498.683.201,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	40 Unit		48 Unit	38 Unit	367.888.645,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		40 Unit	498.683.201,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						545.500.000,00							578.700.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit		30 Unit	754 Unit	545.500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		30 Unit	578.700.000,00	Dinas Kesehatan
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	8 Unit		8 Unit	754 Unit	545.500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		8 Unit	578.700.000,00	Dinas Kesehatan
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit		828 Unit	754 Unit	545.500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		25 Unit	578.700.000,00	Dinas Kesehatan
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	300 Unit		300 Unit	754 Unit	545.500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		300 Unit	578.700.000,00	Dinas Kesehatan
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	35 Unit		30 Unit	754 Unit	545.500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		32 Unit	578.700.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						3.018.693.600,00							9.265.061.595,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	3.018.693.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		5 Paket	9.265.061.595,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket		9 Paket	5 Paket	3.018.693.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		9 Paket	9.265.061.595,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket		3 Paket	5 Paket	3.018.693.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3 Paket	9.265.061.595,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket		4 Paket	5 Paket	3.018.693.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		4 Paket	9.265.061.595,00	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.030.719.065,00					Masyarakat Kota Blitar		40.448.144.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan fasilitas pelayanan kesehatan						50.030.719.065,00					Masyarakat Kota Blitar		40.448.144.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	4.915.800,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	11.630.058.000,00						12 Dokumen	1.730.292.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	69.255.000,00						-	207.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	69.255.000,00						-	207.000.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	30.000.000,00						-	3.300.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang	-		-	-	63.324.600,00						-	289.775.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	11.520.000,00						-	38.074.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan fasyankes						50.030.719.065,00					Masyarakat Kota Blitar		40.448.144.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	4.915.800,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	11.630.058.000,00						12 Dokumen	1.730.292.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	69.255.000,00						-	207.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	69.255.000,00						-	207.000.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	30.000.000,00						-	3.300.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang	-		-	-	63.324.600,00						-	289.775.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	11.520.000,00						-	38.074.000,00	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Puskesmas						9.500.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	48 Dokumen	9.500.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		12 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen		5 Dokumen	48 Dokumen	9.500.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		5 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						30.000.000,00							3.300.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	582 Orang	30.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	3.300.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						4.915.800,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	2 Dokumen	4.915.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium						63.324.600,00							289.775.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	70 Paket	63.324.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	289.775.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.	Pengelolaan pelayanan kesehatan						11.520.000,00							38.074.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	3 Laporan	11.520.000,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	38.074.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						69.255.000,00							207.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	69.255.000,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	207.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						69.255.000,00							207.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	69.255.000,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	207.000.000,00	Dinas Kesehatan
26,	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA**						730.064.200,00							689.596.000,00	
		Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan						730.064.200,00							689.596.000,00	
			1.Rasio Nakes dan Named terhadap populasi	8.22 Indeks (Skala 0-		8.21 Indeks (Skala 0-100)	8.42 Indeks (Skala 0-	730.064.200,00						8.22 Indeks (Skala 0-	689.596.000,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						11.399.200,00					Masyarakat Kota Blitar		60.000.000,00	
		Tersedianya tenaga kesehatan yang berizin						11.399.200,00					Masyarakat Kota Blitar		60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.399.200,00						1 Dokumen	60.000.000,00	
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						11.399.200,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.399.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Dokumen	60.000.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya pelayanan kesehatan spesialistik di Rumah Sakit Pemerintah sesuai standar						377.386.000,00					Masyarakat Kota Blitar		162.763.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	365.386.000,00						1 Dokumen	137.763.000,00	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						365.386.000,00							137.763.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	365.386.000,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Dokumen	137.763.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						341.279.000,00					Masyarakat Kota Blitar		466.833.000,00	
		Meningkatnya mutu dan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia						341.279.000,00					Masyarakat Kota Blitar		466.833.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu	75 Orang		70 Orang	70 Orang	341.279.000,00						70 Orang	466.833.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						341.279.000,00							466.833.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	75 Orang		70 Orang	70 Orang	341.279.000,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		70 Orang	466.833.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						377.386.000,00					Masyarakat Kota Blitar		162.763.000,00	
		Tersedianya pelayanan kesehatan spesialistik di Rumah Sakit Pemerintah sesuai standar						377.386.000,00					Masyarakat Kota Blitar		162.763.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan	-		-	-	12.000.000,00						-	25.000.000,00	
	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						12.000.000,00							25.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	62 Orang	12.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	25.000.000,00	Dinas Kesehatan
27,	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						536.543.800,00							437.271.000,00	
		Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman						536.543.800,00							437.271.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase fasilitas layanan kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi evaluasi mutu	65 %		52 %	55 %	536.543.800,00						58 %	437.271.000,00	
			2.Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	87.70 %		86.30 %	86.85 %	536.543.800,00						87 %	437.271.000,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						95.501.800,00					Masyarakat Kota Blitar		81.747.000,00	
		Meningkatnya kualitas fasilitas kefarmasian dan alat kesehatan						95.501.800,00					Masyarakat Kota Blitar		81.747.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	95.501.800,00						5 Dokumen	81.747.000,00	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro						95.501.800,00							81.747.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	95.501.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		5 Dokumen	81.747.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu						133.153.000,00					Masyarakat Kota Blitar		297.524.000,00	
		Meningkatnya keamanan dan mutu PIRT						133.153.000,00					Masyarakat Kota Blitar		297.524.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	133.153.000,00						2 Dokumen	297.524.000,00	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat						133.153.000,00							297.524.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	133.153.000,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2 Dokumen	297.524.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air						7.520.000,00					Masyarakat Kota Blitar		29.000.000,00	
		Meningkatnya keamanan dan mutu TPM dan DAM						7.520.000,00					Masyarakat Kota Blitar		29.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.520.000,00						1 Dokumen	29.000.000,00	
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah						7.520.000,00							29.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.520.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Dokumen	29.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						5.040.000,00					Masyarakat Kota Blitar		14.000.000,00	
		Meningkatnya keamanan dan mutu sentra pangan jajanan/ kantin						5.040.000,00					Masyarakat Kota Blitar		14.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.040.000,00						1 Dokumen	14.000.000,00	
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						5.040.000,00							14.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.040.000,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Dokumen	14.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						295.329.000,00					Masyarakat Kota Blitar		15.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pangan olahan siap saji						295.329.000,00					Masyarakat Kota Blitar		15.000.000,00	
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka	60 Unit		55 Unit	60 Unit	295.329.000,00						60 Unit	15.000.000,00	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						295.329.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	60 Unit		55 Unit	75 Unit	295.329.000,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		60 Unit	15.000.000,00	Dinas Kesehatan
28,	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						1.987.350.000,00							2.982.166.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang						1.987.350.000,00							2.982.166.000,00	
			1.Persentase UKBM sesuai standar	96 %		100 %	100 %	1.987.350.000,00						100 %	2.982.166.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.973.550.000,00					Masyarakat Kota Blitar		2.650.000.000,00	
		Meningkatnya peran serta masyarakat di bidang kesehatan						1.973.550.000,00					Masyarakat Kota Blitar		2.650.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	1.973.550.000,00						8 Dokumen	2.650.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						1.973.550.000,00							2.650.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	1.973.550.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		8 Dokumen	2.650.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah						13.800.000,00					Masyarakat Kota Blitar		332.166.000,00	
		Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						13.800.000,00					Masyarakat Kota Blitar		332.166.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	2 Dokumen		2 Dokumen	Dokumen	13.800.000,00						2 Dokumen	332.166.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						13.800.000,00							332.166.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	13.800.000,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2 Dokumen	332.166.000,00	Dinas Kesehatan
		UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul						1.015.068.800,00							3.872.344.513,00	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						1.015.068.800,00							3.872.344.513,00	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						1.015.068.800,00							3.872.344.513,00	
29,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						71.144.609.025,00							87.379.434.723,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kinerja BLUD UPT Puskesmas						0,00							3.013.484.313,00	
			1.Skor penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas Kepanjenkidul	78 Nilai		70 Nilai	72 Nilai	0,00						74 Nilai	3.013.484.313,00	
			1.Skor penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas Sananwetan	78 Nilai		70 Nilai	72 Nilai	0,00						74 Nilai	3.013.484.313,00	
			1.Skor penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas Sukorejo	78 Nilai		70 Nilai	72 Nilai	0,00						74 Nilai	3.013.484.313,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						0,00					Masyarakat kecamatan kepanjenkidul		9.772.411.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Medis, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Medis, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keperawatan, Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja dan kepegawaian, Meningkatnya kualitas						0,00					Masyarakat kecamatan kepanjenkidul		9.772.411.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00						1 Unit Kerja	9.772.411.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						0,00					Masyarakat kecamatan kepanjenkidul		9.772.411.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00						1 Unit Kerja	9.772.411.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						0,00							3.013.484.313,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0,00	Kota Blitar	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit Kerja	3.013.484.313,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
		Meningkatnya mutu layanan Rumah Sakit						0,00							3.013.484.313,00	
			1.Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	93 %		89 %	90 %	0,00						91 %	3.013.484.313,00	
			2.Akreditasi RSUD	Paripurna Nilai Akreditasi		Paripurna Nilai Akreditasi	Paripurna Nilai Akreditasi	0,00						Paripurna Nilai Akreditasi	3.013.484.313,00	
			3.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	0,00						100 %	3.013.484.313,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Medis, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Medis, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keperawatan, Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja dan kepegawaian, Meningkatnya kualitas						0,00					Masyarakat kecamatan kepanjenkidul		9.772.411.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00						1 Unit Kerja	9.772.411.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						0,00					Masyarakat kecamatan kepanjenkidul		9.772.411.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00						1 Unit Kerja	9.772.411.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						0,00							3.013.484.313,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0,00	Kota Blitar	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit Kerja	3.013.484.313,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
30,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						56.609.940.200,00							53.690.447.427,00	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						1.015.068.800,00							858.860.200,00	
			10.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yang cukup	65 %		30 %	40 %	1.015.068.800,00						50 %	858.860.200,00	
			11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	100 %		78.57 %	90.50 %	1.015.068.800,00						97.60 %	858.860.200,00	
			4.Presentase lanjut usia yang mandiri	94 %		93.82 %	93.84 %	1.015.068.800,00						93.86 %	858.860.200,00	
			5.Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	73.9 %		71.9 %	77.70 %	1.015.068.800,00						72.9 %	858.860.200,00	
			6.Persentase kelurahan yang mencapai target kekebalan kelompok	100 %		100 %	100 %	1.015.068.800,00						100 %	858.860.200,00	
			7.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0.62 %		0.7 %	0.68 %	1.015.068.800,00						0.66 %	858.860.200,00	
			8.Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	100 %		100 %	100 %	1.015.068.800,00						100 %	858.860.200,00	
			999.Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	3.91 Orang		4.35 Orang	4.35 Orang	1.015.068.800,00						4.35 Orang	858.860.200,00	
			999.Jumlah Kematian Ibu AMPSR	2 Orang		3 Orang	3 Orang	1.015.068.800,00						3 Orang	858.860.200,00	
			999.Persentase Insiden Stunting Balita (kasus baru)	1 %		2.3 %	1.19 %	1.015.068.800,00						1.3 %	858.860.200,00	
			9.Persentase pemenuhan syarat kualitas kesehatan lingkungan	90 %		70 %	75 %	1.015.068.800,00						80 %	858.860.200,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						6.443.588.355,00					Masyarakat kecamatan kepanjenkidul		13.034.498.427,00	
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan						6.443.588.355,00					Masyarakat kecamatan kepanjenkidul		13.034.498.427,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	300 Unit		300 Unit	300 Unit	630.064.000,00						300 Unit	626.700.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit		19 Unit	25 Unit	435.197.325,00						25 Unit	564.683.201,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	3 Paket		3 Paket	3 Paket	3.866.820.920,00						3 Paket	10.115.038.595,00	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						22.759.100,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	21 Unit	22.759.100,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit	20.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit		19 Unit	21 Unit	22.759.100,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		25 Unit	20.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit		25 Unit	21 Unit	22.759.100,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		30 Unit	20.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	40 Unit		38 Unit	21 Unit	22.759.100,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		40 Unit	20.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	40 Unit		48 Unit	21 Unit	22.759.100,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		40 Unit	20.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						25.704.000,00							15.000.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	35 Unit		30 Unit	8 Unit	25.704.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		32 Unit	15.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	8 Unit		8 Unit	8 Unit	25.704.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		8 Unit	15.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit		30 Unit	8 Unit	25.704.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		30 Unit	15.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	300 Unit		300 Unit	8 Unit	25.704.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		300 Unit	15.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit		828 Unit	8 Unit	25.704.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		25 Unit	15.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						274.580.900,00							276.977.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Pa ket		4 Paket	3 Pa ket	274.580.900,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		4 Paket	276.977.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Pa ket		9 Paket	3 Pa ket	274.580.900,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		9 Paket	276.977.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Pa ket		5 Paket	3 Paket	274.580.900,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		5 Pa ket	276.977.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Pa ket		3 Paket	3 Paket	274.580.900,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3 Pa ket	276.977.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat melalui pelayanan kesehatan						323.044.000,00							311.977.000,00	
			999.Persentase layanan rumah sakit dengan kompetensi minimal dasar	87.50 %		70.83 %	0 %	323.044.000,00						79.17 %	311.977.000,00	
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan						6.443.588.355,00					Masyarakat kecamatan kepanjenkidul		13.034.498.427,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit		30 Unit	30 Unit	630.064.000,00						30 Unit	626.700.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit		25 Unit	30 Unit	435.197.325,00						30 Unit	564.683.201,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	3 Paket		3 Paket	3 Paket	3.866.820.920,00						3 Paket	10.115.038.595,00	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						22.759.100,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	21 Unit	22.759.100,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit	20.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	40 Unit		38 Unit	21 Unit	22.759.100,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		40 Unit	20.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	40 Unit		48 Unit	21 Unit	22.759.100,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		40 Unit	20.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit		25 Unit	21 Unit	22.759.100,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		30 Unit	20.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit		19 Unit	21 Unit	22.759.100,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		25 Unit	20.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						25.704.000,00							15.000.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	8 Unit		8 Unit	8 Unit	25.704.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		8 Unit	15.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit		828 Unit	8 Unit	25.704.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		25 Unit	15.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	300 Unit		300 Unit	8 Unit	25.704.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		300 Unit	15.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit		30 Unit	8 Unit	25.704.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		30 Unit	15.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	35 Unit		30 Unit	8 Unit	25.704.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		32 Unit	15.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						274.580.900,00							276.977.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket		5 Paket	3 Paket	274.580.900,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		5 Paket	276.977.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	274.580.900,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		4 Paket	276.977.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	274.580.900,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3 Paket	276.977.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket		9 Paket	3 Paket	274.580.900,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		9 Paket	276.977.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.030.719.065,00					Masyarakat kecamatan kepanjenkidul		40.448.144.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan fasilitas pelayanan kesehatan						50.030.719.065,00					Masyarakat kecamatan kepanjenkidul		40.448.144.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	11.630.058.000,00						12 Dokumen	1.730.292.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan fasyankes						50.030.719.065,00					Masyarakat kecamatan kepanjenkidul		40.448.144.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	11.630.058.000,00						12 Dokumen	1.730.292.000,00	
	1.02.02.2.[illegible]	Operasional Pelayanan Puskesmas						692.024.800,00							546.883.200,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	692.024.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		5 Dokumen	546.883.200,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	5 Dokumen	692.024.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		12 Dokumen	546.883.200,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
		UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo						996.296.800,00							4.189.117.113,00	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						996.296.800,00							4.189.117.113,00	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						996.296.800,00							4.189.117.113,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
31,	1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						71.144.609.025,00							87.379.434.723,00	
		Meningkatnya kinerja BLUD UPT Puskesmas						0,00							3.290.557.313,00	
			1.Skor penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas Kepanjenkidul	78 Nilai		70 Nilai	72 Nilai	0,00						74 Nilai	3.290.557.313,00	
			1.Skor penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas Sananwetan	78 Nilai		70 Nilai	72 Nilai	0,00						74 Nilai	3.290.557.313,00	
			1.Skor penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas Sukorejo	78 Nilai		70 Nilai	72 Nilai	0,00						74 Nilai	3.290.557.313,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						0,00					Masyarakat Kecamatan Sukorejo		9.772.411.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Medis, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Medis, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keperawatan, Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja dan kepegawaian, Meningkatnya kualitas						0,00					Masyarakat Kecamatan Sukorejo		9.772.411.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00						1 Unit Kerja	9.772.411.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						0,00					Masyarakat Kecamatan Sukorejo		9.772.411.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00						1 Unit Kerja	9.772.411.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						0,00							3.290.557.313,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0,00	Kota Blitar	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit Kerja	3.290.557.313,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
		Meningkatnya mutu layanan Rumah Sakit						0,00							3.290.557.313,00	
			1.Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	93 %		89 %	90 %	0,00						91 %	3.290.557.313,00	
			2.Akreditasi RSUD	Paripurna Nilai Akreditasi		Paripurna Nilai Akreditasi	Paripurna Nilai Akreditasi	0,00						Paripurna Nilai Akreditasi	3.290.557.313,00	
			3.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	0,00						100 %	3.290.557.313,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Medis, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Medis, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keperawatan, Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja dan kepegawaian, Meningkatnya kualitas						0,00					Masyarakat Kecamatan Sukorejo		9.772.411.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00						1 Unit Kerja	9.772.411.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						0,00					Masyarakat Kecamatan Sukorejo		9.772.411.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00						1 Unit Kerja	9.772.411.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						0,00							3.290.557.313,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0,00	Kota Blitar	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit Kerja	3.290.557.313,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
32,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						56.609.940.200,00							53.690.447.427,00	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						996.296.800,00							898.559.800,00	
			10.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yang cukup	65 %		30 %	40 %	996.296.800,00						50 %	898.559.800,00	
			11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	100 %		78.57 %	90.50 %	996.296.800,00						97.60 %	898.559.800,00	
			4.Presentase lanjut usia yang mandiri	94 %		93.82 %	93.84 %	996.296.800,00						93.86 %	898.559.800,00	
			5.Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	73.9 %		71.9 %	77.70 %	996.296.800,00						72.9 %	898.559.800,00	
			6.Persentase kelurahan yang mencapai target kekebalan kelompok	100 %		100 %	100 %	996.296.800,00						100 %	898.559.800,00	
			7.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0.62 %		0.7 %	0.68 %	996.296.800,00						0.66 %	898.559.800,00	
			8.Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	100 %		100 %	100 %	996.296.800,00						100 %	898.559.800,00	
			999.Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	3.91 Orang		4.35 Orang	4.35 Orang	996.296.800,00						4.35 Orang	898.559.800,00	
			999.Jumlah Kematian Ibu AMPSR	2 Orang		3 Orang	3 Orang	996.296.800,00						3 Orang	898.559.800,00	
			999.Persentase Insiden Stunting Balita (kasus baru)	1 %		2.3 %	1.19 %	996.296.800,00						1.3 %	898.559.800,00	
			9.Persentase pemenuhan syarat kualitas kesehatan lingkungan	90 %		70 %	75 %	996.296.800,00						80 %	898.559.800,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						6.443.588.355,00					Masyarakat Kecamatan Sukorejo		13.034.498.427,00	
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan						6.443.588.355,00					Masyarakat Kecamatan Sukorejo		13.034.498.427,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit		30 Unit	30 Unit	630.064.000,00						30 Unit	626.700.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit		19 Unit	25 Unit	435.197.325,00						25 Unit	564.683.201,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	3 Paket		3 Paket	3 Paket	3.866.820.920,00						3 Paket	10.115.038.595,00	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						20.918.480,00							22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	14 Unit	20.918.480,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit	22.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit		25 Unit	14 Unit	20.918.480,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		30 Unit	22.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit		19 Unit	14 Unit	20.918.480,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		25 Unit	22.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	40 Unit		48 Unit	14 Unit	20.918.480,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		40 Unit	22.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	40 Unit		38 Unit	14 Unit	20.918.480,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		40 Unit	22.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						33.660.000,00							16.000.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	35 Unit		30 Unit	25 Unit	33.660.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		32 Unit	16.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	8 Unit		8 Unit	25 Unit	33.660.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		8 Unit	16.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit		30 Unit	25 Unit	33.660.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		30 Unit	16.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit		828 Unit	25 Unit	33.660.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		25 Unit	16.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	300 Unit		300 Unit	25 Unit	33.660.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		300 Unit	16.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						274.526.520,00							283.000.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	274.526.520,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		5 Paket	283.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket		9 Paket	4 Paket	274.526.520,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		9 Paket	283.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket		3 Paket	4 Paket	274.526.520,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3 Paket	283.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	274.526.520,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		4 Paket	283.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat melalui pelayanan kesehatan						329.105.000,00							321.000.000,00	
			999.Persentase layanan rumah sakit dengan kompetensi minimal dasar	87.50 %		70.83 %	0 %	329.105.000,00						79.17 %	321.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan						6.443.588.355,00					Masyarakat Kecamatan Sukorejo		13.034.498.427,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit		30 Unit	30 Unit	630.064.000,00						30 Unit	626.700.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	40 Unit		38 Unit	38 Unit	435.197.325,00						40 Unit	564.683.201,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	3 Paket		3 Paket	3 Paket	3.866.820.920,00						3 Paket	10.115.038.595,00	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						20.918.480,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit		19 Unit	14 Unit	20.918.480,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		25 Unit	22.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit		25 Unit	14 Unit	20.918.480,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		30 Unit	22.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	40 Unit		38 Unit	14 Unit	20.918.480,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		40 Unit	22.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	40 Unit		48 Unit	14 Unit	20.918.480,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		40 Unit	22.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	14 Unit	20.918.480,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit	22.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						33.660.000,00							16.000.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	8 Unit		8 Unit	25 Unit	33.660.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		8 Unit	16.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit		828 Unit	25 Unit	33.660.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		25 Unit	16.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	300 Unit		300 Unit	25 Unit	33.660.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		300 Unit	16.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit		30 Unit	25 Unit	33.660.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		30 Unit	16.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	35 Unit		30 Unit	25 Unit	33.660.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		32 Unit	16.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						274.526.520,00							283.000.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	274.526.520,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		5 Paket	283.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Pa ket		3 Paket	4 Pa ket	274.526.520,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3 Paket	283.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	274.526.520,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		4 Paket	283.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket		9 Paket	4 Paket	274.526.520,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		9 Paket	283.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.030.719.065,00					Masyarakat Kecamatan Sukorejo		40.448.144.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan fasilitas pelayanan kesehatan						50.030.719.065,00					Masyarakat Kecamatan Sukorejo		40.448.144.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	11.630.058.000,00						12 Dokumen	1.730.292.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan fasyankes						50.030.719.065,00					Masyarakat Kecamatan Sukorejo		40.448.144.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	11.630.058.000,00						12 Dokumen	1.730.292.000,00	
	1.02.02.2.	Operasional Pelayanan Puskesmas						667.191.800,00							577.559.800,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	667.191.800,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		5 Dokumen	577.559.800,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	5 Dokumen	667.191.800,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		12 Dokumen	577.559.800,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
		UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan						1.118.692.400,00							4.405.218.374,00	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						1.118.692.400,00							4.405.218.374,00	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						1.118.692.400,00							4.405.218.374,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
33,	1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						71.144.609.025,00							87.379.434.723,00	
		Meningkatnya kinerja BLUD UPT Puskesmas						0,00							3.468.369.374,00	
			1.Skor penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas Kepanjenkidul	78 Nilai		70 Nilai	72 Nilai	0,00						74 Nilai	3.468.369.374,00	
			1.Skor penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas Sananwetan	78 Nilai		70 Nilai	72 Nilai	0,00						74 Nilai	3.468.369.374,00	
			1.Skor penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas Sukorejo	78 Nilai		70 Nilai	72 Nilai	0,00						74 Nilai	3.468.369.374,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						0,00					Masyarakat Kecamatan Sananwetan		9.772.411.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Medis, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Medis, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keperawatan, Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja dan kepegawaian, Meningkatnya kualitas						0,00					Masyarakat Kecamatan Sananwetan		9.772.411.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00						1 Unit Kerja	9.772.411.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						0,00					Masyarakat Kecamatan Sananwetan		9.772.411.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00						1 Unit Kerja	9.772.411.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						0,00							3.468.369.374,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0,00	Kota Blitar	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit Kerja	3.468.369.374,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
		Meningkatnya mutu layanan Rumah Sakit						0,00							3.468.369.374,00	
			1.Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	93 %		89 %	90 %	0,00						91 %	3.468.369.374,00	
			2.Akreditasi RSUD	Paripurna Nilai Akreditasi		Paripurna Nilai Akreditasi	Paripurna Nilai Akreditasi	0,00						Paripurna Nilai Akreditasi	3.468.369.374,00	
			3.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	0,00						100 %	3.468.369.374,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Medis, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Medis, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keperawatan, Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja dan kepegawaian, Meningkatnya kualitas						0,00					Masyarakat Kecamatan Sananwetan		9.772.411.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00						1 Unit Kerja	9.772.411.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						0,00					Masyarakat Kecamatan Sananwetan		9.772.411.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00						1 Unit Kerja	9.772.411.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						0,00							3.468.369.374,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0,00	Kota Blitar	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit Kerja	3.468.369.374,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
34,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						56.609.940.200,00							53.690.447.427,00	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						1.118.692.400,00							936.849.000,00	
			10.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yang cukup	65 %		30 %	40 %	1.118.692.400,00						50 %	936.849.000,00	
			11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	100 %		78.57 %	90.50 %	1.118.692.400,00						97.60 %	936.849.000,00	
			4.Presentase lanjut usia yang mandiri	94 %		93.82 %	93.84 %	1.118.692.400,00						93.86 %	936.849.000,00	
			5.Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	73.9 %		71.9 %	77.70 %	1.118.692.400,00						72.9 %	936.849.000,00	
			6.Persentase kelurahan yang mencapai target kekebalan kelompok	100 %		100 %	100 %	1.118.692.400,00						100 %	936.849.000,00	
			7.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0.62 %		0.7 %	0.68 %	1.118.692.400,00						0.66 %	936.849.000,00	
			8.Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	100 %		100 %	100 %	1.118.692.400,00						100 %	936.849.000,00	
			999.Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	3.91 Orang		4.35 Orang	4.35 Orang	1.118.692.400,00						4.35 Orang	936.849.000,00	
			999.Jumlah Kematian Ibu AMPSR	2 Orang		3 Orang	3 Orang	1.118.692.400,00						3 Orang	936.849.000,00	
			999.Persentase Insiden Stunting Balita (kasus baru)	1 %		2.3 %	1.19 %	1.118.692.400,00						1.3 %	936.849.000,00	
			9.Persentase pemenuhan syarat kualitas kesehatan lingkungan	90 %		70 %	75 %	1.118.692.400,00						80 %	936.849.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						6.443.588.355,00					Masyarakat Kecamatan Sananwetan		13.034.498.427,00	
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan						6.443.588.355,00					Masyarakat Kecamatan Sananwetan		13.034.498.427,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit		30 Unit	30 Unit	630.064.000,00						30 Unit	626.700.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit		19 Unit	25 Unit	435.197.325,00						25 Unit	564.683.201,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	3 Paket		3 Paket	3 Paket	3.866.820.920,00						3 Paket	10.115.038.595,00	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						23.631.100,00							24.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	25 Unit	23.631.100,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit	24.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit		19 Unit	25 Unit	23.631.100,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		25 Unit	24.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit		25 Unit	25 Unit	23.631.100,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		30 Unit	24.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	40 Unit		38 Unit	25 Unit	23.631.100,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		40 Unit	24.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	40 Unit		48 Unit	25 Unit	23.631.100,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		40 Unit	24.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						25.200.000,00							17.000.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	8 Unit		8 Unit	17 Unit	25.200.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		8 Unit	17.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	35 Unit		30 Unit	17 Unit	25.200.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		32 Unit	17.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit		30 Unit	17 Unit	25.200.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		30 Unit	17.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	300 Unit		300 Unit	17 Unit	25.200.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		300 Unit	17.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Uni t		828 Unit	17 Uni t	25.200.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		25 Unit	17.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						299.019.900,00							290.000.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Pa ket		4 Paket	3 Pa ket	299.019.900,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		4 Paket	290.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Pa ket		5 Paket	3 Pa ket	299.019.900,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		5 Paket	290.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Pa ket		3 Paket	3 Pa ket	299.019.900,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3 Paket	290.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket		9 Paket	3 Paket	299.019.900,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		9 Paket	290.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat melalui pelayanan kesehatan						347.851.000,00							331.000.000,00	
			999.Persentase layanan rumah sakit dengan kompetensi minimal dasar	87.50 %		70.83 %	0 %	347.851.000,00						79.17 %	331.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan						6.443.588.355,00					Masyarakat Kecamatan Sananwetan		13.034.498.427,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit		30 Unit	30 Unit	630.064.000,00						30 Unit	626.700.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit		19 Unit	25 Unit	435.197.325,00						25 Unit	564.683.201,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	3 Paket		3 Paket	3 Paket	3.866.820.920,00						3 Paket	10.115.038.595,00	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						23.631.100,00							24.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	25 Unit	23.631.100,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit	24.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit		19 Unit	25 Unit	23.631.100,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		25 Unit	24.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit		25 Unit	25 Unit	23.631.100,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		30 Unit	24.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	40 Unit		38 Unit	25 Unit	23.631.100,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		40 Unit	24.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	40 Unit		48 Unit	25 Unit	23.631.100,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		40 Unit	24.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						25.200.000,00							17.000.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	35 Unit		30 Unit	17 Unit	25.200.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		32 Unit	17.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit		30 Unit	17 Unit	25.200.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		30 Unit	17.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit		828 Unit	17 Unit	25.200.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		25 Unit	17.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	300 Unit		300 Unit	17 Unit	25.200.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		300 Unit	17.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	8 Unit		8 Unit	17 Unit	25.200.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		8 Unit	17.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						299.019.900,00							290.000.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket		9 Paket	3 Paket	299.019.900,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		9 Paket	290.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Pa ket		5 Paket	3 Pa ket	299.019.900,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		5 Paket	290.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	299.019.900,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3 Paket	290.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	299.019.900,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		4 Paket	290.000.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.030.719.065,00					Masyarakat Kecamatan Sananwetan		40.448.144.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan fasilitas pelayanan kesehatan						50.030.719.065,00					Masyarakat Kecamatan Sananwetan		40.448.144.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	11.630.058.000,00						12 Dokumen	1.730.292.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan fasyankes						50.030.719.065,00					Masyarakat Kecamatan Sananwetan		40.448.144.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	11.630.058.000,00						12 Dokumen	1.730.292.000,00	
	1.02.02.2.	Operasional Pelayanan Puskesmas						770.841.400,00							605.849.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	770.841.400,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		5 Dokumen	605.849.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	5 Dokumen	770.841.400,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		12 Dokumen	605.849.000,00	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
		Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo						110.300.000.000,00							87.696.978.788,00	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						110.300.000.000,00							87.696.978.788,00	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						110.300.000.000,00							87.696.978.788,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
35,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						110.000.000.000,00							87.696.978.788,00	
			Akreditas i RSUD	-		-	Paripurna Nilai Akreditasi	110.000.000.000,00						-	87.696.978.788,00	
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	-		-	90 %	110.000.000.000,00						-	87.696.978.788,00	
			Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	-		-	100 %	110.000.000.000,00						-	87.696.978.788,00	
	1.02.01.2.	Peningkatan Pelayanan BLUD						110.000.000.000,00					-		87.696.978.788,00	
		-						110.000.000.000,00					-		87.696.978.788,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	110.000.000.000,00						-	87.696.978.788,00	
	1.02.01.2. 10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						110.000.000.000,00							87.696.978.788,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	110.000.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan dari BLUD	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		-	87.696.978.788,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo
36,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						300.000.000,00							0,00	
			Persentase layanan rumah sakit dengan kompetensi minimal dasar	-		-	75 %	300.000.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2. 01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						300.000.000,00					-		0,00	
		-						300.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	-		-	-	300.000.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2. 01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						300.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	-		-	1 Unit	300.000.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		-	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						39.969.245.850,00							47.920.808.647,00	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						39.615.080.850,00							47.071.808.325,00	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						39.615.080.850,00							47.071.808.325,00	
37,	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						6.096.800.011,00							8.932.670.753,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						6.095.800.011,00							8.932.670.753,00	
			1.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	6.095.800.011,00						100 %	8.932.670.753,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.212.500,00					Karyawan - karyawati Dinas PUPR Kota		54.642.169,50	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						8.212.500,00					Karyawan - karyawati Dinas PUPR Kota		54.642.169,50	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	2.100.000,00						1 Berita Acara	19.628.469,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	500.000,00						1 Berita Acara	3.279.935,50	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	13 Data		13 Data	13 Data	950.000,00						13 Data	5.457.375,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.137.500,00						4 Dokumen	4.459.929,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	825.000,00						12 Dokumen	12.896.604,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	2.700.000,00						8 Laporan	8.919.857,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.137.500,00							4.459.929,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.137.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Dokumen	4.459.929,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.700.000,00							8.919.857,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	2.700.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		8 Laporan	8.919.857,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						950.000,00							5.457.375,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	13 Data		13 Data	13 Data	950.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		13 Data	5.457.375,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat						2.100.000,00							19.628.469,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	2.100.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Berita Acara	19.628.469,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						825.000,00							12.896.604,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	825.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Dokumen	12.896.604,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis						500.000,00							3.279.935,50	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	500.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Berita Acara	3.279.935,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.665.758.011,00					Karyawan - karyawati Dinas PUPR Kota		6.208.890.338,78	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						4.665.758.011,00					Karyawan - karyawati Dinas PUPR Kota		6.208.890.338,78	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00						12 Laporan	2.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4.664.558.011,00						45 Orang/bulan	6.206.690.338,78	
	1.03.01.2.[illegible]	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.664.558.011,00							6.206.690.338,78	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4.664.558.011,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		45 Orang/bulan	6.206.690.338,78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.200.000,00							2.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Laporan	2.200.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						500.000,00					Karyawan - karyawati Dinas PUPR Kota		4.189.500,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daera						500.000,00					Karyawan - karyawati Dinas PUPR Kota		4.189.500,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	500.000,00						6 Laporan	4.189.500,00	
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						500.000,00							4.189.500,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	500.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		6 Laporan	4.189.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						500.000,00					Karyawan - karyawati Dinas PUPR Kota		3.279.937,72	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah						500.000,00					Karyawan - karyawati Dinas PUPR Kota		3.279.937,72	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00						12 Dokumen	3.279.937,72	
	1.03.01.2.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi						500.000,00							3.279.937,72	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Dokumen	3.279.937,72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						103.155.500,00					Karyawan - karyawati Dinas PUPR Kota		283.453.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						103.155.500,00					Karyawan - karyawati Dinas PUPR Kota		283.453.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	30 Orang		30 Orang	30 Orang	50.000.000,00						30 Orang	145.144.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	4 Paket		4 Paket	4 Paket	53.155.500,00						4 Paket	138.309.000,00	
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						53.155.500,00							138.309.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	53.155.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Paket	138.309.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						50.000.000,00							145.144.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		30 Orang	145.144.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						357.390.500,00					Karyawan - karyawati Dinas PUPR Kota		724.804.535,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						357.390.500,00					Karyawan - karyawati Dinas PUPR Kota		724.804.535,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	2.754.000,00						24 Dokumen	7.344.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	120 Dokumen		30 Dokumen	6 Dokumen	75.000.000,00						90 Dokumen	215.801.544,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		21 Laporan	21 Laporan	148.901.000,00						25 Laporan	315.773.334,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4 Paket		4 Paket	4 Paket	56.813.800,00						4 Paket	92.150.257,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	14.022.500,00						3 Paket	17.845.800,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	6.143.000,00						3 Paket	13.850.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	38.108.300,00						5 Paket	38.124.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	15.647.900,00						6 Paket	23.915.600,00	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.143.000,00							13.850.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Pa ket		3 Paket	3 Pa ket	6.143.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		3 Paket	13.850.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						38.108.300,00							38.124.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Pa ket		5 Paket	5 Pa ket	38.108.300,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		5 Paket	38.124.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						15.647.900,00							23.915.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Pa ket		6 Paket	6 Pa ket	15.647.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		6 Paket	23.915.600,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						56.813.800,00							92.150.257,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Pa ket		4 Paket	3 Pa ket	56.813.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Paket	92.150.257,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14.022.500,00							17.845.800,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	14.022.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		3 Paket	17.845.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2. 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.754.000,00							7.344.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	2.754.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		24 Dokumen	7.344.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						148.901.000,00							315.773.334,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		21 Laporan	21 Laporan	148.901.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		25 Laporan	315.773.334,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2. 06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						75.000.000,00							215.801.544,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	120 Dokumen		30 Dokumen	6 Dokumen	75.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		90 Dokumen	215.801.544,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						104.898.500,00					Karyawan - karyawati Dinas PUPR Kota		309.452.850,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						104.898.500,00					Karyawan - karyawati Dinas PUPR Kota		309.452.850,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	4 Unit	200.000,00						6 Unit	80.128.755,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit		18 Unit	18 Unit	104.698.500,00						18 Unit	229.324.095,00	
	1.03.01.2.	Pengadaan Mebel						200.000,00							80.128.755,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	1 Unit	200.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		6 Unit	80.128.755,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						104.698.500,00							229.324.095,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit		18 Unit	1 Unit	104.698.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		18 Unit	229.324.095,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						482.516.800,00					Karyawan - karyawati Dinas PUPR Kota		804.971.422,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						482.516.800,00					Karyawan - karyawati Dinas PUPR Kota		804.971.422,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	167.000.000,00						4 Laporan	219.248.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	104 Laporan		104 Laporan	104 Laporan	315.516.800,00						104 Laporan	585.723.022,00	
	1.03.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						167.000.000,00							219.248.400,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	167.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Laporan	219.248.400,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						315.516.800,00							585.723.022,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	104 Laporan		104 Laporan	78 Laporan	315.516.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		104 Laporan	585.723.022,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						373.868.200,00					Karyawan - karyawati Dinas PUPR Kota		538.987.000,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						373.868.200,00					Karyawan - karyawati Dinas PUPR Kota		538.987.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100.000.000,00						2 Unit	197.400.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	28 Unit		28 Unit	28 Unit	204.600.000,00						28 Unit	194.599.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	35.850.000,00						1 Unit	12.060.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	137.200,00						20 Unit	7.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	10 Unit		10 Unit	10 Unit	33.031.000,00						10 Unit	45.928.000,00	
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						35.850.000,00							12.060.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	35.850.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Unit	12.060.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						204.600.000,00							194.599.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit		28 Unit	5 Unit	204.600.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		28 Unit	194.599.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						137.200,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	10 Unit	137.200,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		20 Unit	7.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						33.031.000,00							45.928.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	33.031.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		10 Unit	45.928.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00							197.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Unit	197.400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						373.868.200,00					Karyawan - karyawati Dinas PUPR Kota		538.987.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	-		-	-	250.000,00						-	81.500.000,00	
	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						250.000,00							81.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	4 Unit	250.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		-	81.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
38,	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						4.673.228.571,00							10.372.223.555,00	
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan akses masyarakat terhadap irigasi						4.673.228.571,00							10.272.223.555,00	
			999.Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	66 Persentase		64 Persentase	64.5 Persentase	4.673.228.571,00						65 Persentase	10.272.223.555,00	
			999.Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	98.82 Persentase		98.03 Persentase	98.23 Persentase	4.673.228.571,00						98.43 Persentase	10.272.223.555,00	
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu)						4.673.228.571,00					Masyarakat/petan i wilayah Kota Blitar		10.372.223.555,00	
		Persentase Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi dalam kondisi baik						4.673.228.571,00					Masyarakat/petan i wilayah Kota Blitar		10.372.223.555,00	
			Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	2 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	0 Lembaga		1 Lembaga	0 Lembaga	5.000.000,00						1 Lembaga	100.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1.468 KM		0.60 KM	1.05 KM	302.400.001,00						1.705 KM	3.572.223.555,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan	3 KM		2.60 KM	3 KM	1.418.994.361,00						1 KM	200.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.562 KM		2.75 KM	0.485 KM	2.846.834.209,00						2.020 KM	2.500.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	2.825 KM		1.856 KM	2.907 KM	0,00						3.147 KM	3.900.000.000,00	
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan						302.400.001,00							3.572.223.555,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1.468 KM		0.60 KM	1.05 KM	302.400.001,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1.705 KM	3.572.223.555,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.02.2.	Peningkatan Jaringan Irigasi						0,00							3.900.000.000,00	
		Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	2.825 KM		1.856 KM	2.907 KM	0,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		3.147 KM	3.900.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.02.2.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi						2.846.834.209,00							2.500.000.000,00	
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.562 KM		2.75 KM	0.485 KM	2.846.834.209,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2.020 KM	2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.02.2. 02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						1.418.994.361,00							200.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 KM		2.60 KM	3 KM	1.418.994.361,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 KM	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.02.2. 02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota						5.000.000,00							100.000.000,00	
		Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	0 Lembaga		1 Lembaga	0 Lembaga	5.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Lembaga	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.02.2. 02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	2 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
39,	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						307.989.760,00							660.150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air						307.989.760,00							660.150.000,00	
			999.Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum aman	15.3 %		14.3 %	14.5 %	307.989.760,00						14.7 %	660.150.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						307.989.760,00					Masyarakat Kota Blitar		660.150.000,00	
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum layak						307.989.760,00					Masyarakat Kota Blitar		660.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.024.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	150 Orang		250 Orang	150 Orang	30.038.700,00						150 Orang	110.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0.89 Liter/Detik		0.60 Liter/Detik	1.12 Liter/Detik	192.927.060,00						0.95 Liter/Detik	450.000.000,00	
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						30.038.700,00							110.000.000,00	
		Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	150 Orang		250 Orang	150 Orang	30.038.700,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		150 Orang	110.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						85.024.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.024.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						192.927.060,00							450.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	0.89 Liter/Detik		0.60 Liter/Detik	1.12 Liter/Detik	192.927.060,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		0.95 Liter/Detik	450.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum layak						307.989.760,00					Masyarakat Kota Blitar		660.150.000,00	
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum	-		-	-	0,00						-	150.000,00	
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						0,00							150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-		-	1 SR	0,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		-	150.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
40,	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						535.096.400,00							2.311.678.729,00	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah						514.096.400,00							2.311.678.729,00	
			999.Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman	42.89 %		23.51 %	28.35 %	514.096.400,00						33.20 %	2.311.678.729,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						535.096.400,00					Masyarakat Kota Blitar		2.311.678.729,00	
		Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah yang dikelola dan						535.096.400,00					Masyarakat Kota Blitar		2.311.678.729,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	179.300.000,00						1 Dokumen	350.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik						179.300.000,00							350.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	179.300.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah yang dikelola dan						535.096.400,00					Masyarakat Kota Blitar		2.311.678.729,00	
			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	-		-	-	110.211.600,00						-	114.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air	-		-	-	140.316.800,00						-	190.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan	-		-	-	10.500.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	-		-	-	73.768.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	0,00						-	150.000,00	
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	-	10.500.000,00						-	389.764.350,00	
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)						110.211.600,00							114.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	-		-	1 Unit	110.211.600,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		-	114.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja						73.768.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	-		-	2 Unit	73.768.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						0,00							150.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	1 Unit	0,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		-	150.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.05.2.01.0048	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						140.316.800,00							190.000.000,00	
		Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-		-	155 Orang	140.316.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		-	190.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.05.2.01.0049	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat						10.500.000,00							967.764.379,00	
		Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	1 M³/Hari	10.500.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		-	967.764.379,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.05.2.01.0050	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat						10.500.000,00							389.764.350,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	1 M³/Hari	10.500.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		-	389.764.350,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.05.2.01.0051	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat						10.500.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan	-		-	50 Rumah Tangga	10.500.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		-	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
41,	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						5.138.186.875,00							5.680.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan						5.138.186.875,00							5.680.000.000,00	
			999.Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi	92.08 Persentase		89 Persentase	90.08 Persentase	5.138.186.875,00						91 Persentase	5.680.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						5.138.186.875,00					Masyarakat Kota Blitar		5.680.000.000,00	
		Persentase Sistem Drainase sesuai standart						5.138.186.875,00					Masyarakat Kota Blitar		5.680.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	108.250.000,00						5 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	6 Sistem Drainase Perkotaan		16 Sistem Drainase Perkotaan	15 Sistem Drainase Perkotaan	180.000.000,00						4 Sistem Drainase Perkotaan	390.000.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	4 Sistem Drainase Perkotaan		12 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	1.374.002.400,00						13 Sistem Drainase Perkotaan	2.600.000.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	8 Sistem Drainase Perkotaan		27 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	3.475.934.475,00						14 Sistem Drainase Perkotaan	2.390.000.000,00	
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase						3.475.934.475,00							2.390.000.000,00	
		Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	8 Sistem Drainase Perkotaan		27 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	3.475.934.475,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		14 Sistem Drainase Perkotaan	2.390.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan						1.374.002.400,00							2.600.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	4 Sistem Drainase Perkotaan		12 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	1.374.002.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		13 Sistem Drainase Perkotaan	2.600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan						108.250.000,00							300.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	108.250.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		5 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan						180.000.000,00							390.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	6 Sistem Drainase Perkotaan		16 Sistem Drainase Perkotaan	15 Sistem Drainase Perkotaan	180.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Sistem Drainase Perkotaan	390.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
42,	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						7.038.483.600,00							10.960.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung						7.038.483.600,00							10.960.000.000,00	
			1.Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	89.35 Persentase		81.91 Persentase	83.77 Persentase	7.038.483.600,00						85.63 Persentase	10.960.000.000,00	
			999.Persentase bangunan gedung berizin	16.91 %		15.93 %	16.14 %	7.038.483.600,00						16.37 %	10.960.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi						7.038.483.600,00					Pemerintah dan bangunan gedung berizin		10.960.000.000,00	
		Persentase persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan						7.038.483.600,00					Pemerintah dan bangunan gedung berizin		10.960.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	35.233.200,00						3 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai	19 Dokumen		15 Dokumen	16 Dokumen	163.880.000,00						17 Dokumen	200.000.000,00	
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung						35.233.200,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	35.233.200,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		3 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim						163.880.000,00							200.000.000,00	
		Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai	19 Dokumen		15 Dokumen	16 Dokumen	163.880.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		17 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan						7.038.483.600,00					Pemerintah dan bangunan gedung berizin		10.960.000.000,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis	-		-	-	6.700.370.400,00						-	10.625.000.000,00	
			Jumlah Penyelenggara Bangunan Gedung yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan	-		-	-	139.000.000,00						-	35.000.000,00	
	1.03.08.2.01.0034	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						6.700.370.400,00							10.625.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Bangunan Gedung	6.700.370.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		-	10.625.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.08.2.01.0035	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung						139.000.000,00							35.000.000,00	
		Penyelenggara Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Penyelenggara Bangunan Gedung yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan	-		-	60 Orang	139.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		-	35.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
43,	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						14.086.359.683,00							5.850.150.000,00	
		Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang aman dan						14.076.359.683,00							5.850.150.000,00	
			999.Tingkat Kemantapan Jalan	97.35 Persentase		93.35 Persentase	94.35 Persentase	14.076.359.683,00						95.35 Persentase	5.850.150.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						14.086.359.683,00					Masyarakat Umum, Pengguna Jalan dan Pemerintah		5.850.150.000,00	
		Persentase Penyelenggaraan Jalan yang ditangani						14.086.359.683,00					Masyarakat Umum, Pengguna Jalan dan Pemerintah		5.850.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan	Dokumen		3 Dokumen	Dokumen	428.550.000,00						Dokumen	0,00	
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	4 Jembatan		4 Jembatan	4 Jembatan	200.000.000,00						4 Jembatan	150.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai	0 KM		0 KM	0 KM	2.197.342,00						0 KM	0,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.43 KM		7.41 KM	0 KM	7.064.941.826,85						0 KM	0,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2.61 KM		1.07 KM	0.71 KM	1.050.000.000,00						0.52 KM	600.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2.19 KM		1.29 KM	1.63 KM	5.274.129.848,00						1.82 KM	5.000.000.000,00	
			Panjang jembatan yang dibangun	0 Meter		200 Meter	0 Meter	10.000.000,00						0 Meter	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	0 Meter		0 Meter	0 Meter	1.750.000,00						0 Meter	0,00	
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	1130 Meter		6750 Meter	450 Meter	10.000.000,00						450 Meter	100.000.000,00	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan						428.550.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	428.550.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan						1.050.000.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2.61 KM		1.07 KM	0.71 KM	1.050.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		0.52 KM	600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0052	Pembangunan Jalan						2.197.342,00							0,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	0 KM		0 KM	0 KM	2.197.342,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		0 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan						5.274.129.848,00							5.000.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2.19 KM		1.29 KM	1.63 KM	5.274.129.848,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1.82 KM	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						7.064.941.826,85							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.43 KM		7.41 KM	7.41 KM	7.064.941.826,85	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		0 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan						10.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	1130 Meter		6750 Meter	450 Meter	10.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		450 Meter	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.	Pemeliharaan Berkala Jembatan						1.750.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	0 Meter		0 Meter	0 Meter	1.750.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		0 Meter	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.	Pemeliharaan Rutin Jembatan						200.000.000,00							150.000.000,00	
		Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	4 Jembatan		4 Jembatan	4 Jembatan	200.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Jembatan	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.	Pembangunan Jembatan						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	0 Meter		200 Meter	0 Meter	10.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		0 Meter	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Penyelenggaraan Jalan yang ditangani						14.086.359.683,00					Masyarakat Umum, Pengguna Jalan dan Pemerintah		5.850.150.000,00	
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-		-	-	44.790.666,15						-	150.000,00	
	1.03.10.2.	Rekonstruksi Jalan						44.790.666,15							150.000,00	
		Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-		-	0 KM	44.790.666,15	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		-	150.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
44,	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						400.668.550,00							1.165.000.000,00	
		Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi						400.668.550,00							965.000.000,00	
			999.Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	400.668.550,00						100 Persentase	965.000.000,00	
	1.03.11.2. 01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						200.168.550,00					Masyarakat dan tenaga kerja Konstruksi di		425.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat						200.168.550,00					Masyarakat dan tenaga kerja Konstruksi di Kota Blitar		425.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Lembaga		60 Lembaga	60 Lembaga	66.514.450,00						60 Lembaga	225.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang	75 Orang		75 Orang	75 Orang	133.654.100,00						75 Orang	200.000.000,00	
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis						133.654.100,00							200.000.000,00	
		Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	75 Orang		75 Orang	75 Orang	133.654.100,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		75 Orang	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa						66.514.450,00							225.000.000,00	
		Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Lembaga		60 Lembaga	60 Lembaga	66.514.450,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		60 Lembaga	225.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						0,00					Masyarakat dan tenaga kerja Konstruksi di Kota Blitar		525.000.000,00	
		Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya						0,00					Masyarakat dan tenaga kerja Konstruksi di Kota Blitar		525.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00						4 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang		2 Orang	2 Orang	0,00						2 Orang	200.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung		1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	0,00						1 Perangkat Pendukung	175.000.000,00	
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi						0,00							175.000.000,00	
		Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung		1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	0,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Perangkat Pendukung	175.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota						0,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI						0,00							200.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang		2 Orang	2 Orang	0,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Orang	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						200.500.000,00					Masyarakat dan tenaga kerja Konstruksi di Kota Blitar		215.000.000,00	
		Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi						200.500.000,00					Masyarakat dan tenaga kerja Konstruksi di Kota Blitar		215.000.000,00	
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	100 Badan Usaha		100 Badan Usaha	100 Badan Usaha	25.500.000,00						100 Badan Usaha	40.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	60 Lembaga		60 Lembaga	60 Lembaga	0,00						60 Lembaga	75.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi						0,00							75.000.000,00	
		Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	60 Lembaga		60 Lembaga	60 Lembaga	0,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		60 Lembaga	75.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi						25.500.000,00							40.000.000,00	
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	100 Badan Usaha		100 Badan Usaha	100 Badan Usaha	25.500.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		100 Badan Usaha	40.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.11.2.04.0010	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota						175.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
45,	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						1.338.267.400,00							1.139.935.288,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang						1.069.567.400,00							814.935.288,00	
			999.Persentase kesesuaian perwujudan rencana pola ruang	95.3 %		94.9 %	95 %	1.069.567.400,00						95.1 %	814.935.288,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						428.857.400,00					Masyarakat dan Pemerintah Kota Blitar		250.150.000,00	
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang						428.857.400,00					Masyarakat dan Pemerintah Kota Blitar		250.150.000,00	
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00						0 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00						0 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	29.057.400,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	129.900.000,00						0 Dokumen	0,00	
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		0 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota						129.900.000,00							0,00	
		Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	129.900.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		0 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		0 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang						29.057.400,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	29.057.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						300.150.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Kota Blitar		0,00	
		Tersedianya dokumen Rencana tata Ruang						300.150.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Kota Blitar		0,00	
			Jumlah data SHP Peta [illegible]	1 Peta		0 Peta	0 Peta	50.000.000,00						0 Peta	0,00	
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	150.000,00						0 Dokumen	0,00	
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta		0 Peta	0 Peta	50.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		0 Peta	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota						150.000,00							0,00	
		Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	150.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		0 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota						250.000.000,00							0,00	
		Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		0 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						249.110.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Kota Blitar		287.815.500,00	
		Persentase Ketersediaan Dokumen Pemanfaatan Ruang						249.110.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Kota Blitar		287.815.500,00	
			Jumlah dokumen sinkronisasi program	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	105.000.000,00	
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu	50 Layanan		50 Layanan	50 Layanan	99.110.000,00						50 Layanan	104.065.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan	1 Sistem Informasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	75.000.000,00						1 Sistem Informasi	78.750.000,00	
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang						99.110.000,00							104.065.500,00	
		Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	50 Layanan		50 Layanan	50 Layanan	99.110.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		50 Layanan	104.065.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang						75.000.000,00							105.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Dokumen	105.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang						75.000.000,00							78.750.000,00	
		Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	75.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Sistem Informasi	78.750.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						360.150.000,00					Masyarakat Kota Blitar		601.969.788,00	
		Persentase Ketersediaan Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang						360.150.000,00					Masyarakat Kota Blitar		601.969.788,00	
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	93.600.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non	5 Berita Acara		5 Berita Acara	5 Berita Acara	18.700.000,00						5 Berita Acara	81.969.788,00	
			Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	18.700.000,00						1 Berita Acara	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	62.400.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1 Kasus		1 Kasus	1 Kasus	9.350.000,00						1 Kasus	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	82.400.000,00						12 Laporan	120.000.000,00	
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						62.400.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	62.400.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR						9.350.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1 Kasus		1 Kasus	1 Kasus	9.350.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Kasus	25.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku						93.600.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	93.600.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang						82.400.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	82.400.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Laporan	120.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.	Penilaian Perwujudan RTR						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.	Penyelesaian Sengketa Penataan						18.700.000,00							25.000.000,00	
		Terselesaikan sengketa penataan ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	18.700.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Berita Acara	25.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal						18.700.000,00							81.969.788,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	5 Berita Acara		5 Berita Acara	5 Berita Acara	18.700.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		5 Berita Acara	81.969.788,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang						428.857.400,00					Masyarakat dan Pemerintah Kota Blitar		250.150.000,00	
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	-		-	-	69.900.000,00						-	150.000,00	
	1.03.12.2.	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota						69.900.000,00							150.000,00	
		Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	69.900.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		-	150.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						354.165.000,00							849.000.322,00	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						354.165.000,00							849.000.322,00	
46,	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**						26.400.000,00							45.000.000,00	
		Meningkatnya penyelesaian Sengketa Tanah Garapan						13.200.000,00							45.000.000,00	
			1.Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	13.200.000,00						100 Persentase	45.000.000,00	
	2.10.04.2. 01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						26.400.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Kota Blitar		45.000.000,00	
		Jumlah sengketa tanah garapan yang terselesaikan						26.400.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Kota Blitar		45.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu)	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	13.200.000,00						1 Berita Acara	25.000.000,00	
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.200.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
	2.10.04.2. 01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah						13.200.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	13.200.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Berita Acara	25.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2.10.04.2. 01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						13.200.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.200.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
47,	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**						10.725.000,00							120.000.000,00	
		Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan						10.725.000,00							120.000.000,00	
			1.Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	100 Persentase		0 Persentase	100 Persentase	10.725.000,00						100 Persentase	120.000.000,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						10.725.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Kota Blitar		120.000.000,00	
		Jumlan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang terselesaikan						10.725.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Kota Blitar		120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.600.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.125.000,00						1 Laporan	70.000.000,00	
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah						6.600.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.600.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2.10.05.2.01.0004	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						4.125.000,00							70.000.000,00	
		Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.125.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Laporan	70.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
48,	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**						22.000.000,00							184.000.322,00	
		Meningkatnya pengelolaan tanah kosong						22.000.000,00							184.000.322,00	
			999.Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	25 Persentase		5 Persentase	10 Persentase	22.000.000,00						15 Persentase	184.000.322,00	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong						22.000.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Kota Blitar		184.000.322,00	
		Persentase tanah kosong yang berhasil diinventarisasi dan dimanfaatkan						22.000.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Kota Blitar		184.000.322,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu)	10 Berita Acara		10 Berita Acara	10 Berita Acara	13.200.000,00						10 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.800.000,00						1 Laporan	134.000.322,00	
	2.10.08.2.	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah						8.800.000,00							134.000.322,00	
		Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.800.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Laporan	134.000.322,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2.10.08.2.	Koordinasi Pemanfaatan Tanah						13.200.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi pemanfataan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	10 Berita Acara		10 Berita Acara	10 Berita Acara	13.200.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		10 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
49,	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**						295.040.000,00							500.000.000,00	
		Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah						295.040.000,00							250.000.000,00	
			999.Persentase tanah aset yang bersertifikat	98 %		90 %	92 %	295.040.000,00						94 %	250.000.000,00	
	2.10.10.2. 01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota						295.040.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Kota Blitar		500.000.000,00	
		Jumlan tanah aset pemerintah kota bersertifikat						295.040.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Kota Blitar		500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	206.290.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu)	53 Laporan		53 Laporan	53 Laporan	88.750.000,00						53 Laporan	250.000.000,00	
	2.10.10.2. 01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah						88.750.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	53 Laporan		53 Laporan	53 Laporan	88.750.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		53 Laporan	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2.10.10.2. 01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah						206.290.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	206.290.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						8.360.180.150,00							10.440.784.000,00	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						8.360.180.150,00							10.440.784.000,00	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						8.360.180.150,00							10.440.784.000,00	
50,	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						4.487.180.783,40							5.694.242.760,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						4.484.180.783,40							5.689.442.760,00	
			1.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	4.484.180.783,40						100 %	5.689.442.760,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.280.800,00					ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan		14.219.560,00	
		Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar						9.280.800,00					ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan		14.219.560,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	2.280.800,00						1 Berita Acara	2.736.960,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.000.000,00						1 Berita Acara	2.400.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	1.000.000,00						1 Data	2.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00						4 Dokumen	1.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	1.000.000,00						13 Dokumen	1.378.600,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	3.000.000,00						17 Laporan	4.104.000,00	
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.000.000,00							1.200.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		4 Dokumen	1.200.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000,00							4.104.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	3.000.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		17 Laporan	4.104.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						1.000.000,00							2.400.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	1.000.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Data	2.400.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat						2.280.800,00							2.736.960,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	2.280.800,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Berita Acara	2.736.960,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						1.000.000,00							1.378.600,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	1.000.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		13 Dokumen	1.378.600,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis						1.000.000,00							2.400.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.000.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Berita Acara	2.400.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.176.260.048,40					ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan		3.889.378.826,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						3.176.260.048,40					ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan		3.889.378.826,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.260.000,00						12 Laporan	2.712.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.174.000.048,40						25 Orang/bulan	3.886.666.826,00	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.174.000.048,40							3.886.666.826,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		25 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.174.000.048,40	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		25 Orang/bulan	3.886.666.826,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.260.000,00							2.712.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.260.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		12 Laporan	2.712.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.000.000,00					ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan		2.400.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah						2.000.000,00					ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan		2.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	2.000.000,00						9 Laporan	2.400.000,00	
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.000.000,00							2.400.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan		9 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		9 Laporan	2.400.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						65.628.800,00					ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan		119.520.960,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						65.628.800,00					ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan		119.520.960,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	50 Orang		50 Orang	50 Orang	65.628.800,00						50 Orang	76.008.960,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	3 Paket		3 Paket	3 Paket	0,00						3 Paket	43.512.000,00	
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							43.512.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		3 Paket	0 Paket	0,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		3 Paket	43.512.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						65.628.800,00							76.008.960,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	65.628.800,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		50 Orang	76.008.960,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						233.230.420,00					ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan		256.302.780,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						233.230.420,00					ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan		256.302.780,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.448.000,00						4 Dokumen	2.937.600,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	120.150.000,00						40 Laporan	120.624.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	30 Paket		30 Paket	30 Paket	49.839.500,00						30 Paket	59.823.900,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.030.500,00						1 Paket	18.036.840,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.869.920,00						1 Paket	5.844.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	30.432.500,00						3 Paket	36.593.640,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.460.000,00						4 Paket	12.442.800,00	
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.869.920,00							5.844.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.869.920,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Paket	5.844.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.432.500,00							36.593.640,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	30.432.500,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		3 Paket	36.593.640,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.460.000,00							12.442.800,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.460.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		4 Paket	12.442.800,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						49.839.500,00							59.823.900,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	49.839.500,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		30 Paket	59.823.900,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.030.500,00							18.036.840,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.030.500,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Paket	18.036.840,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						120.150.000,00							120.624.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	25 Laporan	120.150.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		40 Laporan	120.624.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.448.000,00							2.937.600,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.448.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		4 Dokumen	2.937.600,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						96.159.400,00					ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan		121.618.584,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						96.159.400,00					ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan		121.618.584,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		22 Unit	5 Unit	29.622.800,00						5 Unit	66.714.096,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		5 Unit	4 Unit	66.536.600,00						4 Unit	54.904.488,00	
	1.04.01.2.	Pengadaan Mebel						29.622.800,00							66.714.096,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		22 Unit	22 Unit	29.622.800,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		5 Unit	66.714.096,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						66.536.600,00							54.904.488,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		5 Unit	3 Unit	66.536.600,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		4 Unit	54.904.488,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						687.230.160,00					ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan		1.057.091.520,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						687.230.160,00					ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan		1.057.091.520,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	60.510.000,00						36 Laporan	72.244.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	286 Laporan		286 Laporan	286 Laporan	626.720.160,00						286 Laporan	984.846.720,00	
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						60.510.000,00							72.244.800,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	60.510.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		36 Laporan	72.244.800,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						626.720.160,00							984.846.720,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	286 Laporan		286 Laporan	286 Laporan	626.720.160,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		286 Laporan	984.846.720,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						217.391.155,00					ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan		233.710.530,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						217.391.155,00					ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan		233.710.530,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	75.329.195,00						8 Unit	89.871.354,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	71.537.960,00						2 Unit	68.731.296,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	20 Unit		20 Unit	20 Unit	30.540.000,00						20 Unit	36.560.880,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		1 Unit	1 Unit	39.984.000,00						1 Unit	38.547.000,00	
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						71.537.960,00							68.731.296,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	71.537.960,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		2 Unit	68.731.296,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						75.329.195,00							89.871.354,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	75.329.195,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		8 Unit	89.871.354,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.540.000,00							36.560.880,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	15 Unit	30.540.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		20 Unit	36.560.880,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						39.984.000,00							38.547.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	39.984.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Unit	38.547.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
51,	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						659.143.799,00							810.911.600,00	
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah						653.128.799,00							804.911.600,00	
			1.Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang	100 %		100 %	100 %	653.128.799,00						100 %	804.911.600,00	
			999.Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %		100 %	100 %	653.128.799,00						100 %	804.911.600,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program						109.750.000,00					Masyarakat Kota Blitar		60.599.500,00	
		Tersedianya data guna penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau reloksi program						109.750.000,00					Masyarakat Kota Blitar		60.599.500,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.375.000,00						1 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.375.000,00						1 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	107.000.000,00						1 Dokumen	48.599.500,00	
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus						107.000.000,00							48.599.500,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	107.000.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Dokumen	48.599.500,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						1.375.000,00							6.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.375.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Dokumen	6.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						1.375.000,00							6.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.375.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Dokumen	6.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program						16.059.000,00					Masyarakat Kota Blitar		22.945.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah						16.059.000,00					Masyarakat Kota Blitar		22.945.200,00	
			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	40 Orang		40 Orang	40 Orang	4.374.000,00						40 Orang	6.163.200,00	
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah	50 Orang		50 Orang	50 Orang	11.685.000,00						50 Orang	16.782.000,00	
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana						11.685.000,00							16.782.000,00	
		Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	50 Orang		50 Orang	75 Orang	11.685.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		50 Orang	16.782.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan						4.374.000,00							6.163.200,00	
		Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	40 Orang		40 Orang	60 Orang	4.374.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		40 Orang	6.163.200,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						53.510.000,00					Masyarakat Kota Blitar		112.865.000,00	
		Tersedianya / terlaksananya rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah						53.510.000,00					Masyarakat Kota Blitar		112.865.000,00	
			Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi	3 Rumah Tangga		3 Rumah Tangga	3 Rumah Tangga	4.640.000,00						3 Rumah Tangga	58.644.000,00	
			Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang	1 Rumah Tangga		1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	4.640.000,00						1 Rumah Tangga	5.568.000,00	
	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						4.640.000,00							58.644.000,00	
		Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi	3 Rumah Tangga		3 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	4.640.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		3 Rumah Tangga	58.644.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota						4.640.000,00							5.568.000,00	
		Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang	1 Rumah Tangga		1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	4.640.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Rumah Tangga	5.568.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						479.824.799,00					Masyarakat Kota Blitar		614.501.900,00	
		Terpenuhinya tingkat hunian Rusunawa						479.824.799,00					Masyarakat Kota Blitar		614.501.900,00	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	28.538.500,00						1 Dokumen	34.246.400,00	
			Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan	2 Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian		1 Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	2 Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian	451.286.299,00						2 Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian	580.255.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah						28.538.500,00							34.246.400,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	28.538.500,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Dokumen	34.246.400,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.05.0008	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota						451.286.299,00							580.255.500,00	
		Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	2 Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)		1 Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	1 Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	451.286.299,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		2 Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	580.255.500,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Tersedianya / terlaksananya rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah						53.510.000,00					Masyarakat Kota Blitar		112.865.000,00	
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	-		-	-	32.580.000,00						-	35.838.000,00	
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	-		-	-	11.650.000,00						-	12.815.000,00	
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						32.580.000,00							35.838.000,00	
		Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	-		-	2 Unit Rumah	32.580.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		-	35.838.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota						11.650.000,00							12.815.000,00	
		Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	-		-	1 Unit Rumah	11.650.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		-	12.815.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
52,	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						988.326.735,00							1.065.830.100,00	
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman						988.326.735,00							1.065.830.100,00	
			999.Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	54.15 %		40.63 %	43.48 %	988.326.735,00						47.03 %	1.065.830.100,00	
			999.Persentase Rumah Layak Huni di kawasan kumuh	99.43 %		98.37 %	98.58 %	988.326.735,00						98.83 %	1.065.830.100,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						100.000.000,00					Masyarakat Kota Blitar		120.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						100.000.000,00					Masyarakat Kota Blitar		120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	120.000.000,00	
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP						100.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		2 Dokumen	120.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						888.326.735,00					Masyarakat Kota Blitar		945.830.100,00	
		Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						888.326.735,00					Masyarakat Kota Blitar		945.830.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.885.250,00						1 Dokumen	21.462.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	22.500.000,00						1 Laporan	27.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah		20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	245.000.000,00						20 Unit Rumah	288.288.000,00	
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	5 Ha		5 Ha	5 Ha	497.941.485,00						5 Ha	597.529.800,00	
		Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani di dalam						888.326.735,00					Masyarakat Kota Blitar		945.830.100,00	
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.885.250,00						1 Dokumen	21.462.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	22.500.000,00						1 Laporan	27.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah		20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	245.000.000,00						20 Unit Rumah	288.288.000,00	
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	5 Ha		5 Ha	5 Ha	497.941.485,00						5 Ha	597.529.800,00	
	1.04.03.2.03.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						245.000.000,00							288.288.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah		20 Unit Rumah	14 Unit Rumah	245.000.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		20 Unit Rumah	288.288.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh						22.500.000,00							27.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	22.500.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Laporan	27.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh						17.885.250,00							21.462.300,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.885.250,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Dokumen	21.462.300,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh						497.941.485,00							597.529.800,00	
		Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	5 Ha		5 Ha	4,5 Ha	497.941.485,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		5 Ha	597.529.800,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						888.326.735,00					Masyarakat Kota Blitar		945.830.100,00	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	-		-	-	105.000.000,00						-	11.550.000,00	
		Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani di dalam						888.326.735,00					Masyarakat Kota Blitar		945.830.100,00	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	-		-	-	105.000.000,00						-	11.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						105.000.000,00							11.550.000,00	
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-		-	3 Unit	105.000.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		-	11.550.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
53,	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**						1.204.175.965,60							1.636.748.800,00	
		Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani di luar kawasan kumuh						1.204.175.965,60							1.636.748.800,00	
			999.Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang	16.24 %		8.52 %	9.64 %	1.204.175.965,60						11.49 %	1.636.748.800,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						1.204.175.965,60					Masyarakat Kota Blitar		1.636.748.800,00	
		Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan						1.204.175.965,60					Masyarakat Kota Blitar		1.636.748.800,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya	50 Orang		50 Orang	50 Orang	14.900.000,00						50 Orang	17.880.000,00	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	10 Unit		9 Unit	10 Unit	105.000.000,00						10 Unit	252.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di	295 Unit Rumah		249 Unit Rumah	1302 Unit Rumah	1.084.275.965,60						257 Unit Rumah	1.366.868.800,00	
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman						1.084.275.965,60							1.366.868.800,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	295 Unit Rumah		249 Unit Rumah	50 Unit Rumah	1.084.275.965,60	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		257 Unit Rumah	1.366.868.800,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman						105.000.000,00							252.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	10 Unit		9 Unit	3 Unit	105.000.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		10 Unit	252.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya						14.900.000,00							17.880.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	50 Orang		50 Orang	50 Orang	14.900.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		50 Orang	17.880.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
54,	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						1.021.352.867,00							1.233.050.740,00	
		Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan permukiman						1.021.352.867,00							1.233.050.740,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dalam	88.37 %		76.92 %	80.48 %	1.021.352.867,00						83.33 %	1.233.050.740,00	
			2.Persentase Tempat Pemakaman Umum yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik	8.33 %		8.33 %	8.33 %	1.021.352.867,00						8.33 %	1.233.050.740,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						1.021.352.867,00					Masyarakat Kota Blitar		1.233.050.740,00	
		Meningkatnya kualitas perumahan yang dilengkapi PSU						1.021.352.867,00					Masyarakat Kota Blitar		1.233.050.740,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.800.000,00						1 Laporan	17.987.300,00	
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	3 Lokasi		2 Lokasi	3 Lokasi	577.000.000,00						3 Lokasi	692.400.000,00	
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	435.552.867,00						1 Lokasi	522.663.440,00	
		Tersedianya PSU di Areal Pemakaman Umum						1.021.352.867,00					Masyarakat Kota Blitar		1.233.050.740,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.800.000,00						1 Laporan	17.987.300,00	
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	3 Lokasi		2 Lokasi	3 Lokasi	577.000.000,00						3 Lokasi	692.400.000,00	
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	435.552.867,00						1 Lokasi	522.663.440,00	
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum						8.800.000,00							17.987.300,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.800.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Laporan	17.987.300,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						435.552.867,00							522.663.440,00	
		Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 Lokasi		1 Lokasi	2 Lokasi	435.552.867,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Lokasi	522.663.440,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						577.000.000,00							692.400.000,00	
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	3 Lokasi		2 Lokasi	2 Lokasi	577.000.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		3 Lokasi	692.400.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Satuan Polisi Pamong Praja						11.202.164.300,00							11.192.780.049,00	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						11.202.164.300,00							11.192.780.049,00	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						11.202.164.300,00							11.192.780.049,00	
55,	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						7.540.759.300,00							7.259.982.145,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						7.537.559.300,00							7.190.482.145,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	7.537.559.300,00						100 %	7.190.482.145,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.255.800,00					Anggota Satuan Polisi Pamong Praja		4.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						9.255.800,00					Anggota Satuan Polisi Pamong Praja		4.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	4.955.800,00						1 Berita Acara	1.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	500.000,00						1 Berita Acara	1.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	600.000,00						1 Data	500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	800.000,00						4 Dokumen	500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	1.200.000,00						13 Dokumen	500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	1.200.000,00						19 Laporan	500.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						800.000,00							500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	800.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		4 Dokumen	500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.200.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan		18 Laporan	16 Laporan	1.200.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		19 Laporan	500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						600.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	600.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Data	500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat						4.955.800,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	4.955.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Berita Acara	1.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						1.200.000,00							500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	1.200.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		13 Dokumen	500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis						500.000,00							1.000.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Berita Acara	1.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.563.535.000,00					Anggota Satuan Polisi Pamong Praja		6.890.028.935,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						6.563.535.000,00					Anggota Satuan Polisi Pamong Praja		6.890.028.935,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00						4 Laporan	500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan		59 Orang/bulan	59 Orang/bulan	6.562.535.000,00						59 Orang/bulan	6.889.528.935,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.562.535.000,00							6.889.528.935,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan		59 Orang/bulan	61 Orang/bulan	6.562.535.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		59 Orang/bulan	6.889.528.935,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.000.000,00							500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		4 Laporan	500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.000.000,00					Anggota Satuan Polisi Pamong Praja		500.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah						1.000.000,00					Anggota Satuan Polisi Pamong Praja		500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00						1 Laporan	500.000,00	
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.000.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Laporan	500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						9.255.800,00					Anggota Satuan Polisi Pamong Praja		5.000.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						9.255.800,00					Anggota Satuan Polisi Pamong Praja		5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	45 Orang		45 Orang	45 Orang	9.255.800,00						45 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	0 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00						0 Paket	0,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		0 Paket	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						9.255.800,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang		45 Orang	61 Orang	9.255.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		45 Orang	5.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						182.568.300,00					Anggota Satuan Polisi Pamong Praja		81.400.000,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						182.568.300,00					Anggota Satuan Polisi Pamong Praja		81.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.754.000,00						1 Dokumen	5.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00						1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00						12 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	19.620.000,00						1 Paket	7.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.000.000,00						1 Paket	3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00						1 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	27.492.300,00						4 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	19.702.000,00						6 Paket	5.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Paket	5.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						27.492.300,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	27.492.300,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		4 Paket	5.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						19.702.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	19.702.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		6 Paket	5.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						19.620.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	19.620.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Paket	7.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Paket	3.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.754.000,00							5.400.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.754.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Dokumen	5.400.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		12 Laporan	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Dokumen	1.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						36.964.600,00					Anggota Satuan Polisi Pamong Praja		0,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						36.964.600,00					Anggota Satuan Polisi Pamong Praja		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	36.964.600,00						8 Unit	0,00	
	1.05.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						36.964.600,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	3 Unit	36.964.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		8 Unit	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						250.676.036,00					Anggota Satuan Polisi Pamong Praja		194.053.210,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						250.676.036,00					Anggota Satuan Polisi Pamong Praja		194.053.210,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	104.901.100,00						12 Laporan	50.729.810,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	145.774.936,00						12 Laporan	143.323.400,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						104.901.100,00							50.729.810,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	104.901.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		12 Laporan	50.729.810,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						145.774.936,00							143.323.400,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	145.774.936,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		12 Laporan	143.323.400,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						487.503.764,00					Anggota Satuan Polisi Pamong Praja		85.000.000,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						487.503.764,00					Anggota Satuan Polisi Pamong Praja		85.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	33 Unit		33 Unit	33 Unit	237.927.400,00						33 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	15 Unit		30 Unit	15 Unit	9.795.000,00						12 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0 Unit		2 Unit	1 Unit	239.781.364,00						0 Unit	25.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						237.927.400,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit		33 Unit	30 Unit	237.927.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		33 Unit	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.795.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		30 Unit	24 Unit	9.795.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		12 Unit	10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						239.781.364,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		2 Unit	1 Unit	239.781.364,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		0 Unit	25.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
56,	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						3.461.405.000,00							3.745.902.404,00	
		Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum dan						3.461.405.000,00							3.725.902.404,00	
			1.Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	81.82 %		68.18 %	72.73 %	3.461.405.000,00						77.27 %	3.725.902.404,00	
			999.Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	98.10 Persentase		82.88 Persentase	86.68 Persentase	3.461.405.000,00						90.49 Persentase	3.725.902.404,00	
			999.Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	3.461.405.000,00						100 Persentase	3.725.902.404,00	
		Meningkatnya penanganan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						3.335.900.900,00					Masyarakat kota Blitar		2.802.600.344,00	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	45 Orang		45 Orang	45 Orang	50.050.000,00						45 Orang	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.577.600,00						12 Dokumen	21.258.900,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	94.950.100,00						1 Dokumen	115.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.272.600,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli,	1 laporan		1 laporan	1 laporan	2.692.780.700,00						1 laporan	2.551.341.444,00	
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	55 Orang		55 Orang	55 Orang	9.824.000,00						55 Orang	60.000.000,00	
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						6.577.600,00							21.258.900,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.577.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		12 Dokumen	21.258.900,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						94.950.100,00							115.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	94.950.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Dokumen	115.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat						9.824.000,00							60.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	55 Orang		55 Orang	55 Orang	9.824.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		55 Orang	60.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,						2.692.780.700,00							2.551.341.444,00	
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	2.692.780.700,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 laporan	2.551.341.444,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan						7.272.600,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.272.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Laporan	20.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja						50.050.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	45 Orang		45 Orang	45 Orang	50.050.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		45 Orang	20.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						121.480.900,00					Masyarakat kota Blitar		937.302.060,00	
		Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dan Perkada						121.480.900,00					Masyarakat kota Blitar		937.302.060,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.463.800,00						12 Laporan	12.463.800,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	72.067.592,00						1 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	35.445.408,00						12 Laporan	574.838.260,00	
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						72.067.592,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	72.067.592,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Laporan	350.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						35.445.408,00							574.838.260,00	
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	35.445.408,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		12 Laporan	574.838.260,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						13.463.800,00							12.463.800,00	
		TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.463.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		12 Laporan	12.463.800,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						4.023.200,00					Masyarakat kota Blitar		6.000.000,00	
		Meningkatnya kapasitas SDM PPNS						4.023.200,00					Masyarakat kota Blitar		6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.023.200,00						1 Laporan	6.000.000,00	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						4.023.200,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.023.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Laporan	6.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						3.335.900.900,00					Masyarakat kota Blitar		2.802.600.344,00	
		Meningkatnya penanganan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						3.335.900.900,00					Masyarakat kota Blitar		2.802.600.344,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik	-		-	-	234.339.650,01						-	0,00	
			Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan	-		-	-	119.260.350,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan	-		-	-	50.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	-		-	-	70.845.899,99						-	0,00	
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum						234.339.650,01							0,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	-		-	1 Dokumen	234.339.650,01	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0022	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						70.845.899,99							0,00	
		Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	-		-	1 Dokumen	70.845.899,99	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0023	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum						119.260.350,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	1 Dokumen	119.260.350,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0024	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/						50.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		-	15.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dan Perkada						121.480.900,00					Masyarakat kota Blitar		937.302.060,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	-		-	-	504.100,00						-	0,00	
	1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan						504.100,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	-		-	4 unit	504.100,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
57,	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						200.000.000,00							186.895.500,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non						200.000.000,00							166.895.500,00	
			999.Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	100 %		100 %	100 %	200.000.000,00						100 %	166.895.500,00	
			999.Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	200.000.000,00						100 Persentase	166.895.500,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah						173.040.800,00					Masyarakat kota Blitar		62.895.500,00	
		Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran						173.040.800,00					Masyarakat kota Blitar		62.895.500,00	
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan	12 Orang		12 Orang	12 Orang	28.800.000,00						12 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	788.500,00						12 Dokumen	7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						0 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.318.900,00						1 Dokumen	20.895.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.424.100,00						12 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai	4 Unit		10 Unit	4 Unit	30.709.300,00						3 Unit	10.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						6.318.900,00							20.895.500,00	
		Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.318.900,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Dokumen	20.895.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						6.424.100,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.424.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		12 Laporan	5.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						788.500,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	788.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		12 Dokumen	7.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran						28.800.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	12 Orang		12 Orang	12 Orang	28.800.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		12 Orang	20.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)						100.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		0 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						30.709.300,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4 Unit		10 Unit	2 Unit	30.709.300,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		3 Unit	10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						14.544.400,00					Masyarakat kota Blitar		64.000.000,00	
		Meningkatya inspeksi peralatan proteksi kebakaran sesuai standart						14.544.400,00					Masyarakat kota Blitar		64.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.779.100,00						1 Dokumen	9.000.000,00	
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						5.779.100,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.779.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Dokumen	9.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						12.414.800,00					Masyarakat kota Blitar		60.000.000,00	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran						12.414.800,00					Masyarakat kota Blitar		60.000.000,00	
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan	21 Desa/Kelu rahan		21 Desa/Kelu rahan	21 Desa/Kelu rahan	7.964.800,00						21 Desa/Kelu rahan	40.000.000,00	
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	140 Orang		140 Orang	140 Orang	4.450.000,00						140 Orang	20.000.000,00	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						4.450.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	140 Orang		140 Orang	35 Orang	4.450.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		140 Orang	20.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran						7.964.800,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	21 Desa/Kelu rahan		21 Desa/Kelu rahan	21 Desa/Kelu rahan	7.964.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		21 Desa/Kelu rahan	40.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatya inspeksi peralatan proteksi kebakaran sesuai standart						14.544.400,00					Masyarakat kota Blitar		64.000.000,00	
			Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus	-		-	-	8.765.300,00						-	55.000.000,00	
	1.05.04.2.02.0003	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						8.765.300,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-		-	1 Laporan	8.765.300,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		-	55.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						3.660.788.550,00							3.900.822.000,00	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						3.660.788.550,00							3.900.822.000,00	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						3.660.788.550,00							3.900.822.000,00	
58,	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						3.235.932.700,00							3.399.728.000,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						3.235.482.700,00							3.399.491.800,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	3.235.482.700,00						100 %	3.399.491.800,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.890.000,00					Perangkat Daerah (BPBD Kota Blitar)		5.134.200,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						4.890.000,00					Perangkat Daerah (BPBD Kota Blitar)		5.134.200,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	2.750.000,00						1 Berita Acara	2.887.500,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	495.000,00						1 Berita Acara	520.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	220.000,00						1 Data	231.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	225.000,00						2 Dokumen	236.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	975.000,00						13 Dokumen	1.023.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	225.000,00						20 Laporan	236.200,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						225.000,00							236.500,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	225.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		2 Dokumen	236.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						225.000,00							236.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	225.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		20 Laporan	236.200,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						220.000,00							231.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	220.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Data	231.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat						2.750.000,00							2.887.500,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	2.750.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Berita Acara	2.887.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						975.000,00							1.023.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	975.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		13 Dokumen	1.023.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis						495.000,00							520.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	495.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Berita Acara	520.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.227.738.350,00					Perangkat Daerah (BPBD Kota Blitar)		2.339.125.300,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						2.227.738.350,00					Perangkat Daerah (BPBD Kota Blitar)		2.339.125.300,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	248.000,00						18 Laporan	260.400,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	204 Orang/bulan		204 Orang/bulan	204 Orang/bulan	2.227.490.350,00						204 Orang/bulan	2.338.864.900,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.227.490.350,00							2.338.864.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	204 Orang/bulan		204 Orang/bulan	204 Orang/bulan	2.227.490.350,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		204 Orang/bulan	2.338.864.900,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						248.000,00							260.400,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	248.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		18 Laporan	260.400,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						225.000,00					Perangkat Daerah (BPBD Kota Blitar)		236.200,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah						225.000,00					Perangkat Daerah (BPBD Kota Blitar)		236.200,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	225.000,00						4 Laporan	236.200,00	
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						225.000,00							236.200,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	225.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		4 Laporan	236.200,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						108.869.350,00					Perangkat Daerah (BPBD Kota Blitar)		111.062.800,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah						108.869.350,00					Perangkat Daerah (BPBD Kota Blitar)		111.062.800,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	140 Orang		140 Orang	140 Orang	81.473.350,00						140 Orang	82.297.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	2 Paket		2 Paket	2 Paket	27.396.000,00						2 Paket	28.765.800,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						27.396.000,00							28.765.800,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	27.396.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		2 Paket	28.765.800,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						81.473.350,00							82.297.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang		140 Orang	140 Orang	81.473.350,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		140 Orang	82.297.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						122.640.500,00					Perangkat Daerah (BPBD Kota Blitar)		134.022.200,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah						122.640.500,00					Perangkat Daerah (BPBD Kota Blitar)		134.022.200,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.754.000,00						12 Dokumen	2.891.700,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	306.000,00						1 Dokumen	321.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	86.521.000,00						30 Laporan	90.847.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	12.386.000,00						1 Paket	18.255.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.948.100,00						1 Paket	4.145.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.422.400,00						1 Paket	7.793.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.601.500,00						1 Paket	6.931.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.701.500,00						1 Paket	2.836.500,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.422.400,00							7.793.500,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.422.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Paket	7.793.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.601.500,00							6.931.500,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.601.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Paket	6.931.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.701.500,00							2.836.500,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.701.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Paket	2.836.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						12.386.000,00							18.255.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	12.386.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Paket	18.255.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.948.100,00							4.145.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.948.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Paket	4.145.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.754.000,00							2.891.700,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.754.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		12 Dokumen	2.891.700,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						86.521.000,00							90.847.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	86.521.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		30 Laporan	90.847.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						306.000,00							321.500,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	306.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Dokumen	321.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						31.842.200,00					Perangkat Daerah (BPBD Kota Blitar)		33.433.900,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						31.842.200,00					Perangkat Daerah (BPBD Kota Blitar)		33.433.900,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		17 Unit	10 Unit	2.330.800,00						10 Unit	2.447.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		5 Unit	2 Unit	29.511.400,00						2 Unit	30.986.900,00	
	1.05.01.2.	Pengadaan Mebel						2.330.800,00							2.447.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		17 Unit	2 Unit	2.330.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		10 Unit	2.447.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						29.511.400,00							30.986.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		5 Unit	2 Unit	29.511.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		2 Unit	30.986.900,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						580.750.550,00					Perangkat Daerah (BPBD Kota Blitar)		609.788.000,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						580.750.550,00					Perangkat Daerah (BPBD Kota Blitar)		609.788.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	71.540.000,00						36 Laporan	75.117.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	509.210.550,00						13 Laporan	534.671.000,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						71.540.000,00							75.117.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	71.540.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		36 Laporan	75.117.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						509.210.550,00							534.671.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	509.210.550,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		13 Laporan	534.671.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						158.976.750,00					Perangkat Daerah (BPBD Kota Blitar)		166.925.400,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						158.976.750,00					Perangkat Daerah (BPBD Kota Blitar)		166.925.400,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	96.751.300,00						6 Unit	101.588.900,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	21.707.000,00						5 Unit	22.792.300,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit		18 Unit	20 Unit	4.947.200,00						20 Unit	5.194.500,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	30 Unit		39 Unit	30 Unit	15.347.400,00						30 Unit	16.114.700,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 Unit		2 Unit	2 Unit	20.223.850,00						2 Unit	21.235.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						21.707.000,00							22.792.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	21.707.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		5 Unit	22.792.300,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						96.751.300,00							101.588.900,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	7 Unit	96.751.300,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		6 Unit	101.588.900,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.	Pemeliharaan Mebel						4.947.200,00							5.194.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit		18 Unit	13 Unit	4.947.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		20 Unit	5.194.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.347.400,00							16.114.700,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		39 Unit	28 Unit	15.347.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		30 Unit	16.114.700,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.223.850,00							21.235.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.223.850,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		2 Unit	21.235.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
59,	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						424.855.850,00							501.094.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						265.089.850,00							320.915.500,00	
			999.Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100 Persentase		80 Persentase	85 Persentase	265.089.850,00						90 Persentase	320.915.500,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						115.575.550,00					Warga Masyarakat		151.738.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						115.575.550,00					Warga Masyarakat		151.738.000,00	
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00						0 Dokumen	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman	800 Orang		600 Orang	650 Orang	65.575.550,00						700 Orang	96.738.000,00	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						65.575.550,00							96.738.000,00	
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	800 Orang		600 Orang	300 Orang	65.575.550,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		700 Orang	96.738.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		0 Dokumen	55.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						149.514.300,00					Warga Masyarakat, Aparatur		169.177.500,00	
		Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						149.514.300,00					Warga Masyarakat, Aparatur		169.177.500,00	
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap	21 Kawasan		21 Kawasan	21 Kawasan	22.753.100,00						21 Kawasan	36.078.300,00	
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di lawasan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	4.950.000,00						12 laporan	5.197.500,00	
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal	27 Orang		27 Orang	27 Orang	3.076.700,00						27 Orang	3.230.500,00	
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat	100 Orang		100 Orang	100 Orang	9.336.400,00						100 Orang	9.803.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						9.336.400,00							9.803.200,00	
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	9.336.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		100 Orang	9.803.200,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan						22.753.100,00							36.078.300,00	
		Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	21 Kawasan		21 Kawasan	21 Kawasan	22.753.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		21 Kawasan	36.078.300,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						3.076.700,00							3.230.500,00	
		Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	27 Orang		27 Orang	35 Orang	3.076.700,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		27 Orang	3.230.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota						4.950.000,00							5.197.500,00	
		Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan		12 laporan	12 laporan	4.950.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		12 laporan	5.197.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pascabencana						125.457.800,00							144.155.500,00	
			999.Persentase Penanganan Pasca Bencana	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	125.457.800,00						100 Persentase	144.155.500,00	
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						125.457.800,00					Perangkat Daerah, Multihelix		144.155.500,00	
		Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)/Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)						125.457.800,00					Perangkat Daerah, Multihelix		144.155.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi	0 Orang		0 Orang	20 Orang	59.151.000,00						0 Orang	62.108.500,00	
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.630.400,00						2 Dokumen	2.762.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.777.400,00						1 Dokumen	22.692.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.200.000,00						4 Laporan	2.310.000,00	
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	52.500.000,00	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.699.000,00						2 Kegiatan	1.783.000,00	
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						9.777.400,00							22.692.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.777.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Dokumen	22.692.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan						2.630.400,00							2.762.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.630.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		2 Dokumen	2.762.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						2.200.000,00							2.310.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.200.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		4 Laporan	2.310.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota						59.151.000,00							62.108.500,00	
		Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	0 Orang		0 Orang	20 Orang	59.151.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		0 Orang	62.108.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						1.699.000,00							1.783.000,00	
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.699.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		2 Kegiatan	1.783.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota						50.000.000,00							52.500.000,00	
		Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		1 Dokumen	52.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap						34.308.200,00							36.023.000,00	
			999.Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %		100 %	100 %	34.308.200,00						100 %	36.023.000,00	
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						34.308.200,00					Warga Masyarakat		36.023.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban						34.308.200,00					Warga Masyarakat		36.023.000,00	
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek	25 Orang		25 Orang	25 Orang	16.789.500,00						25 Orang	17.629.000,00	
			Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.115.800,00						2 Dokumen	2.221.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.779.500,00						2 Dokumen	5.018.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi	50 Orang		50 Orang	50 Orang	3.743.400,00						50 Orang	3.930.500,00	
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50 Orang		50 Orang	50 Orang	6.880.000,00						50 Orang	7.224.000,00	
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						4.779.500,00							5.018.000,00	
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.779.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		2 Dokumen	5.018.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						6.880.000,00							7.224.000,00	
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50 Orang		50 Orang	50 Orang	6.880.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		50 Orang	7.224.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana						2.115.800,00							2.221.500,00	
		Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.115.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		2 Dokumen	2.221.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota						16.789.500,00							17.629.000,00	
		Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	25 Orang		25 Orang	35 Orang	16.789.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		25 Orang	17.629.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						3.743.400,00							3.930.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang		50 Orang	50 Orang	3.743.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		50 Orang	3.930.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						149.514.300,00					Warga Masyarakat, Aparatur		169.177.500,00	
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang	-		-	-	9.874.100,00						-	10.367.800,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi	-		-	-	99.524.000,00						-	104.500.200,00	
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota						9.874.100,00							10.367.800,00	
		Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	-		-	1 Kegiatan	9.874.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		-	10.367.800,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						99.524.000,00							104.500.200,00	
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	280 Orang	99.524.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		-	104.500.200,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Dinas Sosial						12.048.666.400,00							20.957.670.790,00	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						12.048.666.400,00							20.957.670.790,00	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						12.048.666.400,00							20.957.670.790,00	
60,	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						3.837.874.578,00							5.056.250.625,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						3.837.124.578,00							5.052.250.625,00	
			1.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	3.837.124.578,00						100 %	5.052.250.625,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.650.000,00					ASN Dinsos		64.966.670,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah						6.650.000,00					ASN Dinsos		64.966.670,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.750.000,00						1 Berita Acara	3.750.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	400.000,00						1 Berita Acara	1.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	23 Data		23 Data	23 Data	500.000,00						23 Data	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	250.000,00						2 Dokumen	3.093.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	250.000,00						11 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	3.500.000,00						25 Laporan	53.123.670,00	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						250.000,00							3.093.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	250.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		2 Dokumen	3.093.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.500.000,00							53.123.670,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	3.500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		25 Laporan	53.123.670,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						500.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	23 Data		23 Data	23 Data	500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		23 Data	1.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat						1.750.000,00							3.750.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.750.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Berita Acara	3.750.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						250.000,00							3.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	250.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		11 Dokumen	3.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis						400.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	400.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Berita Acara	1.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat						2.967.896.575,00					ASN Dinsos		3.647.012.534,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						2.967.896.575,00					ASN Dinsos		3.647.012.534,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000,00						12 Laporan	2.847.130,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan		26 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.967.646.575,00						28 Orang/bulan	3.644.165.404,00	
	1.06.01.2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.967.646.575,00							3.644.165.404,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan		26 Orang/bulan	264 Orang/bulan	2.967.646.575,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		28 Orang/bulan	3.644.165.404,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2. 02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						250.000,00							2.847.130,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		12 Laporan	2.847.130,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						250.000,00					ASN Dinsos		2.500.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar						250.000,00					ASN Dinsos		2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	250.000,00						10 Laporan	2.500.000,00	
	1.06.01.2. 03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						250.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan		10 Laporan	12 Laporan	250.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		10 Laporan	2.500.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						128.958.025,00					ASN Dinsos		89.523.650,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						128.958.025,00					ASN Dinsos		89.523.650,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	30 Orang		26 Orang	27 Orang	93.454.025,00						28 Orang	65.323.650,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.504.000,00						1 Paket	24.200.000,00	
	1.06.01.2. 05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						35.504.000,00							24.200.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	35.504.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Paket	24.200.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2. 05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						93.454.025,00							65.323.650,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		26 Orang	66 Orang	93.454.025,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		28 Orang	65.323.650,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						203.038.741,00					ASN Dinsos		181.645.645,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						203.038.741,00					ASN Dinsos		181.645.645,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.160.500,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2040 Dokumen		2040 Dokumen	2040 Dokumen	5.131.500,00						2040 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		25 Laporan	30 Laporan	121.766.293,00						30 Laporan	91.492.395,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	10 Paket		10 Paket	10 Paket	28.214.700,00						10 Paket	28.713.600,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	13.248.100,00						1 Paket	16.246.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.605.100,00						1 Paket	9.990.700,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	13.345.200,00						1 Paket	13.294.200,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	13.567.348,00						1 Paket	18.908.750,00	
	1.06.01.2. 06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.605.100,00							9.990.700,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	5.605.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Paket	9.990.700,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.345.200,00							13.294.200,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	13.345.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Paket	13.294.200,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2. 06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						13.567.348,00							18.908.750,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	13.567.348,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Paket	18.908.750,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						28.214.700,00							28.713.600,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	14 Paket	28.214.700,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		10 Paket	28.713.600,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.248.100,00							16.246.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	13.248.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Paket	16.246.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2. 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.160.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.160.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berk etahanan sosial dan budaya		12 Dokumen	0,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						121.766.293,00							91.492.395,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		25 Laporan	40 Laporan	121.766.293,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		30 Laporan	91.492.395,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.131.500,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2040 Dokumen		2040 Dokumen	2040 Dokumen	5.131.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		2040 Dokumen	3.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						15.500.000,00					ASN Dinsos		75.000.000,00	
		Terpenuhinya penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						15.500.000,00					ASN Dinsos		75.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		3 Unit	3 Unit	15.500.000,00						4 Unit	75.000.000,00	
	1.06.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						15.500.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		3 Unit	1 Unit	15.500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		4 Unit	75.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						402.931.184,00					ASN Dinsos		718.437.126,00	
		Terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan perkantoran						402.931.184,00					ASN Dinsos		718.437.126,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	75.466.280,00						48 Laporan	87.486.324,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	327.464.904,00						13 Laporan	630.950.802,00	
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						75.466.280,00							87.486.324,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	48 Laporan		48 Laporan	36 Laporan	75.466.280,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		48 Laporan	87.486.324,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						327.464.904,00							630.950.802,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	327.464.904,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		13 Laporan	630.950.802,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						112.650.053,00					ASN Dinsos		277.165.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan penunjang kinerja perangkat daerah						112.650.053,00					ASN Dinsos		277.165.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	67.630.353,00						3 Unit	69.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	13 Unit		13 Unit	13 Unit	22.938.000,00						13 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	50 Unit		50 Unit	50 Unit	22.081.700,00						50 Unit	28.165.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	155.000.000,00	
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan						22.938.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	22.938.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		13 Unit	25.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau						67.630.353,00							69.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	67.630.353,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		3 Unit	69.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						22.081.700,00							28.165.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	27 Unit	22.081.700,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		50 Unit	28.165.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							155.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Unit	155.000.000,00	Dinas Sosial
61,	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						477.149.900,00							653.408.024,00	
		Meningkatnya daya dukung potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial						477.149.900,00							653.408.024,00	
			1.Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar	100 %		100 %	100 %	477.149.900,00						100 %	653.408.024,00	
		Meningkatnya peran dan fungsi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial						477.149.900,00					PSKS, Organisasi Sosial, Janda Perintis Kemerdekaan,		653.408.024,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan	20 Lembaga		20 Lembaga	20 Lembaga	228.780.250,00						20 Lembaga	246.145.124,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan,	500 Orang		500 Orang	500 Orang	55.842.050,00						500 Orang	144.296.600,00	
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial	47 Orang		47 Orang	47 Orang	184.059.800,00						47 Orang	249.646.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh	2 Orang		2 Orang	2 Orang	3.312.000,00						2 Orang	3.320.000,00	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						228.780.250,00							246.145.124,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan	20 Lembaga		20 Lembaga	20 Lembaga	228.780.250,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		20 Lembaga	246.145.124,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda						3.312.000,00							3.320.000,00	
		Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	2 Orang		2 Orang	1 Orang	3.312.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		2 Orang	3.320.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial						55.842.050,00							144.296.600,00	
		Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan	500 Orang		500 Orang	500 Orang	55.842.050,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		500 Orang	144.296.600,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota						184.059.800,00							249.646.300,00	
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	47 Orang		47 Orang	47 Orang	184.059.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		47 Orang	249.646.300,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						477.149.900,00					PSKS, Organisasi Sosial, Janda Perintis Kemerdekaan,		653.408.024,00	
		Meningkatnya peran dan fungsi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial						477.149.900,00					PSKS, Organisasi Sosial, Janda Perintis Kemerdekaan,		653.408.024,00	
			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-		-	-	5.155.800,00						-	10.000.000,00	
	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi						5.155.800,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-		-	47 Orang	5.155.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		-	10.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
62,	1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						662.185.700,00							888.071.000,00	
		Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial						657.385.700,00							878.071.000,00	
			1.Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100 %		100 %	100 %	657.385.700,00						100 %	878.071.000,00	
			999.Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100 %		100 %	100 %	657.385.700,00						100 %	878.071.000,00	
			999.Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %		100 %	100 %	657.385.700,00						100 %	878.071.000,00	
			999.Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100 %		100 %	100 %	657.385.700,00						100 %	878.071.000,00	
			999.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan	14.63 %		14.63 %	14.63 %	657.385.700,00						14.63 %	878.071.000,00	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti						647.457.700,00					PPKS di luar panti		858.071.000,00	
		Terpenuhinya rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar						647.457.700,00					PPKS di luar panti		858.071.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan	20 Orang		25 Orang	20 Orang	28.440.000,00						20 Orang	23.812.100,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	35 Orang		35 Orang	35 Orang	28.560.000,00						35 Orang	39.306.300,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	14 Orang		20 Orang	14 Orang	15.198.000,00						20 Orang	43.173.800,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	19.430.000,00						50 Orang	32.074.900,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	1.800.000,00						10 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		25 Orang	25 Orang	2.800.000,00						25 Orang	6.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan	5 Orang		0 Orang	5 Orang	1.800.000,00						5 Orang	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan	4 Orang		0 Orang	4 Orang	1.800.000,00						4 Orang	3.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	22 Orang		22 Orang	22 Orang	64.840.300,00						22 Orang	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	145 Orang		145 Orang	145 Orang	274.871.300,00						145 Orang	377.335.400,00	
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	42 Orang		42 Orang	42 Orang	30.832.500,00						42 Orang	55.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	52 Orang		52 Orang	52 Orang	24.879.200,00						52 Orang	15.275.700,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	5 Orang		5 Orang	5 Orang	1.200.000,00						5 Orang	3.475.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan	243 Orang		243 Orang	243 Orang	124.874.800,00						243 Orang	175.833.600,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	200 Orang		200 Orang	200 Orang	26.131.600,00						200 Orang	27.284.200,00	
	1.06.04.2.	Penyediaan Permakanan						274.871.300,00							377.335.400,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	145 Orang		145 Orang	145 Orang	274.871.300,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		145 Orang	377.335.400,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.	Penyed						24.879.200,00							15.275.700,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Orang		52 Orang	52 Orang	24.879.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		52 Orang	15.275.700,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.	Penyediaa						15.198.000,00							43.173.800,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang		20 Orang	11 Orang	15.198.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		20 Orang	43.173.800,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2. 01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						1.800.000,00							3.500.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan	4 Orang		0 Orang	4 Orang	1.800.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		4 Orang	3.500.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2. 01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						124.874.800,00							175.833.600,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	243 Orang		243 Orang	288 Orang	124.874.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		243 Orang	175.833.600,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2. 01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan						26.131.600,00							27.284.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang		200 Orang	210 Orang	26.131.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		200 Orang	27.284.200,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						28.560.000,00							39.306.300,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang		35 Orang	35 Orang	28.560.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		35 Orang	39.306.300,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.	Pemberian Layanan Data dan						19.430.000,00							32.074.900,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	19.430.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		50 Orang	32.074.900,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.	Pemberian Layanan Kedaruratan						2.800.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		25 Orang	25 Orang	2.800.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		25 Orang	6.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						1.800.000,00							1.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan	5 Orang		0 Orang	5 Orang	1.800.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		5 Orang	1.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.	Pemberian Layanan Rujukan						28.440.000,00							23.812.100,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		25 Orang	25 Orang	28.440.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		20 Orang	23.812.100,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan						1.200.000,00							3.475.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	5 Orang		5 Orang	5 Orang	1.200.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		5 Orang	3.475.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0016	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)						1.800.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	1.800.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		10 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan						64.840.300,00							50.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang		22 Orang	53 Orang	64.840.300,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		22 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.2.01.0018	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial						30.832.500,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	42 Orang		42 Orang	25 Orang	30.832.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		42 Orang	55.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						14.728.000,00					PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti		30.000.000,00	
		Terpenuhinya rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial						14.728.000,00					PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti		30.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	3.040.000,00						2 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan	4 Orang		4 Orang	4 Orang	1.200.000,00						4 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)	4 Orang		3 Orang	4 Orang	10.488.000,00						4 Orang	20.000.000,00	
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						1.200.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang		4 Orang	4 Orang	1.200.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		4 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Rujukan						3.040.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang		2 Orang	4 Orang	3.040.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		2 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02.0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan						10.488.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang		3 Orang	3 Orang	10.488.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		4 Orang	20.000.000,00	Dinas Sosial
63,	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						6.861.056.322,00							14.096.428.871,00	
		Meningkatnya kecukupan perlindungan dan jaminan sosial						6.861.056.322,00							14.096.428.871,00	
			1.Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	40 Persentase		30 Persentase	32.5 Persentase	6.861.056.322,00						35 Persentase	14.096.428.871,00	
			2.Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	6.861.056.322,00						100 Persentase	14.096.428.871,00	
			999.Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang teraredusi dari kemiskinan	3.27 %		0.65 %	1.31 %	6.861.056.322,00						1.96 %	14.096.428.871,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						6.861.056.322,00					Warga miskin dan rentan		14.096.428.871,00	
		Meningkatnya keterampilan PPKS						6.861.056.322,00					Warga miskin dan rentan		14.096.428.871,00	
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang	7751 Orang		7751 Orang	7751 Orang	0,00						7751 Orang	80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan	80 Orang		80 Orang	80 Orang	115.639.000,00						80 Orang	479.949.549,00	
			Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	150.000,00						1 Orang	10.000,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7751 Orang		7751 Orang	7751 Orang	6.705.476.322,00						7751 Orang	13.516.469.322,00	
		Terpenuhinya bantuan sosial bagi PPKS						6.861.056.322,00					Warga miskin dan rentan		14.096.428.871,00	
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang	7751 Orang		7751 Orang	7751 Orang	0,00						7751 Orang	80.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan	80 Orang		80 Orang	80 Orang	115.639.000,00						80 Orang	479.949.549,00	
			Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	150.000,00						1 Orang	10.000,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7751 Orang		7751 Orang	7751 Orang	6.705.476.322,00						7751 Orang	13.516.469.322,00	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						0,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	7751 Orang		7751 Orang	7616 Orang	0,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		7751 Orang	80.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						115.639.000,00							479.949.549,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan	80 Orang		80 Orang	80 Orang	115.639.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		80 Orang	479.949.549,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						6.705.476.322,00							13.516.469.322,00	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7751 Orang		7751 Orang	8276 Orang	6.705.476.322,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		7751 Orang	13.516.469.322,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin						150.000,00							10.000,00	
		Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang		1 Orang	1 Orang	150.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Orang	10.000,00	Dinas Sosial
		Meningkatnya keterampilan PPKS						6.861.056.322,00					Warga miskin dan rentan		14.096.428.871,00	
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan	-		-	-	39.791.000,00						-	20.000.000,00	
		Terpenuhinya bantuan sosial bagi PPKS						6.861.056.322,00					Warga miskin dan rentan		14.096.428.871,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan	-		-	-	39.791.000,00						-	20.000.000,00	
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						39.791.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	-		-	60 Usulan	39.791.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		-	20.000.000,00	Dinas Sosial
64,	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						179.205.500,00							228.512.270,00	
		Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban						179.205.500,00							219.512.270,00	
			1.Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat	100 %		100 %	100 %	179.205.500,00						100 %	219.512.270,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						35.907.000,00					Korban bencana alam, sosial dan non alam		55.573.770,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana						35.907.000,00					Korban bencana alam, sosial dan non alam		55.573.770,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan	30 Orang		0 Orang	30 Orang	3.000.000,00						30 Orang	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca	30 Orang		30 Orang	30 Orang	6.120.000,00						30 Orang	9.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	6.633.000,00						30 Orang	9.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	20.154.000,00						30 Orang	34.573.770,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan						20.154.000,00							34.573.770,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		30 Orang	30 Orang	20.154.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		30 Orang	34.573.770,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang						6.120.000,00							9.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		30 Orang	30 Orang	6.120.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		30 Orang	9.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						6.633.000,00							9.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	6.633.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		30 Orang	9.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.06.2.[illegible]	Pelayanan Dukungan Psikososial						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan [illegible]	30 Orang		0 Orang	30 Orang	3.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		30 Orang	3.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						143.298.500,00					Tagana, Pelajar, masyarakat		172.938.500,00	
		Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana						143.298.500,00					Tagana, Pelajar, masyarakat		172.938.500,00	
			Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	225 Orang		225 Orang	225 Orang	9.763.800,00						225 Orang	8.886.400,00	
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana [illegible]	27 Orang		27 Orang	27 Orang	115.097.100,00						27 Orang	139.231.900,00	
			Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi [illegible]	225 Orang		0 Orang	225 Orang	13.513.800,00						225 Orang	19.896.400,00	
			Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	27 Orang		27 Orang	27 Orang	4.923.800,00						27 Orang	4.923.800,00	
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						115.097.100,00							139.231.900,00	
		Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang		27 Orang	27 Orang	115.097.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		27 Orang	139.231.900,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.02.0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana						4.923.800,00							4.923.800,00	
		Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	27 Orang		27 Orang	27 Orang	4.923.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		27 Orang	4.923.800,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.02.0008	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak						9.763.800,00							8.886.400,00	
		Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	225 Orang		225 Orang	225 Orang	9.763.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		225 Orang	8.886.400,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.02.0011	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada [illegible]						13.513.800,00							19.896.400,00	
		Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	225 Orang		0 Orang	225 Orang	13.513.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		225 Orang	19.896.400,00	Dinas Sosial
65,	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						31.194.400,00							35.000.000,00	
		Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan						31.194.400,00							35.000.000,00	
			999.Persentase TMP Nasional yang terkelola dengan baik	100 %		100 %	100 %	31.194.400,00						100 %	35.000.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						31.194.400,00					Masyarakat		35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya upaya pemeliharaan [illegible]						31.194.400,00					Masyarakat		35.000.000,00	
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	995 Makam		987 Makam	989 Makam	31.194.400,00						991 Makam	35.000.000,00	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						31.194.400,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	995 Makam		987 Makam	989 Makam	31.194.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		991 Makam	35.000.000,00	Dinas Sosial
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						5.858.975.500,00							7.022.000.000,00	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						5.858.975.500,00							7.022.000.000,00	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						4.563.069.500,00							4.868.500.000,00	
66,	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						3.678.326.836,00							4.303.500.000,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						3.678.326.836,00							4.197.000.000,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	3.678.326.836,00						100 %	4.197.000.000,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						26.611.600,00					ASN Dinas P3AP2KB		27.500.000,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						26.611.600,00					ASN Dinas P3AP2KB		27.500.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	5.655.800,00						1 Berita Acara	6.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	700.000,00						1 Berita Acara	1.500.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	109 Data		109 Data	109 Data	7.000.000,00						109 Data	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.900.000,00						2 Dokumen	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	3.300.000,00						13 Dokumen	4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	8.055.800,00						9 Laporan	5.500.000,00	
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.900.000,00							2.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.900.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Dokumen	2.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.055.800,00							5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	8.055.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		9 Laporan	5.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						7.000.000,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	109 Data		109 Data	109 Data	7.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		109 Data	7.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat						5.655.800,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	5.655.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Berita Acara	6.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						3.300.000,00							4.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	3.300.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		13 Dokumen	4.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis						700.000,00							1.500.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	700.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Berita Acara	1.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.952.562.000,00					ASN & Pegawai Non ASN DP3AP2KB		3.501.500.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						2.952.562.000,00					ASN & Pegawai Non ASN DP3AP2KB		3.501.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	1.260.000,00						19 Laporan	1.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/bulan		300 Orang/bulan	300 Orang/bulan	2.951.302.000,00						300 Orang/bulan	3.500.000.000,00	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.951.302.000,00							3.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/bulan		300 Orang/bulan	300 Orang/bulan	2.951.302.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		300 Orang/bulan	3.500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.260.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	1.260.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		19 Laporan	1.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.785.000,00					Karyawan-karyaw ati		2.000.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat						1.785.000,00					Karyawan-karyaw ati		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	1.785.000,00						6 Laporan	2.000.000,00	
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.785.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	1.785.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		6 Laporan	2.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						54.315.900,00					Karyawan-karyaw ati		60.000.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						54.315.900,00					Karyawan-karyaw ati		60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	265 Orang		265 Orang	265 Orang	54.315.900,00						265 Orang	60.000.000,00	
	2.08.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						54.315.900,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	265 Orang		265 Orang	265 Orang	54.315.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		265 Orang	60.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						105.931.086,00					Karyawan-karyaw ati		112.500.000,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						105.931.086,00					Karyawan-karyaw ati		112.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.512.000,00						1 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan		40 Laporan	45 Laporan	56.415.281,00						50 Laporan	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	12 Paket		12 Paket	12 Paket	8.925.000,00						12 Paket	9.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket		5 Paket	8 Paket	7.508.205,00						12 Paket	8.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.455.700,00						1 Paket	7.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	13.000.500,00						5 Paket	13.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.114.400,00						4 Paket	10.500.000,00	
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.455.700,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.455.700,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	7.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.000.500,00							13.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	13.000.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		5 Paket	13.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.114.400,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.114.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		4 Paket	10.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						8.925.000,00							9.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	8.925.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		12 Paket	9.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.508.205,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket		5 Paket	8 Paket	7.508.205,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		12 Paket	8.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						56.415.281,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan		40 Laporan	45 Laporan	56.415.281,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		50 Laporan	60.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.512.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.512.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						28.747.600,00					Karyawan-karyaw ati		35.000.000,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						28.747.600,00					Karyawan-karyaw ati		35.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit		7 Unit	15 Unit	28.747.600,00						20 Unit	35.000.000,00	
	2.08.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						28.747.600,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit		7 Unit	15 Unit	28.747.600,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		20 Unit	35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						322.157.250,00					Karyawan-karyaw ati		355.000.000,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						322.157.250,00					Karyawan-karyaw ati		355.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	80.226.000,00						36 Laporan	85.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	241.931.250,00						13 Laporan	270.000.000,00	
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						80.226.000,00							85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	80.226.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Laporan	85.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						241.931.250,00							270.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	241.931.250,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		13 Laporan	270.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						186.216.400,00					Karyawan-karyaw ati		210.000.000,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						186.216.400,00					Karyawan-karyaw ati		210.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	27 Unit		32 Unit	27 Unit	76.353.400,00						27 Unit	80.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	36.484.400,00						5 Unit	45.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	70 Unit		54 Unit	58 Unit	33.178.600,00						60 Unit	40.000.000,00	
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan						36.484.400,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	36.484.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		5 Unit	45.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau						76.353.400,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit		32 Unit	27 Unit	76.353.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		27 Unit	80.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						33.178.600,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit		54 Unit	58 Unit	33.178.600,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		60 Unit	40.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						186.216.400,00					Karyawan-karyaw ati		210.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	40.200.000,00						-	45.000.000,00	
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						40.200.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	40.200.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	45.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
67,	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						302.681.664,00							320.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam						302.681.664,00							320.000.000,00	
			3.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	62.16 %		60.21 %	60.69 %	302.681.664,00						61.18 %	320.000.000,00	
			3.Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau	35 Persentase		21 Persentase	24 Persentase	302.681.664,00						27 Persentase	320.000.000,00	
			999.Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	33.85 Persentase		33.81 Persentase	33.82 Persentase	302.681.664,00						33.83 Persentase	320.000.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan						19.280.914,00					OPD se Kota Blitar dan Lembaga		25.000.000,00	
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender						19.280.914,00					OPD se Kota Blitar dan Lembaga		25.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.180.800,00						1 Laporan	15.000.000,00	
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan						10.180.800,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.180.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Laporan	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender						19.280.914,00					OPD se Kota Blitar dan Lembaga		25.000.000,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait	-		-	-	9.100.114,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota						9.100.114,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	65 Lembaga	9.100.114,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						120.508.400,00					Perempuan kepala keluarga (PEKKA) Kota Blitar,		125.000.000,00	
		Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan						120.508.400,00					Perempuan kepala keluarga (PEKKA) Kota Blitar,		125.000.000,00	
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan	-		-	-	81.482.000,00						-	85.000.000,00	
			Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan	-		-	-	39.026.400,00						-	40.000.000,00	
	2.08.02.2.02.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan						39.026.400,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	1 Orang	39.026.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	40.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						81.482.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	1 Lembaga	81.482.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	85.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						162.892.350,00					PKK dan GOW Kota Blitar		170.000.000,00	
		Meningkatnya keaktifan lembaga pemberdayaan perempuan						162.892.350,00					PKK dan GOW Kota Blitar		170.000.000,00	
			Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga	-		-	-	27.148.800,00						-	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan	-		-	-	135.743.550,00						-	140.000.000,00	
	2.08.02.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota						27.148.800,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	1 Lembaga	27.148.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.03.0015	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota						135.743.550,00							140.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	1 Orang	135.743.550,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	140.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
68,	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						237.081.295,00							80.000.000,00	
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan						145.192.585,00							60.000.000,00	
			999.Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 perempuan	14.54 Rasio		14.62 Rasio	14.6 Rasio	145.192.585,00						14.58 Rasio	60.000.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						72.953.100,00					Lembaga perlindungan perempuan		20.000.000,00	
		Meningkatnya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan						72.953.100,00					Lembaga perlindungan perempuan		20.000.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat	-		-	-	14.478.600,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana	-		-	-	17.160.000,00						-	0,00	
			Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan	-		-	-	41.314.500,00						-	0,00	
	2.08.03.2.01.0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan						14.478.600,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	1 Kegiatan	14.478.600,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.01.0011	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota						17.160.000,00							0,00	
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Kab/Kota	Jumlah kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana	-		-	1 Dokumen	17.160.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.01.0012	Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)						41.314.500,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan	-		-	1 Orang	41.314.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan						132.203.495,00					Perempuan Korban Kekerasan di Kota Blitar		25.000.000,00	
		Meningkatnya ketersediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan						132.203.495,00					Perempuan Korban Kekerasan di Kota Blitar		25.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Kab/Kota	-		-	-	15.314.785,00						-	0,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan	-		-	-	15.314.785,00						-	0,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat	-		-	-	15.314.785,00						-	0,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli	-		-	-	15.314.785,00						-	0,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban	-		-	-	15.314.785,00						-	0,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO	-		-	-	15.314.785,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Kab/Kota	-		-	-	15.314.785,00						-	0,00	
	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	20 Orang	25.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.02.0011	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						15.314.785,00							0,00	
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan	-		-	1 Orang	15.314.785,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
	2.08.03.2.02.0012	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						15.314.785,00							0,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-		-	1 Orang	15.314.785,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
	2.08.03.2.02.0013	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						15.314.785,00							0,00	
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Kab/Kota	-		-	1 Orang	15.314.785,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
	2.08.03.2.02.0014	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						15.314.785,00							0,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban	-		-	1 Orang	15.314.785,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
	2.08.03.2.02.0015	Layanan spesifik bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						15.314.785,00							0,00	
		Tersedianya layanan spesifik bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Kab/Kota	-		-	1 Orang	15.314.785,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
	2.08.03.2.02.0016	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						15.314.785,00							0,00	
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Kab/Kota	-		-	1 Orang	15.314.785,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
	2.08.03.2.02.0017	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						15.314.785,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO	-		-	1 Orang	15.314.785,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						31.924.700,00					Instansi Vertikal, Organisasi dan Lembaga		35.000.000,00	
		Meningkatnya keaktifan lembaga perlindungan perempuan						31.924.700,00					Instansi Vertikal, Organisasi dan Lembaga		35.000.000,00	
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	-	6.300.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang	-		-	-	11.037.200,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan	-		-	-	14.587.500,00						-	0,00	
	2.08.03.2.03.0010	Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						6.300.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	2 Dokumen	6.300.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.03.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						14.587.500,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan	-		-	1 Orang	14.587.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
	2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						11.037.200,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang	-		-	2 Lembaga	11.037.200,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
69,	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						22.367.400,00							25.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan						22.367.400,00							25.000.000,00	
			999.Jumlah Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak sesuai Standar	3 Unit		3 Unit	3 Unit	22.367.400,00						3 Unit	25.000.000,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						22.367.400,00					Puspaga		25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak						22.367.400,00					Puspaga		25.000.000,00	
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan	400 Orang		250 Orang	350 Orang	22.367.400,00						400 Orang	25.000.000,00	
	2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan						22.367.400,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang		250 Orang	350 Orang	22.367.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		400 Orang	25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
70,	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**						30.629.570,00							0,00	
			-	-		-	-	30.629.570,00						-	0,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						30.629.570,00					-		0,00	
		-						30.629.570,00					-		0,00	
			Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA, mencakup beberapa hal, seperti: pelaksanan Bimtek di tingkat daerah, komposisi penyelenggara, pengelolaan data, Kebijakan & SOP pendukung, mekanisme validasi, pemanfaatan data	-		-	-	30.629.570,00						-	0,00	
	2.08.05.2.01.0006	Penguatan Penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA untuk Penyediaan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berkualitas						30.629.570,00							0,00	
		Terwujudnya data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui optimalisasi penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA di daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA, mencakup beberapa hal, seperti: pelaksanan Bimtek di tingkat daerah, komposisi penyelenggara, pengelolaan data, Kebijakan & SOP pendukung, mekanisme validasi, pemanfaatan data	-		-	1 Dokumen	30.629.570,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
71,	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						46.697.400,00							60.000.000,00	
		Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara konprehensif						46.697.400,00							60.000.000,00	
			1.Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	74.65 Indeks		68.96 Indeks	70.34 Indeks	46.697.400,00						71.75 Indeks	60.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan						21.530.800,00					Lembaga Kota Layak Anak, Anak Sekolah		25.000.000,00	
		Meningkatnya peran serta lembaga dalam pemenuhan hak anak						21.530.800,00					Lembaga Kota Layak Anak, Anak Sekolah		25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan	-		-	-	21.530.800,00						-	25.000.000,00	
	2.08.06.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota						21.530.800,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	3 Lembaga	21.530.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						25.166.600,00					-		35.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak						25.166.600,00					-		35.000.000,00	
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan	-		-	-	25.166.600,00						-	35.000.000,00	
	2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						25.166.600,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan	-		-	150 Orang	25.166.600,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
72,	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						245.285.335,00							80.000.000,00	
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak						168.711.410,00							80.000.000,00	
			2.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	92.42 Indeks		85.41 Indeks	87.12 Indeks	168.711.410,00						88.87 Indeks	80.000.000,00	
			3.Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	5.34 Rasio		6.23 Rasio	6.01 Rasio	168.711.410,00						5.79 Rasio	80.000.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						27.781.800,00					Satgas PPA		30.000.000,00	
		Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak						27.781.800,00					Satgas PPA		30.000.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan	-		-	-	22.281.800,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di	-		-	-	5.500.000,00						-	0,00	
	2.08.07.2.01.0012	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota						5.500.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di	-		-	4 Dokumen	5.500.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.07.2.01.0014	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan						22.281.800,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-		-	1 Kegiatan	22.281.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						116.775.210,00					Anak se-Kota Blitar		15.000.000,00	
		Meningkatnya Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus						116.775.210,00					Anak se-Kota Blitar		15.000.000,00	
			Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan	-		-	-	15.314.785,00						-	0,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah	-		-	-	15.314.785,00						-	0,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah	-		-	-	15.314.785,00						-	0,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban	-		-	-	24.886.500,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan	-		-	-	15.314.785,00						-	0,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah	-		-	-	15.314.785,00						-	0,00	
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	15.314.785,00						-	0,00	
	2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						24.886.500,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	10 Orang	24.886.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
	2.08.07.2.02.0018	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						15.314.785,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan	-		-	1 Orang	15.314.785,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
	2.08.07.2.02.0019	Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah						15.314.785,00							0,00	
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	1 Orang	15.314.785,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
	2.08.07.2.02.0020	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah						15.314.785,00							0,00	
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	1 Orang	15.314.785,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
	2.08.07.2.02.0021	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						15.314.785,00							0,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	1 Orang	15.314.785,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
	2.08.07.2.02.0022	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						15.314.785,00							0,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan	-		-	1 Orang	15.314.785,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
	2.08.07.2.02.0023	Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						15.314.785,00							0,00	
		Tersedianya Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	1 Orang	15.314.785,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah						100.728.325,00					Kelompok PATBM, Anak Sekolah		35.000.000,00	
		Meningkatnya kapasitas Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus						100.728.325,00					Kelompok PATBM, Anak Sekolah		35.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan	-		-	-	28.086.100,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	72.642.225,00						-	0,00	
	2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan						28.086.100,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan	-		-	12 Lembaga	28.086.100,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Ekonomi daerah yang inklusif		-	35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.07.2.03.0016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						72.642.225,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	303 Orang	72.642.225,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						1.295.906.000,00							2.153.500.000,00	
73,	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						66.058.800,00							115.000.000,00	
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk						66.058.800,00							115.000.000,00	
			999.Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	15.10 Kelahiran per 1000 WUS		17.10 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	16.75 Kelahiran per 1000 WUS	66.058.800,00						16.30 Kelahiran per 1000 WUS	115.000.000,00	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						58.200.000,00					Warga se- Kota Blitar		95.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas data dan informasi pengendalian penduduk						58.200.000,00					Warga se- Kota Blitar		95.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	16.800.000,00						3 Dokumen	50.000.000,00	
	2.14.02.2.	Penyediaan Data dan Informasi						16.800.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	16.800.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas						7.858.800,00					-		20.000.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman Remaja tentang pendidikan kependudukan						7.858.800,00					-		20.000.000,00	
			Persentase Kampung Keluarga Berkualitas klasifikasi Mandiri	-		-	-	7.858.800,00						-	20.000.000,00	
	2.14.02.2.01.0043	Fasilitasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas						7.858.800,00							20.000.000,00	
		Terwujudnya Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas klasifikasi Mandiri	-		-	100% Kampung KB	7.858.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
		Meningkatnya kualitas data dan informasi pengendalian penduduk						58.200.000,00					Warga se- Kota Blitar		95.000.000,00	
			Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data	-		-	-	41.400.000,00						-	45.000.000,00	
	2.14.02.2.02.0030	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						41.400.000,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	1 Laporan	41.400.000,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	45.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
74,	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						399.894.966,00							924.500.000,00	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana						399.894.966,00							924.500.000,00	
			999.Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7.95 %		8.09 %	8.07 %	399.894.966,00						8.05 %	924.500.000,00	
			999.Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	10.8 Persentase		15 Persentase	13.1 Persentase	399.894.966,00						12.8 Persentase	924.500.000,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						45.000.000,00					Pengolah data program Bangga Kencana		80.000.000,00	
		Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengendalian penduduk dan KB						45.000.000,00					Pengolah data program Bangga Kencana		80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	45.000.000,00						3 Laporan	80.000.000,00	
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana						45.000.000,00							80.000.000,00	
		Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Laporan	80.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						149.475.000,00					Kader Bangga Kencana, Kader IMP		500.000.000,00	
		Meningkatnya Pendayagunaan SDM KB						149.475.000,00					Kader Bangga Kencana, Kader IMP		500.000.000,00	
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat	425 Orang		417 Orang	417 Orang	149.475.000,00						425 Orang	500.000.000,00	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						149.475.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	425 Orang		417 Orang	1 Orang	149.475.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		425 Orang	500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						205.419.966,00					Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, peserta KB		344.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya cakupan layanan KB						205.419.966,00					Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, peserta KB		344.500.000,00	
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	45 Orang		25 Orang	30 Orang	12.000.000,00						35 Orang	40.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	845 Orang		552 Orang	600 Orang	184.756.000,00						665 Orang	300.000.000,00	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						184.756.000,00							300.000.000,00	
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	845 Orang		552 Orang	1 Orang	184.756.000,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		665 Orang	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.	Peningkatan Kesertaan KB Pria						12.000.000,00							40.000.000,00	
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	45 Orang		25 Orang	1 Orang	12.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		35 Orang	40.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya cakupan layanan KB						205.419.966,00					Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, peserta KB		344.500.000,00	
			Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil	-		-	-	6.510.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk	-		-	-	2.153.966,00						-	2.000.000,00	
	2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu						6.510.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	-		-	1 Kegiatan	6.510.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	2.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
	2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						2.153.966,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk	-		-	4 Laporan	2.153.966,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK	-	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	2.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
75,	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						829.952.234,00							1.114.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera						829.952.234,00							1.112.000.000,00	
			999.Persentase Keluarga yang aktif Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	68.9 %		55.01 %	58 %	829.952.234,00						60.25 %	1.112.000.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						64.952.234,00					Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan		312.000.000,00	
		Meningkatnya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga						64.952.234,00					Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan		312.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	53.477.234,00						4 Laporan	300.000.000,00	
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R						53.477.234,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	53.477.234,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		4 Laporan	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						765.000.000,00					Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu		802.000.000,00	
		Meningkatnya cakupan pendampingan keluarga berisiko stunting						765.000.000,00					Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu		802.000.000,00	
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca	3 laporan		3 laporan	3 laporan	345.000.000,00						3 laporan	350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,						345.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	3 laporan		3 laporan	1 laporan	345.000.000,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 laporan	350.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga						64.952.234,00					Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan		312.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Kegiatan/Poktan atau setara Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang	-		-	-	7.875.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga	-		-	-	3.600.000,00						-	2.000.000,00	
	2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)						3.600.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-		-	3 Laporan / Dokumen	3.600.000,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK	-	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	2.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
	2.14.04.2.01.0039	Penyediaan Biaya Operasional Pelaksanaan Kelompok Kegiatan/Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra,						7.875.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya biaya operasional pelaksanaan kelompok kegiatan (Poktan) bagi BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan/Poktan atau setara Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapatkan biaya operasional pelaksanaan	-		-	1 Kelompok	7.875.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya cakupan pendampingan keluarga berisiko stunting						765.000.000,00					Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calo n PUS, Ibu		802.000.000,00	
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	-	414.000.000,00						-	450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	-		-	-	6.000.000,00						-	2.000.000,00	
	2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga						6.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	-		-	2 Laporan	6.000.000,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK	-	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	2.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
	2.14.04.2.02.0009	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/Kelahiran						414.000.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	1 Keluarga	414.000.000,00	Kota Blitar	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	450.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian						10.728.673.100,00							14.160.575.742,00	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						203.902.000,00							607.000.000,00	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						203.902.000,00							607.000.000,00	
76,	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						137.157.200,00							402.000.000,00	
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat						121.157.500,00							392.000.000,00	
			1.Skor Pola Pangan	89.74 Nilai		89.13 Nilai	90.5 Nilai	112.339.700,00						89.39 Nilai	267.000.000,00	
			1.Skor Pola Pangan	89.74 Nilai		89.13 Nilai	90.526 Nilai	24.817.500,00						89.39 Nilai	125.000.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka						24.817.500,00					Masyarakat Kota Blitar		135.000.000,00	
		Terjaganya pemenuhan bahan pangan						24.817.500,00					Masyarakat Kota Blitar		135.000.000,00	
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	21 Keluarga		21 Keluarga	21 Keluarga	5.492.800,00						21 Keluarga	50.000.000,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.125.000,00						1 Laporan	32.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	25.000.000,00	
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan						5.492.800,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	21 Keluarga		21 Keluarga	30 Keluarga	5.492.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		21 Keluarga	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis						2.125.000,00							32.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.125.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Laporan	32.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						0,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Dokumen	8.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						32.208.000,00					Masyarakat Kota Blitar		100.000.000,00	
		Meningkatnya penyediaan cadangan pangan daerah						32.208.000,00					Masyarakat Kota Blitar		100.000.000,00	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	6 Ton		6 Ton	6 Ton	32.208.000,00						6 Ton	100.000.000,00	
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						32.208.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	6 Ton		6 Ton	1.5 Ton	32.208.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		6 Ton	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						80.131.700,00					Masyarakat Kota Blitar		167.000.000,00	
		Meningkatnya konsumsi pangan selain beras/terigu						80.131.700,00					Masyarakat Kota Blitar		167.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	14.132.000,00						2 Laporan	62.000.000,00	
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.999.700,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						14.132.000,00							62.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	14.132.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		2 Laporan	62.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun						50.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Laporan	70.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.04.0005	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						15.999.700,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.999.700,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Terjaganya pemenuhan bahan pangan						24.817.500,00					Masyarakat Kota Blitar		135.000.000,00	
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.200.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di	-		-	-	15.999.700,00						-	10.000.000,00	
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota						15.999.700,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-		-	1 laporan	15.999.700,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		-	10.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota						1.200.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	1.200.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		-	10.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
77,	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						60.500.000,00							175.000.000,00	
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan						60.500.000,00							165.000.000,00	
			2.Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	0.8 %		1 %	1 %	60.500.000,00						0.9 %	165.000.000,00	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						60.500.000,00					Masyarakat Kota Blitar		175.000.000,00	
		Meningkatnya penangganan kelarga rentan rawan pangan						60.500.000,00					Masyarakat Kota Blitar		175.000.000,00	
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	85.000.000,00	
	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi						0,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		2 Dokumen	70.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi						50.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Dokumen	85.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Meningkatnya penangganan kelarga rentan rawan pangan						60.500.000,00					Masyarakat Kota Blitar		175.000.000,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	-		-	-	3.250.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup	-		-	-	7.250.000,00						-	10.000.000,00	
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah						7.250.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	7.250.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		-	10.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						3.250.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	-		-	1 Laporan	3.250.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		-	10.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
78,	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						6.244.800,00							30.000.000,00	
		Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan						6.244.800,00							30.000.000,00	
			999.Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	6.244.800,00						100 Persentase	30.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah						6.244.800,00					Masyarakat Kota Blitar		30.000.000,00	
		Meningkanya pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu kemanan pangan						6.244.800,00					Masyarakat Kota Blitar		30.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	0,00						5 Dokumen	20.000.000,00	
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah						0,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen		5 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		5 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Meningkanya pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu kemanan pangan						6.244.800,00					Masyarakat Kota Blitar		30.000.000,00	
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah	-		-	-	6.244.800,00						-	10.000.000,00	
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah						6.244.800,00							10.000.000,00	
		Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	-		-	1 Dokumen	6.244.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		-	10.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						10.524.771.100,00							13.553.575.742,00	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						2.414.032.500,00							574.180.000,00	
79,	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						311.932.500,00							397.080.000,00	
		Meningkatnya produksi perikanan budidava						311.932.500,00							397.080.000,00	
			2.Persentase Izin Usaha budidaya perikanan yang Diterbitkan	100 %		100 %	100 %	311.932.500,00						100 %	397.080.000,00	
			999.Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	257.3 Ton		247.28 Ton	249.76 Ton	311.932.500,00						252.26 Ton	397.080.000,00	
	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						9.150.000,00					Pembudidaya Ikan di Kota Blitar		32.000.000,00	
		Meningkatnya usaha budidaya perikanan yang memenuhi						9.150.000,00					Pembudidaya Ikan di Kota		32.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang	25 Rekomendasi		25 Rekomendasi	25 Rekomendasi	9.150.000,00						25 Rekomendasi	32.000.000,00	
	3.25.04.2.01.0003	Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota						9.150.000,00							32.000.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	25 Rekomendasi		25 Rekomendasi	10 Rekomendasi	9.150.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		25 Rekomendasi	32.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						200.000.000,00					Pembudidaya Ikan di Kota		158.000.000,00	
		Meningkatnya pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan pengelolaan pembudidayaan ikan						200.000.000,00					Pembudidaya Ikan di Kota Blitar		158.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok		2 Kelompok	2 Kelompok	50.000.000,00						2 Kelompok	70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan	10 Kelompok		10 Kelompok	10 Kelompok	150.000.000,00						10 Kelompok	88.000.000,00	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil						50.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok		2 Kelompok	2 Kelompok	50.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		2 Kelompok	70.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan						150.000.000,00							88.000.000,00	
		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok		10 Kelompok	10 Kelompok	150.000.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		10 Kelompok	88.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						102.782.500,00					Pembudidaya Ikan di Kota		207.080.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan produksi perikanan budidaya						102.782.500,00					Pembudidaya Ikan di Kota		207.080.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.100.000,00						1 Dokumen	28.000.000,00	
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di	50 Unit		50 Unit	50 Unit	28.650.000,00						50 Unit	49.080.000,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit		1 Unit	1 Unit	66.032.500,00						1 Unit	130.000.000,00	
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						8.100.000,00							28.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.100.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Dokumen	28.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						66.032.500,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit		1 Unit	1 Unit	66.032.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Unit	130.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat						28.650.000,00							49.080.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	50 Unit		50 Unit	30 Unit	28.650.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		50 Unit	49.080.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
80,	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						2.102.100.000,00							177.100.000,00	
		Meningkatnya kualitas produk hasil perikanan						2.102.100.000,00							177.100.000,00	
			2.Persentase Izin Usaha pengolahan hasil perikanan yang Diterbitkan	100 %		100 %	100 %	2.102.100.000,00						100 %	177.100.000,00	
			999.Angka Konsumsi Ikan	23.64 Kg/KAP/TH		23.20 Kg/KAP/TH	23.31 Kg/KAP/TH	2.102.100.000,00						23.42 Kg/KAP/TH	177.100.000,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						19.792.300,00					Poklahsar Di Kota Blitar		81.500.000,00	
		Meningkatnya usaha pengolahan perikanan yang memenuhi rekomendasi teknis						19.792.300,00					Poklahsar Di Kota Blitar		81.500.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.080.000,00						1 Dokumen	48.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran	1 Rekomendasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	10.712.300,00						1 Rekomendasi	33.500.000,00	
	3.25.06.2.01.0003	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil						10.712.300,00							33.500.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1 Rekomendasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	10.712.300,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Rekomendasi	33.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala						9.080.000,00							48.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.080.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Dokumen	48.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						19.503.500,00					Poklahsar Di Kota Blitar		32.070.000,00	
		Meningkatnya unit usaha hasil perikanan yang memiliki standar						19.503.500,00					Poklahsar Di Kota Blitar		32.070.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran	2 Unit Usaha		2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	19.503.500,00						2 Unit Usaha	32.070.000,00	
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha						19.503.500,00							32.070.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	2 Unit Usaha		2 Unit Usaha	60 Unit Usaha	19.503.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		2 Unit Usaha	32.070.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						2.062.804.200,00					Poklahsar Di Kota Blitar		63.530.000,00	
		Meningkatnya pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi						2.062.804.200,00					Poklahsar Di Kota Blitar		63.530.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang	20 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	2.062.804.200,00						20 Pelaku Usaha	63.530.000,00	
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah						2.062.804.200,00							63.530.000,00	
		Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	20 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	2.062.804.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		20 Pelaku Usaha	63.530.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						8.110.738.600,00							12.979.395.742,00	
81,	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						5.944.931.020,00							9.014.087.829,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						5.944.931.020,00							8.993.087.829,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	5.944.931.020,00						100 %	8.993.087.829,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.873.600,00					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota		102.100.000,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						13.873.600,00					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota		102.100.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	8.896.000,00						1 Berita Acara	15.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	452.200,00						1 Berita Acara	6.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	365.400,00						2 Data	700.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	698.100,00						2 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	1.943.600,00						13 Dokumen	6.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	1.518.300,00						17 Laporan	70.000.000,00	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						698.100,00							3.900.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	698.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		2 Dokumen	3.900.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.518.300,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	1.518.300,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		17 Laporan	70.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						365.400,00							700.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	365.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		2 Data	700.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8.896.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	2 Berita Acara	8.896.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Berita Acara	15.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						1.943.600,00							6.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	1.943.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		13 Dokumen	6.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis						452.200,00							6.000.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	452.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Berita Acara	6.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.022.675.008,00					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota		6.898.917.531,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						4.022.675.008,00					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota		6.898.917.531,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	375.000,00						5 Laporan	3.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	576 Orang/bulan		576 Orang/bulan	576 Orang/bulan	4.022.300.008,00						576 Orang/bulan	6.895.417.531,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.022.300.008,00							6.895.417.531,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	576 Orang/bulan		576 Orang/bulan	34 Orang/bulan	4.022.300.008,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		576 Orang/bulan	6.895.417.531,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						375.000,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	375.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		5 Laporan	3.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						263.000,00					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota		600.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah						263.000,00					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota		600.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	263.000,00						5 Laporan	600.000,00	
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						263.000,00							600.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	263.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		5 Laporan	600.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						447.600,00					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota		2.500.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah						447.600,00					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota		2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	447.600,00						12 Dokumen	2.500.000,00	
	3.27.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi						447.600,00							2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	447.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		12 Dokumen	2.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						63.618.050,00					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota		88.000.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						63.618.050,00					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota		88.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	342 Orang		342 Orang	342 Orang	50.583.950,00						342 Orang	73.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	2 Paket		2 Paket	2 Paket	13.034.100,00						2 Paket	15.000.000,00	
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						13.034.100,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	13.034.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		2 Paket	15.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						50.583.950,00							73.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	342 Orang		342 Orang	64 Orang	50.583.950,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		342 Orang	73.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						149.727.000,00					-		237.340.000,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						149.727.000,00					-		237.340.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen		72 Dokumen	72 Dokumen	6.978.000,00						72 Dokumen	16.340.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.390.000,00						1 Dokumen	16.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan		56 Laporan	56 Laporan	90.976.000,00						56 Laporan	125.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.300.000,00						4 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.241.000,00						1 Paket	21.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		3 Paket	3 Paket	6.037.900,00						1 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket		2 Paket	2 Paket	15.515.200,00						0 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	7.288.900,00						5 Paket	24.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.037.900,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		3 Paket	1 Paket	6.037.900,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Paket	5.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.515.200,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket		2 Paket	1 Paket	15.515.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		0 Paket	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.288.900,00							24.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	7.288.900,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		5 Paket	24.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.300.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	9.300.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		4 Paket	30.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9.241.000,00							21.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.241.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Paket	21.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						6.978.000,00							16.340.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen		72 Dokumen	72 Dokumen	6.978.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		72 Dokumen	16.340.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						90.976.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan		56 Laporan	56 Laporan	90.976.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		56 Laporan	125.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						4.390.000,00							16.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.390.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Dokumen	16.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						80.000.000,00					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota		8.000.000,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						80.000.000,00					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota		8.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	10.000.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	3 Unit	50.000.000,00						1 Unit	6.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		6 Unit	10 Unit	20.000.000,00						2 Unit	2.000.000,00	
	3.27.01.2.	Pengadaan Mebel						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	6 Unit	10.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		0 Unit	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.07.0009	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Unit	6.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan						20.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		6 Unit	2 Unit	20.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		2 Unit	2.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.530.982.440,00					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota		1.532.630.298,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						1.530.982.440,00					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota		1.532.630.298,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	216 Laporan		216 Laporan	216 Laporan	256.113.840,00						216 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	1.274.868.600,00						13 Laporan	1.332.630.298,00	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						256.113.840,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan		216 Laporan	216 Laporan	256.113.840,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		216 Laporan	200.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.274.868.600,00							1.332.630.298,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	1.274.868.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		13 Laporan	1.332.630.298,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						83.344.322,00					-		144.000.000,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						83.344.322,00					-		144.000.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						0 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	18 Unit		25 Unit	26 Unit	50.882.340,00						13 Unit	48.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	2 Unit		1 Unit	1 Unit	17.620.982,00						1 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	32 Unit		32 Unit	32 Unit	2.186.100,00						32 Unit	36.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 Unit		28 Unit	10 Unit	12.654.900,00						5 Unit	40.000.000,00	
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan						17.620.982,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	2 Unit		1 Unit	1 Unit	17.620.982,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Unit	20.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau						50.882.340,00							48.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	18 Unit		25 Unit	26 Unit	50.882.340,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		13 Unit	48.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.186.100,00							36.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit		32 Unit	32 Unit	2.186.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		32 Unit	36.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		0 Unit	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						12.654.900,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	15 Unit		28 Unit	14 Unit	12.654.900,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		5 Unit	40.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
82,	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						1.005.794.400,00							285.121.000,00	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian						1.005.794.400,00							285.121.000,00	
			999.Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	0.8 %		0.8 %	1 %	1.005.794.400,00						0.8 %	285.121.000,00	
			999.Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	3 %		3 %	3 %	1.005.794.400,00						3 %	285.121.000,00	
			999.Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0.2 %		0.2 %	0.5 %	1.005.794.400,00						0.2 %	285.121.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						958.889.300,00					Petani di Kota Blitar		183.535.000,00	
		Meningkatnya pengawasan penggunaan sarana pertanian						958.889.300,00					Petani di Kota Blitar		183.535.000,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.772.000,00						1 Laporan	130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	952.117.300,00						2 Laporan	53.535.000,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik						952.117.300,00							53.535.000,00	
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	952.117.300,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		2 Laporan	53.535.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						6.772.000,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.772.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Laporan	130.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan						34.712.000,00					Peternak Di Kota Blitar		63.250.000,00	
		Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan						34.712.000,00					Peternak Di Kota Blitar		63.250.000,00	
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	34.712.000,00						3 Dokumen	63.250.000,00	
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman						34.712.000,00							63.250.000,00	
		Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	34.712.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		3 Dokumen	63.250.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota						11.041.700,00					Peternak Di Kota Blitar		32.355.000,00	
		Meningkatkan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan						11.041.700,00					Peternak Di Kota Blitar		32.355.000,00	
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.968.000,00						2 Laporan	8.240.000,00	
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.073.700,00						3 Laporan	24.115.000,00	
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil						9.073.700,00							24.115.000,00	
		Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.073.700,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		3 Laporan	24.115.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak						1.968.000,00							8.240.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.968.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		2 Laporan	8.240.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer						1.151.400,00					Pengecer Obat Hewan		5.981.000,00	
		Meningkatnya pengawasan obat hewan di tingkat pengecer						1.151.400,00					Pengecer Obat Hewan		5.981.000,00	
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.151.400,00						1 Laporan	5.981.000,00	
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan						1.151.400,00							5.981.000,00	
		Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.151.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Laporan	5.981.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						0,00					Peternak Di Kota Blitar		0,00	
		Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak						0,00					Peternak Di Kota Blitar		0,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	0 Ekor		1 Ekor	1 Ekor	0,00						0 Ekor	0,00	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah						0,00							0,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	0 Ekor		1 Ekor	0 Ekor	0,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		0 Ekor	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
83,	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						926.077.780,00							723.000.000,00	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian						926.077.780,00							443.000.000,00	
			999.Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	30 Ha		30 Ha	30 Ha	926.077.780,00						30 Ha	443.000.000,00	
			999.Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	100 %		100 %	100 %	926.077.780,00						100 %	443.000.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						151.330.300,00					Petani di Kota Blitar		173.000.000,00	
		Menurunnya alih fungsi lahan pertanian						151.330.300,00					Petani di Kota Blitar		173.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.100.000,00						1 Laporan	8.000.000,00	
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	9.969.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	7.886.300,00						0 Dokumen	0,00	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian						4.100.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.100.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Laporan	8.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.03.2.01.0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota						7.886.300,00							0,00	
		Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.886.300,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		0 Dokumen	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan						9.969.000,00							5.000.000,00	
		Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	9.969.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						774.747.480,00					Petani dan peternak di Kota Blitar		550.000.000,00	
		Meningkatnya prasarana pertanian yang tersedia sesuai standar						774.747.480,00					Petani dan peternak di Kota Blitar		550.000.000,00	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit		2 Unit	1 Unit	185.000.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang	1 Unit		1 Unit	1 Unit	432.250.560,00						1 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit		2 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	19.956.900,00						1 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	137.540.020,00						3 Unit	175.000.000,00	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						185.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit		2 Unit	1 Unit	185.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Unit	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air						0,00							30.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Unit	30.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana						0,00							15.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Unit	15.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						432.250.560,00							150.000.000,00	
		terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	432.250.560,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Unit	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan						19.956.900,00							30.000.000,00	
		Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	19.956.900,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Unit	30.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan						137.540.020,00							175.000.000,00	
		Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	137.540.020,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		3 Unit	175.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Menurunnya alih fungsi lahan pertanian						151.330.300,00					Petani di Kota Blitar		173.000.000,00	
			Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	-		-	-	125.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	-		-	-	4.375.000,00						-	10.000.000,00	
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian						4.375.000,00							10.000.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	-		-	303 Ha	4.375.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		-	10.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.03.2.01.0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan						125.000.000,00							50.000.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	-		-	38 Unit	125.000.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		-	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil						0,00							50.000.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	-		-	0 Unit	0,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		-	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.03.2.01.0012	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan						0,00							50.000.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	-		-	0 Unit	0,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		-	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
84,	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						118.949.700,00							289.216.000,00	
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner						118.949.700,00							289.216.000,00	
			999.Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol	54.05 Persentase		43.24 Persentase	45.94 Persentase	118.949.700,00						48.65 Persentase	289.216.000,00	
			999.Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	118.949.700,00						100 Dokumen	289.216.000,00	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah						59.967.700,00					Peternak Di Kota Blitar		140.000.000,00	
		Meningkatnya pelayanan jasa laboratorium dan jasa medic veteriner						59.967.700,00					Peternak Di Kota Blitar		140.000.000,00	
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.520.100,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	56.447.600,00						5 Laporan	130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium						3.520.100,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.520.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Laporan	10.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						56.447.600,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	56.447.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		5 Laporan	130.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan						53.338.000,00					Peternak Di Kota Blitar		114.216.000,00	
		Meningkatnya penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner						53.338.000,00					Peternak Di Kota Blitar		114.216.000,00	
			Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan	200 Orang		200 Orang	200 Orang	37.688.500,00						200 Orang	67.168.000,00	
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.760.000,00						1 Laporan	8.250.000,00	
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.354.500,00						1 Dokumen	13.080.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH	340 Dokumen		330 Dokumen	333 Dokumen	0,00						335 Dokumen	7.088.000,00	
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara	10 Unit Usaha		10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	3.535.000,00						10 Unit Usaha	7.000.000,00	
			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	25 Unit Usaha		23 Unit Usaha	25 Unit Usaha	0,00						25 Unit Usaha	11.630.000,00	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						6.760.000,00							8.250.000,00	
		Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.760.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Laporan	8.250.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner						5.354.500,00							13.080.000,00	
		Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.354.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Dokumen	13.080.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan						0,00							11.630.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	25 Unit Usaha		23 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		25 Unit Usaha	11.630.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04.2.04.0006	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media						0,00							7.088.000,00	
		Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	340 Dokumen		330 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		335 Dokumen	7.088.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan						37.688.500,00							67.168.000,00	
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	200 Orang		200 Orang	132 Orang	37.688.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		200 Orang	67.168.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04.2.	Pengawasan Unit Usaha Produk						3.535.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	10 Unit Usaha		10 Unit Usaha	15 Unit Usaha	3.535.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		10 Unit Usaha	7.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan						5.644.000,00					Peternak Di Kota Blitar		35.000.000,00	
		Meningkatnya penerapan persyaratan teknis kesejahteraan hewan						5.644.000,00					Peternak Di Kota Blitar		35.000.000,00	
			Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	63 Unit		63 Unit	63 Unit	5.644.000,00						63 Unit	35.000.000,00	
	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha						5.644.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	63 Unit		63 Unit	42 Unit	5.644.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		63 Unit	35.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
85,	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						30.234.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana						30.234.000,00							50.000.000,00	
			999.Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	30.234.000,00						100 Persentase	50.000.000,00	
			999.Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	25 Persentase		5 Persentase	10 Persentase	30.234.000,00						15 Persentase	50.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						30.234.000,00					Petani di Kota Blitar		100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian						30.234.000,00					Petani di Kota Blitar		100.000.000,00	
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	30 Ha		20 Ha	30 Ha	21.000.000,00						30 Ha	50.000.000,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang	100 Ha		100 Ha	100 Ha	9.234.000,00						100 Ha	50.000.000,00	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						9.234.000,00							50.000.000,00	
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha		100 Ha	100 Ha	9.234.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		100 Ha	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						21.000.000,00							50.000.000,00	
		Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	30 Ha		20 Ha	30 Ha	21.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		30 Ha	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
86,	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**						13.293.200,00							63.651.000,00	
		Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha						13.293.200,00							63.651.000,00	
			2.Persentase Izin Usaha Peternakan yang	20.5 %		19 %	19.5 %	13.293.200,00						20 %	63.651.000,00	
			999.Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	65.39 Persentase		62.84 Persentase	63.47 Persentase	13.293.200,00						64.11 Persentase	63.651.000,00	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.100.000,00					Pelaku usaha pertanian dan peternakan di Kota Blitar		17.520.000,00	
		Meningkatnya Usaha Pertanian yang memenuhi rekomendasi teknis						1.100.000,00					Pelaku usaha pertanian dan peternakan di Kota Blitar		17.520.000,00	
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00						1 Laporan	17.520.000,00	
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian						1.100.000,00							17.520.000,00	
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Laporan	17.520.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah						7.818.200,00					Pelaku usaha pertanian dan peternakan di Kota Blitar		29.605.000,00	
		Meningkatnya pengawasan izin usaha produksi bibit, pakan dan fasilitas peternakan lainnya						7.818.200,00					Pelaku usaha pertanian dan peternakan di Kota Blitar		29.605.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.200.000,00						1 Laporan	8.135.000,00	
			Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.535.000,00						1 Laporan	10.470.000,00	
			Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.083.200,00						1 Laporan	11.000.000,00	
	3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan						2.200.000,00							8.135.000,00	
		Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.200.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Laporan	8.135.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.06.2.02.0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan						3.535.000,00							10.470.000,00	
		Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.535.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Laporan	10.470.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.06.2.02.0006	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau						2.083.200,00							11.000.000,00	
		Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.083.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Laporan	11.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan						4.375.000,00					Pelaku usaha pertanian dan peternakan di Kota Blitar		16.526.000,00	
		Meningkatnya Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan yang terbit						4.375.000,00					Pelaku usaha pertanian dan peternakan di Kota Blitar		16.526.000,00	
			Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.375.000,00						1 Laporan	16.526.000,00	
	3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan						4.375.000,00							16.526.000,00	
		Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.375.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		1 Laporan	16.526.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
87,	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						71.458.500,00							2.504.319.913,00	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian dan pembinaan kelembagaan usaha						71.458.500,00							2.504.319.913,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Kelembagaan yang Dibentuk dan Beroperasi	14 %		0 %	4 %	71.458.500,00						9 %	2.504.319.913,00	
			999.Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	71.458.500,00						100 Persentase	2.504.319.913,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						71.458.500,00					Petani di Kota Blitar		2.504.319.913,00	
		Meningkatnya kapasitas SDM Pertanian						71.458.500,00					Petani di Kota Blitar		2.504.319.913,00	
			Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi	-		-	-	0,00						-	700.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan	-		-	-	25.880.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan	-		-	-	0,00						-	1.790.819.913,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan	-		-	-	45.578.500,00						-	3.500.000,00	
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian						0,00							700.000.000,00	
		Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	-		-	0 Dokumen	0,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		-	700.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						25.880.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan	-		-	10 Unit	25.880.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		-	10.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa						0,00							1.790.819.913,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan	-		-	0 Unit	0,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		-	1.790.819.913,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.07.2.01.0016	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa						45.578.500,00							3.500.000,00	
		Tersedia Sarana dan prasarana serta Terpeliharanya sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan	-		-	2 Unit	45.578.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penurunan kemiskinan dan pengan gguran		-	3.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Dinas Lingkungan Hidup						25.802.895.750,00							31.207.132.465,00	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						25.802.895.750,00							31.207.132.465,00	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						25.802.895.750,00							31.207.132.465,00	
88,	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						5.822.857.916,00							6.479.632.465,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						5.821.357.916,00							6.427.532.465,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	5.821.357.916,00						100 %	6.427.532.465,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.400.000,00					Aparatur		2.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						1.400.000,00					Aparatur		2.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	500.000,00						1 Berita Acara	750.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	500.000,00						1 Berita Acara	750.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	100.000,00						1 Data	100.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	100.000,00						11 Dokumen	100.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	12 Dokumen		11 Dokumen	12 Dokumen	100.000,00						12 Dokumen	200.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	100.000,00						7 Laporan	100.000,00	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						100.000,00							100.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	100.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		11 Dokumen	100.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100.000,00							100.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	100.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		7 Laporan	100.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						100.000,00							100.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	100.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Data	100.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat						500.000,00							750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Berita Acara	750.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						100.000,00							200.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	12 Dokumen		11 Dokumen	12 Dokumen	100.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Dokumen	200.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis						500.000,00							750.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Berita Acara	750.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat D						5.194.300.000,00					Aparatur		5.730.232.465,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						5.194.300.000,00					Aparatur		5.730.232.465,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	500.000,00						4 Laporan	750.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan		57 Orang/bulan	58 Orang/bulan	5.193.800.000,00						59 Orang/bulan	5.729.482.465,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.193.800.000,00							5.729.482.465,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan		57 Orang/bulan	52 Orang/bulan	5.193.800.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		59 Orang/bulan	5.729.482.465,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						500.000,00							750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Laporan	750.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						100.000,00					Aparatur		200.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat						100.000,00					Aparatur		200.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100.000,00						2 Laporan	200.000,00	
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						100.000,00							200.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Laporan	200.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						100.000,00					Aparatur		200.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah						100.000,00					Aparatur		200.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00						1 Dokumen	200.000,00	
	2.11.01.2.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi						100.000,00							200.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Dokumen	200.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						42.708.900,00					Aparatur		70.000.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						42.708.900,00					Aparatur		70.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	70 Orang		69 Orang	69 Orang	42.708.900,00						70 Orang	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	3 Paket		0 Paket	3 Paket	0,00						3 Paket	30.000.000,00	
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		3 Paket	30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						42.708.900,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang		69 Orang	52 Orang	42.708.900,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		70 Orang	40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						199.592.916,00					Aparatur		218.000.000,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						199.592.916,00					Aparatur		218.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	0,00						36 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58 Laporan		50 Laporan	52 Laporan	85.449.916,00						54 Laporan	90.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	40 Paket		35 Paket	36 Paket	61.100.000,00						37 Paket	65.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	9.641.200,00						2 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.998.700,00						1 Paket	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	33.414.100,00						5 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	4.989.000,00						2 Paket	5.000.000,00	
	2.11.01.2. 06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.998.700,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.998.700,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Paket	3.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						33.414.100,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	33.414.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		5 Paket	35.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2. 06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.989.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	4.989.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Paket	5.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						61.100.000,00							65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		35 Paket	36 Paket	61.100.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		37 Paket	65.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9.641.200,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	9.641.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Paket	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen		36 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		36 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						85.449.916,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58 Laporan		50 Laporan	52 Laporan	85.449.916,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		54 Laporan	90.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.000.000,00					Aparatur		25.000.000,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						10.000.000,00					Aparatur		25.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		0 Unit	5 Unit	10.000.000,00						5 Unit	25.000.000,00	
	2.11.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		0 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		5 Unit	25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						222.985.500,00					Aparatur		287.000.000,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						222.985.500,00					Aparatur		287.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	65.032.500,00						24 Laporan	67.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	26 Laporan		26 Laporan	26 Laporan	157.953.000,00						26 Laporan	220.000.000,00	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						65.032.500,00							67.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	65.032.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		24 Laporan	67.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						157.953.000,00							220.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 Laporan		26 Laporan	13 Laporan	157.953.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		26 Laporan	220.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						151.670.600,00					Aparatur		147.000.000,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						151.670.600,00					Aparatur		147.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	39 Unit		39 Unit	39 Unit	110.497.300,00						39 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	75 Unit		70 Unit	72 Unit	36.173.300,00						74 Unit	40.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90 Unit		0 Unit	85 Unit	5.000.000,00						90 Unit	7.000.000,00	
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						110.497.300,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit		39 Unit	39 Unit	110.497.300,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		39 Unit	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						36.173.300,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit		70 Unit	72 Unit	36.173.300,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		74 Unit	40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90 Unit		0 Unit	85 Unit	5.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		90 Unit	7.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
89,	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						250.000.000,00							32.000.000,00	
		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP						250.000.000,00							32.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	65 Persentase		55 Persentase	58 Persentase	250.000.000,00						60 Persentase	32.000.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						250.000.000,00					Masyarakat		32.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Lingkungan Hidup						250.000.000,00					Masyarakat		32.000.000,00	
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00						1 Dokumen	32.000.000,00	
	2.11.02.2.	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota						250.000.000,00							32.000.000,00	
		RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Dokumen	32.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
90,	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						246.000.800,00							315.500.000,00	
		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup						246.000.800,00							315.500.000,00	
			999.Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	77.8 %		66.7 %	77.8 %	246.000.800,00						77.8 %	315.500.000,00	
			999.Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara	100 %		100 %	100 %	246.000.800,00						100 %	315.500.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						246.000.800,00					Masyarakat		315.500.000,00	
		Meningkatnya Baku Mutu Badan Air						246.000.800,00					Masyarakat		315.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	54.450.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara,	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	160.000.000,00	
			Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	5.000.800,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Baku Mutu Badan						246.000.800,00					Masyarakat		315.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	54.450.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara,	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	160.000.000,00	
			Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	5.000.800,00						1 Laporan	0,00	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara,						5.000.000,00							160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Dokumen	160.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2. 01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi						54.450.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	54.450.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2. 01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat						5.000.800,00							0,00	
		Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan		0 Laporan	3 Laporan	5.000.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Laporan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Baku Mutu Badan Air						246.000.800,00					Masyarakat		315.500.000,00	
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	-		-	-	174.800.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	-		-	-	2.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	-		-	-	4.750.000,00						-	500.000,00	
		Meningkatnya Baku Mutu Badan						246.000.800,00					Masyarakat		315.500.000,00	
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	-		-	-	174.800.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	-		-	-	2.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	-		-	-	4.750.000,00						-	500.000,00	
	2.11.03.2. 01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK						2.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						174.800.000,00							150.000.000,00	
		Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	-		-	1 Lokasi	174.800.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		-	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah						4.750.000,00							500.000,00	
		Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	-		-	1 Dokumen	4.750.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		-	500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
91,	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI**						1.620.115.400,00							6.200.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman						1.620.115.400,00							6.200.000.000,00	
			999.Persentase RTH	16.26 Persentase		16.26 Persentase	16.26 Persentase	1.620.115.400,00						16.26 Persentase	6.200.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						1.620.115.400,00					Masyarakat		6.200.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas RTH Publik						1.620.115.400,00					Masyarakat		6.200.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	20 Unit		18 Unit	18 Unit	1.620.115.400,00						19 Unit	6.200.000.000,00	
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati						1.620.115.400,00							6.200.000.000,00	
		Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	20 Unit		18 Unit	18 Unit	1.620.115.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		19 Unit	6.200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
92,	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**						490.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)						490.000,00							2.000.000,00	
			999.Persentase Limbah B3 yang Terkelola	79.41 Persentase		76.47 Persentase	76.47 Persentase	490.000,00						77.94 Persentase	2.000.000,00	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						490.000,00					Masyarakat		2.000.000,00	
		Meningkatnya Cakupan Layanan limbah B3						490.000,00					Masyarakat		2.000.000,00	
			Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan	55 Usaha		50 Usaha	50 Usaha	490.000,00						50 Usaha	2.000.000,00	
	2.11.05.2.02.0007	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3						490.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan	55 Usaha		50 Usaha	2 Usaha	490.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		50 Usaha	2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
93,	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						1.000.000,00							4.000.000,00	
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan						500.000,00							2.000.000,00	
			999.Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan	71 Usaha/Kegiatan		67 Usaha/Kegiatan	68 Usaha/Kegiatan	500.000,00						69 Usaha/Kegiatan	2.000.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah						1.000.000,00					Masyarakat		4.000.000,00	
		Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan						1.000.000,00					Masyarakat		4.000.000,00	
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	70 Badan Usaha		60 Badan Usaha	60 Badan Usaha	500.000,00						65 Badan Usaha	2.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00						12 Dokumen	2.000.000,00	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						500.000,00							2.000.000,00	
		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Dokumen	2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang						500.000,00							2.000.000,00	
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	70 Badan Usaha		60 Badan Usaha	60 Badan Usaha	500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		65 Badan Usaha	2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
94,	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						45.039.800,00							80.000.000,00	
		Meningkatnya kapasitas dan partisipasi SDM bidang lingkungan hidup						45.039.800,00							80.000.000,00	
			999.Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif	100 %		75 %	75 %	45.039.800,00						75 %	80.000.000,00	
			999.Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	45.039.800,00						100 Persentase	80.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah						45.039.800,00					Masyarakat		80.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terkait Lingkungan Hidup						45.039.800,00					Masyarakat		80.000.000,00	
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat	14 Lembaga		14 Lembaga	14 Lembaga	20.039.800,00						14 Lembaga	50.000.000,00	
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00						3 Dokumen	30.000.000,00	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		3 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok						20.039.800,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	14 Lembaga		14 Lembaga	14 Lembaga	20.039.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		14 Lembaga	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
95,	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						43.350.000,00							24.000.000,00	
		Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup						43.350.000,00							24.000.000,00	
			999.Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	43.350.000,00						100 Persentase	24.000.000,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah						43.350.000,00					Masyarakat		24.000.000,00	
		Meningkatnya Cakupan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat						43.350.000,00					Masyarakat		24.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi	5 Entitas		5 Entitas	5 Entitas	43.350.000,00						5 Entitas	24.000.000,00	
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam						43.350.000,00							24.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas		5 Entitas	5 Entitas	43.350.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		5 Entitas	24.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
96,	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						500.000,00							5.000.000,00	
		Meningkatnya penyelesaian sengketa						500.000,00							5.000.000,00	
			999.Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	500.000,00						100 Persentase	5.000.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						500.000,00					Masyarakat		5.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan lingkungan hidup						500.000,00					Masyarakat		5.000.000,00	
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat	1 Pengaduan		1 Pengaduan	1 Pengaduan	500.000,00						1 Pengaduan	5.000.000,00	
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat						500.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	1 Pengaduan		1 Pengaduan	1 Pengaduan	500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Pengaduan	5.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
97,	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						17.773.541.834,00							18.065.000.000,00	
		Meningkatnya tata kelola						17.773.541.834,00							18.065.000.000,00	
			999.Persentase cakupan layanan persampahan	98.52 %		98.14 %	98.24 %	17.773.541.834,00						98.32 %	18.065.000.000,00	
	2.11.11.2.	Pengelolaan Sampah						17.773.541.834,00					Masyarakat		18.065.000.000,00	
		Meningkatnya Cakupan Layanan Persampahan						17.773.541.834,00					Masyarakat		18.065.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan	3 Kelompok		3 Kelompok	3 Kelompok	212.577.986,00						3 Kelompok	215.000.000,00	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	22950,27 Ton		0 Ton	22950,27 Ton	864.807.200,00						22950,27 Ton	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan,	24 Unit		20 Unit	21 Unit	9.364.545.950,00						22 Unit	10.450.000.000,00	
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah	90 Persentase		90 Persentase	90 Persentase	7.331.610.698,00						90 Persentase	7.400.000.000,00	
	2.11.11.2. 01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						212.577.986,00							215.000.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok		3 Kelompok	3 Kelompok	212.577.986,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		3 Kelompok	215.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2. 01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						9.364.545.950,00							10.450.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	24 Unit		20 Unit	11 Unit	9.364.545.950,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		22 Unit	10.450.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2. 01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan						864.807.200,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	22950,27 Ton		0 Ton	23455,34 Ton	864.807.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		22950,27 Ton	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah						7.331.610.698,00							7.400.000.000,00	
		Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	90 Persentase		90 Persentase	91.50 Persentase	7.331.610.698,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperk uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		90 Persentase	7.400.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						5.112.635.650,00							6.452.207.451,00	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						5.112.635.650,00							6.452.207.451,00	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						5.112.635.650,00							6.452.207.451,00	
98,	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						4.612.898.999,00							5.718.497.331,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						4.612.898.999,00							5.646.497.331,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	4.612.898.999,00						100 %	5.646.497.331,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.727.800,00					ASN Dispenduk Capil		13.874.600,00	
		Tersedianya dokumen perencanaan , pengangaran dan pelaporan kinerja						3.727.800,00					ASN Dispenduk Capil		13.874.600,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.500.000,00						1 Berita Acara	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	231.200,00						4 Dokumen	2.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang diusun	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	500.000,00						10 Dokumen	600.200,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	1.496.600,00						9 Laporan	8.574.400,00	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						231.200,00							2.200.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	231.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	2.200.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.496.600,00							8.574.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	1.496.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Laporan	8.574.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat						1.500.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Berita Acara	2.500.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						500.000,00							600.200,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Dokumen	600.200,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.240.200.000,00					ASN Dispenduk Capil		4.127.675.571,00	
		Terpemuhinya layanan administrasi keuangan perangkat daerah						3.240.200.000,00					ASN Dispenduk Capil		4.127.675.571,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan		26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.240.200.000,00						26 Orang/bulan	4.127.675.571,00	
	2.12.01.2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.240.200.000,00							4.127.675.571,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan		26 Orang/bulan	378 Orang/bulan	3.240.200.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		26 Orang/bulan	4.127.675.571,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						63.783.800,00					ASN Dispenduk Capil		70.000.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						63.783.800,00					ASN Dispenduk Capil		70.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	4 Orang		44 Orang	44 Orang	63.783.800,00						4 Orang	70.000.000,00	
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						63.783.800,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang		44 Orang	132 Orang	63.783.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Orang	70.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						306.213.388,00					ASN Dispenduk Capil, Masyarakat pemohon		402.620.000,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						306.213.388,00					ASN Dispenduk Capil, Masyarakat pemohon		402.620.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	8.100.000,00						2 Dokumen	8.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00						1 Dokumen	72.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	90.021.000,00						25 Laporan	125.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	2 Paket		2 Paket	2 Paket	15.500.000,00						2 Paket	45.220.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.020.988,00						1 Paket	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00						1 Paket	15.300.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	60.271.400,00						1 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	30.300.000,00						3 Paket	32.000.000,00	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.000.000,00							15.300.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	15.300.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60.271.400,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	60.271.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	60.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						30.300.000,00							32.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	30.300.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	32.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.500.000,00							45.220.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	15.500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	45.220.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.020.988,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.020.988,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	45.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						8.100.000,00							8.100.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	8.100.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	8.100.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						90.021.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	90.021.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		25 Laporan	125.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						85.000.000,00							72.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	72.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3.046.400,00					ASN Dispenduk Capil, Masyarakat pemohon		3.350.000,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						3.046.400,00					ASN Dispenduk Capil, Masyarakat pemohon		3.350.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.046.400,00						1 Unit	3.350.000,00	
	2.12.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						3.046.400,00							3.350.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.046.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	3.350.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						694.203.950,00					ASN Dispenduk Capil, Masyarakat pemohon		882.834.000,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						694.203.950,00					ASN Dispenduk Capil, Masyarakat pemohon		882.834.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	189.047.200,00						60 Laporan	231.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	505.156.750,00						13 Laporan	651.834.000,00	
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						189.047.200,00							231.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	189.047.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		60 Laporan	231.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						505.156.750,00							651.834.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	505.156.750,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		13 Laporan	651.834.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						301.723.661,00					ASN Dispenduk Capil, Masyarakat pemohon		218.143.160,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						301.723.661,00					ASN Dispenduk Capil, Masyarakat pemohon		218.143.160,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.080.000,00						1 Unit	886.160,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	48.649.200,00						3 Unit	13.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	26.490.600,00						5 Unit	81.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	16.000.000,00						2 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	2 Unit		2 Unit	2 Unit	138.503.861,00						2 Unit	72.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		1 Unit	1 Unit	71.000.000,00						1 Unit	35.757.000,00	
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						26.490.600,00							81.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	26.490.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	81.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						48.649.200,00							13.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	48.649.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Unit	13.500.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						16.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	16.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	15.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						138.503.861,00							72.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	138.503.861,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	72.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						1.080.000,00							886.160,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.080.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	886.160,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						71.000.000,00							35.757.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	71.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	35.757.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
99,	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						307.628.503,00							326.250.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk						307.628.503,00							326.250.000,00	
			999.Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	30 %		30 %	30 %	307.628.503,00						30 %	326.250.000,00	
			999.Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	99.50 Persentase		99.24 Persentase	99.30 Persentase	307.628.503,00						99.37 Persentase	326.250.000,00	
	2.12.02.2.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						267.418.503,00					Masyarakat		227.000.000,00	
		Terlaksanya pelayanan pendafataran penduduk						267.418.503,00					Masyarakat		227.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	267.418.503,00						12 Dokumen	227.000.000,00	
	2.12.02.2. 01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk						267.418.503,00							227.000.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	267.418.503,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	227.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.	Penataan Pendaftaran Penduduk						13.200.000,00					Masyarakat		12.500.000,00	
		Terlaksannya penataan pendaftaran penduduk						13.200.000,00					Masyarakat		12.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.200.000,00						1 Dokumen	12.500.000,00	
	2.12.02.2. 02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan						13.200.000,00							12.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.200.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	12.500.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.	Penyelenggaraan Pendaftaran						25.010.000,00					Masyarakat		62.750.000,00	
		Terselenggaranya pendaftaran						25.010.000,00					Masyarakat		62.750.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	23.635.000,00						1 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.375.000,00						1 Laporan	7.750.000,00	
	2.12.02.2. 03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk						1.375.000,00							7.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.375.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	7.750.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk						23.635.000,00							55.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	23.635.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	55.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2. 04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran						2.000.000,00					Masyarakat		24.000.000,00	
		Terlaksanay pembinaan, pengawasan dan rvaluasi layanan pendaftaran penduduk						2.000.000,00					Masyarakat		24.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00						1 Laporan	24.000.000,00	
	2.12.02.2. 04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk						2.000.000,00							24.000.000,00	
		Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	24.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
100,	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						67.653.300,00							210.500.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil						67.653.300,00							210.500.000,00	
			1.Persentase kepemilikan dokumen akte kelahiran seluruh penduduk	73.27 %		69.17 %	70.19 %	67.653.300,00						71.22 %	210.500.000,00	
			2.Persentase kepemilikan dokumen perkawinan	95.71 %		93.76 %	94.24 %	67.653.300,00						94.73 %	210.500.000,00	
			3.Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	67.653.300,00						100 Persentase	210.500.000,00	
			4.Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	67.653.300,00						100 Persentase	210.500.000,00	
			5.Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	67.653.300,00						100 Persentase	210.500.000,00	
			6.Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	100 %		99.85 %	99.89 %	67.653.300,00						99.93 %	210.500.000,00	
			7.Persentase kepemilikan dokumen perceraian	95.88 %		88.63 %	90.45 %	67.653.300,00						92.33 %	210.500.000,00	
	2.12.03.2.	Pelayanan Pencatatan Sipil						23.622.700,00					Masyarakat		91.500.000,00	
		Terlaksananya pelayanan pencatatan						23.622.700,00					Masyarakat		91.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	17.672.700,00						12 Dokumen	79.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.950.000,00						1 Paket	12.000.000,00	
	2.12.03.2. 01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting						17.672.700,00							79.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	17.672.700,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	79.500.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan						5.950.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.950.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	12.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						39.085.600,00					Masyarakat		94.000.000,00	
		Terselenggaranya pencatatan sipil						39.085.600,00					Masyarakat		94.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	34.885.600,00						1 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.200.000,00						1 Laporan	14.000.000,00	
	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT						4.200.000,00							14.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.200.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	14.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil						34.885.600,00							80.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	34.885.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	80.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						4.945.000,00					Operator layanan		25.000.000,00	
		Terselenggarakannya pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil						4.945.000,00					Operator layanan adminduk		25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.945.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
	2.12.03.2.	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan						4.945.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.945.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
101,	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						109.118.200,00							170.000.000,00	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan						109.118.200,00							155.000.000,00	
			999.Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	100 Persentase		74.19 Persentase	80.65 Persentase	109.118.200,00						87.10 Persentase	155.000.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						1.772.800,00					Masyarakat		15.000.000,00	
		Terlaksananya pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan						1.772.800,00					Masyarakat		15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	1.772.800,00						2 Dokumen	15.000.000,00	
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan						1.772.800,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	1.772.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						41.558.000,00					Masyarakat		40.000.000,00	
		Terlaksananya penataan pengelolaan administrasi kependudukan						41.558.000,00					Masyarakat		40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	41.558.000,00						1 Dokumen	40.000.000,00	
	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi						41.558.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	41.558.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						53.881.600,00					Masyarakat		90.000.000,00	
		Terlaksananya penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						53.881.600,00					Masyarakat		90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.025.800,00						1 Laporan	84.000.000,00	
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						48.025.800,00							84.000.000,00	
		Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.025.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	84.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						11.905.800,00					Operator layanan adminduk		25.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan						11.905.800,00					Operator layanan adminduk		25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.305.800,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.600.000,00						1 Laporan	15.000.000,00	
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						6.600.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.600.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	15.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data						5.305.800,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.305.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	10.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Terlaksananya penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						53.881.600,00					Masyarakat		90.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	-		-	-	5.855.800,00						-	6.000.000,00	
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan						5.855.800,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	-		-	1 Dokumen	5.855.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		-	6.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
102,	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						15.336.648,00							26.960.120,00	
		Meningkatnya kualitas profil kependudukan						15.336.648,00							26.960.120,00	
			999.Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	15.336.648,00						100 Persentase	26.960.120,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan						15.336.648,00					OPD, lembaga, masyarakat		26.960.120,00	
		Tersedianya profil kependudukan						15.336.648,00					OPD, lembaga, masyarakat		26.960.120,00	
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	15.336.648,00						2 Dokumen	26.960.120,00	
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang						15.336.648,00							26.960.120,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	15.336.648,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	26.960.120,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Dinas Perhubungan						17.945.153.350,00							16.922.951.921,00	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						17.945.153.350,00							16.922.951.921,00	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						17.945.153.350,00							16.922.951.921,00	
103,	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						6.471.468.683,45							7.170.985.277,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						6.468.718.683,45							7.108.485.277,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	6.468.718.683,45						100 %	7.108.485.277,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.175.000,00					Masyarakat pengguna layanan perhubungan		28.500.000,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						13.175.000,00					Masyarakat pengguna layanan perhubungan		28.500.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	2.750.000,00						1 Berita Acara	5.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	2.750.000,00						1 Berita Acara	5.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	1.375.000,00						1 Data	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.750.000,00						3 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	1.050.000,00						11 Dokumen	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	3.500.000,00						9 Laporan	4.500.000,00	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.750.000,00							10.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.750.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		3 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.500.000,00							4.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	3.500.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		9 Laporan	4.500.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						1.375.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	1.375.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Data	1.500.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat						2.750.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	2.750.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Berita Acara	5.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						1.050.000,00							2.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	1.050.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		11 Dokumen	2.500.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis						2.750.000,00							5.000.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	2.750.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Berita Acara	5.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.108.516.932,81					Masyarakat pengguna layanan perhubungan		5.637.985.277,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						5.108.516.932,81					Masyarakat pengguna layanan perhubungan		5.637.985.277,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	1.990.000,00						18 Laporan	1.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	576 Orang/bulan		576 Orang/bulan	576 Orang/bulan	5.106.526.932,81						576 Orang/bulan	5.636.485.277,00	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.106.526.932,81							5.636.485.277,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	576 Orang/bulan		576 Orang/bulan	576 Orang/bulan	5.106.526.932,81	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		576 Orang/bulan	5.636.485.277,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.990.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	1.990.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		18 Laporan	1.500.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.000.000,00					Masyarakat pengguna layanan perhubungan		2.000.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah						1.000.000,00					Masyarakat pengguna layanan perhubungan		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00						12 Laporan	2.000.000,00	
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Laporan	2.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						2.000.000,00					Masyarakat pengguna layanan perhubungan		2.000.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah						2.000.000,00					Masyarakat pengguna layanan perhubungan		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00						12 Dokumen	2.000.000,00	
	2.15.01.2.05.0001	Pelaporan Pengelolaan Retribusi						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Dokumen	2.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						64.907.700,00					Masyarakat pengguna layanan perhubungan		120.000.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						64.907.700,00					Masyarakat pengguna layanan perhubungan		120.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	276 Orang		276 Orang	276 Orang	64.907.700,00						276 Orang	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	3 Paket		3 Paket	0 Paket	0,00						0 Paket	0,00	
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	0,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		0 Paket	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						64.907.700,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	276 Orang		276 Orang	276 Orang	64.907.700,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		276 Orang	120.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						229.511.000,00					Masyarakat pengguna layanan perhubungan		316.500.000,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daera						229.511.000,00					Masyarakat pengguna layanan perhubungan		316.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	4.956.000,00						24 Dokumen	8.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.984.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	138.000.000,00						40 Laporan	180.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	16 Paket		16 Paket	16 Paket	28.939.000,00						16 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.494.500,00						1 Paket	9.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.300.000,00						1 Paket	9.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	18.989.900,00						4 Paket	17.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	11.847.600,00						7 Paket	8.000.000,00	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.300.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.300.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Paket	9.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18.989.900,00							17.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	18.989.900,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Paket	17.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						11.847.600,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	11.847.600,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		7 Paket	8.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						28.939.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	16 Paket	28.939.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		16 Paket	60.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.494.500,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.494.500,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Paket	9.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.956.000,00							8.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	4.956.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		24 Dokumen	8.500.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						138.000.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	138.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		40 Laporan	180.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						9.984.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.984.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.078.700,00					Masyarakat pengguna layanan perhubungan		25.000.000,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						7.078.700,00					Masyarakat pengguna layanan perhubungan		25.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	2 Unit	4.724.500,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		1 Unit	1 Unit	2.354.200,00						1 Unit	25.000.000,00	
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						4.724.500,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	4.724.500,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		0 Unit	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin						2.354.200,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		1 Unit	1 Unit	2.354.200,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Unit	25.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						691.402.050,64					Masyarakat pengguna layanan perhubungan		712.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						691.402.050,64					Masyarakat pengguna layanan perhubungan		712.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	188.968.800,00						36 Laporan	225.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	502.433.250,64						13 Laporan	487.000.000,00	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						188.968.800,00							225.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	188.968.800,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		36 Laporan	225.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						502.433.250,64							487.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	502.433.250,64	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		13 Laporan	487.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						353.877.300,00					Masyarakat pengguna layanan perhubungan		327.000.000,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						353.877.300,00					Masyarakat pengguna layanan perhubungan		327.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	45 Unit		35 Unit	39 Unit	212.986.200,00						39 Unit	179.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	15 Unit		15 Unit	15 Unit	94.381.500,00						15 Unit	128.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	40 Unit		20 Unit	20 Unit	21.666.600,00						20 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		1 Unit	1 Unit	24.843.000,00						1 Unit	10.000.000,00	
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						94.381.500,00							128.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	94.381.500,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		15 Unit	128.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						212.986.200,00							179.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit		35 Unit	35 Unit	212.986.200,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		39 Unit	179.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						21.666.600,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		20 Unit	53 Unit	21.666.600,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		20 Unit	10.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						24.843.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	4 Unit	24.843.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Unit	10.000.000,00	Dinas Perhubungan
104,	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						10.250.308.666,55							9.673.966.644,00	
		Meningkatnya ketertiban jalan						1.880.861.374,04							3.594.000.000,00	
			1.Persentase Ruas Jalan yang Menerapkan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	80 %		40 %	50 %	1.880.861.374,04						60 %	3.594.000.000,00	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						1.230.880.000,00					Masyarakat pengguna layanan parkir tepi jalan umum		1.265.000.000,00	
		Meningkatnya kinerja pelayanan parkir						1.230.880.000,00					Masyarakat pengguna layanan parkir tepi jalan umum		1.265.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.230.880.000,00						12 Laporan	1.265.000.000,00	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan						1.230.880.000,00							1.265.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.230.880.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Laporan	1.265.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						649.981.374,04					Masyarakat pengguna jalan		2.329.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas jalan						649.981.374,04					Masyarakat pengguna jalan		2.329.000.000,00	
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	29.400.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	81.941.300,00						1 Laporan	84.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	423.990.074,00						12 Laporan	2.060.000.000,00	
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	99.650.000,00						12 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,04						1 Dokumen	100.000.000,00	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						423.990.074,00							2.060.000.000,00	
		Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	423.990.074,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Laporan	2.060.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						99.650.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	99.650.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Dokumen	60.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan						29.400.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	29.400.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas						15.000.000,04							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,04	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						81.941.300,00							84.000.000,00	
		Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	81.941.300,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Laporan	84.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya kualitas sarpras perhubungan						4.779.097.908,03							4.318.966.644,00	
			1.Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	89.40 Persentase		88.38 Persentase	88.42 Persentase	4.779.097.908,03						88.50 Persentase	4.318.966.644,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						4.779.097.908,03					Masyarakat pengguna jalan		4.318.966.644,00	
		Meningkatnya ruas jalan berkeselamatan						4.779.097.908,03					Masyarakat pengguna jalan		4.318.966.644,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit		5 Unit	6 Unit	16.708.400,00						5 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	50 Unit		53 Unit	23 Unit	356.056.176,03						23 Unit	75.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	20 Unit		11 Unit	20 Unit	47.826.432,00						25 Unit	293.514.723,00	
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan	5915 Unit		5822 Unit	5833 Unit	4.358.506.900,00						5855 Unit	3.925.451.921,00	
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						47.826.432,00							293.514.723,00	
		Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	20 Unit		11 Unit	3 Unit	47.826.432,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		25 Unit	293.514.723,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						16.708.400,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit		5 Unit	4 Unit	16.708.400,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		5 Unit	25.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan						4.358.506.900,00							3.925.451.921,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5915 Unit		5822 Unit	5866 Unit	4.358.506.900,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		5855 Unit	3.925.451.921,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						356.056.176,03							75.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	50 Unit		53 Unit	28 Unit	356.056.176,03	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		23 Unit	75.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya layanan angkutan jalan berkeselamatan						3.590.349.384,48							1.761.000.000,00	
			1.IKM Layanan Angkutan Jalan Berkeselamatan	93.25 Indeks		92.25 Indeks	92.50 Indeks	3.590.349.384,48						92.75 Indeks	1.761.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas sarpras angkutan						208.764.770,00					Masyarakat pengguna layanan		85.000.000,00	
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan	10 Unit		1 Unit	1 Unit	208.764.770,00						10 Unit	25.000.000,00	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan						208.764.770,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	10 Unit		1 Unit	1 Unit	208.764.770,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		10 Unit	25.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						180.073.395,00					Masyarakat pengguna layanan uji kendaraan		160.000.000,00	
		Meningkatnya kelaikan angkutan umum						180.073.395,00					Masyarakat pengguna layanan uji kendaraan		160.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 Dokumen		1000 Dokumen	2000 Dokumen	10.200.000,00						2000 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	4200 Unit		4000 Unit	4050 Unit	97.961.060,00						4100 Unit	35.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit		11 Unit	11 Unit	71.912.335,00						11 Unit	75.000.000,00	
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor						97.961.060,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	4200 Unit		4000 Unit	4050 Unit	97.961.060,00	Kota Blitar	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4100 Unit	35.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2. 05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						10.200.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 Dokumen		1000 Dokumen	400 Dokumen	10.200.000,00	Kota Blitar	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2000 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2. 05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan						71.912.335,00							75.000.000,00	
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit		11 Unit	11 Unit	71.912.335,00	Kota Blitar	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		11 Unit	75.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2. 09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						3.201.511.219,48					Masyarakat pengguna layanan angkutan		1.516.000.000,00	
		Meningkatnya layanan angkutan orang						3.201.511.219,48					Masyarakat pengguna layanan		1.516.000.000,00	
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	11 Unit		10 Unit	10 Unit	372.289.200,00						10 Unit	448.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.829.222.019,48						12 Laporan	1.068.000.000,00	
	2.15.02.2. 09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)						2.829.222.019,48							1.068.000.000,00	
		Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.829.222.019,48	Kota Blitar	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Laporan	1.068.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2. 09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						372.289.200,00							448.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	11 Unit		10 Unit	10 Unit	372.289.200,00	Kota Blitar	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		10 Unit	448.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						208.764.770,00					Masyarakat pengguna layanan		85.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas sarpras angkutan						208.764.770,00					Masyarakat pengguna layanan		85.000.000,00	
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	-		-	-	0,00						-	60.000.000,00	
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C						0,00							60.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	-		-	1 Dokumen	0,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		-	60.000.000,00	Dinas Perhubungan
105,	**2.15.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**						1.223.376.000,00							78.000.000,00	
		Meningkatnya pengelolaan perlintasan kereta api						1.223.376.000,00							78.000.000,00	
			1.Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	1.223.376.000,00						100 Persentase	78.000.000,00	
	2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian						1.223.376.000,00					Masyarakat pengguna jalan		78.000.000,00	
		Meningkatnya keselamatan perlintasan kereta api						1.223.376.000,00					Masyarakat pengguna jalan		78.000.000,00	
			Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang	7 Unit		7 Unit	7 Unit	1.223.376.000,00						7 Unit	78.000.000,00	
	2.15.05.2.01.0004	Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota						1.223.376.000,00							78.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia	7 Unit		7 Unit	7 Unit	1.223.376.000,00	Kota Blitar	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		7 Unit	78.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik						16.960.415.250,00							13.725.157.460,00	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						16.960.415.250,00							13.725.157.460,00	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						16.295.696.950,00							13.081.857.460,00	
106,	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						5.175.642.135,00							5.666.272.460,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						5.171.242.135,00							5.664.622.460,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	5.171.242.135,00						100 %	5.664.622.460,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						11.000.000,00					Masyarakat dan ASN		13.380.000,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						11.000.000,00					Masyarakat dan ASN		13.380.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	3.300.000,00						1 Berita Acara	3.300.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.100.000,00						1 Berita Acara	1.650.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	1.100.000,00						1 Data	1.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	2.200.000,00						2 Dokumen	2.255.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	1.100.000,00						8 Dokumen	1.375.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	2.200.000,00						10 Laporan	3.150.000,00	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.200.000,00							2.255.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	2.255.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.200.000,00							3.150.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	2.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Laporan	3.150.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						1.100.000,00							1.650.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	1.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		1 Data	1.650.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat						3.300.000,00							3.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	3.300.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Sentul || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Berita Acara	3.300.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						1.100.000,00							1.375.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	8 Dokumen		8 Dokumen	10 Dokumen	1.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Sentul	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Dokumen	1.375.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis						1.100.000,00							1.650.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Sentul || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		1 Berita Acara	1.650.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat						3.930.750.000,00					ASN		4.506.827.108,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						3.930.750.000,00					ASN		4.506.827.108,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	400.000,00						4 Laporan	400.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	455 Orang/bulan		455 Orang/bulan	455 Orang/bulan	3.930.350.000,00						455 Orang/bulan	4.506.427.108,00	
	2.16.01.2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.930.350.000,00							4.506.427.108,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	455 Orang/bulan		455 Orang/bulan	455/13 Orang/bulan	3.930.350.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		455 Orang/bulan	4.506.427.108,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						400.000,00							400.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	400.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Sentul || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	400.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						76.584.550,00					Masyarakat dan ASN		87.292.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						76.584.550,00					Masyarakat dan ASN		87.292.600,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	70 Orang		70 Orang	70 Orang	76.584.550,00						70 Orang	87.292.600,00	
	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						76.584.550,00							87.292.600,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang		70 Orang	70 Orang	76.584.550,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		70 Orang	87.292.600,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						227.476.500,00					ASN		190.268.950,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						227.476.500,00					ASN		190.268.950,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.710.000,00						12 Dokumen	4.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	2.056.250,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	124.200.000,00						20 Laporan	116.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	20 Paket		20 Paket	20 Paket	35.769.600,00						20 Paket	35.769.600,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.977.800,00						1 Paket	2.389.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.832.500,00						4 Paket	5.832.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	10.030.000,00						3 Paket	8.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	15.956.600,00						5 Paket	15.011.600,00	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.832.500,00							5.832.500,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.832.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	5.832.500,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.030.000,00							8.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	10.030.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	8.500.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						15.956.600,00							15.011.600,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	15.956.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	15.011.600,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						35.769.600,00							35.769.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	28 Paket	35.769.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		20 Paket	35.769.600,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.977.800,00							2.389.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.977.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	2.389.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.710.000,00							4.710.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	24 Dokumen	4.710.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	4.710.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						124.200.000,00							116.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	24 Laporan	124.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		20 Laporan	116.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						25.000.000,00							2.056.250,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	2.056.250,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100.972.100,00					ASN		35.746.000,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						100.972.100,00					ASN		35.746.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit		30 Unit	30 Unit	9.497.600,00						30 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		0 Unit	6 Unit	91.474.500,00						6 Unit	20.746.000,00	
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						9.497.600,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit		30 Unit	10 Unit	9.497.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		30 Unit	15.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						91.474.500,00							20.746.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		0 Unit	2 Unit	91.474.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	20.746.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						574.992.500,00					TPL dan ASN		585.695.400,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						574.992.500,00					TPL dan ASN		585.695.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	351.992.500,00						36 Laporan	362.695.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	223.000.000,00						13 Laporan	223.000.000,00	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						351.992.500,00							362.695.400,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	351.992.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	362.695.400,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						223.000.000,00							223.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	223.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		13 Laporan	223.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						253.866.485,00					ASN/THL		247.062.402,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	122.467.800,00						8 Unit	82.062.402,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit		8 Unit	8 Unit	5.000.000,00						8 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	10 Unit		10 Unit	10 Unit	59.600.000,00						10 Unit	60.000.000,00	
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						122.467.800,00							82.062.402,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	7 Unit	122.467.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Unit	82.062.402,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit		8 Unit	8 Unit	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Unit	5.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						59.600.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	59.600.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Unit	60.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						253.866.485,00					ASN/THL		247.062.402,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						253.866.485,00					ASN/THL		247.062.402,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	-		-	-	66.798.685,00						-	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						66.798.685,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	66.798.685,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		-	100.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
107,	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						3.539.401.650,00							2.106.000.000,00	
		Meningkatnya Jangkauan dan kualitas komunikasi publik						3.539.401.650,00							2.106.000.000,00	
			999.Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah	90 %		86 %	87 %	3.539.401.650,00						88 %	2.106.000.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						3.539.401.650,00					ASN dan Masyarakat		2.106.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik						3.539.401.650,00					ASN dan Masyarakat		2.106.000.000,00	
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3.	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	760.737.000,00						13 Laporan	350.000.000,00	
	2.16.02.2.	Relasi Media						760.737.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	760.737.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Sentul || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		13 Laporan	350.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik						3.539.401.650,00					ASN dan Masyarakat		2.106.000.000,00	
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-		-	-	33.867.000,00						-	28.000.000,00	
			Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	-	1.417.238.900,00						-	1.030.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di	-		-	-	542.623.650,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	-	99.470.000,00						-	23.000.000,00	
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda	-		-	-	574.912.000,00						-	450.000.000,00	
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	-	54.946.000,00						-	45.000.000,00	
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	-	55.607.100,00						-	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian						55.607.100,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	85 %	55.607.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		-	60.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik						1.417.238.900,00							1.030.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	67 Orang	1.417.238.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		-	1.030.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.02.2.	Penyusunan Strategi Komunikasi						54.946.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	4 Dokumen	54.946.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		-	45.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.02.2.01.0029	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik						574.912.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	5 Rekomendasi	574.912.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		-	450.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.02.2.01.0030	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik						33.867.000,00							28.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-		-	300 Orang	33.867.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		-	28.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.02.2.01.0031	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						542.623.650,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	5 Komunitas	542.623.650,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		-	120.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.02.2.	Penyusunan Konten						99.470.000,00							23.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	540 Konten	99.470.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		-	23.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
108,	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						7.580.653.165,00							5.309.585.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Digitalisasi Pemerintahan						7.580.653.165,00							5.309.585.000,00	
			1.Persentase pemenuhan layanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis digital	92.45 %		87.32 %	88.41 %	7.580.653.165,00						89.49 %	5.309.585.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						233.576.000,00					Masyarakat dan ASN		63.000.000,00	
		Meningkatnya Penerapan Nama Domain dan Sub Domain pemerintah						233.576.000,00					Masyarakat dan ASN		63.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	233.576.000,00						2 Dokumen	63.000.000,00	
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa						233.576.000,00							63.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	233.576.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		2 Dokumen	63.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						7.347.077.165,00					Mayarakat dan ASN		5.246.585.000,00	
		Meningkatnya Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah						7.347.077.165,00					Mayarakat dan ASN		5.246.585.000,00	
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	32.625.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	12.550.000,00						3 Dokumen	19.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan E-Goverment						7.347.077.165,00					Mayarakat dan ASN		5.246.585.000,00	
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	32.625.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	12.550.000,00						3 Dokumen	19.000.000,00	
	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE						32.625.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	32.625.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		1 Laporan	30.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas						12.550.000,00							19.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	12.550.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	19.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Meningkatnya Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah						7.347.077.165,00					Mayarakat dan ASN		5.246.585.000,00	
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat	-		-	-	2.140.800,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta	-		-	-	220.575.000,00						-	210.000.000,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan dan/atau	-		-	-	377.585.000,00						-	377.585.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan	-		-	-	3.087.360.000,00						-	3.400.000.000,00	
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	-		-	-	3.614.241.365,00						-	1.200.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan E-Goverment						7.347.077.165,00					Mayarakat dan ASN		5.246.585.000,00	
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat	-		-	-	2.140.800,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta	-		-	-	220.575.000,00						-	210.000.000,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan dan/atau	-		-	-	377.585.000,00						-	377.585.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan	-		-	-	3.087.360.000,00						-	3.400.000.000,00	
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	-		-	-	3.614.241.365,00						-	1.200.000.000,00	
	2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet						3.087.360.000,00							3.400.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	30 Titik	3.087.360.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		-	3.400.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.03.2.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit						220.575.000,00							210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	2 Dokumen	220.575.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Sentul || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		-	210.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi						377.585.000,00							377.585.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	11 Layanan	377.585.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		-	377.585.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						3.614.241.365,00							1.200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	30 Titik	3.614.241.365,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		-	1.200.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.03.2.02.0044	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah						2.140.800,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat	-		-	21 Aplikasi	2.140.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		-	10.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						324.698.700,00							246.800.000,00	
109,	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						324.698.700,00							246.800.000,00	
		Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik						324.698.700,00							213.800.000,00	
			1.Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan	100 %		100 %	100 %	324.698.700,00						100 %	213.800.000,00	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral						324.698.700,00					PERANGKAT DAERAH		246.800.000,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	58.698.700,00						2 Laporan	35.000.000,00	
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	320 Orang		240 Orang	260 Orang	113.000.000,00						280 Orang	87.000.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh	95 %		80 %	85 %	8.000.000,00						90 %	8.800.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi	95 %		80 %	85 %	30.000.000,00						90 %	33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 %		80 %	85 %	45.000.000,00						90 %	50.000.000,00	
	2.20.02.2.	Pemenuhan Prinsip Satu Data						30.000.000,00							33.000.000,00	
		Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	95 %		80 %	80 %	30.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Sentul || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		90 %	33.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.20.02.2.	Peningkatan Kualitas Statistik						8.000.000,00							8.800.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	95 %		80 %	80 %	8.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		90 %	8.800.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.20.02.2. 01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral						113.000.000,00							87.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	320 Orang		240 Orang	260 Orang	113.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		280 Orang	87.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.20.02.2. 01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar						45.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 %		80 %	80 %	45.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		90 %	50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.20.02.2. 01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral						58.698.700,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	58.698.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	35.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.20.02.2. 01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						324.698.700,00					PERANGKAT DAERAH		246.800.000,00	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral						324.698.700,00					PERANGKAT DAERAH		246.800.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	-		-	-	70.000.000,00						-	33.000.000,00	
	2.20.02.2. 01.0023	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik						70.000.000,00							33.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	85 %	70.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		-	33.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						340.019.600,00							396.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
110,	2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						340.019.600,00							396.500.000,00	
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah						340.019.600,00							396.500.000,00	
			1.Persentase Perangkat Daerah yang hasil penilaiain implementasi persandian untuk pengaman informasi	83.3 %		70 %	73.3 %	340.019.600,00						76.7 %	396.500.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						340.019.600,00					PERANGKAT DAERAH,Masyarakat		396.500.000,00	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah						340.019.600,00					PERANGKAT DAERAH,Masyarakat		396.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	170.619.600,00						1 Laporan	201.500.000,00	
	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis						170.619.600,00							201.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	170.619.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	201.500.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah						340.019.600,00					PERANGKAT DAERAH,Masyarakat		396.500.000,00	
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai	-		-	-	4.400.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	165.000.000,00						-	190.000.000,00	
	2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						4.400.000,00							5.000.000,00	
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam	-		-	1 Dokumen	4.400.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Sentul || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						165.000.000,00							190.000.000,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	1 Laporan	165.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		-	190.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja						7.673.987.450,00							11.321.065.432,00	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						7.673.987.450,00							11.321.065.432,00	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						2.147.537.500,00							2.949.567.552,00	
111,	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						2.018.000.000,00							2.208.672.552,00	
		Terpenuhinya tenaga kerja sesuai standar kompetensi perusahaan						2.018.000.000,00							2.208.672.552,00	
			999.Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat	10.15 %		9.95 %	10.01 %	2.018.000.000,00						10.05 %	2.208.672.552,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						2.018.000.000,00					tenaga kerja		2.208.672.552,00	
		Meningkatnya sertifikasi kompetensi Pencari Kerja						2.018.000.000,00					tenaga kerja		2.208.672.552,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada	-		-	-	2.018.000.000,00						-	2.208.672.552,00	
	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi						2.018.000.000,00							2.208.672.552,00	
		Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	150 Orang	2.018.000.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	2.208.672.552,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
112,	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						77.277.500,00							595.000.000,00	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja						77.277.500,00							595.000.000,00	
			999.Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	51.75 %		51.55 %	51.6 %	77.277.500,00						51.65 %	595.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						71.277.400,00					tenaga kerja		40.000.000,00	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja melalui sistem magang dan bursa kerja khusus (BKK)						71.277.400,00					tenaga kerja		40.000.000,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	3.650.000,00						30 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain	2 Orang		2 Orang	2 Orang	9.151.800,00						2 Orang	30.000.000,00	
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja						9.151.800,00							30.000.000,00	
		Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	2 Orang		2 Orang	2 Orang	9.151.800,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2 Orang	30.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						3.650.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	30 Orang		30 Orang	10 Orang	3.650.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		30 Orang	10.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.07.04.2.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						6.000.100,00					tenaga kerja		555.000.000,00	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja						6.000.100,00					tenaga kerja		555.000.000,00	
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir	250 Orang		230 Orang	250 Orang	1.500.000,00						250 Orang	200.000.000,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa	100 Orang		50 Orang	100 Orang	4.500.100,00						100 Orang	355.000.000,00	
	2.07.04.2. 03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						1.500.000,00							200.000.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	250 Orang		230 Orang	50 Orang	1.500.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		250 Orang	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.07.04.2.	Job Fair/Bursa Kerja						4.500.100,00							355.000.000,00	
		Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang		50 Orang	10 Orang	4.500.100,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		100 Orang	355.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja melalui sistem magang dan bursa kerja khusus (BKK)						71.277.400,00					tenaga kerja		40.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	-		-	-	58.475.600,00						-	0,00	
	2.07.04.2.	Perluasan Kesempatan Kerja						58.475.600,00							0,00	
		Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	-		-	0 Orang	58.475.600,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
113,	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						52.260.000,00							145.895.000,00	
		Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi						49.960.000,00							145.895.000,00	
			999.Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog	1069 Orang		1028 Orang	1043 Orang	49.960.000,00						1045 Orang	145.895.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah						49.960.000,00					perusahaan		145.895.000,00	
		Meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan						49.960.000,00					perusahaan		145.895.000,00	
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	4 Asosiasi dan Serikat Pekerja		4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	11.410.000,00						4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	15.000.000,00	
			Jumlah Perkara Perselisihan yang	5 Perkara		5 Perkara	5 Perkara	4.100.000,00						5 Perkara	11.000.000,00	
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 Perkara		4 Perkara	4 Perkara	34.450.000,00						4 Perkara	119.895.000,00	
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50 Orang		0 Orang	50 Orang	0,00						50 Orang	0,00	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						34.450.000,00							119.895.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 Perkara		4 Perkara	4 Perkara	34.450.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		4 Perkara	119.895.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						4.100.000,00							11.000.000,00	
		Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	5 Perkara		5 Perkara	5 Perkara	4.100.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		5 Perkara	11.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi						11.410.000,00							15.000.000,00	
		Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	4 Asosiasi dan Serikat Pekerja		4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	11.410.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	15.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50 Orang		0 Orang	50 Orang	0,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		50 Orang	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog	-		-	1043 orang	2.300.000,00						-	0,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu)						2.300.000,00					perusahaan, tenaga kerja		0,00	
		-						2.300.000,00					perusahaan, tenaga kerja		0,00	
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di	-		-	-	2.300.000,00						-	0,00	
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan						2.300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	-		-	1 Perusahaan	2.300.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						5.526.449.950,00							8.371.497.880,00	
114,	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						4.043.447.878,00							4.761.497.880,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						4.043.447.878,00							4.751.497.880,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	89 %		85 %	100 %	4.043.447.878,00						87 %	4.751.497.880,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.515.700,00					Dinas koperasi UKM dan Naker		21.215.600,00	
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.515.700,00					Dinas koperasi UKM dan Naker		21.215.600,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Berita Acara		Berita Acara	1 Berita Acara	2.491.700,00						1 Berita Acara	5.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	2.464.400,00						1 Data	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.859.800,00						4 Dokumen	2.859.800,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	3.340.000,00						13 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	3.359.800,00						8 Laporan	3.355.800,00	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.859.800,00							2.859.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.859.800,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		4 Dokumen	2.859.800,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.01.2. [illegible]	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.359.800,00							3.355.800,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	6 Laporan	3.359.800,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		8 Laporan	3.355.800,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.01.2. 01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						2.464.400,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	2.464.400,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Data	5.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.01.2. 01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat						2.491.700,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		Berita Acara	1 Berita Acara	2.491.700,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Berita Acara	5.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.01.2. 01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						3.340.000,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	6 Dokumen	3.340.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		13 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.278.208.918,00					Dinas koperasi UKM dan Naker		3.953.173.620,00	
		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.278.208.918,00					Dinas koperasi UKM dan Naker		3.953.173.620,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.308.500,00						12 Laporan	2.238.600,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan		360 Orang/bulan	360 Orang/bulan	3.275.900.418,00						360 Orang/bulan	3.950.935.020,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.275.900.418,00							3.950.935.020,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan		360 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3.275.900.418,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		360 Orang/bulan	3.950.935.020,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.308.500,00							2.238.600,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.308.500,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		12 Laporan	2.238.600,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						76.925.500,00					PNS dan PPPK		90.387.600,00	
		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						76.925.500,00					PNS dan PPPK		90.387.600,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	50 Orang		50 Orang	50 Orang	76.925.500,00						50 Orang	50.087.200,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	2 Paket		2 Paket	2 Paket	0,00						2 Paket	40.300.400,00	
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							40.300.400,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	0,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2 Paket	40.300.400,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						76.925.500,00							50.087.200,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	76.925.500,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		50 Orang	50.087.200,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						194.621.700,00					Dinas koperasi UKM dan Naker		194.697.100,00	
		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						194.621.700,00					Dinas koperasi UKM dan Naker		194.697.100,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.508.000,00						1 Dokumen	5.508.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.304.000,00						1 Dokumen	5.304.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00						12 Laporan	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	28.712.000,00						1 Paket	28.782.400,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	22.730.100,00						1 Paket	22.735.100,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.206.100,00						1 Paket	5.206.100,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	18.746.000,00						1 Paket	18.746.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.415.500,00						1 Paket	8.415.500,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.206.100,00							5.206.100,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.206.100,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Paket	5.206.100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18.746.000,00							18.746.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Pa ket		1 Paket	1 Pa ket	18.746.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Paket	18.746.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						8.415.500,00							8.415.500,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Pa ket		1 Paket	1 Pa ket	8.415.500,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Paket	8.415.500,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						28.712.000,00							28.782.400,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Pa ket		1 Paket	11 Paket	28.712.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Paket	28.782.400,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						22.730.100,00							22.735.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	22.730.100,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Paket	22.735.100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.508.000,00							5.508.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.508.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Dokumen	5.508.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		12 Laporan	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.304.000,00							5.304.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.304.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Dokumen	5.304.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						25.517.600,00					BMD Dinkop UKM dan Naker		167.000.000,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						25.517.600,00					BMD Dinkop UKM dan Naker		167.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	1 Unit	25.517.600,00						2 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	102.000.000,00	
	2.17.01.2.	Pengadaan Mebel						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2 Unit	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						25.517.600,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	3 Unit	25.517.600,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2 Unit	15.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							102.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Unit	0 Unit	0,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit	102.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						315.844.460,00					Dinas koperasi UKM dan Naker		90.209.960,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perkantoran						315.844.460,00					Dinas koperasi UKM dan Naker		90.209.960,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	90.209.960,00						12 Laporan	90.209.960,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	225.634.500,00						12 Laporan	0,00	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						90.209.960,00							90.209.960,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	90.209.960,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		12 Laporan	90.209.960,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						225.634.500,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	225.634.500,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		12 Laporan	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						137.814.000,00					BMD Dinkop UKM dan Naker		244.814.000,00	
		Terpenuhinya Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan						137.814.000,00					BMD Dinkop UKM dan Naker		244.814.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	41.370.000,00						1 Unit	41.370.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	75.963.400,00						5 Unit	75.963.400,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	10 Unit		10 Unit	10 Unit	20.480.600,00						10 Unit	20.480.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	107.000.000,00	
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						75.963.400,00							75.963.400,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	75.963.400,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		5 Unit	75.963.400,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.480.600,00							20.480.600,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	15 Unit	20.480.600,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		10 Unit	20.480.600,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						41.370.000,00							41.370.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	41.370.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit	41.370.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							107.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Unit	0 Unit	0,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit	107.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
115,	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**						19.855.800,00							130.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam						19.855.800,00							130.000.000,00	
			999.Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	0.55 Persentase		0.51 Persentase	0.52 Persentase	19.855.800,00						0.53 Persentase	130.000.000,00	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						19.855.800,00					koperasi		130.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kriteria perijinan usaha simpan pinjam						19.855.800,00					koperasi		130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam	10 Unit Usaha		10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	19.855.800,00						10 Unit Usaha	130.000.000,00	
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan						19.855.800,00							130.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit Usaha		10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	19.855.800,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		10 Unit Usaha	130.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
116,	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						46.755.800,00							55.000.000,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi						46.755.800,00							55.000.000,00	
			999.Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	5.80 Persentase		5.80 Persentase	5.80 Persentase	46.755.800,00						5.80 Persentase	55.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam						46.755.800,00					koperasi		55.000.000,00	
		Meningkatnya penguatan tata kelola kelembagaan koperasi						46.755.800,00					koperasi		55.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100 Unit Usaha		100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	46.755.800,00						100 Unit Usaha	55.000.000,00	
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi						46.755.800,00							55.000.000,00	
		Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100 Unit Usaha		100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	46.755.800,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		100 Unit Usaha	55.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
117,	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**						28.082.800,00							130.000.000,00	
		Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi						28.082.800,00							130.000.000,00	
			999.Persentase Koperasi Aktif	24.7 Persentase		21.9 Persentase	22.6 Persentase	28.082.800,00						23.2 Persentase	130.000.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						28.082.800,00					koperasi		130.000.000,00	
		Meningkatnya penilaian kesehatan koperasi						28.082.800,00					koperasi		130.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	100 Unit Usaha		100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	28.082.800,00						100 Unit Usaha	130.000.000,00	
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan						28.082.800,00							130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	100 Unit Usaha		100 Unit Usaha	10 Unit Usaha	28.082.800,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		100 Unit Usaha	130.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
118,	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						28.082.800,00							375.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian						28.082.800,00							375.000.000,00	
			999.Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	21.2 Persentase		21.2 Persentase	21.2 Persentase	28.082.800,00						21.2 Persentase	375.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						28.082.800,00					koperasi		375.000.000,00	
		Meningkatnya kapasitas SDM						28.082.800,00					koperasi		375.000.000,00	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	250 Orang		250 Orang	250 Orang	28.082.800,00						250 Orang	375.000.000,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM						28.082.800,00							375.000.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	250 Orang		250 Orang	20 Orang	28.082.800,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		250 Orang	375.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
119,	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**						246.143.910,00							545.000.000,00	
		Meningkatnya produktivitas koperasi						246.143.910,00							545.000.000,00	
			999.Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	19.81 Persentase		19.01 Persentase	19.25 Persentase	246.143.910,00						19.51 Persentase	545.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						246.143.910,00					koperasi		545.000.000,00	
		Meningkatnya kemampuan nilai produksi koperasi						246.143.910,00					koperasi		545.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	10 Unit Usaha		10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	12.849.360,00						10 Unit Usaha	30.000.000,00	
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	50 Unit Usaha		50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	178.294.550,00						50 Unit Usaha	515.000.000,00	
	2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						12.849.360,00							30.000.000,00	
		Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	10 Unit Usaha		10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	12.849.360,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		10 Unit Usaha	30.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota						178.294.550,00							515.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	50 Unit Usaha		50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	178.294.550,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		50 Unit Usaha	515.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
		Meningkatnya kemampuan nilai produksi koperasi						246.143.910,00					koperasi		545.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi						5.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	-		-	0 Kelompok Masyarakat	5.000.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah						50.000.000,00							0,00	
		Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	-		-	5 Unit Usaha	50.000.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
120,	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						867.449.862,00							1.350.000.000,00	
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri						847.449.862,00							1.290.000.000,00	
			999.Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	12.23 %		10.39 %	10.85 %	847.449.862,00						11.31 %	1.290.000.000,00	
			999.Pertumbuhan Wirausaha	10.77 Persentase		4.79 Persentase	6.86 Persentase	847.449.862,00						8.56 Persentase	1.290.000.000,00	
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan						867.449.862,00					pelaku usaha mikro		1.350.000.000,00	
		Meningkatnya legalitas dan kualitas pengelolaan keuangan usaha mikro						867.449.862,00					pelaku usaha mikro		1.350.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	-	33.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-		-	-	599.999.892,00						-	670.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil	-		-	-	130.000.000,00						-	410.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	-	10.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan	-		-	-	74.449.970,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
		Meningkatnya wirausaha pemula						867.449.862,00					pelaku usaha mikro		1.350.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	-	33.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-		-	-	599.999.892,00						-	670.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil	-		-	-	130.000.000,00						-	410.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	-	10.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan	-		-	-	74.449.970,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
	2.17.07.2.01.0016	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM						599.999.892,00							670.000.000,00	
		Terfasilitasinya perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-		-	10 Lembaga	599.999.892,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	670.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha						130.000.000,00							410.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	70 Orang	130.000.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	410.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.07.2.01.0019	Pembinaan dan Fasilitasi Pemulihan Usaha						74.449.970,00							110.000.000,00	
		Terfasilitasinya perlindungan UMKM melalui Pemulihan Usaha dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha	-		-	25 Unit Usaha	74.449.970,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	110.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.07.2.01.0021	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	-		-	0 Orang	0,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	25.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.07.2.01.0022	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	50 Unit Usaha	10.000.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	15.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM						33.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	1 Kegiatan	33.000.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.07.2.01.0025	Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada pelaku UMKM						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada pelaku UMKM	Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-		-	0 Unit Usaha	10.000.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	10.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.07.2.01.0026	Pembinaan dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa bagi pelaku UMKM						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa bagi UMKM	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa	-		-	0 Unit Usaha	0,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	10.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.07.2.01.0027	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi UMKM dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	20 Unit Usaha	10.000.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
121,	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						246.631.100,00							1.025.000.000,00	
		Meningkatnya daya saing UMKM						246.631.100,00							1.025.000.000,00	
			999.Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	0.026 Persentase		0.005 Persentase	0.010 Persentase	246.631.100,00						0.016 Persentase	1.025.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						246.631.100,00					pelaku usaha mikro		1.025.000.000,00	
		Meningkatnya wirausaha pemula menjadi wirausaha mapan						246.631.100,00					pelaku usaha mikro		1.025.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi	-		-	-	246.631.100,00						-	875.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha yang memperoleh Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	-		-	-	0,00						-	150.000.000,00	
	2.17.08.2.01.0012	Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	Jumlah Wirausaha yang memperoleh Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	-		-	0 Orang	0,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	150.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	2.17.08.2.01.0019	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM						246.631.100,00							875.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada unit usaha UMKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-		-	100 Unit Usaha	246.631.100,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	875.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP						4.894.265.050,00							6.416.144.536,00	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						4.894.265.050,00							6.416.144.536,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						4.894.265.050,00							6.416.144.536,00	
122,	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						4.041.534.850,00							5.074.144.536,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						4.041.534.850,00							4.974.644.536,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	4.041.534.850,00						100 %	4.974.644.536,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.993.800,00					-		15.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						5.993.800,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	0,00						2 Berita Acara	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4.992.800,00						4 Dokumen	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	1.001.000,00						19 Laporan	2.500.000,00	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.992.800,00							2.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4.992.800,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		4 Dokumen	2.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.001.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	1.001.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		19 Laporan	2.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	0,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2 Berita Acara	10.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat						2.895.170.000,00					-		3.025.919.536,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						2.895.170.000,00					-		3.025.919.536,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan		336 Orang/bulan	336 Orang/bulan	2.895.170.000,00						336 Orang/bulan	3.025.919.536,00	
	2.18.01.2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.895.170.000,00							3.025.919.536,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan		336 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.895.170.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		336 Orang/bulan	3.025.919.536,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						68.719.000,00					-		110.000.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						68.719.000,00					-		110.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	147 Orang		147 Orang	147 Orang	48.829.000,00						147 Orang	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	3 Paket		2 Paket	3 Paket	19.890.000,00						3 Paket	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						19.890.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		2 Paket	3 Paket	19.890.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3 Paket	55.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						48.829.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	147 Orang		147 Orang	147 Orang	48.829.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		147 Orang	55.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						166.235.100,00					-		495.875.000,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						166.235.100,00					-		495.875.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	5.508.000,00						5 Dokumen	18.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	75.000.000,00						30 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	20 Paket		16 Paket	16 Paket	24.750.000,00						18 Paket	42.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.600,00						1 Paket	32.125.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	14.980.300,00						1 Paket	36.750.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	13.501.400,00						5 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	17.494.800,00						3 Paket	42.000.000,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						14.980.300,00							36.750.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	14.980.300,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Paket	36.750.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.501.400,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	13.501.400,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		5 Paket	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						17.494.800,00							42.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	17.494.800,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3 Paket	42.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						24.750.000,00							42.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		16 Paket	18 Paket	24.750.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		18 Paket	42.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.600,00							32.125.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.600,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Paket	32.125.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.508.000,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	5.508.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		5 Dokumen	18.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	75.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		30 Laporan	150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.000.000,00					-		170.000.000,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						10.000.000,00					-		170.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		10 Unit	10 Unit	10.000.000,00						12 Unit	145.000.000,00	
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							145.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		10 Unit	8 Unit	10.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		12 Unit	145.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	0,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit	25.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						724.836.010,00					-		992.750.000,00	
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai kebutuhan						724.836.010,00					-		992.750.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	160.000.000,00						24 Laporan	162.750.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	39 Laporan		39 Laporan	39 Laporan	564.836.010,00						39 Laporan	830.000.000,00	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						160.000.000,00							162.750.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	160.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		24 Laporan	162.750.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						564.836.010,00							830.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 Laporan		39 Laporan	39 Laporan	564.836.010,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		39 Laporan	830.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						170.580.940,00					-		264.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan						170.580.940,00					-		264.600.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	30.320.768,00						5 Unit	58.300.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	40.000.000,00						1 Unit	58.250.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 Unit		10 Unit	10 Unit	2.500.000,00						14 Unit	3.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	90 Unit		86 Unit	90 Unit	15.064.000,00						90 Unit	47.250.000,00	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan						40.000.000,00							58.250.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit	58.250.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau						30.320.768,00							58.300.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	5 Unit		5 Unit	4 Unit	30.320.768,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		5 Unit	58.300.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 Unit		10 Unit	0 Unit	2.500.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		14 Unit	3.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.064.000,00							47.250.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit		86 Unit	90 Unit	15.064.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		90 Unit	47.250.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan						170.580.940,00					-		264.600.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	-		-	-	82.696.172,00						-	97.800.000,00	
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						82.696.172,00							97.800.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	-		-	2 Unit	82.696.172,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	97.800.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
123,	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						129.962.200,00							70.000.000,00	
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi						129.962.200,00							70.000.000,00	
			999.Realisasi Total terhadap Target Investasi	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	129.962.200,00						100 Persentase	70.000.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						54.962.200,00					-		70.000.000,00	
		Jumlah Kebijakan Pemberian Fasilitasi/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Ditetapkan						54.962.200,00					-		70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.003.600,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	29.958.600,00						1 Dokumen	22.500.000,00	
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	12.500.000,00	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						29.958.600,00							22.500.000,00	
		Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	29.958.600,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Dokumen	22.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota						15.003.600,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.003.600,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko						10.000.000,00							12.500.000,00	
		Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Dokumen	12.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						75.000.000,00					-		0,00	
		Persentase data potensi investasi yang uptodate/ aktual						75.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	2.18.02.2.02.0006	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah	-		-	0 Dokumen	50.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.02.2.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota						25.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	0 Dokumen	25.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
124,	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						510.043.000,00							535.000.000,00	
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal						510.043.000,00							535.000.000,00	
			999.Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	1.3 Persentase		0.6 Persentase	0.8 Persentase	510.043.000,00						1.1 Persentase	535.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						510.043.000,00					-		535.000.000,00	
		Jumlah Kerja Sama Penanaman Modal						510.043.000,00					-		535.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00						1 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	10.043.000,00						0 Dokumen	35.000.000,00	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota						10.043.000,00							35.000.000,00	
		Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	10.043.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		0 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
125,	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						160.530.000,00							420.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko						160.530.000,00							420.000.000,00	
			1000.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89.25 Indeks		88.25 Indeks	88.5 Indeks	160.530.000,00						88.75 Indeks	420.000.000,00	
			999.Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	160.530.000,00						100 Persentase	420.000.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah						160.530.000,00					-		420.000.000,00	
		Persentase penerbitan izin sesuai SOP						160.530.000,00					-		420.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	4.950.000,00						6 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	24 Pelaku Usaha		24 Pelaku Usaha	24 Pelaku Usaha	25.082.600,00						24 Pelaku Usaha	75.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	1500 Pelaku Usaha		1500 Pelaku Usaha	1500 Pelaku Usaha	77.491.400,00						1500 Pelaku Usaha	125.000.000,00	
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian						4.950.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	4.950.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		6 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						77.491.400,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	1500 Pelaku Usaha		1500 Pelaku Usaha	1500 Pelaku Usaha	77.491.400,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1500 Pelaku Usaha	125.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko						25.082.600,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	24 Pelaku Usaha		24 Pelaku Usaha	24 Pelaku Usaha	25.082.600,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		24 Pelaku Usaha	75.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Persentase penerbitan izin sesuai SOP						160.530.000,00					-		420.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	53.006.000,00						-	200.000.000,00	
	2.18.04.2.01.0009	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						53.006.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	24 Kegiatan Usaha	53.006.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
126,	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						49.995.000,00							315.000.000,00	
		Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal						49.995.000,00							315.000.000,00	
			999.Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	49.995.000,00						100 Persentase	315.000.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						49.995.000,00					-		315.000.000,00	
		Terlaksananya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non						49.995.000,00					-		315.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi	300 Kegiatan Usaha		200 Kegiatan Usaha	225 Kegiatan Usaha	19.995.000,00						250 Kegiatan Usaha	60.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan	350 Pelaku Usaha		350 Pelaku Usaha	350 Pelaku Usaha	10.000.000,00						350 Pelaku Usaha	75.000.000,00	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						10.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan	350 Pelaku Usaha		350 Pelaku Usaha	350 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		350 Pelaku Usaha	75.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.18.05.2.02.0005	Pengawasan Penanaman Modal						19.995.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi	300 Kegiatan Usaha		200 Kegiatan Usaha	225 Kegiatan Usaha	19.995.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		250 Kegiatan Usaha	60.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Terlaksananya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non						49.995.000,00					-		315.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam	-		-	-	20.000.000,00						-	180.000.000,00	
	2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan						20.000.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam	-		-	10 Kegiatan Usaha	20.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	180.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
127,	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						2.200.000,00							2.000.000,00	
		Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal						2.200.000,00							2.000.000,00	
			999.Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	2.200.000,00						100 Persentase	2.000.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.200.000,00					-		2.000.000,00	
		Terlaksananya integrasi data dan informasi perizinan						2.200.000,00					-		2.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	2.200.000,00						30 Dokumen	2.000.000,00	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi						2.200.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang	30 Dokumen		30 Dokumen	1 Dokumen	2.200.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		30 Dokumen	2.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga						22.267.374.450,00							14.006.000.000,00	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						22.267.374.450,00							14.006.000.000,00	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						22.267.374.450,00							14.006.000.000,00	
128,	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						4.690.584.450,00							5.137.000.000,00	
		Meningkatnya Fasilitasi Layanan Kedinasan Perangkat Daerah						4.690.061.650,00							4.946.500.000,00	
			1.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	4.690.061.650,00						100 %	4.946.500.000,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.625.400,00					ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar		8.000.000,00	
		Meningkatnya persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar						6.625.400,00					ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar		8.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Berita Acara		1 Berita Acara	2 Berita Acara	1.853.800,00						1 Berita Acara	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	1 Berita Acara		1 Berita Acara	2 Berita Acara	248.000,00						1 Berita Acara	1.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	620.000,00						1 Data	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	996.200,00						2 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	1.020.200,00						13 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	1.887.200,00						20 Laporan	1.000.000,00	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						996.200,00							1.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	996.200,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Dokumen	1.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.887.200,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	1.887.200,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		20 Laporan	1.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						620.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	620.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Data	1.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.853.800,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.853.800,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Berita Acara	2.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						1.020.200,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	1.020.200,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		13 Dokumen	2.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis						248.000,00							1.000.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	248.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Berita Acara	1.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.233.992.500,00					ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar		2.601.000.000,00	
		Meningkatnya persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar						2.233.992.500,00					ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar		2.601.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.562.500,00						12 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	260 Orang/bulan		234 Orang/bulan	234 Orang/bulan	2.232.430.000,00						234 Orang/bulan	2.600.000.000,00	
	2.19.01.2.02.0004	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.232.430.000,00							2.600.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	260 Orang/bulan		234 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.232.430.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		234 Orang/bulan	2.600.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.562.500,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.562.500,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		12 Laporan	1.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						522.800,00					-		1.000.000,00	
		Meningaktnya persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar						522.800,00					-		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	522.800,00						2 Laporan	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						522.800,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	522.800,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Laporan	1.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						522.800,00					ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar		500.000,00	
		Meningkatnya persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah						522.800,00					ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar		500.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	522.800,00						12 Dokumen	500.000,00	
	2.19.01.2.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi						522.800,00							500.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	522.800,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		12 Dokumen	500.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						41.002.300,00					ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar		50.000.000,00	
		Meningkatnya persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar						41.002.300,00					ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar		50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	60 Orang		60 Orang	60 Orang	41.002.300,00						60 Orang	50.000.000,00	
	2.19.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						41.002.300,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	41.002.300,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		60 Orang	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						207.823.200,00					ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar		264.500.000,00	
		Meningkatnya persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar						207.823.200,00					ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar		264.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.754.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	498.000,00						1 Dokumen	500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.975.500,00						4 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	97.534.000,00						12 Laporan	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	8 Paket		8 Paket	8 Paket	33.016.000,00						8 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.093.600,00						1 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.001.000,00						1 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	29.001.200,00						1 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	27.949.900,00						1 Paket	50.000.000,00	
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.001.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	5 Paket	5.001.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	5.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						29.001.200,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	5 Paket	29.001.200,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	30.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						27.949.900,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	5 Paket	27.949.900,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						33.016.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 paket Paket	33.016.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		8 Paket	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.093.600,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.093.600,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Paket	25.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.754.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.754.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		12 Dokumen	3.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						97.534.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	97.534.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		12 Laporan	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.975.500,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.975.500,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		4 Dokumen	1.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						498.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	498.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Dokumen	500.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3.830.850,00					ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar		2.000.000,00	
		Meningkatnya persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan						3.830.850,00					ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar		2.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	3.830.850,00						3 Unit	2.000.000,00	
	2.19.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						3.830.850,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	3.830.850,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Unit	2.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.056.226.900,00					ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar		2.050.000.000,00	
		Meningkatnya persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar						2.056.226.900,00					ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar		2.050.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	249.763.400,00						36 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	72 Laporan		72 Laporan	72 Laporan	1.806.463.500,00						72 Laporan	1.800.000.000,00	
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						249.763.400,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	249.763.400,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		36 Laporan	250.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.806.463.500,00							1.800.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	72 Laporan	1.806.463.500,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		72 Laporan	1.800.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						140.037.700,00					ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar		160.000.000,00	
		Meningkatnya persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan						140.037.700,00					ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar		160.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	69.152.600,00						10 Unit	80.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	46 Unit		46 Unit	46 Unit	20.885.100,00						46 Unit	30.000.000,00	
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						69.152.600,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	69.152.600,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		10 Unit	80.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.885.100,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit		46 Unit	46 Unit	20.885.100,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		46 Unit	30.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
129,	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						3.730.472.800,00							2.994.000.000,00	
		Meningkatnya daya saing kepemudaan						3.730.472.800,00							2.984.000.000,00	
			1.Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan	54.57 %		52.19 %	52.81 %	3.730.472.800,00						53.41 %	2.984.000.000,00	
			999.Rasio Wirausaha Pemuda	10.25 Persentase		9.74 Persentase	9.88 Persentase	3.730.472.800,00						10.00 Persentase	2.984.000.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader						3.671.875.000,00					Pemuda dan Organisasi Kepemudaan se Kota Blitar		2.800.000.000,00	
		Meningkatnya kapasitas dan kewirausahaan pemuda						3.671.875.000,00					Pemuda dan Organisasi Kepemudaan se Kota Blitar		2.800.000.000,00	
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	-		-	-	3.538.481.200,00						-	2.500.000.000,00	
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan	-		-	-	8.442.800,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya	-		-	-	115.686.200,00						-	280.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan	-		-	-	9.264.800,00						-	10.000.000,00	
	2.19.02.2.01.0019	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat						8.442.800,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	5 Orang	8.442.800,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	10.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota						9.264.800,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	50 Orang	9.264.800,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	10.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.02.2.01.0021	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota						115.686.200,00							280.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya	-		-	50 Orang	115.686.200,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	280.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.02.2.01.0022	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota						3.538.481.200,00							2.500.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	-		-	300 Orang	3.538.481.200,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	2.500.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						58.597.800,00					ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar		194.000.000,00	
		Meningkatnya kapasitas organisasi kepemudaan						58.597.800,00					ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar		194.000.000,00	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	-		-	-	58.597.800,00						-	194.000.000,00	
	2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat						58.597.800,00							194.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	1 Organisasi	58.597.800,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	194.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
130,	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						13.517.876.400,00							5.555.000.000,00	
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga						13.517.876.400,00							4.505.000.000,00	
			1.Persentase atlet yang masuk Pelatda Provinsi	37.50 %		12.50 %	17.50 %	13.517.876.400,00						25 %	4.505.000.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						10.247.521.700,00					Pegiat Olahraga dan Masyarakat se Kota Blitar		1.000.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga						10.247.521.700,00					Pegiat Olahraga dan Masyarakat se Kota Blitar		1.000.000.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota	-		-	-	10.247.521.700,00						-	1.000.000.000,00	
	2.19.03.2.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan						10.247.521.700,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	10 Unit	10.247.521.700,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	1.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						198.343.100,00					Pegiat Olahraga dan Masyarakat se Kota Blitar		350.000.000,00	
		Meningkatnya prestasi pada kejuaraan olahraga tingkat kota dan provinsi						198.343.100,00					Pegiat Olahraga dan Masyarakat se Kota Blitar		350.000.000,00	
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara,	-		-	-	152.343.100,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat	-		-	-	46.000.000,00						-	200.000.000,00	
	2.19.03.2.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan						46.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, temasuk olahraga disabilitas	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	100 Orang	46.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota						152.343.100,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	1 Kegiatan	152.343.100,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	150.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						246.881.500,00					Pegiat Olahraga dan Masyarakat se Kota Blitar		1.125.000.000,00	
		Meningkatnya partisipasi atlet muda dan peran aktif cabang olahraga prestasi dalam kejuaraan						246.881.500,00					Pegiat Olahraga dan Masyarakat se Kota Blitar		1.125.000.000,00	
			Jumlah dokumen pengelolaan sistem data dan penyediaan data Keolahragaan tersedu di	-		-	-	86.933.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan Daerah yang diidentifikasi dan diseleksi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	124.124.500,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	-	10.824.000,00						-	1.000.000.000,00	
	2.19.03.2.03.0011	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-		-	50 Orang	15.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	15.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.03.2.03.0012	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga						10.824.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	100 Orang	10.824.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	1.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.03.2.03.0013	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	-		-	20 Orang	10.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	10.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.03.2.03.0014	Pengelolaan sistem data dan penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota						86.933.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan sistem data dan penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen pengelolaan sistem data dan penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	-		-	1 Dokumen	86.933.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.03.2.03.0015	Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah						124.124.500,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Olahragawan Daerah yang diidentifikasi dan diseleksi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	50 Orang	124.124.500,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						2.645.130.100,00					Pegiat Olahraga dan Masyarakat se Kota Blitar		2.900.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas organisasi olahraga						2.645.130.100,00					Pegiat Olahraga dan Masyarakat se Kota Blitar		2.900.000.000,00	
			Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk	-		-	-	2.645.130.100,00						-	2.900.000.000,00	
	2.19.03.2.04.0007	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait						2.645.130.100,00							2.900.000.000,00	
		Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	3 Kerja Sama	2.645.130.100,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	2.900.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						180.000.000,00					Pegiat Olahraga dan Masyarakat se Kota Blitar		180.000.000,00	
		Meningkatnya peran aktif cabang olahraga rekreasi dalam kejuaraan						180.000.000,00					Pegiat Olahraga dan Masyarakat se Kota Blitar		180.000.000,00	
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Masyarakat di tingkat	-		-	-	180.000.000,00						-	180.000.000,00	
	2.19.03.2.05.0013	Pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota						180.000.000,00							180.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota, termasuk disabilitas	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota, termasuk disabilitas	-		-	1 Lembaga	180.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	180.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
131,	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						328.440.800,00							320.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas						328.440.800,00							320.000.000,00	
			1.Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	37.20 Persentase		33.95 Persentase	34.47 Persentase	328.440.800,00						35.77 Persentase	320.000.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						328.440.800,00					Anggota PRAMUKA se Kota Blitar		320.000.000,00	
		Meningkatnya kapasitas kepramukaan						328.440.800,00					Anggota PRAMUKA se Kota Blitar		320.000.000,00	
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi		1 Organisasi	1 Organisasi	300.000.000,00						1 Organisasi	300.000.000,00	
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi		1 Organisasi	1 Organisasi	300.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		1 Organisasi	300.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		Meningkatnya kapasitas kepramukaan						328.440.800,00					Anggota PRAMUKA se Kota Blitar		320.000.000,00	
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	28.440.800,00						-	20.000.000,00	
	2.19.04.2.01.0015	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah						28.440.800,00							20.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	50 Orang	28.440.800,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	20.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata						11.153.184.600,00							6.406.648.413,00	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						1.528.473.480,00							1.442.165.154,00	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						1.528.473.480,00							1.442.165.154,00	
132,	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						1.286.890.280,00							1.196.465.154,00	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan						1.286.890.280,00							1.196.465.154,00	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	70.05 Persentase		60.39 Persentase	62.80 Persentase	1.286.890.280,00						65.22 Persentase	1.196.465.154,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						571.519.600,00					Masyarakat Kota Blitar		421.753.020,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan						571.519.600,00					Masyarakat Kota Blitar		421.753.020,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan,	4 Objek		4 Objek	4 Objek	147.023.200,00						4 Objek	0,00	
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	145 Orang		125 Orang	130 Orang	404.510.400,00						135 Orang	421.753.020,00	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						147.023.200,00							0,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek		4 Objek	4 Objek	147.023.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		4 Objek	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						404.510.400,00							421.753.020,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	145 Orang		125 Orang	130 Orang	404.510.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		135 Orang	421.753.020,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						715.370.680,00					Masyarakat Kota Blitar		774.712.134,00	
		Meningkatnya kualifikasi Tenaga Kebudayaan						715.370.680,00					Masyarakat Kota Blitar		774.712.134,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	715.370.680,00						12 Laporan	774.712.134,00	
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional						715.370.680,00							774.712.134,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	715.370.680,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		12 Laporan	774.712.134,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan						571.519.600,00					Masyarakat Kota Blitar		421.753.020,00	
			Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	-		-	-	19.986.000,00						-	0,00	
	2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota						19.986.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	-		-	1 Dokumen	19.986.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
133,	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						241.583.200,00							245.700.000,00	
		Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan						241.583.200,00							245.700.000,00	
			1.Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	241.583.200,00						100 Persentase	245.700.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						89.900.000,00					Masyarakat Kota Blitar		119.700.000,00	
		Meningkatnya pelindungan dan pemanfaatan Objek pemajuan kebudayaan						89.900.000,00					Masyarakat Kota Blitar		119.700.000,00	
			Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	2 Objek		2 Objek	2 Objek	89.900.000,00						2 Objek	119.700.000,00	
	2.22.05.2.	Pengusulan Warisan Budaya Tak						89.900.000,00							119.700.000,00	
		Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	2 Objek		2 Objek	2 Objek	89.900.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		2 Objek	119.700.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						151.683.200,00					Masyarakat Kota Blitar		126.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kriteria objek diduga cagar budaya						151.683.200,00					Masyarakat Kota Blitar		126.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	5 Obj		1 Objek	2 Obj	66.510.600,00						3 Objek	47.250.000,00	
	2.22.05.2.	Pelindungan Cagar Budaya						66.510.600,00							47.250.000,00	
		Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	5 Objek		1 Objek	2 Objek	66.510.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		3 Objek	47.250.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Meningkatnya pemenuhan kriteria objek diduga cagar budaya						151.683.200,00					Masyarakat Kota Blitar		126.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	-		-	-	85.172.600,00						-	78.750.000,00	
	2.22.05.2.	Pemanfaatan Cagar Budaya						85.172.600,00							78.750.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	-		-	5 Objek	85.172.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Peningka tan Ekonomi daerah yang inklusif		-	78.750.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						9.624.711.120,00							4.964.483.259,00	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						9.624.711.120,00							4.964.483.259,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
134,	3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						7.517.984.050,00							4.591.733.259,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						7.512.476.050,00							4.591.733.259,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	7.512.476.050,00						100 %	4.591.733.259,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						23.509.300,00					Masyarakat Kota Blitar		18.827.340,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						23.509.300,00					Masyarakat Kota Blitar		18.827.340,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	10.010.000,00						1 Berita Acara	10.510.500,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	2.098.000,00						1 Berita Acara	1.541.400,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	2.750.000,00						1 Data	2.887.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4.948.500,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	3.702.800,00						17 Laporan	3.887.940,00	
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.948.500,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4.948.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		4 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.01.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.702.800,00							3.887.940,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	3.702.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		17 Laporan	3.887.940,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						2.750.000,00							2.887.500,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	2.750.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Data	2.887.500,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat						10.010.000,00							10.510.500,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	10.010.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Berita Acara	10.510.500,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis						2.098.000,00							1.541.400,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	2.098.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Berita Acara	1.541.400,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.437.423.288,00					Masyarakat Kota Blitar		3.567.667.635,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						3.437.423.288,00					Masyarakat Kota Blitar		3.567.667.635,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.278.700,00						12 Laporan	1.342.635,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan		41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	3.436.144.588,00						41 Orang/bulan	3.566.325.000,00	
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.436.144.588,00							3.566.325.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan		41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	3.436.144.588,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		41 Orang/bulan	3.566.325.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.278.700,00							1.342.635,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.278.700,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		12 Laporan	1.342.635,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						82.598.100,00					Masyarakat Kota Blitar		86.728.005,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						82.598.100,00					Masyarakat Kota Blitar		86.728.005,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	41 Orang		41 Orang	41 Orang	82.598.100,00						41 Orang	86.728.005,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						82.598.100,00							86.728.005,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41 Orang		41 Orang	41 Orang	82.598.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		41 Orang	86.728.005,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						214.019.528,00					-		277.065.599,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						214.019.528,00					-		277.065.599,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.508.000,00						1 Dokumen	5.783.400,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.508.000,00						1 Dokumen	5.313.315,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	93.611.328,00						10 Laporan	89.291.894,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4 Paket		4 Paket	4 Paket	35.012.000,00						4 Paket	36.762.600,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	14.622.500,00						2 Paket	15.353.625,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	15.282.400,00						2 Paket	31.872.750,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	11.226.400,00						2 Paket	35.028.945,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	33.248.900,00						4 Paket	57.659.070,00	
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.282.400,00							31.872.750,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	15.282.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2 Paket	31.872.750,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						11.226.400,00							35.028.945,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	11.226.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2 Paket	35.028.945,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						33.248.900,00							57.659.070,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	33.248.900,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		4 Paket	57.659.070,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						35.012.000,00							36.762.600,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	35.012.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		4 Paket	36.762.600,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14.622.500,00							15.353.625,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	14.622.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2 Paket	15.353.625,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.508.000,00							5.783.400,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.508.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Dokumen	5.783.400,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						93.611.328,00							89.291.894,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	93.611.328,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		10 Laporan	89.291.894,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.508.000,00							5.313.315,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.508.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Dokumen	5.313.315,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						37.000.000,00					Masyarakat Kota Blitar		120.245.575,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						37.000.000,00					Masyarakat Kota Blitar		120.245.575,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit		3 Unit	3 Unit	37.000.000,00						3 Unit	120.245.575,00	
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						37.000.000,00							120.245.575,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit		3 Unit	3 Unit	37.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3 Unit	120.245.575,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.357.243.000,00					Masyarakat Kota Blitar		350.632.800,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						3.357.243.000,00					Masyarakat Kota Blitar		350.632.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	333.936.000,00						12 Laporan	350.632.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.023.307.000,00						12 Laporan	0,00	
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						333.936.000,00							350.632.800,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	333.936.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		12 Laporan	350.632.800,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.023.307.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.023.307.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		12 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						366.190.834,00					Masyarakat Kota Blitar		170.566.305,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						366.190.834,00					Masyarakat Kota Blitar		170.566.305,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	14 Unit		14 Unit	14 Unit	62.168.600,00						14 Unit	69.558.930,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	13.857.200,00						1 Unit	14.550.060,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	4 Unit		4 Unit	4 Unit	68.900.000,00						4 Unit	86.457.315,00	
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan						13.857.200,00							14.550.060,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	13.857.200,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit	14.550.060,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau						62.168.600,00							69.558.930,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	62.168.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		14 Unit	69.558.930,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						68.900.000,00							86.457.315,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	68.900.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		4 Unit	86.457.315,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						366.190.834,00					Masyarakat Kota Blitar		170.566.305,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	221.265.034,00						-	0,00	
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						221.265.034,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	221.265.034,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
135,	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						1.000.850.850,00							0,00	
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata						1.000.850.850,00							0,00	
			999.Persentase Pertumbuhan Kunjungan	0.07 Persentase		0.03 Persentase	0.04 Persentase	1.000.850.850,00						0.05 Persentase	0,00	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						940.476.850,00					Masyarakat Kota Blitar		0,00	
		Meningkatnya Kualitas Kawasan pariwisata						940.476.850,00					Masyarakat Kota Blitar		0,00	
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	449.716.950,00						20 Orang	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	3 Unit		3 Unit	3 Unit	490.759.900,00						3 Unit	0,00	
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						490.759.900,00							0,00	
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Unit		3 Unit	3 Unit	490.759.900,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						449.716.950,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	449.716.950,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		20 Orang	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						11.825.000,00					Masyarakat Kota Blitar		0,00	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata						11.825.000,00					Masyarakat Kota Blitar		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.825.000,00						1 Laporan	0,00	
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						11.825.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.825.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						48.549.000,00					-		0,00	
		Meningkatnya kualitas usaha						48.549.000,00					-		0,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan	-		-	-	48.549.000,00						-	0,00	
	3.26.02.2.	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku						48.549.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-		-	5 Pelaku Usaha	48.549.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
136,	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN**						953.503.620,00							283.500.000,00	
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata						953.503.620,00							283.500.000,00	
			999.Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	0.42 Persentase		0.26 Persentase	0.30 Persentase	953.503.620,00						0.34 Persentase	283.500.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata						953.503.620,00					Masyarakat Kota Blitar		283.500.000,00	
		Meningkatnya pengelolaan media pemasaran						953.503.620,00					Masyarakat Kota Blitar		283.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik	2 Promosi		2 Promosi	2 Promosi	62.845.000,00						2 Promosi	26.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	164.706.820,00						4 Dokumen	257.250.000,00	
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar						164.706.820,00							257.250.000,00	
		Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	164.706.820,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		4 Dokumen	257.250.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						62.845.000,00							26.250.000,00	
		Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi		2 Promosi	2 Promosi	62.845.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2 Promosi	26.250.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Meningkatnya pengelolaan media pemasaran						953.503.620,00					Masyarakat Kota Blitar		283.500.000,00	
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	-	725.951.800,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						725.951.800,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	2 Kegiatan	725.951.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
137,	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**						47.865.200,00							21.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas ekosistem ekonomi kreatif						32.865.200,00							21.000.000,00	
			1.Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan	1.04 Persentase		0.35 Persentase	0.52 Persentase	32.865.200,00						0.69 Persentase	21.000.000,00	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						32.865.200,00					Masyarakat Kota Blitar		21.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas produk ekonomi kreatif						32.865.200,00					Masyarakat Kota Blitar		21.000.000,00	
			Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	22.858.600,00						1 Lembaga	21.000.000,00	
	3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah						22.858.600,00							21.000.000,00	
		Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	22.858.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Lembaga	21.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	-		-	0,52% %	15.000.000,00						-	0,00	
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi						15.000.000,00					Masyarakat Kota Blitar		0,00	
		-						15.000.000,00					Masyarakat Kota Blitar		0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	-		-	-	15.000.000,00						-	0,00	
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif						15.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	-		-	1 Unit	15.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Meningkatnya Kualitas produk ekonomi kreatif						32.865.200,00					Masyarakat Kota Blitar		21.000.000,00	
			Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan	-		-	-	10.006.600,00						-	0,00	
	3.26.04.2.	Fasilitasi penguatan Kekayaan						10.006.600,00							0,00	
		Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	-		-	1 Kegiatan	10.006.600,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
138,	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						104.507.400,00							68.250.000,00	
		Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif						104.507.400,00							68.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi yang Dibentuk	30.03 %		22.05 %	24.13 %	104.507.400,00						26.04 %	68.250.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						104.507.400,00					Masyarakat Kota Blitar		68.250.000,00	
		Meningkatnya kapasitas pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						104.507.400,00					Masyarakat Kota Blitar		68.250.000,00	
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya	30 Orang		30 Orang	30 Orang	104.507.400,00						30 Orang	68.250.000,00	
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi						104.507.400,00							68.250.000,00	
		Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang		30 Orang	30 Orang	104.507.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		30 Orang	68.250.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						5.428.620.750,00							6.618.764.144,00	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						5.428.620.750,00							6.618.764.144,00	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						5.332.694.650,00							6.322.161.744,00	
139,	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						4.581.796.700,00							5.401.086.524,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						4.581.696.700,00							5.401.086.524,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	4.581.696.700,00						100 %	5.401.086.524,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.176.800,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar		20.456.300,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						7.176.800,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar		20.456.300,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	3.575.000,00						2 Berita Acara	4.800.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	560.000,00						1 Berita Acara	1.175.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	1.270.200,00						2 Dokumen	1.520.200,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	1.078.000,00						13 Dokumen	1.976.300,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	693.600,00						9 Laporan	10.984.800,00	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.270.200,00							1.520.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	1.270.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2 Dokumen	1.520.200,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						693.600,00							10.984.800,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	693.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		9 Laporan	10.984.800,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2. 01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat						3.575.000,00							4.800.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	3.575.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2 Berita Acara	4.800.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2. 01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						1.078.000,00							1.976.300,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	1.078.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		13 Dokumen	1.976.300,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2. 01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis						560.000,00							1.175.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	560.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Berita Acara	1.175.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.432.911.000,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar		3.739.926.149,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						3.432.911.000,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar		3.739.926.149,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	100.000,00						7 Laporan	881.496,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan		28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.432.811.000,00						28 Orang/bulan	3.739.044.653,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.432.811.000,00							3.739.044.653,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan		28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.432.811.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		28 Orang/bulan	3.739.044.653,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						100.000,00							881.496,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	100.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		7 Laporan	881.496,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						100.000,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar		700.000,00	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						100.000,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar		700.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	100.000,00						15 Laporan	700.000,00	
	2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						100.000,00							700.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	100.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		15 Laporan	700.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						39.736.100,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar		100.143.800,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						39.736.100,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar		100.143.800,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	47 Orang		47 Orang	47 Orang	39.692.400,00						47 Orang	55.941.800,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	3 Paket		3 Paket	3 Paket	43.700,00						3 Paket	44.202.000,00	
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						43.700,00							44.202.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	43.700,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3 Paket	44.202.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						39.692.400,00							55.941.800,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47 Orang		47 Orang	47 Orang	39.692.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		47 Orang	55.941.800,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						131.028.480,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar		209.560.700,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						131.028.480,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar		209.560.700,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.180,00						12 Dokumen	8.100.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	67.158.100,00						12 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	25 Paket		25 Paket	25 Paket	22.870.500,00						25 Paket	57.775.600,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.620.000,00						2 Paket	6.895.200,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.994.900,00						1 Paket	4.734.300,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	7.346.300,00						3 Paket	10.217.100,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	17.838.500,00						6 Paket	21.838.500,00	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.994.900,00							4.734.300,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.994.900,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Paket	4.734.300,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.346.300,00							10.217.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	7.346.300,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3 Paket	10.217.100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						17.838.500,00							21.838.500,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	17.838.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		6 Paket	21.838.500,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						22.870.500,00							57.775.600,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	24 Paket	22.870.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		25 Paket	57.775.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.620.000,00							6.895.200,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.620.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2 Paket	6.895.200,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2. 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7.200.180,00							8.100.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.180,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		12 Dokumen	8.100.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						67.158.100,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	67.158.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		12 Laporan	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						63.069.833,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar		139.596.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						63.069.833,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar		139.596.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		5 Unit	1 Unit	88.281,00						3 Unit	29.596.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		8 Unit	1 Unit	62.906.770,00						3 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		5 Unit	1 Unit	74.782,00						1 Unit	60.000.000,00	
	2.23.01.2.	Pengadaan Mebel						88.281,00							29.596.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		5 Unit	1 Unit	88.281,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3 Unit	29.596.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						62.906.770,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		8 Unit	5 Unit	62.906.770,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3 Unit	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2. 07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						74.782,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		5 Unit	1 Unit	74.782,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit	60.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						738.542.318,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar		833.838.917,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						738.542.318,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar		833.838.917,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	210.414.042,00						36 Laporan	216.910.787,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	528.128.276,00						13 Laporan	616.928.130,00	
	2.23.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						210.414.042,00							216.910.787,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	210.414.042,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		36 Laporan	216.910.787,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						528.128.276,00							616.928.130,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	528.128.276,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		13 Laporan	616.928.130,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						169.232.169,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar		356.864.658,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						169.232.169,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar		356.864.658,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	53.617.305,00						6 Unit	78.114.858,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit		4 Unit	1 Unit	17.345.664,00						1 Unit	17.914.800,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		4 Unit	1 Unit	137.200,00						4 Unit	4.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	58 Unit		58 Unit	58 Unit	36.847.000,00						58 Unit	36.847.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 Unit		2 Unit	2 Unit	61.285.000,00						2 Unit	219.988.000,00	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						17.345.664,00							17.914.800,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		4 Unit	4 Unit	17.345.664,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit	17.914.800,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						53.617.305,00							78.114.858,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	8 Unit	53.617.305,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		6 Unit	78.114.858,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.	Pemeliharaan Mebel						137.200,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		4 Unit	4 Unit	137.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		4 Unit	4.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2. 09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						36.847.000,00							36.847.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit		58 Unit	61 Unit	36.847.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		58 Unit	36.847.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2. 09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						61.285.000,00							219.988.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	61.285.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2 Unit	219.988.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
140,	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						727.852.650,00							921.075.220,00	
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan						727.852.650,00							921.075.220,00	
			1.Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh	4 %		2 %	2.5 %	727.852.650,00						3 %	921.075.220,00	
	2.23.02.2. 01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						453.728.270,00					Pemustaka dan masyarakat Kota Blitar		607.230.970,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perpustakaan						453.728.270,00					Pemustaka dan masyarakat Kota Blitar		607.230.970,00	
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman	1182 Eksemplar		1182 Eksemplar	1182 Eksemplar	108.610.600,00						1182 Eksemplar	182.017.760,00	
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	36.841.500,00						4 Dokumen	72.837.500,00	
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	27000 Eksemplar		20000 Eksemplar	24000 Eksemplar	153.537.020,00						25000 Eksemplar	68.170.260,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	79 Eksemplar		11 Eksemplar	79 Eksemplar	90.919.100,00						79 Eksemplar	98.833.000,00	
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam	98 Perpustakaan		98 Perpustakaan	98 Perpustakaan	17.112.100,00						98 Perpustakaan	31.666.100,00	
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar	15 Perpustakaan		15 Perpustakaan	15 Perpustakaan	8.250.000,00						15 Perpustakaan	24.602.300,00	
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	28.658.550,00						1 Perpustakaan	109.333.900,00	
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah	98 Orang		98 Orang	98 Orang	9.799.400,00						98 Orang	19.770.150,00	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional						17.112.100,00							31.666.100,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	98 Perpustakaan		98 Perpustakaan	98 Perpustakaan	17.112.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		98 Perpustakaan	31.666.100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						28.658.550,00							109.333.900,00	
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	28.658.550,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Perpustakaan	109.333.900,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota						8.250.000,00							24.602.300,00	
		Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	15 Perpustakaan		15 Perpustakaan	15 Perpustakaan	8.250.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		15 Perpustakaan	24.602.300,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat						153.537.020,00							68.170.260,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	27000 Eksemplar		20000 Eksemplar	24000 Eksemplar	153.537.020,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		25000 Eksemplar	68.170.260,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						9.799.400,00							19.770.150,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	98 Orang		98 Orang	98 Orang	9.799.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		98 Orang	19.770.150,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan						36.841.500,00							72.837.500,00	
		Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	36.841.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		4 Dokumen	72.837.500,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan						108.610.600,00							182.017.760,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1182 Eksemplar		1182 Eksemplar	206 Eksemplar	108.610.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1182 Eksemplar	182.017.760,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota						90.919.100,00							98.833.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	79 Eksemplar		11 Eksemplar	9 Eksemplar	90.919.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		79 Eksemplar	98.833.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						274.124.380,00					Pemustaka dan masyarakat Kota Blitar		313.844.250,00	
		Meningkatnya Pembudayaan Kegemaran Membaca						274.124.380,00					Pemustaka dan masyarakat Kota Blitar		313.844.250,00	
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang	1 Orang		1 Orang	1 Orang	14.656.600,00						1 Orang	29.778.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	6.247.200,00						1 Perpustakaan	50.000.000,00	
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar	125 Lokus		125 Lokus	125 Lokus	227.358.680,00						125 Lokus	105.197.600,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat	15 Orang		20 Orang	15 Orang	25.861.900,00						20 Orang	128.868.650,00	
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah						14.656.600,00							29.778.000,00	
		Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang		1 Orang	1 Orang	14.656.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Orang	29.778.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						6.247.200,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	6.247.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Perpustakaan	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca						25.861.900,00							128.868.650,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	15 Orang		20 Orang	3 Orang	25.861.900,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		20 Orang	128.868.650,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat						227.358.680,00							105.197.600,00	
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	125 Lokus		125 Lokus	125 Lokus	227.358.680,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		125 Lokus	105.197.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
141,	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						23.045.300,00							0,00	
			Persentase naskah kuno yang dilestarikan	-		-	1 %	23.045.300,00						-	0,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						23.045.300,00					Pemustaka dan masyarakat Kota Blitar		0,00	
		-						23.045.300,00					Pemustaka dan masyarakat Kota Blitar		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan	-		-	-	23.045.300,00						-	0,00	
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						23.045.300,00							0,00	
		Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	-		-	1 Eksemplar	23.045.300,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						95.926.100,00							296.602.400,00	
142,	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						95.926.100,00							296.602.400,00	
		Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis						95.926.100,00							296.602.400,00	
			999.Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan	87 %		86.6 %	86.7 %	95.926.100,00						86.8 %	296.602.400,00	
			999.Tingkat Ketersediaan Arsip	89.2 Persentase		88.8 Persentase	88.9 Persentase	95.926.100,00						89 Persentase	296.602.400,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						91.801.100,00					Pencipta Arsip dan Pengguna Layanan Kearsipan		266.455.100,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Dinamis						91.801.100,00					Pencipta Arsip dan Pengguna Layanan Kearsipan		266.455.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	5.500.000,00						27 Laporan	12.247.500,00	
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	2500 Berkas		2500 Berkas	2500 Berkas	86.301.100,00						2500 Berkas	254.207.600,00	
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis						86.301.100,00							254.207.600,00	
		Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	2500 Berkas		2500 Berkas	2500 Berkas	86.301.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2500 Berkas	254.207.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota						5.500.000,00							12.247.500,00	
		Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	5.500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		27 Laporan	12.247.500,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						4.125.000,00					Pencipta Arsip dan Pengguna Layanan Kearsipan		30.147.300,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengolahan dan Penyajian Arsip Menjadi Informasi						4.125.000,00					Pencipta Arsip dan Pengguna Layanan Kearsipan		30.147.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah	150 Pengguna		150 Pengguna	150 Pengguna	4.125.000,00						150 Pengguna	30.147.300,00	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN						4.125.000,00							30.147.300,00	
		Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	150 Pengguna		150 Pengguna	50 Pengguna	4.125.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		150 Pengguna	30.147.300,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan						14.462.509.350,00							25.869.550.617,00	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						14.462.509.350,00							25.869.550.617,00	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						12.072.208.750,00							22.362.300.000,00	
143,	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						6.776.570.570,00							7.695.300.000,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						6.770.570.570,00							7.655.300.000,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	86.60 %		86.30 %	86.40 %	6.770.570.570,00						86.50 %	7.655.300.000,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.979.700,00					-		28.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						15.979.700,00					-		28.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	3.989.300,00						1 Berita Acara	5.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	2.990.000,00						1 Data	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	3.000.400,00						8 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	3.000.000,00						13 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	3.000.000,00						8 Laporan	10.000.000,00	
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.000.400,00							10.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	3.000.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		8 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	3.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		8 Laporan	10.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						2.990.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	2.990.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Data	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat						3.989.300,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	3.989.300,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Berita Acara	5.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	3.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		13 Dokumen	3.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat						5.431.450.000,00					-		5.732.450.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						5.431.450.000,00					-		5.732.450.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00						12 Laporan	4.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	684 Orang/bulan		684 Orang/bulan	684 Orang/bulan	5.428.450.000,00						684 Orang/bulan	5.728.450.000,00	
	3.30.01.2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.428.450.000,00							5.728.450.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	684 Orang/bulan		684 Orang/bulan	636 Orang/bulan	5.428.450.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		684 Orang/bulan	5.728.450.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		12 Laporan	4.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.999.998,00					-		5.000.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat						2.999.998,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.999.998,00						1 Laporan	5.000.000,00	
	3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.999.998,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.999.998,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Laporan	5.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						130.490.000,00					-		166.000.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						130.490.000,00					-		166.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	350 Orang		350 Orang	350 Orang	105.586.500,00						350 Orang	98.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	4 Paket		4 Paket	0 Paket	24.903.500,00						4 Paket	68.000.000,00	
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						24.903.500,00							68.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	24.903.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		4 Paket	68.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						105.586.500,00							98.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350 Orang		350 Orang	350 Orang	105.586.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		350 Orang	98.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						304.709.300,00					-		547.850.000,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						304.709.300,00					-		547.850.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	5.508.000,00						24 Dokumen	6.850.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	151.312.000,00						20 Laporan	291.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	15 Paket		15 Paket	15 Paket	38.550.000,00						15 Paket	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.736.800,00						1 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	25.000.000,00						2 Paket	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	46.715.400,00						2 Paket	84.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	16.887.100,00						1 Paket	10.500.000,00	
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						25.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2 Paket	45.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						46.715.400,00							84.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	46.715.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2 Paket	84.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						16.887.100,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	16.887.100,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Paket	10.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						38.550.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	38.550.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		15 Paket	80.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.736.800,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.736.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Paket	30.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.508.000,00							6.850.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	5.508.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		24 Dokumen	6.850.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						151.312.000,00							291.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	151.312.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		20 Laporan	291.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						323.802.400,00					-		205.000.000,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						323.802.400,00					-		205.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	34.599.200,00						1 Unit	70.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	289.203.200,00						2 Unit	135.000.000,00	
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						34.599.200,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	34.599.200,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit	70.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin						289.203.200,00							135.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	289.203.200,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		2 Unit	135.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						244.654.272,00					-		681.000.000,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						244.654.272,00					-		681.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	96.000.300,00						24 Laporan	362.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	148.653.972,00						13 Laporan	319.000.000,00	
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						96.000.300,00							362.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	96.000.300,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		24 Laporan	362.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						148.653.972,00							319.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	148.653.972,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		13 Laporan	319.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						322.484.900,00					-		330.000.000,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						322.484.900,00					-		330.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	13 Unit		13 Unit	13 Unit	180.454.600,00						13 Unit	180.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	11.014.600,00						1 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	5 Unit		5 Unit	5 Unit	30.911.700,00						5 Unit	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.104.000,00						1 Unit	100.000.000,00	
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						180.454.600,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	13 Unit		13 Unit	13 Unit	180.454.600,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		13 Unit	180.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						11.014.600,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	11.014.600,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit	25.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.911.700,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	30.911.700,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		5 Unit	25.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.104.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.104.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
144,	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**						12.372.900,00							30.000.000,00	
		Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran						12.372.900,00							30.000.000,00	
			1.persentase usaha perdagangan yg berizin	92.02 %		75.71 %	79.49 %	12.372.900,00						83.46 %	30.000.000,00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan						12.372.900,00					-		30.000.000,00	
		Meningkatnya kemudahan proses perijinan dan pendaftaran berusaha						12.372.900,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	13 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	12.372.900,00						11 Dokumen	30.000.000,00	
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan						12.372.900,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	13 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	12.372.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		11 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
145,	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						4.014.553.280,00							14.000.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan						4.014.553.280,00							14.000.000.000,00	
			999.Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	18.18 Persentase		18.18 Persentase	18.18 Persentase	4.014.553.280,00						18.18 Persentase	14.000.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						3.989.553.280,00					-		13.950.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang						3.989.553.280,00					-		13.950.000.000,00	
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0 Unit		11 Unit	11 Unit	2.095.543.320,00						11 Unit	3.600.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.750.000,00						1 Kegiatan	2.000.000,00	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	1.891.259.960,00						3 Unit	10.348.000.000,00	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						1.891.259.960,00							10.348.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	1.891.259.960,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3 Unit	10.348.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						2.095.543.320,00							3.600.000.000,00	
		Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0 Unit		11 Unit	11 Unit	2.095.543.320,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		11 Unit	3.600.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.03.2.01.0003	Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah						2.750.000,00							2.000.000,00	
		Terselenggarannya kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.750.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Kegiatan	2.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						25.000.000,00					-		50.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan sarana perdagangan						25.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
146,	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						142.424.800,00							127.000.000,00	
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan						142.424.800,00							127.000.000,00	
			999.Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	142.424.800,00						100 Persentase	127.000.000,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						138.024.800,00					-		117.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pengendalian ketersediaan barang pokok dan						138.024.800,00					-		117.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	74.150.000,00						1 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	62.374.800,00						12 Laporan	40.000.000,00	
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						62.374.800,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	62.374.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		12 Laporan	40.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						74.150.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	74.150.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Laporan	75.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						4.400.000,00					-		10.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pengendalian ketersediaan pupuk dan pestisida bersubsidi						4.400.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.400.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						4.400.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.400.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Laporan	10.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya kualitas pengendalian ketersediaan barang pokok dan						138.024.800,00					-		117.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem	-		-	-	1.500.000,00						-	2.000.000,00	
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						1.500.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem	-		-	1 Laporan	1.500.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	2.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
147,	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**						331.543.000,00							200.000.000,00	
		Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor						331.543.000,00							100.000.000,00	
			999.Nilai Ekspor Barang	100 Nilai		100 Nilai	100	331.543.000,00						100 Nilai	100.000.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah						331.543.000,00					-		200.000.000,00	
		Tercapainya kerjasama ekspor produk						331.543.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	1 Pelaku Usaha		1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	144.215.000,00						1 Pelaku Usaha	100.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	187.328.000,00						5 Pelaku Usaha	100.000.000,00	
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional						187.328.000,00							100.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	187.328.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		5 Pelaku Usaha	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan						144.215.000,00							100.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	1 Pelaku Usaha		1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	144.215.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Pelaku Usaha	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
148,	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						91.651.400,00							160.000.000,00	
		Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk						91.651.400,00							160.000.000,00	
			999.Indeks kepuasan konsumen terhadap layanan perlindungan	88 Indeks (Skala 0-100)		84 Indeks (Skala 0-100)	85 Indeks (Skala 0-100)	91.651.400,00						86 Indeks (Skala 0-100)	160.000.000,00	
			999.Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang	50.29 %		48.26 %	48. 65 %	91.651.400,00						49.23 %	160.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						91.651.400,00					-		160.000.000,00	
		Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen						91.651.400,00					-		160.000.000,00	
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera	6022 Unit		5919 Unit	5944 Unit	53.345.300,00						5970 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 Orang		200 Orang	200 Orang	38.306.100,00						200 Orang	10.000.000,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						53.345.300,00							150.000.000,00	
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	6022 Unit		5919 Unit	5919 Unit	53.345.300,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		5970 Unit	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						38.306.100,00							10.000.000,00	
		Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 Orang		200 Orang	200 Orang	38.306.100,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		200 Orang	10.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
149,	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**						703.092.800,00							150.000.000,00	
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri						703.092.800,00							150.000.000,00	
			999.Jumlah kerjasama penggunaan produk lokal daerah	30 Kerja Sama		10 Kerja Sama	15 Kerja Sama	703.092.800,00						20 Kerja Sama	150.000.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						703.092.800,00					-		150.000.000,00	
		Meningkatnya pemasaran produk lokal daerah						703.092.800,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang	30 Orang		30 Orang	30 Orang	18.560.800,00						30 Orang	75.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa	10 UMKM		10 UMKM	10 UMKM	259.532.000,00						10 UMKM	6.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di	350 UMKM		350 UMKM	350 UMKM	425.000.000,00						350 UMKM	69.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.07.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri						18.560.800,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang	30 Orang		30 Orang	30 Orang	18.560.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		30 Orang	75.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						425.000.000,00							69.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di	350 UMKM		350 UMKM	350 UMKM	425.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		350 UMKM	69.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						259.532.000,00							6.000.000,00	
		Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa	10 UMKM		10 UMKM	10 UMKM	259.532.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		10 UMKM	6.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						2.390.300.600,00							3.507.250.617,00	
150,	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						2.250.744.980,00							3.446.650.617,00	
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri						2.250.744.980,00							3.444.650.617,00	
			999.Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	1.45 Persentase		1.41 Persentase	1.42 Persentase	2.250.744.980,00						1.43 Persentase	3.444.650.617,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri						2.250.744.980,00					-		3.446.650.617,00	
		Meningkatnya Pertumbuhan IKM						2.250.744.980,00					-		3.446.650.617,00	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	37.462.000,00						4 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	109.900.180,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	2.061.067.000,00						5 Dokumen	3.117.650.617,00	
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	39.015.800,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri						37.462.000,00							75.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan	4 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	37.462.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		4 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						109.900.180,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	109.900.180,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						2.061.067.000,00							3.117.650.617,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	2.061.067.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		5 Dokumen	3.117.650.617,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri						3.300.000,00							2.000.000,00	
		Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Dokumen	2.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota						39.015.800,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	39.015.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		1 Dokumen	2.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
151,	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**						39.455.800,00							30.600.000,00	
		Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian						39.455.800,00							30.600.000,00	
			999.Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	50 Persentase		50 Persentase	50 Persentase	39.455.800,00						50 Persentase	30.600.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri						39.455.800,00					-		30.600.000,00	
		Meningkatnya kemudahan proses perijinan dan pendaftaran usaha						39.455.800,00					-		30.600.000,00	
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00						3 Dokumen	30.000.000,00	
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem						30.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya kemudahan proses perijinan dan pendaftaran usaha						39.455.800,00					-		30.600.000,00	
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan	-		-	-	9.455.800,00						-	600.000,00	
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota						9.455.800,00							600.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan	-		-	1 Dokumen	9.455.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		-	600.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
152,	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**						100.099.820,00							30.000.000,00	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi industri						100.099.820,00							30.000.000,00	
			1.Persentase industri yg terdaftar di SIiNAS	35.2 %		34.4 %	34.6 %	100.099.820,00						34.8 %	30.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan						100.099.820,00					-		30.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan persyaratan ijin usaha industri sesuai						100.099.820,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100.099.820,00						3 Dokumen	30.000.000,00	
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui						100.099.820,00							30.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100.099.820,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	4. Peningka tan kualitas Sumber daya manusia		3 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Bagian Pemerintah						1.800.714.290,00							1.974.491.715,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						576.999.532,00							613.089.587,00	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						576.999.532,00							613.089.587,00	
153,	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						50.386.500,00							100.063.018,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola						50.386.500,00							100.063.018,00	
			999.Persentase fasilitasi tata kelola kelurahan	100 %		100 %	100 %	50.386.500,00						100 %	100.063.018,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						50.386.500,00					Tata kelola kelurahan		100.063.018,00	
		Meningkatnya tatakelola Pemerintahan Kelurahan						50.386.500,00					Tata kelola kelurahan		100.063.018,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	21 Dokumen		21 Dokumen	21 Dokumen	50.386.500,00						21 Dokumen	100.063.018,00	
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan						50.386.500,00							100.063.018,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	21 Dokumen		21 Dokumen	21 Dokumen	50.386.500,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		21 Dokumen	100.063.018,00	Bagian Pemerintahan
154,	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						526.613.032,00							513.026.569,00	
		Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan						526.613.032,00							513.026.569,00	
			999.Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK)	100 %		100 %	100 %	526.613.032,00						100 %	513.026.569,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat						526.613.032,00					Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)		513.026.569,00	
		Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan						526.613.032,00					Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		513.026.569,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.965.500,00						1 Laporan	122.927.437,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.625.000,00						1 Laporan	58.085.663,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6 Lembaga		6 Lembaga	6 Lembaga	468.022.532,00						6 Lembaga	332.013.469,00	
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan						468.022.532,00							332.013.469,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan	6 Lembaga		6 Lembaga	6 Lembaga	468.022.532,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		6 Lembaga	332.013.469,00	Bagian Pemerintahan
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						9.625.000,00							58.085.663,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.625.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Laporan	58.085.663,00	Bagian Pemerintahan
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat						48.965.500,00							122.927.437,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.965.500,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Laporan	122.927.437,00	Bagian Pemerintahan
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						1.223.714.758,00							1.361.402.128,00	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						1.223.714.758,00							1.361.402.128,00	
155,	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						10.743.739.558,00							11.831.333.013,00	
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan						1.090.819.058,00							1.204.835.224,00	
			999.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan	100 %		100 %	100 %	908.030.558,00						100 %	919.444.848,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						1.090.819.058,00					capaian hasil yang dicapai oleh Pemerintah Daerah, tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai		1.204.835.224,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						1.090.819.058,00					capaian hasil yang dicapai oleh Pemerintah Daerah, tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai		1.204.835.224,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	577.229.245,00						4 Dokumen	422.908.424,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	330.801.313,00						4 Dokumen	496.536.424,00	
		Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan						1.090.819.058,00					capaian hasil yang dicapai oleh Pemerintah Daerah, tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai		1.204.835.224,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	577.229.245,00						4 Dokumen	422.908.424,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	330.801.313,00						4 Dokumen	496.536.424,00	
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						330.801.313,00							496.536.424,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	330.801.313,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Dokumen	496.536.424,00	Bagian Pemerintahan
	4.01.02.2.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi						577.229.245,00							422.908.424,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	577.229.245,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Dokumen	422.908.424,00	Bagian Pemerintahan
		Meningkatnya kualitas kerja sama daerah						132.895.700,00							156.566.904,00	
			999.Efektivitas Kerja Sama Daerah	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	132.895.700,00						100 Persentase	156.566.904,00	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						132.895.700,00					tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang		156.566.904,00	
		Meningkatnya Sinergitas Antar Daerah						132.895.700,00					tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang		156.566.904,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	110.983.700,00						10 Dokumen	112.300.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	21.912.000,00						1 Laporan	44.266.904,00	
	4.01.02.2.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						110.983.700,00							112.300.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	110.983.700,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		10 Dokumen	112.300.000,00	Bagian Pemerintahan
	4.01.02.2.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						21.912.000,00							44.266.904,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	21.912.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Laporan	44.266.904,00	Bagian Pemerintahan
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan						1.090.819.058,00							1.204.835.224,00	
			999.Kinerja Penyelenggaraan	3.3682 Persentase		3.3674 Persentase	3.3676 Persentase	182.788.500,00						3.3678 Persentase	285.390.376,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						1.090.819.058,00					capaian hasil yang dicapai oleh Pemerintah Daerah, tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai		1.204.835.224,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	182.788.500,00						10 Dokumen	285.390.376,00	
		Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan						1.090.819.058,00					capaian hasil yang dicapai oleh Pemerintah Daerah, tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai		1.204.835.224,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	182.788.500,00						10 Dokumen	285.390.376,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						182.788.500,00							285.390.376,00	
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	182.788.500,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	-	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		10 Dokumen	285.390.376,00	Bagian Pemerintahan
		Bagian Hukum						1.017.637.100,00							965.656.474,00	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						1.017.637.100,00							965.656.474,00	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						1.017.637.100,00							965.656.474,00	
156,	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						10.743.739.558,00							11.831.333.013,00	
		Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan						1.017.637.100,00							965.656.474,00	
			999.Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	94 %		94 %	94 %	633.054.900,00						94 %	580.156.474,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						1.017.637.100,00					Produk hukum yang dihasilkan dan masalah hukum yang		965.656.474,00	
		Meningkatnya Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah						1.017.637.100,00					Produk hukum yang dihasilkan dan masalah hukum yang		965.656.474,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	320 Dokumen		320 Dokumen	320 Dokumen	316.455.200,00						320 Dokumen	262.656.474,00	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang	320 Dokumen		320 Dokumen	320 Dokumen	316.599.700,00						320 Dokumen	317.500.000,00	
		Meningkatnya Fasilitasi Pendampingan Hukum						1.017.637.100,00					Produk hukum yang dihasilkan dan masalah hukum yang		965.656.474,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	320 Dokumen		320 Dokumen	320 Dokumen	316.455.200,00						320 Dokumen	262.656.474,00	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang	320 Dokumen		320 Dokumen	320 Dokumen	316.599.700,00						320 Dokumen	317.500.000,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						316.455.200,00							262.656.474,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	320 Dokumen		320 Dokumen	320 Dokumen	316.455.200,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		320 Dokumen	262.656.474,00	Bagian Hukum
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum						316.599.700,00							317.500.000,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	320 Dokumen		320 Dokumen	320 Dokumen	316.599.700,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		320 Dokumen	317.500.000,00	Bagian Hukum
		Meningkatnya penyelesaian perkara hukum						1.017.637.100,00							965.656.474,00	
			999.Persentase masalah hukum yang terselesaikan	96 %		96 %	96 %	384.582.200,00						96 %	385.500.000,00	
		Meningkatnya Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah						1.017.637.100,00					Produk hukum yang dihasilkan dan masalah hukum yang		965.656.474,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	24 Kasus		24 Kasus	24 Kasus	384.582.200,00						24 Kasus	385.500.000,00	
		Meningkatnya Fasilitasi Pendampingan Hukum						1.017.637.100,00					Produk hukum yang dihasilkan dan masalah hukum yang		965.656.474,00	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	24 Kasus		24 Kasus	24 Kasus	384.582.200,00						24 Kasus	385.500.000,00	
	4.01.02.2.	Fasilitasi Bantuan Hukum						384.582.200,00							385.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	24 Kasus		24 Kasus	24 Kasus	384.582.200,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		24 Kasus	385.500.000,00	Bagian Hukum
		Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat						8.778.837.247,00							20.022.269.836,00	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						8.778.837.247,00							20.022.269.836,00	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						8.778.837.247,00							20.022.269.836,00	
157,	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						10.743.739.558,00							11.831.333.013,00	
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat						8.502.387.700,00							9.504.274.411,00	
			999.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	8.502.387.700,00						100 Persentase	9.504.274.411,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						8.502.387.700,00					tingkat keberhasilan suatu kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan yang		9.504.274.411,00	
		Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Bidang Keagamaan						8.502.387.700,00					tingkat keberhasilan suatu kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan yang		9.504.274.411,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	31 Dokumen		31 Dokumen	31 Dokumen	8.222.090.400,00						31 Dokumen	9.216.563.957,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	33.448.400,00						5 Dokumen	34.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	246.848.900,00						5 Dokumen	253.210.454,00	
		Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat						8.502.387.700,00					tingkat keberhasilan suatu kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan yang		9.504.274.411,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	31 Dokumen		31 Dokumen	31 Dokumen	8.222.090.400,00						31 Dokumen	9.216.563.957,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	33.448.400,00						5 Dokumen	34.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	246.848.900,00						5 Dokumen	253.210.454,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						8.222.090.400,00							9.216.563.957,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	31 Dokumen		31 Dokumen	31 Dokumen	8.222.090.400,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		31 Dokumen	9.216.563.957,00	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						246.848.900,00							253.210.454,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	246.848.900,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		5 Dokumen	253.210.454,00	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						33.448.400,00							34.500.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	33.448.400,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		5 Dokumen	34.500.000,00	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
158,	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						1.059.732.724,00							11.331.016.302,00	
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian						276.449.547,00							10.517.995.425,00	
			999.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	100 %		100 %	100 %	276.449.547,00						100 %	10.517.995.425,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						176.449.547,00					proporsi dari kebijakan yang telah dirumuskan dalam sektor perekonomian		10.343.860.359,00	
		Meningkatnya Kinerja BUMD dan BLUD						176.449.547,00					proporsi dari kebijakan yang telah dirumuskan dalam sektor perekonomian		10.343.860.359,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	62.695.900,00						2 Dokumen	10.203.466.547,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	23.876.847,00						4 Dokumen	60.656.106,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	89.876.800,00						13 Laporan	79.737.706,00	
		Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian						176.449.547,00					proporsi dari kebijakan yang telah dirumuskan dalam sektor perekonomian		10.343.860.359,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	62.695.900,00						2 Dokumen	10.203.466.547,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	23.876.847,00						4 Dokumen	60.656.106,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	89.876.800,00						13 Laporan	79.737.706,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						62.695.900,00							10.203.466.547,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	62.695.900,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Dokumen	10.203.466.547,00	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						89.876.800,00							79.737.706,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	89.876.800,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		13 Laporan	79.737.706,00	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						23.876.847,00							60.656.106,00	
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	23.876.847,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Dokumen	60.656.106,00	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						100.000.000,00					dampak kebijakan yang dirancang mampu mengelola		174.135.066,00	
		Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Bidang Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						100.000.000,00					dampak kebijakan yang dirancang mampu mengelola		174.135.066,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM,	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	174.135.066,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						100.000.000,00							174.135.066,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Blitar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Dokumen	174.135.066,00	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
		Bagian Umum						24.130.677.536,00							25.196.810.767,00	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						24.130.677.536,00							25.196.810.767,00	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						24.130.677.536,00							25.196.810.767,00	
159,	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						24.849.081.236,00							26.111.648.511,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						24.128.477.536,00							25.194.584.367,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	24.128.477.536,00						100 %	25.194.584.367,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						24.673.500,00					dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah (laporan		26.372.013,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						24.673.500,00					dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah (laporan		26.372.013,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.346.900,00						1 Laporan	13.507.164,00	
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.999.900,00							10.120.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.999.900,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Laporan	10.120.000,00	Bagian Umum
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan		20 Laporan	1 Laporan	9.999.900,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		20 Laporan	10.120.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.913.794.696,00					Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai		14.767.769.006,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						13.913.794.696,00					Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai		14.767.769.006,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.650.000,00						4 Laporan	1.669.800,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan		110 Orang/bulan	110 Orang/bulan	13.912.144.696,00						110 Orang/bulan	14.766.099.206,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.912.144.696,00							14.766.099.206,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan		110 Orang/bulan	106 Orang/bulan	13.912.144.696,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		110 Orang/bulan	14.766.099.206,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.650.000,00							1.669.800,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.650.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Laporan	1.669.800,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4.400.000,00					pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai		4.452.800,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah						4.400.000,00					pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai		4.452.800,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.200.000,00						2 Laporan	2.226.400,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.200.000,00						2 Dokumen	2.226.400,00	
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						2.200.000,00							2.226.400,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.200.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Dokumen	2.226.400,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.200.000,00							2.226.400,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.200.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Laporan	2.226.400,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						926.056.000,00					ketersediaan administrasi umum perangkat		1.001.325.762,00	
		Terpenuhinya penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						926.056.000,00					ketersediaan administrasi umum perangkat		1.001.325.762,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	66.555.000,00						24 Dokumen	67.475.100,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan		130 Laporan	130 Laporan	251.692.000,00						130 Laporan	322.591.192,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	170 Paket		170 Paket	170 Paket	414.705.000,00						170 Paket	415.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	26.833.200,00						2 Paket	27.216.526,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	45.888.200,00						4 Paket	46.449.576,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	89.518.200,00						7 Paket	90.600.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	30.864.400,00						3 Paket	31.293.368,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						45.888.200,00							46.449.576,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	45.888.200,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Paket	46.449.576,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						89.518.200,00							90.600.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	6 Paket	89.518.200,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		7 Paket	90.600.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						30.864.400,00							31.293.368,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	30.864.400,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		3 Paket	31.293.368,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						414.705.000,00							415.700.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	170 Paket		170 Paket	170 Paket	414.705.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		170 Paket	415.700.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						26.833.200,00							27.216.526,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	26.833.200,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Paket	27.216.526,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						66.555.000,00							67.475.100,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	66.555.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		24 Dokumen	67.475.100,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						251.692.000,00							322.591.192,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan		130 Laporan	130 Laporan	251.692.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		130 Laporan	322.591.192,00	Bagian Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						110.717.900,00					Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai		153.000.000,00	
		Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						110.717.900,00					Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai		153.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	110.717.900,00						Unit	153.000.000,00	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						110.717.900,00							153.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	8 Unit	110.717.900,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		Unit	153.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.748.519.929,00					penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		2.690.446.845,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.748.519.929,00					penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		2.690.446.845,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	1.138.912.500,00						48 Laporan	1.010.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	1.579.168.276,00						13 Laporan	1.650.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	30.000.553,00						6 Laporan	30.000.553,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	438.600,00						1 Laporan	446.292,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						438.600,00							446.292,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	438.600,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Laporan	446.292,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.138.912.500,00							1.010.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	1.138.912.500,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		48 Laporan	1.010.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.000.553,00							30.000.553,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	30.000.553,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		6 Laporan	30.000.553,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.579.168.276,00							1.650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	1.579.168.276,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		13 Laporan	1.650.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.257.643.179,00					Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai		1.306.893.984,00	
		Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.257.643.179,00					Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai		1.306.893.984,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	65 Unit		65 Unit	65 Unit	548.231.700,00						65 Unit	580.296.848,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	419.405.479,00						7 Unit	424.214.418,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	118 Unit		118 Unit	118 Unit	190.006.000,00						118 Unit	192.382.718,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3 Unit		5 Unit	5 Unit	100.000.000,00						5 Unit	110.000.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						419.405.479,00							424.214.418,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	419.405.479,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		7 Unit	424.214.418,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						548.231.700,00							580.296.848,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit		65 Unit	65 Unit	548.231.700,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		65 Unit	580.296.848,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						190.006.000,00							192.382.718,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	118 Unit		118 Unit	118 Unit	190.006.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		118 Unit	192.382.718,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		5 Unit	110.000.000,00	Bagian Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						984.365.981,00					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		996.250.832,00	
		Terpenuhinya administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						984.365.981,00					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		996.250.832,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	600.000.000,00						2 Orang/Bulan	607.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	239.715.981,00						2 Orang/Bulan	242.592.573,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang		2 Orang	2 Orang	6.000.000,00						2 Orang	6.072.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	23 Paket		23 Paket	23 Paket	138.650.000,00						23 Paket	140.386.259,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala						239.715.981,00							242.592.573,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	239.715.981,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Orang/Bulan	242.592.573,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						138.650.000,00							140.386.259,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	23 Paket		23 Paket	23 Paket	138.650.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		23 Paket	140.386.259,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						6.000.000,00							6.072.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang		2 Orang	2 Orang	6.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Orang	6.072.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil						600.000.000,00							607.200.000,00	
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	600.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Orang/Bulan	607.200.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						3.952.917.851,00					Fasilitasi keruma htanggaan Sekretariat Daerah yang		4.028.696.761,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						3.952.917.851,00					Fasilitasi keruma htanggaan Sekretariat Daerah yang		4.028.696.761,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2.361.971.411,00						12 Paket	2.394.902.898,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	245.425.200,00						12 Paket	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang	12 Paket		12 Paket	12 Paket	1.345.521.240,00						12 Paket	1.383.793.863,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						2.361.971.411,00							2.394.902.898,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2.361.971.411,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Paket	2.394.902.898,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						1.345.521.240,00							1.383.793.863,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	1.345.521.240,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Paket	1.383.793.863,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						245.425.200,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	245.425.200,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Paket	250.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						222.262.100,00					Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai		237.854.777,00	
		Terlaksananya fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan sesuai SOP						222.262.100,00					Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai		237.854.777,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	33 Laporan		33 Laporan	33 Laporan	140.649.900,00						33 Laporan	167.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	400 Laporan		400 Laporan	400 Laporan	1.700.000,00						400 Laporan	1.720.400,00	
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3055 Laporan		3055 Laporan	3055 Laporan	79.912.200,00						3055 Laporan	69.134.377,00	
	4.01.01.2.	Fasilitasi Keprotokolan						140.649.900,00							167.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	33 Laporan		33 Laporan	33 Laporan	140.649.900,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		33 Laporan	167.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						1.700.000,00							1.720.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	400 Laporan		400 Laporan	400 Laporan	1.700.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		400 Laporan	1.720.400,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.[illegible]	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						79.912.200,00							69.134.377,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3055 Laporan		3055 Laporan	3055 Laporan	79.912.200,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		3055 Laporan	69.134.377,00	Bagian Umum
		Bagian Organisasi						718.403.700,00							914.837.744,00	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						718.403.700,00							914.837.744,00	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						718.403.700,00							914.837.744,00	
160,	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						24.849.081.236,00							26.111.648.511,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						113.884.500,00							131.883.993,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	113.884.500,00						100 %	131.883.993,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						24.673.500,00					Layanan kedinasan sesuai standar pelayanan yang		26.372.013,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						24.673.500,00					Layanan kedinasan sesuai standar pelayanan yang		26.372.013,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	2.750.000,00						1 Berita Acara	2.783.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.925.000,00						1 Berita Acara	3.350.430,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.351.600,00						2 Dokumen	3.391.819,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	3.300.000,00						13 Dokumen	3.339.600,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.346.900,00						1 Laporan	13.507.164,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.351.600,00							3.391.819,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.351.600,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Dokumen	3.391.819,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.[illegible]	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.347.000,00							3.387.164,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	3.347.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		20 Laporan	3.387.164,00	Bagian Organisasi
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	20 Laporan	3.347.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Laporan	3.387.164,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat						2.750.000,00							2.783.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	2.750.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Berita Acara	2.783.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						3.300.000,00							3.339.600,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	3.300.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		13 Dokumen	3.339.600,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis						1.925.000,00							3.350.430,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.925.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Berita Acara	3.350.430,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						99.210.900,00					Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai		115.631.980,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						99.210.900,00					Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai		115.631.980,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	110 Orang		110 Orang	110 Orang	80.038.650,00						110 Orang	84.055.354,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	6 Paket		6 Paket	6 Paket	19.172.250,00						6 Paket	31.576.626,00	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						19.172.250,00							31.576.626,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	19.172.250,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		6 Paket	31.576.626,00	Bagian Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						80.038.650,00							84.055.354,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	110 Orang		110 Orang	106 Orang	80.038.650,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		110 Orang	84.055.354,00	Bagian Organisasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik						604.519.200,00							782.953.751,00	
			999.Persentase perangkat daerah yang memiliki IKM dengan kategori minimal	100 %		100 %	100 %	239.936.900,00						100 %	272.117.886,00	
			999.Persentase unit pelayanan publik dengan kategori pelayanan Baik	100 %		100 %	100 %	239.936.900,00						100 %	272.117.886,00	
		Penataan Organisasi						604.519.200,00					Perangkat Daerah yang telah dilakukan pembinaan implementasi SAKIP dan RB, kematangan organisasi, ketatalaksanaa		782.953.751,00	
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah						604.519.200,00					Perangkat Daerah yang telah dilakukan pembinaan implementasi SAKIP dan RB, kematangan organisasi, ketatalaksanaa		782.953.751,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	18.555.000,00						3 Dokumen	18.777.660,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	221.381.900,00						7 Laporan	253.340.226,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah						604.519.200,00					Perangkat Daerah yang telah dilakukan pembinaan implementasi SAKIP dan RB, kematangan organisasi, ketatalaksanaa		782.953.751,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	18.555.000,00						3 Dokumen	18.777.660,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	221.381.900,00						7 Laporan	253.340.226,00	
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						221.381.900,00							253.340.226,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	221.381.900,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		7 Laporan	253.340.226,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						18.555.000,00							18.777.660,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	18.555.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		3 Dokumen	18.777.660,00	Bagian Organisasi
		Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah						604.519.200,00							782.953.751,00	
			999.Indeks Kematangan Organisasi	46.1 Indeks		42.1 Indeks	43.1 Indeks	364.582.300,00						44.1 Indeks	510.835.865,00	
			999.Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal A	100 %		100 %	100 %	364.582.300,00						100 %	510.835.865,00	
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah						604.519.200,00					Perangkat Daerah yang telah dilakukan pembinaan implementasi SAKIP dan RB, kematangan organisasi, ketatalaksanaa		782.953.751,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	13.307.500,00						4 Dokumen	13.467.190,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	169.374.700,00						6 Dokumen	243.430.123,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	181.900.100,00						7 Dokumen	253.938.552,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah						604.519.200,00					Perangkat Daerah yang telah dilakukan pembinaan implementasi SAKIP dan RB, kematangan organisasi, ketatalaksanaa		782.953.751,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	13.307.500,00						4 Dokumen	13.467.190,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	169.374.700,00						6 Dokumen	243.430.123,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	181.900.100,00						7 Dokumen	253.938.552,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						169.374.700,00							243.430.123,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	169.374.700,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		6 Dokumen	243.430.123,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						181.900.100,00							253.938.552,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	181.900.100,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		7 Dokumen	253.938.552,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						13.307.500,00							13.467.190,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	13.307.500,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Dokumen	13.467.190,00	Bagian Organisasi
		Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa						783.283.177,00							813.020.877,00	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						783.283.177,00							813.020.877,00	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						783.283.177,00							813.020.877,00	
161,	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						1.059.732.724,00							11.331.016.302,00	
		Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan						166.352.400,00							185.046.628,00	
			999.Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	166.352.400,00						100 Persentase	185.046.628,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						166.352.400,00					tingkat keberhasilan suatu kebijakan administrasi pembangunan dalam mencapai tujuan yang		185.046.628,00	
		Meningkatnya Monitoring dan Pengendalian Program Pembangunan						166.352.400,00					tingkat keberhasilan suatu kebijakan administrasi pembangunan dalam mencapai tujuan yang		185.046.628,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	54.668.000,00						6 Dokumen	55.324.016,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	111.684.400,00						16 Laporan	129.722.612,00	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						54.668.000,00							55.324.016,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	54.668.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		6 Dokumen	55.324.016,00	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						111.684.400,00							129.722.612,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	111.684.400,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		16 Laporan	129.722.612,00	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
		Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa						616.930.777,00							627.974.249,00	
			999.Tingkat Kematangan UKPBJ	9:9 Level		9:9 Level	9:9 Level	616.930.777,00						9:9 Level	627.974.249,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						616.930.777,00					level kemajuan yang dicapai oleh suatu unit kerja Pengelola PBJ dalam melaksanakan proses		627.974.249,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dalam Penyelesaian Paket Pekerjaan						616.930.777,00					level kemajuan yang dicapai oleh suatu unit kerja Pengelola PBJ dalam melaksanakan proses		627.974.249,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	201.323.177,00						2 Dokumen	202.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	248.943.600,00						18 Dokumen	256.810.281,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang	300 Orang		300 Orang	300 Orang	166.664.000,00						300 Orang	168.663.968,00	
		Meningkatnya Kuantitas dan kualitas SDM PBJ						616.930.777,00					level kemajuan yang dicapai oleh suatu unit kerja Pengelola PBJ dalam melaksanakan proses		627.974.249,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	201.323.177,00						2 Dokumen	202.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	248.943.600,00						18 Dokumen	256.810.281,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang	300 Orang		300 Orang	300 Orang	166.664.000,00						300 Orang	168.663.968,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						248.943.600,00							256.810.281,00	
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	248.943.600,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		18 Dokumen	256.810.281,00	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						201.323.177,00							202.500.000,00	
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	201.323.177,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Dokumen	202.500.000,00	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						166.664.000,00							168.663.968,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang		300 Orang	300 Orang	166.664.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		300 Orang	168.663.968,00	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
		Sekretariat DPRD						31.617.298.275,00							31.925.969.324,00	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						31.617.298.275,00							31.925.969.324,00	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						31.617.298.275,00							31.925.969.324,00	
162,	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						19.161.794.700,00							19.275.831.649,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						19.161.794.700,00							19.275.831.649,00	
			1.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	19.161.794.700,00						100 %	19.275.831.649,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.387.325,00					Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat		8.387.325,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah						8.387.325,00					Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat		8.387.325,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.519.200,00						1 Berita Acara	1.519.200,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.440.000,00						1 Berita Acara	1.440.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	870.000,00						1 Data	870.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	1.396.500,00						3 Dokumen	1.396.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	1.404.225,00						13 Dokumen	1.404.225,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	1.757.400,00						17 Laporan	1.757.400,00	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.396.500,00							1.396.500,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	1.396.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	1.396.500,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.757.400,00							1.757.400,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	1.757.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		17 Laporan	1.757.400,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						870.000,00							870.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	870.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Data	870.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat						1.519.200,00							1.519.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.519.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Berita Acara	1.519.200,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						1.404.225,00							1.404.225,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	1.404.225,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		13 Dokumen	1.404.225,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis						1.440.000,00							1.440.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.440.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Berita Acara	1.440.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.236.910.053,00					Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat		3.167.374.567,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						3.236.910.053,00					Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat		3.167.374.567,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	675.000,00						12 Laporan	675.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/bulan		300 Orang/bulan	300 Orang/bulan	3.236.235.053,00						300 Orang/bulan	3.166.699.567,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.236.235.053,00							3.166.699.567,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/bulan		300 Orang/bulan	300 Orang/bulan	3.236.235.053,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		300 Orang/bulan	3.166.699.567,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						675.000,00							675.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	675.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	675.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.400.000,00					Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat		2.400.000,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah						2.400.000,00					Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat		2.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	2.400.000,00						10 Laporan	2.400.000,00	
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.400.000,00							2.400.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	2.400.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Laporan	2.400.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						185.091.800,00					Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat		185.091.800,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						185.091.800,00					Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat		185.091.800,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	25 Orang		25 Orang	25 Orang	166.886.800,00						25 Orang	166.886.800,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	3 Paket		3 Paket	3 Paket	18.205.000,00						3 Paket	18.205.000,00	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						18.205.000,00							18.205.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	18.205.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	18.205.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						166.886.800,00							166.886.800,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang		25 Orang	25 Orang	166.886.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		25 Orang	166.886.800,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						622.870.400,00					Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat		632.191.800,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						622.870.400,00					Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat		632.191.800,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	16.086.000,00						48 Dokumen	16.086.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	26.520.000,00						100 Dokumen	26.520.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	171.436.000,00						12 Laporan	171.436.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	183.679.000,00						12 Laporan	183.679.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Pa		1 Paket	1 Pa	15.220.000,00						1 Paket	15.220.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Pa ket		1 Paket	1 Pa ket	27.551.500,00						1 Paket	27.555.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Pa ket		1 Paket	1 Pa ket	39.463.200,00						1 Paket	39.754.300,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Pa ket		4 Paket	4 Pa ket	113.593.300,00						4 Paket	113.663.900,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Pa ket		5 Paket	5 Pa ket	29.321.400,00						5 Paket	38.277.600,00	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						39.463.200,00							39.754.300,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Pa ket		1 Paket	1 Pa ket	39.463.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	39.754.300,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						113.593.300,00							113.663.900,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Pa ket		4 Paket	4 Pa ket	113.593.300,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	113.663.900,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						29.321.400,00							38.277.600,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	29.321.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	38.277.600,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.220.000,00							15.220.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.220.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	15.220.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						27.551.500,00							27.555.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	27.551.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	27.555.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						16.086.000,00							16.086.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	16.086.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		48 Dokumen	16.086.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.	Fasilitasi Kunjungan Tamu						171.436.000,00							171.436.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	171.436.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	171.436.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						183.679.000,00							183.679.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	183.679.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	183.679.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2. 06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						26.520.000,00							26.520.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	26.520.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		100 Dokumen	26.520.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						125.837.100,00					Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat		33.875.040,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						125.837.100,00					Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat		33.875.040,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		52 Unit	10 Unit	2.737.500,00						10 Unit	2.737.500,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		46 Unit	10 Unit	123.099.600,00						10 Unit	31.137.540,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
	4.02.01.2. 07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Unit	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.	Pengadaan Mebel						2.737.500,00							2.737.500,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		52 Unit	10 Unit	2.737.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Unit	2.737.500,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						123.099.600,00							31.137.540,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		46 Unit	10 Unit	123.099.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Unit	31.137.540,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						950.685.650,00					Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat		1.283.259.200,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						950.685.650,00					Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat		1.283.259.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	201.420.000,00						12 Laporan	201.420.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	749.265.650,00						12 Laporan	1.081.839.200,00	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						201.420.000,00							201.420.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	201.420.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	201.420.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						749.265.650,00							1.081.839.200,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	749.265.650,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	1.081.839.200,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						857.603.825,00					Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat		791.243.370,00	
		Terpenuhinya pelayanan penunjang kinerja perangkat daerah						857.603.825,00					Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat		791.243.370,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	9 Unit		9 Unit	9 Unit	151.751.600,00						9 Unit	151.751.600,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	148.659.600,00						4 Unit	148.659.600,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	68 Unit		68 Unit	68 Unit	23.257.600,00						68 Unit	23.257.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	89 Unit		89 Unit	89 Unit	149.094.570,00						89 Unit	149.094.570,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3 Unit		2 Unit	3 Unit	384.840.455,00						3 Unit	318.480.000,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						148.659.600,00							148.659.600,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	148.659.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	148.659.600,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						151.751.600,00							151.751.600,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	151.751.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Unit	151.751.600,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.	Pemeliharaan Mebel						23.257.600,00							23.257.600,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	68 Unit		68 Unit	68 Unit	23.257.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		68 Unit	23.257.600,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						149.094.570,00							149.094.570,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit		89 Unit	89 Unit	149.094.570,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		89 Unit	149.094.570,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						384.840.455,00							318.480.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		2 Unit	3 Unit	384.840.455,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Unit	318.480.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						13.172.008.547,00					Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat		13.172.008.547,00	
		Terpenuhinya Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						13.172.008.547,00					Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat		13.172.008.547,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	300 Orang/Bulan		300 Orang/Bulan	300 Orang/Bulan	12.722.878.947,00						300 Orang/Bulan	12.722.878.947,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	25 Orang		25 Orang	25 Orang	75.000.000,00						25 Orang	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	374.129.600,00						5 Paket	374.129.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						12.722.878.947,00							12.722.878.947,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	300 Orang/Bulan		300 Orang/Bulan	300 Orang/Bulan	12.722.878.947,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		300 Orang/Bulan	12.722.878.947,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						374.129.600,00							374.129.600,00	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	374.129.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	374.129.600,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.[illegible]	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang		25 Orang	25 Orang	75.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		25 Orang	75.000.000,00	Sekretariat DPRD
163,	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						12.455.503.575,00							12.650.137.675,00	
		Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan						3.390.346.250,00							3.390.347.350,00	
			999.Persentase penyampaian rekomendasi	100 %		100 %	100 %	3.390.346.250,00						100 %	3.390.347.350,00	
			999.persentase penyampaian rekomendasi pengawasan penyelenggaraan	100 %		100 %	100 %	3.390.346.250,00						100 %	3.390.347.350,00	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						1.327.312.700,00					Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD		1.337.793.800,00	
		Terfasilitasinya Pembahasan Kebijakan Anggaran						1.327.312.700,00					Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD		1.337.793.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	258.452.000,00						2 Dokumen	275.949.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	284.681.700,00						2 Dokumen	269.596.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	238.696.300,00						2 Dokumen	259.288.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	280.083.300,00						2 Dokumen	272.112.100,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	265.399.400,00						2 Dokumen	260.847.800,00	
	4.02.02.2.[illegible]	Pembahasan KUA dan PPAS						238.696.300,00							259.288.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	238.696.300,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	259.288.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						265.399.400,00							260.847.800,00	
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	265.399.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	260.847.800,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.02.2.	Pembahasan APBD						258.452.000,00							275.949.500,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	258.452.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	275.949.500,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.	Pembahasan APBD Perubahan						284.681.700,00							269.596.400,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	284.681.700,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	269.596.400,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.	Pembahasan Pertanggungjawaban						280.083.300,00							272.112.100,00	
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	280.083.300,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	272.112.100,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2. 03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						541.310.600,00					Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD		537.911.100,00	
		Terfasilitasinya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						541.310.600,00					Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD		537.911.100,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	277.131.500,00						12 Dokumen	282.644.500,00	
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	264.179.100,00						1 Dokumen	255.266.600,00	
	4.02.02.2.	Pengawasan Penggunaan Anggaran						277.131.500,00							282.644.500,00	
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	277.131.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	282.644.500,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2. 03.0008	Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah						264.179.100,00							255.266.600,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	264.179.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	255.266.600,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2. 05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						1.521.722.950,00					DPRD dan Sekretariat		1.514.642.450,00	
		Terfasilitasinya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						1.521.722.950,00					DPRD dan Sekretariat		1.514.642.450,00	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.521.722.950,00						3 Dokumen	1.514.642.450,00	
	4.02.02.2.	Pelaksanaan Reses						1.521.722.950,00							1.514.642.450,00	
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.521.722.950,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	1.514.642.450,00	Sekretariat DPRD
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan						9.065.157.325,00							9.259.790.325,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	9.065.157.325,00						100 Persentase	9.259.790.325,00	
			2.Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100 %		100 %	100 %	9.065.157.325,00						100 %	9.259.790.325,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						2.202.069.545,00					Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD		2.396.702.545,00	
		Terfasilitasinya Pembahasan Perda dan Peraturan DPRD						2.202.069.545,00					Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD		2.396.702.545,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	1.415.323.250,00						10 Dokumen	1.626.858.250,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	25.200.000,00						5 Dokumen	270.833.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00						2 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	452.947.295,00						1 Dokumen	401.947.295,00	
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	233.599.000,00						2 Dokumen	22.064.000,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan						25.200.000,00							270.833.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	25.200.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Dokumen	270.833.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						1.415.323.250,00							1.626.858.250,00	
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	1.415.323.250,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Dokumen	1.626.858.250,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						452.947.295,00							401.947.295,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	452.947.295,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	401.947.295,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	75.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.	Penyusunan Tata Tertib DPRD						233.599.000,00							22.064.000,00	
		Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	233.599.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	22.064.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						2.230.574.475,00					Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD		2.230.574.475,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD						2.230.574.475,00					Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD		2.230.574.475,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	1.291.924.000,00						6 Dokumen	1.291.924.000,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	430.233.800,00						12 Dokumen	430.233.800,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	72.369.675,00						1 Dokumen	72.369.675,00	
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim	7 Orang		7 Orang	7 Orang	131.400.000,00						7 Orang	131.400.000,00	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang		5 Orang	5 Orang	304.647.000,00						5 Orang	304.647.000,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						1.291.924.000,00							1.291.924.000,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	1.291.924.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Dokumen	1.291.924.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						131.400.000,00							131.400.000,00	
		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	7 Orang		7 Orang	7 Orang	131.400.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Orang	131.400.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						304.647.000,00							304.647.000,00	
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang		5 Orang	5 Orang	304.647.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Orang	304.647.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD						72.369.675,00							72.369.675,00	
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	72.369.675,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	72.369.675,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						430.233.800,00							430.233.800,00	
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	430.233.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	430.233.800,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						4.632.513.305,00					Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD		4.632.513.305,00	
		Terfasilitasinya Layanan Administrasi Tugas DPRD						4.632.513.305,00					Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD		4.632.513.305,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.529.513.305,00						12 Dokumen	4.529.513.305,00	
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	103.000.000,00						1 Laporan	103.000.000,00	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						4.529.513.305,00							4.529.513.305,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.529.513.305,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	4.529.513.305,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2. [illegible]	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						103.000.000,00							103.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	103.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	103.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah						6.827.381.300,00							6.675.432.435,00	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						6.827.381.300,00							6.675.432.435,00	
	5.01	**PERENCANAAN**						6.077.515.600,00							6.129.185.355,00	
164,	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						4.673.063.370,00							5.189.111.953,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						4.671.163.370,00							5.189.111.953,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	4.671.163.370,00						100 %	5.189.111.953,00	
	5.01.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.051.500,00					Perangkat Daerah		9.961.380,00	
		-						9.051.500,00					Perangkat Daerah		9.961.380,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.750.000,00						1 Berita Acara	1.925.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.330.000,00						1 Berita Acara	1.463.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	1.225.000,00						2 Data	1.347.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	1.900.000,00						2 Dokumen	2.073.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	11 Dokumen		13 Dokumen	11 Dokumen	946.500,00						11 Dokumen	1.042.580,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan		21 Laporan	21 Laporan	1.900.000,00						21 Laporan	2.109.800,00	
	5.01.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.900.000,00							2.073.500,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	1.900.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	2.073.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2. [illegible]	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.900.000,00							2.109.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan		21 Laporan	21 Laporan	1.900.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		21 Laporan	2.109.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						1.225.000,00							1.347.500,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	1.225.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Data	1.347.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.750.000,00							1.925.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.750.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Berita Acara	1.925.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						946.500,00							1.042.580,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	11 Dokumen		13 Dokumen	11 Dokumen	946.500,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Dokumen	1.042.580,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis						1.330.000,00							1.463.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.330.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Berita Acara	1.463.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.065.918.962,00					Perangkat Daerah		4.419.566.195,00	
		-						4.065.918.962,00					Perangkat Daerah		4.419.566.195,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	716.800,00						17 Laporan	837.760,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	448 Orang/bulan		448 Orang/bulan	448 Orang/bulan	4.065.202.162,00						448 Orang/bulan	4.418.728.435,00	
	5.01.01.2.[illegible]	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.065.202.162,00							4.418.728.435,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	448 Orang/bulan		448 Orang/bulan	448 Orang/bulan	4.065.202.162,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		448 Orang/bulan	4.418.728.435,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						716.800,00							837.760,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	716.800,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		17 Laporan	837.760,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						800.000,00					Perangkat Daerah		884.510,00	
		-						800.000,00					Perangkat Daerah		884.510,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	800.000,00						17 Laporan	884.510,00	
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						800.000,00							884.510,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	800.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		17 Laporan	884.510,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						66.907.100,00					Perangkat Daerah		58.713.500,00	
		-						66.907.100,00					Perangkat Daerah		58.713.500,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	144 Orang		144 Orang	144 Orang	66.907.100,00						144 Orang	58.713.500,00	
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						66.907.100,00							58.713.500,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	144 Orang		144 Orang	35 Orang	66.907.100,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		144 Orang	58.713.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						255.504.469,00					Perangkat Daerah		368.014.040,00	
		-						255.504.469,00					Perangkat Daerah		368.014.040,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	7.956.000,00						24 Dokumen	6.058.800,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.375.000,00						1 Dokumen	1.512.500,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	780.000,00						1 Dokumen	772.640,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	180.719.139,00						120 Laporan	297.218.460,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	12 Paket		12 Paket	12 Paket	42.022.300,00						12 Paket	33.650.200,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	6.393.000,00						2 Paket	10.851.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	957.500,00						1 Paket	1.081.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.600.130,00						4 Paket	11.662.640,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	4.701.400,00						3 Paket	5.206.000,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						957.500,00							1.081.300,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	957.500,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	1.081.300,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.600.130,00							11.662.640,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.600.130,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	11.662.640,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.701.400,00							5.206.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	2 Paket	4.701.400,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	5.206.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						42.022.300,00							33.650.200,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	42.022.300,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Paket	33.650.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.393.000,00							10.851.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	6.393.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	10.851.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7.956.000,00							6.058.800,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	7.956.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Dokumen	6.058.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						180.719.139,00							297.218.460,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	180.719.139,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		120 Laporan	297.218.460,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						780.000,00							772.640,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	780.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	772.640,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1.375.000,00							1.512.500,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.375.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	1.512.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						105.168.705,00					Perangkat Daerah		96.526.630,00	
		-						105.168.705,00					Perangkat Daerah		96.526.630,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		4 Unit	2 Unit	7.288.400,00						1 Unit	16.336.300,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		14 Unit	12 Unit	97.880.305,00						12 Unit	80.190.330,00	
	5.01.01.2.	Pengadaan Mebel						7.288.400,00							16.336.300,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		4 Unit	2 Unit	7.288.400,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	16.336.300,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						97.880.305,00							80.190.330,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		14 Unit	11 Unit	97.880.305,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Unit	80.190.330,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						38.371.234,00					Perangkat Daerah		114.314.400,00	
		-						38.371.234,00					Perangkat Daerah		114.314.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.400.000,00						12 Laporan	2.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	35.971.234,00						13 Laporan	111.914.400,00	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.400.000,00							2.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.400.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	2.400.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						35.971.234,00							111.914.400,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	35.971.234,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		13 Laporan	111.914.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						131.341.400,00					Perangkat Daerah		121.131.298,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						131.341.400,00					Perangkat Daerah		121.131.298,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	38.928.800,00						4 Unit	42.888.120,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	28.000.000,00						1 Unit	30.841.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	274.400,00						2 Unit	603.680,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	16 Unit		16 Unit	16 Unit	17.098.200,00						16 Unit	18.590.800,00	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						28.000.000,00							30.841.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	0 Unit	28.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	30.841.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						38.928.800,00							42.888.120,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	38.928.800,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	42.888.120,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.	Pemeliharaan Mebel						274.400,00							603.680,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	274.400,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	603.680,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						17.098.200,00							18.590.800,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	16 Unit	17.098.200,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		16 Unit	18.590.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		-						131.341.400,00					Perangkat Daerah		121.131.298,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	47.040.000,00						-	28.207.698,00	
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						47.040.000,00							28.207.698,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	47.040.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		-	28.207.698,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
165,	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						748.950.000,00							555.075.192,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah						748.950.000,00							555.075.192,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	748.950.000,00						100 Persentase	555.075.192,00	
			3.Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	748.950.000,00						100 Persentase	555.075.192,00	
			3.Persentase program prioritas nasional yang didukung program daerah	57.83 %		46.26 %	49.15 %	748.950.000,00						52.04 %	555.075.192,00	
			999.Persentase capaian kinerja program daerah	95 %		91 %	92 %	748.950.000,00						93 %	555.075.192,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						656.799.900,00					Perangkat Daerah		453.702.512,00	
		-						656.799.900,00					Perangkat Daerah		453.702.512,00	
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	17.700.000,00						1 Berita Acara	19.470.000,00	
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	47.400.050,00						1 Berita Acara	52.139.780,00	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	82.250.000,00						1 Berita Acara	90.466.200,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	55.700.000,00						2 Dokumen	61.281.660,00	
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	453.749.850,00						1 Dokumen	230.344.872,00	
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis						453.749.850,00							230.344.872,00	
		Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	453.749.850,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	230.344.872,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.	Pelaksanaan Konsultasi Publik						47.400.050,00							52.139.780,00	
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	47.400.050,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Berita Acara	52.139.780,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						17.700.000,00							19.470.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	17.700.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Berita Acara	19.470.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						82.250.000,00							90.466.200,00	
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	82.250.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Berita Acara	90.466.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah						55.700.000,00							61.281.660,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/R KPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	55.700.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	61.281.660,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						5.400.000,00					Perangkat Daerah		5.906.450,00	
		-						5.400.000,00					Perangkat Daerah		5.906.450,00	
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	35 Orang		35 Orang	35 Orang	5.400.000,00						35 Orang	5.906.450,00	
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah						5.400.000,00							5.906.450,00	
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	35 Orang		35 Orang	35 Orang	5.400.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		35 Orang	5.906.450,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						78.300.100,00					Perangkat Daerah		86.121.230,00	
		-						78.300.100,00					Perangkat Daerah		86.121.230,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	55.050.100,00						4 Laporan	60.562.730,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	23.250.000,00						2 Laporan	25.558.500,00	
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						23.250.000,00							25.558.500,00	
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	23.250.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	25.558.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						55.050.100,00							60.562.730,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	55.050.100,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	60.562.730,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						8.450.000,00					Perangkat Daerah		9.345.000,00	
		-						8.450.000,00					Perangkat Daerah		9.345.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah	35 Dokumen		35 Dokumen	35 Dokumen	8.450.000,00						35 Dokumen	9.345.000,00	
	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						8.450.000,00							9.345.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	35 Dokumen		35 Dokumen	1 Dokumen	8.450.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		35 Dokumen	9.345.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
166,	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						655.502.230,00							384.998.210,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang						633.502.230,00							372.898.210,00	
			999.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	633.502.230,00						100 Persentase	372.898.210,00	
			999.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	633.502.230,00						100 Persentase	372.898.210,00	
			999.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	633.502.230,00						100 Persentase	372.898.210,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						250.855.600,00					Perangkat Daerah		220.983.480,00	
		-						250.855.600,00					Perangkat Daerah		220.983.480,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	11.000.000,00						2 Laporan	12.100.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	44.750.000,00						2 Laporan	43.289.400,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	154.425.000,00						5 Laporan	145.783.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	40.680.600,00						2 Laporan	19.810.780,00	
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang						44.750.000,00							43.289.400,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	44.750.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	43.289.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang						40.680.600,00							19.810.780,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	40.680.600,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	19.810.780,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang						11.000.000,00							12.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	11.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	12.100.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang						154.425.000,00							145.783.300,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	154.425.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Laporan	145.783.300,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						164.255.630,00					Perangkat Daerah		80.757.490,00	
		-						164.255.630,00					Perangkat Daerah		80.757.490,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	11.000.000,00						2 Laporan	6.622.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	153.255.630,00						2 Laporan	74.135.490,00	
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang						11.000.000,00							6.622.000,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	11.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	6.622.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang						153.255.630,00							74.135.490,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	153.255.630,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	74.135.490,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						240.391.000,00					Perangkat Daerah		83.257.240,00	
		-						240.391.000,00					Perangkat Daerah		83.257.240,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	11.000.000,00						2 Laporan	12.100.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	229.391.000,00						3 Laporan	71.157.240,00	
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang						11.000.000,00							12.100.000,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	11.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	12.100.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang						229.391.000,00							71.157.240,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	229.391.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	71.157.240,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						749.865.700,00							546.247.080,00	
167,	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**						749.865.700,00							546.247.080,00	
		Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam						749.865.700,00							546.247.080,00	
			2.Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam	50 Persentase		50 Persentase	50 Persentase	749.865.700,00						50 Persentase	546.247.080,00	
			999.Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha	39.58 Rasio		37.5 Rasio	38.1 Rasio	749.865.700,00						38.64 Rasio	546.247.080,00	
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						232.740.500,00					Perangkat Daerah		332.547.000,00	
		-						232.740.500,00					Perangkat Daerah		332.547.000,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian,	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	29.550.700,00						2 Laporan	32.547.000,00	
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	3 Naskah		3 Naskah	3 Naskah	203.189.800,00						3 Naskah	300.000.000,00	
	5.05.03.2.	Penyusunan kebijakan berbasis hasil						203.189.800,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	3 Naskah		3 Naskah	2 Naskah	203.189.800,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Naskah	300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan						29.550.700,00							32.547.000,00	
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	29.550.700,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	32.547.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi						517.125.200,00					Perangkat Daerah		213.700.080,00	
		-						517.125.200,00					Perangkat Daerah		213.700.080,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	43.186.200,00						1 Laporan	47.442.560,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	180.839.700,00						2 Laporan	118.823.760,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	293.099.300,00						2 Laporan	47.433.760,00	
	5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi						293.099.300,00							47.433.760,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	293.099.300,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	47.433.760,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.2.02.0003	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah						180.839.700,00							118.823.760,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	180.839.700,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	118.823.760,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual						43.186.200,00							47.442.560,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	43.186.200,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	47.442.560,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah						20.103.261.150,00							25.227.182.761,00	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						20.103.261.150,00							25.227.182.761,00	
	5.02	**KEUANGAN**						20.103.261.150,00							25.227.182.761,00	
168,	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						10.258.416.048,00							12.392.682.761,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						10.258.416.048,00							12.367.682.761,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	10.258.416.048,00						100 %	12.367.682.761,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.541.600,00					ASN BPKAD		16.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						9.541.600,00					ASN BPKAD		16.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	2.411.100,00						1 Berita Acara	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	920.200,00						1 Berita Acara	2.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	997.000,00						1 Data	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.384.900,00						4 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	1.472.000,00						13 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	2.356.400,00						18 Laporan	3.000.000,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.384.900,00							2.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	1.384.900,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Dokumen	2.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.356.400,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	2.356.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		18 Laporan	3.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						997.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	997.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Data	1.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.411.100,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	2.411.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Berita Acara	5.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						1.472.000,00							3.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	1.472.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		13 Dokumen	3.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis						920.200,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	920.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Berita Acara	2.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat						9.334.126.639,00					ASN BPKAD		11.150.682.761,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						9.334.126.639,00					ASN BPKAD		11.150.682.761,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	1.512.000,00						18 Laporan	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	882 Orang/bula n		882 Orang/bulan	882 Orang/bula n	9.332.614.639,00						882 Orang/bula n	11.147.682.761,00	
	5.02.01.2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.332.614.639,00							11.147.682.761,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	882 Orang/bula n		882 Orang/bulan	882 Orang/bula n	9.332.614.639,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		882 Orang/bula n	11.147.682.761,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2. 02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.512.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	1.512.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		18 Laporan	3.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.580.800,00					ASN BPKAD		2.000.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat						1.580.800,00					ASN BPKAD		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	1.580.800,00						7 Laporan	2.000.000,00	
	5.02.01.2. 03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.580.800,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	1.580.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		7 Laporan	2.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						84.896.100,00					ASN BPKAD		95.000.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						84.896.100,00					ASN BPKAD		95.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	189 Orang		189 Orang	189 Orang	84.896.100,00						189 Orang	95.000.000,00	
	5.02.01.2. 05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						84.896.100,00							95.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	189 Orang		189 Orang	189 Orang	84.896.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		189 Orang	95.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						277.896.100,00					ASN BPKAD		423.000.000,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						277.896.100,00					ASN BPKAD		423.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	12.852.000,00						36 Dokumen	13.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00						12 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan		110 Laporan	110 Laporan	175.117.000,00						110 Laporan	280.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	55.036.500,00						1 Paket	61.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.997.900,00						1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.008.100,00						1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	14.926.900,00						4 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	4.957.700,00						3 Paket	9.000.000,00	
	5.02.01.2. 06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.008.100,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.008.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Paket	10.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						14.926.900,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	14.926.900,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Paket	35.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.957.700,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	4.957.700,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		3 Paket	9.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						55.036.500,00							61.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	55.036.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Paket	61.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.997.900,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.997.900,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Paket	10.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12.852.000,00							13.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	12.852.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		36 Dokumen	13.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						175.117.000,00							280.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan		110 Laporan	110 Laporan	175.117.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		110 Laporan	280.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Dokumen	5.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						40.249.282,00					ASN BPKAD		120.000.000,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						40.249.282,00					ASN BPKAD		120.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	40.249.282,00						20 Unit	120.000.000,00	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40.249.282,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	40.249.282,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		20 Unit	120.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						365.321.400,00					ASN BPKAD		431.000.000,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						365.321.400,00					ASN BPKAD		431.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	90.659.600,00						12 Laporan	91.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	274.661.800,00						13 Laporan	340.000.000,00	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						90.659.600,00							91.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	90.659.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Laporan	91.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						274.661.800,00							340.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	274.661.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		13 Laporan	340.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						144.804.127,00					ASN BPKAD		155.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						144.804.127,00					ASN BPKAD		155.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	10 Unit		5 Unit	15 Unit	55.300.485,00						15 Unit	60.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	29.994.500,00						2 Unit	40.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	50 Unit		50 Unit	50 Unit	59.509.142,00						50 Unit	55.000.000,00	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan						29.994.500,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	29.994.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Unit	40.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau						55.300.485,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		5 Unit	15 Unit	55.300.485,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		15 Unit	60.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						59.509.142,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	59.509.142,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		50 Unit	55.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
169,	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						4.102.025.100,00							5.626.000.000,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan						3.238.169.200,00							4.278.500.000,00	
			1.Persentase laporan keuangan tepat waktu	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	232.007.600,00						100 Persentase	261.000.000,00	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan						183.007.600,00					OPD		312.000.000,00	
		Tertibnya penyusunan pelaporan keuangan						183.007.600,00					OPD		312.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00						2 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	42.450.600,00						16 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00						1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.512.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	25.007.000,00						14 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	100 Orang		100 Orang	100 Orang	14.695.800,00						100 Orang	25.000.000,00	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	72.342.200,00						2 Dokumen	110.000.000,00	
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO						42.450.600,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	42.450.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		16 Dokumen	75.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan						25.007.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	25.007.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		14 Laporan	25.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran						72.342.200,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	72.342.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Dokumen	110.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Dokumen	1.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Dokumen	1.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah						26.512.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.512.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Dokumen	75.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						14.695.800,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	14.695.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		100 Orang	25.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						3.001.000.000,00					BUMD dan Masyarakat penerima santunan (BTT)		4.001.000.000,00	
		Tertibnya penyusunan laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						3.001.000.000,00					BUMD dan Masyarakat penerima santunan (BTT)		4.001.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00						2 Laporan	1.000.000,00	
	5.02.02.2.	Analisis Investasi Pemerintah Daerah						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Laporan	1.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						56.161.600,00					OPD		67.500.000,00	
		Tertibnya Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan SIPD						56.161.600,00					OPD		67.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya tata kelola						718.080.500,00							920.000.000,00	
			999.Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	40.03 Persentase		39.90 Persentase	40.00 Persentase	668.080.500,00						40.01 Persentase	920.000.000,00	
			999.Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	29.97 Persentase		30.20 Persentase	30.00 Persentase	668.080.500,00						29.99 Persentase	920.000.000,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						661.918.900,00					OPD		982.500.000,00	
		Tertibnya penyusunan dokumen penganggaran						661.918.900,00					OPD		982.500.000,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	24.422.250,00						2 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	24.222.250,00						2 Dokumen	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.570.000,00						1 Dokumen	45.000.000,00	
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen		68 Dokumen	68 Dokumen	11.560.450,00						68 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah	80 Orang		80 Orang	80 Orang	5.000.000,00						80 Orang	12.500.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	447.749.500,00						2 Dokumen	545.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	56.802.700,00						2 Dokumen	120.000.000,00	
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen		68 Dokumen	68 Dokumen	22.725.800,00						68 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen		68 Dokumen	68 Dokumen	13.127.500,00						68 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen		68 Dokumen	68 Dokumen	47.738.450,00						68 Dokumen	60.000.000,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						24.422.250,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	24.422.250,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Dokumen	50.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						24.222.250,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	24.222.250,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Dokumen	50.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						47.738.450,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen		68 Dokumen	68 Dokumen	47.738.450,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		68 Dokumen	60.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						13.127.500,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen		68 Dokumen	68 Dokumen	13.127.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		68 Dokumen	30.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						11.560.450,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen		68 Dokumen	68 Dokumen	11.560.450,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		68 Dokumen	30.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD						22.725.800,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen		68 Dokumen	68 Dokumen	22.725.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		68 Dokumen	40.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang						447.749.500,00							545.000.000,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	447.749.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Dokumen	545.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						56.802.700,00							120.000.000,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	56.802.700,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Dokumen	120.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						8.570.000,00							45.000.000,00	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.570.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Dokumen	45.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah						5.000.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang		80 Orang	80 Orang	5.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		80 Orang	12.500.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
		Tertibnya Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan SIPD						56.161.600,00					OPD		67.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.161.600,00						2 Dokumen	17.500.000,00	
	5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah						6.161.600,00							17.500.000,00	
		Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.161.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Dokumen	17.500.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan						3.200.937.000,00							4.264.000.000,00	
			1.Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	95.50 Persentase		95.10 Persentase	95.20 Persentase	3.199.937.000,00						95.30 Persentase	4.263.000.000,00	
			2.Persentase Penurunan SILPA	-10.20 Persentase		-10 Persentase	-10.05 Persentase	3.199.937.000,00						-10.10 Persentase	4.263.000.000,00	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						199.937.000,00					OPD		263.000.000,00	
		Tertibnya pengelolaan						199.937.000,00					OPD		263.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	71.742.600,00						12 Dokumen	85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.078.800,00						12 Dokumen	10.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas	116 Dokumen		116 Dokumen	116 Dokumen	5.315.200,00						116 Dokumen	12.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	344 Dokumen		344 Dokumen	344 Dokumen	58.330.400,00						344 Dokumen	67.500.000,00	
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.467.200,00						12 Laporan	22.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	150 Orang		150 Orang	150 Orang	26.469.800,00						150 Orang	40.000.000,00	
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	16.533.000,00						2 Dokumen	25.000.000,00	
	5.02.02.2.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas						71.742.600,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	71.742.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Dokumen	85.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2. 02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan						5.315.200,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	116 Dokumen		116 Dokumen	116 Dokumen	5.315.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		116 Dokumen	12.500.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2. 02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer						10.078.800,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.078.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Dokumen	10.500.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2. 02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran						11.467.200,00							22.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.467.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Laporan	22.500.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						58.330.400,00							67.500.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	344 Dokumen		344 Dokumen	344 Dokumen	58.330.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		344 Dokumen	67.500.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan						16.533.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	16.533.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Dokumen	25.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						26.469.800,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang		150 Orang	150 Orang	26.469.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		150 Orang	40.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
		Tertibnya penyusunan laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						3.001.000.000,00					BUMD dan Masyarakat penerima santunan (PTT)		4.001.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000.000,00						12 Laporan	4.000.000.000,00	
	5.02.02.2.	Pengelolaan Dana Darurat dan						3.000.000.000,00							4.000.000.000,00	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Laporan	4.000.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
170,	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						3.402.565.558,00							4.175.000.000,00	
		Meningkatnya tata kelola aset						3.402.565.558,00							4.150.000.000,00	
			999.Persentase Penambahan Nilai Aset	1.20 Persentase		1.00 Persentase	1.05 Persentase	3.402.565.558,00						1.10 Persentase	4.150.000.000,00	
	5.02.03.2.	Pengelolaan Barang Milik Daerah						3.402.565.558,00					OPD		4.175.000.000,00	
		Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah						3.402.565.558,00					OPD		4.175.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.436.571.242,00						1 Dokumen	2.600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.331.516,00						1 Laporan	135.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	392.400.000,00						1 Laporan	615.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	60.000.000,00						4 Laporan	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	160.262.800,00						2 Laporan	275.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	118 Orang		118 Orang	118 Orang	15.000.000,00						118 Orang	30.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000,00						5 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.000.000,00						1 Dokumen	80.000.000,00	
	5.02.03.2.	Penyusunan Standar Harga						78.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Dokumen	80.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2. 01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		5 Dokumen	25.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2. 01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						1.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Dokumen	150.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah						160.262.800,00							275.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	160.262.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Laporan	275.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.	Inventarisasi Barang Milik Daerah						10.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Laporan	50.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.	Pengamanan Barang Milik Daerah						392.400.000,00							615.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	392.400.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Laporan	615.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.	Penilaian Barang Milik Daerah						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Laporan	100.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2. 01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						24.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Laporan	25.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2. 01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan						2.436.571.242,00							2.600.000.000,00	
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.436.571.242,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Dokumen	2.600.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2. 01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik						60.000.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	60.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Laporan	90.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2. 01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						100.331.516,00							135.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.331.516,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Laporan	135.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2. 01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						15.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	118 Orang		118 Orang	118 Orang	15.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		118 Orang	30.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
171,	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						2.340.254.444,00							3.033.500.000,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Pendapatan Daerah						2.340.254.444,00							3.013.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Target Pajak Daerah terhadap PAD	46 %		42 %	43 %	2.340.254.444,00						44 %	3.013.500.000,00	
			2.Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap PAD	46 %		42 %	43 %	2.340.254.444,00						44 %	3.013.500.000,00	
			3.Persentase Realisasi Retribusi Daerah terhadap Target Retribusi Daerah	97.50 %		95.50 %	96 %	2.340.254.444,00						96.50 %	3.013.500.000,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						2.340.254.444,00					Wajib Pajak dan OPD Penghasil Retribusi		3.033.500.000,00	
		Tertibnya Pengelolaan Pendapatan Daerah						2.340.254.444,00					Wajib Pajak dan OPD Penghasil Retribusi		3.033.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	25.153.700,00						4 Dokumen	51.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4000 Dokumen		4000 Dokumen	4000 Dokumen	1.009.955.936,00						4000 Dokumen	1.220.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	16.871.900,00						4 Dokumen	17.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	500 Dokumen		500 Dokumen	500 Dokumen	10.549.088,00						500 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	10.000.000,00						7 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	34.000.000,00						2 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	384.027.000,00						4 Laporan	440.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	292.495.813,00						10 Laporan	335.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	214.998.200,00						10 Laporan	275.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	19.176.000,00						12 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	51.445.200,00						12 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3500 Layanan		3500 Layanan	3500 Layanan	105.581.607,00						3500 Layanan	155.000.000,00	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	53000 Obyek Pajak		53000 Obyek Pajak	53000 Obyek Pajak	166.000.000,00						53000 Obyek Pajak	280.000.000,00	
	5.02.04.2.	Perencanaan Pengelolaan Pajak						34.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	34.000.000,00	Kota Blitar	Pajak Daerah	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Dokumen	50.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						25.153.700,00							51.000.000,00	
		Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	25.153.700,00	Kota Blitar	Pajak Daerah	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Dokumen	51.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						19.176.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	19.176.000,00	Kota Blitar	Pajak Daerah	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Laporan	20.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						292.495.813,00							335.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	292.495.813,00	Kota Blitar	Pajak Daerah	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		10 Laporan	335.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						214.998.200,00							275.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	214.998.200,00	Kota Blitar	Pajak Daerah	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		10 Laporan	275.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						166.000.000,00							280.000.000,00	
		Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	53000 Obyek Pajak		53000 Obyek Pajak	53000 Obyek Pajak	166.000.000,00	Kota Blitar	Pajak Daerah	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		53000 Obyek Pajak	280.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.	Penetapan Wajib Pajak Daerah						10.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	10.000.000,00	Kota Blitar	Pajak Daerah	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		7 Dokumen	70.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak						105.581.607,00							155.000.000,00	
		Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3500 Layanan		3500 Layanan	3500 Layanan	105.581.607,00	Kota Blitar	Pajak Daerah	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		3500 Layanan	155.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.	Penagihan Pajak Daerah						1.009.955.936,00							1.220.000.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4000 Dokumen		4000 Dokumen	4000 Dokumen	1.009.955.936,00	Kota Blitar	Pajak Daerah	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4000 Dokumen	1.220.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						10.549.088,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	500 Dokumen		500 Dokumen	500 Dokumen	10.549.088,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		500 Dokumen	20.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						16.871.900,00							17.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	16.871.900,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Dokumen	17.500.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						384.027.000,00							440.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	384.027.000,00	Kota Blitar	Pajak Daerah	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Laporan	440.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						51.445.200,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	51.445.200,00	Kota Blitar	Pajak Daerah	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Laporan	100.000.000,00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya						6.954.562.100,00							12.754.460.463,00	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						6.954.562.100,00							12.754.460.463,00	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						6.573.919.900,00							10.177.460.463,00	
172,	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						5.278.320.137,00							8.904.460.463,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						5.278.320.137,00							8.821.460.463,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	5.278.320.137,00						100 %	8.821.460.463,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.103.500,00					ASN BKPSDM		15.550.000,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						7.103.500,00					ASN BKPSDM		15.550.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.067.000,00						2 Berita Acara	3.700.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	650.000,00						1 Berita Acara	2.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.387.100,00						4 Dokumen	1.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	1.600.000,00						10 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	2.399.400,00						17 Laporan	3.050.000,00	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.387.100,00							1.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.387.100,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Dokumen	1.700.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.399.400,00							3.050.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	2.399.400,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		17 Laporan	3.050.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat						1.067.000,00							3.700.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.067.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Berita Acara	3.700.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						1.600.000,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	1.600.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		10 Dokumen	5.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis						650.000,00							2.100.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	650.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Berita Acara	2.100.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat						4.781.138.303,00					ASN BKPSDM		7.921.296.295,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						4.781.138.303,00					ASN BKPSDM		7.921.296.295,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	900.000,00						12 Laporan	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490 Orang/bulan		490 Orang/bulan	490 Orang/bulan	4.780.238.303,00						490 Orang/bulan	7.919.296.295,00	
	5.03.01.2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.780.238.303,00							7.919.296.295,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490 Orang/bulan		490 Orang/bulan	44 Orang/bulan	4.780.238.303,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		490 Orang/bulan	7.919.296.295,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						900.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	900.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Laporan	2.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						500.000,00					ASN BKPSDM		750.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat						500.000,00					ASN BKPSDM		750.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	500.000,00						4 Laporan	750.000,00	
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						500.000,00							750.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	500.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Laporan	750.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						69.694.500,00					ASN BKPSDM		146.000.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						69.694.500,00					ASN BKPSDM		146.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang		40 Orang	40 Orang	1.300.000,00						40 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	160 Orang		160 Orang	160 Orang	52.540.500,00						160 Orang	78.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	2 Paket		2 Paket	2 Paket	15.854.000,00						2 Paket	48.000.000,00	
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						15.854.000,00							48.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	15.854.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Paket	48.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						52.540.500,00							78.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160 Orang		160 Orang	40 Orang	52.540.500,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		160 Orang	78.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						1.300.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang		40 Orang	40 Orang	1.300.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		40 Orang	20.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						252.034.200,00					ASN BKPSDM		430.000.000,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						252.034.200,00					ASN BKPSDM		430.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.754.000,00						12 Dokumen	3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	439.000,00						1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	190.128.000,00						36 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	30 Paket		30 Paket	30 Paket	21.360.000,00						30 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	12.974.400,00						2 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	21.017.200,00						1 Paket	48.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.361.600,00						1 Paket	7.500.000,00	
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						21.017.200,00							48.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	21.017.200,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Paket	48.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.361.600,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.361.600,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Paket	7.500.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						21.360.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	21.360.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		30 Paket	35.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.974.400,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	12.974.400,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Paket	35.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.754.000,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.754.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Dokumen	3.500.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						190.128.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan		36 Laporan	48 Laporan	190.128.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		36 Laporan	300.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						439.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	439.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Dokumen	1.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						41.907.100,00					ASN BKPSDM		114.998.568,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						41.907.100,00					ASN BKPSDM		114.998.568,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	2 Unit	1.817.600,00						1 Unit	4.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		5 Unit	4 Unit	40.089.500,00						4 Unit	110.998.568,00	
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						1.817.600,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	2 Unit	1.817.600,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Unit	4.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40.089.500,00							110.998.568,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		5 Unit	4 Unit	40.089.500,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Unit	110.998.568,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						35.843.734,00					ASN BKPSDM		116.914.400,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						35.843.734,00					ASN BKPSDM		116.914.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	35.843.734,00						12 Laporan	116.914.400,00	
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						35.843.734,00							116.914.400,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	35.843.734,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Laporan	116.914.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						90.098.800,00					ASN BKPSDM		158.951.200,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						90.098.800,00					ASN BKPSDM		158.951.200,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	43.103.600,00						2 Unit	70.028.800,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit		1 Unit	5 Unit	24.709.400,00						2 Unit	56.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	80 Unit		79 Unit	80 Unit	22.285.800,00						80 Unit	32.922.400,00	
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						24.709.400,00							56.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	24.709.400,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Unit	56.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						43.103.600,00							70.028.800,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	43.103.600,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Unit	70.028.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						22.285.800,00							32.922.400,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit		79 Unit	56 Unit	22.285.800,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		80 Unit	32.922.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
173,	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						1.295.599.763,00							1.273.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian						1.295.599.763,00							1.253.000.000,00	
			2.Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	95 Persentase		90 Persentase	91 Persentase	1.295.599.763,00						92 Persentase	1.253.000.000,00	
			999.Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	20 Persentase		4.16 Persentase	8.32 Persentase	1.295.599.763,00						12.48 Persentase	1.253.000.000,00	
			999.Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	72 %		68 %	69 %	1.295.599.763,00						70 %	1.253.000.000,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						548.714.963,00					Seluruh ASN		670.000.000,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Sistem Informasi Kepegawaian melalui fasilitasi pensiun						548.714.963,00					Seluruh ASN		670.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	81 Dokumen		128 Dokumen	124 Dokumen	7.284.000,00						86 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	226.111.963,00						2 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	65.319.000,00						2 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	250.000.000,00						1 Lembaga	0,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Sistem Informasi Kepegawaian melalui pengukuran kualitas data						548.714.963,00					Seluruh ASN		670.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	81 Dokumen		128 Dokumen	124 Dokumen	7.284.000,00						86 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	226.111.963,00						2 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	65.319.000,00						2 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	250.000.000,00						1 Lembaga	0,00	
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						65.319.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	65.319.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Dokumen	350.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian						7.284.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	81 Dokumen		128 Dokumen	128 Dokumen	7.284.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		86 Dokumen	20.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						250.000.000,00							0,00	
		Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	250.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Lembaga	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						226.111.963,00							300.000.000,00	
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	226.111.963,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Dokumen	300.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.	Mutasi dan Promosi ASN						467.231.700,00					Seluruh ASN		380.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Penataan ASN sesuai kompetensi						467.231.700,00					Seluruh ASN		380.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	467.231.700,00						4 Dokumen	380.000.000,00	
	5.03.02.2.	Pengelolaan Mutasi ASN						467.231.700,00							380.000.000,00	
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	467.231.700,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Dokumen	380.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.	Pengembangan Kompetensi ASN						245.354.200,00					Seluruh ASN		75.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Penataan ASN sesuai kompetensi						245.354.200,00					Seluruh ASN		75.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	45 Orang		45 Orang	45 Orang	2.255.700,00						45 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	243.098.500,00						2 Dokumen	55.000.000,00	
	5.03.02.2.	Pengelolaan Assessment Center						243.098.500,00							55.000.000,00	
		Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	243.098.500,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Dokumen	55.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						2.255.700,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	45 Orang		45 Orang	45 Orang	2.255.700,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		45 Orang	20.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja						34.298.900,00					Seluruh ASN		148.000.000,00	
		Meningkatnya Pengembangan Kinerja melalui umpan balik berkelanjutan						34.298.900,00					Seluruh ASN		148.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	1.036.600,00						100 Orang	12.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	12.004.500,00						100 Orang	48.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3100 Dokumen		3100 Dokumen	3100 Dokumen	19.862.900,00						3100 Dokumen	58.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.394.900,00						4 Laporan	30.000.000,00	
	5.03.02.2. 04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						19.862.900,00							58.000.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3100 Dokumen		3100 Dokumen	3100 Dokumen	19.862.900,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		3100 Dokumen	58.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2. 04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						1.036.600,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	1.036.600,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		100 Orang	12.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.	Pembinaan Disiplin ASN						12.004.500,00							48.000.000,00	
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	12.004.500,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		100 Orang	48.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2. 04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						1.394.900,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.394.900,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Laporan	30.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						380.642.200,00							2.577.000.000,00	
174,	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						380.642.200,00							2.577.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, pengembangan dan evaluasi serta layanan pengembangan kompetensi						380.642.200,00							2.577.000.000,00	
			999.Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	38 Persentase		38 Persentase	36 Persentase	380.642.200,00						38 Persentase	2.577.000.000,00	
			999.Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan	20 %		18 %	18.5 %	380.642.200,00						19 %	2.577.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis	88 Persentase		80 Persentase	82 Persentase	380.642.200,00						84 Persentase	2.577.000.000,00	
			999.Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	70 Persentase		52 Persentase	55 Persentase	380.642.200,00						60 Persentase	2.577.000.000,00	
	5.04.02.2.	Pengembangan Kompetensi Teknis						248.785.800,00					Seluruh ASN		1.077.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN						248.785.800,00					Seluruh ASN		1.077.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1200 Orang		1200 Orang	1200 Orang	215.813.300,00						1200 Orang	950.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.875.000,00						1 Dokumen	90.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.097.500,00						1 Dokumen	37.000.000,00	
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan						19.097.500,00							37.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.097.500,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Dokumen	37.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah						215.813.300,00							950.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1200 Orang		1200 Orang	1200 Orang	215.813.300,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1200 Orang	950.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan						13.875.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.875.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Dokumen	90.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial						131.856.400,00					Seluruh ASN		1.500.000.000,00	
		Meningkatnya Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN						131.856.400,00					Seluruh ASN		1.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	131.856.400,00						5 Laporan	1.500.000.000,00	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan						131.856.400,00							1.500.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	131.856.400,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		5 Laporan	1.500.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Inspektorat						9.170.978.050,00							9.739.608.754,00	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						9.170.978.050,00							9.739.608.754,00	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						9.170.978.050,00							9.739.608.754,00	
175,	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						7.141.645.740,00							7.700.653.491,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						7.139.097.140,00							7.697.356.291,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	7.139.097.140,00						100 %	7.697.356.291,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						34.443.200,00					-		38.862.000,00	
		Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar						34.443.200,00					-		38.862.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.650.000,00						1 Berita Acara	898.600,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	898.600,00						1 Berita Acara	898.600,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	898.600,00						1 Data	898.600,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.769.500,00						4 Dokumen	4.833.700,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	1.404.000,00						13 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	27.822.500,00						17 Laporan	28.332.500,00	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.769.500,00							4.833.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.769.500,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Dokumen	4.833.700,00	Inspektorat
	6.01.01.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						27.822.500,00							28.332.500,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	27.822.500,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		17 Laporan	28.332.500,00	Inspektorat
	6.01.01.2. 01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						898.600,00							898.600,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	898.600,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Data	898.600,00	Inspektorat
	6.01.01.2. 01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat						1.650.000,00							898.600,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.650.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Berita Acara	898.600,00	Inspektorat
	6.01.01.2. 01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						1.404.000,00							3.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	1.404.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		13 Dokumen	3.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2. 01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis						898.600,00							898.600,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	898.600,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Berita Acara	898.600,00	Inspektorat
	6.01.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat						5.894.761.000,00					-		6.259.046.391,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						5.894.761.000,00					-		6.259.046.391,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	250 Dokumen		250 Dokumen	250 Dokumen	1.650.000,00						250 Dokumen	1.650.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	2.511.000,00						18 Laporan	2.553.800,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	492 Orang/bulan		492 Orang/bulan	492 Orang/bulan	5.890.600.000,00						492 Orang/bulan	6.254.842.591,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.890.600.000,00							6.254.842.591,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	492 Orang/bulan		492 Orang/bulan	492 Orang/bulan	5.890.600.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		492 Orang/bulan	6.254.842.591,00	Inspektorat
	6.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1.650.000,00							1.650.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	250 Dokumen		250 Dokumen	250 Dokumen	1.650.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		250 Dokumen	1.650.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.511.000,00							2.553.800,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	2.511.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		18 Laporan	2.553.800,00	Inspektorat
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						897.600,00					-		1.500.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat						897.600,00					-		1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	897.600,00						4 Laporan	1.500.000,00	
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						897.600,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	897.600,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Laporan	1.500.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						219.245.700,00					-		466.876.900,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						219.245.700,00					-		466.876.900,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	41 Orang		42 Orang	41 Orang	128.672.000,00						41 Orang	290.834.400,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	41 Orang		42 Orang	41 Orang	78.148.700,00						41 Orang	160.997.500,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	2 Paket		2 Paket	2 Paket	12.425.000,00						2 Paket	15.045.000,00	
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						12.425.000,00							15.045.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	12.425.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Paket	15.045.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						78.148.700,00							160.997.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41 Orang		42 Orang	41 Orang	78.148.700,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		41 Orang	160.997.500,00	Inspektorat
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						128.672.000,00							290.834.400,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	41 Orang		42 Orang	41 Orang	128.672.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		41 Orang	290.834.400,00	Inspektorat
	6.01.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						300.296.000,00					-		257.037.000,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						300.296.000,00					-		257.037.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.754.000,00						12 Dokumen	2.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.490.600,00						4 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	206.022.800,00						25 Laporan	162.754.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	12 Paket		12 Paket	12 Paket	20.398.000,00						12 Paket	20.440.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	14.878.400,00						3 Paket	14.874.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.754.000,00						1 Paket	4.763.200,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	26.590.800,00						4 Paket	26.591.400,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	23.407.400,00						4 Paket	23.413.900,00	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.754.000,00							4.763.200,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.754.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Paket	4.763.200,00	Inspektorat
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						26.590.800,00							26.591.400,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	26.590.800,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Paket	26.591.400,00	Inspektorat
	6.01.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						23.407.400,00							23.413.900,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	23.407.400,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Paket	23.413.900,00	Inspektorat
	6.01.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.398.000,00							20.440.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	20.398.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Paket	20.440.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14.878.400,00							14.874.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	14.878.400,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		3 Paket	14.874.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.754.000,00							2.700.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.754.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Dokumen	2.700.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						206.022.800,00							162.754.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	206.022.800,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		25 Laporan	162.754.500,00	Inspektorat
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.490.600,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.490.600,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Dokumen	1.500.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						99.528.800,00					-		18.409.300,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						99.528.800,00					-		18.409.300,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	5.304.000,00						2 Unit	11.409.300,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	52.538.000,00						5 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 Unit		0 Unit	2 Unit	41.686.800,00						2 Unit	2.000.000,00	
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						5.304.000,00							11.409.300,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	5.304.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Unit	11.409.300,00	Inspektorat
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin						52.538.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	52.538.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		5 Unit	5.000.000,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						41.686.800,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	1 Unit	41.686.800,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Unit	2.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						359.294.838,00					-		425.391.600,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						359.294.838,00					-		425.391.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	103.688.700,00						24 Laporan	103.689.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	255.606.138,00						13 Laporan	321.702.000,00	
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						103.688.700,00							103.689.600,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	103.688.700,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		24 Laporan	103.689.600,00	Inspektorat
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						255.606.138,00							321.702.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	255.606.138,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		13 Laporan	321.702.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						233.178.602,00					-		233.530.300,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						233.178.602,00					-		233.530.300,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	76.500.000,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	19 Unit		18 Unit	18 Unit	68.382.702,00						19 Unit	60.515.900,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	34.246.200,00						7 Unit	24.233.400,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	3.480.400,00						5 Unit	3.681.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	58 Unit		58 Unit	58 Unit	35.089.300,00						58 Unit	35.100.000,00	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						34.246.200,00							24.233.400,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	34.246.200,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		7 Unit	24.233.400,00	Inspektorat
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						68.382.702,00							60.515.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit		18 Unit	9 Unit	68.382.702,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		19 Unit	60.515.900,00	Inspektorat
	6.01.01.2.	Pemeliharaan Mebel						3.480.400,00							3.681.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	3.480.400,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		5 Unit	3.681.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2. 09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						35.089.300,00							35.100.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit		58 Unit	58 Unit	35.089.300,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		58 Unit	35.100.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						76.500.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	76.500.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		1 Unit	100.000.000,00	Inspektorat
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						233.178.602,00					-		233.530.300,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	-		-	-	15.480.000,00						-	10.000.000,00	
	6.01.01.2. 09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						15.480.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	15.480.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		-	10.000.000,00	Inspektorat
176,	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						1.725.511.310,00							1.620.574.263,00	
		Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan						1.725.511.310,00							1.620.574.263,00	
			999.Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	94 Persentase		93.8 Persentase	93.85 Persentase	1.725.511.310,00						93.9 Persentase	1.620.574.263,00	
	6.01.02.2.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						1.678.634.910,00					-		1.566.381.263,00	
		Meningkatnya penjaminan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						1.678.634.910,00					-		1.566.381.263,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	49.049.500,00						4 Dokumen	6.971.000,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan		3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	1.407.843.460,00						3 Kesepakatan	925.750.263,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	38.563.000,00						40 Laporan	38.165.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	92.433.550,00						30 Laporan	403.900.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	37.657.900,00						50 Laporan	60.928.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	53.087.500,00						30 Laporan	130.667.000,00	
	6.01.02.2.	Pengawasan Kinerja Pemerintah						92.433.550,00							403.900.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	92.433.550,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		30 Laporan	403.900.000,00	Inspektorat
	6.01.02.2. 01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						38.563.000,00							38.165.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	38.563.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		40 Laporan	38.165.000,00	Inspektorat
	6.01.02.2.	Reviu Laporan Kinerja						53.087.500,00							130.667.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	53.087.500,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		30 Laporan	130.667.000,00	Inspektorat
	6.01.02.2.	Reviu Laporan Keuangan						37.657.900,00							60.928.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	37.657.900,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		50 Laporan	60.928.000,00	Inspektorat
	6.01.02.2.	Kerja Sama Pengawasan Internal						1.407.843.460,00							925.750.263,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan		3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	1.407.843.460,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		3 Kesepakatan	925.750.263,00	Inspektorat
	6.01.02.2. 01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						49.049.500,00							6.971.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	49.049.500,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Dokumen	6.971.000,00	Inspektorat
	6.01.02.2. 02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						46.876.400,00					-		54.193.000,00	
		Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat						46.876.400,00					-		54.193.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	42.450.400,00						5 Laporan	49.084.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	4.426.000,00						2 Laporan	5.109.000,00	
	6.01.02.2. 02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah						4.426.000,00							5.109.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	4.426.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		2 Laporan	5.109.000,00	Inspektorat
	6.01.02.2.	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						42.450.400,00							49.084.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	42.450.400,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		5 Laporan	49.084.000,00	Inspektorat
177,	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						303.821.000,00							418.381.000,00	
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi						303.821.000,00							418.381.000,00	
			2.Indeks Manajemen Risiko (IMR)	2.97 Indeks		2.966 Indeks	2.967 Indeks	303.821.000,00						2.968 Indeks	418.381.000,00	
			999.Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Terintegrasi (Integrated) Level		Terintegrasi (Integrated) Level	Terintegrasi (Integrated) Level	303.821.000,00						Terintegrasi (Integrated) Level	418.381.000,00	
	6.01.03.2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi						5.596.800,00					-		23.634.000,00	
		Tersusunnya kebijakan teknis terkait pengawasan sesuai peraturan berlaku						5.596.800,00					-		23.634.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi		4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	5.596.800,00						4 Rekomendasi	23.634.000,00	
	6.01.03.2. 01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						5.596.800,00							23.634.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi		4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	5.596.800,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Rekomendasi	23.634.000,00	Inspektorat
	6.01.03.2.	Pendampingan dan Asistensi						298.224.200,00					-		394.747.000,00	
		Meningkatnya peran APIP sebagai consulting partner						298.224.200,00					-		394.747.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	16 Kegiatan		16 Kegiatan	16 Kegiatan	179.388.200,00						16 Kegiatan	59.848.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan	6 perangkat daerah		6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	70.194.600,00						6 perangkat daerah	152.569.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	10 perangkat daerah		10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	43.811.000,00						10 perangkat daerah	176.754.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan	30 perangkat daerah		30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	4.830.400,00						30 perangkat daerah	5.576.000,00	
	6.01.03.2. 02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						4.830.400,00							5.576.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 perangkat daerah		30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	4.830.400,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		30 perangkat daerah	5.576.000,00	Inspektorat
	6.01.03.2. 02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						43.811.000,00							176.754.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah		10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	43.811.000,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		10 perangkat daerah	176.754.000,00	Inspektorat
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						179.388.200,00							59.848.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	16 Kegiatan		16 Kegiatan	16 Kegiatan	179.388.200,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		16 Kegiatan	59.848.000,00	Inspektorat
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						70.194.600,00							152.569.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 perangkat daerah		6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	70.194.600,00	Kota Blitar	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		6 perangkat daerah	152.569.000,00	Inspektorat
		Kecamatan Kepanjenkidul						12.689.858.076,00							13.973.421.251,00	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						12.689.858.076,00							13.973.421.251,00	
	7.01	**KECAMATAN**						12.689.858.076,00							13.973.421.251,00	
178,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						12.275.926.660,00							13.359.482.637,95	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						11.467.200.236,00							12.711.160.244,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	11.467.200.236,00						100 %	12.711.160.244,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.313.600,00					Aparat Kecamatan		13.974.870,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						13.313.600,00					Aparat Kecamatan		13.974.870,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	6.546.200,00						0 Dokumen	7.050.120,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	700.000,00						10 Dokumen	735.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.067.400,00						4 Laporan	6.189.750,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						700.000,00							735.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	700.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	735.000,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	2 Dokumen	700.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Dokumen	735.000,00	Kecamatan Kepanjenkidul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	700.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Dokumen	735.000,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	700.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	735.000,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	700.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	735.000,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	700.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	735.000,00	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						700.000,00							735.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	6 Laporan	700.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	735.000,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		0 Laporan	6 Laporan	700.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Laporan	735.000,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	6 Laporan	700.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	735.000,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	6 Laporan	700.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	735.000,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	700.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Laporan	735.000,00	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.01.2. 01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						700.000,00							735.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	700.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Dokumen	735.000,00	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.156.222.600,00					Aparat Kecamatan		10.811.728.007,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						10.156.222.600,00					Aparat Kecamatan		10.811.728.007,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.222.600,00						1 Laporan	5.549.817,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/bulan		95 Orang/bulan	96 Orang/bulan	10.150.000.000,00						96 Orang/bulan	10.806.178.190,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.150.000.000,00							10.806.178.190,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/bulan		95 Orang/bulan	95 Orang/bulan	10.150.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		96 Orang/bulan	10.806.178.190,00	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						700.000,00							735.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	0 Laporan		0 Laporan	6 Laporan	700.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Laporan	735.000,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	6 Laporan	700.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	735.000,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	6 Laporan	700.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	735.000,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	700.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Laporan	735.000,00	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0,00					Aparat Kecamatan		257.250,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat						0,00					Aparat Kecamatan		257.250,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	257.250,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							257.250,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	257.250,00	Kecamatan Kepanjenkidul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						700.000,00					Aparat Kecamatan		735.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah						700.000,00					Aparat Kecamatan		735.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	700.000,00						12 Dokumen	735.000,00	
	7.01.01.2.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi						700.000,00							735.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	700.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	735.000,00	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						104.911.800,00					Aparat Kecamatan		117.380.112,50	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						104.911.800,00					Aparat Kecamatan		117.380.112,50	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	100 Orang		100 Orang	100 Orang	104.911.800,00						100 Orang	117.380.112,50	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						24.724.900,00							24.911.145,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang		65 Orang	50 Orang	24.724.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		65 Orang	24.911.145,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang		80 Orang	50 Orang	24.724.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		80 Orang	24.911.145,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		30 Orang	50 Orang	24.724.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		30 Orang	24.911.145,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang		18 Orang	50 Orang	24.724.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Orang	24.911.145,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang		14 Orang	50 Orang	24.724.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Orang	24.911.145,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang		12 Orang	50 Orang	24.724.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Orang	24.911.145,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	50 Orang	24.724.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		100 Orang	24.911.145,00	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						386.588.974,00					Aparat Kecamatan		335.728.109,05	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						386.588.974,00					Aparat Kecamatan		335.728.109,05	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	17.520.000,00						36 Dokumen	19.530.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan		12 Laporan	9 Laporan	78.249.000,00						9 Laporan	50.518.650,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	98.394.400,00						1 Paket	103.646.025,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	52.069.733,00						1 Paket	36.992.970,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.153.541,00						1 Paket	20.500.305,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	62.445.500,00						1 Paket	64.575.121,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	54.756.800,00						1 Paket	39.965.038,05	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.906.400,00							5.151.720,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.906.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	5.151.720,00	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12.973.900,00							13.620.705,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	3 Paket	12.973.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	13.620.705,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	12.973.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	13.620.705,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	12.973.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	13.620.705,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	3 Paket	12.973.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	13.620.705,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	12.973.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	13.620.705,00	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						27.873.700,00							17.899.665,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	4 Paket	27.873.700,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	17.899.665,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	27.873.700,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	17.899.665,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	4 Paket	27.873.700,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	17.899.665,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	27.873.700,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	17.899.665,00	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						51.176.600,00							53.683.980,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	12 Paket	51.176.600,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	53.683.980,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	51.176.600,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Paket	53.683.980,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	12 Paket	51.176.600,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	53.683.980,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	51.176.600,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	53.683.980,00	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						26.531.600,00							18.490.080,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	26.531.600,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	18.490.080,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	26.531.600,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	18.490.080,00	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.01.2. 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						17.520.000,00							19.530.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	17.520.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Dokumen	19.530.000,00	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						78.249.000,00							50.518.650,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	78.249.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Laporan	50.518.650,00	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						278.400.018,00					Aparat dan Masyarakat Kecamatan		98.520.455,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						278.400.018,00					Aparat dan Masyarakat Kecamatan		98.520.455,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	278.400.018,00						1 Unit	98.520.455,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						89.135.400,00							32.498.510,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	6 Unit	89.135.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	32.498.510,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	6 Unit	89.135.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	32.498.510,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		13 Unit	6 Unit	89.135.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	32.498.510,00	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						898.237.468,00					Aparat Kecamatan		1.387.688.199,40	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						898.237.468,00					Aparat Kecamatan		1.387.688.199,40	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	233.366.068,00						36 Laporan	242.767.925,40	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	664.871.400,00						13 Laporan	1.144.920.274,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						66.684.736,00							47.247.900,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	66.684.736,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	47.247.900,00	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						664.871.400,00							1.144.920.274,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	12 Laporan	664.871.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		13 Laporan	1.144.920.274,00	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						437.552.200,00					Aparat Kecamatan		593.470.635,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						437.552.200,00					Aparat Kecamatan		593.470.635,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	14 Unit		14 Unit	14 Unit	83.352.200,00						14 Unit	64.567.755,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit		4 Unit	1 Unit	23.414.100,00						1 Unit	22.896.930,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	11 Unit		11 Unit	11 Unit	73.615.900,00						11 Unit	45.327.450,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		Unit	1 Unit	257.000.000,00						1 Unit	460.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						23.414.100,00							22.896.930,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		4 Unit	2 Unit	23.414.100,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	22.896.930,00	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						67.582.500,00							53.315.430,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	9 Unit	67.582.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	53.315.430,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		14 Unit	9 Unit	67.582.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Unit	53.315.430,00	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.856.000,00							10.804.815,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	16 Unit	10.856.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	10.804.815,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		18 Unit	16 Unit	10.856.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	10.804.815,00	Kecamatan Kepanjenkidul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit		11 Unit	16 Unit	10.856.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Unit	10.804.815,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	16 Unit	10.856.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Unit	10.804.815,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	16 Unit	10.856.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Unit	10.804.815,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	16 Unit	10.856.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	10.804.815,00	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						150.000.000,00							388.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Unit	1 Unit	150.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	388.500.000,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	388.500.000,00	Kecamatan Kepanjenkidul
179,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						2.288.771.940,00							2.282.365.913,05	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan						203.495.600,00							213.350.445,00	
			999.Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	100 %		100 %	100 %	203.495.600,00						100 %	213.350.445,00	
			999.Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan	100 %		100 %	100 %	203.495.600,00						100 %	213.350.445,00	
			999.Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan	100 %		100 %	100 %	203.495.600,00						100 %	213.350.445,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.036.632.640,00					Aparat dan Masyarakat Kecamatan		2.052.223.195,05	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan trantibum yang sesuai dengan ketentuan						2.036.632.640,00					Aparat dan Masyarakat Kecamatan		2.052.223.195,05	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.791.040,00						1 Dokumen	1.905.153.390,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	135.841.600,00						1 Laporan	147.069.805,05	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan						2.036.632.640,00					Aparat dan Masyarakat Kecamatan		2.052.223.195,05	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.791.040,00						1 Dokumen	1.905.153.390,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	135.841.600,00						1 Laporan	147.069.805,05	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						64.999.000,00							68.248.950,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	64.999.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	68.248.950,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan		3 Laporan	12 Laporan	64.999.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	68.248.950,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan		7 Laporan	12 Laporan	64.999.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	68.248.950,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	12 Laporan	64.999.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	68.248.950,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	64.999.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	68.248.950,00	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						37.496.600,00							61.101.495,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	37.496.600,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	61.101.495,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	12 Dokumen	37.496.600,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	61.101.495,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	12 Dokumen	37.496.600,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	61.101.495,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	37.496.600,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	61.101.495,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di						252.139.300,00					Aparat dan Masyarakat Kecamatan		230.142.718,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan						252.139.300,00					Aparat dan Masyarakat Kecamatan		230.142.718,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.814.400,00						1 Dokumen	10.907.863,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	240.324.900,00						1 Laporan	219.234.855,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan						252.139.300,00					Aparat dan Masyarakat Kecamatan		230.142.718,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.814.400,00						1 Dokumen	10.907.863,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	240.324.900,00						1 Laporan	219.234.855,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						1.689.000,00							1.773.450,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.689.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	1.773.450,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	1.689.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	1.773.450,00	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						99.311.000,00							82.226.550,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	12 Laporan	99.311.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	82.226.550,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	99.311.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	82.226.550,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	99.311.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	82.226.550,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	12 Laporan	99.311.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	82.226.550,00	Kecamatan Kepanjenkidul
180,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						7.215.262.500,00							7.433.918.602,00	
		Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan						1.016.362.240,00							1.045.970.562,00	
			1.Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi	7 Kelompok		7 Kelompok	7 Kelompok	1.016.362.240,00						7 Kelompok	1.045.970.562,00	
			2.Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		100 %	100 %	1.016.362.240,00						100 %	1.045.970.562,00	
			3.Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang	75 %		70 %	70 %	1.016.362.240,00						70 %	1.045.970.562,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						6.521.075.700,00					Aparat dan Masyarakat Kecamatan		6.739.393.372,00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan						6.521.075.700,00					Aparat dan Masyarakat Kecamatan		6.739.393.372,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	2 Lembaga K emasyarakat an		2 Lembaga K emasyarakat an	2 Lembaga K emasyarakat an	195.630.262,00						2 Lembaga K emasyarakat an	161.932.890,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas		11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	2.132.664.338,00						11 Pokmas / Ormas	2.356.733.022,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di						29.102.300,00							30.557.415,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga K emasyarakat an		2 Lembaga K emasyarakat an	9 Lembaga K emasyarakat an	29.102.300,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Lembaga K emasyarakat an	30.557.415,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga K emasyarakat an		9 Lembaga K emasyarakat an	9 Lembaga K emasyarakat an	29.102.300,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Lembaga K emasyarakat an	30.557.415,00	Kecamatan Kepanjenkidul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	29.102.300,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Lembaga Kemasyarakatan	30.557.415,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	29.102.300,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Lembaga Kemasyarakatan	30.557.415,00	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.03.2.[illegible]	Pemberdayaan Masyarakat di [illegible]						702.317.840,00							724.833.732,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	702.317.840,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Pokmas / Ormas	724.833.732,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	702.317.840,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Pokmas / Ormas	724.833.732,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas		9 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	702.317.840,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Pokmas / Ormas	724.833.732,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	702.317.840,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	724.833.732,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31 Pokmas / Ormas		31 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	702.317.840,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		31 Pokmas / Ormas	724.833.732,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas		11 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	702.317.840,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Pokmas / Ormas	724.833.732,00	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						694.186.800,00					Aparat dan Masyarakat Kecamatan		694.525.230,00	
		Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat						694.186.800,00					Aparat dan Masyarakat Kecamatan		694.525.230,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	38.602.900,00						1 Laporan	27.023.640,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Lembaga Kemasyarakatan		11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	655.583.900,00						11 Lembaga Kemasyarakatan	667.501.590,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						273.029.200,00							278.070.870,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	273.029.200,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Lembaga Kemasyarakatan	278.070.870,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Lembaga Kemasyarakatan		11 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	273.029.200,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Lembaga Kemasyarakatan	278.070.870,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	273.029.200,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Lembaga Kemasyarakatan	278.070.870,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	273.029.200,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Lembaga Kemasyarakatan	278.070.870,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	273.029.200,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Lembaga Kemasyarakatan	278.070.870,00	Kecamatan Kepanjenkidul
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						11.912.900,00							12.508.545,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	11.912.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	12.508.545,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	11.912.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	12.508.545,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	11.912.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	12.508.545,00	Kecamatan Kepanjenkidul
		Kelurahan Kepanjenkidul						1.831.448.882,00							1.851.847.512,90	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						1.831.448.882,00							1.851.847.512,90	
	7.01	**KECAMATAN**						1.831.448.882,00							1.851.847.512,90	
181,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						12.275.926.660,00							13.359.482.637,95	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						95.204.882,00							70.123.827,90	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	95.204.882,00						100 %	70.123.827,90	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.313.600,00					Aparat Kelurahan		13.974.870,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						13.313.600,00					Aparat Kelurahan		13.974.870,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	6.546.200,00						0 Dokumen	7.050.120,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	6.067.400,00						0 Laporan	6.189.750,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						75.000,00							78.750,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	75.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	78.750,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	75.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Dokumen	78.750,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	2 Dokumen	75.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Dokumen	78.750,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	75.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	78.750,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	75.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	78.750,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	75.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	78.750,00	Kelurahan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						75.000,00							78.750,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	75.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	78.750,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	75.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	78.750,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	75.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Laporan	78.750,00	Kelurahan Kepanjenkidul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	2 Laporan	75.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Laporan	78.750,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	75.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	78.750,00	Kelurahan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat						10.156.222.600,00					Aparat		10.811.728.007,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						10.156.222.600,00					Aparat Kelurahan		10.811.728.007,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	6.222.600,00						0 Laporan	5.549.817,00	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						75.000,00							78.750,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	75.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	78.750,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	6 Laporan		6 Laporan	2 Laporan	75.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Laporan	78.750,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	0 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	75.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Laporan	78.750,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	75.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	78.750,00	Kelurahan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						104.911.800,00					Aparat Kelurahan		117.380.112,50	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						104.911.800,00					Aparat Kelurahan		117.380.112,50	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	100 Orang		100 Orang	100 Orang	104.911.800,00						100 Orang	117.380.112,50	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						11.146.950,00							10.576.807,50	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang		18 Orang	18 Orang	11.146.950,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Orang	10.576.807,50	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	18 Orang	11.146.950,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		100 Orang	10.576.807,50	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang		12 Orang	18 Orang	11.146.950,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Orang	10.576.807,50	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang		80 Orang	18 Orang	11.146.950,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		80 Orang	10.576.807,50	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang		65 Orang	18 Orang	11.146.950,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		65 Orang	10.576.807,50	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		30 Orang	18 Orang	11.146.950,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		30 Orang	10.576.807,50	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang		14 Orang	18 Orang	11.146.950,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Orang	10.576.807,50	Kelurahan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						386.588.974,00					Aparat		335.728.109,05	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						386.588.974,00					Aparat Kelurahan		335.728.109,05	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	98.394.400,00						1 Paket	103.646.025,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	52.069.733,00						1 Paket	36.992.970,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.153.541,00						1 Paket	20.500.305,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	62.445.500,00						1 Paket	64.575.121,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	54.756.800,00						1 Paket	39.965.038,05	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.342.600,00							2.177.175,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.342.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	2.177.175,00	Kelurahan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.806.500,00							10.379.880,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	5 Paket	9.806.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	10.379.880,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	5 Paket	9.806.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	10.379.880,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	5 Paket	9.806.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	10.379.880,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	5 Paket	9.806.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	10.379.880,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	9.806.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	10.379.880,00	Kelurahan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.063.200,00							6.861.855,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	5.063.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	6.861.855,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	3 Paket	5.063.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	6.861.855,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	5.063.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	6.861.855,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	3 Paket	5.063.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	6.861.855,00	Kelurahan Kepanjenkidul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.650.000,00							267.750,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	4.650.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	267.750,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	4.650.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Paket	267.750,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.650.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	267.750,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	4.650.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	267.750,00	Kelurahan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.419.100,00							5.681.760,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	4.419.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	5.681.760,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	4.419.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	5.681.760,00	Kelurahan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						278.400.018,00					Aparat Kelurahan		98.520.455,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						278.400.018,00					Aparat Kelurahan		98.520.455,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	278.400.018,00						1 Unit	98.520.455,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						33.245.600,00							13.860.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	0 Unit	33.245.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	13.860.000,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		13 Unit	0 Unit	33.245.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	13.860.000,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	33.245.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	13.860.000,00	Kelurahan Kepanjenkidul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						898.237.468,00					Aparat Kelurahan		1.387.688.199,40	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						898.237.468,00					Aparat Kelurahan		1.387.688.199,40	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	233.366.068,00						36 Laporan	242.767.925,40	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.993.532,00							11.089.310,40	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	15.993.532,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	11.089.310,40	Kelurahan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						437.552.200,00					Aparat Kelurahan		593.470.635,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						437.552.200,00					Aparat Kelurahan		593.470.635,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	14 Unit		14 Unit	14 Unit	83.352.200,00						14 Unit	64.567.755,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	11 Unit		11 Unit	11 Unit	73.615.900,00						11 Unit	45.327.450,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.377.000,00							1.445.850,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		14 Unit	2 Unit	1.377.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Unit	1.445.850,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	2 Unit	1.377.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	1.445.850,00	Kelurahan Kepanjenkidul
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.085.400,00							7.704.690,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		18 Unit	17 Unit	7.085.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	7.704.690,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	17 Unit	7.085.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Unit	7.704.690,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit		11 Unit	17 Unit	7.085.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Unit	7.704.690,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	17 Unit	7.085.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Unit	7.704.690,00	Kelurahan Kepanjenkidul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	17 Unit	7.085.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	7.704.690,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	17 Unit	7.085.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	7.704.690,00	Kelurahan Kepanjenkidul
182,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						2.288.771.940,00							2.282.365.913,05	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan						449.864.000,00							449.755.740,00	
			999.Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	100 %		100 %	100 %	449.864.000,00						100 %	449.755.740,00	
			999.Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan	100 %		100 %	100 %	449.864.000,00						100 %	449.755.740,00	
			999.Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan	100 %		100 %	100 %	449.864.000,00						100 %	449.755.740,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.036.632.640,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		2.052.223.195,05	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan trantibum yang sesuai dengan ketentuan						2.036.632.640,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		2.052.223.195,05	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.791.040,00						1 Dokumen	1.905.153.390,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	135.841.600,00						1 Laporan	147.069.805,05	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan						2.036.632.640,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		2.052.223.195,05	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.791.040,00						1 Dokumen	1.905.153.390,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	135.841.600,00						1 Laporan	147.069.805,05	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						33.675.000,00							34.996.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	25 Laporan	33.675.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	34.996.500,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan		12 Laporan	25 Laporan	33.675.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	34.996.500,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	25 Laporan	33.675.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	34.996.500,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan		3 Laporan	25 Laporan	33.675.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	34.996.500,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan		7 Laporan	25 Laporan	33.675.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenkidul || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	34.996.500,00	Kelurahan Kepanjenkidul
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						399.964.000,00							397.722.990,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	3 Dokumen	399.964.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	397.722.990,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	399.964.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	397.722.990,00	Kelurahan Kepanjenkidul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	399.964.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	397.722.990,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	399.964.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	397.722.990,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di						252.139.300,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		230.142.718,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan						252.139.300,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		230.142.718,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.814.400,00						1 Dokumen	10.907.863,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	240.324.900,00						1 Laporan	219.234.855,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan						252.139.300,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		230.142.718,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.814.400,00						1 Dokumen	10.907.863,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	240.324.900,00						1 Laporan	219.234.855,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						150.000,00							157.500,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	157.500,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	150.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	157.500,00	Kelurahan Kepanjenkidul
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						16.075.000,00							16.878.750,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	16.075.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	16.878.750,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	2 Laporan	16.075.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	16.878.750,00	Kelurahan Kepanjenkidul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	16.075.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	16.878.750,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	16.075.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	16.878.750,00	Kelurahan Kepanjenkidul
183,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						7.215.262.500,00							7.433.918.602,00	
		Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan						1.286.230.000,00							1.331.810.445,00	
			1.Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi	7 Kelompok		7 Kelompok	7 Kelompok	1.286.230.000,00						7 Kelompok	1.331.810.445,00	
			2.Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		100 %	100 %	1.286.230.000,00						100 %	1.331.810.445,00	
			3.Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang	75 %		70 %	70 %	1.286.230.000,00						70 %	1.331.810.445,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						6.521.075.700,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		6.739.393.372,00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan						6.521.075.700,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		6.739.393.372,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	2 Lembaga K emasyarakat an		2 Lembaga K emasyarakat an	2 Lembaga K emasyarakat an	195.630.262,00						2 Lembaga K emasyarakat an	161.932.890,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas		11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	2.132.664.338,00						11 Pokmas / Ormas	2.356.733.022,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit		0 Unit	0 Unit	4.192.781.100,00						0 Unit	4.220.727.460,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di						34.909.800,00							22.130.010,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga K emasyarakat an		2 Lembaga K emasyarakat an	9 Lembaga K emasyarakat an	34.909.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Lembaga K emasyarakat an	22.130.010,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga K emasyarakat an		3 Lembaga K emasyarakat an	9 Lembaga K emasyarakat an	34.909.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Lembaga K emasyarakat an	22.130.010,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga K emasyarakat an		6 Lembaga K emasyarakat an	9 Lembaga K emasyarakat an	34.909.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Lembaga K emasyarakat an	22.130.010,00	Kelurahan Kepanjenkidul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	34.909.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Lembaga Kemasyarakatan	22.130.010,00	Kelurahan Kepanjenkidul
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						822.500.000,00							863.625.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	47 Unit		47 Unit	47 Unit	822.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		47 Unit	863.625.000,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit		29 Unit	47 Unit	822.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		29 Unit	863.625.000,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit		0 Unit	47 Unit	822.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Unit	863.625.000,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit		18 Unit	47 Unit	822.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	863.625.000,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit		28 Unit	47 Unit	822.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		28 Unit	863.625.000,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	31 Unit		31 Unit	47 Unit	822.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		31 Unit	863.625.000,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit		33 Unit	47 Unit	822.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		33 Unit	863.625.000,00	Kelurahan Kepanjenkidul
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						376.850.200,00							393.330.210,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas		11 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	376.850.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Pokmas / Ormas	393.330.210,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	376.850.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Pokmas / Ormas	393.330.210,00	Kelurahan Kepanjenkidul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31 Pokmas / Ormas		31 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	376.850.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		31 Pokmas / Ormas	393.330.210,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	376.850.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Pokmas / Ormas	393.330.210,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	376.850.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	393.330.210,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas		9 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	376.850.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Pokmas / Ormas	393.330.210,00	Kelurahan Kepanjenkidul
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						694.186.800,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		694.525.230,00	
		Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat						694.186.800,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		694.525.230,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	38.602.900,00						1 Laporan	27.023.640,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Lembaga Kemasyarakatan		11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	655.583.900,00						11 Lembaga Kemasyarakatan	667.501.590,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						51.770.000,00							52.252.725,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	51.770.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Lembaga Kemasyarakatan	52.252.725,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	51.770.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Lembaga Kemasyarakatan	52.252.725,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	51.770.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Lembaga Kemasyarakatan	52.252.725,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	51.770.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Lembaga Kemasyarakatan	52.252.725,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Lembaga Kemasyarakatan		11 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	51.770.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Lembaga Kemasyarakatan	52.252.725,00	Kelurahan Kepanjenkidul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						200.000,00							472.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	472.500,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	472.500,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	472.500,00	Kelurahan Kepanjenkidul
		Kelurahan Ngadirejo						852.089.263,00							853.066.260,00	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						852.089.263,00							853.066.260,00	
	7.01	**KECAMATAN**						852.089.263,00							853.066.260,00	
184,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						12.275.926.660,00							13.359.482.637,95	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						103.531.083,00							84.808.770,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	103.531.083,00						100 %	84.808.770,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.313.600,00					Aparat Kelurahan		13.974.870,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						13.313.600,00					Aparat Kelurahan		13.974.870,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	6.546.200,00						0 Dokumen	7.050.120,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	6.067.400,00						0 Laporan	6.189.750,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						525.000,00							551.250,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	525.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	551.250,00	Kelurahan Ngadirejo
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	1 Dokumen	525.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Dokumen	551.250,00	Kelurahan Ngadirejo
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	525.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Dokumen	551.250,00	Kelurahan Ngadirejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	525.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	551.250,00	Kelurahan Ngadirejo
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	525.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	551.250,00	Kelurahan Ngadirejo
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	525.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	551.250,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						525.000,00							551.250,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	525.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	551.250,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	525.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Laporan	551.250,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	525.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	551.250,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	525.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	551.250,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	2 Laporan	525.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Laporan	551.250,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat						10.156.222.600,00					Aparat		10.811.728.007,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						10.156.222.600,00					Aparat Kelurahan		10.811.728.007,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	6.222.600,00						0 Laporan	5.549.817,00	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						525.000,00							551.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	525.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Ngadirejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	551.250,00	Kelurahan Ngadirejo
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	525.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Ngadirejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Laporan	551.250,00	Kelurahan Ngadirejo
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	525.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Ngadirejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	551.250,00	Kelurahan Ngadirejo
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	0 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	525.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Ngadirejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Laporan	551.250,00	Kelurahan Ngadirejo
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						104.911.800,00					Aparat Kelurahan		117.380.112,50	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						104.911.800,00					Aparat Kelurahan		117.380.112,50	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	100 Orang		100 Orang	100 Orang	104.911.800,00						100 Orang	117.380.112,50	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						12.976.350,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang		65 Orang	30 Orang	12.976.350,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		65 Orang	10.500.000,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	12.976.350,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		30 Orang	10.500.000,00	Kelurahan Ngadirejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang		18 Orang	30 Orang	12.976.350,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Orang	10.500.000,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang		14 Orang	30 Orang	12.976.350,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Orang	10.500.000,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang		80 Orang	30 Orang	12.976.350,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		80 Orang	10.500.000,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	30 Orang	12.976.350,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		100 Orang	10.500.000,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang		12 Orang	30 Orang	12.976.350,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Orang	10.500.000,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						386.588.974,00					Aparat		335.728.109,05	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						386.588.974,00					Aparat Kelurahan		335.728.109,05	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	98.394.400,00						1 Paket	103.646.025,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	52.069.733,00						1 Paket	36.992.970,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.153.541,00						1 Paket	20.500.305,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	62.445.500,00						1 Paket	64.575.121,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.063.600,00							1.116.780,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.063.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	1.116.780,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.449.500,00							5.015.850,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	4.449.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	5.015.850,00	Kelurahan Ngadirejo
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	4.449.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	5.015.850,00	Kelurahan Ngadirejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	4.449.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	5.015.850,00	Kelurahan Ngadirejo
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	1 Paket	4.449.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	5.015.850,00	Kelurahan Ngadirejo
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.449.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	5.015.850,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.739.200,00							6.213.060,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	6.739.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Paket	6.213.060,00	Kelurahan Ngadirejo
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.739.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	6.213.060,00	Kelurahan Ngadirejo
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	6.739.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	6.213.060,00	Kelurahan Ngadirejo
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	6.739.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	6.213.060,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.105.033,00							2.289.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	2.105.033,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	2.289.000,00	Kelurahan Ngadirejo
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.105.033,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	2.289.000,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						278.400.018,00					Aparat kelurahan		98.520.455,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						278.400.018,00					Aparat kelurahan		98.520.455,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	278.400.018,00						1 Unit	98.520.455,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						31.883.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	31.883.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Ngadirejo
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	31.883.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Ngadirejo
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		13 Unit	1 Unit	31.883.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						898.237.468,00					Aparat Kelurahan		1.387.688.199,40	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						898.237.468,00					Aparat Kelurahan		1.387.688.199,40	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	233.366.068,00						36 Laporan	242.767.925,40	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.391.800,00							16.291.800,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	4 Laporan	15.391.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	16.291.800,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						437.552.200,00					Aparat Kelurahan		593.470.635,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						437.552.200,00					Aparat Kelurahan		593.470.635,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	11 Unit		11 Unit	11 Unit	73.615.900,00						11 Unit	45.327.450,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		Unit	1 Unit	257.000.000,00						1 Unit	460.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.397.600,00							3.831.030,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	18 Unit	4.397.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	3.831.030,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		18 Unit	18 Unit	4.397.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	3.831.030,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	18 Unit	4.397.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Unit	3.831.030,00	Kelurahan Ngadirejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	18 Unit	4.397.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	3.831.030,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit		11 Unit	18 Unit	4.397.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Unit	3.831.030,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	18 Unit	4.397.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Unit	3.831.030,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						24.000.000,00							24.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	24.000.000,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Unit	1 Unit	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	24.000.000,00	Kelurahan Ngadirejo
185,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						2.288.771.940,00							2.282.365.913,05	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan						190.034.280,00							198.857.820,00	
			999.Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	100 %		100 %	100 %	190.034.280,00						100 %	198.857.820,00	
			999.Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan	100 %		100 %	100 %	190.034.280,00						100 %	198.857.820,00	
			999.Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan	100 %		100 %	100 %	190.034.280,00						100 %	198.857.820,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.036.632.640,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		2.052.223.195,05	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan trantibum yang sesuai dengan ketentuan						2.036.632.640,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		2.052.223.195,05	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.791.040,00						1 Dokumen	1.905.153.390,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	135.841.600,00						1 Laporan	147.069.805,05	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan						2.036.632.640,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		2.052.223.195,05	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.791.040,00						1 Dokumen	1.905.153.390,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	135.841.600,00						1 Laporan	147.069.805,05	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						8.190.000,00							15.592.500,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	12 Laporan	8.190.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Ngadirejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	15.592.500,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.190.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Ngadirejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	15.592.500,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	8.190.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Ngadirejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	15.592.500,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan		3 Laporan	12 Laporan	8.190.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Ngadirejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	15.592.500,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan		7 Laporan	12 Laporan	8.190.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Ngadirejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	15.592.500,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						167.546.280,00							168.355.320,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	4 Dokumen	167.546.280,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	168.355.320,00	Kelurahan Ngadirejo
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	167.546.280,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	168.355.320,00	Kelurahan Ngadirejo
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	4 Dokumen	167.546.280,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	168.355.320,00	Kelurahan Ngadirejo
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	167.546.280,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	168.355.320,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di						252.139.300,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		230.142.718,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan						252.139.300,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		230.142.718,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.814.400,00						1 Dokumen	10.907.863,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	240.324.900,00						1 Laporan	219.234.855,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan						252.139.300,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		230.142.718,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.814.400,00						1 Dokumen	10.907.863,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	240.324.900,00						1 Laporan	219.234.855,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						2.298.000,00							2.310.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.298.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	2.310.000,00	Kelurahan Ngadirejo
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	2.298.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	2.310.000,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						12.000.000,00							12.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	12.600.000,00	Kelurahan Ngadirejo
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	12.600.000,00	Kelurahan Ngadirejo
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	12.600.000,00	Kelurahan Ngadirejo
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	12.600.000,00	Kelurahan Ngadirejo
186,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						7.215.262.500,00							7.433.918.602,00	
		Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan						557.473.900,00							568.297.170,00	
			1.Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi	7 Kelompok		7 Kelompok	7 Kelompok	557.473.900,00						7 Kelompok	568.297.170,00	
			2.Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		100 %	100 %	557.473.900,00						100 %	568.297.170,00	
			3.Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang	75 %		70 %	70 %	557.473.900,00						70 %	568.297.170,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						6.521.075.700,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		6.739.393.372,00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan						6.521.075.700,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		6.739.393.372,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	195.630.262,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	161.932.890,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas		11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	2.132.664.338,00						11 Pokmas / Ormas	2.356.733.022,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit		0 Unit	0 Unit	4.192.781.100,00						0 Unit	4.220.727.460,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di						17.300.000,00							17.640.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	17.300.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Lembaga Kemasyarakatan	17.640.000,00	Kelurahan Ngadirejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	17.300.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Lembaga Kemasyarakatan	17.640.000,00	Kelurahan Ngadirejo
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	17.300.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Lembaga Kemasyarakatan	17.640.000,00	Kelurahan Ngadirejo
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	17.300.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Lembaga Kemasyarakatan	17.640.000,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						383.663.100,00							465.412.500,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit		18 Unit	18 Unit	383.663.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	465.412.500,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	47 Unit		47 Unit	18 Unit	383.663.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		47 Unit	465.412.500,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit		0 Unit	18 Unit	383.663.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Unit	465.412.500,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	31 Unit		31 Unit	18 Unit	383.663.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		31 Unit	465.412.500,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit		29 Unit	18 Unit	383.663.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		29 Unit	465.412.500,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit		33 Unit	18 Unit	383.663.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		33 Unit	465.412.500,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit		28 Unit	18 Unit	383.663.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		28 Unit	465.412.500,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di						97.576.000,00							24.412.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31 Pokmas / Ormas		31 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	97.576.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		31 Pokmas / Ormas	24.412.500,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas		9 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	97.576.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Pokmas / Ormas	24.412.500,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	97.576.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	24.412.500,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas		11 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	97.576.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Pokmas / Ormas	24.412.500,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	97.576.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Pokmas / Ormas	24.412.500,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	97.576.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Pokmas / Ormas	24.412.500,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						694.186.800,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		694.525.230,00	
		Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat						694.186.800,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		694.525.230,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	38.602.900,00						1 Laporan	27.023.640,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Lembaga Kemasyarakatan		11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	655.583.900,00						11 Lembaga Kemasyarakatan	667.501.590,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						53.734.800,00							55.387.500,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	53.734.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Lembaga Kemasyarakatan	55.387.500,00	Kelurahan Ngadirejo
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Lembaga Kemasyarakatan		11 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	53.734.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Lembaga Kemasyarakatan	55.387.500,00	Kelurahan Ngadirejo
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	53.734.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Lembaga Kemasyarakatan	55.387.500,00	Kelurahan Ngadirejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	53.734.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Lembaga Kemasyarakatan	55.387.500,00	Kelurahan Ngadirejo
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	53.734.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Lembaga Kemasyarakatan	55.387.500,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						5.200.000,00							5.444.670,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	5.444.670,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	5.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	5.444.670,00	Kelurahan Ngadirejo
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	5.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	5.444.670,00	Kelurahan Ngadirejo
		Kelurahan Sentul						1.307.489.441,00							1.317.072.118,05	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						1.307.489.441,00							1.317.072.118,05	
	7.01	**KECAMATAN**						1.307.489.441,00							1.317.072.118,05	
187,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						12.275.926.660,00							13.359.482.637,95	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						126.080.841,00							117.461.713,05	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	126.080.841,00						100 %	117.461.713,05	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.313.600,00					Aparat Kelurahan		13.974.870,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						13.313.600,00					Aparat Kelurahan		13.974.870,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	6.546.200,00						0 Dokumen	7.050.120,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	6.067.400,00						0 Laporan	6.189.750,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						700.000,00							1.102.500,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	10 Dokumen	700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	1.102.500,00	Kelurahan Sentul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	1.102.500,00	Kelurahan Sentul
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Dokumen	1.102.500,00	Kelurahan Sentul
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen	10 Dokumen	700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Dokumen	1.102.500,00	Kelurahan Sentul
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	10 Dokumen	700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	1.102.500,00	Kelurahan Sentul
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	10 Dokumen	700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	1.102.500,00	Kelurahan Sentul
	7.01.01.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						700.000,00							1.102.500,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	1.102.500,00	Kelurahan Sentul
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Laporan	1.102.500,00	Kelurahan Sentul
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	1.102.500,00	Kelurahan Sentul
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	1.102.500,00	Kelurahan Sentul
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Laporan	1.102.500,00	Kelurahan Sentul
	7.01.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat						10.156.222.600,00					Aparat		10.811.728.007,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						10.156.222.600,00					Aparat Kelurahan		10.811.728.007,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	6.222.600,00						0 Laporan	5.549.817,00	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.140.000,00							1.197.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	1.140.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Sentul || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	1.197.000,00	Kelurahan Sentul
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan		6 Laporan	4 Laporan	1.140.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Sentul || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Laporan	1.197.000,00	Kelurahan Sentul
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.140.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Sentul || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	1.197.000,00	Kelurahan Sentul
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	1.140.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Sentul || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Laporan	1.197.000,00	Kelurahan Sentul
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						104.911.800,00					Aparat Kelurahan		117.380.112,50	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						104.911.800,00					Aparat Kelurahan		117.380.112,50	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	100 Orang		100 Orang	100 Orang	104.911.800,00						100 Orang	117.380.112,50	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						11.200.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	12 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		100 Orang	10.500.000,00	Kelurahan Sentul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang		12 Orang	12 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Orang	10.500.000,00	Kelurahan Sentul
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang		14 Orang	12 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Orang	10.500.000,00	Kelurahan Sentul
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang		18 Orang	12 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Orang	10.500.000,00	Kelurahan Sentul
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		30 Orang	12 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		30 Orang	10.500.000,00	Kelurahan Sentul
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang		65 Orang	12 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		65 Orang	10.500.000,00	Kelurahan Sentul
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang		80 Orang	12 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		80 Orang	10.500.000,00	Kelurahan Sentul
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						386.588.974,00					Aparat		335.728.109,05	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						386.588.974,00					Aparat Kelurahan		335.728.109,05	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	98.394.400,00						1 Paket	103.646.025,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	52.069.733,00						1 Paket	36.992.970,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.153.541,00						1 Paket	20.500.305,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	62.445.500,00						1 Paket	64.575.121,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	54.756.800,00						1 Paket	39.965.038,05	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.840.041,00							3.409.140,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.840.041,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	3.409.140,00	Kelurahan Sentul
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.325.200,00							8.741.460,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	8.325.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	8.741.460,00	Kelurahan Sentul
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	3 Paket	8.325.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	8.741.460,00	Kelurahan Sentul
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	8.325.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	8.741.460,00	Kelurahan Sentul
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	3 Paket	8.325.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	8.741.460,00	Kelurahan Sentul
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	8.325.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	8.741.460,00	Kelurahan Sentul
	7.01.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.391.500,00							3.960.748,05	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	2 Paket	4.391.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	3.960.748,05	Kelurahan Sentul
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	4.391.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	3.960.748,05	Kelurahan Sentul
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	4.391.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	3.960.748,05	Kelurahan Sentul
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	2 Paket	4.391.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	3.960.748,05	Kelurahan Sentul
	7.01.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						11.790.000,00							21.588.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	4 Paket	11.790.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	21.588.000,00	Kelurahan Sentul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	11.790.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	21.588.000,00	Kelurahan Sentul
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	11.790.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	21.588.000,00	Kelurahan Sentul
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	4 Paket	11.790.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Paket	21.588.000,00	Kelurahan Sentul
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.999.800,00							2.472.750,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.999.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	2.472.750,00	Kelurahan Sentul
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	4.999.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	2.472.750,00	Kelurahan Sentul
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						278.400.018,00					Aparat kelurahan		98.520.455,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						278.400.018,00					Aparat kelurahan		98.520.455,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	278.400.018,00						1 Unit	98.520.455,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						26.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		13 Unit	1 Unit	26.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Sentul
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	26.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Sentul
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	26.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Sentul
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						898.237.468,00					Aparat Kelurahan		1.387.688.199,40	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						898.237.468,00					Aparat Kelurahan		1.387.688.199,40	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	233.366.068,00						36 Laporan	242.767.925,40	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						22.194.000,00							17.614.800,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	22.194.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	17.614.800,00	Kelurahan Sentul
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						437.552.200,00					Aparat Kelurahan		593.470.635,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						437.552.200,00					Aparat Kelurahan		593.470.635,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	14 Unit		14 Unit	14 Unit	83.352.200,00						14 Unit	64.567.755,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	11 Unit		11 Unit	11 Unit	73.615.900,00						11 Unit	45.327.450,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		Unit	1 Unit	257.000.000,00						1 Unit	460.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.980.000,00							3.129.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		14 Unit	6 Unit	2.980.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Unit	3.129.000,00	Kelurahan Sentul
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	2.980.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	3.129.000,00	Kelurahan Sentul
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.520.300,00							4.746.315,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit		11 Unit	12 Unit	4.520.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Unit	4.746.315,00	Kelurahan Sentul
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	12 Unit	4.520.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Unit	4.746.315,00	Kelurahan Sentul
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	12 Unit	4.520.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	4.746.315,00	Kelurahan Sentul
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	4.520.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Unit	4.746.315,00	Kelurahan Sentul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		18 Unit	12 Unit	4.520.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	4.746.315,00	Kelurahan Sentul
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	12 Unit	4.520.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	4.746.315,00	Kelurahan Sentul
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						24.000.000,00							24.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	24.000.000,00	Kelurahan Sentul
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Unit	1 Unit	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	24.000.000,00	Kelurahan Sentul
188,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						2.288.771.940,00							2.282.365.913,05	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan						292.948.800,00							287.250.600,00	
			999.Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	100 %		100 %	100 %	292.948.800,00						100 %	287.250.600,00	
			999.Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan	100 %		100 %	100 %	292.948.800,00						100 %	287.250.600,00	
			999.Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan	100 %		100 %	100 %	292.948.800,00						100 %	287.250.600,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.036.632.640,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		2.052.223.195,05	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan trantibum yang sesuai dengan ketentuan						2.036.632.640,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		2.052.223.195,05	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.791.040,00						1 Dokumen	1.905.153.390,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	135.841.600,00						1 Laporan	147.069.805,05	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan						2.036.632.640,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		2.052.223.195,05	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.791.040,00						1 Dokumen	1.905.153.390,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	135.841.600,00						1 Laporan	147.069.805,05	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						2.100.000,00							2.205.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan		7 Laporan	12 Laporan	2.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Sentul || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	2.205.000,00	Kelurahan Sentul
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan		3 Laporan	12 Laporan	2.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Sentul || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	2.205.000,00	Kelurahan Sentul
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	12 Laporan	2.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Sentul || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	2.205.000,00	Kelurahan Sentul
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	2.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Sentul || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	2.205.000,00	Kelurahan Sentul
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Sentul || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	2.205.000,00	Kelurahan Sentul
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						265.168.800,00							262.281.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	12 Dokumen	265.168.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	262.281.600,00	Kelurahan Sentul
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	265.168.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	262.281.600,00	Kelurahan Sentul
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	265.168.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	262.281.600,00	Kelurahan Sentul
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	12 Dokumen	265.168.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	262.281.600,00	Kelurahan Sentul
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di						252.139.300,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		230.142.718,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan						252.139.300,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		230.142.718,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.814.400,00						1 Dokumen	10.907.863,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	240.324.900,00						1 Laporan	219.234.855,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan						252.139.300,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		230.142.718,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.814.400,00						1 Dokumen	10.907.863,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	240.324.900,00						1 Laporan	219.234.855,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						1.680.000,00							1.764.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	1.680.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	1.764.000,00	Kelurahan Sentul
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.680.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	1.764.000,00	Kelurahan Sentul
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						24.000.000,00							21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	21.000.000,00	Kelurahan Sentul
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	21.000.000,00	Kelurahan Sentul
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	21.000.000,00	Kelurahan Sentul
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	2 Laporan	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	21.000.000,00	Kelurahan Sentul
189,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						7.215.262.500,00							7.433.918.602,00	
		Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan						887.759.800,00							911.257.305,00	
			1.Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi	7 Kelompok		7 Kelompok	7 Kelompok	887.759.800,00						7 Kelompok	911.257.305,00	
			2.Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		100 %	100 %	887.759.800,00						100 %	911.257.305,00	
			3.Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang	75 %		70 %	70 %	887.759.800,00						70 %	911.257.305,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						6.521.075.700,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		6.739.393.372,00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan						6.521.075.700,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		6.739.393.372,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	195.630.262,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	161.932.890,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas		11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	2.132.664.338,00						11 Pokmas / Ormas	2.356.733.022,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit		0 Unit	0 Unit	4.192.781.100,00						0 Unit	4.220.727.460,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di						25.459.800,00							22.587.180,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	25.459.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Lembaga Kemasyarakatan	22.587.180,00	Kelurahan Sentul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	25.459.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Lembaga Kemasyarakatan	22.587.180,00	Kelurahan Sentul
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	25.459.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Lembaga Kemasyarakatan	22.587.180,00	Kelurahan Sentul
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	25.459.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Lembaga Kemasyarakatan	22.587.180,00	Kelurahan Sentul
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						542.500.000,00							569.625.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	47 Unit		47 Unit	21 Unit	542.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		47 Unit	569.625.000,00	Kelurahan Sentul
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit		0 Unit	21 Unit	542.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Unit	569.625.000,00	Kelurahan Sentul
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit		18 Unit	21 Unit	542.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	569.625.000,00	Kelurahan Sentul
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit		28 Unit	21 Unit	542.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		28 Unit	569.625.000,00	Kelurahan Sentul
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit		29 Unit	21 Unit	542.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		29 Unit	569.625.000,00	Kelurahan Sentul
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	31 Unit		31 Unit	21 Unit	542.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		31 Unit	569.625.000,00	Kelurahan Sentul
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit		33 Unit	21 Unit	542.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		33 Unit	569.625.000,00	Kelurahan Sentul
	7.01.03.2.	Pemberdayaan Masyarakat di						259.225.000,00							262.502.625,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	259.225.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	262.502.625,00	Kelurahan Sentul
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	259.225.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Pokmas / Ormas	262.502.625,00	Kelurahan Sentul
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas		9 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	259.225.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Pokmas / Ormas	262.502.625,00	Kelurahan Sentul
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas		11 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	259.225.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Pokmas / Ormas	262.502.625,00	Kelurahan Sentul
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31 Pokmas / Ormas		31 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	259.225.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		31 Pokmas / Ormas	262.502.625,00	Kelurahan Sentul
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	259.225.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Pokmas / Ormas	262.502.625,00	Kelurahan Sentul
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						694.186.800,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		694.525.230,00	
		Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat						694.186.800,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		694.525.230,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	38.602.900,00						1 Laporan	27.023.640,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Lembaga Kemasyarakatan		11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	655.583.900,00						11 Lembaga Kemasyarakatan	667.501.590,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						56.775.000,00							52.867.500,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	56.775.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Lembaga Kemasyarakatan	52.867.500,00	Kelurahan Sentul
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	56.775.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Lembaga Kemasyarakatan	52.867.500,00	Kelurahan Sentul
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	56.775.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Lembaga Kemasyarakatan	52.867.500,00	Kelurahan Sentul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	56.775.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Lembaga Kemasyarakatan	52.867.500,00	Kelurahan Sentul
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Lembaga Kemasyarakatan		11 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	56.775.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Lembaga Kemasyarakatan	52.867.500,00	Kelurahan Sentul
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						3.800.000,00							3.675.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	3.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	3.675.000,00	Kelurahan Sentul
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	3.675.000,00	Kelurahan Sentul
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	3.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	3.675.000,00	Kelurahan Sentul
		Kelurahan Kauman						1.274.515.000,00							1.286.085.660,00	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						1.274.515.000,00							1.286.085.660,00	
	7.01	**KECAMATAN**						1.274.515.000,00							1.286.085.660,00	
190,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						12.275.926.660,00							13.359.482.637,95	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						110.206.500,00							100.396.955,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	110.206.500,00						100 %	100.396.955,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.313.600,00					Aparat Kelurahan		13.974.870,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						13.313.600,00					Aparat Kelurahan		13.974.870,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	6.546.200,00						0 Dokumen	7.050.120,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	6.067.400,00						0 Laporan	6.189.750,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.325.000,00							2.441.250,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	2.325.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	2.441.250,00	Kelurahan Kauman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	2.325.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Dokumen	2.441.250,00	Kelurahan Kauman
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	2.325.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	2.441.250,00	Kelurahan Kauman
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.325.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	2.441.250,00	Kelurahan Kauman
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.325.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	2.441.250,00	Kelurahan Kauman
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	2 Dokumen	2.325.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Dokumen	2.441.250,00	Kelurahan Kauman
	7.01.01.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.745.000,00							1.832.250,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.745.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	1.832.250,00	Kelurahan Kauman
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	4 Laporan	1.745.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Laporan	1.832.250,00	Kelurahan Kauman
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	1.745.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	1.832.250,00	Kelurahan Kauman
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	1.745.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	1.832.250,00	Kelurahan Kauman
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	1.745.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Laporan	1.832.250,00	Kelurahan Kauman
	7.01.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat						10.156.222.600,00					Aparat		10.811.728.007,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						10.156.222.600,00					Aparat Kelurahan		10.811.728.007,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	6.222.600,00						0 Laporan	5.549.817,00	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						835.000,00							876.750,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	0 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	835.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kauman || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Laporan	876.750,00	Kelurahan Kauman
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	835.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kauman || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	876.750,00	Kelurahan Kauman
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	835.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kauman || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	876.750,00	Kelurahan Kauman
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	6 Laporan		6 Laporan	4 Laporan	835.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kauman || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Laporan	876.750,00	Kelurahan Kauman
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						104.911.800,00					Aparat Kelurahan		117.380.112,50	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						104.911.800,00					Aparat Kelurahan		117.380.112,50	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	100 Orang		100 Orang	100 Orang	104.911.800,00						100 Orang	117.380.112,50	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						11.200.000,00							10.527.650,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang		65 Orang	40 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		65 Orang	10.527.650,00	Kelurahan Kauman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang		80 Orang	40 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		80 Orang	10.527.650,00	Kelurahan Kauman
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		30 Orang	40 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		30 Orang	10.527.650,00	Kelurahan Kauman
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang		18 Orang	40 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Orang	10.527.650,00	Kelurahan Kauman
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang		14 Orang	40 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Orang	10.527.650,00	Kelurahan Kauman
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang		12 Orang	40 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Orang	10.527.650,00	Kelurahan Kauman
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	40 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		100 Orang	10.527.650,00	Kelurahan Kauman
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						386.588.974,00					Aparat		335.728.109,05	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						386.588.974,00					Aparat Kelurahan		335.728.109,05	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	98.394.400,00						1 Paket	103.646.025,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	52.069.733,00						1 Paket	36.992.970,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.153.541,00						1 Paket	20.500.305,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	62.445.500,00						1 Paket	64.575.121,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	54.756.800,00						1 Paket	39.965.038,05	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.826.500,00							3.111.570,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.826.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	3.111.570,00	Kelurahan Kauman
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.268.500,00							5.019.735,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	7.268.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	5.019.735,00	Kelurahan Kauman
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	7.268.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	5.019.735,00	Kelurahan Kauman
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	3 Paket	7.268.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	5.019.735,00	Kelurahan Kauman
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	7.268.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	5.019.735,00	Kelurahan Kauman
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	3 Paket	7.268.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	5.019.735,00	Kelurahan Kauman
	7.01.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.970.800,00							3.649.590,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.970.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	3.649.590,00	Kelurahan Kauman
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	5.970.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	3.649.590,00	Kelurahan Kauman
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	5.970.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	3.649.590,00	Kelurahan Kauman
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	1 Paket	5.970.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	3.649.590,00	Kelurahan Kauman
	7.01.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.813.100,00							7.085.715,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	6.813.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	7.085.715,00	Kelurahan Kauman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	2 Pa ket	6.813.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Paket	7.085.715,00	Kelurahan Kauman
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Pa ket		2 Paket	2 Pa ket	6.813.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	7.085.715,00	Kelurahan Kauman
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Pa ket		4 Paket	2 Pa ket	6.813.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	7.085.715,00	Kelurahan Kauman
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.596.000,00							1.674.540,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Pa ket		1 Paket	2 Pa ket	7.596.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	1.674.540,00	Kelurahan Kauman
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Pa ket		2 Paket	2 Pa ket	7.596.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	1.674.540,00	Kelurahan Kauman
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						278.400.018,00					Aparat kelurahan		98.520.455,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						278.400.018,00					Aparat kelurahan		98.520.455,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	278.400.018,00						1 Unit	98.520.455,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						24.056.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	24.056.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Kauman
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	24.056.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Kauman
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		13 Unit	1 Unit	24.056.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Kauman
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						898.237.468,00					Aparat Kelurahan		1.387.688.199,40	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						898.237.468,00					Aparat Kelurahan		1.387.688.199,40	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	233.366.068,00						36 Laporan	242.767.925,40	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						24.012.000,00							47.250.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	24 Laporan	24.012.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	47.250.000,00	Kelurahan Kauman
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						437.552.200,00					Aparat Kelurahan		593.470.635,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						437.552.200,00					Aparat Kelurahan		593.470.635,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	14 Unit		14 Unit	14 Unit	83.352.200,00						14 Unit	64.567.755,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	11 Unit		11 Unit	11 Unit	73.615.900,00						11 Unit	45.327.450,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.978.600,00							1.077.405,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	3 Unit	2.978.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	1.077.405,00	Kelurahan Kauman
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		14 Unit	3 Unit	2.978.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Unit	1.077.405,00	Kelurahan Kauman
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						11.580.000,00							850.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		18 Unit	2 Unit	11.580.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	850.500,00	Kelurahan Kauman
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	2 Unit	11.580.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	850.500,00	Kelurahan Kauman
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	2 Unit	11.580.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	850.500,00	Kelurahan Kauman
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	2 Unit	11.580.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Unit	850.500,00	Kelurahan Kauman
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	2 Unit	11.580.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Unit	850.500,00	Kelurahan Kauman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit		11 Unit	2 Unit	11.580.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Unit	850.500,00	Kelurahan Kauman
191,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						2.288.771.940,00							2.282.365.913,05	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan						288.240.000,00							288.353.310,00	
			999.Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	100 %		100 %	100 %	288.240.000,00						100 %	288.353.310,00	
			999.Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan	100 %		100 %	100 %	288.240.000,00						100 %	288.353.310,00	
			999.Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan	100 %		100 %	100 %	288.240.000,00						100 %	288.353.310,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.036.632.640,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		2.052.223.195,05	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan trantibum yang sesuai dengan ketentuan						2.036.632.640,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		2.052.223.195,05	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.791.040,00						1 Dokumen	1.905.153.390,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	135.841.600,00						1 Laporan	147.069.805,05	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan						2.036.632.640,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		2.052.223.195,05	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.791.040,00						1 Dokumen	1.905.153.390,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	135.841.600,00						1 Laporan	147.069.805,05	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						3.675.000,00							8.452.500,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.675.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kauman || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	8.452.500,00	Kelurahan Kauman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan		12 Laporan	2 Laporan	3.675.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kauman || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	8.452.500,00	Kelurahan Kauman
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	3.675.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kauman || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	8.452.500,00	Kelurahan Kauman
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	3.675.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kauman || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	8.452.500,00	Kelurahan Kauman
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan		7 Laporan	2 Laporan	3.675.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kauman || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	8.452.500,00	Kelurahan Kauman
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						258.590.000,00							252.653.310,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	258.590.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	252.653.310,00	Kelurahan Kauman
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	258.590.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	252.653.310,00	Kelurahan Kauman
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	12 Dokumen	258.590.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	252.653.310,00	Kelurahan Kauman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	12 Dokumen	258.590.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	252.653.310,00	Kelurahan Kauman
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di						252.139.300,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		230.142.718,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan						252.139.300,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		230.142.718,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.814.400,00						1 Dokumen	10.907.863,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	240.324.900,00						1 Laporan	219.234.855,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan						252.139.300,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		230.142.718,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.814.400,00						1 Dokumen	10.907.863,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	240.324.900,00						1 Laporan	219.234.855,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						850.000,00							787.500,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	787.500,00	Kelurahan Kauman
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	787.500,00	Kelurahan Kauman
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						25.125.000,00							26.460.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	25.125.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	26.460.000,00	Kelurahan Kauman
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	2 Laporan	25.125.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	26.460.000,00	Kelurahan Kauman
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	25.125.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	26.460.000,00	Kelurahan Kauman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	25.125.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	26.460.000,00	Kelurahan Kauman
192,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						7.215.262.500,00							7.433.918.602,00	
		Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan						876.068.500,00							897.335.395,00	
			1.Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi	7 Kelompok		7 Kelompok	7 Kelompok	876.068.500,00						7 Kelompok	897.335.395,00	
			2.Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		100 %	100 %	876.068.500,00						100 %	897.335.395,00	
			3.Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang	75 %		70 %	70 %	876.068.500,00						70 %	897.335.395,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						6.521.075.700,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		6.739.393.372,00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan						6.521.075.700,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		6.739.393.372,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	2 Lembaga K emasyarakat an		2 Lembaga K emasyarakat an	2 Lembaga K emasyarakat an	195.630.262,00						2 Lembaga K emasyarakat an	161.932.890,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas		11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	2.132.664.338,00						11 Pokmas / Ormas	2.356.733.022,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit		0 Unit	0 Unit	4.192.781.100,00						0 Unit	4.220.727.460,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di						23.550.300,00							21.242.340,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga K emasyarakat an		2 Lembaga K emasyarakat an	6 Lembaga K emasyarakat an	23.550.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Lembaga K emasyarakat an	21.242.340,00	Kelurahan Kauman
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga K emasyarakat an		6 Lembaga K emasyarakat an	6 Lembaga K emasyarakat an	23.550.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Lembaga K emasyarakat an	21.242.340,00	Kelurahan Kauman
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga K emasyarakat an		3 Lembaga K emasyarakat an	6 Lembaga K emasyarakat an	23.550.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Lembaga K emasyarakat an	21.242.340,00	Kelurahan Kauman
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga K emasyarakat an		9 Lembaga K emasyarakat an	6 Lembaga K emasyarakat an	23.550.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Lembaga K emasyarakat an	21.242.340,00	Kelurahan Kauman
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						561.018.000,00							629.464.960,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	47 Unit		47 Unit	33 Unit	561.018.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		47 Unit	629.464.960,00	Kelurahan Kauman
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit		0 Unit	33 Unit	561.018.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Unit	629.464.960,00	Kelurahan Kauman
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit		28 Unit	33 Unit	561.018.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		28 Unit	629.464.960,00	Kelurahan Kauman
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit		29 Unit	33 Unit	561.018.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		29 Unit	629.464.960,00	Kelurahan Kauman
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	31 Unit		31 Unit	33 Unit	561.018.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		31 Unit	629.464.960,00	Kelurahan Kauman
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit		33 Unit	33 Unit	561.018.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		33 Unit	629.464.960,00	Kelurahan Kauman
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit		18 Unit	33 Unit	561.018.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	629.464.960,00	Kelurahan Kauman
	7.01.03.2.	Pemberdayaan Masyarakat di						231.500.300,00							196.540.575,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31 Pokmas / Ormas		31 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	231.500.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		31 Pokmas / Ormas	196.540.575,00	Kelurahan Kauman
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	231.500.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Pokmas / Ormas	196.540.575,00	Kelurahan Kauman
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	231.500.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Pokmas / Ormas	196.540.575,00	Kelurahan Kauman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	231.500.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	196.540.575,00	Kelurahan Kauman
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas		9 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	231.500.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Pokmas / Ormas	196.540.575,00	Kelurahan Kauman
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas		11 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	231.500.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Pokmas / Ormas	196.540.575,00	Kelurahan Kauman
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						694.186.800,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		694.525.230,00	
		Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat						694.186.800,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		694.525.230,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	38.602.900,00						1 Laporan	27.023.640,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Lembaga Kemasyarakatan		11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	655.583.900,00						11 Lembaga Kemasyarakatan	667.501.590,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						56.749.900,00							49.037.520,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	56.749.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Lembaga Kemasyarakatan	49.037.520,00	Kelurahan Kauman
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	56.749.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Lembaga Kemasyarakatan	49.037.520,00	Kelurahan Kauman
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	56.749.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Lembaga Kemasyarakatan	49.037.520,00	Kelurahan Kauman
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	56.749.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Lembaga Kemasyarakatan	49.037.520,00	Kelurahan Kauman
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Lembaga Kemasyarakatan		11 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	56.749.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Lembaga Kemasyarakatan	49.037.520,00	Kelurahan Kauman
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						3.250.000,00							1.050.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.250.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	1.050.000,00	Kelurahan Kauman
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	3.250.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	1.050.000,00	Kelurahan Kauman
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	3.250.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	1.050.000,00	Kelurahan Kauman
		Kelurahan Tanggung						1.424.976.641,00							1.399.428.223,00	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						1.424.976.641,00							1.399.428.223,00	
	7.01	**KECAMATAN**						1.424.976.641,00							1.399.428.223,00	
193,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						12.275.926.660,00							13.359.482.637,95	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						159.779.500,00							116.900.115,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	159.779.500,00						100 %	116.900.115,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.313.600,00					Aparat Kelurahan		13.974.870,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						13.313.600,00					Aparat Kelurahan		13.974.870,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	6.546.200,00						0 Dokumen	7.050.120,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	6.067.400,00						0 Laporan	6.189.750,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						380.000,00							66.780,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	380.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Dokumen	66.780,00	Kelurahan Tanggung
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	380.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	66.780,00	Kelurahan Tanggung
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	380.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	66.780,00	Kelurahan Tanggung
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	380.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	66.780,00	Kelurahan Tanggung

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	380.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	66.780,00	Kelurahan Tanggung
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	4 Dokumen	380.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Dokumen	66.780,00	Kelurahan Tanggung
	7.01.01.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						380.000,00							66.780,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	380.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Laporan	66.780,00	Kelurahan Tanggung
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	4 Laporan	380.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Laporan	66.780,00	Kelurahan Tanggung
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	380.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	66.780,00	Kelurahan Tanggung
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	380.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	66.780,00	Kelurahan Tanggung
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	380.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	66.780,00	Kelurahan Tanggung
	7.01.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat						10.156.222.600,00					Aparat		10.811.728.007,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						10.156.222.600,00					Aparat Kelurahan		10.811.728.007,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	6.222.600,00						0 Laporan	5.549.817,00	
	7.01.01.2. 02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						863.600,00							66.780,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	6 Laporan		6 Laporan	4 Laporan	863.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Laporan	66.780,00	Kelurahan Tanggung

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	863.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	66.780,00	Kelurahan Tanggung
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	863.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	66.780,00	Kelurahan Tanggung
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	0 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	863.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Laporan	66.780,00	Kelurahan Tanggung
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						104.911.800,00					Aparat Kelurahan		117.380.112,50	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						104.911.800,00					Aparat Kelurahan		117.380.112,50	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	100 Orang		100 Orang	100 Orang	104.911.800,00						100 Orang	117.380.112,50	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						11.263.600,00							26.709.480,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang		18 Orang	15 Orang	11.263.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Orang	26.709.480,00	Kelurahan Tanggung
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang		80 Orang	15 Orang	11.263.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		80 Orang	26.709.480,00	Kelurahan Tanggung
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang		14 Orang	15 Orang	11.263.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Orang	26.709.480,00	Kelurahan Tanggung
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	15 Orang	11.263.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		100 Orang	26.709.480,00	Kelurahan Tanggung

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang		12 Orang	15 Orang	11.263.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Orang	26.709.480,00	Kelurahan Tanggung
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		30 Orang	15 Orang	11.263.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		30 Orang	26.709.480,00	Kelurahan Tanggung
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang		65 Orang	15 Orang	11.263.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		65 Orang	26.709.480,00	Kelurahan Tanggung
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						386.588.974,00					Aparat		335.728.109,05	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						386.588.974,00					Aparat Kelurahan		335.728.109,05	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	98.394.400,00						1 Paket	103.646.025,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	52.069.733,00						1 Paket	36.992.970,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.153.541,00						1 Paket	20.500.305,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	62.445.500,00						1 Paket	64.575.121,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	54.756.800,00						1 Paket	39.965.038,05	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.533.600,00							2.660.280,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.533.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	2.660.280,00	Kelurahan Tanggung
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.920.600,00							5.125.890,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	3.920.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	5.125.890,00	Kelurahan Tanggung
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	3 Paket	3.920.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	5.125.890,00	Kelurahan Tanggung
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	3.920.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	5.125.890,00	Kelurahan Tanggung

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	3.920.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	5.125.890,00	Kelurahan Tanggung
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	3 Paket	3.920.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	5.125.890,00	Kelurahan Tanggung
	7.01.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6.334.000,00							2.836.890,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	1 Paket	6.334.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	2.836.890,00	Kelurahan Tanggung
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.334.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	2.836.890,00	Kelurahan Tanggung
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	6.334.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	2.836.890,00	Kelurahan Tanggung
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	6.334.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	2.836.890,00	Kelurahan Tanggung
	7.01.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.154.000,00							2.545.200,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	4.154.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	2.545.200,00	Kelurahan Tanggung
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	4.154.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	2.545.200,00	Kelurahan Tanggung
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	4.154.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	2.545.200,00	Kelurahan Tanggung
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	2 Paket	4.154.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Paket	2.545.200,00	Kelurahan Tanggung
	7.01.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.687.000,00							3.379.950,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	3.687.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	3.379.950,00	Kelurahan Tanggung
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.687.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	3.379.950,00	Kelurahan Tanggung
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						278.400.018,00					Aparat Kelurahan		98.520.455,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						278.400.018,00					Aparat Kelurahan		98.520.455,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	278.400.018,00						1 Unit	98.520.455,00	
	7.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						15.217.400,00							5.925.045,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.217.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	5.925.045,00	Kelurahan Tanggung
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	15.217.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	5.925.045,00	Kelurahan Tanggung
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		13 Unit	1 Unit	15.217.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	5.925.045,00	Kelurahan Tanggung
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						898.237.468,00					Aparat Kelurahan		1.387.688.199,40	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						898.237.468,00					Aparat Kelurahan		1.387.688.199,40	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	233.366.068,00						36 Laporan	242.767.925,40	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						28.000.000,00							37.019.115,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	24 Laporan	28.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	37.019.115,00	Kelurahan Tanggung
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						437.552.200,00					Aparat Kelurahan		593.470.635,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						437.552.200,00					Aparat Kelurahan		593.470.635,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	14 Unit		14 Unit	14 Unit	83.352.200,00						14 Unit	64.567.755,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	11 Unit		11 Unit	11 Unit	73.615.900,00						11 Unit	45.327.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		Unit	1 Unit	257.000.000,00						1 Unit	460.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						3.947.500,00							1.816.500,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	5 Unit	3.947.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	1.816.500,00	Kelurahan Tanggung
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		14 Unit	5 Unit	3.947.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Unit	1.816.500,00	Kelurahan Tanggung
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.478.200,00							4.814.985,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	9 Unit	20.478.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Unit	4.814.985,00	Kelurahan Tanggung
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	9 Unit	20.478.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	4.814.985,00	Kelurahan Tanggung
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		18 Unit	9 Unit	20.478.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	4.814.985,00	Kelurahan Tanggung
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	9 Unit	20.478.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	4.814.985,00	Kelurahan Tanggung
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	9 Unit	20.478.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Unit	4.814.985,00	Kelurahan Tanggung
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit		11 Unit	9 Unit	20.478.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Unit	4.814.985,00	Kelurahan Tanggung
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						59.000.000,00							24.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Unit	1 Unit	59.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	24.000.000,00	Kelurahan Tanggung

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	59.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	24.000.000,00	Kelurahan Tanggung
194,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						2.288.771.940,00							2.282.365.913,05	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan						322.740.800,00							314.100.088,00	
			999.Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	100 %		100 %	100 %	322.740.800,00						100 %	314.100.088,00	
			999.Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan	100 %		100 %	100 %	322.740.800,00						100 %	314.100.088,00	
			999.Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan	100 %		100 %	100 %	322.740.800,00						100 %	314.100.088,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.036.632.640,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		2.052.223.195,05	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan trantibum yang sesuai dengan ketentuan						2.036.632.640,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		2.052.223.195,05	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.791.040,00						1 Dokumen	1.905.153.390,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	135.841.600,00						1 Laporan	147.069.805,05	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan						2.036.632.640,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		2.052.223.195,05	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.791.040,00						1 Dokumen	1.905.153.390,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	135.841.600,00						1 Laporan	147.069.805,05	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						10.200.000,00							6.063.750,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	10.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	6.063.750,00	Kelurahan Tanggung

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	10.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	6.063.750,00	Kelurahan Tanggung
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan		7 Laporan	3 Laporan	10.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	6.063.750,00	Kelurahan Tanggung
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	10.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	6.063.750,00	Kelurahan Tanggung
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan		12 Laporan	3 Laporan	10.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Tanggung || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	6.063.750,00	Kelurahan Tanggung
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						295.450.000,00							286.965.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	295.450.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	286.965.000,00	Kelurahan Tanggung
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	3 Dokumen	295.450.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	286.965.000,00	Kelurahan Tanggung
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	295.450.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	286.965.000,00	Kelurahan Tanggung

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	295.450.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	286.965.000,00	Kelurahan Tanggung
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di						252.139.300,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		230.142.718,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan						252.139.300,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		230.142.718,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	11.814.400,00						2 Dokumen	10.907.863,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	240.324.900,00						1 Laporan	219.234.855,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan						252.139.300,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		230.142.718,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.814.400,00						1 Dokumen	10.907.863,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	240.324.900,00						1 Laporan	219.234.855,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						1.090.800,00							71.338,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.090.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	71.338,00	Kelurahan Tanggung
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	1.090.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	71.338,00	Kelurahan Tanggung
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						16.000.000,00							21.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	16.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	21.000.000,00	Kelurahan Tanggung
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	16.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	21.000.000,00	Kelurahan Tanggung
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	16.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	21.000.000,00	Kelurahan Tanggung

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	16.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	21.000.000,00	Kelurahan Tanggung
195,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						7.215.262.500,00							7.433.918.602,00	
		Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan						942.076.341,00							968.294.460,00	
			1.Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi	7 Kelompok		7 Kelompok	7 Kelompok	942.076.341,00						7 Kelompok	968.294.460,00	
			2.Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		100 %	100 %	942.076.341,00						100 %	968.294.460,00	
			3.Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang	75 %		70 %	70 %	942.076.341,00						70 %	968.294.460,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						6.521.075.700,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		6.739.393.372,00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan						6.521.075.700,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		6.739.393.372,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	2 Lembaga K emasyarakat an		2 Lembaga K emasyarakat an	2 Lembaga K emasyarakat an	195.630.262,00						2 Lembaga K emasyarakat an	161.932.890,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas		11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	2.132.664.338,00						11 Pokmas / Ormas	2.356.733.022,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit		0 Unit	0 Unit	4.192.781.100,00						0 Unit	4.220.727.460,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di						26.926.841,00							18.287.640,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga K emasyarakat an		2 Lembaga K emasyarakat an	3 Lembaga K emasyarakat an	26.926.841,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Lembaga K emasyarakat an	18.287.640,00	Kelurahan Tanggung
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga K emasyarakat an		3 Lembaga K emasyarakat an	3 Lembaga K emasyarakat an	26.926.841,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Lembaga K emasyarakat an	18.287.640,00	Kelurahan Tanggung
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga K emasyarakat an		6 Lembaga K emasyarakat an	3 Lembaga K emasyarakat an	26.926.841,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Lembaga K emasyarakat an	18.287.640,00	Kelurahan Tanggung
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga K emasyarakat an		9 Lembaga K emasyarakat an	3 Lembaga K emasyarakat an	26.926.841,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Lembaga K emasyarakat an	18.287.640,00	Kelurahan Tanggung
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						825.000.000,00							630.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	31 Unit		31 Unit	33 Unit	825.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		31 Unit	630.000.000,00	Kelurahan Tanggung
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit		0 Unit	33 Unit	825.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Unit	630.000.000,00	Kelurahan Tanggung
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit		18 Unit	33 Unit	825.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	630.000.000,00	Kelurahan Tanggung
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit		28 Unit	33 Unit	825.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		28 Unit	630.000.000,00	Kelurahan Tanggung
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit		29 Unit	33 Unit	825.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		29 Unit	630.000.000,00	Kelurahan Tanggung
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit		33 Unit	33 Unit	825.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		33 Unit	630.000.000,00	Kelurahan Tanggung
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	47 Unit		47 Unit	33 Unit	825.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		47 Unit	630.000.000,00	Kelurahan Tanggung
	7.01.03.2.	Pemberdayaan Masyarakat di						29.925.000,00							268.438.590,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31 Pokmas / Ormas		31 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	29.925.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		31 Pokmas / Ormas	268.438.590,00	Kelurahan Tanggung
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas		9 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	29.925.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Pokmas / Ormas	268.438.590,00	Kelurahan Tanggung
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	29.925.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	268.438.590,00	Kelurahan Tanggung

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	29.925.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Pokmas / Ormas	268.438.590,00	Kelurahan Tanggung
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas		11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	29.925.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Pokmas / Ormas	268.438.590,00	Kelurahan Tanggung
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	29.925.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Pokmas / Ormas	268.438.590,00	Kelurahan Tanggung
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						694.186.800,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		694.525.230,00	
		Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat						694.186.800,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		694.525.230,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	38.602.900,00						1 Laporan	27.023.640,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Lembaga Kemasyarakatan		11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	655.583.900,00						11 Lembaga Kemasyarakatan	667.501.590,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						54.474.500,00							51.501.450,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Lembaga Kemasyarakatan		11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	54.474.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Lembaga Kemasyarakatan	51.501.450,00	Kelurahan Tanggung
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	54.474.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Lembaga Kemasyarakatan	51.501.450,00	Kelurahan Tanggung
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	54.474.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Lembaga Kemasyarakatan	51.501.450,00	Kelurahan Tanggung
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	54.474.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Lembaga Kemasyarakatan	51.501.450,00	Kelurahan Tanggung
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	54.474.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Lembaga Kemasyarakatan	51.501.450,00	Kelurahan Tanggung
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						5.750.000,00							66.780,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.750.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	66.780,00	Kelurahan Tanggung
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	5.750.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	66.780,00	Kelurahan Tanggung
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	5.750.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	66.780,00	Kelurahan Tanggung
		Kelurahan Bendo						1.227.550.976,00							1.222.696.666,00	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						1.227.550.976,00							1.222.696.666,00	
	7.01	**KECAMATAN**						1.227.550.976,00							1.222.696.666,00	
196,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						12.275.926.660,00							13.359.482.637,95	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						106.090.318,00							71.329.561,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	106.090.318,00						100 %	71.329.561,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.313.600,00					Aparat Kelurahan		13.974.870,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						13.313.600,00					Aparat Kelurahan		13.974.870,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	6.546.200,00						0 Dokumen	7.050.120,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	6.067.400,00						0 Laporan	6.189.750,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						931.200,00							610.260,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	10 Dokumen	931.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	610.260,00	Kelurahan Bendo
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen	10 Dokumen	931.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Dokumen	610.260,00	Kelurahan Bendo
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	931.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Dokumen	610.260,00	Kelurahan Bendo
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	931.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	610.260,00	Kelurahan Bendo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	10 Dokumen	931.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	610.260,00	Kelurahan Bendo
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	10 Dokumen	931.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	610.260,00	Kelurahan Bendo
	7.01.01.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.032.400,00							1.084.020,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	1.032.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	1.084.020,00	Kelurahan Bendo
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	1.032.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Laporan	1.084.020,00	Kelurahan Bendo
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	1.032.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	1.084.020,00	Kelurahan Bendo
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.032.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	1.084.020,00	Kelurahan Bendo
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	4 Laporan	1.032.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Laporan	1.084.020,00	Kelurahan Bendo
	7.01.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat						10.156.222.600,00					Aparat		10.811.728.007,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						10.156.222.600,00					Aparat Kelurahan		10.811.728.007,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	6.222.600,00						0 Laporan	5.549.817,00	
	7.01.01.2. 02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.206.800,00							532.140,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	0 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	1.206.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Bendo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Laporan	532.140,00	Kelurahan Bendo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	6 Laporan		6 Laporan	4 Laporan	1.206.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Bendo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Laporan	532.140,00	Kelurahan Bendo
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	1.206.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Bendo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	532.140,00	Kelurahan Bendo
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.206.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Bendo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	532.140,00	Kelurahan Bendo
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						104.911.800,00					Aparat Kelurahan		117.380.112,50	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						104.911.800,00					Aparat Kelurahan		117.380.112,50	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	100 Orang		100 Orang	100 Orang	104.911.800,00						100 Orang	117.380.112,50	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						11.200.000,00							13.155.030,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang		65 Orang	10 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		65 Orang	13.155.030,00	Kelurahan Bendo
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	10 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		100 Orang	13.155.030,00	Kelurahan Bendo
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang		14 Orang	10 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Orang	13.155.030,00	Kelurahan Bendo
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang		18 Orang	10 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Orang	13.155.030,00	Kelurahan Bendo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		30 Orang	10 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		30 Orang	13.155.030,00	Kelurahan Bendo
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang		80 Orang	10 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		80 Orang	13.155.030,00	Kelurahan Bendo
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang		12 Orang	10 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Orang	13.155.030,00	Kelurahan Bendo
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						386.588.974,00					Aparat		335.728.109,05	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						386.588.974,00					Aparat Kelurahan		335.728.109,05	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	98.394.400,00						1 Paket	103.646.025,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	52.069.733,00						1 Paket	36.992.970,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.153.541,00						1 Paket	20.500.305,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	62.445.500,00						1 Paket	64.575.121,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	54.756.800,00						1 Paket	39.965.038,05	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.912.800,00							1.721.790,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.912.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	1.721.790,00	Kelurahan Bendo
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.856.500,00							7.883.626,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	8.856.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	7.883.626,00	Kelurahan Bendo
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	8.856.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	7.883.626,00	Kelurahan Bendo
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	4 Paket	8.856.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	7.883.626,00	Kelurahan Bendo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	4 Paket	8.856.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	7.883.626,00	Kelurahan Bendo
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	8.856.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	7.883.626,00	Kelurahan Bendo
	7.01.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.317.200,00							632.310,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	1.317.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	632.310,00	Kelurahan Bendo
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	1.317.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	632.310,00	Kelurahan Bendo
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	1 Paket	1.317.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	632.310,00	Kelurahan Bendo
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.317.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	632.310,00	Kelurahan Bendo
	7.01.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.707.500,00							9.306.360,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	9.707.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	9.306.360,00	Kelurahan Bendo
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	9.707.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	9.306.360,00	Kelurahan Bendo
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	9.707.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	9.306.360,00	Kelurahan Bendo
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	2 Paket	9.707.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Paket	9.306.360,00	Kelurahan Bendo
	7.01.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.308.000,00							1.144.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.308.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	1.144.500,00	Kelurahan Bendo
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	1.308.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	1.144.500,00	Kelurahan Bendo
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						278.400.018,00					Aparat Kelurahan		98.520.455,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						278.400.018,00					Aparat Kelurahan		98.520.455,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	278.400.018,00						1 Unit	98.520.455,00	
	7.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						32.636.918,00							1.050.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		13 Unit	1 Unit	32.636.918,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	1.050.000,00	Kelurahan Bendo
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	32.636.918,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	1.050.000,00	Kelurahan Bendo
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	32.636.918,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	1.050.000,00	Kelurahan Bendo
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						898.237.468,00					Aparat Kelurahan		1.387.688.199,40	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						898.237.468,00					Aparat Kelurahan		1.387.688.199,40	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	233.366.068,00						36 Laporan	242.767.925,40	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						25.090.000,00							28.455.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	25.090.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	28.455.000,00	Kelurahan Bendo
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						437.552.200,00					Aparat Kelurahan		593.470.635,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						437.552.200,00					Aparat Kelurahan		593.470.635,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	14 Unit		14 Unit	14 Unit	83.352.200,00						14 Unit	64.567.755,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	11 Unit		11 Unit	11 Unit	73.615.900,00						11 Unit	45.327.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.570.800,00							2.086.770,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	2.570.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	2.086.770,00	Kelurahan Bendo
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		14 Unit	6 Unit	2.570.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Unit	2.086.770,00	Kelurahan Bendo
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.320.200,00							3.667.755,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	6.320.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Unit	3.667.755,00	Kelurahan Bendo
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		18 Unit	12 Unit	6.320.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	3.667.755,00	Kelurahan Bendo
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit		11 Unit	12 Unit	6.320.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Unit	3.667.755,00	Kelurahan Bendo
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	12 Unit	6.320.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	3.667.755,00	Kelurahan Bendo
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	12 Unit	6.320.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	3.667.755,00	Kelurahan Bendo
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	12 Unit	6.320.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Unit	3.667.755,00	Kelurahan Bendo
197,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						2.288.771.940,00							2.282.365.913,05	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan						285.628.860,00							277.264.155,00	
			999.Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	100 %		100 %	100 %	285.628.860,00						100 %	277.264.155,00	
			999.Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan	100 %		100 %	100 %	285.628.860,00						100 %	277.264.155,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan	100 %		100 %	100 %	285.628.860,00						100 %	277.264.155,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.036.632.640,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		2.052.223.195,05	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan trantibum yang sesuai dengan ketentuan						2.036.632.640,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		2.052.223.195,05	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.791.040,00						1 Dokumen	1.905.153.390,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	135.841.600,00						1 Laporan	147.069.805,05	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan						2.036.632.640,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		2.052.223.195,05	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.791.040,00						1 Dokumen	1.905.153.390,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	135.841.600,00						1 Laporan	147.069.805,05	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						4.725.000,00							3.344.250,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	8 Laporan	4.725.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Bendo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	3.344.250,00	Kelurahan Bendo
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan		3 Laporan	8 Laporan	4.725.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Bendo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	3.344.250,00	Kelurahan Bendo
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan		7 Laporan	8 Laporan	4.725.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Bendo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	3.344.250,00	Kelurahan Bendo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	8 Laporan	4.725.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Bendo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	3.344.250,00	Kelurahan Bendo
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan		12 Laporan	8 Laporan	4.725.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Bendo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	3.344.250,00	Kelurahan Bendo
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						251.025.360,00							249.850.020,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	12 Dokumen	251.025.360,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	249.850.020,00	Kelurahan Bendo
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	12 Dokumen	251.025.360,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	249.850.020,00	Kelurahan Bendo
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	251.025.360,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	249.850.020,00	Kelurahan Bendo
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	251.025.360,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	249.850.020,00	Kelurahan Bendo
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di						252.139.300,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		230.142.718,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan						252.139.300,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		230.142.718,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.814.400,00						1 Dokumen	10.907.863,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	240.324.900,00						1 Laporan	219.234.855,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan						252.139.300,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		230.142.718,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.814.400,00						1 Dokumen	10.907.863,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	240.324.900,00						1 Laporan	219.234.855,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						2.064.600,00							1.800.330,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.064.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	1.800.330,00	Kelurahan Bendo
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	2.064.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	1.800.330,00	Kelurahan Bendo
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						27.813.900,00							22.269.555,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	2 Laporan	27.813.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	22.269.555,00	Kelurahan Bendo
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	27.813.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	22.269.555,00	Kelurahan Bendo
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	27.813.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	22.269.555,00	Kelurahan Bendo
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	27.813.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	22.269.555,00	Kelurahan Bendo
198,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						7.215.262.500,00							7.433.918.602,00	
		Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan						835.831.798,00							874.102.950,00	
			1.Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi	7 Kelompok		7 Kelompok	7 Kelompok	835.831.798,00						7 Kelompok	874.102.950,00	
			2.Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		100 %	100 %	835.831.798,00						100 %	874.102.950,00	
			3.Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang	75 %		70 %	70 %	835.831.798,00						70 %	874.102.950,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						6.521.075.700,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		6.739.393.372,00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan						6.521.075.700,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		6.739.393.372,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	195.630.262,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	161.932.890,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas		11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	2.132.664.338,00						11 Pokmas / Ormas	2.356.733.022,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit		0 Unit	0 Unit	4.192.781.100,00						0 Unit	4.220.727.460,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di						23.999.800,00							16.234.890,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	23.999.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Lembaga Kemasyarakatan	16.234.890,00	Kelurahan Bendo
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	23.999.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Lembaga Kemasyarakatan	16.234.890,00	Kelurahan Bendo
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	23.999.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Lembaga Kemasyarakatan	16.234.890,00	Kelurahan Bendo
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	23.999.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Lembaga Kemasyarakatan	16.234.890,00	Kelurahan Bendo
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						458.100.000,00							548.100.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit		29 Unit	31 Unit	458.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		29 Unit	548.100.000,00	Kelurahan Bendo
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit		0 Unit	31 Unit	458.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Unit	548.100.000,00	Kelurahan Bendo
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit		28 Unit	31 Unit	458.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		28 Unit	548.100.000,00	Kelurahan Bendo
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit		18 Unit	31 Unit	458.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	548.100.000,00	Kelurahan Bendo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	47 Unit		47 Unit	31 Unit	458.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		47 Unit	548.100.000,00	Kelurahan Bendo
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit		33 Unit	31 Unit	458.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		33 Unit	548.100.000,00	Kelurahan Bendo
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	31 Unit		31 Unit	31 Unit	458.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		31 Unit	548.100.000,00	Kelurahan Bendo
	7.01.03.2.	Pemberdayaan Masyarakat di						295.299.998,00							235.672.290,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	295.299.998,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Pokmas / Ormas	235.672.290,00	Kelurahan Bendo
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas		9 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	295.299.998,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Pokmas / Ormas	235.672.290,00	Kelurahan Bendo
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	295.299.998,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	235.672.290,00	Kelurahan Bendo
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31 Pokmas / Ormas		31 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	295.299.998,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		31 Pokmas / Ormas	235.672.290,00	Kelurahan Bendo
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	295.299.998,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Pokmas / Ormas	235.672.290,00	Kelurahan Bendo
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas		11 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	295.299.998,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Pokmas / Ormas	235.672.290,00	Kelurahan Bendo
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						694.186.800,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		694.525.230,00	
		Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat						694.186.800,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		694.525.230,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	38.602.900,00						1 Laporan	27.023.640,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Lembaga Kemasyarakatan		11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	655.583.900,00						11 Lembaga Kemasyarakatan	667.501.590,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						53.783.000,00							73.360.770,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	53.783.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Lembaga Kemasyarakatan	73.360.770,00	Kelurahan Bendo
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	53.783.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Lembaga Kemasyarakatan	73.360.770,00	Kelurahan Bendo
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Lembaga Kemasyarakatan		11 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	53.783.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Lembaga Kemasyarakatan	73.360.770,00	Kelurahan Bendo
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	53.783.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Lembaga Kemasyarakatan	73.360.770,00	Kelurahan Bendo
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	53.783.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Lembaga Kemasyarakatan	73.360.770,00	Kelurahan Bendo
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						4.649.000,00							735.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	4.649.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	735.000,00	Kelurahan Bendo
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.649.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	735.000,00	Kelurahan Bendo
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	4.649.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	735.000,00	Kelurahan Bendo
		Kelurahan Kepanjenlor						1.172.032.821,00							1.172.149.462,05	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						1.172.032.821,00							1.172.149.462,05	
	7.01	**KECAMATAN**						1.172.032.821,00							1.172.149.462,05	
199,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						12.275.926.660,00							13.359.482.637,95	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						101.843.300,00							81.865.392,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	101.843.300,00						100 %	81.865.392,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.313.600,00					Aparat Kelurahan		13.974.870,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						13.313.600,00					Aparat Kelurahan		13.974.870,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	6.546.200,00						0 Dokumen	7.050.120,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	6.067.400,00						0 Laporan	6.189.750,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						910.000,00							1.464.330,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	10 Dokumen	910.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	1.464.330,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	10 Dokumen	910.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	1.464.330,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	910.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	1.464.330,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	910.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Dokumen	1.464.330,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen	10 Dokumen	910.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Dokumen	1.464.330,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	10 Dokumen	910.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	1.464.330,00	Kelurahan Kepanjenlor
	7.01.01.2.[illegible]	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						910.000,00							739.200,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	910.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Laporan	739.200,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	910.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	739.200,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	910.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	739.200,00	Kelurahan Kepanjenlor

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	910.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	739.200,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	910.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Laporan	739.200,00	Kelurahan Kepanjenlor
	7.01.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat						10.156.222.600,00					Aparat		10.811.728.007,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						10.156.222.600,00					Aparat Kelurahan		10.811.728.007,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	6.222.600,00						0 Laporan	5.549.817,00	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						877.200,00							1.512.147,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	0 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	877.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Laporan	1.512.147,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	6 Laporan		6 Laporan	4 Laporan	877.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Laporan	1.512.147,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	877.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	1.512.147,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	877.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	1.512.147,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						104.911.800,00					Aparat Kelurahan		117.380.112,50	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						104.911.800,00					Aparat Kelurahan		117.380.112,50	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	100 Orang		100 Orang	100 Orang	104.911.800,00						100 Orang	117.380.112,50	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						11.200.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang		12 Orang	14 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Orang	10.500.000,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang		18 Orang	14 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Orang	10.500.000,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang		14 Orang	14 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Orang	10.500.000,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	14 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		100 Orang	10.500.000,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang		65 Orang	14 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		65 Orang	10.500.000,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang		80 Orang	14 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		80 Orang	10.500.000,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		30 Orang	14 Orang	11.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		30 Orang	10.500.000,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						386.588.974,00					Aparat		335.728.109,05	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						386.588.974,00					Aparat Kelurahan		335.728.109,05	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	98.394.400,00						1 Paket	103.646.025,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	52.069.733,00						1 Paket	36.992.970,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.153.541,00						1 Paket	20.500.305,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	62.445.500,00						1 Paket	64.575.121,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	54.756.800,00						1 Paket	39.965.038,05	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						728.000,00							1.151.850,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	728.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	1.151.850,00	Kelurahan Kepanjenlor
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.844.800,00							8.787.975,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	6.844.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	8.787.975,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	6.844.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	8.787.975,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.844.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	8.787.975,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	4 Paket	6.844.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	8.787.975,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	4 Paket	6.844.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	8.787.975,00	Kelurahan Kepanjenlor
	7.01.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.806.400,00							4.123.980,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.806.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	4.123.980,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	3.806.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	4.123.980,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	1 Paket	3.806.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	4.123.980,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	3.806.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	4.123.980,00	Kelurahan Kepanjenlor

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.364.000,00							2.955.960,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	12 Paket	3.364.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	2.955.960,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	12 Paket	3.364.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	2.955.960,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	3.364.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	2.955.960,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	3.364.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Paket	2.955.960,00	Kelurahan Kepanjenlor
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.423.200,00							1.860.390,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.423.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	1.860.390,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	1.423.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	1.860.390,00	Kelurahan Kepanjenlor
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						278.400.018,00					Aparat Kelurahan		98.520.455,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						278.400.018,00					Aparat Kelurahan		98.520.455,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	278.400.018,00						1 Unit	98.520.455,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						26.225.700,00							186.900,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		13 Unit	1 Unit	26.225.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	186.900,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	26.225.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	186.900,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	26.225.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	186.900,00	Kelurahan Kepanjenlor

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						898.237.468,00					Aparat Kelurahan		1.387.688.199,40	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						898.237.468,00					Aparat Kelurahan		1.387.688.199,40	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	233.366.068,00						36 Laporan	242.767.925,40	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36.000.000,00							37.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	24 Laporan	36.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	37.800.000,00	Kelurahan Kepanjenlor
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						437.552.200,00					Aparat Kelurahan		593.470.635,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						437.552.200,00					Aparat Kelurahan		593.470.635,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	14 Unit		14 Unit	14 Unit	83.352.200,00						14 Unit	64.567.755,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	11 Unit		11 Unit	11 Unit	73.615.900,00						11 Unit	45.327.450,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.915.800,00							1.696.800,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		14 Unit	1 Unit	1.915.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Unit	1.696.800,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	1 Unit	1.915.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	1.696.800,00	Kelurahan Kepanjenlor
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.378.200,00							8.907.360,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	4 Unit	8.378.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	8.907.360,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit		11 Unit	4 Unit	8.378.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Unit	8.907.360,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	4 Unit	8.378.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Unit	8.907.360,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		18 Unit	4 Unit	8.378.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	8.907.360,00	Kelurahan Kepanjenlor

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	4 Unit	8.378.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Unit	8.907.360,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	8.378.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	8.907.360,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						437.552.200,00					Aparat Kelurahan		593.470.635,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	170.000,00						-	178.500,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						170.000,00							178.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	170.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		-	178.500,00	Kelurahan Kepanjenlor
200,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						2.288.771.940,00							2.282.365.913,05	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan						255.819.600,00							253.433.755,05	
			999.Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	100 %		100 %	100 %	255.819.600,00						100 %	253.433.755,05	
			999.Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan	100 %		100 %	100 %	255.819.600,00						100 %	253.433.755,05	
			999.Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan	100 %		100 %	100 %	255.819.600,00						100 %	253.433.755,05	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.036.632.640,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		2.052.223.195,05	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan trantibum yang sesuai dengan ketentuan						2.036.632.640,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		2.052.223.195,05	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.791.040,00						1 Dokumen	1.905.153.390,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	135.841.600,00						1 Laporan	147.069.805,05	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan						2.036.632.640,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		2.052.223.195,05	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.791.040,00						1 Dokumen	1.905.153.390,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	135.841.600,00						1 Laporan	147.069.805,05	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						8.277.600,00							8.166.355,05	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	8.277.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	8.166.355,05	Kelurahan Kepanjenlor
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan		12 Laporan	3 Laporan	8.277.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	8.166.355,05	Kelurahan Kepanjenlor
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	8.277.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	8.166.355,05	Kelurahan Kepanjenlor
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	8.277.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	8.166.355,05	Kelurahan Kepanjenlor
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan		7 Laporan	3 Laporan	8.277.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan Kepanjenlor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	8.166.355,05	Kelurahan Kepanjenlor
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						225.550.000,00							226.223.655,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	225.550.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	226.223.655,00	Kelurahan Kepanjenlor

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	225.550.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	226.223.655,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	225.550.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	226.223.655,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	225.550.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	226.223.655,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di						252.139.300,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		230.142.718,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan						252.139.300,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		230.142.718,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.814.400,00						1 Dokumen	10.907.863,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	240.324.900,00						1 Laporan	219.234.855,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan						252.139.300,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		230.142.718,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.814.400,00						1 Dokumen	10.907.863,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	240.324.900,00						1 Laporan	219.234.855,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						1.992.000,00							2.243.745,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.992.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	2.243.745,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	1.992.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	2.243.745,00	Kelurahan Kepanjenlor
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						20.000.000,00							16.800.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	16.800.000,00	Kelurahan Kepanjenlor

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	16.800.000,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	16.800.000,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	16.800.000,00	Kelurahan Kepanjenlor
201,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						7.215.262.500,00							7.433.918.602,00	
		Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan						813.459.921,00							836.850.315,00	
			1.Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi	7 Kelompok		7 Kelompok	7 Kelompok	813.459.921,00						7 Kelompok	836.850.315,00	
			2.Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		100 %	100 %	813.459.921,00						100 %	836.850.315,00	
			3.Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang	75 %		70 %	70 %	813.459.921,00						70 %	836.850.315,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						6.521.075.700,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		6.739.393.372,00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan						6.521.075.700,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		6.739.393.372,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	2 Lembaga K emasyarakat an		2 Lembaga K emasyarakat an	2 Lembaga K emasyarakat an	195.630.262,00						2 Lembaga K emasyarakat an	161.932.890,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas		11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	2.132.664.338,00						11 Pokmas / Ormas	2.356.733.022,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit		0 Unit	0 Unit	4.192.781.100,00						0 Unit	4.220.727.460,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di						14.381.421,00							13.253.415,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga K emasyarakat an		2 Lembaga K emasyarakat an	3 Lembaga K emasyarakat an	14.381.421,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Lembaga K emasyarakat an	13.253.415,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga K emasyarakat an		3 Lembaga K emasyarakat an	3 Lembaga K emasyarakat an	14.381.421,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Lembaga K emasyarakat an	13.253.415,00	Kelurahan Kepanjenlor

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	14.381.421,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Lembaga Kemasyarakatan	13.253.415,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	14.381.421,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Lembaga Kemasyarakatan	13.253.415,00	Kelurahan Kepanjenlor
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						600.000.000,00							514.500.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	31 Unit		31 Unit	28 Unit	600.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		31 Unit	514.500.000,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit		33 Unit	28 Unit	600.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		33 Unit	514.500.000,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit		28 Unit	28 Unit	600.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		28 Unit	514.500.000,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit		29 Unit	28 Unit	600.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		29 Unit	514.500.000,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	47 Unit		47 Unit	28 Unit	600.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		47 Unit	514.500.000,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit		0 Unit	28 Unit	600.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Unit	514.500.000,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit		18 Unit	28 Unit	600.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	514.500.000,00	Kelurahan Kepanjenlor
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						139.970.000,00							251.002.500,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31 Pokmas / Ormas		31 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	139.970.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		31 Pokmas / Ormas	251.002.500,00	Kelurahan Kepanjenlor

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas		9 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	139.970.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Pokmas / Ormas	251.002.500,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	139.970.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	251.002.500,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	139.970.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Pokmas / Ormas	251.002.500,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	139.970.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Pokmas / Ormas	251.002.500,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas		11 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	139.970.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Pokmas / Ormas	251.002.500,00	Kelurahan Kepanjenlor
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						694.186.800,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		694.525.230,00	
		Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat						694.186.800,00					Aparat dan Masyarakat Kelurahan		694.525.230,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	38.602.900,00						1 Laporan	27.023.640,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Lembaga Kemasyarakatan		11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	655.583.900,00						11 Lembaga Kemasyarakatan	667.501.590,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						55.267.500,00							55.023.255,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	55.267.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Lembaga Kemasyarakatan	55.023.255,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Lembaga Kemasyarakatan		11 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	55.267.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Lembaga Kemasyarakatan	55.023.255,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	55.267.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Lembaga Kemasyarakatan	55.023.255,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	55.267.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Lembaga Kemasyarakatan	55.023.255,00	Kelurahan Kepanjenlor

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	55.267.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Lembaga Kemasyarakatan	55.023.255,00	Kelurahan Kepanjenlor
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						3.841.000,00							3.071.145,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	3.841.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	3.071.145,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	3.841.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	3.071.145,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.841.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Kepanjenkidul || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	3.071.145,00	Kelurahan Kepanjenlor
		Kecamatan Sukorejo						14.830.766.701,00							14.024.199.396,00	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						14.830.766.701,00							14.024.199.396,00	
	7.01	**KECAMATAN**						14.830.766.701,00							14.024.199.396,00	
202,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						12.403.474.602,00							13.370.942.980,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						11.520.849.928,00							12.698.699.396,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	11.520.849.928,00						100 %	12.698.699.396,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.934.500,00					ASN Kecamatan Sukorejo		15.038.386,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						21.934.500,00					ASN Kecamatan Sukorejo		15.038.386,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.787.100,00						3 Dokumen	6.878.678,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	10.399.400,00						7 Laporan	7.785.708,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.668.400,00							1.250.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	2.668.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	1.250.000,00	Kecamatan Sukorejo
	7.01.01.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.668.400,00							1.150.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	2.668.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	1.150.000,00	Kecamatan Sukorejo
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.984.140.400,00					ASN Kecamatan Sukorejo		10.156.281.896,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						9.984.140.400,00					ASN Kecamatan Sukorejo		10.156.281.896,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.140.400,00						1 Laporan	7.232.500,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan		78 Orang/bulan	78 Orang/bulan	9.975.000.000,00						78 Orang/bulan	10.149.049.396,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.975.000.000,00							10.149.049.396,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan		78 Orang/bulan	92 Orang/bulan	9.975.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		78 Orang/bulan	10.149.049.396,00	Kecamatan Sukorejo
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.500.000,00							1.150.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	1.500.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Laporan	1.150.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	9 Laporan	1.500.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	1.150.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	9 Laporan	1.500.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	1.150.000,00	Kecamatan Sukorejo
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.000.000,00					ASN Kecamatan Sukorejo		1.000.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat						1.000.000,00					ASN Kecamatan Sukorejo		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan		0 Laporan	10 Laporan	1.000.000,00						10 Laporan	1.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Laporan	1.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	1.000.000,00	Kecamatan Sukorejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan		9 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Laporan	1.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						2.000.000,00					ASN Kecamatan Sukorejo		2.500.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah						2.000.000,00					ASN Kecamatan Sukorejo		2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00						1 Dokumen	2.500.000,00	
	7.01.01.2.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi						2.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		0 Dokumen	14 Dokumen	2.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	2.500.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	14 Dokumen	2.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	2.500.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	14 Dokumen	2.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	2.500.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	2.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Dokumen	2.500.000,00	Kecamatan Sukorejo
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						56.663.000,00					ASN Kecamatan Sukorejo		20.750.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						56.663.000,00					ASN Kecamatan Sukorejo		20.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	40 Orang		0 Orang	40 Orang	40.425.000,00						40 Orang	8.400.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket		1 Paket	1 Paket	16.238.000,00						1 Paket	12.350.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						16.238.000,00							12.350.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	16.238.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	12.350.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	16.238.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	12.350.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		2 Paket	3 Paket	16.238.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	12.350.000,00	Kecamatan Sukorejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						40.425.000,00							8.400.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang		40 Orang	125 Orang	40.425.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		40 Orang	8.400.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang		0 Orang	125 Orang	40.425.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		40 Orang	8.400.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	125 Orang		125 Orang	125 Orang	40.425.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		125 Orang	8.400.000,00	Kecamatan Sukorejo
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						429.408.025,00					ASN Kecamatan Sukorejo		384.150.023,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						429.408.025,00					ASN Kecamatan Sukorejo		384.150.023,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.972.000,00						1 Dokumen	14.764.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	157.584.500,00						1 Paket	140.198.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	41.976.325,00						1 Paket	38.847.625,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	24.503.400,00						Paket	23.376.198,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.139.200,00						1 Paket	88.616.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	37.208.300,00						2 Paket	33.687.400,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.103.600,00							10.100.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.103.600,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		Paket	10.100.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Pa ket		1 Paket	1 Pa ket	10.103.600,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	10.100.000,00	Kecamatan Sukorejo
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						32.525.800,00							32.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	8 Paket	32.525.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	32.500.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	32.525.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Paket	32.500.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	8 Paket	32.525.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	32.500.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	8 Paket	32.525.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	32.500.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	8 Paket	32.525.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	32.500.000,00	Kecamatan Sukorejo
	7.01.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						21.331.400,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	3 Paket	21.331.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	20.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	21.331.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	20.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	3 Paket	21.331.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	20.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
	7.01.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						69.318.100,00							48.700.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	69.318.100,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	48.700.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	69.318.100,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	48.700.000,00	Kecamatan Sukorejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	2 Pa ket	69.318.100,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		15 Paket	48.700.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	69.318.100,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	48.700.000,00	Kecamatan Sukorejo
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						17.350.800,00							17.350.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	17.350.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	17.350.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	17.350.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	17.350.000,00	Kecamatan Sukorejo
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.754.000,00							4.700.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	24 Dokumen	2.754.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	4.700.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	24 Dokumen	2.754.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	4.700.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	2.754.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Dokumen	4.700.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	24 Dokumen	2.754.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	4.700.000,00	Kecamatan Sukorejo
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	40.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	40.000.000,00	Kecamatan Sukorejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						220.849.223,00					ASN Kecamatan Sukorejo		151.365.300,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						220.849.223,00					ASN Kecamatan Sukorejo		151.365.300,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	20.424.400,00						2 Unit	10.500.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0 Unit	2 Unit	200.424.823,00						2 Unit	140.865.300,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						20.424.400,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.424.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	10.500.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		53 Unit	1 Unit	20.424.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	10.500.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	1 Unit	20.424.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Unit	10.500.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	1 Unit	20.424.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	10.500.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit		0 Unit	1 Unit	20.424.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Unit	10.500.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	20.424.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	10.500.000,00	Kecamatan Sukorejo
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.795.400,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0 Unit	2 Unit	50.795.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	40.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	50.795.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	40.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	50.795.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	40.000.000,00	Kecamatan Sukorejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	2 Unit	50.795.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	40.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						934.801.629,00					ASN Kecamatan Sukorejo		1.137.111.403,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						934.801.629,00					ASN Kecamatan Sukorejo		1.137.111.403,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	176.680.701,00						12 Laporan	177.061.403,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	758.120.928,00						12 Laporan	960.050.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						758.120.928,00							960.050.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	758.120.928,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	960.050.000,00	Kecamatan Sukorejo
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						752.677.825,00					ASN Kecamatan Sukorejo		1.502.745.972,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						752.677.825,00					ASN Kecamatan Sukorejo		1.502.745.972,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	74.007.300,00						1 Unit	69.114.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	24.761.900,00						1 Unit	24.750.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	10 Unit		10 Unit	10 Unit	82.426.600,00						10 Unit	65.588.383,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		0 Unit	1 Unit	571.482.025,00						1 Unit	1.343.292.989,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan						24.761.900,00							24.750.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	1 Unit	24.761.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	24.750.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		0 Unit	1 Unit	24.761.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	24.750.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		0 Unit	1 Unit	24.761.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	24.750.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	24.761.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	24.750.000,00	Kecamatan Sukorejo
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						51.383.300,00							51.350.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		0 Unit	9 Unit	51.383.300,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	51.350.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	51.383.300,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Unit	51.350.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	9 Unit	51.383.300,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	51.350.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	9 Unit	51.383.300,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	51.350.000,00	Kecamatan Sukorejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	9 Unit	51.383.300,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	51.350.000,00	Kecamatan Sukorejo
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						22.929.400,00							23.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		18 Unit	10 Unit	22.929.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	23.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	22.929.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Unit	23.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	10 Unit	22.929.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Unit	23.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						350.219.500,00							1.230.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit		18 Unit	18 Unit	350.219.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	1.230.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	18 Unit	350.219.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	1.230.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	18 Unit	350.219.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	1.230.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		9 Unit	18 Unit	350.219.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Unit	1.230.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
203,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						2.201.530.000,00							1.945.753.304,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan						245.286.400,00							128.700.000,00	
			1.Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	100 %		100 %	100 %	245.286.400,00						100 %	128.700.000,00	
			2.Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan	100 %		100 %	100 %	245.286.400,00						100 %	128.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			3.Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	100 %		100 %	100 %	245.286.400,00						100 %	128.700.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.836.235.200,00					Masyarakat Kecamatan Sukorejo		1.644.660.400,00	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan						1.836.235.200,00					Masyarakat Kecamatan Sukorejo		1.644.660.400,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.681.149.900,00						1 Dokumen	1.521.431.200,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	155.085.300,00						1 Laporan	123.229.200,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						78.436.500,00							78.450.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	78.436.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	78.450.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	78.436.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	78.450.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14 Laporan		14 Laporan	2 Laporan	78.436.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Laporan	78.450.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	78.436.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	78.450.000,00	Kecamatan Sukorejo
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						54.999.900,00							8.900.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	54.999.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	8.900.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	12 Dokumen	54.999.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	8.900.000,00	Kecamatan Sukorejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	54.999.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	8.900.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	54.999.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Dokumen	8.900.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di						365.294.800,00					Masyarakat Kecamatan Sukorejo		301.092.904,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan						365.294.800,00					Masyarakat Kecamatan Sukorejo		301.092.904,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.196.800,00						1 Dokumen	43.943.304,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	343.098.000,00						1 Laporan	257.149.600,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						11.850.000,00							11.850.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	11.850.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	11.850.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	11.850.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	11.850.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	14 Dokumen		14 Dokumen	2 Dokumen	11.850.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Dokumen	11.850.000,00	Kecamatan Sukorejo
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						100.000.000,00							29.500.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan		14 Laporan	7 Laporan	100.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Laporan	29.500.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	7 Laporan	100.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	29.500.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	7 Laporan	100.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	29.500.000,00	Kecamatan Sukorejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	100.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	29.500.000,00	Kecamatan Sukorejo
204,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						9.013.637.798,00							6.885.775.980,00	
		Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan						3.011.961.973,00							1.155.650.000,00	
			1.Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi	8 Kelompok		8 Kelompok	8 Kelompok	3.011.961.973,00						8 Kelompok	1.155.650.000,00	
			2.Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		100 %	100 %	3.011.961.973,00						100 %	1.155.650.000,00	
			3.Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang	100 %		100 %	100 %	3.011.961.973,00						100 %	1.155.650.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.226.459.720,00					Masyarakat Kecamatan Sukorejo		6.170.317.380,00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif						8.226.459.720,00					Masyarakat Kecamatan Sukorejo		6.170.317.380,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	1 Lembaga K emasyarakat an		1 Lembaga K emasyarakat an	1 Lembaga K emasyarakat an	252.577.300,00						1 Lembaga K emasyarakat an	185.515.628,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	1.735.925.085,00						12 Pokmas / Ormas	1.667.400.552,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit	12 Unit	6.237.957.335,00						12 Unit	4.317.401.200,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di						53.536.800,00							13.800.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga K emasyarakat an		7 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	53.536.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Lembaga K emasyarakat an	13.800.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarak a tan		12 Lembaga Kemasyaraka tan	4 Lembaga K emasyarakat an	53.536.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Lembaga Kemasyarak a tan	13.800.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an		1 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	53.536.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Lembaga K emasyarakat an	13.800.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Lembaga Kemasyarak a tan		17 Lembaga Kemasyaraka tan	4 Lembaga K emasyarakat an	53.536.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		17 Lembaga Kemasyarak a tan	13.800.000,00	Kecamatan Sukorejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	53.536.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Lembaga Kemasyarakatan	13.800.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	53.536.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Lembaga Kemasyarakatan	13.800.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	53.536.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Lembaga Kemasyarakatan	13.800.000,00	Kecamatan Sukorejo
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1.965.589.535,00							333.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	7 Unit	1.965.589.535,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	333.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit	7 Unit	1.965.589.535,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Unit	333.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	7 Unit	1.965.589.535,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	333.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	51 Unit		51 Unit	7 Unit	1.965.589.535,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		51 Unit	333.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit	7 Unit	1.965.589.535,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	333.000.000,00	Kecamatan Sukorejo
	7.01.03.2.	Pemberdayaan Masyarakat di						783.987.760,00							633.950.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas		8 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	783.987.760,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Pokmas / Ormas	633.950.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	783.987.760,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Pokmas / Ormas	633.950.000,00	Kecamatan Sukorejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	783.987.760,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Pokmas / Ormas	633.950.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	783.987.760,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	633.950.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	783.987.760,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Pokmas / Ormas	633.950.000,00	Kecamatan Sukorejo
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						787.178.078,00					Masyarakat Kecamatan Sukorejo		715.458.600,00	
		Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat						787.178.078,00					Masyarakat Kecamatan Sukorejo		715.458.600,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	56.318.700,00						1 Laporan	22.725.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga K emasyarakat an		4 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	730.859.378,00						4 Lembaga K emasyarakat an	692.733.600,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						183.847.078,00							164.600.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga K emasyarakat an		7 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	183.847.078,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Lembaga K emasyarakat an	164.600.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga K emasyarakat an		8 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	183.847.078,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Lembaga K emasyarakat an	164.600.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga K emasyarakat an		4 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	183.847.078,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Lembaga K emasyarakat an	164.600.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga K emasyarakat an		5 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	183.847.078,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Lembaga K emasyarakat an	164.600.000,00	Kecamatan Sukorejo
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						25.000.800,00							10.300.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	25.000.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	10.300.000,00	Kecamatan Sukorejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7 Laporan		7 Laporan	3 Laporan	25.000.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	10.300.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	25.000.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	10.300.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	25.000.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	10.300.000,00	Kecamatan Sukorejo
		Kelurahan Pakunden						1.518.151.925,00							1.410.225.727,00	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						1.518.151.925,00							1.410.225.727,00	
	7.01	**KECAMATAN**						1.518.151.925,00							1.410.225.727,00	
205,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						12.403.474.602,00							13.370.942.980,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						142.994.925,00							112.941.927,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	142.994.925,00						100 %	112.941.927,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.934.500,00					ASN Kelurahan Pakunden		15.038.386,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						21.934.500,00					ASN Kelurahan Pakunden		15.038.386,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.787.100,00						3 Dokumen	6.878.678,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	10.399.400,00						7 Laporan	7.785.708,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						945.000,00							630.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	945.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	630.000,00	Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						720.000,00							1.260.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	720.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	1.260.000,00	Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.984.140.400,00					ASN Kelurahan Pakunden		10.156.281.896,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						9.984.140.400,00					ASN Kelurahan Pakunden		10.156.281.896,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.140.400,00						1 Laporan	7.232.500,00	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						945.000,00							1.260.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	9 Laporan	945.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	1.260.000,00	Kelurahan Pakunden
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	9 Laporan	945.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	1.260.000,00	Kelurahan Pakunden
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	945.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Laporan	1.260.000,00	Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						429.408.025,00					ASN Kelurahan Pakunden		384.150.023,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						429.408.025,00					ASN Kelurahan Pakunden		384.150.023,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.024.300,00						1 Dokumen	4.660.200,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	157.584.500,00						1 Paket	140.198.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	41.976.325,00						1 Paket	38.847.625,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	24.503.400,00						Paket	23.376.198,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.139.200,00						1 Paket	88.616.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	37.208.300,00						1 Paket	33.687.400,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.400.500,00							2.615.200,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.400.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		Paket	2.615.200,00	Kelurahan Pakunden
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.400.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	2.615.200,00	Kelurahan Pakunden

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.463.500,00							10.643.500,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	9.463.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Paket	10.643.500,00	Kelurahan Pakunden
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	8 Paket	9.463.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	10.643.500,00	Kelurahan Pakunden
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	8 Paket	9.463.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	10.643.500,00	Kelurahan Pakunden
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	8 Paket	9.463.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	10.643.500,00	Kelurahan Pakunden
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	8 Paket	9.463.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	10.643.500,00	Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.318.700,00							4.787.100,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	3 Paket	3.318.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	4.787.100,00	Kelurahan Pakunden
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	3.318.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	4.787.100,00	Kelurahan Pakunden
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	3 Paket	3.318.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	4.787.100,00	Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						16.500.000,00							11.520.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	16.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	11.520.000,00	Kelurahan Pakunden
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	2 Paket	16.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		15 Paket	11.520.000,00	Kelurahan Pakunden

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	16.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	11.520.000,00	Kelurahan Pakunden
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	16.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	11.520.000,00	Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.756.500,00							2.657.300,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.756.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	2.657.300,00	Kelurahan Pakunden
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	2.756.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	2.657.300,00	Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.155.000,00							720.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.155.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	720.000,00	Kelurahan Pakunden
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	1.155.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	720.000,00	Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						220.849.223,00					ASN Kelurahan Pakunden		151.365.300,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						220.849.223,00					ASN Kelurahan Pakunden		151.365.300,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0 Unit	2 Unit	200.424.823,00						2 Unit	140.865.300,00	
	7.01.01.2.07.0016	Pengadaan Peralatan dan Mesin						18.589.200,00							28.115.500,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	18.589.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	28.115.500,00	Kelurahan Pakunden
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0 Unit	2 Unit	18.589.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	28.115.500,00	Kelurahan Pakunden
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	18.589.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	28.115.500,00	Kelurahan Pakunden

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	2 Unit	18.589.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	28.115.500,00	Kelurahan Pakunden
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						934.801.629,00					ASN Kelurahan Pakunden		1.137.111.403,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						934.801.629,00					ASN Kelurahan Pakunden		1.137.111.403,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	176.680.701,00						12 Laporan	177.061.403,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						26.023.925,00							25.902.627,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	12 Laporan	26.023.925,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Laporan	25.902.627,00	Kelurahan Pakunden
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	12 Laporan	26.023.925,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	25.902.627,00	Kelurahan Pakunden
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	12 Laporan	26.023.925,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	25.902.627,00	Kelurahan Pakunden
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	12 Laporan	26.023.925,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Laporan	25.902.627,00	Kelurahan Pakunden
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	26.023.925,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	25.902.627,00	Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						752.677.825,00					ASN Kelurahan Pakunden		1.502.745.972,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						752.677.825,00					ASN Kelurahan Pakunden		1.502.745.972,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	74.007.300,00						1 Unit	69.114.600,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	10 Unit		10 Unit	10 Unit	82.426.600,00						10 Unit	65.588.383,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		0 Unit	1 Unit	571.482.025,00						1 Unit	1.343.292.989,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						4.995.000,00							5.490.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	9 Unit	4.995.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	5.490.000,00	Kelurahan Pakunden
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	4.995.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Unit	5.490.000,00	Kelurahan Pakunden
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	9 Unit	4.995.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	5.490.000,00	Kelurahan Pakunden
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	9 Unit	4.995.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	5.490.000,00	Kelurahan Pakunden
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		0 Unit	9 Unit	4.995.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	5.490.000,00	Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.096.100,00							8.600.700,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	7.096.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Unit	8.600.700,00	Kelurahan Pakunden
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		18 Unit	10 Unit	7.096.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	8.600.700,00	Kelurahan Pakunden
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	10 Unit	7.096.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Unit	8.600.700,00	Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						49.031.500,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	49.031.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Pakunden
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	49.031.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Pakunden

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit		18 Unit	1 Unit	49.031.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Pakunden
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		9 Unit	1 Unit	49.031.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Pakunden
206,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						2.201.530.000,00							1.945.753.304,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan						355.629.200,00							313.425.600,00	
			1.Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	100 %		100 %	100 %	355.629.200,00						100 %	313.425.600,00	
			2.Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan	100 %		100 %	100 %	355.629.200,00						100 %	313.425.600,00	
			3.Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	100 %		100 %	100 %	355.629.200,00						100 %	313.425.600,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.836.235.200,00					ASN dan Masyarakat Kelurahan Pakunden		1.644.660.400,00	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan						1.836.235.200,00					ASN dan Masyarakat Kelurahan Pakunden		1.644.660.400,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.681.149.900,00						1 Dokumen	1.521.431.200,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	155.085.300,00						1 Laporan	123.229.200,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						12.025.000,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		4 Laporan	14 Laporan	12.025.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	7.500.000,00	Kelurahan Pakunden

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	14 Laporan	12.025.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	7.500.000,00	Kelurahan Pakunden
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	14 Laporan	12.025.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	7.500.000,00	Kelurahan Pakunden
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	12.025.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Laporan	7.500.000,00	Kelurahan Pakunden
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						281.730.000,00							265.301.400,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	14 Dokumen	281.730.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	265.301.400,00	Kelurahan Pakunden
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	14 Dokumen	281.730.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	265.301.400,00	Kelurahan Pakunden
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	281.730.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Dokumen	265.301.400,00	Kelurahan Pakunden
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	14 Dokumen	281.730.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	265.301.400,00	Kelurahan Pakunden
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di						365.294.800,00					Masyarakat Kelurahan Pakunden		301.092.904,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan						365.294.800,00					Masyarakat Kelurahan Pakunden		301.092.904,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.196.800,00						1 Dokumen	43.943.304,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	343.098.000,00						1 Laporan	257.149.600,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						1.174.200,00							724.200,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.174.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	724.200,00	Kelurahan Pakunden
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	14 Dokumen		14 Dokumen	2 Dokumen	1.174.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Dokumen	724.200,00	Kelurahan Pakunden
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	1.174.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	724.200,00	Kelurahan Pakunden
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						60.700.000,00							39.900.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	60.700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Laporan	39.900.000,00	Kelurahan Pakunden
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan		7 Laporan	14 Laporan	60.700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	39.900.000,00	Kelurahan Pakunden
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	14 Laporan	60.700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	39.900.000,00	Kelurahan Pakunden
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	14 Laporan	60.700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	39.900.000,00	Kelurahan Pakunden
207,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						9.013.637.798,00							6.885.775.980,00	
		Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan						1.018.582.800,00							982.598.200,00	
			1.Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi	8 Kelompok		8 Kelompok	8 Kelompok	1.018.582.800,00						8 Kelompok	982.598.200,00	
			2.Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		100 %	100 %	1.018.582.800,00						100 %	982.598.200,00	
			3.Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang	100 %		100 %	100 %	1.018.582.800,00						100 %	982.598.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.226.459.720,00					Masyarakat Kelurahan Pakunden		6.170.317.380,00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif						8.226.459.720,00					Masyarakat Kelurahan Pakunden		6.170.317.380,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	252.577.300,00						1 Lembaga Kemasyarakatan	185.515.628,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1.735.925.085,00						7 Pokmas / Ormas	1.667.400.552,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	51 Unit		51 Unit	51 Unit	6.237.957.335,00						51 Unit	4.317.401.200,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di						29.812.200,00							21.164.300,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	29.812.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Lembaga Kemasyarakatan	21.164.300,00	Kelurahan Pakunden
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	29.812.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Lembaga Kemasyarakatan	21.164.300,00	Kelurahan Pakunden
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	29.812.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Lembaga Kemasyarakatan	21.164.300,00	Kelurahan Pakunden
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	29.812.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Lembaga Kemasyarakatan	21.164.300,00	Kelurahan Pakunden
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Lembaga Kemasyarakatan		17 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	29.812.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		17 Lembaga Kemasyarakatan	21.164.300,00	Kelurahan Pakunden
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	29.812.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Lembaga Kemasyarakatan	21.164.300,00	Kelurahan Pakunden
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	29.812.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Lembaga Kemasyarakatan	21.164.300,00	Kelurahan Pakunden
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						833.425.000,00							738.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	12 Unit	833.425.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	738.900.000,00	Kelurahan Pakunden
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit	12 Unit	833.425.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Unit	738.900.000,00	Kelurahan Pakunden
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	51 Unit		51 Unit	12 Unit	833.425.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		51 Unit	738.900.000,00	Kelurahan Pakunden
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit	12 Unit	833.425.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	738.900.000,00	Kelurahan Pakunden
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	12 Unit	833.425.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	738.900.000,00	Kelurahan Pakunden
	7.01.03.2.	Pemberdayaan Masyarakat di						88.915.400,00							156.661.400,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	88.915.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	156.661.400,00	Kelurahan Pakunden
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	88.915.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Pokmas / Ormas	156.661.400,00	Kelurahan Pakunden
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas		8 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	88.915.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Pokmas / Ormas	156.661.400,00	Kelurahan Pakunden
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	88.915.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Pokmas / Ormas	156.661.400,00	Kelurahan Pakunden
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	88.915.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Pokmas / Ormas	156.661.400,00	Kelurahan Pakunden
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						787.178.078,00					ASN dan Masyarakat Kelurahan Pakunden		715.458.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat						787.178.078,00					ASN dan Masyarakat Kelurahan Pakunden		715.458.600,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	56.318.700,00						3 Laporan	22.725.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	730.859.378,00						4 Lembaga Kemasyarakatan	692.733.600,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						62.917.700,00							64.747.500,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	62.917.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Lembaga Kemasyarakatan	64.747.500,00	Kelurahan Pakunden
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	62.917.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Lembaga Kemasyarakatan	64.747.500,00	Kelurahan Pakunden
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	62.917.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Lembaga Kemasyarakatan	64.747.500,00	Kelurahan Pakunden
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	62.917.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Lembaga Kemasyarakatan	64.747.500,00	Kelurahan Pakunden
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						3.512.500,00							1.125.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	3.512.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	1.125.000,00	Kelurahan Pakunden
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	3.512.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	1.125.000,00	Kelurahan Pakunden
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	3.512.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	1.125.000,00	Kelurahan Pakunden
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7 Laporan		7 Laporan	3 Laporan	3.512.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Pakunden || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	1.125.000,00	Kelurahan Pakunden
		Kelurahan Blitar						851.619.780,00							767.910.080,00	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						851.619.780,00							767.910.080,00	
	7.01	**KECAMATAN**						851.619.780,00							767.910.080,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
208,	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						12.403.474.602,00							13.370.942.980,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						61.755.280,00							51.899.480,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	61.755.280,00						100 %	51.899.480,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.934.500,00					ASN Kelurahan Blitar		15.038.386,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						21.934.500,00					ASN Kelurahan Blitar		15.038.386,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.787.100,00						3 Dokumen	6.878.678,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	10.399.400,00						7 Laporan	7.785.708,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.320.000,00							500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	7 Dokumen	1.320.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	500.000,00	Kelurahan Blitar
	7.01.01.2.[illegible]	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.320.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	8 Laporan	1.320.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	500.000,00	Kelurahan Blitar
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.984.140.400,00					ASN Kelurahan Blitar		10.156.281.896,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						9.984.140.400,00					ASN Kelurahan Blitar		10.156.281.896,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.140.400,00						1 Laporan	7.232.500,00	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.260.000,00							700.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	9 Laporan		9 Laporan	4 Laporan	1.260.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Laporan	700.000,00	Kelurahan Blitar
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.260.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	700.000,00	Kelurahan Blitar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	1.260.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	700.000,00	Kelurahan Blitar
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						429.408.025,00					ASN Kelurahan Blitar		384.150.023,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						429.408.025,00					ASN Kelurahan Blitar		384.150.023,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	2 Paket		2 Paket	2 Paket	157.584.500,00						2 Paket	140.198.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	41.976.325,00						2 Paket	38.847.625,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	24.503.400,00						Paket	23.376.198,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	100.139.200,00						8 Paket	88.616.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	37.208.300,00						2 Paket	33.687.400,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.456.000,00							728.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.456.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		Paket	728.000,00	Kelurahan Blitar
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.456.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	728.000,00	Kelurahan Blitar
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.502.800,00							3.351.200,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	8.502.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	3.351.200,00	Kelurahan Blitar
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	8.502.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	3.351.200,00	Kelurahan Blitar
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	8.502.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	3.351.200,00	Kelurahan Blitar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	3 Paket	8.502.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Paket	3.351.200,00	Kelurahan Blitar
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	3 Paket	8.502.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	3.351.200,00	Kelurahan Blitar
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.955.200,00							1.142.400,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	2 Paket	1.955.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	1.142.400,00	Kelurahan Blitar
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.955.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	1.142.400,00	Kelurahan Blitar
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	2 Paket	1.955.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	1.142.400,00	Kelurahan Blitar
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.308.000,00							214.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	1.308.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	214.000,00	Kelurahan Blitar
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	1.308.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	214.000,00	Kelurahan Blitar
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.308.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	214.000,00	Kelurahan Blitar
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	1 Paket	1.308.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		15 Paket	214.000,00	Kelurahan Blitar
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.250.500,00							4.162.900,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	3 Paket	2.250.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	4.162.900,00	Kelurahan Blitar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	2.250.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	4.162.900,00	Kelurahan Blitar
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						220.849.223,00					ASN Kelurahan Blitar		151.365.300,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						220.849.223,00					ASN Kelurahan Blitar		151.365.300,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0 Unit	2 Unit	200.424.823,00						2 Unit	140.865.300,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						19.000.000,00							19.950.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	2 Unit	19.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	19.950.000,00	Kelurahan Blitar
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0 Unit	2 Unit	19.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	19.950.000,00	Kelurahan Blitar
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	19.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	19.950.000,00	Kelurahan Blitar
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	19.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	19.950.000,00	Kelurahan Blitar
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						934.801.629,00					ASN Kelurahan Blitar		1.137.111.403,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						934.801.629,00					ASN Kelurahan Blitar		1.137.111.403,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	176.680.701,00						3 Laporan	177.061.403,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						18.257.280,00							18.257.280,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	36 Laporan	18.257.280,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	18.257.280,00	Kelurahan Blitar
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	36 Laporan	18.257.280,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	18.257.280,00	Kelurahan Blitar
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	36 Laporan	18.257.280,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Laporan	18.257.280,00	Kelurahan Blitar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	36 Laporan	18.257.280,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Laporan	18.257.280,00	Kelurahan Blitar
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	18.257.280,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	18.257.280,00	Kelurahan Blitar
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						752.677.825,00					ASN Kelurahan Blitar		1.502.745.972,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						752.677.825,00					ASN Kelurahan Blitar		1.502.745.972,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	74.007.300,00						1 Unit	69.114.600,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	18 Unit		18 Unit	18 Unit	82.426.600,00						18 Unit	65.588.383,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						3.397.500,00							964.700,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	5 Unit	3.397.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Unit	964.700,00	Kelurahan Blitar
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		0 Unit	5 Unit	3.397.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	964.700,00	Kelurahan Blitar
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	5 Unit	3.397.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	964.700,00	Kelurahan Blitar
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	3.397.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	964.700,00	Kelurahan Blitar
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	5 Unit	3.397.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	964.700,00	Kelurahan Blitar
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.300.000,00							1.555.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	3 Unit	2.300.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Unit	1.555.000,00	Kelurahan Blitar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	2.300.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Unit	1.555.000,00	Kelurahan Blitar
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		18 Unit	3 Unit	2.300.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	1.555.000,00	Kelurahan Blitar
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						21.934.500,00					ASN Kelurahan Blitar		15.038.386,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	0 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	748.000,00						0 Laporan	374.000,00	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						748.000,00							374.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan		2 Laporan	9 Laporan	748.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		0 Laporan	374.000,00	Kelurahan Blitar
209,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						2.201.530.000,00							1.945.753.304,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan						194.773.200,00							150.360.400,00	
			1.Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	100 %		100 %	100 %	194.773.200,00						100 %	150.360.400,00	
			2.Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan	100 %		100 %	100 %	194.773.200,00						100 %	150.360.400,00	
			3.Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	100 %		100 %	100 %	194.773.200,00						100 %	150.360.400,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.836.235.200,00					Masyarakat Kelurahan Blitar		1.644.660.400,00	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan						1.836.235.200,00					Masyarakat Kelurahan Blitar		1.644.660.400,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.681.149.900,00						12 Dokumen	1.521.431.200,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	155.085.300,00						1 Laporan	123.229.200,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						20.900.000,00							500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14 Laporan		14 Laporan	4 Laporan	20.900.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Laporan	500.000,00	Kelurahan Blitar
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	20.900.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	500.000,00	Kelurahan Blitar
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	20.900.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	500.000,00	Kelurahan Blitar
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	20.900.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	500.000,00	Kelurahan Blitar
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						148.580.000,00							130.896.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	148.580.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	130.896.000,00	Kelurahan Blitar
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	12 Dokumen	148.580.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	130.896.000,00	Kelurahan Blitar
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	148.580.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Dokumen	130.896.000,00	Kelurahan Blitar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	148.580.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	130.896.000,00	Kelurahan Blitar
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di						365.294.800,00					Masyarakat Kelurahan Blitar		301.092.904,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan						365.294.800,00					Masyarakat Kelurahan Blitar		301.092.904,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.196.800,00						1 Dokumen	43.943.304,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	343.098.000,00						1 Laporan	257.149.600,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						743.200,00							564.400,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	743.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	564.400,00	Kelurahan Blitar
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	743.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	564.400,00	Kelurahan Blitar
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	14 Dokumen		14 Dokumen	2 Dokumen	743.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Dokumen	564.400,00	Kelurahan Blitar
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						24.550.000,00							18.400.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	24.550.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	18.400.000,00	Kelurahan Blitar
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan		7 Laporan	2 Laporan	24.550.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	18.400.000,00	Kelurahan Blitar
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	24.550.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	18.400.000,00	Kelurahan Blitar
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan		14 Laporan	2 Laporan	24.550.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Laporan	18.400.000,00	Kelurahan Blitar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
210,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						9.013.637.798,00							6.885.775.980,00	
		Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan						593.771.300,00							565.150.200,00	
			1.Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi	8 Kelompok		8 Kelompok	8 Kelompok	593.771.300,00						8 Kelompok	565.150.200,00	
			2.Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		100 %	100 %	593.771.300,00						100 %	565.150.200,00	
			3.Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang	100 %		100 %	100 %	593.771.300,00						100 %	565.150.200,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.226.459.720,00					Masyarakat Kelurahan Blitar		6.170.317.380,00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang						8.226.459.720,00					Masyarakat Kelurahan Blitar		6.170.317.380,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	17 Lembaga Kemasyarakatan		17 Lembaga Kemasyarakatan	17 Lembaga Kemasyarakatan	252.577.300,00						17 Lembaga Kemasyarakatan	185.515.628,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	1.735.925.085,00						12 Pokmas / Ormas	1.667.400.552,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit	12 Unit	6.237.957.335,00						12 Unit	4.317.401.200,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di						18.548.300,00							13.800.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	18.548.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Lembaga Kemasyarakatan	13.800.000,00	Kelurahan Blitar
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	18.548.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Lembaga Kemasyarakatan	13.800.000,00	Kelurahan Blitar
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	18.548.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Lembaga Kemasyarakatan	13.800.000,00	Kelurahan Blitar
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	18.548.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Lembaga Kemasyarakatan	13.800.000,00	Kelurahan Blitar
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Lembaga Kemasyarakatan		17 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	18.548.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		17 Lembaga Kemasyarakatan	13.800.000,00	Kelurahan Blitar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	18.548.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Lembaga Kemasyarakatan	13.800.000,00	Kelurahan Blitar
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	18.548.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Lembaga Kemasyarakatan	13.800.000,00	Kelurahan Blitar
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						394.000.000,00							394.001.200,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	51 Unit		51 Unit	7 Unit	394.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		51 Unit	394.001.200,00	Kelurahan Blitar
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	7 Unit	394.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	394.001.200,00	Kelurahan Blitar
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit	7 Unit	394.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Unit	394.001.200,00	Kelurahan Blitar
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	7 Unit	394.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	394.001.200,00	Kelurahan Blitar
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit	7 Unit	394.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	394.001.200,00	Kelurahan Blitar
	7.01.03.2.	Pemberdayaan Masyarakat di						60.590.000,00							46.310.800,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	60.590.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Pokmas / Ormas	46.310.800,00	Kelurahan Blitar
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas		8 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	60.590.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Pokmas / Ormas	46.310.800,00	Kelurahan Blitar
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	60.590.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Pokmas / Ormas	46.310.800,00	Kelurahan Blitar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	60.590.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	46.310.800,00	Kelurahan Blitar
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	60.590.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Pokmas / Ormas	46.310.800,00	Kelurahan Blitar
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						787.178.078,00					Masyarakat Kelurahan Blitar		715.458.600,00	
		Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat						787.178.078,00					Masyarakat Kelurahan Blitar		715.458.600,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	56.318.700,00						1 Laporan	22.725.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga K emasyarakat an		4 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	730.859.378,00						4 Lembaga K emasyarakat an	692.733.600,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						115.877.200,00							110.538.200,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga K emasyarakat an		8 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	115.877.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Lembaga K emasyarakat an	110.538.200,00	Kelurahan Blitar
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga K emasyarakat an		4 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	115.877.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Lembaga K emasyarakat an	110.538.200,00	Kelurahan Blitar
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga K emasyarakat an		5 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	115.877.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Lembaga K emasyarakat an	110.538.200,00	Kelurahan Blitar
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga K emasyarakat an		7 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	115.877.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Lembaga K emasyarakat an	110.538.200,00	Kelurahan Blitar
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						4.755.800,00							500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7 Laporan		7 Laporan	2 Laporan	4.755.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	500.000,00	Kelurahan Blitar
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	4.755.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	500.000,00	Kelurahan Blitar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	4.755.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	500.000,00	Kelurahan Blitar
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	4.755.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Blitar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	500.000,00	Kelurahan Blitar
		Kelurahan Tlumpu						865.064.623,00							806.324.951,00	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						865.064.623,00							806.324.951,00	
	7.01	**KECAMATAN**						865.064.623,00							806.324.951,00	
211,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						12.403.474.602,00							13.370.942.980,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						133.178.323,00							130.474.867,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	133.178.323,00						100 %	130.474.867,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.934.500,00					ASN Kelurahan Tlumpu		15.038.386,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						21.934.500,00					ASN Kelurahan Tlumpu		15.038.386,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.787.100,00						3 Dokumen	6.878.678,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	10.399.400,00						7 Laporan	7.785.708,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.312.000,00							648.678,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	1.312.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	648.678,00	Kelurahan Tlumpu
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.251.000,00							535.708,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	4 Laporan	1.251.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	535.708,00	Kelurahan Tlumpu
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.984.140.400,00					ASN Kelurahan Tlumpu		10.156.281.896,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						9.984.140.400,00					ASN Kelurahan Tlumpu		10.156.281.896,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.140.400,00						1 Laporan	7.232.500,00	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.255.400,00							782.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	1.255.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	782.500,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.255.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	782.500,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	9 Laporan		9 Laporan	1 Laporan	1.255.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Laporan	782.500,00	Kelurahan Tlumpu
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						429.408.025,00					ASN Kelurahan Tlumpu		384.150.023,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						429.408.025,00					ASN Kelurahan Tlumpu		384.150.023,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.972.000,00						1 Dokumen	14.764.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.024.300,00						1 Dokumen	4.660.200,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	157.584.500,00						1 Paket	140.198.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	41.976.325,00						1 Paket	38.847.625,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	24.503.400,00						Paket	23.376.198,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.139.200,00						1 Paket	88.616.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	37.208.300,00						1 Paket	33.687.400,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.703.000,00							3.740.598,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.703.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	3.740.598,00	Kelurahan Tlumpu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.703.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		Paket	3.740.598,00	Kelurahan Tlumpu
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.001.500,00							8.274.400,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	9.001.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	8.274.400,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	3 Paket	9.001.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Paket	8.274.400,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	3 Paket	9.001.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	8.274.400,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	9.001.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	8.274.400,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	9.001.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	8.274.400,00	Kelurahan Tlumpu
	7.01.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.118.600,00							3.121.600,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	3 Paket	3.118.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	3.121.600,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	3 Paket	3.118.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	3.121.600,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	3.118.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	3.121.600,00	Kelurahan Tlumpu
	7.01.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						24.110.000,00							27.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	24.110.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	27.500.000,00	Kelurahan Tlumpu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	24.110.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	27.500.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	24.110.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	27.500.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	2 Paket	24.110.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		15 Paket	27.500.000,00	Kelurahan Tlumpu
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.218.300,00							3.332.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	4.218.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	3.332.500,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	4.218.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	3.332.500,00	Kelurahan Tlumpu
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.754.000,00							2.754.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.754.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	2.754.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	2 Dokumen	2.754.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	2.754.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	2.754.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	2.754.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	2 Dokumen	2.754.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Dokumen	2.754.000,00	Kelurahan Tlumpu
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						878.000,00							878.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	878.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	878.000,00	Kelurahan Tlumpu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	878.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	878.000,00	Kelurahan Tlumpu
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						220.849.223,00					ASN Kelurahan Tlumpu		151.365.300,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						220.849.223,00					ASN Kelurahan Tlumpu		151.365.300,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0 Unit	2 Unit	200.424.823,00						2 Unit	140.865.300,00	
	7.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						22.739.323,00							19.950.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	22.739.323,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	19.950.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0 Unit	2 Unit	22.739.323,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	19.950.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	2 Unit	22.739.323,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	19.950.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	22.739.323,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	19.950.000,00	Kelurahan Tlumpu
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						934.801.629,00					ASN Kelurahan Tlumpu		1.137.111.403,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						934.801.629,00					ASN Kelurahan Tlumpu		1.137.111.403,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	176.680.701,00						12 Laporan	177.061.403,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						18.770.200,00							18.770.200,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	18.770.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	18.770.200,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	12 Laporan	18.770.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Laporan	18.770.200,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	12 Laporan	18.770.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	18.770.200,00	Kelurahan Tlumpu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	12 Laporan	18.770.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	18.770.200,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	12 Laporan	18.770.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Laporan	18.770.200,00	Kelurahan Tlumpu
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						752.677.825,00					ASN Kelurahan Tlumpu		1.502.745.972,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						752.677.825,00					ASN Kelurahan Tlumpu		1.502.745.972,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	74.007.300,00						1 Unit	69.114.600,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	10 Unit		10 Unit	10 Unit	82.426.600,00						10 Unit	65.588.383,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		0 Unit	1 Unit	571.482.025,00						1 Unit	1.343.292.989,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.787.000,00							500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	5 Unit	2.787.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	500.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	5 Unit	2.787.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	500.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		0 Unit	5 Unit	2.787.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	500.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	5 Unit	2.787.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Unit	500.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	2.787.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	500.000,00	Kelurahan Tlumpu
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						13.280.000,00							14.486.683,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	3 Unit	13.280.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Unit	14.486.683,00	Kelurahan Tlumpu
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		18 Unit	3 Unit	13.280.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	14.486.683,00	Kelurahan Tlumpu
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	13.280.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Unit	14.486.683,00	Kelurahan Tlumpu
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						24.000.000,00							25.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	25.200.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit		18 Unit	1 Unit	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	25.200.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	25.200.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		9 Unit	1 Unit	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Unit	25.200.000,00	Kelurahan Tlumpu
212,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						2.201.530.000,00							1.945.753.304,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan						155.619.400,00							151.751.704,00	
			1.Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	100 %		100 %	100 %	155.619.400,00						100 %	151.751.704,00	
			2.Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan	100 %		100 %	100 %	155.619.400,00						100 %	151.751.704,00	
			3.Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	100 %		100 %	100 %	155.619.400,00						100 %	151.751.704,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.836.235.200,00					Masyarakat Kelurahan Tlumpu		1.644.660.400,00	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan						1.836.235.200,00					Masyarakat Kelurahan Tlumpu		1.644.660.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	1.681.149.900,00						14 Dokumen	1.521.431.200,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	155.085.300,00						1 Laporan	123.229.200,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						7.700.000,00							10.800.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14 Laporan		14 Laporan	3 Laporan	7.700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Laporan	10.800.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	7.700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	10.800.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	7.700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	10.800.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	7.700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tlumpu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	10.800.000,00	Kelurahan Tlumpu
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						131.000.000,00							124.032.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14 Dokumen		14 Dokumen	4 Dokumen	131.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Dokumen	124.032.000,00	Kelurahan Tlumpu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	4 Dokumen	131.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	124.032.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	131.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	124.032.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	131.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	124.032.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di						365.294.800,00					Masyarakat Kelurahan Tlumpu		301.092.904,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan						365.294.800,00					Masyarakat Kelurahan Tlumpu		301.092.904,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.196.800,00						1 Dokumen	43.943.304,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	343.098.000,00						1 Laporan	257.149.600,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						1.719.400,00							1.719.704,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.719.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	1.719.704,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	1.719.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	1.719.704,00	Kelurahan Tlumpu
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	14 Dokumen		14 Dokumen	1 Dokumen	1.719.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Dokumen	1.719.704,00	Kelurahan Tlumpu
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						15.200.000,00							15.200.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	15.200.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan		14 Laporan	4 Laporan	15.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Laporan	15.200.000,00	Kelurahan Tlumpu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan		7 Laporan	4 Laporan	15.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	15.200.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	15.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	15.200.000,00	Kelurahan Tlumpu
213,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						9.013.637.798,00							6.885.775.980,00	
		Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan						576.266.900,00							524.098.380,00	
			1.Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi	8 Kelompok		8 Kelompok	8 Kelompok	576.266.900,00						8 Kelompok	524.098.380,00	
			2.Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		100 %	100 %	576.266.900,00						100 %	524.098.380,00	
			3.Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang	100 %		100 %	100 %	576.266.900,00						100 %	524.098.380,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.226.459.720,00					Masyarakat Kelurahan Tlumpu		6.170.317.380,00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif						8.226.459.720,00					Masyarakat Kelurahan Tlumpu		6.170.317.380,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	1 Lembaga K emasyarakat an		1 Lembaga K emasyarakat an	1 Lembaga K emasyarakat an	252.577.300,00						1 Lembaga K emasyarakat an	185.515.628,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	1.735.925.085,00						12 Pokmas / Ormas	1.667.400.552,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit	12 Unit	6.237.957.335,00						12 Unit	4.317.401.200,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di						20.960.500,00							17.444.428,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga K emasyarakat an		2 Lembaga K emasyarakat an	3 Lembaga K emasyarakat an	20.960.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Lembaga K emasyarakat an	17.444.428,00	Kelurahan Tlumpu
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarak a tan		12 Lembaga Kemasyaraka tan	3 Lembaga K emasyarakat an	20.960.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Lembaga Kemasyarak a tan	17.444.428,00	Kelurahan Tlumpu
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Lembaga Kemasyarak a tan		17 Lembaga Kemasyaraka tan	3 Lembaga K emasyarakat an	20.960.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		17 Lembaga Kemasyarak a tan	17.444.428,00	Kelurahan Tlumpu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	20.960.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Lembaga Kemasyarakatan	17.444.428,00	Kelurahan Tlumpu
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	20.960.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Lembaga Kemasyarakatan	17.444.428,00	Kelurahan Tlumpu
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	20.960.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Lembaga Kemasyarakatan	17.444.428,00	Kelurahan Tlumpu
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	20.960.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Lembaga Kemasyarakatan	17.444.428,00	Kelurahan Tlumpu
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						288.000.000,00							310.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	4 Unit	288.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	310.000.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	4 Unit	288.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	310.000.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit	4 Unit	288.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Unit	310.000.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit	4 Unit	288.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	310.000.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	51 Unit		51 Unit	4 Unit	288.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		51 Unit	310.000.000,00	Kelurahan Tlumpu
	7.01.03.2.	Pemberdayaan Masyarakat di						188.530.200,00							139.663.952,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	188.530.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Pokmas / Ormas	139.663.952,00	Kelurahan Tlumpu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas		8 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	188.530.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Pokmas / Ormas	139.663.952,00	Kelurahan Tlumpu
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	188.530.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Pokmas / Ormas	139.663.952,00	Kelurahan Tlumpu
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	188.530.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	139.663.952,00	Kelurahan Tlumpu
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	188.530.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Pokmas / Ormas	139.663.952,00	Kelurahan Tlumpu
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						787.178.078,00					Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan		715.458.600,00	
		Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat						787.178.078,00					Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan		715.458.600,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	56.318.700,00						1 Laporan	22.725.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	730.859.378,00						4 Lembaga Kemasyarakatan	692.733.600,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						74.926.200,00							56.490.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	74.926.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Lembaga Kemasyarakatan	56.490.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	74.926.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Lembaga Kemasyarakatan	56.490.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	74.926.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Lembaga Kemasyarakatan	56.490.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	74.926.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Lembaga Kemasyarakatan	56.490.000,00	Kelurahan Tlumpu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						3.850.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	3.850.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	500.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.850.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	500.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	3.850.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	500.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	3.850.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	500.000,00	Kelurahan Tlumpu
		Kelurahan Turi						733.937.121,00							651.528.896,00	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						733.937.121,00							651.528.896,00	
	7.01	**KECAMATAN**						733.937.121,00							651.528.896,00	
214,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						12.403.474.602,00							13.370.942.980,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						120.501.321,00							70.882.196,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	120.501.321,00						100 %	70.882.196,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.934.500,00					ASN Kelurahan Turi		15.038.386,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						21.934.500,00					ASN Kelurahan Turi		15.038.386,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.787.100,00						3 Dokumen	6.878.678,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	10.399.400,00						7 Laporan	7.785.708,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						600.000,00							800.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	8 Dokumen	600.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	800.000,00	Kelurahan Turi
	7.01.01.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						480.000,00							1.040.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	4 Laporan	480.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	1.040.000,00	Kelurahan Turi
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.984.140.400,00					ASN Kelurahan Turi		10.156.281.896,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						9.984.140.400,00					ASN Kelurahan Turi		10.156.281.896,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.140.400,00						1 Laporan	7.232.500,00	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						400.000,00							800.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	9 Laporan		9 Laporan	4 Laporan	400.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Laporan	800.000,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	400.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	800.000,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	400.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	800.000,00	Kelurahan Turi
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						429.408.025,00					ASN Kelurahan Turi		384.150.023,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						429.408.025,00					ASN Kelurahan Turi		384.150.023,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.972.000,00						1 Dokumen	14.764.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Pa		1 Paket	1 Pa	157.584.500,00						1 Paket	140.198.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Pa ket		1 Paket	1 Pa ket	41.976.325,00						1 Paket	38.847.625,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Pa ket		1 Paket	1 Pa ket	24.503.400,00						Paket	23.376.198,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Pa ket		1 Paket	1 Pa ket	100.139.200,00						1 Paket	88.616.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Pa ket		0 Paket	1 Pa ket	37.208.300,00						1 Paket	33.687.400,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.099.300,00							452.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.099.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		Paket	452.400,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.099.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	452.400,00	Kelurahan Turi
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.704.100,00							5.036.500,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	5 Paket	7.704.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	5.036.500,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	5 Paket	7.704.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Paket	5.036.500,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	5 Paket	7.704.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	5.036.500,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	5 Paket	7.704.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	5.036.500,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	7.704.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	5.036.500,00	Kelurahan Turi
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.171.600,00							648.300,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	2 Paket	1.171.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	648.300,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	2 Paket	1.171.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	648.300,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.171.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	648.300,00	Kelurahan Turi
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.752.400,00							714.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	1 Paket	1.752.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		15 Paket	714.000,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	1.752.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	714.000,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	1.752.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	714.000,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.752.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	714.000,00	Kelurahan Turi
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.400.000,00							1.331.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.400.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	1.331.000,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	2.400.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	1.331.000,00	Kelurahan Turi
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.754.000,00							2.754.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	12 Dokumen	2.754.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Dokumen	2.754.000,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	2.754.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	2.754.000,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.754.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	2.754.000,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	12 Dokumen	2.754.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	2.754.000,00	Kelurahan Turi
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						220.849.223,00					ASN Kelurahan Turi		151.365.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						220.849.223,00					ASN Kelurahan Turi		151.365.300,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0 Unit	2 Unit	200.424.823,00						2 Unit	140.865.300,00	
	7.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						18.589.200,00							19.950.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	2 Unit	18.589.200,00	Provinsi Jawa Timur | | Kota Blitar | | Kecamatan Sukorejo | | Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	19.950.000,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0 Unit	2 Unit	18.589.200,00	Provinsi Jawa Timur | | Kota Blitar | | Kecamatan Sukorejo | | Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	19.950.000,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	18.589.200,00	Provinsi Jawa Timur | | Kota Blitar | | Kecamatan Sukorejo | | Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	19.950.000,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	18.589.200,00	Provinsi Jawa Timur | | Kota Blitar | | Kecamatan Sukorejo | | Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	19.950.000,00	Kelurahan Turi
	7.01.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						934.801.629,00					ASN Kelurahan Turi		1.137.111.403,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						934.801.629,00					ASN Kelurahan Turi		1.137.111.403,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	176.680.701,00						12 Laporan	177.061.403,00	
	7.01.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20.609.396,00							20.609.396,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	36 Laporan	20.609.396,00	Provinsi Jawa Timur | | Kota Blitar | | Kecamatan Sukorejo | | Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	20.609.396,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	36 Laporan	20.609.396,00	Provinsi Jawa Timur | | Kota Blitar | | Kecamatan Sukorejo | | Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Laporan	20.609.396,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	36 Laporan	20.609.396,00	Provinsi Jawa Timur | | Kota Blitar | | Kecamatan Sukorejo | | Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Laporan	20.609.396,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	36 Laporan	20.609.396,00	Provinsi Jawa Timur | | Kota Blitar | | Kecamatan Sukorejo | | Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	20.609.396,00	Kelurahan Turi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	20.609.396,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	20.609.396,00	Kelurahan Turi
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						752.677.825,00					ASN Kelurahan Turi		1.502.745.972,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						752.677.825,00					ASN Kelurahan Turi		1.502.745.972,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	74.007.300,00						1 Unit	69.114.600,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	10 Unit		10 Unit	10 Unit	82.426.600,00						10 Unit	65.588.383,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		0 Unit	1 Unit	571.482.025,00						1 Unit	1.343.292.989,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						3.060.000,00							2.108.900,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		0 Unit	5 Unit	3.060.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	2.108.900,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	5 Unit	3.060.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	2.108.900,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	3.060.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	2.108.900,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	5 Unit	3.060.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	2.108.900,00	Kelurahan Turi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	5 Unit	3.060.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Unit	2.108.900,00	Kelurahan Turi
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						668.300,00							437.700,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	668.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Unit	437.700,00	Kelurahan Turi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		18 Unit	3 Unit	668.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	437.700,00	Kelurahan Turi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	3 Unit	668.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Unit	437.700,00	Kelurahan Turi
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						59.213.025,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		9 Unit	1 Unit	59.213.025,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Turi
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit		18 Unit	1 Unit	59.213.025,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Turi
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	59.213.025,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Turi
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	59.213.025,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Turi
215,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						2.201.530.000,00							1.945.753.304,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan						149.304.000,00							135.294.000,00	
			1.Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	100 %		100 %	100 %	149.304.000,00						100 %	135.294.000,00	
			2.Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan	100 %		100 %	100 %	149.304.000,00						100 %	135.294.000,00	
			3.Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	100 %		100 %	100 %	149.304.000,00						100 %	135.294.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.836.235.200,00					Masyarakat Kelurahan Turi		1.644.660.400,00	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan						1.836.235.200,00					Masyarakat Kelurahan Turi		1.644.660.400,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.681.149.900,00						1 Dokumen	1.521.431.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	155.085.300,00						1 Laporan	123.229.200,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						9.432.000,00							7.579.200,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.432.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	7.579.200,00	Kelurahan Turi
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	9.432.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	7.579.200,00	Kelurahan Turi
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	9.432.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	7.579.200,00	Kelurahan Turi
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14 Laporan		14 Laporan	1 Laporan	9.432.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Laporan	7.579.200,00	Kelurahan Turi
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						120.560.000,00							110.674.800,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	120.560.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	110.674.800,00	Kelurahan Turi
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	120.560.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	110.674.800,00	Kelurahan Turi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	120.560.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Dokumen	110.674.800,00	Kelurahan Turi
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	12 Dokumen	120.560.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	110.674.800,00	Kelurahan Turi
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di						365.294.800,00					Masyarakat Kelurahan Turi		301.092.904,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan						365.294.800,00					Masyarakat Kelurahan Turi		301.092.904,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.196.800,00						1 Dokumen	43.943.304,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	343.098.000,00						1 Laporan	257.149.600,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						1.980.000,00							780.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.980.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	780.000,00	Kelurahan Turi
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	14 Dokumen		14 Dokumen	2 Dokumen	1.980.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Dokumen	780.000,00	Kelurahan Turi
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	1.980.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	780.000,00	Kelurahan Turi
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						17.332.000,00							16.260.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	17.332.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	16.260.000,00	Kelurahan Turi
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	17.332.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	16.260.000,00	Kelurahan Turi
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan		14 Laporan	2 Laporan	17.332.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Laporan	16.260.000,00	Kelurahan Turi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan		7 Laporan	2 Laporan	17.332.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	16.260.000,00	Kelurahan Turi
216,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						9.013.637.798,00							6.885.775.980,00	
		Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan						464.131.800,00							444.552.700,00	
			1.Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi	8 Kelompok		8 Kelompok	8 Kelompok	464.131.800,00						8 Kelompok	444.552.700,00	
			2.Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		100 %	100 %	464.131.800,00						100 %	444.552.700,00	
			3.Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang	100 %		100 %	100 %	464.131.800,00						100 %	444.552.700,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.226.459.720,00					Masyarakat Kelurahan Turi		6.170.317.380,00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang						8.226.459.720,00					Masyarakat Kelurahan Turi		6.170.317.380,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	1 Lembaga K emasyarakat an		1 Lembaga K emasyarakat an	1 Lembaga K emasyarakat an	252.577.300,00						1 Lembaga K emasyarakat an	185.515.628,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	1.735.925.085,00						12 Pokmas / Ormas	1.667.400.552,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Uni t		12 Unit	12 Unit	6.237.957.335,00						12 Unit	4.317.401.200,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di						16.896.300,00							17.445.300,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarak a tan		12 Lembaga Kemasyaraka tan	10 Lembaga Kemasyarak a tan	16.896.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Lembaga Kemasyarak a tan	17.445.300,00	Kelurahan Turi
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga K emasyarakat an		9 Lembaga K emasyarakat an	10 Lembaga Kemasyarak a tan	16.896.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Lembaga K emasyarakat an	17.445.300,00	Kelurahan Turi
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga K emasyarakat an		7 Lembaga K emasyarakat an	10 Lembaga Kemasyarak a tan	16.896.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Lembaga K emasyarakat an	17.445.300,00	Kelurahan Turi
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga K emasyarakat an		4 Lembaga K emasyarakat an	10 Lembaga Kemasyarak a tan	16.896.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Lembaga K emasyarakat an	17.445.300,00	Kelurahan Turi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	16.896.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Lembaga Kemasyarakatan	17.445.300,00	Kelurahan Turi
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	16.896.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Lembaga Kemasyarakatan	17.445.300,00	Kelurahan Turi
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Lembaga Kemasyarakatan		17 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	16.896.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		17 Lembaga Kemasyarakatan	17.445.300,00	Kelurahan Turi
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						227.500.000,00							309.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	9 Unit	227.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	309.000.000,00	Kelurahan Turi
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit	9 Unit	227.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Unit	309.000.000,00	Kelurahan Turi
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit	9 Unit	227.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	309.000.000,00	Kelurahan Turi
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	51 Unit		51 Unit	9 Unit	227.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		51 Unit	309.000.000,00	Kelurahan Turi
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	9 Unit	227.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	309.000.000,00	Kelurahan Turi
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						148.100.200,00							59.764.600,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	148.100.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Pokmas / Ormas	59.764.600,00	Kelurahan Turi
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	148.100.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	59.764.600,00	Kelurahan Turi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	148.100.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Pokmas / Ormas	59.764.600,00	Kelurahan Turi
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas		8 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	148.100.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Pokmas / Ormas	59.764.600,00	Kelurahan Turi
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	148.100.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Pokmas / Ormas	59.764.600,00	Kelurahan Turi
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						787.178.078,00					Masyarakat Kelurahan Turi		715.458.600,00	
		Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat						787.178.078,00					Masyarakat Kelurahan Turi		715.458.600,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	56.318.700,00						1 Laporan	22.725.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga K emasyarakat an		4 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	730.859.378,00						4 Lembaga K emasyarakat an	692.733.600,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						68.335.300,00							54.742.800,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga K emasyarakat an		8 Lembaga K emasyarakat an	7 Lembaga K emasyarakat an	68.335.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Lembaga K emasyarakat an	54.742.800,00	Kelurahan Turi
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga K emasyarakat an		4 Lembaga K emasyarakat an	7 Lembaga K emasyarakat an	68.335.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Lembaga K emasyarakat an	54.742.800,00	Kelurahan Turi
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga K emasyarakat an		5 Lembaga K emasyarakat an	7 Lembaga K emasyarakat an	68.335.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Lembaga K emasyarakat an	54.742.800,00	Kelurahan Turi
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga K emasyarakat an		7 Lembaga K emasyarakat an	7 Lembaga K emasyarakat an	68.335.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Lembaga K emasyarakat an	54.742.800,00	Kelurahan Turi
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						3.300.000,00							3.600.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	7 Laporan	3.300.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	3.600.000,00	Kelurahan Turi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	7 Laporan	3.300.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	3.600.000,00	Kelurahan Turi
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	3.300.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	3.600.000,00	Kelurahan Turi
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	7 Laporan	3.300.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	3.600.000,00	Kelurahan Turi
		Kelurahan Karangsari						996.522.225,00							928.450.000,00	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						996.522.225,00							928.450.000,00	
	7.01	**KECAMATAN**						996.522.225,00							928.450.000,00	
217,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						12.403.474.602,00							13.370.942.980,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						115.584.500,00							90.750.000,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	115.584.500,00						100 %	90.750.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.934.500,00					ASN Kelurahan Karangsari		15.038.386,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						21.934.500,00					ASN Kelurahan Karangsari		15.038.386,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.787.100,00						3 Dokumen	6.878.678,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	10.399.400,00						7 Laporan	7.785.708,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.320.000,00							1.100.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.320.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	1.100.000,00	Kelurahan Karangsari
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.320.000,00							1.100.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	1.320.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	1.100.000,00	Kelurahan Karangsari
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.984.140.400,00					ASN Kelurahan Karangsari		10.156.281.896,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						9.984.140.400,00					ASN Kelurahan Karangsari		10.156.281.896,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.140.400,00						1 Laporan	7.232.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.260.000,00							1.100.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	9 Laporan	1.260.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Karangsari || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	1.100.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	9 Laporan	1.260.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Karangsari || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	1.100.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	1.260.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Karangsari || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Laporan	1.100.000,00	Kelurahan Karangsari
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						429.408.025,00					ASN Kelurahan Karangsari		384.150.023,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						429.408.025,00					ASN Kelurahan Karangsari		384.150.023,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.972.000,00						1 Dokumen	14.764.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.024.300,00						1 Dokumen	4.660.200,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	157.584.500,00						1 Paket	140.198.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	41.976.325,00						1 Paket	38.847.625,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	24.503.400,00						Paket	23.376.198,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.139.200,00						1 Paket	88.616.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	37.208.300,00						1 Paket	33.687.400,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.053.100,00							2.100.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.053.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		Paket	2.100.000,00	Kelurahan Karangsari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.053.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	2.100.000,00	Kelurahan Karangsari
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.006.500,00							13.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	8 Paket	9.006.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	13.500.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	8 Paket	9.006.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	13.500.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	9.006.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Paket	13.500.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	8 Paket	9.006.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	13.500.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	8 Paket	9.006.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	13.500.000,00	Kelurahan Karangsari
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.010.400,00							2.100.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	3 Paket	2.010.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	2.100.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	2.010.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	2.100.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	3 Paket	2.010.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	2.100.000,00	Kelurahan Karangsari
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						23.656.000,00							26.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	2 Paket	23.656.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		15 Paket	26.000.000,00	Kelurahan Karangsari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	23.656.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	26.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	23.656.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	26.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	23.656.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	26.000.000,00	Kelurahan Karangsari
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.507.500,00							3.200.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	4.507.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	3.200.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	4.507.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	3.200.000,00	Kelurahan Karangsari
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.754.000,00							2.600.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	12 Dokumen	2.754.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	2.600.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.754.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	2.600.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	2.754.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	2.600.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	12 Dokumen	2.754.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Dokumen	2.600.000,00	Kelurahan Karangsari
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.010.100,00							1.100.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	1.010.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	1.100.000,00	Kelurahan Karangsari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.010.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	1.100.000,00	Kelurahan Karangsari
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						220.849.223,00					ASN Kelurahan Karangsari		151.365.300,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						220.849.223,00					ASN Kelurahan Karangsari		151.365.300,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0 Unit	2 Unit	200.424.823,00						2 Unit	140.865.300,00	
	7.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						18.589.200,00							600.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	18.589.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	600.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	1 Unit	18.589.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	600.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	18.589.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	600.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0 Unit	1 Unit	18.589.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	600.000,00	Kelurahan Karangsari
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						934.801.629,00					ASN Kelurahan Karangsari		1.137.111.403,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						934.801.629,00					ASN Kelurahan Karangsari		1.137.111.403,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	176.680.701,00						12 Laporan	177.061.403,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13.748.000,00							14.250.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	24 Laporan	13.748.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	14.250.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	24 Laporan	13.748.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Laporan	14.250.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	24 Laporan	13.748.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	14.250.000,00	Kelurahan Karangsari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	13.748.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Laporan	14.250.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	24 Laporan	13.748.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	14.250.000,00	Kelurahan Karangsari
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						752.677.825,00					ASN Kelurahan Karangsari		1.502.745.972,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						752.677.825,00					ASN Kelurahan Karangsari		1.502.745.972,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	74.007.300,00						1 Unit	69.114.600,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	10 Unit		10 Unit	10 Unit	82.426.600,00						10 Unit	65.588.383,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		0 Unit	1 Unit	571.482.025,00						1 Unit	1.343.292.989,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						3.128.500,00							3.100.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	6 Unit	3.128.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Unit	3.100.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		0 Unit	6 Unit	3.128.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	3.100.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	6 Unit	3.128.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	3.100.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	6 Unit	3.128.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	3.100.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	3.128.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	3.100.000,00	Kelurahan Karangsari
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.736.800,00							3.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	5 Unit	8.736.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Unit	3.100.000,00	Kelurahan Karangsari
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	5 Unit	8.736.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Unit	3.100.000,00	Kelurahan Karangsari
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		18 Unit	5 Unit	8.736.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	3.100.000,00	Kelurahan Karangsari
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						23.804.400,00							24.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit		18 Unit	1 Unit	23.804.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	24.300.000,00	Kelurahan Karangsari
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	23.804.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	24.300.000,00	Kelurahan Karangsari
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	23.804.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	24.300.000,00	Kelurahan Karangsari
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		9 Unit	1 Unit	23.804.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Unit	24.300.000,00	Kelurahan Karangsari
218,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						2.201.530.000,00							1.945.753.304,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan						223.060.000,00							233.000.000,00	
			1.Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	100 %		100 %	100 %	223.060.000,00						100 %	233.000.000,00	
			2.Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan	100 %		100 %	100 %	223.060.000,00						100 %	233.000.000,00	
			3.Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	100 %		100 %	100 %	223.060.000,00						100 %	233.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.836.235.200,00					Masyarakat Kelurahan Karangsari		1.644.660.400,00	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan						1.836.235.200,00					Masyarakat Kelurahan Karangsari		1.644.660.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.681.149.900,00						1 Dokumen	1.521.431.200,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	155.085.300,00						1 Laporan	123.229.200,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						10.505.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14 Laporan		14 Laporan	2 Laporan	10.505.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Karangsari || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Laporan	1.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	10.505.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Karangsari || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	1.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.505.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Karangsari || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	1.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	10.505.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Karangsari || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	1.000.000,00	Kelurahan Karangsari
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						182.405.000,00							157.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	182.405.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	157.000.000,00	Kelurahan Karangsari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	182.405.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	157.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14 Dokumen		14 Dokumen	2 Dokumen	182.405.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Dokumen	157.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	2 Dokumen	182.405.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	157.000.000,00	Kelurahan Karangsari
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di						365.294.800,00					Masyarakat Kelurahan Karangsari		301.092.904,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan						365.294.800,00					Masyarakat Kelurahan Karangsari		301.092.904,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.196.800,00						1 Dokumen	43.943.304,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	343.098.000,00						1 Laporan	257.149.600,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						1.350.000,00							26.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	14 Dokumen		14 Dokumen	1 Dokumen	1.350.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Dokumen	26.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	1.350.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	26.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.350.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	26.000.000,00	Kelurahan Karangsari
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						28.800.000,00							49.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	28.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	49.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan		14 Laporan	1 Laporan	28.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Laporan	49.000.000,00	Kelurahan Karangsari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	28.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	49.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	28.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	49.000.000,00	Kelurahan Karangsari
219,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						9.013.637.798,00							6.885.775.980,00	
		Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan						656.557.725,00							596.200.000,00	
			1.Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi	8 Kelompok		8 Kelompok	8 Kelompok	656.557.725,00						8 Kelompok	596.200.000,00	
			2.Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		100 %	100 %	656.557.725,00						100 %	596.200.000,00	
			3.Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang	100 %		100 %	100 %	656.557.725,00						100 %	596.200.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.226.459.720,00					ASN dan Masyarakat Kelurahan Karangsari		6.170.317.380,00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif						8.226.459.720,00					ASN dan Masyarakat Kelurahan Karangsari		6.170.317.380,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	1 Lembaga K emasyarakat an		1 Lembaga K emasyarakat an	1 Lembaga K emasyarakat an	252.577.300,00						1 Lembaga K emasyarakat an	185.515.628,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	1.735.925.085,00						12 Pokmas / Ormas	1.667.400.552,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Uni t		12 Unit	12 Unit	6.237.957.335,00						12 Unit	4.317.401.200,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di						25.261.600,00							21.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	12 Lembaga Kemasyarak a tan		12 Lembaga Kemasyaraka tan	17 Lembaga Kemasyarak a tan	25.261.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Lembaga Kemasyarak a tan	21.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	9 Lembaga K emasyarakat an		9 Lembaga K emasyarakat an	17 Lembaga Kemasyarak a tan	25.261.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Lembaga K emasyarakat an	21.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	7 Lembaga K emasyarakat an		7 Lembaga K emasyarakat an	17 Lembaga Kemasyarak a tan	25.261.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Lembaga K emasyarakat an	21.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	4 Lembaga K emasyarakat an		4 Lembaga K emasyarakat an	17 Lembaga Kemasyarak a tan	25.261.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Lembaga K emasyarakat an	21.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	2 Lembaga K emasyarakat an		2 Lembaga K emasyarakat an	17 Lembaga Kemasyarak a tan	25.261.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Lembaga K emasyarakat an	21.000.000,00	Kelurahan Karangsari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	17 Lembaga Kemasyarakatan	25.261.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Lembaga Kemasyarakatan	21.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	17 Lembaga Kemasyarakatan		17 Lembaga Kemasyarakatan	17 Lembaga Kemasyarakatan	25.261.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		17 Lembaga Kemasyarakatan	21.000.000,00	Kelurahan Karangsari
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						370.240.400,00							375.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	14 Unit	370.240.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	375.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit	14 Unit	370.240.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	375.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit	14 Unit	370.240.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Unit	375.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	51 Unit		51 Unit	14 Unit	370.240.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		51 Unit	375.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	14 Unit	370.240.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	375.000.000,00	Kelurahan Karangsari
	7.01.03.2.	Pemberdayaan Masyarakat di						175.056.125,00							112.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	175.056.125,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Pokmas / Ormas	112.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas		8 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	175.056.125,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Pokmas / Ormas	112.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	175.056.125,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Pokmas / Ormas	112.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	175.056.125,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Pokmas / Ormas	112.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	175.056.125,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	112.000.000,00	Kelurahan Karangsari
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						787.178.078,00					Masyarakat Kelurahan Karangsari		715.458.600,00	
		Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat						787.178.078,00					Masyarakat Kelurahan Karangsari		715.458.600,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	56.318.700,00						1 Laporan	22.725.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	730.859.378,00						4 Lembaga Kemasyarakatan	692.733.600,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						80.000.000,00							82.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Lembaga Kemasyarakatan	82.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Lembaga Kemasyarakatan	82.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Lembaga Kemasyarakatan	82.000.000,00	Kelurahan Karangsari
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Lembaga Kemasyarakatan	82.000.000,00	Kelurahan Karangsari
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						5.999.600,00							6.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7 Laporan		7 Laporan	2 Laporan	5.999.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	6.200.000,00	Kelurahan Karangsari
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	5.999.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	6.200.000,00	Kelurahan Karangsari
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.999.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	6.200.000,00	Kelurahan Karangsari
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	5.999.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	6.200.000,00	Kelurahan Karangsari
		Kelurahan Sukorejo						2.122.447.200,00							1.996.592.989,00	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						2.122.447.200,00							1.996.592.989,00	
	7.01	**KECAMATAN**						2.122.447.200,00							1.996.592.989,00	
220,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						12.403.474.602,00							13.370.942.980,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						132.334.500,00							68.357.289,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	132.334.500,00						100 %	68.357.289,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.934.500,00					ASN Kelurahan Sukorejo		15.038.386,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						21.934.500,00					ASN Kelurahan Sukorejo		15.038.386,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.787.100,00						3 Dokumen	6.878.678,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	10.399.400,00						7 Laporan	7.785.708,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.301.700,00							600.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	4 Dokumen	1.301.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	600.000,00	Kelurahan Sukorejo
	7.01.01.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.320.000,00							600.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	1.320.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	600.000,00	Kelurahan Sukorejo
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.984.140.400,00					ASN Kelurahan Sukorejo		10.156.281.896,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						9.984.140.400,00					ASN Kelurahan Sukorejo		10.156.281.896,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.140.400,00						1 Laporan	7.232.500,00	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.260.000,00							600.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.260.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Sukorejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	600.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	1.260.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Sukorejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	600.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	9 Laporan		9 Laporan	4 Laporan	1.260.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Sukorejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Laporan	600.000,00	Kelurahan Sukorejo
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						429.408.025,00					ASN Kelurahan Sukorejo		384.150.023,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						429.408.025,00					ASN Kelurahan Sukorejo		384.150.023,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.972.000,00						1 Dokumen	14.764.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.024.300,00						1 Dokumen	4.660.200,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	157.584.500,00						1 Paket	140.198.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	41.976.325,00						1 Paket	38.847.625,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	24.503.400,00						Paket	23.376.198,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.139.200,00						1 Paket	88.616.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	37.208.300,00						1 Paket	33.687.400,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.503.900,00							1.456.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.503.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		Paket	1.456.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.503.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	1.456.000,00	Kelurahan Sukorejo
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12.999.700,00							10.273.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	12.999.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	10.273.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	12.999.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Paket	10.273.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	1 Paket	12.999.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	10.273.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	12.999.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	10.273.000,00	Kelurahan Sukorejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	12.999.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	10.273.000,00	Kelurahan Sukorejo
	7.01.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.015.400,00							500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	2.015.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	500.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	2.015.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	500.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	2.015.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	500.000,00	Kelurahan Sukorejo
	7.01.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.005.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	9.005.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	9.000.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	9.005.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	9.000.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.005.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	9.000.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	1 Paket	9.005.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		15 Paket	9.000.000,00	Kelurahan Sukorejo
	7.01.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.254.400,00							2.596.400,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.254.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	2.596.400,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	4.254.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	2.596.400,00	Kelurahan Sukorejo
	7.01.01.2. 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.956.000,00							1.956.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.956.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	1.956.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	1.956.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	1.956.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	1 Dokumen	1.956.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Dokumen	1.956.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	1.956.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	1.956.000,00	Kelurahan Sukorejo
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.019.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.019.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	1.000.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	1.019.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	1.000.000,00	Kelurahan Sukorejo
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						220.849.223,00					ASN Kelurahan Sukorejo		151.365.300,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						220.849.223,00					ASN Kelurahan Sukorejo		151.365.300,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0 Unit	2 Unit	200.424.823,00						2 Unit	140.865.300,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						29.010.900,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0 Unit	1 Unit	29.010.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	4.000.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	29.010.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	4.000.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	29.010.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	4.000.000,00	Kelurahan Sukorejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	1 Unit	29.010.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	4.000.000,00	Kelurahan Sukorejo
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						934.801.629,00					ASN Kelurahan Sukorejo		1.137.111.403,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						934.801.629,00					ASN Kelurahan Sukorejo		1.137.111.403,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	176.680.701,00						12 Laporan	177.061.403,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.272.400,00							15.272.400,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	3 Laporan	15.272.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	15.272.400,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	3 Laporan	15.272.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Laporan	15.272.400,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	15.272.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	15.272.400,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	3 Laporan	15.272.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Laporan	15.272.400,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	3 Laporan	15.272.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	15.272.400,00	Kelurahan Sukorejo
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						752.677.825,00					ASN Kelurahan Sukorejo		1.502.745.972,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						752.677.825,00					ASN Kelurahan Sukorejo		1.502.745.972,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	74.007.300,00						1 Unit	69.114.600,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	10 Unit		10 Unit	10 Unit	82.426.600,00						10 Unit	65.588.383,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		0 Unit	1 Unit	571.482.025,00						1 Unit	1.343.292.989,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.085.000,00							2.442.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	7 Unit	2.085.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Unit	2.442.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	7 Unit	2.085.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	2.442.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	7 Unit	2.085.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	2.442.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	7 Unit	2.085.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	2.442.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		0 Unit	7 Unit	2.085.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	2.442.000,00	Kelurahan Sukorejo
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.578.200,00							5.968.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	8.578.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Unit	5.968.500,00	Kelurahan Sukorejo
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		18 Unit	10 Unit	8.578.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	5.968.500,00	Kelurahan Sukorejo
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	10 Unit	8.578.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Unit	5.968.500,00	Kelurahan Sukorejo
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						40.752.900,00							13.292.989,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	40.752.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	13.292.989,00	Kelurahan Sukorejo
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit		18 Unit	1 Unit	40.752.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	13.292.989,00	Kelurahan Sukorejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	40.752.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	13.292.989,00	Kelurahan Sukorejo
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		9 Unit	1 Unit	40.752.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Unit	13.292.989,00	Kelurahan Sukorejo
221,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						2.201.530.000,00							1.945.753.304,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan						489.206.800,00							468.106.800,00	
			1.Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	100 %		100 %	100 %	489.206.800,00						100 %	468.106.800,00	
			2.Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan	100 %		100 %	100 %	489.206.800,00						100 %	468.106.800,00	
			3.Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	100 %		100 %	100 %	489.206.800,00						100 %	468.106.800,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.836.235.200,00					Masyarakat Kelurahan Sukorejo		1.644.660.400,00	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan						1.836.235.200,00					Masyarakat Kelurahan Sukorejo		1.644.660.400,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.681.149.900,00						1 Dokumen	1.521.431.200,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	155.085.300,00						1 Laporan	123.229.200,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						7.246.800,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	7.246.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Sukorejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	10.000.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14 Laporan		14 Laporan	1 Laporan	7.246.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Sukorejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Laporan	10.000.000,00	Kelurahan Sukorejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.246.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Sukorejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	10.000.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	7.246.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Sukorejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	10.000.000,00	Kelurahan Sukorejo
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						432.660.000,00							417.306.800,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	51 Dokumen	432.660.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	417.306.800,00	Kelurahan Sukorejo
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	51 Dokumen	432.660.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	417.306.800,00	Kelurahan Sukorejo
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14 Dokumen		14 Dokumen	51 Dokumen	432.660.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Dokumen	417.306.800,00	Kelurahan Sukorejo
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	51 Dokumen	432.660.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	417.306.800,00	Kelurahan Sukorejo
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di						365.294.800,00					Masyarakat Kelurahan Sukorejo		301.092.904,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan						365.294.800,00					Masyarakat Kelurahan Sukorejo		301.092.904,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.196.800,00						1 Dokumen	43.943.304,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	343.098.000,00						1 Laporan	257.149.600,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						1.700.000,00							800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	1.700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	800.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	800.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	14 Dokumen		14 Dokumen	2 Dokumen	1.700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Dokumen	800.000,00	Kelurahan Sukorejo
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						47.600.000,00							40.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan		14 Laporan	2 Laporan	47.600.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Laporan	40.000.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan		7 Laporan	2 Laporan	47.600.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	40.000.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	47.600.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	40.000.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	47.600.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	40.000.000,00	Kelurahan Sukorejo
222,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						9.013.637.798,00							6.885.775.980,00	
		Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan						1.500.905.900,00							1.458.928.900,00	
			1.Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi	8 Kelompok		8 Kelompok	8 Kelompok	1.500.905.900,00						8 Kelompok	1.458.928.900,00	
			2.Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		100 %	100 %	1.500.905.900,00						100 %	1.458.928.900,00	
			3.Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang	100 %		100 %	100 %	1.500.905.900,00						100 %	1.458.928.900,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.226.459.720,00					Masyarakat Kelurahanbawah Sukorejo		6.170.317.380,00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif						8.226.459.720,00					Masyarakat Kelurahanbawah Sukorejo		6.170.317.380,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	252.577.300,00						1 Lembaga Kemasyarakatan	185.515.628,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	1.735.925.085,00						12 Pokmas / Ormas	1.667.400.552,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit	12 Unit	6.237.957.335,00						12 Unit	4.317.401.200,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di						45.000.000,00							39.900.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	51 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Lembaga Kemasyarakatan	39.900.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	51 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Lembaga Kemasyarakatan	39.900.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan	51 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Lembaga Kemasyarakatan	39.900.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan	51 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Lembaga Kemasyarakatan	39.900.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Lembaga Kemasyarakatan		17 Lembaga Kemasyarakatan	51 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		17 Lembaga Kemasyarakatan	39.900.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	51 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Lembaga Kemasyarakatan	39.900.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	51 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Lembaga Kemasyarakatan	39.900.000,00	Kelurahan Sukorejo
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1.194.202.400,00							892.500.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit	51 Unit	1.194.202.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Unit	892.500.000,00	Kelurahan Sukorejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit	51 Unit	1.194.202.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	892.500.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	51 Unit	1.194.202.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	892.500.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	51 Unit	1.194.202.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	892.500.000,00	Kelurahan Sukorejo
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	51 Unit		51 Unit	51 Unit	1.194.202.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		51 Unit	892.500.000,00	Kelurahan Sukorejo
	7.01.03.2.	Pemberdayaan Masyarakat di						181.797.600,00							435.243.400,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	181.797.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Pokmas / Ormas	435.243.400,00	Kelurahan Sukorejo
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	181.797.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Pokmas / Ormas	435.243.400,00	Kelurahan Sukorejo
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	181.797.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	435.243.400,00	Kelurahan Sukorejo
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	181.797.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Pokmas / Ormas	435.243.400,00	Kelurahan Sukorejo
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas		8 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	181.797.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Pokmas / Ormas	435.243.400,00	Kelurahan Sukorejo
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						787.178.078,00					Masyarakat Kelurahan Sukorejo		715.458.600,00	
		Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat						787.178.078,00					Masyarakat Kelurahan Sukorejo		715.458.600,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	56.318.700,00						1 Laporan	22.725.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	730.859.378,00						4 Lembaga Kemasyarakatan	692.733.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						74.955.900,00							91.285.500,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	74.955.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan		5 Lembaga Kemasyarakatan	91.285.500,00	Kelurahan Sukorejo
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	74.955.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan		4 Lembaga Kemasyarakatan	91.285.500,00	Kelurahan Sukorejo
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	74.955.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan		7 Lembaga Kemasyarakatan	91.285.500,00	Kelurahan Sukorejo
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	74.955.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan		8 Lembaga Kemasyarakatan	91.285.500,00	Kelurahan Sukorejo
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						4.950.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	4.950.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	0,00	Kelurahan Sukorejo
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	4.950.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	0,00	Kelurahan Sukorejo
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	4.950.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	0,00	Kelurahan Sukorejo
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7 Laporan		7 Laporan	2 Laporan	4.950.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	0,00	Kelurahan Sukorejo
		Kelurahan Tanjungsari						1.700.132.825,00							1.617.240.225,00	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						1.700.132.825,00							1.617.240.225,00	
	7.01	**KECAMATAN**						1.700.132.825,00							1.617.240.225,00	
223,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						12.403.474.602,00							13.370.942.980,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						118.702.425,00							93.527.825,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	118.702.425,00						100 %	93.527.825,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.934.500,00					ASN Kelurahan Tanjungsari		15.038.386,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						21.934.500,00					ASN Kelurahan Tanjungsari		15.038.386,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.787.100,00						3 Dokumen	6.878.678,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	10.399.400,00						7 Laporan	7.785.708,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.320.000,00							1.350.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.320.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	1.350.000,00	Kelurahan Tanjungsari
	7.01.01.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.320.000,00							1.600.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	1.320.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	1.600.000,00	Kelurahan Tanjungsari
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.984.140.400,00					ASN Kelurahan Tanjungsari		10.156.281.896,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						9.984.140.400,00					ASN Kelurahan Tanjungsari		10.156.281.896,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.140.400,00						1 Laporan	7.232.500,00	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.260.000,00							840.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	9 Laporan	1.260.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tanjungsari || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	840.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	9 Laporan	1.260.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tanjungsari || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	840.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	1.260.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tanjungsari || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Laporan	840.000,00	Kelurahan Tanjungsari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						429.408.025,00					ASN Kelurahan Tanjungsari		384.150.023,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						429.408.025,00					ASN Kelurahan Tanjungsari		384.150.023,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.024.300,00						1 Dokumen	4.660.200,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	157.584.500,00						1 Paket	140.198.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	41.976.325,00						1 Paket	38.847.625,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	24.503.400,00						Paket	23.376.198,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.139.200,00						1 Paket	88.616.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	37.208.300,00						1 Paket	33.687.400,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.184.000,00							2.184.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.184.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	2.184.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.184.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		Paket	2.184.000,00	Kelurahan Tanjungsari
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.935.300,00							5.038.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	4 Paket	10.935.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	5.038.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	10.935.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	5.038.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.935.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	5.038.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	4 Paket	10.935.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Paket	5.038.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	10.935.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	5.038.000,00	Kelurahan Tanjungsari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.287.000,00							1.388.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	3 Paket	2.287.000,00	Provinsi Jawa Timur | | Kota Blitar | | Kecamatan Sukorejo | | Kelurahan Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	1.388.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	2.287.000,00	Provinsi Jawa Timur | | Kota Blitar | | Kecamatan Sukorejo | | Kelurahan Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	1.388.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	3 Paket	2.287.000,00	Provinsi Jawa Timur | | Kota Blitar | | Kecamatan Sukorejo | | Kelurahan Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	1.388.000,00	Kelurahan Tanjungsari
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						11.935.000,00							16.550.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	11.935.000,00	Provinsi Jawa Timur | | Kota Blitar | | Kecamatan Sukorejo | | Kelurahan Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	16.550.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	2 Paket	11.935.000,00	Provinsi Jawa Timur | | Kota Blitar | | Kecamatan Sukorejo | | Kelurahan Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		15 Paket	16.550.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	11.935.000,00	Provinsi Jawa Timur | | Kota Blitar | | Kecamatan Sukorejo | | Kelurahan Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	16.550.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	11.935.000,00	Provinsi Jawa Timur | | Kota Blitar | | Kecamatan Sukorejo | | Kelurahan Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	16.550.000,00	Kelurahan Tanjungsari
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.238.325,00							4.217.525,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	4.238.325,00	Provinsi Jawa Timur | | Kota Blitar | | Kecamatan Sukorejo | | Kelurahan Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	4.217.525,00	Kelurahan Tanjungsari
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	4.238.325,00	Provinsi Jawa Timur | | Kota Blitar | | Kecamatan Sukorejo | | Kelurahan Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	4.217.525,00	Kelurahan Tanjungsari
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						962.200,00							962.200,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	962.200,00	Provinsi Jawa Timur | | Kota Blitar | | Kecamatan Sukorejo | | Kelurahan Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	962.200,00	Kelurahan Tanjungsari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	962.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	962.200,00	Kelurahan Tanjungsari
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						220.849.223,00					ASN Kelurahan Tanjungsari		151.365.300,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						220.849.223,00					ASN Kelurahan Tanjungsari		151.365.300,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0 Unit	2 Unit	200.424.823,00						2 Unit	140.865.300,00	
	7.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						23.111.600,00							8.299.800,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0 Unit	2 Unit	23.111.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	8.299.800,00	Kelurahan Tanjungsari
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	23.111.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	8.299.800,00	Kelurahan Tanjungsari
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	23.111.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Unit	8.299.800,00	Kelurahan Tanjungsari
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	2 Unit	23.111.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	8.299.800,00	Kelurahan Tanjungsari
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						934.801.629,00					ASN Kelurahan Tanjungsari		1.137.111.403,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						934.801.629,00					ASN Kelurahan Tanjungsari		1.137.111.403,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	176.680.701,00						12 Laporan	177.061.403,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13.999.500,00							13.999.500,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	12 Laporan	13.999.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	13.999.500,00	Kelurahan Tanjungsari
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	12 Laporan	13.999.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	13.999.500,00	Kelurahan Tanjungsari
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	12 Laporan	13.999.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Laporan	13.999.500,00	Kelurahan Tanjungsari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	12 Laporan	13.999.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Laporan	13.999.500,00	Kelurahan Tanjungsari
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.999.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	13.999.500,00	Kelurahan Tanjungsari
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						752.677.825,00					ASN Kelurahan Tanjungsari		1.502.745.972,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						752.677.825,00					ASN Kelurahan Tanjungsari		1.502.745.972,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	74.007.300,00						1 Unit	69.114.600,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	10 Unit		10 Unit	10 Unit	82.426.600,00						10 Unit	65.588.383,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		0 Unit	1 Unit	571.482.025,00						1 Unit	1.343.292.989,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						3.171.000,00							3.159.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	9 Unit	3.171.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	3.159.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	3.171.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Unit	3.159.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	9 Unit	3.171.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	3.159.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		0 Unit	9 Unit	3.171.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	3.159.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	9 Unit	3.171.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	3.159.000,00	Kelurahan Tanjungsari
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						18.837.800,00							8.439.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	18.837.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Unit	8.439.800,00	Kelurahan Tanjungsari
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	10 Unit	18.837.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Unit	8.439.800,00	Kelurahan Tanjungsari
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		18 Unit	10 Unit	18.837.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	8.439.800,00	Kelurahan Tanjungsari
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						24.460.700,00							25.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	24.460.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	25.500.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	24.460.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	25.500.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit		18 Unit	1 Unit	24.460.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		18 Unit	25.500.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		9 Unit	1 Unit	24.460.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Unit	25.500.000,00	Kelurahan Tanjungsari
224,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						2.201.530.000,00							1.945.753.304,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan						388.651.000,00							365.114.800,00	
			1.Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	100 %		100 %	100 %	388.651.000,00						100 %	365.114.800,00	
			2.Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan	100 %		100 %	100 %	388.651.000,00						100 %	365.114.800,00	
			3.Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	100 %		100 %	100 %	388.651.000,00						100 %	365.114.800,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.836.235.200,00					Masyarakat Kelurahan Tanjungsari		1.644.660.400,00	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan						1.836.235.200,00					Masyarakat Kelurahan Tanjungsari		1.644.660.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.681.149.900,00						1 Dokumen	1.521.431.200,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	155.085.300,00						1 Laporan	123.229.200,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						8.840.000,00							7.400.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	8.840.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tanjungsari || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	7.400.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	8.840.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tanjungsari || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	7.400.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14 Laporan		14 Laporan	1 Laporan	8.840.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tanjungsari || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Laporan	7.400.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.840.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan Tanjungsari || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	7.400.000,00	Kelurahan Tanjungsari
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						329.215.000,00							307.320.200,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14 Dokumen		14 Dokumen	2 Dokumen	329.215.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Dokumen	307.320.200,00	Kelurahan Tanjungsari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	329.215.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	307.320.200,00	Kelurahan Tanjungsari
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	329.215.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	307.320.200,00	Kelurahan Tanjungsari
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	2 Dokumen	329.215.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	307.320.200,00	Kelurahan Tanjungsari
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di						365.294.800,00					Masyarakat Kelurahan Tanjungsari		301.092.904,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan						365.294.800,00					Masyarakat Kelurahan Tanjungsari		301.092.904,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.196.800,00						1 Dokumen	43.943.304,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	343.098.000,00						1 Laporan	257.149.600,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						1.680.000,00							1.505.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	1.680.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	1.505.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.680.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	1.505.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	14 Dokumen		14 Dokumen	2 Dokumen	1.680.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Dokumen	1.505.000,00	Kelurahan Tanjungsari
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						48.916.000,00							48.889.600,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	48.916.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	48.889.600,00	Kelurahan Tanjungsari
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan		14 Laporan	1 Laporan	48.916.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Laporan	48.889.600,00	Kelurahan Tanjungsari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.916.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	48.889.600,00	Kelurahan Tanjungsari
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	48.916.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	48.889.600,00	Kelurahan Tanjungsari
225,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						9.013.637.798,00							6.885.775.980,00	
		Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan						1.191.459.400,00							1.158.597.600,00	
			1.Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi	8 Kelompok		8 Kelompok	8 Kelompok	1.191.459.400,00						8 Kelompok	1.158.597.600,00	
			2.Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		100 %	100 %	1.191.459.400,00						100 %	1.158.597.600,00	
			3.Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang	100 %		100 %	100 %	1.191.459.400,00						100 %	1.158.597.600,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.226.459.720,00					ASN dan Masyarakat Kelurahan Tanjungsari		6.170.317.380,00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif						8.226.459.720,00					ASN dan Masyarakat Kelurahan Tanjungsari		6.170.317.380,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	1 Lembaga K emasyarakat an		1 Lembaga K emasyarakat an	1 Lembaga K emasyarakat an	252.577.300,00						1 Lembaga K emasyarakat an	185.515.628,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	1.735.925.085,00						12 Pokmas / Ormas	1.667.400.552,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Uni t		12 Unit	12 Unit	6.237.957.335,00						12 Unit	4.317.401.200,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di						42.561.600,00							40.961.600,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga K emasyarakat an		2 Lembaga K emasyarakat an	7 Lembaga K emasyarakat an	42.561.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Lembaga K emasyarakat an	40.961.600,00	Kelurahan Tanjungsari
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga K emasyarakat an		4 Lembaga K emasyarakat an	7 Lembaga K emasyarakat an	42.561.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Lembaga K emasyarakat an	40.961.600,00	Kelurahan Tanjungsari
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga K emasyarakat an		7 Lembaga K emasyarakat an	7 Lembaga K emasyarakat an	42.561.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Lembaga K emasyarakat an	40.961.600,00	Kelurahan Tanjungsari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	42.561.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Lembaga Kemasyarakatan	40.961.600,00	Kelurahan Tanjungsari
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	42.561.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Lembaga Kemasyarakatan	40.961.600,00	Kelurahan Tanjungsari
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Lembaga Kemasyarakatan		17 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	42.561.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		17 Lembaga Kemasyarakatan	40.961.600,00	Kelurahan Tanjungsari
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	42.561.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Lembaga Kemasyarakatan	40.961.600,00	Kelurahan Tanjungsari
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						965.000.000,00							965.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	7 Unit	965.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	965.000.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	7 Unit	965.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	965.000.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit	7 Unit	965.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Unit	965.000.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	51 Unit		51 Unit	7 Unit	965.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		51 Unit	965.000.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit	7 Unit	965.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	965.000.000,00	Kelurahan Tanjungsari
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						108.947.800,00							83.806.400,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	108.947.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	83.806.400,00	Kelurahan Tanjungsari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	108.947.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Pokmas / Ormas	83.806.400,00	Kelurahan Tanjungsari
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	108.947.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Pokmas / Ormas	83.806.400,00	Kelurahan Tanjungsari
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas		8 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	108.947.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Pokmas / Ormas	83.806.400,00	Kelurahan Tanjungsari
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	108.947.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Pokmas / Ormas	83.806.400,00	Kelurahan Tanjungsari
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						787.178.078,00					Masyarakat Kelurahan Tanjungsari		715.458.600,00	
		Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat						787.178.078,00					Masyarakat Kelurahan Tanjungsari		715.458.600,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	56.318.700,00						1 Laporan	22.725.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	730.859.378,00						4 Lembaga Kemasyarakatan	692.733.600,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						70.000.000,00							68.329.600,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Lembaga Kemasyarakatan	68.329.600,00	Kelurahan Tanjungsari
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Lembaga Kemasyarakatan	68.329.600,00	Kelurahan Tanjungsari
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Lembaga Kemasyarakatan	68.329.600,00	Kelurahan Tanjungsari
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Lembaga Kemasyarakatan	68.329.600,00	Kelurahan Tanjungsari
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						4.950.000,00							500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.950.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	500.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	4.950.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	500.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	4.950.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Laporan	500.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	4.950.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sukorejo || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	500.000,00	Kelurahan Tanjungsari
		Kecamatan Sananwetan						13.551.482.190,00							16.671.630.323,00	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						13.551.482.190,00							16.671.630.323,00	
	7.01	**KECAMATAN**						13.551.482.190,00							16.671.630.323,00	
226,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						13.186.602.210,00							15.429.508.816,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						12.034.418.850,00							14.072.257.488,00	
			1.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	12.034.418.850,00						100 %	14.072.257.488,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.750.000,00					ASN		147.410.538,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						21.750.000,00					ASN		147.410.538,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	0,00						1 Berita Acara	15.600.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	1.000.000,00						1 Data	72.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	12.600.000,00						3 Dokumen	16.012.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	1.000.000,00						9 Dokumen	3.300.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	7.150.000,00						7 Laporan	40.498.538,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.200.000,00							6.600.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		9 Dokumen	3 Dokumen	4.200.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Dokumen	6.600.000,00	Kecamatan Sananwetan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	4.200.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	6.600.000,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.01.2.[illegible]	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.150.000,00							40.498.538,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	7.150.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Laporan	40.498.538,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						1.000.000,00							72.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	1.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Data	72.000.000,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						1.000.000,00							3.300.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	1.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Dokumen	3.300.000,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis						0,00							15.600.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	0 Berita Acara	0,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Berita Acara	15.600.000,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.01.2.[illegible]	Administrasi Keuangan Perangkat [illegible]						10.194.746.250,00					ASN		11.058.763.050,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						10.194.746.250,00					ASN		11.058.763.050,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.970.000,00						4 Laporan	12.726.500,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1056 Orang/bulan		1056 Orang/bulan	1056 Orang/bulan	10.183.776.250,00						1056 Orang/bulan	11.046.036.550,00	
	7.01.01.2.[illegible]	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.183.776.250,00							11.046.036.550,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1056 Orang/bulan		1056 Orang/bulan	90 Orang/bulan	10.183.776.250,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1056 Orang/bulan	11.046.036.550,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						800.000,00							1.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	800.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	1.200.000,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						300.000,00					ASN		2.650.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat						300.000,00					ASN		2.650.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	300.000,00						4 Laporan	2.650.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						300.000,00							2.650.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	2.650.000,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						630.000,00					ASN		6.600.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah						630.000,00					ASN		6.600.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	630.000,00						1 Dokumen	6.600.000,00	
	7.01.01.2.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi						630.000,00							6.600.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	630.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	6.600.000,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						168.906.900,00					ASN		217.296.670,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						168.906.900,00					ASN		217.296.670,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	26 Orang		26 Orang	26 Orang	155.104.600,00						26 Orang	153.491.170,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket		1 Paket	1 Paket	13.802.300,00						1 Paket	63.805.500,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						13.802.300,00							50.035.500,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	17 Paket	13.802.300,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	50.035.500,00	Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket		30 Paket	17 Paket	13.802.300,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		30 Paket	50.035.500,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						36.701.000,00							38.561.500,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang		28 Orang	60 Orang	36.701.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		28 Orang	38.561.500,00	Kecamatan Sananwetan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	36.701.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		60 Orang	38.561.500,00	Kecamatan Sananwetan
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang		42 Orang	60 Orang	36.701.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		42 Orang	38.561.500,00	Kecamatan Sananwetan
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		30 Orang	60 Orang	36.701.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		30 Orang	38.561.500,00	Kecamatan Sananwetan
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang		26 Orang	60 Orang	36.701.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		26 Orang	38.561.500,00	Kecamatan Sananwetan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						491.998.600,00					ASN		564.669.488,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						491.998.600,00					ASN		564.669.488,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						491.998.600,00					ASN		564.669.488,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	22.032.000,00						12 Dokumen	22.169.700,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	22.032.000,00						12 Dokumen	22.169.700,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.900,00						1 Dokumen	5.074.100,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.900,00						1 Dokumen	5.074.100,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	61.315.400,00						12 Laporan	99.995.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	61.315.400,00						12 Laporan	99.995.200,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	10 Paket		10 Paket	10 Paket	136.811.500,00						10 Paket	163.167.150,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	10 Paket		10 Paket	10 Paket	136.811.500,00						10 Paket	163.167.150,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	51.342.900,00						1 Paket	54.370.988,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	51.342.900,00						1 Paket	54.370.988,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	38.890.900,00						1 Paket	32.123.800,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	38.890.900,00						1 Paket	32.123.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.247.700,00						3 Paket	107.616.100,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.247.700,00						3 Paket	107.616.100,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	75.657.300,00						3 Paket	80.152.450,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	75.657.300,00						3 Paket	80.152.450,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.439.200,00							4.837.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.439.200,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	4.837.000,00	Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	8.439.200,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	4.837.000,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.002.700,00							23.094.400,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	4 Paket	20.002.700,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	23.094.400,00	Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.002.700,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	23.094.400,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						11.998.800,00							13.864.400,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	5 Paket	11.998.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	13.864.400,00	Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	5 Paket	11.998.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	13.864.400,00	Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	11.998.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	13.864.400,00	Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	5 Paket	11.998.800,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Paket	13.864.400,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						33.096.500,00							55.185.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	33.096.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Paket	55.185.900,00	Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	12 Paket	33.096.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Paket	55.185.900,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14.156.500,00							17.594.200,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	14.156.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	17.594.200,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.754.000,00							2.754.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.754.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	2.754.000,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						61.315.400,00							99.995.200,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	61.315.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	99.995.200,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						630.300,00							630.300,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	630.300,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	630.300,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						741.432.100,00					ASN		1.312.374.520,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						741.432.100,00					ASN		1.312.374.520,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		15 Unit	5 Unit	187.025.100,00						5 Unit	606.105.520,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		1 Unit	1 Unit	528.305.000,00						1 Unit	630.000.000,00	
	7.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						15.467.500,00							139.827.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		8 Unit	2 Unit	15.467.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	139.827.000,00	Kecamatan Sananwetan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		15 Unit	2 Unit	15.467.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	139.827.000,00	Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	2 Unit	15.467.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	139.827.000,00	Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		37 Unit	2 Unit	15.467.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	139.827.000,00	Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	2 Unit	15.467.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	139.827.000,00	Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		6 Unit	2 Unit	15.467.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	139.827.000,00	Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		7 Unit	2 Unit	15.467.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	139.827.000,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						500.000.000,00							630.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	500.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	630.000.000,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.080.581.160,00					ASN		1.384.053.050,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						1.080.581.160,00					ASN		1.384.053.050,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	269.398.160,00						24 Laporan	234.875.450,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	811.183.000,00						12 Laporan	1.149.177.600,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						72.713.500,00							72.713.500,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		2424 Laporan	36 Laporan	72.713.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Laporan	72.713.500,00	Kecamatan Sananwetan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	36 Laporan	72.713.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Laporan	72.713.500,00	Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	72.713.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	72.713.500,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						798.475.000,00							1.138.269.600,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	36 Laporan	798.475.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	1.138.269.600,00	Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	798.475.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	1.138.269.600,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						486.257.200,00					ASN		735.691.500,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						486.257.200,00					ASN		735.691.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	106.250.000,00						1 Unit	105.649.600,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	46.557.500,00						1 Unit	46.557.500,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	47 Unit		47 Unit	47 Unit	113.449.700,00						47 Unit	98.957.200,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		Unit	Unit	220.000.000,00						1 Unit	474.700.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan						46.557.500,00							46.557.500,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	46.557.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	46.557.500,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau						61.137.900,00							61.137.900,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	12 Unit	61.137.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Unit	61.137.900,00	Kecamatan Sananwetan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	12 Unit	61.137.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	61.137.900,00	Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	12 Unit	61.137.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	61.137.900,00	Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	12 Unit	61.137.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	61.137.900,00	Kecamatan Sananwetan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	12 Unit	61.137.900,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		13 Unit	61.137.900,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						39.314.500,00							39.314.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	6 Unit	39.314.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	39.314.500,00	Kecamatan Sananwetan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	6 Unit	39.314.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	39.314.500,00	Kecamatan Sananwetan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit		47 Unit	6 Unit	39.314.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		47 Unit	39.314.500,00	Kecamatan Sananwetan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	6 Unit	39.314.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	39.314.500,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	450.000.000,00	Kecamatan Sananwetan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		2 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	450.000.000,00	Kecamatan Sananwetan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	450.000.000,00	Kecamatan Sananwetan
227,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						2.658.682.350,00							2.887.998.335,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan						167.075.000,00							583.800.592,00	
			1.Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	100 %		100 %	100 %	167.075.000,00						100 %	583.800.592,00	
			2.Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan	100 %		100 %	100 %	167.075.000,00						100 %	583.800.592,00	
			3.Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	167.075.000,00						100 %	583.800.592,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.347.624.250,00					Masyarakat		2.542.701.235,00	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum						2.347.624.250,00					Masyarakat		2.542.701.235,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.208.371.300,00						12 Dokumen	2.122.161.535,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	139.252.950,00						12 Laporan	420.539.700,00	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan						2.347.624.250,00					Masyarakat		2.542.701.235,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.208.371.300,00						12 Dokumen	2.122.161.535,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	139.252.950,00						12 Laporan	420.539.700,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						65.761.400,00							150.534.100,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	96 Laporan		96 Laporan	96 Laporan	65.761.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		96 Laporan	150.534.100,00	Kecamatan Sananwetan
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan		12 Laporan	96 Laporan	65.761.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	150.534.100,00	Kecamatan Sananwetan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						55.428.500,00							365.804.092,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	55.428.500,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	365.804.092,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di						311.058.100,00					Masyarakat		345.297.100,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat						311.058.100,00					Masyarakat		345.297.100,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.132.200,00						2 Dokumen	25.665.600,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	289.925.900,00						12 Laporan	319.631.500,00	
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar						311.058.100,00					Masyarakat		345.297.100,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.132.200,00						2 Dokumen	25.665.600,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	289.925.900,00						12 Laporan	319.631.500,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						4.272.000,00							10.143.200,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4.272.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	10.143.200,00	Kecamatan Sananwetan
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	4.272.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	10.143.200,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						41.613.100,00							57.319.200,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	41.613.100,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	57.319.200,00	Kecamatan Sananwetan
228,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						8.653.836.840,00							12.141.430.270,00	
		Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan						1.348.988.340,00							2.008.972.243,00	
			1.Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi	7 Kelompok		7 Kelompok	7 Kelompok	1.348.988.340,00						7 Kelompok	2.008.972.243,00	
			2.Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		100 %	100 %	1.348.988.340,00						100 %	2.008.972.243,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			3.Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang	100 %		100 %	100 %	1.348.988.340,00						100 %	2.008.972.243,00	
	7.01.03.2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						7.904.045.440,00					Masyarakat		11.300.310.870,00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan						7.904.045.440,00					Masyarakat		11.300.310.870,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	249.647.100,00						14 Lembaga Kemasyarakatan	243.123.248,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	2.199.889.460,00						6 Pokmas / Ormas	3.217.610.377,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	10 Unit	5.454.508.880,00						10 Unit	7.839.577.245,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di						33.104.700,00							56.144.848,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	33.104.700,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Lembaga Kemasyarakatan	56.144.848,00	Kecamatan Sananwetan
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	33.104.700,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Lembaga Kemasyarakatan	56.144.848,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						370.508.880,00							949.577.245,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 Unit	7 Unit	370.508.880,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Unit	949.577.245,00	Kecamatan Sananwetan
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	7 Unit	370.508.880,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	949.577.245,00	Kecamatan Sananwetan
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	7 Unit	370.508.880,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	949.577.245,00	Kecamatan Sananwetan
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit		17 Unit	7 Unit	370.508.880,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		17 Unit	949.577.245,00	Kecamatan Sananwetan
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit		59 Unit	7 Unit	370.508.880,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		15 Unit	949.577.245,00	Kecamatan Sananwetan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		11 Unit	7 Unit	370.508.880,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Unit	949.577.245,00	Kecamatan Sananwetan
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	7 Unit	370.508.880,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Unit	949.577.245,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.03.2.	Pemberdayaan Masyarakat di						669.140.360,00							592.612.600,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	669.140.360,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	592.612.600,00	Kecamatan Sananwetan
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	669.140.360,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	592.612.600,00	Kecamatan Sananwetan
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	669.140.360,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Pokmas / Ormas	592.612.600,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.03.2. 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						749.791.400,00					Masyarakat		841.119.400,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan perekonomian dan kesejahtaeraan masyarakat						749.791.400,00					Masyarakat		841.119.400,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	72.862.500,00						1 Laporan	139.304.500,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga K emasyarakat an		4 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	676.928.900,00						4 Lembaga K emasyarakat an	701.814.900,00	
	7.01.03.2. 03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						255.445.400,00							321.873.800,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga K emasyarakat an		4 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	255.445.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Lembaga K emasyarakat an	321.873.800,00	Kecamatan Sananwetan
	7.01.03.2. 03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						20.789.000,00							88.763.750,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.789.000,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	88.763.750,00	Kecamatan Sananwetan
		Kelurahan Gedog						2.054.740.000,00							2.176.931.850,00	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						2.054.740.000,00							2.176.931.850,00	
	7.01	**KECAMATAN**						2.054.740.000,00							2.176.931.850,00	
229,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						13.186.602.210,00							15.429.508.816,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						161.427.700,00							222.275.350,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	161.427.700,00						100 %	222.275.350,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.750.000,00					ASN		147.410.538,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						21.750.000,00					ASN		147.410.538,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	12.600.000,00						3 Dokumen	16.012.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.320.000,00							1.320.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	9 Dokumen	1.320.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	1.320.000,00	Kelurahan Gedog
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	1.320.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Dokumen	1.320.000,00	Kelurahan Gedog
	7.01.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat						10.194.746.250,00					ASN		11.058.763.050,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						10.194.746.250,00					ASN		11.058.763.050,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.970.000,00						4 Laporan	12.726.500,00	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.650.000,00							1.650.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.650.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	1.650.000,00	Kelurahan Gedog
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						168.906.900,00					ASN		217.296.670,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						168.906.900,00					ASN		217.296.670,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	26 Orang		26 Orang	26 Orang	155.104.600,00						26 Orang	153.491.170,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket		1 Paket	1 Paket	13.802.300,00						1 Paket	63.805.500,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							6.630.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	6.630.000,00	Kelurahan Gedog

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket		30 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		30 Paket	6.630.000,00	Kelurahan Gedog
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						16.133.400,00							16.133.400,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang		26 Orang	26 Orang	16.133.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		26 Orang	16.133.400,00	Kelurahan Gedog
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang		28 Orang	26 Orang	16.133.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		28 Orang	16.133.400,00	Kelurahan Gedog
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		30 Orang	26 Orang	16.133.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		30 Orang	16.133.400,00	Kelurahan Gedog
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang		42 Orang	26 Orang	16.133.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		42 Orang	16.133.400,00	Kelurahan Gedog
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		60 Orang	26 Orang	16.133.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		60 Orang	16.133.400,00	Kelurahan Gedog
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						491.998.600,00					ASN		564.669.488,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						491.998.600,00					ASN		564.669.488,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						491.998.600,00					ASN		564.669.488,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	22.032.000,00						12 Dokumen	22.169.700,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	22.032.000,00						12 Dokumen	22.169.700,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.900,00						1 Dokumen	5.074.100,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.900,00						1 Dokumen	5.074.100,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	10 Paket		10 Paket	10 Paket	136.811.500,00						10 Paket	163.167.150,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	10 Paket		10 Paket	10 Paket	136.811.500,00						10 Paket	163.167.150,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	51.342.900,00						1 Paket	54.370.988,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	51.342.900,00						1 Paket	54.370.988,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	38.890.900,00						1 Paket	32.123.800,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	38.890.900,00						1 Paket	32.123.800,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.247.700,00						3 Paket	107.616.100,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.247.700,00						3 Paket	107.616.100,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	75.657.300,00						3 Paket	80.152.450,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	75.657.300,00						3 Paket	80.152.450,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.954.000,00							3.935.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	3.954.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	3.935.000,00	Kelurahan Gedog
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.954.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	3.935.000,00	Kelurahan Gedog
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	12.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	12.000.000,00	Kelurahan Gedog
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	12.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	12.000.000,00	Kelurahan Gedog
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000,00							9.999.650,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	6 Paket	10.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	9.999.650,00	Kelurahan Gedog
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	6 Paket	10.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	9.999.650,00	Kelurahan Gedog
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	10.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Paket	9.999.650,00	Kelurahan Gedog

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	6 Paket	10.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	9.999.650,00	Kelurahan Gedog
	7.01.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.485.000,00							15.218.400,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	15.485.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Paket	15.218.400,00	Kelurahan Gedog
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	10 Paket	15.485.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Paket	15.218.400,00	Kelurahan Gedog
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							4.963.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	4.963.500,00	Kelurahan Gedog
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.754.000,00							2.754.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.754.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	2.754.000,00	Kelurahan Gedog
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						630.300,00							630.300,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	630.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	630.300,00	Kelurahan Gedog
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						741.432.100,00					ASN		1.312.374.520,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						741.432.100,00					ASN		1.312.374.520,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	26.102.000,00						1 Unit	76.269.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		15 Unit	5 Unit	187.025.100,00						5 Unit	606.105.520,00	
	7.01.01.2.	Pengadaan Mebel						0,00							22.242.500,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		20 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	22.242.500,00	Kelurahan Gedog
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		4 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	22.242.500,00	Kelurahan Gedog

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		9 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	22.242.500,00	Kelurahan Gedog
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		71 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	22.242.500,00	Kelurahan Gedog
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		20 Unit	22.242.500,00	Kelurahan Gedog
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		15 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	22.242.500,00	Kelurahan Gedog
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	22.242.500,00	Kelurahan Gedog
	7.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						14.991.000,00							78.258.900,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		6 Unit	1 Unit	14.991.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	78.258.900,00	Kelurahan Gedog
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		37 Unit	1 Unit	14.991.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	78.258.900,00	Kelurahan Gedog
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	1 Unit	14.991.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	78.258.900,00	Kelurahan Gedog
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		7 Unit	1 Unit	14.991.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	78.258.900,00	Kelurahan Gedog
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		8 Unit	1 Unit	14.991.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	78.258.900,00	Kelurahan Gedog

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		15 Unit	1 Unit	14.991.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	78.258.900,00	Kelurahan Gedog
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	1 Unit	14.991.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	78.258.900,00	Kelurahan Gedog
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.080.581.160,00					ASN		1.384.053.050,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						1.080.581.160,00					ASN		1.384.053.050,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	269.398.160,00						24 Laporan	234.875.450,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	811.183.000,00						12 Laporan	1.149.177.600,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						26.400.400,00							26.652.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	26.400.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Laporan	26.652.000,00	Kelurahan Gedog
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	24 Laporan	26.400.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	26.652.000,00	Kelurahan Gedog
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		2424 Laporan	24 Laporan	26.400.400,00	Kota Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Laporan	26.652.000,00	Kelurahan Gedog
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.800.000,00							1.836.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	1.836.000,00	Kelurahan Gedog
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	1.836.000,00	Kelurahan Gedog
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						486.257.200,00					ASN		735.691.500,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						486.257.200,00					ASN		735.691.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	106.250.000,00						1 Unit	105.649.600,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	47 Unit		47 Unit	47 Unit	113.449.700,00						47 Unit	98.957.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		Unit	Unit	220.000.000,00						1 Unit	474.700.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						7.493.500,00							6.137.200,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	7 Unit	7.493.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	6.137.200,00	Kelurahan Gedog
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	7 Unit	7.493.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Unit	6.137.200,00	Kelurahan Gedog
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	7.493.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	6.137.200,00	Kelurahan Gedog
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	7 Unit	7.493.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	6.137.200,00	Kelurahan Gedog
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	7 Unit	7.493.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		13 Unit	6.137.200,00	Kelurahan Gedog
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						17.816.100,00							7.914.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit		47 Unit	5 Unit	17.816.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		47 Unit	7.914.500,00	Kelurahan Gedog
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	17.816.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	7.914.500,00	Kelurahan Gedog
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	5 Unit	17.816.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	7.914.500,00	Kelurahan Gedog
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	5 Unit	17.816.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	7.914.500,00	Kelurahan Gedog
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						24.000.000,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	4.000.000,00	Kelurahan Gedog
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		2 Unit	1 Unit	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	4.000.000,00	Kelurahan Gedog
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Unit	1 Unit	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	4.000.000,00	Kelurahan Gedog
230,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						2.658.682.350,00							2.887.998.335,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan						487.608.500,00							528.283.600,00	
			1.Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	100 %		100 %	100 %	487.608.500,00						100 %	528.283.600,00	
			2.Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan	100 %		100 %	100 %	487.608.500,00						100 %	528.283.600,00	
			3.Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	487.608.500,00						100 %	528.283.600,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.347.624.250,00					Masyarakat		2.542.701.235,00	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum						2.347.624.250,00					Masyarakat		2.542.701.235,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.208.371.300,00						12 Dokumen	2.122.161.535,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	139.252.950,00						12 Laporan	420.539.700,00	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan						2.347.624.250,00					Masyarakat		2.542.701.235,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.208.371.300,00						12 Dokumen	2.122.161.535,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	139.252.950,00						12 Laporan	420.539.700,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						11.110.000,00							43.006.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.110.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		12 Laporan	43.006.600,00	Kelurahan Gedog
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	96 Laporan		96 Laporan	12 Laporan	11.110.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		96 Laporan	43.006.600,00	Kelurahan Gedog
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						424.650.000,00							412.550.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	424.650.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	412.550.000,00	Kelurahan Gedog
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di						311.058.100,00					Masyarakat		345.297.100,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat						311.058.100,00					Masyarakat		345.297.100,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.132.200,00						2 Dokumen	25.665.600,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	289.925.900,00						12 Laporan	319.631.500,00	
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar						311.058.100,00					Masyarakat		345.297.100,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.132.200,00						2 Dokumen	25.665.600,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	289.925.900,00						12 Laporan	319.631.500,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						2.639.800,00							2.639.800,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	2.639.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	2.639.800,00	Kelurahan Gedog
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.639.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	2.639.800,00	Kelurahan Gedog

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						49.208.700,00							70.087.200,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	49.208.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	70.087.200,00	Kelurahan Gedog
231,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						8.653.836.840,00							12.141.430.270,00	
		Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan						1.405.703.800,00							1.426.372.900,00	
			1.Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi	7 Kelompok		7 Kelompok	7 Kelompok	1.405.703.800,00						7 Kelompok	1.426.372.900,00	
			2.Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		100 %	100 %	1.405.703.800,00						100 %	1.426.372.900,00	
			3.Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang	100 %		100 %	100 %	1.405.703.800,00						100 %	1.426.372.900,00	
	7.01.03.2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						7.904.045.440,00					Masyarakat		11.300.310.870,00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan						7.904.045.440,00					Masyarakat		11.300.310.870,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	249.647.100,00						14 Lembaga Kemasyarakatan	243.123.248,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	2.199.889.460,00						6 Pokmas / Ormas	3.217.610.377,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	10 Unit	5.454.508.880,00						10 Unit	7.839.577.245,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di						42.079.900,00							43.079.800,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	42.079.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Lembaga Kemasyarakatan	43.079.800,00	Kelurahan Gedog
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	42.079.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Lembaga Kemasyarakatan	43.079.800,00	Kelurahan Gedog
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						875.000.000,00							875.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 Unit	15 Unit	875.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		8 Unit	875.000.000,00	Kelurahan Gedog
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	15 Unit	875.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		10 Unit	875.000.000,00	Kelurahan Gedog

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		11 Unit	15 Unit	875.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		11 Unit	875.000.000,00	Kelurahan Gedog
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	15 Unit	875.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		7 Unit	875.000.000,00	Kelurahan Gedog
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit		17 Unit	15 Unit	875.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		17 Unit	875.000.000,00	Kelurahan Gedog
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	15 Unit	875.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Unit	875.000.000,00	Kelurahan Gedog
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit		59 Unit	15 Unit	875.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		15 Unit	875.000.000,00	Kelurahan Gedog
	7.01.03.2.	Pemberdayaan Masyarakat di						415.320.000,00							434.415.200,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	415.320.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Pokmas / Ormas	434.415.200,00	Kelurahan Gedog
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	415.320.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	434.415.200,00	Kelurahan Gedog
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	415.320.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	434.415.200,00	Kelurahan Gedog
	7.01.03.2. 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						749.791.400,00					Masyarakat		841.119.400,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan perekonomian dan kesejahtaeraan masyarakat						749.791.400,00					Masyarakat		841.119.400,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	72.862.500,00						1 Laporan	139.304.500,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga K emasyarakat an		4 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	676.928.900,00						4 Lembaga K emasyarakat an	701.814.900,00	
	7.01.03.2. 03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						63.385.900,00							65.355.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	63.385.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Lembaga Kemasyarakatan	65.355.900,00	Kelurahan Gedog
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						9.918.000,00							8.522.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.918.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	8.522.000,00	Kelurahan Gedog
		Kelurahan Plosokerep						1.100.522.600,00							1.914.522.300,00	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						1.100.522.600,00							1.914.522.300,00	
	7.01	**KECAMATAN**						1.100.522.600,00							1.914.522.300,00	
232,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						13.186.602.210,00							15.429.508.816,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						173.784.600,00							239.373.500,00	
			1.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	173.784.600,00						100 %	239.373.500,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.750.000,00					ASN		147.410.538,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						21.750.000,00					ASN		147.410.538,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	12.600.000,00						3 Dokumen	16.012.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.320.000,00							1.320.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	1.320.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Dokumen	1.320.000,00	Kelurahan Plosokerep
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	9 Dokumen	1.320.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	1.320.000,00	Kelurahan Plosokerep
	7.01.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat						10.194.746.250,00					ASN		11.058.763.050,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						10.194.746.250,00					ASN		11.058.763.050,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.970.000,00						4 Laporan	12.726.500,00	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.650.000,00							1.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.650.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	1.650.000,00	Kelurahan Plosokerep
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						168.906.900,00					ASN		217.296.670,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						168.906.900,00					ASN		217.296.670,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	26 Orang		26 Orang	26 Orang	155.104.600,00						26 Orang	153.491.170,00	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						14.092.800,00							16.098.600,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang		28 Orang	30 Orang	14.092.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		28 Orang	16.098.600,00	Kelurahan Plosokerep
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang		26 Orang	30 Orang	14.092.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		26 Orang	16.098.600,00	Kelurahan Plosokerep
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	14.092.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		30 Orang	16.098.600,00	Kelurahan Plosokerep
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang		42 Orang	30 Orang	14.092.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		42 Orang	16.098.600,00	Kelurahan Plosokerep
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		60 Orang	30 Orang	14.092.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		60 Orang	16.098.600,00	Kelurahan Plosokerep
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						491.998.600,00					ASN		564.669.488,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						491.998.600,00					ASN		564.669.488,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						491.998.600,00					ASN		564.669.488,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	22.032.000,00						12 Dokumen	22.169.700,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	22.032.000,00						12 Dokumen	22.169.700,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.900,00						1 Dokumen	5.074.100,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.900,00						1 Dokumen	5.074.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	12 Paket		12 Paket	12 Paket	136.811.500,00						12 Paket	163.167.150,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	12 Paket		12 Paket	12 Paket	136.811.500,00						12 Paket	163.167.150,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	51.342.900,00						1 Paket	54.370.988,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	51.342.900,00						1 Paket	54.370.988,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	38.890.900,00						1 Paket	32.123.800,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	38.890.900,00						1 Paket	32.123.800,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.247.700,00						3 Paket	107.616.100,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.247.700,00						3 Paket	107.616.100,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	75.657.300,00						3 Paket	80.152.450,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	75.657.300,00						3 Paket	80.152.450,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.713.700,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	5.713.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	4.000.000,00	Kelurahan Plosokerep
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.713.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	4.000.000,00	Kelurahan Plosokerep
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						11.210.600,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	11.210.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	12.000.000,00	Kelurahan Plosokerep
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	11.210.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	12.000.000,00	Kelurahan Plosokerep
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						9.746.900,00							8.847.800,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	9.746.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	8.847.800,00	Kelurahan Plosokerep

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	5 Paket	9.746.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	8.847.800,00	Kelurahan Plosokerep
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	5 Paket	9.746.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	8.847.800,00	Kelurahan Plosokerep
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	5 Paket	9.746.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Paket	8.847.800,00	Kelurahan Plosokerep
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						11.860.000,00							15.440.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	10 Paket	11.860.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Paket	15.440.000,00	Kelurahan Plosokerep
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	11.860.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Paket	15.440.000,00	Kelurahan Plosokerep
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.134.900,00							6.135.900,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.134.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	6.135.900,00	Kelurahan Plosokerep
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.754.000,00							2.754.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.754.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	2.754.000,00	Kelurahan Plosokerep
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						630.300,00							630.300,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	630.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	630.300,00	Kelurahan Plosokerep
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						741.432.100,00					ASN		1.312.374.520,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						741.432.100,00					ASN		1.312.374.520,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	26.102.000,00						1 Unit	76.269.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		37 Unit	1 Unit	187.025.100,00						1 Unit	606.105.520,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							34.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		9 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	34.600.000,00	Kelurahan Plosokerep
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		4 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	34.600.000,00	Kelurahan Plosokerep
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		20 Unit	34.600.000,00	Kelurahan Plosokerep
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		71 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	34.600.000,00	Kelurahan Plosokerep
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		20 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	34.600.000,00	Kelurahan Plosokerep
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	34.600.000,00	Kelurahan Plosokerep
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		15 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	34.600.000,00	Kelurahan Plosokerep
	7.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						27.611.600,00							70.703.100,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		7 Unit	1 Unit	27.611.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	70.703.100,00	Kelurahan Plosokerep
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		37 Unit	1 Unit	27.611.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	70.703.100,00	Kelurahan Plosokerep
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	1 Unit	27.611.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	70.703.100,00	Kelurahan Plosokerep

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		6 Unit	1 Unit	27.611.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	70.703.100,00	Kelurahan Plosokerep
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		8 Unit	1 Unit	27.611.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	70.703.100,00	Kelurahan Plosokerep
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		15 Unit	1 Unit	27.611.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	70.703.100,00	Kelurahan Plosokerep
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	1 Unit	27.611.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	70.703.100,00	Kelurahan Plosokerep
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.080.581.160,00					ASN		1.384.053.050,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						1.080.581.160,00					ASN		1.384.053.050,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	269.398.160,00						24 Laporan	234.875.450,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	811.183.000,00						12 Laporan	1.149.177.600,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						35.800.000,00							35.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		2424 Laporan	36 Laporan	35.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Laporan	35.800.000,00	Kelurahan Plosokerep
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	36 Laporan	35.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Laporan	35.800.000,00	Kelurahan Plosokerep
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	35.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	35.800.000,00	Kelurahan Plosokerep
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.800.000,00							1.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	1.800.000,00	Kelurahan Plosokerep

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	1.800.000,00	Kelurahan Plosokerep
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						486.257.200,00					ASN		735.691.500,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						486.257.200,00					ASN		735.691.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	106.250.000,00						1 Unit	105.649.600,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	47 Unit		47 Unit	47 Unit	113.449.700,00						47 Unit	98.957.200,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		Unit	Unit	220.000.000,00						1 Unit	474.700.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						7.405.600,00							6.593.200,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	6 Unit	7.405.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	6.593.200,00	Kelurahan Plosokerep
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	6 Unit	7.405.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		13 Unit	6.593.200,00	Kelurahan Plosokerep
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	6 Unit	7.405.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	6.593.200,00	Kelurahan Plosokerep
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	6 Unit	7.405.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Unit	6.593.200,00	Kelurahan Plosokerep
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	7.405.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	6.593.200,00	Kelurahan Plosokerep
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12.054.200,00							18.000.600,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit		47 Unit	5 Unit	12.054.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		47 Unit	18.000.600,00	Kelurahan Plosokerep

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	12.054.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	18.000.600,00	Kelurahan Plosokerep
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	5 Unit	12.054.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	18.000.600,00	Kelurahan Plosokerep
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	5 Unit	12.054.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	18.000.600,00	Kelurahan Plosokerep
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						24.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	3.000.000,00	Kelurahan Plosokerep
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Unit	0 Unit	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	3.000.000,00	Kelurahan Plosokerep
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		2 Unit	0 Unit	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	3.000.000,00	Kelurahan Plosokerep
233,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						2.658.682.350,00							2.887.998.335,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan						238.156.300,00							293.292.100,00	
			1.Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	100 %		100 %	100 %	238.156.300,00						100 %	293.292.100,00	
			2.Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan	100 %		100 %	100 %	238.156.300,00						100 %	293.292.100,00	
			3.Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	238.156.300,00						100 %	293.292.100,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.347.624.250,00					Masyarakat		2.542.701.235,00	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum						2.347.624.250,00					Masyarakat		2.542.701.235,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.208.371.300,00						12 Dokumen	2.122.161.535,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	139.252.950,00						12 Laporan	420.539.700,00	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan						2.347.624.250,00					Masyarakat		2.542.701.235,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.208.371.300,00						12 Dokumen	2.122.161.535,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	139.252.950,00						12 Laporan	420.539.700,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						7.750.000,00							45.596.600,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	96 Laporan		96 Laporan	12 Laporan	7.750.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		96 Laporan	45.596.600,00	Kelurahan Plosokerep
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.750.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Plosokerep || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	45.596.600,00	Kelurahan Plosokerep
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						201.852.800,00							214.916.800,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	201.852.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	214.916.800,00	Kelurahan Plosokerep
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di						311.058.100,00					Masyarakat		345.297.100,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat						311.058.100,00					Masyarakat		345.297.100,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.132.200,00						2 Dokumen	25.665.600,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	289.925.900,00						12 Laporan	319.631.500,00	
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar						311.058.100,00					Masyarakat		345.297.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.132.200,00						2 Dokumen	25.665.600,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	289.925.900,00						12 Laporan	319.631.500,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						2.639.800,00							2.294.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.639.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	2.294.000,00	Kelurahan Plosokerep
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	2.639.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	2.294.000,00	Kelurahan Plosokerep
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						25.913.700,00							30.484.700,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.913.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	30.484.700,00	Kelurahan Plosokerep
234,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						8.653.836.840,00							12.141.430.270,00	
		Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan						688.581.700,00							1.381.856.700,00	
			1.Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi	7 Kelompok		7 Kelompok	7 Kelompok	688.581.700,00						7 Kelompok	1.381.856.700,00	
			2.Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		100 %	100 %	688.581.700,00						100 %	1.381.856.700,00	
			3.Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang	100 %		100 %	100 %	688.581.700,00						100 %	1.381.856.700,00	
	7.01.03.2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						7.904.045.440,00					Masyarakat		11.300.310.870,00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan						7.904.045.440,00					Masyarakat		11.300.310.870,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	249.647.100,00						14 Lembaga Kemasyarakatan	243.123.248,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	2.199.889.460,00						6 Pokmas / Ormas	3.217.610.377,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	10 Unit	5.454.508.880,00						10 Unit	7.839.577.245,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di						21.920.900,00							22.351.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	21.920.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Lembaga Kemasyarakatan	22.351.300,00	Kelurahan Plosokerep
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	21.920.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Lembaga Kemasyarakatan	22.351.300,00	Kelurahan Plosokerep
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						440.000.000,00							805.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	7 Unit	440.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	805.000.000,00	Kelurahan Plosokerep
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	7 Unit	440.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Unit	805.000.000,00	Kelurahan Plosokerep
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		11 Unit	7 Unit	440.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Unit	805.000.000,00	Kelurahan Plosokerep
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit		59 Unit	7 Unit	440.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		15 Unit	805.000.000,00	Kelurahan Plosokerep
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit		17 Unit	7 Unit	440.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		17 Unit	805.000.000,00	Kelurahan Plosokerep
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	7 Unit	440.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	805.000.000,00	Kelurahan Plosokerep
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 Unit	7 Unit	440.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Unit	805.000.000,00	Kelurahan Plosokerep
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						167.370.000,00							488.550.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	167.370.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	488.550.000,00	Kelurahan Plosokerep

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	167.370.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	488.550.000,00	Kelurahan Plosokerep
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	167.370.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Pokmas / Ormas	488.550.000,00	Kelurahan Plosokerep
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						749.791.400,00					Masyarakat		841.119.400,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan perekonomian dan kesejahtaeraan masyarakat						749.791.400,00					Masyarakat		841.119.400,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	72.862.500,00						1 Laporan	139.304.500,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga K emasyarakat an		4 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	676.928.900,00						4 Lembaga K emasyarakat an	701.814.900,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						51.627.300,00							58.150.650,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga K emasyarakat an		4 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	51.627.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Lembaga K emasyarakat an	58.150.650,00	Kelurahan Plosokerep
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						7.663.500,00							7.804.750,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.663.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	7.804.750,00	Kelurahan Plosokerep
		Kelurahan Klampok						1.152.014.700,00							1.900.604.800,00	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						1.152.014.700,00							1.900.604.800,00	
	7.01	**KECAMATAN**						1.152.014.700,00							1.900.604.800,00	
235,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						13.186.602.210,00							15.429.508.816,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						115.477.200,00							201.637.950,00	
			1.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	115.477.200,00						100 %	201.637.950,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.750.000,00					ASN		147.410.538,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						21.750.000,00					ASN		147.410.538,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	12.600.000,00						3 Dokumen	16.012.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.320.000,00							1.320.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	1.320.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Dokumen	1.320.000,00	Kelurahan Klampok

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	9 Dokumen	1.320.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	1.320.000,00	Kelurahan Klampok
	7.01.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat						10.194.746.250,00					ASN		11.058.763.050,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						10.194.746.250,00					ASN		11.058.763.050,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.970.000,00						4 Laporan	12.726.500,00	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.320.000,00							1.650.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.320.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Klampok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Pembang unan infrastruktur dan lingkungan yang berkel anjutan		4 Laporan	1.650.000,00	Kelurahan Klampok
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						168.906.900,00					ASN		217.296.670,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						168.906.900,00					ASN		217.296.670,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	26 Orang		26 Orang	26 Orang	155.104.600,00						26 Orang	153.491.170,00	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						16.013.600,00							16.039.400,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang		26 Orang	28 Orang	16.013.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		26 Orang	16.039.400,00	Kelurahan Klampok
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		30 Orang	28 Orang	16.013.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		30 Orang	16.039.400,00	Kelurahan Klampok
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang		42 Orang	28 Orang	16.013.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		42 Orang	16.039.400,00	Kelurahan Klampok
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		60 Orang	28 Orang	16.013.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		60 Orang	16.039.400,00	Kelurahan Klampok
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang		28 Orang	28 Orang	16.013.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		28 Orang	16.039.400,00	Kelurahan Klampok

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						491.998.600,00					ASN		564.669.488,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						491.998.600,00					ASN		564.669.488,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						491.998.600,00					ASN		564.669.488,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	22.032.000,00						12 Dokumen	22.169.700,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	22.032.000,00						12 Dokumen	22.169.700,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.900,00						1 Dokumen	5.074.100,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.900,00						1 Dokumen	5.074.100,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	10 Paket		10 Paket	10 Paket	136.811.500,00						10 Paket	163.167.150,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	10 Paket		10 Paket	10 Paket	136.811.500,00						10 Paket	163.167.150,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	51.342.900,00						1 Paket	54.370.988,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	51.342.900,00						1 Paket	54.370.988,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	38.890.900,00						1 Paket	32.123.800,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	38.890.900,00						1 Paket	32.123.800,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.247.700,00						3 Paket	107.616.100,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.247.700,00						3 Paket	107.616.100,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	75.657.300,00						3 Paket	80.152.450,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	75.657.300,00						3 Paket	80.152.450,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.222.500,00							3.964.800,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	4.222.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	3.964.800,00	Kelurahan Klampok
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.222.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	3.964.800,00	Kelurahan Klampok
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.573.600,00							11.924.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	9.573.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	11.924.000,00	Kelurahan Klampok
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	9.573.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	11.924.000,00	Kelurahan Klampok
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						8.834.500,00							9.125.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	3 Paket	8.834.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Paket	9.125.000,00	Kelurahan Klampok
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	8.834.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	9.125.000,00	Kelurahan Klampok
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	8.834.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	9.125.000,00	Kelurahan Klampok
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	3 Paket	8.834.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	9.125.000,00	Kelurahan Klampok
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.100.000,00							15.077.600,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	10 Paket	15.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Paket	15.077.600,00	Kelurahan Klampok
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	15.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Paket	15.077.600,00	Kelurahan Klampok
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.707.200,00							4.625.200,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.707.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	4.625.200,00	Kelurahan Klampok
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.754.000,00							2.754.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.754.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	2.754.000,00	Kelurahan Klampok

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.260.600,00							630.300,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.260.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	630.300,00	Kelurahan Klampok
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						741.432.100,00					ASN		1.312.374.520,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						741.432.100,00					ASN		1.312.374.520,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		15 Unit	5 Unit	187.025.100,00						5 Unit	606.105.520,00	
	7.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						12.517.400,00							87.798.700,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	1 Unit	12.517.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	87.798.700,00	Kelurahan Klampok
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		37 Unit	1 Unit	12.517.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	87.798.700,00	Kelurahan Klampok
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		8 Unit	1 Unit	12.517.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	87.798.700,00	Kelurahan Klampok
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	1 Unit	12.517.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	87.798.700,00	Kelurahan Klampok
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		15 Unit	1 Unit	12.517.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	87.798.700,00	Kelurahan Klampok
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		7 Unit	1 Unit	12.517.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	87.798.700,00	Kelurahan Klampok
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		6 Unit	1 Unit	12.517.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	87.798.700,00	Kelurahan Klampok
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.080.581.160,00					ASN		1.384.053.050,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						1.080.581.160,00					ASN		1.384.053.050,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	269.398.160,00						24 Laporan	234.875.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	811.183.000,00						12 Laporan	1.149.177.600,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						22.934.800,00							24.542.250,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	24 Laporan	22.934.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	24.542.250,00	Kelurahan Klampok
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		2424 Laporan	24 Laporan	22.934.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Laporan	24.542.250,00	Kelurahan Klampok
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	22.934.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Laporan	24.542.250,00	Kelurahan Klampok
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.836.000,00							1.836.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	12 Laporan	1.836.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	1.836.000,00	Kelurahan Klampok
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.836.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	1.836.000,00	Kelurahan Klampok
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						486.257.200,00					ASN		735.691.500,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						486.257.200,00					ASN		735.691.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	106.250.000,00						1 Unit	105.649.600,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	47 Unit		47 Unit	47 Unit	113.449.700,00						47 Unit	98.957.200,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.065.000,00							10.523.500,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	7 Unit	5.065.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	10.523.500,00	Kelurahan Klampok
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	7 Unit	5.065.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		13 Unit	10.523.500,00	Kelurahan Klampok

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	7 Unit	5.065.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	10.523.500,00	Kelurahan Klampok
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	5.065.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	10.523.500,00	Kelurahan Klampok
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	7 Unit	5.065.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Unit	10.523.500,00	Kelurahan Klampok
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.338.000,00							9.827.200,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	6 Unit	8.338.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	9.827.200,00	Kelurahan Klampok
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit		47 Unit	6 Unit	8.338.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		47 Unit	9.827.200,00	Kelurahan Klampok
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	6 Unit	8.338.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	9.827.200,00	Kelurahan Klampok
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	6 Unit	8.338.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	9.827.200,00	Kelurahan Klampok
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						486.257.200,00					ASN		735.691.500,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	-		-	-	0,00						-	9.827.200,00	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							9.827.200,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		-	9.827.200,00	Kelurahan Klampok
236,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						2.658.682.350,00							2.887.998.335,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan						263.423.400,00							293.014.600,00	
			1.Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	100 %		100 %	100 %	263.423.400,00						100 %	293.014.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan	100 %		100 %	100 %	263.423.400,00						100 %	293.014.600,00	
			3.Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	263.423.400,00						100 %	293.014.600,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.347.624.250,00					Masyarakat		2.542.701.235,00	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum						2.347.624.250,00					Masyarakat		2.542.701.235,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.208.371.300,00						12 Dokumen	2.122.161.535,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	139.252.950,00						12 Laporan	420.539.700,00	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan						2.347.624.250,00					Masyarakat		2.542.701.235,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.208.371.300,00						12 Dokumen	2.122.161.535,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	139.252.950,00						12 Laporan	420.539.700,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						9.350.000,00							45.514.600,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	96 Laporan		96 Laporan	12 Laporan	9.350.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Klampok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		96 Laporan	45.514.600,00	Kelurahan Klampok
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.350.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Klampok || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	45.514.600,00	Kelurahan Klampok
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						221.330.000,00							211.203.400,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	221.330.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	211.203.400,00	Kelurahan Klampok

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di						311.058.100,00					Masyarakat		345.297.100,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat						311.058.100,00					Masyarakat		345.297.100,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.132.200,00						2 Dokumen	25.665.600,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	289.925.900,00						12 Laporan	319.631.500,00	
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar						311.058.100,00					Masyarakat		345.297.100,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.132.200,00						2 Dokumen	25.665.600,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	289.925.900,00						12 Laporan	319.631.500,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						2.639.800,00							2.639.800,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	2.639.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	2.639.800,00	Kelurahan Klampok
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.639.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	2.639.800,00	Kelurahan Klampok
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						30.103.600,00							33.656.800,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.103.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	33.656.800,00	Kelurahan Klampok
237,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						8.653.836.840,00							12.141.430.270,00	
		Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan						771.794.100,00							1.396.125.050,00	
			1.Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi	7 Kelompok		7 Kelompok	7 Kelompok	771.794.100,00						7 Kelompok	1.396.125.050,00	
			2.Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		100 %	100 %	771.794.100,00						100 %	1.396.125.050,00	
			3.Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang	100 %		100 %	100 %	771.794.100,00						100 %	1.396.125.050,00	
	7.01.03.2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						7.904.045.440,00					Masyarakat		11.300.310.870,00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan						7.904.045.440,00					Masyarakat		11.300.310.870,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	249.647.100,00						14 Lembaga Kemasyarakatan	243.123.248,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	2.199.889.460,00						6 Pokmas / Ormas	3.217.610.377,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	10 Unit	5.454.508.880,00						10 Unit	7.839.577.245,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di						22.240.800,00							24.709.400,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	22.240.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Lembaga Kemasyarakatan	24.709.400,00	Kelurahan Klampok
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	22.240.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Lembaga Kemasyarakatan	24.709.400,00	Kelurahan Klampok
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						549.000.000,00							1.130.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	3 Unit	549.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	1.130.000.000,00	Kelurahan Klampok
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit		59 Unit	3 Unit	549.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		15 Unit	1.130.000.000,00	Kelurahan Klampok
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		11 Unit	3 Unit	549.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Unit	1.130.000.000,00	Kelurahan Klampok
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	3 Unit	549.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Unit	1.130.000.000,00	Kelurahan Klampok
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	3 Unit	549.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	1.130.000.000,00	Kelurahan Klampok
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit		17 Unit	3 Unit	549.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		17 Unit	1.130.000.000,00	Kelurahan Klampok

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 Unit	3 Unit	549.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Unit	1.130.000.000,00	Kelurahan Klampok
	7.01.03.2.	Pemberdayaan Masyarakat di						145.650.000,00							166.511.400,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	145.650.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Pokmas / Ormas	166.511.400,00	Kelurahan Klampok
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	145.650.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	166.511.400,00	Kelurahan Klampok
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	145.650.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	166.511.400,00	Kelurahan Klampok
	7.01.03.2. 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						749.791.400,00					Masyarakat		841.119.400,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan perekonomian dan kesejahtaeraan masyarakat						749.791.400,00					Masyarakat		841.119.400,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	72.862.500,00						1 Laporan	139.304.500,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga K emasyarakat an		4 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	676.928.900,00						4 Lembaga K emasyarakat an	701.814.900,00	
	7.01.03.2. 03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						48.353.300,00							66.268.250,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga K emasyarakat an		4 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	48.353.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Lembaga K emasyarakat an	66.268.250,00	Kelurahan Klampok
	7.01.03.2. 03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						6.550.000,00							8.636.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.550.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	8.636.000,00	Kelurahan Klampok
		Kelurahan Sananwetan						2.407.066.700,00							4.026.597.928,00	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						2.407.066.700,00							4.026.597.928,00	
	7.01	**KECAMATAN**						2.407.066.700,00							4.026.597.928,00	
238,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						13.186.602.210,00							15.429.508.816,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						160.355.600,00							217.531.808,00	
			1.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	160.355.600,00						100 %	217.531.808,00	
	7.01.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.750.000,00					ASN		147.410.538,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						21.750.000,00					ASN		147.410.538,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	12.600.000,00						3 Dokumen	16.012.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.320.000,00							1.426.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	9 Dokumen	1.320.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	1.426.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	1.320.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Dokumen	1.426.000,00	Kelurahan Sananwetan
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.194.746.250,00					ASN		11.058.763.050,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						10.194.746.250,00					ASN		11.058.763.050,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.970.000,00						4 Laporan	12.726.500,00	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.650.000,00							1.544.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.650.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Sananwetan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	1.544.000,00	Kelurahan Sananwetan
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						168.906.900,00					ASN		217.296.670,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						168.906.900,00					ASN		217.296.670,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	26 Orang		26 Orang	26 Orang	155.104.600,00						26 Orang	153.491.170,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket		1 Paket	1 Paket	13.802.300,00						1 Paket	63.805.500,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							7.140.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		30 Paket	7.140.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	7.140.000,00	Kelurahan Sananwetan
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						18.081.000,00							16.133.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		30 Orang	28 Orang	18.081.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		30 Orang	16.133.400,00	Kelurahan Sananwetan
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang		26 Orang	28 Orang	18.081.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		26 Orang	16.133.400,00	Kelurahan Sananwetan
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang		28 Orang	28 Orang	18.081.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		28 Orang	16.133.400,00	Kelurahan Sananwetan
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang		42 Orang	28 Orang	18.081.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		42 Orang	16.133.400,00	Kelurahan Sananwetan
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		60 Orang	28 Orang	18.081.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		60 Orang	16.133.400,00	Kelurahan Sananwetan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						491.998.600,00					ASN		564.669.488,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						491.998.600,00					ASN		564.669.488,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						491.998.600,00					ASN		564.669.488,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	22.032.000,00						12 Dokumen	22.169.700,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	22.032.000,00						12 Dokumen	22.169.700,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.900,00						1 Dokumen	5.074.100,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.900,00						1 Dokumen	5.074.100,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	10 Paket		10 Paket	10 Paket	136.811.500,00						10 Paket	163.167.150,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	10 Paket		10 Paket	10 Paket	136.811.500,00						10 Paket	163.167.150,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	51.342.900,00						1 Paket	54.370.988,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	51.342.900,00						1 Paket	54.370.988,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	38.890.900,00						1 Paket	32.123.800,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	38.890.900,00						1 Paket	32.123.800,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.247.700,00						3 Paket	107.616.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.247.700,00						3 Paket	107.616.100,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	75.657.300,00						3 Paket	80.152.450,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	75.657.300,00						3 Paket	80.152.450,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.000.100,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	4.000.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	4.000.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.000.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	4.000.000,00	Kelurahan Sananwetan
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.433.300,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	10.433.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	12.000.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	10.433.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	12.000.000,00	Kelurahan Sananwetan
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.234.900,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	7.234.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	10.000.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	7.234.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	10.000.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	3 Paket	7.234.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	10.000.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	3 Paket	7.234.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Paket	10.000.000,00	Kelurahan Sananwetan
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	10 Paket	15.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Paket	15.000.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	15.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Paket	15.000.000,00	Kelurahan Sananwetan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							6.421.988,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	6.421.988,00	Kelurahan Sananwetan
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.754.000,00							2.754.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.754.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	2.754.000,00	Kelurahan Sananwetan
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						630.300,00							630.300,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	630.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	630.300,00	Kelurahan Sananwetan
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						741.432.100,00					ASN		1.312.374.520,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						741.432.100,00					ASN		1.312.374.520,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	26.102.000,00						1 Unit	76.269.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		15 Unit	5 Unit	187.025.100,00						5 Unit	606.105.520,00	
	7.01.01.2.	Pengadaan Mebel						0,00							5.814.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		71 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	5.814.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		20 Unit	5.814.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		9 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	5.814.000,00	Kelurahan Sananwetan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		4 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	5.814.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		20 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	5.814.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	5.814.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		15 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	5.814.000,00	Kelurahan Sananwetan
	7.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						21.534.200,00							79.137.720,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		37 Unit	7 Unit	21.534.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	79.137.720,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	7 Unit	21.534.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	79.137.720,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		6 Unit	7 Unit	21.534.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	79.137.720,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		7 Unit	7 Unit	21.534.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	79.137.720,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		8 Unit	7 Unit	21.534.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	79.137.720,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		15 Unit	7 Unit	21.534.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	79.137.720,00	Kelurahan Sananwetan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	21.534.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	79.137.720,00	Kelurahan Sananwetan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.080.581.160,00					ASN		1.384.053.050,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						1.080.581.160,00					ASN		1.384.053.050,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	269.398.160,00						24 Laporan	234.875.450,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	811.183.000,00						12 Laporan	1.149.177.600,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						35.798.700,00							35.798.700,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	35.798.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	35.798.700,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		2424 Laporan	36 Laporan	35.798.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Laporan	35.798.700,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	36 Laporan	35.798.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Laporan	35.798.700,00	Kelurahan Sananwetan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.836.000,00							1.836.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.836.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	1.836.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	12 Laporan	1.836.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	1.836.000,00	Kelurahan Sananwetan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						486.257.200,00					ASN		735.691.500,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						486.257.200,00					ASN		735.691.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	106.250.000,00						1 Unit	105.649.600,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	47 Unit		47 Unit	47 Unit	113.449.700,00						47 Unit	98.957.200,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		Unit	Unit	220.000.000,00						1 Unit	474.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						3.173.400,00							7.486.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	1 Unit	3.173.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Unit	7.486.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	1 Unit	3.173.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		13 Unit	7.486.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.173.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	7.486.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	1 Unit	3.173.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	7.486.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	1 Unit	3.173.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	7.486.000,00	Kelurahan Sananwetan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.909.700,00							7.909.700,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	7.909.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	7.909.700,00	Kelurahan Sananwetan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	7 Unit	7.909.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	7.909.700,00	Kelurahan Sananwetan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	7 Unit	7.909.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	7.909.700,00	Kelurahan Sananwetan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit		47 Unit	7 Unit	7.909.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		47 Unit	7.909.700,00	Kelurahan Sananwetan
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						24.000.000,00							2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Unit	1 Unit	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	2.500.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	2.500.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		2 Unit	1 Unit	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	2.500.000,00	Kelurahan Sananwetan
239,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						2.658.682.350,00							2.887.998.335,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan						577.569.000,00							631.535.443,00	
			1.Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	100 %		100 %	100 %	577.569.000,00						100 %	631.535.443,00	
			2.Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan	100 %		100 %	100 %	577.569.000,00						100 %	631.535.443,00	
			3.Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	577.569.000,00						100 %	631.535.443,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.347.624.250,00					Masyarakat		2.542.701.235,00	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum						2.347.624.250,00					Masyarakat		2.542.701.235,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.208.371.300,00						12 Dokumen	2.122.161.535,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	139.252.950,00						12 Laporan	420.539.700,00	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan						2.347.624.250,00					Masyarakat		2.542.701.235,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.208.371.300,00						12 Dokumen	2.122.161.535,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	139.252.950,00						12 Laporan	420.539.700,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						14.800.000,00							47.946.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	96 Laporan		96 Laporan	12 Laporan	14.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Sananwetan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		96 Laporan	47.946.600,00	Kelurahan Sananwetan
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	14.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Sananwetan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	47.946.600,00	Kelurahan Sananwetan
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						517.290.000,00							510.989.843,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	517.290.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	510.989.843,00	Kelurahan Sananwetan
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di						311.058.100,00					Masyarakat		345.297.100,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat						311.058.100,00					Masyarakat		345.297.100,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.132.200,00						2 Dokumen	25.665.600,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	289.925.900,00						12 Laporan	319.631.500,00	
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar						311.058.100,00					Masyarakat		345.297.100,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.132.200,00						2 Dokumen	25.665.600,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	289.925.900,00						12 Laporan	319.631.500,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						2.670.000,00							2.670.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	2.670.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	2.670.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.670.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	2.670.000,00	Kelurahan Sananwetan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						42.809.000,00							69.929.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	42.809.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	69.929.000,00	Kelurahan Sananwetan
240,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						8.653.836.840,00							12.141.430.270,00	
		Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan						1.669.142.100,00							3.177.530.677,00	
			1.Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi	7 Kelompok		7 Kelompok	7 Kelompok	1.669.142.100,00						7 Kelompok	3.177.530.677,00	
			2.Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		100 %	100 %	1.669.142.100,00						100 %	3.177.530.677,00	
			3.Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang	100 %		100 %	100 %	1.669.142.100,00						100 %	3.177.530.677,00	
	7.01.03.2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						7.904.045.440,00					Masyarakat		11.300.310.870,00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan						7.904.045.440,00					Masyarakat		11.300.310.870,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	249.647.100,00						14 Lembaga Kemasyarakatan	243.123.248,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	2.199.889.460,00						6 Pokmas / Ormas	3.217.610.377,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	10 Unit	5.454.508.880,00						10 Unit	7.839.577.245,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di						47.483.700,00							49.856.400,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	47.483.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Lembaga Kemasyarakatan	49.856.400,00	Kelurahan Sananwetan
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	47.483.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Lembaga Kemasyarakatan	49.856.400,00	Kelurahan Sananwetan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1.250.000.000,00							2.240.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit		17 Unit	17 Unit	1.250.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		17 Unit	2.240.000.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	17 Unit	1.250.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Unit	2.240.000.000,00	Kelurahan Sananwetan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		11 Unit	17 Unit	1.250.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Unit	2.240.000.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit		59 Unit	17 Unit	1.250.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		15 Unit	2.240.000.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	17 Unit	1.250.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	2.240.000.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	17 Unit	1.250.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	2.240.000.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 Unit	17 Unit	1.250.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Unit	2.240.000.000,00	Kelurahan Sananwetan
	7.01.03.2.	Pemberdayaan Masyarakat di						302.664.900,00							809.995.077,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	302.664.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Pokmas / Ormas	809.995.077,00	Kelurahan Sananwetan
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	302.664.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	809.995.077,00	Kelurahan Sananwetan
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	302.664.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	809.995.077,00	Kelurahan Sananwetan
	7.01.03.2. 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						749.791.400,00					Masyarakat		841.119.400,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan perekonomian dan kesejahtaeraan masyarakat						749.791.400,00					Masyarakat		841.119.400,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	72.862.500,00						1 Laporan	139.304.500,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	676.928.900,00						4 Lembaga Kemasyarakatan	701.814.900,00	
	7.01.03.2. 03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						65.993.500,00							69.157.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	65.993.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Lembaga Kemasyarakatan	69.157.200,00	Kelurahan Sananwetan
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						3.000.000,00							8.522.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	8.522.000,00	Kelurahan Sananwetan
		Kelurahan Rembang						762.354.200,00							1.276.161.400,00	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						762.354.200,00							1.276.161.400,00	
	7.01	**KECAMATAN**						762.354.200,00							1.276.161.400,00	
241,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						13.186.602.210,00							15.429.508.816,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						135.999.000,00							184.747.600,00	
			1.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	135.999.000,00						100 %	184.747.600,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.750.000,00					ASN		147.410.538,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						21.750.000,00					ASN		147.410.538,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	12.600.000,00						3 Dokumen	16.012.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.320.000,00							1.320.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	9 Dokumen	1.320.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	1.320.000,00	Kelurahan Rembang
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	1.320.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Dokumen	1.320.000,00	Kelurahan Rembang
	7.01.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat						10.194.746.250,00					ASN		11.058.763.050,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						10.194.746.250,00					ASN		11.058.763.050,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.970.000,00						4 Laporan	12.726.500,00	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.650.000,00							1.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.650.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Rembang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	1.650.000,00	Kelurahan Rembang
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						168.906.900,00					ASN		217.296.670,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						168.906.900,00					ASN		217.296.670,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	26 Orang		26 Orang	26 Orang	155.104.600,00						26 Orang	153.491.170,00	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						18.899.000,00							17.493.400,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	18.899.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		30 Orang	17.493.400,00	Kelurahan Rembang
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang		42 Orang	30 Orang	18.899.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		42 Orang	17.493.400,00	Kelurahan Rembang
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		60 Orang	30 Orang	18.899.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		60 Orang	17.493.400,00	Kelurahan Rembang
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang		26 Orang	30 Orang	18.899.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		26 Orang	17.493.400,00	Kelurahan Rembang
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang		28 Orang	30 Orang	18.899.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		28 Orang	17.493.400,00	Kelurahan Rembang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						491.998.600,00					ASN		564.669.488,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						491.998.600,00					ASN		564.669.488,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						491.998.600,00					ASN		564.669.488,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	22.032.000,00						12 Dokumen	22.169.700,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	22.032.000,00						12 Dokumen	22.169.700,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.900,00						1 Dokumen	5.074.100,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.900,00						1 Dokumen	5.074.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	10 Paket		10 Paket	10 Paket	136.811.500,00						10 Paket	163.167.150,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	10 Paket		10 Paket	10 Paket	136.811.500,00						10 Paket	163.167.150,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	51.342.900,00						1 Paket	54.370.988,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	51.342.900,00						1 Paket	54.370.988,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	38.890.900,00						1 Paket	32.123.800,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	38.890.900,00						1 Paket	32.123.800,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.247.700,00						3 Paket	107.616.100,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	100.247.700,00						4 Paket	107.616.100,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	75.657.300,00						3 Paket	80.152.450,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	75.657.300,00						3 Paket	80.152.450,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.036.800,00							4.170.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	4.036.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	4.170.000,00	Kelurahan Rembang
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.036.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	4.170.000,00	Kelurahan Rembang
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						11.730.200,00							11.997.700,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	11.730.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	11.997.700,00	Kelurahan Rembang
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	11.730.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	11.997.700,00	Kelurahan Rembang
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.694.500,00							9.744.600,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	7.694.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	9.744.600,00	Kelurahan Rembang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	4 Paket	7.694.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	9.744.600,00	Kelurahan Rembang
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	4 Paket	7.694.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Paket	9.744.600,00	Kelurahan Rembang
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.694.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	9.744.600,00	Kelurahan Rembang
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						17.875.000,00							15.586.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	17.875.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Paket	15.586.000,00	Kelurahan Rembang
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	10 Paket	17.875.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Paket	15.586.000,00	Kelurahan Rembang
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.075.900,00							4.380.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.075.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	4.380.000,00	Kelurahan Rembang
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.754.000,00							2.754.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.754.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	2.754.000,00	Kelurahan Rembang
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.260.600,00							630.300,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.260.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	630.300,00	Kelurahan Rembang
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						741.432.100,00					ASN		1.312.374.520,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						741.432.100,00					ASN		1.312.374.520,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	26.102.000,00						1 Unit	76.269.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		15 Unit	5 Unit	187.025.100,00						5 Unit	606.105.520,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							13.612.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		71 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	13.612.500,00	Kelurahan Rembang
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		15 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	13.612.500,00	Kelurahan Rembang
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	13.612.500,00	Kelurahan Rembang
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		20 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	13.612.500,00	Kelurahan Rembang
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		4 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	13.612.500,00	Kelurahan Rembang
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		9 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	13.612.500,00	Kelurahan Rembang
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		20 Unit	13.612.500,00	Kelurahan Rembang
	7.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						4.543.200,00							63.450.900,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		6 Unit	1 Unit	4.543.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	63.450.900,00	Kelurahan Rembang
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	1 Unit	4.543.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	63.450.900,00	Kelurahan Rembang
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		37 Unit	1 Unit	4.543.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	63.450.900,00	Kelurahan Rembang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		7 Unit	1 Unit	4.543.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	63.450.900,00	Kelurahan Rembang
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		15 Unit	1 Unit	4.543.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	63.450.900,00	Kelurahan Rembang
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		8 Unit	1 Unit	4.543.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	63.450.900,00	Kelurahan Rembang
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	1 Unit	4.543.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	63.450.900,00	Kelurahan Rembang
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.080.581.160,00					ASN		1.384.053.050,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						1.080.581.160,00					ASN		1.384.053.050,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	269.398.160,00						24 Laporan	234.875.450,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	811.183.000,00						12 Laporan	1.149.177.600,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						16.800.000,00							18.900.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		2424 Laporan	36 Laporan	16.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Laporan	18.900.000,00	Kelurahan Rembang
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	16.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	18.900.000,00	Kelurahan Rembang
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	36 Laporan	16.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Laporan	18.900.000,00	Kelurahan Rembang
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.800.000,00							1.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	1.800.000,00	Kelurahan Rembang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	1.800.000,00	Kelurahan Rembang
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						486.257.200,00					ASN		735.691.500,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						486.257.200,00					ASN		735.691.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	106.250.000,00						1 Unit	105.649.600,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	47 Unit		47 Unit	47 Unit	113.449.700,00						47 Unit	98.957.200,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		Unit	Unit	220.000.000,00						1 Unit	474.700.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						8.729.600,00							6.779.400,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	7 Unit	8.729.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	6.779.400,00	Kelurahan Rembang
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	8.729.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	6.779.400,00	Kelurahan Rembang
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	7 Unit	8.729.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		13 Unit	6.779.400,00	Kelurahan Rembang
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	7 Unit	8.729.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Unit	6.779.400,00	Kelurahan Rembang
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	7 Unit	8.729.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	6.779.400,00	Kelurahan Rembang
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.830.200,00							7.978.800,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	7.830.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	7.978.800,00	Kelurahan Rembang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit		47 Unit	5 Unit	7.830.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		47 Unit	7.978.800,00	Kelurahan Rembang
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	5 Unit	7.830.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	7.978.800,00	Kelurahan Rembang
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	5 Unit	7.830.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	7.978.800,00	Kelurahan Rembang
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						24.000.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Unit	1 Unit	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	2.500.000,00	Kelurahan Rembang
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	2.500.000,00	Kelurahan Rembang
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		2 Unit	1 Unit	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	2.500.000,00	Kelurahan Rembang
242,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						2.658.682.350,00							2.887.998.335,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan						150.936.900,00							189.940.400,00	
			1.Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	100 %		100 %	100 %	150.936.900,00						100 %	189.940.400,00	
			2.Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan	100 %		100 %	100 %	150.936.900,00						100 %	189.940.400,00	
			3.Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	150.936.900,00						100 %	189.940.400,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.347.624.250,00					Masyarakat		2.542.701.235,00	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum						2.347.624.250,00					Masyarakat		2.542.701.235,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.208.371.300,00						12 Dokumen	2.122.161.535,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	139.252.950,00						12 Laporan	420.539.700,00	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan						2.347.624.250,00					Masyarakat		2.542.701.235,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.208.371.300,00						12 Dokumen	2.122.161.535,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	139.252.950,00						12 Laporan	420.539.700,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						7.920.000,00							42.544.600,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.920.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Rembang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	42.544.600,00	Kelurahan Rembang
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	96 Laporan		96 Laporan	12 Laporan	7.920.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Rembang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		96 Laporan	42.544.600,00	Kelurahan Rembang
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						124.710.000,00							120.256.400,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	124.710.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	120.256.400,00	Kelurahan Rembang
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di						311.058.100,00					Masyarakat		345.297.100,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat						311.058.100,00					Masyarakat		345.297.100,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.132.200,00						2 Dokumen	25.665.600,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	289.925.900,00						12 Laporan	319.631.500,00	
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar						311.058.100,00					Masyarakat		345.297.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.132.200,00						2 Dokumen	25.665.600,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	289.925.900,00						12 Laporan	319.631.500,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						2.639.800,00							2.639.800,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	2.639.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	2.639.800,00	Kelurahan Rembang
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.639.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	2.639.800,00	Kelurahan Rembang
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						15.667.100,00							24.499.600,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	15.667.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	24.499.600,00	Kelurahan Rembang
243,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						8.653.836.840,00							12.141.430.270,00	
		Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan						475.418.300,00							901.473.400,00	
			1.Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi	7 Kelompok		7 Kelompok	7 Kelompok	475.418.300,00						7 Kelompok	901.473.400,00	
			2.Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		100 %	100 %	475.418.300,00						100 %	901.473.400,00	
			3.Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang	100 %		100 %	100 %	475.418.300,00						100 %	901.473.400,00	
	7.01.03.2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						7.904.045.440,00					Masyarakat		11.300.310.870,00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan						7.904.045.440,00					Masyarakat		11.300.310.870,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	249.647.100,00						14 Lembaga Kemasyarakatan	243.123.248,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	2.199.889.460,00						6 Pokmas / Ormas	3.217.610.377,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	10 Unit	5.454.508.880,00						10 Unit	7.839.577.245,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di						15.393.300,00							15.499.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	15.393.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Lembaga Kemasyarakatan	15.499.700,00	Kelurahan Rembang
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	15.393.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Lembaga Kemasyarakatan	15.499.700,00	Kelurahan Rembang
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						245.000.000,00							545.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	4 Unit	245.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	545.000.000,00	Kelurahan Rembang
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	4 Unit	245.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	545.000.000,00	Kelurahan Rembang
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	4 Unit	245.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Unit	545.000.000,00	Kelurahan Rembang
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 Unit	4 Unit	245.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Unit	545.000.000,00	Kelurahan Rembang
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		11 Unit	4 Unit	245.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Unit	545.000.000,00	Kelurahan Rembang
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit		59 Unit	4 Unit	245.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		15 Unit	545.000.000,00	Kelurahan Rembang
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit		17 Unit	4 Unit	245.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		17 Unit	545.000.000,00	Kelurahan Rembang
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						149.125.000,00							273.407.600,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	149.125.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Pokmas / Ormas	273.407.600,00	Kelurahan Rembang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	149.125.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	273.407.600,00	Kelurahan Rembang
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	149.125.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	273.407.600,00	Kelurahan Rembang
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						749.791.400,00					Masyarakat		841.119.400,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan perekonomian dan kesejahtaeraan masyarakat						749.791.400,00					Masyarakat		841.119.400,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	72.862.500,00						1 Laporan	139.304.500,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga K emasyarakat an		4 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	676.928.900,00						4 Lembaga K emasyarakat an	701.814.900,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						57.975.000,00							59.034.100,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga K emasyarakat an		4 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	57.975.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Lembaga K emasyarakat an	59.034.100,00	Kelurahan Rembang
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						7.925.000,00							8.532.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.925.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	8.532.000,00	Kelurahan Rembang
		Kelurahan Karangtengah						1.505.983.100,00							2.420.067.300,00	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						1.505.983.100,00							2.420.067.300,00	
	7.01	**KECAMATAN**						1.505.983.100,00							2.420.067.300,00	
244,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						13.186.602.210,00							15.429.508.816,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						156.597.500,00							202.836.400,00	
			1.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	156.597.500,00						100 %	202.836.400,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.750.000,00					ASN		147.410.538,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						21.750.000,00					ASN		147.410.538,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	12.600.000,00						3 Dokumen	16.012.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.320.000,00							1.320.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	1.320.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Dokumen	1.320.000,00	Kelurahan Karangtengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	9 Dokumen	1.320.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	1.320.000,00	Kelurahan Karangtengah
	7.01.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat						10.194.746.250,00					ASN		11.058.763.050,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						10.194.746.250,00					ASN		11.058.763.050,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.970.000,00						4 Laporan	12.726.500,00	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.650.000,00							1.650.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.650.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Karang Tengah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	1.650.000,00	Kelurahan Karangtengah
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						168.906.900,00					ASN		217.296.670,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						168.906.900,00					ASN		217.296.670,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	26 Orang		26 Orang	26 Orang	155.104.600,00						26 Orang	153.491.170,00	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						18.825.400,00							16.091.400,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang		26 Orang	30 Orang	18.825.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		26 Orang	16.091.400,00	Kelurahan Karangtengah
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		60 Orang	30 Orang	18.825.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		60 Orang	16.091.400,00	Kelurahan Karangtengah
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang		42 Orang	30 Orang	18.825.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		42 Orang	16.091.400,00	Kelurahan Karangtengah
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	18.825.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		30 Orang	16.091.400,00	Kelurahan Karangtengah
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang		28 Orang	30 Orang	18.825.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		28 Orang	16.091.400,00	Kelurahan Karangtengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						491.998.600,00					ASN		564.669.488,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						491.998.600,00					ASN		564.669.488,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						491.998.600,00					ASN		564.669.488,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	22.032.000,00						12 Dokumen	22.169.700,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	22.032.000,00						12 Dokumen	22.169.700,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.900,00						1 Dokumen	5.074.100,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.900,00						1 Dokumen	5.074.100,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	10 Paket		10 Paket	10 Paket	136.811.500,00						10 Paket	163.167.150,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	10 Paket		10 Paket	10 Paket	136.811.500,00						10 Paket	163.167.150,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	51.342.900,00						1 Paket	54.370.988,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	51.342.900,00						1 Paket	54.370.988,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	38.890.900,00						1 Paket	32.123.800,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	38.890.900,00						1 Paket	32.123.800,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.247.700,00						3 Paket	107.616.100,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.247.700,00						3 Paket	107.616.100,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	75.657.300,00						3 Paket	80.152.450,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	75.657.300,00						3 Paket	80.152.450,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.000.000,00							3.017.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	4.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	3.017.000,00	Kelurahan Karangtengah
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	3.017.000,00	Kelurahan Karangtengah
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12.000.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	12.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	12.000.000,00	Kelurahan Karangtengah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	12.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	12.000.000,00	Kelurahan Karangtengah
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						9.644.300,00							8.071.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	5 Paket	9.644.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	8.071.000,00	Kelurahan Karangtengah
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	5 Paket	9.644.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Paket	8.071.000,00	Kelurahan Karangtengah
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	5 Paket	9.644.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	8.071.000,00	Kelurahan Karangtengah
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	9.644.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	8.071.000,00	Kelurahan Karangtengah
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							15.400.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	10 Paket	15.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Paket	15.400.000,00	Kelurahan Karangtengah
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	15.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Paket	15.400.000,00	Kelurahan Karangtengah
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.356.000,00							5.000.200,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.356.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	5.000.200,00	Kelurahan Karangtengah
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.754.000,00							2.754.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.754.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	2.754.000,00	Kelurahan Karangtengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						658.500,00							630.300,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	658.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	630.300,00	Kelurahan Karangtengah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						741.432.100,00					ASN		1.312.374.520,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						741.432.100,00					ASN		1.312.374.520,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		15 Unit	5 Unit	187.025.100,00						5 Unit	606.105.520,00	
	7.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						18.450.000,00							86.929.200,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		6 Unit	1 Unit	18.450.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	86.929.200,00	Kelurahan Karangtengah
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		37 Unit	1 Unit	18.450.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	86.929.200,00	Kelurahan Karangtengah
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	1 Unit	18.450.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	86.929.200,00	Kelurahan Karangtengah
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		7 Unit	1 Unit	18.450.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	86.929.200,00	Kelurahan Karangtengah
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		8 Unit	1 Unit	18.450.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	86.929.200,00	Kelurahan Karangtengah
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		15 Unit	1 Unit	18.450.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	86.929.200,00	Kelurahan Karangtengah
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	1 Unit	18.450.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	86.929.200,00	Kelurahan Karangtengah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.080.581.160,00					ASN		1.384.053.050,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						1.080.581.160,00					ASN		1.384.053.050,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	269.398.160,00						24 Laporan	234.875.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	811.183.000,00						12 Laporan	1.149.177.600,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20.058.000,00							20.469.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	20.058.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	20.469.000,00	Kelurahan Karangtengah
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		2424 Laporan	36 Laporan	20.058.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Laporan	20.469.000,00	Kelurahan Karangtengah
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	36 Laporan	20.058.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Laporan	20.469.000,00	Kelurahan Karangtengah
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.800.000,00							1.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	1.800.000,00	Kelurahan Karangtengah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	1.800.000,00	Kelurahan Karangtengah
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						486.257.200,00					ASN		735.691.500,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						486.257.200,00					ASN		735.691.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	106.250.000,00						1 Unit	105.649.600,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	47 Unit		47 Unit	47 Unit	113.449.700,00						47 Unit	98.957.200,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		Unit	Unit	220.000.000,00						1 Unit	474.700.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.289.000,00							6.992.400,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	5.289.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Unit	6.992.400,00	Kelurahan Karangtengah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	8 Unit	5.289.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		13 Unit	6.992.400,00	Kelurahan Karangtengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	8 Unit	5.289.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	6.992.400,00	Kelurahan Karangtengah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	8 Unit	5.289.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	6.992.400,00	Kelurahan Karangtengah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	8 Unit	5.289.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	6.992.400,00	Kelurahan Karangtengah
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.792.300,00							8.011.900,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	15.792.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	8.011.900,00	Kelurahan Karangtengah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	5 Unit	15.792.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	8.011.900,00	Kelurahan Karangtengah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	5 Unit	15.792.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	8.011.900,00	Kelurahan Karangtengah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit		47 Unit	5 Unit	15.792.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		47 Unit	8.011.900,00	Kelurahan Karangtengah
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						24.000.000,00							12.700.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Unit	1 Unit	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	12.700.000,00	Kelurahan Karangtengah
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	12.700.000,00	Kelurahan Karangtengah
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		2 Unit	1 Unit	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	12.700.000,00	Kelurahan Karangtengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
245,	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						2.658.682.350,00							2.887.998.335,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan						339.599.700,00							368.131.600,00	
			1.Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	100 %		100 %	100 %	339.599.700,00						100 %	368.131.600,00	
			2.Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan	100 %		100 %	100 %	339.599.700,00						100 %	368.131.600,00	
			3.Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	339.599.700,00						100 %	368.131.600,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.347.624.250,00					Masyarakat		2.542.701.235,00	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum						2.347.624.250,00					Masyarakat		2.542.701.235,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.208.371.300,00						12 Dokumen	2.122.161.535,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	139.252.950,00						12 Laporan	420.539.700,00	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan						2.347.624.250,00					Masyarakat		2.542.701.235,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.208.371.300,00						12 Dokumen	2.122.161.535,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	139.252.950,00						12 Laporan	420.539.700,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						11.000.000,00							45.396.600,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Karang Tengah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	45.396.600,00	Kelurahan Karangtengah
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	96 Laporan		96 Laporan	12 Laporan	11.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Karang Tengah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		96 Laporan	45.396.600,00	Kelurahan Karangtengah
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						301.750.000,00							286.441.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	301.750.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	286.441.000,00	Kelurahan Karangtengah
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di						311.058.100,00					Masyarakat		345.297.100,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat						311.058.100,00					Masyarakat		345.297.100,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.132.200,00						2 Dokumen	25.665.600,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	289.925.900,00						12 Laporan	319.631.500,00	
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar						311.058.100,00					Masyarakat		345.297.100,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.132.200,00						2 Dokumen	25.665.600,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	289.925.900,00						12 Laporan	319.631.500,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						2.239.000,00							2.639.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.239.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	2.639.000,00	Kelurahan Karangtengah
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	2.239.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	2.639.000,00	Kelurahan Karangtengah
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						24.610.700,00							33.655.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	24.610.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	33.655.000,00	Kelurahan Karangtengah
246,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						8.653.836.840,00							12.141.430.270,00	
		Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan						1.009.785.900,00							1.849.099.300,00	
			1.Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi	7 Kelompok		7 Kelompok	7 Kelompok	1.009.785.900,00						7 Kelompok	1.849.099.300,00	
			2.Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		100 %	100 %	1.009.785.900,00						100 %	1.849.099.300,00	
			3.Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang	100 %		100 %	100 %	1.009.785.900,00						100 %	1.849.099.300,00	
	7.01.03.2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						7.904.045.440,00					Masyarakat		11.300.310.870,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan						7.904.045.440,00					Masyarakat		11.300.310.870,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	249.647.100,00						14 Lembaga Kemasyarakatan	243.123.248,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	2.199.889.460,00						6 Pokmas / Ormas	3.217.610.377,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	10 Unit	5.454.508.880,00						10 Unit	7.839.577.245,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di						31.685.800,00							31.481.800,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	31.685.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Lembaga Kemasyarakatan	31.481.800,00	Kelurahan Karangtengah
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	31.685.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Lembaga Kemasyarakatan	31.481.800,00	Kelurahan Karangtengah
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						600.000.000,00							1.295.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit		17 Unit	10 Unit	600.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		17 Unit	1.295.000.000,00	Kelurahan Karangtengah
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit		59 Unit	10 Unit	600.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		15 Unit	1.295.000.000,00	Kelurahan Karangtengah
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		11 Unit	10 Unit	600.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Unit	1.295.000.000,00	Kelurahan Karangtengah
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 Unit	10 Unit	600.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Unit	1.295.000.000,00	Kelurahan Karangtengah
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	10 Unit	600.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Unit	1.295.000.000,00	Kelurahan Karangtengah
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	10 Unit	600.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	1.295.000.000,00	Kelurahan Karangtengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	10 Unit	600.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	1.295.000.000,00	Kelurahan Karangtengah
	7.01.03.2.	Pemberdayaan Masyarakat di						308.311.600,00							452.118.500,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	308.311.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	452.118.500,00	Kelurahan Karangtengah
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	308.311.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	452.118.500,00	Kelurahan Karangtengah
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	308.311.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Pokmas / Ormas	452.118.500,00	Kelurahan Karangtengah
	7.01.03.2. 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						749.791.400,00					Masyarakat		841.119.400,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan perekonomian dan kesejahtaeraan masyarakat						749.791.400,00					Masyarakat		841.119.400,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	72.862.500,00						1 Laporan	139.304.500,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga K emasyarakat an		4 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	676.928.900,00						4 Lembaga K emasyarakat an	701.814.900,00	
	7.01.03.2. 03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						61.348.500,00							61.975.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga K emasyarakat an		4 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	61.348.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Lembaga K emasyarakat an	61.975.000,00	Kelurahan Karangtengah
	7.01.03.2. 03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						8.440.000,00							8.524.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.440.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	8.524.000,00	Kelurahan Karangtengah
		Kelurahan Bendogerit						1.964.957.910,00							72.421.520,00	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						1.964.957.910,00							72.421.520,00	
	7.01	**KECAMATAN**						1.964.957.910,00							72.421.520,00	
247,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						13.186.602.210,00							15.429.508.816,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						246.221.760,00							72.421.520,00	
			1.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	246.221.760,00						100 %	72.421.520,00	
	7.01.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.750.000,00					ASN		147.410.538,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						21.750.000,00					ASN		147.410.538,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	12.600.000,00						3 Dokumen	16.012.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						480.000,00							1.386.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	480.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	1.386.000,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		9 Dokumen	3 Dokumen	480.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		9 Dokumen	1.386.000,00	Kelurahan Bendogerit
	7.01.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat						10.194.746.250,00					ASN		11.058.763.050,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						10.194.746.250,00					ASN		11.058.763.050,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.970.000,00						4 Laporan	12.726.500,00	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						600.000,00							1.732.500,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	600.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	1.732.500,00	Kelurahan Bendogerit
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						168.906.900,00					ASN		217.296.670,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						168.906.900,00					ASN		217.296.670,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	26 Orang		26 Orang	26 Orang	155.104.600,00						26 Orang	153.491.170,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket		1 Paket	1 Paket	13.802.300,00						1 Paket	63.805.500,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket		30 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		30 Paket	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	0,00	Kelurahan Bendogerit
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						16.358.400,00							16.940.070,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		60 Orang	20 Orang	16.358.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		60 Orang	16.940.070,00	Kelurahan Bendogerit
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang		42 Orang	20 Orang	16.358.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		42 Orang	16.940.070,00	Kelurahan Bendogerit
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang		26 Orang	20 Orang	16.358.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		26 Orang	16.940.070,00	Kelurahan Bendogerit
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		30 Orang	20 Orang	16.358.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		30 Orang	16.940.070,00	Kelurahan Bendogerit
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang		28 Orang	20 Orang	16.358.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		28 Orang	16.940.070,00	Kelurahan Bendogerit
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						491.998.600,00					ASN		564.669.488,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						491.998.600,00					ASN		564.669.488,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						491.998.600,00					ASN		564.669.488,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	22.032.000,00						12 Dokumen	22.169.700,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	22.032.000,00						12 Dokumen	22.169.700,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.900,00						1 Dokumen	5.074.100,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.900,00						1 Dokumen	5.074.100,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	10 Paket		10 Paket	10 Paket	136.811.500,00						10 Paket	163.167.150,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	10 Paket		10 Paket	10 Paket	136.811.500,00						10 Paket	163.167.150,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	51.342.900,00						1 Paket	54.370.988,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	51.342.900,00						1 Paket	54.370.988,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	38.890.900,00						1 Paket	32.123.800,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	38.890.900,00						1 Paket	32.123.800,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.247.700,00						3 Paket	107.616.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.247.700,00						3 Paket	107.616.100,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	75.657.300,00						3 Paket	80.152.450,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	75.657.300,00						3 Paket	80.152.450,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.524.600,00							4.200.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	4.524.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	4.200.000,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.524.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	4.200.000,00	Kelurahan Bendogerit
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.297.300,00							12.600.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	13.297.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	12.600.000,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	13.297.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	12.600.000,00	Kelurahan Bendogerit
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.503.400,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	3 Paket	10.503.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Paket	10.500.000,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	3 Paket	10.503.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Paket	10.500.000,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	10.503.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	10.500.000,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	10.503.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	10.500.000,00	Kelurahan Bendogerit
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						13.395.000,00							16.259.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	2 Paket	13.395.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Paket	16.259.250,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	2 Paket	13.395.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Paket	16.259.250,00	Kelurahan Bendogerit
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.912.400,00							5.250.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.912.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	5.250.000,00	Kelurahan Bendogerit
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.754.000,00							2.891.700,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.754.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	2.891.700,00	Kelurahan Bendogerit
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							662.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	-	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	662.000,00	Kelurahan Bendogerit
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						741.432.100,00					ASN		1.312.374.520,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						741.432.100,00					ASN		1.312.374.520,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	26.102.000,00						1 Unit	76.269.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		15 Unit	5 Unit	187.025.100,00						5 Unit	606.105.520,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		1 Unit	1 Unit	528.305.000,00						1 Unit	630.000.000,00	
	7.01.01.2.	Pengadaan Mebel						26.102.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		20 Unit	2 Unit	26.102.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		71 Unit	2 Unit	26.102.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	2 Unit	26.102.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		20 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		9 Unit	2 Unit	26.102.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		4 Unit	2 Unit	26.102.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	26.102.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		15 Unit	2 Unit	26.102.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
	7.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin						71.910.200,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		15 Unit	4 Unit	71.910.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		37 Unit	4 Unit	71.910.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	4 Unit	71.910.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		6 Unit	4 Unit	71.910.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		7 Unit	4 Unit	71.910.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		8 Unit	4 Unit	71.910.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	4 Unit	71.910.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						28.305.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	28.305.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.080.581.160,00					ASN		1.384.053.050,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						1.080.581.160,00					ASN		1.384.053.050,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	269.398.160,00						24 Laporan	234.875.450,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	811.183.000,00						12 Laporan	1.149.177.600,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						38.892.760,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	38.892.760,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		2424 Laporan	36 Laporan	38.892.760,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Laporan	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	36 Laporan	38.892.760,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Laporan	0,00	Kelurahan Bendogerit
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.836.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.836.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	12 Laporan	1.836.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	0,00	Kelurahan Bendogerit
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						486.257.200,00					ASN		735.691.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan						486.257.200,00					ASN		735.691.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	106.250.000,00						1 Unit	105.649.600,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	47 Unit		47 Unit	47 Unit	113.449.700,00						47 Unit	98.957.200,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						7.956.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	1 Unit	7.956.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	1 Unit	7.956.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	7.956.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	1 Unit	7.956.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		13 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	1 Unit	7.956.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
	7.01.01.2.	Pemeliharaan Mebel						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.394.700,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	2 Unit	4.394.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	2 Unit	4.394.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit		47 Unit	2 Unit	4.394.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		47 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	2 Unit	4.394.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
248,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						2.658.682.350,00							2.887.998.335,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan						434.313.550,00							0,00	
			1.Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	100 %		100 %	100 %	434.313.550,00						100 %	0,00	
			2.Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan	100 %		100 %	100 %	434.313.550,00						100 %	0,00	
			3.Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	434.313.550,00						100 %	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.347.624.250,00					Masyarakat		2.542.701.235,00	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum						2.347.624.250,00					Masyarakat		2.542.701.235,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.208.371.300,00						12 Dokumen	2.122.161.535,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	139.252.950,00						12 Laporan	420.539.700,00	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan						2.347.624.250,00					Masyarakat		2.542.701.235,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.208.371.300,00						12 Dokumen	2.122.161.535,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	139.252.950,00						12 Laporan	420.539.700,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						11.561.550,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	96 Laporan		96 Laporan	12 Laporan	11.561.550,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		96 Laporan	0,00	Kelurahan Bendogerit

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.561.550,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan Bendogerit || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	0,00	Kelurahan Bendogerit
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						361.360.000,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	361.360.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	0,00	Kelurahan Bendogerit
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di						311.058.100,00					Masyarakat		345.297.100,00	
		Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat						311.058.100,00					Masyarakat		345.297.100,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.132.200,00						2 Dokumen	25.665.600,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	289.925.900,00						12 Laporan	319.631.500,00	
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar						311.058.100,00					Masyarakat		345.297.100,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.132.200,00						2 Dokumen	25.665.600,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	289.925.900,00						12 Laporan	319.631.500,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						1.392.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	1.392.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Dokumen	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.392.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	0,00	Kelurahan Bendogerit
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						60.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Laporan	0,00	Kelurahan Bendogerit
249,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						8.653.836.840,00							12.141.430.270,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan						1.284.422.600,00							0,00	
			1.Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi	7 Kelompok		7 Kelompok	7 Kelompok	1.284.422.600,00						7 Kelompok	0,00	
			2.Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		100 %	100 %	1.284.422.600,00						100 %	0,00	
			3.Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang	100 %		100 %	100 %	1.284.422.600,00						100 %	0,00	
	7.01.03.2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						7.904.045.440,00					Masyarakat		11.300.310.870,00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan						7.904.045.440,00					Masyarakat		11.300.310.870,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	249.647.100,00						14 Lembaga Kemasyarakatan	243.123.248,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	2.199.889.460,00						6 Pokmas / Ormas	3.217.610.377,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	10 Unit	5.454.508.880,00						10 Unit	7.839.577.245,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di						35.738.000,00							0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	35.738.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	35.738.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		14 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kelurahan Bendogerit
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1.125.000.000,00							0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit		17 Unit	59 Unit	1.125.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		17 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	59 Unit	1.125.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		11 Unit	59 Unit	1.125.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit		59 Unit	59 Unit	1.125.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		15 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	59 Unit	1.125.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	59 Unit	1.125.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 Unit	59 Unit	1.125.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Unit	0,00	Kelurahan Bendogerit
	7.01.03.2.	Pemberdayaan Masyarakat di						42.307.600,00							0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	42.307.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	42.307.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		6 Pokmas / Ormas	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	42.307.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		7 Pokmas / Ormas	0,00	Kelurahan Bendogerit
	7.01.03.2. 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						749.791.400,00					Masyarakat		841.119.400,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan perekonomian dan kesejahtaeraan masyarakat						749.791.400,00					Masyarakat		841.119.400,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	72.862.500,00						1 Laporan	139.304.500,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga K emasyarakat an		4 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	676.928.900,00						4 Lembaga K emasyarakat an	701.814.900,00	
	7.01.03.2. 03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						72.800.000,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga K emasyarakat an		4 Lembaga K emasyarakat an	4 Lembaga K emasyarakat an	72.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Lembaga K emasyarakat an	0,00	Kelurahan Bendogerit
	7.01.03.2. 03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						8.577.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.577.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Blitar || Kecamatan Sananwetan || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	0,00	Kelurahan Bendogerit
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						8.340.902.500,00							7.945.215.997,00	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						8.340.902.500,00							7.945.215.997,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						8.340.902.500,00							7.945.215.997,00	
250,	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						4.280.723.800,00							3.973.367.542,00	
		Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah						4.280.723.800,00							3.973.367.542,00	
			999.Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	4.280.723.800,00						100 %	3.973.367.542,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						29.817.900,00					Masyarakat		16.897.900,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah						29.817.900,00					Masyarakat		16.897.900,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	17.320.000,00						1 Berita Acara	4.200.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	2.200.000,00						1 Berita Acara	2.400.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	1.200.000,00						1 Data	1.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.723.200,00						4 Dokumen	2.723.200,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.187.200,00						12 Dokumen	3.187.200,00	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.723.200,00							2.723.200,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	2.723.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Dokumen	2.723.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						1.200.000,00							1.200.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	1.200.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Data	1.200.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat						17.320.000,00							4.200.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	17.320.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Berita Acara	4.200.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja						3.187.200,00							3.187.200,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	12 Dokumen		12 Dokumen	11 Dokumen	3.187.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		12 Dokumen	3.187.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis						2.200.000,00							2.400.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	2.200.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Berita Acara	2.400.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat						2.981.850.000,00					-		2.982.100.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah						2.981.850.000,00					-		2.982.100.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.250.000,00						5 Laporan	1.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.980.600.000,00						25 Orang/bulan	2.980.600.000,00	
	8.01.01.2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.980.600.000,00							2.980.600.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		25 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.980.600.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		25 Orang/bulan	2.980.600.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.250.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulano	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.250.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Laporan	1.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.450.000,00					-		2.220.000,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat						1.450.000,00					-		2.220.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.450.000,00						1 Laporan	2.220.000,00	
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.450.000,00							2.220.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.450.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	2.220.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						154.402.100,00					-		154.376.400,00	
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						154.402.100,00					-		154.376.400,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	25 Orang		25 Orang	25 Orang	87.622.100,00						25 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	3 Paket		3 Paket	3 Paket	66.780.000,00						3 Paket	54.376.400,00	
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						66.780.000,00							54.376.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		3 Paket	5 Paket	66.780.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Paket	54.376.400,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						87.622.100,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang		25 Orang	20 Orang	87.622.100,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		25 Orang	100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						275.379.740,00					-		211.664.342,00	
		Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah						275.379.740,00					-		211.664.342,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	11.934.000,00						24 Dokumen	7.956.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.605.000,00						1 Dokumen	3.936.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	165.045.000,00						40 Laporan	125.661.102,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	2 Paket		2 Paket	2 Paket	32.176.800,00						2 Paket	23.346.200,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.696.600,00						1 Paket	10.696.600,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.303.400,00						1 Paket	5.954.800,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	31.098.340,00						4 Paket	29.703.840,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.520.600,00						4 Paket	4.409.800,00	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						9.303.400,00							5.954.800,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.303.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	5.954.800,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						31.098.340,00							29.703.840,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	31.098.340,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	29.703.840,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.520.600,00							4.409.800,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.520.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Paket	4.409.800,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						32.176.800,00							23.346.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	32.176.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Paket	23.346.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.696.600,00							10.696.600,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.696.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Paket	10.696.600,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						11.934.000,00							7.956.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	36 Dokumen	11.934.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		24 Dokumen	7.956.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						165.045.000,00							125.661.102,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	165.045.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		40 Laporan	125.661.102,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						4.605.000,00							3.936.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.605.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	3.936.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						150.491.400,00					-		86.882.400,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan						150.491.400,00					-		86.882.400,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		5 Unit	2 Unit	36.386.000,00						5 Unit	43.119.500,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		5 Unit	5 Unit	114.105.400,00						10 Unit	43.762.900,00	
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						36.386.000,00							43.119.500,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		5 Unit	4 Unit	36.386.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		5 Unit	43.119.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin						114.105.400,00							43.762.900,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		5 Unit	8 Unit	114.105.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		10 Unit	43.762.900,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						251.259.670,00					-		247.484.000,00	
		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran						251.259.670,00					-		247.484.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	53.856.000,00						36 Laporan	44.248.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	197.403.670,00						13 Laporan	203.235.200,00	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						53.856.000,00							44.248.800,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	53.856.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		36 Laporan	44.248.800,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						197.403.670,00							203.235.200,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	197.403.670,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		13 Laporan	203.235.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						436.072.990,00					-		271.742.500,00	
		Terpenuhinya pelayanan penunjang kinerja perangkat daerah						436.072.990,00					-		271.742.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	11 Unit		11 Unit	11 Unit	25.996.000,00						11 Unit	19.633.500,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.976.800,00						1 Unit	40.264.200,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit		8 Unit	8 Unit	13.852.000,00						8 Unit	12.526.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	85 Unit		85 Unit	85 Unit	26.963.600,00						85 Unit	24.318.800,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit		1 Unit	1 Unit	318.284.590,00						1 Unit	175.000.000,00	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.976.800,00							40.264.200,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.976.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	40.264.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						25.996.000,00							19.633.500,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	25.996.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Unit	19.633.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.	Pemeliharaan Mebel						13.852.000,00							12.526.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit		8 Unit	22 Unit	13.852.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		8 Unit	12.526.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						26.963.600,00							24.318.800,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit		85 Unit	36 Unit	26.963.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		85 Unit	24.318.800,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						318.284.590,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	318.284.590,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Unit	175.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah						29.817.900,00					Masyarakat		16.897.900,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	3.187.500,00						-	3.187.500,00	
	8.01.01.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.187.500,00							3.187.500,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	15 Laporan	3.187.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		-	3.187.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
251,	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						1.675.802.700,00							1.615.011.500,00	
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter						1.675.802.700,00							1.609.011.500,00	
			999.Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persentase		66.67 Persentase	9,5 Persentase	1.675.802.700,00						85.71 Persentase	1.609.011.500,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						1.675.802.700,00					Masyarakat		1.615.011.500,00	
		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						1.675.802.700,00					Masyarakat		1.615.011.500,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	100 Keluarga		200 Keluarga	200 Keluarga	49.042.300,00						200 Keluarga	49.042.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Risiko Terorisme Hoax dan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00						2 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	200 Orang		200 Orang	200 Orang	678.702.200,00						200 Orang	668.718.700,00	
			Jumlah Paskibraka	110 Orang		110 Orang	110 Orang	615.468.200,00						110 Orang	779.750.500,00	
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	230.100.000,00						3 Dokumen	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan						678.702.200,00							668.718.700,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	200 Orang		200 Orang	2723 Orang	678.702.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		200 Orang	668.718.700,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2 Laporan	75.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat,						49.042.300,00							49.042.300,00	
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	100 Keluarga		200 Keluarga	200 Keluarga	49.042.300,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		200 Keluarga	49.042.300,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan						230.100.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	230.100.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		3 Dokumen	15.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.	Pembentukan Paskibraka						615.468.200,00							779.750.500,00	
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	110 Orang		110 Orang	78 Orang	615.468.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		110 Orang	779.750.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						1.675.802.700,00					Masyarakat		1.615.011.500,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	-		-	-	8.250.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	-		-	-	5.500.000,00						-	7.500.000,00	
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	-		-	-	4.390.000,00						-	6.000.000,00	
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	-		-	-	9.350.000,00						-	6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan						8.250.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	-		-	50 Orang	8.250.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		-	8.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila						9.350.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	-		-	1 Dokumen	9.350.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		-	6.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila						4.390.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	-		-	1 Dokumen	4.390.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		-	6.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila						5.500.000,00							7.500.000,00	
		Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	-		-	78 Orang	5.500.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		-	7.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
252,	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						677.256.100,00							665.943.050,00	
		Meningkatnya etika dan budaya						677.256.100,00							665.943.050,00	
			999.Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	89 Persentase		85 Persentase	82,12 Persentase	677.256.100,00						87 Persentase	665.943.050,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,						677.256.100,00					Masyarakat		665.943.050,00	
		Meningkatnya peran parpol terhadap pendidikan politik pada masyarakat						677.256.100,00					Masyarakat		665.943.050,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	603.449.800,00						11 Laporan	596.199.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	400 Orang		400 Orang	400 Orang	13.308.000,00						800 Orang	20.500.000,00	
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan						13.308.000,00							20.500.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	400 Orang		400 Orang	200 Orang	13.308.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		800 Orang	20.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum						603.449.800,00							596.199.800,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	603.449.800,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		11 Laporan	596.199.800,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya peran parpol terhadap pendidikan politik pada masyarakat						677.256.100,00					Masyarakat		665.943.050,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	-		-	-	60.498.300,00						-	49.243.250,00	
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan						60.498.300,00							49.243.250,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	-		-	300 Orang	60.498.300,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		-	49.243.250,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
253,	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						103.402.200,00							67.485.050,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan						103.402.200,00							67.485.050,00	
			999.Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	90,4 Persentase		90 Persentase	90,1 Persentase	103.402.200,00						90,2 Persentase	67.485.050,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						103.402.200,00					Masyarakat		67.485.050,00	
		Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan						103.402.200,00					Masyarakat		67.485.050,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas	150 Orang		150 Orang	150 Orang	13.300.000,00						150 Orang	13.895.500,00	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan						13.300.000,00							13.895.500,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	150 Orang		150 Orang	100 Orang	13.300.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		150 Orang	13.895.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Laporan	50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan						103.402.200,00					Masyarakat		67.485.050,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	-		-	-	40.102.200,00						-	3.589.550,00	
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan						40.102.200,00							3.589.550,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	-		-	200 Orang	40.102.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		-	3.589.550,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
254,	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						336.683.600,00							364.275.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat						336.683.600,00							364.275.400,00	
			999.Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	100 %		100 %	100 %	336.683.600,00						100 %	364.275.400,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan						336.683.600,00					Masyarakat		364.275.400,00	
		Persentase masyarakat yang mendapatkan Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya						336.683.600,00					Masyarakat		364.275.400,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00						4 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	200 Orang		200 Orang	200 Orang	40.921.400,00						200 Orang	61.275.400,00	
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan						40.921.400,00							61.275.400,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	200 Orang		200 Orang	200 Orang	40.921.400,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		200 Orang	61.275.400,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat						150.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	4 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	150.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	300.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase masyarakat yang mendapatkan Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya						336.683.600,00					Masyarakat		364.275.400,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	-		-	-	145.762.200,00						-	3.000.000,00	
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan						145.762.200,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	-		-	50 Orang	145.762.200,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		-	3.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
255,	8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						1.267.034.100,00							1.259.133.455,00	
		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan						1.267.034.100,00							1.259.133.455,00	
			999.Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	1.267.034.100,00						100 Persentase	1.259.133.455,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan						1.267.034.100,00					Masyarakat		1.259.133.455,00	
		Jumlah potensi konflik sosial yang terdeteksi						1.267.034.100,00					Masyarakat		1.259.133.455,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	181.790.600,00						1 Dokumen	176.564.955,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	800.000.000,00						4 Laporan	800.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	2350 Orang		2250 Orang	2275 Orang	279.293.500,00						2300 Orang	276.568.500,00	
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang						279.293.500,00							276.568.500,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	2350 Orang		2250 Orang	5340 Orang	279.293.500,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		2300 Orang	276.568.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang						800.000.000,00							800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	800.000.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		4 Laporan	800.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						181.790.600,00							176.564.955,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	181.790.600,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		1 Dokumen	176.564.955,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah potensi konflik sosial yang terdeteksi						1.267.034.100,00					Masyarakat		1.259.133.455,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	-		-	-	5.950.000,00						-	6.000.000,00	
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang						5.950.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	-		-	44 Orang	5.950.000,00	Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningka tan kualitas pelayanan publik serta peningkatan ketahanan fiskal daerah		-	6.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	JUMLAH							**840.085.999.000,00**							**912.558.646.311,50**	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana ditunjukkan tabel 6.1 dan tabel 6.2 sebagai berikut:

Tabel 6. 1

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN					TARGET RKPD TAHUN
			2021	2022	2023	2024	2025	2027
(01)	*(02)*	*(03)*						
1.	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	Data belum pernah dirilis				6,91	6,99
2.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,46	74,71	74,97	75,20	75,47	75,82
3.	Tingkat Kemiskinan	(%)	7,89	7,37	7,30	6,75	6,60	5,50 – 6,14
4.	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	Data belum pernah dirilis				75,87	75,90
5.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	79,27	80,15	80,78	81,44	82,03	83,20 – 84,10
6.	Rasio Gini	Indeks	0,37	0,381	0,397	0,353	0,34	0,327 – 0,346
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68,04	68,71	84,68	90,84	92,86	92,90
8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,28	5,22	5,29	5,33	5,31	5,08 – 5,54
9.	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	NA	NA	100	98,52	81,43	81,45
10.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	108,28	110,1	109,04	71,51	69,66	66,97
11.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	12,9	12,8	17,7	11,4	6,18	9,24
12.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	NA	NA	NA	62,23	53,98	62,93
13.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	Data belum pernah dirilis			80,00	81,00	83,00
14.	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	0,00	86,31	84,37	88,68	89,06	89,10
15.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	80,19	81,89	83,26	79,03	79,91	94,19
16.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,61	5,39	5,24	5,11	4,28	4,27 – 4,08

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN					TARGET RKPD TAHUN
			2021	2022	2023	2024	2025	2027
(01)	*(02)*	*(03)*						
17.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,14	84,5	85,6	89,23	91,22	91,24
18.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	61,75	64,15	67,58	64,94	67,33	67,35
19.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Angka	73,25	73,73	74,79	80,06	81,19	81,21
20.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,33	14,56	14,57	14,81	14,82	14,91
21.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,35	10,65	10,78	10,82	10,83	10,85
22.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	97,91	97,94	98,09	98,03	98,11	98,13
23.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	24,16	25,11	25,03	24,69	24,78	25,39
24.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	5,29	5,48	5,71	5,89	5,92	5,95
25.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	10,02	10,10	9,85	9,91	10,13	10,15
26.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel 6. 1

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kota Blitar

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN					TARGET RKPD TAHUN
			2021	2022	2023	2024	2025	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Tingkat Inflasi	%	NA	5,76	2,64	0,52	2,95	2,75
2	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	54,67	33,57	11,54	12,38	1,1	2
3	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	Rasio	NA	NA	NA	3,51	Data belum rilis	3,67
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	%	19,5	19,75	19,54	19,24	19,38	19,39
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,96	67,78	72,26	70,44	75,95	75,96
6	Indeks Inovasi Daerah	Angka	53,21	56,88	50,83	48,04	61,34	61,35
7	Proporsi jumlah usaha mikro	%	NA	NA	NA	NA	16,33	16,34
8	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	NA	NA	NA	93,29	94,36	94,37
9	Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal	%	37,65	38,22	38,8	38,04	46,7	46,8
10	Rasio kewirausahaan daerah	%	NA	NA	NA	NA	0,01	0,02
11	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	NA	3,42	3,84	4,05	4,12	4,5
12	Persentase pemanfaatan digital pada sektor ekonomi	%	NA	NA	NA	9,88	10,88	12,88

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN					TARGET RKPD TAHUN
			2021	2022	2023	2024	2025	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Proses Politik	%	NA	NA	NA	85,14	NA	85,14
14	Angka Ketergantungan	%	43,81	40,17	41,64	41,45	40,33	40,27
15	Return on Asset (ROA) BUMD	%	NA	NA	NA	-0,045	-0,038	0,03
16	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	-9,8	-7,69	-6,58	-4,91	-4,54	-4,53
17	Realisasi investasi (Triliun Rupiah)	triliun rupiah	0,25846	0,34522	0,38506	0,43273	0,43752	0,452
18	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	NA	NA	NA	6,46	Data belum dirilis	6,48
19	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,54	0,58	0,66	0,59	0,82	0,83
II	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
1	Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Kumulatif	TON CO2 EQ	7.607,37	176.604,99	593.725,15	650.775,49	664.110,67	690.608,12
2	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	68,69	74,75	79,25	80,8/64,86 (Baru)	69,56	71,06
3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	97,69	97,73	97,78	98,01	18,47	18,49
4	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,31	0,4	0,43	0,4	0,41	0,43
5	Indeks Kualitas Udara	Indeks	83,76	85,90	85,83	89,79	75,10	79,79
6	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,58	59,73	67,78	56,11	70,86	70,87
7	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	38,52	31,50	33,51	34,13	46,90	46,91

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN					TARGET RKPD TAHUN
			2021	2022	2023	2024	2025	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment)*	%	6,25	7,21	6,11	5,42	6,11	4,59
9	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	-0,04	0,20	0,77	0,89	0,44	0,397
10	Rasio Penduduk	%	99,24	99,18	99,40	99,44	99,28	99,57
11	Kepadatan Penduduk	Orang/km^2	4,858	4,868	4,812	4,855	4,876	4466
12	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	NA	NA	NA	14	14,49	14,50
13	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	11,1	11,18	11,42	11,99	13,26	13,27
14	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	88,6	89,0	90,0	90,5	91,0	91,5
15	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	6,55	7,15	8,21	8,45	8,98	28,35
16	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	NA	NA	NA	71,90	71,90*	72.77
III	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	47,33	51,59	55,52	59,33	63,14	61,33
2	Indeks Pelestarian Budaya	Indeks	Data belum pernah dirilis				50,29	86,98
3	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Indeks	Data belum pernah dirilis				Perhitungan dilaksanakan tahun 2026	0,720

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN					TARGET RKPD TAHUN
			2021	2022	2023	2024	2025	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	62,92	64,49	71,94	70,33	88,12	88,15
5	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	74,12	77,77	84,03	85,77	96,62	96,65
6	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	41,67	47,04	54,19	59,00	84,54	84,60
7	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	74,12	77,77	71,07	71,24	91,73	91,75
8	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	NA	NA	NA	59,67	64,00	68,61
9	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	NA	NA	NA	NA	0,569	0,609
10	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,53	72,83	70,57	72,83	78,40	78,45
11	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	803,78	172,31	47,68	173,99	0	130,49
12	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	tahun	10,98	10,95	10,80	10,85	10,95	11,18
13	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,334	0,199	0,194	0,188	0,198	0,200
14	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	96,79	100	100	100	100	100
15	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	NA	NA	NA	0,40	0,73	0,75
16	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	%	135,2	85,7	54,4	82,61	82,87	84,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN					TARGET RKPD TAHUN
			2021	2022	2023	2024	2025	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis	%	4,47	12,64	60,31	73,91	84,52	84,54
18	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	%	84,88	85,15	85,49	85,49	85,61	85,71
19	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	NA	NA	16,34	16,59	25,77	25,79
20	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks		11,37	41,54	47,43	14,09	50
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	59,04	56,23	63,87	59,23	67,37	67,39
22	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%		38,26	45,8	48,41	41,1	54,56
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Indeks Rasa Aman	Angka	NA	NA	NA	76,6	Data belum rilis	76,70
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	BPKP tidak melaksanakan QA	3	3	3	Terdefinisi (3,038)
3	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	NA	97,54	91,93	99,15	79,74	80,28
4	Indeks Pemerintahan Digital Indonesia	Indeks	NA	NA	NA	NA	Data belum rilis	1,70
5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	44,44	44,44	66,67	59,09	65,00	72,73
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,19	2,81	3,68	4,11	4,26	2,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN					TARGET RKPD TAHUN
			2021	2022	2023	2024	2025	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	NA	77,65	96,98	97,57	98,7	98,75
8	Persentase Capaian Aksi HAM	%	NA	76,47	87,38	94,70	97,40	97,45
9	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,175	4,395	4,05	4,52	4,69	4,75
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)							
	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	%	81,66	95,32	86,06	83,75	95,00	95,02
2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98,84	98,71	98,4	99,96	100	100
3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	41,38	36,64	36,41	41,06	46,61	49,48
4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				46,22	46,25
5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				44,52	44,55
	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1	Persentase kematian ibu	(per 100.000 kelahiran	803,78	172,31	47,68	173,99	0	130,49

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN					TARGET RKPD TAHUN
			2021	2022	2023	2024	2025	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		hidup)						
2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,9	12,8	17,7	11,4	6,18	9,24
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	92,85	100	100	100	100	100
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
12	Persentase pelayanan kesehatan orang	%	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN					TARGET RKPD TAHUN
			2021	2022	2023	2024	2025	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dengan gangguan jiwa berat sesuai standar							
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)* sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			63,56	100	64,5
2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	%	96,6	97,8	98	92,35	92,36	94,35
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			99,54	96,75	100
4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			8,45	98,53	10,50
5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			97,84	97,84	98,23

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN					TARGET RKPD TAHUN
			2021	2022	2023	2024	2025	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	banjir							
6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	%	0					
7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			100	100	100
8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			0	0	0
9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	82,2	100	100	100	100	100
10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100	100
	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	%	78,09	98,35	7,64	33,52	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN					TARGET RKPD TAHUN
			2021	2022	2023	2024	2025	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			100	100	100
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			17,69	100	100
	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	%					80	80
2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			59,09	65,00	65,00
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN					TARGET RKPD TAHUN
			2021	2022	2023	2024	2025	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100
	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	60	100	100	100
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan	%	100	100	43,39	21,46	22,35	22,37

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN					TARGET RKPD TAHUN
			2021	2022	2023	2024	2025	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)							
3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100	100
	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100
	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			12,5	0	13,1
	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							
1	Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	%	bukan merupakan bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			85	87,43	92,00
2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				98,30	98,50
3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN					TARGET RKPD TAHUN
			2021	2022	2023	2024	2025	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	%	67	67	67,5	68,09	68,29	68,30
2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100
	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	%	98,24	98,91	99	99,63	99,81	99,89
2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	90.64	91,14	94,97	99,11	98,99	99,30
3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Persen	99,49	99,28	97,79	99,35	99,91	99,93
5	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	93,53	100
7	Persentase Akta Perceraian yang	%	100	100	100	100	84,46	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN					TARGET RKPD TAHUN
			2021	2022	2023	2024	2025	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Diterbitkan bagi yang Melaporkan							
	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	0					
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0					
3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	%	0					
	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
1	Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,14	1,92	1,91	1,93	1,89	1,87
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern *Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR)	%	74,17	72,75	74,56	64,75	69,03	69,05
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(unmet need)*	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			8,11	8,7	8,07
	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
1	Konektivitas kabupaten/kota	%	70	70	70	70	70	75,00
2	Volume/*Capacity Ratio* di jalan kabupaten/kota	Nilai	0,2605	0,478	0,259	0,28	0,25	0,24
3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				87,50	88,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN					TARGET RKPD TAHUN
			2021	2022	2023	2024	2025	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan							
	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi	%		90	89,30	97,67	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%		87	45,80	86,25	77,39	77,50
	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
1	Persentase pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			18,8	18,61	19,25
2	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			9,28	9,94	10,85
	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	54,67	33,56	11,5	12,38	1,11	2

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN					TARGET RKPD TAHUN
			2021	2022	2023	2024	2025	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			100	100,12	100
	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	-	-	30,11	9,34	5,15	5,20
2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	-	-	81,78	83,23	7,94	52,81
3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			Tidak dilaksanakan Pelatda	8,85	8,90
4	Persentase jumlah atlet berprestasi	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2025 - 2029				86,96	87,00
	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
1	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100	100
	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
1	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100	100
	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				48,01	100
2	Persentase peningkatan jumlah	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				-22,80	0,50

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN					TARGET RKPD TAHUN
			2021	2022	2023	2024	2025	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah							
	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	Nilai	-	47,49	51,43	52,4	54,44	63
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	-	11,37	41,54	47,43	15,54	15,60
	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	-	62,5	87,5	88,68	89,25	89,30
	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Kg/Kap/Th	18,54	22,76	22,87	22,98	22,93	23,31
2	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			100,57	100,20	100
	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			0,5	33,54	33,75
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				3,75	42,48
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke	%	-	575,36	42,4	471,35	0,38	0,40

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN					TARGET RKPD TAHUN
			2021	2022	2023	2024	2025	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kabupaten/kota							
	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			-38,03	0,2	25,12
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			0,1	4,40	0,8
3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			4,19	4,54	4,60
4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari *surveylance* penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			100	100	100
	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	62,28	56,27	42,61	48,17	61,21	61,50
	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			75	76,06	78

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN					TARGET RKPD TAHUN
			2021	2022	2023	2024	2025	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota							
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				47,06	48,00
3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				6,71	6,75
4	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			11,2	26,22	26,30
	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH							
1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Level	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				40	40
2	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			27,49	28,64	28,70
3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Poin	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			15	21,92	22,50
	4.02 - SEKRETARIAT DPRD							

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN					TARGET RKPD TAHUN
			2021	2022	2023	2024	2025	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	%	100	100	100	100	100	100
	5.01 - PERENCANAAN							
1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			100	100	100
	5.02 - KEUANGAN							
1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			30,51	35,98	30,00
2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	%	4,18	17	18,47	18,04	21,50	22,20
3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			94,85	59,19	60,00
4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			33,13	34,74	40,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN					TARGET RKPD TAHUN
			2021	2022	2023	2024	2025	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	5.03 - KEPEGAWAIAN							
1	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				69,48	70,00
	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			100	100	100
	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH							
1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	Tidak dilaksanakan QA	3	3,026	3,026	Terdefinisi (3,038)
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2	3	3	Terintegrasi *(Integrated)*	3,195	Terintegrasi (3,21)
3	Manajemen Risiko Indeks	Indeks	bukan merupakan Indikator RPJMD			2,966	2,966	2.967
4	Persentase tindaklanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran N-1	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			93,75	100	93.85

BAB VII
P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Tahun 2027 memiliki arti penting karena merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Sebagai tahun transisi menuju tahap akhir periode RPJMD, RKPD 2027 menempati posisi strategis untuk menilai konsistensi pencapaian tujuan pembangunan daerah sekaligus memperkuat landasan bagi pencapaian target – target RPJMD pada tahun 2029.

Perencanaan pembangunan Kota Blitar tahun 2027 juga disusun melalui pendekatan perencanaan pembangunan, yaitu Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS), yang dalam implementasinya tetap berfokus pada :

a. Kesinambungan melalui penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan, permasalahan dan isu strategis serta program prioritas Kota Blitar;
b. Penerapan prioritas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan, antara lain pencepatan target indikator makro pembangunan, penyelesaian isu – isu komprehensif, penyelesaian isu strategis kewilayahan, serta pengarusutamaan pembangunan;
c. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sasaran prioritas pembangunan dengan pendekatan penganggaran berbasis program *(money follow program)* serta program prioritas 2027;
d. Pelibatan secara aktif *stakeholder* dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan menerapkan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

Rencana program dan kegiatan tahun 2027 selain diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya.

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan secara terarah, efektif dan efisien, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. RKPD Kota Blitar Tahun 2027, sebagai bagian dari pembangunan Daerah provinsi Jawa Timur dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Timur dan atau Nasional, maka RKPD Kota Blitar dapat dimungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Seluruh perangkat daerah berkewajiban menjadikan RKPD 2027 sebagai pedoman dalam penyusunan rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2027 dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi;
3. Masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dengan mendukung program - program pembangunan. Dengan demikian semua kegiatan masyarakat dan

dunia usaha dapat diharapkan dapat mendukung bahkan mempercepat pencapaian target-target IKU maupun IKK dalam RKPD 2027;

4. Dokumen RKPD Kota Blitar Tahun 2027 dijadikan pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Blitar Tahun 2027;
5. Dalam rangka sinkronisasi & sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, baik yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah dalam menyusun rencana anggaran sub kegiatan, kegiatan dan programnya melalui SIPD sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
6. Untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan Pemerintah Kota Blitar perlu melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala minimal satu kali (1X) dalam tiga (3) bulan;
7. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi diawali dengan setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan capaian hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Apabila realisasi SILPA pada akhir tahun anggaran 2026 melebihi dari proyeksi, maka kelebihan tersebut di prioritaskan untuk mendanai kegiatan sebagai berikut:
   - Kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian target kinerja RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 – 2029;
   - Kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan daya beli masyarakat;
   - Kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan SPM;
9. Pagu anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2027 merupakan pagu indikatif, menunggu anggaran definitif berdasarkan besaran anggaran transfer dari Pemerintah maupun Provinsi Jawa Timur kepada Kota Blitar, sehingga dimungkinkan terjadi perubahan pada proses penetapan APBD Kota Blitar 2027;
10. Usulan lokasi kegiatan dimungkinkan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan alokasi anggaran definitif, serta pertimbangan-pertimbangan lain pada proses penetapan APBD dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ; dan
11. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi saat disusunnya RKPD 2027 sehingga mengakibatkan tidak dapat tercapainya target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2027 ini, maka dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan terhadap RKPD juga akan dilaksanakan jika terdapat peraturan hukum secara nasional maupun regional yang mengharuskan dilakukan perubahan terhadap RKPD ini.

7.2 Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar tahun 2027, maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja sebagai operasionalisasi RKPD dan pedoman kerja masing-masing Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian IKU dan IKK Daerah serta mencapai IKU masing-masing Perangkat Daerah.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 19810130 200604 2 007